BANK PAPUA

Bersama Papua Membangun Negeri

Laporan Tahunan
Annual Report
2017

TRANSFORMASI
back on track

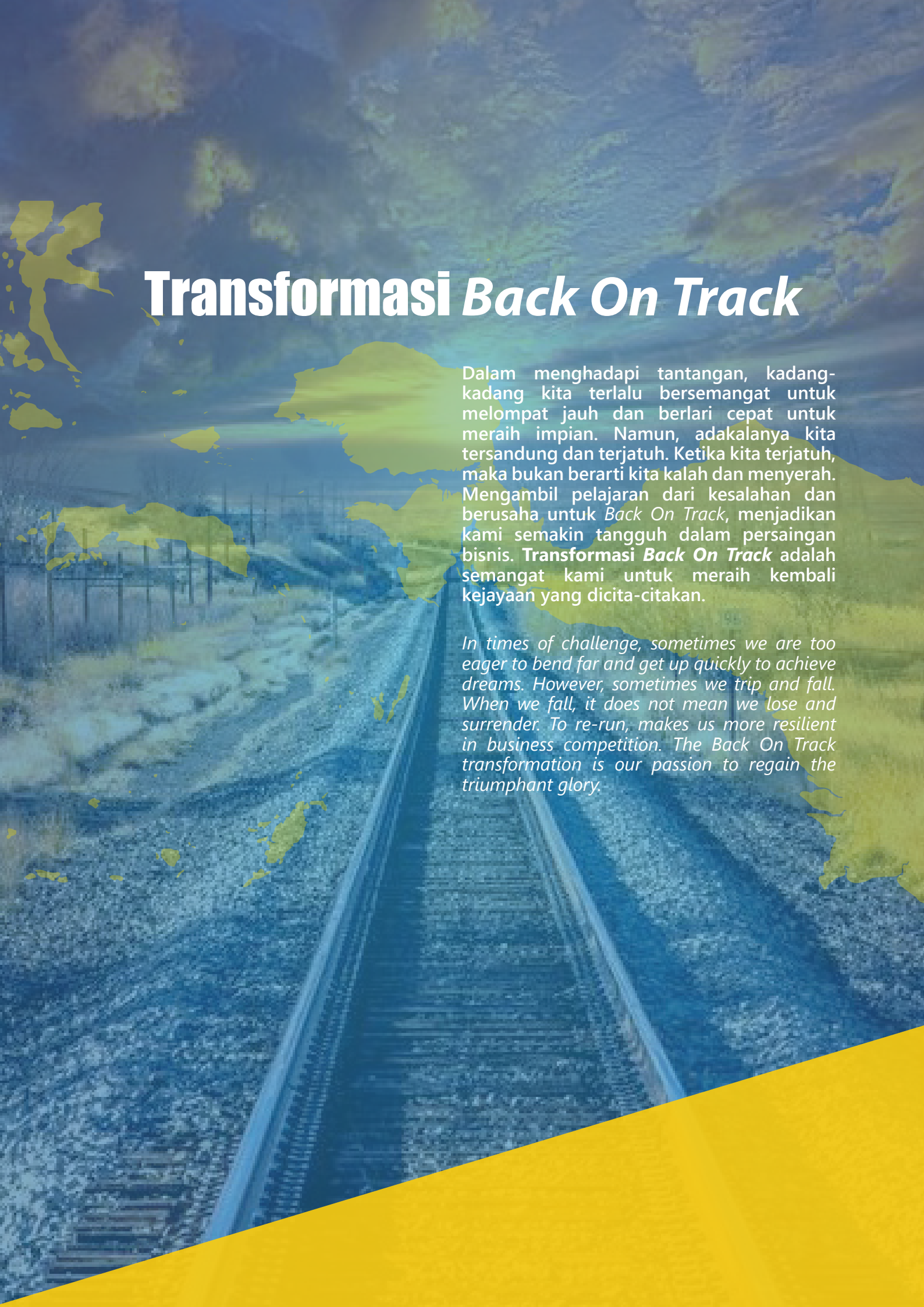

Transformasi *Back On Track*

Dalam menghadapi tantangan, kadang-kadang kita terlalu bersemangat untuk melompat jauh dan berlari cepat untuk meraih impian. Namun, adakalanya kita tersandung dan terjatuh. Ketika kita terjatuh, maka bukan berarti kita kalah dan menyerah. Mengambil pelajaran dari kesalahan dan berusaha untuk *Back On Track*, menjadikan kami semakin tangguh dalam persaingan bisnis. **Transformasi *Back On Track*** adalah semangat kami untuk meraih kembali kejayaan yang dicita-citakan.

In times of challenge, sometimes we are too eager to bend far and get up quickly to achieve dreams. However, sometimes we trip and fall. When we fall, it does not mean we lose and surrender. To re-run, makes us more resilient in business competition. The Back On Track transformation is our passion to regain the triumphant glory.

Kesinambungan tema

Sustainability Theme

Pemilihan setiap tema di dalam Laporan Tahunan Bank Papua adalah gambaran nyata dari kondisi aktual perjalanan Bank Papua pada tahun tersebut. Melalui Laporan Tahunan ini, Bank Papua memaparkan perbandingan kinerja perusahaan, rencana strategis, realisasi target, dan kondisi pegawai, serta kondisi kantor untuk menilai kinerja Bank Papua setiap tahunnya.

The selection of each theme in the Annual Report of Bank Papua is a clear picture of the actual condition of the Bank Papua trip that year. Through this Annual Report, Bank Papua presents a comparison of company performance, strategic plans, target realization, and employee conditions, and office conditions to assess the performance of Bank Papua each year.

2013

Meraih Harapan Mewujudkan Citra

Geliat aktif manajemen Bank Papua dalam melakukan *radical change strategy* bersama seluruh *shareholder* dan masyarakat, baik jangka pendek maupun jangka panjang secara konsisten dengan memberikan pertumbuhan kinerja dan optimalisasi laba secara wajar dalam meraih harapan menjadi *Bank Regional Champion* kebanggaan masyarakat Papua.

Reaching the Expectation, Realizing the Image

The active management of Bank Papua in its radical change strategy with all stakeholders and the public, both short-term and long-term consistently by providing performance growth and reasonable profit optimization in achieving hope became the Bank Regional Champion's of Papuan pride.

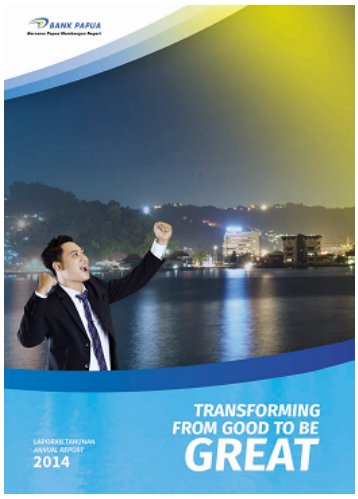

2014

Transforming From Good To Be Great

Perjalanan telah membuktikan ketangguhan Bank Papua untuk tetap berprestasi dan terus bertumbuh. Kami telah berhasil mengatasi berbagai tantangan, yang kami anggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pertumbuhan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Transforming From Good To Be Great

The Journey has proven the resilience of Bank Papua to keep achieving and growing. We have overcome many challenges, which we consider to be an integral part of the growth process to achieve better performance.

2015

Pelopor Pembangunan dari Tanah Papua

Komitmen "Kami segenap insan Bank Papua siap menjadi pelopor pembangunan daerah dengan memperkuat perekonomian masyarakat di daerah-daerah pedesaan dan pesisir di Tanah Papua serta daerah lainnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang makmur dan sejahtera. Kami segenap insan Bank Papua berkomitmen untuk menjadi motor penggerak pembangunan daerah sejalan dengan program Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memajukan daerah Timur Indonesia"

Pioneer of Development from Tanah Papua

Commitment "We are all human of Bank Papua is ready to pioneer regional development by strengthening the economy of people in rural and coastal areas in Tanah Papua and other areas within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia is prosperous and prosperous. We are all human beings of Bank Papua is committed to be the driving force of regional development in line with the Central and Regional Government programs to advance the eastern region of Indonesia "

2016

Bertransformasi Menjadi Lebih Unggul

Lingkungan bisnis berubah dengan sangat cepat. Persaingan pun semakin berat. Agar tidak kalah, Bank harus bisa beradaptasi dengan perubahan itu dan berinovasi terhadap perubahan itu, sehingga Bank Papua dapat berlari dua kali lebih cepat dari tahun sebelumnya untuk menjadi lebih Unggul.

Transformed Become Superior

The business environment is changing very quickly. Competition is getting heavier. In order not to lose, the Bank must be able to adapt to that change and innovate on the change, so that Bank Papua can run twice as faster than the previous year to become more superior.

2017

TRANSFORMASI BACK ON TRACK

Mengambil pelajaran dari kesalahan dan berusaha untuk *Back On Track*, menjadikan kami semakin tangguh dalam persaingan bisnis. Transformasi *Back On Track* adalah semangat kami untuk meraih kembali kejayaan yang dicita-citakan.

TRANSFORMATION BACK ON TRACK

Taking lessons from mistakes and trying to Back On Track, makes us even more resilient in business competition. The Back On Track transformation is our passion to regain the triumphant glory.

Daftar Isi
Table of contents

Pendahuluan
Introduction

1
1 Tema dan Penjelasan
Theme and Explanation
2 Kesinambungan Tema
Sustainability Theme
4 Daftar isi
Table of Contents
8 Manajemen Baru, Semangat Baru
New Management, New Spirit
9 7 Arahan Direktur Utama kepada Segenap Pegawai Bank Papua
7 Directives of the President Director to all Bank Papua employees
10 Ikhtisar Data Keuangan Penting 2017
Key Financial Highlights 2017
18 Ringkasan Kinerja Utama 2017
2017 Key Performance Highlight

Laporan kepada Pemegang Saham & Pemangku Kepentingan
Report to Shareholder & Stakeholder

20
22 Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioner Report
30 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioner's Profile
34 Laporan Direksi
Board of Directors Report
46 Profil Direksi
Board of Directors Profile
54 Profil Staf Ahli dan GCG
Expert Staff and GCG Profile
56 Surat Pernyataan Direksi & Komisaris tentang Tanggungjawab atas Laporan Tahunan 2017
The Board Statement on the Accountability of the 2017 Annual Report

Profil Perusahaan
Company Profile

58
60 Identitas Perusahaan
Corporate Identity
62 Sekilas Bank Papua
Bank Papua's Brief History
64 Jejak Langkah
Milestones
66 Makna Logo
Meaning of Logo
67 Visi & Misi
Vision & mission
69 Budaya Kerja
Work Culture
70 Pedoman Perilaku
Code of Conduct
72 Bidang Usaha
Business Lines
72 Produk & Layanan
Products & Services
78 Rangkaian Kegiatan Penting
Important Activities
89 Penghargaan & Sertifikasi di Tahun 2017
Awards & Certification in 2017
90 Struktur & Komposisi Pemegang Saham
Structure & Shares Composition
92 Identitas Pemegang Saham
Shareholder Identiy
100 Struktur Organisasi
Organization Structure
102 Profil Anggota Komite
Committee Member Profile
108 Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer's Profile
143 Profil Pegawai Perusahaan
Employees Profile
146 Struktur Grup Perusahaan, Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi
The Structure of the Company Group, Subsidiaries and Affiliates
146 Kronologis Pencatatan Saham & Efek Lainnya
Chronology of Share & Securities Listing
147 Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan
Proffesional Institution for Company Support
148 Jaringan Kantor
Office Network
151 Alamat Kantor
Office address
160 Delivery Channel
Delivery Channel

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion & Analysis

174

176 Tinjauan Industri
Industry Overview
176 Pertumbuhan Perekonomian Nasional 2017
National Economic Growth in 2017
178 Pertumbuhan Perekonomian Provinsi Papua 2017
Papua Provincial Economic Growth in 2017
182 Pertumbuhan Perkonomian Provinsi Papua Barat 2017
West Papua Provincial Economic Growth in 2017
184 Perbankan Nasional & BPD
National Banking & BPD
191 Perbankan Daerah
Regional Banking
193 Tinjauan Bisnis
Business Overview
194 Perbandingan Antara Target Awal Tahun Buku dengan Realisasi Tahun 2017 & Proyeksi Tahun 2018
Comparative Between Early Fiscal Year Target With Realization in 2017 and Projection in 2018
197 Penerapan Kebijakan Pembagian Dividen
Dividend Policy Implementation
200 Accounting Position Paper
Accounting Position Paper
209 Tinjauan Persegmen Usaha
Business Performance Overview
209 Segmen Dana Pihak Ketiga
Third Party Funds Segment
225 Segmen Kredit
Loan Segment
235 Penanganan Kredit Khusus
Special Loan Handling
236 Tingkat Kolektibilitas Kredit
Loan Collectibility Level
237 Treasury & Internasional
Treasury & International
238 Tinjauan Kinerja Keuangan 2017
Financial Performance 2017 Overview
246 Liabilitas/Kewajiban
Liability
251 Ekuitas
Equity
253 Laporan Arus Kas
Cash Flow Statement
254 Laba Rugi
Earning and Loss
259 Rasio-rasio Keuangan Penting
Key Financial Ratios
262 Kemampuan Membayar Hutang
Ability to Pay Debt
262 Rasio Likuiditas
Liquidity Ratio
262 Rasio Solvabilitas
Solvability Ratio
263 Rasio Rentabilitas
Rentability Ratio
265 Tinjauan Aspek Pemasaran Bank
Bank Marketing Aspects Overview
281 Tinjauan Informasi Keuangan & Non Keuangan Lainnya
Financial Information and Other Non Financial Overview
281 Struktur Modal & Kebijakan Struktur Modal
Capital Structure & Capital Structure Policy
282 Perkembangan Suku Bunga Dasar Kredit(SBDK)
Development of Prime Lending Rate (SBDK)
283 Materialitas Peningkatan Usaha
Materiality of Business Improvement
283 Dampak Perubahan Harga Terhadap Pendapatan Usaha
Impact of Changes of Price on Business Revenues
283 Hapus Buku
Written Off
283 Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal
Capital Goods Investment Bonding
284 Realisasi Perolehan dan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization and Planning of Public Offering Fund
285 Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi
Buy Back Shares and Buy Back Bonds
285 Pengendalian BOPO
BOPO Controlling
285 Informasi Material Antara Lain Mengenai: Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, Restrukturisasi Hutang/ Modal
Material Information Among Other: Investment, Expansion, Divestation, Acquisition, Restructure Loan / Capital
285 Informasi Keuangan yang Telah Dilaporkan yang Mengandung Kejadian yang Sifatnya Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Financial Information that Has Been Reported which Contains extraordinary and Rarely Event
285 Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts that Happened After Date of Accountant Report
286 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/ atau Manajemen yang Dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP)
Stock Ownership Program by Employees and / or Employed Management (ESOP / MSOP)
286 Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Material Transactions Containing Conflict of Interest and Transactions with Affiliation Parties
291 Kebijakan Akuntansi Perusahaan
Corporate Accounting Policies
291 Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policies
293 Peristiwa Penting yang Jarang Terjadi
Important Events Rarely Happened
293 Perubahan-perubahan Penting yang Terjadi
Important Changes
294 Tinjauan Prospek Usaha Perusahaan
Company's Business Prospects Overview
294 Prospek Usaha
Business Prospect
294 Strategi dan Rencana Kerja 2018
Strategy and Work Plan 2018

Tinjauan Pendukung Bisnis
Bussines Support
298

300 Tinjauan Sumber Daya Manusia
Human Resources Overview
324 Tinjauan Teknologi Informasi
Information Technology Overview

Laporan Tata kelola Perusahaan
Good Corporate Governance Report
328

330 Pendahuluan
Preliminary
331 Komitmen dan Konsistensi Penerapan Tata Kelola
Commitment & Consistency Governance Practices
331 Dasar Acuan Implementasi Tata Kelola yang Baik
Basics of GCG Implementation
333 Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik
Good Corporate Governance Prinsiples
336 Komitmen dan Tujuan Penerapan Tata Kelola Bank Papua
Commitment and Objectives of Bank Papua's GCG Implementation
336 Perjalanan Implementasi Tata Kelola Bank Papua
The Journey of Bank Papua's GCG Implementation
343 Fokus Penerapan Tata Kelola Bank Papua Tahun 2017
Focus on Bank Papua GCG's Implementation in 2017
344 Penilaian Penerapan Tata Kelola Bank Papua
Assesment of the Bank Papua GCG Implementation
358 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Papua
Bank Papua GCG Implementation Report
358 Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Information About the Major Shareholders and Controls
359 Struktur Tata Kelola Bank Papua
Bank Papua GCG Structure
360 Rapat Umum Pemegang Saham
Shareholder General Meeting
369 Dewan Komisaris
Board Of Commissioners
396 Informasi Mengenai Komisaris Independen
Information on Independent Commissioners
400 Komite di Bawah Dewan Komisaris
Committees under Board of Commissioner
417 Uraian Direksi
Board of Director
455 Komite di Bawah Direksi
Committess under Board of Directors
467 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
472 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System
481 Laporan Audit Intern
Internal Audit Report
494 Fungsi Audit Eksternal
External Audit Function
497 Fungsi Manajemen Risiko
Risk Management Function
542 Fungsi Kepatuhan
Compliance Function
566 *Whistleblowing System*
Whistleblowing System
581 Internal Fraud
Internal Fraud
584 Etika Perusahaan
Corporate ethics
588 Kebijakan tentang Seleksi Pemasok atau Vendor
Policy on the Selection of Suppliers or Vendors
588 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Wealth State Administration Report
589 Pencegahan Tindakan Korupsi & Gratifikasi
Prevention Of Corruption Action & Gratification
590 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
Conflict of Interest Transaction
591 Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi
Buy Back Shares and Buy Back Bonds
591 Shares Option
Shares Option
592 Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
Provision of Funds to Related Parties and Provision of Large Exposure
593 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank
Transparency of Financial and Non-Financial
593 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
Highest and Lowest Salary Ratio
594 Permasalahan Hukum
Legal issues
595 Rencana Strategis Bank
Bank's Strategic Plan
604 Akses Informasi
Access Information
604 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan
Changes to the Laws and Regulations

606 Pemberian Dana untuk Kepentingan Sosial
Funding for Social Interests
607 Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment atas Penerapan Tata Kelola Bank
Conclusions General Results Self Assessment on the Implementation of Good Corporate Governance

Laporan Tanggungjawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility Reports
608

Referensi Penyusunan Laporan Tahunan
Annual Report Reference
617

Laporan Keuangan Audit Independen
Independent Auditor's Financial Report
635

Manajemen Baru, Semangat Baru

Setelah melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang digelar di Hotel Sahid Papua, Senin 6 Maret 2017, akhirnya memilih dan memutuskan lima orang pejabat utama sebagai jajaran Direksi di lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua atau biasa dikenal Bank Papua.

Jajaran baru Direksi Bank Papua tersebut adalah F. Zendrato (BNI) sebagai Direktur Utama, Sadar Sebayang (BCA) sebagai Direktur Bisnis, Rudhy Dharma (Bank Mandiri) sebagai Direktur Keuangan, kemudian Isak Semuel Wopari (Bank Papua) sebagai Direktur Operasional, serta Jefry Sani Pither Siing (Bank Papua) sebagai Direktur Kepatuhan.

Manajemen baru ini akan fokus dalam hal memperbaiki tingkat kesehatan bank, meningkatkan kualitas pinjaman, mengurangi NPL (kredit bermasalah), memperbaiki bisnis proses dan ketentuan SOP, meningkatkan kompetensi SDM, perbaikan dan peningkatan Sistem Pengendalian Intern, memperbaiki dan meningkatan tata kelola serta tingkat Kecukupan Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).

Sebagai BUMD yang bergerak di bidang perbankan, Bank Papua mempunyai visi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sekaligus dapat mendorong peran aktif dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar keberadaan Bank Papua memberikan kepercayaan pelaku bisnis dan investasi.

Dengan komitmen dan semangat baru dari jajaran Direksi serta didukung oleh semua *stakeholder*, Bank Papua menunjukan performa yang semakin membaik. Hal ini akan terus dijaga bahkan ditingkatkan, sehingga visi dan misi Bank Papua sebagai bank komersial yang kuat, unggul dan terpercaya dapat segera terwujud.

After going through the Extraordinary Shareholders General Meeting (ESGM) held at Hotel Sahid Papua, Monday, March 6, 2017, finally chose and decided five main officers as the Board of Directors within the PT. Bank Pembangunan Daerah Papua or commonly known as Bank Papua.

The new Board of Directors of Bank Papua are F. Zendrato (BNI) as President Director, Sadar Sebayang (BCA) as Business Director, Rudhy Dharma (Bank Mandiri) as Finance Director, Isak Samuel Wopari as Banking Operation Director, and Jefry Sani Pither Siing (Bank Papua) as Compliance Director.

The new management will focus on improving bank soundness, improving loan quality, reducing NPLs, improving business processes and SOP provisions, improving human resource competencies, improving and upgrading the Internal Control System, and improving governance as well as the level of Application Adequacy Risk Management (KPMR).

As a BUMD engaged in banking, Bank Papua has a vision to encourage regional economic growth and economic growth nationally. At the same time can encourage an active role in providing excellent service to the community so that the existence of Bank Papua gives business and investment trust.

With the commitment and new spirit of the Board of Directors and supported by all stakeholders, Bank Papua is showing an improving performance. This will be maintained and enhanced, so that the vision and mission of Bank Papua as a superior and trusted bank can be realized soon.

7 ARAHAN HARIAN DIREKTUR UTAMA KEPADA SEGENAP PEGAWAI BANK PAPUA

1. Senantiasa berdoa dan bersyukur.
2. Bekerjalah sebagai ibadah, taati dan patuhi ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal.
3. Melayani nasabah dengan setulus hati.
4. Menjaga kehormatan, martabat dan intergritas sebagai insan Bank Papua, tidak melakukan korupsi, kolusi,nepotisme, tidak menerima gratifikasi/ hadiah/ pemberian dari debitur/ nasabah dan rekanan/vendor, tidak manipulasi rekening nasabah, tidak menyalahgunakan kewenangan dan tugas yang dipercayakan oleh Bank atau pimpinan.
5. Menjaga pertumbuhan Bank Papua yang berkelanjutan, dengan fundamental keuangan yang sehat dan kuat.
6. Berpikir positif, proaktif, inovatif dan selalu menjaga solidaritas tim serta sinergi antar unit.
7. Bank lokal dengan kapasitas Nasional, dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensi setiap pegawai.

Ikhtisar Data Keuangan Penting 2017

Key Financial Highlights 2017

dalam jutaan rupiah - *in millions rupiah*

DATA KEUANGAN	2017	2016	2015	2014	2013	*FINANCIAL DATA*
ASET	**20.400.812**	**20.611.850**	**20.357.639**	**20.176.685**	**17.665.211**	*ASSET*
DANA PIHAK KETIGA	**16.655.575**	**16.569.479**	**15.906.364**	**16.673.385**	**13.469.167**	*THIRD-PARTY FUNDS*
Giro	7.731.486	7.118.044	7.368.549	7.383.293	6.951.249	*Current Account*
Tabungan	6.573.996	6.292.181	5.878.738	5.324.238	4.621.902	*Savings*
Deposito	2.350.092	3.159.254	2.659.077	3.965.854	1.896.016	*Time Deposit*
PENGGUNAAN DANA	**20.252.334**	**20.493.727**	**19.657.098**	**19.330.935**	**16.621.791**	*USE OF FUNDS*
Kredit	13.270.908	14.209.840	13.207.177	13.359.444	11.378.388	*Loan*
Penempatan	4.372.182	4.333.139	4.203.094	3.945.226	3.964.420	*Placement*
Surat Berharga	2.609.245	1.950.749	2.246.827	2.026.265	1.278.983	*Marketable Securities*
EKUITAS	**2.675.004**	**2.369.255**	**2.805.332**	**2.220.726**	**2.033.089**	*EQUITY*
Modal Saham	1.907.850	1.698.825	1.490.605	1.319.670	1.122.340	*Share Capital*
Tambahan Modal Disetor	95.306	58.171	96.160	23.195	-	*Additional Paid in Capital*
Rugi yang belum direalisasi atas Efek-efek, Obligasi setelah pajak	38	5.451	3.340	(535)	(866)	*Unrealized losses on marketable securities, bonds after the tax*
Pendapatan Komprehensif Lainnya	(305.784)	(257.513)	(55.462)	(84.421)	(90.547)	*Other Comprehensive Income*
Saldo Laba	977.593	864.321	1.270.689	962.817	1.002.162	*Retain Earning*
Telah ditentukan penggunaannya	864.320	1.101.025	887.346	811.875	621.589	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	113.273	(236.704)	383.343	150.942	380.573	*Unappropriated*

dalam jutaan rupiah - *in millions rupiah*

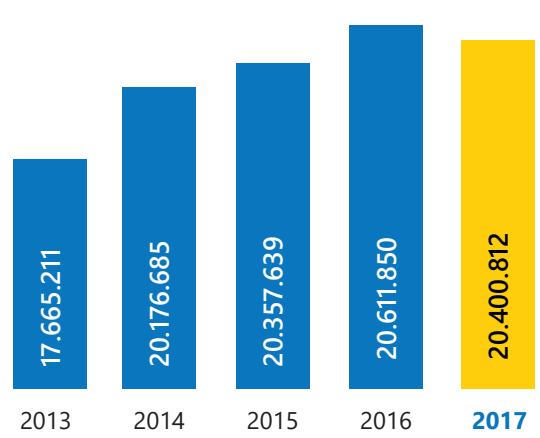

Aset
Asset

-1,02% (yoy)

Jumlah Aset tahun 2017 sebesar Rp20.400.812 juta atau menurun sebesar 1,02 % dari tahun sebelumnya.

Total Assets in 2017 amounted to Rp20,400,812 million or decreased by 1.02% from the previous year.

dalam jutaan rupiah - *in millions rupiah*

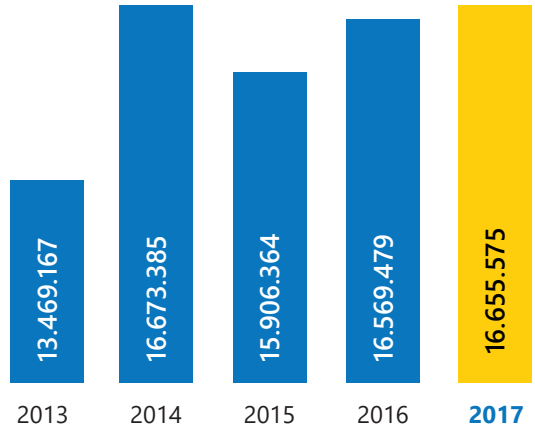

Dana Pihak Ketiga
Third-party funds

0,52% (yoy)

Jumlah Dana Pihak Ketiga tahun 2017 sebesar Rp16.655.575 juta atau meningkat sebesar 0,52% dari tahun sebelumnya.

The amount of Third Party Funds in 2017 amounted to Rp16,655,575 million, an increase of 0.52% from the previous year.

dalam jutaan rupiah - *in millions rupiah*

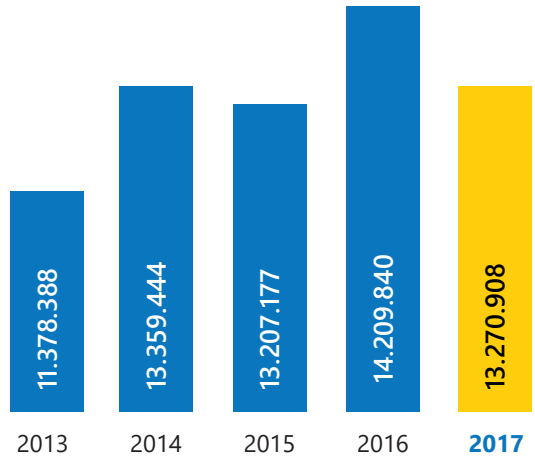

Kredit
Loan

-6,61% (yoy)

Jumlah Kredit tahun 2017 sebesar Rp13.270.908 juta atau menurun sebesar 6,61% dari tahun sebelumnya.

Total Credit of 2017 amounted to Rp13,270,908 million or decreased by 6.61% from the previous year.

dalam jutaan rupiah - *in millions rupiah*

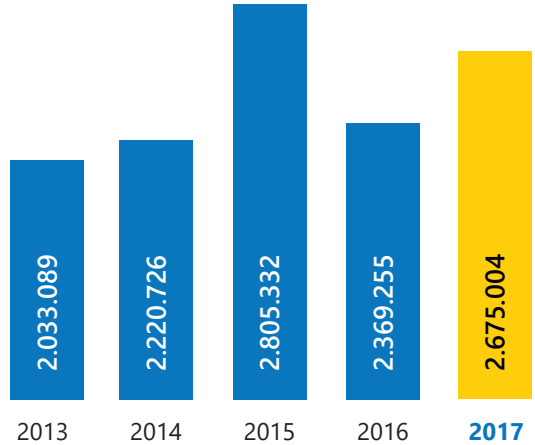

Ekuitas
Equity

12,90% (yoy)

Jumlah Ekuitas tahun 2017 sebesar Rp2.675.004 juta atau meningkat sebesar 12,90% dari tahun sebelumnya.

Total Equity in 2017 amounted to Rp2,675,004 million or an increase of 12.90% from the previous year.

Ikhtisar Data Keuangan Penting 2017

Key Financial Highlights 2017

dalam jutaan rupiah - *in millions rupiah*

LABA RUGI	2017	2016	2015	2014	2013	*EARNING AND LOSS*
Pendapatan Bunga & Operasional	2.294.936	2.220.022	2.347.255	2.133.475	1.755.555	*Interest Income & Operations*
Beban Bunga & Operasional	(432.383)	(447.745)	(580.229)	(468.988)	(263.738)	*Interest & Operational Expenses*
Pendapatan Operasional Bersih	1.862.553	1.772.277	1.767.026	1.664.487	1.491.817	*Net Operating Income*
Pembentukan CKPN	(687.937)	(879.997)	(281.307)	(552.704)	(73.915)	*CKPN Formation*
Beban Operasional Lainnya	(1.048.283)	(1.089.999)	(1.021.379)	(925.217)	(926.767)	*Other Operating Expenses*
Laba Operasional	126.334	(197.719)	464.340	186.566	491.135	*Operational Earning*
Pendapatan (Beban) Non Operasional	18.052	53.638	63.960	19.979	13.829	*Income (Expenses) Non-Operational*
Laba Sebelum Pajak	144.386	(144.081)	528.300	206.545	504.964	*Earning before Tax*
Beban Pajak Penghasilan	(31.113)	(92.624)	(144.957)	(55.602)	(124.392)	*Income Tax Expense*
Laba Bersih Tahun Berjalan	113.273	(236.705)	383.343	150.943	380.572	*Net Earning Current Year*
Pendapatan (Beban) Komprehensif	42.883	(147.534)	(52.122)	331	(866)	*Income (Expense) Comprehensive*
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	156.157	(384.239)	331.221	151.274	379.706	*Comprehensive Earnings Current Year*
Laba Persaham *(Dalam Rupiah)						*Earnings per share * (In Rupiah)*
Laba operasional	315.336	(562.662)	1.463.164	831.144	2.187.995	*Operational Earning*
Laba bersih	282.735	(673.606)	1.043.698	673.917	1.695.443	*Net Earning*

dalam jutaan rupiah - *in millions rupiah*

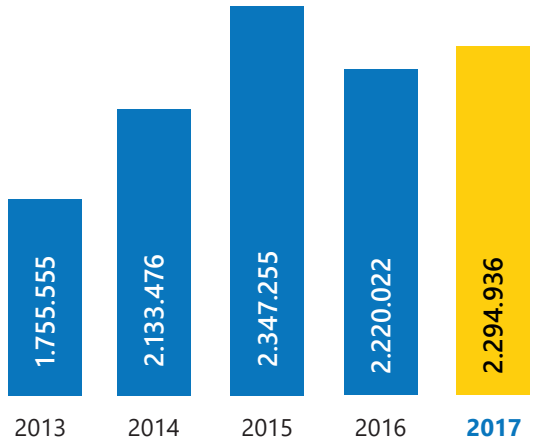

Pendapatan Bunga & Operasional

Interest Income & Operation

3,37% (yoy)

Pendapatan Bunga dan Operasional tahun 2017 sebesar Rp2.294.936 juta atau meningkat sebesar 3,37% dari tahun sebelumnya.

Interest and Operating Income in 2017 amounted to Rp2,294,936 million, an increase of 3.37% from the previous year.

dalam jutaan rupiah - *in millions rupiah*

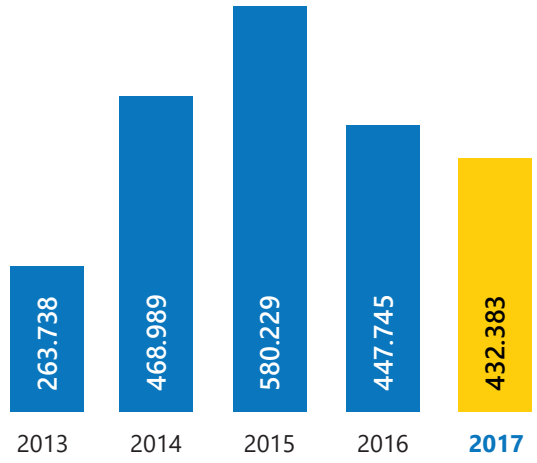

Beban Bunga & Operasional
Interest & Operational Expenses

-3,43% (yoy)

Beban Bunga dan Operasional tahun 2017 sebesar Rp432.383 juta atau menurun sebesar 3,43% dari tahun sebelumnya.

Interest and Operational Expenses in 2017 amounted to Rp432,383 million or decreased by 3.43% from the previous year.

dalam jutaan rupiah - *in millions rupiah*

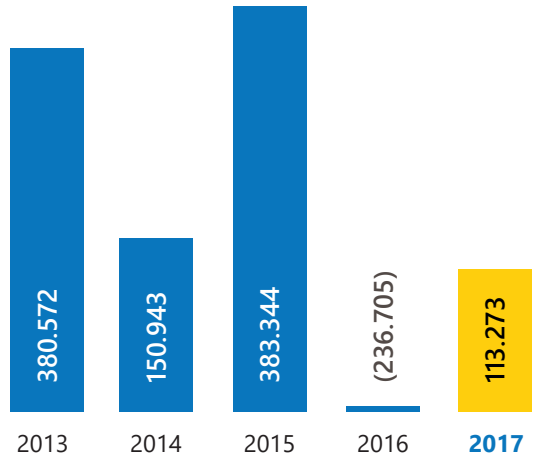

Laba Bersih
Net Earning

147,85% (yoy)

Laba Bersih tahun 2017 sebesar Rp113.273 juta atau meningkat sebesar 147,85% dari tahun sebelumnya.

Net Income in 2017 amounted to Rp113,273 million or an increase of 147.85% from the previous year.

dalam rupiah - *in rupiah*

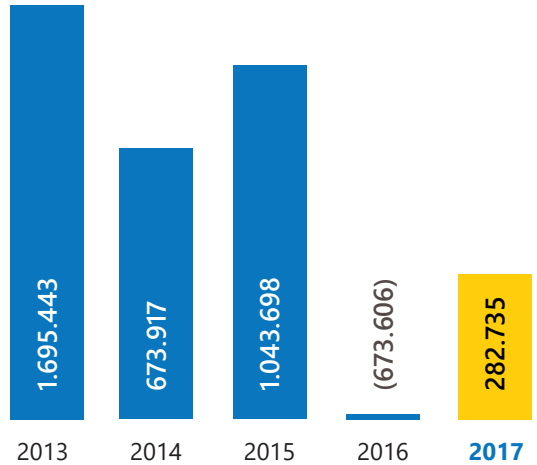

Laba per Saham
Earning per Share

141,97% (yoy)

Laba per Saham tahun 2017 sebesar Rp282.735 rupiah atau meningkat sebesar 141,97% dari tahun sebelumnya.

Earnings per Share in 2017 amounting to Rp282,735 rupiah or an increase of 141.97% from the previous year.

Ikhtisar Data Keuangan Penting 2017

Key Financial Highlights 2017

dalam presentase - *in percentage*

RASIO - RASIO KEUANGAN	2017	2016	2015	2014	2013	*FINANCIAL RATIOS*
I. PERMODALAN						*I. CAPITAL*
1. KPMM	17.99	17.28	22.22	16,28	18.40	*1. CAR*
II. AKTIVA PRODUKTIF						*II. ASSETS*
1. Aktiva Produktif Bermasalah	10.22	10.91	13.44	5.13	0.78	*1. Non Performing Earning Assets*
2. PPAP terhadap Aktiva Produktif	9.64	10.42	4.73	3.60	0.90	*2. PPAP Earning Assets*
3. NPL (Gross)	14.72	15.03	9,63	7.33	1.14	*3. NPL (Gross)*
4. NPL Netto	3.79	3.95	2,99	2.87	0.26	*4. Net NPL*
III. *RENTABILITAS*						*III. PROFITABILITY*
1. Laba Terhadap Asset (ROA)	0.61	-0.61	2.60	1.02	2.86	*1. Return on Assets (ROA)*
2. Laba Terhadap Modal (ROE)	4.37	-8.06	13.66	6.80	17.92	*2. Return on Equity (ROE)*
3. Pendapatan Bunga Bersih Terhadap Aktiva Produktif	7.16	7.01	7,51	7.59	7.88	*3. Net Interest Margin (NIM)*
4. BOPO	94.35	106.54	80,22	91.14	72.01	*4. OEOI*
IV. *LIKUIDITAS*						*IV. LIQUIDITY*
1. L D R	80.12	86.23	83.03	80.12	84.48	*1. L D R*
V. KEPATUHAN						*V. COMPLIANCE*
1. GWM Rupiah	7.93	7.43	8.81	9.19	8.29	*1. Statutory Reserve in Rupiah*
2. BMPK	-	-	-	-	-	*2. LLL*
- Pihak Terkait	-	-	-	-	-	*- Related parties*
- Pihak Tidak Terkait	-	-	-	-	-	*- Third Party*

dalam presentase - *in percentage*

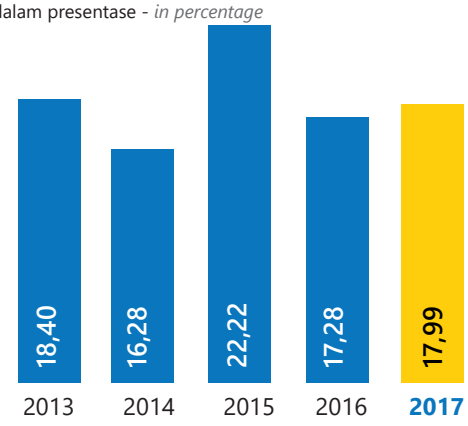

Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Capital Adequacy Ratio (CAR)

0,71% (yoy)

Rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum tahun 2017 sebesar 17,99% atau meningkat sebesar 0,71% dari tahun sebelumnya.

The Capital Adequacy Ratio of 2017 is 17.99% or an increase of 0.71% from the previous year.

dalam presentase - *in percentage*

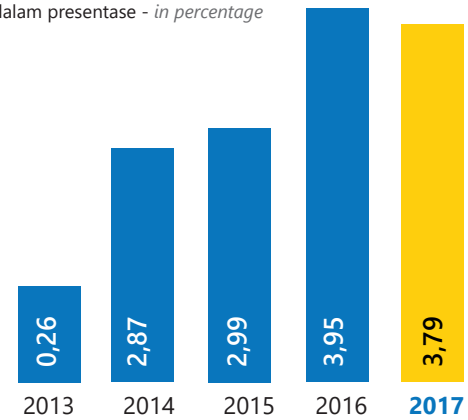

Non Performing Loan Netto

Net NPL

-0,16% (yoy)

Rasio NPL netto tahun 2017 sebesar 3,79% atau menurun sebesar 0,16% dari tahun sebelumnya.

The net NPL ratio of 2017 was 3.79% or decreased by 0.16% from the previous year.

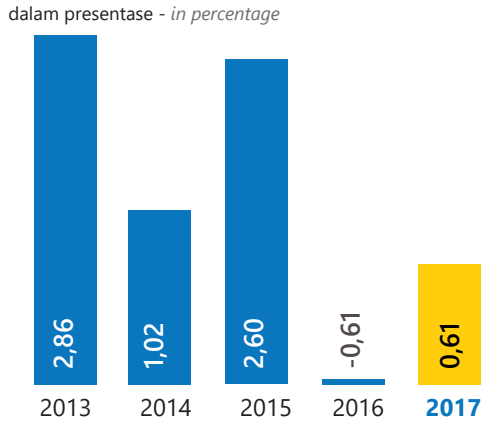

Laba terhadap Aset
Return On Asset (ROA)

1,22% (yoy)

Rasio Laba terhadap Aset tahun 2017 sebesar 0,61% atau meningkat sebesar 1,22% dari tahun sebelumnya.

The Ratio of Earnings to Assets in 2017 amounted to 0.61% or increased by 1.22% from the previous year.

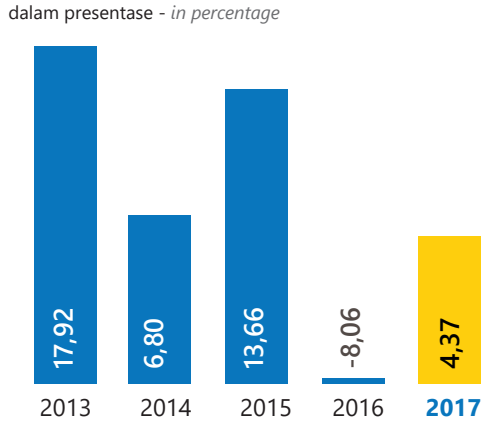

Laba terhadap Modal
Return On Equity (ROE)

12,43% (yoy)

Rasio Laba terhadap Modal tahun 2017 sebesar 4,37% atau meningkat sebesar 12,43% dari tahun sebelumnya.

The Ratio of Profit to Capital of 2017 amounted to 4.37% or increased by 12.43% from the previous year.

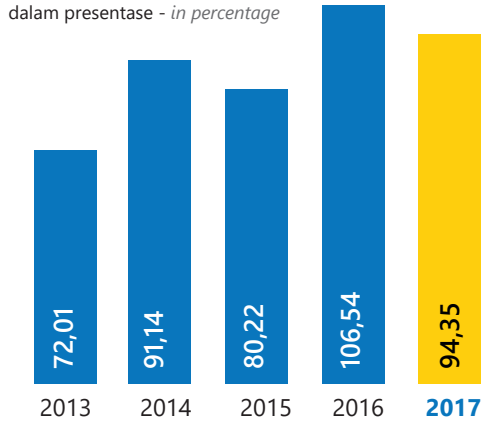

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
Operational Expense to Operational Income (OEOI)

-12,19% (yoy)

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional tahun 2017 sebesar 94,35% atau menurun sebesar 12,19% dari tahun sebelumnya.

Operational Cost Ratio to Operating Income in 2017 amounted to 94.35% or decreased by 12.19% from the previous year.

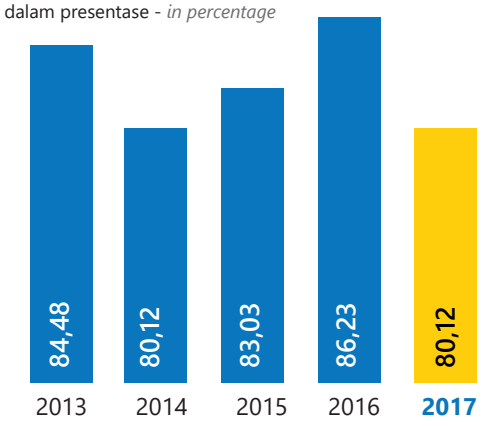

Loan to Deposit Ratio
(LDR)

-6,11% (yoy)

Rasio LDR tahun 2017 sebesar 80,12% atau menurun sebesar 6,11% dari tahun sebelumnya.

The LDR ratio for 2017 was 80.12% or decreased by 6.11% from the previous year.

Ikhtisar Kinerja Lainnya
Other Performance Highlight

IKHTISAR KINERJA LAINNYA	2017	2016	2015	2014	2013	*OTHER PERFORMANCE HIGHLIGHT*
JUMLAH PEGAWAI	2.565	2.701	2.590	2.361	2.021	*NUMBER OF EMPLOYEES*
JARINGAN KANTOR	223	222	203	182	156	*OFFICE NETWORK*
Kantor Pusat	1	1	1	1	1	*Head Office*
Kantor Cabang	37	37	35	33	30	*Branch office*
Kantor Cabang Pembantu	70	73	74	69	57	*Sub Branch office*
Kantor Kas	113	109	91	77	66	*Cash office*
Mobil Kas Keliling	2	2	2	2	2	*Mobile Cash*
DELIVERY CHANNEL	506	574	561	542	485	*DELIVERY CHANNEL*
Anjungan Tunai Mandiri	301	296	296	292	248	*Automatic Teller Machine (ATM)*
EDC	95	176	176	176	174	*Electronic Data Capture*
CDM	8	8	8	8	8	*Cash Deposit Machine*
Kasda Online	19	19	19	18	18	*Kasda Online*
Samsat Online	23	23	23	23	23	*Samsat Online*
Kartu Pegawai Elektronik	23	22	19	17	12	*Electronic Employee Card*
CMS	4	3	0	0	0	*Cash Management System*
Payment Point	28	25	20	8	2	*Payment Point*
Kas Titipan Bank Indonesia	5	1	0	0	0	*Bank Indonesia Entrusted Cash*
OPINI KANTOR AKUNTAN PUBLIK	Wajar Tanpa Pengecualian *Unqualified*	Wajar Tanpa Pengecualian *Unqualified*	Wajar Tanpa Pengecualian *Unqualified*	Wajar Tanpa Pengecualian *Unqualified*	Wajar Tanpa Pengecualian *Unqualified*	*OPINION OFFICE OF PUBLIC ACCOUNTANTS*

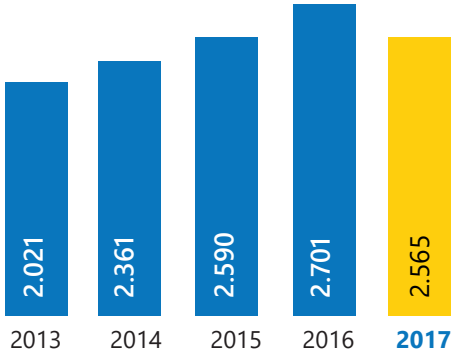

Jumlah Pegawai
Total Employees

-5,04% (yoy)

Jumlah pegawai pada tahun 2017 sebanyak 2.565 orang atau turun sebesar 5,04% dari tahun sebelumnya.

The number of employees in the year 2017 as many as 2,565 people or decreased by 5.04% from the previous year.

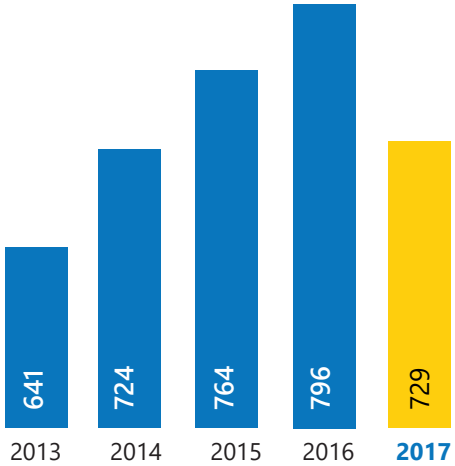

Jaringan Kantor
Network Office

-8,56% (yoy)

Jumlah jaringan kantor pada tahun 2017 sebanyak 729 atau turun sebesar 8,56% dari tahun sebelumnya.

Total office networks in 2017 amounted to 729 or decreased by 8.42% from the previous year.

Ikhtisar Efek Lainnya

Other Maketable Securities Highlight

IKHTISAR EFEK LAINNYA	2017	2016	2015	2014	2013	*OTHER SECURITIES OVERVIEW*
Saham & Obligasi						*Stocks & Bonds*
Jumlah Saham yang beredar	-	-	-	-	-	*Number of Shares outstanding*
Kapitalisasi pasar	-	-	-	-	-	*Market capitalization*
Harga saham						*Stock price*
- Tertinggi	-	-	-	-	-	*- Highest*
- Terendah	-	-	-	-	-	*- Lowest*
- Penutupan	-	-	-	-	-	*- Closure*
Volume Perdagangan Saham	-	-	-	-	-	*Stock Trading Volume*

Sampai dengan akhir Desember tahun 2017, Bank Papua tidak menerbitkan saham dan tidak tercatat di dalam pasar modal, sehingga tidak terdapat informasi yang relevan mengenai jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, terendah dan penutupan serta volume perdagangan.

Until the end of December 2017, the shares of Bank Papua are not listed in the capital market so there is no relevant information about the number of shares outstanding, market capitalization, stock price highs, lows and closures and trading volume.

Sampai dengan akhir Desember tahun 2017, Bank Papua tidak menerbitkan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

Until the end of December 2017, Bank Papua does not issue bonds, sukuk or convertible bonds, so there is no information on the number of bonds / sukuk / convertible bonds, interest rate, maturity date and bond rating / sukuk.

Ringkasan Kinerja Utama 2017

Summary of Key Performance 2017

Bank Papua terus berupaya meningkatkan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan. Sebagai upaya untuk tetap pada jalur bisnisnya, manajemen telah berhasil membukukan kinerja pada tahun 2017 sebagai berikut :

Bank Papua continually strives to improve performance growth in a sustainable manner. In an effort to stay in line with its business, outstanding management managed to record its performance in 2017 as follows:

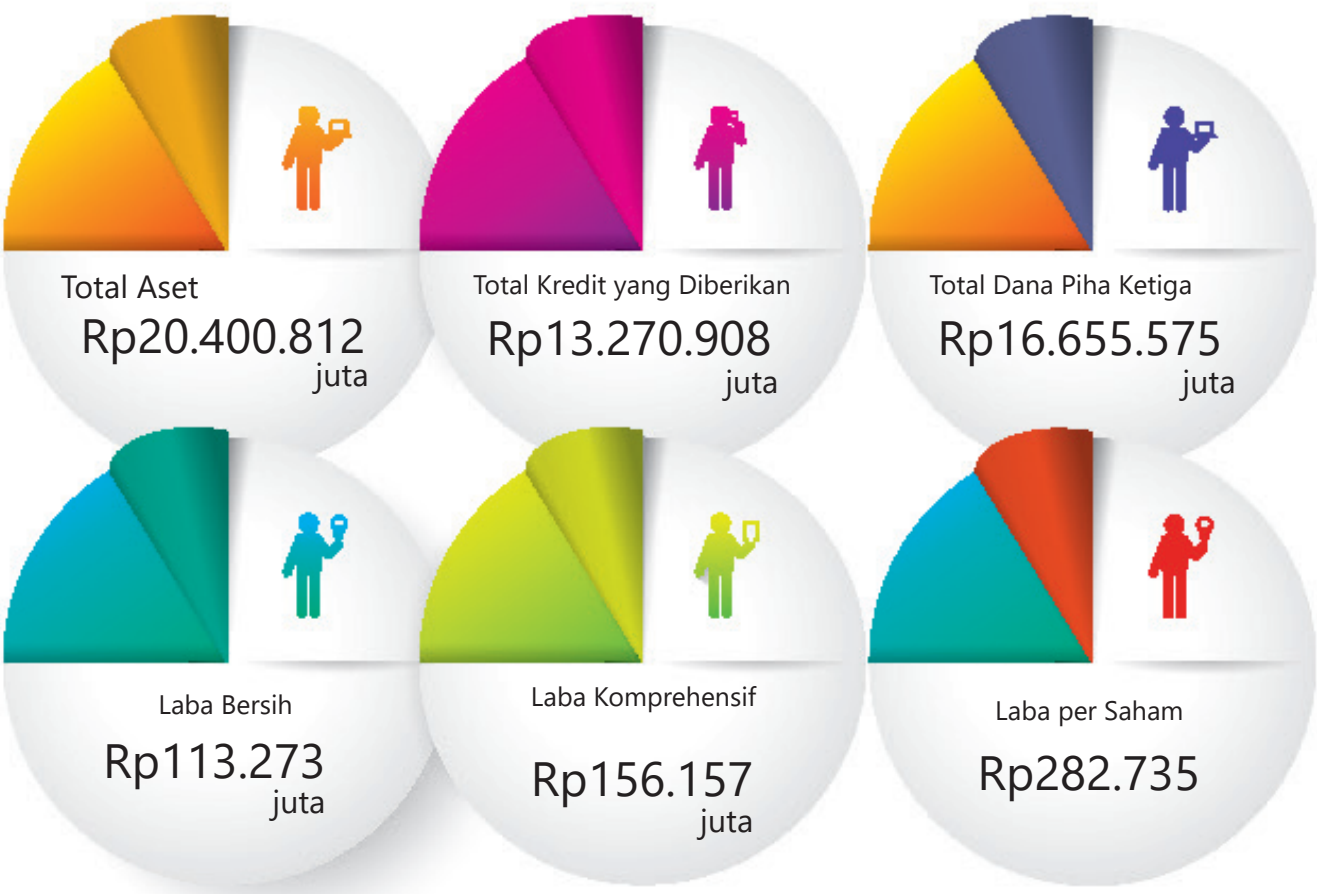

Rasio CAR **17,99%**	**Rasio ROA** **0,61%**	**Rasio ROE** **4,37%**
Rasio BOPO **94,35%**	**Rasio LDR** **80,12%**	**Rasio NPL Net** **3,79%**

Laporan kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Report to Shareholder and Stakeholder

Berpikir, Berkata dan Bertindak Terpuji.

Thinking, Saying and Acting Praiseworthy.

Dalam setiap perilaku insan Bank Papua harus berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan kode etik dan peraturan disiplin pegawai serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.

In every human behavior of Bank Papua should think, say and act in accordance with the code of ethics and discipline rules of employees and norms that apply in the community.

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioner's Report

Optimis Lebih Baik dengan Manajemen Baru

Better Optimists with New Management

Dengan manajemen baru, jajaran Direksi telah melaksanakan upaya maksimal untuk mencapai kinerja terbaik dalam merealisasikan Rencana Bisnis Bank tahun 2017. Kinerja Bank Papua selama tahun 2017 tercatat baik dari segi keuangan maupun operasional. Bank Papua tetap mampu mengejar target-target penting yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2017.

With the new management, the Board of Directors has implemented the maximum effort to achieve the best performance in realizing the bank's business plan in 2017. Performance of Bank Papua during 2017 is recorded both in financial and operational terms. Bank Papua remains able to pursue the key targets set out in the Bank Business Plan as outlined in the Work Plan and Budget of 2017.

Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th
Komisaris Utama
President Commissioner

Syaloom,
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Para Pemangku Kepentingan Yang Terhormat,

Pada tahun 2017 memang ekonomi beberapa Negara, seperti Malaysia bahkan Singapura, yang tadinya pertumbuhan perekonomiannya rendah kini mulai meningkat dan bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penyebab utama dari pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih rendah dibanding dengan negara lain ialah rendahnya kontribusi sektor industri. Di mana, sektor industri negara lain lebih besar peranannya terhadap perekonomian negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bertahan dengan sumbangan dari konsumsi dalam negeri maka pertumbuhannya tidak besar.

Sementara itu suku bunga acuan terus mengalami penurunan sejak awal tahun 2017. Terakhir suku bunga acuan Bank Indonesia tercatat 4,25%. Rendahnya suku bunga ini turut mengerek penurunan suku bunga simpanan di perbankan yang akhirnya mempengaruhi suku bunga kredit perbankan.

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

Sebagai salah satu tugas utama, Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi selama tahun 2017. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris senantiasa mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank serta memberikan nasihat kepada Direksi atas berbagai permasalahan yang terjadi. Baik itu kinerja pada periode Direksi sebelumnya dan periode Direksi yang baru. Atas aktivitas pengawasan selama tahun 2017, Dewan Komisaris menilai kinerja bank tercatat baik dari segi keuangan maupun operasional. Dengan kebijakan strategis Direksi , Bank Papua tetap mampu mengejar target-target penting yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2017. Dewan Komisaris berpendapat bahwa selama tahun 2017, jajaran Direksi telah melaksanakan upaya maksimal untuk mencapai kinerja terbaik dalam merealisasikan Rencana Bisnis Bank tahun 2017, meskipun ada berbagai catatan penting terhadap kinerja Direksi sebelumnya.

Dengan telah lengkapnya pengurus di jajaran Direksi , hal ini menjadi angin segar bagi kinerja perusahaan. Direksi beserta jajarannya telah mampu memperbaiki kinerja perusahaan secara menyeluruh. Bank membukukan

Syaloom,
Greetings to all of us,
Dear Stakeholders,

In the year 2017 indeed the economies of some countries, such as Malaysia and Singapore, which has low growth begun to increase and even exceed the economic growth of Indonesia. The main cause of Indonesia's economic growth is lower than other countries is the low contribution of the industrial sector. Where, the industrial sector of other countries is greater role in the economy of the country. Indonesia's economic growth is sustained by the contribution of domestic consumption, so the growth is not great.

Meanwhile, the benchmark interest rate has continued to decline since early 2017. Finally, the benchmark interest rate of Bank Indonesia was recorded at 4.25%. This low interest rate also hoisted the decline in deposit interest rates in banks that ultimately affect the interest rate of bank loan.

Assessment of the Performance of the BOD

As one of the main tasks, the Board of Commissioners has conducted supervision on the implementation the duties and responsibilities of the Board of Directors during 2017. In conducting supervision, the Board of Commissioners constantly directs, monitors and evaluates the implementation of the Bank's strategic policy and advises the Board of Directors on various issues. Whether it's Performance on the previous Board of Directors and the new Board of Directors. For supervisory activities during 2017, the Board of Commissioners assessed the bank's performance in both financial and operational terms. With the Board of Directors strategic policy, Bank Papua is still able to pursue the key targets set forth in the Bank Business Plan as outlined in the Work Plan and Budget of 2017. The Board of Commissioners believes that during 2017, the Board of Directors has implemented the maximum effort to achieve the best performance in realizing Work Plans and Budgets of the Year 2017, despite important notes on the performance of previous Directors.

With a complete board in the Board of Directors, this is a fresh breeze for the company's performance. The Board of Directors and its staff have been able to improve the overall performance of the company. The bank posted

pencapaian laba ditahun 2017 yakni sebesar Rp113.27 milyar, tercatat tumbuh dibandingkan pada tahun 2016 yakni sebesar minus Rp236.70 milyar.

profit achievement in 2017 of Rp113,27 billion, growing in comparison to 2016 at minus Rp236,70 billion.

Untuk Kredit tercatat sebesar Rp13.27 triliun atau tumbuh negatif sebesar -6,61% jika dibanding tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp14.21triliun. Namun penurunan kredit diikuti dengan membaiknya NPL Gross bank yang tercatat menurun dari 15,03% ditahun 2016 menjadi sebesar 14,72% pada akhir tahun 2017. Sedangka tingkat NPL netto relatif lebih rendah yakni dari 3,95% di tahun 2016 menjadi 3,79% pada akhir tahun 2017. Indikator kinerja lainnya adalah tumbuhnya penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank menjadi sebesar Rp16.65 triliun pada akhir tahun 2017 atau tumbuh sebesar 0,52% dibandingkan tahun 2016 yakni sebesar Rp16.56 triliun.

Loans reached Rp13,27 trillion or a negative growth of -6,61% compared to 2016 recorded at Rp14,21 trillion. However, the decline in loan was followed by an improvement in the NPL of Gross Bank recorded declining from 15.03% in 2016 to 14.72% by the end of 2017. The level of net NPL was relatively lower from 3.95% in 2016 to 3.79% by the end of 2017. Performance indicators is the growth of third party funding (TPF) funds to Rp16,65 trillion by the end of 2017 or grew by 0.52% compared to the year 2016 of Rp16,56 trillion.

Beberapa kebijakan strategis yang diambil jajaran Direksi yang baru serta arahan dari Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Dan Papua Barat, menjadi poin penting bagi perubahan arah kebijakan perusahaan. Hal ini berdampak besar bagi pertumbuhan Bisnis Bank Papua.

Some of the strategic policies adopted by the new Board of Directors as well as the guidance from the Papua and West Papua Province Representatives Financial Services Authority became an important point for a change in the company's policy direction. This has a major impact on the business growth of Bank Papua.

Pandangan atas Prospek Usaha Bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2018 akan lebih baik dari tahun 2017. Membaiknya perekonomian Indonesia pada tahun mendatang tentunya disebabkan beberapa indikator. Membaiknya ekonomi Indonesia terlihat dari indikator pada tahun 2017 yang mulai membaik. Selain itu, proyeksi IMF terhadap negara maju dan berkembang seperti Indonesia semuanya positif dan meningkat. *Likuiditas* cukup kuat, permodalan perbankan juga kuat, diperkirakan sampai dengan 23% dan cenderung meningkat terus setiap tahunnya.

Bank's Business Prospects Review

The Financial Services Authority (OJK) predicts Indonesia's economic condition in 2018 will be better than this year. The improving Indonesian economy in the coming year is certainly due to several indicators. The improving Indonesian economy is seen from indicators in 2017 that began to improve. In addition, IMF projections of developed and developing countries like Indonesia are all positive and increasing. Liquidity is strong, banking capital is also strong, estimated at up to 23% and tends to increase steadily every year.

Meskipun berbagai sentimen positif tengah menyambut Indonesia pada tahun 2018, ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Salah satunya kemungkinan Bank Sentral Amerika Serikat *(The Federal Reserved)* yang akan segera menaikkan suku bunganya dalam waktu dekat. Potensi dan ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga lagi menjadi semakin terbatas.

Although positive sentiments are welcoming Indonesia in 2018, there are some things of concern. One possibility is the Federal Reserve which will soon raise interest rates in the near future. The potential and space for Bank Indonesia to lower interest rates again becomes increasingly limited.

Dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan perbankan pada tahun 2018, Dewan Komisaris memandang bahwa prospek usaha Bank Papua pada tahun 2018 yang telah disusun oleh Direksi , baik terkait dengan penyaluran kredit dan produk-proudk layanan jasa lainnya akan

In view of economic and banking growth in 2018, the Board of Commissioners considers that the prospects for Bank Papua in 2018 that have been drawn up by the Board of Directors, whether related to the distribution of credit and other service products will be opportunities and

menjadi kesempatan dan peluang bisnis yang harus diraih untuk meningkatan pertumbuhan kinerja perusahaan. Disamping itu, dengan telah lengkapnya jajaran Direksi Bank Papua, membawa angin perubahan dan menjadi pendorong semangat optimistis guna mewujudkan visi dan misi Bank Papua dan juga dapat berkontribusi nyata bagi pertumbuhan perekonomian daerah.

business opportunities that must be achieved to increase growth of company performance. In addition, with the full range of Board of Directors of Bank Papua, bringing winds of change and encouraging optimistic spirit to realize the vision and mission of Bank Papua and also can contribute significantly to the growth of the regional economy.

Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko Bank

Sebagaimana salah satu tugas utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko Bank. Dari penilaian *Self Assesment* tingkat kesehatan Bank pada tahun 2017, Bank Papua memperoleh Peringkat Komposit 3 (tiga), hal ini mencerminkan kondisi Bank tergolong cukup sehat. Begitu pula dengan Profl Risiko posisi 31 Desember 2017, dimana profil Risiko Bank Papua menunjukkan predikat risiko komposit Bank dengan nilai 3 (tiga) atau Moderat. Penilaian Profil Risiko mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan Sistem Pengendalian Risiko (*risk control sistem*).

Bank Sound Rating and Bank Risk Profile

As one of the main duties of the Board of Commissioners is to supervise Bank Sound Rating and Bank Risk Profile. From Self Assessment of Bank soundness in 2017, Bank Papua obtained Composite Rating 3 (three), it reflects Bank condition is quite sound. Similarly, the Risk Profile of the position on December 31, 2017, in which the Risk Profile of Bank Papua shows the composite risk rating of Banks with a value of 3 (three) or Moderate. The Risk Profile Assessment includes an assessment of Inherent Risk and an assessment of the Quality of Risk Management Implementation that reflects the Risk Control System.

Dengan tingkat kesehatan Bank Komposit 3 (tiga) dengan Profil Risiko Moderat, artinya kondisi Bank secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain: profil risiko, penerapan GCG, *rentabilitas*, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.

With the soundness of Composite Bank 3 (three) premises Moderate Risk Profile, it means that the condition of the Bank in general is sound enough so that it is deemed sufficient enough to face significant negative impact from changes of business condition and other external factors which reflected by the rating of assessment factors, among others: risks, the implementation of GCG, rentability, and capital which are generally quite good. If there are weaknesses, then the general weakness is quite significant and if not successfully addressed well by management can be disruptive business continuity of the bank.

Pengawasan di Bidang Teknologi Informasi

Mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/ PBI/2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /Pojk.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, dalam aktifitasnya Dewan Komisaris juga mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan teknologi informasi serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi di Bank Papua agar efektif, efisien, dan tepat waktu serta kecukupan sumber daya yang dimiliki Bank. Dengan adanya rencana pengembangan produk perbankan berbasis *Fintech*, maka Dewan Komisaris

Supervision in Information Technology

Referring to Bank Indonesia Regulation No. 9/15 / PBI / 2007 and Regulation of Financial Services Authority Number 38 /Pojk.03/2016 On Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology By Commercial Banks, in its activities the Board of Commissioners also evaluates, directs and monitors the Information Technology Strategic Plan and Bank policy related to the use of information technology and evaluate the Board of Directors' responsibility for the implementation of risk management in the use of Information Technology at Bank Papua in order to be effective, efficient, and timely and sufficient resources owned by the Bank. With the development plan of Fintech-based banking products, the Board of Commissioners

memberikan saran agar selalu memperkuat fasilitas pengamanan sisitem informasi teknologi yang dimiliki perusahaan.

Laporan Audit Independen

Mengacu kepada prosedur dan ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris Bank Papua melalui Komite Audit secara transparan telah memilih Kantor Akuntan Publik (Hertanto, Grace & Karunawan) untuk melakukan audit independen atas laporan keuangan tahun buku 2017. Hasil audit laporan keuangan Bank Papua untuk Laporan Keuangan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 serta Laporan Auditor Independen yang disampaikan Kantor Akuntan Publik (Hertanto, Grace & Karunawan) mendapat opini "Wajar Tanpa Pengecualian dalam semua hal yang material", dengan beberapa catatan koreksi atas beberapa data kinerja pada Laporan Audit Independen sebelumnya, sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan yang berlaku.

Perlu kami sampaikan bahwa Kantor Akuntan Publik (Hertanto, Grace & Karunawan) mengarahkan perhatian atas laporan keuangan, dimana bank melakukan reklasifikasi akun tertentu pada laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan laporan laba rugi serta penghasilan komprehensif lainnya yang berkahir pada tanggal 31 Desember 2016 yang menyebabkan laporan posisi keungan tanggal 1 Januari 2016 disajikan pada laporan keuangan, sebagaimana dipersyaratkan oleh Standar Akutansi Keuangan di Indonesia. Opini Kantor Akuntan Publik (Hertanto, Grace & Karunawan) tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut. Terjadinya reklasifikasi akun tertentu pada laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016 telah disampaikan Direksi melalui *accounting position paper* No. 01/14/SKI/2018 yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace & Karunawan juga telah menyerahkan manajemen letter yang isinya catatan-catatan temuan, baik material maupun immaterial yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan saran-saran perbaikan dari Kantor Akuntan Publik (KAP).

Tindak Lanjut Hasil Audit

Dewan Komisaris senantiasa memantau agar Direksi menindaklanjuti semua temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Disepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris telah melakukan beberapa kali rapat dengan Direksi untuk membahas tindak lanjut hasil audit, baik hasil audit Internal maupun audit eksternal.

advises to always memeperkuat security facility's system information technology owned company.

Independent Audit Report

Referring to prevailing procedures and regulations, the Board of Commissioners of Bank Papua through the Audit Committee has transparently selected the Public Accounting Firm (Hertanto, Grace & Karunawan) to conduct an independent audit of the financial statements of the fiscal year 2017. The results of the audited financial statements of Bank Papua for Financial Statements 31 December 2017 and 31 December 2016 and the Independent Auditor's Report submitted by the Public Accounting Firm (Hertanto, Grace & Karunawan) received an "Unqualified in all material respects in all material respects", with some correction notes on some performance data in the previous Independent Audit Report with accounting standards and applicable regulations.

It is necessary to convey that the Public Accounting Firm (Hertanto, Grace & Karunawan) directs the attention to the financial statements, which the bank reclassifies certain accounts in the statement of financial position of 31 December 2016 and the related income and other comprehensive income as of 31 December 2016 resulted in a January 1, 2016 financial statement position presented in the financial statements, as required by the Financial Accounting Standards in Indonesia. Opinions Public Accounting Firm (Hertanto, Grace & Karunawan) is not modified in this respect. The occurrence of reclassification of certain accounts in the statement of financial position dated 31 December 2016 has been submitted by the Board of Directors through accounting position paper No. 01 / 14 / SKI / 2018 submitted to the Board of Commissioners.

Public Accounting Firm Hertanto, Grace & Karunawan has also submitted letter management whose contents of both material and immaterial inventory records were found during the execution of the examination, accompanied by suggestions of improvement from the Public Accounting Firm (KAP).

Follow Up Audit Results

The Board of Commissioners continuously monitors the Board of Directors to follow up on all audit findings and recommendations from the Bank's internal audit work units, external auditors, the results of supervision of the Financial Services Authority and / or other authorities' supervisory results. Throughout 2017, the Board of Commissioners has conducted several meetings with the Board of Directors to discuss the follow up of audit results,

Dari hasil audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris secara periodik, Dewan Komisaris senantiasa meminta Direksi untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut serta meminta kepada Direksi untuk meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Bank dan Penerapan Strategi Anti Fraud.

both Internal audit results and external audits. From the results of the audit submitted to the BOC periodically, the BOC always asks the Board of Directors to follow up the findings and ask the Board of Directors to improve the effectiveness of the Bank Internal Control System and the Implementation of Anti Fraud Strategy.

Implementasi Tata Kelola Yang Baik

Bank Papua senantiasa berupaya menerapkan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dipersyaratkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 / POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di perusahaan. Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Dengan kelima prinsip dasar inilah menjadi pedoman bagi Komisaris dalam membuat setiap keputusan dan menjalankan aktivitas pengawasan di Bank Papua.

Implementation of GCG

Bank Papua always strives to implement Good Corporate Governance as required in Regulation of the Financial Services Authority Number 55 /POJK.03/2016 Concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks. The Board of Commissioners shall ensure that good implementation of Good Corporate Governance is implemented in every business activity of the Bank at all levels or levels of the organization in the company. Good Corporate Governance is a Bank management procedure that applies the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. These five basic principles serve as guidelines for the Commissioners in making every decision and conducting supervisory activities in Bank Papua.

Dengan adanya komitmen yang tinggi dari seluruh insan di Bank Papua untuk menerapkan Tata Kelola yang Baik, tentunya akan berdampak pada eksistensi perusahaan dimata para *stakeholder*. Dewan Komisaris senantiasa memastikan efektivitas penerapan Tata Kelola yang Baik di Bank Papua berjalan sebagaimana mestinya. Untuk hal tersebut, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Dengan berlandaskan pada itikad baik serta moral yang tinggi, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya rasa tanggungjawab bank terhadap *stakeholders* secara konsisten, maka Dewan Komisaris berkomitmen untuk melaksanakan Tata Kelola yang Baik di Bank Papua.

Given the high commitment of all human beings in Bank Papua to implement Good Corporate Governance, it will certainly have an impact on the company's existence in the eyes of the stakeholders. The Board of Commissioners always ensures that the effectiveness of Good Corporate Governance implementation in Bank Papua is working as it should. To this end, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, Risk Oversight Committee, and the Remuneration and Nomination Committee. Based on good bands and high morale, compliance with prevailing laws and regulations, and awareness of a consistent sense of corporate responsibility for the stakeholders, the Board of Commissioners is committed to implementing Good Corporate Governance in Bank Papua.

Disepanjang periode tahun 2017, Dewan Komisaris menilai Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah bekerja dengan baik. Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan saran dan masukkan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan di Bank Papua. Khusus Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah berperan aktif dalam melaksanakan proses nominasi bagi calon pengurus Bank Papua. Kembali kami tegaskan bahwa keberadaan Komite telah mendukung Dewan Komisaris dalam penerapan Tata Kelola yang Baik di Bank Papua.

Throughout the 2017 period, the BOC assessed that the Audit Committee, Risk Oversight Committee, and the Remuneration and Nomination Committee had performed well. The Audit Committee, Risk Oversight Committee, and the Remuneration and Nomination Committee have advised and submitted to the BOC in conducting supervision at Bank Papua. Specifically, the Remuneration and Nomination Committee has played an active role in implementing the nomination process for prospective managers of Bank Papua. Again, we affirm that the existence of the Committee as an organ of the BOC has supported the implementation of Good Corporate Governance in Bank Papua.

Komposisi Dewan Komisaris

Dari tanggal 31 Desember 2016 hingga akhir tahun 2017 komposisi Dewan Komisaris yang berjumlah 2 (dua) orang yakni Komisaris Utama dan satu orang Komisaris. Dengan Demikian maka susunan Komisaris Bank Papua tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th. sebagai Komisaris Utama
2. drh. Constant Karma sebagai Komisaris

Dengan mempertimbangkan jumlah Direksi yang saat ini telah lengkap berjumlah 5 (lima) orang, maka kami telah mengusulkan kepada pemegang saham agar minimal jumlah Komisaris sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang dari pihak Independen dan dari 2 (dua) orang dari pihak Non Independen, dan hal ini telah ditindaklanjuti setelah adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di bulan Juni 2017.

Composition of the Board of Commissioners

From December 31, 2016 until the end of 2017, the composition of the Board of Commissioners consists of 2 (two) members, namely the President Commissioner and one Commissioner. Thus, the composition of the Board of Commissioners of Bank Papua in 2017 is as follows:

1. *Pdt. Lippies Biniluk, M.Th. as the President Commissioner*
2. *drh. Constant Karma as Commissioner*

Considering the current number of directors totaling 5 (five) persons, we have proposed to the shareholders to have at least 4 (four) Commissioners consisting of 2 (two) persons from Independent parties and from 2 (two) and this has been followed up following the resolution of the Extraordinary Shareholders General Meeting in June 2017.

Apresiasi

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala dedikasi dan komitmen Direksi dan segenap pegawai Bank Papua, yang di sepanjang tahun 2017 telah mencatat kinerja terbaiknya. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Dan Papua Barat, para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan, kami mengucapkan terimakasih atas kepercayaan serta dukungan yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi selama ini. Semoga dengan kebersamaan ini, menjadi motivasi kami untuk selalu memberikan kinerja terbaik.

Sekian dan terima kasih.
Syaloom.

Appreciation

The Board of Commissioners also expresses their deepest gratitude and appreciation for all the dedication and commitment of the Board of Directors and all the employees of Bank Papua, which throughout the year 2017 has recorded its best performance. Head Of Authority Of Financial Services Representatives Of Papua And West Papua Province, we would like to acknowledge the trust and support given to the Board of Commissioners and the Board of Directors so far. Hopefully with this togetherness, it becomes our motivation to always give the best performance.

That is all and thank you.
Saloom.

Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th.
Komisaris Utama
President Commissioner

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioner's Profile

54 tahun. Lahir di Jayawijaya 08 Agustus 1963. Menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua pada tahun 2013 berdasarkan SK RUPS Nomor : 03/SK/RUPS-LB/BPD/XII/2013 pada tanggal 19 Desember 2013 dan diperpanjang pada tanggal 01 Oktober 2015 dengan SK RUPS Nomor: 05/SK/RUPS-LB/BPD/X/2015. Beliau Menyelesaikan pendidikan Akademi tahun 1993 di Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar.

Pendidikan dan pengembangan yang pernah diikuti antara lain:

- Gospel Literature Outreach (GLO) di Sidney Australia,
- Cornerstone Community Center Australia,
- Tasmania Mission Center, Christian Leadership Training,
- Pelatihan Jurnalistik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Kristen Indonesia.

54 years old. Born on Jayawijaya August 08, 1963. Appointed as President Commissioner of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua in 2013 is based on the resolutions of the GMS Decree Number: .03 / SK / RUPS-LB / BPD / XII / 2013 on December 19, 2013 and extended to 01 October 2015 with the resolutions of the GMS Decree Number 05 / SK / RUPS-LB / BPD / X / 2015. He completed his 1993 Academy education at the Arastamar Injil Theology College.

Education and development that have been followed include:

- *Gospel Literature Outreach (GLO) in Sydney, Australia,*
- *Cornerstone Community Center Australia,*
- *Tasmania Mission Center, Christian Leadership Training,*
- *Journalism Training, Faculty of Social and Political Sciences at Indonesian Christian University.*

Pengalaman pekerjaan antara lain:
- Tim penyusun PERDASI dan PERDASUS Provinsi Papua,
- Panitia tim seleksi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua,
- Penasehat spiritual Pemerintah Provinsi Papua selama 10 tahun berturut turut tahun 2006 sampai sekarang,
- Direktur di Yayasan Global Ministries Indonesia tahun 1997 sampai sekarang.

Memberikan modal usaha kepada masyarakat ekonomi lemah sebanyak 280 orang didaerah Cimahi - Jawa Barat tahun 1993 s/d 1997. Memberikan modal usaha kepada masyarakat ekonomi lemah sebanyak 323 orang di daerah Geger Kalong - Bandung tahun 1993 s/d 1997

Mengikuti dan memiliki Sertifikat :
- Manajemen Risiko Level IV yang diselenggarakan oleh BSMR pada tanggal 14 November 2015.

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dibidang Perbankan :
- 26 Maret 2013 Worshop KPMM yang diselenggarakan oleh *Risk Management* Guard (RMG).
- 15 Desember 2014 Pengawasan Internal/Audit, Seminar Memahami Tanggaungjawab Dekom, Dirpat serta Divisi *Risk Management* yang diselenggarakan oleh ASBANDA.
- 12 Agustus 2015 Analisa Kredit, Juknis Implementasi Loan Remedial, Portofolio Management & Litigasi yang diselenggarakan oleh *Risk Management* Guard (RMG).
- 24 Februari 2016 Perencanaan Karier untuk KPI Direksi -Komisaris dan Implementasi POJK No.45/ POJK.03/2015 yang diselenggarakan oleh *Risk Management* Guard (RMG).
- 01 April 2016 *Business Process*, Seminar BPDSI dan penarikan Undian Nasional yang diselenggarakan oleh ASBANDA.
- 03 September 2016 Akuntansi Perbankan, Tax Amnesty, sebuah tantangan sekaligus Peluang Bagi BPD yang diselenggarakan oleh ASBANDA.

Work experience has included:
- *The drafting team PERDASI and PERDASUS Papua Province,*
- *Selection team team members of the Papua People's Assembly (MRP) Papua Province,*
- *Papua Provincial spiritual adviser for 10 consecutive years 2006 to present,*
- *Director at Global Ministries Indonesia Foundation 1997 until now.*

Providing business capital to the economically weak community of 280 people in Cimahi area - West Java 1993 to 1997. Giving business capital to the weak economic community as much as 323 people in the area of Geger Kalong - Bandung 1993 to 1997

Following and having a Certificate:
- *Level IV Risk Management organized by BSMR on November 14, 2015.*

Never attended Education and Training in Banking:
- *March 26, 2013 Worshop KPMM organized by Risk Management Guard (RMG).*
- *December 15, 2014 Internal Control / Audit, Seminar Understanding the Dekom Responsibility, Dirpat and Risk Management Division organized by ASBANDA.*
- *August 12, 2015 Loan Analysis, Loan Remedial Implementation Guidelines, Portfolio Management & Litigation organized by Risk Management Guard (RMG).*
- *February 24, 2016 Career Planning for KPI POJK Directors and Implementation No.45 / POJK.03 / 2015 organized by Risk Management Guard (RMG).*
- *April 01, 2016 Business Process, Seminar BPDSI and drawing of National Lottery organized by ASBANDA.*
- *September 3, 2016 Accounting for Banking, Tax Amnesty, a challenge as well as Opportunities for BPD organized by ASBANDA.*

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioner's Profile

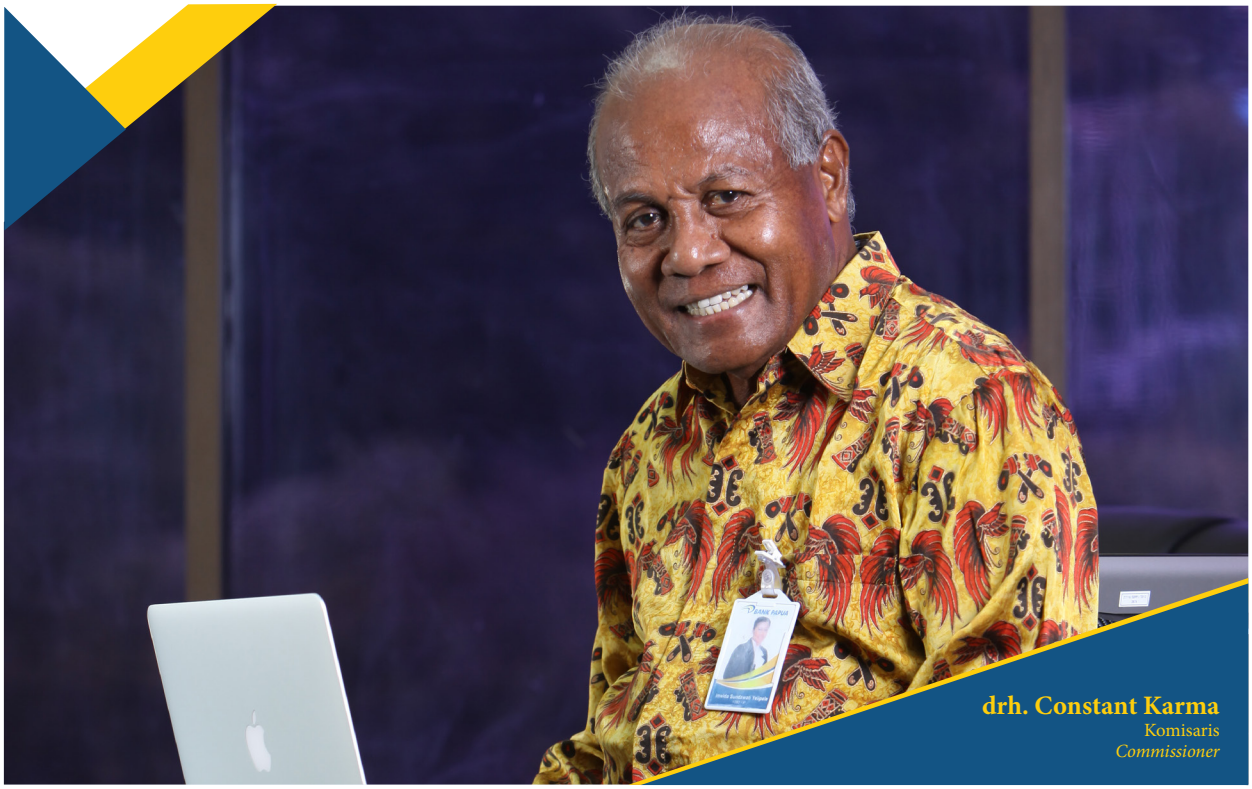

63 tahun. Lahir di Biak 24 Maret 1954. Menjabat sebagai Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tahun 2012 berdasarkan SK RUPS Nomor: 09/SK/RUPS-LB/BPD/XI/2012 pada tanggal 28 November 2012 dan diperpanjang pada tanggal 01 Oktober 2015 dengan SK RUPS Nomor: 09/SK/RUPS-LB/BPD/X/2015. Beliau Memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Kedokteran di Universitas Gajah Mada di Jogjakarta tahun 1981.

Pendidikan dan pengembangan yang pernah diikuti antara lain:

- Kursus singkat angkatan XII LEMHANAS,
- Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Pemerintah Daerah,
- Penataran P4 pejabat Eselon II & Bupati/Walikota Dati II,
- Pendidikan dan pelatihan SPAMEN angkatan I klas I,

63 years old. Born in Biak March 24, 1954. Appointed as Commissioner of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua for the year 2012 based on GSM Decree Number: 09 / SK / RUPS-LB / BPD / XI / 2012 on November 28, 2012 and extended to 01 October 2015 with the Decision of the Shareholders General Meeting Number: 09 / SK / RUPS-LB / BPD / X / 2015. He earned a Bachelor degree in the Faculty of Medicine at Gajah Mada University in Jogjakarta in 1981.

Education and development that have been followed include:

- *Short course of class XII LEMHANAS,*
- *Education and training of local government leadership,*
- *Upgrading of P4 officials of Echelon II & Regent / Mayor Local Goverment,*
- *SPAMEN education and training class I, 1st Batch*

Jabatan penting yang pernah di pegang antara lain:
- Kepala Dinas Peternakan Provinsi Dati I Irian Jaya tahun 1997,
- Wakil Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi Dati I Irian Jaya tahun 2000,
- Kepala Dinas Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2006,
- Staff Ahli Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2009,
- Sekretaris Daerah Provinsi Papua tahun 2010,
- Pelaksana tugas harian KPA Provinsi Papua sampai sekarang.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat Manajemen Risiko :
- Manajemen Risiko level II yang diselenggarakan oleh Lembaga Manajemen Surabaya pada tanggal 22 Januari 2014

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perbankan :
- 15 juli 2014 Peningkatan efektifitas pengelolaan aset dan liabilitas yang diselenggarakan oleh PT. Determinasi Lintas Strategi Pro.
- 18 Juli 2014 Seminar Nasional Peluang & Tantangan BPD dalam rangka Implementasi Undang-undang yang diselenggarakan oleh ASBANDA.
- 24 Juli 2015 *Business Process* yang diselenggarakan oleh PT. Collega Inti Pratama.
- 12 Agustus 2015 Analisa Kredit, Juknis Implementasi Loan Remedial, Portofolio Management & Litigasi yang diselenggarakan oleh *Risk Management* Guard (RMG).

Important positions ever held include:
- *Head of Livestock Service Office of Irian Jaya Province in 1997,*
- *Vice Governor of the Provincial Government of Irian Jaya in 2000,*
- *Head of Livestock Service Office of Papua Province Local Government in 2006,*
- *Expert Staff of Local Government of Papua Province in 2009,*
- *Provincial Secretary of Papua Province in 2010,*
- *Daily execution of KPA of Papua Province until now.*

Following and having a Risk Management Certificate:
- *Level II Risk Management organized by Surabaya Management Institute on January 22, 2014*

Attended Education and Training in Banking:

- *July 15, 2014 Increasing the effectiveness of asset and liability management organized by PT. Determinasi Lintas Strategi Pro.*
- *July 18, 2014 National Seminar on Opportunities & Challenges of BPD in the Implementation of Laws organized by ASBANDA.*
- *July 24, 2015 Business Process organized by PT. College Inti Pratama.*
- *August 12, 2015 Loan Analysis, Loan Remedial Implementation Guidelines, Portfolio Management & Litigation organized by the Risk Management Guard (RMG).*

Laporan Direksi
Board of Director's Report

Tetap Tumbuh, di Tengah Persaingan yang Ketat

Stay Growing, in the midst of a Tight Competition

Di tengah persaingan yang ketat dan dengan penerapan strategi bisnis yang tepat, Bank Papua berhasil membukukan laba yang signifikan pada tahun 2017. Peningkatan laba diikuti juga oleh indikator rasio keuangan yang semakin membaik. Tercatat rasio CAR yang relatif tinggi, *rentabilitas* masih stabil dengan tingkat efisiensi yang membaik seiring turunnya BOPO dan *Net Non Performing Loan* (NPL) serta meningkatnya *Return on Asset* (ROA).

In the midst of intense competition and with the adoption of appropriate business strategy, Bank Papua has earned a significant profit in 2017. Increased earnings are also followed by improved financial ratio indicator. Recorded relatively high CAR ratios, profitability is still stable with improved efficiency as OEOI and Net Non Performing Loan (Net NPL) decline, also Returned on Asset (ROA) inreased.

F. Zendrato, SE.MM
Direktur Utama
President Director

Para Pemangku Kepentingan Yang Terhormat,

Puji syukur kepada Tuhan yang maha kuasa atas kasih, anugerah dan penyertaan-Nya, Bank Papua mengakhiri Tahun 2017 dengan pencapaian kinerja yang cukup baik ditengah berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, tahun 2017 adalah tahun pemulihan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi domestik kembali menguat pada semester dua, setelah sempat tertahan pada semester satu. Ini didorong oleh perbaikan kinerja ekspor dan peningkatan investasi oleh swasta. Bank Indonesia memaparkan bahwa strategi pemerintah berjalan sesuai rencana dan mampu mendorong ekonomi lebih tinggi. Ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,1% tahun 2017 ini, angka ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan negara lain. Angka inflasi di tahun 2017 ini pada kisaran 3%-3,5%. Angka ini sesuai dengan sasaran inflasi tahun 2017, di tengah tekanan kenaikan inflasi *administered prices* akibat kenaikan tarif listrik sebagai bagian dari reformasi energi. Disisi lain, fungsi intermediasi perbankan belum sepenuhnya pulih seperti yang diharapkan. Kredit perbankan pada tahun 2017 ini tumbuh pada kisaran sekitar 8%, atau di bawah 10%. Meski begitu, angka tersebut membaik dari pertumbuhan kredit tahun sebelumnya 7,86%. Pertumbuhan ekonomi tersebut masih ditopang oleh permintaan domestik. Dengan percepatan reformasi struktural, perekonomian bisa tumbuh tinggi tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Kinerja Keuangan Bank

Perlu kami sampaikan bahwa di awal tahun 2017, Bank telah melakukan analisis terhadap penurunan nilai kredit yang diberikan sesuai Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No.55 (Revisi 2015) dan analisis terhadap kesalahan mendasar sesuai Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No. 25 (revisi 2014) untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Atas analisa ini, maka terjadi perubahan penyajian kembali laporan keuangan 31 Desember 2016 yang disampaikan oleh Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.Tb. Hasanuddin, M.Sc. dan Rekan. Analisis dan perubahan penyajian laporan keuangan tahun buku 2016 tersebut, disampaikan dalam *accounting position paper* No.01/14/SKI/2018 yang termuat didalam laporan tahunan ini.

Melalui penerapan strategi bisnis yang super ketat ditahun 2017, Bank Papua tetap bisa mencatat laba sebelum pajak yakni sebesar Rp144.38 milyar, atau tumbuh positif dibandingkan tahun 2016 yang

Dear Stakeholders,

Thanks to God Almighty for His love, grace and inclusion, Bank Papua ends the Year 2017 with the achievement of good performance amid various problems and challenges faced.

As we all know, 2017 is the year of Indonesia's economic recovery. In 2017, domestic economic growth again strengthened in the second half, after being loss in the first semester. This is driven by improving export performance and increased private investment. Bank Indonesia explained that the government's strategy is running according to plan and ability to push the economy higher. Indonesia's economy grew about 5.1% in 2017, this figure is better than the growth of other countries. The inflation rate in 2017 is in the range of 3% -3.5%. This figure is in line with the inflation target of 2017, amid mounting inflationary pressure in administered prices due to an increase in electricity tariffs as part of energy reforms. On the other hand, the banking intermediation function has not fully recovered as expected. Banking loan in 2017 is growing in the range of about 8%, or below 10%. Even so, the figure improved from the previous year's loan growth of 7.86%. The economic growth is still supported by domestic demand. With the acceleration of structural reform, the economy can grow high without disturbing the stability of the financial sistem.

Bank Financial Performance

We need to announce that at the beginning of 2017, the Bank has analyzed the decline in the value of lending in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No.55 (Revised 2015) and an analysis of fundamental errors in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 25 (revised 2014) for the fiscal year ending December 31, 2016. Based on this analysis, there is a change in the restatement of the financial statements of December 31, 2016 submitted by Public Accountant Office of Prof. DR. H.Tb. Hasanuddin, M.Sc. and Partners. The analysis and changes in the presentation of the financial statements of the fiscal year 2016 shall be submitted in the accounting position paper No.01 / 14 / SKI / 2018 affixed in this annual session.

Through the implementation of a super tight business strategy in 2017, Bank Papua can still earn pre-tax earning of Rp144,38 billion, or grow positively compared to 2016 which recorded a profit before tax of minus Rp144,08

mencatat laba sebelum pajak sebesar minus Rp144.08 milyar. Sementara itu laba bersih pada tahun yang sama tercatat sebesar Rp113.27 milyar atau tumbuh positif dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencatat laba bersih sebesar minus Rp236.70 milyar. Pencapaian laba bersih perusahaan tercatat sebesar 87,11% dari target 2017 yang ditetapkan yakni sebesar Rp100.341 milyar. Pertumbuhan positif laba terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga dan operasional serta menurunnya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) di tahun 2017.

billion. Meanwhile, net income in the same year stood at Rp113,27 billion or grew positively compared to 2016 which recorded a net profit of minus Rp236,70 billion. The company's net earning is recorded at 87.11 percent of the 2017 target set at Rp100,341 billion. The positive profit growth was mainly due to higher interest and operating income and declining Reserve Loss (CKPN) in 2017.

Dengan capaian kinerja tersebut, maka imbal hasil asset (ROA) dan imbal hasil ekuitas (ROE) Bank Papua menjadi masing-masing sebesar 0,61% dan 4,37% pada tahun 2017 dibandingkan pada tahun 2016 yakni masing-masing sebesar minus 0,61% dan minus 8,06%. Sedangkan Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) Bank Papua, yakni sebesar 106,54% di tahun 2016 menjadi 94,35% di tahun 2017.

With these performance outcomes, the return on assets (ROA) and return on equity (ROE) of Bank Papua become 0.61% and 4.37% respectively in 2017 compared to 2016 ie minus 0.61% and minus 8.06% . The operational cost of operational income (BOPO) of Bank Papua is 106.54% in 2016 to 94.35% in 2017.

Selanjutnya, di tahun 2017 Bank Papua telah membukukan total aset sebesar Rp20.40 triliun atau turun 1,02% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp20.61 triliun. Pencapaian target asset perusahaan tercatat sebesar 94,98% dari target 2017 yang ditetapkan yakni sebesar Rp21.47 triliun. Total aset terutama didominasi oleh kredit yang mencapai Rp13.27 triliun atau turun sebesar minus 6,61% dibanding tahun 2016, yakni sebesar Rp14.21 triliun. Ekspansi kredit tersebut diimbangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebesar Rp1.51 triliun menurun dibanding tahun 2016, yakni sebesar Rp1.67 triliun.

Furthermore, in 2017 Bank Papua has recorded total assets of Rp20,40 trillion, decreased 1.02% from the previous year which amounted to Rp20,61 trillion. Achievement of the company's asset target is 94.98% of the target set at Rp21,47 trillion 2017. Total assets were mainly dominated by loans reaching Rp13,27 trillion or decreased by minus 6.61% compared to 2016, amounting to Rp14,21 trillion. The loan expansion was offset by Rp1,51 trillion in decline in impairing losses (CKPN) from Rp1,67 trillion in 2016.

Penyaluran kredit ini tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) serta memperhatikan kondisi kualitatas kredit secara keseluruhan. Dengan demikian, NPL Gross tercatat turun menjadi sebesar 14,72% pada akhir tahun 2017 dibanding tahun 2016 yang tercatat sebesar 15,03%. Tingkat NPL netto juga tercatat menurun yakni sebesar 3,79% pada akhir tahun 2017, dibanding tahun 2016 yang tercatat sebesar 3,95%. Dengan kondisi tersebut, maka rasio *Loan To Deposit Ratio* (LDR) Bank berada pada 80,12% di akhir tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 yang tercatat sebesar 86,23. Pada tahun 2017, Manajemen Bank Papua mengambil kebijakan untuk fokus untuk berupaya menjaga kualitas asset melalui penyelesaian kredit bermasalah.

This lending is still carried out with prudential banking principles and taking into consideration the quality of loan conditions as a whole. Thus, NPL Gross is decreased to 14.72% by the end of 2017 compared to the year of 2016 which was recorded at 15.03%. The net NPL also recorded a decline of 3.79% at the end of 2017, compared to the year 2016 recorded at 3.95%. Under these conditions, the Bank's Loan To Deposit Ratio (LDR) ratio is at 80.12% at the end of 2017 compared to 2016 recorded at 86.23. In 2017, Bank Papua's Management took the policy to focus on trying to maintain asset quality through the settlement of non-performing loans.

Berbeda dengan penyaluran kredit, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Papua tercatat tumbuh positif sebesar 0,52% menjadi sebesar Rp16.65 triliun pada

In contrast to loan, Bank Papua's third party funds grew 0.52% to Rp16,65 trillion by the end of 2017 compared to Rp16,56 trillion in 2016. The achievement of third

akhir tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp16.56 triliun. Pencapaian penghimpunan Dana Pihak Ketiga tercatat sebesar 96,04% dari target 2017 yang ditetapkan yakni sebesar Rp17.34 triliun. Pertumbuhan DPK didominasi oleh pertumbuhan giro, dari sebesar Rp7.12 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp7.73 triliun pada tahun 2017. Begitu juga dengan tabungan, dimana terjadi peningkatan dari sebesar Rp6.29 Triliun pada tahun 2016 menjadi Rp6.57 triliun pada tahun 2017.

party funding was recorded at 96.04% of the set target of Rp17,34 trillion in 2017. The growth of hird party fund is dominated by growth in current accounts, from Rp7,12 trillion in 2016 to Rp7,73 trillion in 2017. Similarly, savings accounts, which increased from Rp6,29 trillion in 2016 to Rp6,57 trillion in 2017.

Langkah Strategis Tahun 2017

Langkah kebijakan tegas dan terarah telah diambil oleh manajemen Bank Papua ditengah berbagai masalah yang dihadapi. Pasalnya sejak bulan Desember 2016 lalu, perusahaan mengalami kredit bermasalah yang cukup tinggi. Sejak tahun 2010, strategi Bisnis Bank Papua memang lebih kepada penyaluran kredit produktif, seperti kredit modal kerja dan investasi, setelah sebelumnya perusahaan lebih fokus kepada kredit konsumtif. Persoalan kredit bermasalah timbul karena bank belum memiliki infrastruktur yang kuat untuk menggarap kredit produktif yang umumnya disalurkan dalam jumlah besar.

Strategic Steps in 2017

The firm and targeted policy measures have been taken by the management of Bank Papua amid the various problems faced. Because since December 2016, the company experienced quite high non-performing loans. Since 2010, Bank Papua's business strategy is more to the provision of performing loan, such as working capital and investment loan, after previously the company focuses more on consumer loan. The problem of non performing loan arised because banks do not have a strong infrastructure to work on performing loans that are generally distributed in large numbers.

Persoalan kredit bermasalah di Bank Papua dipandang serius oleh manajemen, karena telah berlangsung cukup panjang. Dimanapun bank selalu dihadapkan pada permasalahan NPL, hanya sekarang bagaimana manajemen mengelolanya dengan baik sehingga NPL bisa terjaga mengikuti ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

The problem of non performing loan in Bank Papua is considered seriously by management, because it has gone on quite a long time. Wherever banks are faced with NPL problems, it is only now how management manages them well so that NPLs can be maintained following Bank Indonesia regulation and Financial Services Otiritas.

Manajemen bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua dan Papua Barat memberikan pendampingan dalam upaya menurunkan rasio kredit bermasalah (NPL) yang saat ini masih di atas batas yang ditetapkan regulator dan membuat kebijakan untuk bertransformasi ***Back On Track*** sesuai dengan harapan para *stakeholders*. Beberapa langkah strategis yang dilakukan manajemen antara lain:

1. Melakukan Hapus buku.
2. Peningkatan kredit baru dengan lebih selektif.
3. Membentuk pencadangan sehingga NPL netto di bawah 5 persen.
4. Tambahan modal dari para pemilik sehingga CAR-nya tetap di atas profil risiko dan masih ada kapasitas untuk pemberian kredit baru.
5. Membentuk struktur organisasi yang mengakomodir Risiko Bisnis yakni Divisi Risiko Bisnis dan Divisi Pembinaan Cabang. Divisi Pembinaan Cabang berfokus untuk memantau kinerja cabang baik dari sisi layanan maupun bisnisnya.

*The joint management of the Financial Services Authority (OJK) of Papua and West Papua Province provides assistance in reducing the NPL ratio that is currently above the regulatory limit and makes the policy to transform **Back On Track** in line with the expectations of the stakeholders. Some strategic steps undertaken by management include:*

1. *Writen off.*
2. *New loan increased with more selection.*
3. *Establish a reserve so that the net NPL is below 5 percent.*
4. *Additional capital from the owners so that its CAR remains above the risk profile and there is still capacity for new lending.*
5. *Establish an organizational structure that accommodates Business Risk, ie Business Risk Division and Branch Development Division. The Branch Development Division focuses on monitoring branch performance both in terms of service and business.*

6. Menghentikan sementara pemberian kredit di luar Papua.
7. Membatasi plafon kredit, dimana individu paling banyak Rp50 milyar, yang grup paling banyak Rp75 milyar.
8. Melakukan evaluasi terhadap beberapa kantor cabang yang kinerja keuangannya tidak memuaskan terutama untuk cabang-cabang di Luar Wilayah Papua dan Papua Barat.
9. Manajemen SDM, yaitu pengambilan keputusan yang tegas untuk karyawan yang melakukan pelanggaran.

Program Kerja Sumber Daya Manusia

Fokus utama manajemen Bank Papua pada tahun 2017 untuk Sumber Daya Manusia adalah memperbaiki integritas seluruh pegawai, dimana tindakan-tindakan yang tidak sesuai aturan dan hukum yang berlaku ditindak tegas. Manajemen menindak tegas dengan aturan-aturan yang berlaku.

Program kerja lainnya adalah peningkatan kompetensi, khususnya mengenai kompetensi penyaluran kredit serta risiko-risiko yang ada diberbagai macam bisnis dan perusahaan yang akan dibiayai.

Hal penting lainnya adalah optimalisasi penerapan Budaya Kerja dan Standar Layanan Bank Papua dengan melaksanakan kegiatan diantaranya:

1. Sosialisasi Internalisasi Budaya Kerja & Standar Layanan Bank Papua dengan cara melakukan sosialisasi/ internalisasi Budaya Kerja & Standar Layanan ke seluruh insan Bank Papua dengan cara yang kreatif dan menarik dengan melibatkan semua pegawai secara aktif.
2. Monitoring & evaluasi penerapan Budaya Kerja & Standar Layanan Bank Papua dengan cara:
   - Melakukan monitoring penerapan budaya kerja termasuk optimalisasi peran *Change Agent*.
   - Melakukan monitoring penerapan standar layanan dengan *mystery caller*, *mystery shopping*, penilaian Operator masing-masing unit kerja khususnya *Frontliner by sistem*/ Aplikasi CAMAR serta monitoring langsung, khususnya pada cabang prioritas.
3. *Rewarding System* (Sistem Pemberian Penghargaan) dengan cara:
   - Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada unit kerja dan individu atas penerapan budaya kerja dan standar layanan Bank Papua.
   - Merumuskan aturan-aturan pelaksanaan Budaya Kerja & Standar Layanan.

6. *Stopping lending outside of Papua.*
7. *Limiting the loan limit, where the individual is at most Rp50 billion, the group at most Rp75 billion.*
8. *Evaluate several branch offices whose financial performance is not satisfactory, especially for branches outside Papua and West Papua.*
9. *Human Resource Management, which is firm decision making for employees who commit violations.*

Human Resource Work Program

The main focus of the management of Bank Papua in 2017 for Human Resources is to improve the integrity of all employees, where non-compliance measures and applicable law are dealt with firmly. Management takes firm action with applicable rules.

Another work program is the improvement of competence, especially regarding the competency of loan distribution and the risks that exist in various businesses and companies to be financed.

Another important thing is the optimization of the implementation of Work Culture and Bank Papua Standard Services by implementing activities such as:

1. *Socialization of the Internalization of Work Culture & Bank Papua Standard Services by way of socialization / internalization of Work Culture & Service Standards to all Bank Papua personnel in a creative and interesting way of involving all employees actively.*
2. *Monitoring & evaluation of application of Bank Papua Work Culture & Standard Services by:*
   - *Monitoring the application of a work culture, including optimizing the role of Change Agent.*
   - *Monitoring the implementation of service standards with mystery caller, mystery shopping, operator appraisal of each work unit especially Frontliner by system / CAMAR Application and direct monitoring, especially on priority branch.*
3. *Rewarding System (System of Awarding) by:*
   - *Provide appreciation and gratitude to work units and individuals for implementation of the work culture and service standards of Bank Papua.*
   - *Formulate the rules of implementation of Work Culture & Service Standards.*

Penguatan Sistem Internal Kontrol

Permasalahan tingginya NPL ini merupakan pembelajaran untuk jajaran manajemen dan seluruh insan di Bank Papua agar kami lebih berhati-hati. Manajemen senantiasa mengawal semua proses masalah tersebut agar berjalan sesuai aturan dan hukum. Manajemen berharap, berbagai permasalahan ini tidak membuat jajaran manajemen dan seluruh insan di Bank Papua menjadi patah semangat. Justru sebaliknya, menjadi motivasi bagi kami untuk lebih baik dan lebih profesional lagi ke depannya, sehingga mampu bersaing dengan bank lain dan membantu perekonomian masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua.

Diakui bahwa lemah dalam hal pengawasan pemberian kredit kepada nasabah adalah penyebab utama permasalahan tersebut. Jauhnya jarak kantor di luar Papua juga penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Meskipun perangkat pengawasan telah ada dan penguatan sistem *internal control* senantiasa dilakukan, namun hal tersebut tetap terjadi . Manajemen bersama unit kerja pengawasan internal akan meninjau kembali proses pemberian kredit yang selama ini tidak sesuai prosedur. Selain itu, untuk memaksimalkan pengawasan, manajemen akan melakukan *host limit* untuk kredit. Untuk individu, maksimal pemberian plafonnya hanya Rp50 milyar. Adapun untuk grup, hanya diberikan plafon maksimal Rp75 milyar.

Strengthening Internal Control System

The high problem of this NPL is learning for management and all humanity in Bank Papua so we are more careful. Management constantly oversees all the process of the problem to run according to the rules and laws. The management hopes that these problems will not make the management and all human beings in Bank Papua become discouraged. On the contrary, it becomes a motivation for us to be better and more professional in the future, so that we can compete with other banks and help the economy of the Papuan people, especially the indigenous people of Papua.

It is acknowledged that weak in terms of supervision of lending to clients is the main cause of the problem. The distance of office outside Papua is also the cause of the problem. Although monitoring tools are already in place and internal system strengthening is constantly underway, it still happens. The joint management of the internal control unit will review the crediting process that has not been in accordance with the procedure. In addition, in order to maximize supervision, management will host a limit for credit. For individuals, the maximum granting of the ceiling is only Rp50 billion. As for the group, only given a maximum ceiling of Rp75 billion.

Pelaksanaan Tata Kelola Yang Baik

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan pondasi dari bisnis yang transparan dan sehat. Untuk mencapai kinerja yang lebih baik Bank Papua melakukan penyempurnaan penerapan tata kelola perusahaan. Hal tersebut merupakan komitmen Bank untuk mempertahankan kepercayaan nasabah, pemegang saham, mitra bisnis dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam memastikan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang optimal, Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan bersama dengan manajemen mengevaluasi implementasi *Good Corporate Governance* perusahaan secara berkesinambungan.

Penerapan tata kelola perusahaan di Bank Papua mengedepankan 5 (lima) prinsip penting dalam *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu :

1. *Transparancy* (Transparansi)
   Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material, secara relevan, konsisten dan komparable mengenai perusahaan kepada para *stakeholders* dengan mudah untuk memperoleh informasi mengenai kinerja perusahaan

Good Corporate Governance Implementation

The principles of Good Corporate Governance (GCG) are the foundation of a transparent and sound business. To achieve better performance Bank Papua is making improvements to the implementation of corporate governance. It is the Bank's commitment to maintain the trust of customers, shareholders, business partners and other interested parties. In ensuring the optimal implementation of Good Corporate Governance, the Board of Commissioners and the Compliance Director together with the management are evaluating the implementation of Good Corporate Governance on an ongoing basis.

The implementation of corporate governance in Bank Papua prioritizes 5 (five) important principles in Good Corporate Governance (GCG) namely:

1. *Transparency*
   Openness in carrying out the decision-making process and openness in bringing material information, relevant, consistent and comparable about the company to the stakeholders ease to obtain information about the company's performance when needed.

pada saat dibutuhkan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)
   Kemampuan dan integritas serta kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab organisasi perusahaan untuk mengelola perusahaan secara efektif dan profesional.
3. *Responsibility* (Tanggungjawab)
   Kesesuaian di dalam mengelola Perseroan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. *Independency* (Kemandirian)
   Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (Keadilan)
   Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam mengimplementasikan Tata Kelola yang baik di tahun 2017, Bank Papua terus berupaya untuk menyempurnakan pelaksanaan tata kelola perusahaan, dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang meliputi:

1. Pemenuhan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi beserta pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab komite-komite yaitu komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi & nominasi.
3. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
4. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko.
5. Pemenuhan ketentuan BI terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar.
6. Penyusunan rencana strategis Bank sesuai dengan ketentuan mengenai Rencana Bisnis Bank.
7. Pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
8. Penyusunan Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Buku Pedoman Kerja Direksi yang juga memuat dalam Buku Pedoman GCG diantaranya :
   - Buku 1 Pedoman Pelaksanaan GCG.
   - Buku 2 Pedoman Kerja Komisaris.
   - Buku 3 Pedoman Kerja Direksi .
   - Buku 4 Pedoman Kerja Komite Audit.
   - Buku 5 Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko.
   - Buku 6 Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
   - Buku 7 Pedoman Kerja Kepatuhan.

2. *Accountability*
   Ability and integrity and clarity of functions, rights, obligations, authorities and responsibilities of corporate organizations to manage the company effectively and professionally.
3. *Responsibility*
   Compliance in the Company's management of applicable laws and corporate principles.

4. *Independence*
   The Company is professionally managed without a conflict of interest and influence / pressure from any parties that do not comply with applicable laws and corporate principles.

5. *Fairness*
   Fairness and equality in fulfilling the rights of stakeholders arising under applicable agreements and laws.

In implementing Good Corporate Governance in 2017, Bank Papua continues to work on improving the implementation of corporate governance, under the Regulation of the Financial Services Authority Number 55 /POJK.03/2016 Concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks covering:

1. *Compliance of the BOC and BOD together with the implementation of their duties and responsibilities.*
2. *Completeness and execution of the duties and responsibilities of the committees of audit committee, risk oversight committee and remuneration & nomination committee.*
3. *Implementation of compliance, internal audit and external audit functions.*
4. *Implementation of risk management function.*
5. *Fulfillment of BI regulation related to prudential principles in the provision of funds to related parties and large debtors.*
6. *Preparation of the Bank's strategic plan in accordance with the Bank's business plan.*
7. *Implementation of transparency of financial and non financial condition.*
8. *Preparation of the Board of Commissioners 'Workbook Manual and The Board of Directors' Manual which also contains in the GCG Handbook includes:*
   - *Book 1 GCG Implementation Guidelines.*
   - *Book 2 of the the BOC Guidelines.*
   - *Book 3 of the Board of Directors Guidelines*
   - *Book 4 of the Audit Committee Work Guidelines.*
   - *Book 5 of Risk Oversight Committee Guidelines.*
   - *Book 6 of the the Remuneration and Nomination Committee Guidelines.*
   - *Book of 7 Compliance Guidelines.*

- Buku 8 Pedoman Kerja Benturan Kepentingan
- Buku 9 Pedoman Kerja GCG (*SELF ASSESMENT*)
- Buku 10 Kertas Kerja GCG (*SELF ASSESMENT*)
- Buku 11 Laporan GCG

Penerapan Tata Kelola yang baik perusahaan di Bank Papua dilakukan melalui komitmen bersama dan dimulai dari pucuk pimpinan/pengurus bank sampai pada staf/ karyawan. Disamping itu Program Kerja Transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD), mendorong peningkatan Kualitas Pengelolaan *Governance, Risk, and Compliance*.

Program CSR

Wujud dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh Bank Papua adalah suatu kegiatan yang memiliki sifat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan di Papua-Papua Barat dengan memberikan bantuan di bidang pendidikan dalam hal ini beasiswa bagi masyarakat kurang mampu, perbaikan atau pembangunan fasilitas umum, maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat sosial.

Meskipun dalam kondisi yang cukup sulit, Bank Papua tetap berkomitmen dengan program *Corporate Social Responsibility*/CSR dengan merealisasi dana Program *Corporate Social Responsibility*/CSR pada tahun 2017 sebesar Rp1,300 milyar, dimana terjadi pertumbuhan negative jika dibandingkan tahun 2016 yakni sebesar Rp4,993 milyar. Laporan lengkap mengenai hal ini, kami laporkan dalam Laporan Keberlanjutan (*sustainability report*) Bank Papua.

Manfaat program *Corporate Social Responbility* (CSR) yang telah dilaksanakan Bank Papua dapat dirasakan oleh perusahaan dan masyarakat antara lain:

- Manfaat bagi masyarakat :
  1. Kesejahteraan masyarakat meningkat
  2. Membantu meningkatkan pendidikan yang layak bagi orang yang kurang mampu.
  3. Membantu penyediaan Fasilitas umum dan pemeliharaannya.
  4. Fasilitas rumah ibadah yang belum layak menjadi layak dan masyarakat bisa dengan nyaman dalam melakukan ibadah.

- Manfaat bagi perusahaan :
  1. Citra Bank Papua akan lebih meningkat.
  2. Bank Papua memiliki kesempatan lebih besar untuk dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam hal ini melancarkan bisnis bank.

- *Book 8 Conflict of Interest Guidelines.*
- *Book 9 GCG Guidelines (SELF ASSESMENT).*
- *Book 10 GCG Working Paper (SELF ASSESMENT).*
- *Book 11 GCG Report.*

The implementation of good corporate governance in Bank Papua is done through a mutual commitment and starts from the top of the bank management / staff to staff / employees. In addition, the Transformation Work Program of Regional Development Bank (BPD), encourages the improvement of the Quality of Governance, Risk, and Compliance Management.

CSR program

The form of Corporate Social Responsibility (CSR) activities undertaken by Bank Papua is an activity that has the character of improving people's welfare and environmental sustainability in Papua-West Papua by providing assistance in the field of education in this case scholarships for underprivileged, general, and other activities that are social.

Despite the difficult conditions, Bank Papua remains committed to the Corporate Social Responsibility / CSR program by realizing Corporate Social Responsibility / CSR funds in 2017 amounting to Rp1.300 billion, where there was a negative growth compared to 2016 of Rp4.993 billion. Full report on this, we report on Sustainability Report of Bank Papua.

The benefits of Corporate Social Responsibility (CSR) program implemented by Bank Papua can be felt by companies and communities, among others:

- *Benefits to the community:*
  1. *People's welfare increases*
  2. *Helping to improve decent education for the less fortunate.*
  3. *Assist the provision of public facilities and maintenance.*
  4. *Facilities of worship houses that have not been feasible to be feasible and the community can be comfortable in performing worship.*

- *Benefits for the company:*
  1. *The image of Bank Papua will increase further.*
  2. *Bank Papua has a greater opportunity to work with the community in this case launched bank business.*

3. *Brand* Bank Papua akan lebih kuat di mata masyarakat.
4. Memiliki daya tarik bagi masyarkat di banding bank lain.

Prospek di Tahun 2018

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 diprediksikan akan mengalami lonjakan meskipun menghadapi tahun politik. Pemerintah pun menargetkan pada 2018 pertumbuhan ekonomi 2018 mencapai 5,4 persen atau meningkat 0,3 persen dari target 2017 sebesar 5,1 persen. Angka yang ditargetkan oleh pemerintah ini terlalu tinggi, pasalnya pertumbuhan ekonomi tahun 2017 stagnant atau tidak melaju drastis. Terpengaruh pilkada, iklim investasi didominasi investor domestik, dan investasi juga tidak akan mengalami lonjakan yang signifikan di tahun 2018. Dengan adanya Pilkada belanja negara diperkirakan akan meningkat daya beli negara. Terlebih selain Pilkada pada tahun 2018 Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan besar seperti Asian Games 2018 dan *International Monitory Fund* (IMF) 2018.

Tahun depan inflasi ditargetkan bisa tumbuh 3,5% plus minus 1%. Kemudian pertumbuhan kredit perbankan bisa tumbuh 10%-12%. Sementara dana pihak ketiga (DPK) perbankan tahun depan diperkirakan tumbuh 9%-11%. Kemudian defisit neraca berjalan atau *current account deficit* (CAD) diprediksi berada di bawah 3% dari PDB. Dalam jangka pendek, stimulus dari pemerintah akan berperan penting dalam mendorong perekonomian. Stimulus pemerintah, momen Pilkada dan Asian Games pada 2018 akan berpengaruh pada permintaan domestik khususnya konsumsi. Investasi pemerintah dalam bentuk proyek-proyek infrastruktur tetap akan mewarnai pertumbuhan investasi ke depan. Di sisi lain, ekspor diperkirakan tetap tumbuh namun melambat dibandingkan tahun ini dengan struktur ekspor yang masih bertumpu pada komoditas. Prospek perekonomian dalam jangka pendek tersebut akan menjadi landasan yang kuat bagi perekonomian dalam jangka menengah dan panjang. Dalam jangka menengah, perekonomian global diperkirakan mulai meningkat secara gradual. Harga komoditas juga mulai tumbuh positif sejalan dengan permintaan yang mulai meningkat.

Di sisi domestik Bank Indonesia meyakini reformasi struktural yang dicanangkan pemerintah akan berjalan dengan baik, dilandasi oleh komitmen yang tinggi dari pemerintah. Proyek-proyek infrastruktur pemerintah akan terakselerasi dan berdampak signifikan pada perekonomian. Paket-paket kebijakan ekonomi yang

3. *Bank Papua's Brand will be stronger in the eyes of society.*
4. *It has appeal to the community in the appeal of other banks.*

Prospects in 2018

Indonesia's economic growth in 2018 is predicted to experience a surge despite the political year. The The government also targets 2018 economic growth in 2018 to reach 5.4 percent or an increase of 0.3 percent from the target of 2017 off 5.1 percent. The targeted figure of the government is too high, because the economic growth of 2017 is stagnant or not drove rapidly. The impact of the investment climate clash is dominated by domestic investors, and investment will not experience a significant spike in 2018. With the existence of the state budget election is expected to increase the purchasing power of the country. Moreover, in addition to elections in 2018 Indonesia hosted major events such as the 2018 Asian Games and International Monetary Fund (IMF) 2018.

Next year, inflation is targeted to grow 3.5% plus minus 1%. Then the growth of bank loan can grow 10% -12%. Meanwhile, third party fund (TPF) of banking next year is estimated to grow by 9% -11%. Then the current account deficit (CAD) is predicted to be below 3% of GDP. In the short term, stimulus from the government will play an important role in stimulating the economy. The government's stimulus, the electoral moments and the Asian Games in 2018 will affect domestic demand, especially consumption. Government investment in the form of infrastructure projects will continue to color future investment growth. On the other hand, exports are expected to keep growing, but slowing down compared to this year with export structures that are still based on commodities. The short-term economic outlook will be a strong foundation for the economy in the medium to long term. In the medium term, the global economy is expected to start increasing gradually. Commodity prices also began to grow positively in line with increasing demand.

On the domestic side, Bank Indonesia believes that the structural reforms proclaimed by the government will work well, underpinned by high commitment from the government. Government infrastructure projects will be accelerated and have a significant impact on the economy. The economic policy packages launched by the

diluncurkan pemerintah juga akan memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

government will also improve the investment climate in Indonesia.

Reformulasi regulasi di berbagai kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan daerah akan memberikan keyakinan dan dampak yang signifikan pada minat berinvestasi.

Regulatory reform in various ministries and agencies at the central and regional levels will provide significant confidence and impact on investment interests.

Di sektor keuangan, Bank Indonesia memperkirakan tren suku bunga dunia akan meningkat, sejalan dengan tren pengetatan kebijakan moneter di negara maju. Suku bunga kebijakan AS diperkirakan akan meningkat sekali lagi tahun ini dan meningkat tiga kali pada tahun depan. Dinamika perekonomian global, tantangan ekonomi, dan arah kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia akan menentukan prospek perekonomian ke depan.

In the financial sector, Bank Indonesia predicts the world interest rate trend will increase, in line with the tightening of monetary policy in developed countries. US policy interest rates are expected to rise once again this year and increase three times next year. The dynamics of the global economy, economic challenges and the direction of economic policies pursued by the government and Bank Indonesia will determine the outlook for the economy in the future.

Rencana kerja pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta proyeksi pertumbuhan ekonomi 2018 yang tumbuh positif, serta didukung dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat di tahun 2018, dipandang sebagai prospek utama Kinerja Bank Papua di tahun 2018. Peranan Bank Papua sangat dibutuhkan sebagai Bank milik Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat yang harus dijalankan dengan maksimal, Bank Papua wajib mendukung program pemerintah sesuai dengan fungsi intermediasi bank. Dengan adanya jajaran manajemen baru, diharapkan dapat menjadi angin perubahan yang memberikan semangat baru yang dapat mengelola bisnis dengan lebih profesional di segala lini dan dapat menjangkau sampai di seluruh pelosok Tanah Papua. Disamping itu juga manajemen berkomitmen untuk mampu bertanggungjawab bagi keberlangsungan proses intermediasi yang dilakukan Bank Papua. Kemudian keberpihakan kepada masyarakat yang hidup dan menjalankan usahanya di atas Tanah Papua sehingga dapat terus *survive* juga bertanggungjawab bagi proses intermediasi di luar Tanah Papua.

The infrastructure development plan of the central government for Eastern Indonesia (KTI), as well as the positive growth of 2018 economic growth, supported by the Provincial Government Work Plan of Papua and West Papua in 2018, is seen as the main prospect of Bank Performance in 2018. Bank Papua's role is needed as a Bank, owned by Papua and West Papua Local Government that must be run maximally, Bank Papua must support a government program in accordance with bank intermediation function. With the new management ranks, it is expected to be a wind of change that provides a new spirit that can manage the business with more professionals in all lines and can reach up to all corners of Papua Land. In addition, management is committed to being responsible for the sustainability of the intermediation process undertaken by Bank Papua. Then the alignment of the people who live and run their business on the Land of Papua so that it can continue to survive is also responsible for the intermediation process outside Tanah Papua.

Bank Papua sebagai mitra kerja pemerintah daerah mempunyai peran meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini terealisasi diantaranya melalui kontribusi bagi hasil (deviden) atas investasi saham dari tiap provinsi, kabupaten dan kota. Kemudian memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berusaha secara mandiri dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat itu sendiri melalui skim-skim kredit yang disediakan oleh Bank Papua.

Bank Papua as a partner of the local government has a role to improve the regional economy through increasing local own revenue (PAD). This is realized through the dividend sharing of share investment from each province, regency and municipal. Then provide the widest space to the community to try independently in order to improve the living standards of the community itself through loan schemes provided by Bank Papua.

Perubahan Susunan Direksi

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 6 Maret 2017 memilih dan memutuskan lima orang Direksi Bank Papua menggantikan dua Direksi sebelumnya. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2017, perubahan komposisi Direksi Bank Papua, yaitu berjumlah 5 (lima) orang. Susunan Direksi adalah sebagai berikut:

Change of Composition of Directors

Based on the decision of the Extraordinary Shareholder General Meetings (ESGM) dated March 6, 2017, it has elected and decided five Directors of Bank Papua to replace the two previous directors. Thus, until the end of 2017, changes in the composition of the Board of Directors of Bank Papua, which amounted to 5 (five) people. The composition of the Board of Directors is as follows:

Nama *Name*	**Jabatan** *Position*
F. Zendrato	Direktur Utama - *President Director*
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis - *Business Director*
Rudhy Dharma	Direktur Keuangan - *Finance Director*
Isak Semuel Wopari	Direktur Operasional - *Banking Operation Director*
Jefri Sani Pither Siing	Direktur Kepatuhan - *Compliance Director*

Dengan berakhirnya tugas Sharly Andris Parrangan dan Frens Mambrisau, SE, MM, kami atas nama Direksi dan karyawan mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras selama bergabung di Bank Papua. Walaupun tidak lagi bertugas di Bank Papua, namun besar harapan kami akan saran dan masukannya untuk kemajuan Bank Papua dimasa yang akan datang.

With the expiration of the duties of Sharly Andris Parrangan and Frens Mambrisau, SE, MM, we on behalf of the Board of Directors and employees would like to thank for their dedication and hard work during joining Bank Papua. Although we are no longer in charge of Bank Papua, we hope for suggestions and include them for the future of Bank Papua.

Apresiasi dan Penghargaan

Akhir kata, atas nama jajaran Direksi , kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Dewan Komisaris atas peran pengawasan yang dilakukan. Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh Pejabat Eksekutif, Pemimpin Cabang, dan seluruh karyawan/ karyawati Bank Papua yang telah berjuang dengan penuh semangat membawa perusahaan *Back On Track* sebagaimana yang kita bersama harapkan.

Appreciation and Gratitude

Finally, on behalf of the Board of Directors, we would like to extend our gratitude for the support and trust provided by the Financial Services Authority, the shareholders and all stakeholders. We also appreciate the appreciation to the Board of Commissioners for its supervisory role. We also extend our gratitude and appreciation to all Executive Officers, Branch Managers, and all employees of Bank Papua who have fought vigorously with the Back On Track company as we all hope.

Sekian dan terima kasih.

That is all and thank you.

F. Zendrato, SE.MM
Direktur Utama
President Director

Profil Direksi
Board of Directors Profile

59 tahun. Lahir di Gn. Sitoli 15 November 1958. Terhitung tanggal 06 Maret 2017 resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua periode 2017-2021. Memperoleh gelar pendidikan Magister Manajemen di STIE IPWIJA Jakarta tahun 1997.

Jabatan terakhir CEO Region/Pemimpin Wilayah Jakarta Kota, di Bank BNI dari 19 September 2013 s/d 30 November 2014.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat :
- Sertifikasi Manajemen Risiko tingkat V Penyelenggara BSMR.

59 years old. Born in Mt. Sitoli November 15, 1958. As of March 6, 2017 officially occupied as President Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua 2017-2021 period. Obtained his Master of Management degree in STIE IPWIJA Jakarta in 1997.

The last position was CEO Region / Regional Leader of Jakarta City, at Bank BNI from 19 September 2013 to 30 November 2014.

Following and having a Certificate:
- *BSMR Level V risk management certification.*

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan :

- 23 Februari 2007 SESPIBANK Sekolah Staf & Pimpinan Bank Angkatan XLV LPPI.
- 23 Maret 2017 *Business Process* Transformasi Bank Papua Talents Indonesia.
- 28 Maret 2017 Treasury (ALMA) Ujian Kompetensi Program Khusus Sertifikasi Treasury Dealer Lembaga Sertifikasi profesi perbankan.
- 28 Maret 2017 Treasury (ALMA) Ext-Pelatihan program khusus (fast Track) ACI *Financial* Market Association Indonesia.
- 07 April 2017 Pengelolaan Tugas/Operasi (UTama) Sosialisasi POJK Nomor 5/POJK.05/2017 tentang iuran, manfaat pensiun dan manfaat OJK Pusat.
- 04 Mei 2017 *Business Process* Changing *cost*umer behavior trough *Financial* Literacy,*Financial* Inclusion, And OJK Provinsi Papua dan Papua Barat.
- 26 Juli 2017 Pengelolaan Perubahan (Utama) Workshop dan *sharing session* terkait peran management dan Change management of Asosiasi Bank Pembangunan daerah (asbanda).
- 10 November 2017 Akuntansi Perbankan IHT PSAK 71 Bank Papua.
- 15 November 2017 *Business Process* Transformasi Bank Papua Talents Indonesia.

Diangkat menjadi Direktur Utama berdasarkan SK:
Hasil keputusan RUPS-LB tanggal 06 Maret 2017 Nomor 03/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Attended Education and Training:

- *February 23, 2007 SESPIBANK Bank Staff & Management School Batch XLV LPPI.*
- *March 23, 2017 Business Process Transformation of Bank Papua Talents Indonesia.*
- *March 28, 2017 Treasury (ALMA) Competency Exam Special Programs Certification Treasury Dealers Certification Institute of the banking profession.*
- *March 28, 2017 Treasury (ALMA) Ext-Training of the ACI Financial Market Association Indonesia's fast Track program.*
- *April 7, 2017 Tasks / Operations Management Dissemination POJK Number 5 / POJK.05 / 2017 on contributions, pension and benefits of OJK Center.*
- *May 4, 2017 Business Process Changing costumer behavior trough Financial Literacy, Financial Inclusion, And OJK Papua and West Papua Provinces.*
- *July 26, 2017 Change Management (Main) Workshop and sharing session related to a management role and Change management of Association of Regional Development Bank (asbanda).*
- *November10, 2017 Accounting for Banking IHT PSAK 71 Bank Papua.*
- *November 15, 2017 Business Process Transformation of Bank Papua Talents Indonesia.*

Appointed as President, Director based on Decree:
The result of the ESGM decision dated 06 March 2017 Number 03 / SK / RUPSLB-BPD / III / 2017 regarding Appointment of President Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Profil Direksi
Board of Directors Profile

55 tahun. Lahir di Medan, 3 Desember 1962. Terhitung tanggal 06 Maret 2017 resmi menjabat sebagai Direktur Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Papua periode 2017-2021. Memperoleh gelar pendidikan Magister di Istitut Pengembangan Wiraswasta Indonesia Jakarta tahun 1998.

Jabatan terakhir Kepala Biro *Corporate Credit Risk Management*, di Bank BCA sejak 1 Desember 2010.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat :
- 16 April 2016 Sertifikasi Manajemen Risiko tingkat V Penyelenggara BSMR.

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan :
- 23 Maret 2017 *Business process* Seminar BPDSI dan Penarikan Undian Nasional Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA).
- 10 November 2017 Akuntansi Perbankan IHT PSAK 71 Bank Papua.
- 15 November 2017 *Business Process* Transformasi Bank Papua Talens Indonesia.

Diangkat menjadi Direktur Bisnis berdasarkan SK:
Hasil keputusan RUPS-LB tanggal 06 Maret 2017 Nomor 04/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengangkatan Direktur Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

55 years old. Born in Medan, December 3, 1962. As of March 6, 2017 officially occupied as Business Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua 2017-2021 period. Obtained his Master degree in the Institute of Indonesian Self-Employed Development Jakarta in 1998.

The last position was Head of Corporate Bureau of loan Risk Management, at Bank BCA since December 1, 2010

Following and having a Certificate:
- *April 16, 2016 Risk Management Certification level V organized by BSMR.*

Attended Education and Training:
- *March 23, 2017 Business process of BPDSI Seminar and National Recall of Regional Development Bank Association (ASBANDA).*
- *November 10, 2017 Accounting for Banking IHT PSAK 71 Bank Papua.*
- *November 15, 2017 Business Process Transformation of Bank Papua Talens Indonesia.*

Appointed as Business Director based on Decree:
The result of ESGM decision dated March 06, 2017 Number 04 / SK / RUPSLB-BPD / III / 2017 regarding Appointment of Business Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Rudhy Dharma, SE
Direktur Keuangan
Finance Director

60 tahun. Lahir di Jakarta, 13 Mei 1957. Terhitung tanggal 06 Maret 2017 resmi menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua periode 2017-2021. Memperoleh gelar pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Krisnadwipayna tahun 1986.

Jabatan terakhir Koordinator Wilayah/Kakanwil Jakarta, di PT. Bank JTRUST IND sejak bulan Juli 2016.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat :
- 21 Mei 2016 Manajemen Risiko Level IV penyelenggara BSMR.
- 28 Mei 2016 Manajemen Risiko Level V penyelenggara BSMR.

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan :
- 25 Maret 2017 Treasury (ALMA) Ext-Pelatihan program khusus (fast Track) ACI *Financial* Market Association Indonesia.
- 25 Maret 2017 Treasury (ALMA) Ujian Kompetensi Program Khusus Sertifikasi Treasury Dealer Lembaga Sertifikasi profesi perbankan.
- 05 Oktober 2017 Akuntansi Perbankan Ext-Seminar Persiapan Penerapan PSAK71 OJK Pusat.
- 10 November 2017 Akuntansi Perbankan IHT PASK 71 Bank Papua.
- 15 November 2017 *Business Process* Transformasi Bank Papua Talents Indonesia

Diangkat menjadi Direktur Keuangan berdasarkan SK:
Hasil keputusan RUPS-LB tanggal 06 Maret 2017 Nomor 05/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

60 years. Born in Jakarta, May 13, 1957. As of March 6, 2017 officially occupied as Finance Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua period 2017-2021. Obtained his Bachelor of Economics degree at Krisnadwipayna University in 1986.

The last position was Area Coordinator / Kakanwil Jakarta, at PT. Bank JTRUST IND since July 2016.

Following and having a Certificate:
- *May 21, 2016 Risk Management Level IV of BSMR organizers.*
- *May 28, 2016 Risk Management Level V BSMR organizers.*

Attended Education and Training:
- *March 25, 2017 Treasury (ALMA) Ext Training of ACI Financial Market Association Indonesia's fast Track program.*
- *March 25, 2017 Treasury (ALMA) Competency Exam Special Programs Certification Treasury Dealer Institute Certification banking profession.*
- *October 5, 2017 Accounting for Ext-Seminar Banking Preparation for Implementation of PSAK71 OJK Center.*
- *November 10, 2017 Accounting for Banking IHT PASK 71 Bank Papua.*
- *November 15, 2017 Business Process Transformation of Bank Papua Talents Indonesia*

Appointed as Finance Director based on Decree:
The result of the ESGM decision dated March 06, 2017 Number 05 / SK / RUPSLB-BPD / III / 2017 regarding Appointment of Finance Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Profil Direksi
Board of Directors Profile

43 tahun. Lahir di Serui, 22 Agustus 1974. Terhitung tanggal 06 Maret 2017 resmi menjabat sebagai Direktur Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Papua periode 2017-2021. Memperoleh gelar pendidikan Magister Manajemen di Universitas Cenderawasih Jayapura tahun 2013. Jabatan terakhir Kepala Satuan Kerja Anti Fraud (SKAF) Bank Papua sejak tahun 2016.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat :
- Sertifikasi Pimpinan Cabang Angkatan 168 LPPI pada Tanggal 28 Maret 2011.
- Manajemen Risiko Tingkat V Penyelenggara BSMR pada tanggal 14 Februari 2015.
- Sertifikasi SESPIBANK ANGKATAN 64 Penyelenggara LPPI pada tanggal 13 Mei 2016.

43 years old. Born in Serui, August 22, 1974. As of March 6, 2017 officially occupied as Banking Operation Banking Operation Director PT. Bank Pembangunan Daerah Papua period 2017-2021. Obtained a Master of Management degree at Cendrawasih University Jayapura in 2013. The last position of Head of Anti Fraud Working Unit (SKAF) of Bank Papua since 2016.

Following and having a Certificate:
- *Branch Manager Certification of Batch 168 LPPI on March 28, 2011.*
- *Risk Management Level V organized by BSMR on February 14, 2015.*
- *Certification of SESPIBANK Batch 64 organized by LPPI on May 13, 2016.*

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan :

- 09 Januari 2010 Pengawasan Intern/Audit Sistem Informai Manajemen Audit Batch III.
- 14 Maret 2011 Treasury (Alma) Operasional Bank Devisa Untuk CS dan Teller Penyelenggara LPPI Jkt.
- 05 Sepetember 2012 sistem imbal jasa peraturan Menteri dalam Negeri No.13 tahun 2006 penyelenggara PERMENDAGRI
- 15 Maret 2013 *Leadership Skill* (utama), Pemimpin Kredibel dan Pemimpin Visioner (the ethos leadhership) penyelenggara PT. MItra Pembelajaran.
- 26 Juli 2013 kepatuhan, Strategi Anti Fraud Banking & *Good Corporate Governance* (GCG) penyelenggara CV. Cakrawala Anugerah.
- 25 Februari 2015 Perencanaan Karir, Assesment Kepala Divisi, Kepala Cabang, & Kepala Departemen penyelenggara PT. Aplikasi Sistem Bisnis.
- 25 Juli 2015 Manajemen SDM, system manajemen kinerja penyelenggara PT. Aplikasi Sistem Bisnis.
- 26 Agustus 2017 *Business Process* Ext-Seminar Nasional BPDSI diselenggarakan oleh Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA).
- 10 November 2017 Akuntansi Perbankan IHT PASK 71 diselenggarakan oleh Bank Papua.
- 15 November 2017 *Business Process* Transformasi Bank Papua diselenggarakan oleh Talents Indonesia.

Jabatan penting yang pernah di pegang antara lain:

- Kepala Satuan Kerja Anti Fraud pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 01 Maret 2016 sesuai SK Direksi Nomor: 73/KEPEG/III/2016.
- Kepala Cabang Wamena pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 16 Mei 2013 sesuai SK Direksi Nomor: 104/KEPEG/V/2013.
- Kepala Cabang Biak PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 29 Maret 2011 sesuai SK Direksi Nomor: 53/KEPEG/III/2011.

Diangkat menjadi Direktur Operasional berdasarkan SK: Hasil keputusan RUPS-LB tanggal 06 Maret 2017 Nomor 06/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengangkatan Direktur Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Attended Education and Training:

- *January 09, 2010 Internal Audit / Audit Information Management System Batch III Audit.*
- *March 14, 2011 Treasury (Alma) Foreign Exchange Bank Operations For CS and Teller Organizer LPPI Jkt.*
- *September 05, 2012 regulatory system of Ministry of Home Affairs No.13 year 2006 organized by PER-MENDAGRI*
- *March 15, 2013 Leadership Skill (main), Credible Leader and Visionary Leader (the ethos leadership) organized by PT. MItra Pembelajaran.*
- *July 26, 2013 compliance, Strategy Anti Fraud, Banking & Good Corporate Governance (GCG), organized by CV. Cakrawala Anugerah.*
- *February 25, 2015 Career Planning, Assessment Head of Division, Branch Manager, & Department Head organized by PT. Aplikasi Sistem Bisnis.*
- *July 25, 2015 HR Management, performance management system organized by PT. Aplikasi Sistem Bisnis.*
- *August 26, 2017 The National Business Process Ext-Seminar of BPDSI is organized by the Association of Regional Development Banks (ASBANDA).*
- *November 10, 2017 Accounting for Banking IHT PASK 71 organized by Bank Papua.*
- *November 15, 2017 Business Process The transformation of Bank Papua organized by Talents Indonesia.*

Important positions ever held include:

- *Head of Anti Fraud Working Unit of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since March 01, 2016 according to BOD's Decree No.: 73 / KEPEG / III / 2016*
- *Wamena Branch Manager of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since May 16, 2013 according to BOD's Decree No.: 104 / KEPEG / V / 2013*
- *Biak Branch Manager of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since March 29, 2011 according to BOD's Decree No.: 53 / KEPEG / III / 2011*

Appointed as Banking Operations Director based on Decree: Result of the decision of ESGM dated 06 March 2017 Number 06 / SK / RUPSLB-BPD / III / 2017 regarding Appointment of Banking Operational Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Profil Direksi
Board of Directors Profile

54 tahun. Lahir di Palu, 17 Agustus 1963. Terhitung tanggal 06 Maret 2017 resmi menjabat sebagai Direktur Kepatuhan PT.Bank Pembangunan Daerah Papua periode 2017-2021. Memperoleh gelar pendidikan Sarjana Ekonomi Pertanian di Universitas Cenderawasih Jayapura tahun 1989. Jabatan terakhir Kepala Kantor Bank Papua Cabang Timika sejak Maret 2016.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat :
- Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat IV penyelenggara BSMR pada tanggal 30 Mei 2009.
- Sertifikasi Program SESPIBANK angkatan 56 LPPI pada tanggal 16 April 2012.

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan :
- 01 Desember 2008 Akuntansi Perbankan, Penerapan PSAK 50 & 55 Revisi 2006, penyelenggara oleh *Risk management* Center Indonesia.
- 07 Oktober 2010 Manajemen Risiko, Penyelesaian Pidana Serta Strategi Efektif Mengendalikan penyelenggara oleh Synergi

54 years old. Born in Palu, August 17, 1963. As of March 6, 2017 officially occupied as Compliance Director of PT. Bank Papua Regional Development period 2017-2021. Obtained his Bachelor degree in Agricultural Economics at Cendrawasih University Jayapura in 1989. The last position of Head of Bank Papua branch office of Timika since March 2016.

Following and having a Certificate:
- *Risk Management Level IV Certification organized by BSMR on May 30, 2009.*
- *Certification of SESPIBANK Program Batch 56 organized by LPPI on April 16, 2012.*

Attended Education and Training:
- *December 01, 2008 Accounting for Banking, Implementation of PSAK 50 & 55 Revised 2006, organized by Risk management Center Indonesia.*
- *October 07, 2010 Risk Management, Criminal Settlement And Effective Strategy Controlling organized by Synergy.*

- 19 Januari 2012 Hukum Perspektif pengaturan dan penegakan hukum dalam menyikapi tindak pidana penyelenggara ASBANDA.
- 20 Juni 2012 Manajemen Risiko, Peran Bank dalam mencegah & menangani kejahatan Perbankan penyelenggara FKDKP.
- 05 September 2012 Sistem Imbal Jasa Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Penyelenggara PERMENDAGRI.
- 30 Juni 2014 Perencanaan Karir, Asessment potensi & Kompetensi Pegawai calon pemimpin Divisi, Wilayah, Cabang penyelenggara PT. Aplikasi Sistem Bisnis.
- 14 Maret 2016 Akuntansi Perbankan, PAPI 2008 & PSAK 55 Revisi Batch I Penyelenggara PT. Infobank Lentera Cipta Kreasi.
- 06 September 2017 Kepatuhan Seminar Penilaian *mutual evaluation Review* terhadap Indonesia oleh APG dan Penil peyelenggara LPPI.
- 10 November 2017 Akuntansi Perbankan IHT PASK 71 penyelenggara Bank Papua.
- 15 November 2017 *Business Process* Transformasi Bank Papua penyelenggara Talents Indonesia.

Jabatan penting yang pernah di pegang antara lain:
- Kepala Cabang Timika pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 01 Maret 2016 sesuai SK Direksi Nomor: 73/KEPEG/III/2016.
- Kepala Divisi Pemasaran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 11 September 2015 sesuai SK Direksi Nomor: 89/KEPEG/IX/2015.
- Kepala Divisi Manajemen Risiko pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 20 April 2012 sesuai SK Direksi Nomor: 72/KEPEG/IV/2012.
- Kepala Divisi Kepatuhan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 31 Maret 2010 sesuai SK Direksi Nomor: 50/KEPEG/III/2010.

Diangkat menjadi Direktur Kepatuhan berdasarkan SK: Hasil keputusan RUPS-LB tanggal 06 Maret 2017 Nomor 07/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

- *January 19, 2012 Legal Perspective of law enforcement and enforcement in responding to the crime organized by ASBANDA.*
- *June 20, 2012 Risk Management, Role of Bank in preventing & handling crime Banking organized by FKDKP.*
- *September 05, 2012 Ministry of Home Affairs Regulation of Ministry of Home Affairs No.13 of 2006 organized by PERMENDAGRI.*
- *June 30, 2014 Career planning, potential Assessment & Competence Personnel Head of Division, Region, Branch organized by PT. Aplikasi Sistem Bisnis.*

- *March 14, 2016 Accounting for Banking, PAPI 2008 & SFAS 55 Revised Batch I organized by of PT. Infobank Lentera Cipta Kreasi.*
- *September 06, 2017 Seminar Compliance Assessment of mutual evaluation review of Indonesia by APG and Penil organized by LPPI.*
- *November 10, 2017 Accounting, Banking IHT PASK 71 organized by Bank Papua.*
- *15 November 2017 Business Process Transformation of Bank Papua organized by Talents Indonesia.*

Important positions ever held include:
- *Timika Branch Manager of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since March 01, 2016 according to BOD Decree No.: 73 / KEPEG / III / 2016.*
- *Head of Marketing Division at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since September 11, 2015 according to BOD Decree No.: 89 / KEPEG / IX / 2015.*
- *Head of Risk Management Division at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since 20 April 2012 according to BOD Decree No.: 72 / KEPEG / IV / 2012.*
- *Head of Compliance Division at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since March 31, 2010 according to BOD Decree No.:50 / KEPEG / III / 2010.*

Appointed as Compliance Director based on Decre:: Result of the decision of ESGM dated 06 March 2017 Number 07 / SK / RUPSLB-BPD / III / 2017 regarding Appointment of Compliance Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Profil Staf Ahli dan GCG

Expert Staff and GCG's Profile

Dr. Abraham Krey, SE.MM
Staf Ahli dan GCG
Expert Staff and GCG

49 tahun. Lahir di Jayapura tanggal 13 Januari 1968. Bekerja di Bank Papua sejak tahun 1994. Menjabat sebagai Staf Ahli dan GCG Bank Papua pada tahun 2017. Memperoleh gelar pendidikan Magister Manajemen Pemasaran di Universitas Cenderawasih Jayapura tahun 2008 dan Pendidikan Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Brawijaya Malang tahun 2014.

49 years. Born in Jayapura on 13 January 1968. Worked at Bank Papua since 1994. Occupied as an expert staff and GCG Bank Papua in 2017. Obtained a Master of Marketing Management degree at Cenderawasih University in Jayapura in 2008 and Doctoral Education in Management Science at Brawijaya University Malang in 2014.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat :
- Manajemen Risiko Tingkat V Penyelenggara BSMR pada tanggal 15 Desember 2012.
- Sertifikasi SESPIBANK Angkatan 55 penyelenggara LPPI.
- Sertifikasi Pimpinan Cabang angkatan 160 penyelenggara LPPI pada tanggal 02 Juni 2008.

Following and having a Certificate:
- *BSMR Organizational Level V Risk Management on December 15, 2012.*
- *SESPIBANK Certification Batch 55 organizer by LPPI.*
- *Branch Manager Certification Batch 160 organizers by LPPI on June 2, 2008.*

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan:
- 01 September 2003 Analisa keuangan penyelenggara LPPI.
- 06 April 2006 pembinaan Kredit penyelenggara LPPI
- 04 Maret 2008 manajemen SDM berbasis Kompetensi penyelenggara LPPM.
- 17 Maret 2008 *Basic Comunications Skill*, Standarisasi Kompetensi untuk Pejabat Lini penyelenggara PT. Bina Mitra Talenta.
- 23 November 2009 Treasury (ALMA), *Asset Liability Management* penyelenggara LPPI.
- 08 Desember 2010 Kepatuhan, Penyerapan Program APU/PPT penyelenggara FKDKP.

Attended Education and Training:
- *September 01, 2003 Financial analysis organized by LPPI.*
- *April 6, 2006 coaching of loan organized by LPPI.*
- *March 04, 2008-human resources management based competency organized by LPPM.*
- *March 17, 2008 Basic Comunications Skill, Competency Standardization for Offline Officer organized by PT. Bina Mitra Talenta.*
- *November 23, 2009 Treasury (ALMA), Asset Liability Management organized by LPPI.*
- *December 8, 2010 Compliance, Absorption of APU / PPT Program organized by FKDKP.*

- 01 Mei 2012 Manajemen Umum, Sertifikasi ahli pengadaan barang dan Jasa penyelenggara Universitas Airlangga Surabaya
- 04 Juni 2012 Kepatuhan, SOP Strategi Anti Fraud penyelenggara Talents Indonesia.
- 26 Juli 2013 Kepatuhan, Strategi Anti Fraud Banking & *Good Corporate Governance* (GCG) penyelenggara CV. Cakrawala Anugerah.
- 01 Juli 2014 Perencanaan Karir, asesmen Potensi & Kompetensi Pegawai Calon Pemimpin Divisi serta Kantor Wilayah Penyelenggara PT. Aplikasi Sistem Bisnis.
- 24 Februari 2016 Perencanaan karir, KPI Direksi -Komisaris dan Implementasi POJK No.45/ POJK.03/2015 penyelenggara *Risk Management* Guard (RMG).
- 29 Juni 2016 Pengelolaan Tugas/operasi (utama), Leadership For Division Head & Mangers Penyelenggara Gelang Learning Forum.
- 08 Februari 2017 Manajemen SDM, *Employee Performance Management* penyelenggara Mitra Kelola Insani.
- 07 April 2017 Pengelolaan tugas (Utama) Penyerapan POJK No.5/POJK.05/2017 tentang iuran, manfaat pensiun penyelenggara OJK Pusat.
- 03 Juli 2017 Pengelolaan tugas (Utama) *strategic issues in banking for* Bank Pembangunan Daerah penyelenggara SDG Training dan *Consulting*.
- 15 November 2017 *Business Process*, Transformasi Bank Papua Penyelenggara Talents Indonesia.

Jabatan penting yang pernah di pegang antara lain:

- Kepala Divisi Sumber Daya Manusia pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 19 Mei 2015 sesuai SK Direksi Nomor: 41.1/ KEPEG/V/2015.
- Kepala Divisi Umum pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 02 Maret 2012 sesuai SK Direksi Nomor : 45/KEPEG/III/2012.
- Kepala Cabang Sentani Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 04 Juni 2009 sesuai SK Direksi Nomor: 65/KEPEG/VI/2009.
- Kepala Cabang Pembantu Arso pada PT Bank Pembagunan Daerah Papua sejak tanggal 01 November 2007 sesuai SK Direksi Nomor: 89/ KEPEG/XI/2007.

- *May 1, 2012 General Manager, Certification of procurement expert and service provider organized by Airlangga University Surabaya.*
- *June 4, 2012 Compliance, SOP of Anti Fraud Strategy organized by Talents Indonesia.*
- *July 26, 2013 Compliance, Anti Fraud, Banking Strategy & Good Corporate Governance (GCG) organized by CV. Cakrawala Anugerah.*
- *July 01, 2014 Career Planning, Assessment of Potential & Competency Employee Candidate of Division Leaders and Regional Office organized by PT. Sistem Aplikasi Bisnis.*
- *February 24, 2016 Career planning, KPI Board of Directors-Commissioner and Implementation of POJK No.45 / POJK.03 / 2015 organized by Risk Management Guard (RMG).*
- *June 29, 2016 Tasks / Operations (main) Management, Leadership For Division Leader & Mangers organized by Gelang Learning Forum.*
- *February 08, 2017 Human Resource Management, Employee Performance Management organized by Mitra Kelola Insani.*
- *April 07, 2017 Task Management (Main) POJK Absorption No.5 / POJK.05 / 2017 on contribution, pension benefits organized by Central OJK.*
- *July 03, 2017 Management of tasks (Main) strategic issues in banking for banks Regional Development Organizer by SDG Training and Consulting.*
- *November 15, 2017 Business Process, Transformation of Bank Papua organized by Talents Indonesia.*

Important positions ever held include:

- *Head of Human Resources Division at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since May 19, 2015 according to BOD's Decree Number: 41.1 / KEPEG / V / 2015.*
- *Head of General Affair Division at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since March 02, 2012 according to BOD's Decree Number: 45 / KEPEG / III / 2012*
- *Sentani Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since June 04, 2009 according to BOD's Decree Number: 65 / KEPEG / VI / 2009.*
- *Arso Branch Manager of PT Bank Pembimban Daerah Papua since November 1, 2007 according to DBOD's Decree Number: 89 / KEPEG / XI / 2007.*

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA TAHUN BUKU 2017

STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS REGARDING RESPONSIBILITY FOR THE ANNUAL REPORT OF PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA FINANCIAL YEAR BOOK 2017

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun buku 2017 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We the undersigned, declare that all information in the Annual Report. PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Year book 2017 is complete and full responsibility for the accuracy of the content of the company's annual report. This statement was made with actual.

Jayapura, 23 April 2018

Dewan Komisaris
Board of Commissioner

Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th
Komisaris Utama
President Commissioner

drh. Constant Karma
Komisaris
Commissioner

Direksi
Directors

F. Zendrato, SE. MM
Direktur Utama
President Director

Ir. Sadar Sebayang
Direktur Bisnis
Business Director

Rudhy Dharma, SE
Direktur Keuangan
Finance Director

Isak Semuel Wopari, SE. MM
Direktur Operasional
Banking Operation Director

Ir. Jefri Sani Pither Siing
Direktur Kepatuhan
Compliance Director

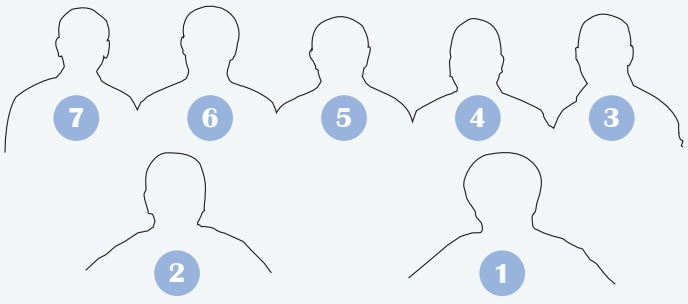

1. **Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th** - Komisaris Utama / *President Commissioner*
2. **F. Zendrato** - Direktur Utama / *President Director*
3. **Isak Semuel Wopari** - Direktur Operasional / *Banking Operation Director*
4. **Sadar Sebayang** - Direktur Bisnis / *Business Director*
5. **drh. Constant Karma** - Komisaris / *Commissioner*
6. **Jefri Sani Pither Siing** - Direktur Kepatuhan / *Compliance Director*
7. **Rudhy Dharma** - Direktur Keuangan / *Finance Director*

Profil Perusahaan
Company Profile

Disiplin dan Konsisten untuk menjadi insan Bank Papua yang Inovatif, Proaktif dan Kreatif.

Discipline and Consistency to be an Innovative, Proactive and Creative Bank Papua's personnel.

BANK PAPUA

Bersama Papua Membangun Negeri

Selalu tepat waktu dan patuh terhadap aturan yang ada dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk menjadikan insan Bank Papua yang selalu berinisiatif melakukan pembaruan, berperan aktif dan memiliki banyak ide dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya demi kemajuan perusahaan.

Always on time and obedient to the existing rules in carrying out its duties and responsibilities to make personnel of Bank Papua who always take the initiative to reform, play an active role and have many ideas in carrying out their duties and responsibilities for the progress of the company.

Identitas Perusahaan
Corporate Identity

Nama Perusahaan I *Company name*
PT. Bank Pembangunan Daerah Papua

Nama Panggilan I *Nick name*
Bank Papua

Alamat Kantor I ***Office*** *Address*
Corporate secretary,
Gedung Kantor Pusat Bank Papua
Lt.4 Jl. Ahmad Yani No.5-9 Jayapura 99111, Papua

Kantor Pusat I ***Office*** *Center*
Jl. Achmad Yani No. 5-7 Jayapura 99111, Papua

Bidang Usaha I *Business fields*
Perbankan

Status Perusahaan I *Company Status*
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pendirian Perusahaan I *Company Establishment*
13 April 1966

Nomor Telepon
Telp. 62-967 532012,533608,531944,532351

Call center
+62 967 532011

Nomor Fax
Fax. 62-967 533019

Situs Perusahaan I ***Company Site***
www.bankpapua.co.id

Email
sekper@bankpapua.co.id
info@bankpapua.co.id

Facebook
https://web.facebook.com/bankpapua1966/

Twitter
https://twiter.com/bankpapua1966

Instragram
https://web.instragram.com/bankpapua_id

Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 21 Mei 2002.
- Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor: C-13031 HT.01.01.TH.2002 tanggal 16 Juli 2002
- Berita Negara RI Nomor 61 tanggal 30 Juli 2002.
- SK Deputi Gubernur Bank Indonesia No.4/147/KEP. Dp.6/2002 tanggal 11 September 2002.

Legal basis

- *Regional Regulation No. 2 of 2002 dated May 21, 2002.*
- *Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia No. C-13031 HT.01.01.TH.2002 dated July 16, 2002*
- *State Gazette No. 61 dated 30 July 2002.*
- *Decree of the Deputy Governor of Bank Indonesia No.4/147/KEP.Dp.6/2002 dated September 11, 2002.*

Pemegang Saham Bank Papua

SERI A

- Pemerintah Provinsi Papua.
- Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- Pemerintah Kota dan Kabupaten Se-Provinsi Papua.
- Pemerintah Kota dan Kabupaten Se-Provinsi Papua Barat.

SERI B

- KSU Bank Papua Berdikari.

Bank Papua's Shareholders

A SERIES

- *Papua Provincial Government.*
- *West Papua Provincial Government.*
- *Regency & Municipal Government of Papua Province.*
- *Regency & Municipal Government of West Papua.*

B SERIES

- *Bank Papua Berdikari Cooperative*

Modal Dasar

Rp4.000.000.000,000;

Authorized capital

Rp4,000,000,000,000;

Modal Disetor

Rp1.907.850.000.000;

Paid-up capital

Rp1,907,850,000,000;

Jumlah Aset

Rp20.400.812.611.119;

Total assets

Rp20,400,812,611,119;

Jumlah Karyawan

2.565

Number of employees

2,565

NPWP
01.135.393.5-952.000

NPWPD
P.2.0007813.01.001

Tanda Daftar Perusahaan
2608.1.64.020.27

Produk
- Dana DPK
- Pembiayaan/kredit
- Layanan Jasa Bank Papua

Jumlah Jaringan Kantor
Total Jaringan sebanyak 729 meliputi: total Jaringan Kantor 223 dan total Delivery Channel sebanyak 506 yang terdiri dari 301 ATM (tergabung dengan Jaringan ATM Bersama dengan jumlah peserta sebanyak 79 bank dengan 7.500 lebih ATM dan Jaringan ATM Prima dengan jumlah 29 bank dengan jaringan 6.500 lebih ATM yang tersebar di seluruh Indonesia), 95 Unit EDC, 8 unit CDM, 19 Kasda Online, 23 Kantor Samsat Online, 23 Kartu Pegawai Elektronik (KPE), 4 Cash Management Sistem, 28 *Payment Point* dan 5 Kantor Kas Titipan Bank Indonesia.

TIN
01.135.393.5-952.000

Regional TIN
P.2.0007813.01.001

Certificate of Company Registration
2608.1.64.020.27

Products
- TPF Fund
- Financing / loan
- Bank Papua's other services

Number of Office Networks
Total Network of 729 includes: total Office Network as 223 and total Delivery Channel as 506 consisting of 301 ATMs (joined with ATM Bersama Network with total number of 79 banks with 7,500 more ATM and Prima ATM Network with 29 banks with 6,500 more ATM network which are spread throughout Indonesia), 95 EDC Units, 8 CDM units, 19 Kasda Online, 23 Samsat Online Offices, 23 Electronic Employee Cards (KPE), 4 Cash Management Systems, 28 Payment Points and 5 Bank Indonesia Cash Deposits.

Sekilas Bank Papua

Bank Papua's Brief History

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang sebelum menjadi Perseroan Terbatas bernama Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya, didirikan pada tanggal 13 April 1966 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Barat Nomor : 37/GIB/1966 dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Irian Barat Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 23 Maret 1970, pada lembaran Daerah Provinsi Irian Barat No. 42 Tahun 1970, kemudian sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep.283/DDK/II/1972 tanggal 15 Juli 1972 tentang pemberian izin usaha Bank Pembangunan Daerah Irian Barat berkedudukan di Jayapura melaksanakan operasional sebagaimana Bank Umum lainnya dengan modal dasar pertama kali ditetapkan sebesar Rp4 juta.

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, which was named Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya before it turned into a Limited Company, was established on 13 th of April 1966 based on the Decree of the governor of the Province of West Irian No: 37/GIB/1966 and ratified into regulation of the Province of West Irian No. 1 year 1970 dated 23 March 1970, in West Irian Province Gazette No. 42 years 1970, then by the Decree of the Minister of Finance No.Kep.283/ DDK/II/1972 dated 15 July 1972 on licensing of Irian Barat Regional Development Bank, which located in Jayapura, performs banking operations as other public/general banks do, with first authorized capital of IDR 4 million.

Selanjutnya sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 tahun 1996 terjadi perubahan modal dasar Bank Papua menjadi sebesar Rp50 milyar, Kemudian sesuai hasil Keputusan RUPS Nomor: 05/SK/RUPS-BPD/XII/2000 telah diputuskan untuk mengubah bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), dan selanjutnya sesuai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan tanggal 17 Juni 2001 disetujui perubahan modal dasar Bank Papua menjadi Rp150 milyar.

Furthermore, according to Regional Regulation (PERDA) No. 7 year 1996, the authorized capital of Bank Papua was increased to Rp50 billion. Then, pursuant to the decree of Annual General Meeting No: 05/SK/ RUPS-BPD/XII/2000 it was decided to change the legal form of the Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya from the Regional Company (PD) to Limited Company (PT), and thereafter according to the Annual Shareholder General Meeting (SGM) held on 17 June 2001, the authorized capital of Bank Papua was increased to Rp150 billion.

Perubahan menjadi Perseroan Terbatas (PT) ini selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 21 Mei 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Papua dan telah diundangkan dalam lembaran Daerah Provinsi Nomor 23 tahun 2002,

Amendment to Limited Company (LC) is then stated in the Regional Regulation No. 2 year 2002, dated May 21, 2002 on Bank Pembangunan Daerah Papua and has been promulgated in the Provincial Gazzete No. 23 year 2002, deed of LC incorporation before the Notary

Akta pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Notaris Maryatie Simanjuntak, SH Nomor 1 tanggal 19 Juni 2002 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor: C-13031 HT.01.01. TH.2002 tanggal 16 Juli 2002 dan berita Negara RI Nomor 61 tanggal 30 Juli 2002. Dan telah mendapat persetujuan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.4/147/ KEP.Dp.6/2002 tanggal 11 September 2002.

Maryatie Simanjuntak, SH No. 1 dated June 19, 2002 and has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia No. C-13031 HT.01.01. TH.2002 dated July 16, 2002, and the national gazette of Republic of Indonesia No. 61 dated July 30, 2002. It was also approved by the Deputy Governor of Bank Indonesia No.4/147/KEP. Dp.6/2002 dated September 11, 2002.

Berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 03/SK/RUPS-BPD/VI/2004 tanggal 22 Juni 2004 komposisi modal dasar Bank Papua dari Rp150 milyar menjadi Rp500 milyar, selanjutnya untuk memenuhi kebijakan Bank Indonesia tentang Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dalam hal Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum Bank (*Capital Requirement*) hingga tahun 2010, maka sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 07/SK/RUPS-BPD/V/2007 modal dasar Bank Papua disepakati menjadi sebesar Rp1 Triliun. Sesuai Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lilis Heryeni, SH tanggal 8 Agustus 2008 No. 08 modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 200.000 lembar saham yang terdiri atas saham seri A sebanyak 180.000 lembar saham dan saham seri B sebanyak 20.000 lembar saham.

Based on the Decree of the Shareholders General Meeting (SGM) of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Number: 03/SK/RUPS-BPD/VI/2004 dated June 22, 2004, the composition of the authorized capital of Bank Papua increased from Rp150 billion to Rp500 billion, then to comply with Bank Indonesia's policy on Indonesian Banking Architecture (API) in the case of Bank Minimum Capital Adequacy Requirement (Capital Requirements) until the end of 2010, then in line with the decision of the Shareholders General Meeting (SGM) of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Number: 07/SK/RUPS-BPD/V/2007, authorized capital of the Bank Papua is agreed to be Rp1 Trillion. According to Deeds of Notary and Land Deed Maker Official Heryeni Lilis, SH dated August 8, 2008 No. 08, company's authorized capital is divided into 200,000 shares, consisting of 180,000 sheets of A series-A and 20,000 sheets of B series-B.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham terjadi perubahan Modal Dasar Bank Papua yaitu perubahan dari Rp1 Triliun Menjadi Rp2 Triliun yang kemudian disahkan dalam SK Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 11/ SK/RUPS BPD/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Perubahan Modal Dasar Bank Papua sesuai Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lilis Heryeni, SH, M.Si tanggal 20 April 2010 No. 05, yang kemudian diputuskan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-30935.AH.01.02.Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

At the Shareholders General Meeting, the Bank's authorized capital changes of Bank Papua changed from Rp1 trillion to Rp2 trillion, which is then passed in the Shareholders General Meeting Decree No. 11/SK/RUPS-BPD/III/2010 dated March 29, 2010 on the amendment of the authorized capital of Bank Papua corresponding Deed and Land Deed Official Lilis Heryeni, SH, M.Si dated 20 April 2010 No. 05, which is then determined according to the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-30935.AH.01.02. Than 2010 on Approval of Amendment of Articles of Association of the Company.

Di tanggal 21 Agustus 2013, sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) nomor: 02/SK/RUPS-LB/BPD/VIII/2013 modal dasar Bank Papua disepakati menjadi Rp4 triliun. Sesuai Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Maryatie Simanjuntak, SH tanggal 21 Agustus 2013 No. 17 modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 800.000 lembar saham yang terdiri atas saham seri A sebanyak 728.000 lembar saham dan saham seri B sebanyak 72.000 lembar saham dan disahkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor: 19 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor: 2 tahun 2002 Tentang Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 30 Desember 2013.

At the date of August 21, 2013, in accordance the result of the Extraordinary Shareholders General Meeting (ESGM) numbers: 02/SK/RUPS-LB/BPD/VIII/2013, authorized capital of Bank Papua was agreed to Rp4 trillion. Corresponding on Official Notary Deed of Maryatie Simanjuntak, SH dated August 21, 2013 No. 17 The Company's authorized capital consists of 800,000 shares consisting of as many as 728,000 shares of A series shares and 72,000 of B series shares was passed into the Papua Provincial Regulation number: 19 of 2013 on Amendment of Papua Provincial Regulation No. 2 year 2002 in Bank Pembangunan Daerah Papua, dated December 30, 2013.

Jejak Langkah
Milestones

1966

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang sebelum menjadi Perseroan Terbatas bernama Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya, didirikan pada tanggal 13 April 1966

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, prior to becoming a Limited Liability Company, was named Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya, established on 13 April 1966

1970

Disahkan menjadi peraturan Daerah Provinsi Irian Barat Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 23 Maret 1970, pada lembaran Daerah Provinsi Irian Barat No. 42 Tahun1970.

Ratified into West Irian Provincial Regulation No. 1 of 1970 dated March 23, 1970, on the West Irian Provincial District gazette No. 42 Year1970.

1972

Sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep.283/ DDK/ II/1972 tanggal 15 Juli 1972 tentang pemberian izin usaha Bank Pembangunan Daerah Irian Barat berkedudukan di Jayapura melaksanakan operasional sebagaimana Bank Umum lainnya dengan modal dasar pertama kali ditetapkan sebesar Rp.4juta

In accordance with the Decree of the Minister of Finance No. RI. Kep.283 / DDK / II / 1972 dated July 15, 1972 concerning the granting of business licenses of Bank Pembangunan Daerah Irian Baratk located in Jayapura conducting operations as other commercial banks with the authorized capital of Rp.4 million

1996

Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 tahun 1996 terjadi perubahan modal dasar Bank Papua menjadi sebesar Rp.50 milyar.

In accordance with the Regional Regulation (PERDA) No. 7 of 1996, there was a change in the basic capital of Bank Papua to Rp.50 billion.

2010

SK RUPS: 11/SK/RUPS-BPD/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Perubahan Modal Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua menjadi Rp2 Triliun, yang kemudian diputuskan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- 30935.AH.01.02. Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Decree of the Shareholder General Meetings: 11 / SK / RUPS-BPD / III / 2010 dated March 29, 2010 regarding Amendment of Authorized Capital of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua to Rp2 Trillion, which was then decided in accordance with the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU- 30935.AH.01.02. Year 2010 on Approval of Deed of Amendment of Company's Articles of Association.

2013

RUPS tanggal 21 Agustus 2013 perubahan modal dasar menjadi 4 triliun yang telah disahkan dalam SK RUPS nomor : 02/SK/RUPS-LB/ BPD/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Peningkatan Modal Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

AGMS dated August 21, 2013 the change of authorized capital to 4 trillion, which has been ratified in the AGMS of Decision Number 02 / SK / RUPS-LB / BPD / VIII / 2013 dated August 21, 2013 on the increase of Authorized Capital of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

2014

RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Papua No.4/SK/RUPS-LB/ BPD/XI/2014 pengambilan keputusan di luar RUPS (Circular Resolution) untuk pengesahan modal disetor oleh pemegang saham.

SGM of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua No.4 / SK / RUPS-LB / BPD / XI / 2014 decision-making outside the SGM (Circular Resolution) for the approval of paid up capital by shareholders.

2015

Pada tahun 2015 ini Bank Papua mengembangkan program greemen bank dan sparkasen melalui program mencetak 1000 wirausaha asli papua yang dapat menciptakan pioneer sebagai kader yang dapat menjadi motivator, trainer, wirausahawan yang menjadi sumber inspirasi masyarakat Papua dalam mewujudkan visi Pemerintah Daerah yaitu PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA

In 2015, Bank Papua develops bank agreement and sparkasen program through a program of printing 1000 original entrepreneurs of Papua that can create a pioneer as a cadre that can be a motivator, trainer, entrepreneur who became a source of inspiration of the people of Papua in realizing the vision of the Local Government that is PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN PROSPEROUS

2000

SK Nomor : 05/SK/RUPS-BPD/ XII/2000 memutuskan untuk mengubah bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

SK Number: 05 / SK / RUPS-BPD / XII / 2000 decided to change the legal form of Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya from Regional Company (PD) to Limited Liability Company (PT).

2001

RUPS tanggal 17 Juni 2001 disetujui perubahan modal dasar Bank Papua menjadi Rp150 milyar.

The AGMS dated June 17, 2001 approved the change of authorized capital of Bank Papua to Rp150 billion

2002

Berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 21 Mei 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Papua dan telah diundangkan dalam lembaran Daerah Provinsi Nomor 23 tahun 2002.

Turned into a Limited Liability Company (PT) hereinafter set forth in Local Regulation No. 2 of 2002 dated May 21, 2002 of the Bank Pembangunan Daerah Papua and has been promulgated in the Provincial sheet No. 23 of 2002.

2008

RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 07/SK/RUPS-BPD/V/2007 modal dasar Bank Papua disepakati menjadi sebesar Rp1 Triliun. Sesuai Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lilis Heryeni, SH tanggal 8 Agustus 2008 No.08 modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 200.000 lembar saham yang terdiri atas saham seri A sebanyak 180.000 lembar saham dan saham seri B sebanyak20.000 lembar saham.

GMS of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Number: 07 / SK / RUPS-BPD / V / 2007 Bank Papua's authorized capital is agreed to be Rp1 trillion. Pursuant to Notarial Deed and Land Acquisition Officer Lilis Heryeni, SH dated August 8, 2008 No.08 of the Company's authorized capital is divided into 200,000 shares consisting of Series A shares of 180,000 shares and 20,000 Series B shares.

2016

Bank Papua sukseskan "Program 1000 Wirausaha Asli Papua"

Bank Papua succeeds "1000 Indigenous Papuan Entrepreneur Program"

2017

Sesuai RUPS LB tahun 2017, tanggal 6 Maret 2017, manajemen baru Bank Papua resmi dilantik. Manajemen bertekad menjadikan Bank Papua sebagai Bank yang sehat dengan menitikberatkan kepada pengembangan Sumber Daya Manusia dan bekerja sesuai SOP serta bertanggungjawab sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dibentuk 2 Divisi baru yaitu Divisi Risiko Bisnis dan Divisi Pembinaan Cabang.

In accordance with the ESGM in 2017, dated March 6, 2017, the new management of Bank Papua was officially inaugurated. Management is determined to make Bank Papua as a sound bank by focusing on human resource development and working as SOP as well as responsible so as to improve company performance. Formed 2 new divisions which are the Business Risk Division and the Branch Development Division.

Makna Logo
Meaning of Logo

BANK PAPUA

Bersama Papua Membangun Negeri

1. Grafis merupakan bentuk dari SAYAP DAN BULU **BURUNG CENDERAWASIH**, membentuk huruf/ tulisan BPD yang memberikan kesan melesat ke atas melambangkan visi dan misi perusahaan dengan bisnis jasa keuangan yang kuat, terpercaya dan berkinerja tinggi. Burung Cenderawasih merupakan burung khas dan kebanggaan Masyarakat Papua sehingga bila menyebut Cenderawasih akan teringat atau identik dengan Papua.

2. Grafis terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu 2 (dua) bulu dan sayap. Tiga bagian ini mencerminkan tiga pilar yaitu :
   a. Tiga tungku pembangunan Papua yaitu Agama, Pemerintah dan Adat.
   b. Tiga Pemegang saham yaitu Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota, Karyawan / Masyarakat / Pihak ketiga.
   c. Budaya kerja BPD Papua, Yaitu : Berpikir, Bertindak secara Bisnis.

3. Sayap membentuk huruf B Melambangkan fleksibilitas, dinamis dalam mengikuti perkembangan dan kondisi lingkungan usaha perbankan yang semakin mengglobal. Warna biru melambangkan ketenangan, konsentrasi, kerjasama dan bersatu.

4. Warna emas (*gold*) pada bulu membentuk huruf P menggambarkan Tanah Papua yang kaya sumber daya alam (hasil bumi) dan juga mencerminkan *core business* Bank Pembangunan Daerah Papua pada usaha ritel yang sangat menjanjikan.

5. Bulu membentuk huruf D merupakan cermin sebagai bank yang memiliki kepedulian sebagai pendorong untuk memajukan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional khususnya pembangunan di Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat.

6. Grafis membentuk gambaran yang kompak dan harmonis mencerminkan sikap profesional dan menjunjung tinggi nilai etika dan hubungan harmonis antara pemilik dan pengurus bank serta nasabah.

1. *The graphic is a shape of WING AND FEATHER OF CENDERAWASIH, shaping letters/words of BPD, which gives a sense like it flies away up there. It symbolizes the company's vision and mission with financial service business which is strong, trusted and has high work activity. Cendrawasih bird is a typical and a pride bird of Papua so that when it's said about Cenderawasih, people will be remained to Papua*

2. *The graphic consisted of 3 parts which are 2 feathers and a wing. These three parts reflected three pillars, which are:*
   a. 3 Papua's stove of development, which are Religion, Government and Culture.
   b. 3 Stakeholders which are Regional Province Government, Regency/Municipality, Employees/ Society/Third Party.
   c. BPD Papua's culture of work, which are: thinking, acting in a business way.

3. *The wing shapes a B letter, symbolized a flexible, dynamic in following the development and banking working environment condition which globalize more. The blue color symbolizes tranquility, concentration, cooperation, and unity.*

4. *Gold color at the feather shapes P letter, images the rich Papua's land with natural resources and also reflects the core business of the Regional Development Bank in very promising retail business.*

5. *The feather shapes D letter reflection of a bank having cares as a supporter to push forward national and regional economies growth, especially for development in Papua Province and West Papua Province*

6. *The graphic shapes a compact and harmonic picture reflects the professional attitude and respect, ethics values and harmonic bond between the bank's owner, management, and customer.*

Visi & Misi
Vision and Mission

" Menjadi Bank Komersial yang Kuat, Unggul dan Terpercaya "

"Being a Commercial Bank Strong, Superior and Reliable "

Menjadi
Mencerminkan arah pengembangan Bank Papua untuk melakukan transformasi dari Bank Pembangunan Daerah Menjadi Bank Umum.

Bank Komersial
Bank Papua sebagai *business entity* akan dikelola secara profesional berdasarkan prinsip kehati-hatian dan komersial sehingga dapat menghasilkan laba yang optimal dan memberikan nilai tambah kepada pemegang sahamnya melalui deviden. Bank Papua akan menyediakan produk-produk perbankan yang bersaing sesuai dengan target pasarnya. Bank Papua akan melayani nasabah individu, UKMK (Usaha Kecil Menengah dan Koperasi) serta korporasi termasuk Pemerintah Daerah.

Kuat
Mewujudkan suatu bank komersial yang sehat memiliki kinerja yang baik dan memiliki daya tahan tinggi terhadap ancaman, baik dari luar maupun dalam sehingga dapat menjalankan operasional perbankan secara berkelanjutan. Dalam menjalankan operasional perbankan. Bank Papua akan selalu mengacu kepada prinsip kehatihatian, mentaati regulasi perbankan dan aturan yang ditetapkan Bank Indonesia serta melaksanakan prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* (GCG).

Being
Reflecting the development of Bank Papua to transform the Regional Development Bank into a Commercial Bank.

Commercial Bank
Bank Papua as a business entity will be professionally managed based on prudential and commercial principles so as to generate optimal profit and provide added value to its shareholders through dividends. Bank Papua will provide competing banking products in accordance with its target market. Bank Papua will serve individual customers, UKMK (Small and Medium Enterprises and Cooperatives) as well as corporations including Local Government.

Strong
Realizing a sound commercial bank has a good performance and has high resistance to threats, both from outside and inside so as to run banking operations in a sustainable manner. In running the banking operations. Bank Papua will always refer to the principles of prudence, obey the banking regulations and rules set by Bank Indonesia and implement the principles and practices of Good Corporate Governance (GCG).

Unggul

Bank Papua akan dikelola secara professional dengan dukungan SDM dan Teknologi yang tepat dan handal. Bank Papua akan mempertahankan posisi sebagai bank terbesar di Papua. Bank Papua akan memberikan produk dengan layanan prima yang lebih baik dari pesaing.

Terpercaya

Bank Papua selalu berusaha untuk dapat memenuhi harapan masyarakat dan nasabah berdasarkan transparansi kerja, tanggungjawab dan integritas dengan sikap profesional, sehingga Bank Papua menjadi satu-satunya Institusi terpercaya dalam pemenuhan kebutuhan para nasabahnya.

Superior

Bank Papua will be managed professionally with the support of human resources and appropriate technology and reliability. Bank Papua will maintain its position as the largest bank in Papua. Bank Papua will provide products with excellent service better than competitors.

Trusted

Bank Papua always strives to meet the expectations of the community and customers based on transparency of work, responsibility and integrity with professional attitude, so that Bank Papua is the only trusted institution in meeting the needs of its customers.

Misi Bank Papua

1. Membangun kelembagaan yang berdaya saing tinggi.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.
3. Mengelola dana Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
4. Melakukan optimalisasi sebagai konsultan keuangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan Daerah.
5. Memberikan Pelayanan Prima dan Kepuasan kepada para nasabah.

Bank Papua Mission

1. *To build a high competitive institution.*
2. *To encourage economic growth and regional development.*
3. *To manage a fund of the Regional Government and society and to become one of Regional Revenue.*
4. *To optimize as financial consultant for Regional Government in managing Regional Budget.*
5. *To provide excellent service and customer satisfaction.*

Budaya Kerja
Work Culture

Budaya kerja Bank Papua yaitu: "Berpikir, Bertindak secara Bisnis" yang memiliki makna:

"Memikirkan dan melakukan setiap tindakan professional yang memberikan nilai tambah kepada semua pihak yang terkait dengan Bank Papua".

Budaya kerja Bank Papua didasarkan kepada nilai-nilai:

1. Melayani
Pelayanan yang tulus kepada setiap orang dengan cepat, tepat & efektif yang dilakukan oleh semua unit kerja dan insan Bank Papua secara terus menerus guna kepuasan semua pihak terkait.

2. Efisien
Melakukan setiap tindakan secara terencana, dilandasi dengan kejujuran untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi perusahaan.

3. Responsif
Tanggap terhadap perubahan, memberikan solusi cepat dan tepat serta peka terhadap situasi internal dan eksternal yang berhubungan dengan perusahaan.

4. Kewirausahaan
Jiwa wirausaha yang sudah melekat dalam pribadi-pribadi seorang pegawai yang mampu menangkap, mengembangkan dan menciptakan peluang guna menghasilkan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan.

5. Asas Manfaat
Menetapkan skala prioritas dan melaksanakannya dengan memanfaatkan sumber daya jangka pendek dan jangka panjang untuk kepentingan perusahaan.

6. Risiko yang Diperhitungkan
Setiap tindakan harus memberikan nilai tambah bagi perusahaan dengan memperhitungkan risiko.

7. Kerjasama
Tindakan yang dilakukan bersama-sama oleh insan Bank Papua (dengan memanfaatkan perbedaan dan kemajemukan) untuk mencapai kinerja perusahaan yang optimal.

Bank Papua work culture that is: "Thinking, Acting Business, " which has a meaning:

"Thinking and taking every precaution to professionals who provide added value to all pihak yang associated with the Bank Papua".

Bank Papua work culture based on values:

1. Serve
Sincere service to everyone quickly, precisely and effectively carried out by all the working units and Bank Papua beings continuously to the satisfaction of all parties concerned.

2. Efficient
Perform each action in a planned, based on the honesty to obtain optimum benefit for the company.

3. Responsive
Responsive to change, providing quick and precise solution and sensitive to internal and external situations related to the company

4. Entrepreneurship
Entrepreneurial spirit that is inherent in every employee who is able to capture, develop and create opportunities to generate economic added value for the company.

5. Utility Function
Establishes priorities and implement them by utilizing the resources of short-term and long-term interests of the company.

6. Calculated Risk
Each action should provide added value to the company taking into account the risk.

7. Cooperation
Actions carried out jointly by the Bank Papua beings (by exploiting the differences and plurality) in order to achieve optimal business performance.

10

Pedoman Perilaku
Code of Conduct

1

Mengutamakan Kebutuhan Pelanggan
Prioritize Customer Needs

Melayani dengan cepat, tepat dan efektif yang dilakukan oleh semua insan Bank Papua dengan berusaha memenuhi dan memuaskan pelanggan dengan memberikan layanan prima serta mengupayakan solusi tuntas atas segala masalah nasabah.

Serve quickly, appropriately and effectively by all Bank Papua personnel by trying to satisfy and satisfy customers by providing excellent service and pursue a thorough solution to all customer problems.

2

Jujur, Tulus, Terbuka Dan Berempati
Honest, Sincere, Open And Empathy

Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan menghindari penyelewengan wewenang jabatan dan konflik kepentingan. Tulus dalam memberikan pelayanan dan terbuka dalam menerima saran/kritik yang membangun serta berempati terhadap kebutuhan dan keluhan nasabah.

Uphold the values of honesty and avoid misuse of authority of the positions and conflicts of interest. Sincere in providing services and open in receiving suggestions / criticisms that build and empathize with customer needs and complaints.

3

Memberi Solusi Dan Hasil Terbaik
Providing The Best Solutions And Results

Mampu memberi solusi terhadap permasalahan perusahaan dan menindaklanjutinya serta memastikan penyelesaiannya sampai tuntas dengan tidak mengesampingkan faktor efisiensi.

Be able to provide solutions to the company's problems and follow up as well as ensure completion to the end without denying the efficiency factor.

4

Peduli Lingkungan
Environmental care

Peka terhadap situasi lingkungan internal dan eksternal Bank dan mampu beradaptasi sehingga fungsi dan tanggungjawab Bank tetap terjaga.

Sensitive to the Bank's internal and external environment situation and able to adapt so that the Bank's functions and responsibilities are maintained.

5	Inovatif, Proaktif Dan Kreatif *Innovative, Proactive And Creative*	Selalu berinisiatif melakukan pembaruan, berperan aktif dan memiliki banyak ide dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya demi kemajuan perusahaan. *Always initiative to make updates, active role and have many ideas in carrying out its duties and responsibilities for the sake of the company's progress.*
6	Disiplin Dan Konsisten *Discipline And Consistent*	Selalu tepat waktu dan patuh terhadap aturan yang ada dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta melakukannya secara terus menerus. *Always on time and obedient to the rules that exist in carrying out their duties and responsibilities and do it continuously.*
7	Berpikir, Berkata Dan Bertindak Terpuji *Thinking, Saying And Acting Praiseworthy*	Dalam setiap perilaku insan Bank Papua harus berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan kode etik dan peraturan disiplin pegawai serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. *In every human behavior Bank Papua should think, say and act in accordance with the code of ethics and discipline rules of employees and norms that apply in the community.*
8	Menciptakan Rasa Aman Dan Nyaman *Creating Secure And Comfortable*	Mampu menciptakan suasana atau kondisi yang terkesan baik, aman dan nyaman di lingkungan kerja dan kepada nasabah sekalipun dalam situasi lingkungan yang kurang kondusif. *Able to create an atmosphere or conditions that impressed good, safe and comfortable in the work environment and to the customer even in a less conducive environment.*
9	Orientasi Pada Nilai Tambah Dan Perbaikan Terus Menerus *Orientation On Added Value And Continuous Improvement*	Selalu kreatif dan inovatif dalam berpikir dan bertindak dengan melakukan pembaharuan dan perbaikan untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang dilakukan secara terus menerus. *Always creative and innovative in thinking and acting by doing renewal and improvement to provide added value to the company that is done continuously.*
10	Bekerja Sama, Saling Menghargai dan Mempunyai Rasa Memiliki *Working Together, Mutual Respecting And Having Ownership*	Mampu bekerja secara tim, mudah berkoordinasi dengan semua insan Bank Papua maupun dengan pihak terkait lainnya, menghargai orang lain serta memiliki kecintaan yang besar terhadap perusahaan. *Able to work in a team, easy to coordinate with all people of Bank Papua and with other related parties, appreciate others and have a great love for the company.*

Bidang Usaha
Business Lines

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank Papua, Bidang usaha Bank Papua adalah jasa keuangan perbankan, dengan beberapa produk jasa keuangan perbankan.

Based on the Articles of Association of the Bank Papua, Bank Papua business areas are banking, financial services, with some banking financial services products.

Produk & Layanan
Products & Services

Salah satu strategi untuk meningkatkan pencapaian target perusahaan serta kepuasan dalam pelayanan kepada seluruh nasabah, Bank Papua pun senantiasa meningkatkan pelayanan kepada seluruh nasabah serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, Bank Papua telah menyediakan dan mengembangkan produk dan layanan jasa bank, antara lain:

One strategy to increase the target achievement and satisfaction in service to all customers, Bank Papua also continually improves services to all customers as well as meet the needs of the community banking products and services, the Bank Papua has been providing and developing products and services of banks, others:

A. Dana Pihak Ketiga

1. Giro
   Produk ini merupakan simpanan Dana Pihak Ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro dan sarana perintah pembayaran lainnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

A. Third Party Funds

1. *Current Account*
   This product is a deposit of third party funds which may be withdrawn at any time by check, current account, demand deposit and forms of payment order pursuant wherewith set.

2. Deposito Berjangka
   Produk ini merupakan simpanan Dana Pihak Ketiga yang penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dan diperuntukkan bagi perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum. Bank Papua menawarkan beberapa pilihan sesuai jangka waktunya dengan suku bunga bersaing, dapat diperpanjang secara otomatis sesuai konfirmasi awal. Keunggulan Deposito Berjangka dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit.
3. Tabungan
   Tabungan merupakan sarana simpanan Dana Pihak Ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, dengan bunga yang menarik dan memberikan fasilitas kemudahan untuk bertransaksi Bank Papua memberikan beberapa pilihan simpanan dalam bentuk tabungan antara lain:
   a. Tabungan Simpeda
      (Simpanan Pembangunan Daerah)
      Keuntungan bagi penabungnya, yaitu:
      - Menawarkan bunga menarik.
      - Menawarkan hadiah menarik yang diundi secara nasional sebanyak 2 kali dalam 1 tahun dan regional sebanyak 2 kali dalam 1 tahun.
   b. Tabungan Simanja
      (Simpanan Aman dan Sejahtera)
      Keuntungan bagi penabungnya, yaitu:
      - Menawarkan bunga menarik
      - Menawarkan hadiah menarik yang diundi secara regional sebanyak 2 kali dalam 1 tahun
   c. TabunganKu
      Keuntungan bagi penabungnya, yaitu:
      - Mudah persyaratannya dan ringan setorannya.
      - Bebas biaya administrasi.

Selain keuntungan dari masing-masing pilihan tabungan tersebut diatas, dapat juga memberikan berbagai keuntungan bagi penabungnya, yaitu:
- Memberikan kemudahan transaksi seperti penarikan tunai, cek saldo dan transfer dana 24 jam dengan menggunakan Kartu ATM Bank Papua.
- Fasilitas kartu ATM yang dapat digunakan sebagai kartu debit di *merchant*, yang berlogo PRIMA Debit.
- Memberikan kemudahan dalam transaksi penyetoran tunai 24 jam melalui *Cash Deposit Machine* (CDM).
- Fasilitas SMS Banking.
- Dapat digunakan sebagai jaminan kredit.

2. *Time Deposit*
   This product is a deposit of third party funds withdrawn by a certain time period has been agreed and is intended for individuals or businesses who are legal entities. Bank Papua offers several options for the amount of time with competitive interest rates, can be extended automatically according to the initial confirmation. Time Deposits can be used as loan collateral.

3. *Savings*
   Savings deposit is a means of third party funds which may be withdrawn at any time, with interests that attract and facilitate ease of transacting Bank Papua offers several options in the form of savings deposits, among others:

   a. *Simpeda Savings*
      (Deposit Regional Development)
      Benefits for savers, namely:
      - *Offering Attractive interest.*
      - *Offering attractive prizes that will be drawn nationally as much as 2 times in 1 year and regionally as much as 2 times in 1 year.*

   b. *Simanja Savings*
      (Deposits Safe and Prosperous)
      Benefits for customer, namely:
      - *Offering Attractive interest.*
      - *Offering attractive prizes that will be drawn on a regional as much as 2 times in 1 year.*
   c. *TabunganKu*
      Benefits for customer, namely:
      - *Easy and light the deposit requirements.*
      - *Free of administration charge.*

In addition to the advantages of each option savings mentioned above, can also provide a variety of benefits for customer, namely:
- *Providing ease of transactions such as cash withdrawals, check balances and transfer funds 24 hours using ATM Card Bank Papua.*
- *Facilities, ATM card that can be used as a debit card at merchants, bearing the PRIMA Debit,*
- *Providing ease of depositing cash transactions 24 hours through Cash Deposit Machine (CDM).*
- *SMS Banking facility.*
- *Can be used as loan collateral.*

B. Kredit

Guna pembiayaan ekspansi bisnis yang prospektif atau untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha kecil, menengah dan besar, Bank Papua menawarkan berbagai kredit menurut jenis penggunaannya, antara lain:

1. Kredit Modal Kerja
   Kredit modal kerja yang diberikan Bank Papua memiliki jenis yang beragam baik untuk usaha kecil menengah maupun besar yaitu:
   - KMK Bank Papua Peduli.
   - KMK Kontrakting.
   - KMK R/C Perdagangan.
   - KMK Dana Sendiri.
   - KMK Dana Sendiri PRK.
   - KMK Pemerintah Daerah.
   - KMK Peduli Papua (Dijamin Pemerintah Daerah Provinsi).
   - KMK Kontruksi dengan Penjaminan.
   - KMK KUMK SUP-005.
   - KMK R/C Perdagangan SUP 005.
   - KMK Kontruksi SUP-005.
   - KMK Peduli Papua (dijamin Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten).
   - Pinjaman Usaha Mikro (PUM).
   - KMK Mikro.
   - KMK Kecil.
2. Kredit Investasi
   - KI Dana Sendiri.
   - KI Papua Peduli (Dijamin Pemerintah Daerah).
   - KI KUMK SUP-005.
   - KI Mikro.
   - KI Kecil.
   - KI Kendaraan Usaha.
3. Kredit Konsumsi
   - KKs Griya Bhakti.
   - KKs Wira Bhakti.
   - KKs Purna Bhakti.
   - KKs Multi Guna.
   - KKs Asset Buy Bank Lampung.
   - KKs Asset Buy Bank Sumsel Babel.
   - KKs PUMP-KB Jamsostek.
   - Kks Kendaraan.
4. Kredit Sindikasi
   - KS Investasi.
   - KS Modal Kerja.
   - KS KMK RC.
5. Kredit Karyawan
   - KKr Griya Bhakti.
   - KKr Abdi Bhakti.
   - KKr Kendaraan.
6. Kredit Program Pemerintah
   - KPP Koperasi dan Anggota.
   - KPP Ketahanan Pangan.

B. Loan

In order to finance the expansion of a prospective business or for the improvement of social welfare through the small, medium and large, Bank Papua offers a variety of loan according to the type of use, among others:

1. *Working Capital Loan (WCL)*
   Working capital loans of the Bank Papua have diverse types of good for small and medium businesses as well as large, namely:
   - *Bank Papua Peduli WCL.*
   - *Contracting WCL.*
   - *R / C Trading WCL.*
   - *Individula Fund WCL.*
   - *Individual Fund WCL PRK.*
   - *Local Government WCL.*
   - *Peduli Papua WCL (Provincial Government Guaranteed).*
   - *Construction WCL with Guarantee.*
   - *KUMK SUP-005 WCL.*
   - *R / C Trading SUP 005 WCL.*
   - *Construction SUP-005 WCL.*
   - *Peduli Papua WCL (guaranteed Local Government Municipal/Regency).*
   - *Micro Business Loan (PUM).*
   - *Micro WCL.*
   - *Small WCL.*
2. *Investment Loan (IL)*
   - *Individual Funds IL.*
   - *Papua Peduli IL (Guaranteed Local Government).*
   - *005 SUP KUMK IL.*
   - *Micro IL.*
   - *Small IL.*
   - *Vehicle Business IL.*
3. *Consumer Loan (CL)*
   - *Griya Bhakti CL.*
   - *Wira Bhakti CL.*
   - *Purna Bhakti CL.*
   - *Multi Guna CL.*
   - *Asset Buy Bank Lampung CL.*
   - *Asset Buy Bank Sumsel Babel CL.*
   - *PUMP-KB Social Security CL.*
   - *Vehicles CL.*
4. *Syndication Loan (SL)*
   - *Investments SL.*
   - *Working Capital SL.*
   - *WCL RC SL.*
5. *Employees Loan (EL)*
   - *Griya Bhakti EL.*
   - *Bhakti Abdi EL.*
   - *Vehicle EL.*
6. *The Government Loan Program (GLP)*
   - *Cooperative and Members GLP.*
   - *Food Security GLP.*

- KPP KMK KUR.
- KPP KI KUR.
- KPP KMK KUR R/C Perdagangan.
- KPP KMK KUR Konstruksi.

7. Kredit Non Program
   - PUM.
   - KMK-Mikro s/d 50 Juta.
   - KMK-Kecil s/d 500 Juta.
   - KMK R/C Perdagangan.
   - KI-Mikro s/d 50 Juta.
   - KI-Kecil s/d 500 Juta.
   - KI Kendaraan Usaha.

C. Jasa Perbankan lainnya

1. SMS Banking Bank Papua.
   Kemudahan bertransaksi perbankan kapan saja dan dimana saja melalui handphone.
2. Bank Papua Card.
   Untuk melakukan transaksi perbankan melalui mesin ATM, CDM yang memberikan kemudahan 24 jam (7 hari dalam seminggu) serta dapat digunakan sebagai kartu debet dalam bertransaksi di EDC *Merchant* berlogo Bank Papua dan prima. Kartu ini dapat memberikan kemudahan bertransaksi seperti penarikan tunai, cek saldo, transfer dana dan *payment point*.
3. Transfer/Kliring/RTGS.
4. Kartu ATM/ Debit Bank Papua.
   Kemudahan bertransaksi dalam satu kartu.
5. EDC (*Electronic Data Capture*).
   Mesin pembayaran menggunakan Kartu ATM Bank Papua yang menjadikan pembayaran pembelanjaan menjadi lebih mudah dan aman.
6. CDM (*Cash Deposit Machine*).
   Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Setoran yang disediakan khusus untuk setoran tunai secara realtime dan bebas biaya ke rekening sendiri di Bank Papua.
7. Samsat Online.
   Layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), retribusi jasa ketatausahaan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pendapatan lain-lain secara online.
8. Layanan Kartu Pegawai Elektronik (KPE).
   Layanan kartu identitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan fasilitas perbankan. Layanan ini berfungsi sebagai Kartu Identitas PNS, Kartu Taspen, Kartu Askes, Bapertarum dan sebagai Kartu ATM Bank Papua.
9. BPDNet Online.
   Kemudahan setoran tunai ke seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara realtime melalui Teller Bank Papua.

- *KUR WCL GLP.*
- *IL KPP KUR GLP.*
- *KUR R / C Trading WCL GLP.*
- *Construction KUR WCL GLP.*

7. *Non-Loan Program*
   - *PUM.*
   - *Micro-WCL upto 50 Million.*
   - *Small-WCL upto 500 Million.*
   - *R / C Trading WCL.*
   - *Micro_IL upto 50 Million.*
   - *Small-IL upto 500 Million.*
   - *Vehicle Business IL.*

C. Other Banking Services

1. *Bank Papua SMS Banking*
   Ease of banking transactions anytime and anywhere via mobile phone.
2. *Bank Papua Card.*
   To perform banking transactions via ATM, CDM provides convenience 24 hours (7 days a week) and can be used as a debit card in the deal in EDC logo Merchant Bank Papua and Prima. This card can provide convenience to transact such as cash withdrawals, check balances, transfer funds and paying points
3. *Remmitance / Clearing / RTGS.*
4. *ATM/Debet Card Bank Papua.*
   Ease of transacting in a single card.
5. *EDC (Electronic Data Capture).*
   Payment machines using ATM Card Bank Papua which makes payment of expenditures becomes easier and safer.
6. *CDM (Cash Deposit Machine).*
   Automated Teller Machine (ATM) Amount reserved for a cash deposit in real time and free of charge for its own account in the Bank Papua.
7. *Samsat Online.*
   Motor vehicle tax payment services (PKB), administrative service fees, Motor Vehicle Name Fee (BBNKB) and other online income.
8. *Electronic Service Employee Card (KPE).*
   Civil Service identity card (PNS) service with banking facilities. This service serves as the identity card of PNS, Taspen Card, Askes Card, Bapertarum and as Bank Papua ATM Card.
9. *BPD Net Online.*
   Ease of cash deposit to the Regional Development Bank (BPD) in real time through Bank Papua Teller.

10. *Save Deposit Box* (SDB).
    Fasilitas jasa bagi nasabah untuk menyimpan barang-barang berharga dan dokumen pribadi yang rahasia dengan sistem pengamanan berteknologi modern.
11. Kas Daerah Online (KASDA ONLINE).
    Merupakan layanan kepada Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan informasi transaksi rekening Giro Pemerintah Daerah secara Online.
12. Garansi Bank.
    Jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (bisa perorangan atau perusahaan), apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.
13. Referensi Bank.
    Surat keterangan yang diterbitkan oleh Bank atas permintaan nasabah Perorangan atau Perusahaan.
14. *Automatic Teller Machine* (ATM) Bank Papua
    Mesin pengambil uang dengan banyak fungsi dan tergabung dalam jaringan Bank Papua, ATM Bersama dan jaringan Prima di seluruh Indonesia.
15. *Payment Point* Telkomsel.
    Layanan pembayaran tagihan Telkomsel dan pembelian pulsa melalui ATM dan Teller Bank Papua.
16. *Payment Point* Indosat.
    Layanan pembayaran tagihan Indosat dan pembelian pulsa melalui ATM.
17. *Payment Point* PLN.
    Layanan yang diberikan kepada nasabah terutama dalam pembayaran listrik PLN yang meliputi Pembayaran Tagihan Listrik, Tagihan dan Pembayaran Lainnya secara terpusat yang dapat dilakukan melalui Teller maupun secara Autodebet/ Pemindahbukuan.
18. Layanan *Airport Executive Lounge*.
    Fasilitas layanan yang diberikan kepada nasabah Bank Papua berupa pemanfaatan ruangan *Airport Executive Lounge* dibeberapa Bandara diseluruh Indonesia yang telah bekerja sama dengan Bank Papua. Fasilitas ini diberikan gratis bagi nasabah pemegang Platinum Bank Papua Card.

10. Safe Deposit Box (SDB).
Service facility for customers to store valuables and personal documents confidential with the modern tech security system.

11. Regional Cash Online (KASDA ONLINE).
A service to local government in terms of providing information of demand deposit account transactions Local Government Online.

12. Bank Guarantee.
Guarantee of payment given to the insured party (either individuals or companies), if the guaranteed party can not fulfill its obligations.

13. Bank Reference.
The certificate issued by the Bank at the request of customers Individual or Business.

14. Automatic Teller Machine (ATM) Bank Papua.
Money maker machine with many functions and incorporated in the network of the Bank Papua, ATM together and Prima network throughout Indonesia.

15. Telkomsel Payment Point.
Telkomsel bill payment services and loan purchase through ATM and Teller BankPapua.

16. INDOSAT Payment Point.
Indosat bill payment services and pulse purchase through ATM.

17. PLN Payment Point.
Services provided to customers mainly in the payment of electricity that includes the Electricity Bill Payments, Billing and Other Payments centrally which can be done through Auto Teller as well as debit / Transfer.

18. Airport Executive Lounge Service.
Facility services provided to customers of the Bank Papua form of utilization of several rooms Airport Executive Lounge services throughout Indonesia who has been working with the Bank Papua. A facility is provided free of charge to holders of the Bank Papua Platinum Card.

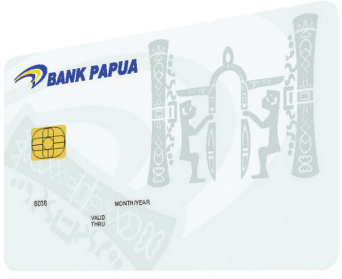

KARTU ATM/DEBIT

BANK PAPUA

Bersama Papua Membangun Negeri

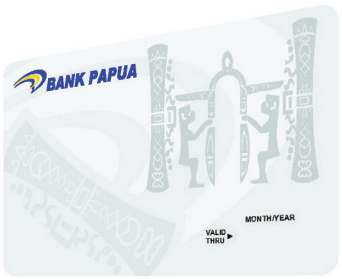

Rangkaian Kegiatan Penting Manajemen Bank Papua Tahun 2017
Important Activities of Bank Papua's Management in 2017

02 Januari *January* 2017

Seluruh karyawan Bank Papua mengikuti Briefing pagi perdana mengawali tahun baru 2017.

All Bank Papua employees followed the initial morning briefing new year 2017.

09 Januari *January* 2017

Natal Bersama Bank Papua dan BMPD Papua.

Natal Together with Bank Papua and BMPD Papua.

18 Januari *January* 2017

Pertemuan dengan PT. Rintis Sejahtera (Prima) terkait *Business* Update dan penyerahan plakat awarding kepada Bank Papua.

Meeting with PT. Rintis Sejahtera (Prima) related to Business Update and submission of plaque awarding to Bank Papua.

23 Januari *January* 2017

Direktur Kepatuhan Bank Papua melakukan Pelepasan PIN 50 Tahun Bank Papua pada saat briefing pagi bersama.

Compliance Director of Bank Papua Conducts Release of 50 Years PIN Bank Papua at the morning briefing together.

23 Januari *January* 2017

Plt. Direktur Utama Bank Papua melakukan Penandatanganan MoU dengan perwakilan Manajemen Maskapai Citylink.

Acting President Director of Bank Papua signed MoU with Citylink Airlines Management Representative.

24 Januari *January* 2017

Plt. Direktur Utama Bank Papua melakukan Penandatanganan MoU antara PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dengan PT. Telkom Indonesia tentang Amandemen ke-II, Kontrak Berlangganan.

Acting President Director of Bank Papua signed MoU between PT. Bank Pembangunan Daerah Papua with PT. Telkom Indonesia on the Second Amendment, Subscription Contract.

25 Januari *January* 2017

Plt. Direktur Utama didampingi oleh Manajemen Bank Papua melakukan Pertemuan / Silaturahmi bersama Manajemen PT. Infokom Electrindo.

Acting President Director accompanied by the Management of Bank Papua conduct Meeting / Hospitality with Management PT. Infokom Electrindo.

9 Februari *February* 2017

Pertemuan dan Silaturahmi dengan Bank Jambi.

Meeting and Gathering with Bank Jambi.

3 Maret *March* 2017

Manajemen Bank Papua melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Republik Indonesia satuan kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) Penyediaan perumahan Provinsi Papua Barat tentang Rekening Online.

Management of Bank Papua Signed Cooperation Agreement between PT. Bank Pembangunan Daerah Papua with Ministry of Public Works and People's Housing of the Republic of Indonesia a particular non-Vertical work unit (SNVT) Provision of housing of West Papua Province on Online Accounts.

6 Maret *March* 2017

Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan sekaligus Pelantikan Manajemen Baru Bank Papua.

Extraordinary Shareholder General Meetings (ESGM) and the inauguration of New Management of Bank Papua.

14 Maret *March* 2017

Direktur Bisnis Bank Papua menghadiri Rapat Kerja Teknis Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan se-Provinsi Papua.

Business Director of Bank Papua attended the Technical Work Meeting for the Framework of Coordination and Consultation on Plantation Development in Papua Province.

17 Maret *March* 2017

Direksi Bank Papua didampingi oleh Pimpinan Pejabat Bank Papua untuk melakukan MoU dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) penyediaan perumahan tentang Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahaan Swadaya (BSPS) di wilayah Provinsi Papua.

The Board of Directors of Bank Papua is accompanied by the Head of Officials of Bank Papua to perform MoU with the Ministry of Public Works and People's Housing, Certain Non-Vertical Working Units (SNVT) providing housing on the Distribution of Self-Supported Housing Stimulus Support (BSPS) in the province of Papua.

24 Maret *March* 2017

Lepas Sambut Direksi Bank Papua Lama dan Baru.

Release and welcome for Old and New of the Board of Directors of Bank Papua.

24 Maret *March* 2017

Direksi Bank Papua mengikuti Seminar Nasional seluruh pimpinan Bank Pembangunan Daerah se Indonesia sebelum acara Penarikan Undian Simpeda Nasional di Labuan Bajo.

The Board of Directors of Bank Papua attended the National Seminar of all Regional Development Bank leaders throughout Indonesia prior to the National Simpeda Drawing Event in Labuan Bajo.

Rangkaian Kegiatan Penting Manajemen Bank Papua Tahun 2017
Important Activities of Bank Papua Management in 2017

24 Maret *March* 2017

Nasabah Bank Papua Mendapat hadiah Utama Simpeda Nasional periode ke-2 tahun 2017 yang diselenggarakan oleh ASBANDA di Labuan Bajo dan diterima oleh Direksi PT. Bank pembangunan Daerah Papua.

Customers of Bank Papua Received the 2nd National Simpeda Prize for the 2nd period of 2017 held by ASBANDA in Labuan Bajo and received by the Board of Directors of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

29 Maret *March* 2017

Direktur Bisnis bersama Direktur Operasional Bank Papua didampingi oleh Pimpinan Pejabat Bank Papua untuk melakukan MoU dengan PT. Taspen (Persero) tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, pembayaran tabungan Multiguna, pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan kematian melalui rekening Bank.

Business Director with Operations Banking Director of Bank Papua accompanied by the Chief Officer of Bank Papua to conduct MoU with PT. Taspen (Persero) on Payment of Pension Savings, Multiguna savings payment, pension, Work Accident Insurance, Death Guarantee through Bank account.

8 April *April* 2017

Seluruh Insan Bank Papua melakukan Jalan Santai bersama untuk menyambut HUT Bank Papua ke-51 Tahun.

All employees of Bank Papua do the leisurely strolling together to welcome the 51st anniversary of Bank Papua.

10 April *April* 2017

Seluruh Insan Bank Papua peduli akan sesama melalui kegiatan Donor Darah dalam rangka menyambut HUT Bank Papua ke-51 Tahun.

All employee Bank Papua care about others through Blood Donor activities in order to welcome the 51st anniversary of Bank Papua.

19-20 April *April* 2017

Acara *Business* Meeting. .

Business Meeting Event.

24 Mei *Mei* 2017

Prime *Cost*omer Cathering With Bank Papua.

Prime Costomer Cathering With Bank Papua.

24 Mei *Mei* 2017

Direksi Bank Papua melakukan MoU dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua tentang penempatan dana jaminan perusahaan rekrame dan pasca tambang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

The Board of Directors of Bank Papua holds an MoU with the Department of Energy and Mineral Resources of the Papua Province on the placement of guarantee funds of the recruiting companies and post mining permits (IUP).

19 Juni *juny* 2017

Direktur Utama Bank Papua Menghadiri Pembukaan Festival Danau Sentani.

President Director of Bank Papua Attends the Opening of Lake Sentani Festival.

15 Juli *July* 2017

Kegiatan Halal Bi Halal dengan seluruh Pegawai Bank Papua.

Halal Bi Halal Activities with all Bank Papua Officers.

18 Juli *July* 2017

Silaturahmi bersama sesama perbankan, Jajaran Direksi Bank Papua menerima Kunjungan PANWIL BNI di kantor Bank Papua.

Greeting with fellow banks, Board of Directors of Bank Papua receives BNI PANWIL Visit at Bank Papua office.

3 Agustus *August* 2017

Pertemuan antara Bank Sumsel Babel dengan manajemen Bank Papua untuk melakukan studi banding terkait dengan OLIBS 724.

The meeting between Bank Sumsel Babel and the management of Bank Papua to conduct a comparative study related to OLIBS 724.

29 September *September* 2017

Senam Bersama dalam rangka HUT Perisba Bank Papua.

Gymnastics Together in the anniversary of Perisba Bank Papua.

5 Oktober *October* 2017

Silaturahmi antara manajemen Bank Papua dengan Rektor Baru Universitas Cenderawasih (UNCEN).

The Greeting between the management of Bank Papua and the New Rector of Cenderawasih University (UNCEN).

9 Oktober *October* 2017

Pertemuan antara Manajemen Bank Papua dengan Komisi III DPR Propinsi Papua terkait keberlansungan Bisnis Bank Papua.

Meeting between the Management of Bank Papua and Commission III of the Provincial Parliament of Papua related to the sustainability of Bank Papua Business.

Rangkaian Kegiatan Penting Manajemen Bank Papua Tahun 2017
Important Activities of Bank Papua Management in 2017

13 Oktober *October* 2017

Kunjungan Deputi Bank Indonesia dan Asisten II Provinsi Papua dalam rangka Acara Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Tahun 2017.

The Visit of Deputy of Bank Indonesia and Assistant II of Papua Province in the framework of the Non-Cash National Movement (GNNT) Year 2017.

15 Oktober *October* 2017

Direktur Bisnis Bank Papua Menerima Simbolis Kerjasama Bank Papua dengan Maskapai Sriwijaya.

Business Director of Bank Papua Receives Symbolic Cooperation between Bank Papua and Sriwijaya Airlines.

17 Oktober *October* 2017

Pertemuan antara Manajemen Bank Papua dengan Gubernur Papua terkait keberlansungan Rencana Bisnis Bank Papua.

The meeting between the Management of Bank Papua and the Governor of Papua is related to the sustainability of the Bank Papua Business Plan.

6 November *November* 2017

Direktur Bisnis Bank Papua melakukan Konferensi Pers BPJS tentang Pembayaran Iuran JKN-KIS melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Business Director of Bank Papua conducts BPJS Press Conference on Payment of JKN-KIS Contribution through PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

7 November *November* 2017

Manajemen Bank Papua melakukan Pertemuan dengan PT. Asuransi Jiwasraya terkait manfaat Asuransi Jiwa Bagi pegawai Bank Papua.

Management of Bank Papua held a meeting with PT. Asuransi Jiwasraya related benefits Life Insurance For employees of Bank Papua.

8 November *November* 2017

Untuk meningkatkan manfaat perlakuan PSAK 71, Bank Papua melakukan pelatihan PSAK 71 bagi seluruh Pejabat Bank Papua baik dilingkungan Kantor Pusat maupun KCU Jayapura bertempat di Bank Papua KP (lt.4).

To improve the benefits of PSAK 71 treatment, Bank Papua conducts SFAS 71 training for all Bank Indonesia Officials both within Head Office and KCU Jayapura at Bank Papua KP (4th fl.).

21 November *November* 2017

Direktur Operasional PT.Bank Pembagunan Daerah Papua melakukan Penandatanganan dalam rangka Pekan Pembangunan untuk mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

Banking Operation Director of PT.Bank Pembagunan Daerah Papua Signed in the framework of the Development Week to realize Papua Rise, Independent and prosperous.

Rangkaian Kegiatan Penting CSR Bank Papua Tahun 2017
Summary of Important Activities of Bank Papua's CSR in 2017

2 Februari 2017 *February*

Bantuan CSR dalam rangka pembinaan mental Gereja Bethel-Jayapura.
CSR donation in the context of mentoring the Bethel Church-Jayapura.

13 Februari 2017 *February*

Bantuan CSR Renovasi Tugu Pendidikan-Lingkaran Abe

CSR donation for Renovation Monument Education-Circle Abe

16 Februari 2017 *February*

Bantuan CSR berupa bahan bangunan GBI-Jayapura.
CSR donation in the form of building materials GBI-Jayapura

13 Maret 2017 *March*

Bantuan Dana CSR Wisata Rohani Klasis GKI Jayapura.
CSR Funding donation Spiritual Tour GKI Klasis Jayapura.

23 Maret 2017 *March*

Bantuan CSR untuk PBSI Kabupaten Boven Digoel untuk persiapan PON.
CSR donation for PBSI Boven Digoel Regency for PON preparation.

8 April 2017 *April*

Bantuan CSR untuk pembayaran sisa 70% pengadaan 1 unit mobil ambulans Kabupaten Waisai.

CSR donation for the remaining 70% procurement of 1 unit of ambulance- Waisai Regency.

11 April 2017 *April*

Bantuan CSR bidang Pendidikan 1 unit Komputer untuk SD YPPK Santo Petrus Argapura Jayapura.
Educational CSR donation of 1 unit Computer for SD YPPK St. Peter Argapura Jayapura.

Rangkaian Kegiatan Penting CSR Bank Papua Tahun 2017
Important Acitivities of Bank Papua's CSR in 2017

5 Mei *Mei* 2017

Bantuan CSR Kelompok Kerja Taman Kanak-Kanak (K3TK) se-Kota Jayapura.

CSR donation of Level Working Group (K3TK) in Jayapura City.

5 Mei *Mei* 2017

Bantuan 2 buah unit komputer untuk SMU Negeri 4 Jayapura.

Donation of 2 pieces of computer unit for SMA Negeri 4 Jayapura.

5 Mei *Mei* 2017

Bantuan Dana CSR Rumah Sakit AL- DR. Soedibjo Sard-Jayapura

CSR Funds donatin for DR. Soedibjo Sard Hospital-Jayapura

22 Mei *Mei* 2017

Bantuan CSR bahan bangunan untuk pembangunan Gereja Advent hari ke Tujuh Yowanibi Doyo Baru.

CSR donation of building materials for the construction of the Seventh Day Adventist Church Yowanibi Doyo Baru.

23 Mei *Mei* 2017

Bantuan CSR bidang Lingkungan Tahap I (50%) dalam rangka pembuatan Taman Hijau di Kota Nabire.

CSR donation in Phase I Environment (50%) for the purpose of making Green Park in Nabire City.

23 Mei *Mei* 2017

Bantuan CSR makanan tambahan untuk masalah kesehatan yang bekerjasama dengan SATPOLAIR POLDA Jayapura.

Additional food CSR donation for health issues in collaboration with SATPOLAIR POLDA Jayapura.

7 Juli *July* 2017

Bantuan CSR pembelian bahan bangunan untuk korban kebakaran Kel. Philipus Pamanggori-Hamadi.

CSR donation in purchasing building materials for fire victims Philipus Pamanggori district-Hamadi.

18 Juli *July* 2017

Bantuan CSR pembangunan Gedung Gereja Pentakosta Jemaat Kana-Koya Barat.
CSR donation for the construction of Pentecostal Church Building of the Kana Church-Western Koya.

7 Agustus *August* 2017

Bantuan CSR bidang keagamaan, 100 sak Semen dalam rangka pembangunan Gedung Gereja GKI Jemaat Yakhin Kleubouw-Sentani.
Religious CSR donation, 100 pcs cement for the construction of Church Building GKI Yakhin Kleubouw-Sentani.

9 Agustus *August* 2017

Bantuan CSR Kebakaran pembelian 50 Sak Semen untuk Masjid Fajrul Islam Kotaraja.
Fire CSR donation purchase of 50 pcs Cement for Fajrul Islam Mosque Kotaraja.

16 Agustus *August* 2017

Bantuan CSR 1 unit Truck Sampah untuk Pemda Kabupaten Biak Numfor.
CSR donation of 1 unit of Garbage Truck for the Local Government of Biak Numfor Regency.

22 Agustus *August* 2017

Bantuan CSR dalam rangka pembangunan Gereja Sion Mapura Teminabuan Tahap terakhir (100%).
CSR donation in the framework of building the Church of Sion Mapura Teminabuan. Finishing stage (100%).

24 Agustus *August* 2017

Bantuan CSR Pembangunan Gedung Gereja Jemaat Patmos Daerah Bolakme.
CSR donation for Development of Patmos Church Building Bolakme District.

25 Agustus *August* 2017

Bantuan CSR dalam rangka pembayaran tahap II (100%) pembuatan Taman Hijau Kota Nabire.
CSR donation in the framework of payment stage II (100%) making Nabire City Green Park.

Rangkaian Kegiatan Penting CSR Bank Papua Tahun 2017
Important Acitivities of Bank Papua's CSR in 2017

30 Agustus *August* 2017

Bantuan CSR Kepada Panitia Pelaksana Rapat Kerja Klasis Kota Jayapura Gereja Kemah Injil Indonesia.

CSR donation to the Executive Committee of the Jayapura City Cluster Meeting of Gereja Kemah Injil Indonesia.

10 Oktober *October* 2017

Bantuan 2 komputer untuk rumah singgah yayasan PKBM Sentani.

Donation 2 computers for shelter home PKBM Sentani Foundation.

10 Oktober *October* 2017

Bantuan CSR Rehab Mesjid An-Nur Teminabuan Sorong-Selatan.

CSR donation for Rehabilitation of An-Nur Mosque Teminabuan Sorong-Selatan.

10 Oktober *October* 2017

Bantuan Kebakaran di Abepura an. Kel. Karel Arnol Wambrau.

Fire donation in Abepura. for behalf Karel Arnol Wambrau.

12 Oktober *October* 2017

Bantuan Genset 1 unit untuk puskesmas Kotaraja.

Donation of 1 unit generator for community Health centers Kotaraja.

1 November *November* 2017

Direktur Operasional Bank Papua Memberikan bantuan CSR musibah Kebakaran rumah di Weref Jayapura.

Banking Operation Director of Bank Papua Providing CSR donation for fire accident at Weref Jayapura.

3 November *November* 2017

Bantuan CSR untuk PAUD Mutiara Kasih Persemi GPDN En-Rimon Dok IX Jayapura.

CSR donation for PAUD Mutiara Kasih Persemi GPDN En-Rimon Dok IX Jayapura.

9 November 2017
November

Bantuan CSR Pengobatan an. Siti Sara Hagar Nuboba Penderita Kanker.

CSR donation for Treatment behalf Siti Sara Hagar Nuboba, Cancer Patients.

27 November 2017
November

Bantuan Dana Natal untuk Panitia Ebamukai & budaya Gereja Katedral Jayapura.
Christmas Fund donation for Ebamukai Committee & Cathedral Culture Church of Jayapura.

8 Desember 2017
December

Partisipasi Lintas Alam Cycloops Wana Rally(CWR) oleh Dinas Kehutanan Propinsi Papua.

Cross Country of Cycloops Wana Rally (CWR) Participation by Forestry Service Papua Province.

14 Desember 2017
December

Bantuan Pembangunan Mesjid Al-Wadissalam.
Development donation for Al-Wadissalam Mosque.

14 Desember 2017
December

Bantuan Renovasi Gereja Rehobot-Serui.

Rehobot-Serui Church Renovation donation.

Rangkaian Kegiatan Penting Sponsorship Bank Papua Tahun 2017
Important Activities of Bank Papua's Sponsorship in 2017

12 Juli *July* 2017

Bantuan Sponsor Corporate Kepada Panitia Natal Oikumene Umat Kristiani dilingkungan BAPPENDA Provinsi Papua dan Mitra Kereja Tahun 2017.

Corporate Sponsor donation To Christmas Committee of Oikumene Christians within BAPPENDA of Papua Province and Partners of the Church in 2017.

7 Desember *December* 2017

Sponsor Corporate berupa Doorprize tabungan untuk usaha dana pembangunan Gereja Katedral Jayapura.

Corporate Sponsor in the form of Doorprize savings for the development effort of Jayapura Cathedral Church.

7 Desember *December* 2017

Penyerahan Bantuan Sponsor Corporate Kepada Komunitas Wartawan Papua di Jayapura.

Submission of Corporate Sponsor donation to the Papuan Journalist Community in Jayapura.

Penghargaan & Sertifikasi di Tahun 2017

Awards & Certification in 2017

Sertifikat Bank Pelaksana Pengguna Sertifikat Elektronik pada Sistem e-FLPP dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

Certificate of Executing Bank User Electronic Certificate on e-FLPP System from Housing Financing Fund Management Center

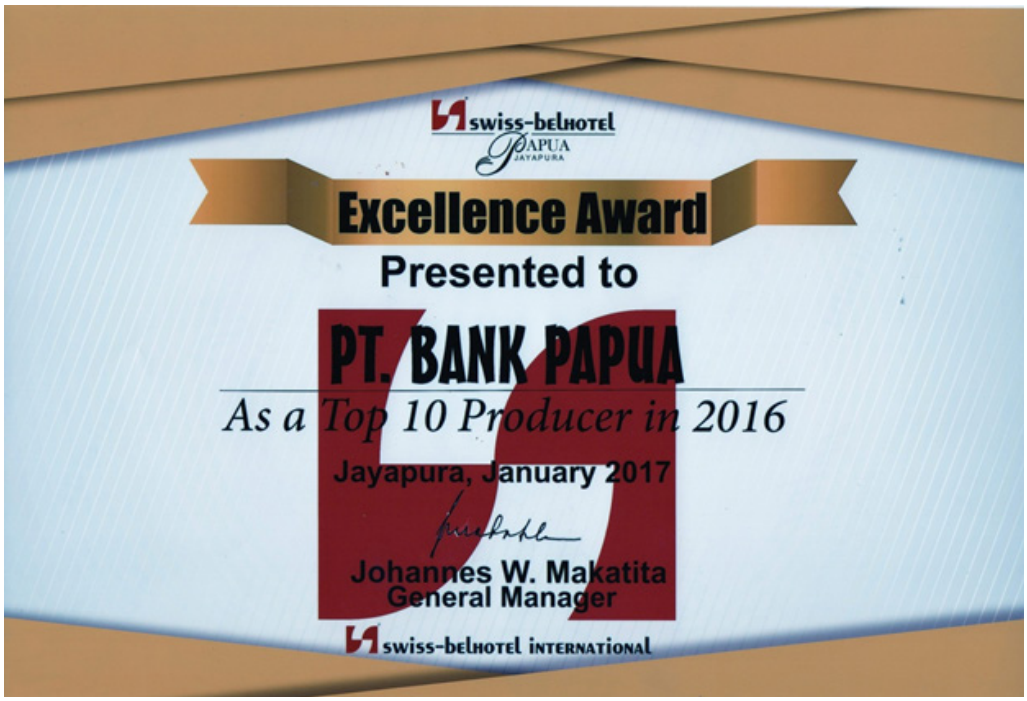

Excellence Award As a Top 10 Producer in 2016 dari Swiss-Belhotel International

Excellence Award As a Top 10 Producer in 2016 from Swiss-Belhotel International

Struktur & Komposisi Pemegang Saham

Structure & Shareholder Composition

Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama

Bank Papua merupakan Bank Pembangunan Daerah yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Papua dan Papua Barat. Disamping itu saham Bank Papua dimiliki juga oleh Koperasi Serba Usaha Bank Papua Berdikari sebagai bagian dari program kepemilikan saham yang dimiliki oleh karyawan Bank Papua. Dari seluruh pemegang saham, persentase kepemilikan saham terbesar adalah Pemerintah Provinsi Papua yakni sebesar 20,37%, sehingga menjadi Pemegang Saham Mayoritas PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Information on Major Shareholders

Bank Papua is a Regional Development Bank, whose shares is majority owned by the Papua Regional Government consisting of Provincial Governments of Papua and West Papua, Regency and Municipal Governments throughout Papua and West Papua. In addition, the shares of Bank Papua are also owned by the Multipurpose Business Cooperative of Bank Papua Berdikari as part of the share ownership program owned by Bank Papua employees. Of the total shareholders, the largest percentage of ownership is a Papua Provincial Government, which is 20.37%, thus becoming a Mayority Shareholder of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Pemegang Saham
Shareholder

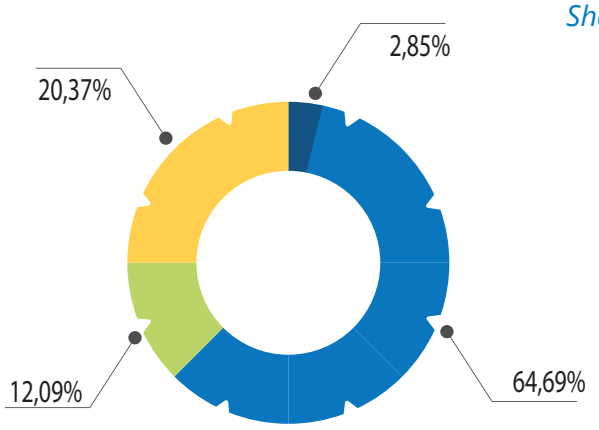

KETERANGAN	Nama Pemegang Saham	Total (%)
PEMEGANG SAHAM SERI A	- Pemda Provinsi Papua	20,37%
	- Pemda Provinsi Papua Barat	12,09%
	- Pemda Kota/Kabupaten Setanah Papua	64,69%
PEMEGANG SAHAM SERI B	- KSU Bank Papua Berdikari	2,85%

Komposisi Saham

Sampai dengan akhir Desember 2017 komposisi saham Bank Papua adalah sebagai berikut.

Share Composition

Until the end of December 2017 the composition of shares of Bank Papua is as follows.

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM
SHARE LISTING CHRONOLGY

KETERANGAN	SALDO NOMINAL MODAL	NILAI NOMINAL PER LEMBAR SAHAM	LEMBAR SAHAM	JUMLAH LEMBAR SAHAM SERI A	JUMLAH LEMBAR SAHAM SERI B	KETERANGAN
MODAL YANG SUDAH DISAHKAN	1.907.850.000.000	5.000.000	381.570	370.677	10.893	1 Januari 2017 s/d 16 Juni 2017
TAMBAHAN MODAL DISETOR (BELUM DISAHKAN)	95.306.705.785	5.000.000	19.061	19.061	0	16 Juni 2017 s/d 31 Desember 2017
TOTAL	**2.003.156.705.785**	**-**	**400.631**	**389.738**	**10.893**	**31 Desember 2017**

Nama Pemegang Saham *Name of Shareholder*	**Lembar Saham** *Stockholder*	**Persentase Kepemilikan (%)** *Percentage of Ownership (%)*	**Jumlah Kepemilikan (Rp)** *Total Ownership (Rp)*
A. Provinsi Papua:			
1. Pemda Provinsi Papua	77.721	20,37%	388.605.000.000
2. Pemda Kota Jayapura	10.079	2,64%	50.395.000.000
3. Pemda Kabupaten Jayapura	9.616	2,52%	48.080.000.000
4. Pemda Kabupaten Jayawijaya	7.802	2,04%	39.010.000.000
5. Pemda Kabupaten Puncak Jaya	9.950	2,61%	49.750.000.000
6. Pemda Kabupaten Merauke	11.477	3,01%	57.385.000.000
7. Pemda Kabupaten Biak Numfor	4.605	1,21%	23.025.000.000
8. Pemda Kabupaten Yapen	7.593	1,99%	37.965.000.000
9. Pemda Kabupaten Nabire	5.756	1,51%	28.780.000.000
10. Pemda Kabupaten Paniai	3.700	0,97%	18.500.000.000
11. Pemda Kabupaten Mimika	15.346	4,02%	76.730.000.000
12. Pemda Kabupaten Sarmi	8.500	2,23%	42.500.000.000
13. Pemda Kabupaten Tolikara	7.631	2,00%	38.155.000.000
14. Pemda Kabupaten Waropen	4.800	1,26%	24.000.000.000
15. Pemda Kabupaten Yahukimo	2.591	0,68%	12.955.000.000
16. Pemda Kabupaten Asmat	8.200	2,15%	41.000.000.000
17. Pemda Kabupaten Keerom	5.029	1,32%	25.145.000.000
18. Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang	10.400	2,73%	52.000.000.000
19. Pemda Kabupaten Supiori	3.398	0,89%	16.990.000.000
20. Pemda Kabupaten Boven Digoel	3.600	0,94%	18.000.000.000
21. Pemda Kabupaten Mappi	5.400	1,42%	27.000.000.000
22. Pemda Kabupaten Lanny Jaya	2.500	0,66%	12.500.000.000
23. Pemda Kabupaten Yalimo	1.419	0,37%	7.095.000.000
24. Pemda Kabupaten Mamberamo Raya	4.200	1,10%	21.000.000.000
25. Pemda Kabupaten Nduga	3.333	0,87%	16.665.000.000
26. Pemda Kabupaten Dogiyai	3.274	0,86%	16.370.000.000
27. Pemda Kabupaten Puncak	3.400	0,89%	17.000.000.000
28. Pemda Kabupaten Mamberamo Tengah	1.036	0,27%	5.180.000.000
29. Pemda Kabupaten Intan Jaya	1.747	0,46%	8.735.000.000
30. Pemda Kabupaten Deiyai	1.200	0,31%	6.000.000.000
Jumlah / Total	**245.303**	**64,29%**	**1.226.515.000.000**
B. Provinsi Papua Barat:			
31. Pemda Provinsi Papua Barat	46.128	12,09%	230.640.000.000
32. Pemda Kota Sorong	2.400	0,63%	12.000.000.000
33. Pemda Kabupaten Manokwari	10.128	2,65%	50.640.000.000
34. Pemda Kabupaten Sorong	5.955	1,56%	29.775.000.000
35. Pemda Kabupaten Sorong Selatan	7.800	2,04%	39.000.000.000
36. Pemda Kabupaten Fak-Fak	8.285	2,17%	41.425.000.000
37. Pemda Kabupaten Teluk Bintuni	10.100	2,65%	50.500.000.000
38. Pemda Kabupaten Kaimana	6.000	1,57%	30.000.000.000
39. Pemda Kabupaten Raja Ampat	13.238	3,47%	66.190.000.000
40. Pemda Kabupaten Teluk Wondama	5.400	1,42%	27.000.000.000
41. Pemda Kabupaten Tambrauw	2.850	0,75%	14.250.000.000
42. Pemda Kabupaten Maybrat	3.215	0,84%	16.075.000.000
43. Pemda Kabupaten Pegunungan Arfak	3.000	0,79%	15.000.000.000
44. Pemda Kabupaten Manokwari Selatan	875	0,23%	4.375.000.000
Jumlah/Total	**125.374**	**32,86%**	**626.870.000.000**
C. KSU Bank Papua BERDIKARI	10.893	2,85%	54.465.000.000
JUMLAH MODAL/*CAPITAL*	381.570	100,00%	1.907.850.000.000
TAMBAHAN MODAL DISETOR	19.061	4,76%	95.306.705.785
TOTAL MODAL/ *TOTAL CAPITAL*	**400.635**	**100,00%**	**2.003.156.705.785**

Identitas Pemegang Saham

Shareholders Identity

Provinsi Papua

Gubernur Provinsi Papua terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi Pemegang Saham Pengendali Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Papua Province

Papua province selected during the administration period automatically becomes the controlling shareholder of Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kota Jayapura

Walikota Jayapura terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Jayapura Municipal Government

Jayapura Mayor elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua,until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Jayapura

Bupati Jayapura terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Jayapura Regency Government

Jayapura Regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

Bupati Jayawijaya terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Jayawijaya Regency Government

Jayawijaya Regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya

Bupati Puncak Jaya terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Puncak Jaya Regency Government

Puncak Jaya Regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Merauke

Bupati Merauke terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Merauke Regency Government

Merauke regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor

Bupati Biak Numfor terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Biak Numfor Regency Government

Biak Noemfoor Regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen

Bupati Yapen Waropen terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Yapen Waropen Regency Government

Yapen Waropen Regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Nabire

Bupati Nabire terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Nabire Regency Government

Nabire Regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Paniai

Bupati Paniai terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Paniai Regency Government

Paniai Regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Mimika

Bupati Mimika terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Mimika Regency Government

Mimika Regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua , until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Sarmi

Bupati Sarmi terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Sarmi Regency Government

Sarmi Regents elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Identitas Pemegang Saham

Shareholders Identity

Pemerintah Kabupaten Tolikara

Bupati Tolikara terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Tolikara Regency Government

Tolikara Regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Waropen

Bupati Waropen terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Waropen Regency Government

Regent Waropen elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Yahukimo

Bupati Yahukimo terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Yahukimo Regency Government

Yahukimo Regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Asmat

Bupati Asmat terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Asmat Regency Government

Asmat Regents elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Keerom

Bupati Keerom terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Keerom Regency Government

Keerom Regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang

Bupati Pegunungan Bintang terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Pegunungan Bintang Regency Government

Pegunungan Bintang regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Supiori

Bupati Supiori terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Supiori Regency Government

Supiori Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel

Bupati Boven Digoel terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Boven Digoel Regency Government

Boven Digoul Regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Mappi

Bupati Mappi terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Mappi Regency Government

Mappi Regent elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until thefinancial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya

Bupati Lanny Jaya terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Lanny Jaya Regency Government

Lanny Jaya Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Yalimo

Bupati Yalimo terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Yalimo Regency Government

Yalimo Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya

Bupati Memberamo Raya terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Memberamo Raya Regency Government

Memberamo Raya Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Identitas Pemegang Saham

Shareholders Identity

Pemerintah Kabupaten Nduga

Bupati Nduga terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Nduga Regency Government

Nduga Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Dogiyai

Bupati Dogiyai terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Dogiyai Regency Government

Dogiyai Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Puncak

Bupati Puncak terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Puncak Regency Government

Puncak Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Memberamo Tengah

Bupati Memberamo Tengah terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Central Mamberamo Regency Government

Central Memberamo Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Intan Jaya

Bupati Intan Jaya terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Intan Jaya Regency Government

Intan Jaya Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Deiyai

Bupati Deiyai terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Deiyai Regency Government

Deiyai Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the fiscal year2017.

Provinsi Papua Barat

Gubernur Provinsi Papua Barat terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi Pemegang Saham Pengendali Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

West Papua Province

Governor of West Papua Province during the period of administration elected automatically become the controlling shareholder of Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kota Sorong

Walikota Sorong terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Sorong Municipal Government

Sorong Mayor was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Manokwari

Bupati Manokwari terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Manokwari Regency Government

Manokwari Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Sorong

Bupati Sorong terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Sorong Regency Government

Sorong Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan

Bupati Sorong Selatan terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

South Sorong Regency Government

South Sorong Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Identitas Pemegang Saham

Shareholders Identity

Pemerintah Kabupaten Fak-Fak

Bupati Fak-Fak terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Fak-Fak Regency Government

Fak-Fak Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni

Bupati Teluk Bintuni terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Teluk Bintuni Regency Government

Teluk Bintuni Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Kaimana

Bupati Kaimana terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Kaimana Regency Government

Kaimana Regent waselected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

Bupati Raja Ampat terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Raja Ampat Regency Government

Raja Ampat Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama

Bupati Teluk Wondama terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Teluk Wondama Regency Government

Teluk Wondama Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Tambrauw

Bupati Tambrauw terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Tambrauw Regency Government

Tambrauw Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the fiscal year 2017.

Pemerintah Kabupaten Maybrat

Bupati Maybrat terpilih pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua, hingga tahun buku 2017.

Maybrat Regency Government

Maybrat Regent was elected during the administration period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the financial year 2017.

Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak

Bupati Pegunungan Arfak pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papu, hingga tahun buku 2017.

Pegunungan Arfak Regency Government

Arfak Mountains regent during the reign period automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the 2017 financial year.

Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan

Bupati Manokwari Selatan pada masa periode pemerintahannya otomatis menjadi salah satu Pemegang Saham Bank Papua. Hingga tahun buku 2017.

South Manokwari Regency Government

South Manokwari Regent during the period of his rule automatically becomes one of the Shareholders of the Bank Papua, until the 2017 financial year.

Koperasi Serba Usaha Bank Papua Berdikari

Ketua pengurus Koperasi Serba Usaha Bank Papua terpilih pada masa periode kepengurusan otomatis menjadi Pemegang Saham Bank Papua.

Business Multipurpose Cooperative Bank Papua Berdikari

Chairman of the Multipurpose Business Cooperative of Bank Papua was elected during the period of stewardship automatically became a Shareholder of Bank Papua.

Struktur Organisasi

Organizational structure

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 11.1/DIR-BPD/III/2017 tentang Struktur Organisasi dan Profil Pekerjaan (*Job Profile*) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, maka Struktur Organisasi Bank Papua adalah sebagai berikut:

Based on Board of Directors Decree No. 11.1/DIR-BPD/III/2017 About Standard Operating Procedure (SOP) Organization Structure PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, the Organizational Structure of Bank Papua is as follows:

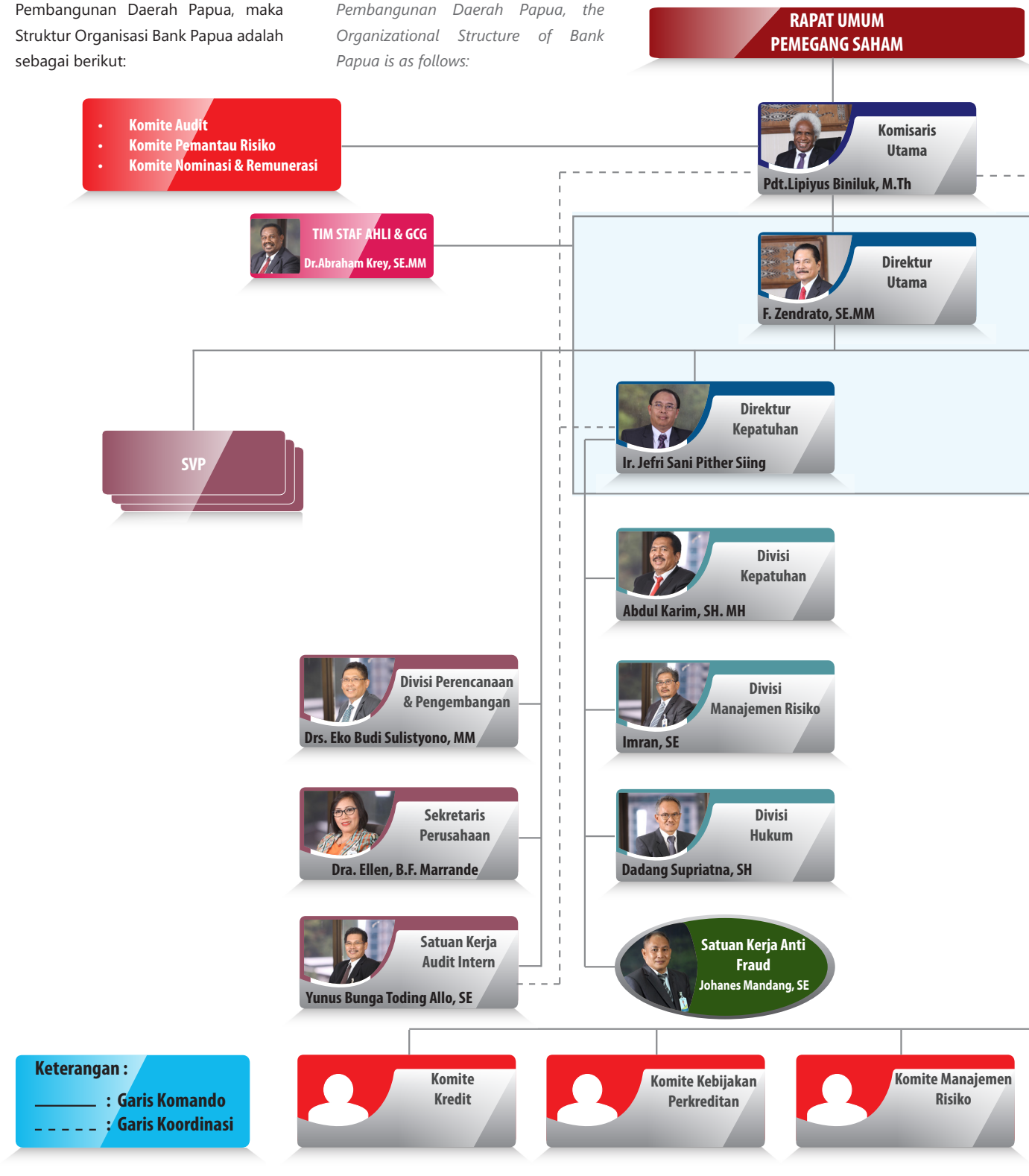

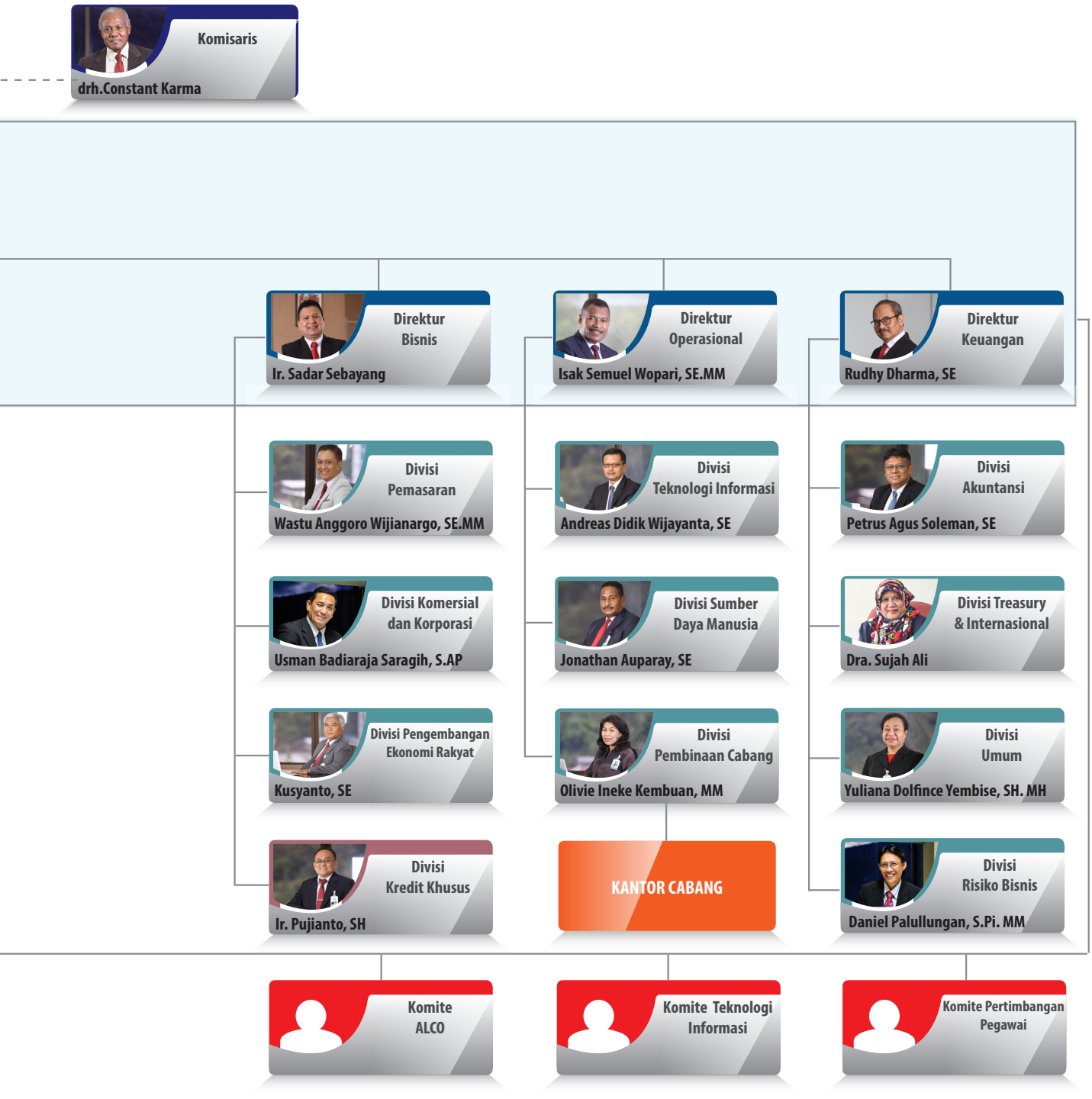
Komisaris
drh.Constant Karma
Direktur Bisnis
Ir. Sadar Sebayang
Direktur Operasional
Isak Semuel Wopari, SE.MM
Direktur Keuangan
Rudhy Dharma, SE
Divisi Pemasaran
Wastu Anggoro Wijianargo, SE.MM
Divisi Teknologi Informasi
Andreas Didik Wijayanta, SE
Divisi Akuntansi
Petrus Agus Soleman, SE
Divisi Komersial dan Korporasi
Usman Badiaraja Saragih, S.AP
Divisi Sumber Daya Manusia
Jonathan Auparay, SE
Divisi Treasury & Internasional
Dra. Sujah Ali
Divisi Pengembangan Ekonomi Rakyat
Kusyanto, SE
Divisi Pembinaan Cabang
Olivie Ineke Kembuan, MM
Divisi Umum
Yuliana Dolfince Yembise, SH. MH
Divisi Kredit Khusus
Ir. Pujianto, SH
KANTOR CABANG
Divisi Risiko Bisnis
Daniel Palullungan, S.Pi. MM
Komite ALCO
Komite Teknologi Informasi
Komite Pertimbangan Pegawai

Profil Anggota Komite
Committee Member's Profile

Jonathan Sesa, SE
Anggota Komite Audit & Pemantau Risiko
Members of the Audit & Risk Oversight Committee

57 tahun. Lahir di Tator 25 Desember 1960. Menjabat sebagai Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tahun Bulan Juni tahun 2017. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi di Universitas Hasanudin Makassar tahun 1987. Jabatan terakhir beliau adalah Pensiunan Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

57 years old. Born in Tator December 25, 1960. Occupied as a Member of the Board of Commissioners of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since the year of June 2017. Obtained his Bachelor of Accounting degree at the Faculty of Economics at Hasanudin University Makassar in 1987. His last position was Retired Employee PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat :
- Manajemen Risiko Level I penyelenggara BSMR pada tanggal 26 Oktober 2017.

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan :
- Akuntansi Perbankan (IHT-PSAK 71) penyelenggara Bank Papua pada tanggal 10 November 2017.
- Manajemen Risiko, pembekalan sertifikasi Manajemen Risiko penyelenggara Talents Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2017.

Pengalaman Kerja antara lain:
- Ketua Kelompok Wilayah II Satuan Pengawasan Intern Pada Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua pada tahun 1996.
- Kepala Seksi Kredit pada Kantor Cabang Bank Papua Wamena pada tahun 1998.
- Kepala Seksi Akuntansi pada Kantor Cabang Bank Papua Wamena pada tahun 1999.

Following and having a Certificate:
- *Risk Management Level I organizer by BSMR on 26 October 2017.*

Attended Education and Training:
- *Banking Accounting (IHT-PSAK 71) organizer by Bank Papua on November 10, 2017.*
- *Risk Management, certification of Risk Management organizer by Talents Indonesia on October 23, 2017.*

Work Experience include:
- *Chairman of Group II Region Internal Audit Unit at the Office of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua in 1996.*
- *Head of Loan Section at Bank Wamena Branch Office in 1998.*
- *Head of Accounting Section at Bank Wamena Branch Office in 1999.*

- Kepala Seksi Akuntansi pada Kantor Cabang Bank Papua Fak-Fak pada tahun 2001.
- Kepala Departemen Keuangan pada Kantor Cabang Bank Papua Sorong pada tahun 2005.
- Kepala Cabang Pembantu Waisai pada Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua pada tahun 2006.
- Kepala Departemen Keuangan & Akuntansi pada Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua pada tahun 2007.
- Kepala Departemen Pembinaan & Pemantauan Bisnis Cabang Pada Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua pada tahun 2009.
- Wakil Kepala Cabang Utama Jayapura pada Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua pada tahun 2009.
- Kepala Cabang Timika pada Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua pada tahun 2010.
- Kepala Divisi Perencanaan & Keuangan pada Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua pada tahun 2012.
- Kepala Divisi Akuntansi pada Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua pada tahun 2012.
- Masa Persiapan Pensiunan pada Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tahun 2015.

Diangkat menjadi Anggota Komite Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 29 DIR-BPD/ VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.

- *Head of Accounting Section at Branch Office of Bank Papua Fak-Fak in 2001.*
- *Head of Departemen Finance at Branch Office of Bank Papua Sorong in 2005.*
- *Waisai Sub-Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua in 2006.*
- *Head of Departemen Finance & Accounting at the Office of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua in 2007.*
- *Head of Departemen Business Development & Monitoring Branch Office PT. Bank Pembangunan Daerah Papua in 2009.*
- *Deputy Head of Main Branch of Jayapura at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua in 2009.*
- *Timika Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua in 2010.*
- *Head of Planning & Finance Division at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua in 2012.*
- *Head of Accounting Division at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua in 2012.*
- *Retirement Preparation Time at the Office of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua 2015.*

Appointed as a Member of the Board of Commissioners by the Decree No. BOD. 29 DIR-BPD / VI / 2017 dated June 12, 2017.

Profil Anggota Komite
Committee Member's Profile

Marthin Yanis Warikar, SE
Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

57 tahun. Lahir di Biak 03 Maret 1960. Menjabat sebagai Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tahun Bulan Juni tahun 2017. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi di Universitas Cenderawasih di Jayapura tahun 1999. Jabatan terakhir beliau adalah Pensiunan Pegawai Bank BNI.

57 years old. Born in Biak March 03, 1960. Occupied as a Member of the Board of Commissioners Committee of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since the year of June 2017. Obtained his Bachelor of Economics degree at the Faculty of Economics at Cenderawasih University in Jayapura in 1999. His last position was Retired Employee of Bank BNI.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat :
- Manajemen Risiko Level I penyelenggara BSMR pada tanggal 26 Oktober 2017.

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan :
- Manajemen Risiko, pembelakan sertifikasi Manajemen Risiko penyelenggara Talents Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2017.

Pengalaman Kerja antara lain:
- Divisi Pendidikan dan Latihan pada Kantor Bank BNI Jakarta, tahun 1983.
- Asisten Adm Cabang pada Kantor Bank BNI Cabang Jakarta, tahun 1985.
- Asisten Administrasi dan Pembukuan pada Kantor Bank BNI Jatinegara Jakarta, tahun 1986.
- Asisten Transaksi DNK pada Kantor Bank BNI Jatinegara Jakarta, tahun 1987.

Following and having a Certificate:
- *Risk Management Level I organized by BSMR on 26 October 2017.*

Attended Education and Training:
- *Risk Management, certification of Risk Management organized by Talents Indonesia on October 23, 2017.*

Work Experience include:
- *Education and Training Division at Bank BNI Jakarta Office, 1983.*
- *Assistant Adm Branch at Bank BNI Branch Office Jakarta, 1985.*
- *Adm System and Bookkeeping at Bank BNI Jatinegara Jakarta, 1986.*
- *Assistant of DNK Transaction at Bank BNI Jatinegara Jakarta, 1987.*

- Asisten Pelayanan Nasabah pada Kantor Bank BNI Jatinegara Jakarta, tahun 1989.
- Asisten Administrasi Kredit pada Kantor Bank BNI Jatinegara Jakarta, tahun 1990.
- Penyelia Administrasi Kredit pada Kantor Bank BNI Sorong Papua, Tahun 1995.
- Penyelia Pemasaran Kredit pada Kantor Bank BNI Jayapura Papua, Tahun 1998.
- Pemimpin KLN pada Kantor Bank BNI Abepura Jayapura Papua, Tahun 2002.
- Wakil Pemimpin Cabang pada Kantor Bank BNI Jayapura Papua, Tahun 2006.
- Wakil Pemimpin Cabang Baubau pada Kantor Bank BNI Baubau Sulawesi Tenggara, tahun 2011.

Diangkat menjadi Anggota Komite Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 29 DIR-BPD/ VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.

- *Customer Service Assistant at Bank BNI Jatinegara Jakarta, 1989.*
- *Assistant of Loan Adm at Bank BNI Jatinegara Jakarta Office, 1990.*
- *Supervisor of Loan Adm at BNI Bank Office of Sorong Papua, 1995.*
- *Marketing Loan Supervisor at BNI Jayapura Papua Office, 1998.*
- *KLN Leader at BNI Bank Office Abepura Jayapura Papua, 2002.*
- *Deputy Chief of Branch Office of BNI Jayapura Papua, 2006.*
- *Baubau Branch Manager Representative at BNI Baubau Southeast Sulawesi Regional Office 2011.*

Appointed as a Member of the Board of Commissioners by virtue of BOD Decree No. 29 DIR-BPD / VI / 2017 dated June 12, 2017.

Profil Anggota Komite
Committee Member's Profile

Ivant B. Simamora, S.Sos
Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of Risk Oversight Committee

41 tahun. Lahir di Lampung 13 Oktober 1976. Menjabat sebagai Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tahun Bulan Juni tahun 2017. Memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Administrasi Bisnis di Universitas Atmajaya di Jakarta tahun 2003. Jabatan terakhir beliau adalah Pensiunan Pegawai Bank Victoria Internasional.

41 years old. Born in Lampung October 13, 1976. Occupied as a Member of the Board of Commissioners of PT. Bank Pembangunan Daerah Papuasince June of 2017. Obtained his Bachelor degree in the Faculty of Business Administration at the University of Atmajaya Jakarta in 2003. His last position was the Retired of Bank Victoria International.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat :
- Manajemen Risiko Level I penyelenggara BSMR pada tanggal 26 Oktober 2017.

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan :
- Manajemen Risiko, pembelakan sertifikasi Manajemen Risiko penyelenggara Talents Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2017.
- One day Training On " Anti Pencucian Uang & Pencegahaan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)" Held in Bank Victoria Sub Branch Fatmawati On June 9, 2012.
- Training " Funding Officer Training Program (FOTP 7) – APU & PPT" Held in Menara Bank Mega Learning Centre 12floor, On Desember 1-23 December, 2010.

Following and having a Certificate:
- *Risk Management Level I organized by BSMR on 26 October 2017.*

Attended Education and Training:
- *Risk Management, certification of Risk Management organized by Talents Indonesia on October 23, 2017.*
- *One day Training On "Anti Money Laundering & Terrorism Financing Prevention (APU-PPT)" Held in Victoria Bank Sub Branch Fatmawati On June 9, 2012.*
- *Training "Funding Officer Training Program (FOTP 7) - APU & PPT" Held in Tower Bank Mega Learning Center 12floor, On December 1-23 December, 2010.*

- On day Advance Training I On " System and Character Building" Held in Digital Media Technology Learning Centre, tahun 2008.
- Supervisory Training On "Leadership and Team Building Held in Villa Via Renata, Cimacan On February 1-3, 2008.
- Three-days Basic Training On "*Profile* & Product" held in Digital Media Technology Learning Centre, tahun 2007.

Pengalaman kerja antara lain:
- Marketing Staf at Lippo Bukit Sentul cabang Glory (Property) Jakarta, tahun 2001.
- Sales at PT. Cahaya Andhika (Nestle Product) Jakarta, tahun 2002.
- Sales Officer at Standard Chartered Bank Jakarta, tahun 2003.
- Casual Production Assistant at PT. Dunia Visitama Produksi (Indonesia Idol I) Jakarta, tahun 2004.
- Kaise Collector at PT. Bumicitra Sentosa Jaya Jakarta, tahun 2006.
- Senior Production Asistant at PT. Megah Nukleusindo (Production House) Jakarta, Tahun 2007.
- Account Manager at PT. Digital Media Technology (Legitimate CD/DVD Manufacture) Jakarta, Tahun 2007.
- Funding Officer Corporate at Bank Mega Citra Raya Banten, Tahun 2010.
- Branch Manager at Bank Victoria Internasional.Tbk Jakarta, tahun 2011.
- National Sales Manajer at PT. Inerco Global Internasional Jakarta, Tahun 2015.

Diangkat menjadi Anggota Komite Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 29 DIR-BPD/ VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.

- *On Day Advance Training I On "System and Character Building" Held in Digital Media Technology Learning Center, 2008.*
- *Supervisory Training On "Leadership and Team Building Held in Villa Via Renata, Cimacan On February 1-3, 2008.*
- *Three-days Basic Training On "Profile & Product" was held in Digital Media Technology Learning Center, 2007.*

Work experience include:
- *Marketing Staff at Lippo Bukit Sentul branch of Glory (Property) Jakarta, 2001.*
- *Sales at PT. Andhika Light (Nestle Product) Jakarta, 2002.*
- *Sales Officer at Standard Chartered Bank Jakarta, 2003.*
- *Casual Production Assistant at PT. World Visitama Production (Indonesia Idol I) Jakarta, 2004.*
- *Kaise Collector at PT. Bumicitra Sentosa Jaya Jakarta, in 2006.*
- *Senior Production Asistant at PT. Megah Nukleusindo (Production House) Jakarta, 2007.*
- *Account Manager at PT. Digital Media Technology (Legitimate CD / DVD Manufacture) Jakarta, 2007.*
- *Funding Officer of Corporate at Bank Mega Citra Raya Banten, 2010.*
- *Branch Manager at Victoria International Bank. Jakarta, in 2011.*
- *National Sales Manager at PT. Inerco Global Internasional Jakarta, Year 2015.*

Appointed as a Member of the Board of Commissioners by BOD Decree No.29 DIR-BPD / VI / 2017 dated June 12, 2017.

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer's Profile

Dra. Ellen B.F. Marande
Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan
Head of Corporate Secretary Division

52 tahun. Lahir di Limboto pada tanggal 09 Februari 1965. Bekerja di Bank Papua sejak tahun 1992. Menjabat sebagai Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan sejak tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan SK Direksi Nomor 32.1/KEPEG/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Ahli Tugas Pegawai. Memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 1989.

52 years. Born in Limboto on February 09, 1965. She has been working at Bank Papua since 1992. Occupied as Head of Corporate Secretary Division from 27 February 2017 based on Decree of the Board of Directors Number 32.1 / KEPEG / I / 2017 dated January 20, 2017 regarding Employee Duties Experts. Obtained with a Bachelor degree in State Administration at Sam Ratulangi University in Manado in 1989.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat antara lain:
- Manajemen Risiko Tingkat IV Penyelenggara BSMR tanggal 28 September 2015.
- Sertifikasi Pengadaan Barang & Jasa penyelenggara LPK tanggal 07 April 2012
- Sertifikasi Pimpinan Cabang Angkatan 169 LPPI Tanggal 17 Februari 2012.

Following and owning Certificates include:
- *Level IV Risk Management Organized by BSMR dated September 28, 2015.*
- *Certification of Goods & Services Provider Procurement organized by LPK on 07 April 2012*
- *Branch Manager Certification Branch Batch169 Organized by LPPI Date February 17, 2012.*

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan antara lain:
- 01 Januari 2000 Sekretaris Perusahaan/Dekom, Manajemen Bagi Sekretaris penyelenggara LPPM Jakarta.
- 01 Januari 2006 Manajemen Umum, Pelatihan Nas. Peraturan Protokol Badan Usaha Penyelenggara Institut Era Indonesia (INERSIA)
- 17 April 2007 *Leadership Skill*, Kepemimpinan Efektif penyelenggara LPPM.
- 11 Agustus 2008 Strategi Korporasi, pola pembiayaan orang miskin penyelenggara LPPI.
- 11 Februari 2009 Kepatuhan, *Good Corporate Governance* (GCG) penyelenggara PT. Insan Abhi Yasa (IAY).
- 06 November 2009 Character and Culture Building Role Model Penyelenggara Synergi.
- 06 Mei 2013 Manajemen SDM Penyusunan KPI

Has followed the Education and Training, among others:
- *01 Januari 2000 Corporate Secretary / BOC, Management for the Secretary of LPPM Jakarta.*
- *01 Januari 2006 General Management, National Training. Protocol Regulations Business Entity organized by Institut Era Indonesia (INERSIA).*
- *17 April 2007 Leadership Skill, Effective Leadership organized by LPPM.*
- *11 Agustus 2008 Corporate Strategy, financing pattern of the poor organized byLPPI.*
- *11 Februari 2009 Compliance, Good Corporate Governance (GCG) organized byPT. Insan Abhi Yasa (IAY).*
- *06 November 2009 Character and Culture Building Role Model organized by Synergi.*
- *06 Mei 2013 HR Management Preparation of KPI*

penyelenggara Jhonson Indonesia.
- 31 Mei 2013 Manajemen Risiko, Program Pemeliharaan sertifikasi manajemen *risko* penyelenggara Talents Indonesia.
- 22 Mei 2014 *Busines Process* aplikasi study kelayakan penyelenggara Pusat Training Perbankan.
- 30 Juni 2014 Perencanaan Karir, assessment potensi & Kompetensi pegawai calon pemimpin Divisi, Wilayah serta Cabang penyelenggara PT. Aplikasi Sistem Bisnis.
- 14 Maret 2016 Manajemen Risiko, Papi 2008 & PSAK 55 Revisis Batch 1 penyelenggara PT. Multi Talenta *Consulting*.
- 22 Maret 2017 Strategi Korporasi *The Power of Ceredibility and Trust* penyelenggara PT. Media PR Indonesia.
- 15 November 2017 *Business Process* Transformasi Bank Papua penyelenggara Talents Indonesia.

Jabatan penting yang pernah di pegang antara lain:
- Kepala Departemen Pembinaan & Supervisi Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 01 Juni 2016 sesuai SK Direksi nomor: 117/ KEPEG/IV/2016 tanggal 29 April 2016.
- Kepala Cabang Teminabuan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 01 September 2015 sesuai SK Direksi nomor: 72/ KEPEG/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015.
- Senior Spesialis HUMAS & CSR pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 26 Januari 2015 sesuai SK Direksi nomor: 02/ KEPEG/I/2015 tanggal 08 Januari 2015.
- Kepala Departemen Pengembangan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 16 September 2013 sesuai SK Direksi nomor: 186/ KEPEG/IX/2013 tanggal tanggal 16 September 2013.
- Kepala Departemen Pengeloaan Proyek pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 30 Juli 2012 sesuai SK Direksi nomor: 98/KEPEG/ VI/2012 tanggal tanggal 14 Juni 2012.
- Kepala Cabang Pembantu Abepura pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 08 Februari 2010 sesuai SK Direksi nomor: 04/ KEPEG/I/2010 tanggal tanggal 18 Januari 2010.
- Kepala Departemen Sekretaris Perusahaan & Protokoler pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 04 Februari 2009 sesuai SK Direksi nomor: 03/KEPEG/I/2009 tanggal 27 Januari 2009.

organized by Jhonson Indonesia.
- *31 Mei 2013 Risk Management, Maintenance Program of Risk Management Certification organized by Talents Indonesia.*
- *22 Mei 2014 Busines Process application feasibility study organized by of Banking Training Center.*
- *30 Juni 2014 Career Planning, Potential Assessment & Competence of candidates for Division, Region and Branch Officer organized by PT. Sistem Aplikasi Bisnis.*
- *14 Maret 2016 Risk Management, Papi 2008 & PSAK 55 Revision Batch 1 organized by PT. Multi Talenta Consulting.*
- *22 Maret 2017 Corporate Strategy The Power of Ceredibility and Trust organized by PT. Media PR Indonesia.*
- *15 November 2017 Business Process Transformation of Bank Papua organized by Talents Indonesia.*

Important positions ever held include:
- *Head of Departemen Coaching & Supervision Loan at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since June 1, 2016 according to Decree of the Board of Directors number: 117 / KEPEG / IV / 2016 dated April 29, 2016.*
- *Teminabuan Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since September 01, 2015 according to BOD Decree No.: 72 / KEPEG / VIII / 2015 dated 03 August 2015.*
- *Senior Specialist of PR & CSR at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since January 26, 2015 according to BOD Decree number : 02 / KEPEG / I / 2015 dated 08 January 2015.*
- *Head of Departemen Development at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since September 16, 2013 according to according to BOD Decree number: 186 / KEPEG / IX / 2013 dated 16 September 2013.*
- *Head of Departemen Project management at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since July 30, 2012 according to according to BOD Decree number: 98 / KEPEG / VI / 2012 dated June 14, 2012.*
- *Abepura Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since the date of 08 February 2010 according to the according to BOD Decree number: 04 / KEPEG / I / 2010 dated January 18, 2010.*
- *Head of Departemen Corporate Secretary & Protocol at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since February 4, 2009 according to according to BOD Decree number: 03 / KEPEG / I / 2009 dated January 27, 2009.*

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer's Profile

Drs. Eko Budi Sulistyono, MM
Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan
Head of Planning and Development Division

55 tahun. Lahir di Surabaya pada tanggal 07 Oktober 1962. Bekerja di PT. Bank Papua sejak tahun 1989. Menjabat sebagai Kepala Divisi Perencanaan & Pengembangan sejak tanggal 18 Juli 2016 berdasarkan SK Direksi Nomor: 161/KEPEG/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Ahli Tugas Pegawai. Memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Universitas Cenderawasih tahun 1987 dan Magister Ekonomi Manajemen di Universitas Islam Indonesia Yogjakarta tahun 2004.

55 years old. Born in Surabaya on October 7, 1962. He has been working at PT. Bank Papua since 1989. Occupied as Head of Planning & Development Division since July 18, 2016 based on Decree of the Board of Directors Number: 161 / KEPEG / VI / 2016 dated June 16, 2016 regarding Employee Duties Experts. Obtained his Bachelor of Forestry degree at Cenderawasih University in 1987 and Master of Management Economics at the Islamic University of Indonesia Yogjakarta in 2004.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat antara lain:
- Sertifikasi Audit Intern tingkat Dasar 1 Yayasan PIA pada tanggal 28 Maret 2016.
- Program SESPIBANK Angkatan Ke-55 LPPI JKT pada tanggal 10 Oktober 2011
- Manajemen Risiko Tingkat IV Penyelenggara BSMR pada tanggal 25 Juni 2011.
- Program sertifikasi Pimpinan Cabang Angkatan 169 LPPI pada tanggal 01 Januari 1997

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan antara lain:
- 14 November 1994 Pengelolaan SDM, Kepemimpinan & Pengembangan Staf penyelenggara Bank DKI.
- 23 September 2003 Perencanaan & Anggaran Keuangan, Rethungking Channel MGT penyelenggara MARKPLUS.
- 14 September 2005 Perencanaan & Anggaran Keuangan, Strategic *Business* Planning penyelenggara GML.
- 01 Januari 2006 Penilaian Kinerja, Penyusunan KPI & Sosisalisasi Budaya Kerja penyelenggara PT. Dunamis.
- 27 September 2007 Perencanaan & Anggaran Keuangan, rencana kerja Program Edukasi Perbankan 2007 penyelenggara Bank Indonesia (BI).
- 19 November 2007 Perencanaan & Anggaran Keuangan, *Budgeting* & *Monitoring* penyelenggara SIDE *Consulting*.
- 22 Juli 2009 *Customer Service Orientation*, *The power Of service marketing* penyelenggara Prasetya Mulya.

Following and having a Certificates include:
- *Internal Audit Certification of Primary Level 1 PIA Foundation on 28 March 2016.*
- *SESPIBANK Program of the 55th Batch LPPI JKT on October 10, 2011*
- *Risk Management Level IV organized by BSMR on June 25, 2011.*
- *Certification program of Branch Manager Batch169 LPPI on 01 January 1997.*

Has followed the Education and Training, among others:
- *14 November 1994 HR Management, Leadership & Development Staff organized by Bank DKI.*
- *23 September 2003 Financial Planning & Budgeting, Rethungking Channel MGT organized by MARKPLUS.*
- *14 September 2005 Financial Planning & Budgeting, Strategic Business Planning GML organizer.*
- *01 Januari 2006 Performance Appraisal, Compilation of KPI & Cultural Culture organized byPT. Dunamis.*
- *27 September 2007 Financial Planning & Budgeting, work plan of Banking Education Program 2007 organized by Bank Indonesia (BI).*
- *19 November 2007 Financial Planning & Budgeting, Budgeting & Monitoring organized by SIDE Consulting.*
- *22 Juli 2009 Customer Service Orientation, The power of service marketing organized by Prasetya Mulya.*

- 06 April 2010 Kepatuhan, Peran Bank Dalam Mencegah serta Memberantas Kejahatan Perbankan penyelenggara FKDKP.
- 15 Oktober 2012 Kepemimpinan madya (DKMA), *Style Based Leadershio Training* Penyelenggara PT. Magnif Solution.
- 30 Juni 2014 Perencanaan Karir, Assesment Potensi & Kompetensi Pegawai Calon Pemimpin Divisi, Wilayah dan Cabang penyelenggara PT. Aplikasi Sistem Bisnis.
- 22 Juni 2015 *Business Process*, Persiapan Pra Purnabakti tahun 2015 penyelenggara PT. Insmart.
- 25 November 2016 Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko, Leadership for Managers, penyelenggara ASBANDA.
- 23 Maret 2017 *Business Process*, Seminar BPDSI dan Penarikan Undian Nasional Penyelenggara ASBANDA.
- 19 Oktober 2017 Perencanaan Karir, Sistem Pengembangan *Job Grading* Penyelenggara Johnson Indonesia.
- 15 November 2017 *Business Process*, Transformasi Bank Papua Penyelenggara Talents Indonesia.

Jabatan penting yang pernah di pegang antara lain:

- Senior Executive Auditor Umum pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 29 Maret 2016 sesuai SK Direksi nomor: 73/KEPEG/III/2016 tanggal 01 Maret 2016.
- Kepala Cabang Abepura pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 16 Juni 2015 sesuai SK Direksi nomor: 41.1/KEPEG/V/2015 tanggal 19 Mei 2015.
- Kepala Cabang Serui pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 02 Mei 2012 sesuai SK Direksi nomor: 46/KEPEG/III/2012 tanggal 02 Maret 2012.
- Kepala Cabang Merauke pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 01 Oktober 2009 Sesuai SK Direksi nomor: 99/KEPEG/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009.
- Kepala Cabang Biak pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 01 Agustus 2008 sesuai SK Direksi nomor: 58/KEPEG/V/2008 tanggal 22 Mei 2008.
- Kepala Departemen Perencanaan Perusahan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 01 Februari 2005 sesuai SK Direksi nomor: 01/DIR-BPD/II/2005 tanggal 01 Februari 2005
- Kepala Cabang Manokwari pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 01 Januari 2002 sesuai SK Direksi nomor: 01/KEPEG/I/2002 tanggal 02 Januari 2002
- Kepala Cabang Wamena pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 01 Februari 2000 sesuai SK Direksi nomor: 16/KEPEG/II/2000 tanggal 01 Februari 2000

- *06 April 2010 Compliance, Bank's Role in Preventing and Combating Banking Crime organized by FKDKP.*
- *15 Oktober 2012 Middle Leadership (DKMA), Style Based Leaders Training Training organized by PT. Magnif Solution.*
- *30 Juni 2014 Career Planning, Assessment of Potential & Competence of Prospective Leaders Division, Region and Branch Officer organized by PT. Sistem Aplikasi Bisnis.*
- *22 Juni 2015 Business Process, Pre-Retirement Preparation in 2015 organized byPT. Insmart*
- *25 November 2016 Risk Management Certification Maintenance Program, Leadership for Managers, organized by ASBANDA.*
- *23 Maret 2017 Business Process, BPDSI Seminar and Drawing Prize organized by ASBANDA.*
- *19 Oktober 2017 Career Planning, Job Grading Development System organized by Johnson Indonesia.*
- *15 November 2017 Business Process, Transformation of Bank Papua organized by Talents Indonesia.*

Important positions ever held include:

- *Senior Executive Auditor General of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since March 29, 2016 according to BOD Decree number: 73 / KEPEG / III / 2016 dated 01 March 2016.*
- *Abepura Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since June 16, 2015 according BOD Decree number: 41.1 / KEPEG / V / 2015 dated May 19, 2015.*
- *Serui Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since May 02, 2012 according to BOD Decree number: 46 / KEPEG / III / 2012 dated 02 March 2012.*
- *Merauke Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since October 1, 2009 according to BOD Decree number: 99 / KEPEG / VIII / 2009 dated August 21, 2009.*
- *Biak Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since August 1, 2008 according to BOD Decree number: 58 / KEPEG / V / 2008 dated May 22, 2008.*
- *Head of Departemen Company Planning at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since February 1, 2005 according to BOD Decree number: 01 / DIR-BPD / II / 2005 dated 01 February 2005*
- *Manokwari Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since January 1, 2002 according to BOD Decree number: 01 / KEPEG / I / 2002 dated 02 January 2002*
- *Wamena Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since February 1, 2000 according to BOD Decree number: 16 / KEPEG / II / 2000 dated 01 February 2000*

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer's Profile

Yunus Bunga Todingallo, SE
Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
Chairman of Internal Audit Unit

54 tahun. Lahir di Toraja pada tanggal 06 Juli 1963. Bekerja di Bank Papua sejak tahun 1991. Menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sejak 09 Juni 2017 sesuai SK Nomor:179/KEPEG/V/2017 pada tanggal 19 Mei 2017 tentang Ahli Tugas Pegawai. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Cenderawasih Manokwari tahun 1987.

54 years old. Born in Toraja on July 6, 1963. He has been working at Bank Papua since 1991. Occupied as Head of Internal Audit Unit since June 9, 2017 in accordance with Decree No. 179 / KEPEG / V / 2017 on May 19, 2017 regarding expert duty employees. Obtained his Bachelor of Economics degree at Cenderawasih University Manokwari in 1987

Mengikuti dan memiliki Sertifikat Manajemen Risiko antara lain:
- Program SESPIBANK Angkatan Ke-65 LPPI Jakarta pada tanggal 25 November 2016.
- *Sertified Fraud Examiner* (CFE) Penyelenggara LPFA pada tanggal 25 November 2014.
- Manajemen Risiko Tingkat IV Penyelenggara BSMR pada tanggal 21 April 2012.
- Sertifikasi Audit Intern tingkat Manajerial Yayasan PIA pada tanggal 01 Agustus 2011.
- Program Sertifikasi Pimpinan Cabang Angkatan 149 LPPI pada tanggal 13 Maret 2006.
- Sertifikasi Audit Intern Tingkat Dasar 1 Yayasan PIA pada tanggal 13 April 2004.

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan antara lain:
- 14 September 1992 Audit Intern, Satuan Pengawasan Audit Intern Penyelenggara BPD Jayapura.
- 05 Juli 1993 Audit Intern, Dasar-Dasar pemeriksaan I Penyelenggara STAN Jakarta.
- 22 Juni 1995 Audit Intern, UP Grading Petugas Pemeriksa Intern Bank Penyelenggara BPD Jayapura PT.Trico-BPKP.
- 16 September 2002 Audit Intern, Pelatihan EDP Audit Penyelenggara YPIA.
- 02 Februari 2004 Kepatuhan, Penilaian Kesehatan Bank Berbasis Risiko, Penyelenggara LPPI.
- 01 Januari 2006 Perencaan Karir, Pendidikan Kenaikan Pangkat/Gol C4-D1 Penyelenggara LPPI.
- 15 Oktober 2008 Pemeriksaan Intern/Audit, Investigasi untuk SPI BUMN & BUMD Angkatan 2 Penyelenggara LEMBANGTEK.

Following and having Risk Management Certificates include:
- *SESPIBANK Program batch 65th LPPI Jakarta on 25 November 2016.*
- *Sertified Fraud Examiner (CFE) organized by LPFA on November 25, 2014.*
- *Level IV Risk Management organized by BSMR on 21 April 2012.*
- *Certification of Managerial Internal Audit Level organized by PIA Foundation on August 01, 2011.*
- *Branch Manager Certification Program batch 149 organized by LPPI on 13 March 2006.*
- *Internal Audit Certification of 1st Primary Level organized by PIA Foundation on 13 April 2004.*

Has followed the Education and Training, among others:
- *14 September 1992 Internal Audit, Internal Audit Monitoring Unit organized by BPD Jayapura.*
- *05 Juli 1993 Internal Audit, Fundamentals of Inspection I organized by STAN Jakarta.*
- *22 Juni 1995 Internal Audit, UP Grading Officer Internal Auditor Bank organized by BPD jayapura PT.Trico-BPKP.*
- *16 September 2002 Internal Audit, Audit EDP Training organized by YPIA.*
- *02 Februari 2004 Compliance, Risk-Based Bank Rating, Audit organized by LPPI.*
- *01 Januari 2006 Career Planning, Promotion Education / C4-D1 class organized by LPPI.*
- *15 Oktober 2008 Internal Audit, Investigative for SPI SOE & BUMD batch 2 organized by LEMBANGTEK.*

- 10 November 2009 Akuntansi Perbankan, PSAK 50 &55 Revisi 2006 penyelenggara RMCI.
- 14 Januari 2010 *Business Process*, Sistem Informasi manajemen Audit (SIMA) penyelenggara PT. Auditing Arin Prima.
- 25 Maret 2010 Manajemen Risiko, Integrasi Implementasi Audit Berbasis Risiko & PSAK 50/55 penyelenggara RMCI.
- 22 Februari 2012 Kepatuhan, Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris Bacth I Penyelenggara PPATK.
- 27 Februari 2012 Audit Intern, Audit Treasury penyelenggara Citra Insan Selaras.
- 23 Oktober 2012 Kepatuhan, Teknik Deteksi, Identifikasi, Analisa Fraud & *Money Laundering* penyelenggara PT. Determinasi Lintas Strategis Pro.
- 17 Juni 2013 Kepatuhan, *Good Corporate Governance* (GCG) penyelenggara EPC.
- 15 Juli 2013 Audit Intern, Audit Investigasi penyelengara LPFA.
- 30 Juni 2014 Perencanaan Karir, Asesment Potensi & Kompetensi Pegawai Calon Pemimpin Divisi, Wilayah & Cabang Penyelenggara PT. Aplikasi Sistem Bisnis.
- 20 Februari 2015 *Business Process*, End User olibs724 Domain Kepala Divisi & Kepala Kantor Cabang penyelenggara PT.CIP.
- 14 Maret 2016 Akuntansi Perbankan, PAPI 2008 & PSAK 55 Revisi Batch 1 penyelenggara PT. Infobank Lentera Cipta Kreasi.
- 25 November 2016 Manajemen Risiko, Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko penyelenggara PT. Multi Talenta *Consulting*.
- 20 Maret 2017 *Business Process*, Persiapan Pra Purnabakti Batcth I penyelenggara PT. Multi Talenta *Consulting*.
- 15 November 2017 *Business Process*, Transformasi Bank Papua penyelenggara Talents Indonesia.

Jabatan penting yang pernah di pegang antara lain:

- Kepala Divisi Manajemen Risiko pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 16 November 2015 sesuai SK Direksi nomor: 89/KEPEG/IX/2015 tanggal 11 September 2015.
- Kepala Cabang Bintuni pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 10 Januari 2014 sesuai SK Direksi nomor: 259/KEPEG/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.
- Senior Executive Specialis Anti Fraud pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 20 April 2012 sesuai SK Direksi nomor: 72/KEPEG/IV/2012 tanggal 20 April 2012.
- Senior Spesialis Auditor pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 01 Agustus 2008 sesuai SK Direksi nomor: 58/KEPEG/V/2008 tanggal 22 Mei 2008.
- Asisten Auditor pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 06 Juni 2003 sesuai SK Direksi nomor: 42/KEPEG/VI/2003 tanggal 06 Juni 2003.
- Ketua Kelompok Pengawasan Wilayah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 07 Oktober 1996 sesuai SK Direksi nomor: 29/KEPEG/X/1996 tanggal 07 Oktober 1996.

- *10 November 2009 Accounting for Banking, SFAS 50 & 55 2006 revision organized by RMCI.*
- *14 Januari 2010 Business Process, Management Information System Audit (SIMA) organized by PT. Auditing Arin Prima.*
- *25 Maret 2010 Risk Management, Integration of Risk Based Audit Implementation & SFAS 50/55 organized by RMCI.*
- *22 Februari 2012 Compliance, Anti Money Laundering & Terrorist Financing Prevention Bacth I organized by PPATK.*
- *27 Februari 2012 Internal Audit, Treasury Audit organized by Citra Insan Selaras.*
- *23 Oktober 2012 Compliance, Detection Technique, Identification, Fraud & Money Laundering Analysis organized by PT. Determinasi Lintas Strategis Pro.*
- *17 Juni 2013 Compliance, Good Corporate Governance (GCG) organized by EPC.*
- *15 Juli 2013 Internal Audit, Audit Investigation Survey organized by LPFA.*
- *30 Juni 2014 Career Planning, Assessment of Potential & Competence of Prospective Leaders Division, Region & Branch Officer by PT. Sistem Aplikasi Bisnis.*
- *20 Februari 2015 Business Process, End User olibs724 Domain Head Division & Branch Manager organized by PT.CIP.*
- *14 Maret 2016 Accounting for Banking, PAPI 2008 & SFAS 55 Revision Batch 1 organized by PT. Infobank Lentera Cipta Kreasi.*
- *25 November 2016 Risk Management, Risk Management Certification Maintenance Program organized by PT. Multi Talenta Consulting.*
- *20 Maret 2017 Business Process, Preparation Pre Retirement Batcth I organized by PT. Multi Talenta Consulting.*
- *15 November 2017 Business Process, Transformation of Bank Papua organized by Talents Indonesia.*

Important positions ever held include:

- *Head of Risk Management Division at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since November 16, 2015 according to BOD Decree number: 89 / KEPEG / IX / 2015 dated September 11, 2015.*
- *Head of Bintuni Branch at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since January 10, 2014 according to BOD Decree number: 259 / KEPEG / XII / 2013 dated December 16, 2013.*
- *Senior Executive Specialist of Anti Fraud at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since 20 April 2012 according to BOD Decree number: 72 / KEPEG / IV / 2012 dated 20 April 2012.*
- *Senior Auditor Specialist at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since August 1, 2008 according to BOD Decree number: 58 / KEPEG / V / 2008 dated 22 May 2008.*
- *Assistant Auditor at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since June 6, 2003 according to BOD Decree number: 42 / KEPEG / VI / 2003 dated June 06, 2003.*
- *Chairman of the Regional Oversight Group at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since October 7, 1996 according to BOD Decree number: 29 / KEPEG / X / 1996 dated 07 October 1996.*

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer's Profile

Abdul Karim, SH. MH
Kepala Divisi Kepatuhan
Head of Compliance Division

53 tahun. Lahir di Karumbu Wawo (Bima) pada tanggal 18 Juni 1964. Bekerja di Bank Papua sejak tahun 1991. Menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan sejak tanggal 20 April 2012 berdasarkan SK Direksi Nomor: 72/KEPEG/IV/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Ahli Tugas Pegawai. Memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Cenderawasih tahun 1990 dan Magister Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2011 dan saat ini sedang mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum / S3 di Universitas Hasanuddin Makassar.

53 years old. Born in Karumbu Wawo (Bima) on June 18, 1964. He has been working at Bank Papua since 1991. He has occupied as Head of Compliance Division since 20 April 2012 based on Decree of the Board of Directors Number: 72 / KEPEG / IV / 2012 dated 20 April 2012 on Task Force Employee. Obtained his law degree at Cenderawasih University in 1990 and Master of Law at Hasanuddin University Makassar in 2011 and is currently attending Doctoral Program of Law / Doctoral Science at Hasanuddin University Makassar.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat antara lain:
- Manajemen Risiko Tingkat V Penyelenggara BSMR pada tanggal 16 Juli 2016.
- Program SESPIBANK Angkatan Ke-60 LPPI Jakarta pada tanggal 21 Maret 2014.
- Program Sertifikasi Pimpinan Cabang Angkatan 172 LPPI pada tanggal 08 Maret 2013.
- Sertifikasi Profesional Internal Auditor (SPIA) penyelenggara BPD-STAN tanggal 01 Januari 2004.

Following and owning Certificates include:
- *Risk Management Level V organized by BSMR on July 16, 2016.*
- *SESPIBANK Program batch 60th LPPI JKT on March 21, 2014.*
- *Branch Certification Program batch 172 LPPI on March 08, 2013.*
- *Internal Auditor Professional Certification (SPIA) organized by BPD-STAN dated 01 January 2004.*

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan antara lain:
- 10 November 1997 Account Management/Clearing/ TRX lain, Account Officer penyelenggara LPPI.
- 01 Januari 2002 Manajemen Umum, Penerapan PP 12/98 & Keterkaitan dengan Ketenagakerjaan penyelenggara Ketenagakerjaan.
- 01 Januari 2005 Akuntansi Perbankan, Standar Akuntansi penyelenggara Kanwil Anggaran.
- 15 September 2006 Hukum Komersial, Workshop implementasi UU PT Perbankan penyelenggara Prima Counts.
- 24 Juni 2009 Kepatuhan, Peran Bank Pemberantas Kejahatan, Pidana & Pencucian Uang penyelenggara FKDKP.
- 15 Juni 2011 Kepatuhan, Workshop APU & PPT penyelenggara Bank Indonesia (BI).

Has followed the Education and Training, among others:
- *10 November 1997 Other Account Management / Clearing / TRX, Account Officer organized by LPPI.*
- *01 Januari 2002 General Management, Implementation of PP 12/98 & Linkage to Employment organized by Employment.*
- *01 Januari 2005 Accounting for Banking, Accounting Standard organized by Budget Regional Office.*
- *15 September 2006 Commercial Law, Workshop on the implementation of Act on PT Banking organized by Prima Counts.*
- *24 Juni 2009 Compliance, Role of Bank Eradicating Crime, Crime and Money Laundering organized by FKDKP.*
- *15 Juni 2011 Compliance, Workshop of APU & PPT organized by Bank Indonesia (BI).*

- 06 Juli 2011 Manajamen Risiko, Panduan Penilaian TKB penyelenggara RMG.
- 27 Februari 2012 Kepatuhan, Penerapan Strategi Anti Fraud Bank Umum penyelenggara ASBANDA.
- 13 Juni 2012 Kepatuhan, Workshop Implementing Enhanced Due Dilligence (EDD) on *High Risk* Area penyelenggara Bank Indonesia (BI).
- 05 Desember 2012 Kepatuhan, Workshop Peran Bank Dalam Mencegah & Menangani Kejahatan Perbankan penyelenggara FKDKP.
- 05 Juli 2013 Workshop GCG tentang Kegiatan Usaha & Jaringan kantor berdasarkan Modal Inti.
- 30 Juni 2014 Perencanaan Karir, Assessment Potensi & Kompetensi Pegawai Calon Pemimpin Divisi, Wilayah & Cabang penyelenggara PT. Aplikasi Sistem Bisnis.
- 17 Desember 2014 Manajemen Risiko, *Workshop Risk Based Bank Rating* (RBBR) penyelenggara OJK Provinsi Papua & Papua Barat.
- 01 April 2015 Kepatuhan, penyerapan Fungsi kepatuhan & pengawasan Internal untuk mencegah kejahatan perbankan penyelenggara FKDKP.
- 14 Maret 2016 Akuntansi Perbankan, Papi 2008 & PSAK 55 revisi Batch I penyelenggara PT. Infobank Lentera Cipta Kreasi.
- 10 November 2017 Akuntansi Perbankan, PSAK 71 penyelenggara Bank Papua.
- 15 November 2017 *Business Process*, Transformasi Bank Papua penyelenggara Talents Indonesia.
- 16 November 2017 Treasury (Alma), Pengelolaan *Liquidity Risk* dalam Rangka Implementasi Pelaksanaan Kerangka penyelenggara PT. Synergi Daya Utama.

Jabatan penting yang pernah di pegang antara lain:

- Kepala Departemen Kepatuhan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 09 Mei 2011 sesuai SK Direksi Nomor: 53/KEPEG/III/2011 tanggal 29 Maret 2011.
- Kepala Departemen Manajemen Risiko pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 03 Januari 2011 sesuai SK Direksi Nomor: 167/KEPEG/XII/2011 tanggal 14 Desember 2010.
- Senior Spesialis Manajemen Risiko pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 16 Februari 2009 sesuai SK Direksi nomor: 03/KEPEG/I/2009 tanggal 27 Januari 2009.
- Senior Spesialis Hukum pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 01 Agustus 2008 sesuai SK Direksi nomor: 58/KEPEG/V/2008 tanggal 22 Mei 2008.
- Kepala Cabang Pembantu Kurik pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 25 Januri 2000 sesuai SK Direksi nomor: 12/KEPEG/I/2000 tanggal 29 Maret 2011.

- *06 Juli 2011 Risk Management, Bank Rating Assessment Guides organized by RMG.*
- *27 Februari 2012 Compliance, Implementation of Anti Fraud Strategy of Commercial Bank by ASBANDA .*
- *13 Juni 2012 Compliance, Workshop on Implementing Enhanced Due Dilligence (EDD) on High Risk Area organized by Bank Indonesia (BI).*
- *05 Desember 2012 Compliance, Workshop The Role of Banks in Preventing & Handling Banking Crime organized by FKDKP.*
- *05 Juli 2013 GCG Workshop on Business Activities & Office Network based on Core Capital.*
- *30 Juni 2014 Career Planning, Potential Assessment & competency of Employee Candidate Leaders Division, Region & Branch organized by PT. Sistem Aplikasi Bisnis.*
- *17 Desember 2014 Risk Management, Risk Based Bank Rating Workshop (RBBR) organized by of OJK Papua & West Papua Province.*
- *01 April 2015 Compliance, absorption Internal compliance & monitoring function to prevent banking crime organized by FKDKP.*
- *14 Maret 2016 Accounting Banking, Papi 2008 & SFAS 55 revisions Batch I organized by PT. Infobank Lentera Cipta Kreasi.*
- *10 November 2017 Accounting for Banking, PSAK 71 organized by Bank Papua.*
- *15 November 2017 Business Process, Transformation of Bank Papua organized by Talents Indonesia.*
- *16 November 2017 Treasury (Alma), Management of Liquidity Risk in Implementation Framework Implementation Framework organized by PT. Synergi Daya Utama.*

Important positions ever held include:

- *Head of Compliance Department at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since May 9, 2011 according to BOD Decree Number: 53 / KEPEG / III / 2011 dated March 29, 2011.*
- *Head of Risk Management Department at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since January 03, 2011 according to BOD Decree Number: 167 / KEPEG / XII / 2011 dated December 14, 2010.*
- *Senior Risk Management Specialist at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since February 16, 2009 according to BOD Decreenumber: 03 / KEPEG / I / 2009 dated January 27, 2009.*
- *Senior Legal Specialist at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since August 1, 2008 according to BOD Decree number: 58 / KEPEG / V / 2008 dated 22 May 2008.*
- *Kurik Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since 25th of Januri 2000 according to BOD Decree number: 12 / KEPEG / I / 2000 dated March 29, 2011.*

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer's Profile

Imran, SE
Kepala Divisi Manajemen Risiko
Head of Risk Management Division

51 tahun. Lahir di Mario pada tanggal 23 Januari 1966. Bekerja di Bank Papua sejak tahun 1991. Menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko sejak 12 Juni 2017 berdasarkan SK Direksi Nomor: 179/KEPEG/V/2017 pada tanggal 19 Mei 2017 tentang Ahli Tugas Pegawai. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1990.

51 years old. Born in Mario on 23 January 1966. He has been working at Bank Papua since 1991. Occupied as Head of Risk Management Division since June 12, 2017 based on Decree of the Board of Directors Number: 179 / KEPEG / V / 2017 on May 19, 2017 regarding Employee Duties. Obtained his Bachelor of Economics degree at Hasanuddin University Makassar in 1990.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat antara lain:
- Manajemen Risiko Tingkat IV Penyelenggara BSMR pada tanggal 23 November 2013.
- Program sertifikasi Pimpinan Cabang Angkatan 162 LPPI pada tanggal 02 Maret 2009.

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan antara lain:
- 01 Januari 2003 Manajemen Keuangan, *corporate budgeting* penyelenggara LPPM.
- 01 Januari 2006 Perencanaan Karir, Kenaikan Pangkat/Gol C4 penyelenggara LPPI.
- 13 Desember 2006 Pembinaan Kredit, Penyelesaian Kredit Macet & Piutang BUMN/BUMD penyelenggara PUSDIKNAS.
- 02 Maret 2009 Diklat Pemimpin Cabang, penyelenggara LPPI.
- 08 Februari 2010 Manajemen Risiko, Implementasi Manajmen Risiko Operasional Bank penyelenggara Talents Indonesia.
- 11 Agustus 2010 *Business Process*, *Customer Relationship Management* penyelenggara PT. *Risk* Frontier Indoconsult.
- 25 Agustus 2010 Bisnis & Strategi (Muda), Perencanaan Strategic penyelenggara Indolatih management.

Following and owning Certificates include:
- *Risk Management Level IV organized by BSMR on 23 November 2013.*
- *Certification program of Branch Manager batch162 LPPI on March 02, 2009.*

Has followed the Education and Training, among others:
- *01 Januari 2003 Financial Management, corporate budgeting organized by LPPM.*
- *01 Januari 2006 Career Planning, Increase Rank / C4 Class organized by LPPI.*
- *13 Desember 2006 Loan Development, Loan Settlement & Receivables BUMN / BUMD organized by PUSDIKNAS.*
- *02 Maret 2009 Training of Branch Manager, organized by LPPI.*
- *08 Februari 2010 Risk Management, Implementation of Operational Risk Management Bank organized by Talents Indonesia.*
- *11 Agustus 2010 Business Process, Custumer Relationship Management organized by PT. Risk Frontier Indoconsult.*
- *25 Agustus 2010 Business & Strategy (Youth), Strategic*

- 15 Maret 2013 *Leadership Skill* (Utama), Pemimpin Kredibel & Pemimpin Visioner (The Ethos Leadership) penyelenggara PT. Mitra Pembelajaran.
- 26 Juli 2013 Kepatuhan, Strategi Anti Fraud Banking & GCG penyelenggara CV. Cakrawala Anugerah.
- 30 Juni 2014 Perencanaan Karir, Asesment Potensi & Kompetensi Pegawai Calon Pemimpin Divisi, Wilayah dan Cabang penyelenggara PT. Aplikasi Sistem Bisnis.
- 02 Mei 2016 *Business Process*, Tax Accounting penyelenggara Mairodi Mandiri sejahtera.
- 25 November 2016 Manajemen *Risk*o, Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko penyelenggara PT. Multi Talenta *Consulting*.
- 23 Agustus 2017 Manajemen Risiko, Perbaikan Rating Tingkat Kesehatan Bank melalui ICAAP & GCG penyelenggara Equivalent Training Center.
- 10 November 2017 Akuntansi Perbankan, PSAK 71 penyelenggara Bank Papua.
- 16 November 2017 Treasury (Alma), Pengelolaan *Liquidity Risk* dalam rangka implementasi pelaksanaan kerangka penyelenggara PT.Synergi Daya Utama.
- 23 November 2017 Analisa Kredit, Loan Exposure Limit, penyelenggara Talents Indonesia.

Jabatan penting yang pernah di pegang antara lain:

- Kepala Departemen Pengadaan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 01 Agustus 2016 sesuai SK Direksi nomor: 161/KEPEG/VI/2016 tanggal 16 Juli 2016.
- Kepala Departemen Administrasi Infrastruktur & Fasilitas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 20 Oktober 2015 sesuai SK Direksi nomor: 89/KEPEG/IX/2015 tanggal 11 September 2015.
- Kepala Cabang Mulia pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 14 Maret 2012 sesuai SK Direksi nomor: 30/KEPEG/II/2012 tanggal 15 Februari 2012.
- Kepala Departemen Pengembangan Produk, Jasa & Layanan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 03 Mei 2010 sesuai SK Direksi nomor: 50/KEPEG/III/2010 tanggal 31 Maret 2010.
- Kepala Departemen Program PER pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 02 Februari 2009 sesuai SK Direksi nomor: 32/KEPEG/IV/2009 tanggal 20 April 2009.
- Kepala Departemen Pendukung Operasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 17 Juli 2008 sesuai SK Direksi nomor: 59/KEPEG/V/2008 tanggal 22 Mei 2008.

Planning organized by Indolatih management.

- *15 Maret 2013 Leadership Skill (Main), Credible Leader & Visionary Leader (The Ethos Leadership) organized by PT. Mitra Pembelajaran.*
- *26 Juli 2013 Compliance, Anti Fraud Banking Strategy & GCG organized by CV. Cakrawala Anugerah.*
- *30 Juni 2014 Career Planning, Assessment of Potential & Competence of Candidate Leaders of Division, Region and Branch organized by PT. Sistem Aplikasi Bisnis.*
- *02 Mei 2016 Business Process, Tax Accounting organized by Mairodi Mandiri sejahtera.*
- *25 November 2016 Risk Management, Risk Management Certification Maintenance Program organized by PT. Multi Talenta Consulting.*
- *23 Agustus 2017 Risk Management, Bank Rating Improvement through ICAAP & GCG organized by Equivalent Training Center.*
- *10 November 2017 Accounting for Banking, PSAK 71 organized by Bank Papua.*
- *16 November 2017 Treasury (Alma), Liquidity Risk Management in the framework of implementation organized by PT. Synergi Daya Utama.*
- *23 November 2017 Loan Analysis, Loan Exposure Limit, organized by Talents Indonesia.*

Important positions ever held include:

- *Head of Departemen Procurement at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since 01 August 2016 according to BOD Decree number: 161 / KEPEG / VI / 2016 dated July 16, 2016.*
- *Head of Departemen Administration of Infrastructure & Facilities at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since October 20, 2015 according to BOD Decree number: 89 / KEPEG / IX / 2015 dated September 11, 2015.*
- *Mulia Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since March 14, 2012 according to BOD Decree number: 30 / KEPEG / II / 2012 dated February 15, 2012.*
- *Head of Product Development & Services Department at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since 03 May 2010 according to BOD Decree number: 50 / KEPEG / III / 2010 dated March 31, 2010.*
- *Head of PER Program Department at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since February 2, 2009 according to BOD Decree number: 32 / KEPEG / IV / 2009 dated April 20, 2009.*
- *Head of Supporting Operations Department at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since July 17, 2008 according to BOD Decree number: 59 / KEPEG / V / 2008 dated May 22, 2008.*

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer's Profile

Dadang Supriatna, SH
Kepala Divisi Hukum
Head of Legal Division

52 tahun. Lahir di Bandung pada tanggal 10 April 1965. Bekerja di Bank Papua pada tahun 1992. Menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum sejak tanggal 16 September 2015 berdasarkan SK Direksi Nomor: 89/KEPEG/IX/2015 pada tanggal 11 September 2015 tentang Ahli Tugas Pegawai. Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Padjajaran Bandung tahun 1990.

52 years. Born in Bandung on April 10, 1965. He has been working at Bank Papua in 1992. Occupied as Head of Legal Division from 16 September 2015 based on Decree of the Board of Directors No. 89 / KEPEG / IX / 2015 on 11 September 2015 on Employee Duties. Obtained a law degree at Padjajaran University Bandung in 1990.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat antara lain:
- Sertifikasi Profesi Advokat (SIPUPA) penyelenggara FHP PKPA tanggal 22 Maret 2013.
- Manajemen Risiko Tingkat IV Penyelenggara BSMR tanggal 10 september 2011.
- Program Sertifikasi Pimpinan Cabang Angkatan 169 LPPI pada tanggal 01 Januari 2005.

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan antara lain:
- 29 April 1998 *Leadership Skill* (Muda), Manajerial Lini Pertama penyelenggara BPD-IBI JKT.
- 01 Januari 2005 Perencanaan Karir, Kenaikan Pangkat/Gol.D1 penyelenggara LPPI.
- 29 Agustus 2007 Kemitraan Bisnis, Penyelesaian Kredit Macet dengan System Sindikasi penyelenggara Aktual Indonesia.
- 01 Desember 2008 Akuntansi Perbankan, Penerapan psak 50 & 55 revisi 2006 penyelenggara RMG.
- 26 Mei 2009 Straregi Korporasi, Strategi Penanganan Kredit Macet Bank & Lembaga Keuangan penyelenggara Legal *Business* Institut.
- 02 Desember 2009 *Business Process*, Pelaksanaan UAT Aplikasi Kredit sesuai PAPI 2008 penyelenggara PT. CIP.
- 09 November 2010 Analisa Kredit, *Fundamental Management Loan Syndication* penyelenggara CIS.
- 06 Juli 2011 Manajemen Risiko, Woskshop Panduan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank peneyelenggara RMG.

Following and owning Certificates include:
- *Certification of Advocate Profession (SIPUPA) organized by PKPA FHP dated March 22, 2013.*
- *Level IV Risk Management organized by BSMR dated September 10, 2011.*
- *Branch Manager Certification Program batch 169 LPPI on January 01, 2005.*

Has followed the Education and Training, among others:
- *29 April 1998 Leadership Skill (Youth), First Line Managerial Manager organized by BPD-IBI JKT.*
- *01 Januari 2005 Career Planning, Promotion/D1 group organized by LPPI.*
- *29 Agustus 2007 Business Partnership, Debt Loan Settlement with Syndication System organized by Aktual Indonesia.*
- *01 Desember 2008 Accounting for Banking, Implementation of psak 50 & 55 revision 2006 organized by RMG.*
- *26 Mei 2009 Straregi Corporations, Bad Debt Management Strategies Banks & Financial Institutions organized by Legal Business Institute.*
- *02 Desember 2009 Business Process, Implementation of UAT Loan Application in accordance PAPI 2008 organized by PT. CIP.*
- *09 November 2010 Loan Analysis, Fundamental Management Loan Syndication organized by CIS.*
- *06 Juli 2011 Risk Management, Woskshop Sound Banking Rating Assessment Guidelines organized by RMC.*

- 14 November 2011 Hukum, Pembekalan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) penyelenggara FHP Education of Law.
- 20 Juni 2012 Manajemen Risiko, Pelatihan Peran Bank dalam Mencegah & Menangani Kejahatan Perbankan penyelenggara FKDKP.
- 29 November 2012,Hukum, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang penyelenggara LPI.
- 21 Mei 2013 Kepatuhan, APU & PPT Batch I Penyelenggara Tiga Sekawan solution.
- 30 Juni 2014 Perencanaan Karir, Asesment Potensi & Kompetensi Pegawai Calon Pemimpin Divisi, Wilayah dan Cabang penyelenggara PT. Aplikasi Sistem Bisnis.
- 14 Maret 2016 Akuntansi Perbankan, PAPI 2008 & PSAK 55 Revisi Batch 1 penyelenggara PT. Infobank Lentera Cipta Kreasi.
- 28 Maret 2016 Hukum, Sertifikasi Mediator penyelenggara Pusat Mediasi Indonesia (PMN).
- 25 November 2016 Manajemen Risiko, Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko penyelenggara PT. Multi Talenta *Consulting*.
- 15 November 2017 *Business Process*, Transformasi Bank Papua penyelenggara Talents Indonesia.

Jabatan penting yang pernah di pegang antara lain:

- Tim Penyelamatan Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 03 juni 2015 sesuai SK Direksi nomor: 41.1/KEPEG/V/2015 tanggal 19 Mei 2015.
- Kepala Cabang Abepura pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 15 Januari 2014 sesuai SK Direksi nomor: 02/KEPEG/I/2014 tanggal 03 Januari 2014.
- Kepala Departemen Peraturan & Per UU pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 20 April 2013 sesuai SK Direksi nomor: 72/KEPEG/IV/2012 tanggal 20 April 2012.
- Kepala Departemen Manajemen Risiko pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 02 Januari 2012 sesuai SK Direksi nomor: 200/KEPEG/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011.
- Senior Executive Spesialis Manajemen Risiko Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 09 Mei 2011 sesuai SK Direksi nomor: 53/KEPEG/III/2011 tanggal 29 Maret 2011.
- Kepala Departemen Pengembangan Ekonomi Rakyat & Komersial pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 04 Mei 2009 sesuai SK Direksi nomor: 32/KEPEG/IV/2009 tanggal 20 April 2009.
- Kepala Departemen Korporat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 01 Februari 2005 sesuai SK Direksi nomor: 04/DIR-BPD/II/2005 tanggal 01 Februari 2005.
- Ass.Account Officer PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 16 April 2003 sesuai SK Direksi Nomor: 23/KEPEG/IV/2003 tanggal 16 April 2003.
- Kepala Seksi Pengawasan Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 30 Maret 1999 sesuai SK Direksi nomor: 10/KEPEG/III/1999 tanggal 30 Maret 1999

- *14 November 2011 Law, Training of Special Education of Advocate Profession (PKPA) organized by FHP Education of Law.*
- *20 Juni 2012 Risk Management, Training of Bank Role in Preventing & Handling Crime Banking organized by FKDKP.*
- *29 November 2012, Legal, Eradication of Money Laundering Crime organized by LPI.*
- *21 Mei 2013 Compliance, APU & PPT Batch I organized by Tiga Sekawan solution.*
- *30 Juni 2014 Career Planning, Assessment of Potential & Competence of Candidate Leaders of Division, Region and Branch organized by PT. Sistem Aplikasi Bisnis.*
- *14 Maret 2016 Accounting for Banking, PAPI 2008 & SFAS 55 Revision Batch 1 organized byPT. Infobank Lentera Cipta Kreasi.*
- *28 Maret 2016 Legal, Certification Mediator organized by Pusat Mediasi Indonesia (PMN).*
- *25 November 2016 Risk Management, Risk Management Certification Maintenance Program organized by PT. Multi Talenta Consulting.*
- *15 November 2017 Business Process, Transformation of Bank Papua organized by Talents Indonesia.*

Important positions ever held include:

- *Loan Rescue Team at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since 03 June 2015 according to BOD Decree number: 41.1 / KEPEG / V / 2015 dated May 19, 2015.*
- *Abepura Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since January 15, 2014 according to BOD Decree number: 02 / KEPEG / I / 2014 dated 03 January 2014.*
- *Head of Regulation & Per Law Department on PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since 20 April 2013 according to BOD Decree number: 72 / KEPEG / IV / 2012 dated 20 April 2012.*
- *Head of Risk Management Department at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since January 2, 2012 according to BOD Decree number: 200 / KEPEG / XII / 2011 dated December 13, 2011.*
- *Senior Executive Credit Risk Management Specialist at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since May 9, 2011 according to BOD Decree number: 53 / KEPEG / III / 2011 dated March 29, 2011.*
- *Head of Develop. Economic & Commercial Economy Department at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since May 4, 2009 according to BOD Decree number: 32 / KEPEG / IV / 2009 dated April 20, 2009.*
- *Head of Corporate Department in PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since February 1, 2005 according to BOD Decree number: 04 / DIR-BPD / II / 2005 dated 01 February 2005.*
- *Ass.Account Officer of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dated 16 April 2003 according to BOD Decree Number: 23 / KEPEG / IV / 2003 dated April 16, 2003.*
- *Head of Loan Supervision Section of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since 30 March 1999 according to BOD Decree number: 10 / KEPEG / III / 1999 dated March 30, 1999.*

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer's Profile

Johanes Mandang, SE
Kepala Satuan Kerja Anti Fraud (SKAF)
Head of Anti Fraud Working Unit

53 tahun. Lahir di Soa Siu pada tanggal 18 Januari 1964. Bekerja di PT. Bank Papua sejak tahun 1991. Menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Anti Fraud (SKAF) sejak tanggal 25 April 2017 sesuai dengan SK Direksi nomor: 109/KEPEG/IV/2017 tanggal 04 April 2017 Ahli Tugas Pegawai. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Cenderawasih Jayapura tahun 1988.

53 years old. Born in Soa Siu on January 18, 1964. He has been working at PT. Bank Papua since 1991. Occupied as Head of the Anti Fraud Unit (SKAF) since April 25, 2017 in accordance with Decree No. 109 / KEPEG / IV / 2017 dated 04 April 2017 Employee Duty Expert. Obtained his Bachelor of Economics degree at Universitas Cenderawasih Jayapura in 1988.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat antara lain:
- Manajemen Risiko Tingkat IV Penyelenggara BSMR tanggal 22 Februari 2014.
- Sertifikasi Internal Auditor Tingkat Dasar II penyelenggara YPIA tanggal 24 Maret 2009.
- Program Sertifikasi Pimpinan Cabang Angkatan 149 penyelenggara LPPI tanggal 13 Maret 2006.
- Sertifikasi professional Internal Auditor (SPIA) penyelenggara STAN tanggal 01 Januari 2004.

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan antara lain:
- 01 Januari 2005 *Leadership Skill, Developing Managerial Skill* penyelenggara BPD Jayapura.
- 01 Januari 2006 Perencanaan Karir, Dinas Kenaikan Pangkat/Gol C4-D1 penyelenggara LPPI.
- 22 Oktober 2007 Pemeriksaan Internal Auditor penyelenggara Husno, Mucharam & Rasidi.
- 11 Februari 2009 Kepatuhan GCG penyelenggara PT. Insan Abhi Yasa (IAY).
- 02 Juli 2009 Akuntansi Perbankan, Penerapan PSAK 510 & 55 Revisi 2006 penyelenggara RMCI.
- 14 Januari 2010 Pengawasan Internal, SIMA penyelenggara PT. Auditindo Arin Prima.
- 25 Maret 2010 Integritas Implementasi Audit Berbasis Risiko & PSAK 55/50 penyelenggara RMCI.

Following and owning Certificates include:
- *Level IV Risk Management organized by BSMR dated February 22, 2014.*
- *Certification of Internal Auditor of Secondary Level II organized by YPIA dated March 24, 2009.*
- *Branch Manager Certification Program batch 149 organized by LPPI on 13 March 2006.*
- *Internal Auditor Internal Auditor Certification (SPIA) organized by STAN dated 01 January 2004.*

Has followed the Education and Training, among others:
- *01 Januari 2005 Leadership Skill, Developing Managerial Skill organized by BPD Jayapura.*
- *01 Januari 2006 Career Planning, Service Officer / C4-D1 Class organized by LPPI.*
- *22 Oktober 2007 Internal Audit Auditor organized by Husno, Mucharam & Rasidi.*
- *11 Februari 2009 GCG Compliance organized by PT. Insan Abhi Yasa (IAY).*
- *02 Juli 2009 Accounting for Banking, Implementation of SFAS 510 & 55 2006 revision organized by RMCI.*
- *14 Januari 2010 Internal Control, SIMA organized by PT. Auditindo Arin Prima.*
- *25 Maret 2010 Integrity Implementation of Risk Based Audit & SFAS 55/50 organized by RMCI.*

- 18 April 2011 Pengawasan Internal, Seminar Nasional Internasional Audit penyelenggara YPIA.
- 20 Juli 2011 Audit Internal, Workshop Penilaian TKB penyelenggara Talents Indonesia.
- 19 Januari 2012 Hukum, Pengaturan & Penegakan Hukum dalam Menyikapi Tindak Pidana di Bidan Bank penyelenggara ASBANDA.
- 22 Februari 2012 Kepatuhan, APU & PPT penyelenggara PPATK.
- 16 April 2014 Seminar Nasional Internal Audit 2014 penyelenggara YPIA.
- 20 Februari 2015 *Business Process*, End User Olibs 724 Domain Kepala Divisi & Kepala Kantor Cabang Penyelenggara PT.CIP.
- 14 Maret 2016 Akuntansi Perbankan, PAPI 2008 & PSAK 55 Revisi Batch I penyelenggara PT. Infobank Lentera Cipta Kreasi.
- 24 Maret 2017 Program Pemeliharan Sertifikasi Manajemen Risiko Batch 1 penyelenggara PT. Multi Talenta *Consulting*.
- 10 November 2017 Akuntansi Perbankan PSAK 71 penyelenggara Bank Papua.
- 15 November 2017 *Business Process*, Transformasi Bank Papua penyelenggara Talents Indonesia.

Jabatan penting yang pernah di pegang antara lain:

- Wakil Kepala Cabang Utama Jayapura pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 26 Juli 2016 sesuai SK Direksi nomor: 161/KEPEG/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016.
- Kepala Cabang Karubaga pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 16 Juli 2014 sesuai SK Direksi nomor: 34.1/KEPEG/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014.
- Kepala Departemen Pendukung Operasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 27 Maret 2012 sesuai SK Direksi nomor: 46/KEPEG/III/2012 tanggal 02 Maret 2012.
- Kepala Departemen Auditor pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 22 Januari 2010 sesuai SK Direksi nomor: 04/KEPEG/I/2010 tanggal 18 Januari 2010.
- Senior Spesialis Auditor pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 01 Juni 2007 sesuai SK Direksi nomor: 37/KEPEG/V/2007 tanggal 01 Mei 2007.
- Kepala Departemen Pendukung Bisnis pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 01 Februari 2005 sesuai SK Direksi nomor: 04/DIR-BPD/II/2005 tanggal 01 Februari 2005.
- Kepala Seksi Dana & Jasa pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 11 Maret 2003 sesuai SK Direksi nomor: 15/KEPEG/III/2003 tanggal 11 Maret 2003.

- *18 April 2011 Internal Supervision, International Seminar on International Audit organized by YPIA.*
- *20 Juli 2011 Internal Audit, Bank Sound Rating Assessment Workshop organized by Talents Indonesia.*
- *19 Januari 2012 Law, Arrangement & Law Enforcement in Responding to Crime at Midwife Bank organized by ASBANDA.*
- *22 Februari 2012 Compliance, APU & PPAT organized by PPATK.*
- *16 April 2014 National Seminar of Internal Audit 2014 organized by YPIA.*
- *20 Februari 2015 Business Process, End User Olibs 724 Domain Head Division & Branch Manager Office PT.CIP.*
- *14 Maret 2016 Accounting Banking, PAPI 2008 & PSAK 55 Revision Batch I organized by PT. Infobank Lentera Cipta Kreasi.*
- *24 Maret 2017 Risk Management Certification Maintenance Program Batch 1 organized by PT. Multi Talenta Consulting.*
- *10 November 2017 Accounting for Banking PSAK 71 organized by Bank Papua.*
- *15 November 2017 Business Process, Transformation of Bank Papua organized by Talents Indonesia.*

Important positions ever held include:

- *Deputy Manager of Jayapura Main Branch of at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since July 26, 2016 according to BOD Decree number: 161 / KEPEG / VI / 2016 dated June 16, 2016.*
- *Karubaga Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since July 16, 2014 according to BOD Decree number: 34.1 / KEPEG / VI / 2014 dated June 17, 2014.*
- *Head of Supporting Operations Department at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since March 27, 2012 according to BOD Decree number: 46 / KEPEG / III / 2012 dated 02 March 2012.*
- *Head of Auditor Department at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since January 22, 2010 according to BOD Decree number: 04 / KEPEG / I / 2010 dated January 18, 2010.*
- *Senior Auditor Specialist at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since June 1, 2007 according to BOD Decree number: 37 / KEPEG / V / 2007 dated 01 May 2007.*
- *Head Business Support Department to PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since February 1, 2005 according to BOD Decree number: 04 / DIR-BPD / II / 2005 dated 01 February 2005.*
- *Head of Funds & Services Section at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since 11 March 2003 according to BOD Decree number: 15 / KEPEG / III / 2003 dated 11 March 2003.*

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer's Profile

Wastu Anggoro W, SE.MM
Kepala Divisi Pemasaran
Head of Marketing Division

43 tahun. Lahir di Biak pada tanggal 09 April 1974. Bekerja di Bank Papua sejak tahun 1996. Menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasaran sejak tanggal 28 Februari 2017 berdasarkan SK Direksi Nomor: 32.1/KEPEG/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Ahli Tugas Pegawai. Memperoleh gelar Magister Manajemen di Universitas Cenderawasih Jayapura tahun 2014.

43 years old. Born in Biak on 09 April 1974. He has been working at Bank Papua since 1996. Occupied as Head of Marketing Division since February 28, 2017 based on Decree of the Board of Directors Number: 32.1 / KEPEG / I / 2017 dated January 20, 2017 regarding Employee Duty Expert. Obtained a Master of Management degree at Cenderawasih University in Jayapura 2014.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat antara lain:
- Manajemen Risiko Tingkat IV Penyelenggara BSMR pada tanggal 22 Februari 2014.

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan antara lain:
- 19 Oktober 1998 Analisa Pasar, Hardware PC Training Penyelenggara INIXINDO.
- 02 Maret 2003 Pembinaan Kredit, LPS penyelenggara FKDK JKT.
- 09 November 2007 Akuntansi Perbankan, Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 50 & 55 Penyelenggara Bank Indonesia (BI).
- 15 Juni 2009 Retail & UMKM, Survey Potensi UMKM dengan Menggunakan Metode RRA penyelenggara Bank Indonesia (BI).
- 30 Juni 2009 Pemasaran/Marketing, Strategi Bank dalam Mengembangan Kredit UKM penyelenggara Stabilitas.
- 15 Desember 2009 *Business Process*, penerapan aplikasi Olibs sesuai PSAK 55 & 50 penyelenggara Bank Papua.
- 22 Maret 2010 *Leadership Skill* (Muda), *Problem Solving & Decision Making* penyelenggara Lembaga Manajemen PPM.

Following and having Certificates include:
- *Level IV Risk Management organized by BSMR on February 22, 2014.*

Has followed the Education and Training, among others:
- *19 Oktober 1998 Market Analysis, PC Hardware Training organized by INIXINDO.*
- *02 Maret 2003 Loan Guarantee, LPS organized by FKDK JKT.*
- *09 November 2007 Accounting for Banking, Financial Accounting Standard Guidelines 50 & 55 organized byBank Indonesia (BI).*
- *15 Juni 2009 Retail & UMKM, Survey of UMKM Potential by Using RRA Method organized by Bank Indonesia (BI).*
- *30 Juni 2009 Marketing / Marketing, Bank Strategy in Developing Loan UKM organized by Stabilitas.*
- *15 Desember 2009 Business Process, application of Olibs application in accordance with PSAK 55 & 50 organized by Bank Papua.*
- *22 Maret 2010 Leadership Skill (Young), Problem Solving & Decision Making organized by PPM Management Institute.*

- 06 Februari 2012 *Customer Service Orientation*, Aplikasi CAMAR Bank Papua penyelenggara Bank Papua.
- 27 Agustus 2012 *Leadership Skill* (Muda), Program manager development program (MDP) penyelenggara LPPI.
- 10 April 2014 Hubungan Industrial, BPP Organisasi dan Tata Kerja Bank Papua penyelenggara Bank Papua.
- 30 Juni 2014 Perencanaan Karir, Assessment Potensi & Kompetensi Pegawai Calon Pemimpin Divisi, Wilayah penyelenggara PT. Aplikasi Sistem Binis.
- 14 Maret 2016 Akuntansi Perbankan, PAPI 2008 & PSAK 55 Revisi Batch I Penyelenggara PT. Infobank Lentera Cipta Kreasi.
- 18 Januari 2017 *Business Process*, Strategi Bisnis penyelenggara Daniel Saputra.
- 20 Januari 2017 Manajemen Risiko, Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko penyelenggara PT. Multi Talenta *Consulting*.
- 14 September 2017 *Business Process*, *E-commere, E-channel, Fintech* Updates 2017 dan Trensds 2018 penyelenggara Sharing Vision.
- 15 November 2017 *Business Process*, Transformasi Bank Papua penyelenggara Talents Indonesia.

Jabatan penting yang pernah di pegang antara lain:

- Kepala Cabang Biak pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 01 Januari 2015 sesuai SK Direksi nomor: 02/KEPEG/I/2015 tanggal 02 Februari 2015.
- Kepala Departemen Pelaporan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 29 Mei 2012 sesuai SK Direksi nomor: 72/KEPEG/IV/2012 tanggal 20 April 2012.
- Kepala Departemen Konsumer pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 01 September 2009 sesuai SK Direski nomor: 99/KEPEG/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009.

- *06 Februari 2012 Customer Service Orientation, CAMAR Application Bank Papua organized by Bank Papua.*
- *27 Agustus 2012 Leadership Skill (Youth), Program manager development program (MDP) organized by LPPI*
- *10 April 2014 Industrial Relations, BPP Organization and Bank Papua Working Procedures organized by Bank Papua*
- *30 Juni 2014 Career Planning, Potential Assessment & Employee Competency of Prospective Division Leader, Area organized by PT. Application of Binary System*
- *14 Maret 2016 Accounting for Banking, PAPI 2008 & PSAK 55 Revision of Batch I The Operator organized by PT. Infobank Lentera Cipta Kreasi*
- *January 18, 2017 Business Process, Business Strategy organized by Daniel Saputra*
- *20 Januari 2017 Risk Management, Risk Management Certification Maintenance Program organized by PT. Multi Talenta Consulting.*
- *14 September 2017 Business Process, E-commere, E-channel, Fintech Updates 2017 and Trensds 2018 organized bySharing Vision*
- *15 November 2017 Business Process, Transformation of Bank Papua organized by Talents Indonesia*

Important positions ever held include:

- *Biak Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since 01 January 2015 according to BOD Decree number: 02 / KEPEG / I / 2015 dated 02 February 2015.*
- *Head of Reporting Department at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since May 29, 2012 according to BOD Decree number: 72 / KEPEG / IV / 2012 dated 20 April 2012.*
- *Head of Consumer Department at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since September 1, 2009 according to BOD Decree number: 99 / KEPEG / VIII / 2009 dated August 21, 2009.*

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer's Profile

Usman Badiaraja Saragih, S.AP
Kepala Divisi Komersial & Korporasi
Head of Corporate & Commercial Division

48 tahun. Lahir di Sibuntuon, pada tanggal 10 Juni 1969. Bekerja di Bank Papua sejak tahun 1998. Menjabat sebagai Kepala Divisi Komersial & Korporasi sejak 03 Juli 2017 berdasarkan SK Direksi Nomor: 179/ KEPEGVI/2017 pada tanggal 19 Mei 2017 tentang Ahli Tugas Pegawai. Memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di STIA LAN Jakarta tahun 2009.

48 years. Born in Sibuntuon on June 10, 1969. He has been working at Bank Papua since 1998. Occupied as Head of Corporate & Commercial Division since July 03, 2017 based on Decree of the Board of Directors Number: 179 / KEPEGVI / 2017 on May 19, 2017 on Employee Officer. Obtained a Bachelor of Public Administration degree at STIA LAN Jakarta in 2009.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat antara lain:
- Manajemen Risiko Tingkat IV Penyelenggara BSMR pada tanggal 26 Oktober 2013.

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan antara lain:
- 22 Juni 2009 Analisa Kredit, Survey Potensi UMKM dengan menggunakan Metode RRA penyelenggara BI.
- 10 Juni 2010 Manajemen *Likuiditas* penyelenggara LPPI.
- 01 September 2011 Akuntansi Perbankan, Pengenalan & Pembekalan Menyeluruh atas PSAK 50/55 revisi 2006 penyelenggara RMG.
- 15 Juli 2012 Analisa Kredit Menegah & Besar For Supervisor penyelenggara Bank Papua.
- 12 November 2012 Kepemimpinan Madya, *Based* Style Leadership Training penyelenggara PT.MS.
- 26 Juli 2013 Kepatuhan, Strategi Anti Fraud Banking & GCG penyelenggara CV. Cakrawala Anugerah.
- 01 Juli 2014 Perencanaan Karir, Assesment Potensi & Kompetensi Pegawai Calon Pemimpin Divisi, Kantor Wilayah dan Cabang penyelenggara PT. Aplikasi Sistem Bisnis.
- 11 Mei 2015 Manajemen Risiko, Menguji Akurasi Kebijakan Berdasarkan Integrasi *Stress Test* Model dari Risiko KR penyelenggara RMG.

Following and owning Certificates include:
- *Risk Management Level IV organized by BSMR on 26 October 2013.*

Has followed the Education and Training, among others:
- *22 Juni 2009 Loan Analysis, Survey of UMKM Potential by using RRA Method organized by BI.*
- *10 Juni 2010 Management Liquidity organized by LPPI.*
- *01 September 2011 Accounting for Banking, Introduction & Overview of SFAS 50/55 revision 2006 organized by RMG.*
- *15 Juli 2012 Medium & Large Loan Analysis For Supervisor organized by Bank Papua.*
- *12 November 2012 Leadership Madya, Based Style Leadership Training organized by PT.MS.*
- *26 Juli 2013 Compliance, Anti Fraud Banking Strategy & GCG organized by CV. Cakrawala Anugerah.*
- *01 Juli 2014 Career Planning, Assessment of Potential & Competence of Prospective Leaders Division, Regional Office and Branch organized by PT. Sistem Aplikasi Bisnis.*
- *11 Mei 2015 Risk Management, Testing Policy Accuracy Based on Stress Integration Test Model from KR Risk organized by RMG.*

- 12 Februari 2016 Perencanaan Karir, Penyusunan System Manajemen Kinerja Batch II penyelenggara PT Aplikasi System Bisnis.
- 18 Januari 2017 Manajemen Risiko, program Pemeliharaan Sertifikasi Manajamen Risiko penyelenggara PT. Multi Talenta *Consulting*.
- 26 Agustus 2017 Analisa Kredit atas Laporan Keuangan penyelenggara BNI.
- 10 November 2017 Akuntansi Perbankan PSAK 71 penyelenggara Bank Papua.
- 15 November 2017 *Business Process*, Transformasi Bank Papua penyelenggara Talents Indonesia.

Jabatan penting yang pernah di pegang antara lain:
- Senior Executive Manajemen Risiko Cabang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 04 April 2016 sesuai SK Direksi nomor: 73/KEPEG/III/2016.
- Kepala Departemen Pendukung Kredit Khusus pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 04 Desember 2015 sesuai SK Direksi nomor: 118/KEPEG/XI/2015 tanggal 09 November 2015.
- Spesialis Risiko Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 31 Juli 2013 sesuai SK Direksi Nomor: 145/KEPEG/V/2013 tanggal 02 Juli 2013.
- Kepala Cabang Karubaga pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 08 April 2013 sesuai SK Direksi nomor: 51/KEPEG/III/2013 tanggal 15 Maret 2013.
- Kepala Departemen Pengembangan Ekonomi Rakyat & Komersial pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 19 September 2011 sesuai SK Direksi nomor: 119/KEPEG/VIII/2011 tanggal 06 Agustus 2011.
- Kepala Cabang Pembantu Karubaga pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 08 Mei 2009 sesuai SK Direksi nomor: 32/KEPEG/IV/2009 tanggal 20 April 2009.

- *12 Februari 2016 Career Planning, Preparation of Performance Management System Batch II organized by PT Application System Business.*
- *18 Januari 2017 Risk Management, Risk Management Certification Maintenance program organized by PT. Multi Talenta Consulting.*
- *26 Agustus 2017 Loan Analysis of Financial Report organized by BNI.*
- *10 November 2017 Accounting for Banking PSAK 71 organized by Bank Papua.*
- *15 November 2017 Business Process, Transformation of Bank Papua organized by Talents Indonesia.*

Important positions ever held include:
- *Senior Executive Risk Management Branch at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since April 4, 2016 according BOD Decree number: 73 / KEPEG / III / 2016.*
- *Head of Special Loan Supporting Department of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since December 04, 2015 according to BOD Decree number: 118 / KEPEG / XI / 2015 dated 09 November 2015.*
- *Credit Risk Specialist at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since July 31, 2013 according to BOD Decree Number: 145 / KEPEG / V / 2013 dated 02 July 2013.*
- *Karubaga Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since 08 April 2013 according to BOD Decree number: 51 / KEPEG / III / 2013 dated March 15, 2013.*
- *Head of Development of People & Commercial Economy Department at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since September 19, 2011 according to BOD Decree number: 119 / KEPEG / VIII / 2011 dated August 6, 2011.*
- *Karubaga Sub Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since May 08, 2009 according to BOD Decree number: 32 / KEPEG / IV / 2009 dated April 20, 2009.*

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer's Profile

Kusyanto, SE
Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Rakyat
Head of People's Economic Development Division

49 tahun. Lahir di Merauke pada tanggal 09 Mei 1968. Bekerja di Bank Papua sejak tahun 1998. Menjabat sebagai Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Rakyat sejak tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan SK Direksi Nomor: 32.1/KEPEG/I/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 tentang Ahli Tugas Pegawai. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Cenderawasih Manokwari tahun 1992.

49 years. Born in Merauke on May 09, 1968. He has been working at Bank Papua since 1998. Has occupied as Head of the People's Economic Development Division since February 27, 2017 based on Decree of the Board of Directors Number: 32.1 / KEPEG / I / 2017 on January 20, 2017 regarding Employee Duties . Obtained his Bachelor of Economics degree at Cenderawasih University Manokwari in 1992.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat antara lain:
- Manajemen Risiko Tingkat IV Penyelenggara BSMR pada tanggal 26 Oktober 2013.
- Program Sertifikasi Pimpinan Cabang Angkatan 168 LPPI pada tanggal 19 September 2011.
- Sertifikat Profesional Internal Auditor (SPIA) penyelenggara Bank Papua – STAN tanggal 01 Januari 2004.

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan antara lain:
- 08 November 2006 Analisa Kredit, Penilaian Jaminan Kredit penyelenggara MAPPI Jatim.
- 10 November 2009 Akuntansi Perbankan, PSAK 50/55 Revisi 2006 penyelenggara RMCI.
- 25 Maret 2010 Manajemen Risiko, Integritas Implementasi Audit Berbasisi Risiko & PSAK 50/55 penyelenggara RMCI.
- 19 Agustus 2010 Analisa Kredit, Kredit Scoring dalam Mengelola Kredit Personal penyelenggara BSS *Consulting* JKT.
- 30 Mei 2011 Retail & UKMK, Sharing Experience Praktek Pengelolaan Kredit Mikro & Manajmen Risiko penyelenggara LPPI.
- 05 September 2012 Sistem Imbal Jasa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 penyelenggara PERMENDAGRI.

Following and owning Certificates include:
- *Risk Management Level IV organized by BSMR on 26 October 2013.*
- *Branch Manager Certification Program batch 168 LPPI on September 19, 2011.*
- *Certificate of Professional Internal Auditor (SPIA) organized by Bank Papua - STAN dated 01 Januari 2004.*

Has followed the Education and Training, among others:
- *08 November 2006 Loan Analysis, Loan Assurance Assessment organized by MAPPI East Java.*
- *10 November 2009 Accounting for Banking, SFAS 50/55 Revision 2006 organized by RMCI.*
- *25 Maret 2010 Risk Management, Integrity of Risk Based Audit Implementation & SFAS 50/55 organized by RMCI.*
- *19 Agustus 2010 Loan Analysis, Loan Scoring in Managing Loan Personal organized by BSS Consulting JKT.*
- *30 Mei 2011 Retail & UKMK, Sharing Experience of Micro Loan Management & Risk Management Practices organized by LPPI.*
- *05 September 2012 System of Return on Services, Minister of Home Affairs Regulation No.13 of 2006*

- 26 Juli 2013 Kepatuhan, Strategi Anti Fraud Banking & GCG penyelenggara CV. Cakrawala Anugerah.
- 01 Juli 2014 Perencanaan Karir, Assessment Potensi & Kompetensi Pegawai Calon Pemimpin Divisi, Kantor Wilayah dan Cabang.
- 28 September 2015 Manajemen Risiko, Program pemeliharaan sertifikasi Manajemen risiko penyelenggara PT. Multi Talenta *Consulting*.
- 15 September 2016 Kepemimpinan Utama, *Performance* Management penyelenggara PT. Jhonson.
- 15 November 2017 *Business Process*, Transformasi Bank Papua Penyelenggara Talents Indonesia.

Jabatan penting yang pernah di pegang antara lain:

- Kepala Cabang Arso pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 09 September 2013 sesuai SK Direksi Nomor: 163/KEPEG/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013.
- Kepala Cabang Keppi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 22 Agustus 2011 sesuai SK Direksi Nomor: 119/KEPEG/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011.
- Kepala Unit Kredit UKMK & Konsumsi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 23 Januari 2005 sesuai SK Direksi Nomor: 01/KEPEG/I/2005 tanggal 03 Januari 2005.

organized by PERMENDAGRI.

- *26 Juli 2013 Compliance, Anti Fraud Banking Strategy & GCG organized by CV. Cakrawala Anugerah.*
- *01 Juli 2014 Career Planning, Potential Assessment & Employee Competency Candidate Leaders Division, Regional Office and Branch.*
- *28 September 2015 Risk Management, Certification maintenance program Organizer risk management organized by PT. Multi Talenta Consulting.*
- *15 September 2016 Main Leadership, Performance Management organized by PT. Jhonson.*
- *15 November 2017 Business Process, Transformation of Bank Papua organized by Talents Indonesia.*

Important positions ever held include:

- *Arso Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since 09 September 2013 according to BOD Decree Number: 163 / KEPEG / VIII / 2013 dated August 12, 2013.*
- *Keppi Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since August 22, 2011 according to BOD Decree Number: 119 / KEPEG / VIII / 2011 dated August 16, 2011.*
- *Head Unit of SMEs & Consumption Loan at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since 23 January 2005 according to BOD Decree Number: 01 / KEPEG / I / 2005 dated January 3, 2005.*

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer's Profile

Pujianto, SH
Kepala Divisi Kredit Khusus
Head of Special Loan Division

47 tahun. Lahir di Surabaya pada tanggal 23 Desember 1970. Bekerja di Bank Papua sejak tahun 1998. Menjabat sebagai Kepala Divisi Kredit Khusus sejak tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan SK Direksi Nomor: 32.1/ KEPEG/I/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 tentang Ahli Tugas Pegawai. Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Cenderawasih Manokwari tahun 2004.

47 years. Born in Surabaya on December 23, 1970. He has been working at Bank Papua since 1998. Occupied as Head of Special Creation Division since February 27, 2017 based on Decree of the Board of Directors Number: 32.1 / KEPEG / I / 20017 dated January 20, 2017 regarding Employee Duties. Obtained his law degree at Cenderawasih University Manokwari in 2004.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat antara lain:
- Manajemen Risiko Tingkat IV Penyelenggara BSMR tanggal 22 Juni 2013.
- Program Sertifikasi Pemimpin Cabang Angkatan 172 penyelenggara LPPI tanggal 08 Maret 2013.

Following and owning Certificates include:
- *Level IV Risk Management organized by BSMR dated June 22, 2013.*
- *Branch Manager Certification Program batch 172 LPPI dated March 08, 2013*

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan antara lain:
- 01 September 1998 Analisa Kredit, Pejabat Pemberi Kredit penyelenggara BPD- IBI JKT.
- 28 Juli 2005 Analisa Pasar, Riset Pasar penyelenggara LPPM.
- 22 Juni 2009 Analisa Kredit, Survey Potensi UMKM dengan menggunakan Metode RRA penyelenggara Bank Indonesia (BI).
- 17 Juni 2013 Kepatuahan, GCG penyelenggara Evio plus Consultant.
- 01 Juli 2014 Perencanaan Karir, Asesment Potensi & Komptenesi Pegawai Calon Pemimpin Divisi, Kantor Wilayah dan Cabang penyelenggara PT. Aplikasi Sistem Bisnis.
- 09 Februari 2015 *Business* Presentation Skill, For Trainer Domain Kredit Olibs724 Penyelenggara PT. CIP.
- 12 Maret 2015 *Business Process*, Teknik Review Kebijakan Perkreditan Bank & Standard Operating procedure penyelenggara Galang Learning Forum.

Has followed the Education and Training, among others:
- *01 September 1998 Loan Analysis, Provider of Loan organized by BPD-IBI JKT.*
- *28 Juli 2005 Market Analysis, Market Research organized by LPPM.*
- *22 Juni 2009 Loan Analysis, Survey of UMKM Potential by using RRA Method organized by Bank Indonesia (BI).*
- *17 Juni 2013 Completion, GCG organized by Evio plus Consultant.*
- *01 Juli 2014 Career Planning, Potential Assessment & Competence of Candidate Leaders Employee Division, Regional Office and Branch organized by PT. Sistem Aplikasi Bisnis.*
- *09 Februari 2015 Business Presentation Skill, For Trainer Domain Loan Olibs724 organized by PT. CIP.*
- *12 Maret 2015 Business Process, Loan Rating Technique Techniques Bank & Standard Operating procedure organized by Galang Learning Forum.*

- 13 April 2016 Pembinaan Kredit, pembiayaan kepada Multifinance penyelenggara PT.FIK.
- 18 April 2016 Analisa Kredit Komprehensif penyelenggara Bank Papua.
- 10 Mei 2016 Manajamen Umum, MSDM For Non SDM Batch I Penyelenggara Indolatih.
- 18 Januari 2017 Manajemen Risiko, Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Penyelenggara PT. Multi Talents *Consulting*.
- 15 November 2017 *Business Process*, Transformasi Bank Papua Penyelenggara Talents Indonesia.

Jabatan penting yang pernah di pegang antara lain:

- Kepala Departemen Kredit Korporasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 09 November 2015 sesuai SK Direksi nomor: 118/ KEPEG/XI/2015 tanggal 09 November 2015.
- Kepala Departemen Kredit Menengah & Korporasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 08 Oktober 2015 sesuai SK Direksi nomor: 89/KEPEG/IX/2015 tanggal 09 November 2015.
- Kepala Departemen Pendukung Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 06 Februari 2014 sesuai SK Direksi nomor: 264.A/ KEPEG/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.
- Wakil Kepala Cabang Manokwari pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 15 Maret 2012 sesuai SK Direksi nomor: 30/KEPEG/ III/2012 tanggal 15 Februari 2012.

- *13 April 2016 Loan Development, Financing to Multifinance organized by PT.FIK.*
- *18 April 2016 Analysis of Comprehensive Loan organized by Bank Papua.*
- *10 Mei 2016 General Manajamen, MSDM For Non HR Batch I organized by Indolatih.*
- *18 Januari 2017 Risk Management, Risk Management Certification Maintenance Program organized by PT. Multi Talents Consulting.*
- *15 November 2017 Business Process, Transformation of Bank Papua organized by Talents Indonesia.*

Important positions ever held include:

- *Head of Corporate Loan Department at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since November 9, 2015 according to BOD Decree number: 118 / KEPEG / XI / 2015 dated 09 November 2015.*
- *Head of Secondary & Corporate Loan Department at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since 08 October 2015 according to BOD Decree number: 89 / KEPEG / IX / 2015 dated 09 November 2015.*
- *Head of Supporting Loan Department to PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since February 6, 2014 according to BOD Decree number: 264.A / KEPEG / XII / 2013 dated December 23, 2013.*
- *Manokwari Deputy Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since March 15, 2012 according to BOD Decree number: 30 / KEPEG / III / 2012 dated February 15, 2012.*

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer's Profile

Andreas Didik Wijayanta, SE
Kepala Divisi Teknologi Informasi
Head of Information Technology Division

45 tahun. Lahir di Sleman pada tanggal 24 September 1972. Bekerja di Bank Papua sejak tahun 1995. Menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi sejak tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan SK Direksi Nomor: 32.1/ KEPEG/I/20017 pada tanggal 20 Januari 2017 tentang Ahli Tugas Pegawai. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri Manokwari tahun 2001.

45 years. Born in Sleman on September 24, 1972. He has been working at Bank Papua since 1995. Occupied as Head of Information Technology Division since February 27, 2017 based on Decree of the Board of Directors Number: 32.1 / KEPEG / I / 20017 on January 20, 2017 on Employee Expert. Obtained his Bachelor of Economics degree at University Manokwari in 2001.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat antara lain:
- Manajemen Risiko Tingkat IV Penyelenggara BSMR pada tanggal 22 Februari 2014.
- Programer Yunior penyelenggara UPT.Komputer Universitas Gajah Madah pada tanggal 15 Juni 1992.

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan antara lain:
- 01 Januari 2002 Analisa Pasar, Security Jaringan penyelenggara Denpasar Bali.
- 03 April 2006 Analisa Pasar, Instalasi & Training Komunikasi VSAT penyelenggara PT. Infocom Electindo.
- 08 November 2006 Teknologi Informasi, Training Iqmax IPC System penyelenggara PT.JJCI.
- 01 Januari 2007 Teknologi Informasi, Windows Server 2003 & SQL Server 2000 Penyelenggara BE,Logix.
- 09 Juli 2007 Teknologi Informasi, IBM DB2 Full Package penyelenggara INIXINDO.
- 03 Juli 2008 Pemeriksaan Intern/Audit, *Fundamentals Of Information Technology Audit* penyelenggara PPU Fakultas Ekonomi & Bisnis UGM.
- 14 April 2009 Teknologi Informasi, Audit Technology System Informasi penyelenggara Pusat Pengembangan Audit & Manajemen.
- 14 Januari 2010, *Business Process*, Sistem Informasi Manajamen Audit (SIMA) penyelenggara PT. Audittindo Arin Prima.

Following and owning Certificates include:
- *Level IV Risk Management organized by BSMR on February 22, 2014.*
- *Junior Programmer organized by UPT. Computer Universitas Gajah Madah on June 15, 1992*

Has followed the Education and Training, among others:
- *01 January 2002 Market Analysis, Security Network organized by Denpasar Bali.*
- *03 April 2006 Market Analysis, Installation & Communication Training VSAT organized by PT. Infocom Electindo.*
- *08 November 2006 Information Technology, Training Iqmax IPC System organized by PT.JJCI.*
- *01 Januari 2007 Information Technology, Windows Server 2003 & SQL Server 2000 organized by BE, Logix.*
- *09 Juli 2007 Information Technology, IBM DB2 Full Package organized by INIXINDO.*
- *03 Juli 2008 Internal Audit, Fundamentals Of Information Technology Auditor organized by PPU Faculty of Economics & Business UGM.*
- *14 April 2009 Information Technology, Audit Technology System Information organized by Center for Audit & Management Development.*
- *14 Januari 2010, Business Process, Management Information System Manajamen Audit (SIMA)*

- 22 Maret 2010 Pelatihan & Pengembangan Computer Audit Tecniques Using ACL for Windows Basic penyelenggara AUDITTINDO.
- 18 Februari 2011 Manjemen Risiko, Impairment sesuai PSAK 50/66 & kaitannya dengan IRB Basel II penyelenggara Global Strategic.
- 27 September 2011 Kepemimpinan Madya, Team Building For Supervisor penyelenggara Makhfud Solution.
- 24 Juni 2013 Leadership Sklill (Madya), *Based* Style Leadershio Batch III penyelenggara PT.Magnify Solution.
- 19 Agustus 2013 Teknologi Informasi, Aplikasi Interface RTGS generasi II penyelanggara Bank Papua.
- 30 Juni 2014 Perencanaan Karir, Asesment Potensi & Kompetensi Pegawai Calon Pemimpin Divisi, Wilayah, & Cabang penyelenggara PT. Aplikasi Sistem Bisnis.
- 23 April 2015 *Business Process*, BPD Forum XI-2015 "Successful Branch Transformation:Achieving Service-Oriented" penyelenggara ASBANDA.
- 17 Maret 2016 Akuntansi Perbankan, PAPI 2008 & PSAK 55 Revisis Batch III penyelenggara PT. Infobanak Lentera Cipta Kreasi.
- 20 Januari 2017 Manajemen *Risk*o, Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko penyelenggara PT. Multi Talents *Consulting*.
- 10 November 2017 Akuntansi Perbankan PSAK 71 penyelenggara Bank Papua.
- 15 November 2017 *Business Process*, Transformasi Bank Papua penyelenggara Talents Indonesia.

Jabatan penting yang pernah di pegang antara lain:

- Kepala Cabang Kaimana pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejaka tanggal 04 April 2016 sesuai SK Direksi nomor: 83/KEPEG/III/2016 tanggal 01 Maret 2016.
- Senior Specialis Non Core Aplication pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 01 November 2012 sesuai SK Direksi nomor: 161.A/KEPEG/IX/2012 tanggal 21 September 2012.
- Senior Spesialis TI Complience, QA & User pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 20 April 2012 sesuai SK Direksi Nomor: 72/KEPEG/IV/2012 tanggal 20 April 2012.
- *Quality Assurance* pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 09 Mei 2011 sesuai SK Direksi nomor: 53/KEPEG/III/2011 tanggal 23 Maret 2011.
- Spesialis Auditor pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 14 April 2008 sesuai SK Direksi Nomor: 29/KEPEG/IV/2005 tanggal 10 April 2008.
- Staf Pengembangan IT & IS pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 02 Februari 2005 sesuai SK Direksi nomor: 04/DIR-BPD/III/2005 tanggal 01 Februari 2002.

organized by PT. Audittindo Arin Prima.

- *22 Maret 2010 Training & Development of Computer Audit Tecniques Using ACL for Windows Basic organized by AUDITTINDO.*
- *18 Februari 2011 Risk Management, Impairment in accordance with PSAK 50/66 & its relation with IRB Basel II organized by Global Strategic.*
- *September 27, 2011 Leadership Madya, Team Building For Supervisor organized by Makhfud Solution.*
- *24 Juni 2013 Leadership Sklill (Madya), Based Style Leadershio Batch III organized by PT.Magnify Solution.*
- *19 Agustus 2013 Information Technology, RTGS Interface Application II generation organized by Bank Papua settlement.*
- *30 Juni 2014 Career Planning, Potential Assessment & Employee Competency Candidate Leaders Division, Region, & Branch organized by PT. Sistem Aplikasi Bisnis.*
- *April 23, 2015 Business Process, BPD Forum XI-2015 "Successful Branch Transformation: Achieving Service-Oriented" organized by ASBANDA.*
- *March 17, 2016 Accounting for Banking, PAPI 2008 & SFAS 55 Revision Batch III organized by PT. Infobanak Lentera Cipta Kreasi.*
- *January 20, 2017 Risk Management, Maintenance Risk Management Certification organized by PT. Multi Talents Consulting.*
- *10 November 2017 Accounting for Banking PSAK 71 organizer of Bank Papua.*
- *15 November 2017 Business Process, Transformation of Bank Papua organized by Talents Indonesia.*

Important positions ever held include:

- *Kaimana Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since 04 April 2016 according to BOD Decree number: 83 / KEPEG / III / 2016 dated 01 March 2016.*
- *Senior Specialist Non Core Application at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since November 1, 2012 according to BOD Decree number: 161.A / KEPEG / IX / 2012 dated 21 September 2012.*
- *Senior IT Complience Specialist, QA & User at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since 20 April 2012 according to BOD DecreeNumber: 72 / KEPEG / IV / 2012 dated 20 April 2012.*
- *Quality Assurance at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since May 9, 2011 according to BOD Decree number: 53 / KEPEG / III / 2011 dated March 23, 2011.*
- *Auditor Specialist at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since April 14, 2008 in according to BOD Decree Number: 29 / KEPEG / IV / 2005 dated April 10, 2008.*
- *IT & IS Development Staff at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since February 2, 2005 according to BOD Decree number: 04 / DIR-BPD / III / 2005 dated 01 February 2002.*

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer's Profile

Jonathan Auparay, SE
Pjs. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
Acting Head of Human Resources Division

43 tahun. Lahir di Ansus pada tanggal 23 Maret 1974. Bekerja di Bank Papua sejak tahun 1996. Menjabat sebagai Pjs. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia sejak 21 Juni 2017 berdasarkan SK Direksi Nomor: 179/ KEPEG/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Ahli Tugas Pegawai. Memperoleh gelar Sarjana Manajemen Perusahaan di STIE OTTOW & GEISLER Serui tahun 2005.

43 years old. Born in Ansus on 23 March 1974. He has been working at Bank Papua since 1996. Occupied as Head of the Human Resources Division since June 21, 2017 based on Decree of the Board of Directors Number: 179 / KEPEG / V / 2017 dated May 19, 2017 regarding employee duties. Obtained a Bachelor degree in Corporate Management at STIE OTTOW & GEISLER Serui in 2005.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat antara lain:
- Manajemen Risiko Tingkat IV Penyelenggara BSMR pada tanggal 27 November 2013.
- Sertifikasi Pimpinan Cabang Angkatan 174 LPPI pada Tanggal 13 September 2013.

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan antara lain:
- 03 Juni 2008 *Basic Communications skill* penyelenggara Prasetya Mulya.
- 29 Juni 2009 Akuntansi Perbankan, Penyerapan PSAK 50 & 55 (revisi 2006) Penyelenggara *Risk Management* Center Indonesia.
- 15 Oktober 2009 Pengelolaan Perubahan (Madya) Coaching & Conselinh Batch II penyelenggara Citra Insan Selaras (CIS).
- 22 Maret 2010 *Leadership Skill* (Muda), Problem Solving & Decision Making penyelenggara Lembaga Manajemen PPM.
- 11 Agustus 2010 *Customer* Service Leadership Penyelenggara PT. *Risk* Frontier Indoconsult.
- 06 Februari 2012 *Customer* Service Orientation Aplikasi CAMAR Bank Papua penyelenggara Bank Papua.
- 05 September 2012 Sistem Imbal Jasa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 penyelenggara PERMENDAGRI.

Following and owning Certificates include:
- *Risk Management Level IV organized by BSMR on 27 November 2013.*
- *Branch Manager Certification batch 174 LPPI on 13 September 2013.*

Has followed the Education and Training, among others:
- *June 03, 2008 Basic Communications skill organized by Prasetya Mulya.*
- *June 29, 2009 Accounting for Banking, Absorption of SFAS 50 & 55 (revised 2006) organized by Risk Management Center Indonesia.*
- *October 15, 2009 Change Management (Madya) Coaching & Conselinh Batch II organized by Citra Insan Selaras (CIS).*
- *March 22, 2010 Leadership Skill (Young), Problem Solving & Decision Making organized by PPM Management Institute.*
- *August 11, 2010 Customer Service Leadership organized by PT. Risk Frontier Indoconsult.*
- *February 06, 2012 Customer Service Orientation Application CAMAR Bank Papua organized by Bank Papua.*
- *September 05, 2012 System of Return on Services, Minister of Home Affairs Regulation No.13 Year 2006 organized by PERMENDAGRI.*

- 26 Juli 2013 Kepatuhan, Strategi Anti Fraud Banking & *Good Corporate Governance* (GCG) penyelenggara CV. Cakrawala Anugerah.
- 22 Mei 2014 *Leadership Skill* (Muda), Leadership for managers penyelenggara Galang Learning Forum
- 30 Juni 2014 Perencanaan Karir, Assessment Potensi & Kompetensi Pegawai Calon Pemimpin Divisi, Wilayah dan Cabang penyelenggara PT. Aplikasi Sistem Bisnis.
- 20 Februari 2015 *Business Process*, End User Olibs 724 Domain kepala Divisi & Kepala Kantor Cabang penyelenggara PT. Collega Inti Pratama.
- 14 Maret 2016 Akuntansi Perbankan, PAPI 2008 & PSAK 55 revisi Batch 1 penyelenggara PT. Infobank Lentera Cipta Kreasi.
- 19 Juli 2016 Manajemen SDM, MSDM For Non SDM Batch III penyelenggara Indolatih Management.
- 20 Januari 2017 Manajemen Risiko, Program Pemeliaharan Sertifikasi Manajemen Risiko penyelenggara PT. Multi Talenta *Consulting*.
- 19 Oktober 2017 Perencanaan Karir, System Pengembangan Job Grading Penyelenggara Johnson Indonesia.
- 03 November 2017 Pelatihan dan Pengembangan Human Resources Management Penyelenggara Johnson Indonesia.
- 11 November 2017 Sistem Imbal Jasa, Perhitungan Aktuaria Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak penyelenggara PT. Dian Artha Tama.
- 15 November 2017 *Business Process*, Transformasi Bank Papua penyelenggara Talents Indonesia.
- 28 November 2017 Pelatihan dan Pengembangan Training Need Analysis penyelenggara Indolatih Management.

Jabatan penting yang pernah di pegang antara lain:

- Kepala Cabang Bintuni pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 05 Oktober 2015 sesuai SK Direksi Nomor: 104/KEPEG/X/2015.
- Kepala Cabang Waren pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 16 Mei 2013 sesuai SK Direksi Nomor: 104/KEPEG/V/2013.

- *26 July 2013 Compliance, Anti Fraud Banking Strategy & Good Corporate Governance (GCG) organized by CV. Cakrawala Anugerah.*
- *22 Mei 2014 Leadership Skill (Young), Leadership for managers organized byGalang Learning Forum.*
- *30 June 2014 Career Planning, Potential Assessment & Competence of Prospective Leaders Division, Region and Branch Officer organized by PT. Sistem Aplikasi Bisnis.*
- *February 20, 2015 Business Process, End User Olibs 724 Domain Head Division & Branch Manager Office organized by PT. Collega Inti Pratama.*
- *March 14, 2016 Accounting for Banking, PAPI 2008 & SFAS 55 revisions Batch 1 organized by PT. Infobank Lentera Cipta Kreasi.*
- *19 Juli 2016 HR Management, MSDM For Non HR Batch III organized by Indolatih Management*
- *January 20, 2017 Risk Management, Risk Management Certification Risk Management Program organized byPT. Multi Talenta Consulting.*
- *October 19, 2017 Career Planning, Job Grading Development System organized by Johnson Indonesia.*
- *03 November 2017 Training and Development of Human Resources Management organized by Johnson Indonesia.*
- *November 11, 2017 System of Benefits, Calculation of Severance Actuarial, Awards of Work Period, Replacement of Right organized by PT. Dian Artha Tama.*
- *November 15, 2017 Business Process, Transformation of Bank Papua organized by Talents Indonesia.*
- *28 November 2017 Training and Development Training Need Analysis organized by Indolatih Management.*

Important positions ever held include:

- *Bintuni Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since 05 October 2015 according to BOD Decree Number: 104 / KEPEG / X / 2015.*
- *Waren Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since May 16, 2013 according to BOD Decree Number: 104 / KEPEG / V / 2013.*

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer's Profile

Olvie Ineke Kembuan, MM
Kepala Divisi Pembinaan Cabang
Head of Branch Development Division

56 tahun. Lahir di Manado pada tanggal 16 Oktober 1961. Bekerja di Bank Papua sejak tahun 2017. Menjabat sebagai Kepala Divisi Pembinaan Cabang sejak tanggal 02 Juni 2017 berdasarkan SK Direksi nomor: 03/PK-KWT/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017. Memperoleh gelar Magister Manajemen di Universitas Sam ratulangi Manado tahun 2005.

56 years old. Born in Manado on 16 October 1961. She has been working at Bank Papua since 2017. Occupied as Branch Manager Development Division since June 2, 2017 based on Decree of the Board of Directors number: 03 / PK-KWT / VI / 2017 dated 02 June 2017. Obtained his Master of Management degree at the University of Sam ratulangi Manado in 2005.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat antara lain:
- Sertifikat Wealth Management penyelenggara LSPP.
- Sertifikat MGR level 1-2.
- Sertifikat AVV level 3.

Following and owning Certificates include:
- *Wealth Management certificate organized by LSPP.*
- *MGR level 1-2 certificate.*
- *AVV Level 3 certificate.*

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan antara lain:
- 10 November 2017 Akuntansi Perbankan, PSAK 71 penyelenggara Bank Papua.
- 15 November 2017 *Business Process*, Transformasi Bank Papua penyelenggara Talents Indonesia.

Has followed the Education and Training, among others:
- *10 November 2017 Accounting for Banking, PSAK 71 organized by Bank Papua.*
- *15 November 2017 Business Process, Transformation of Bank Papua organized by Talents Indonesia.*

Jabatan penting yang pernah di pegang antara lain:
- Terakhir Wakil Pemimpin Kanwil BNI Manado.

Important positions ever held include:
- *Last Deputy Leader of BNI Regional Office of Manado.*

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer's Profile

Petrus Agus Soleman, SE
Kepala Divisi Akuntansi
Head of Accounting Division

49 tahun. Lahir di Abepura pada tanggal 25 Oktober 1968. Bekerja di Bank Papua sejak tahun 1998. Menjabat sebagai Kepala Divisi Akuntansi sejak 03 Juni 2015 berdasarkan SK Direksi Nomor: 41.1/KEPEG/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Ahli Tugas Pegawai. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Cenderawasih Jayapura tahun 1994.

49 years. Born in Abepura on 25 October 1968. He has been working at Bank Papua since 1998. Occupied as Head of Accounting Division since June 03, 2015 based on Decree of the Board of Directors Number: 41.1 / KEPEG / V / 2015 dated May 19, 2015 regarding employee duties. Obtained his Bachelor of Economics degree at Cenderawasih University in Jayapura in 1994.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat antara lain:
- Manajemen Risiko Tingkat V penyelenggara BSMR pada tanggal 29 September 2016.
- Sertifikasi SESPIBANK angkatan 64 penyelenggara LPPI pada Tanggal 19 Maret 2016.
- Manajemen Risiko Tingkat IV penyelenggara BSMR pada tanggal 23 November 2013.
- Sertifikasi Pimpinan Cabang angkatan 166 penyelenggara LPPI pada Tanggal 20 September 2010.

Following and having a Certificates include:
- *Risk Management Level V organized by BSMR on 29 September 2016.*
- *Certification of SESPIBANK batch 64 organized by LPPI on 19 March 2016.*
- *Risk Management Level IV of organized by BSMR on 23 November 2013.*
- *Branch Manager Certification batch166 organized by LPPI on 20 September 2010.*

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan antara lain:
- 18 Juli 2001 Manajemen Investasi/Perpajakan, perpajakan Brevet A &B penyelenggara BPD JAP-LM, PATRA, JAP.
- 18 Maret 2003 Manajemen SDM, SK Direksi No.16 tentang Tata cara pemotongan PPH Pasal 21 penyelenggara Bank Papua.
- 30 April 2004 Pemeriksaan Intern/audit, Sertifikasi Professional Internak Auditor (SPIA) penyelenggara STAN JKT.
- 04 Desember 2006 Treasury (ALMA), Bank Devisa, Treasury MGT & Pasar Modal penyelenggara EDP STAN.

Has followed the Education and Training, among others:
- *18 Juli 2001 Investment Management / Taxation, taxation Brevet A & B organized by BPD JAP-LM, PATRA, JAP*
- *March 18, 2003 Human Resource Management, BOD Decree No.16 on the procedure for withholding PPH Article 21 organized by Bank Papua.*
- *April 30, 2004 Internal Audit, Certification of Professional Internal Auditor (SPIA) organized by STAN JKT*
- *04 Desember 2006 Treasury (ALMA), Foreign Exchange Bank, Treasury MGT & Capital Market organized by EDP STAN*

- 01 Desember 2008 Akuntansi Perbankan, Penerapan PSAK 50 &55 Revisi 2006 penyelenggara *Risk Management* Center Indonesia (RMCI).

- 27 Januari 2011 Kepemimpinan Utama (DKMU), *Quality Leadership ans Life manajement* penyelenggara ASBANDA.
- 04 Juni 2012 Kepatuhan, Standar Operating Procedure (SOP) Strategi Anti Fraud penyelenggara Talents Indonesia.
- 06 Agustus 2012 Perencanaan dan Anggaran Keuangan, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) tahun 2013 penyelenggara LEMBANGTEK.
- 01 Juli 2014 Perencanaan Karir, Assessment Potensi & Kompetensi Pegawai Calon Pemimpin Divisi, Kantor Wilayah penyelenggara PT. Aplikasi Sistem Bisnis.
- 20 April 2015 Penilaian Karya, Penyusunan System Manajemen Kinerja penyelenggara PT. Aplikasi Sistem Bisnis.
- 01 Februari 2017 Manajemen Keuangan, pelatihan PSAK 24 penyelenggara PT. Media Utama Indonesia.
- 05 Oktober 2017 Akutansi Perbankan, Penerapan PSAK 71 penyelenggara OJK Pusat.

- 10 November 2017 Akuntansi Perbankan, PSAK 71 penyelenggara Bank Papua.
- 11 November 2017 Sistem Imbal Jasa, Perhitungan Aktuaria Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak Penyelenggara PT. Dian Artha Tama.
- 15 November 2017 *Business Process*, Transformasi Bank Papua penyelenggara Talents Indonesia
- 16 November 2017 Treasury (ALMA), Pengelolaan *Liquidity Risk* dalam rangka implementasi pelaksanaan penyelenggara PT. Synergi Daya Utama.

Jabatan penting yang pernah di pegang antara lain:
- Kepala Cabang Mulia pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 03 Mei 2010 sesuai SK Direksi Nomor: 66/KEPEG/IV/2010 tanggal 22 April 2010.
- Kepala Cabang Pembantu Mulia pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 12 Mei 2009 sesuai SK Direksi Nomor: 32/KEPEG/IV/2009 tanggal 20 April 2009.

- *01 Desember 2008 Accounting for Banking, Implementation of PSAK 50 & 55 Revised 2006 organized by Risk Management Center Indonesia (RMCI).*
- *27 Januari 2011 Leadership (DKMU), Quality Leadership ans Life management organized by ASBANDA.*
- *04 Juni 2012 Compliance, Standard Operating Procedure (SOP) Anti Fraud Strategy organized by Talents Indonesia.*
- *06 Agustus 2012 Financial Planning and Budget, preparation of Work Plan and Budget (RKAP) of 2013 organized by LEMBANGTEK.*
- *01 Juli 2014 Career Planning, Potential Assessment & Competence of Prospective Leaders Division Officers, Regional Offices organized by PT. Sistem Aplikasi Bisnis.*
- *20 April 2015 Assessment of Work, Preparation of Performance Management System organized by PT. Sistem Aplikasi Bisnis.*
- *01 Februari 2017 Financial Management, training of PSAK 24 organized by PT. Main Media Indonesia.*
- *05 Oktober 2017 Accounting for Banking, Implementation of PSAK 71 organized by Central OJK.*
- *10 November 2017 Accounting for Banking, PSAK 71 organized byBank Papua.*
- *11 November 2017 System of Return on Services, Calculation of Severance Actuarial, Awards of Work Period, Transfer of Right organized by PT. Dian Artha Tama.*
- *15 November 2017 Business Process, Transformation of Bank Papua organized by Talents Indonesia.*
- *16 November 2017 Treasury (ALMA), Liquidity Risk Management in the framework of implementation organized by PT. Synergi Daya Utama.*

Important positions ever held include:
- *Mulia Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since 03 May 2010 according to BOD Decree Number: 66 / KEPEG / IV / 2010 dated 22 April 2010.*
- *Mulia Sub Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since May 12, 2009 according to BOD Decree Number: 32 / KEPEG / IV / 2009 dated April 20, 2009.*

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer's Profile

Dra. Sujah Ali
Kepala Divisi Treasury dan International
Head of Treasury and International Division

54 tahun. Lahir di Merauke pada tanggal 13 Desember 1963. Bekerja di Bank Papua sejak tahun 1988. Menjabat sebagai Kepala Divisi Treasury & Internasional sejak 16 September 2013 berdasarkan SK Direksi Nomor: 186/KEPEG/IX/2013 tanggal 06 September 2013 tentang Ahli Tugas Pegawai. Memperoleh gelar Sarjana Sastra Inggris di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1987.

54 years old. Born in Merauke on 13 December 1963. She has been working at Bank Papua since 1988. Occupied as Head of Treasury & International Division since 16 September 2013 based on Decree of the Board of Directors Number: 186 / KEPEG / IX / 2013 dated 06 September 2013 regarding Employee Duties Experts. Obtained his degree in English Literature at Hasanuddin University Makassar in 1987.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat antara lain:
- Program Khusus Sertifikasi Treasury Dealer penyelenggara LSPP tanggal 25 Maret 2017.
- Manajemen Risiko Tingkat V penyelenggara BSMR pada tanggal 01 Oktober 2016.
- Sertifikasi SESPIBANK General Banking penyelenggara LPPI pada Tanggal 20 Mei 2014.
- Sertifikasi SESPIBANK angkatan 59 penyelenggara LPPI pada Tanggal 20 September 2013.
- Sertifikasi Pimpinan Cabang penyelenggara LPPI pada Tanggal 03 Juli 2000.

Following and owning Certificates include:
- *Special Program of Treasury Certification Dealer of organized by LSPP dated March 25, 2017.*
- *Risk Management Level V organized by BSMR on 01 October 2016.*
- *Certification of SESPIBANK General Banking organized by LPPI on May 20, 2014.*
- *SESPIBANK certification batch 59 organized by LPPI on 20 September 2013.*
- *Branch Manager Certification organized by LPPI on July 3, 2000.*

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan antara lain:
- 16 Februari 1990 Treasury (Alma) & Forex penyelenggara LPPI.
- 23 April 2003 retail dan UKMK, strategi pengembangan usaha kecil & menengah penyelenggara UGM.
- 22 September 2005 Perencanaan Karier, Kenaikan Pangkat/Golongan penyelenggara LPPI.
- 15 November 2006 Strategi Korporasi, Proyek Percontohan KPR/KPRS penyelenggara ASBANDA.
- 04 Desember 2006 Treasury (Alma), Bank Devisa, Treasury MGT & Pasar Modal penyelenggara EDP STAN.
- 26 Maret 2008 Analisa Kredit, *Knowledge* Sharing Linkage Program, penyelenggara BI.
- 06 Juni 2008 Retail dan UKMK, plafond kredit

Has followed the Education and Training, among others:
- *16 Februari 1990 Treasury (Alma) & Forex organized by LPPI.*
- *23 April 2003 retail and UKMK, small & medium enterprise development strategy organized by UGM.*
- *22 September 2005 Career Planning, Promotion/ Class organized by LPPI.*
- *15 November 2006 Corporate Strategy, KPRS Pilot Project organized by ASBANDA.*
- *04 Desember 2006 Treasury (Alma), Forex Bank, Treasury MGT & Capital Market organized by EDP STAN.*
- *26 Maret 2008 Loan Analysis, Knowledge Sharing Linkage Program, organized by BI.*
- *06 Juni 2008 Retail and SMES, loan limit Investment organized by Ministry of Agriculture RI.*

Investasi penyelenggara Departemen Pertanian RI.
- 03 November 2009 Treasury (ALMA), internasional Banking Trade Finance & and Trade Finance Penyelenggara PT. Bank Mandiri.
- 17 November 2009 Treasury (RTGS), Basic Treasury penyelenggara LPPI.
- 27 Februari 2012 Audit Treasury penyelenggara Citra Insan Selaras (CIS).
- 15 Maret 2012 Manajemen *Likuiditas* Penyelenggara ASBANDA.
- 26 Juli 2013 Kepatuhan, Strategi Anti Fraud Banking & GCG penyelenggara CV. Cakrawala.
- 30 Juni 2014 Perencanaan Karir, Assessment Potensi & Kompetensi pegawai Calon Divisi, Wilayah dan Cabang.
- 10 November 2015 Treasury (Alma), Penyediaan *Likuiditas* Akhir Tahun penyelenggara ASBANDA.
- 03 Mei 2016 Treasury (Alma),Tata Cara Penilaian Kecukupan Kebijakan & Prosedur Aktifitas Treasury ALMA/ALCO penyelenggara Leinad Aganis Consultant.
- 03 September 2016 Akuntansi Perbankan, Tax Amnesty, Sebuah Tantangan sekaligus Peluang bagi Bank penyelenggara ASBANDA.
- 25 November 2016 Manajemen Risiko, Program Pemeliharaan Manajemen Risiko penyelenggara PT. Multi Talenta *Consulting*.
- 20 Maret 2017 *Business Process*, Persiapan Pra Purnabakti Batch I penyelenggara PT. Multi Talenta *Consulting*.
- 25 Maret 2017 Treasury (Alma), Program Khusus (Fast Track) penyelenggara ACI FMAI.
- 10 November 2017 Akuntansi Perbankan, PSAK 71 penyelenggara Bank Papua.
- 15 November 2017 *Business Process*, Transformasi Bank Papua penyelenggara talents Indonesia.
- 16 November 2017 Treasury (Alma), Pengelolaan *Liquidity Risk* dalam rangka Implementasi Pelaksanaan penyelenggara PT. Synergi Daya Utama.

Jabatan penting yang pernah di pegang antara lain:
- Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Rakyat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 20 April 2012 sesuai SK Direksi Nomor: 72/KEPEG/IV/2012 pada tanggal tanggal 20 April 2012.
- Kepala Departemen Pasar Uang, Modal, Srt Berharga & *Likuiditas* Divisi Treasury & Internasional pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 01 September 2009 sesuai SK Direksi Nomor: 99/KEPEG/VIII/2009 pada tanggal tanggal 21 Agustus 2009.
- Wakil Kepala Cabang Utama Jayapura pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 09 Februari 2009 sesuai SK Direksi Nomor: 02/KEPEG/I/2009 tanggal 19 Januari 2009.

- *03 November 2009 Treasury (ALMA), International Banking Trade Finance & and Trade Finance organized by PT. Mandiri Bank.*
- *17 November 2009 Treasury (RTGS), Basic Treasury organized by LPPI.*
- *27 Februari 2012 Audit Treasury organized by Citra Insan Selaras (CIS).*
- *15 Maret 2012 Liquidity Management organized by ASBANDA.*
- *26 Juli 2013 Compliance, Anti Fraud Banking Strategy & GCG organized by CV. Cakrawala.*
- *30 Juni 2014 Career Planning, Potential Assessment & Competence of Candidates for Division, Region and Branch Officer.*
- *10 November 2015 Treasury (Alma), Provision of Liquidity End of Year organized by ASBANDA.*
- *03 Mei 2016 Treasury (Alma), Procedures for Assessing the Sufficiency of Policies & Procedures of Treasury Activities ALMA / ALCO organized by Leinad Aganis Consultant.*
- *03 September 2016 Accounting for Banking, Tax Amnesty, A Challenge as well as Opportunity for Bank organized by ASBANDA.*
- *25 November 2016 Risk Management, Risk Management Maintenance Program organized by PT. Multi Talenta Consulting.*
- *20 Maret 2017 Business Process, Pre-Retirement Preparation Batch I organized by PT. Multi Talenta Consulting.*
- *25 Maret 2017 Treasury (Alma), Special Program (Fast Track) organized by ACI FMAI.*
- *10 November 2017 Accounting for Banking, PSAK 71 organized by Bank Papua.*
- *15 November 2017 Business Process, Transformation of Bank Papua organized by Talents Indonesia.*
- *16 November 2017 Treasury (Alma), Management of Liquidity Risk in Implementation Framework organized by PT. Synergi Daya Utama.*

Important positions ever held include:
- *Head of Economic Development Division at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since 20 April 2012 according to BOD DecreeNumber: 72 / KEPEG / IV / 2012 on 20 April 2012.*
- *Head of Money Market, Capital, Bonds & Liquidity of Treasury & International Division Department at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since September 1, 2009 according to BOD Decree Number: 99 / KEPEG / VIII / 2009 dated August 21, 2009.*

- *Jayapura Deputy Main Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since February 9, 2009 according to BOD Decree Number: 02 / KEPEG / I / 2009 dated January 19, 2009.*

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer's Profile

Yuliana D Yembise, SH. MH
Kepala Divisi Umum
Head of General Affair Division

52 tahun. Lahir di Biak pada tanggal 20 Desember 1965. Bekerja di Bank Papua sejak tahun 1990. Menjabat sebagai Kepala Divisi Umum sejak 09 Juni 2017 berdasarkan SK Direksi Nomor: 179/KEPEG/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Ahli Tugas Pegawai. Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Cenderawasih Jayapura tahun 1990.

52 years. Born in Biak on December 20, 1965. She has been working at Bank Papua since 1990. Occupied as Chief of General Affair Division since June 9, 2017 based on Decree of the Board of Directors Number: 179 / KEPEG / V / 2017 dated May 19, 2017 regarding Employee Duties. Obtained his law degree at the Cenderawasih University in Jayapura in 1990.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat antara lain:
- Manajemen Risiko Tingkat V penyelenggara BSMR pada tanggal 16 Juli 2016.
- Sertifikasi Qualified Auditor Tingkat Dasar 2 penyelenggara YPIA pada tanggal 16 September 2013.
- Sertifikasi SESPIBANK penyelenggara LPPI pada Tanggal 20 Juli 2007.
- Sertifikasi Pimpinan Cabang angkatan 169 penyelenggara IBI JKT pada Tanggal 01 Januari 2003.

Following and having Certificates include:
- *Risk Level Management Level V organized by BSMR July 16, 2016.*
- *2nd Base Qualified Auditor Certification organized by YPIA on September 16, 2013.*
- *SESPIBANK certification organized by LPPI on July 20, 2007.*
- *Branch Manager Certification batch169 organized by IBI JKT on January 01, 2003.*

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan antara lain:
- 09 Juni 1997 Audit Intern penyelenggara BPD – PT. Econ.
- 29 April 1998 *Leadership Skill* (Muda), Manajer Lini Pertama penyelenggara BPD – IBI JKT.
- 01 Januari 2006 Perencanaan Karir, Dinas Kenaikan Pangkat/Gol C4-D1 penyelenggara BPD – LPPI.
- 28 Juli 2008 Perencanaan & Anggaran Keuangan, *Business* Continuity Planing penyelenggara Talents Indonesia.
- 26 Mei 2009 Manajemen Investasi, Obligasi & Reksadana penyelenggara PT.Danareksa.
- 15 Juli 2013 Audit Intern, Audit Investigasi penyelenggara LP *Fraud Auditing*.

Has followed the Education and Training, among others:
- *09 Juni 1997 Internal Audit organized by BPD - PT. Econ.*
- *29 April 1998 Leadership Skill (Youth), First Line Manager organized by BPD - IBI JKT.*
- *01 Januari 2006 Career Planning, Department of Promotion / C4-D1 Class organized by BPD - LPPI.*
- *28 Juli 2008 Financial Planning & Budgeting, Business Continuity Planing organized by Talents Indonesia.*
- *26 Mei 2009 Investment Management, Bonds & Mutual Funds organized by PT.Danareksa.*
- *15 Juli 2013 Internal Audit, Audit Investigation organized by of LP Fraud Auditing.*

- 30 Juni 2014 Perencanaan Karir, Asesment Potensi & Kompetensi Pegawai Calon Pemimpin Divisi, Wilayah Dan Cabang.
- 04 Agustus 2016 General Auditing, Efektivitas audit internal dalam mencegah fraud penyelenggara LPPI.
- 25 November 2016 Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko penyelenggara PT. MTC.
- 15 November 2017 *Business Process*, Transformasi Bank Papua penyelenggara Talents Indonesia.

Jabatan penting yang pernah di pegang antara lain:
- Kepala SKAI pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 08 Januari 2013 sesuai SK Direksi nomor: 03/KEPEG/I/2013 tanggal 08 Januari 2013.
- Senior Executive Specialias Auditor Umum pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 27 Agustus 2012 sesuai SK Direksi nomor: 147/ KEPEG/VIII/2012 tanggal tanggal 27 Agustus 2012.
- Kepala Divisi Treasury & Internasional pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 16 Februari 2009 sesuai SK Direksi nomor: 03/ KEPEG/I/2009 tanggal tanggal 27 Januari 2009.
- Kepala Divisi Perencanaan & Keuangan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 01 Februari 2008 sesuai SK Direksi nomor: 105/KEPEG/ XII/2013 tanggal tanggal 12 Desember 2007.
- Kepala Cabang Timika pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 03 Mei 2006 sesuai SK Direksi nomor: 28/KEPEG/V/2006 tanggal tanggal 01 Mei 2006.
- Kepala Departemen Forex & Pasar Uang Divisi Treasury & Internasional pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 12 Juli 2005 sesuai SK Direksi nomor: 53/KEPEG/ VII/2005 tanggal 12 Juli 2005.
- Kepala Departemen Investasi Divisi Treasury & Internasional pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 01 Februari 2005 sesuai SK Direksi nomor: 4/DIR-BPD/III/2005 tanggal 01 Februari 2005.
- Kepala Sekretariat Dewan Pengawas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 21 Januari 2002 sesuai SK Direksi nomor:02/ KEPEG/I/2002 tanggal 21 Januari 2002.

- *30 Juni 2014 Career Planning, Assessment of Potential & Competence of Prospective Leaders Division, Region and Branch Officer.*
- *04 Agustus 2016 General Auditing, Effectiveness of internal audit in preventing fraud organized by LPPI.*
- *25 November 2016 Maintenance Program Risk Management Certification organized by PT. MTC.*
- *15 November 2017 Business Process, Transformation of Bank Papua organized by Talents Indonesia.*

Important positions ever held include:
- *Head of SKAI Division at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since January 08, 2013 according to BOD Decree number: 03 / KEPEG / I / 2013 dated January 08, 2013.*
- *Senior Executive Specialias General Auditor at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since August 27, 2012 according to BOD Decreenumber: 147 / KEPEG / VIII / 2012 dated August 27, 2012.*
- *Head of Treasury & International Division at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since February 16, 2009 according to BOD Decreenumber: 03 / KEPEG / I / 2009 dated January 27, 2009.*
- *Head of Planning & Finance Division at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since February 1, 2008 according to BOD Decree number: 105 / KEPEG / XII / 2013 dated December 12, 2007.*
- *Timika Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since May 03, 2006 according to BOD Decree number: 28 / KEPEG / V / 2006 dated May 1, 2006.*
- *Head of Forex & Money Market Department, Treasury & International Div. at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since July 12, 2005 according to BOD Decree No.: 53 / KEPEG / VII / 2005 dated July 12, 2005.*
- *Head of Investment Department of Treasury & International Div. at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since February 1, 2005 according to BOD Decree No: 4 / DIR-BPD / III / 2005 dated 01 February 2005.*
- *Head of Secretary of the Supervisory Board at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since January 21, 2002 according to BOD Decree number: 02 / KEPEG / I / 2002 dated January 21, 2002.*

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer's Profile

Daniel Palullungan, S.Pi, MM
Kepala Divisi Risiko Bisnis
Business Risk Division

48 tahun. Lahir di Rantepao, pada tanggal 07 September 1969. Bekerja di Bank Papua sejak tahun 1996. Menjabat sebagai Kepala Divisi Risiko Bisnis sejak 12 September 2017 berdasarkan SK Direksi Nomor: 315/KEPEG/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Ahli Tugas Pegawai. Memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 1989.

48 years. Born in Rantepao on 7 September 1969. He has been workiing at Bank Papua since 1996. Occupied as Head of Business Risk Division since September 12, 2017 based on Decree of the Board of Directors Number: 315 / KEPEG / IX / 2017 dated September 12, 2017 regarding Employee Duties. Obtained his bachelor degree in State Administration at Sam Ratulangi University of Manado in 1989.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat antara lain:
- Program Sertifikasi Pimpinan Cabang Angkatan 169 penyelenggara LPPI tanggal 19 September 2011.
- Manajemen Risiko Tingkat IV penyelenggara BSMR tanggal 25 Juni 2011.

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan antara lain:
- 20 Mei 2002 Retail & UKMK, Penyelematan Kredit penyelenggara LPPI.
- 01 Januari 2006 *Loan Analysis* penyelenggara PT. Citra Insan Selaras.
- 19 Februari 2007 Bisnis & Strategi (Madya) penyelenggara LPPM.
- 13 Agustus 2008 Retail & UKMK, Pengembangan Ekonomi Rakyat penyelenggara Bank Papua.
- 27 Januari 2011 Quality Leadership and Life Management penyelenggara ASBANDA.
- 26 Juli 2013 Kepatuhan, Strategi Anti Fraud Banking & GCG penyelenggara CV. Cakrawala Anugerah.
- 01 Juli 2014 Perencanaan Karir, Assessment Potensi & Kompetensi Pegawai Calon Pemimpin Divisi, Kantor Wilayah dan Cabang penyelenggara PT. Aplikasi Sistem Bisnis.
- 20 Februari 2015 *Business Process*, End User Olibs 724 Domain Kepala Divisi & Kepala Cabang Penyelenggara PT. Aplikasi Sistem Bisnis.

Following and owning Certificates include:
- *Branch Manager Certification Program batch 169 organized by LPPI dated September 19, 2011*
- *Risk Management Level IV organized by BSMR dated June 25, 2011.*

Has followed the Education and Training, among others:
- *20 Mei 2002 Retail & SMEs, Loan Settlement organized by LPPI.*
- *01 Januari 2006 Loan Analysisorganized byPT. Citra Insan Selaras.*
- *19 Februari 2007 Business & Strategy (Madya) organized by LPPM.*
- *13 Agustus 2008 Retail & UKMK, People's Economic Development organized by Bank Papua.*
- *27 Januari 2011 Quality Leadership and Life Management organized by ASBANDA.*
- *26 Juli 2013 Compliance, Anti Fraud Banking Strategy & GCG organized by CV. Cakrawala Anugerah.*
- *01 Juli 2014 Career Planning, Potential Assessment & Competence of Prospective Leaders Division, Regional Office and Branch organized by PT. Sistem Aplikasi Bisnis.*
- *20 Februari 2015 Business Process, End User Olibs 724 Domain Head Division & Branch Manager organized by PT. Sistem Aplikasi Bisnis.*

- 15 Maret 2016 Akuntansi Perbankan, PAPI 2008 & PSAK 55 revisi Batch II penyelenggara PT. Infobank Lentera *Consulting*.
- 25 November 2016 Manajemen Risiko, Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko penyelenggara PT. Multi Talenta *Consulting*.
- 26 Agustus 2017 Analisa Kredit atas Laporan Keuangan penyelenggara BNI.
- 10 November 2017 Akuntansi Perbankan, PSAK 71 penyelenggara Bank Papua.
- 15 November 2017 *Business Process*, Transformasi Bank Papua penyelenggara Talents Indonesia.
- 16 November 2017 Treasury (ALMA), Pengelolaan *Liquidity Risk* dalam rangka Implementasi Pelaksanaan penyelenggara PT. Synergi Daya Utama.

Jabatan penting yang pernah di pegang antara lain:

- Kepala Departemen Risiko Bisnis Komersial, Korporasi & Sindikasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 03 Juli 2017 sesuai SK Direksi Nomor: 179/KEPEG/V/2017 tanggal tanggal 19 Mei 2017.
- Kepala Departemen Pembinaan & Supervisi Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 20 Februari 2017 sesuai SK Direksi Nomor: 32.1/KEPEG/I/2017 tanggal tanggal 20 Januari 2017.
- Senior Spesialis Kebijakan & Prosedur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 11 September 2015 sesuai SK Direksi Nomor: 90.2/ KEPEG/IX/2015 tanggal tanggal 11 September 2015.
- Kepala Cabang Teminabuan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 28 agustus 2012 sesuai SK Direksi Nomor: 34.1/ KEPEG/VIII/2012 tanggal tanggal 17 Juli 2012.
- Kepala Cabang Sorong pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 05 April 2012 sesuai SK Direksi Nomor: 46/KEPEG/III/2012 tanggal tanggal 02 Maret 2012.
- Kepala Cabang Waisai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 18 April 2010 sesuai SK Direksi Nomor: 143/KEPEG/X/2010 pada tanggal tanggal 18 Oktober 2010.
- Kepala Cabang Pembantu Waisai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 07 Okober 2009 sesuai SK Direksi Nomor: 99/ KEPEG/VIII/2009 tanggal tanggal 18 Agustus 2009.

- *15 Maret 2016 Accounting for Banking, PAPI 2008 & PSAK 55 revision Batch II organized by PT. Infobank Lentera Consulting.*
- *25 November 2016 Risk Management, Risk Management Certification Maintenance Program organized by PT. Multi Talenta Consulting.*
- *26 Agustus 2017 Loan Analysis of Financial Report organized by BNI.*
- *10 November 2017 Accounting for Banking, PSAK 71 organized by Bank Papua.*
- *15 November 2017 Business Process, Transformation of Bank Papua organized by Talents Indonesia.*
- *16 November 2017 Treasury (ALMA), Management of Liquidity Risk in Implementation Framework organized by PT. Synergi Daya Utama.*

Important positions ever held include:

- *Head of Commercial, Corporate & Syndicated Business Risks Department at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since July 3, 2017 according to BOD Decree Number: 179 / KEPEG / V / 2017 dated May 19, 2017.*
- *Head of Construction & Loan Supervision Department at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since February 20, 2017 according to BOD Decree Number: 32.1 / KEPEG / I / 2017 dated January 20, 2017.*
- *Senior Policy Specialist & Procedure at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since September 11, 2015 according to BOD Decree Number: 90.2 / KEPEG / IX / 2015 dated September 11, 2015.*
- *Teminabuan Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since 28 August 2012 according to BOD Decree Number: 34.1 / KEPEG / VIII / 2012 dated July 17, 2012.*
- *Sorong Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since April 5, 2012 according to BOD Decree Number: 46 / KEPEG / III / 2012 dated 02 March 2012.*
- *Waisai Branch Manager at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since 18 April 2010 according to BOD Decree Number: 143 / KEPEG / X / 2010 on October 18, 2010.*
- *Waisai Sub-Branch Manager Office at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since 07 October 2009 according to BOD Decree Number: 99 / KEPEG / VIII / 2009 dated August 18, 2009.*

Profil Pegawai Perusahaan

Employees Profile

Bank Papua sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menyadari bahwa perusahaan yang sukses mengelola SDM tidak hanya memberikan gaji yang layak bagi pekerja, namun paham bahwa kebutuhan pekerja tidak hanya berhubungan dengan masalah finansial. Perusahaan juga harus memberikan rasa aman, memberikan penghargaan akan jati diri, pengakuan sosial, dan pemberian peluang aktualisasi diri bagi pekerja. Hasilnya sungguh luar biasa, dimana pekerja bekerja dengan mentalitas yang pantang menyerah dan penuh energi yang berlimpah ruah. Para pekerja tidak hanya menjalankan tugas yang harus dikerjakan tetapi berlomba-lomba memberikan seluruh kemampuannya untuk kemajuan perusahaan. Untuk itu, Manajemen Bank Papua berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam mengelola Sumber Daya Manusia yang dimiliki sesuai dengan tujuan perusahaan.

Bank Papua as a company that upholds humanistic values realizes that a successful company managing human resources not only provides a decent salary for workers, but understands that the needs of workers are not only related to financial problems. Companies should also provide a sense of security, an appreciation of identity, social recognition, and the provision of self-actualization opportunities for workers. The result is remarkable, where workers work with an unyielding mentality and abundant energy. The workers not only perform the task to be done, but compete to give all their ability to progress the company. To that end, the Bank Papua Management is committed to apply these principles in managing Human Resources owned in accordance with corporate objectives.

Komposisi Pegawai

Jumlah Pegawai

Sampai dengan tahun 2017 jumlah pegawai Bank Papua sebanyak 2.565 orang, yang terdiri dari 2.343 Pegawai tetap dan 189 pegawai kontrak serta 33 honor diperbantukan yang ditempatkan diseluruh Kantor Bank Papua, dengan jumlah pegawai seperti tergambar pada tabel dibawah ini:

Employee Composition

Number of Employees

Up to 2017 the number of Bank Indonesia employees is 2,565 persons, consisting of 2,343 permanent employees and 189 contract employees and 33 honorarium placed throughout the Bank Papua Office, with the number of employees as illustrated in the table below:

JUMLAH PEGAWAI BANK PAPUA DARI TAHUN 2013-2017
NUMBER OF EMPLOYEES OF BANK PAPUA FROM 2013-2017

No	Status Pegawai	Total 2013	Total 2014	Total 2015	Total 2016	Total 2017	*Employee Status*
1	Pegawai Tetap	1.916	1.875	2.211	2.426	2.343	*Permanent employee*
2	Profesional Hire	-	-	-	-	1	*Professional Hire*
3	PKWT/Kontrak	69	446	341	237	188	*Contract*
	Sub Total	1.985	2.321	2.552	2.663	2.532	*Sub-Total*
3	HDP	36	40	38	38	33	*HDP*
	Jumlah	2.021	2.361	2.590	2.701	2.565	

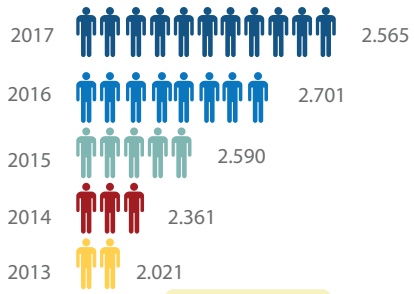

Dibandingkan dengan tahun 2016, secara total terjadi penurunan jumlah pegawai tetap sebanyak 136 orang atau 5,04% di tahun 2017.

Compared to 2016, the total number of permanent employees decreased by 136 people or 5.04% in 2017.

Uraian lengkap mengenai profil karyawan, dapat dilihat pada bab Pendukung Bisnis dalam Laporan Tahunan 2017 ini.

Detailed description of employee** profiles**, can be seen in the Business Support chapter in this 2017 Annual Report.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Bank Papua memiliki pegawai dengan tingkat pendidikan yang bervariasi dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Doktoral untuk mengakomodir kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan. Sampai dengan tahun 2017, komposisi pegawai Bank Papua berdasarkan jenjang pendidikan seperti terlihat dalam tabel dibawah ini:

Number of Employees by Education Level

Bank Papua has employees with varying levels of education from elementary school level to doctoral level to accommodate the needs of workers in accordance with the needs. Until 2017, the composition of Bank Papua employees based on education level as shown in the table below:

JUMLAH PEGAWAI BANK PAPUA BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN DARI TAHUN 2013-2017
NUMBER OF EMPLOYEES OF BANK PAPUA BASED ON EDUCATION LEVEL FROM 2013-2017

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TOTAL 2013	TOTAL 2014	TOTAL 2015	TOTAL 2016	TOTAL 2017	*EDUCATIONAL LEVEL*
1	DOKTOR (S3)	-	-	1	1	1	*DOCTORAL (S3)*
2	PASCA SARJANA (S2)	45	53	60	67	69	*POST GRADUAT (S2)*
3	SARJANA (S1)	1.281	1.645	1.897	2.061	1.990	*BACHELOR DEGREE)*
4	DIPLOMA (D4)	1	2	2	1	1	*DIPLOMA (D4)*
5	DIPLOMA (D3)	111	120	120	112	105	*DIPLOMA (D3)*
6	DIPLOMA (D1)	2	2	3	3	3	*DIPLOMA (D1)*
7	SMA / SEDERAJAT	570	529	498	447	389	*SENIOR HIGH / EQUAL*
8	SMP / SEDERAJAT	5	5	4	4	3	*JUNIOR HIGH / EQUAL*
9	SD / SEDERAJAT	6	5	5	5	4	*ELEMENTARY / EQUAL*
TOTAL		**2.021**	**2.361**	**2.590**	**2.701**	**2.565**	

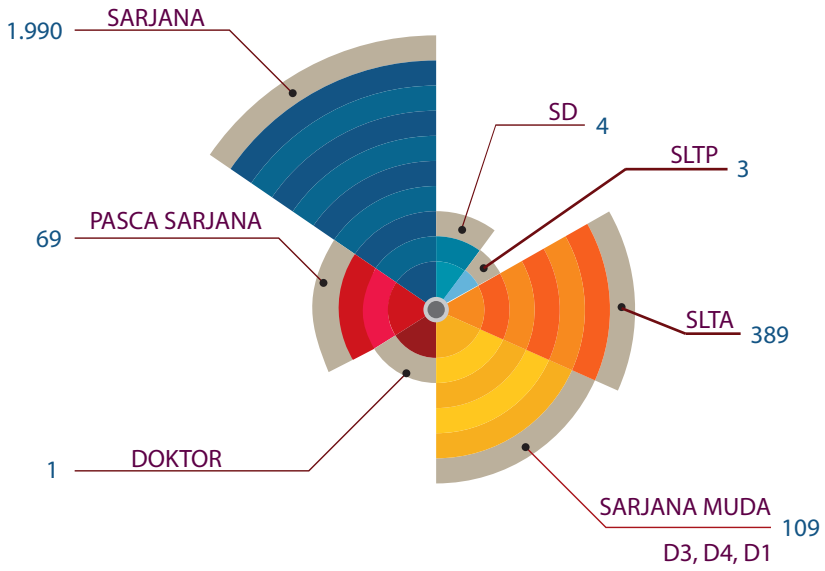

Terjadi penambahan pegawai untuk jenjang pasca sarjana sebanyak 2 orang dan pengurangan pegawai pada jenjang sarjana sebanyak 71 orang, pada jenjang SMA sederajat sebanyak 58 orang, pada jenjang SMP sederajat sebanyak 1 orang, serta pada jenjang SD sederajat sebanyak 1 orang.

There was an increase in the number of employees for the graduate level as much as 2 people and the reduction of the employee at the bachelor level as many as 62 people, at the equivalent of 53 senior high school level, at the junior high school equivalent of 1 person, as well as in elementary school level equal to 1 person.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Bank Papua memiliki pegawai dengan tingkat usia produktif yang bervariasi. Sampai dengan tahun 2017, komposisi pegawai berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

Employee Composition by Age

Bank Papua has employees with varying productive age. Up to 2017, the composition of employees by age is as follows:

KOMPOSISI PEGAWAI BANK PAPUA BERDASARKAN USIA DARI TAHUN 2013-2017
COMPOSITION OF EMPLOYEES OF BANK PAPUA BY AGE FROM 2013-2017

NO	JENJANG USIA	JML 2013	JML 2014	JML 2015	JML 2016	JML 2017
1	21 – 25	464	448	362	281	280
2	26 – 30	702	921	1.102	1.173	1.128
3	31 – 35	339	467	571	663	638
4	36 – 40	151	152	163	181	173
5	41 – 45	186	173	175	166	151
6	46 – 50	123	137	136	120	115
7	> 50	56	63	81	117	80
TOTAL		**2.021**	**2.361**	**2.590**	**2.701**	**2.565**

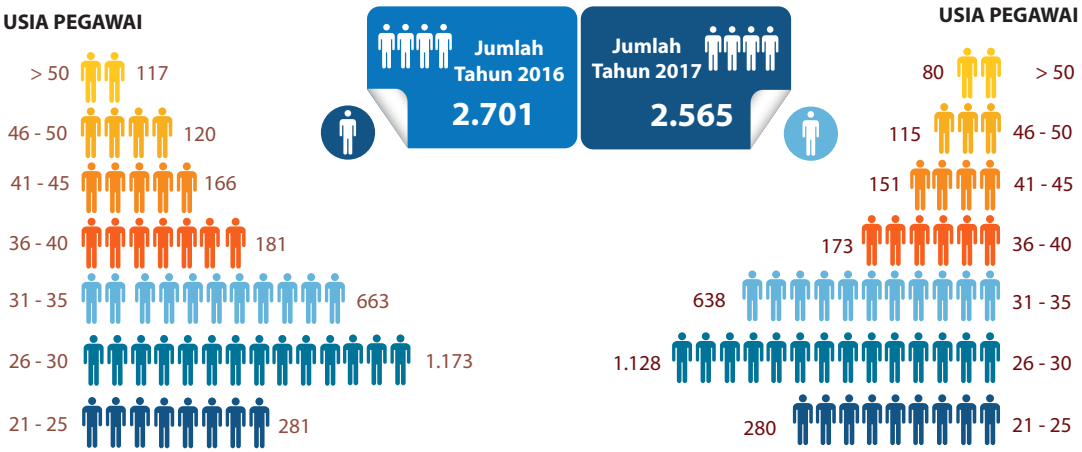

Ditahun 2017, pegawai pada usia 26-30 tahun dan 31 sampai 35 tahun mendominasi komposisi total pegawai, yang artinya pegawai dengan usia muda dan produktif lebih banyak.

By 2017, employees at the age of 26-30 years and 31-35 years dominate the total composition of employees, which means younger and more productive employees.

Struktur Grup Perusahaan, Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi

The Structure of the Company Group, Subsidiaries and Affiliates

Nama dan Alamat Entitas Anak & Asosiasi *Name and Address of Subsidiary & Associations*	Sampai dengan tahun 2017, Bank Papua tidak memiliki entitas anak dan/atau entitas asosiasi yang terkonsolidasi dalam laporan keuangan. *Until 2017, the Bank Papua does not have subsidiaries and / or associates are consolidated in the financial statements.*
Struktur Grup Perusahaan *Group Structure Company*	Sampai dengan tahun 2017, Bank Papua tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi, *joint venture* maupun *special purpose vehicle* (SPV) sehingga tidak ada informasi untuk menggambarkan struktur grup perusahaan yang terkait dengan hal tersebut. *Until 2017, the Bank Papua does not have subsidiaries, associated entities, joint ventures and special purpose vehicle (SPV) so no information to describe the structure of a group of companies associated with it.*

Kronologis Pencatatan Saham & Efek Lainnya

Chronology of Share & Securities Listing

Kronologi Pencatatan Saham *Chronology Listing Of Shares*	Sampai dengan akhir Desember tahun 2017, Bank Papua tidak menerbitkan saham dan tidak tercatat di dalam pasar modal, sehingga tidak terdapat informasi yang relevan mengenai jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, terendah dan penutupan serta volume perdagangan. *As of the end of December 2017, the Bank Papua does not issue stock and are not recorded in the capital market, so there is no relevant information regarding the number of shares outstanding, market capitalization, stock price high, low and closing trading volume.*

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya
Chronology Other Securities Listing

Sampai dengan akhir Desember tahun 2017, Bank Papua juga tidak menerbitkan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah obligasi/ sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

As of the end of December 2017, Bank Papua also does not issue bonds, sukuk, or convertible bonds, so there is no information on the number of bonds / securities / convertible bonds outstanding, interest rate, maturity date and ratings of bonds / sukuk.

Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan
Professional Institution for Company Support

Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan
Institutions Supporting Professionals Company

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
HERTANTO, GRACE dan KARUNAWAN
Palma Tower 18th Floor Lot. F & G, Jl. RA. Kartini II-S Kav. 06, RT.6/RW.14, Pd. Pinang, Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310

NOTARIS
LILIS HERYENI, SH,SP1,M.Si
Jl. Amphibi No.12 Hamadi Angkatan Laut
Telp. (0967) 523474
Fax. (0967) 535272

PEMERINGKAT
PT. Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia)
Panin Tower – Senayan City 17th Floor

Jaringan Kantor
Office Network

KC. Yogyakarta
Ruko Raflesia Kavling J Dan K Sleman
Provinsi D.I.Yogyakarta 55281
Telp (0274)4332886, 4332730, 4332906
Fax. (0274)4332567
email: cabang.yogyakarta@bankpapua.co.id

KC. Jakarta
Gedung Thamrin City Lt. Dasar Blok A 19 No. 11
Jl Thamrin Boulevard (d/h Jl. Kebon Kacang Raya)
Jakarta Pusat 10340
Telp. (021) 31990940, 31990941
Email. cabang.jakarta@bankpapua.co.id

KC. Surabaya
Jl. Raya Darmo No.61 Kec. Tegalsari-Kotamadya
Surabaya Provinsi Jawa Timur 60265
Telp. (031) 5662280, 5662296
Fax. (031) 5662286
email: cabang.surabaya@bankpapua.co.id

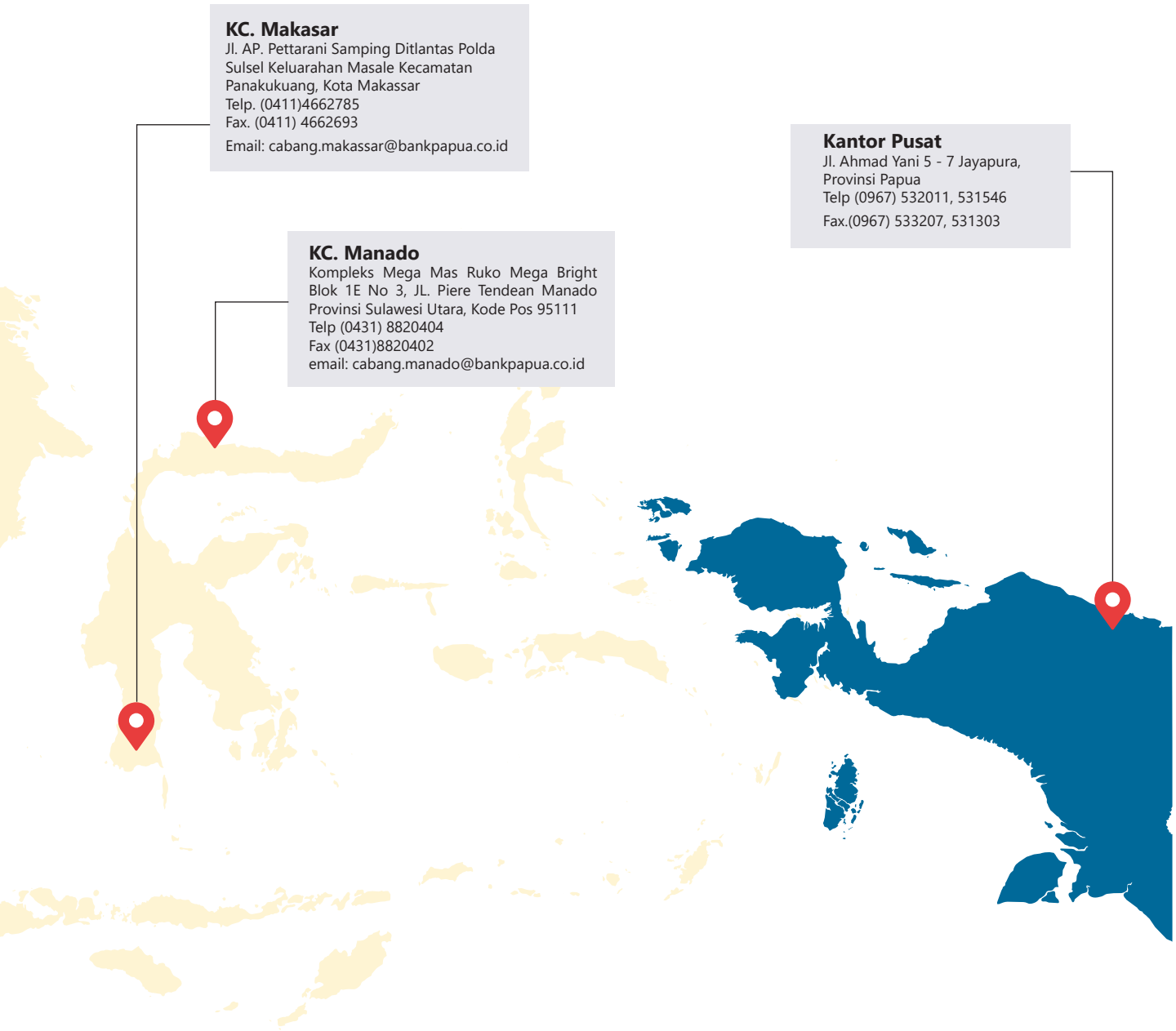

Sejak berdiri pada tahun 1966, Bank Papua telah dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat mengelola dana masyarakat hingga saat ini. Eksistensi Bank Papua hingga saat ini, menjadi bukti nyata bahwa Bank Papua senantiasa menjaga kepercayaan para *stakeholder*, khususnya para nasabah dengan menjunjung tinggi prinsip pelayanan dan pengabdian yang tinggi pada masyarakat. Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Papua, Papua Barat dan pihak lainnya sebagai pemegang saham, Bank Papua selalu berkomitmen meningkatkan akses ketersediaan jaringan baik dalam bentuk kantor cabang dan *delivery channel* yang tersebar baik di Tanah Papua maupun diluar Tanah Papua.

Since its establishment in 1966, Bank Papua has been entrusted by the Papua and West Papua Local Governments to manage public funds till now. The existence of Bank Papua until now, is a clear proof that Bank Papua always keeps the trust of its stakeholders, especially its customers by upholding the principle of service and high dedication to the community. With the full support of the Papua and West Papua Provincial Governments as shareholders, Bank Papua has always been committed to improving access to network availability in both branch offices and delivery channels spread both in Papua and outside Papua.

Pertumbuhan Jaringan Kantor Sampai dengan Tahun 2017
Growth of Office Network until 2017

JUMLAH JARINGAN KANTOR PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA PER DESEMBER 2017
NUMBER OF OFFICE NETWORKS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA AS OF DECEMBER 2017

No	Kantor dan Delivery Chanel	2013	2014	2015	2016	2017
A	JARINGAN KANTOR					
1	Kantor Pusat	1	1	1	1	**1**
2	Kantor Cabang	30	33	35	37	**37**
	- Papua	19	20	22	23	**23**
	- Papua Barat	8	8	8	9	**9**
	- Luar Papua	3	5	5	5	**5**
3	Kantor Cabang Pembantu	57	69	74	73	**70**
	- Papua	41	48	50	50	**50**
	- Papua Barat	15	17	20	19	**19**
	- Luar Papua	1	4	4	4	**1**
4	Kantor Kas	66	77	91	109	**113**
	- Papua	34	41	49	61	**65**
	- Papua Barat	32	36	42	47	**47**
	- Luar Papua	0	0	0	1	**1**
5	Mobil Kas Keliling	2	2	2	2	**2**
	- Papua	1	1	1	1	**1**
	- Papua Barat	1	1	1	1	**1**
	Total Jaringan Kantor	156	182	203	222	**223**
B	JARINGAN DELIVERY CHANNEL					
1	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	248	292	296	296	**301**
	- Papua	171	198	200	200	**205**
	- Papua Barat	67	77	77	77	**77**
	- Luar Papua	10	17	19	19	**19**
2	*Electronic Data Capture* (EDC)	174	176	176	176	**95**
	- Papua	131	131	131	131	**58**
	- Papua Barat	43	43	43	43	**37**
	- Luar Papua	0	2	2	2	**0**
3	*Cash Deposit Machine* (CDM)	8	8	8	8	**8**
	- Papua	6	6	6	6	**6**
	- Papua Barat	2	2	2	2	**2**
4	Kasda Online	18	18	19	19	**19**
	- Papua	12	12	12	12	**12**
	- Papua Barat	6	6	7	7	**7**
5	Samsat Online	23	23	23	23	**23**
	- Papua	14	14	14	14	**14**
	- Papua Barat	9	9	9	9	**9**
6	Kartu Pegawai Elektronik (KPE)	12	17	19	23	**23**
	- Papua	7	11	12	16	**16**
	- Papua Barat	5	6	7	7	**7**
7	Cash Management Sistem (Cms)	0	0	0	3	**4**
	- Papua	-	-	-	3	**4**
	- Papua Barat	-	-	-	-	**-**
8	*Payment Point* Bank Papua	2	8	20	25	**28**
	- Papua	2	8	15	19	**20**
	- Papua Barat	0	0	5	6	**8**
9	Kas Titipan Bank Indonesia	0	0	0	1	**5**
	- Papua	0	-	-	1	**3**
	- Papua Barat	-	-	-	-	**2**
	Total *Delivery Chanel*	485	542	561	574	**506**
	Total Jaringan	641	724	764	796	**729**

Alamat Kantor
Office address

No	Nama Kantor/ *Office Name*	Alamat/ *Address*	No Telepon/ *No phone*	Fax/*Facs*
1	Kantor Pusat	Jl. Ahmad Yani 5 - 7 Jayapura 99111	(0967) 532011, 533608, 531944	(0967) 533019
Kantor Cabang/ Branch Office				
No	**Nama Kantor/ *Office Name***	**Alamat/ *Address***	**No Telepon/ *No phone***	**Fax/*Facs***
1	KC. Utama Jayapura	Jl. Ahmad Yani 5-7 Jayapura 99111	(0967) 532011, 532351	(0967) 533207 . 531303
2	KC. Merauke	Jl. Raya Mandala Muli No. 350 Merauke 99614	(0971) 321850,321112, 321301	(0971) 321340
3	KC. Biak	Jl. Achmad Yani No. 11 Biak 98112	(0981) 23100, 24031, 23102	(0981) 23104
4	KC. Wamena	Jl. Yos Sudarso Wamena 99511	(0969) 31167, 31168, 31011	(0969) 31402
5	KC. Serui	Jl. Diponegoro, Kel. Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen 98212	(0983) 31763, 31482, 31483, 33193	(0983) 31793, 33364
6	KC. Nabire	Jl. Yos Sudarso No. 15 Nabire 98800	(0984) 21511, 21691, 24044, 22320	(0984) 21556
7	KC. Sentani	Jl. Raya Kemiri Sentani (Ex. Gedung Kantor Dinas Pertanian 99352)	(0967) 592626, 594510	(0967) 591017
8	KC. Timika	Jl. Yos Sudarso No. 4 Timika 99910	(0901) 321051, 322958	(0901) 321015
9	KC. Sarmi	Jl. Inpres Mararena Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi 99373	(0966) 31054	(0966) 31054
10	KC. Arso	Jl. Raya Keerom Distrik Arso Kabupaten Keerom 99468	(Telp. Vsat) 47 - 10701	-
11	KC. Mulia	Jl. Silas Papare, Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya 98911	081344324245, (Telp. Vsat) 47 - 70107	(0969) 31402
12	KC. Enarotali	Jl. Frans Kaisepo Enarotali, Distrik Paniai Timur Kab. Paniai 98800	(031) 60007012, (Telp. Vsat) 47 - 90101	(031) 60007012
13	KC. Agats	Jl. Sultan Hasannudin Distrik Agats, Kabupaten Asmat 99614	(0902) 31006, (Telp. Vsat) 47 - 40201	(0902) 31206
14	KC. Keppi	Jl. Irian Distrik Obaa Kabupaten Mappi 99614	(Telp. Vsat) 47 - 40401	(0971) 532134
15	KC. Karubaga	Jl. Kota Baru Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara 99562	(Telp. Vsat) 47 - 70301	(0969) 31404
16	KC. Waren	Jl. Inpres, Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen 98212	(Telp. Vsat) 47 - 80101	(0983) 31793
17	KC. Oksibil	Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang 99573	(Telp. Vsat)47 - 10801	(0967) 591017
18	KC. Tanah Merah	Jl. Trans Papua - Tanah Merah, Distrik Mandobo Kabupaten Bouven Digoel 99663	(0975) 21028	(0971) 532134
19	KC. Kasonaweja	Distrik Kasonaweja Kabupaten Mamberamo Raya 99376	-	-
20	KC. Abepura	Jl. Raya Abepura Kotaraja Kota Jayapura Provinsi Papua	(0967) 584503, 585139, 585014,585271	(0967) 584488
21	KC. Sorong	Jl. Ahmad Yani No 18 Sorong 98416	(0951) 326380, 326381, 326382, 326383	(0951) 326384
22	KC. Utama Manokwari	Jl. Yos Sudarso No. 57A Manokwari 98312	(0986) 231080, 215855, 213088, 211807, 211809	(0986) 212291
23	KC. Fak-Fak	Jl. Salasa Namudat, Distrik Fak-Fak Kabupaten Fak-Fak 98611	(0956) 23118, 22491, 22391, 23202	(0956) 22391, 23203
24	KC. Kaimana	Jl. Trikora No. 1A Kaimana 98654	(0957) 21642, 21643, 21956	(0957) 21644
25	KC. Teminabuan	Jl. Soekarno Hatta No. 1 Teminabuan Kab. Sorong Selatan		

Alamat Kantor
Office address

Kantor Cabang/ Branch Office				
No	**Nama Kantor/ *Office Name***	**Alamat/ *Address***	**No Telepon/ *No phone***	**Fax/*Facs***
26	KC. Bintuni	Jl. Raya Bintuni Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni 98364	(0955) 31182, 31183, 31124, 311243	(0955) 31243
27	KC. Waisai	Jl. Jenderal Sudirman Waisai Kabupaten Raja Ampat 98452	(Telp. Vsat) 47 - 20201	(0951) 326384
28	KC. Aimas	Jl. Nangka Km. 19 Kel. Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong 98416	(0951) 3123435, (Telp. Vsat) 47 -20301	(0951) 326385
29	KC. Jakarta	Gedung Thamrin City Lt. Dasar Blok A 19 No. 11 Jl Thamrin Boulevard (D/H Jl. Kebon Kacang Raya) Jakarta Pusat 10340	(021) 31990940, 31990941	(021) 31990944
30	KC. Makassar	Jl. AP. Pettarani Samping Ditlantas Polda Sulsel Kel. Masale, Kec. Panakukuang, Kota Makassar	(0411) 4662785, 4662810, 4662693	(0411) 430345
31	KC. Surabaya	Jl. Raya Darmo No.61 Kecamatan Tegalsari - Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur		
32	KC. Manado	Kompleks Mega Mas Ruko Mega Bright Blok 1E No. 3 Jl. Piere Tendean Manado Provinsi Sulawesi Utara		
33	KC. Yogyakarta	Ruko Raflesia Kavling J Dan K Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta	(0274) 4332906	-
34	KC. Waghete	Jalan Poros Waghete Distrik Tigi Kabupaten Deiyai 98800	(0984) 21511, 21691, 24044 (Kc. Induk)	(0984) 21558
35	KC. Ilaga	Jl. Raya Ilaga Desa Kimak Distrik Ilaga Kabupaten Puncak 98972	-	-
36	KC. Dekai	Kompleks Ruko Blok A No. 28- 30 Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo 9971	(0812) 4843079	(0969) 31403
37	KC. Wasior	Jl. Flanden Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama 98312	VSAT 31702	(0986) 212291

Kantor Cabang Pembantu/ *Branch Office*				
No	**Nama Kantor/ *Office Name***	**Alamat/ *Address***	**No Telepon/ *No phone***	**Fax/*Facs***
1	KCP. PTC. Entrop	Jl. Raya Kelapa II Entrop Komp. Ptc Entrop Blok A No. 18B,19,20	(0967) 551937, 551935	(0967) 551936
2	KCP. Abepura	Jl. Raya Sentani Distrik Abepura Kota Jayapura	(0967) 581039	(0967) 581027
3	KCP. Waena	Jl. Raya Sentani Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura	(0967) 572241	(0967) 572251
4	KCP. Cigombong	Jl Perkutut No 13 Kel Vim Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura	(0967) 585051	-
5	KCP. Pasar Youtefa	Jalan Baru Pasar Youtefa Distrik Abepura Kota Jayapura	-	-
6	KCP. Muara Tami	Distrik Muara Tami Kota Jayapura	-	-
7	KCP. Hamadi	Jl. Pasar Hamadi Kel. Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura	(0967) 534980	(0967) 534979
8	KCP. Tanah Hitam	Jl. Raya Abe Pantai Distrik Abepura Kota Jayapura	(0967) 584074	(0967) 589061
9	KCP. Dok IX	Jl. Sulawesi Kel. Imbi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura	-	-
10	KCP. Mall Jayapura	Jl. Dr. Sam Ratulangi Apo Kel. Bhayangkara Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura	-	-

Kantor Cabang Pembantu/ *Branch Office*				
No	**Nama Kantor/ *Office Name***	**Alamat/ *Address***	**No Telepon/ *No phone***	**Fax/*Facs***
11	KCP. Entrop	Jalan Raya Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura	(0967) 533485	-
12	KCP. Kurik	Jl. Moh Hatta Distrik Kurik Kabupaten Merauke	(0971) 324453	(0971) 532134
13	KCP. Tanah Miring	Jl. Raya Tanah Miring / LB Moerdani, Kampung Yasa Mulya Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke	-	-
14	KCP. Pasar Ampera	Jl. Tmp Polder Distrik Merauke Kabupaten Merauke	(0971) 326595	(0971) 532134
15	KCP. Simpati Muting	Jl. Tras Papua, Distrik Eligobel Kabupaten Merauke	(0971) 321038, 321112 (Kc. Induk)	(0971) 532147
16	KCP. Tiom	Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya	-	-
17	KCP. Kobakma	Distrik Kobakma - Kabupaten Mamberamo Tengah	081244170507	-
18	KCP. Elelim	Distrik Elelim Kabupaten Yalimo	-	-
19	KCP. Kenyam	Distrik Kenyam Kabupaten Nduga	-	-
20	KCP. Tembagapura	Sentra Niaga Mile 68, Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika	-	(0901) 321015
21	KCP. Sp. IV	Jl. Poros Mapurujaya Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika	(Telp. Vsat) 39402	(0901) 321016
22	KCP. Pasar Sentral Timika	Jl. Hasanudin Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika	-	-
23	KCP. Budi Utomo	Jl. Budi Utomo No. 41 Distrik Mimika Kabupaten Mimika	(0901) 3126991	(0901) 3126992
24	KCP. Sp II Timika	Jl. Poros Sp II - Sp V No. 45 B Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika	-	-
25	KCP. Sorendiweri	Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori (Komp. Pasar Sentral Supiori)	Vsat #*4722603	-
26	KCP. Kampung Baru	Jl. Sorido Raya Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor	(0981) 26589	-
27	KCP. Numfor Timur	Jl. Raya Kornasoren Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor	(0981) 23100, 23101, 23102 (Kc. Induk)	(0981) 23104
28	KCP. Bosnik	Jl. Bosnik Raya Kampung Woniki Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor	-	-
29	KCP. Darfuar	Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor	-	-
30	KCP. Korido	Distrik Korido Kabupaten Supiori	(0981) 23100, 23101, 23102 (Kc. Induk)	(0981) 23105
31	KCP. Sp. II Kalisemen	Jl. Bumi Raya Distrik Wanggar Kabupaten Nabire	(0984) 22812, 08114800735.	
32	KCP. Moanemani	Jl. Trans Papua Nabire - Ilaga, Distrik Kamu Kabupaten Dogiyai	(0984) 21511, 21691, 24044 (Kc. Induk)	(0984) 21556
33	KCP. Samabusa	Jl. Poros Nabire Legari - Samabusa, Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire	-	-
34	KCP. Sugapa	Jl. Padat Karya - Yokatapa, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya	(0984) 21511, 21691, 24044 (Kc. Induk)	(0984) 21557
35	KCP. Karang Tumaritis	Jl. Patriot (Ruko B-7) Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire	(0984) 22236, 081344561499.	-
36	KCP. RSUD Nabire	Jl. R.E. Martadinata Kabupaten Nabire	-	-
37	KCP. Urfas	Jl. Inpres Urfas Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen	-	-

Alamat Kantor

Office address

Kantor Cabang Pembantu/ *Branch Office*				
No	**Nama Kantor/ *Office Name***	**Alamat/ *Address***	**No Telepon/ *No phone***	**Fax/*Facs***
38	KCP. Bade	Jl. Angkasa Bade, Distrik Edera Kabupaten Mappi	(0974) 21012	(0971) 532136
39	KCP. Assue	Jl. Garuda Distrik Assue Kabupaten Mappi	(Telp.satelit) 086812127142	(0971) 532138
40	KCP. Genyem	Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura	(0984) 21511, 21691, 24044 (Kc. Induk)	(0967) 591017
41	KCP. Doyo Baru	Jl. Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura	(0967) 5195062	-
42	KCP. Nimbokrang	Desa Bunyom Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura	-	-
43	KCP. Hawai	Jl. Raya Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura	(0967) 594603, 594602	-
44	KCP. Menawi	Jalan Menawi Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen	(0983) 31481, 31482, 31484 (Kc. Induk)	(0983) 31793
45	KCP. Ansus Yapen Barat	Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen	-	-
46	KCP. Skamto	Distrik Skanto Kabupaten Keerom	-	-
47	KCP. Prafi	Jl. Merpati No. 270 SP IV Distrik Prafi Kabupaten Manokwari	-	-
48	KCP. Bumi Marina Asri	Jl. Angkasa Mulyono Kelurahan Amban Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari	-	-
49	KCP. Babo	Jl. Angkasa Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni	(Telp. Vsat) 31302	(0955) 31123
50	KCP. Tofoi	Jalan Raya Tofoi Kampung Tofoi Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni	-	-
51	KCP. Klasaman	Jl. Basuki Rahmat Km. 11 Kompleks Ruko Central Kab. Sorong	-	-
52	KCP. Sausapor	Distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw	-	-
53	KCP. Pasar Remu	Jl. Selat Sagawin Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Timur Kota Sorong	(0951) 326380, 326381 (Kc. Induk)	(0951) 326384
54	KCP. Boswezen	Jl. R.a. Kartini No. 25 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong	-	-
55	KCP. Jalan Baru	Kelurahan Malawei Distrik Manoi Kota Sorong	-	-
56	KCP. Basuki Rahmat	Jl. Basuki Rahmat Km. 9, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong	-	-
57	KCP. Klamono	Distrik Klamono Kabupaten Sorong	-	-
58	KCP. SP III Aimas	Jl. Poros Tengah Katapop SP III Kelurahan Maksubun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong	-	-
59	KCP. Kumurkek	Distrik Aifat Kabupaten Maybrat	-	-
60	KCP. Ayamaru	Jl. Ayamaru Distrik Ayamaru Kabupaten Maybrat	(0951) 323020	(0952) 31176
61	KCP. Moswaren	Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan	-	-
62	KCP. Kantor Bupati Sesna	Kompleks Kantor Bupati Sesna Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan	-	-
63	KCP. Inanwatan	Distrik Inanwatan Kabupaten Sorong Selatan	-	-
64	KCP. Danaweria	Distrik Fak-Fak Tengah Kabupaten Fak-Fak	-	-

Kantor Cabang Pembantu/ *Branch Office*				
No	**Nama Kantor/ *Office Name***	**Alamat/ *Address***	**No Telepon/ *No phone***	**Fax/*Facs***
65	KCP. Toraja	Jl. P. Diponegoro Kel. Penian Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara	-	-
66	KCP. Mangga Dua	Itc Mangga Dua Blok A No. 80 & 80A Jl. Raya Mangga Dua Kelurahan Ancol Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara Provinsi Dki	-	-
67	KCP. Sp III Timika	JIn. Sunan Kalijaga Jalur 02 Distrik Kula Kencana Kabupaten Mimika	-	-
68	KCP. Atsy	JIn. Frans Kaisepo Distrik Atsy Kabupaten Asmat	(0971) 321038, 321112 (Kc. Induk)	(0971) 532144
69	KCP. Ransiki	Jl. Kartini, Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari	(0980) 31078	(0986) 212293
70	KCP. Pasar Jibama	Jl. J . B Wenas No. 1 - 3 Wamena (Depan Pasar Jibama) Kabupaten Jayawijaya	-	-
Kantor KAS/ *Cash Office*				
	Nama Kantor/ *Office Name*	**Alamat/ *Address***	**No Telepon/ *No phone***	**Fax/*Facs***
1	KK. RSUD	Jl. Kesehatan Dok II Jayapura Kota Jayapura	(0967) 536418	(0967) 533207
2	KK. VIM	Jl. Raya Sentani Abepura Kantor Dinas Otonom VIM Kotaraja	(0967) 532011, 532351(Kc. Induk)	(0967) 533208
3	KK. Dok II Kantor Gubernur	Jl. Soa Siu Dok II Kota Jayapura Komp. Kantor Gubernur	(0967) 524768	(0967) 533209
4	KK. RSUD Abepura	Jl. Kesehatan No.1 Kelurahan Yobe Distrik Abepura - Kota Jayapura	-	-
5	KK. Pasar Youtefa	Kompleks Pasar Youtefa Distrik Abepura Kota Jayapura	-	-
6	KK. Kantor Walikota Jayapura	Kompleks Kantor Walikota Jalan Balai Kota Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura	-	-
7	KK. Pemda Merauke	Jl. RE. Martadinata Kabupaten Merauke	(0971) 325473	(0971) 532135
8	KK. Wanam	Komp. PT. Djarma Aru Wanam, Kec. Kaimaam Kabupaten Merauke	(Telp. Satelit) 086812118119	(0971) 532137
9	KK. Kimaam	Jl. Gotong Royong Kimaam Kabupaten Merauke	(Telp.satelit) 086812127142	(0971) 532139
10	KK. Okaba	Jl. Bandara Okaba, Distrik Okaba Kabupaten Merauke	(0971) 321038, 321112 (Kc. Induk)	(0971) 532142
11	KK. Senggo	Tawanim Senggo Distrik Citak Mitak Kabupaten Mappi	(Telp.satelit) 086812122512	(0971) 532141
12	KK. Moor	Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi	-	-
13	KK. RSUD Mappi	Jl Poros Keppi - Agham Km 6	-	-

Alamat Kantor
Office address

Kantor KAS/ *Cash Office*				
	Nama Kantor/ *Office Name*	**Alamat/ *Address***	**No Telepon/ *No phone***	**Fax/*Facs***
14	KK. Mindiptana	Jl. Trikora, Distrik Mindiptana Kabupaten Bouven Digoel	(0971) 321038, 321112 (Kc. Induk)	(0971) 532140
15	KK. Asiki	Komp. PT. Korindo Asiki, Distrik Jair Kabupaten Bouven Digoel	(0971) 321038, 321112 (Kc. Induk)	(0971) 532146
16	KK. Pantai Kasuari	Jl. Konohari, Pantai Kasuari Distrik Kamur Kabupaten Asmat	(Telp.satelit) 086812126481	(0971) 532143
17	KK. Sawa Erma	Jl. Wamap, Distrik Sawa Erma Kabupaten Asmat	(0971) 321038, 321112 (Kc. Induk)	(0971) 532145
18	KK. Oyehe	Jl. Yos Sudarso No. 60 Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire	-	-
19	KK. Kalibobo	Jl. Ch. Martatiahahu Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire	-	-
20	KK. Lagari	Jl. Marillephi Kelurahan Legari Jaya Distrik Makimi Kabupaten Nabire	-	-
21	KK. Demta	Distrik Demta Kabupaten Jayapura	(0984) 21511, 21691, 24044 (Kc. Induk)	(0967) 591018
22	KK. Lereh	Kompleks Perkebunan Sinar Mas Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura	0813455069	-
23	KK. Kantor Bupati Jayapura	Kompleks Kantor Bupati Jayapura, Jalan Gunung Merah Distrik Sentani Kabupaten Jayapura	-	-
24	KK. Kuala Kencana	Komp. Mini Shoping Terminal Kuala Kencana Kabupaten Mimika	(Telp. Vsat)	(0901) 321015
25	KK. Porsite	Komp. PT. Freeport Indonesia Amamapare Porsite, Distrik Mimika Timur Kab. Mimika	(Telp. Vsat) 31402	(0901) 321016
26	KK. Kokonao	Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika	-	-
27	KK. Mapuru Jaya	Jl. Poros Mapuru Jaya Distrik Mapuru Jaya Kabupaten Mimika	-	-
28	KK. Utikini Baru	Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika	(0901) 521051, 322958 (Kc. Induk)	(0901) 321018
29	Kantor Kas Sp V Timika	Kampung Limau Asri, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika	-	-
30	KK. Pemda Mimika	Jl. SP 3 (Pusat Pemerintahan Pemda Mimika), Distrik Kuala Kencana Kab. Mimika	-	-
31	KK. Beoga	Jl. Bandara Beoga	-	-
32	KK. Bupati Yapen	Jl. Timor Serui Kabupaten Kepulauan Yapen	-	-
33	KK. Dum (Doom)	Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong	(Telp. Vsat) 22502	(0951) 326385
34	KK. RSUD Sorong	Kompleks RSUD Jl. Yos Sudarso Kota Sorong	-	-
35	KK. Malanu	Jl. F. Kalasuat Rt 02/Rw Vi Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara Kota Sorong	-	-
36	KK. RSUD Sele Be Solu	Jl. Basuki Rachmad Km.12 Distrik Sorong Timur Kota Sorong	-	-
37	KK. Kalobo	Distrik Kalobo Kabupaten Raja Ampat	(0951) 326380, 326381 (Kc. Induk)	(0951) 326386
38	KK. Kabare	Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat	-	-
39	KK. Waigama	Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat	-	-
40	KK. Dabatan	Kampung Dabatan Distrik Misool Selatan Kab Raja Ampat	-	-
41	KK. Samate	Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat	-	-

Kantor KAS/ *Cash Office*				
	Nama Kantor/ *Office Name*	**Alamat/ *Address***	**No Telepon/ *No phone***	**Fax/*Facs***
42	KK. Pasar Sanggeng	Jl. Yos Sudarso, Komp Pasar Sanggeng	(0986) 211446	(0986) 212291
43	KK. Oransbari	Jl. Merdeka, Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari	(0986) 211807, 211808 (Kc. Induk)	(0986) 212292
44	KK. Masni	Jl. Raya SP VII, Distrik Masni Kabupaten Manokwari	(0986) 211807, 211808 (Kc. Induk)	(0986) 212294
45	KK. Unipa Amban	Kompleks Kampus Unipa Amban Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari	-	-
46	KK. RSUD Manokwari	Jl. Bhayangkara No. 01 Manokwari	-	-
47	KK. Kokas	Jl. Pelda La Poe, Distrik Kokas Kabupaten Fak-Fak	(0956) 23118, 22491, 22391 (Kc. Induk)	(0956) 22291
48	KK. Bomberai	Distrik Bomberai Kabupaten Fak - Fak	-	-
49	KK. Dulan Pok Pok	Jl. Yos Sudarso Distrik Fak - Fak Kota Kabupaten Fak - Fak	-	-
50	KK. RSUD Fakfak	Kompleks RSUD Fakfak Jalan Jenderal Sudirman Wagom Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak	-	-
51	KK. Teluk Pattipi	Distrik Teluk Pattipi Kabupaten Fakfak	-	-
52	KK. Karas	Distrik Karas Kabupaten Fak-Fak	-	-
53	KK. Teluk Arguni	Jl. Jaman San Bofuwer, Distrik Teluk Arguni Kab. Kaimana	(0957) 21641, 21642, 21643 (Kc. Induk)	(0957) 21644
54	KK. Pasar Baru Krooy	Pasar Baru Krooy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana	(0957) 21641, 21642, 21643 (Kc. Induk)	(0957) 21645
55	KK. Avona	Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana	(0957) 21641, 21642, 21643 (Kc. Induk)	(0957) 21646
56	KK. Kambala	Distrik Buruway Kabupaten Kaimana	-	-
57	KK. Namatota	Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana	-	-
58	KK. Kajase	Kompleks Pasar Sentral Kajase, Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan	-	-
59	KK. RSUD Schoolo Keyen	Jl. Teminabuan Kampung Keyen - Ayamaru Kabupaten Sorong Selatan	-	-
60	KK. Pasar Sentral Bintuni	Pasar Sentral Bintuni Distrik Bintuni, Kab. Teluk Bintuni	-	-
61	KK. Kantor Bupati Bintuni	Kompleks Kantor Bupati Bintuni, Kampung Bumi Saniari SP III Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni	-	-
62	KK. Sp II	Daerah SP II Kelurahan Mariyai Distrik Mariat Kabupaten Sorong	-	-
63	KK. Katapop	Daerah Katapop Kelurahan Majaran Distrik Salawati Kabupaten Sorong	-	-
64	KK. Stkip	Jl. Kh.a. Dahlan No.01 Mariyat Pantai Aimas Kabupaten Sorong	-	-
65	KK. RSUD Madi	Jl. Poros Madi	-	-
66	KK. Pasar Wouma	Jl. Achmad Yani, Kompleks Pasar Wouma	-	-
67	KK. Pasar Potikelek	Jl. Sd Percobaan, Kompleks Pasar Potikelek	-	-
68	KK. Pasar Sinakma	Jl. Yos Sudarso	-	-
69	KK. Kimbim	Jl. Raya Wamena Kimbim	-	-
70	KK. RSUD Kaimana	Jl. Batu Putih Km 0, Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana	-	-

Alamat Kantor
Office address

Kantor KAS/ *Cash Office*				
	Nama Kantor/ *Office Name*	**Alamat/ *Address***	**No Telepon/ *No phone***	**Fax/*Facs***
71	KK. Arso I	Jl. Kusuma Wijaya Kelurahan Sanggaria Arso 1, Distrik Arso, Kabupaten Keerom	-	-
72	KK. Swakarsa	Jl. Bhayangkara, Kelurahan Asyaman, Distrik Arso, Kabupaten Keerom	-	-
73	KK. Kantor Bupati Manokwari	Jl. Sowi Gunung, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari	-	-
74	KK. Anggi	Jl. Drs. Dominggus Mandacan, Distrik Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak	-	-
75	KK. Windesi	Distrik Windesi, Kabupten Telik Wondama	-	-
76	KK. Ilu	Jl. Kaleb Kayame, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya	-	-
77	KK. Korem	Jl. Korem, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor	-	-
78	KK. Sarmi Kota	Jl. Diponegoro, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi	-	-
79	KK. KPPT Kota Sorong	Jl. Pramuka	-	-
80	KK. Thumburuni	Jl. Thunburuni, Komp. Plasa Thunburuni, Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak	-	-
82	KK. Jagebob	Jl. Poros Kampung Gurinda Jaya Distrik Jagebob	-	-
83	KK. Klamit	Kampung Klamit Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan	-	-
84	KK. Madi	Kompleks Kantor Bupati Kabupaten Paniai	-	
85	KK. Senggi	Sp I Senggi Kampung Woslay Distrik Senggi Kabupaten Keerom	-	-
86	KK. Dabra	Kampung Dabra Kabupaten Mamberamo Raya	-	-
87	KK. Tomu	Distrik Tomu Kabupaten Teluk Bintuni	-	-
88	KK. Kantor Bupati Jayawijaya	Jl. Yos Sudarso Kompleks Kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya	-	-
89	KK. Trimuris	Kampung Trimuris Distrik Mamberamo Hilir Kabupaten Mamberamo Raya	-	-
90	KK. Werba	Distrik Werba Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat	-	-
91	KK. Perum 100	Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Waisai Kota Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat	-	-
92	KK Dorekhar	Distrik Ayau Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat	-	-
93	KK Depapre	Jl. Raya Depapre - Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua	-	-
94	KK Dispenda Biak	Jl. Jenderal Achmad Yani Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua	-	-
95	KK YOMDORI	Distrik Biak Barat Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua	-	-

Kantor KAS/ *Cash Office*				
	Nama Kantor/ *Office Name*	**Alamat/ *Address***	**No Telepon/ *No phone***	**Fax/*Facs***
96	KK HAJU	Jl. Mani Distrik Haju Kabupaten Mappi Provinsi Papua	-	-
97	KK WARWANAI	Kampung Warwanai Distrik Warwarbomi Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat	-	-
98	KK MAKALE	Distrik Makale Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan	-	-
99	KK ARGUNI	Kampung Taver Distrik Arguni Kabupaten Fakfak	-	-
100	KK AITINYO	Distrik Aitinyo Kabupaten Maybrat	-	-
101	KK KAMPUNG HARAPAN	Jalan Raya Sentani Kampung Harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura	-	-
102	KK SUATOR	Distrik Suator Kabupaten Agats	-	-
103	KK SOTA	Distrik Sota Kabupaten Merauke		
104	KK KANTOR GUBERNUR PAPUA BARAT	Jl. Arfai Distrik Manokwari Selatan	-	-
105	KK KIWIROK	Jl. Polopakyol Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang	-	-
106	KK BORME	Jl. Borfelum Distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang	-	-
107	KK PASAR BARU	Jl. Pln Kota Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai	-	-
108	KK BOMAKIA	Kompleks Bomakia II Distrik Bomakia Kabupaten Bouven Digoel	-	-
109	KK PERUM PEMDA	Jl. Trans Papua Mindiptana Kilometer 03 Tanah Merah Kabupaten Bouven Digoel		
110	KK OKBIBAB	Distrik Okbibab Kabupaten Pegunungan Bintang		
111	KK WAPOGA	Jl. Trans Wapoga Kampung Pirare Distrik Wapoga		
112	KK MASIREI	Jl. Pendidikan Kampung Obutai Distrik Masirei		
113	KK SINAK	Distrik Sinak		
Mobil Kas Keliling				
1	Jayapura	Kantor Cabang Utama Jayapura	-	-
2	Manokwari	Kantor Cabang Utama Manokwari	-	-

Delivery Channel

Delivery Channel

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA				
DAFTAR JARINGAN KEGIATAN PELAYANAN KAS				
NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
1	PELAYANAN PERBANKAN ELEKTRONIS / TRANSAKSI NON TUNAI			
1,1	ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)			
	1	KCU. JAYAPURA	ATM CENTRE KCU JAYAPURA	JL. ACHMAD YANI NO. 5-7 JAYAPURA
	2	KCU. JAYAPURA	ATM CENTRE KCU JAYAPURA	JL. ACHMAD YANI NO. 5-7 JAYAPURA
	3	KCU. JAYAPURA	SAGA MALL ABEPURA	JL. RAYA ABEPURA - SENTANI
	4	KCU. JAYAPURA	SAGA MALL ABEPURA	JL. RAYA ABEPURA - SENTANI
	5	KCU. JAYAPURA	ATM CENTRE MULTI GROSIR	MULTI GROSIR TANAH HITAM ABEPURA
	6	KCU. JAYAPURA	LOBY LT. 1 KANTOR GUBERNUR JAYAPURA	JL.SOA SIU DOK II KOTA JAYAPURA KOMPLEKS KANTOR GUBERNUR
	7	KCU. JAYAPURA	ATM CENTRE KOMPLEKS PTC BLOK A (RELOKASI)	JL. RAYA KELAPA II ENTROP KOMPLEKS PTC ENTROP BLOK A
	8	KCU. JAYAPURA	RSUD DOK II JAYAPURA	JL. KESEHATAN DOK II KOTA JAYAPURA
	9	KCU. JAYAPURA	INDO SMART RUKO DOK II	JL. RUKO PASIFIK PERMAI
	10	KC. SARMI	KANTOR CABANG SARMI (GEDUNG LAMA)	JL. DIPONEGORO DISTRIK SARMI KABUPATEN SARMI
	11	KCU. JAYAPURA	KOMPLEKS RUKO DOK V	JL. LUMBA - LUMBA DOK V KOTA JAYAPURA
	12	KCU. JAYAPURA	SAGA MALL ABEPURA	Jl. Raya Abepura, Kota Jayapura, Papua 99224
	13	KC. SORONG	SAGA SUPERMARKET & Departemen STORE	JL. ACHMAD YANI KOTA SORONG
	14	KC. SORONG	KANTOR CABANG SORONG	JL. ACHMAD YANI NO. 18 KOTA SORONG
	15	KC. WAISAI	KANTOR CABANG WAISAI	DISTRIK WAIGEO SELATAN KABUPATEN RAJA AMPAT
	16	KC. AIMAS	KANTOR CABANG AIMAS	JL. NANGKA KM. 19 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS KAB. SORONG
	17	KC. SORONG	MEGA MALL SORONG	JL. BASUKI RAHMAT KOTA SORONG
	18	KC. SORONG	PUSAT PERTOKOAN JUPITER	JL. S. MARUNI KM. 10 SORONG
	19	KCU. MANOKWARI	KANTOR CABANG MANOKWARI	JL. YOS SUDARSO NO. 57A MANOKWARI
	20	KCU. MANOKWARI	HADI MALL	JL. YOS SUDARSO MANOKWARI
	21	KCU. MANOKWARI	KANTOR CABANG MANOKWARI	JL. YOS SUDARSO NO. 57A MANOKWARI
	22	KCU. MANOKWARI	RUKO WOSI (AMD)	JL. TRIKORA WOSI KABUPATEN MANOKWARI
	23	KCU. MANOKWARI	HOTEL MANGGA	JL. BHAYANGKARA NO. 01 KABUPATEN MANOKWARI
	24	KCU. MANOKWARI	KANTOR CABANG PEMBANTU WASIOR	JL. FLANDEN WASIOR KABUPATEN TELUK WONDAMA
	25	KC. MERAUKE	KANTOR CABANG MERAUKE	JL. RAYA MANDALA MULI NO. 350 MERAUKE
	26	KC. MERAUKE	HALAMAN KANTOR BUPATI MERAUKE	JL. BRAWIJAYA MERAUKE
	27	KC. MERAUKE	BANDARA MOPAH	Jl. PGT No. 1 Kec.Merauke, Kota Merauke, Papua 99611
	28	KC. AGATS	KANTOR CABANG AGATS	JL. SULTAN HASANUDDIN DISTRIK AGATS KABUPATEN ASMAT
	29	KC. TANAH MERAH	KANTOR CABANG TANAH MERAH	JL. TRANS PAPUA - TANAH MERAH, DISTRIK MANDOBO KAB. BOUVEN DIGOEL
	30	KC. BIAK	KANTOR CABANG BIAK	JL. ACHMAD YANI NO. 1 Kabupaten Biak Numfor, Papua 98112
	31	KC. BIAK	KANTOR CABANG BIAK	JL. ACHMAD YANI NO. 1 Kabupaten Biak Numfor, Papua 98112
	32	KC. FAK - FAK	KANTOR CABANG FAK - FAK	JL. DR. SALASA NAMUDAT DISTRIK FAK - FAK KABUPATEN FAK - FAK
	33	KC. FAK - FAK	SUPERMARKET MATAHARI	JL. YOS SUDARSO WAGONG KABUPATEN FAK - FAK
	34	KC. WAMENA	KANTOR CABANG WAMENA	JL. YOS SUDARSO WAMENA
	35	KC. MULIA	KANTOR CABANG MULIA	JL. SILAS PAPARE DISTRIK MULIA KABUPATEN PUNCAK JAYA
	36	KC. KARUBAGA	KANTOR CABANG KARUBAGA	JL. KOTA BARU DISTRIK KARUBAGA KABUPATEN TOLIKARA
	37	KC. WAMENA	KANTOR BUPATI JAYAWIJAYA	JL. YOS SUDARSO NO. 25 KABUPATEN JAYAWIJAYA
	38	KC. WAMENA	KANTOR CABANG PEMBANTU DEKAI	KOMPLEKS RUKO DEKAI BLOK A NO. 28- 30 DISTRIK DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO
	39	KC. SERUI	KANTOR CABANG SERUI	JL. DIPONEGORO KEL. SERUI DISTRIK YAPEN SELATAN KAB. YAPEN

NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
1	PELAYANAN PERBANKAN ELEKTRONIS / TRANSAKSI NON TUNAI			
1,1	ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)			
	40	KC. SERUI	KANTOR CABANG SERUI	JL. DIPONEGORO KEL. SERUI DISTRIK YAPEN SELATAN KAB. YAPEN
	41	KC. NABIRE	KANTOR KAS OYEHE (EX. GEDUMG KC NABIRE)	JL. YOS SUDARSO NO. 60 NABIRE
	42	KC. NABIRE	KANTOR KAS OYEHE (EX. GEDUMG KC NABIRE)	JL. YOS SUDARSO NO. 60 NABIRE
	43	KC. ENAROTALI	KANTOR CABANG ENAROTALI	JL. FRANS KAISEPO ENAROTALI, DISTRIK PANIAI TIMUR KAB. PANIAI
	44	KC. SENTANI	KANTOR CABANG SENTANI	JL. RAYA KEMIRI SENTANI (EX. GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN)
	45	KC. SENTANI	BANDARA SENTANI	JL. YABASO NO. 76 KABUPATEN JAYAPURA
	46	KC. SENTANI	GUNUNG MERAH SENTANI	HALAMAN KANTOR BUPATI KABUPATEN JAYAPURA
	47	KC. TIMIKA	KANTOR CABANG TIMIKA	JL. YOS SUDARSO NO. 4 TIMIKA KABUPATEN MIMIKA
	48	KC. TIMIKA	KANTOR CABANG TIMIKA	JL. YOS SUDARSO NO. 4 TIMIKA KABUPATEN MIMIKA
	49	KC. TIMIKA	KANTOR CABANG PEMBANTU TEMBAGAPURA	SENTRA NIAGA MILE 68 DISTRIK TEMBAGAPURA KABUPATEN MIMIKA
	50	KC. TIMIKA	SUPERMARKET DIANA	KOMPLEKS MINI SHOPING TERMINAL KUALA KENCANA
	51	KC. TIMIKA	KANTOR CABANG PEMBANTU SP. IV	JL. POROS MAPURU JAYA DISTRIK MIMIKA BARU KABUPATEN MIMIKA
	52	KC. TIMIKA	MILE 72	DISTRIK TEMBAGAPURA KABUPATEN MIMIKA
	53	KC. TIMIKA	KOMPLEKS BANDARA MOZEZ KILANGIN TIMIKA	JL. AIRPORT MOZEZ KILANGIN KABUPATEN MIMIKA
	54	KC. KAIMANA	KANTOR CABANG KAIMANA	JL. TRIKORA NO. 1A KAIMANA
	55	KC. KAIMANA	KANTOR CABANG KAIMANA	JL. TRIKORA NO. 1A KAIMANA
	56	KC. BINTUNI	KANTOR CABANG BINTUNI	JL. RAYA BINTUNI NO. 54 DISTRIK BINTUNI KAB. TELUK BINTUNI
	57	KC. MERAUKE	KANTOR CABANG MERAUKE	JL. RAYA MANDALA MULI NO. 350 MERAUKE
	58	KCU. JAYAPURA	ATM CENTRE KCU JAYAPURA	JL. ACHMAD YANI NO. 5-7 JAYAPURA
	59	KCU. JAYAPURA	ATM CENTRE KCU JAYAPURA	JL. ACHMAD YANI NO. 5-7 JAYAPURA
	60	KCU. JAYAPURA	DOK IX	JL. TANJUNG RIA RT.03 RW.IV DISTRIK JAYAPURA UTARA
	61	KCU. JAYAPURA	HOTEL YASMIN	JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 8 JAYAPURA
	62	KCU. JAYAPURA	DAILY FRESH	JL. TASANGKAPURA NO. 5 - 7 JAYAPURA
	63	KCU. JAYAPURA	KANTOR CABANG PEMBANTU ABEPURA	JL. RAYA SENTANI DISTRIK ABEPURA KOTA JAYAPURA
	64	KCU. JAYAPURA	KANTOR CABANG PEMBANTU WAENA	JL. RAYA SENTANI KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA
	65	KC. ARSO	KANTOR CABANG ARSO	JL. RAYA KEEROM DISTRIK ARSO KABUPATEN KEEROM
	66	KCU. JAYAPURA	SAGU INDAH PLAZA	JL. AHMAD YANI (SAGU INDAH PLAZA) JAYAPURA
	67	KC. SORONG	KANTOR CABANG SORONG	JL. AHMAD YANI NO. 18 SORONG
	68	KC. SORONG	KANTOR CABANG SORONG	JL. AHMAD YANI NO. 18 SORONG
			BANDAR UDARA DOMINIIQUE EDWARD OSOK	JL. BASUKI RAHMAD KM. 7,5 KOTA SORONG
	69	KC. SORONG	FORZA SWALAYAN	JL. SAMRATULANGI DISTRIK SORONG BARAT KOTA SORONG
	70	KC. TIMIKA	KANTOR CABANG TIMIKA	JL. YOS SUDARSO NO. 4 TIMIKA KABUPATEN MIMIKA
	71	KC. SENTANI	KANTOR CABANG SENTANI	JL. RAYA KEMIRI SENTANI (EX. GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN)
	72	KC. SENTANI	SENTANI CITY SQUARE (BOROBUDUR MALL)	JL. KEMIRI SENTANI KEL. HINEKOMBE DISTRIK SENTANI KOTA KAB. JAYAPURA
	73	KC. TEMINABUAN	KANTOR CABANG TEMINABUAN	JL. SOEKARNO HATTA NO. 1 TEMINABUAN KABUPATEN SORONG SELATAN
	74	KC. TIMIKA	RSUD TIMIKA	JL. YOS SUDARSO KEL. WONOSARI JAYA SP 4 KABUPATEN MIMIKA
	75	KC. MERAUKE	RSUD MERAUKE	Jl. Sukarjo Wiryopranoto No.1, Maro, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99613
	76	KC. JAKARTA	KANTOR CABANG JAKARTA	JL. THAMRIN BOULEVARD (D/H JL. KEBON KACANG RAYA) JAKARTA PUSAT
	77	KCU. JAYAPURA	KANTOR WALIKOTA JAYAPURA	JL. BALAI KOTA DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA
	78	KC. TIMIKA	MINI SHOPHING KUALA KENCANA	KOMPLEKS MINI SHOPING KUALA KENCANA KABUPATEN MIMIKA
	79	KCU. JAYAPURA	ATM CENTRE KCU JAYAPURA	JL. ACHMAD YANI NO. 5-7 JAYAPURA

Delivery Channel

Delivery Channel

NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
1	PELAYANAN PERBANKAN ELEKTRONIS / TRANSAKSI NON TUNAI			
1,1	ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)			
	80	KCU. JAYAPURA	KANTOR CABANG PEMBANTU MUARA TAMI	DISTRIK MUARA TAMI KOTA JAYAPURA
	81	KCU. JAYAPURA	KANTOR CABANG PEMBANTU CIGOMBONG	JL. PERKUTUT KOTARAJA DALAM KOTA JAYAPURA
	82	KCU. JAYAPURA	KANTOR CABANG PEMBANTU ABEPURA	JL. RAYA SENTANI DISTRIK ABEPURA KOTA JAYAPURA
	83	KCU. JAYAPURA	KANTOR CABANG PEMBANTU WAENA	JL. RAYA SENTANI KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA
	84	KC. NABIRE	KANTOR CABANG NABIRE	JL. YOS SUDARSO NO. 15 NABIRE, KABUPATEN NABIRE
	85	KCU. JAYAPURA	SUPERMARKET MEGA WAENA	JL. RAYA SENTANI KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA
	86	KCU. JAYAPURA	PERUMNAS 3 WAENA	PERUMNAS 3 WAENA - KOTA JAYAPURA
	87	KC. SENTANI	KANTOR CABANG SENTANI	JL. RAYA KEMIRI SENTANI (EX. GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN)
	88	KC. BIAK	SUPERMARKET HADI & DEPARTEMENT STORE	SUPERMARKET HADI & DEPARTEMENT STORE
	89	KC. FAK-FAK	HOTEL GRAND PAPUA FAK-FAK	HOTEL GRAND PAPUA FAK-FAK, KABUPATEN FAK-FAK
	90	KC. FAK-FAK	KANTOR CABANG FAK-FAK	JL. SALASA NAMUDAT, DISTRIK FAK-FAK, KABUPATEN FAK-FAK
	91	KC. NABIRE	KCP. SP II KALISEMEN	JL. BUMI RAYA DISTRIK WANGGAR KABUPATEN NABIRE
	92	KC. KAIMANA	KANTOR BUPATI KAIMANA	KOMPLEKS KANTOR BUPATI KABUPATEN KAIMANA
	93	KC. SARMI	KANTOR CABANG SARMI	JL. INPRES MARARENA DISTRIK SARMI KABUPATEN SARMI
	94	KCU. JAYAPURA	HOLA PLAZA PADANG BULAN	JL. RAYA SENTANI PADANG BULAN - JAYAPURA
	95	KC. ENAROTALI	KANTOR CABANG ENAROTALI	JL. FRANS KAISEPO ENAROTALI, DISTRIK PANIAI TIMUR KAB. PANIAI
	96	KC. MERAUKE	KANTOR CABANG MERAUKE	JL. RAYA MANDALA MULI NO. 350 MERAUKE
	97	KC. KAIMANA	HOTEL KAIMANA BEACH KROOY	JL. UTARUM KROOY, DISTRIK KAIMANA KABUPATEN KAIMANA
	98	KC. SORONG	RSUD SORONG	KOMPLEKS RSUD SORONG, JL. YOS SUDARSO KOTA SORONG
	99	KC. WAREN	KANTOR CABANG WAREN	JL. INPRES DISTRIK WAROPEN BAWAH KAB. WAROPEN
	100	KC. BIAK	SUPERMARKET HADI & DEPARTEMENT STORE	SUPERMARKET HADI & DEPARTEMENT STORE
	101	KC. AGATS	KANTOR CABANG AGATS	JL. SULTAN HASANUDDIN DISTRIK AGATS KABUPATEN ASMAT
	102	KCU. JAYAPURA	TOKO EVAN DOK V	JL. SOA SIU DOK V BAWAH
	103	KCU. JAYAPURA	TOKO SINAR REJEKI ENTROP	JL. RAYA KELAPA II ENTROP
	104	KCU. JAYAPURA	AGRO SEGAR KOTARAJA	JL. RAYA ABEPURA - SENTANI
	105	KC. WAMENA	HOTEL BALIEM PILAMO	JL. TRIKORA - WAMENA, KABUPATEN JAYAWIJAYA
	106	KC. TANAH MERAH	KANTOR KAS ASIKI	KOMPLEKS PT. KORINDO DISTRIK JAIR KABUPATEN BOUVEN Digoel
	107	KC. MERAUKE	KANTOR CABANG PEMBANTU KURIK	JL. MOH HATTA NO. 12 DISTRIK KURIK KABUPATEN MERAUKE
	108	KCU. JAYAPURA	KOMPLEKS KODAM XVII CENDERAWASIH	MAKODAM XVII/CENDERAWASIH, JL. POLIMAK IV ATAS, KOTA JAYAPURA
	109	KC. TIMIKA	KANTOR CABANG TIMIKA (PARKIRAN)	JL. YOS SUDARSO NO. 4 TIMIKA KABUPATEN MIMIKA
	110	KCU. MANOKWARI	KANTOR CABANG PEMBANTU WASIOR	JL. FLANDEN WASIOR DISTRIK WASIOR KABUPATEN TELUK WONDAMA
	111	KC. JAKARTA	GALERY PLAZA ATRIUM SENEN	JALAN RAYA 135 JAKARTA 10410
	112	KC. KEPI	KANTOR CABANG KEPI	JL. KALIMANTAN DISTRIK OBAA - KABUPATEN MAPPI
	113	KC. KEPI	KANTOR CABANG KEPI	JL. KALIMANTAN DISTRIK OBAA - KABUPATEN MAPPI
	114	KCU. MANOKWARI	BILLY JAYA HOTEL	JL. MERDEKA KABUPATEN MANOKWARI
	115	KC. TIMIKA	KANTOR CABANG TIMIKA	JL. YOS SUDARSO NO. 4 TIMIKA KABUPATEN MIMIKA
	116	KC. MERAUKE	KANTOR CABANG PEMBANTU PASAR AMPERA	JL. TMP POLDER MERAUKE KABUPATEN MERAUKE
	117	KC. WAMENA	KANTOR CABANG WAMENA	JL. YOS SUDARSO WAMENA
	118	KC. SENTANI	KANTOR KAS LEREH	KOMPLEKS PERKEBUNAN SINAR MAS DISTRIK KAUREH KABUPATEN JAYAPURA

NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
1	PELAYANAN PERBANKAN ELEKTRONIS / TRANSAKSI NON TUNAI			
1,1	ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)			
	119	KCU. JAYAPURA	KANTOR KAS PASAR YOUTEFA	KOMP PASAR YOUTEFA KOTA JAYAPURA
	120	KCU. JAYAPURA	KANTOR CABANG PEMBANTU CIGOMBONG	JL PERKUTUT NO 13 KEL VIM DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA
	121	KCU. JAYAPURA	RAMAYANA MALL	JL RAYA ABEPURA
	122	KC. TEMINABUAN	KANTOR CABANG TEMINABUAN	JL. SOEKARNO HATTA NO. 1 TEMINABUAN KABUPATEN SORONG SELATAN
	123	KC. SORONG	HOMI HOUSEWARE & SUPERMARKET	JL. CENDERAWASI NO. 17 ABC SORONG
	124	KC. NABIRE	KANTOR CABANG NABIRE	JL. YOS SUDARSO NO. 15 NABIRE, KABUPATEN NABIRE
	125	KC. TEMINABUAN	PASAR AMPERA	JL. PASAR AMPERA TEMINABUAN
	126	KC. TIMIKA	SUPERMARKET DIANA	SUPERMARKET DIANA KABUPATEN MIMIKA
	127	KCU. JAYAPURA	RSUD ABEPURA	JL. KESEHATAN NO.1 KELURAHAN YOBE DISTRIK ABEPURA
	128	KC. TIMIKA	SHOPPING MALL KOALA	JL. BUDI UTOMO DISTRIK MIMIKA KABUPATEN MIMIKA
	129	KC. SORONG	KANTOR CABANG PEMBANTU KLASAMAN	RUKO CENTRAL JL. BASUKI RAHMAT KM 10,5 SORONG
	130	KC. BIAK	BANDAR UDARA FRANS KAISIEPO BIAK	JL. MUHAMMAD YAMIN KELURAHAN MANDALA DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR
	131	KC. KASONAWEJA	KANTOR CABANG KASONAWEJA	DISTRIK KASONAWEJA KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
	132	KCU. MANOKWARI	KANTOR CABANG PEMBANTU PRAFI	JL. MERPATI NO. 270 SP IV DISTRIK PRAFI KABUPATEN MANOKWARI
	133	KC. BIAK	RSUD BIAK	JL. SRIWIJAYA RIDGE II KELURAHAN BRAMBAKEN DISTRIK SAMOFA KABUPATEN BIAK NUMFOR
	134	KC. NABIRE	KANTOR CABANG PEMBANTU MOANEMANI	JL. TRANS PAPUA NABIRE - ILAGA, DISTRIK KAMU KABUPATEN DOGIYAI
	135	KC. NABIRE	KANTOR KAS KARANG TUMARITIS	JL. PATRIOT (RUKO B-7) KELURAHAN KARANG TUMARITIS KABUPATEN NABIRE
	136	KCU JAYAPURA	KANTOR SAMSAT LAMA	JALAN RAYA ENTROP - JAYAPURA
	137	KCU JAYAPURA	PASAR HAMADI (DEPAN PUSKESMAS)	JL. PERIKANAN - PASAR HAMADI - JAYAPURA
	138	KC. TIMIKA	HOTEL RIMBA PAPUA	KOMPLEKS BANDARA MOZEZ KILANGIN TIMIKA, JL. AIRPORT MOZEZ KILANGIN KABUPATEN MIMIKA
	139	KC. NABIRE	KOMPLEKS RSUD NABIRE	JL. R.E. MARTHADINATA KABUPATEN NABIRE
	140	KC. SERUI	TOKO SERUI INDAH	JL. MOH. YAMIN DISTRIK YAPEN SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
	141	KC. SERUI	PERKANTORAN SERUI (KK BUPATI YAPEN)	JL. TIMUR DISTRIK YAPEN SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
	142	KC. SERUI	TOKO SINAR MARIADEI	JL. MARIADEI DISTRIK YAPEN SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
	143	KC. SERUI	SUPERMARKET HADI	JL. FRANS KAISEPO DISTRIK YAPEN SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
	144	KC. SERUI	TOKO MERPATI INDAH	JL. MOH. YAMIN DISTRIK YAPEN SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
	145	KC. SORONG	GKI BOSWESEN SORONG	KANTOR KLASIS GKI BOSWESEN SORONG
	146	KCU JAYAPURA	RS. DIAN HARAPAN	PERUMNAS II WAENA KOTA JAYAPURA
	147	KC. WAISAI	KANTOR BUPATI RAJA AMPAT	KOMPLEKS KANTOR BUPATI, WAISAI - DISTRIK WAIGEO SELATAN KABUPATEN RAJA AMPAT
	148	KC. SORONG	KANTOR CABANG PEMBANTU BOSWEZEN	JL. R.A. KARTINI NO. 25 KELURAHAN RUFEI DISTRIK SORONG BARAT KOTA SORONG
	149	KC. SORONG	KANTOR WALIKOTA SORONG	JL. BURUNG KURANA NO. 4 SORONG
	150	KC. BIAK	KANTOR BUPATI BIAK	Jl. Majapahit No 1, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111
	151	KC. BIAK	KANTOR BUPATI BIAK	Jl. Majapahit No 1, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111
	152	KC. BIAK	KANTOR CABANG PEMBANTU KAMPUNG BARU BIAK	JL. SORIDO RAYA DISTRIK SAMOFA KABUPATEN BIAK NUMFOR
	153	KC. TIMIKA	KANTOR CABANG PEMBANTU PASAR SENTRAL TIMIKA	JL. HASANUDIN DISTRIK MIMIKA BARU KABUPATEN MIMIKA
	154	KC. TIMIKA	GELAEL TIMIKA	JL. CENDERAWASIH TIMIKA DISTRIK MIMIKA BARU KABUPATEN MIMIKA

Delivery Channel

Delivery Channel

NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
1	PELAYANAN PERBANKAN ELEKTRONIS / TRANSAKSI NON TUNAI			
1,1	ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)			
	155	KC. MULIA	KANTOR CABANG MULIA	JL. SILAS PAPARE, DISTRIK MULIA KABUPATEN PUNCAK JAYA
	156	KC. SARMI	KANTOR CABANG SARMI	JL. INPRES MARARENA DISTRIK SARMI KABUPATEN SARMI
	157	KC. MAKASSAR	KANTOR CABANG MAKASSAR	JL. AP PETTARANI KOMPLEKS *BUSINESS* CENTRE NO. 53D KELURAHAN MASALE KECAMATAN
				PANAKKUKANG KOTAMADYA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
	158	KC. SURABAYA	KANTOR CABANG SURABAYA	JL. RAYA DARMO NO. 61 KECAMATAN TEGALSARI - KOTAMADYA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
	159	KC. TIMIKA	SUPERMARKET DIANA 2	JL. HASANUDDIN TIMIKA KABUPATEN MIMIKA
	160	KC. JAKARTA	SURYA INSTITUTE SERPONG	KOMPLEKS SCIENTIA SQUARE GADING SERPONG - TANGGERANG
	161	KC. MAKASSAR	KANTOR CABANG PEMBANTU TORAJA	JL. P. DIPONEGORO KEL. PENIAN KEC. RANTEPAO KAB. TORAJA UTARA
	162	KC. WAMENA	KOPERASI NIT HASIK WAMENA	JL. TRIKORA WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA
	163	KC. AGATS	KANTOR BUPATI ASMAT	KOMPLEKS KANTOR BUPATI ASMAT KABUPATEN ASMAT
	164	KC. OKSIBIL	KANTOR CABANG OKSIBIL	DISTRIK OKSIBIL KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
	165	KC. KASONAWEJA	LOGPON PT. MAMBERAMO ALAS MANDIRI	PT. MAMBERAMO ALAS MANDIRI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
	166	KC. WAISAI	KANTOR CABANG WAISAI	WAISAI - DISTRIK WAIGEO SELATAN KABUPATEN RAJA AMPAT
	167	KC. BINTUNI	KANTOR CABANG PEMBANTU BABO	JL. ANGKASA DISTRIK BABO KABUPATEN TELUK BINTUNI
	168	KC. BINTUNI	KANTOR CABANG BINTUNI	JL. RAYA BINTUNI DISTRIK BINTUNI KABUPATEN TELUK BINTUNI
	169	KCU JAYAPURA	GEDUNG DPRD PAPUA	JL. SAM RATULANGI - JAYAPURA
	170	KCU JAYAPURA	PUSKESMAS DOK VIII JAYAPURA	JL. SULAWESI JAYAPURA
	171	KCU JAYAPURA	PALDAM JAYAPURA	JL. ACHMAD YANI JAYAPURA
	172	KCU MANOKWARI	HOTEL ASTON MANOKWARI	JL. RAYA ESAU SESA MANOKWARI
	173	KCU MANOKWARI	ORCHID SWALAYAN MANOKWARI	JL. MERDEKA MANOKWARI
	174	KC. AIMAS	KANTOR CABANG AIMAS	JL. NANGKA KM. 19 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS KAB. SORONG
	175	KCU JAYAPURA	SPBU KOTARAJA	JL. RAYA ABEPURA - SENTANI
	176	KCU MANOKWARI	RUKO WOSI MANOKWARI	JL. TRIKORA WOSI KABUPATEN MANOKWARI
	177	KC. FAK - FAK	HOTEL SULINA	JL. IZAK TELUSSA FAK - FAK (DEPAN POLRES FAK - FAK)
	178	KC. TEMINABUAN	KANTOR CABANG PEMBANTU AYAMARU	JL. AYAMARU DISTRIK AYAMARU KABUPATEN MAYBRAT
	179	KCU JAYAPURA	HOTEL D'GREEN KAMPKEY	JL. RAYA KAMPKEY ABEPURA
	180	KCU JAYAPURA	TOKO METRO POLIMAK	JL. ARDIPURA I POLIMAK JAYAPURA
	181	KCU JAYAPURA	PELABUHAN JAYAPURA	JL. KOTI KOMPLEKS PELABUHAN JAYAPURA
	182	KC. TIMIKA	KANTOR CABANG PEMBANTU SP II TIMIKA	JL. POROS SP II - SP V NO. 45 B KAMPUNG TIMIKA JAYA DISTRIK MIMIKA BARU KABUPATEN MIMIKA
	183	KC. SORONG	AGRO FRESH MART	JL. ACHMAD YANI KOTA SORONG
			ATM CENTER SPBU KLALIGI	JL. JEND. SUDIRMAN KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI KOTA SORONG
	184	KC. TIMIKA	KANTOR BUPATI MIMIKA	JL. TIMIKA KABUPATEN MIMIKA
	185	KC. TIMIKA	HOTEL SERAYU TIMIKA	JL. JEND. ACHMAD YANI NO. 10 TIMIKA
	186	KCU. MANOKWARI	ATM CENTER KCU. MANOKWARI	JL. YOS SUDARSO NO. 57A MANOKWARI
	187	KCU. MANOKWARI	ATM CENTER KCU. MANOKWARI	JL. YOS SUDARSO NO. 57A MANOKWARI
	188	KC. FAK - FAK	KANTOR KAS DULAN POK - POK	JL. YOS SUDARSO DISTRIK FAK - FAK KOTA KABUPATEN FAK - FAK
	189	KC. SENTANI	GUNUNG MERAH SENTANI	KOMPLEKS KANTOR BUPATI KABUPATEN JAYAPURA
	190	KCU. MANOKWARI	KANTOR KAS RANSIKI	JL. KARTINI, DISTRIK RANSIKI KABUPATEN MANOKWARI
	191	KC. TIMIKA	SHOPPING KUALA KENCANA	SHOPPING KUALA KENCANA OB 3 RETAIL CENTRE - KUALA KENCANA

NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
1	PELAYANAN PERBANKAN ELEKTRONIS / TRANSAKSI NON TUNAI			
1,1	ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)			
	192	KC. MAKASSAR	ATM CENTER MALL PANAKKUKANG	JL. BOULEVARD - PANAKKUKANG MAS
	193	KC. WAGHETE	KANTOR CABANG WAGHETE	JL. POROS WAGHETE KABUPATEN DEIYAI
	194	KC. ENAROTALI	KANTOR CABANG ENAROTALI	JL. FRANS KAISEPO ENAROTALI, DISTRIK PANIAI TIMUR KABUPATEN PANIAI
	195	KC. MERAUKE	KANTOR CABANG PEMBANTU TANAH MIRING	JL. RAYA TANAH MIRING / LB MOERDANI, KAMPUNG YASA MULYA
	196	KCU. JAYAPURA	DOK IX JAYAPURA	JL. SULAWESI DOK IX JAYAPURA
	197	KC. SENTANI	TOKO ALFA OMEGA SENTANI	JL. RAYA KEMIRI SENTANI
	198	KCU. JAYAPURA	SPBU ENTROP	JL. KELAPA DUA ENTROP JAYAPURA
	199	KCU. JAYAPURA	HAMADI	JL. HAMADI JAYAPURA
	200	KCU. MANOKWARI	KANTOR KAS MASNI	JL. RAYA SP VII, DISTRIK MASNI KABUPATEN MANOKWARI
	201	KCU. JAYAPURA	TANAH HITAM	JL. TANAH HITAM DISTRIK ABEPURA KOTA JAYAPURA
	202	KC. KEPI	KANTOR CABANG PEMBANTU BADE	JL. ANGKASA BADE, DISTRIK EDERA KABUPATEN MAPPI
	203	KCU. MANOKWARI	KANTOR KAS ORANSBARI	JL. MERDEKA, DISTRIK ORANSBARI KABUPATEN MANOKWARI
	204	KCU JAYAPURA	MULTI MANDIRI	JL. BARU PASAR LAMA DISTRIK ABEPURA KOTA JAYAPURA
	205	KC. SENTANI	HAWAI (RENCANA KCP. HAWAI)	JL. RAYA SENTANI HAWAI DISTRIK SENTANI KABUPATEN JAYAPURA
	206	KC. SENTANI	DOYO BARU (RENCANA KCP. DOYO BARU)	JL. RAYA DOYO BARU DISTRIK WAIBU KABUPATEN JAYAPURA
	207	KCU. JAYAPURA	SPA PRODUCTION	JL. RAYA ABEPURA - SENTANI, DEPAN KORAMIL ABEPURA
	208	KCU. JAYAPURA	MALL JAYAPURA	JL. SAM RATULANGI APO - JAYAPURA
	209	KCU. JAYAPURA	MALL JAYAPURA /ATM CENTER HYPERMART JAYAPURA	JL. SAM RATULANGI APO - JAYAPURA
	210	KCU. JAYAPURA	PASIR II	JL. PASIFIK INDAH, PASIR II - JAYAPURA
	211	KC. TIMIKA	KANTOR CABANG PEMBANTU TEMBAGAPURA	SENTRA NIAGA MILE 68, DISTRIK TEMBAGAPURA KABUPATEN MIMIKA
	212	KC. SENTANI	KANTOR CABANG PEMBANTU GENYEM	DISTRIK NIMBORAN KABUPATEN JAYAPURA
	213	KC. SENTANI	KANTOR CABANG PEMBANTU NIMBOKRANG	DESA BUNYOM DISTRIK NIMBOKRANG KABUPATEN JAYAPURA
	214	KCU. JAYAPURA	RUMAH SAKIT MARTHEN INDEY	JL. GURABESI - ARYOKO JAYAPURA
	215	KC. JAKARTA	KANTOR CABANG JAKARTA	GEDUNG THAMRIN CITY LT. DASAR JL. THAMRIN BOULEVARD (D/H JL. KEBON KACANG RAYA) JAKARTA PUSAT
	216	KC. MAKASSAR	BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR	BANDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN LANTAI 2 GATE 4 MAKASSAR (SAMPING DUNKIN DONUTS)
	217	KC. MAKASSAR	ATM CENTER MAKASSAR TRADE CENTER (MTC) KAREBOSI	JL. AHMAD YANI MAKASSAR
	218	KC. WAMENA	WAMENA MALL	JL. TRIKORA WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA
	219	KC. WAMENA	KANTOR CABANG PEMBANTU DEKAI	KOMPLEKS RUKO DEKAI BLOK A NO. 28- 30 DISTRIK DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO
	220	KC SORONG	KANTOR CABANG SORONG	JL. ACHMAD YANI NO. 18 KOTA SORONG
	221	KC SORONG	KANTOR CABANG SORONG	JL. ACHMAD YANI NO. 18 KOTA SORONG
	222	KC SORONG	KANTOR CABANG SORONG	JL. ACHMAD YANI NO. 18 KOTA SORONG
	223	KC TEMINABUAN	PASAR KAJASE	KOMPLEKS PASAR SENTRAL KAJASE, TEMINABUAN KABUPATEN SORONG SELATAN
	224	KC. AIMAS	KANTOR BUPATI AIMAS	KOMPLEKS KANTOR BUPATI KABUPATEN SORONG - JALAN KLAMONO KM. 24 AIMAS
	225	KC. MERAUKE	KANTOR CABANG PEMBANTU KURIK	JL. MOH HATTA DISTRIK KURIK KABUPATEN MERAUKE
	226	KCU. MANOKWARI	MOBIL KAS KELILING MANOKWARI	KANTOR CABANG UTAMA MANOKWARI
	227	KCU. JAYAPURA	KANTOR CABANG PEMBANTU PASAR YOUTEFA	JALAN BARU PASAR YOUTEFA DISTRIK ABEPURA KOTA JAYAPURA
	228	KC TANAH MERAH	KANTOR CABANG TANAH MERAH	JL. TRANS PAPUA - TANAH MERAH, DISTRIK MANDOBO KABUPATEN BOUVEN DIGOEL
	229	KCU. JAYAPURA	MOBIL KAS KELILING JAYAPURA	KANTOR CABANG UTAMA JAYAPURA
	230	KC TEMINABUAN	KANTOR BUPATI SESNA - SORONG SELATAN	KOMPLEKS KANTOR BUPATI SESNA KABUPATEN SORONG SELATAN - TEMINABUAN

Delivery Channel

Delivery Channel

NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
1	PELAYANAN PERBANKAN ELEKTRONIS / TRANSAKSI NON TUNAI			
1,1	ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)			
	231	KC WAMENA	KANTOR CABANG PEMBANTU TIOM	DISTRIK TIOM KABUPATEN LANNY JAYA
	232	KC MERAUKE	KANTOR POLRES MERAUKE	JALAN BRAWIJAYA - MERAUKE
	233	KC KAIMANA	KANTOR CABANG KAIMANA	JL. TRIKORA NO. 1A KAIMANA
	234	KC KAIMANA	KANTOR CABANG KAIMANA	JL. TRIKORA NO. 1A KAIMANA
	235	KC KAIMANA	KANTOR CABANG KAIMANA	JL. TRIKORA NO. 1A KAIMANA
	236	KC. MULIA	KANTOR CABANG MULIA	JL. SILAS PAPARE DISTRIK MULIA KABUPATEN PUNCAK JAYA
	237	KC. MERAUKE	APOTIK K - 24 MERAUKE	JL. TMP POLDER MERAUKE KABUPATEN MERAUKE
	238	KC. MERAUKE	TOKO STAR BRAWIJAYA	JL. BRAWIJAYA MERAUKE KABUPATEN MERAUKE
	239	KCU MANOKWARI	AWIN MARTINA FUTSAL	DISTRIK MANOKWARI BARAT KABUPATEN MANOKWARI
	240	KCU MANOKWARI	KANTOR CABANG PEMBANTU BUMI MARINA ASRI	JL. ANGKASA MULYONO KELURAHAN AMBAN DISTRIK MANOKWARI BARAT KABUPATEN MANOKWARI
	241	KCU JAYAPURA	KOPERASI PENABUR PERUM JAYA ASRI	PERUM JAYA ASRI, DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA
	242	KCU JAYAPURA	PUSKOPAD BUCEND II ENTROP	JL. ABEPURA BUCEND II ENTROP, DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA
	243	KC. TEMINABUAN	RSUD SCHOLOO KEYEN	JL. TEMINABUAN KAMPUNG KEYEN DISTRIK AYAMARU KABUPATEN SORONG SELATAN
	244	KCU JAYAPURA	KLASIS GKI JAYAPURA	KELURAHAN GURABESI DISTRIK JAYAPURA UTARA KOTA JAYAPURA
	245	KCU JAYAPURA	KLASIS GKI JAYAPURA	KELURAHAN GURABESI DISTRIK JAYAPURA UTARA KOTA JAYAPURA
	246	KCU JAYAPURA	KOYA TIMUR	DISTRIK MUARA TAMI KOTA JAYAPURA
	247	KC. TEMINABUAN	KANTOR CABANG PEMBANTU MOSWAREN	DISTRIK MOSWAREN KABUPATEN SORONG SELATAN
	248	KC. TIMIKA	KANTOR CABANG PEMBANTU BUDI UTOMO TIMIKA	Jl. BUDI UTOMO NO. 41 DISTRIK MIMIKA KABUPATEN MIMIKA
	249	KC. WAREN	KANTOR CABANG PEMBANTU URFAS	JL. INPRES URFAS DISTRIK UREI FAISEI KABUPATEN WAROPEN
	250	KC. WAREN	KANTOR CABANG PEMBANTU URFAS	JL. INPRES URFAS DISTRIK UREI FAISEI KABUPATEN WAROPEN
	251	KC. NABIRE	KANTOR BUPATI NABIRE	Jl. Merdeka No.53, Karang Mulia, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire, Papua 98811
	252	KC. MERAUKE	SWISSBELL HOTEL	Jl. Raya Mandala No. 53, Kabupaten Merauke, Papua 99614
	253	KC. WAREN	KANTOR CABANG WAREN	JL. INPRES, DISTRIK WAROPEN BAWAH KABUPATEN WAROPEN
	254	KCU. MANOKWARI	ATM CENTRE BANDARA RENDANI MANOKWARI	Sowi, Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat 98315
	255	KC. OKSIBIL	KANTOR CABANG OKSIBIL	KANTOR CABANG OKSIBIL
	256	KC. ENAROTALI	RSUD PANIAI	Badauwo, Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua 98781
	257	KCU. JAYAPURA	TOKO CEMERLANG MART	JL. WAENA
	258	KC. SURABAYA	SPBU KLAMPIS	JL. KLAMPIS JAYA, NO. 19
	259	KC. JAKARTA	KC. GADING SERPONG	RUKO BOLSENA,JL.RAYA BOLSENA BLOK A NO.01
	260	KC. MANADO	ATM CENTER KANTOR CABANG MANADO	KOMP.MEGA MAS RUKO MEGA BRIGHT BLOK1E NO.3,JL. PIERE TENDEAN MANADO
	261	KCU JAYAPURA	KANTOR CABANG PEMBANTU ENTROP	JL. RAYA ENTROP, KOTA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA
	262	KCU JAYAPURA	KANTOR CABANG PEMBANTU ENTROP	JL. RAYA ENTROP, KOTA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA
	263	KC. NABIRE	KANTOR CABANG PEMBANTU SAMABUSA	JL. POROS NABIRE LAGARI - SAMABUSA, DISTRIK TELUK KIMI KABUPATEN NABIRE
	264	KC. JAKARTA	KANTOR CABANG PEMBANTU MANGGA DUA	ITC MANGGA DUA BLOK A NO.80 DAN 80A JL.RAYA MANGGA DUAUTARA
	265	KC. YOGYAKARTA	ATM CENTER KANTOR CABANG YOGYAKARTA	RUKO RAFLESIA KAVLING J DAN K
	266	KC. AGATS	ATM CENTER KANTOR CABANG AGATS	JL. SULTAN HASANNUDIN
	267	KC. AGATS	ATM CENTER KANTOR CABANG AGATS	JL. SULTAN HASANNUDIN

NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
1	PELAYANAN PERBANKAN ELEKTRONIS / TRANSAKSI NON TUNAI			
1,1	ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)			
	268	KC. MANADO	ATM CENTER KANTOR CABANG MANADO	KOMP.MEGA MAS RUKO MEGA BRIGHT BLOK1E NO.3,JL. PIERE TENDEAN MANADO
	269	KCU JAYAPURA	SPBU WAENA	JL. RAYA SENTANI, Heram, Kota Jayapura, Papua 99225
	270	KC. JAKARTA	KANTOR CABANG PEMBANTU KELAPA GADING	PERUM.KELAPA GADING PERMAI II,JL.KELAPA GADING BOULEVARD BLOK TA-2 NO.37
	271	KCU MANOKWARI	SUPERMARKET HADI MANOKWARI	JL. YOS SUDARSO MANOKWARI
	272	KC.AIMAS	KANTOR CABANG PEMBANTU KLAMONO	JL. RAYA KALMONO,DISTRIK KLAMONO KABUPATEN SORONG
	273	KC. AIMAS	KAMPUS STKIP MUHAMMADIYAH SORONG	JL. KH.A. DAHLAN NO.01 MARIYAT PANTAI AIMAS KABUPATEN SORONG
	274	KCU JAYAPURA	HOTEL AGUNG	JL. ARGAPURA NO.37, DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA
	275	KCU MANOKWARI	RM. SABAR MENANTI SP.1 PRAFI	DISTRIK PRAFI KABUPATEN MANOKWARI
	276	KCU MANOKWARI	ATM CENTER SPBU WOSI	JL. BARU, WOSI MANOKWARI
	277	KC TEMINABUAN	BANDARA TEMINABUAN	DISTRIK TEMINABUAN KABUPATEN SORONG SELATAN
	278	KC SENTANI	SENTANI CITY SQARE	JL. KEMIRI DISTRIK SENTANI KOTA KABUPATEN JAYAPURA
	279	KC ABEPURA	ATM CENTER KANTOR CABANG ABEPURA	JL. ABEPURA KOTARAJA KOTA JAYAPURA
	280	KC ABEPURA	ATM CENTER KANTOR CABANG ABEPURA	JL. ABEPURA KOTARAJA KOTA JAYAPURA
	281	KC ABEPURA	ATM CENTER KANTOR CABANG ABEPURA	JL. ABEPURA KOTARAJA KOTA JAYAPURA
	282	KC ABEPURA	ATM CENTER KANTOR CABANG ABEPURA	JL. ABEPURA KOTARAJA KOTA JAYAPURA
	283	KCU JAYAPURA	KOPERASI MAMBERAMO ANGKASA	JALAN SUJARWO CONDRONEGORO, DISTRIK JAYAPURA UTARA KOTA JAYAPURA
	284	KCU MANOKWARI	HOTEL FAJAR ROON	JALAN TRIKORA WOSI, KABUPATEN MANOKWARI
	285	KC TIMIKA	SHOPING KELUARGA MILE 68 TEMBAGAPURA	MILE 68 DISTRIK TEMBAGAPURA KABUPATEN MIMIKA
	286	KC BINTUNI	TOKO NAGA JAYA	JALAN RAYA BINTUNI
	287	KC TANAH MERAH	HOTEL IDAMAN TANAH MERAH	JALAN TRANS PAPUA
	288	KC NABIRE	ATM BANDARA NABIRE	JALAN SISINGAMANGARAJA, DISTRIK OYEHE KABUPATEN NABIRE
	289	KC SARMI	ATM KANTOR BUPATI SARMI	Jl. Kantor Buapti,Kota Baru Petam, Kab Sarmi 99373
	290	KC. FAK - FAK	RSUD FAK - FAK	JL. JENDRAL SUDIRMAN, FAK - FAK
	291	KC. KASONAWEJA	ATM CENTER KC. KASONAWEJA	DISTRIK KASONAWEJA KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
	292	KC. KASONAWEJA	ATM CENTER KC. KASONAWEJA	DISTRIK KASONAWEJA KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
	293	KC. ARSO	KANTOR KAS SWAKARSA	JL. BHAYANGKARA, KELURAHAN ASYAMAN, DISTRIK ARSO, KABUPATEN KEEROM
	294	KC. MANADO	ATM BAHU MALL MANADO	KAWASAN BAHU MALL MANADO, KELURAHAN BAHU DISTRIK MALALAYANG KOTA MANADO
	295	KC. SARMI	ATM MALL S ONE SARMI	JLN. DIPONEGORO DISTRIK SARMI KABUPATEN SARMI
	296	KC. JOGJAKARTA	ATM JOGJA EXPO CENTRE	JALAN RAYA JANTI BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
	297	KCU JAYAPURA	ATM CENTER KCU JAYAPURA	JL. A. YANI NO 5-7 JAYAPURA 99111
	298	KCU JAYAPURA	ATM CENTER KCU JAYAPURA	JL. A. YANI NO 5-7 JAYAPURA 99111
	299	KCU JAYAPURA	ATM CENTER KCU JAYAPURA	JL. A. YANI NO 5-7 JAYAPURA 99111
	300	KCU JAYAPURA	ATM CENTER KCU JAYAPURA	JL. A. YANI NO 5-7 JAYAPURA 99111
	301	KCU JAYAPURA	ATM CENTER KCU JAYAPURA	JL. A. YANI NO 5-7 JAYAPURA 99111

NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
1	PELAYANAN PERBANKAN ELEKTRONIS / TRANSAKSI NON TUNAI			
1,2	ELEKTRONIC DATA CAPTURE (EDC)			
	1	JAYAPURA	BOULEVARD CLUB	JL. KELAPA DUA ENTROP
	2	JAYAPURA	BOULEVARD 1	JL. KELAPA DUA ENTROP
	3	JAYAPURA	ROYAL GARDEN FAMILY SPA & REFLEXOLOGY	JL. RAYA PADANG BULAN WAENA
	4	JAYAPURA	TOKO EMAS REMAJA	JL. JENDRAL AHMAD YANI NO. 23 JAYAPURA
	5	JAYAPURA	INUL VIZTA	MALL JAYAPURA LT. 4
	6	JAYAPURA	TOKO BATIK Q-TORANG	RUKO PASIFIK PERMAI DOK II BLOK B2
	7	JAYAPURA	LABORATORIUM KLINIK 129	BUCEND RAYA 2 RUKO 1-2 JAYAPURA

Delivery Channel

Delivery Channel

NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
1	PELAYANAN PERBANKAN ELEKTRONIS / TRANSAKSI NON TUNAI			
1,2	ELEKTRONIC DATA CAPTURE (EDC)			
	8	JAYAPURA	TOKO EMAS GEMILANG	JL. AHMAD YANI
	9	JAYAPURA	HAPPY PUPPY	Jl. Pacific Permai, Bayangkara, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua
	10	JAYAPURA	HOTEL SAHID PAPUA	Jl. Raya Kelapa Dua Entrop No.18, Entrop, Jayapura Selatan,Kota Jayapura, Papua 99221
	11	JAYAPURA	CARE LAUNDRY	JL. RAYA ABE SENTANI PADANG BULAN
	12	JAYAPURA	SINAR VARIASI	KOTARAJA
	13	JAYAPURA	TOKO SUMBER MAKMUR	JL. DEWI SARTIKA NO. 06 ABE
	14	JAYAPURA	HOLLA PLAZA	JL. RAYA SENTANI PADANG BULAN
	15	JAYAPURA	SWISS BELL HOTEL (RESTAURANT)	RUKO PASIFIK PERMAI DOK II
	16	JAYAPURA	SWISS BELL HOTEL (RESTAURANT)	RUKO PASIFIK PERMAI DOK II
	17	JAYAPURA	TOKO EMAS BANTENG	Jl Pembangunan No 6 Dr Soetomo No 6 Gurabesi 99111, Gurabesi, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua 99111
	18	JAYAPURA	DUNKIN DONUTS	JL. RAYA ABEPURA KOTARAJA
	19	JAYAPURA	TOKO EMAS MURNI	JL. ACHMAD YANI NO. 32
	20	JAYAPURA	TOKO EMAS CENDRAWASIH EMAS	Jl. Jenderal Ahmad Yani No.32, Gurabesi, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua 99222
	21	JAYAPURA	RUMAH MAKAN NUSANTARA	APO
	22	JAYAPURA	STAR MART	RUKO PASIFIK PERMAI DOK II
	23	JAYAPURA	INDOPRIMA JAYAPURA	RUKO PASIFIK PERMAI DOK II
	24	JAYAPURA	FACTORY OUTLET TRIPLE L	JL. RAYA KELAPA DUA ENTROP
	25	JAYAPURA	TOKO LUMBUNG BERKAT	JL. PADANG BULAN ATAS NO 65 A
	26	JAYAPURA	RESTO & CAFÉ RUMAH LAUT	JL. KOTI NO 5 JAYAPURA
	27	JAYAPURA	HOTEL GRAND VIEW	RUKO PASIFIK PERMAI DOK II
	28	JAYAPURA	TOKO ANEKA BATIK	JL. HALMAHERA RUKO NO. 3-4
	29	JAYAPURA	HOTEL YASMIN	JL. Percetakan Negara No. 8 Gurabesi, Jayapura Utara
	30	JAYAPURA	ISMARI TOUR & TRAVEL	JL. RAYA ABEPURA PAPUA
	31	JAYAPURA	SAGA MALL ABEPURA 7	JL. RAYA ABEPURA
	32	JAYAPURA	SAGA MALL ABEPURA 12	JL. RAYA ABEPURA
	33	JAYAPURA	TOKO SUMBER MAS	JL. AHMAD YANI NO. 23
	34	ABEPURA	HARI HARI TRAVEL	PERUMAHAN ORGANDA PADANG BULAN RT/RW 02/04
	35	ABEPURA	SAGA SUPERMARKET JAYAPURA Cashier 1	JL. AHMAD YANI
	36	ABEPURA	SAGA SUPERMARKET ABEPURA Cashier 2	JL. RAYA ABEPURA
	37	ABEPURA	SAGA SUPERMARKET ABEPURA Cashier 1	JL. RAYA ABEPURA
	38	ABEPURA	SAGA SUPERMARKET ABEPURA Cashier 3	JL. RAYA ABEPURA
	39	ABEPURA	SAGA SUPERMARKET ABEPURA Cashier 4	JL. RAYA ABEPURA
	40	ABEPURA	MAHKOTA ELECTRIC	JL. BARU PASAR LAMA ABEPURA
	41	ABEPURA	UD. MOTOR JAYA LESTARI	JL. SAMRATULANGI NO 47A JAYAPURA
	42	SENTANI	TOKO GLODOK HAWAI	JL. RAYA HAWAI KEL. SENTANI KOTA
	43	SENTANI	KING VARIASI	JL. RAYA HAWAI SENTANI KEL. SENTANI KOTA KEC. SENTANI
	44	SENTANI	EXECUTIVE LOUNGE BANDARA SENTANI	BANDARA UDARA SENTANI SENTANI
	45	SENTANI	TOKO MELODY CENTER	JL. RAYA JAYAPURA - POLIMAK
	46	SENTANI	GRAND ALLISON HOTEL	JL. KEMIRI RAYA NO. 282 KEL. HINEKOMBE
	47	SENTANI	TOKO PUTRI YASMIN	JL. PASAR LAMA KEL. HINEKOMBE KEC. SENTANI
	48	SENTANI	TOKO MAHARANI	JL. RAYA KEMIRI SAMPING HOTEL TRAVELLER
	49	SENTANI	HOTEL SENTANI RAYA	JL. YAHIM SENTANI KELURAHAN DOBONSOLO
	50	MERAUKE	TOKO DUA	JL. RAYA MANDALA
	51	MERAUKE	PT. ANGKASA GITA SARANA	JL. RAYA MANDALA
	52	MERAUKE/KEPI	TOKO GOLDEN SWALAYAN	JL. RAYA MANDALA
	53	MERAUKE	TOKO EMAS REJEKI	JL. RAYA MANDALA

NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
1	PELAYANAN PERBANKAN ELEKTRONIS / TRANSAKSI NON TUNAI			
1,2	ELEKTRONIC DATA CAPTURE (EDC)			
	54	MERAUKE	SWISS BELL HOTEL MERAUKE	JL. RAYA MANDALA
	55	MERAUKE	TOKO EMAS SENANG SUBUR	Jl. Raya Mandala, Mandala, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99615
	56	MERAUKE	TOKO EMAS SAMA SUBUR	Jl. Raya Mandala, Maro, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99614
	57	MANOKWARI	TOKO ANEKA BANGUNAN	JL. TRIKORA WOSI
	58	MANOKWARI	TOKO SURYA BARU	JL. YOS SUDARSO SANGGENG
	59	MANOKWARI	TOKO MULTI JAYA 1	JL. PAHLAWAN MANOKWARI
	60	MANOKWARI	TOKO MULTI JAYA 2	JL. PAHLAWAN MANOKWARI
	61	MANOKWARI	HOTEL ASTON MANOKWARI	Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Drs Esau Sesa, Sowi, South Manokwari, Manokwari Regency, Papua Barat 98315
	62	MANOKWARI	TOKO DEPO MAKMUR	JL. TRIKORA WOSI
	63	MANOKWARI	TOKO EMAS LOGAM TUNGGAL	JL. MERDEKA
	64	MANOKWARI	AUTO FORMULA	JL. JENDRAL SUDIRMAN
	65	MANOKWARI	BILLY JAYA TRAVEL	JL. MERDEKA MANOKWARI
	66	MANOKWARI	LEE SALON AND REFLEXOLOGY	JL. MERDEKA
	67	MANOKWARI	HAPPY MART	Jl. Trikora Wosi, Manokwari Barat., Kabupaten Manokwari, Papua Barat. 98312
	68	MANOKWARI	REFLEXI SEGAR BUGAR	JL. CILIWUNG MANOKWARI
	69	MANOKWARI	TOKO SINAR JAYA	JL. MERDEKA
	70	MANOKWARI	TOKO FIRMAN	JL. TRIKORA WOSI
	71	MANOKWARI	KARAOKE TOP IDOL	JL. MERDEKA WOSI
	72	MANOKWARI	MANSINAM BEACH HOTEL	JL. KENARI TINGGI PASIR PUTIH
	73	MANOKWARI	MANSINAM BEACH RESORT	JL. KENARI TINGGI PASIR PUTIH
	74	MANOKWARI	BAKARO LOUNGE	BANDARA RENDANI MANOKWARI
	75	MANOKWARI	LEE CAFÉ	JL. MERDEKA
	76	MANOKWARI	TOKO AMAN JAYA	JL.YOS SUDARSO SANGGENG
	77	MANOKWARI	RM. SALAM MANIS	JL. MERDEKA MANOKWARI
	78	MANOKWARI	ORCHID SWALAYAN (CASHIER 1)	JL. MERDEKA
	79	MANOKWARI	ORCHID SWALAYAN (CASHIER 2)	JL. MERDEKA
	80	MANOKWARI	ORCHID Departemen STORE	JL. MERDEKA
	81	MANOKWARI	HADI Departemen STORE (CASHIER 1)	JL. YOS SUDARSO
	82	MANOKWARI	HADI Departemen STORE (CASHIER 2)	JL. YOS SUDARSO
	83	MANOKWARI	HADI SUPERMARKET (CASHIER 2)	JL. YOS SUDARSO
	84	MANOKWARI	HADI SUPERMARKET (CASHIER 1)	JL. YOS SUDARSO
	85	MANOKWARI	SURYA JAYA 1	JL. MERDEKA MANOKWARI
	86	MANOKWARI	SURYA JAYA 2	JL. MERDEKA MANOKWARI
	87	SORONG	PAPUA STORE (Cashier 5)	JL. DANAU MANINJAU
	88	SORONG	AS KARAOKE DAN RESTAURANT Cashier 2	KM 12 JL. BASUKI RAHMAT SORONG
	89	SORONG	AS KARAOKE DAN RESTAURANT Cashier 3	KM 12 JL. BASUKI RAHMAT SORONG
	90	SORONG	HOKI MART	JL. BASUKI RAHMAT
	91	SORONG	TOKO MAKMUR ABADI	JL. BASUKI RAHMAT KM 12 SORONG
	92	KAIMANA	RED BULL KARAOKE	JL. UTARUM BANTEMI PASIR LOMBO
	93	KAIMANA	SAMUDRA MART	JL. UTARUM KROY KAIMANA
	94	TIMIKA	DIANA Departemen STORE CHASIER FASHION LT 2	Jl Budi Utomo 8 C, Timika, Mimika, Papua
	95	TIMIKA	KUALA MALL	TIMIKA

NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
1	PELAYANAN PERBANKAN ELEKTRONIS / TRANSAKSI NON TUNAI			
1,3	*CASH DEPOSIT MACHINE* (CDM)			
	1	KCU. JAYAPURA	KANTOR CABANG UTAMA JAYAPURA	JL. ACHMAD YANI NO. 5 - 7 KOTA JAYAPURA
	2	KCU. MANOKWARI	KANTOR CABANG UTAMA MANOKWARI	JL. YOS SUDARSO NO. 57A MANOKWARI
	3	KC. SORONG	KANTOR CABANG SORONG	JL. AHMAD YANI NO 18 SORONG
	4	KC. WAMENA	KANTOR CABANG WAMENA	JL. YOS SUDARSO WAMENA

Delivery Channel

Delivery Channel

NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
1	PELAYANAN PERBANKAN ELEKTRONIS / TRANSAKSI NON TUNAI			
1,3	*CASH DEPOSIT MACHINE* (CDM)			
	5	KCP. ABEPURA	KANTOR CABANG PEMBANTU ABEPURA	JL. RAYA SENTANI DISTRIK ABEPURA KOTA JAYAPURA
	6	KC. MERAUKE	KANTOR CABANG MERAUKE	JL. RAYA MANDALA MULI NO. 350 MERAUKE
	7	KC. SENTANI	KANTOR CABANG SENTANI	JL. RAYA KEMIRI SENTANI (EX. GEDUNG KANTOR DINAS PERTANIAN)
	8	KC. TIMIKA	KANTOR CABANG TIMIKA	JL. YOS SUDARSO NO. 4 TIMIKA
NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
2	KASDA ONLINE			
	1	KCU JAYAPURA	PEMDA KOTA JAYAPURA	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA JAYAPURA
	2	KC. SENTANI	PEMDA KABUPATEN JAYAPURA	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN JAYAPURA
	3	KC. NABIRE	PEMDA KABUPATEN NABIRE	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN NABIRE
	4	KC. WAMENA	PEMDA KABUPATEN JAYAWIJAYA	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN JAYAWIJAYA
	5	KCU JAYAPURA	PEMDA PROVINSI PAPUA	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI PAPUA
	6	KC. BIAK	PEMDA KABUPATEN BIAK NUMFOR	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN BIAK NUMFOR
	7	KC. SERUI	PEMDA KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
	8	KC. MERAUKE	PEMDA KABUPATEN MERAUKE	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN MERAUKE
	9	KC. SARMI	PEMDA KABUPATEN SARMI	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN SARMI
	10	KC. OKSIBIL	PEMDA KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
	11	KC. TIMIKA (DISPENDA OL)	PEMDA KABUPATEN MIMIKA	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN MIMIKA
	12	KC. KASONAWEJA	PEMDA KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
	13	KC. FAK - FAK	PEMDA KABUPATEN FAK - FAK	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN FAK - FAK
	14	KCU. MANOKWARI	PEMDA KABUPATEN MANOKWARI	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN MANOKWARI
	15	KC. KAIMANA	PEMDA KABUPATEN KAIMANA	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN KAIMANA
	16	KC. TEMINABUAN	PEMDA KABUPATEN SORONG SELATAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN SORONG SELATAN
	17	KC. WAISAI	PEMDA KABUPATEN RAJA AMPAT	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN RAJA AMPAT
	18	KC. AIMAS	PEMDA KABUPATEN SORONG	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN SORONG
	19	KCP. RANSIKI	PEMDA KABUPATEN MANOKWARI SELATAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
3	SAMSAT ONLINE			
	1	KCU JAYAPURA	KANTOR UPPT SAMSAT KOTA JAYAPURA	DEPAN SWALAYAN AGRO SEGAR ABEPURA, JL. RAYA ABEPURA - KOTA JAYAPURA
	2	KC. SENTANI	KANTOR UPPT SAMSAT SENTANI	JL. DOYO SENTANI - KABUPATEN JAYAPURA
	3	KC. SARMI	KANTOR UPPT SAMSAT SARMI	JL. SYAMOR MARARENA SARMI - KABUPATEN SARMI

NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
3	SAMSAT ONLINE			
	4	KC. ARSO	KANTOR UPPT SAMSAT KEEROM	JL. ARSO II - KABUPATEN KEEROM
	5	KC. MERAUKE	KANTOR UPPT SAMSAT MERAUKE	JL. PRAJURIT NO. 15 KABUPATEN MERAUKE
	6	KCP. SP IV TIMIKA	KANTOR UPPT SAMSAT TIMIKA	JL. YOS SUDARSO NO. 15 TIMIKA - KABUPATEN MIMIKA
	7	KC. BIAK	KANTOR UPPT SAMSAT BIAK	JL. JEND. A. YANI NO. 31 BIAK - KABUPATEN BIAK NUMFOR
	8	KC. NABIRE	KANTOR UPPT SAMSAT NABIRE	JL. MERDEKA NO. 77 KABUPATEN NABIRE
	9	KC. SERUI	KANTOR UPPT SAMSAT SERUI	JL. IRIAN SERUI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
	10	KCP. URFAS WAREN	KANTOR UPPT SAMSAT WAROPEN	JL. WANGGHAFA URFAS WAROPEN - KABUPATEN WAROPEN
	11	KC. WAMENA	KANTOR UPPT SAMSAT WAMENA	JL. YOS SUDARSO WAMENA
	12	KC. TANAH MERAH	KANTOR UPPT SAMSAT BOUVEN DIGOEL	JL. JAIR, TANAH MERAH - KABUPATEN BOVEN DIGOEL
	13	KC. KEPPI	KANTOR UPPT SAMSAT MAPPI	JL. KALIMANTAN, KEPPI - KABUPATEN MAPPI
	14	KCP. SORENDIWERI	KANTOR UPPT SAMSAT SUPIORI	DISTRIK SUPIORI TIMUR KABUPATEN SUPIORI (KOMP. PASAR SENTRAL SUPIORI)
	15	KCU. MANOKWARI	KANTOR UPTD SAMSAT MANOKWARI	JL. KARYA ABRI SANGGENG - KABUPATEN MANOKWARI
	16	KC. SORONG	KANTOR UPTD SAMSAT KOTA SORONG	JL. JEND. SUDIRMAN - KOTA SORONG
	17	KC. AIMAS	KANTOR UPTD SAMSAT AIMAS	JL. MARIAT AIMAS - KABUPATEN SORONG
	18	KC. WAISAI	KANTOR UPTD SAMSAT WAISAI	WAISAI - DISTRIK WAIGEO SELATAN KABUPATEN RAJA AMPAT
	19	KC. TEMINABUAN	KANTOR UPTD SAMSAT TEMINABUAN	KOMPLEKS KANTOR BUPATI SESNA, TEMINABUAN - KABUPATEN SORONG SELATAN
	20	KC. BINTUNI	KANTOR UPTD SAMSAT BINTUNI	JL. RAYA BINTUNI SP V - KABUPATEN TELUK BINTUNI
	21	KC. FAK - FAK	KANTOR UPTD SAMSAT FAK - FAK	WAGOM - KABUPATEN FAK - FAK
	22	KC. WASIOR	KANTOR UPTD SAMSAT WONDAMA	JL. RASIEI PERKANTORAN BUPATI TELUK WONDAMA
	23	KC. KAIMANA	KANTOR UPTD SAMSAT KAIMANA	JL. BATU PUTIH KROOY KABUPATEN KAIMANA
NO	**JENIS KEGIATAN**	**KANTOR INDUK (KC)**	**LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN**	**ALAMAT**
4	KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK (KPE)			
	1	KCU JAYAPURA	PEMERINTAH DAERAH KOTA JAYAPURA	Jl. Balai Kota No.1, Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua 99223
	2	KCU JAYAPURA	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua
	3	KC. MERAUKE	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERAUKE	JL. BRAWIJAYA MERAUKE
	4	KC. TIMIKA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA	JL. TIMIKA KABUPATEN MIMIKA
	5	KC. SENTANI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	JL. GUNUNG MERAH DISTRIK SENTANI KABUPATEN JAYAPURA ,Papua 99352
	6	KC. AGATS	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASMAT	Jl. Frans Kaisiepo Agats (0902) 31196
	7	KC. BIAK	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR	Jalan Majapahit no 1, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111
	8	KC. NABIRE	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NABIRE	Jl. Merdeka No.53, Karang Mulia, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire, Papua 98811
	9	KC. SORONG	PEMERINTAH DAERAH KOTA SORONG	Jl. Burung Kurana, Remu Utara No 4, Kota Sorong Papua Barat 98412
	10	KC. WAISAI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT	WAISAI - DISTRIK WAIGEO SELATAN KABUPATEN RAJA AMPAT 98482
	11	KCU. MANOKWARI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI	Sowi, Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Papua Bar. 98315
	12	KC. TEMINABUAN	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN	Kompleks Kantor Bupati Sesna Jl. Teminabuan-Ayamaru Kelurahan Kaibus Distrik Teminabuan
	13	KC. AIMAS	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG	Kp. Baru, Kec. Sorong, Kota Sorong, Papua Barat 98411
	14	KC. FAKFAK	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FAKFAK	Jl. Jendral Sudirman Fak Fak, Wagom Utara, Fakfak Sub-District, Fakfak Regency, West Papua 98611
	15	KCP. SORENDIWERI	PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI	Jl. Sorendidori, Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Papua 98161
	16	KC. SERUI	PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	Jalan Irian, Serui Kota, Yapen Sel., Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua 98213
	17	KC. SARMI	PEMERINTAH KABUPATEN SARMI	Jl Kantor Bupati, Kelurahan Kota Baru Petam, Kecamatan Sarmi, Kota Sarmi, Provinsi Papua, Kode Pos 99373
	18	KC. KASONAWEJA	PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	Jl. Burmeso, Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Papua 99376

Delivery Channel

Delivery Channel

NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
4	KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK (KPE)			
	19	KC. WASIOR	PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA	Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Raisiei
	20	KC. ARSO	PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM	Arso Kota, Arso, Kabupaten Keerom, Papua 99468
	21	KC. WAROPEN	PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN	Jl. Waren Satu, Oudate, Kabupaten Waropen, Papua 98261
	22	KC. TANAH MERAH	PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL	Jalan Trans Papua, Tanah Merah Boven Digoel
	23	KC. KEPPI	PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI	Jl. Obaa, Mappi Regency, Papua 99881

NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
5	CASH MANAGEMENT SISTEM (CMS)			
	1	KCU. JAYAPURA	PEMDA PROVINSI PAPUA	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI PAPUA
	2	KCU. JAYAPURA	PEMDA KOTA JAYAPURA	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA JAYAPURA
	3	KC. ARSO	PEMDA KABUPATEN KEEROM	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN KEEROM
	4	KC. WAMENA	PEMDA KABUPATEN LANNY JAYA	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN LANNY JAYA

NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
6	KAS TITIPAN BANK INDONESIA			
	1	KC. MERAUKE	Bank Papua Kantor Cabang Merauke	Jl. Raya Mandala Muli No.350 Merauke, Papua 99614
	2	KC. WAMENA	Bank Papua Kantor Cabang Wamena	Jl. Yos Sudarso Wamena, Papua 99511
	3	KC. FAKFAK	Bank Papua Kantor Cabang Fak-Fak	Jl. Salasa Namudat Fak-Fak Selatan, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat 48611
	4	KC. BINTUNI	Bank Papua Kantor Cabang Bintuni	Jl. Raya Bintuni, Distrik Bintuni, Kab. Bintuni, Papua
	5	KC. NABIRE	Bank Papua Kantor Cabang Nabire	Jl. Yos Sudarso No.15 Nabire, Papua 98800

NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
2	*PAYMENT POINT* Bank Papua			
2,1	SAMSAT CORNER			
	1	KCP. MALL JAYAPURA	SAMSAT CORNER KCP MALL JAYAPURA	JL. DR. SAM RATULANGI APO KEL. BHAYANGKARA DISTRIK JAYAPURA UTARA KOTA JAYAPURA
	2	KC ABEPURA	SAMSAT CORNER KCP MUARA TAMI	DISTRIK MUARA TAMI KOTA JAYAPURA
	3	KC SENTANI	SAMSAR CORNER KCP NIMBOKRANG	DESA BUNYOM DISTRIK NIMBOKRANG KABUPATEN JAYAPURA
	4	KCU JAYAPURA	SAMSAT CORNER KCP DOK IX	JL. SULAWESI KEL. IMBI DISTRIK JAYAPURA UTARA KOTA JAYAPURA
	5	KCU JAYAPURA	SAMSAT CORNER KCP HAMADI	JL. PASAR HAMADI KEL. HAMADI DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA
	6	KC OKSIBIL	SAMSAT CORNER KC OKSIBIL	DISTRIK OKSIBIL KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
	7	KC. SORONG	SAMSAT CORNER KCP BOZWEZEN	JL. R.A. KARTINI NO. 25 KELURAHAN RUFEI DISTRIK SORONG BARAT KOTA SORONG
	8	KC. AIMAS	SAMSAT CORNER KC AIMAS	JL. NANGKA KM. 19 KEL. MALAWILI DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG
	9	KC. TEMINABUAN	SAMSAT CORNER KK KAJASE	KOMPLEKS PASAR SENTRAL KAJASE, TEMINABUAN KABUPATEN SORONG SELATAN

NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
2	*PAYMENT POINT* Bank Papua			
2,2	PAYMENT PBB P2			
	1	KCU JAYAPURA	KANTOR BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (PAYMENT PBB P2)	JL.KABUPATEN III DISTRIK JAYAPURA UTARA KOTA JAYAPURA
	2	KC. MERAUKE	KANTOR BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (PAYMENT PBB P2)	PEMDA KABUPATEN MERAUKE

NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
2	*PAYMENT POINT* Bank Papua			
2,2	PAYMENT PBB P2			
	3	KCU. MANOKWARI	KANTOR BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (PAYMENT PBB P2)	PEMDA KABUPATEN MANOKWARI
	4	KC. NABIRE	KANTOR BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (PAYMENT PBB P2)	PEMDA KABUPATEN NABIRE
	5	KC. TIIMIKA	KANTOR BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (PAYMENT PBB P2)	PEMDA KABUPATEN MIMIKA
	6	KC. ARSO	KANTOR BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (PAYMENT PBB P2)	PEMDA KABUPATEN KERROM
	7	KC. SENTANI	KANTOR BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (PAYMENT PBB P2)	PEMDA KABUPATEN JAYAPURA

NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
2	*PAYMENT POINT* Bank Papua			
2,3	*PAYMENT POINT* PDAM			
	1	KCU JAYAPURA	PAYMENT PDAM JAYAPURA	JL.AHMAD YANI NO.5-7 Jayapura
	2	KC. MERAUKE	PAYMENT PDAM MERAUKE	

NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
2	*PAYMENT POINT* Bank Papua			
2,4	PHRI ONLINE			
	1	KCU JAYAPURA	PHRI ONLINE KOTA JAYAPURA	JL.AHMAD YANI NO.5-7 Jayapura

NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
2	*PAYMENT POINT* Bank Papua			
2,5	RSUD			
	1	KC. NABIRE	*PAYMENT POINT* RSUD NABIRE	Jl. R.E Martadinata Nabire Papua 98817
	2	KCU. JAYAPURA	*PAYMENT POINT* RSUD DOK 2 JAYAPURA	JLN. KESEHATAN NO.01 KOMPLEKS GEDUNG RSUD DOK 2 JAYAPURA Papua
	3	KC. KAIMANA	*PAYMENT POINT* RSUD KABUPATEN KAIMANA	Jl. Batu Putih, Kilo I, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat 98654
	4	KCU MANOKWARI	RSUD MANOKWARI	Jl. Siliwangi No.1, Manokwari Bar., Kabupaten Manokwari, Papua Barat 98312
	5	KANTOR CABANG SORONG	RSUD KABUPATEN SORONG	Kp. Baru, Kec. Sorong, Kota Sorong, Papua Barat 98411
	6	KANTOR CABANG TEMINABUAN	RSUD SCOLO KEYEN	JL.TEMINABUAN, Papua Barat 98454

NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
2	*PAYMENT POINT* Bank Papua			
2,6	*PAYMENT POINT* PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)			
	1	KC. FAKFAK	PEMDA KABUPATEN FAKFAK	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP)
	2	KC. BIAK	PEMDA KABUPATEN BIAK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP)
	3	KCU JAYAPURA	PEMDA KOTA JAYAPURA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP)

NO	JENIS KEGIATAN	KANTOR INDUK (KC)	LOKASI TEMPAT / TEMPAT KEGIATAN	ALAMAT
3	MOBIL KAS KELILING			
	1	KCU. JAYAPURA	Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura	JL. ACHMAD YANI NO. 5 - 7 KOTA JAYAPURA
	2	KCU. MANOKWARI	Bank Papua Kantor Cabang Utama Manokwari	JL. YOS SUDARSO NO. 57A MANOKWARI

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Mengutamakan Kebutuhan Pelanggan

Prioritize Customer Needs

Melayani dengan cepat, tepat dan efektif yang dilakukan oleh semua insan Bank Papua dengan berusaha memenuhi dan memuaskan pelanggan dengan memberikan layanan prima serta mengupayakan solusi tuntas atas segala masalah nasabah.

Serve quickly, appropriately and effectively by all Bank Papua personnel by trying to satisfy and satisfy customers by providing excellent service and pursue a thorough solution to all customer problems.

Tinjauan Industri
Industry Overview

PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN NASIONAL TAHUN 2017

Perekonomian nasional 2017 tumbuh 5,07%, meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 5,03%. Capaian pertumbuhan ekonomi pada 2017 merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Peningkatan pertumbuhan ditopang oleh perbaikan ekspor dan investasi. Perbaikan pendapatan memberikan dukungan pada konsumsi rumah tangga sehingga tetap memberikan kontribusi pertumbuhan yang tinggi dengan pangsa sekitar 54% terhadap perekonomian nasional. Perbaikan pertumbuhan ekspor nasional sebesar 9,09% (yoy) didorong oleh pemulihan ekonomi global yang semakin kuat. Realisasi pertumbuhan ekspor tersebut merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Sementara, perbaikan pertumbuhan investasi pada 2017 menjadi sebesar 6,15% (yoy), dari pertumbuhan 2016 sebesar 4,47% (yoy), didorong oleh percepatan realisasi proyek infrastruktur Pemerintah, khususnya sejak semester II 2017. Secara sektoral, perbaikan ekonomi terutama terjadi pada lapangan usaha yang terkait dengan aktivitas ekspor dan investasi Pemerintah. Kontribusi tertinggi berasal dari lapangan usaha industri pengolahan yang memiliki pangsa lebih dari 21% terhadap perekonomian. Perbaikan kinerja ekspor tercermin pada lapangan usaha pertanian, khususnya perkebunan, serta lapangan usaha industri pengolahan. Selanjutnya, percepatan berbagai proyek infrastruktur menopang perbaikan kinerja lapangan usaha konstruksi. Secara spasial, perbaikan kinerja perekonomian nasional pada 2017 ditopang oleh peningkatan pertumbuhan di seluruh kawasan.

NATIONAL ECONOMIC GROWTH IN 2017

The national economy of 2017 grew 5.07%, an increase compared to 2016 of 5.03%. The achievement of economic growth in 2017 is the highest in the last four years. The increasing growth is underpinned by improved exports and investment. Revenue improvement provides support to household consumption so that it continues to contribute to high growth with a share of about 54% of the national economy. The improvement in national export growth by 9.09% (yoy) is driven by a stronger global economic recovery. The realization of export growth is the highest in the last 5 years. Meanwhile, the improvement of investment growth in 2017 to be 6.15% (yoy), from 2014 growth of 4.47% (yoy), driven by the acceleration of the Government's infrastructure projects, especially since the second half of 2017. In sector, on business fields related to export activities and Government investment. The highest contribution comes from the manufacturing industry which has a share of more than 21% of the economy. Improvement in export performance is reflected in the field of agricultural business, especially the plantation, as well as the processing industry business field. Furthermore, the acceleration of various infrastructure projects sustains improvements in the performance of the construction business field. Spatially, the improvement of national economic performance in 2017 is supported by increased growth throughout the region.

Pertumbuhan Ekonomi Nasional Triwulan IV 2017 (% yoy)
National Economic Growth of 4th Quarter 2017 (% yoy)

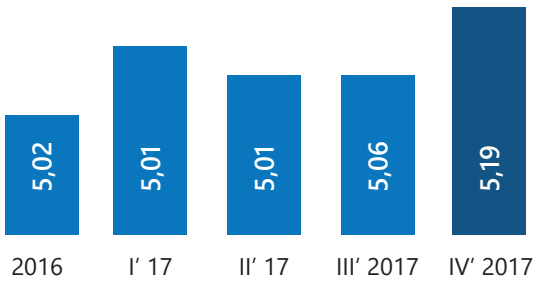

Perekonomian KTI 2017 tumbuh sebesar 5,10% (yoy), lebih tinggi dibanding 2016 yang tumbuh 4,84% (yoy). Perbaikan kinerja ekonomi KTI didukung oleh peningkatan kinerja investasi dan ekspor. Pada tahun 2017, ekspor KTI tumbuh 7,70% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 2016 yang mengalami kontraksi 2,63% (yoy). Peningkatan kinerja ekspor KTI didorong oleh perbaikan harga komoditas global yaitu batu bara, CPO, dan karet. Sementara, investasi KTI pada 2017 tumbuh 4,94% (yoy), lebih tinggi dari 2016 yang sebesar 3,61% (yoy). Pertumbuhan investasi dipengaruhi oleh percepatan realisasi Proyek Strategis Pemerintah (PSN), pembangunan proyek hilirisasi, serta peningkatan investasi barang modal pelaku usaha pertambangan dan industri. Secara sektoral, perbaikan ekonomi KTI terutama terjadi pada LU yang terkait dengan aktivitas ekspor dan investasi. Perbaikan ekspor, tercermin dari peningkatan kinerja LU pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Lapangan usaha pertanian pada 2017 tumbuh 5,20% (yoy), lebih tinggi dari 2016 yang sebesar 4,20% (yoy). Peningkatan kinerja LU pertanian juga didukung oleh perbaikan harga komoditas perkebunan, khususnya karet dan kelapa sawit, serta peningkatan produksi tanaman bahan makanan dan peningkatan volume produksi perikanan tangkap. LU pertambangan turut tumbuh lebih tinggi pada 2017 (2,01%;yoy) dibandingkan 2016 (1,42%;yoy). Kondisi tersebut sejalan didukung oleh tren peningkatan harga komoditas, khususnya batu bara, operasional beberapa smelter baru komoditas pertambangan dan dukungan kebijakan relaksasi ekspor mineral yaitu nikel kadar rendah. Secara spasial, perbaikan ekonomi KTI 2017 didorong oleh wilayah Kalimantan.

The KTI 2017 economy grew by 5.10% (yoy), higher than 2016 which grew 4.84% (yoy). The improvement of KTI's economic performance is supported by improved investment and export performance. In 2017, KTI exports grew 7.70% (yoy), higher than 2016 which contracted 2.63% (yoy). The improvement of export performance in Eastern Indonesia was driven by the improvement of global commodity prices, namely coal, CPO, and rubber. Meanwhile, KTI's investment in 2017 grew by 4.94% (yoy), higher than 2016 which was 3.61% (yoy). Investment growth is influenced by the acceleration of the realization of Government Strategic Project (PSN), the development of downstream projects, and the increase of investment in capital goods of mining and industrial business actors. By sector, KTI's economic improvement mainly occurs in LU related to export and investment activities. Export improvement, reflected in improved LU performance in agriculture, mining and trade. Agricultural field in 2017 grew 5.20% (yoy), higher than 2016 which amounted to 4.20% (yoy). The improvement of agricultural LU performance is also supported by the improvement of prices of plantation commodities, especially rubber and palm oil, as well as increased production of food crops and increased production volume of capture fisheries. Mining LU also grew higher in 2017 (2.01%, yoy) compared to 2016 (1.42%; yoy). The condition is in line with the upward trend in commodity prices, especially coal, the operations of several new smelter mining commodities and the support of mineral export relaxation policy which is low grade nickel. Spatially, the improvement of KTI 2017 economy is driven by Kalimantan region.

Inflasi

Dari sisi inflasi, inflasi berbagai daerah secara agregat pada tahun 2017 tercatat 3,61%, terjaga di kisaran target sasaran inflasi 4,0%±1%. Pencapaian inflasi tersebut didukung oleh inflasi *volatile foods* (VF) yang rendah (0,71%) dan inflasi inti yang terjaga (2,95%). Sementara, tekanan *administered prices* tercatat relatif tinggi (8,70%) terutama disebabkan oleh penyesuaian tarif listrik terkait kebijakan subsidi listrik tepat sasaran untuk daya 900 VA. Keberhasilan pencapaian inflasi yang rendah dan stabil di tahun 2017 tidak terlepas dari dukungan koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah Posat dan Pemerintah Daerah dalam upaya pengendalian inflasi.

Inflation

In terms of inflation, inflation of various regions in aggregate in 2017 was 3.61%, maintained in the target range of 4.0% ± 1% inflation target. The inflation was supported by low volatile foods (VF) inflation (0.71%) and steady core inflation (2.95%). Meanwhile, administered prices pressure recorded relatively high (8.70%) mainly due to the adjustment of electricity tariffs related to the electricity subsidy policy targeted to power 900 VA. The achievement of low and stable inflation in 2017 can not be separated from the support of coordination of Bank Indonesia with the Central Government and Local Government in the effort to control inflation.

Prospek Perekonomian Tahun 2018

Kinerja ekonomi tahun 2018 didorong oleh permintaan domestik yang kuat, peningkatan investasi, dan berlanjutnya pemulihan perekonomian dunia. Pada triwulan I 2018, risiko inflasi *volatile foods* diprakirakan

Prospects for the Economy of 2018

The economic performance of 2018 is driven by strong domestic demand, increased investment, and the continued recovery of the world economy. In the first quarter of 2018, the risk of volatile foods inflation is

akan minimal seiring berlangsungnya panen raya sejumlah komoditas tanaman bahan makanan. Sementara, tekanan inflasi inti dan administered price diperkirakan meningkat seiring peningkatan harga minyak dunia dan komoditas global. Hingga akhir tahun 2018, inflasi diperkirakan berada dalam kisaran target 3,5%±1%. Potensi tekanan inflasi diperkirakan berasal dari peningkatan harga minyak dunia dan penguatan permintaan masyarakat seiring kondisi ekonomi yang lebih baik dibanding tahun 2017. Tekanan inflasi *volatile foods* diperkirakan sedikit meningkat seiring potensi peningkatan harga beberapa komoditas pangan.

predicted to be minimal as the harvest of some food crops commodities continues. Meanwhile, core inflation and administered price inflation are expected to increase in line with rising global oil and commodity prices. Until the end of 2018, inflation is predicted to be within the 3.5% ± 1% target range. The potential for inflationary pressures is expected to come from rising world oil prices and strengthening public demand in line with better economic conditions compared to 2017. The volatile foods inflation pressure is forecasted to rise slightly as potential increases in the prices of some food commodities.

PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2017

Perkembangan Makro Ekonomi Provinsi Papua

Kinerja perekonomian Provinsi Papua pada triwulan IV 2017 mengalami penguatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Tercatat perekonomian Provinsi Papua pada triwulan laporan tumbuh sebesar 4,78% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,87% (yoy). Meskipun demikian, realisasi pertumbuhan ekonomi Papua pada periode laporan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,19% (yoy) pada triwulan IV 2017.

PAPUA PROVINCIAL ECONOMIC GROWTH IN 2017

Macroeconomic Developments of Papua Province

The economic performance of Papua Province in the fourth quarter of 2017 strengthened compared to the previous quarter. Recorded economy of Papua Province in quarterly report grew by 4.78% (yoy) compared to the previous quarter which grew by 3.87% (yoy). Nevertheless, the realization of Papua's economic growth in the reporting period is lower than the national economic growth which reached 5.19% (yoy) in the fourth quarter of 2017.

Pertumbuhan Ekonomi Papua & Nasional
Papua & National Economic Growth

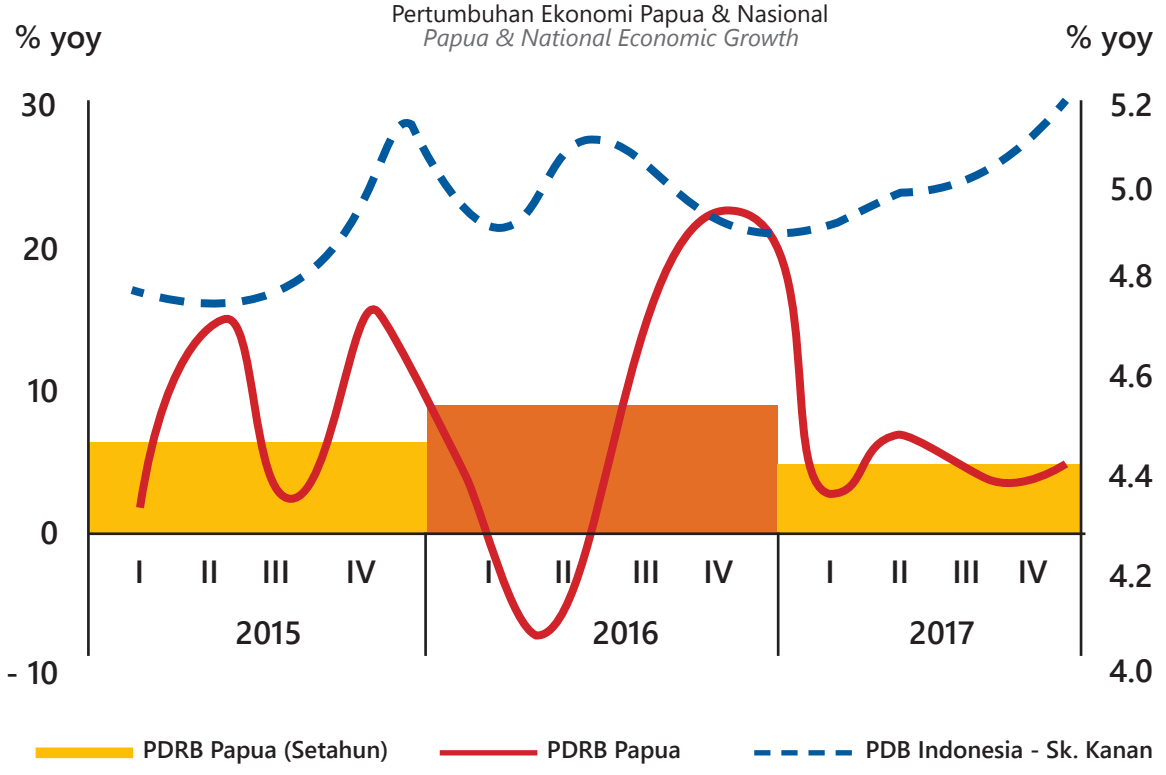

Sumber: BPS Papua Barat (diolah)

Kenaikan ekspor luar negeri menjadi pendorong kenaikan ekonomi Papua pada triwulan IV 2017 sejalan dengan peningkatan kinerja lapangan usaha pertambangan. Selain itu, peningkatan kinerja juga terjadi pada lapangan usaha konstruksi dan administrasi pemerintahan sejalan dengan perbaikan kinerja investasi. Sementara, kinerja lapangan usaha pertanian terpantau mengalami kenaikan yang didorong oleh panen di beberapa daerah. Perayaan natal dan tahun baru pada triwulan IV 2017 menjadi pendorong kinerja lapangan usaha perdagangan.

The increase in overseas exports was the driving force of Papua's economic growth in Q4 / 2017 in line with the improvement in mining business performance. In addition, improvements in performance also occur in the field of construction and administration business in line with the improvement of investment performance. Meanwhile, the performance of agricultural field observed increased, which is driven by the harvest in some areas. Christmas and New Year celebration in the fourth quarter of 2017 became the driving force of trade field performance.

Sementara untuk keseluruhan tahun 2017, regulasi izin ekspor mineral masih menjadi faktor utama penahan kinerja lapangan usaha pertambangan yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja perekonomian Papua secara keseluruhan. Selain itu, peralihan pemerintahan pasca pilkada menyebabkan penyerapan anggaran selama tahun 2017 kurang optimal.

While for the whole of 2017, mineral export permit regulation is still a major factor in retaining mining business performance that ultimately affects the overall performance of the Papua economy. In addition, the post-election government transition caused the budget absorption during 2017 less than optimal.

Memasuki triwulan I 2018, kinerja perekonomian Papua diperkirakan mengalami kenaikan. Optimalisasi kinerja pertambangan dan ekspor diperkirakan menjadi faktor utama pendorong perekonomian Papua. Sementara itu, berlalunya perayaan natal dan tahun baru serta panen menjadi faktor penahan kinerja ekonomi pada triwulan I 2018.

Entering the first quarter of 2018, the performance of Papua's economy is expected to increase. The optimization of mining and export performance is expected to be a major factor driving Papua's economy. Meanwhile, the passing of the Christmas and New Year celebration and the harvest became a factor of retaining economic performance in the first quarter of 2018.

Keuangan Pemerintah

Realisasi APBN dan di lingkup Provinsi Papua pada triwulan IV 2017 mengalami peningkatan, baik pada pos pendapatan maupun pos belanja dibandingkan periode yang sama tahun 2016. Pada triwulan IV 2017 sumber pendapatan terbesar berasal dari pajak dalam negeri. Sementara itu, realisasi belanja terbesar pada triwulan IV 2017 berasal dari belanja modal.

Government Finance

The realization of State Budget and the scope of Papua Province in the fourth quarter of 2017 has increased, both in revenue and expenditure posts compared to the same period in 2016. In the fourth quarter of 2017 the largest source of income came from domestic taxes. Meanwhile, the largest expenditure spending in the fourth quarter of 2017 came from capital expenditure.

Selain itu, Realisasi APBD Papua pada triwulan IV 2017 secara umum mengalami peningkatan. Realisasi Pendapatan dan Belanja mengalami peningkatan baik secara nominal maupun persentase realisasi. Berdasarkan pangsanya, postur pendapatan APBD Papua mayoritas berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan komposisi terbesarnya berasal dari dana otonomi khusus. Dari sisi belanja, peningkatan terbesar berasal dari peningkatan belanja tidak langsung. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan belanja barang dan jasa serta belanja modal.

In addition, the realization of APBD Papua in the fourth quarter of 2017 in general has increased. Revenue and Expenditure realization has increased both in nominal and percentage of realization. Based on the share, the majority of APBD Papua's income is derived from other legitimate local revenue with its largest composition derived from special autonomy funds. In terms of expenditure, the biggest increase comes from an increase in indirect spending. The increase was mainly driven by increased spending on goods and services and capital expenditures.

Perkembangan Inflasi

Tekanan inflasi Papua pada triwulan IV 2017 mengalami kenaikan dibanding dengan triwulan III 2017 namun masih lebih rendah dibanding inflasi Nasional. Sementara itu, secara tahunan, selama 2017 inflasi Papua mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. Terkendalinya inflasi Papua pada triwulan IV 2017 disebabkan oleh terjaganya inflasi kelompok komoditas inti dan deflasi kelompok *volatile food*. Disisi lain, terjadi peningkatan inflasi kelompok komoditas *administered prices* pada triwulan IV 2017.

Secara spasial, kedua kota inflasi di Papua mengalami inflasi. Pada triwulan IV 2017, inflasi Kota Jayapura lebih tinggi dibanding inflasi di Kabupaten Merauke. Secara umum inflasi kedua wilayah tersebut terutama disebabkan oleh inflasi kelompok komoditas *administered prices* dan komoditas inti.

Mencermati risiko peningkatan harga di Papua, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah berkoordinasi melaksanakan berbagai kegiatan guna melaksanakan pengendalian harga di Papua.

Stabilitas Sistem Keuangan Daerah

Kinerja keuangan sektor korporasi dan rumah tangga pada triwulan IV 2017 terjaga dengan baik dan menjadi penopang stabilitas sistem keuangan secara umum di Papua.

Kinerja sektor korporasi di Papua pada triwulan IV 2017 relatif mengalami kenaikan dibanding triwulan III 2017. Peningkatan kinerja lapangan usaha tambang menjadi penopang stabilitas keuangan di sektor korporasi di tengah rendahnya realisasi belanja pemerintah. Kinerja perbankan di sektor Korporasi Papua pada triwulan IV 2017 masih relatif terjaga dengan kualitas kredit yang sedikit membaik.

Sementara kinerja sektor Rumah Tangga pada triwulan IV 2017 masih tumbuh positif, tercermin dari kondisi dan risiko keuangan di sektor Rumah Tangga yang relatif terjaga. Perkembangan indikator perbankan di sektor rumah tangga pada triwulan IV 2017 menunjukkan peningkatan, khususnya DPK dan penyaluran kredit. Sementara, kualitas kredit NPL relatif terjaga dalam batas ketentuan Bank Indonesia.

Inflation

Papua's inflationary pressures in Q4 / 2017 increased compared to Q3 / 2017 but still lower than national inflation. Meanwhile, on an annual basis, during 2017 Papua's inflation declined compared to 2016. The controlled inflation of Papua in the fourth quarter of 2017 is due to stable inflation of core commodity groups and deflation in the volatile foods category. On the other hand, there was an increase in administered prices inflation in Q4 / 2017.

Spatially, the two cities of inflation in Papua experienced inflation. In the fourth quarter of 2017, inflation in Jayapura City was higher than inflation in Merauke Regency. In general, inflation in both regions was mainly due to inflation in administered prices and core commodity commodities.

Observing the risks of price increases in Papua, Bank Indonesia and local governments coordinate implementing various activities to implement price controls in Papua.

Stability of Regional Financial System

The financial performance of the corporate and household sectors in Q4 / 2017 was well maintained and contributed to the stability of the financial system in general in Papua.

The performance of the corporate sector in Papua in the fourth quarter of 2017 increased relative to the third quarter of 2017. The improvement in mining business performance contributed to financial stability in the corporate sector amid the low realization of government spending. Banking performance in the corporate sector of Papua in the fourth quarter of 2017 is still relatively maintained with a slightly improved loan quality.

Meanwhile, Household sector performance in Q4 / 2017 grew positively, reflected by the condition of financial condition and financial risks in the Household sector. The development of banking indicators in the household sector in the fourth quarter of 2017 showed an increase, particularly deposits and lending. Meanwhile, the quality of NPL loan is maintained within the limits of Bank Indonesia regulation.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Perkembangan transaksi system Klining Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Papua pada triwulan IV 2017 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, baik secara volume dan nominal. Transaksi melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) pada triwulan laporan juga tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, aliran uamg kartal melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Papua menunjukkan posisi net outflow pada triwulan IV 2017 sebesar Rp3.257 milyar.

Kondisi tersebut salah satunya disebabkan pencairan dana desa di provinsi Papua dan tingginya kebutuhan uang tunai terkait perayaan hari raya natal dan tahun baru.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Jumlah tenaga kerja di Papua pada triwulan IV 2017 mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun 2017 namun disertai kenaikan tingkat pengangguran terbuka.

Secara umum kesejahteraan masyarakat Papua cenderung membaik dan jumlah penduduk miskin menurun. Tingkat kesenjangan menunjukan kecenderungan menurun walaupun masih berada di atas nilai rata-rata nasional. Disamping itu, garis kemiskinan juga mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Di sisi lain, penurunan terjadi pada nilai tukar petani yang mengindikasikan terjadinya penurunan kesejahteraan petani di Papua.

Prospek Ekonomi Daerah

Perekonomian Papua pada triwulan II 2018 diperkirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan I 2018. Izin ekspor konsentrat tembaga yang berakhir pada Februari 2018 diperkirakan menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja lapangan usaha pertambangan dan ekspor luar negeri. Sementara, peralihan pemerintahan pasca pilkada berpotensi membuat kinerja lapangan usaha konstruksi, konsumsi pemerintah dan realisasi investasi tumbuh terbatas. Di sisi lain, pelaksanaan puasa dan lebaran menjadi faktor penopang perekonomian seiring kenaikan kinerja lapangan usaha perdagangan dan konsumsi masyarakat. Untuk keseluruhan tahun 2018, penambahan kuota ekspor, kenaikan UMP dan rencana eksplorasi tambang secara umum menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Implementation of Payment System and Rupiah Money Management

The development of Bank Indonesia National Clinical Transactions (SKNBI) system in Papua in the fourth quarter of 2017 increased compared to the previous quarter, both in volume and nominal. Transactions through the Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) system during the quarter under review also increased compared to the previous quarter. Meanwhile, the flow of cartage through the Office of the Representative of Bank Indonesia (KPwBI) of Papua Province shows the net outflow position in the fourth quarter of 2017 amounted to Rp3,257 billion.

The condition is one of them due to the disbursement of village funds in the province of Papua and the high demand for cash related to the celebration of Christmas and New Year.

Employment and Welfare

The number of laborers in Papua in the fourth quarter of 2017 increased compared to the same period in 2017 but accompanied by the increase in the open unemployment rate.

In general, the welfare of the people of Papua tends to improve and the number of poor people decreases. Gap levels show a downward trend even though it is above the national average. In addition, the poverty line also increased although not significant. On the other hand, the decline occurred in the farmer's exchange rate which indicated a decline in the welfare of farmers in Papua.

Regional Economic Prospects

Papua's economy in the second quarter of 2018 is predicted to grow lower than the first quarter of 2018. The export permit for copper concentrate ending in February 2018 is predicted to be the main factor affecting the performance of the mining and export business fields abroad. Meanwhile, post-election government transition has the potential to make the performance of construction business field, government consumption and investment realization grows limited. On the other hand, the implementation of fasting and Eid-ul-Fitr became the economic support factor in line with the increase in the performance of the trade and consumption business. For the whole of 2018, the addition of export quotas, increases in UMP and mine exploration plans are generally a driving factor for economic growth.

Tekanan inflasi Papua pada triwulan II 2018 diperkirakan lebih tinggi dari triwulan I 2018. Perayaan pauasa dan lebaran menjadi salah satu faktor pemicu kenaikan harga. Untuk keseluruhan tahun 2018, inflasi Papua diperkirakan mengalami kenaikan dibanding tahun 2017. Kenaikan UMP dan pengaruh base effect menjadi faktor yang dapat memicu inflasi. Di sisi lain, kebijakan perubahan harga oleh pemerintah yang relatif minimal menjadi faktor yang dapat meredam tekanan inflasi pada tahun 2018.

Papua's inflationary pressure in the second quarter of 2018 is predicted to be higher than the first quarter of 2018. The celebration of pauasa and Eid is one of the factors triggering price increase. For the whole year 2018, Papua inflation is predicted to increase compared to 2017. Increase in UMP and the influence of base effect into factors that can trigger inflation. On the other hand, a relatively minimal government price change policy is a factor that can reduce inflationary pressures by 2018.

PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017

Perkembangan Makro Ekonomi Provinsi Papua Barat

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat mengalami peningkatan dari 3,08% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi 6,32% (yoy) pada triwulan IV 2017. Peningkatan pertumbuhan ekonomi didorong oleh perbaikan di seluruh sektor utama Papua Barat, yaitu: sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor konstruksi. Di samping itu, meningkatnya kinerja ekspor barang dan jasa, konsumsi rumah tangga, dan investasi menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan IV 2017. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat tercatat sebesar 4,01% (yoy) di tahun 2017.

WEST PAPUA PROVINCIAL ECONOMIC GROWTH IN 2017

Macro Economic Developments of West Papua Province

Economic growth in West Papua increased from 3.08% (yoy) in Q3 / 2017 to 6.32% (yoy) in Q4 / 2017. The increase in economic growth was driven by improvements across all key sectors of West Papua: manufacturing, mining and quarrying sectors, as well as the construction sector. In addition, the increasing performance of exports of goods and services, household consumption, and investment has been the backbone of West Papua's economic growth in the fourth quarter of 2017. Overall economic growth in West Papua Province was 4.01% (yoy) in 2017.

Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat & Nasional
Economic Growth West Papua & National

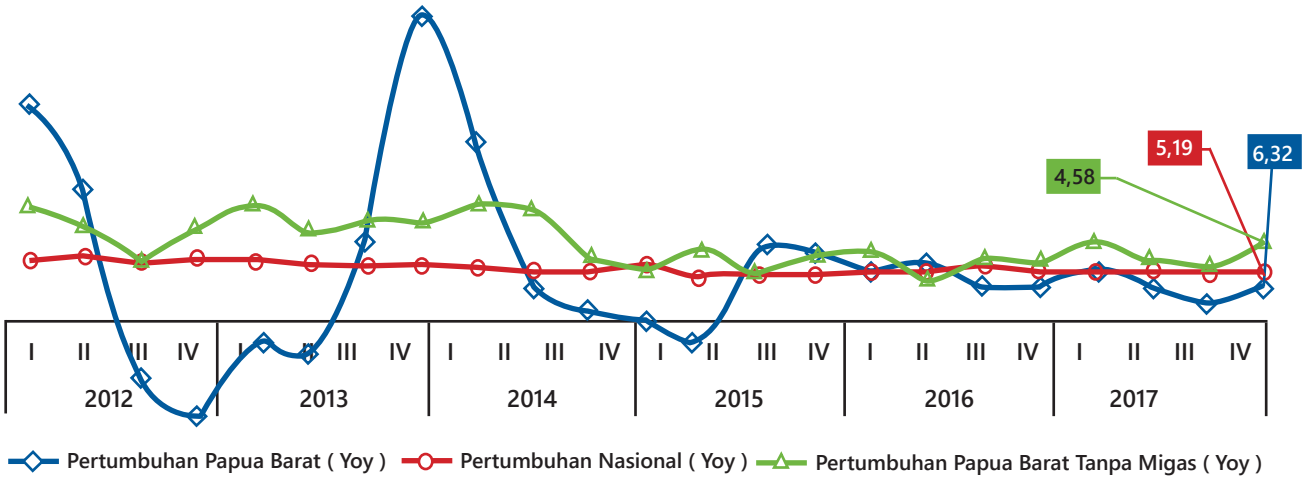

Sumber: BPS Papua Barat (diolah)

Inflasi Provinsi Papua Barat

Inflasi Papua Barat tercatat menurun pada triwulan IV 2017, ditengah meningkatnya pertumbuhan ekonomi Papua Barat. Laju inflasi tahunan pada triwulan laporan tercatat 1,44% (yoy), lebih rendah bila dibandingkan dengan triwulan III 2017 yang mencapai 1,71% (yoy). Penurunan laju inflasi ini terutama disumbang oleh menurunnya tekanan inflasi kelompok *volatile food* akibat beberapa harga komoditas utama seperti daging ayam ras, ikan cakalang, bawang merah, bawang putih, beras, dan cabe rawit yang mengalami deflasi. Selain itu, inflasi kelompok inti juga mengalami sedikit penurunan inflasi yang dipengaruhi oleh harga dari gula pasir, dan semen. Sementara itu, inflasi *administered prices* menjadi penyumbang terbesar inflasi seiring meningkatnya permintaan pada kelompok angkutan udara selama libur akhir tahun dan hari raya natal 2017.

Inflation of West Papua Province

West Papua inflation declined in Q4 / 2017, amid growing economic growth in West Papua. The annual inflation rate in the quarter under review was 1.44% (yoy), lower than the 1.71% (yoy) quarterly of 2017. The decline in inflation was mainly contributed by lower volatile foods inflationary pressures due to some major commodity prices such as chicken, skipjack, onion, garlic, rice and defecated chilies. In addition, core group inflation also experienced a slight drop in inflation influenced by the price of sugar, and cement. In the meantime, administered prices inflation is the largest contributor to inflation as demand increases for the air transport group during the year-end holidays and Christmas festivities in 2017.

Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas keuangan daerah Provinsi Papua Barat pada triwulan IV 2017 cukup terjaga. Kinerja perbankan Provinsi Papua Barat pada triwulan IV 2017 menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari meningkatnya pertumbuhan aset, DPK, dan penyaluran kredit. Selanjutnya, Nilai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada triwulan IV 2017 relatif stabil di angka 79,22%. Rasio kredit bermasalah di Papua Barat juga mengalami perbaikan sebagaimana tercermin dari penurunan angka NPL menjadi sebesar 4,95%. Namun, spread suku bunga DPK dengan suku bunga kredit yang masih relatif tinggi mengindikasikan efisiensi biaya intermediasi masih perlu ditingkatkan.

Financial System Stability

The financial stability of the West Papua Provincial Region in Q4 / 2017 was well maintained. The banking performance of West Papua Province in the fourth quarter of 2017 showed an increase compared to the previous quarter, as reflected in the increase in asset growth, third party funds and lending. Furthermore, the Loan to Deposit Ratio (LDR) in Q4 / 2017 was relatively stable at 79.22%. The ratio of non-performing loans in West Papua also improved as reflected in the decline in NPLs to 4.95%. However, the relatively high interest rate spread of deposits in interest rates indicates that intermediary cost efficiency still needs to be improved.

Resiko kredit yang disalurkan kepada sektor korporasi Provinsi Papua Barat sedikit meningkat pada triwulan IV 2017 namun masih dalam batas aman. Hal ini tercermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) sektor korporasi yang mengalami peningkatan dari 3,21% di triwulan III 2017 menjadi 3,24% pada triwulan laporan. Sementara, resiko kredit pada kredit rumah tangga masih terjaga dengan baik, NPL kredit sektor rumah tangga berada di bawah batas ketentuan Bank Indonesia (5%) yang tercatat sebesar 1,38% pada triwulan laporan.

Loan risk disbursed to the corporate sector of West Papua Province increased slightly in Q4 / 2017 but remained within safe limits. This is reflected in the Non Performing Loan (NPL) ratio of the corporate sector which increased from 3.21% in Q3 / 2017 to 3.24% in the quarter under review. Meanwhile, loan risk on household loan is still well maintained, household loan NPLs are below the Bank Indonesia regulation (5%) stipulated at 1.38% in the quarter under review.

Transaksi pembayaran nilai besar melalui BI-RTGS pada Triwulan IV 2017 tercatat meningkat baik secara nilai transaksi maupun dari sisi volume jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (qtq). Sementara transaksi non tunai melalui SKNBI juga mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengelolaan uang Rupiah di Papua Barat menunjukkan peningkatan net outflow seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang perayaan akhir tahun. Selama bulan Januari hingga

The large value of payment transactions through the BI-RTGS in the fourth Quarter of 2017 increased both in terms of transaction value and volume in comparison with the previous period (qtq). While non-cash transactions through SKNBI also increased along with the increase of economic growth. In addition, the management of Rupiah money in West Papua shows an increase in net outflow in line with the increasing needs of the community ahead of year-end celebrations. During January to December 2017, the West Papua Provincial Office of Bank Indonesia

Desember 2017, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat telah melakukan kegiatan kas keliling dalam dan luar kota sebanyak 95 (sembilan puluh lima) kali dengan rincian 79 kali kas keliling dalam kota dan 16 kali kas keliling luar kota.

conducted 95 (ninety-five) in-house cash outgoing activities with details of 79 inland city cash and 16 out of town cash payments.

Prospek Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada tahun 2018 diperkirakan mengalami peningkatan terbatas dibandingkan tahun 2017 diiringi dengan inflasi yang meningkat namun tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada tahun 2018 diperkirakan berada pada rentang 3,8% - 4,2% (yoy).

Regional Economic Prospects

The economic growth of West Papua in 2018 is estimated to have a limited increase compared to 2017, accompanied by rising but maintained inflation. West Papua's economic growth in 2018 is estimated to be in the range of 3.8% - 4.2% (yoy).

Laju inflasi Papua Barat di tahun 2018 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017. Inflasi tahunan Papua Barat diproyeksikan pada kisaran batas bawah 3,4% - 3,8% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh risiko tekanan pada kelompok kelompok inti dan *volatile food*.

West Papua inflation rate in 2018 is predicted to increase compared to 2017. Annual inflation of West Papua is projected in the lower limit range of 3.4% - 3.8% (yoy). Increased inflationary pressure is mainly influenced by pressure risk in core group and volatile foods.

PERBANKAN NASIONAL & BPD

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sektor jasa keuangan Indonesia sepanjang 2017 menunjukkan kondisi stabil dan positif. Hal ini didukung permodalan yang tinggi dan *likuiditas* yang memadai untuk mengantisipasi risiko dan mendukung ekspansi usaha. Sampai dengan akhir tahun 2017, perkembangan kredit bank umum tumbuh menjadi sebesar Rp4.781.959 milyar lebih tinggi dari kredit tahun 2016 yakni sebesar Rp4.413.414 milyar. Sedangkan DPK bank umum Sampai dengan akhir tahun 2017 tumbuh menjadi sebesar Rp5.289.209 milyar lebih tinggi dari DPK tahun 2016 yakni sebesar Rp4.836.758 milyar. Pertumbuhan kegiatan usaha Bank Umum sampai dengan akhir Desember tahun 2017 tergambar pada tabel dibawah ini.

NATIONAL BANKING & BPD

The Financial Services Authority (OJK) noted that Indonesia's financial services sector throughout 2017 showed stable and positive conditions. This is supported by high capital and adequate liquidity to anticipate risks and support business expansion. Until the end of 2017, loan growth of commercial banks grew to Rp4,781,959 billion higher than loan in 2016 of Rp4,413,414 billion. While deposits of commercial banks Up to the end of 2017 grew to Rp5, 289, 209 billion higher than the DPK in 2016 amounting to Rp4,836,758 billion. The growth of Commercial Bank business activities until the end of December 2017 is illustrated in the table below.

KEGIATAN USAHA BANK UMUM (*COMMERCIAL BANK OPERATIONS*) milyar Rp(billion RP)								
Keterangan		2013	2014	2015	2016	2017 Des	*Items*	
Penyaluran Dana							*Distribution of Funds*	
a.	Kredit Yang Diberikan	3.319.842	3.706.501	4.092.104	4.413.414	4.781.959	*a.*	*Lending*
	- Kepada Pihak Ketiga	3.292.874	3.674.308	4.057.904	4.377.195	4.737.972		*- To Third Party*
	Rupiah	2.720.500	3.057.964	3.423.180	3.736.609	4.044.752		*Rupiah*
	Valas	572.374	616.345	634.724	640.585	693.220		*Foreign Exchange*
	- Kepada Bank Lain	26.968	32.192	34.200	36.220	43.987		*- Inter Bank Loan*
	Rupiah	16.681	19.100	21.443	22.983	27.409		*Rupiah*
	Valas	10.287	13.092	12.757	13.237	16.578		*Foreign Exchange*
b.	Penempatan pada Bank Lain	171.915	182.432	211.901	207.050	235.595	*b.*	*Interbank Placement*
	- Giro	65.031	70.250	77.840	78.205	90.206		*- Current Account*
	- Inter Bank Call Money	83.549	77.697	104.725	98.230	105.081		*- Inter Bank Call Money*
	- Deposito Berjangka	20.159	29.622	20.692	16.127	23.314		*- Time Deposits*
	- Lainnya	3.176	4.864	8.643	14.489	16.994		*- Others*
c.	Penempatan pada Bank Indonesia	506.453	569.018	685.575	717.840	700.775	*c.*	*Placement to Bank Indonesia*
	- Giro	322.562	361.588	393.362	370.727	386.356		*- Current Account*
	- Fine Tune Operation (FTO)	52.034	79.917	158.264	156.936	152.706		*- Fine Tune Operation (FTO)*
	- Fasbi	110.905	123.020	123.177	185.371	155.221		*- Fasbi*
	- Lainnya	20.952	4.493	10.772	4.806	6.492		*- Others*
d.	Surat Berharga	520.642	636.688	660.828	860.522	1.035.335	*d.*	*Securitiess*
	- Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	111.689	113.104	40.017	96.103	19.901		*- Bank Indonesia Certificates (SBI)*
	- Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	17.908	19.418	26.443	31.352	53.299		*- Treasury Bills*
	- Obligasi	323.941	369.849	485.238	561.963	637.773		*- Bonds*
	- Lainnya	67.103	134.316	109.130	171.104	324.361		*- Others*
e.	Penyertaan	15.725	20.984	25.605	33.889	39.708	*e.*	*Equity Investment*
f.	Cadangan Kerugian Penurunan	79.492	90.454	116.540	153.245	157.154	*f.*	*Impairment on Financial Assets*
	Nilai Aset Keuangan (CKPN)							
	- Kredit yang diberikan	73.108	83.240	110.161	147.470	151.618		*- Loan*
	- Surat Berharga	2.290	2.289	1.612	1.404	1.083		*- Securities*
	- Lainnya	4.095	4.926	4.767	4.371	4.453		*- Others*
g.	Tagihan Spot dan Derivatif	26.092	17.483	20.611	13.693	7.938	*g.*	*Spot and Derivatives Claims*
h.	Tagihan Lainnya	183.143	245.350	155.488	171.250	218.588	*h.*	*Other claims*

KEGIATAN USAHA BANK UMUM
(*COMMERCIAL BANK OPERATIONS*)
milyar Rp(billion RP)

Keterangan		2013	2014	2015	2016	2017		*Items*
Sumber Dana								*Source of Funds*
a.	Dana Pihak Ketiga	3.663.968	4.114.420	4.413.056	4.836.758	5.289.209	*a.*	*Third Party Funds*
	Rupiah	3.025.150	3.434.579	3.665.444	4.091.634	4.541.238		*Rupiah*
	Giro	569.927	605.276	667.537	821.777	932.562		*Current Account*
	Tabungan	1.123.696	1.187.559	1.274.588	1.413.351	1.573.353		*Saving*
	Simpanan Berjangka	1.331.527	1.641.743	1.723.319	1.856.507	2.035.323		*Time Deposits*
	Valas	638.818	679.841	747.612	745.124	747.971		*Foreign Exchange*
	Giro	276.854	284.309	319.995	302.458	300.775		*Current Account*
	Tabungan	89.011	96.899	121.423	138.459	127.822		*Saving*
	Simpanan Berjangka	272.952	298.633	306.194	304.208	319.374		*Time Deposits*
b.	Kewajiban kepada Bank Indonesia	1.782	2.147	691	808	1.197	*b.*	*Liabilities to BI*
c.	Kewajiban kepada Bank lain	115.793	132.956	161.094	168.531	184.647	*c.*	*Interbank Liabilities*
d.	Surat Berharga yang diterbitkan	54.450	54.308	65.544	93.222	113.013	*d.*	*Issued Securities*
e.	Pinjaman yang Diterima	112.914	145.853	177.718	179.671	199.054	*e.*	*Loans received*
	Rupiah	16.025	20.350	22.873	21.734	28.099		*Rupiah*
	Valas	96.888	125.503	154.845	157.938	170.955		*Foreign Exchange*
f.	Kewajiban Spot dan Derivatif	29.987	18.880	27.728	14.302	6.665	*f.*	*Spot and Derivatives Liabilities*
g.	Kewajiban Lainnya (mencakup Tagihan Akseptasi, dan Tagihan atas Surat Berharga yang dijual dgn janji dibeli kembali/repo)	85.131	120.691	109.623	100.710	121.219	*g.*	*Other Liabilities*
h.	Setoran Jaminan	5.993	5.622	6.292	5.206	5.996	*h.*	*Margin Deposits*
Beberapa komponen modal								*Components of Capital*
a.	Modal Disetor	138.138	153.439	164.270	176.712	196.289	*a.*	*Paid In Capital*
b.	Cadangan	50.619	67.568	81.652	64.834	65.253	*b.*	*Reserves*
c.	L/R Tahun lalu 1)	201.059	256.642	323.763	411.187	469.995	*c.*	*Retained Earnings (Profit/Loss) 1)*
d.	L/R Tahun berjalan sesudah pajak 2)	106.707	112.213	104.628	106.544	131.161	*d.*	*Current Earnings (Profit /Loss) 2)*
e.	Tambahan modal disetor	92.638	97.889	96.177	111.688	124.233	*e.*	*Additional Paid In Capital*
f.	Modal Pinjaman	33.551	34.432	40.878	41.692	44.650	*f.*	*Loan Capital*
1). Pada LBU 2008 tdk didefinisikan Vs Metadata								*1) LBU 2008 is not defined vs metada*
2). Selisih positif dr Seluruh Pendapatan Op. dan Non Op. Dikurangi Beban Op. dan Non Op. Vs Metadata Lama								*2) Positive difference of op. income and non op. minus op. expenses and non op. V's old method*
*) Angka-angka sementara								**) Provisional figures*
r) Angka-angka diperbaiki								*r) Revised figures*

Sedangkan pertumbuhan kegiatan usaha Bank Pembangunan Daerah (BPD) sampai dengan akhir tahun 2017, mencatat pertumbuhan kredit BDP tumbuh menjadi sebesar Rp390.803 milyar lebih tinggi dari kredit tahun 2016 yakni sebesar Rp393.439 milyar. Sedangkan DPK BDP Sampai dengan akhir tahun 2017 tumbuh menjadi sebesar Rp449.389 milyar lebih tinggi dari DPK tahun 2016 yakni sebesar Rp383.531 milyar. Pertumbuhan kegiatan usaha BDP sampai dengan bulan November tahun 2017 tergambar pada tabel dibawah ini.

While the growth of the Regional Development Bank (BPD) until the end of 2017, recorded growth in BDP loans grew to Rp390,803 billion higher than the loan of 2016 amounting to Rp393,439 billion. While DPK BDP Until the end of 2017 to grow to Rp449,389 billion higher than the TPF in 2016 amounting to Rp383,531 billion. The growth of BDP business activities until November 2017 is illustrated in the table below.

KEGIATAN USAHA BPD
(REGIONAL DEVELOPMENT BANKS OPERATIONS)
milyar Rp(billion RP)

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017	*Items*
Penyaluran Dana						*Distribution of Funds*
a. Kredit Yang Diberikan	265.250	302.426	329.742	359.327	393.439	*a. Lending*
- Kepada Pihak Ketiga	264.541	301.456	328.759	357.859	390.372	*- To Third Party*
Rupiah	263.597	300.647	328.131	357.145	389.863	*Rupiah*
Valas	944	809	628	714	509	*Foreign Exchange*
- Kepada Bank Lain	709	970	983	1.468	3.067	*- Inter Bank Loan*
Rupiah	709	970	983	1.468	3.067	*Rupiah*
Valas	-	-	-	-	-	*Foreign Exchange*
b. Penempatan pada Bank Lain	31.853	38.351	29.244	23.582	29.585	*b. Interbank Placement*
- Giro	2.318	1.675	1.249	1.818	2.266	*- Current Account*
- Inter Bank Call Money	14.468	14.233	13.117	9.625	11.310	*- Inter Bank Call Money*
- Deposito Berjangka	14.522	21.856	13.551	11.042	14.576	*- Time Deposits*
- Lainnya	545	586	1.327	1.097	1.433	*- Others*
c. Penempatan pada Bank Indonesia	31.626	39.144	43.069	72.100	82.388	*c. Placement to Bank Indonesia*
- Giro	27.971	31.339	35.639	31.051	37.904	*- Current Account*
- Fine Tune Operation (FTO)	200	382	1.051	3.065	10.683	*- Fine Tune Operation (FTO)*
- Fasbi	2.546	6.801	6.080	37.592	33.254	*- Fasbi*
- Lainnya	909	623	298	392	547	*- Others*
d. Surat Berharga	32.106	30.988	41.796	38.065	58.965	*d. Securitiess*
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	12.125	9.179	6.753	7.097	5.926	*- Bank Indonesia Certificates (SBI)*
- Surat Perbendaharaan Negara (SB/ PN)	100	43	787	383	3.073	*- Treasury Bills*
- Obligasi	16.980	17.605	27.355	21.318	26.987	*- Bonds*
- Lainnya	2.901	4.161	6.902	9.267	22.979	*- Others*
e. Penyertaan	693	692	692	1.092	1.343	*e. Equity Investment*
f. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (CKPN)	5.173	7.927	9.073	8.797	9.137	*f. Impairment on Financial Assets*
- Kredit yang diberikan	5.155	7.655	8.804	8.510	8.856	*- Loan*
- Surat Berharga	4	4	3	0	1	*- Securities*
- Lainnya	15	268	266	286	279	*- Others*
g. Tagihan Spot dan Derivatif	-	-	2	2	0	*g. Spot and Derivatives Claims*
h. Tagihan Lainnya	3.081	5.481	5.743	3.497	5.927	*h. Other claims*

KEGIATAN USAHA BPD
(REGIONAL DEVELOPMENT BANKS OPERATIONS)
milyar Rp(billion RP)

Keterangan		2013	2014	2015	2016	2017		*Items*
Sumber Dana								*Source of Funds*
a.	Dana Pihak Ketiga	287.709	335.957	356.600	383.531	449.389	*a.*	*Third Party Funds*
	Rupiah	286.021	334.704	353.719	380.794	448.012		*Rupiah*
	Giro	106.398	120.531	110.080	102.914	108.911		*Current Account*
	Tabungan	95.786	100.903	116.551	128.691	143.598		*Saving*
	Simpanan Berjangka	83.838	113.270	127.088	149.190	195.502		*Time Deposits*
	Valas	1.688	1.253	2.881	2.736	1.377		*Foreign Exchange*
	Giro	673	368	264	270	353		*Current Account*
	Tabungan	41	46	50	111	72		*Saving*
	Simpanan Berjangka	974	839	2.567	2.355	952		*Time Deposits*
b.	Kewajiban kepada Bank Indonesia	222	2	2	2	1	*b.*	*Liabilities to BI*
c.	Kewajiban kepada Bank lain	22.957	20.612	21.809	33.694	27.762	*c.*	*Interbank Liabilities*
d.	Surat Berharga yang diterbitkan	6.860	7.050	6.730	8.852	12.357	*d.*	*Issued Securities*
e.	Pinjaman yang Diterima	1.846	3.212	3.945	6.727	10.910	*e.*	*Loans received*
	Rupiah	1.846	3.150	3.945	6.053	10.165		*Rupiah*
	Valas	-	62	-	674	745		*Foreign Exchange*
f.	Kewajiban Spot dan Derivatif	0	-	-	1	1	*f.*	*Spot and Derivatives Liabilities*
g.	Kewajiban Lainnya (mencakup Tagihan Akseptasi, dan Tagihan atas Surat Berharga yang dijual dgn janji dibeli kembali/repo)	5.051	3.405	5.585	4.396	3.593	*g.*	*Other Liabilities*
h.	Setoran Jaminan	492	467	564	378	472	*h.*	*Margin Deposits*
Beberapa komponen modal				-				*Components of Capital*
a.	Modal Disetor	22.744	26.771	30.333	34.947	37.849	*a.*	*Paid In Capital*
b.	Cadangan	10.343	12.877	15.484	18.111	20.154	*b.*	*Reserves*
c.	L/R Tahun lalu 1)	377	706	875	854	1.543	*c.*	*Retained Earnings (Profit/Loss) 1)*
d.	L/R Tahun berjalan sesudah pajak 2)	10.733	9.720	10.595	11.487	12.436	*d.*	*Current Earnings (Profit /Loss) 2)*
e.	Tambahan modal disetor	2.740	2.230	2.168	2.992	2.585	*e.*	*Additional Paid In Capital*
f.	Modal Pinjaman	1.004	1.004	1.005	1.502	1.503	*f.*	*Loan Capital*
1). Pada LBU 2008 tdk didefinisikan Vs Metadata								*1) LBU 2008 is not defined vs metada*
2). Selisih positif dr Seluruh Pendapatan Op. dan Non Op. Dikurangi Beban Op. dan Non Op. Vs Metadata Lama								*2) Positive difference of op. income and non op. minus op. expenses and non op. V's old method*
r) Angka-angka diperbaiki								*r) Revised figures*

Sedangkan untuk Kinerja Bank Umum Konvensional, sampai dengan akhir tahun 2017 mencatat pertumbuhan positif. Dimana Rasio Pemenuhan Kecukupan Modal Minimum pada tahun 2016 tercatat sebesar 22,93% mengalami pertumbuhan menjadi 23,18% pada akhir tahun 2017. Begitupula dengan ROA Bank Umum Konvensional tercatat sebesar 2,23% pada akhir tahun 2016 mengalami pertumbuhan menjadi 2,45% pada akhir tahun 2017. Perkembangan Kinerja Bank Umum Konvensional sampai dengan akhir tahun 2017 tergambar pada tabel dibawah ini.

As for the Performance of Conventional Commercial Banks, until the end of 2017 recorded positive growth. Where the Capital Adequacy Ratio of Fulfillment Capital in 2016 was recorded at 22.93% growth to 23.18% at the end of 2017. Similar to conventional commercial bank ROA 2.23% at the end of 2016 growth to 2.45% at the end of 2017. Bank Performance General Conventional until the end of 2017 is illustrated in the table below.

KINERJA BANK UMUM KONVENSIONAL
***(COMMERCIAL BANKS** PERFORMANCE)*
milyar Rp(billion RP)

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017	*items*
Rasio Pemenuhan Kecukupan Modal Minimum (%)	18,13	19,57	21,39	22,93	23,18	*Capital Adequacy Ratio (%)*
- Modal	626.888	754.174	914.657	1.052.597	1.166.002	*- Capital*
- ATMR	3.458.404	3.854.234	4.276.555	4.589.611	5.029.816	*- Risk Weighted Assets*
Rasio Modal Inti terhadap ATMR (%)	16,36	18,01	19,00	21,19	21,50	*Core Capital Ratio to ATMR (%)*
- Modal Inti (Tier I)	565.774	694.198	812.590	972.350	1.081.234	*- Core Capital (Tier I)*
- ATMR	3.458.404	3.854.234	4.276.555	4.589.611	5.029.816	*- Risk Weighted Assets*
ROA (%)	3,08	2,85	2,32	2,23	2,45	*Return On Assets Ratio (%)*
- Laba sebelum pajak	134.571	142.769	132.601	136.048	165.196	*- Earning before Tax*
- Rata-rata total aset	4.365.364	5.004.089	5.703.813	6.106.959	6.730.350	*- Average total assets*
BOPO (%)	74,08	76,29	81,49	82,22	78,64	*Operating Expenses/Operating Income (%)*
- Biaya Operasional	368.460	446.217	569.141	624.173	603.178	*- Operating Expenses*
- Pendapatan Operasional	497.384	584.887	698.404	759.146	766.975	*- Operating Income*
NIM (%)	4,89	4,23	5,39	5,63	5,32	*Net Interest Margin Ratio (%)*
- Pendapatan bunga bersih	233.841	260.940	293.824	329.913	342.731	*- Interest income net*
- Rata-rata total aset produktif	4.782.557	6.161.761	5.449.642	5.854.786	6.445.076	*- Average total earning assets*
LDR (%)	89,70	89,42	92,11	90,70	90,04	*Loan to Deposits Ratio (%)*
- Total Kredit kepada pihak ketiga bukan Bank	3.158.099	3.526.364	3.903.936	4.199.713	4.548.155	*- Total Loan to third party*
- Total Dana Pihak Ketiga	3.520.616	3.943.697	4.238.349	4.630.352	5.050.984	*- Total Third Party Funds*
Rasio Aset Likuid (%)	15,77	16,24	16,70	17,50	18,56	*Liquid Assets Ratio (%)*
- Aset Likuid Primer	589.158	686.023	736.720	837.433	963.833	*- Primary Liquid Asset*
- Aset Likuid Sekunder	163.506	192.598	251.623	296.098	353.504	*- Secondary Liquid Asset*
- Total Aset	4.773.892	5.410.098	5.919.390	6.475.602	7.099.564	*- Total Assets*
Ket: Data tidak termasuk BUS						

Sementara itu untuk Kinerja BPD Konvensional, sampai dengan akhir tahun 2017 mencatat pertumbuhan negatif. Dimana Rasio Pemenuhan Kecukupan Modal Minimum pada tahun 2016 tercatat sebesar 21,69 % mengalami penurunan menjadi 21,65% pada akhir tahun 2017. Begitupula dengan ROA Kinerja BPD Konvensional, dimana sampai dengan akhir tahun 2017 tercatat sebesar 2,40% yang sebelumnya sebesar 2,58 % pada akhir tahun 2016. Perkembangan Kinerja BPD Konvensional sampai dengan tahun 2017 tergambar pada tabel dibawah ini.

Meanwhile, for the Performance of Conventional BPD, until the end of 2017 recorded negative growth. Where the Minimum Capital Adequacy Ratio in 2016 was 21.69% decreased to 21.65% by the end of 2017. Similarly, the ROA Performance of Conventional BPD, which until the end of 2017 was recorded at 2.40% which was previously at 2.58% by the end of 2016. The Performance Development of Conventional BPD until 2017 is illustrated in the table below.

KINERJA BPD KONVENSIONAL
***(REGIONAL DEVELOPMENT BANKS** PERFORMANCE)*
milyar Rp(billion RP)

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017	*Items*
Rasio Pemenuhan Kecukupan Modal Minimum (%)	17,58	17,79	20,61	21,69	21,65	*Capital Adequacy Ratio (%)*
- Modal	40.343	46.922	57.254	64.815	71.306	*- Capital*
- ATMR	229.459	263.682	277.858	298.862	329.349	*- Risk Weighted Assets*
Rasio Modal Inti terhadap ATMR (%)	16,33	16,55	18,56	20,31	20,44	*Core Capital Ratio to ATMR (%)*
- Modal Inti (Tier I)	37.474	43.630	51.569	60.714	67.324	*- Core Capital (Tier I)*
- ATMR	229.459	263.682	277.858	298.862	329.349	*- Risk Weighted Assets*
ROA (%)	3,18	2,68	2,40	2,58	2,40	*Return On Assets Ratio (%)*
- Laba sebelum pajak	12.686	11.723	12.390	13.486	14.052	*- Earning before Tax*
- Rata-rata total aset	399.075	437.155	516.788	522.538	585.037	*- Average total assets*
BOPO (%)	73,49	78,08	79,57	78,08	78,65	*Operating Expenses/ Operating Income (%)*
- Biaya Operasional	34.438	41.363	47.802	47.883	51.462	*- Operating Expenses*
- Pendapatan Operasional	46.864	52.973	60.078	61.327	65.429	*- Operating Income*
NIM (%)	7,04	6,65	6,66	7,07	6,42	*Net Interest Margin Ratio (%)*
- Pendapatan bunga bersih	27.891	29.593	32.707	35.192	35.786	*- Interest income net*
- Rata-rata total aset produktif	396.439	444.769	491.269	497.909	557.558	*- Average total earning assets*
LDR (%)	92,34	89,73	92,19	93,65	87,62	*Loan to Deposits Ratio (%)*
- Total Kredit kepada pihak ketiga bukan Bank	265.661	301.456	328.759	345.652	377.525	*- Total Loan to third party*
- Total Dana Pihak Ketiga	287.709	335.957	356.600	369.095	430.890	*- Total Third Party Funds*
Rasio Aset Likuid (%)	18,19	18,38	15,72	18,47	20,14	*Liquid Assets Ratio (%)*
- Aset Likuid Primer	63.091	72.996	63.680	85.910	105.716	*- Primary Liquid Asset*
- Aset Likuid Sekunder	7.858	8.015	11.086	8.456	11.512	*- Secondary Liquid Asset*
- Total Aset	389.964	440.691	475.696	510.794	582.113	*- Total Assets*
Ket: Data tidak termasuk BUS						

PERBANKAN DAERAH

Sampai dengan akhir tahun 2017, beberapa indikator perbankan di wilayah Provinsi Papua tercatat mengalami pertumbuhan yang positif, meskipun ada beberapa indikator yang juga mengalami pertumbuhan negatif. Simpanan masyarakat mengalami pertumbuhan, dimana tahun 2016 tercatat sebesar Rp37.481.345 milyar, tumbuh menjadi Rp38.440.716 milyar pada akhir tahun 2017. Pembiayaan yang diberikan juga tercatat mengalami pertumbuhan yang positif, yang sebelumnya tercatat sebesar Rp25.710.591 milyar pada tahun 2016, tumbuh menjadi Rp27.568.590 milyar pada akhir tahun 2017. Indikator pertumbuhan perbankan di Papua, tergambar pada tabel dibawah:

REGIONAL BANKING

Until the end of 2017, several indicators of banking in the province of Papua recorded a positive growth, although there are some indicators that also experienced negative growth. Deposits grew by Rp37,481,345 billion in 2016, growing to Rp38,440,716 billion at the end of 2017. The financing provided also recorded positive growth, which was previously recorded at Rp25,710,591 billion in 2016, growing to Rp27,568,590 billion at the end of 2017. The indicators of banking growth in Papua are illustrated in the table below:

INDIKATOR EKONOMI & PERBANKAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2013 -2017 (DLM JUTA)
PAPUA PROVINCE ECONOMIC & BANKING INDICATORS 2013 -2017 (IN MILLION)

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Simpanan	RpJuta	28.681.814	32.636.853	34.095.172	37.481.345	38.440.716
	- Giro	RpJuta	8.550.396	8.773.999	7.970.526	8.808.742	8.157.559
	- Tabungan	RpJuta	14.584.652	16.342.871	18.594.330	20.263.651	21.201.175
	- Simpanan Berjangka	RpJuta	5.546.765	7.519.983	7.530.316	8.408.953	9.081.982
2	Pinjaman yang diberikan	RpJuta	18.398.740	21.006.426	23.304.008	25.710.591	27.568.590
	- Modal Kerja	RpJuta	6.802.807	7.614.454	9.439.547	8.993.585	9.199.243
	- Investasi	RpJuta	3.038.933	3.093.701	2.711.784	3.772.824	4.380.329
	- Konsumsi	RpJuta	8.557.001	10.298.271	11.152.677	12.944.182	13.989.018
3	Kredit UMKM	RpJuta	7.471.478	8.608.023	9.342.109	10.405.288	10.155.730
	- Mikro	RpJuta	1.088.794	1.308.394	1.642.075	1.805.474	2.060.125
	- Kecil	RpJuta	2.800.476	3.087.224	3.373.387	3.757.822	3.769.831
	- Menengah	RpJuta	3.582.208	4.212.406	4.326.647	4.841.991	4.325.774
4	Ekspor Non Migas						
	- Nilai	USD ribu	5.062.173	2.206.801	1.088.437	1.899.883	746.779
	- Volume	ton	55.101.254	10.192.856	249.085	14.194.595	307.912
5	Impor Non Migas						
	- Nilai	USD ribu	61.188.054	72.847.495	56.063.756	61.457.800	19.734.847
	- Volume	ton	9.796.368	15.000.940	9.151.402	7.932.210	4.187.589
6	Harga-harga Kota Jayapura						
	- IHK		0	120.200	123.550	128.650	131.75
	- Inflasi (mtm)	%	1.480	4.260	1.450	1.760	2,28
7	Harga-harga Kota Merauke						
	- IHK		0	123.900	131.040	132.120	133.77
	- Inflasi (mtm)	%	0	4.530	2.870	0.240	0,97
Sumber Data: SEKDA BI							
Keterangan :							
Sumber Data : Bank Indonesia (Data Simpanan dan Pinjaman), Badan Pusat Statistik (IHK dan PDRB), Ditjen Bea dan Cukai (Ekspor dan Impor Nonmigas)							
* Angka sementara							
** Angka sangat sementara							

Senada dengan Provinsi Papua, pertumbuha perbankan di wilyah Provinsi Papua Barat juga mencatat pertumbuhan positif. Sampai dengan akhir tahun 2017, simpanan masyarakat mengalami pertumbuhan, dimana tahun 2016 tercatat sebesar Rp13.530.168 milyar tumbuh menjadi sebesar Rp14.996.089 milyar pada akhir tahun 2017. Pembiayaan yang diberikan juga tercatat mengalami pertumbuhan yang positif, yang sebelumnya tercatat sebesar Rp14.808.232 milyar pada tahun 2016, tumbuh menjadi sebesar Rp16.737.800 milyar pada akhir tahun 2017. Indikator pertumbuhan perbankan di Papua, tergambar pada tabel dibawah:

In line with Papua Province, banking growth in West Papua province also recorded positive growth. Until the end of 2017, public savings growth, which in 2016 was recorded at Rp13,530,168 billion grew to Rp14,996,089 billion at the end of 2017. Financing also recorded a positive growth, previously recorded at Rp14,808,232 billion in 2016, grew to Rp16,737,800 billion at the end of 2017. The indicators of banking growth in Papua are illustrated in the table below:

INDIKATOR EKONOMI & PERBANKAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 -2017 (DLM milyar)
ECONOMIC INDICATORS & BANKING WEST PAPUA PROVINCE 2013 -2017 (DLM billion)

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Simpanan	RpJuta	11.133.900	12.841.149	13.037.010	13.530.168	14.996.089
	- Giro	RpJuta	3.719.710	4.162.869	2.839.665	3.106.908	3.798.925
	- Tabungan	RpJuta	5.387.720	5.914.930	7.033.553	7.349.181	7.813.688
	- Simpanan Berjangka	RpJuta	2.026.470	2.763.350	3.163.792	3.074.078	3.383.476
2	Pinjaman yang diberikan	RpJuta	7.766.315	9.269.840	11.192.721	14.808.232	16.737.800
	- Modal Kerja	RpJuta	3.243.777	3.534.589	4.112.739	4.344.471	4.324.244
	- Investasi	RpJuta	1.493.797	1.826.121	2.909.016	5.303.884	6.042.725
	- Konsumsi	RpJuta	3.028.741	3.909.130	4.170.965	5.159.877	6.370.831
3	Kredit UMKM	RpJuta	3.375.771	3.836.110	4.005.062	4.441.325	4.240.298
	- Mikro	RpJuta	465.447	565.854	742.814	825.224	898.560
	- Kecil	RpJuta	1.227.714	1.352.742	1.404.927	1.530.792	1.487.399
	- Menengah	RpJuta	1.682.610	1.917.514	1.857.321	2.085.309	1.854.339
4	Ekspor Non Migas						
	- Nilai	USD ribu					
	- Volume	ton					
5	Impor Non Migas						
	- Nilai	USD ribu					
	- Volume	ton					
6	Harga-harga Kota Manokwari						
	- IHK		0	112.580	115.700	122.350	124.53
	- Inflasi (mtm)	%	0.300	1.760	2.020	1.180	0,27
7	Harga-harga Kota Sorong						
	- IHK		0	116.040	123.200	126.840	128.53
	- Inflasi (mtm)	%	1.060	1.740	0.880	0.450	0,18
Sumber Data: SEKDA BI							
Keterangan :							
Sumber Data : Bank Indonesia (Data Simpanan dan Pinjaman), Badan Pusat Statistik (IHK dan PDRB), Ditjen Bea dan Cukai (Ekspor dan Impor Nonmigas)							
* Angka sementara							
** Angka sangat sementara							

Tinjauan Bisnis
Business Review

PROGRAM TRANSFORMASI BPD

Komitmen Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua dalam berkontribusi terhadap pembangunan di Timur Indonesia menjadi perhatian khusus para stakeholder. Dalam upaya memperkuat posisi Bank Papua agar lebih kompetitif dan meningkatkan kontribusi lebih besar, maka Bank Papua senantiasa mengikuti arahan dan petunjuk yang diberikan regulator dalam bertransformasi melalui Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dicanangkan OJK dan ASBANDA.

Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) telah diresmikan peluncuran pada tanggal 26 Mei 2016 oleh Presiden Joko Widodo terus dikembangkan kepada program aplikasi nyata bagi BPD Papua. Melalui kerja sama antara *Sparkassenstiftung Fuer Internationale Cooperation* (SBFIC) Jerman dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) digagas program pengembangan kredit usaha mikro dalam rangka program transformasi BPD sebagai agen pembangunan ekonomi daerah. Adapun tujuan dari kerja sama ini untuk mendukung program transformasi BPD terutama dalam pengembangan produk kredit produktif sebagai upaya meningkatkan daya saing BPD maupun peran BPD sebagai agen pembangunan ekonomi daerah. Kerja sama dimaksud dalam bentuk bantuan teknis yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi BPD dalam penyaluran kredit produktif BPD serta peran BPD dalam memberdayakan usaha mikro di daerah.

Proyek bantuan teknis tersebut kemudian diimplementasikan pada enam (6) BPD untuk membantu mengembangkan dan menyalurkan kredit usaha mikro serta mendukung program transformasi BPD. Proyek tersebut dibiayai oleh German *Federal Ministry for Economic Cooperation and Development* (BMZ). Enam (6) BPD yang dibantu yakni: BPD Sumut, BPD DIY, BPD Kalbar, BPD SulutGo, BPD Jateng, dan BPD Papua. Adapun kerjasama ini dapat meningkatkan peran BPD sebagai agen pembangunan ekonomi daerah melalui pemberian kredit produktif kepada usaha mikro. Mendorong inklusi keuangan dengan memberikan kesempatan usaha mikro memperoleh pembiayaan dari BPD. Memberdayakan usaha mikro di daerah dan membantu mengurangi kemiskinan.

BPD TRANSFORMATION PROGRAM

The commitment of the Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua in contributing to development in Eastern Indonesia is of particular concern to stakeholders. In an effort to strengthen the position of BPD Papua in order to be more competitive and to increase the larger contribution, Bank Papua always follow the direction and guidance given by the regulator in transformation through Transformation Program of Regional Development Bank (BPD) issued by OJK and ASBANDA.

The Transformation Program of Regional Development Bank (BPD) has been officially launched on 26 May 2016 by President Joko Widodo continuously developed to the real application program for BPD Papua. Through cooperation between Sparkassenstiftung Fuer Internationale Kooperation (SBFIC) Germany with Association of Regional Development Bank (Asbanda) initiated micro loan development program in the framework of BPD transformation program as regional economic development agent. The purpose of this cooperation to support the program of BPD transformation, especially in the development of performing loan products as an effort to improve the competitiveness of BPD and the role of BPD as an agent of regional economic development. Such cooperation in the form of technical assistance is expected to increase the competence of BPD in the provision of BPD performing loan and the role of BPD in empowering micro-enterprises in the region.

The technical assistance project is then implemented in six (6) BPDs to help develop and distribute micro business loan and support the BPD transformation program. The project is financed by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). Six (6) BPD assisted are: BPD Sumut, BPD DIY, BPD Kalbar, BPD SulutGo, BPD Jateng, and BPD Papua. The cooperation can increase the role of BPD as an agent of regional economic development through the provision of performing loan to micro business. Encourage financial inclusion by providing micro business opportunities to obtain financing from BPD. Empower micro-enterprises in the regions and help reduce poverty.

Selain itu, bisa juga meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia BPD melalui alih pengetahuan dan pengalaman dari SBFIC Jerman yang telah berpengalaman mengembangkan kredit usaha mikro di Jerman dan beberapa negara Asia Tenggara, serta memperbaiki budaya dan pola pikir pegawai BPD dalam penyaluran kredit produktif dengan lebih menekankan analisis kredit pada arus kas usaha debitur daripada agunan. Setelah enam BPD ini, proyek akan dilanjutkan dengan menggandeng BPD lainnya dalam pengembangan dan penyaluran Kredit Usaha Mikro tersebut dan ke depannya diharapkan BPD yang telah mengimplementasikan dapat mengalihkan dan menularkan pengetahuan dan pengalamannya kepada BPD lainnya. Dengan adanya kerjasama ini, akan terjadi proses transformasi di BPD terutama dalam inovasi pengembangan produk dan layanan, peningkatan kompetensi SDM, serta perubahan budaya dan pola pikir pegawai BPD dalam penyaluran kredit produktif.

In addition, BPD human resource competencies can be improved through knowledge transfer and experience from SBFIC Germany who have experience in developing micro business loans in Germany and some Southeast Asian countries, as well as improving the culture and mindset of BPD employees in the channeling of performing loan by emphasizing the loan analysis to the business cash flow of the debtor rather than collateral. After these six BPDs, the project will be continued by cooperating with other BPDs in the development and distribution of the Micro Business loan and in the future it is hoped that the BPD that has implemented can divert and transmit its knowledge and experience to other BPDs. With this cooperation, there will be a transformation process in BPD, especially in innovation of product and service development, human resource competence improvement, and change of culture and mindset of BPD employee in performing loan distribution.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET AWAL TAHUN BUKU DENGAN REALISASI TAHUN 2017 DAN PROYEKSI TAHUN 2018

Untuk mengetahui kinerja Bank dan memastikan bahwa strategi objektif terpenuhi, Bank Papua telah mengidentifikasi beberapa indikator penting dalam pengukuran kinerja Bank sebagai perbandingan antara kinerja tahun sebelumnya dengan kinerja yang akan datang yang telah disusun berdasarkan Rencana Bisnis Bank. Tabel dibawah ini menggambarkan kinerja Bank Papua ditahun 2017 dibandingan target dan realisasi sebelumnya dan proyeksi tahun 2018.

COMPARATIVE BETWEEN EARLY FISCAL YEAR TARGET WITH REALIZATION IN 2017 AND PROJECTION IN 2018

To determine the Bank's performance and ensure that the objective strategy is met, Bank Papua has identified several key indicators in measuring the Bank's performance as a comparison of the previous year's performance with the performance that will be prepared based on the bank's business plan. The table below illustrates the performance of Bank Papua in 2017 compared to the previous target and realization and projection of 2018.

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2017 SERTA PROYEKSI TAHUN 2018
TARGET AND REALIZATION IN 2017 AND PROJECTION IN 2018

Key Performance Indikator	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Pencapaian		Proyeksi 2018	Growth	
				Nominal	%		Nominal	%
ASET (Dalam RpJuta)	20.611.850	21.478.888	20.400.813	(1.078.075)	94,98%	23.733.791	3.332.978	14,04%
DANA PIHAK KETIGA	16.569.479	17.342.734	16.655.575	(687.159)	96,04%	19.164.006	2.508.431	13,09%
Giro	7.118.045	7.380.591	7.731.486	350.895	104,75%	8.449.651	718.165	8,50%
Tabungan	6.292.181	6.727.801	6.573.996	(153.805)	97,71%	7.279.003	705.007	9,69%
Deposito	3.159.254	3.234.342	2.350.093	(884.249)	72,66%	3.435.352	1.085.259	31,59%
PENGGUNAAN DANA	20.493.727	17.019.966	20.252.335	3.232.369	118,99%	18.944.676	(1.307.659)	-6,90%
Kredit	14.209.840	12.910.487	13.270.908	360.421	102,79%	14.271.664	1.000.756	7,01%
Penempatan	4.333.139	2.451.569	4.372.182	1.920.613	178,34%	2.707.982	(1.664.200)	-61,46%
Surat Berharga	1.950.749	1.657.910	2.609.245	951.335	157,38%	1.965.030	(644.215)	-32,78%
RASIO - RASIO KEUANGAN								
I. PERMODALAN								
1. CAR	17.28	18.57	17.99	(0.58)	96,88%	21.85	3.86	17,67%
II. AKTIVA PRODUKTIF								
1. NPL (Gross)	15.03	4.85	14.72	9.87	303,51%	7.62	-7.10	-93,18%
2. NPL Netto	3.95	2.84	3.79	0.95	133,45%	1.52	-2.27	-149,34%

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2017 SERTA PROYEKSI TAHUN 2018
TARGET AND REALIZATION IN 2017 AND PROJECTION IN 2018

Key Performance Indikator	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Pencapaian		Proyeksi 2018	Growth	
				Nominal	%		Nominal	%
III. RENTABILITAS								
1. Laba Terhadap Asset (ROA)	(0.61)	0.61	0.61	-	100,00%	1.19	0.58	48,74%
2. Laba Terhadap Modal (ROE)	(8.06)	4.36	4.37	0.01	100,23%	6.45	2.08	32,25%
3. Pendapatan Bunga Bersih Terhadap Aktiva Produktif (NIM)	7.01	7.71	7.16	(0.55)	92,87%	6.97	-0.19	-2,73%
4. BOPO	106.54	94.99	94.35	(0.64)	99,33%	87.84	-6.51	-7,41%
IV. LIKUIDITAS								
1. L D R	86.23	74.44	80.12	5.68	107,63%	74.47	-5.65	-7,59%
Laba Bersih Tahun Berjalan (Dalam RpJuta)	**(236.705)**	**100.341**	**113.272**	**12.931**	**112,89%**	**208.563**	**95.291**	**45,69%**

Meskipun target untuk tahun 2017 tidak mencapai 100%, namun secara keseluruhan indikator realisasi pertumbuhan kinerja Bank papua ditahun 2017 dapat dikatakan bagus jika dibandingkan dengan rencana target yang ditetapkan ditahun 2017.

1. Aset
   Pada tahun 2017, aset ditargetkan tumbuh sebesar Rp21.478.888 juta dan terealisasi sebesar Rp20.400.812 juta atau pencapaian sebesar 94,98% dari target. Bercermin dari data pertumbuhan ini, maka Bank memproyeksikan pertumbuhan kewajaran aset di tahun 2018 adalah sebesar Rp23.733.791 juta.
2. Kredit
   Pada tahun 2017, kredit ditargetkan tumbuh sebesar Rp12.910.487 juta dan terealisasi sebesar Rp13.270.907 juta atau pencapaian sebesar 102,79% dari target. Bercermin dari data pertumbuhan ini, maka Bank memproyeksikan pertumbuhan kewajaran kredit di tahun 2018 adalah sebesar Rp14.271.664 juta.
3. Dana Pihak Ketiga (simpanan nasabah)
   Pada tahun 2017, Simpanan ditargetkan tumbuh sebesar Rp17.342.734 juta dan terealisasi sebesar Rp16.655.575 juta dengan rincian sebagai berikut:
   a. Giro
      Pada tahun 2017, giro ditargetkan tumbuh sebesar Rp7.380.591 juta dan terealisasi sebesar Rp7.731.486 juta atau pencapaian sebesar 104,75% dari target.
   b. Tabungan
      Pada tahun 2017, Simpanan ditargetkan tumbuh sebesar Rp6.727.801 juta dan terealisasi sebesar Rp6.573.996 juta atau pencapaian sebesar 97,71% dari target

Although the target for 2017 does not reach 100%, the overall indicator of the realization of the growth performance of Bank Papua in 2017 can be said to be good when compared with the target plan set in 2017.

1. *Assets*
   In 2017, the assets are targeted to grow by Rp21,478,888 million and the realization of Rp20,400,812 million or achievement of 94.98% of the target. Reflecting from this growth data, the Bank projected asset growth in assets in 2018 amounted to Rp23,733,791 million.

2. *Loan*
   In 2017, the loan is targeted to grow by Rp12,910,487 million and the realization of Rp13,270,907 million or achievement of 102.79% of the target. Reflecting from this growth data, the Bank projected the growth of reasonableness of loan in 2018 amounted to Rp14,271,664 million.

3. *Third Party Funds (customer deposits)*
   In 2017, Deposits are targeted to grow by Rp16,655,575 million and realized at Rp16,563,714 million with details as follows:
   a. *Current Account*
      In 2017, current account are targeted to grow by Rp7,380,591 million and terealisasi amounting to Rp7,731,486 million or achievement of 104.75% of the target.
   b. *Savings*
      In 2017, Deposits are targeted to grow by Rp6,727,801 million and terealisasi amounted to Rp6,573,996 million or achievement of 97.71% of target

c. Deposito
Pada tahun 2017, Simpanan ditargetkan tumbuh sebesar Rp3.234.342 juta dan terealisasi sebesar Rp2.350.093 juta atau pencapaian sebesar 72,66% dari target.

Bercermin dari data pertumbuhan ini, maka Bank memproyeksikan pertumbuhan kewajaran Dana Pihak Ketiga simpanan di tahun 2018 adalah sebesar Rp19.164.006 juta dengan rincian sebagai berikut:

a. Giro
Bank memproyeksikan pertumbuhan kewajaran Giro di tahun 2018 adalah sebesar Rp8.449.651 juta atau tumbuh sebesar 18,50%.

b. Tabungan
Bank memproyeksikan pertumbuhan kewajaran Tabungan di tahun 2018 adalah sebesar Rp7.279.003 juta atau tumbuh sebesar 9,69%.

c. Deposito
Bank memproyeksikan pertumbuhan kewajaran Deposito di tahun 2018 adalah sebesar Rp3.435.352 juta atau tumbuh sebesar 31,59%.

4. CAR
Pada tahun 2017, CAR ditargetkan tumbuh sebesar 18,57% dan terealisasi sebesar 17,99%. Bercermin dari data pertumbuhan ini, maka Bank memproyeksikan pertumbuhan kewajaran CAR di tahun 2018 adalah sebesar 21,85%.

5. BOPO
Pada tahun 2017, BOPO ditargetkan turun sebesar 94,99% dan terealisasi sebesar 94,35%. Bercermin dari data pertumbuhan ini, maka Bank memproyeksikan pertumbuhan kewajaran BOPO di tahun 2018 adalah sebesar 87,84%.

6. ROA
Pada tahun 2017, ROA ditargetkan tumbuh sebesar 0,61 % dan terealisasi sebesar 0,61%. Bercermin dari data pertumbuhan ini, maka Bank memproyeksikan pertumbuhan kewajaran ROA di tahun 2018 adalah sebesar 1,19%.

7. ROE
Pada tahun 2017, ROE ditargetkan tumbuh sebesar 4,36% dan terealisasi sebesar 4,37%. Bercermin dari data pertumbuhan ini, maka Bank memproyeksikan pertumbuhan kewajaran ROE di tahun 2018 adalah sebesar 6,45%.

8. NIM
Pada tahun 2017, NIM ditargetkan tumbuh sebesar 7,71% dan terealisasi sebesar 7,16%. Bercermin dari data pertumbuhan ini, maka Bank memproyeksikan pertumbuhan kewajaran NIM di tahun 2018 adalah sebesar 6,97%.

c. Time Deposit
In 2017, Time Deposit is targeted to grow by Rp3,234,342 million and realization of Rp2,350,093 million or achievement of 72.66% of target.

Reflecting from this growth data, the Bank projected that the growth of Third Party Fund of deposits in 2018 amounted to Rp19,164,006 million with details as follows:

a. Current Account
The Bank projected the Current Account fairness growth in 2018 amounted to Rp8,449,651 million or grew by 18.50%.

b. Savings
The bank projected the growth of the saving fairness in 2018 amounted to Rp7,279,003 million or grew by 9.69%%.

c. Time Deposit
The bank projected the growth of reasonableness of Time Deposits in 2018 amounted to Rp3,435,352 million or grew by 31.59%.

4. CAR
In 2017, CAR is targeted to grow by 18.57% and realized by 17.99%. Reflecting from this growth data, the Bank projected CAR fairness growth in 2018 amounted to 21.85%.

5. OEOI
In 2017, OEOI is targeted to decrease by 94.99% and to reach 94.35%. Reflecting from this growth data, the Bank projected OEOI's fairness growth in 2018 to be 87.84%.

6. ROA
By 2017, ROA is targeted to grow by 0.61% and realized by 0.61%. Reflecting from this growth data, the Bank projected the growth of ROA fairness in 2018 is 1.19%.

7. ROE
In 2017, ROE is targeted to grow by 4.36% and terealisasi by 4.37%. Reflecting from this growth data, the Bank projected the fair growth of ROE in 2018 was 6.45%.

8. NIM
In 2017, NIM is targeted to grow by 7.71% and 7.16% respectively. Reflecting from this growth data, the Bank projected the NIM's fairness growth in 2018 to be 6.97%.

9. LDR
   Pada tahun 2017, LDR ditargetkan tumbuh sebesar 74,44% dan terealisasi sebesar 80,12%. Bercermin dari data pertumbuhan ini, maka Bank memproyeksikan pertumbuhan kewajaran LDR di tahun 2018 adalah sebesar 74,47%.
10. NPL Gross
    Pada tahun 2017, NPL Gross ditargetkan turun sebesar 4,85% dan terealisasi sebesar 14,72%. Bercermin dari data pertumbuhan ini, maka Bank memproyeksikan pertumbuhan kewajaran NPL Gross di tahun 2018 adalah sebesar 7,62%.
11. NPL Net
    Pada tahun 2017, NPL Net ditargetkan turun sebesar 2,84% dan terealisasi sebesar 3,79%. Bercermin dari data pertumbuhan ini, maka Bank memproyeksikan pertumbuhan kewajaran NPL Net di tahun 2018 adalah sebesar 1,52%.
12. Laba Bersih Tahun Berjalan
    Pada tahun 2017, Laba Bersih Tahun Berjalan ditargetkan tumbuh sebesar Rp100.341 juta dan terealisasi sebesar Rp113.273 juta atau pencapaian sebesar 112,89% dari target. Bercermin dari data pertumbuhan ini, maka Bank memproyeksikan pertumbuhan kewajaran Laba Bersih Tahun Berjalan di tahun 2018 adalah sebesar Rp208.563 juta.

Penetapan proyeksi indicator kinerja untuk tahun 2018, telah dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Penerapan Kebijakan Pembagian Deviden Bank Papua sebagai berikut:

1. Membayarkan deviden tunai minimum 50% dari laba bersih setiap tahunnya, yang besarnya akan diputuskan melalui RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi .
2. Keputusan untuk membayar deviden tergantung pada laba, kondisi keuangan dan *likuiditas*, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Bank Papua setelah memperoleh persetujuan RUPS.

Penggunaan laba tahun 2016 ditetapkan berdasarkan akta notaris Lilis Heryeni, SH, SP1, M.si No. 06 tanggal 13 Juli 2017 tentang risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Berdasarkan keputusan RUPS tersebut diatas, penggunaan laba tahun 2016 ditetapkan sebagai berikut:

9. `LDR
In 2017, the LDR is targeted to grow by 74.44% and the realization by 80.12%. Reflecting from this growth data, the Bank projected that LDR's fairness growth in 2018 will be 74.47%.

10. NPL Gross
In 2017, NPL Gross is targeted to decrease by 4.85% and to be realized at 14.72%. Reflecting from this growth data, the Bank projected that the Gross NPL growth in 2018 was equal to 7.62%.

11. NPL Net
In 2017, NPL Net is targeted to decrease by 2.84% and 3.79% respectively. Reflecting from this growth data, the Bank projected the growth of NPL Net fairness in 2018 amounted to 1.52%.

12. Net Earning of the Current Year
In 2017, Net Earning of the Current Year is targeted to grow by Rp100,341 million and realization of Rp113,273 million or achievement of 112.89% of the target. Reflecting from this growth data, the Bank projected the growth of Fairness of Net Earning of the Current Year in 2018 amounted to Rp208,563 million.

The determination of projected performance indicators for 2018 has been included in the Bank Business Plan submitted to the Financial Services Authority (OJK).

DIVIDEND POLICY IMPLEMENTATION

Implementation of Bank Dividend Distribution Policy as follows:

1. *Pay the minimum cash dividend of 50% of the net profit annually, the amount will be decided through the GMS based on the recommendation of the Board of Directors.*
2. *The decision to pay dividends depends on profits, financial conditions and liquidity, compliance with statutory regulations and other factors deemed relevant by the Board of Directors of Bank Papua after obtaining approval from the GMS.*

The use of profit in 2016 is determined by notarial deed of Lilis Heryeni, SH, SP1, M.si. 06 dated July 13, 2017 concerning the minutes of the Annual Shareholders General Meeting (ESGM) of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Based on the above SGM resolutions, the use of profit for 2016 is set forth as follows:

KOMPOSISI PEMBAGIAN LABA TAHUN 2016 *COMPOSITION OF PROFIT SHARING YEAR 2016*			
Uraian	2017	2016	*Description*
Dividen	0.00%	70.00%	*Dividend*
Cadangan umum	100.00%	30.00%	*General Reserve*
CSR	0.00%	0.00%	*CSR*
Tantiem	0.00%	0.00%	*Tantiem*
Dana Pendidikan	0.00%	0.00%	*Education Fund*
Jumlah Laba yang dibagikan	100.00%	100.00%	*Total of Earning shared*

Daftar pembagian deviden selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

The list of dividend payments for the past 3 years is as follows:

Penerima Dana	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
	Deviden	Dana Pembangunan	Deviden	Dana Pembangunan	Deviden	Dana Pembangunan
A. Provinsi Papua:	35%	15%	55%	15%	100%	100%
1. Pemerintah Provinsi Papua	10.971.504.720	4.702.073.452	41.297.286.330	11.262.896.272	-	-
2. Pemerintah Kota Jayapura	1.294.891.074	554.953.317	5.791.128.779	1.579.398.758	-	-
3. Pemerintah Kabupaten Jayapura	1.082.203.389	463.801.453	4.336.429.847	1.182.662.686	-	-
4. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	1.543.450.313	661.478.706	5.680.460.993	1.549.216.634	-	-
5. Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya	1.218.551.355	522.236.295	5.120.812.054	1.396.585.106	-	-
6. Pemerintah Kabupaten Merauke	1.559.673.630	668.431.556	6.220.451.837	1.696.486.865	-	-
7. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor	656.647.762	281.420.470	2.729.562.710	744.426.193	-	-
8. Pemerintah Kabupaten Yapen	1.029.567.739	441.243.317	3.926.522.191	1.070.869.688	-	-
9. Pemerintah Kabupaten Nabire	790.832.619	338.928.265	3.074.428.773	838.480.574	-	-
10. Pemerintah Kabupaten Paniai	757.088.120	324.466.337	2.548.271.402	694.983.109	-	-
11. Pemerintah Kabupaten Mimika	2.342.376.565	1.003.875.670	9.095.872.748	2.480.692.567	-	-
12. Pemerintah Kabupaten Sarmi	1.254.603.170	537.687.073	5.054.071.613	1.378.383.167	-	-
13. Pemerintah Kabupaten Tolikara	825.586.569	353.822.815	3.567.579.962	972.976.353	-	-
14. Pemerintah Kabupaten Waropen	519.146.139	222.491.203	2.257.040.384	615.556.468	-	-
15. Pemerintah Kabupaten Yahukimo	432.621.783	185.409.335	1.456.155.087	397.133.205	-	-
16. Pemerintah Kabupaten Asmat	1.557.438.418	667.473.607	5.642.600.960	1.538.891.171	-	-
17. Pemerintah Kabupaten Keerom	641.722.311	275.023.848	2.766.694.665	754.553.090	-	-
18. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang	1.312.286.074	562.408.318	4.659.696.277	1.270.826.257	-	-
19. Pemerintah Kabupaten Supiori	389.359.604	166.868.402	1.957.315.129	533.813.217	-	-
20. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel	519.146.139	222.491.203	1.832.328.484	499.725.950	-	-
21. Pemerintah Kabupaten Mappi	951.767.922	407.900.538	3.203.541.190	873.693.052	-	-
22. Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya	432.621.783	185.409.335	1.668.511.037	455.048.464	-	-
23. Pemerintah Kabupaten Yalimo	167.640.941	71.846.117	982.601.318	267.982.177	-	-
24. Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya	389.359.604	166.868.402	1.747.386.104	476.559.846	-	-
25. Pemerintah Kabupaten Nduga	533.566.865	228.671.514	2.232.649.787	608.904.487	-	-
26. Pemerintah Kabupaten Dogiyai	410.990.693	176.138.869	1.889.361.225	515.280.334	-	-
27. Pemerintah Kabupaten Puncak	237.941.981	101.975.134	1.565.366.718	426.918.196	-	-
28. Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah	173.048.713	74.163.734	754.288.335	205.715.000	-	-
29. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya	237.941.981	101.975.134	1.040.362.136	283.735.128	-	-
30. Pemerintah Kabupaten Deiyai	43.262.178	18.540.934	345.836.833	94.319.136	-	-
Jumlah / Total A	34.276.840.154	14.690.074.353	134.444.614.908	36.666.713.150		

Penerima Dana	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
	Deviden	Dana Pembangunan	Deviden	Dana Pembangunan	Deviden	Dana Pembangunan
B. Provinsi Papua Barat:	35%	15%	55%	15%	100%	100%
Pemerintah	5.407.772.284	2.317.616.693	25.308.460.788	6.902.307.488	-	-
32. Pemerintah Kota Sorong	519.146.139	222.491.203	1.747.386.104	476.559.846	-	-
33. Pemerintah Kabupaten Manokwari	1.952.854.727	836.937.740	6.573.084.061	1.792.659.289	-	-
34. Pemerintah Kabupaten Sorong	1.111.477.464	476.347.484	3.947.393.747	1.076.561.931	-	-
35. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan	995.030.100	426.441.472	4.319.926.756	1.178.161.843	-	-
36. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak	1.503.721.213	644.451.949	5.376.852.657	1.466.414.361	-	-
37. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni	868.848.747	372.363.749	4.441.273.014	1.211.256.276	-	-
38. Pemerintah Kabupaten Kaimana	1.297.865.348	556.228.006	4.368.465.260	1.191.399.616	-	-
39. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat	1.422.244.111	609.533.190	6.698.313.398	1.826.812.745	-	-
40. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama	746.272.575	319.831.104	2.766.694.665	754.553.090	-	-
41. Pemerintah Kabupaten Tambrauw	328.071.519	140.602.079	1.395.481.958	380.585.988	-	-
42. Pemerintah Kabupaten Maybrat	338.887.063	145.237.313	1.893.001.612	516.273.167	-	-
43. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak	-	-	209.322.294	57.087.898	-	-
44. Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan	-	-	48.538.503	13.237.773	-	-
Jumlah/Total B	**16.492.191.290**	**7.068.081.982**	**69.094.194.817**	**18.843.871.311**		
C. KSU Bank Papua BERDIKARI	**2.943.785.221**	**-**	**9.290.843.089**	**-**		
TOTAL	**53.712.816.665**	**21.758.156.335**	**212.829.652.814**	**55.510.584.461**		

ACCOUNTING POSISITION PAPER

Melalaui *accounting posisition paper* No.01/14/SKI/2018, Bank telah melakukan analisis terhadap penurunan nilai kredit yang diberikan sesuai Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No.55 (Revisi 2015) dan analisis terhadap kesalahan mendasar sesuai Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No. 25 (revisi 2014) untuk tahun buku yang berakhir tanggal
31 Desember 2016. Terjadi perubahan penyajian kembali laporan keuangan 31 Desember 2016 yang disampaikan oleh Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.Tb. Hasanuddin, M.Sc. dan Rekan. Latar belakang laporan *accounting posisition paper* adalah sebagai berikut:

Tujuan

Tujuan *Accounting Position Paper* ini adalah untuk melakukan analisis terhadap penurunan nilai atas kredit yang diberikan sebagaimana diatur dalam paragraf 63 PSAK 55 (Revisi 2015) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran terhadap bukti objektif kerugian penurunan nilai terhadap kredit yang diberikan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.

Selanjutnya *Accounting Position Paper* ini adalah untuk melakukan analisis terhadap kesalahan mendasar yang terjadi pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagaimana diatur dalam paragraph 41 PSAK 25 (Revisi 2014) tentang kesalahan material periode sebelumnya yang ditemukan pada periode selanjutnya.

Ruang Lingkup

1. Lingkup bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (selanjutnya disebut "Bank Papua") dalam analisis penurunan nilai terhadap kredit yang diberikan ini meliputi kredit yang diberikan kepada para debitur Bank Papua merupakan salah satu bisnis utama dari Bank Papua, yaitu penyaluran dana kepada masyarakat.
2. Objek penurunan nilai yang dibahas dalam analisis ini adalah kredit yang diberikan oleh Bank Papua, dimana metode penurunan nilai atas kredit yang diberikan sesuai dengan paragraph 63 PSAK 55 (Revisi 2015) dan peraturan internal Bank Papua melalui Surat Keputusan Direksi nomor 112/DIR-BPD/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015, dimana teknik perhitungan penurunan nilai dibagi menjadi 2 metode, yaitu teknik individual dan teknik kolektif.
3. Kredit yang diberikan yang masuk kedalam analisis ini, meliputi kredit yang tercatat pada laporan keuangan periode 31 Desember 2016 dengan nilai

ACCOUNTING POSISITION PAPER

Through accounting position paper No.01 / 14 / SKI / 2018, the Bank has analyzed the decrease of the lending value in accordance with the statement of financial accounting standard (PSAK) No.55 (Revised 2015) and an analysis of fundamental errors in accordance with the statement of financial accounting standards PSAK) No. 25 (revised 2014) for the fiscal year ending December 31, 2016. There was a change in the restatement of the financial statements of December 31, 2016 submitted by the Public Accountant Office of Prof. DR. H.Tb. Hasanuddin, M.Sc. and Partners. The background of accounting posisition paper is as follows:

Purpose

The purpose of this Accounting Position Paper is to conduct an analysis of the impairment of the lending as set forth in paragraph 63 PSAK 55 (Revised 2015) on Financial Instruments: Recognition and Measurement of objective evidence of impairment losses on loans loaned to amortized cost at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua for the financial year ended on 31 December 2016.

Furthermore, the Accounting Position Paper is intended to conduct an analysis of the fundamental errors that occurred in the statements of financial position and income statement and other comprehensive income for the year ended December 31, 2016 as set forth in paragraph 41 of PSAK 25 (Revised 2014) previously found in the next period.

Scope

1. *The business scope of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (hereinafter referred to as "Bank Papua") in the analysis of the impairment of loan provided includes loan provided to the debtor Bank Papua is one of the main business of Bank Papua, the distribution of funds to the public.*
2. *The impairment object discussed in this analysis is the lending by Bank Papua, where the method of impairment of lending in accordance with paragraph 63 of PSAK 55 (Revised 2015) and internal regulations of Bank Papua through Decree of the Board of Directors number 112 / DIR- BPD / XII / 2015 dated December 31, 2015, where the calculation technique of impairment is divided into 2 methods, namely individual techniques and collective techniques.*
3. *Lending included in this analysis include loan recorded in the financial statements of 31 December 2016 with a ceiling / loan limit value of more than*

plafond/limit kredit lebih dari Rp5.000.000.000,- dan dalam status *Non Performing Loan* (NPL).

Referensi

1. PSAK 55 (Revisi 2015) – Tentang Penurunan Nilai Aset tetap;
2. PSAK 25 (Revisi 2014) – Tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan estimasi, dan kesalahan;
3. Peraturan Direksi Bank Papua nomor 112/DIR-BPD/XII/2015 tanggal 32 Desember 2015

Latar Belakang

Sesuai dengan pernyataan pada PSAK 55 (Revisi 2015) paragraph 63 bahwa: "Entitas pertama kali menentukan bahwa terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas asset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk asset keuangan yang tidak signifikan secara individual (lihat paragraph 59). Jika entitas menentukan bahwa tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas asset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas asset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka entitas memasukan asset tersebut ke dalam kelompok asset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penurunan nilai kolektif."

Selanjutnya, sesuai paragraph 59 PSAK 55 (Revisi 2015), dijelaskan bahwa: "Aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal asset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan asset keuangan atau kelompok asset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Sulit untuk mengidentifikasi satu peristiwa tertentu yang menyebabkan penurunan nilai. Penurunan nilai pada dasarnya disebabkan oleh kombinasi dari beberapa peristiwa. Kerugian yang diperkirakan timbul akibat peristiwa masa depan tidak dapat diakui, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi. Bukti objektif bahwa asset keuangan atau kelompok asset keuangan mengalami penurunan nilai termasuk data yang dapat diobservasi yang menjadi perhatian dari pemegang asset tersebut mengenai peristiwa merugikan berikut ini:

a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
b) Pelanggaran kontrak, sperti terjadinya gagal bayar

Rp.5,000,000,000; and in Non Performing Loan (NPL) status.

Reference

1. *PSAK 55 (Revised 2015) - Regarding Impairment of Fixed Assets;*
2. *PSAK 25 (Revised 2014) - On Accounting Policies, Changes in Estimates, and Errors;*
3. *Regulation of the Board of Directors of Bank Papua Number 112 / DIR-BPD / XII / 2015 dated December 32, 2015*

Background

In accordance with the statement in PSAK 55 (Revised 2015) paragraph 63 that: "The entity first determines that there is objective evidence of impairment individually on individual financial assets individually and individually or collectively for non-individually significant financial assets see paragraph 59). If the entity determines that there is no objective evidence of impairment of individually assessed financial assets, whether or not the financial asset is significant, the entity enters the asset into a group of financial assets with similar loan risk characteristics and assesses the impairment value of the group collectively. Assets where impairment are assessed individually, and for which an impairment loss is recognized or otherwise recognized, is not included in the collective impairment. "

Further, in accordance with paragraph 59 of SFAS 55 (Revised 2015), it is explained that: "Financial assets are derived in value and a loss of losses has occurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events occurring after the initial recognition of assets (adverse events), and such adverse events have an impact on the estimated future cash flows of a financially manageable asset or group of financial assets. It is difficult to identify one particular event that causes the impairment. Decrease in value is basically due to a combination of several events. The expected losses arising from future events can not be acknowledged, irrespective of which they are likely to occur. Objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired includes observable data of concern to the asset holder regarding the following adverse events:

a) Significant financial difficulties experienced by the issuer or the debtor;
b) Breach of contract, such as default or arrears of

atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;

c) Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
d) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
e) Hilangnya pasar katif dari asset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
f) Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok asset keuangan sejak pengakuan awal asset tersebut, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap asset keuangan secara individual dalam kelompok asset tersebut, termasuk:
   i. Memburuknya status pembayaran peminjam dalam kelompok tersebut (contohnya meningkatnya tunggakan pembayaran atau meningkatnya jumlah pihak peminjam kartu kredit yang mencapai batas kreditnya dan hanya mampu membayar cicilan bulanan minimal); atau
   ii. Kondisi ekonomik nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas asset dalam kelompok tersebut (contohnya bertambahnya tingkat pengangguran di area geografis pihak peminjam, turunnya harga minyak untuk pinjaman yang diberikan kepada produsen minyak, atau memburuknya kondisi industri yang mempengaruhi pihak peminjam dalam kelompok tersebut)".

Sesuai dengan pernyataan pada PSAK No. 25 (Revisi 2014) paragraph 41 bahwa: "Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu entitas. Potensi kesalahan periode berjalan yang ditemukan pada periode tersebut dikoreksi sebelum laporan keuangan diselesaikan. Akan tetapi, kesalahan material yag kadangkala tidak ditemukan sampai periode selanjutnya, dan kesalahan periode sebelumnya dikoreksi pada informasi komparatif sajian pada laporan keuangan periode selanjutnya tersebut (paragraph 42-47)."

Selanjutnya sesuai dengan pernyataan pada PSAK 26 (Revisi 2014) paragraph 42 bahwa: "Entitas mengoreksi

principal or interest payments;

c) The creditor, for economic or legal reasons in relation to the financial difficulties experienced by the debtor, provides the debtor with a concession that is unlikely to be granted if the debtor does not encounter such difficulties;

d) There is the possibility that the debtor will be declared bankrupt or reorganize other financial resources;

e) Loss of the katif market of financial assets due to financial difficulties; or
f) Observable data indicates a measurable decrease in the estimated future cash flows of the financial asset group since the initial recognition of the asset, although the impairment has not been identified for individual financial assets in the asset group, including:

   i. The deterioration in the status of payments of debtors in the group (for example increased arrears in payments or increased number of loan card debtors who reach their loan limits and can afford only minimal monthly repayments); or

   ii. The national or local economic conditions that correlate with the defaults on the assets in the group (for example the increase in unemployment rates in the debtor's geographic area, the decrease of oil prices for lending to oil producers, or the deterioration of industry conditions affecting the debtor in the group) .

In accordance with the statement of SFAS No. 25 (Revised 2014) paragraph 41 that: "Errors may arise in the recognition, measurement, presentation or disclosure of the elements of the financial statements. The financial statements are not in accordance with IFRSs if they contain material or material deliberate mistakes to achieve a presentation of the entity's financial position, financial performance or specific cash flow. Potential mistakes of the current period found in the period are corrected before the financial statements are finalized. However, material errors are sometimes not found until later periods, and previous period errors are corrected on the comparative information presented in the financial statements of the subsequent period (paragraph 42-47). "

Subsequently, in accordance with the statement of PSAK 26 (Revised 2014) paragraph 42 that: "The entity corrects

kesalahan material periode sebelumnya secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan dengan:

a. Menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan dimana kesalahan terjadi; atau
b. Jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal asset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode sebelumnya sajian paling awal.

the previous period material errors retrospectively on the first complete financial statement issued after the discovery of an error by:

a. Represents the comparative amount for the previous period presented where the error occurred; or

b. If errors occur before the earliest serving period, then present the initial balance of assets, liabilities, and equities for the earliest periods of the earliest serving.

Untuk menganalisa apakah terdapat penurunan nilai kredit yang diberikan oleh Bank Papua, khususnya untuk kredit dengan nilai plafond lebih dari Rp5.000.000.000,- dan terdapat bukti objektif adanya penurunan nilai, dan guna melakukan analisis terhadap terjadinya kesalahan material pada periode laporan keuangan sebelumnya, maka perlu dipahami terlebih dahulu karakteristik kredit yang diberikan dan penyajian laporan keuangan periode sebelumnya secara menyeluruh.

To analyze whether there is an impairment in the loan score provided by Bank Papua, especially for loans with a ceiling value of more than Rp5,000,000,000,- and there is objective evidence of impairment, and in order to analyze the occurrence of material errors in the previous financial statement period it is necessary to understand first the characteristics of the lending and the presentation of the financial statements of the previous period as a whole.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan analisis apakah terdapat penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan terjadinya kesalahan material pada laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sesuai ketentuan dalam PSAK 55 (Revisi 2015) dan PSAK 25 (Revisi 2014) atas pengukuran asset keuangan dan kesalahan material kredit yang diberikan dalam laporan keuangan tanggal 31 Desember 2016.

Selanjutnya apabila hasil analisa menunjukan terdapat penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan merupakan suatu kesalahan material, maka manajemen Bank Papua akan melakukan koreksi atas pembentukan penurunan nilai kredit yang diberikan melalui koreksi atas kesalahan mendasar dalam penerapan PSAK 55 pada laporan keuangan tahun buku 31 Desember 2016.

Problems

Based on the above background, it is necessary to analyze whether there is any impairment in the value of loans and material errors in the financial statements for the year ended December 31, 2016 in accordance with the provisions of PSAK 55 (Revised 2015) and PSAK 25 (Revised 2014) measurement of financial assets and material misstatements given in the financial statements of December 31, 2016.

Furthermore, if the results of the analysis indicate any impairment on the lending and constitute a material error, then the management of Bank Papua will make corrections to the formation of the decrease of loan value provided through the correction of fundamental mistake in the application of PSAK 55 in the financial statements of the financial year of December 31, 2016.

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi Bank Papua untuk penghitungan penurunan nilai kredit yang diberikan sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2015), dimana perhitungan penurunan nilai kredit yang diberikan hierarkis dengan terlebih dahulu melakukan perhitungan dengan teknik individual, dan apabila tidak terdapat bukti objektif adanya penurunan nilai, maka penurunan nilai menggunakan teknik kolektif (lihat lampiran 1. Surat Keputusan Direksi nomor 112/DIR-BPD/XII/2015,tanggal 31 Desember 2015).

Accounting Policies

The accounting policies of Bank Papua for the calculation of impairment of the value of lending in accordance with PSAK 55 (Revised 2015), where the calculation of the impairment of the hierarchical value of loan by first performing calculations by individual techniques, and where there is no objective evidence of impairment, using collective techniques (see attachment 1. Decree of the Board of Directors, number 112 / DIR-BPD / XII / 2015, December 31, 2015).

Diagram Alur Proses *Individual Impairment* di BANK PAPUA
Individual Impairment Process Flow Chart in BANK PAPUA

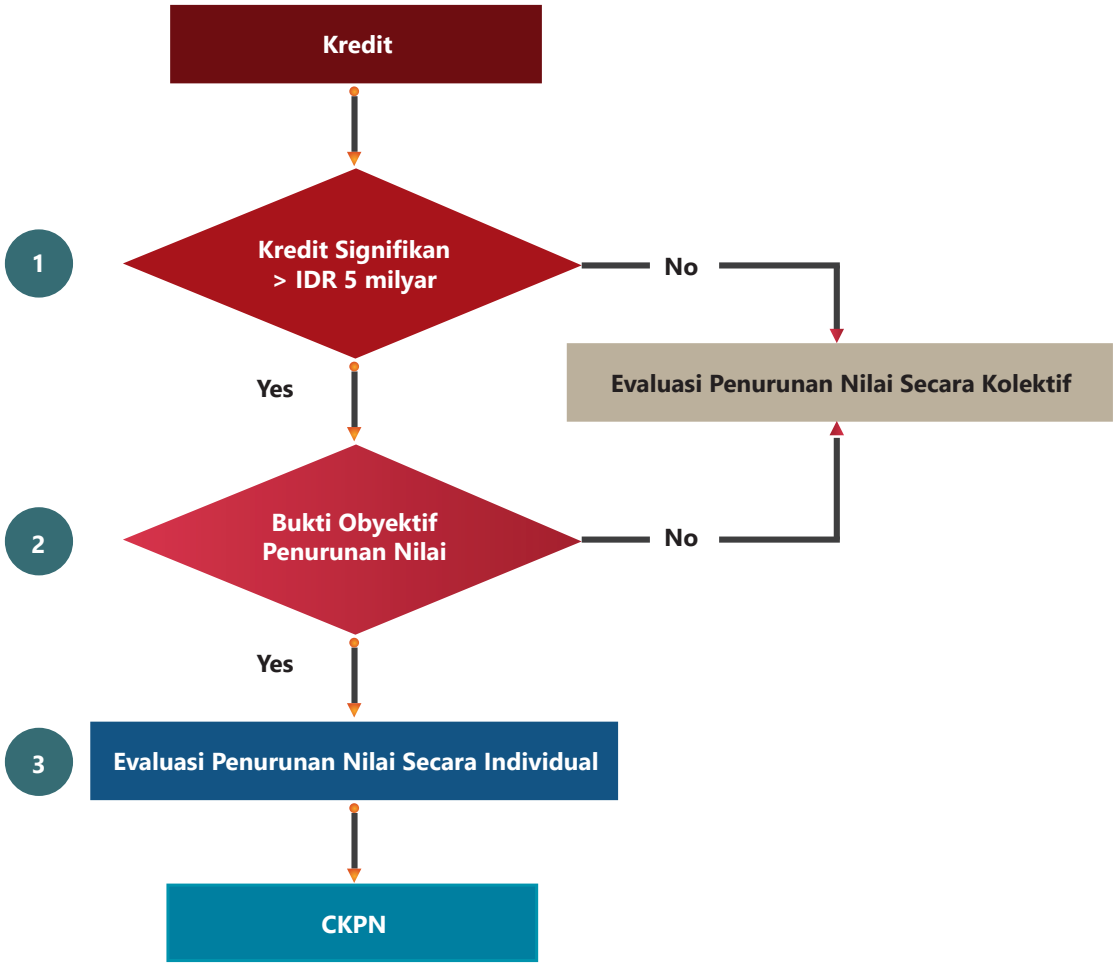

Kredit yang signifikan (*significant loan*) ditentukan atas masing-masing individual debitur. Kredit dinilai signifikan apabila plafond/limit fasilitas kredit yang diberikan lebih dari Rp5.000.000.000,- (ekuivalen) per individual debitur. Kriteria ini diambil dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Sejalan dengan kebijakan kredit internal Bank Papua, dimana diantaranya untuk limit pengajuan kredit investasi dan modal kerja sampai dengan Rp5.000.000.000,- (ekuivalen).
b. Bank mengadopsi pembiayaan berbasis asset (*asset-based lending*) untuk kredit kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,- ekuivalen; dimana membutuhkan agunan yang lebih dari cukup (>100% *collateral coverage*). Agunan sebagian besar terdiri dari tanah dan bangunan yang diikat melalui hak tanggungan pertama. Berdasarkan pengalaman historis, nilai pengembalian (*recovery value*) untuk tunggakan pokok (dari likuidasi agunan) sangat baik, berkisar antara 90-100%.
c. Sementara itu, bank mengadopsi lebih kepada pembiayaan berbasis arus kas (*cash flow-based lending*) untuk kredit lebih dari Rp5.000.000.000,- ekuivalen dan dengan fasilitas yang lenih kompleks (*structured*). Oleh karena itu, evaluasi penurunan nilai kredit secara individual (*individual impairment*) lebih sesuai.
d. Berdasarkan data rata-rata portofolio kredit Bank Papua dari waktu ke waktu:
    - Untuk kredit sampai Rp5.000.000.000,- ekuivalen, total fasilitas secara rata-rata sebesar 13,46% dari total fasilitas yang diberikan Bank, dan mewakili 20% dari total debitur.
    - Untuk kredit lebih dari Rp5.000.000.000,- ekuivalen, secara rata-rata mewakili 86,53% dari total fasilitas yang diberikan Bank, dan mewakili 80,38% dari total debitur Bank.

Bukti Obyektif Penurunan nilai :

a. Kerugian penurunan nilai terjadi hanya jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, dimana Kredit diklasifikasikan Rating.
b. Kredit direstrukturisasi atau dijadwalkan kembali (*rescheduled*), penurunan nilai secara individual diterapkan untuk debitur dalam kategori seperti ini.
    - Penilaian rating kredit dilakukan secara bulanan berdasarkan klasifikasi Rating yakni berdasarkan kemampuan membayar debitur (lamanya hari tunggakan pokok dan atau tunggakan bunga pinjaman).
    - Evaluasi penurunan nilai kredit secara individual untuk kredit yang memenuhi salah satu kriteria diatas, dilakukan secara bulanan.

Significant loan is determined on each individual debtor. Loan is assessed as significant if the loan limit / loan facility is granted more than Rp5,000,000,000, - (equivalent) per individual debtor. This criterion is taken with the following considerations:

a. In line with Bank Papua's internal loan policy, among other things is to limit the application of investment loan and working capital up to Rp5,000,000,000, - (equivalent).

b. Banks adopt asset-based lending for loans of less than or equal to Rp5,000,000,000, - equivalent; which requires adequate collateral (> 100% collateral coverage). Collateral consists mainly of land and buildings bound through the first mortgage. Based on historical experience, the value of recovery (arrears) for principal arrears (from collateral liquidation) is very good, ranging from 90-100%.

c. Meanwhile, banks have adopted more cash-based lending for loan of more than Rp5,000,000,000, - equivalent and with facilities that are complex (structured). Therefore, the evaluation of individual loan impairment is more appropriate.

d. Based on the average data of portopolio loan of Bank Papua from time to time:
    - *For loans up to Rp5,000,000,000, - equivalent, the total facility on average is 13.46% of the total facilities provided by the Bank, and represents 20% of total debtors.*
    - *For loans of more than Rp5,000,000,000, - equivalent, on average represents 86.53% of the total facilities provided by the Bank, and represents 80.38% of the total Bank debtors.*

Objective Evidence Impairment losses :

a. Impairment losses occur only if there is objective evidence of impairment, in which Loan is classified Rating.
b. Loan is restructured or rescheduled, individual impairment is applied to debtors in this category.
    - *Loan rating appraisal is done on a monthly basis based on the Rating classification based on the ability to pay the debtor (the length of the principal arrears and / or interest arrears).*
    - *Evaluation of individual loan appraisal for loans that meet any of the above criteria, is made on a monthly basis.*

Analisa

Berdasarkan PSAK 55 (Revisi 2015) terhadap 47 rekening kredit yag diberikan dengan nilai wajar / saldo neraca sebesar Rp1.273.503.148.772,- pada laporan keuangan periode 31 Desember 2016, khususnya untuk kredit yang diberikan dengan nilai plafond lebih dari Rp5.000.000.000,- yang mengalami potensi penurunan nilai sehubungan dengan bukti-bukti obyektif sebagai berikut:

a. Rating kredit merupakan kolektibilitas macet (Kol. 5) sesuai dengan nominatif kredit pada tanggal 31 Desember 2016, hal ini mengindikasikan adanya:
   - Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
   - Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga.
b. Terdapat skema restrukturisasi atau dijadwalkan kembali (*rescheduled*) atas rekening kredit tersebut diatas, hal ini mengindikasikan adanya bukti objektif pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomik atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yag tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut.

Sehubungan dengan kondisi tersebut diatas yang berdampak di rekening kredit yang diberikan oleh Bank Papua pada laporan keuangan 31 Desember 2016, maka berdasarkan analisis manajemen terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit yang diberikan tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan asset keuangan atau kelompok asset keuangan, serta kerugian atas penurunan nilai kredit dapat diestimasi secara andal.

Analysis

Based on PSAK 55 (Revised 2015) on 47 loan accounts provided with fair value / balance sheet amounting to Rp1,273,503,148,772, - in the financial statements of 31 December 2016, especially for lending in limit value of more than Rp5,000,000,000 , which has the potential for impairment in relation to objective evidence as follows:

a. The loan rating is a collectibility of congestion (Col 5) in accordance with the nominative loan as of December 31, 2016, it indicates:
   - *Significant financial difficulties experienced by the creditor or the debtor;*
   - *Breach of contract, such as the occurrence of default or arrears of principal or interest payments.*

b. There is a restructuring scheme or rescheduled upon the above mentioned loan account, indicating an objective evidence of the creditor, for economic or legal reasons in relation to the financial difficulties experienced by the borrower's feet, giving the borrower no concession to the debtor provided if the borrower does not experience such difficulties.

In relation to the above conditions affected by the loan account provided by Bank Papua in the financial statements of December 31, 2016, based on management analysis there is objective evidence of impairment as a result of one or more events occurring after the initial recognition of such loan adverse), and such adverse events have an impact on the estimated future cash flows of a financial asset or group of financial assets, as well as a loss of impairement loa can be estimated reliably.

Berdasarkan PSAK 25 (Revisi 2014) manajemen Bank Papua menemukan adanya kesalahan material terhadap pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas kredit yang diberikan sebesar Rp398.587.393.725,- yang disebabkan oleh kesalahan dalam pengukuran dan penyajian unsur pada laporan keuangan, khususnya untuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang diukur menggunakan teknil individual dimana laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi tidak sesuai dengan PSAK dan mempengaruhi penyajian posisi keuangan dan kinerja keuangan. Kesalahan material tersebut tidak dapat ditemukan oleh manajemen Bank Papua pada laporan keuangan periode 31 Desember 2016 (periode sebelumnya), dan baru ditemukan pada periode laporan keuangan 31 Desember 2017 (periode selanjutnya).

Based on PSAK 25 (Revised 2014), the management of Bank Papua finds a material mistake in the form of allowance for impairment losses on loans amounting to Rp398,587,393,725, - which is caused by an error in the measurement and presentation of elements in the financial statements, especially for allowance for impairment losses measured using individualized technology in which the financial statements for the year ended December 31, 2016 are inconsistent with SFAS and affect the presentation of financial position and financial performance. Such material faults could not be found by the management of Bank Papua in the financial statements of 31 December 2016 (previous period), and were only discovered during the period of December 31, 2017 (later period).

Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai penerapan PSAK 55 (Revisi 2015) dan penerapan PSAK 25 (Revisi 2014) sebagaimana tersebut sebelumnya, manajemen Bank Papua akan melakukan koreksi kesalahan material yang dapat diukur secara andal pada laporan keuangan periode 31 Desember 2016 (periode sebelumnya) secara restroktif pada laporan keuangan lengkap pertama (periode 31 Desember 2017) yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan dengan menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan dimana kesalahan terjadi.

Conclusion

Based on the analysis of the application of PSAK 55 (Revised 2015) and the adoption of PSAK 25 (Revised 2014) as previously mentioned, the management of Bank Papua will make correct measurable material errors in the financial statements of 31 December 2016 (previous period) in a restrictive report the first complete finance (period 31 December 2017) issued after the discovery of an error by presenting the comparative amount for the previous period presented where the error occurred.

Rincian rekening kredit yang diberikan dapat dilihat pada Lampiran 2 - Tabel CKPN Individual 31 Desember 2016, rincian tersebut yang akan dilakukan koreksi pada laporan keuangan periode 31 Desember 2017 (periode selanjutnya) dengan cara restroktif yaitu menyajikan kembali jumlah komparatif laporan keuangan periode 31 Desember 2016 dimana kesalahan terjadi.

Details of the current accounts provided can be seen in Appendix 2 - Individual CKPN Table December 31, 2016, the details of which will be corrected to the December 31, 2017 (next period) financial statements by restrocating restatement of the financial statement as of December 31, 2016 error occurred.

LAMPIRAN

Penyajian Kembali Laporan Keuangan 31 Desember 2016

	Sebelum Penyajian Kembali / Before Restatement	Penyajian Kembali / Restatement	Setelah Penyajian kembali / After Restatement
Laporan Posisi Keuangan			
Aset			
Cadangan Penurunan Nilai (CPN)			
Kredit yang diberikan			
CPN KYD Individual - Pinjaman dan Piutang	(35.629.598.397)	398.587.393.725	435.281.940.602
CPN KYD Kolektif - Pinjaman dan Piutang	(1.237.279.428.492)	-	(1.237.279.428.492)
Total Aset	**21.057.733.864.015**	**398.587.393.725**	**20.611.849.994.805**
Ekuitas			
Laba Rugi Tahun Berjalan	233.984.711.988	398.587.393.725	(236.704.444.940)
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
Beban CPN - Kredit yang diberikan	465.344.981.209	399.652.342.205	864.997.323.414
Laba (Rugi) Bersih - Setelah Pajak	233.984.711.988	398.587.393.725	(164.602.681.737)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	111.255.899.439	398.587.393.725	(287.331.494.286)

Tinjauan Persegmen Usaha
Business Segment Overview

Dalam kondisi tren perbaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 mendorong peningkatan investasi. Kondisi ini meningkatkan semangat perbankan dalam meningkatkan portofolio produk dananya baik itu tabungan, giro, maupun deposito. Tidak hanya itu, beragam produk beraplikasi teknologi juga ditawarkan seiring dengan meningkatnya kebutuhan nasabah dalam memudahkan melakukan berbagai macam transaksi keuangan, serta variasi tingkat suku bunga yang ditawarkan perbankan. Dengan kondisi persaingan ini, Bank Papua senantiasa melakukan inovasi guna memenuhi kebutuhan nasabah dengan menitik beratkan pada kualitas layanan, daya saing produk, jasa perbankan yang update, serta pengembangan produk inovatif yang berbasis teknologi.

Under conditions of improvement trend of economic growth in 2017 encourage increased investment. This condition raises the spirit of the banking system in increasing the portfolio of its products, whether it be savings, current accounts, and time deposits. Not only that, a variety of technology-applied products are also offered along with the increasing needs of customers in facilitating various financial transactions, as well as variations in interest rates offered by banks. With this competitive condition, Bank Papua continues to innovate to meet the needs of sabaha with emphasis on service quality, product competitiveness, updated banking services, and the development of innovative products based on technology.

Begitupula dengan penyaluran kredit di tengah intermediasi perbankan yang belum kuat ditahun 2017, Bank Papua masih bisa membukukan pertumbuhan kredit yang cukup besar. Namun, kondisi ekonomi yang masih dalam tren perbaikan menjadi perhatian penuh Bank Papua agar tidak memperburuk kualitas kredit di tahun 2017. Berikut ini adalah gambaran tinjuan persegmen usaha Bank Papua

Likewise with lending. Amidst the banking intermediation that has not been strong in 2017, Bank Papua can still record a substantial loan growth. However, the economic condition that is still in the trend of improvement becomes the full concern of Bank Papua in order not to exacerbate the quality of loan in 2017. Below is an overview of Bank Papua business partnership

SEGMEN DANA PIHAK KETIGA

Intensitas persaingan dalam dunia usaha perbankan di tahun 2017 tetap tinggi, antara lain meliputi persaingan tingkat suku bunga, layanan yang diberikan, luasnya jaringan, dan fitur-fitur yang diberikan. Berbagai strategi diterapkan Bank Papua dalam upaya mencapai target pertumbuhan dananya, diantaranya dengan menawarkan produk, layanan, dan fasilitas baru yang dimiliki ataupun menambah fitur-fitur dari produk, layanan atau fasilitas yang dibutuhkan nasabah.

Dana pihak ketiga Bank dihimpun dari masyarakat (simpanan nasabah) melalui produk-produk dana pihak ketiga yang terdiri dari produk, tabungan, giro dan deposito. Pada tahun 2017, terjadi pertumbuhan positif terhadap Dana Pihak Ketiga Bank dari simpanan nasabah yakni dari sebesar Rp16.569.479 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp16.655.575 juta pada tahun 2017. Komposisi simpanan nasabah Bank Papua didominasi oleh produk Giro.

THIRD PARTY FUNDS SEGMENT

The intensity of competition in the banking business in 2017 remains high, including among others interest rate competition, the services provided, the breadth of the network, and the features provided. Various strategies are implemented by Bank Papua in the effort to achieve its funding growth target, including by offering new products, services and facilities owned or adding features of products, services or facilities required by customers.

The Bank's third party funds are collected from the public (customers' savings) through third party fund products consisting of products, savings, current accounts and time deposits. In 2017, there was a positive growth of Third Party Funds from customers' deposits of Rp16,569,479 million in 2016 to Rp16,655,575 million in 2017. The composition of Bank Papua customer deposits is dominated by Current Account products.

Pada tahun 2017, terjadi pertumbuhan positif terhadap Dana Pihak Ketiga Bank dari Simpanan dari bank lain yakni dari sebesar Rp90.817 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp91.860 juta pada tahun 2017.

In 2017, there was a positive growth of Bank Third Party Funds from Deposits from other banks, from Rp90,817 million in 2016 to Rp91,860 million in 2017.

Sehingga total Dana Pihak Ketiga Bank Papua pada tahun 2017, terjadi pertumbuhan positif sebesar 0,52%, yakni dari sebesar Rp16.569.479 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp16.655.575 juta, atau tumbuh sebesar Rp86.095 juta pada tahun 2017. Pertumbuhan dana pihak ketiga Bank Papua tergambar pada tabel dibawah ini:

So that the total Third Party Fund of Bank Papua in 2017, there is a positive growth of 0.52%, from Rp16,569,479 million in 2016 to Rp16,655,575 million, or grew by Rp86,095 million in 2017. Third party funds of Bank Papua illustrated in the table below:

PERTUMBUHAN DPK BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
THE GROWTH OF BANK PAPUA DPK IN 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Items*
						Nominal	%	
Giro	6.951.249	7.383.293	7.368.548	7.118.044	7.731.486	613.442	8,62%	*Current Account*
Tabungan	4.621.902	5.324.238	5.878.738	6.292.181	6.573.996	281.815	4,48%	*Saving*
Deposito	1.896.016	3.965.854	2.659.077	3.159.254	2.350.093	(809.162)	-25,61%	*Time Deposit*
TOTAL	**13.469.167**	**16.673.385**	**15.906.363**	**16.569.479**	**16.655.575**	**86.095**	**0,52%**	*Total*

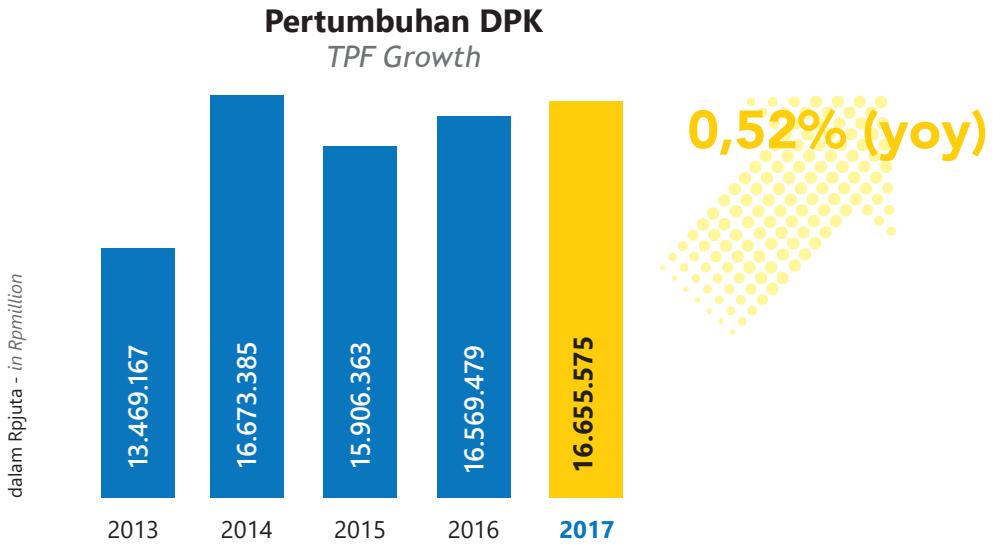

Beberapa produk simpanan nasabah Bank Papua memiliki beberapa jenis beserta karakteristiknya. Adapun rincian produknya adalah sebagai berikut:

1. Giro
   Giro adalah simpanan yang dapat ditarik sewaktu waktu menggunakan surat berharga berupa cek/ bilyet giro/surat pembayaran lainnya, serta dapat melakukan pemindahbukuan, dan uang yang terdapat dalam giro dapat berupa mata uang asing.

Some Bank Papua customers' savings products have several types and their characteristics. The details of its products are as follows:

1. *Current Account*
   Current Account are deposits that may be withdrawn at any time using securities in the form of checks / bilyet current account / other payment papers, and can perform book-entry, and money contained in current account may be in foreign currency.

2. Tabungan
   Tabungan adalah simpanan dengan denominasi rupiah serta dapat ditarik atau dipindahbukukan sewaktu waktu serta penarikannya tidak dapat menggunakan cek/bilyet giro.
3. Deposito
   Deposito adalah simpanan berjangka sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan sehingga tidak dapat ditarik sewaktu-waktu dan pencairannya dapat melalui tunai ataupun pemindahbukuan serta denominasi dapat berupa rupiah maupun mata uang asing.

2. Savings
Savings are deposits denominated in rupiah and can be withdrawn or transferred at any time and withdrawal can not use check / bilyet current account.

3. Time Deposits
Time Deposits are time deposits in accordance with the agreements made so that they can not be withdrawn at any time and disbursements can be by cash or book-entry and denomination can be in the form of rupiah or foreign currency.

A. Dana Pemda dan Non Pemda

Melanjutkan program Transformasi BPD menajadi bank yang sehat, Bank Papua terus berupaya menekan porsi dana pemerintah daerah dari dana pihak ketiga bank. Saat ini porsi dana pemda terus turun dibandingkan dengan posisi tahun lalu dan saat ini sudah berada di level 33.32%. Komposisi dana Pemda dan Non Pemda dimiliki Bank Papua tergambar pada tabal berikut ini.

A. LG and Non LG Funds

Continuing the program of BPD Transformation into a sound bank, Bank Papua continues to push the portion of local government funds from bank third-party funds. Currently the portion of local government funding continues to decline compared to last year's position and is currently at the 33.32% level. The composition of local governments and non-local government funds owned by Bank Papua is illustrated in the following table.

PERBANDINGAN KOMPOSISI DANA PEMDA & NON PEMDA BANK PAPUA TAHUN 2015-2017 (RpJUTA)
COMPOSITION OF NON-LOCAL GOVERNMENT & NON-PERFORMING REGIONAL GOVERNMENT FUNDS OF BANK PAPUA 2015-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013		2014		2015		2016		2017		*Description*
	Realisasi	Komp.	Realisasi	Komp.	Realisasi	Komp.	Realisasi	Komp.	Realisasi	Komp.	
Dana Pemda	5.211.773	39%	5.663.623	34%	3.978,569	25%	4.682.306	28%	5.033.793	30%	*LG Funds*
Dana Non Pemda	8.257.393	61%	11.009.761	66%	11.927.794	75%	11.887.173	72%	11.621.782	70%	*Non LG Funds*
Total	**13.469.166**	**100%**	**16.673.384**	**100%**	**15.906.363**	**100%**	**16.569.479**	**100%**	**16.655.575**	**100%**	**Total**

Pada tahun 2017, terjadi pertumbuhan positif terhadap Dana Pemda yakni sebesar 7,51% dari Rp5.033.793 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp4.682.306 juta pada tahun 2017. Sedangkan Dana Non Pemda, terjadi pertumbuhan negatif yakni sebesar -2,23% dari Rp11.887.173 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp11.621.782 juta pada tahun 2017. Uraian mengenai pertumbuhan Dana Pemda dan Non Pemda tergambar pada tabel dibawah ini:

In 2017, there was a positive growth of the Local Government Fund by 7.51% from Rp5,033,793 million in 2016 to Rp4,682,306 million in 2017. Meanwhile, Non-Local Government Funds, negative growth occurred at -2.23% from Rp11,887,173 million in 2016 to be Rp11,621,782 million in 2017. Description of the growth of local and non-regional government funds is illustrated in the table below:

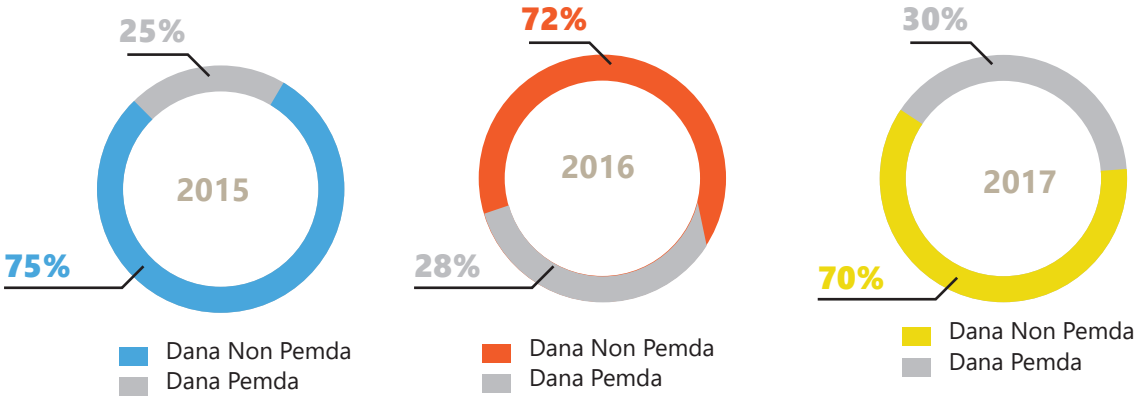

PERTUMBUHAN DANA PEMDA & NON PEMDA BANK PAPUA TAHUN 2013 - 2017 (RPJUTA)
GROWTH OF PAPUA & LOCAL GOVERNMENT** FUNDS **PAPUA BANK YEAR 2013 - 2017 (RPJUTA)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Pihak PEMDA	3.967.475	3.881.486	2.721.163	3.010.422	3.295.328	**284.906**	9,46%	*LG*
Non PEMDA	2.983.773	3.501.806	4.647.385	4.107.622	4.436.157	**328.535**	8,00%	*Non-LG*
Total Giro	6.951.248	7.383.292	7.368.548	7.118.044	7.731.485	**613.441**	8,62%	*Total Current Acc*
Pihak PEMDA	58.761	43.247	103.990	103.990	340.122	**236.132**	227,07%	*LG*
Non PEMDA	4.563.141	5.280.991	5.774.747	6.204.975	6.233.874	**28.899**	0,47%	*Non-LG*
Total Tabungan	4.621.902	5.324.238	5.878.738	6.292.180	6.573.996	**281.816**	4,48%	*Total Savings*
PEMDA	1.185.537	1.738.890	1.153.416	1.584.678	1.398.343	**(186.335)**	-11,76%	*LG*
Non PEMDA	710.479	2.226.964	1.505.660	1.574.576	951.749	**(622.827)**	-39,56%	*Non-LG*
Total Deposito	1.896.016	3.965.854	2.659.076	3.159.254	2.350.092	**(809.162)**	-25,61%	*Total Time Dep.*
Total DPK	13.469.167	16.673.385	15.906.363	16.569.479	16.655.574	**86.095**	0,52%	*Total TPF*

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Dana PEMDA	5.211.773	5.663.623	3.978.569	4.682.306	5.033.793	351.487	7,51%	*LG Fund*
Dana Non PEMDA	8.257.393	11.009.761	11.927.794	11.887.173	11.621.782	(265.392)	-2,23%	*Non-LG Fund*
	13.469.167	**16.673.384**	**15.906.363**	**16.569.479**	**16.655.575**	**86.095**	**0,52%**	

Dengan porsi dana pemda yang masih dibawah dana non pemda, Bank Papua akan terus meningkatkan pelayanan dan memberikan beragam produk jasa keuangan bagi masyarakat atau nasabahnya guna meningkatkan dana non Pemda pada dana pihak ketiga bank. Dengan semakin tingginya komposisi dana non pemda tersebut, tentunya dapat memberikan ruang gerak lebih luas kepada manajemen untuk mengembangkan Bisnis Bank di masa depan.

With the portion of local government funding still under non-regional government funding, Bank Papua will continue to improve its services and provide a range of financial services products for the community or its customers to increase non-regional government funds in third party bank funds. With the increasingly high composition of non-local government funds, of course, can provide wider space to management to develop the bank's business in the future.

B. *Current Account Saving Account*/CASA

Jika dilihat dari jenis-jenis DPK maka dapat dibagi menjadi dana murah dan dana mahal. Pengertian dana murah adalah bank memberikan bunga simpanan dalam persentase yang rendah, adapun yang masuk dalam golongan ini adalah giro dan tabungan. Dana mahal adalah bank memberikan bunga simpanan lebih tinggi dibanding dana murah, adapun yang masuk dalam golongan ini adalah deposito. Latar belakang deposito mendapatkan bunga yang lebih besar dibandingkan giro dan tabungan karena deposito penarikannya berjangka sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan bank. Kondisi tersebut menjadikan bank dapat mengatur kebutuhan likuiditasnya sehingga kegiatan operasional bank dapat berlangsung dengan optimal. Sedangkan giro dan tabungan dapat ditarik sewaktu-waktu dan bank wajib menyediakan dana nasabah tabungan atau giro jika dilakukan penarikan. Jika bank tidak mampu menyediakan uang yang ditarik nasabah tabungan dan giro maka bank tersebut mengalami gagal bayar (*likuiditas* kurang). Salah satu komponen yang terpenting bank dalam menghasilkan laba selain kredit yang berkualitas adalah sumber dana yang memadai. Semakin besar komposisi dana murah

B. *Current Account Saving Account / CASA*

When viewed from the types of DPK then it can be divided into cheap funds and expensive funds. Understanding low-cost funds is the bank provides savings interest in a low percentage, while the entry in this group is the current account and savings. Expensive funds are banks provide higher deposit rates than low-cost funds, while the entry in this class is deposits. The background of the deposit earns more interest than current account and savings due to time deposit withdrawal in accordance with the stipulated time limit of the bank. This condition allows banks to manage their liquidity requirements so that bank operational activities can take place optimally. While current accounts and savings can be withdrawn at any time and banks are required to provide savings or current account funds if a withdrawal is made. If the bank is unable to provide the money withdrawn by the savings and giro customers, the bank will experience a default (less liquidity). One of the most important components of banks in generating profits other than quality loan is an adequate source of funds. The larger the current

(*current account saving account*/CASA) dalam bank, maka semakin besar pula potensial laba yang dapat diperoleh dari penyaluran kredit. CASA Bank Papua ditahun 2017 adalah sebesar 86%, dimana dana murah yang terhimpun adalah sebesar Rp14.305.482 juta atau naik 15,27% dari tahun 2016 yakni sebesar Rp12.410.225 juta. Ini artinya Bank memiliki dana murah yang besar. Pertumbahan (*current account saving account*/CASA) Bank Papua tergambar pada tabel dibawah ini:

account savings account (CASA) in the bank, the greater the potential profit that can be obtained from lending. CASA Bank Papua in 2017 amounted to 86%, of which low-cost funds were collected amounted to Rp14.305.482 million, an increase of 15,27% from 2016 amounting to Rp12.410.225 million. This means that the Bank has substantial low-cost funds. Bank Papua's current account saving account (CASA) is illustrated in the table below:

PERTUMBUHAN CASA BANK PAPUA 2013 - 2017 (%)
GROWTH OF CASA BANK PAPUA 2013 - 2017 (%)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	*Description*
Current Account Saving Account	86%	76%	84%	81%	86%	*CASA*

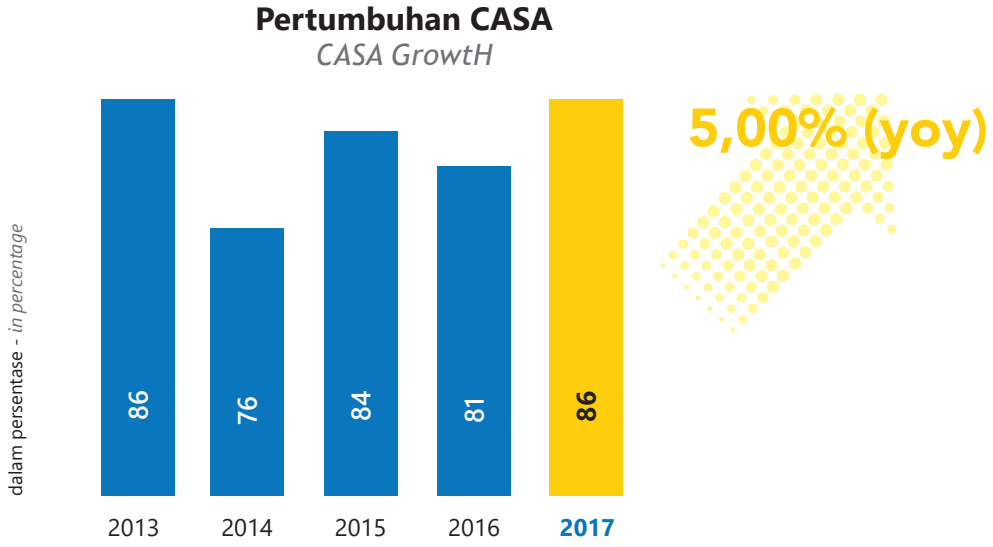

Upaya-upaya yang dilakukan Bank Papua dalam meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) ditahun 2017, diantaranya:

a. Memberikan target kepada semua kantor cabang untuk penghimpunan dana pihak ketiga dari masyarakat.
b. Berupaya mencari dana dalam bentuk deposito yang bersumber dari mitra kerja Bank Papua, pengusaha, dan investor.
c. Meningkatkan fungsi Tim Satuan Tugas (*Task Force Team*) Penghimpunan Dana Pihak Ketiga.
d. Pendanaan diprioritaskan simpanan berjangka untuk memperkecil *Missmatch* antara sumber dan penggunaan dana.
e. Memperluas *gathering community* dengan perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional, pemerintah daerah. Pendekatan ini dalam rangka menjaga hubungan dengan pemilik dana dan dana yang telah disimpan di Bank Papua perlu dikelola dengan baik.

Efforts by Bank Papua to increase Third Party Funds (TPF) in 2017, including:

a. Targeting all branch offices for the collection of third party funds from the community.
b. Seeks funds in the form of deposits sourced from partners of Bank Papua, entrepreneurs, and investors.
c. Improve the functioning of the Task Force Team of Third Party Funds.
d. Funding is prioritized for time deposits to minimize Missmatch between source and use of funds.
e. Expand the gathering community with national and multinational companies, local governments. This approach in keeping with the owners of funds and funds that have been stored in Bank Papua needs to be managed properly.

C. Produk Simpanan Nasabah

Uraian mengenai segmen usaha produk Dana Pihak Ketiga Bank Papua ditahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. **Pertumbuhan Giro**

   Produk ini merupakan simpanan Dana Pihak Ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Pertumbuhan produk tabungan ditahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 8,62% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp7.118.044 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp7.731.486 juta pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan dana giro swasta yang menjadi nasabah di Bank Papua. Uraian mengenai pertumbuhan simpanan nasabah dari produk giro, tergambar pada tabel dibawah ini:

C. Customer Deposits Products

The description of the business segment of Third Party Fund product of Bank Papau in 2017 is as follows:

1. ***Current Account Growth***

   This product represents deposits of Third Party Funds withdrawals may be made at any time by check, bilyet current account and other means of payment order in accordance with the stipulated conditions. The growth of savings products in 2017 experienced a growth of 8.62% over the previous year, which amounted to Rp7,118,044 million in 2016 to Rp7,731,486 million in 2017. This is due to an increase in private current account funds that become customers in Bank Papua. Description of the growth of customer deposits from current accounts is illustrated in the table below:

PERTUMBUHAN GIRO BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
CURRENT ACCOUNT GROWTH OF BANK PAPUA IN 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		
						Nominal	%	*Description*
Giro :	**6.951.248**	**7.383.292**	**7,368,549**	**7.118.044**	**7.731.486**	**613.442**	**8,62%**	*Current Account:*
Pihak berelasi	4.193.716	3.934.606	2.614.509	3.010.422	3.295.328	284.906	7,69%	*Related Parties*
Pihak ketiga	2.757.532	3.448.686	4,754,039	4.107.622	4.436.158	328.536	9,63%	*Third party*

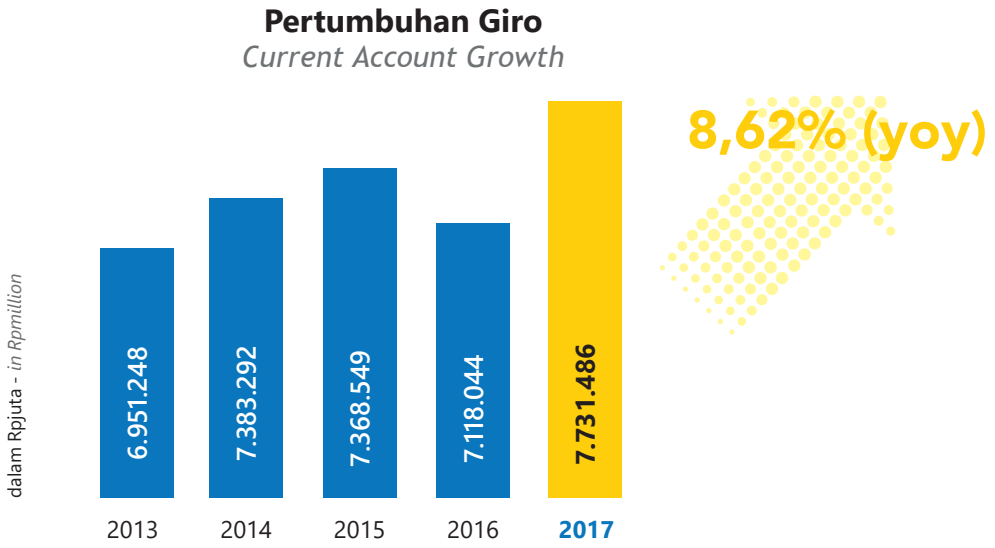

Sebagaimana produk simpanan nasabah, Giro Bank Papua juga memberikan suku bunga yang menarik. Tingkat suku bunga untuk beberapa jenis produk Giro yang berlaku pada tahun 2017 sebagaimana dibawah ini.

As with the customers' deposit products, Bank Papua's current account also provide attractive interest rates. Interest rates for certain types of Current Accounts as of 2017 are as follows.

Suku Bunga Giro Pemerintah Daerah — *Current Account Interest Rate of Local Government*

SUKU BUNGA GIRO PEMERINTAH DAERAH *CURRENT ACCOUNT INTEREST RATE OF LOCAL GOVERNMENT*			
No.	Jenis Giro	Saldo	Suku Bunga
1	Giro Pemda	>Rp100.000.000 - Rp250.000.000	0% - 0,75%
2		>Rp250.000.000 - Rp5.000.000.000	0,75% - 1,25%
3		>Rp5.000.000.000	1,25%

Suku Bunga Giro — *Current Acccount Interest Rate*

SUKU BUNGA GIRO *CURRENT ACCOUNT INTEREST RATE*			
No.	Jenis Giro	Saldo	Suku Bunga
1	Giro Umum	>Rp100.000.000 - Rp250.000.000	0% - 0,50%
2		>Rp250.000.000 - Rp5.000.000.000	0,75% - 1,00%
3		>Rp5.000.000.000	1,00% - 1,25%

2. Pertumbuhan Tabungan

Tabungan merupakan sarana simpanan Dana Pihak Ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, dengan bunga yang menarik dan memberikan fasilitas kemudahan untuk bertransaksi. Pertumbuhan produk tabungan ditahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 24,22% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari Rp5.292.181 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp6.573.996 juta ditahun 2017. Hal ini dikarenakan tepatnya program promosi yang membuat bertambahnya nasabah tabungan.

Uraian mengenai pertumbuhan simpanan nasabah dari produk tabungan, tergambar pada tabel dibawah ini:

2. Savings Growth

Savings are a means of depositing Third Party Funds withdrawals which may be made at any time, with attractive interest and facilitating transactions. The growth of savings products in 2017 increased by 4.48% compared to the previous year, from Rp6,292,181 million in 2016 to Rp6,573,996 million in 2017. This is because precisely the promotional program that makes the increase of savings customers.

The description of the growth of customer deposits from savings products is illustrated in the table below:

PERTUMBUHAN TABUNGAN BANK PAPUA TAHUN 2013 - 2017 (RP.JUTA) *SAVING GROWTH OF BANK PAPUA 2013 - 2017 (RP.MILLION)*								
Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Tabungan	**4.621.902**	**5.324.238**	**5.878.738**	**5.292.181**	**6.573.996**	**281.815**	**4,48%**	***Savings***
Pihak Berelasi	6.656	5.300	8.716	8.206	11.882	**3.676**	44,80%	*Related Parties*
Pihak Ketiga	4.615.246	5.318.938	5.870.022	6.283.975	6.562.114	**278.139**	4,43%	*Third party*

Pertumbuhan Tabungan
Saving Growth

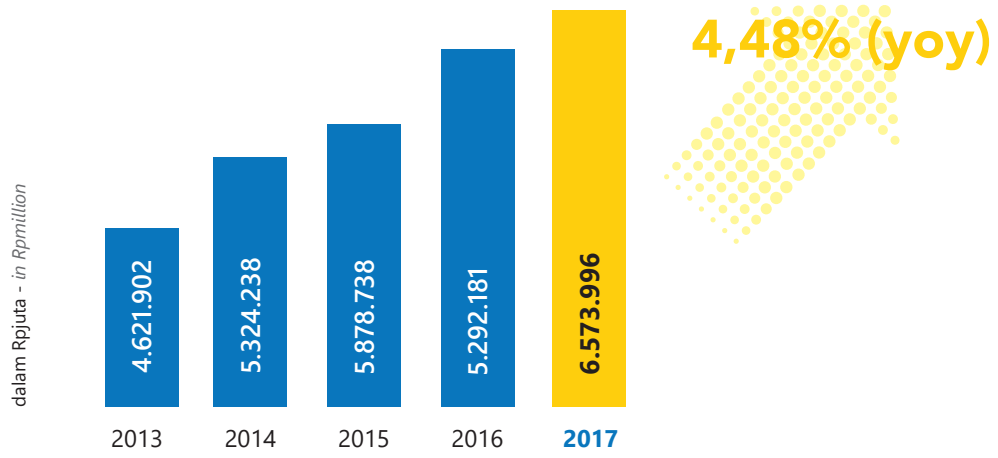

Untuk terus meningkatkan pertumbuhan produk tabungan, Bank Papua memberikan beberapa pilihan simpanan dalam bentuk tabungan antara lain:

a) Tabungan Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah)
   Keuntungan bagi penabungnya, yaitu:
   - Menawarkan bunga menarik.
   - Menawarkan hadiah menarik yang diundi secara nasional sebanyak 2 kali dalam 1 tahun dan regional sebanyak 2 kali dalam 1 tahun.

b) Tabungan Simanja (Simpanan Aman dan Sejahtera)
   Keuntungan bagi penabungnya, yaitu:
   - Menawarkan bunga menarik
   - Menawarkan hadiah menarik yang diundi secara regional sebanyak 2 kali dalam 1 tahun

c) TabunganKu
   Keuntungan bagi penabungnya, yaitu :
   - Mudah persyaratannya dan ringan setorannya
   - Bebas biaya administrasi

d) Simpel
   - Bebas biaya administrasi
   - Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp5.000,-
   - Rekening dan kartu atas nama siswa
     Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) merupakan tabungan untuk siswa yang dipelopori oleh Bapak Presiden Jokowi dalam Program Nawacita dimana tabungan tersebut diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Launching Tabungan Simpanan Pelajar Bank Papua telah dilakukan untuk Wilayah Papua Barat pada tanggal 21 Desember 2016 bertempat di Manokwari dan untuk Wilayah Papua pada tanggal 27 Januari 2017 bertempat di Jayapura. Hingga saat ini pencapaian dana di seluruh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu maupun Kantor Kas selama tahun berjalan telah menunjukan peningkatan. Adapun pencapaian Tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL) masing – masing Kantor Cabang Bank Papua sampai dengan akhir Desember 2017 sebanyak 748 Nasabah dengan total Dana keseluruhan sebesar Rp29.410.494.485,- (dua puluh sembilan milyar empat ratus sepuluh juta tiga empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

Selain keuntungan dari masing-masing pilihan tabungan tersebut diatas, beberapa tabungan dapat juga memberikan berbagai keuntungan lainnya bagi penabungnya, yaitu:

To continue to increase the growth of savings products, Bank Papua provides several savings options in the form of savings, among others:

a) Simpeda Savings (Deposits of Regional Development)

Benefits for savers, namely:
- *Offer attractive interest.*
- *Offer attractive prizes that are drawn nationally twice in 1 year and regional 2 times a year.*

b) Tabungan Simanja (Safe and Prosperous Deposits)
Benefits for savers, namely:
- *Offer attractive interest*
- *Offer attractive prizes drawn regionally twice a year*

c) TabunganKu
Benefits for savers, namely:
- *Easy terms and light deposit*
- *Free administration fee*

d) Simple
- *Free administration fee*
- *Initial opening of minimum account Rp5,000,-*

- *Accounts and cards on behalf of students*
  Simpel Savings Account is a savings account for students pioneered by Mr. President Jokowi in the Nawacita Program where the savings are published nationally by banks in Indonesia with easy and simple requirements and attractive features in order to educate and financial inclusion to encourage saving culture since early stage. Launching Student Savings Bank Papua has been conducted for West Papua Region on 21 December 2016 located in Manokwari and for Papua Region on 27 January 2017 located in Jayapura. Until now, the achievement of funds in all Branch Offices, Sub-Branch Offices and Cash Offices during the year has shown an increase. The achievement of Student Savings (SIMPEL) of each branch office of Bank Papua until the end of December 2017 as many as 748 customers with total Fund of Rp29,410,494,485, - (twenty nine billion four hundred and ten million three four hundred and ninety four thousand four hundred and eighty five rupiah)

In addition to the advantages of each of the above savings options, some savings may also provide other benefits for savers:

- Memberikan kemudahan transaksi seperti penarikan tunai, cek saldo dan transfer dana 24 jam dengan menggunakan Kartu ATM Bank papua
- Fasilitas kartu ATM yang dapat digunakan sebagai kartu debit di *merchant*, yang berlogo PRIMA Debit,
- Memberikan kemudahan dalam transaksi penyetoran tunai 24 jam melalui *Cash Deposit Machine* (CDM).
- Fasilitas SMS Banking.
- Dapat digunakan sebagai jaminan kredit.

- *Provide ease of transactions such as cash withdrawal, balance check and 24 hour funds transfer using Bank Papua ATM card.*
- *ATM card facility that can be used as a debit card in mercha, which has PRIMA Debit logo,*
- *Provides convenience in 24-hour cash deposit transactions via Cash Deposit Machine (CDM).*
- *SMS Banking Facility.*
- *Can be used as a loan guarantee.*

Disamping promosi, Bank Papua memberikan bunga yang menarik untuk masing-masing produk tabungan. Tingkat suku bunga untuk beberapa jenis produk tabungan yang berlaku pada tahun 2017 sebagaimana dibawah ini.

In addition to promotion, Bank Papua provides attractive interest for each savings product. Interest rates for certain types of savings products are valid in 2017 as below.

Suku Bunga Tabungan Simpeda:

Simpeda Savings Interest Rates:

SUKU BUNGA TABUNGAN *INTEREST RATE SAVINGS*			
No.	Jenis Tabungan	Saldo	Suku Bunga
1	Simpeda	< Rp100.000	0%
2		>Rp100.000 -Rp100.000.000	1%
3		>Rp100.000.000 - Rp500.000	1,50%
4		>Rp500.000.000 - Rp1.000.000.000	2,50%
5		>Rp1.000.000.000	3,00%

Suku Bunga Tabungan Simanja, Simanja Jakarta, dan Tabungan KPE.

Simanja Savings Interest Rates, Simanja Jakarta, and KPE Saving.

SUKU BUNGA *INTEREST RATE*			
No.	Jenis Tabungan	Saldo	SukuBunga
1	Simanja, Tabungan KPE, Simanja Jakarta	< Rp100.000	0%
2		>Rp100.000 -Rp100.000.000	1,50%
3		>Rp100.000.000 - Rp500.000	2,00%
4		>Rp500.000.000 - Rp1.000.000.000	3,00%
5		>Rp1.000.000.000	3,50%

Suku Bunga Tabunganku *TabunganKu Interest Rate*

SUKUBUNGA TABUNGAN *SAVINGS INTEREST RATE*			
No.	Jenis Tabungan	Saldo	SukuBunga
1	TabunganKu	< Rp500.000	0%
2		>Rp500.000 -Rp1.000.000	0,25%
3		>Rp1.000.000 - Rp500.000	1,00%

Suku Bunga Simanja Mahasiswa *Simanja Student Interest Rate*

SUKU BUNGA TABUNGAN *SAVINGS INTEREST RATE*			
No.	Jenis Tabungan	Saldo	SukuBunga
1	SimanjaMahasiswa UNIPA	< Rp500.000	0%
2		>Rp500.000 -Rp1.000.000	0,50%
3		>Rp1.000.000 - Rp500.000	1,00%

Suku Bunga Tabungan Pemberdayaan Masyarakat *Community Empowerment Saving Interest Rate*

SUKU BUNGA TABUNGAN *SAVINGS INTEREST RATE*			
No.	Jenis Tabungan	Saldo	SukuBunga
1	Tabungan Pemberdayaan Masyarakat	< Rp500.000	0%
2		>Rp500.000 -Rp1.000.000	0,50%
3		>Rp1.000.000 - Rp500.000	1,00%

3. Pertumbuhan Deposito

Produk ini merupakan simpanan Dana Pihak Ketiga yang penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dan diperuntukkan bagi perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum. Pertumbuhan produk Deposito ditahun 2017 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -25,61% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp3.159.254 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp2.350.092 juta pada tahun 2017.

3. Time Deposit Growth

This product constitutes deposits of Third Party Funds withdrawal based on certain periods agreed upon and intended for individuals and business entities in the form of legal entities. Deposit product growth in 2017 experienced a negative growth of -25.61% compared to the previous year, which amounted to Rp3,159,254 million in 2016 to Rp2,350,092 million in 2017.

Uraian mengenai pertumbuhan simpanan nasabah dari produk deposito, tergambar pada tabel dibawah ini:

The description of the growth of customer deposits from time deposit products is illustrated in the table below:

PERTUMBUHAN DEPOSITO BANK PAPUA TAHUN 2013 - 2017 (RPJUTA) *PAPUA BANK DEPOSIT GROWTH IN 2013 - 2017 (RPJUTA)*								
Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Deposito Berjangka	**1.896.016**	**3.969.854**	**2.659.077**	**3.159.254**	**2.350.092**	**(809.162)**	**-25,61%**	*Time deposit*
Pihak Berelasi	1.199.792	1.797.779	1.206.460	1.585.233	1.358.563	**(226.670)**	-14,30%	*Related Parties*
Pihak Ketiga	696.224	2.168.075	1.452.617	1.574.021	991.529	**(582.492)**	-37,01%	*Third party*

Pertumbuhan Deposito
Time Deposit Growth

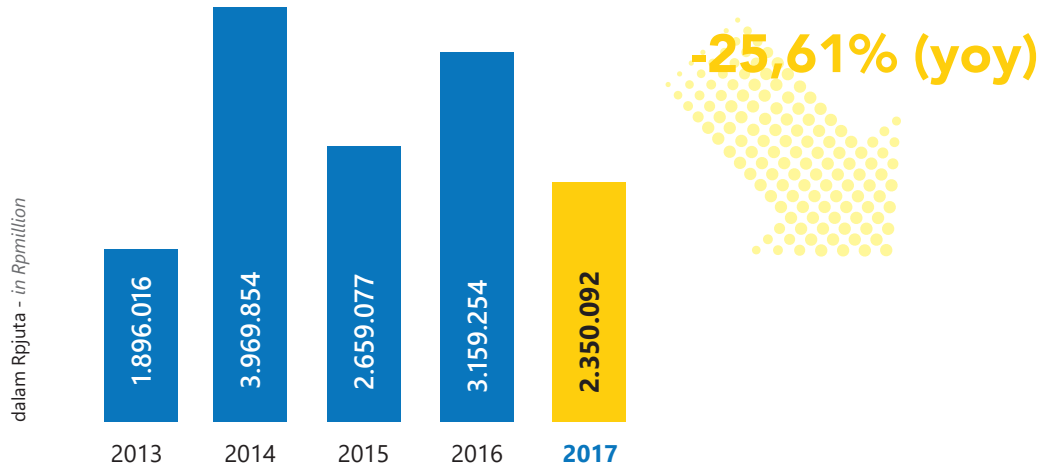

Untuk meningkatkan pertumbuhan dana simpanan nasabah dari produk deposito, Bank Papua menawarkan beberapa pilihan Deposito sesuai jangka waktunya dengan suku bunga bersaing, dapat diperpanjang secara otomatis sesuai konfirmasi awal. Keunggulan Deposito Berjangka dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit. Tingkat suku bunga untuk beberapa jenis produk Deposito yang berlaku pada tahun 2017 sebagaimana dibawah ini.

To increase the growth of deposit funds from deposit products, Bank Papua offers several options of time deposits with competitive interest rates, automatically renewable according to initial confirmation. The advantages of Time Deposits can be used as loan guarantees. Interest rates for certain types of products Deposits applicable in 2017 as below.

Suku Bunga Deposito Rp5 juta s/d Rp100 juta.

Time Deposit Interest Rate Rp5 million to Rp100 million.

SUKU BUNGA DEPOSITO *TIME DEPOSIT INTEREST RATE*			
No.	Jangka Waktu	Saldo	Suku Bunga
1	1 bulan	5 juta s/d 100 juta	5,00%
2	3 bulan	5 juta s/d 100 juta	5,25%
3	6 bulan	5 juta s/d 100 juta	5,75%
4	12 bulan	5 juta s/d 100 juta	6,00%

Suku Bunga Deposito Rp100 juta s/d Rp250 juta.

Time Deposit Interest Rate Rp100 million to Rp250 million.

SUKU BUNGA DEPOSITO *TIME DEPOSIT INTEREST RATE*			
No.	Jangka Waktu	Saldo	Suku Bunga
1	1 bulan	> 100 juta s/d 250 juta	5,05%
2	3 bulan	> 100 juta s/d 250 juta	5,30%
3	6 bulan	> 100 juta s/d 250 juta	5,80%
4	12 bulan	> 100 juta s/d 250 juta	6,05%

Suku Bunga Deposito Rp250 juta s/d Rp500 juta *Time Deposit Interest Rate Rp250 million to Rp500 million*

SUKU BUNGA DEPOSITO *TIME DEPOSIT INTEREST RATE*			
No.	Jangka Waktu	Saldo	Suku Bunga
1	1 bulan	> 250 juta s/d 500 juta	5,10%
2	3 bulan	> 250 juta s/d 500 juta	5,35%
3	6 bulan	> 250 juta s/d 500 juta	5,85%
4	12 bulan	> 250 juta s/d 500 juta	6,10%

Suku Bunga Deposito Rp500 juta s/d Rp1 M *Time Deposit Interest Rate Rp500 million to Rp1 billion*

SUKU BUNGA DEPOSITO *TIME DEPOSIT INTEREST RATE*			
No,	Jangka Waktu	Saldo	Suku Bunga
1	1 bulan	> 500 juta s/d 1 M	5,15%
2	3 bulan	> 500 juta s/d 1 M	5,40%
3	6 bulan	> 500 juta s/d 1 M	5,90%
4	12 bulan	> 500 juta s/d 1 M	6,15%

Suku Bunga Deposito > Rp1 M *Time Deposit Interest Rate> Rp1 billion*

SUKU BUNGA DEPOSITO *TIME DEPOSIT INTEREST RATE*			
No,	Jangka Waktu	Saldo	Suku Bunga
1	1 bulan	> 1 M	5,25%
2	3 bulan	> 1 M	5,50%
3	6 bulan	> 1 M	6,00%
4	12 bulan	> 1 M	6,25%

D. Unit Layanan Pihak Ketiga

Sebagai lembaga keuangan, Bank Papua juga dipercaya oleh beberapa instansi dan lembaga baik Pemerintah maupun non Pemerintah untuk turut serta dalam berbagai program pengelolaan dana bagi masyarakat. Realisasi program kerja sama tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

   Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan Program Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua melaksanakan program tersebut dan diberikan kepada siswa/siswi yang dikelola oleh sekolah yang berfungsi sebagai biaya untuk wajib belajar dua belas tahun baik Sekolah Negeri maupun sekolah Swasta (tingkat SD/SMP/SMA/SMK). Pemerintah Daerah Papua telah mempercayakan PT.Bank Pembangunan Daerah Papua untuk menyalurkan/ mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama di 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten di Provinsi Papua.

   Berdasarkan hasil koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Utama Jayapura bahwa penyaluran dan BOS yang selama ini telah dilaksanakan sejak tahun 2009 s/d 2016 untuk tingkat SD dan SMP telah berjalan sesuai dengan prosedur perbankan namun masih terdapat beberapa kendala yaitu penyampaian data nomor rekening yang salah dari kepala sekolah dan penggantian kepala sekolah tidak disampaikan untuk nomor rekening sekolah kepada pejabat baru sehingga penyaluran tidak sampai ke pihak sekolah sebagaimana laporan realisasi dana BOS dari kantor cabang utama.

   Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) sebelumnya disalurkan melalui bank lain sehingga penyalurannya menggunakan fasilitas transfer, maka dengan itu Divisi Pemasaran melakukan pendekatan dan komunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua untuk penyaluran dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) dialihkan ke Bank Papua.

D. Third Party Service Units

As a financial institution, Bank Papua is also trusted by several agencies and institutions both Government and non-Government to participate in various fund management programs for the community. The realization of the cooperation program is as follows.

1. ***School Operational Assistance Fund (BOS)***

   School Operational Assistance Fund (BOS) is the Government of the Republic of Indonesia Program in this case the Ministry of Education and Culture where the Department of Education and Culture of Papua Province implement the program and given to students / schoolgirls managed by the school that serves as a fee for compulsory education twelve years Both public and private schools (primary / junior / senior high / vocational school level). Local Government of Papua has entrusted PT.Bank Pembangunan Daerah Papua to channel / allocate School Operational Assistance Fund (BOS) for elementary and junior secondary education unit in 29 (twenty nine) regencies / province of Papua.

   Based on the results of coordination between the Department of Education and Culture of Papua Province with PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Main Branch Office of Jayapura that the distribution and BOS which has been implemented since 2009 to 2016 for elementary and junior high school level has been running in accordance with banking procedures but there are still some obstacles that is submitting data wrong account number from the principal and the replacement of the principal is not submitted for the school account number to the new official so that the distribution does not reach the school as the BOS funds realization report from the main branch office.

   Distribution of School Operational Fund (BOS) funds for senior high and vocational high schools (SMA/ SMK) previously distributed through other banks so that the distribution using the transfer facility, with the Marketing Division to approach and communication with the Department of Education and Culture of Papua Province for the distribution of School Operational Assistance Fund (BOS) are transferred to Bank Papua.

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua telah melakukan Penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua No. 900/554 dan No. 23/PKS-BPD/IV/2016 tanggal 17 Mei 2016 bertempat di Ruang Kasuari Lt. 4 Gedung Kantor Pusat tentang Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Periode 2017 s/d 2021.

Realisasi Penyaluran Dana Bos APBN Tahun 2017 untuk 29 Kabupaten / Provinsi Papua sebagai berikut:

a) Dana BOS (SD /SMP)
   - Semester I tanggal 02 Maret 2017 Rp222.846.000.000,-
   - Semester II tanggal 02 september Rp234.535.900.000,-
   - Kurang Salur Semester I dan II (SD / SMP) Tanggal 28 Desember 2017 Rp14.454.400.000,-

b) Dana BOS SMK
   - Triwulan I tanggal 05 April 2017 Rp6.618.150.000,-
   - Triwulan II tanggal 22 Juni 2017 Rp8.273.850.000,-
   - Triwulan III tanggal 13 Oktober 2017 Rp7.956.550,-

c) Dana BOS SMA masih disalurkan melalui Bank Lain
   - Triwulan I tanggal 06 April 2017 Rp17.685.150.000,-
   - Triwulan II tanggal 22 Juni 2017 Rp18.427.850.000,-
   - Triwulan III tanggal 13 Oktober 2017 Rp20.141.100.000,-

2. Pengelolaan Dana Lembaga Pengembangan Masyarakat Amugme dan Komoro (LPMAK)

Lembaga Pengembangan Masyarakat Amugme dan Komoro (LPMAK) merupakan lembaga nirlaba yang mempunyai tujuan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup dan Sumber Daya Manusia serta kesejahteraan sosial ekonomi dari masyarakat melalui program pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi serta untuk mendukung kegiatan program yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi keagamaan masyarakat suku amugme dan komoro.

PT. Bank Bank Pembangunan Daerah Papua telah melakukan kerjasama dengan LPMAK dalam Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan (Pemberantasan Malaria), dan Fasilitas Rekening Online dengan menempatkan dana pada rekening Deposito Bank

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua has signed a cooperation agreement with the Department of Education and Culture of Papua Province No. 900/554 and No. 23 / PKS-BPD / IV / 2016 dated May 17, 2016 held at Ruang Kasuari 4th fl. Headquarters Building on School Fund Operational Assistance (BOS) for the period of 2017 to 2021.

Actual Distribution of BOS Funds of APBN Year 2017 for 29 Regencies / Province of Papua as follows:

a) BOS Fund of Elementary & Junior High
   - *1st Semester dated March 02, 2017 Rp222,846,000,000, -*
   - *2nd Semester dated 02 September Rp234,535,900,000, -*
   - *Less distribution for 1st and 2nd Semester (SD / SMP) Date 28 December 2017 Rp14,454,400,000, -*

b) BOS Fund of Vocational School
   - *1st Quarter dated 05 April 2017 Rp6,618,150,000,-*
   - *2nd Quarter on June 22, 2017 Rp8,273,850,000,-*
   - *3rd Quarter on 13 October 2017 Rp7,956,550,-*

c) BOS Fund of Senior High are still distributed through Other Banks
   - *1st Quarter dated April 6, 2017 Rp17,685,150,000,-*
   - *2nd Quarter on June 22, 2017 Rp18,427,850,000,-*
   - *3rd Quarter of 13 October 2017 Rp20,141,100,000, -*

2. The Management of Amugme and Komoro Community Development Fund (LPMAK)

The Amugme and Komoro Community Development Institute (LPMAK) is a non-profit organization that aims to help improve the quality of life and human resources and socio-economic welfare of the community through development programs in education, health and economic development and to support program activities implemented by religious organizations of tribal communities amugme and komoro.

PT. Bank Pembangunan Daerah Papuahas collaborated with LPMAK in the Education Sector, Health Sector (Malaria Eradication) and Online Account Facility by placing funds in Bank Papua Deposit account of Rp150,000,000,000,- (one hundred

Papua sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar) dan telah melakukan pencairan pada tanggal 14 November 2016 sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) untuk memenuhi kesulitan *likuiditas* LPMAK dan sisanya Rp100.000.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2017.

and fifty billion) and has made the disbursement on November 14, 2016 amounting to Rp50,000,000,000 (fifty billion rupiahs) to meet LPMAK's liquidity difficulties and the remaining Rp100,000,000,000, - is due on December 29, 2017.

Adapun penempatan dana operasional LPMAK posisi per 30 Desember 2017 antara lain :

- Kolekte LPMAK nomor rek. KC Timika 104.0201.10677.1 pengendapan dana sebesar Rp38.116.057;
- LPMAK nomor rek. KC Timika 104.0201.10780.4 pengendapan dana Rp22.761.454.830;
- LPMAK - Radio Publik Mimika nomor rek. KC Timika 104.0201.20412.3 pengendapan dana sebesar Rp210.151.029;
- Pelatihan Kel Ekonomi LPMAK nomor rekening 104.0202.16276.3 pengendapan dana sebesar Rp2.775.487.054;
- Listrik dan Telepon LPMAK nomor rek. KC Timika 104.0202.26287.3 pengendapan dana sebesar Rp235.574.216;
- Pengembangan Eko. Kamoro Pantai nomor rek. KC Timika 104.0201.10579.1 pengendapan dana sebesar Rp1.556.044.745;

The placement of LPMAK operational fund position as per December 30, 2017, among others:

- *Kolekte LPMAK acc,number, KC Timika 104.0201.10677.1 deposition of funds of Rp38,116,057;*
- *LPMAK acc, number KC Timika 104.0201.10780.4 Deposition of funds Rp22,761,454,830;*
- *LPMAK - Mimika Public Radio acc, number KC Timika 104.0201.20412.3 deposition funds of Rp210,151,029;*
- *LPMAK Economic Field Training acc, number 104.0202.16276.3 deposition funds of Rp2,775,487,054;*
- *Electricity and Phone LPMAK number acc, number KC Timika 104.0202.26287.3 deposition funds of Rp235,574,216;*
- *Development of eco, Kamoro Beach acc, number KC Timika 104.0201.10579.1 deposition of funds amounting to Rp1,556,044,745;*

3. Kerjasama Dengan Universitas Cenderawasih (UNCEN)

Universitas Cenderawasih telah bekerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dalam penerimaan pembayaran Uang SPP bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan(FKIP) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Saat ini Universitas Cenderawasih hanya memiliki rekening yang dipergunakan sebagai tempat penampungan pembayaran Uang SPP dan pada waktu tertentu rekening tersebut akan dilakukan overbooking (pemindahbukuan) kepada Kas Negara di Bank Lain sebagai laporan atas hasil penerimaan SPP Universitas Cenderawasih. Perlu adanya intensitas hubungan kedua belah pihak dalam hal ini PT.Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Universitas Cenderawasih terkait Penempatan dana-dana pendidikan dan beasiswa agar dipindahkan ke Bank Papua guna bersinergi dalam mengoptimalkan pelayanan fasilitas perbankan dan untuk peningkatan Bisnis Bank Papua.

3. Cooperation With Cenderawasih University (UNCEN)

Cenderawasih University has cooperated with PT. Bank Pembangunan Daerah Papua in the receipt of the payment of SPP money for Students Faculty of Economics, Faculty of Teacher Training and Education (FKIP) and Faculty of Social and Political Sciences (FISIP). Currently Cenderawasih University only has an account that is used as a shelter for payment of Tuition Money and at a certain time the account will be overbooking to the State Treasury at another Bank as a report on the results of acceptance of SPP Cendrawasih University. It is necessary to intensify the relationship of both parties in this case PT.Bank Pembangunan Daerah Papua with Cenderawasih University related Placement of education funds and scholarships to be transferred to Bank Papua to synergize in optimizing banking facilities services and to improve business bank papua.

4. Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua terpilih sebagai penyalur dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Optimalnya penyerahan dana BSPS kepada yang berhak dengan tepat jumlah, tepat waktu, serta tetap sasaran. Total Jumlah Rekening Penerima BSPS untuk tahun 2017 untuk 7 kabupaten per 31 Oktober 2017 adalah 2.000 orang penerima manfaat BSPS dan Total dana sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar).

4. Distribution of Self-Help Housing Stimulant Fund (BSPS)

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua is selected as the channel of the Self-Help Housing Stimulant Fund (BSPS), optimally delivering the BSPS funds to the eligible to the right amount, on time, and on target. Total Number of BSPS Recipient Accounts for 2017 for 7 regencies as of 31 October 2017 is 2,000 beneficiaries of BSPS and Total funds of Rp30,000,000,000, - (thirty billion).

5. Penyaluran Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua terpilih sebagai penyalur dana Program Indonesia Pintar (PIP), Optimalnya penyerahan dana PIP kepada yang berhak dengan tepat jumlah, tepat waktu, serta tetap sasaran dalam rangka mendukung Program Indonesia Pintar (PIP), Kementrian Agama Republik Indonesia Kantor wilayah Provinsi Papua Barat dalam Bidang Pendidikan Islam dan Pendidikan Kristen. Dan untuk penyaluran wilayah Papua dalam Bidang Pendidikan Agama Kristen.

- Total Jumlah Rekening Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2017 Provinsi Papua untuk 14 Kabupaten adalah 747 Orang penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) dan Total dana tersalurkan sebesar Rp747.000.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta)
- Total Jumlah Rekening Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2017 Provinsi Papua Barat untuk 6 Kabupaten adalah 732 Orang penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) dan Total dana tersalurkan sebesar Rp466.600.000,- (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)

5. Distribution of Program Indonesia Pintar Assistance Fund (PIP)

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua is selected as the channel of the PIP (Indonesia Pintar) Program funds, optimally delivering PIP funds to the rightful, timely, and targeted beneficiaries in support of the Program Indonesia Pintar (PIP), Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia West in the field of Islamic Education and Christian Education. And for the distribution of Papua in the field of Christian Religious Education.

- *Total Number of Accounts Receiving Program Indonesia Pintar (PIP) 2017 Papua Province for 14 regencies is 747 beneficiaries of Program Indonesia Pintar (PIP) and Total funds channeled Rp747,000,000; (seven hundred forty seven million)*
- *Total Number of Accounts Receiving Program Indonesia Pintar (PIP) in 2017 West Papua Province for 6 regencies is 732 beneficiaries of Program Indonesia Pintar (PIP) and Total funds channeled Rp466,600,000; (four hundred sixty six million six hundred thousand rupiah)*

6. Implementasi Sistem Pembayaran Uang Sekolah (SPP) Papua National Plus School (PNPS)

Implementasi Sistem Pembayaran Uang Sekolah (SPP) Papua National Plus School (PNPS) melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Sekolah Satu Atap PNPS merupakan sekolah swasta yang sangat bergengsi mulai dari tingkat Play Group, Level (TK), sekolah dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimana siswa/i sebanyak 350 pelajar dengan mempunyai kewajiban pembayaran SPP dan pembayaran operasional lainnya sesuai rincian sebagai berikut :

- Total SPP Play group per siswa/i Rp36.650.000,-.
- Total SPP TK per siswa/i Rp36.850.000,-.
- Total SPP SD per siswa/i Rp50.270.000,-.
- Total SPP SMP per siswa/i Rp51.890.000,-.

6. Implementation of Tuition Payments System (SPP) Papua National Plus School (PNPS)

Implementation of Tuition Fees (SPP) Papua National Plus School (PNPS) through PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. One Roof School PNPS is a very prestigious private school starting from the level of Play Group, Kindergarten Level (TK), elementary school, and junior high school where 350 students have the obligation to pay tuition fee and other operational payments according to the following details :

- *Total SPP Play group per student Rp36.65 million,-.*
- *Total SPP TK per student Rp36,850,000,-.*
- *Total SPP SD per student Rp50,270,000,-.*
- *Total SPP SMP per student Rp51,890,000,-.*

SEGMEN KREDIT

Tahun 2017 merupakan tahun pengetatan ikat pinggang, hal ini merupakan dampak dari ekonomi global yang dihadapi Indonesia termasuk perbankan di Indonesia. Dampak ini mengakibatkan pertumbuhan kredit perbankan nasional berjalan lambat bahkan tidak mengalami pertumbuhan, seperti yang dialami Bank Papua. Kredit Bank Papua mengalami pertumbuhan negatif sebesar 6,61% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp14.209.840 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp13.270.908 juta pada tahun 2017. Pertumbuhan negatif ini dikarenakan sangat selektifnya bank dalam melakukan ekspansi kredit selama tahun 2017.

LOAN SEGMENT

The year 2017 is the year of belt tightening, this is the impact of the global economy faced by Indonesia, including banking in Indonesia. This impact has resulted in the slow growth of national bank lending and even no growth, as experienced by Bank Papua. Bank Papua's loan experienced negative growth of -6.61% compared to the previous year, which amounted to Rp14,209,840 million in 2016 to Rp13,270,908 million in 2017. This negative growth is due to the very selective of banks in expanding loan during 2017.

Pertumbuhan kredit Bank Papua dari tahun 2013 sampai dengan 2017 tergambar pada tabel dibawah ini:

Bank Papua's loan growth from 2013 to 2017 is illustrated in the table below:

PERTUMBUHAN KREDIT KONSOLIDASI BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
CONSOLIDATED OF BANK PAPUA LENDING IN 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth	%	*Description*
Penyaluran Kredit	11.378.388	13.359.444	13.207.177	14.209.840	13.270.908	(938.932)	-6,61%	*Lending*

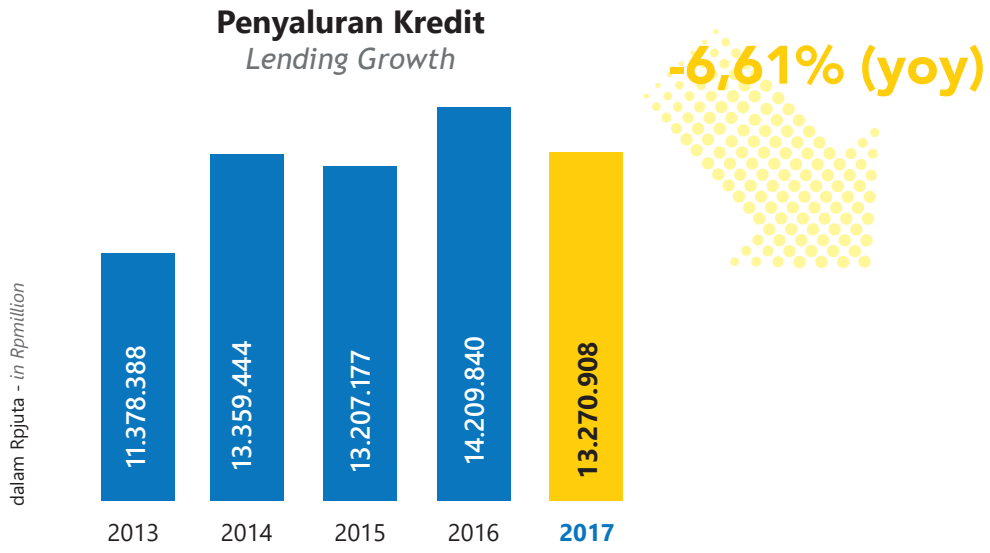

Dengan rincian penyaluran kredit persegmennya sebagai berikut:

The details of its loan are as follows:

PERTUMBUHAN KREDIT BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
PAPUA BANK LOAN GROWTH IN 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Kredit Modal Kerja	3.760.640	4.671.957	4.407.834	4.940.757	3.743.441	(1.197.316)	-24,23%	*Work Cap. Loan*
Kredit Investasi	1.847.837	2.328.051	2.120.633	2.079.797	1.754.950	(324.848)	-15,62%	*Investment Loan*
Kredit Konsumsi	3.764.981	4.279.259	4.968.285	5.764.436	6.397.129	632.693	10,98%	*Consumer Loan*
Kredit Sindikasi	1.519.082	1.567.009	1.313.105	1.079.631	1.040.839	(38.792)	-3,59%	*Syndication Loan*
Kredit Karyawan	278.700	285.559	278.974	303.818	319.095	15.277	5,03%	*Employees Loan*
Kredit Program Pemerintah	207.148	227.609	118.346	41.401	15.456	(25.946)	-62,67%	*Government Program Loan*
TOTAL	**11.378.388**	**13.359.444**	**13.207.177**	**14.209.840**	**13.270.908**	**(938.932)**	**-6,61%**	**TOTAL**

Berbagai upaya telah dilakukan Bank Papua untuk meningkatkan ekspansi kredit di tahun 2017, meskipun letak geografis Provinsi Papua dan Papua Barat yang penuh tantangan, dimana transportasi masih banyak yang menggunakan pesawat terbang menyebabkan supervisi kredit menjadi kurang efektif karena biaya yang terlalu tinggi.

Various efforts have been made by Bank Papua to increase loan expansion in 2017, despite the challenging geographical position of Papua and West Papua Province, where transportation is still plentiful using airplanes causing loan supervision to be less effective due to exorbitant costs.

Meskipun demikian, Bank Papua tetap berupaya mengembangkan jaringan kantor diantaranya membuka beberapa kantor di sentra-sentra ekonomi, baik diwilayah Papua maupun diluar Papua, sehingga dapat menyalurkan kredit modal kerja dan investasi pada sektor UMKM sebagai salah satu misi bank dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Nevertheless, Bank Papua strives to expand its office network by opening several offices in economic centers, both in Papua and outside Papua, so as to channel working capital loan and investment in the MSME sector as one of the bank's mission in order to encourage regional economic growth.

Kredit Produktif dan Konsumtif

Dengan semangat Transformasi BPD, Bank Papua tetap pertumbuhan kredit produktifnya. Komposisi kredit yang disalurkan oleh Bank Papua mencapai 49% - 51%, antara kredit produktif dan konsumtif. Berdasarkan skim kredit, maka pengelompokkan kredit produktif diantaranya adalah kredit modal kerja, kredit investasi, kredit sindikasi, kredit program pemerintah. Sedangkan pengelompokkan kredit konsumtif diantaranya kredit konsumsi dan kredit karyawan.

Productive and Consumer Loan

With the spirit of BPD Transformation, Bank Papua keeps its performing loan growth. The composition of lending by Bank Papua reaches 49% - 51%, between productive and consumer loans. Under the loan scheme, the grouping of productive loans includes working capital loans, investment loans, syndicated loans, government loan programs. While grouping consumer loan include consumer loan and employee loan.

Hingga akhir Desember 2017, komposisi total penyaluran kredit produktif sebesar Rp6.554.685 juta atau sebesar 49% dibandingkan penyaluran kredit konsumtif. Adapun sektor produktif yang dipetakan tumbuh yaitu usaha mikro kecil menengah dan korporasi. Sedangkan kredit konsumtif Bank Papua adalah sebesar Rp6.716.223 juta atau sebesar 51% dibandingkan fortopolio penyaluran kredit keseluruhan di tahun 2017 yakni sebesar Rp13.270.908 juta. Penurunan komposisi kredit ini dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan adanya kebijakan manajemen untuk menggarap segmen konsumsi yang telah menjadi captive market Bank Pembangunan Daerah. Segmen ini dipandang lebih aman untuk terhindar dari kredit macet. Pertumbuhan kredit sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

By the end of December 2017, the total composition of earning loans amounted to Rp6,554,685 million or 49% compared to consumer loan. The mapped productive sectors are small and medium enterprises and corporations. Consumer financing of Bank Papua was Rp6,716,223 million or 51% compared to the total loan portfolio in 2017 of Rp13,270,908 million. This decline in loan composition compared to the previous year, due to the management policy to work on the consumption segment that has become the captive market of Regional Development Bank. This segment is considered safer to avoid bad loan. Loan growth as illustrated in the table below.

PERBANDINGAN KOMPOSISI KREDIT BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
COMPARISON OF LOAN COMPOSITION OF BANK PAPUA IN 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013		2014		2015		2016		2017		Growth	
	Realisasi	Komposisi	Realisasi	Komposisi	Realisasi	Komposisi	Realisasi	Komposisi	Realisasi	Komposisi	Nominal	%
Produktif / *Productive*	7.334.707	64%	8.794.626	66%	7.959.918	60%	8.141.586	57%	6.554.685	49%	(1.586.901)	-24,21%
Konsumtif / *Consumptive*	4.043.681	36%	4.564.818	34%	5.247.259	40%	6.068.254	43%	6.716.223	51%	647.970	9,65%
Total	**11.378.388**	**100%**	**13.359.444**	**100%**	**13.207.177**	**100%**	**14.209.840**	**100%**	**13.270.908**	**100%**	**(938.932)**	**-7,08%**

Meskipun demikian Bank Papua tetap berupaya untuk meningkatkan kredit produktif pada segmen kredit UMKM . Melalui Divisi Pengembangan Ekonomi Rakyat, beberapa program kerja telah dilakukan selama tahun 2017 diantaranya adalah :

1. Meningkatkan Jumlah Penyaluran Kredit UMK, baik Kredit Program maupun kredit Non Program hingga mencapai minimal 20% dari total kredit Bank Papua dengan tingkat NPL yang terkendali guna mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas penyaluran kredit produktif dalam rangka peningkatan pendapatan operasional Bank Papua.
3. Melakukan monitoring aktif dan pasif Kredit *Non Performing* terhadap kredit UMK seluruh cabang.
4. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* berupa pelatihan maupun mempertemukan UMK binaan dengan akses pasar.
5. Peningkatan Kompetensi Pejabat dan staf dibidang perkreditan.
6. Melakukan review atas ketentuan produk kredit.
7. Kerja sama dengan lembaga Asuransi dan Pertanggungan Kredit.

Kredit Modal Kerja

Untuk segmen kredit modal kerja, Bank Papua memilki beberapa produk yang terdiri dari beberapa skim kredit. Pada segmen kredit modal kerja Bank Papua mengalami pertumbuhan positif sebesar 24,23% yakni dari Rp4.940.757 juta ditahun 2016 menjadi Rp3.743.441 juta di tahun 2017. Pertumbuhan negatif pada segmen kredit modal kerja Bank Papua karena kebijakan manajemen untuk membatasi kredit modal kerja skala besar yang rentan terhadap kredit macet pada tahun 2017. Pertumbuhan segmen kredit modal kerja tergambar pada tabel dibawah ini.

Nevertheless, Bank Papua strives to increase productive loan in the segment of MSME loan. Through the People's Economic Development Division, several work programs have been done during 2017 including:

1. *Increasing the amount of MSM loan distribution, both Program Loan and Non-Program Loan up to a minimum of 20% of the total loan of Bank Papua with a controlled NPL level to encourage the development of the people's economy.*
2. *Increasing the number and quality of productive loan distribution in order to increase the operational income of Bank Papua.*
3. *Conducting active and passive monitoring of Non-Performing Loans to all branch loan of UMK.*
4. *Corporate Social Responilibity implementation in the form of training and reconcile the built-in MSE with market access.*
5. *Increasing Competence Officials and staff in the field of loan.*
6. *Reviewing the terms of loan products.*
7. *Cooperation with Insurance and Loan Insurance Institution.*

Working Capital Loan

For the working capital loan segment, Bank Papua has several products consisting of several loan schemes. In the working capital loan segment, Bank Papua experienced a positive growth of -24.23% from Rp4,940,757 million in 2016 to Rp3,743,441 million in 2017. Negative growth in the working capital loan segment of Bank Papua due to management policy to limit the large working capital loan vulnerable to non-productive loans by 2017. The growth of working capital loan segment is illustrated in the table below.

PERTUMBUHAN KREDIT MODAL KERJA BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
WORKING CAPITAL LOAN GROWTH OF BANK PAPUA IN 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth	%	*Description*
Kredit Modal Kerja	3.760.640	4.671.957	4.407.834	4.940.757	3.743.441	(1.197.316)	-24,23%	*Working Capital Loan*

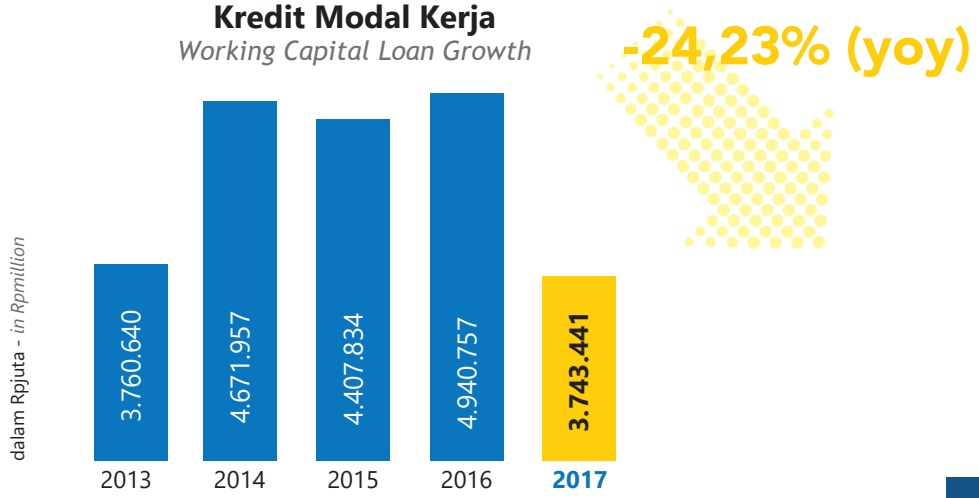

Meskipun membatasi penyaluran kredit segmen modal kerja untuk perusahaan besar, namun pada tahun 2017, Bank Papua tetap kembali melaksanakan program utama penyaluran kredit segmen modal kerja bagi skim Kredit Mikro dan Kecil yakni "Program 1000 Wirausaha Asli Papua". Tujuan dari program ini adalah penguatan Sumber Daya Manusia khusus orang asli Papua dalam rangka membentuk pola pikir dan kemandirian menciptakan usaha-usaha baru dan mengembangkan usaha yang sudah ada dalam usaha mewujudkan pertumbuhan ekonomi di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan peningkatan taraf hidup penduduk. Disamping itu melalui program ini dapat menciptakan pioneer sebagai kader yang dapat menjadi motivator, trainer, wirausahawan yang menjadi sumber inspirasi di sekitarnya dan menjadi perpanjangan tangan Bank Papua untuk bersama membangun perekonomian di Kota/Kabupaten yang ada di Tanah Papua. Untuk program ini Bank Papua telah melakukan pembinaan diantaranya:

- Sebanyak 136 orang (3 Batch) Wira Usaha yang dilatih dalam program 1000 Wirausaha Asli Papua.
- Sebanyak 778 orang yang telah dibina sebagai peserta pelatihan.

Selain itu, Bank Papua juga mendesign sebuah skim kredit yang mengadopsi pola Grameen Bank dengan melibatkan ibu rumah tangga. Skim ini dinamai Kredit PUM Mama-Mama (Pola Grameen).

Kredit Investasi

Untuk segmen kredit investasi, Bank Papua memilki beberapa produk yang terdiri dari beberapa skim kredit. Pada segmen kredit investasi, Bank Papua mengalami pertumbuhan negatif sebesar -15,62% dari total kredit sebesar Rp2.079.797 juta ditahun 2016 menjadi Rp1.754.950 juta di tahun 2017, sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

Despite restricting the loan portfolio of working capital to large companies, in 2017, Bank Papua continues to re-implement the main program of working capital segment loan for the Micro and Small Loan scheme, namely "1000 Indigenous Papuan Entrepreneurs Program". The objective of this program is to strengthen the special human resources of the indigenous Papuans in order to shape the mindset and independence to create new businesses and develop existing businesses in the effort to realize economic growth in the regions, create jobs, and improve the lives of the population. Besides, through this program can create a pioneer as a cadre that can be a motivator, trainer, entrepreneur who became the source of inspiration around it and become an extension of Bank Papua to jointly build the economy in the City / District in Tanah Papua. For this program Bank Papua has conducted coaching among others:

- *A total of 136 people (3 Batches) of Entrepreneurs trained in the original 1000 Papuan Entrepreneurs program.*
- *A total of 778 people who have been trained as trainees.*

In addition, Bank Papua also designed a loan scheme that adopted the Grameen Bank pattern by involving housewives. This scheme is named PUM Mama-Mama Loan (Grameen Pattern).

Investment Loan

For the investment loan segment, Bank Papua has several products consisting of several loan schemes. In the investment loan segment, Bank Papua experienced a negative growth of -15.62% of total loans of Rp2,079,797 million in 2016 to Rp1,754,950 million in 2017, as illustrated in the table below.

PERTUMBUHAN KREDIT INVESTASI BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
INVESTMENT LOAN GROWTH OF BANK PAPUA IN 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth	%	*Description*
Kredit Investasi	1.847.837	2.328.051	2.120.633	2.079.797	1.754.950	(324.848)	-15,62%	*Investment Loan*

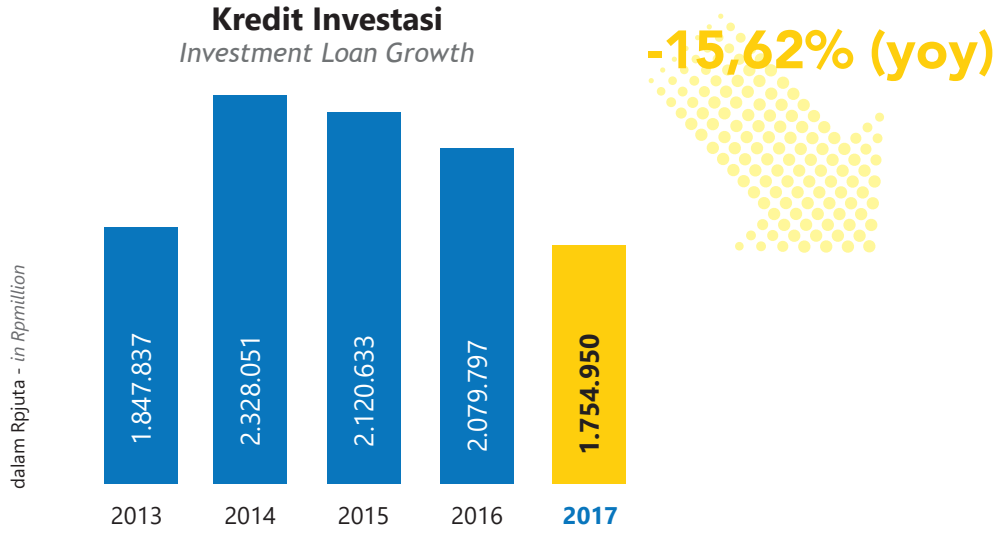

Pertumbuhan negatif pada segmen kredit investasi Bank Papua dikarenakan kebijakan manajemen untuk membatasi penyaluran kredit investasi disektor perusahaan swasta besar akibat dari tingginya NPL dan kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk bisnis skala industri dan pabrikan.

Negative growth in the investment loan segment of Bank Papua is due to management policy to limit investment lending in large private sector sectors resulting from high NPLs and a lack of competent Human Resources for industrial and manufacturing businesses.

Kredit Konsumsi

Untuk segmen kredit konsumsi, Bank Papua memilki beberapa produk yang terdiri dari beberapa skim kredit. Pada segmen kredit konsumsi, Bank Papua mengalami pertumbuhan positif sebesar 10,98% dari total Rp5.764.436 juta ditahun 2016 menjadi Rp 6.397.129 juta di tahun 2017, sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

Consumer Loan

For the consumer loan segment, Bank Papua has several products consisting of several loan schemes. In the consumer loan segment, Bank Papua experienced a positive growth of 10.98% from total Rp5.764.436 million in 2016 to Rp6,397,129 million in 2017, as illustrated in the table below.

PERTUMBUHAN KREDIT KONSUMER BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
CONSUMER LOAN GROWTH OF BANK PAPUA IN 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth	%	*Description*
Kredit Konsumsi	3.764.981	4.279.259	4.968.285	5.764.436	6.397.128	632.129	10,98%	*Consumer Loan*

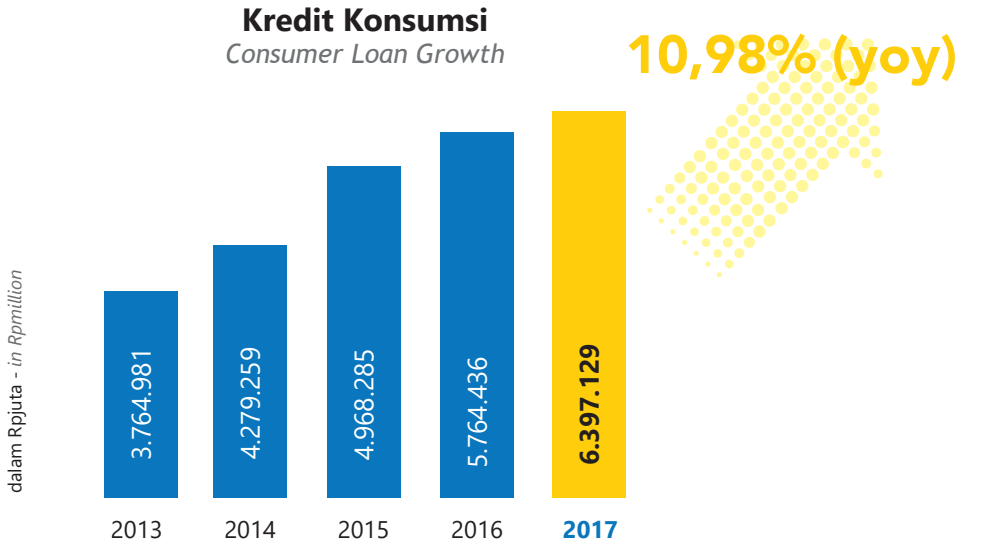

Pertumbuhan kredit segmen konsumsi terbesar adalah pada skim kredit KPR sejahtera Bank Papua, dimana pada tahun 2016 sebesar Rp105,794 juta menjadi sebesar Rp478,165 juta pada tahun 2017 atau tumbuh sebesar 350.26%. Hal ini menjadi salah satu fokus Bank Papua dalam mewujukan komitmen Bank Papua Membangun Negeri.

The largest consumer segment loan growth is on the Bank Papua's prosperous loan scheme, which in 2016 amounted to Rp105,794 million to Rp478.165 million in 2017 or grew by 350.26%. This became one of the focuses of Bank Papua in attributing the commitment of Bank Papua Build the Country.

Pertumbuhan positif pada segmen kredit ini dikarenakan adanya kebijakan strategis manajemen untuk menggarap segmen konsumsi yang telah menjadi core bisnis seluruh Bank Pembangunan Daerah. Disamping itu, pengelolaan kas daerah serta gaji pegawai yang telah dikelola bank cukup lama, menjadikan segmen ini lebih prospek terhindar dari kredit macet.

Positive growth in the loan segment is due to the strategic policy of management to work on the consumption segment that has become the core business of all Regional Development Banks. In addition, local cash management and salary of employees who have managed the bank long enough, making this segment lehih prospects avoid bad loan.

Hal lain yang juga menunjang pertumbuhan segmen kredit konsumtif adalah program penyaluran KPR Sejahtera-FLPP yang dilaksanakan oleh Bank Papua. Dalam rangka meningkatkan pelayanan serta mendukung program pemerintah untuk menerbitkan satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden, Bank Papua terus meningkatkan perannya secara aktif dan nyata dalam mendukung program penyaluran KPR Sejahtera-FLPP.

Another thing that also supports the growth of consumer loan segment is the distribution program of KPR Sejahtera-FLPP implemented by Bank Papua. In order to improve services and support the government program to issue one million houses for low-income people (MBR), as proclaimed by the President, Bank Papua continues to enhance its active and tangible role in supporting the KPR Sejahtera-FLPP distribution program.

Dalam melaksanakan program tersebut Bank Papua telah bekerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya :

1. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyaluran KPR Bersubsidi dalam rangka Perolehan Rumah Bagi MBR;
2. BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) tentang Penyaluran Dana Fasilitas *Likuiditas* Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
3. Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan tentang Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Bagi MBR;
4. PT. Sarana Multigriya *Financial* dalam rangka penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) KPR BPD-SMF.
5. REI Papua dan Papua Barat serta APERNAS Propinsi Papua selaku Asosiasi dari para pengembang yang melakukan pembangunan perumahan.

Atas keseriusan Bank Papua dalam menyalurkan KPR Sejahtera-FLPP tersebut telah mengantarkan Bank Papua menjadi BPD No. 1 di Indonesia dalam pelaksanaan Program Penerbitan Sejuta Rumah.

In implementing the program, Bank Papua has cooperated with various parties, including:

1. *Ministry of Public Works and People's Housing on the Distribution of Subsidized KPR in the framework of Acquiring Houses for MBR;*
2. *BLU Center for Housing Financing Fund Management (PPDPP) on the Distribution of Housing Financing Liquidity Facility Fund (FLPP) in the framework of House Acquisition through Home Ownership Loans for Low-Income Communities*
3. *Satker of the Directorate General of Housing Financing on the Distribution of Housing Assistance Subsidy (SBUM) for Housing in the Framework of Acquiring Houses for MBR;*
4. *PT. Sarana Multigriya Financial for the purpose of preparing Standard Operational Procedures (SOP) of KPR BPD-SMF.*
5. *REI Papua and West Papua and APERNAS Papua Province as the Association of the developers who undertake the construction of housing.*

On the seriousness of Bank Papua in channeling KPR Sejahtera-FLPP has led Bank Papua into BPD No. 1 in Indonesia in the implementation of One Million Housing Publishing Program.

Dalam rangka efesiensi dan percepatan waktu Penyaluran KPR Sejahtera FLPP di Tahun 2018, Bank Papua juga

In the framework of the efficiency and timeliness of KPR Sejahtera FLPP Distribution in 2018, Bank Papua has also

telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Operasional (PKO) dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) tentang Penyaluran Dana Fasilitas *Likuiditas* Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tanggal 21 Desember 2017 dihadapan Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Operasional (PKO) tentang Penyaluran Dana Fasilitas *Likuiditas* Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan PPDPP Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara serentak dengan 42 Bank dihadapan Bapak Menteri.

Kredit Sindikasi

Untuk segmen kredit sindikasi, Bank Papua memilki beberapa produk yang terdiri dari beberapa skim kredit. Pada segmen kredit sindikasi, Bank Papua mengalami pertumbuhan negatif sebesar 3,59% dari total Rp1.079.631 juta ditahun 2016 menjadi Rp1.040.839 juta di tahun 2017, sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

signed an Operational Working Agreement (PKO) with Housing Financing Fund Management Center (PPDPP) on Funding Distribution of Housing Financing Facility (FLPP) Prosperous Home Ownership Loan for Low-Income Communities on 21 December 2017 before the Minister of Public Works and People's Housing.

Signing of Operational Work Agreement (PKO) Agreement on the Distribution of Housing Financing Liquidity Facility Fund (FLPP) in the framework of House Acquisition through Home Ownership Loan for Low-Income People with PPDPP Ministry of Public Works and People's Housing simultaneously with 42 Banks before the Minister.

Syndication Loan

For the syndication loan segment, Bank Papua has several products consisting of several loan schemes. In the syndicated loan segment, Bank Papua experienced negative growth of -3.59% from total Rp1,079,631 million in 2016 to Rp1,040,839 million in 2017, as illustrated in the table below.

PERTUMBUHAN KREDIT SINDIKASI BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
SYNDICATION LOAN GROWTH OF BANK PAPUA IN 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth	%	*Description*
Kredit Sindikasi	1.519.082	1.567.009	1.313.105	1.079.631	1.040.839	(38.792)	-3,59%	*Syndication Loan*

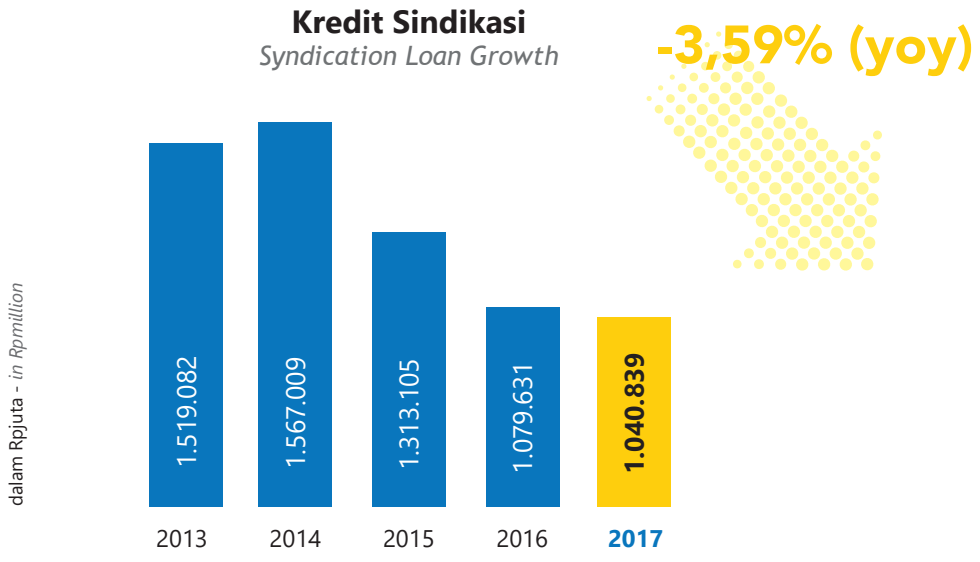

Pertumbuhan negatif pada segmen kredit sindikasi dikarenakan tidak adanya penyaluran kredit sindikasi Bank Papua pada tahun 2017. *Outstanding* kredit sindikasi pada tahun 2017, adalah *outstanding* kredit berjalan setalah adanya pengurangan angsuran.

The negative growth in the syndicated loan segment is due to the absence of a syndication lending of Bank Papua in 2017. Outstanding syndication loans in 2017, is outstanding loan run after the reduction of installments.

Kredit Karyawan

Untuk segmen kredit karyawan, Bank Papua memilki beberapa produk yang terdiri dari beberapa skim kredit. Pada segmen kredit karyawan, Bank Papua mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,03% dari total Rp303.818 juta ditahun 2016 menjadi Rp319.095 juta di tahun 2017, sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

Employees Loan

For the loan segment of employees, Bank Papua has several products consisting of several loan schemes. In the loan segment, Bank Papua experienced a positive growth of 5.03% of the total Rp303.818 million in 2016 to Rp319,095 million in 2017, as illustrated in the table below.

PERTUMBUHAN KREDIT KARYAWAN BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
EMPLOYEE LOAN GROWTH OF BANK BANK PAPUA IN 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth	%	*Description*
Kredit Karyawan	278.700	285.559	278.975	303.818	319.094	15.277	5,03%	*Employees Loan*

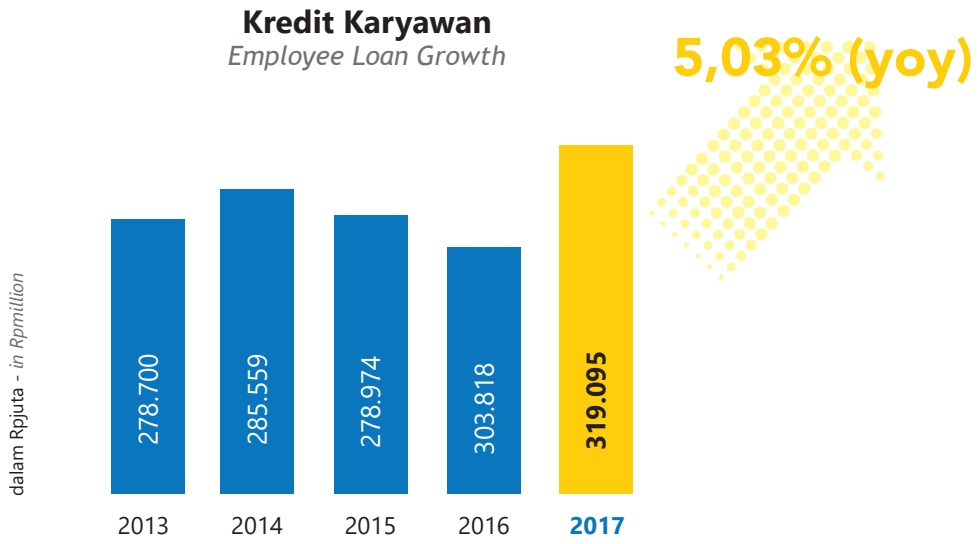

Pertumbuhan positif pada segmen kredit karyawan dikarenakan adanya kebijakan strategis manajemen untuk memberikan fasilitas kemudahan bagi kesejahteraan karyawan melalui segmen kredit karyawan yang didominasi oleh penyaluran kredit bagi karyawan Bank Papua.

Positive growth in the employee loan segment is due to the strategic policy of management to facilitate the employee's welfare through employee loan segment dominated by loan channeling for Bank Papua employees.

Kredit Program Pemerintah

Untuk segmen kredit program pemerintah, Bank Papua memilki beberapa produk yang terdiri dari beberapa skim kredit. Pada segmen kredit program pemerintah, Bank Papua mengalami pertumbuhan negatif sebesar 62,67% dari total Rp41.401 juta ditahun 2016 menjadi Rp15.455 juta di tahun 2017, sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

Government Program Loan

For the loan segment of government programs, Bank Papua has several products consisting of several loan schemes. In the loan segment of the government program, Bank Papua experienced negative growth of -62.67% from total Rp41,401 million in 2016 to Rp15,455 million in 2017, as illustrated in the table below.

PERTUMBUHAN KREDIT PROGRAM PEMERINTAH BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
GOVERNMENT PROGRAM LOAN GROWTH OF BANK PAPUA IN 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth	%	*Description*
Kredit Program Pemerintah	207.148	227.609	118.346	41.401	15.456	(25.946)	-62,67%	*Government Program Loan*

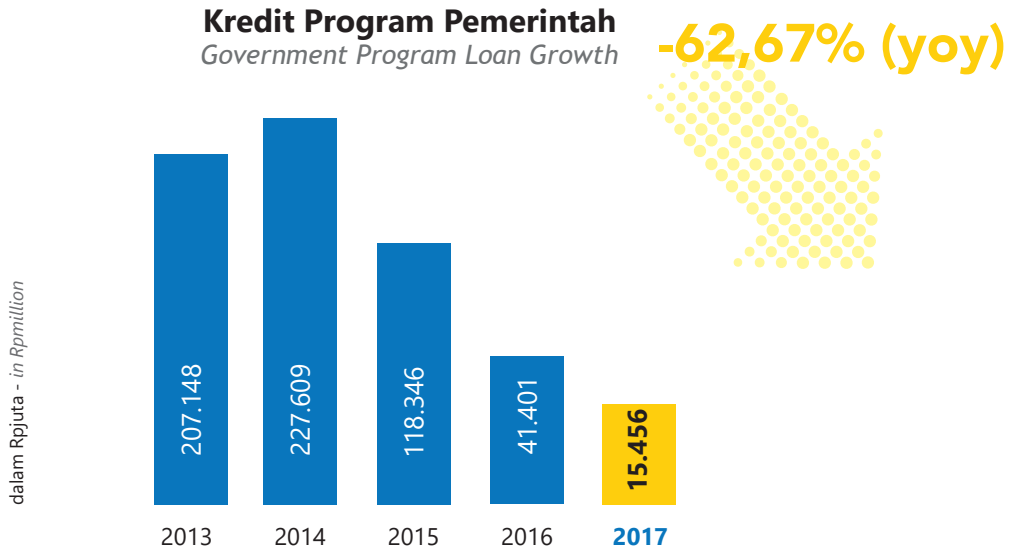

Pertumbuhan negatif pada segmen kredit program pemerintah Bank Papua didominasi karena turunnya pertumbuhan kredit pada skim Kredit Program Pemerintah Ketahanan Pangan pada tahun 2017.

The negative growth in the credit segment of the Papua Bank government program is dominated by the decline in loan growth in the Government Food Security Program Loan scheme in 2017.

Tingkat Suku Bunga

Guna memberikan kemudahan dan meningkatkan daya saing produk, maka Bank Papua memberikan tingkat suku bunga untuk beberapa produk kredit yang berlaku pada tahun 2017 sebagaimana dibawah ini.

Interest Rate

In order to facilitate and enhance the competitiveness of products, Bank Papua provides interest rates for certain loan products applicable in 2017 as below.

SUKU BUNGA SKIM KREDIT BANK PAPUA TAHUN 2017
LOAN INTEREST RATE SCHEME OF BANK PAPUA YEAR 2017

No.	Skim Kredit	SukuBunga	*Loan Scheme*
1	KMK-Mikro Plafond s/d Rp.50 jt	13,25%	*Micro WCL max. limit Rp50 million*
2	KMK-Kecil Plafond> 50 jt s/d Rp.500 jt	13,50%	*Small WCL limit Rp50 up to 500 million*
3	KI-Mikro Plafond s/d Rp.50 jt	13,25%	*Micro IL max. limit Rp50 million*
4	KI-Kecil Plafond > 50 jt s/d 500 jt	13,50%	*Small IL limit Rp50 up to 500 million*
5	KUR Ritel	13,00%	*Retail KUR*
6	KUR Mikro	22,00%	*Micro KUR*
7	KKP-EPeternakan	5,75%	*KKP-E Livestock*
8	KKP-E Perikanan	5,25%	*KKP-E Fisheries*
9	PUM	11,50%	*PUM*
10	PUM Mama-Mama Papua	9,50%	*Mama-Mama Papua PUM*
11	Kredit Pola Gramen Bank	14,00%	*Gramen Bank Loan Scheme*
12	Kredit Papua Sejahtera	15,00%	*Papua Prosperous Loan*
13	KKs Wira Bhakti	9,00%	*Wira Bhakti KKs*
14	KKrAbdi Bhakti	4,56%	*Abdi Bhakti KKr*
15	KKrPurna Bhakti Intern	7,00%	*Intern Purna Bhakti KKr*
16	KKs PT.Freeport dan Privatisasinya	11,76%	*PT. Freeport and its Pirivate KKs*
17	Kredit Pegawai Siaga	11,88%	*Siaga Employee Loan*
18	KKs PUMP-KB Jamsostek	6,00%	*Jamsostek KKs PUMP-KB*
19	KKr Kendaraan	7,25%	*Vehicle Loan*
20	KKs KPR Sejahtera	5,00%	*KPR Sejahtera Mortgage Loan*
21	KMK Kontruksi	13,50%	*Construction WCL*
22	KMK Perdagangan (System Angsuran)	13,25%	*Trading (System Installment) WCL*
23	KMK Perdagangan (RC)	13,50%	*Trading (RC) WCL*
24	KMK Pemerintah Daerah	12,75%	*Local Government WCL*
25	Kredit Investasi	14,00%	*Investment Loan*

Penanganan Kredit Khusus
Special Loan Handling

Mengacu kepada Surat Keputusan Direksi Nomor 68/DIR-BPD/IX 2016 tanggal 30 September 2016 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT.Bank Pembangunan Daerah Papua, efektif dibentuk Divisi Kredit Khusus. Pembentukan Divisi baru ini difokuskan untuk memperbaiki *Non Performing Loan* (NPL) Bank Papua, sehingga ada *action plan* yang jelas dan terarah. Divisi Kredit Khusus ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan monitoring atas kredit bermasalah yaitu kredit-kredit yang memiliki Kolektibiliti 3,4,5, dan merestrukturisasi kredit, serta melakukan perencanaan dan realisasi penghapusan kredit, hapus tagih serta penagihan kredit yang telah dihapus buku (*extra comptable*).

Referring to the Decree of the Board of Directors Number 68 / DIR-BPD / IX 2016 dated 30 September 2016 on Completion of Organization Structure of PT.Bank Pembangunan Daerah Papua, effectively set up Special Loan Division. The establishment of this new Division is focused on improving the Papua Bank's Non-Proforming Loan (NPL), so there is a clear and directed action plan. The Special Loan Division has duties and responsibilities in performing monitoring of non-performing loans, which have collectibility of 3.4.5, and loan restructuring, as well as planning and realization of lending, write-off as well as collection of written-off loans comptable).

Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit di Tahun 2017

Untuk Penyelamatan Kredit dan perbaikan NPL ditahun 2017, Bank Papua melalui Divisi Kredit Khusus telah menyusun strategi dan melakukan beberapa langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah termasuk agunan yang diambil alih (AYDA). Kredit bermasalah akan diselesaikan, apabila semua data nasabah kredit tercatat dengan baik dan benar. Langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Mengintensifkan supervisi kredit baik oleh Kantor Cabang, Cabang Pembantu maupun oleh Divisi Bisnis Kantor Pusat.
2. Melakukan klaim pembayaran atas kredit yang dijamin risikonya oleh lembaga penjaminan / asuransi kredit serta kredit yang dicover dengan asuransi kerugian dan atau asuransi jiwa dan PHK.
3. Melakukan Restrukturisasi Kredit.
4. Melakukan upaya negosiasi untuk penjualan agunan secara sukarela ataupun penebusan agunan.
5. Mengajukan permohonan lelang eksekusi agunan kepada Kantor Lelang Negara.

Sedangkan penyelesaian Agunan yang Diambil Alih (AYDA) dilakukan :

1. Untuk pencairan/penyelesaian agunan AYDA an. PT. Papan Mandiri Utama (debitur KC. Merauke) maka telah dilakukan permohonan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara Jayapura untuk agunan yang berlokasi di Merauke dan Jayapura.
2. AYDA untuk debitur An, PT. Trah Maju Utama (debitur KCU. Jayapura) akan dilakukan pada tahun 2018.

Loan Settlement In 2017

For Loan Settlement and NPL improvement in 2017, Bank Papua through the Special Loan Division has developed strategies and undertook several non performing settlement measures including foreclosed collateral (AYDA). Nonperforming loans will be settled, if all loan customers' data are recorded properly and correctly. The steps for settlement of non-performing loans of 2017 are as follows:

1. *To intensify loan supervision by both Branch Offices, Sub-Branches or by the Head Office Business Division.*
2. *Claim payment of loan guaranteed by risk institution / loan insurance as well as loan covered by insurance of loss and or life insurance and dismissal.*
3. *Conducting Loan Restructuring.*
4. *Conduct negotiation efforts for the sale of collateral on a voluntary basis or redemption of collateral.*
5. *Submit a request for auction of collateral execution to the State Auction Office.*

While the settlement of Foreclosed Collateral (AYDA) is done:

1. *For the disbursement / settlement of Foreclosed Collateral on behalf PT. Papan Mandiri Utama (debtor KC Merauke), an auction sale has been made through the State Auction Office of Jayapura for collateral located in Merauke and Jayapura.*
2. *Foreclosed Collateral for debtors on behalf, PT. Trah Maju Utama (KCU Jayapura debtor) will be conducted in 2018.*

TINGKAT KOLEKTIBILITAS KREDIT

Kolektibilitas kredit yang diberikan yang dikategorikan sebagai *Non Performing Loan* (NPL), adalah kredit yang diberikan dengan kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Sampai dengan akhir tahun 2017, tingkat kolektibilitas kredit yang diberikan yang dikategorikan sebagai *Non Performing Loan* (NPL) tertinggi adalah sebesar Rp1.952.865 juta atau turun sebesar 8,54% dari tahun 2016 yakni sebesar Rp2.135.326 juta. Penurunan ini adalah bentuk nyata dari tindakan strategis manajemen untuk terus berusaha menurunkan NPL bank. Tabel dibawah ini menguraikan tingkat kolektibilits kredit di Bank Papua.

LOAN COLLECTIBILITY LEVEL

The collected loan collectibles categorized as Non Performing Loans (NPLs) are loans that are classified as substandard, doubtful and loss. Until the end of 2017, the loan collectibility granted as the highest Non Performing Loan (NPL) amounted to Rp1,952,865 million or decreased by 8.54% from 2016 amounting to Rp2,135,326 million. This decline is a tangible form of strategic management action to keep trying to lower bank NPLs. The table below describes the level of collectibilits of loan in Bank Papua.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS KREDIT TAHUN 2013-2017 (RP.JUTA)
LOAN COLLECTIBILITY LEVEL 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Lancar	10.798.422	11.773.722	10.565.485	10.730.524	9.906.997	(823.527)	-7,67%	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	446.170	605.910	1.370.333	1.343.989	1.411.046	67.057	4,99%	*In Special Attention*
Kurang Lancar	21.897	107.767	23.894	758.895	70.036	(688.859)	-90,77%	*Substandard*
Diragukan	17.479	46.858	136.947	36.694	311.824	275.130	749,80%	*Doubtful*
Macet	94.420	825.186	1.110.517	1.339.737	1.571.005	231.268	17,26%	*Loss*
TOTAL	**11.378.388**	**13.359.443**	**13.207.176**	**14.209.839**	**13.270.908**	**(938.932)**	**-6,61%**	**TOTAL**

Tingkat NPL Tahun 2013-2017/*NPL Rate Year 2013-2017*

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	*Growth*	
						Nominal	%
NPL	133.796	979.811	1.271.358	2.135.326	1.952.865	(182.461)	-8.54%

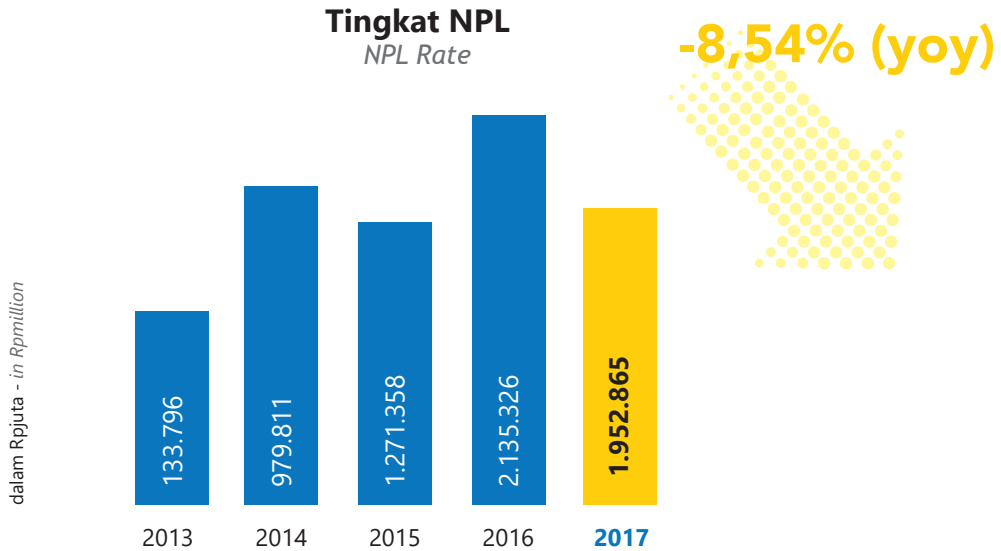

TREASURY DAN INTERNATIONAL

Kegiatan Treasury & Internasional merupakan kegiatan operasional Bank dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Bank, selain yang berasal dari penyaluran kredit. Adapun kegiatan Treasury & Internasional Bank Papua melalui Divisi Treasury & Internasional di tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan *likuiditas* yang tersedia pada instrument keuangan untuk meningkatkan pendapatan bunga melalui:
   - Transaksi pasar uang; interbank call money, depo facility dan trading,
   - Transaksi fixed income melalui pembelian obligasi pemerintah dan obligasi korporasi,
   - Melakukan transaksi Reverse Repo dengan bank umum lainnya dan Bank Indonesia.
b. Mengelola fungsi ALMA dan melaksanakan *funding management* dengan meminimalisasi *cost* sesuai kebijakan prosedur bank dan kebijakan dari regulator (OJK & BI),
c. Mengevaluasi kebijakan *feebased income* untuk meningkatkan pendapatan bank,
d. Membina hubungan baik dengan *counterpart* guna mendukung kelancaran transaksi.

Disepanjang tahun 2017, Bank Papua melalui Divisi Treasury & Internasional telah berhasil memberikan kontribusi pendapatan bank melalui penempatan. Bank memperoleh bunga penempatan sebesar Rp418.967 juta, atau menurun 9,77% dibandingkan pendapatan tahun 2016 yakni sebesar Rp464.312 juta.

TREASURY AND INTERNATIONAL

Treasury & International activity is the Bank's operational activities in optimizing the Bank's revenue, in addition to lending. The Treasury & International activities of Bank Papua through the Treasury & International Division in 2017 are as follows:

a. Optimizing the liquidity available on financial instruments to increase interest income through:
   - *Money market transactions; interbank call money, depo facility and trading,*
   - *Fixed income transactions through the purchase of government bonds and corporate bonds,*
   - *Conducting Reverse Repo transactions with other commercial banks and Bank Indonesia.*

b. Manage ALMA function and implement funding management by minimizing cost according to bank procedure policy and policy from regulator (OJK & BI),

c. Evaluating the feebased income policy to increase bank earnings,
d. Fostering good relationships with counterparts to support the smoothness of transactions.

Throughout 2017, Bank Papua through the Treasury & International Division has succeeded in contributing bank income through placement. The Bank obtained placement interest amounting to Rp418,967 million, or decreased 9.77% compared to 2014 revenues of Rp464,312 million.

PENDAPATAN BUNGA PENEMPATAN BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
INTEREST INCOME PLACEMENT OF BANK PAPUA IN 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Bunga penempatan bank lain	167.828	196.235	256.673	164.956	115.812	(49.144)	-29,79%	*Interest placements of other banks*
Bunga penempatan bank Indonesia	6.033	8.705	10.334	13.503	23.418	9.915	73,43%	*Interest of Bank Indonesia placement*
Bunga Efek-efek	170.812	161.440	258.097	285.853	279.737	(6.116)	-2,14%	*Interest Effects*
Jumlah Pendapatan bunga penempatan	**344.673**	**366.380**	**525.104**	**464.312**	**418.967**	**(45.345)**	**-9,77%**	***Total of Interest on placement interest***

Tinjauan Kinerja Keuangan 2017

2017 Financial Performance Overview

ASET

Selama tahun 2017, jumlah aset tercatat tumbuh negatif sebesar -1,02% dari Rp20.611.850 juta pada tahun 2016 menjadi Rp20.400.813 juta pada tahun 2017. Hal ini terutama didorong oleh turun total Kredit yang diberikan pada tahun 2017. Pertumbuhan asset Bank Papua tergambar pada grafik dibawah ini.

ASSET

During 2017, total assets recorded negative growth of -1.02% from Rp20,611,850 million in 2016 to Rp20,400,813 million in 2017. This was mainly driven by the total decline in net-lending by 2017. The growth of Bank Papua's assets illustrated in the graph below.

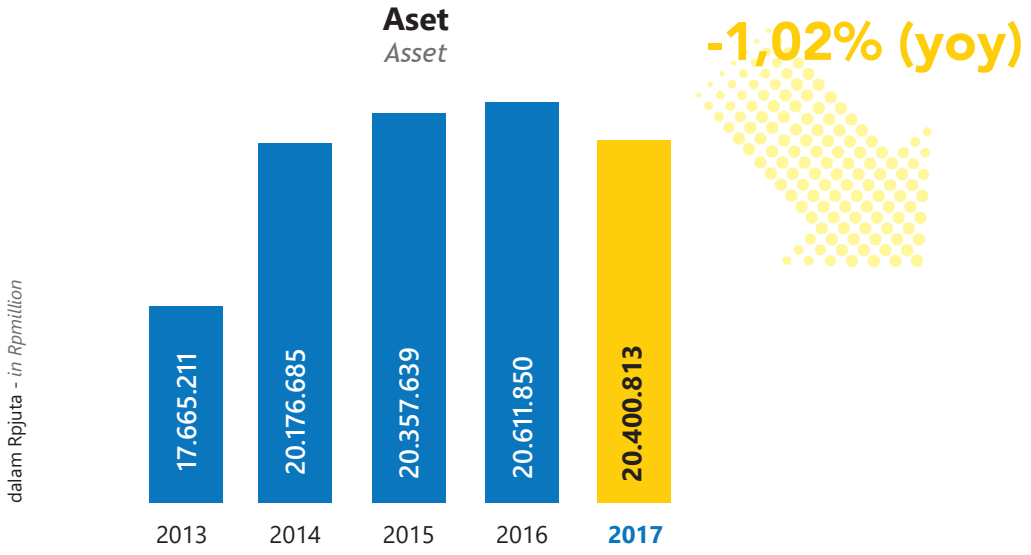

Untuk rincian pertumbuhan asset bank dari tahun 2013 sampai dengan 2017, digambarkan pada tabel sebagai berikut.

For details of bank asset growth from 2013 to 2017, illustrated in the table as follows.

POSISI ASET TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
ASSET POSITION IN 2013-2017 (RpMILLION)

Pos-Pos	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Posts*
						Nominal	%	
Kas	737.990	887.964	738.378	941.681	831.085	(110.596)	-11,74%	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	1.323.463	1.894.233	1.885.404	1.511.313	1.415.941	(95.372)	-6,31%	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain - bersih	44.956	13.502	7.717	45.126	6.303	(38.823)	-86,03%	*Current accounts with other banks - net*
Penempatan Pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih	2.596.001	2.037.490	2.309.972	2.776.700	2.949.938	173.238	6,24%	*Placements with Bank Indonesia and other banks - net*
Surat-surat berharga&Efek-efek bersih	1.278.983	2.026.265	2.246.827	1.950.749	2.609.245	658.496	33,76%	*Marketable securities Net*
Kredit yang diberikan - bersih	11.232.436	12.665.736	12.279.592	12.537.278	11.764.167	(773.111)	-6,17%	*Lending- net*
Aset Tetap Bersih	262.824	261.495	288.133	289.302	285.012	(4.290)	-1,48%	*Net Fixed Asset*
Aset lain-lain	236.245	451.032	601.615	559.701	539.121	(20.580)	-3,68%	*Other Assets*
Jumlah Aset	**17.712.898**	**20.237.717**	**20.357.638**	**20.611.850**	**20.400.813**	**(211.038)**	**-1,02%**	**Total Assets**

Optimalisasi *rentabilitas* menjadi perhatian penting bank, sehingga kondisi *likuiditas* antara aset dan kewajiban harus selalu dijaga dengan baik. Bank Papua telah mengoptimalkan pengelolaan treasury untuk menjaga *likuiditas* dengan melakukan penempatan dana pada beberapa instrument keuangan yang lebih likuid. Bank mengklasifikasikan asset yang sangat likuid yang terdiri dari:

1. Kas

   Kas merupakan aset paling likuid dalam suatu kajian keuangan. Di Bank Papua, kas merupakan dana yang disediakan oleh Bank untuk mendukung kegiatan operasional melalui teller atau *Automatic Teller Machine* (ATM). Agar pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan tidak pada posisi *idle* berbagai upaya manajemen dalam melakukan pengelolaan kas secara efektif dan efisiensi. Posisi kas per 31 Desember 2017 tergambar pada tabel dibawah ini:

Optimizing rentability is an important concern of banks, so that liquidity conditions between assets and liabilities must always be well maintained. Bank Papua has optimized treasury management to maintain liquidity by placing funds on some of the more liquid financial instruments. The Bank classifies highly liquid assets consisting of:

1. *Cash*

   Cash is the most liquid asset in a financial review. At Bank Papua, cash is provided by the Bank to support operational activities through teller or Automatic Teller Machine (ATM). In order for services to run smoothly and not in idle position of various management efforts in managing cash effectively and efficiency. The cash position as at 31 December 2017 is illustrated in the table below:

KAS TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
CASH YEAR 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Rupiah	737.990	887.964	738.378	941.681	831.085	(110.596)	-11,74%	*Rupiah*
Valas	-	-	-	-	-	-	-	*Forex*
Jumlah	**737.990**	**887.964**	**738.378**	**941.681**	**831.085**	**(110.596)**	**-11,74%**	**Total**

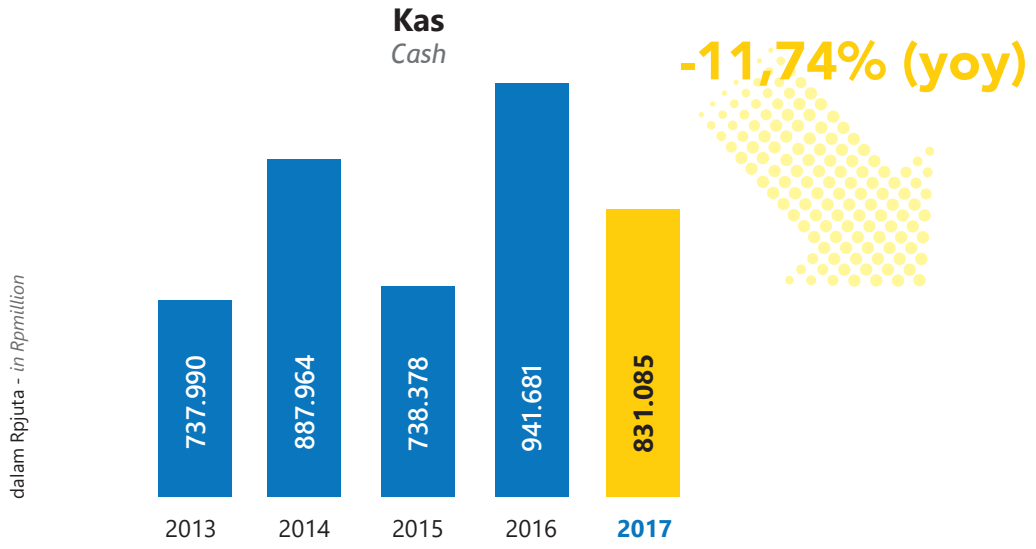

2. Giro pada Bank Indonesia

   Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/10/PBI/2011 pada tanggal 9 Februari 2011 perihal Giro Wajib Minimum (GWM), mengatur bahwa Giro Wajib Minimum untuk rekening Rupiah menjadi sebesar 10,5% yang terdiri dari 8% GWM Utama dan GWM sekunder 2,5% dari total dana pihak ketiga Rupiah.

   Untuk GWM utama, Bank Papua tetap menjaga cadangan minimum di Giro Bank Indonesia, sedangkan untuk GWM sekunder, Bank Papua harus memelihara cadangan minimum di efek yaitu

2. *Current Accounts with Bank Indonesia*

   Based on Bank Indonesia Regulation number 13/10 / PBI / 2011 dated February 9, 2011 concerning Statutory Reserves (GWM), stipulates that the Statutory Reserve Requirement for Rupiah account becomes 10.5% consisting of 8% Primary GWM and Secondary GWM 2.5% of total Rupiah TPF.

   For primary reserve requirement, Bank Papua keeps the minimum reserve in Current Account Bank Indonesia, while for secondary reserve requirement, Bank Papua must maintain minimum reserve

Sertifikat Bank Indonesia dan Obligasi Pemerintah.

Terhadap perubahan peraturan tersebut, Bank Papua di tahun 2017 telah memenuhi peraturan tersebut dengan mempertahankan cadangan minimum giro pada Bank Indonesia pada posisi Rp1.415.941 juta, terjadi penurunan dibandingkan dari posisi tahun sebelumnya. Posisi giro pada Bank Indonesia per 31 Desember 2017 tergambar pada tabel dibawah ini :

in securities ie Bank Indonesia Certificates and Government Bonds.
Regarding the amendment of the regulation, Bank Papua in 2017 has complied with the regulation by maintaining the minimum reserve requirement at Bank Indonesia at Rp1,415.941 million, decreasing compared to the previous year's position. Current account at Bank Indonesia as of December 31, 2017 are illustrated in the table below :

GIRO PADA BANK INDONESIA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Rupiah	1.323.463	1.894.233	1.885.404	1.511.313	1.415.941	(95.372)	-6,31%	*Rupiah*
Valas	-	-	-	-	-	-	-	*Forex*
Jumlah	**1.323.463**	**1.894.233**	**1.885.404**	**1.511.313**	**1.415.941**	**(95.372)**	**-6,31%**	**Total**

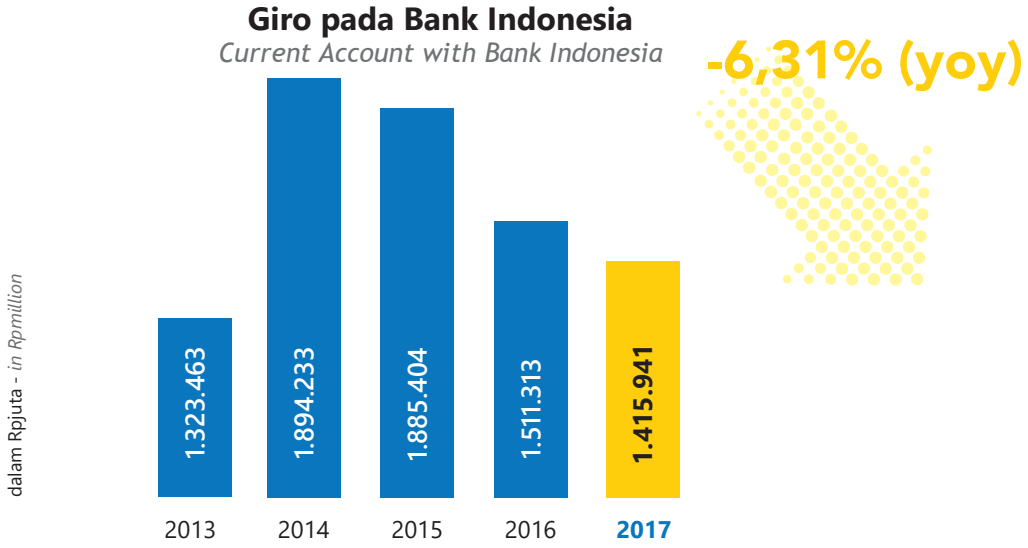

3. Giro pada Bank Lain

Dana yang ditempatkan dalam rekening giro pada bank lain bertujuan untuk menyediakan cara yang lebih mudah dalam melaksanakan transfer dana/ pengiriman uang/penyelesaian transaksi antar bank. Frekuensi transaksi dana yang dilakukan oleh nasabah sangat mempengaruhi fluktuasi giro pada bank lain. Selama tahun 2017, rekening giro pada bank lain mengalami penurunan dari Rp45.126 juta pada tahun 2016 menjadi Rp6.303 juta pada tahun 2017. Berdasarkan tingkat kolektibilitas, nilai ini digolongkan lancar dengan suku bunga rata-rata 0,5%. Posisi giro pada bank lain per 31 Desember 2017 tergambar pada tabel dibawah ini:

3. *Current Account with Other Banks*

Funds placed in current accounts with other banks aim to provide an easier way to execute money transfer / remittance / settlement of interbank transactions. The frequency of funds transactions conducted by customers greatly affect the fluctuation of current account at other banks. During 2017, current accounts with other banks decreased from Rp45.126 million in 2016 to Rp6,303 million in 2017. Based on the collectibility rate, this value is classified smoothly with an average interest rate of 0.5%. Current accounts with other banks as of December 31, 2017 are illustrated in the table below:

GIRO PADA BANK LAIN TAHUN 2013-2017 (RpJUTA) *CURRENT ACCOUNT WITH OTHER BANKS IN 2013-2017 (RpMILLION)*								
Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Rupiah	44.956	13.502	7.717	45.126	6.303	(38.823)	-86,03%	*Rupiah*
Valas	-	-	-	-	-	-	-	*Forex*
Penyisihan Kerugian/ CKPN	-	-	-	-	-	-	-	*Allowance for Losses / CKPN*
Jumlah	**44.956**	**13.502**	**7.717**	**45.126**	**6.303**	**(38.823)**	**-86,03%**	***Total***

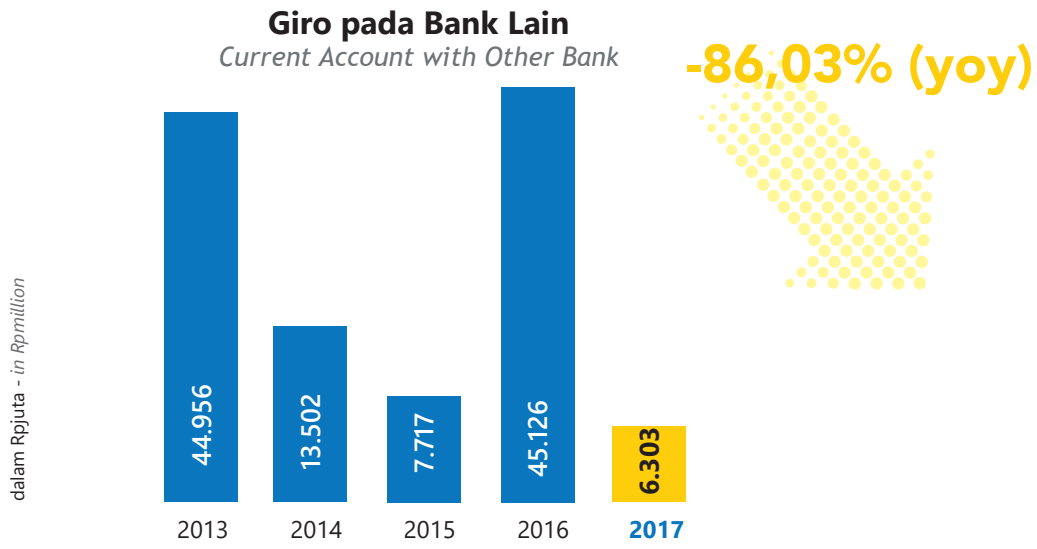

4. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain
Penempatan dana pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk promes, deposito berjangka, deposit *on call*, dan kliring Bank Indonesia serta Fasilitas Bank Indonesia. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain mengalami peningkatan dari Rp2.776.700 juta pada tahun 2016 menjadi Rp2.949.938 juta pada tahun 2017. Peningkatan ini sebagai bagian dari strategi pengelolaan dana dalam meraih pendapatan bunga penempatan Bank Papua. Posisi Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain per 31 Desember 2017 tergambar pada tabel dibawah ini:

4. Placements with Bank Indonesia and Other Banks
Placements with Bank Indonesia and other banks are placements of funds in the form of promissory notes, time deposits, deposits on call, and clearing of Bank Indonesia and Bank Indonesia Facility. Placements with Bank Indonesia and other Banks increased from Rp2,776,700 million in 2016 to Rp2,949,938 million in 2017. This increase is part of the fund management strategy to achieve Bank Papua placement interest income. Placement Positions at Bank Indonesia and other Banks as of December 31, 2017 are illustrated in the table below:

PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA & BANK LAIN TAHUN 2013-2017 (RpJUTA) *PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA & OTHER BANKS 2013-2017 (RpMILLION)*								
Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Rupiah	2.596.001	2.037.490	2.309.972	2.776.700	2.949.938	173.238	6,24%	*Rupiah*
Valas	-	-	-	-	-	-	-	*Forex*
Penyisihan Kerugian/ CKPN	-	-	-	-	-	-	-	*Allowance for Losses / CKPN*
Jumlah	**2.596.001**	**2.037.490**	**2.309.972**	**2.776.700**	**2.949.938**	**173.238**	**6,24%**	***Total***

Penempatan pada Bank Indonesia & Bank Lain

Placement with Bank Indonesia and Other Bank

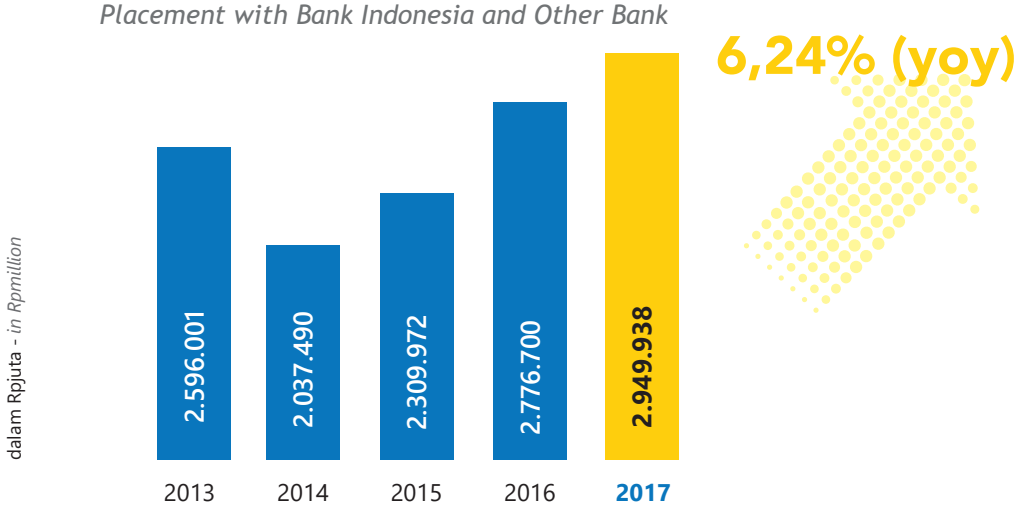

5. Surat Berharga & Efek-Efek

Surat berharga yang dimiliki dari Sertifikat Bank Indonesia, Obligasi Pemerintah, Obligasi Korporasi, Surat Piutang Negara (SPN), dan reksadana serta Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) yang diperdagangkan di bursa efek.

Sampai dengan akhir tahun 2017, penempatan dana dalam bentuk surat berharga sebesar Rp1.007.587 juta lebih tinggi dari saldo tahun 2016 yakni sebesar Rp511.137 juta. Peningkatan ini disebabkan manajemen treasury Bank Papua mampu mengelola kelebihan dana dalam bentuk Efek-efek Yang Dibeli Dengan Dijual Kembali untuk meningkatkan margin profit. Posisi Efek-efek Yang Dibeli Dengan Dijual Kembali per 31 Desember 2017 tergambar pada tabel dibawah ini:

5. Marketabel Securities & Bonds

Marketabel Securities owned by Bank Indonesia Certificates, Government Bonds, Corporate Bonds, State Receivables (SPN), and mutual funds and Certificates of Deposit of Bank Indonesia (SDBI) traded on the stock exchange.

Until the end of 2017, the placement of funds in the form of securities amounted to Rp1,007,587 million higher than the balance of 2016 amounting to Rp511,137 million. This increase is due to treasury management Bank Papua is able to manage the excess funds in the form of Marketable Securities Reverse Repo to increase profit margins. The Position of Marketable Securities Reverse Repo as of December 31, 2017 is illustrated in the table below:

EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN DIJUAL KEMBALI TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
MARKETABLE SECURITIES PURCHASED WITH RE-SALE IN 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Rupiah	-	664.001	822.169	511.137	1.007.587	496.450	97,13%	*Rupiah*

Sampai dengan akhir tahun 2017, efek-efek Bank Papua sebesar Rp1.601.658 juta lebih tinggi dari saldo tahun 2016 yakni sebesar Rp1.439.611 juta. Peningkatan ini disebabkan manajemen treasury Bank Papua mampu mengelola kelebihan dana dalam bentuk Efek-Efek untuk meningkatkan margin profit bank. Posisi Efek-efek per 31 Desember 2017 tergambar pada tabel dibawah ini:

Until the end of 2017, the bonds of Bank Papua amounted to Rp1,601,658 million higher than the balance of 2016 amounting to Rp1,439,611 million. This increase is due to treasury management Bank Papua is able to manage the excess funds in the form of Marketable Securities to increase the profit margin of the bank. Position of Securities as of December 31, 2017 is illustrated in the table below:

EFEK-EFEK TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
MARKETABLE SECURITIES OF 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Rupiah	1.282.463	1.364.504	1.424.657	1.439.611	1.601.658	162.047	11,26%	*Rupiah*
Valas	-	-	-	-	-	-	-	*Forex*
Penyisihan Kerugian/ CKPN	(3.480)	(2.240)	-	-	-	-	-	*Allowance for Losses / CKPN*
Jumlah	**1.278.983**	**1.362.264**	**1.424.657**	**1.439.611**	**1.601.658**	**162.047**	**11,26%**	**Total**

Surat Berharga & Efek-efek
Marketable Securities

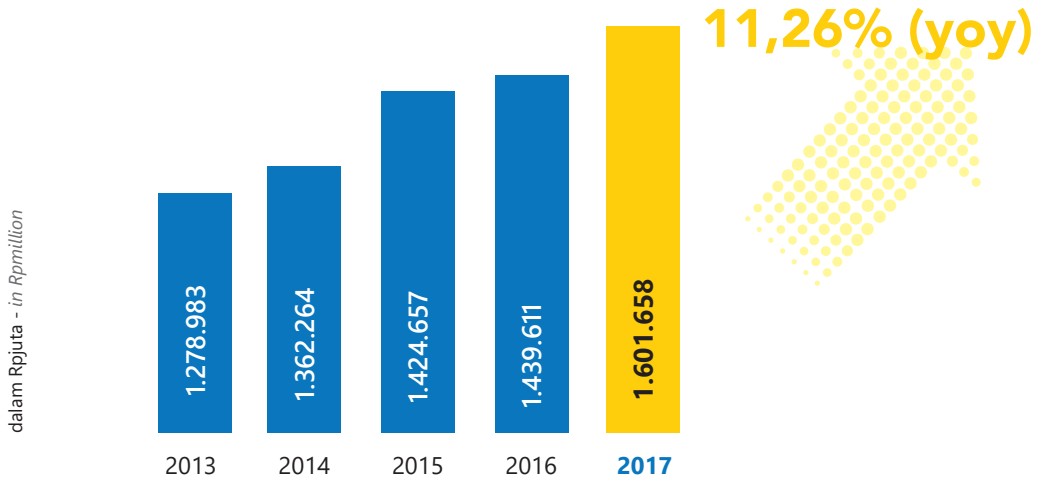

6. Kredit Yang Diberikan

Total kredit yang diberikan neto di tahun 2017 mencapai Rp11.764.167 juta, dimana terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yakni sebesar Rp12.537.278 juta. Posisi kredit yang diberikan per 31 Desember 2017 tergambar pada tabel dibawah ini:

6. *Lending*

Total net Lending in 2017 reached Rp11,764,167 million, which decreased compared to 2016 amounting to Rp12,537,278 million. The position of lending as of December 31, 2017 is illustrated in the table below:

TOTAL KREDIT YANG DIBERIKAN TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
TOTAL LENDING IN 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		Description
						Nominal	%	
Pihak Berelasi	109.916	261.191	215.388	636.140	720.065	83.924	13,19%	*Related Parties*
Pihak Ketiga	11.268.472	13.098.252	12.991.789	13.573.699	12.550.843	(1.022.856)	-7,54%	*Third party*
Total kredit yang diberikan	**11.378.388**	**13.359.443**	**13.207.177**	**14.209.839**	**13.270.908**	**(938.932)**	**-6,61%**	**Total Lending**
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(145.951)	(693.707)	(927.584)	(1.672.561)	(1.506.741)	165.821	-9,91%	*Allowance for impairment losses*
Total kredit yang diberikan-Neto	**11.232.437**	**12.665.736**	**12.279.593**	**12.537.278**	**11.764.167**	**(773.111)**	**-6,17%**	**Total Lending Net**

Kredit yang Diberikan
Lending

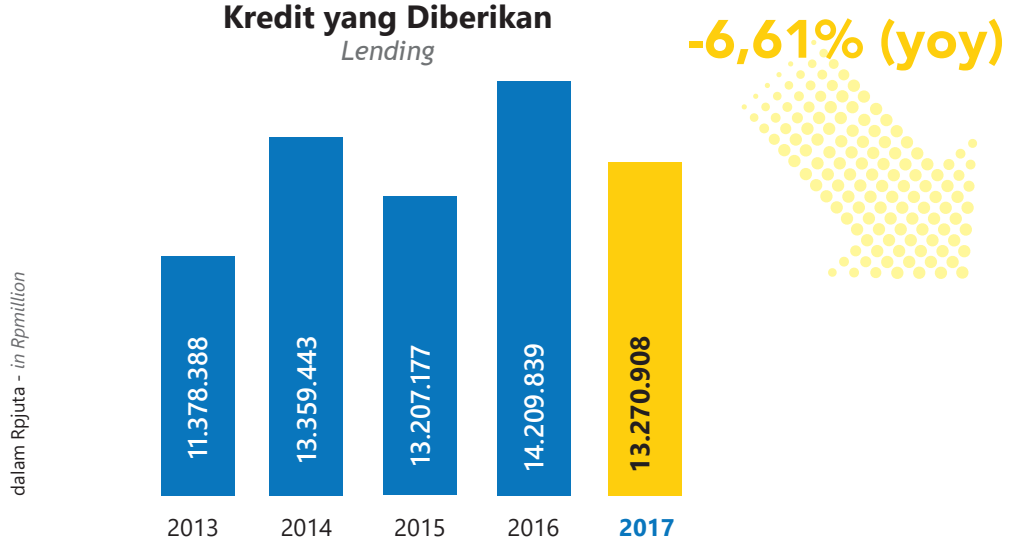

7. Aset Tetap

Sampai dengan akhir tahun 2017, Aset tetap mengalami penurunan dengan nilai buku sebesar Rp285.012 juta lebih rendah dari saldo tahun 2016 yakni sebesar Rp289.301 juta. Penurunan ini dikarenakan tingginya nilai penyusutan inventaris kantor.

7. *Fixed Assets*

Until the end of 2017, assets have decreased with the fiscal value of Rp285,012 million lower than the balance of 2016 amounting to Rp289,301 million. This decrease is due to the high value of depreciation of office inventory.

ASET TETAP BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
BANK PAPUA'S FIXED ASSET FOR 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		Description
						Nominal	%	
Harga Perolehan								*Acquisition cost*
Tanah	25.614	27.529	33.146	36.949	36.949	-	0,00%	*Land*
Bangunan Kantor	191.067	215.564	265.842	272.420	280.348	7.928	2,91%	*Office building*
Perumahan dinas	15.093	17.533	17.910	20.171	21.234	1.063	5,27%	*Housing services*
Kendaraan bermotor	14.607	13.908	14.710	14.978	15.416	438	2,92%	*Motor vehicle*
Inventaris Kantor	157.827	184.491	202.589	215.648	224.042	8.394	3,89%	*Office inventory*
Inventaris rumah dinas	6.597	6.317	6.805	6.909	7.921	1.012	14,65%	*Inventory of official housing*
Inventaris lainnya	1.655	1.981	3.242	6.077	7.145	1.068	17,57%	*Other inventory*
Inventaris dalam penyelesaian	5.007	1.301	1.643	1.946	2.475	529	27,18%	*Inventory in progress*
Bangunan dalam penyelesaian	27.420	20.989	7.345	11.091	18.720	7.629	68,79%	*Building in progress*
Total	**444.890**	**489.613**	**553.236**	**586.190**	**614.250**	**28.061**	**4,79%**	**Total**
Akumulasi Penyusutan								*Accumulated depreciation*
Bangunan Kantor	(55.230)	(65.719)	(77.069)	(90.149)	(100.566)	(10.417)	11,56%	*Office building*
Perumahan dinas	(4.228)	(4.974)	(5.853)	(6.664)	(7.677)	(1.013)	15,20%	*Housing services*
Kendaraan bermotor	(8.957)	(9.261)	(10.918)	(12.320)	(13.590)	(1.270)	10,31%	*Motor vehicle*
Inventaris Kantor	(108.515)	(142.905)	(164.786)	(179.796)	(197.137)	(17.341)	9,64%	*Office inventory*
Inventaris rumah dinas	(4.384)	(4.080)	(4.950)	(5.229)	(6.184)	(955)	18,26%	*Inventory of official housing*
Inventaris lainnya	(753)	(1.179)	(1.527)	(2.730)	(4.084)	(1.354)	49,60%	*Other inventory*
Total Penyusutan	**(182.066)**	**(228.118)**	**(265.099)**	**(296.888)**	**(329.238)**	**(32.350)**	**10,90%**	***Total Depreciation***
Nilai buku	**262.824**	**261.495**	**288.133**	**289.302**	**285.012**	**(4.290)**	**-1,48%**	**Fiscal value**

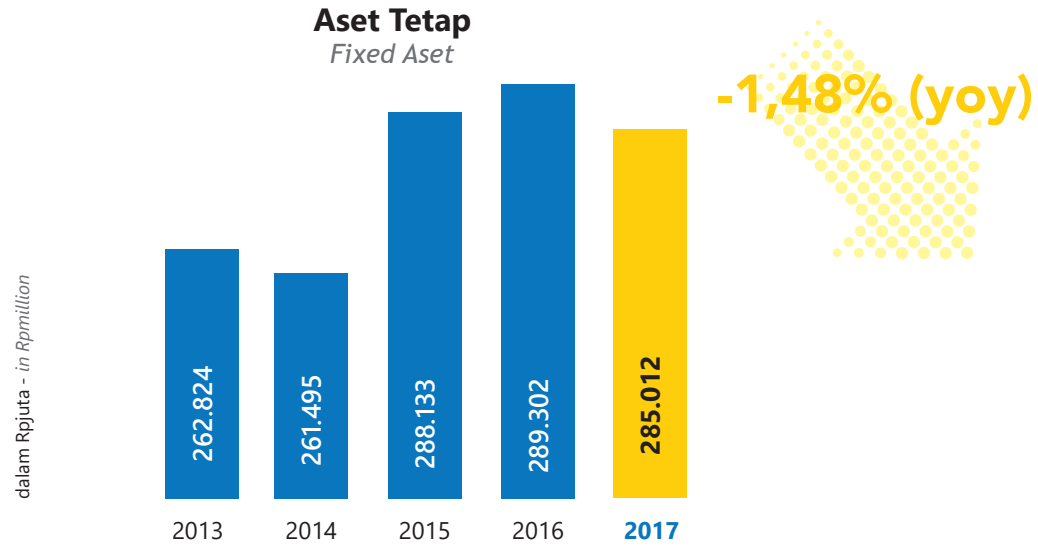

8. Aset lain-lain

Sampai dengan akhir tahun 2017, Aset lain-lain mengalami penurunan dengan saldo sebesar Rp510.043 juta lebih rendah dari saldo tahun 2016 yakni sebesar Rp551.959 juta. Perkembangan aset lain-lain bank tergambar pada tabel dibawah ini:

8. Other assets

Until the end of 2017, Other assets decreased by the balance of Rp510,043 million lower than the balance of 2016 amounting to Rp551,959 million. The development of other bank assets is illustrated in the table below:

ASET LAIN-LAIN BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
OTHER ASSETS OF BANK PAPUA IN 2013-2017 (RpMILLION)

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*DESCRIPTION*
						Nominal	%	
Piutang Bunga Penempatan pada Bank Lain	2.448	1.095	2.236	1.517	1.501	(16)	-1,05%	*Placement Interest Receivables at Other Banks*
Piutang Bunga Surat Berharga	7.973	4.704	9.629	8.696	3.954	(4.742)	-54,53%	*Securities Interest Receivable*
Premium SB dibayar dimuka	-	237	1.492	6.337	2	(6.335)	-99,98%	*Premium SB paid upfront*
Rupa Rupa Lainnya	24.930	163.830	247.136	39.927	29.079	(10.848)	-27,17%	*Other Fine*
Uang muka Lainnya	5.683	139.568	210.992	7.983	11.495	3.512	43,99%	*Other Advances*
Aktiva Non Produktif	4.948	-	100.000	85.000	100.520	15.520	18,26%	*Non-earning Assets*
Persediaan Kantor	3.355	4.918	3.776	4.429	5.713	1.284	28,99%	*Visit the Office*
Persediaan Lainnya	1.453	2.550	1.236	2.176	3.465	1.289	59,24%	*Share More*
Biaya Dibayar Dimuka	19.864	24.541	25.471	21.361	17.045	(4.317)	-20,21%	*Paid Prepaid*
Aktiva Pajak Tangguhan	8.543	9.517	63.309	95.354	89.850	(5.504)	-5,77%	*Deferred Tax Assets*
Pajak Penghasilan Lebih Bayar	-	73.105	82.077	73.994	72.467	(1.526)	-2,06%	*More Income Tax*
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	-	2	4	4	318	314	7388,91%	*Value Added Tax (VAT)*
Uang Jaminan	171	2.236	2.218	2.155	2.113	(43)	-1,97%	*Bail*
Beban Yang Ditangguhkan Lainnya	30.287	15.856	13.227	8.753	7.888	(865)	-9,88%	*Other Deferred Charges*
Rek. Dalam Penyelesaian	203	583	1.051	2.086	3.293	1.207	57,87%	*Rec. In Settlement*
Lainnya	7.972	3.619	1.851	192.188	161.341	(30.847)	-16,05%	*Others*
Total	**117.830**	**446.360**	**765.704**	**551.959**	**510.043**	**(41.916)**	**-7,59%**	***Total***

Sedangkan untuk aset tidak produktif ditahun 2017 sebesar Rp100.520 juta, tumbuh dibandingkan aset tidak produktif bank ditahun 2016 yakni sebesar Rp85.000 juta. Perkembangan aset produktif Bank Papua tergambar pada tabel dibawah ini:

As for non performing assets in 2017 amounting to Rp100.520 million, growing compared to bank non performing assets in 2016 amounting to Rp85.000 million. The development of productive assets of Bank Papua is illustrated in the table below:

ASET TIDAK PRODUKTIF BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
NON PERFORMING ASSETS OF BANK PAPUA IN 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Agunan yang diambil alih	15.193	15.193	113.772	113.772	129.292	15.520	13,64%	*Foreclosed properties*
Properti terbengkalai	169	169	169	169	169	-	0,00%	*Neglected Property*
Total	15.362	15.362	113.941	113.941	129.461	15.520	13,62%	*Total*
Penyisihan penghapusan :						-	-	*Allowance for write off*
Aset yang diambil alih	(10.290)	(15.193)	(13.772)	(28.772)	(28.772)	-	0,00%	*Forclosed Asset*
Properti terbengkalai	(124)	(169)	(169)	(169)	(169)	-	0,00%	*Neglected Property*
Total penyisihan	(10.414)	(15.362)	(13.941)	(28.941)	(28.941)	-	0,00%	*Total allowance*
Neto	**4.948**	**0**	**100.000**	**85.000**	**100.520**	**15.520**	**18,26%**	**Net**

LIABILITAS/ KEWAJIBAN

Liabilitas atau kewajiban Bank Papua mengalami penurunan dari Rp18.242.594 juta pada tahun 2016 menjadi Rp17.725.808 juta di tahun 2017. Penurunan liabilitas berasal dari Pinjaman yang diterima - Pihak ketiga yang penurunan dari Rp325.000 juta menjadi sebesar Rp8.594 juta ditahun 2017. Perkembangan Liabilitas Bank Papua tergambar pada tabel dibawah ini:

LIABILITY

Liabilities of Bank Papua decreased from Rp18,242,594 million in 2016 to Rp17,725,808 million in 2017. The decrease in liabilities was derived from borrowing - Third parties decreased from Rp325,000 million to Rp8,594 million in 2017. The development of Bank Indonesia Liabilities is illustrated in the table below:

LIABILITAS BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
LIABILITIES OF BANK PAPUA IN 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Liabilitas segera	866.636	964.858	978.224	566.370	664.354	97.984	17,30%	*Current Liabilities*
Simpanan Nasabah	13.469.167	16.673.385	15.787.212	16.477.114	16.478.662	85.143	0,53%	*Deposits from Customer*
Simpanan dari bank lain	48.249	39.744	119.151	90.817	91.770	954	1,05%	*Deposits from other banks*
Pinjaman yang diterima - Pihak ketiga	894.797	36.168	235.143	325.000	8.594	(316.406)	-97,36%	*Loans received - Third parties*
Cadangan Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-	-	-	-	*Reserves Estimated losses on commitments and contingencies*
Liabilitas lain-lain	310.975	342.581	432.576	781.746	397.286	(384.460)	-49,18%	*Other liabilities*
Total	**15.541.575**	**18.016.992**	**17.552.306**	**18.242.594**	**17.725.808**	**(516.786)**	**-2,83%**	**Total**

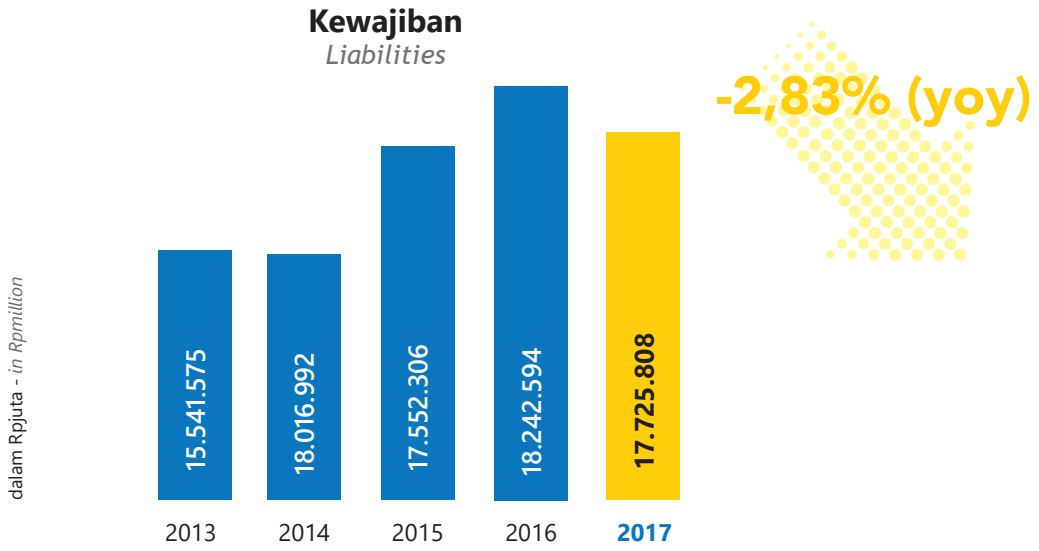

1. Liabilitas Segera
   Liabilitas segera merupakan kewajiban Bank Papua yang harus segera dibayar, dengan rincian: Liabilitas kepada Kantor Bendahara dan Kas Negara, Rekening Titipan, Kiriman Uang, Utang Pajak, Setoran Jaminan yang telah jatuh tempo tetapi belum diambil nasabah, Utang Bunga, dan Lainnya. Sampai dengan akhir Desember 2017, terjadi peningkatan liabilitas yakni menjadi sebesar Rp664.353 juta yang sebelumnya sebesar Rp566.370 juta pada tahun 2016. Posisi liabilitas segera Bank Papua per 31 Desember 2017 tergambar pada tabel dibawah ini:

1. *Current Liabilities*
   Current liability is an obligation of Bank Papua to be paid immediately, with details: Liabilities to the Treasury and State Treasury Office, Cash Account, Money Transfer, Tax Debt, Guaranteed Deposit but not yet taken by the customer, Interest Payable, and Others. Up to the end of December 2017, an increase in liabilities amounted to Rp664,353 million, which was previously Rp566,370 million in 2016. The position of Bank Papua's current liabilities as of December 31, 2017 is illustrated in the table below:

LIABILITAS SEGERA BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
CURRENT LIABILITIES OF BANK PAPUA IN 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Liabilitas kepada Kantor Bendahara dan Kas Negara	280.821	418.789	437.790	134.017	112.428	(21.589)	-16,11%	*Liabilities to the Treasury and State Treasury Office*
Rekening Titipan Utang Pajak Setoran Jaminan yang telah jatuh tempo	567.825	542.651	458.254	415.434	521.300	105.866	25,48%	*Account Deposit Guarantee Debt Deposit Guarantee that has matured*
Utang Pajak Setoran Jaminan yang telah jatuh tempo	10.173	-	41.671	-	13.985	13.985	100,00%	*Wasteful Warranty Tax Payable*
Setoran Jaminan yang telah jatuh tempo tetapi belum diambil nasabah	5.643	2.841	39.739	15.071	12,010	(3,061)	-20,31%	*Deposit Guarantee that has matured but not yet taken by the customer*
Utang bunga	2.174	577	769	1.848	4.630	2.782	150,54%	*Interest debt*
Total	**866.636**	**964.858**	**978.224**	**566.370**	**664.353**	**97.983**	**17,30%**	**Total**

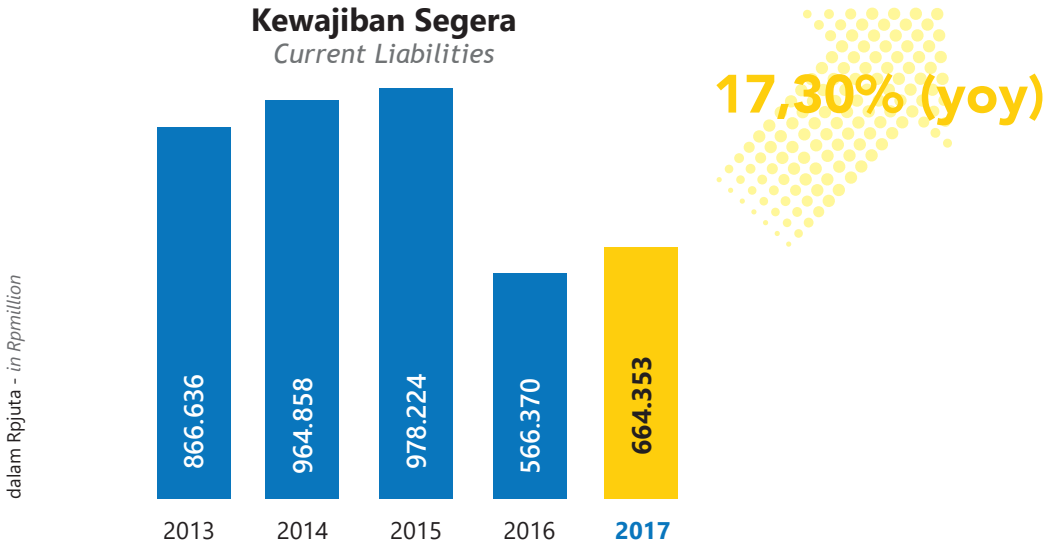

2. Simpanan Nasabah
Simpanan nasabah merupakan dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat melalui produk-produk dana pihak ketiga Bank Papua yang terdiri dari produk giro, tabungan, dan deposito dan simpanan dari bank lain. Sampai dengan akhir Desember 2017, komposisi simpanan nasabah Bank Papua didominasi oleh produk Giro, dimana terjadi pertumbuhan pada produk tersebut, sehingga total simpanan nasabah mengalami peningkatan yakni dari Rp16.569.479 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp16.655.575 juta pada tahun 2017. Pertumbuhan simpanan nasabah bank tergambar pada grafik dibawah ini:

2. *Customer Deposits*
Deposits from customers are third party funds collected from the public through third party fund products of Bank Papua consisting of current account, savings deposits, and time deposits and deposits from other banks. Until the end of December 2016, the composition of customer deposits of Bank Papua is dominated by Current Account products, where there is growth in the product, resulting in total customer deposits increased from Rp16,569,479 million in 2016 to Rp16,655,575 million in 2017. Deposit growth of bank customers are illustrated in the graph below:

PERTUMBUHAN SIMPANAN NASABAH&SIMPANAN DARI BANK LAIN TAHUN 2013-2017 (RpJUTA) *CUSTOMER DEPOSITS GROWTH FROM OTHER BANKS IN 2013-2017 (RpMILLION)*								
Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Giro	6.951.249	7.383.293	7.368.548	7.118.045	7.731.486	613,441	8.62%	*Current Account*
Tabungan	4.621.902	5.324.238	5.878.738	6.292.181	6.573.996	281,816	4,48%	*Savings*
Deposito	1.896.016	3.965.854	2.659.077	3.159.254	2.350.092	(809,162)	-25,61%	*Time Deposit*
TOTAL	**13.469.167**	**16.673.385**	**15.906.363**	**16.569.479**	**16.655.575**	**86,096**	**0,52%**	**TOTAL**

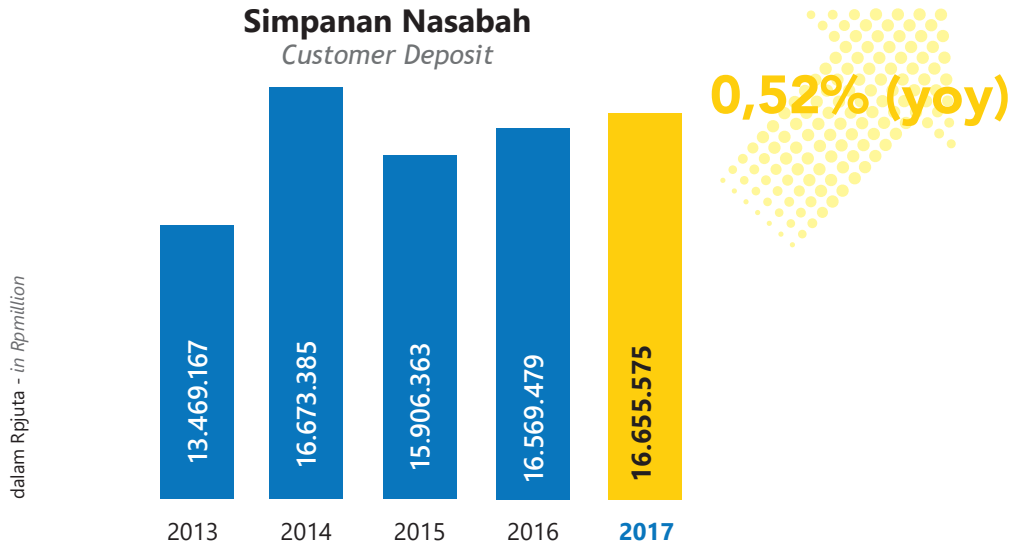

3. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima Bank Papua hingga tahun 2017 terdiri dari dukungan dana dari Bank Indonesia dalam bentuk Kredit *Likuiditas* Bank Indonesia (KLBI), Pinjaman Rekening Dana Investasi, dan Pinjaman KUMK SUP-005. Sampai dengan akhir Desember 2017, total Pinjaman yang diterima Bank Papua sebesar Rp8.594 juta turun sebesar 97,36% dari tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp325.000 juta, dimana terjadi penurunan signifikan pada *account Interbank Call Money* Bank Umum menjadi Rp0. Pertumbuhan Pinjaman yang diterima bank tergambar pada grafik dibawah ini:

3. Borrowing

Borrowing by Bank Papua until 2017 consist of funding support from Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Liquidity Loan (KLBI), Investment Fund Account Loan, and KUMK SUP-005 Loan. Until the end of December 2017, total loans received by Bank Papua amounting to Rp8,594 million fell by 97.36% from the year 2016 amounted to Rp325,000 million, where there was a significant decrease in the account of Interbank Call Money Commercial Bank to Rp0. Borrowing growth is reflected in the graph below:

PINJAMAN YANG DITERIMA BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA) *LOAN RECEIVED BY BANK PAPUA IN 2013-2017 (RpMILLION)*								
Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Interbank Call Money Bank Umum	860.000	-	200.000	300.000	-	-	-	*Interbank Call Money Commercial Bank*
KUMK SUP-005	34.655	36.025	35.000	25.000	8.594	(16.406)	-65,62%	*KUMK SUP-005*
Bank Indonesia	117	117	117	-		-	-	*Bank Indonesia*
Pinjaman Penerusan BTN-RDI	26	26	26	-	-	-	-	*BTN-RDI Forwarding Loans*
Total	**894.798**	**36.168**	**235.143**	**325.000**	**8.594**	**(316.406)**	**-97,36%**	**Total**

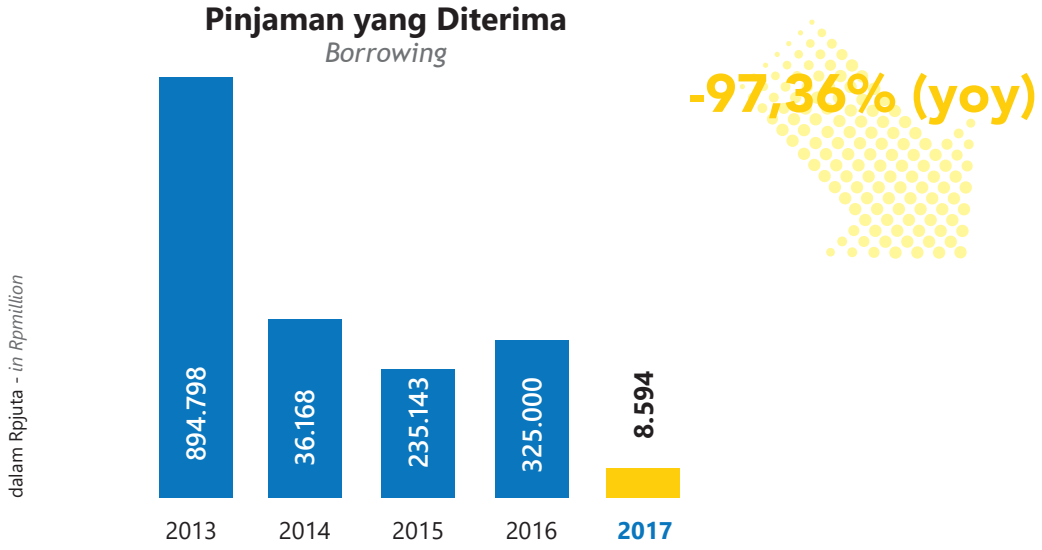

4. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi
   Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) No.13/658/DPNP/DPnP tanggal 23 Desember 2011, Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non-produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi), namun Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

5. Liabilitas lain-lain
   Liabilitas lain-lain terdiri dari Jasa produksi dan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris, Rekening Titipan, Liabilitas manfaat karyawan, Setoran jaminan, Bunga deposito, Biaya yang masih harus dibayar, Pendapatan diterima dimuka, dan lainnya. Pada akhir tahun 2017, liabilitas lain-lain mengalami penurunan dari Rp781.745 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp397.286 juta di tahun 2017. Penurunan ini dikarenakan turunnya saldo pada Rekening Titipan secara signifikan. Pertumbuhan Liabilitas lain-lain tergambar pada grafik dibawah ini:

4. Estimated Losses of Commitment and Contingency
In accordance with Bank Indonesia Circular Letter No.13 / 658 / DPNP / DPnP dated December 23, 2011, the Bank is no longer required to establish allowance for impairment losses on non-earning assets and off-balance sheet transactions (commitments and contingencies) but the Bank still must calculate the allowance for impairment losses based on the applicable Statement of Financial Accounting Standards.

5. Other Liabilities
Other liabilities consist of production services and Tantiem Board of Directors and Board of Commissioners, Custody Account, Employee Benefit Liabilities, Deposit Guarantee, Interest on Deposit, Accrued Expenses, Revenue Received Upfront, and others. At the end of 2017, other liabilities decreased from Rp781,745 million in 2016 to Rp397,286 million in 2017. This decrease was due to significant decline in account balances. The growth of other liabilities is illustrated in the graph below:

LIABILITAS LAIN-LAIN BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
OTHER LIABILITIES BANK PAPUA YEAR 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		Description
						Nominal	%	
Jasa produksi dan Tantiem Direksi dan Dewan Pengawas	193.555	59.183	151.242	67.643	146	(67.497)	-99,78%	*Production services and Tantiem of Directors and Supervisory Board*
Rekening Titipan	23.181	50.391	97.047	429.246	19.322	(409.924)	95,50%	*Safekeeping account*
Liabilitas manfaat karyawan	32.799	183.521	130.875	258.824	359.451	100.627	38,88%	*Employee benefits liability*
Setoran jaminan	18.905	27.641	37.787	9.333	1.629	(7.704)	-82,55%	*Deposit guarantee*
Bunga deposito	5.364	13.223	8.611	9.857	6.671	(3.186)	32,32%	*Interest on deposits*
Biaya yang masih harus dibayar	34.771	8.167	6.366	6.396	9.550	3.154	49,32%	*Accrued cost*
Pendapatan diterima dimuka	80	69	340	185	29	(156)	-84,11%	*Prepaid income*
Lainnya	2.320	386	308	261	487	226	86,76%	*Others*
Jumlah liabilitas lain-lain	**310.975**	**342.581**	**432.576**	**781.745**	**397.286**	**(384.460)**	**-49,18%**	**Total of other liabilities**

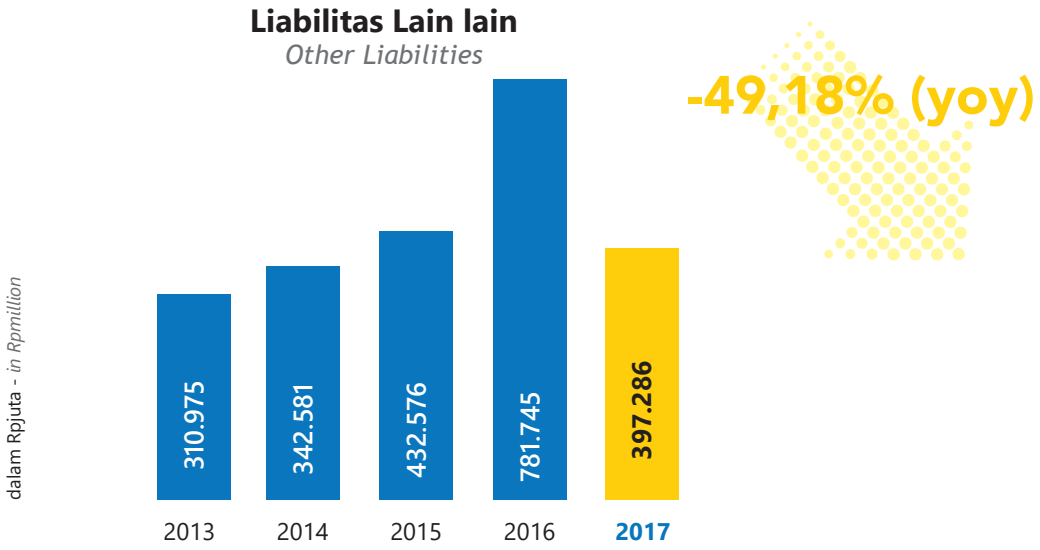

EKUITAS

Pada tahun 2017, jumlah ekuitas Bank Papua naik dari Rp2.369.255 juta ditahun 2016 menjadi sebesar Rp2.675.003 juta pada tahun 2017. Peningkatan ekuitas tersebut berasal dari penambahan setoran modal, sehingga modal saham Bank Papua sebelumnya sebesar Rp1.698.825 menjadi sebesar Rp1.907.850 juta ditahun 2017. Pertumbuhan ekuitas tergambar pada grafik dibawah ini:

EQUITY

In 2017, the total equity of Bank Papua increased from Rp2,369,255 million in 2016 to Rp2,675,003 million in 2017. The increase in the equity was attributable to the increase in the capital injection, thus the previous share capital of Bank Papua amounted to Rp1,698,825 to Rp1,907,850 million in 2017. The growth of equity is illustrated in the graph below:

EKUITAS BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
EQUITY OF BANK PAPUA IN 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Modal Saham	1.122.340	1.319.670	1.490.605	1.698.825	1.907.850	209.025	12,30%	*Capital stock*
Tambahan Modal Disetor	-	23.195	96.160	58.171	95.307	37.135	63,84%	*Additional Paid-in Capital*
Rugi yang belum direalisasi atas Efek-efek, Obligasi setalah pajak	(866)	(535)	3.340	5.451	38	(5.413)	-99,30%	*Unrealized loss on Marketable Securities, Bonds after tax*
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria atas Program Manfaat Pasti	(90.547)	(84.421)	(55.462)	(257.513)	(305.784)	(48.271)	18,75%	*Actuarial Profit (Loss) on the Definite Benefit Program*
Saldo Laba						-		*Retain Earning*
Telah ditentukan penggunaannya	621.589	811.875	887.346	1.101.025	864.320	(236.705)	-21,50%	*Has been determined*
Belum ditentukan penggunaannya	380.573	150.942	383.343	(236.704)	113.273	349.977	-147,85%	*Unspecified*
Total	**2.033.089**	**2.220.726**	**2.805.332**	**2.369.255**	**2.675.004**	**305.749**	**12,90%**	**Total**

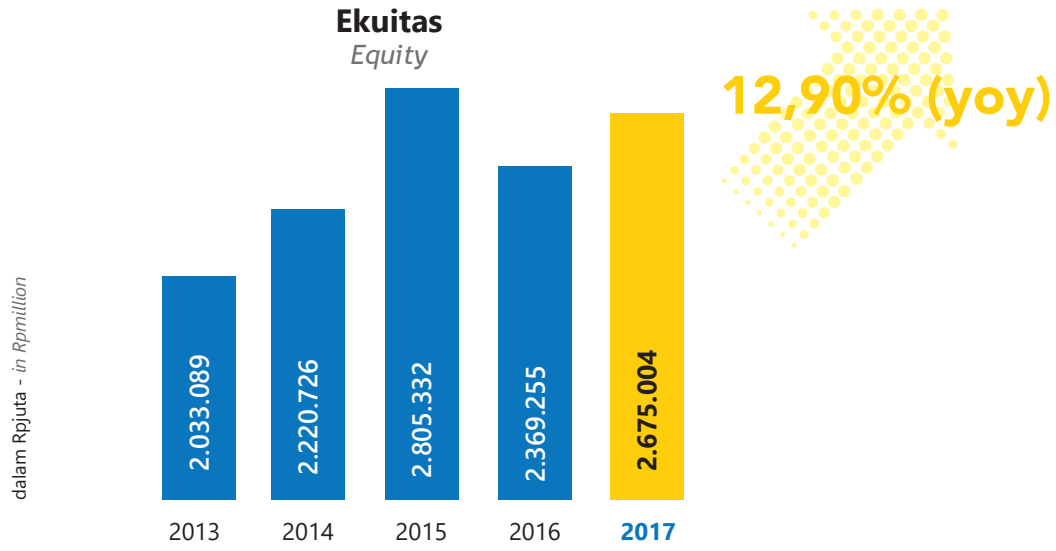

1. Modal Saham
   Modal Saham adalah Jumlah saham dari masing-masing saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham. Per 31 Desember 2017 modal saham Bank Papua adalah sebesar Rp1.907.850 juta.

2. Tambahan Modal Disetor
   Tambahan modal disetor sebesar Rp95.306 juta yang akan disahkan menjadi modal saham berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tahun 2018.

3. Rugi yang belum direalisasi atas Efek-efek, Obligasi setelah pajak
   Rugi yang belum direalisasi atas Efek-efek, Obligasi setelah pajak Bank Papua per 31 Desember 2017 yakni sebesar Rp38 juta

4. Saldo Laba
   Cadangan Umum Bank Papua per 31 Desember 2017 sebesar Rp864.320 milyar sedangkan Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp113.273 milyar. Akun ini terdiri dari laba yang telah ditentukan penggunaannya (cadangan) dan yang belum ditentukan penggunaannya. Untuk akun cadangan terdiri dari cadangan umum dan cadangan tujuan.

1. *Capital stock*
   Stock Capital is the Number of shares of each share that have been placed and paid by the shareholders. As of December 31, 2017 the share capital of Bank Papua amounted to Rp1,907,850 million.

2. *Additional Paid-in Capital*
   The additional paid-in capital of Rp95,306 million has been ratified into share capital pursuant to Statement of Shareholders of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua 2018.

3. *Unrealized loss on Marketable Securities, after-tax Bonds*
   Unrealized loss on Marketable Securities, Bond after tax of Bank Papua as of December 31, 2017 amounting to Rp38 million

4. *Retain Earning*
   General Reserves of Bank Papua as of December 31, 2017 amounting to Rp864,320 billion, while unappropriated Retained Earnings of Rp113,273 billion . This account consists of pre-defined earnings (reserves) and undetermined ones. For reserve accounts consist of general reserve and purposes reserves.

LAPORAN ARUS KAS

Bank Papua menetapkan kebijakan dalam pengelolaan arus kas adalah untuk mengoptimalkan antara arus kas masuk dengan arus kas keluar termasuk arus kas yang sensitif terhadap suku bunga (*rate sensitivity asset* dan *rate sensitivity liability*). Laporan arus kas Bank Papua tahun 2017 disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Uraian mengenai arus kas, tergambar pada tabel dibawah ini.

CASH FLOW STATEMENT

The Bank Papua establishes policies in cash flow management to optimize cash inflows with outflows including cash flow sensitivity (rate sensitivity asset and rate sensitivity liability). The statements of cash flows of Bank Papua 2017 are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. The description of cash flow is illustrated in the table below.

LAPORAN ARUS KAS BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
CASH FLOW STATEMENT OF BANK PAPUA YEAR 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(820.653)	1.615.100	184.323	(140.435)	(138.089)	2.346	-1,67%	*Net Cash Flows Provided by Operating Activities*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(72.763)	(97.419)	(26.638)	(39.353)	(36.457)	2.896	-7,36%	*Net Cash Flows Provided by Investment Activities*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	713.634	(828.391)	367.404	46.410	(70.245)	(116.654)	-251,36%	*Net Cash Flows Provided from Financing Activities*
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(179.781)	689.290	525.089	(133.378)	(244.791)	(111.412)	83,53%	*Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents*
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	2.286.190	2.106.409	2.106.409	2.631.498	2.498.120	(133.378)	-5,07%	*Cash and Cash Equivalents Early Years*
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	**2.106.409**	**2.795.699**	**2.631.498**	**2.498.120**	**2.253.330**	**(244.790)**	**-9,80%**	**Cash and Cash Equivalents At End of Year**

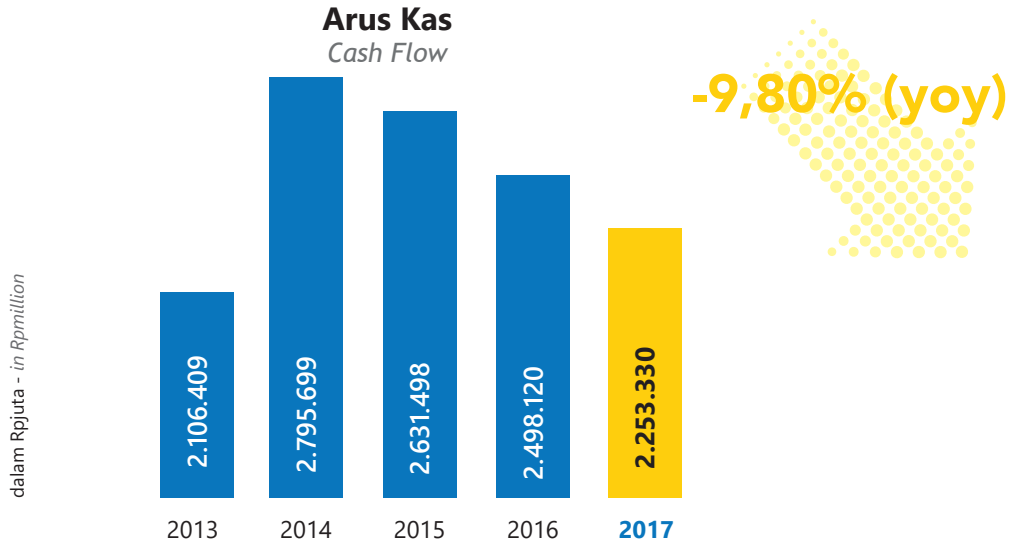

LABA RUGI

Pada tanggal 31 Desember 2017, Bank Papua telah berhasil mencapai laba bersih sebesar Rp113,273 juta yang naik secara signifikan dari laba tahun sebelumnya yakni sebesar Rp(236.704)juta ditahun 2016. Pertumbuhan ini terutama disebabkan tingginya pendapatan bunga dan operasional Bank yang signifikan dan menurunnya CKPN pada tahun 2017. Uraian mengenai laba rugi, tergambar pada tabel dibawah ini.

EARNING AND LOSS

As of December 31, 2017, Bank Papua has successfully achieved a net earning of Rp113,273 million which rose significantly from the previous year's earning of Rp(236,704) million in 2016. This growth was primarily due to high interest income and significant bank operations and declining of CKPN in 2017. The description of profit and loss is illustrated in the table below.

PERKEMBANGAN LABA RUGI BANK PAPUA TAHUN2013-2017 (RpJUTA)
EARNING & LOSS GROWTH OF BANK PAPUA YEAR 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth	*Description*
						Nominal	
Pendapatan Bunga & Operasional	1.755.554	2.133.475	2.347.255	2.220.022	2.294.936	74.915	*Interest & Operational Income*
Beban Bunga & Operasional	(263.738)	(468.989)	(580.229)	(447.745)	(432.383)	15.362	*Interest & Operational Expenses*
Pendapatan Operasional Bersih	1.491.816	1.664.486	1.767.026	1.772.277	1.862.553	90.276	*Net Operating Income*
Pembentukkan CKPN	(73.915)	(552.704)	(281.306)	(879.997)	(687.937)	192.060	*Formation of CKPN*
Beban Operasional Lainnya	(926.767)	(925.217)	(1.021.379)	(1.089.999)	(1.048.283)	41.716	*Other Operating Expenses*
LABA OPERASIONAL	491.134	186.565	464.341	(197.718)	126.333	324.052	*OPERATIONAL EARNING*
Pendapatan (Beban) Non Operasional	13.829	19.979	63.960	53.638	18.052	(35.586)	*Non-Operational Income (Expense)*
Laba Sebelum Pajak	504.963	206.544	528.301	(144.081)	144.385	288.466	*Earning before tax*
Beban Pajak Penghasilan	(124.392)	(55.602)	(144.957)	(92.624)	(31.113)	61.511	*Income Tax Expense*
Laba Bersih Tahun Berjalan	380.572	150.942	383.344	(236.704)	113.273	349.977	*Net Earning of the Current Year*
Pendapatan (Beban) Komprehensif	(866)	331	(52.122)	(147.534)	42.884	190.418	*Comprehensive Income (Expense)*
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	379.705	151.273	331.222	(384.239)	156.156	540.395	*Comprehensive Earning of the Current Year*

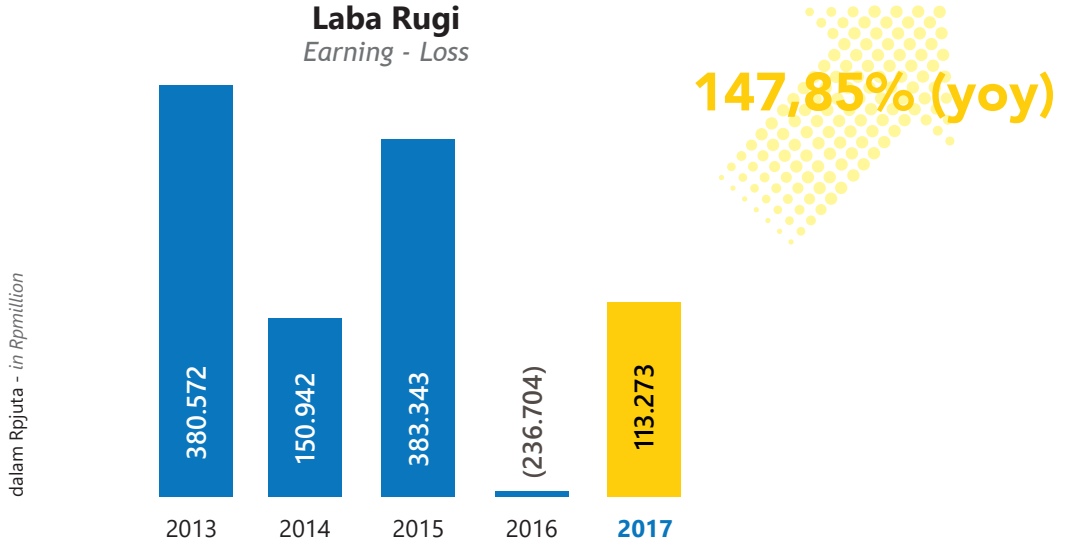

1. Pendapatan Bunga & Operasional

Bank Papua memperoleh pendapatan bunga dan operasional dari hasil penyaluran kredit, penempatan dana antar bank, surat-surat berharga, serta pendapatan provisi dan komisi. Untuk tahun 2017 ini, Bank memperoleh pendapatan yang meningkat dibandingkan tahun 2016, yakni dari sebesar Rp2.220.022 juta menjadi sebesar Rp2.294.936 pada tahun 2017. Uraian mengenai pendapatan bunga dan operasional tergambar pada tabel dibawah ini.

1. Interest & Operational Income

Bank Papua earned interest and operating income from loan, interbank placements, marketable securities, and provision and commission income. For the year 2017, the Bank has increased its incomes compared to 2016, from Rp2,220,021 million to Rp2,294,936 in 2017. Description of interest and operating income is illustrated in the table below.

PENDAPATAN BUNGA DAN OPERASIONAL BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
INTEREST AND OPERATIONAL INCOME BANK PAPUA YEAR 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Pendapatan Bunga Kredit	1.356.155	1.676.165	1.727.926	1.624.348	1.695.828	71.480	4,40%	*Loan Interest Income*
Pendapatan Bunga Penempatan	299.443	360.351	267.009	464.312	418.967	(45.345)	-9,77%	*Placement Interest Income*
Pendapatan Operasional lainnya	105.964	161.440	519.512	31.005	81.556	50.551	163,04%	*Other Operating Income*
Pendapatan provisi dan komisi	90.687	90.930	94.223	100.356	98.585	(1.771)	-1,76%	*Provision and commission income*
Jumlah	**1.851.616**	**2.288.886**	**2.347.255**	**2.220.021**	**2.294.936**	**74.915**	**3,37%**	*Total*

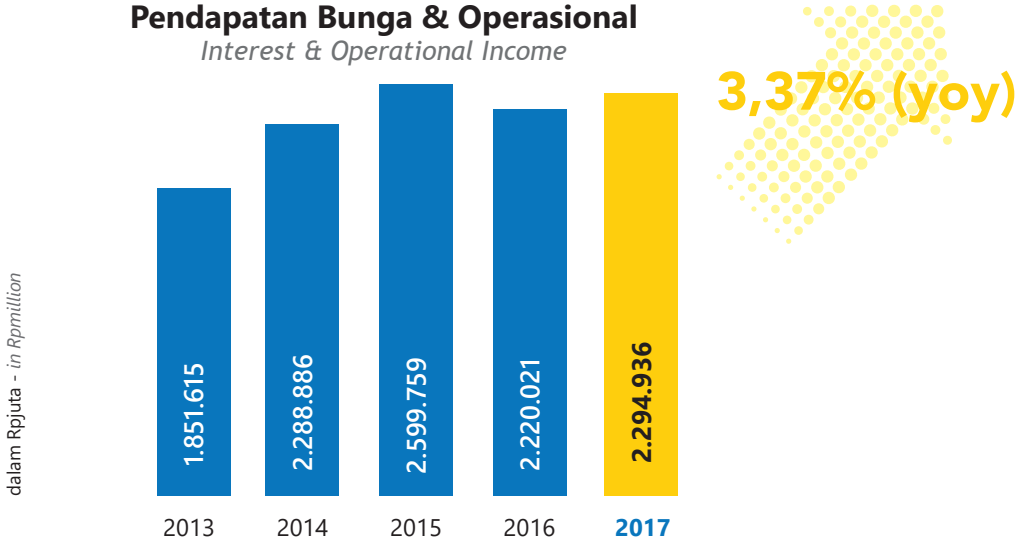

* **Pendapatan Bunga Kredit**

Pendapatan bunga bank dari hasil penyaluran kredit lebih besar dari pendapatan lainnya. Untuk tahun 2017 ini, bank mencatat pendapatan bunga yang diperoleh dari penyaluran kredit adalah sebesar Rp1.695.828 juta, atau tumbuh sebesar 4,40% dari tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp1.624.348 juta. Skim kredit Bank Papua yang terdiri dari Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, Kredit Konsumsi, Kredit Sindikasi, Kredit Karyawan dan Kredit Program Pemerintah tingkat suku bunga rata-rata naik 4% - 24%.

Selama tahun 2017, skim kredit konsumsi memberikan pendapatan yang besar bagi bank. Peningkatan pendapatan bunga dari kredit, tergambar pada tabel dibawah ini.

* ***Loan Interest Income***

The bank's interest income from loan is greater than other income. For the year 2017, the bank recorded interest income derived from lending amounted to Rp1,695,828 million, or grew by 4.40% from the year 2016 recorded at Rp1,624,348 million. Bank Papua's loan scheme consisting of Working Capital Loan, Investment Loan, Consumption Loan, Syndicated Loan, Employee Loan and Government Program Loan average interest rate increase 4% - 24%.

During 2017, the consumption loan scheme provides substantial revenues for banks. Increase in interest income from loan, illustrated in the table below.

PENDAPATAN BUNGA KREDIT BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
BANK PAPUA LOAN INTEREST INCOME FOR 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		Description
						Nominal	%	
Kredit Modal Kerja	396.518	502.518	496.369	437.440	354.732	(82.708)	-18,91%	*Working Capital Loan*
Kredit Investasi	180.433	230.108	210.245	163.267	153.458	(9.809)	-6,01%	*Investment Loan*
Kredit Konsumsi	600.879	715.875	820.566	874.901	1.051.961	177.060	20,24%	*Consumer Loan*
Kredit Sindikasi	138.637	174.538	156.732	119.866	106.250	(13.616)	-11,36%	*Syndication Loan*
Kredit Karyawan	18.062	21.924	156.732	20.028	26.311	6.283	31,37%	*Employee Loan*
Kredit Program Pemerintah	21.626	28.905	20.932	8.846	3.116	(5.730)	-64,78%	*Government Program Loans*
Kredit Unwinding	-	2.296	1,568	-	-	-	-	*Unwinding Loan*
Jumlah	**1.356.155**	**1.676.164**	**1.727.926**	**1.624.348**	**1.695.828**	**71.480**	**4,40%**	*Total*

* **Pendapatan Bunga Penempatan**
Pendapatan Bunga Penempatan Bank Papua terbesar didapat dari bunga penempatan bank lain. Untuk tahun 2017 ini, bank membukukan pendapatan bunga penempatan sebesar Rp418.967 juta, jika dibandingkan dengan tahun 2016 yakni sebesar Rp464.312 juta, maka terjadi penurunan sebesar 9,77%.

* ***Placement Interest Income***
The largest placement Interest income of the Bank Papua comes from interest on the placement of other banks. For the year 2017, the bank posted a placement interest income of Rp418.097 million, when compared with the year 2016 amounting to Rp464.312 million, then a decrease of 9.77%.

* **Pendapatan Operasional**
Pendapatan operasional bank berasal dari Bunga SDBI, Bunga obligasi korporasi, Bunga obligasi pemerintah, Bunga reksadana, Bunga reverse repo, Bunga surat berharga, Bunga SBI, Pendapatan hapus buku, Bunga SPN, Bunga SPN Syariah, Keuntungan (Kerugian) dari perubahan nilai wajar yang belum direalisasi dan penjualan instrumen keuangan, dan Pendapatan Diskonto Surat Berharga. Untuk tahun 2017 ini, bank membukukan pendapatan operasional sebesar Rp81.556 juta meningkat dari tahun 2016 yakni sebesar Rp31.005 juta.

* ***Operating Income***
The bank's operating income is derived from SDBI interest, interest on corporate bonds, interest on government bonds, mutual funds, reverse repo interest, securities interest, interest on SBIs, book-write income, SPN interest, Sharia SPN interest, gain (loss) from changes in fair value unrealized and sale of financial instruments, and Securities Discount Income. For the year 2017, the bank recorded an operating income of Rp81.556 million increased from 2016 amounting to Rp31.005 million.

* **Pendapatan Amortisasi Konversi Kredit**
Pendapatan Amortisasi Konversi Kredit Bank Papua berasal dari Amortisasi Konversi Kredit KMK, Amortisasi Konversi Kredit KI, Amortisasi Konversi Kredit KKs, Amortisasi Konversi Kredit Sindikasi, Amortisasi Konversi Kredit Karyawan, dan Amortisasi Konversi Kredit Program Pemerintah. Untuk tahun 2017 Bank membukukan Pendapatan Amortisasi sebesar Rp212.089 juta meningkat dari tahun 2016 yakni sebesar Rp6.307 juta.

* ***Loan Amortization Amortization Income***
Amortization of Loan Conversion of Bank Papua is derived from Amortization of WCL Loan Conversion, Amortization of IL Loan Conversion, Amortization of Consumption Loan Conversions, Amortization of Syndicated Loan Conversions, Amortization of Employee Loan Conversions, and Amortization of Government Program Loan Conversions. For 2017, the Bank recorded an Amortization Revenue of Rp212,089 million, up from 2016 amounting to Rp6,307 million.

* **Pendapatan Provisi dan Komisi**
Pendapatan Provisi dan Komisi Bank Papua berasal dari provisi lainnya dan hasil komisi. Untuk tahun 2017 ini, bank membukukan pendapatan Provisi dan Komisi sebesar Rp98.585 juta menurun dari tahun 2016 yakni sebesar Rp100.356 juta.

* ***Provision and Commission Fees***
The Bank's Fees and Commission Fees come from other provisions and commission proceeds. For the year 2017, the bank recorded income Provision and Commission amounting to Rp98.585 million decreased from the year 2016 amounting to Rp100.356 million.

2. Beban Operasional

Beban operasional bank terdiri dari Beban Bunga & Operasional, Beban provisi dan komisi. Sampai dengan akhir tahun 2017, tercatat beban operasional tertinggi adalah beban bunga operasional, yakni beban bunga sebesar Rp431.052, namun terjadi penurunan jika dibandingkan tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp445.924. Beban operasional bank tergambar pada tabel dibawah ini:

2. Operational Expenses

Bank operating expenses consist of Interest & Operational Expenses, Provision and commission expenses. Until the end of 2017, the highest operational expense was operational interest expense, which was interest expense of Rp431.052, but decreased compared to the year 2016 which was recorded at Rp(445.924). Bank operating expenses are illustrated in the table below:

BEBAN OPERASIONAL BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
OPERATIONAL EXPENSES OF BANK PAPUA IN 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Beban Bunga	(260.238)	(466.369)	(578.639)	(445.924)	(431.052)	14.872	-3,34%	*Interest & Operational Expenses*
Beban provisi dan komisi	(3.502)	(2.619)	(1.590)	(1.821)	(1.331)	490	-26,91%	*Provision and commission expenses*
Total	**(263.740)**	**(468.988)**	**(580.229)**	**(447.745)**	**(432.383)**	**15.362**	**-3,43%**	*Total*

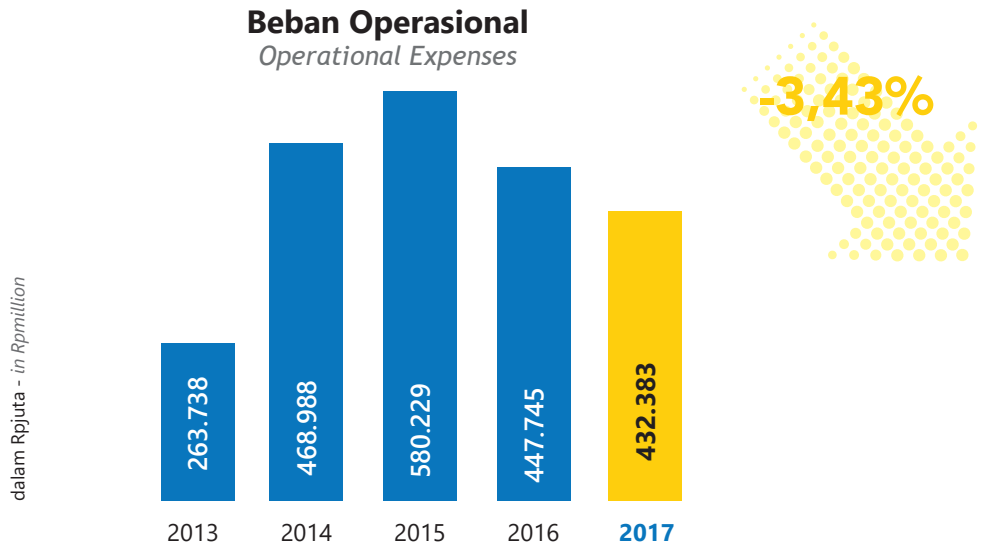

3. **Pembentukkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)**

Beban pembentukan cadangan penurunan nilai pada tahun 2017 tercatat turun menjadi Rp687.937 juta jika dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp879.997 juta. Penurunan pembentukan cadangan penurunan nilai terutama oleh pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif berupa pinjaman yang diberikan dan surat-surat berharga. Uraian mengenai hal tersebut tergambar pada tabel dibawah ini:

3. Forming of Impairment Losses (CKPN)

The expense of forming of Impairment Losses in 2017 was recorded to decrease to Rp(687.937) million compared to 2016 of Rp(879.997) million. Decrease in the establishment of impairment primarily by the establishment of allowance for impairment losses on earning assets in the form of loans and marketable securities. The description of it is illustrated in the table below:

PEMBENTUKAN CKPN BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
FORMATION OF CKPN BANK PAPUA YEAR 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Aset produktif	(73.915)	(547.756)	(281.307)	(864.997)	(687.937)	177.060	-20,47%	*Earning Assets*
Aset non produktif	-	(4.948)	-	(15.000)	-	15.000	-100,00%	*Non-earning Assets*
Total	**(73.915)**	**(552.704)**	**(281.307)**	**(879.997)**	**(687.937)**	**192.060**	**-21,83%**	**Total**

4. Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya pada tahun 2017 juga tercatat turun menjadi Rp(1.048.282) juta dibandingkan tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp(1.089.998) juta. Penurunan ini terutama oleh turunnya beban tenaga kerja dan Beban imbalan manfaat karyawan. Uraian mengenai hal tersebut tergambar pada tabel dibawah ini:

4. Other Operational Expenses

Other operational expenses in 2017 also decreased to Rp(1,048,228) million compared to 2016 recorded at Rp(1,089,998) million. This decrease is mainly due to the decrease in the burden of Labor and Employee Benefits. The description of it is illustrated in the table below:

BEBAN OPERASIONAL LAINNYA BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
OTHER OPERATIONAL EXPENSES OF BANK PAPUA IN 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Penyusutan dan amortisasi	(32.834)	(41.489)	(37.935)	(40.620)	(38.671)	1.949	-4,80%	*Depreciation and amortization*
Umum dan administrasi	(383.081)	(457.103)	(493.086)	(521.682)	(446.804)	74.878	-14,35%	*General and administration*
Tenaga kerja	(503.096)	(415.615)	(478.787)	(468.367)	(479.967)	(11.600)	2,48%	*Employee*
Beban imbalan manfaat karyawan	(7.755)	(11.011)	(11.570)	(59.329)	(82.840)	(23.511)	39,63%	*Employee benefit benefits expense*
Total	**(926.766)**	**(925.218)**	**(1.021.378)**	**(1.089.998)**	**(1.048.282)**	**41.716**	**-3,83%**	**Total**

5. Laba

Hingga akhir Desember 2017, Bank Papua telah menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp144.386 juta atau mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang hanya sebesar Rp144.080 juta. Hal senada juga tercatat pada laba bersih tahun berjalan, dimana Bank mencatat pengingkatan yakni sebesar Rp113.273 juta pada tahun 2017 jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp(236.704) juta pada tahun 2016.

5. Earning

Until the end of December 2017. Bank Papua has made an earning before tax of Rp144,386 million or an increase from 2016, which was only Rp(144,080) million. The same thing is also recorded in the current year net income, which the Bank recorded an increase of Rp113,273 million in 2017 compared to the previous year recorded Rp(236,704) million in 2016.

LABA BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
BANK PAPUA'S EARNING FOR 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		*Description*
						Nominal	%	
Laba Sebelum Pajak	504.964	206.544	528.300	(144.080)	144.386	288.466	-200,21%	*Earning before tax*
Beban pajak penghasilan - bersih	(124.392)	(55.602)	(144.957)	(92.624)	(31.113)	61.511	-66,41%	*Income tax expense - net*
Laba Bersih Tahun Berjalan	380.573	150.942	383.343	(236.704)	113.273	349.977	-147,85%	*Net Earning Current Year*
Pendapatan (Beban) Komprehensif lain	(866)	330	(52.122)	(147.534)	42.883	190.417	-129,07%	*Other Comprehensive Income (Expense)*
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	**379.707**	**151.272**	**331.221**	**(384.238)**	**156.156**	**540.394**	**-140,64%**	**Comprehensive Current Year Earning**

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Berdasarkan pencapaian kinerja ditahun 2017, maka didapatkan rasio-rasio keuangan penting Bank Papua pada akhir tahun sebagaimana tabel di bawah ini.

KEY FINANCIAL RATIO

Financial ratios are tools used to analyze financial condition and company performance. Based on the achievement of performance in 2017, then obtained important financial ratios of Bank Papua at the end of the year as the table below.

RASIO-RASIO KEUANGAN BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (%)
PAPUA BANK FINANCIAL RATIOS YEAR 2013-2017 (%)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Growth %	Description
Rasio Kecukupan Modal (CAR) risiko Kredit, operasional dan Pasar	18,40%	16,28%	22.22%	17,28%	17,99%	0,71%	*Capital Adequacy Ratio (CAR) of loan, Operational and Market risk*
Non Performing Loan (NPL) Gross	1,14%	7,33%	9,63%	15,03%	14,72%	-0,31%	*Non Performing Loan (NPL) Gross*
Non Performing Loan (NPL) Net	0,26%	2,87%	2,99%	3,95%	3,79%	-0,16%	*Non Performing Loan (NPL) Net*
Loan to Deposit Ratio (LDR)	84,48	80,12	83%	86,23%	80,12%	-6,11%	*Loan to Deposit Ratio (LDR)*
Return On Asset (ROA)	2,86%	1,02%	2,60%	-0,61%	0,61%	1,00%	*Return On Assets (ROA)*
Return On Equity (ROE)	17,92%	6.80%	13,66%	-8,06%	4,37%	12,43%	*Return On Equity (ROE)*
Net Interest Margin (NIM)	7,88%	7,59%	7.51%	7,01%	7,16%	0,15%	*Net Interest Margin (NIM)*
Beban operasional terhadap Pendapatan operasional (BOPO)	72,01%	91,26%	80.22%	106,54%	94,35%	-12,19%	*Operating Expenses to Operating Income (OEOI)*

1. Rasio Kecukupan Modal
   Tingginya pemanfaatan aktiva produktif khususnya pada penyaluran kredit dan penempatan, menggiring rasio CAR Bank di tahun 2017 menjadi 17,99%. Untuk angka minimal rasio CAR yang ditetapkan Bank Indonesia adalag 8%, sehingga rasio CAR Bank Papua ditahun 2017 yang berada diatas angka minimal menunjukkan bahwa Bank memiliki ketahanan modal yang kuat dalam meng-cover risiko yang mungkin timbul.

2. Rasio Kredit Bermasalah Gross (NPL Gross)
   Untuk kolektibilitas kredit bermasalah Bank Papua, tingkat rasio NPL gross tahun 2017 sudah berada diatas ambang yang ditetapkan regulator yakni sebesar 14,72%, namun NPL gross tahun 2017 tercatat lebih baik dibandingkan dengan tahun 2016 yakni sebesar 15,03%.

3. Rasio Kredit Bermasalah Net (NPL Net)
   Sedangkan tingkat rasio NPL Net di tahun 2017 sebesar 3,79% lebih baik dibandingkan dengan tahun 2016 yakni sebesar 3,95%

4. *Ratio Loan to Deposit Ratio* (LDR)
   LDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank. Rasio LDR Bank Papua di tahun 2017 sebesar 80,12% lebih baik dibandingkan dengan tahun 2016 yakni sebesar 86,23%. Ini mencerminkan kontribusi besar bank dalam upaya membantu pemerintah

1. *Capital Adequacy Ratio*
   The high utilization of earning assets, especially in the distribution of loan and placement, led the CAR Bank ratio in 2017 to 17.99%. For a minimum rate of CAR ratios set by Bank Indonesia is 8%, so the CAR ratio of Bank Papua in 2017 which is above the minimum indicates that the Bank has strong capital resilience in covering possible risks.

2. *Non Performing Loan Gross Ratio (NPL Gross)*
   For the collectibility of non-performing loans of Bank Papua, the gross NPL ratio of 2017 is above the regulator's 14.72% threshold, but the gross NPL of 2017 is better than 2016 at 15.03%.

3. *Net NPL Ratio (NPL)*
   While the level of NPL Net ratio in 2017 amounted to 3.79% better than the year 2016 at 3.95%

4. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*
   LDR is the ratio between the total amount of lending by the bank and the funds received by the bank. The ratio of LDR of Bank Papua in 2017 is 80.12% better compared to 2016 which is 86.23%. This reflects the large contribution of banks in an effort to help the government revive the productive sector through the

menghidupkan sektor produktif melalui penyaluran kredit sudah maksimal. Disamping itu Bank juga menjaga rasio LDR nya untuk tidak terlalu tinggi, karena rasio LDR menggambarkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber *likuiditas*nya.

maximum loan distribution. Besides, the Bank also keeps its LDR ratio not too high, because the LDR ratio describes how far the ability of banks to repay the withdrawal of funds by depositors by relying on the lending as a source of liquidity.

5. Rasio *Return On Asset* (ROA)
   Selayaknya penggunaan aset yang efektif untuk menghasilkan pendapatan yang maksimal dapat meningkatkan Rasio Return on Aset (ROA). Namun ROA Bank Papua tercatat sebesar -0,61% pada tahun 2016, menjadi 0,61% di tahun 2017.

5. *Return On Asset Ratio (ROA)*
   The proper use of effective assets to generate maximum income can increase the Return on Assets Ratio (ROA). However, Bank Papua's ROA is recorded at -0.61% in 2016, to 0.61% in 2017.

6. *Return On Equity* (ROE)
   Begitu pula dengan *Return on Equity* (ROE) yang mengalami peningkatan dari -8,06% pada tahun 2016, menjadi 4,37% di tahun 2017. Gambaran ini menunjukkan sinergi kinerja volume aset dan pemanfaatan modal yang dimiliki menghasilkan kinerja *rentabilitas* yang sangat optimal.

6. *Return On Equity (ROE)*
   Similarly, the Return on Equity (ROE), which increased from -8.06% in 2016, to 4.37% in 2017. This figure shows the synergy of asset volume performance and utilization of capital owned to produce a very optimal profitability performance.

7. Rasio *Net Interest Margin* (NIM)
   Tingginya hasil usaha bank yang berasal dari pendapatan utama bank yakni pendapatan bunga kredit, mendongkrak Rasio NIM Bank Papua pada posisi 7,16%. Rasio ini menjadi indikator kemampuan pemanfaatan aktiva produktif bank secara maksimal.

7. *Net Interest Margin (NIM)*
   The high yield of bank's business that came from the bank's main income is credit interest income, boosting the NIM Ratio of Bank Papua at 7.16% position. This ratio is an indicator of the maximum utilization of bank earning assets.

8. Rasio BOPO
   Kinerja bank untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi harus pula didukung dengan upaya efisiensi yang optimal yang ditandai dengan rasio BOPO. Ditahun 2017, rasio BOPO Bank Papua tercatat sebesar 94,35% mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2016 yakni sebesar 106,54%. Penurunan ini didorong oleh turunnya beban CKPN bank pada tahun 2017.

8. *OEOI Ratio*
   The performance of banks to generate high revenues should also be supported by optimal efficiency efforts marked by OEOI ratios. In 2017, the ratio of OEOI Bank Papua was recorded at 94.35% decreased compared to 2016 at 106.54%. This decrease was driven by the decrease in impairing losses bank expenses by 2017.

Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
Capital Adequacy Ratio (CAR)

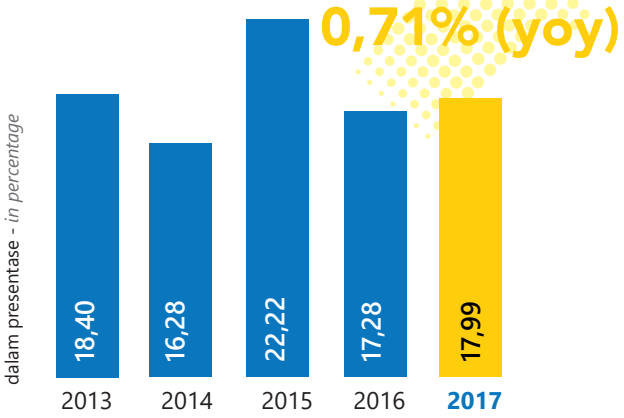

Non Performing Loan Netto
Net NPL

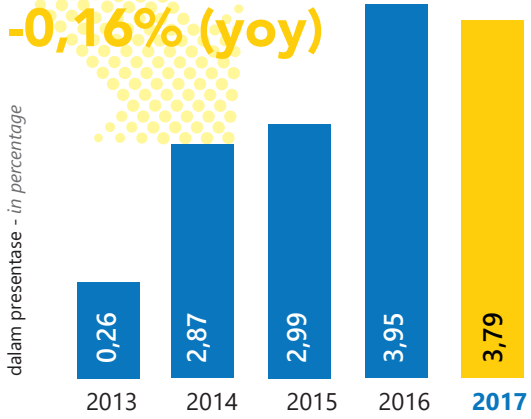

Laba terhadap Aset
Return On Asset (ROA)

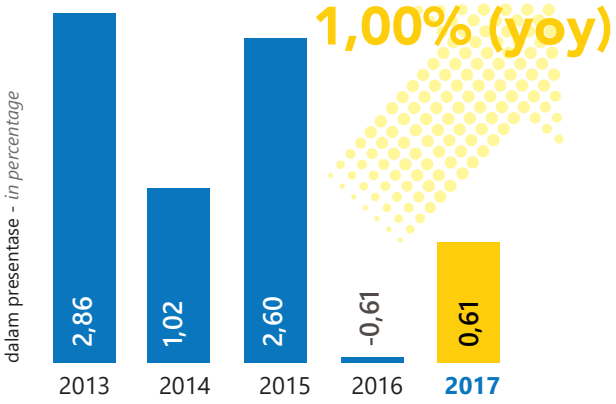

Laba terhadap Modal
Return On Equity (ROE)

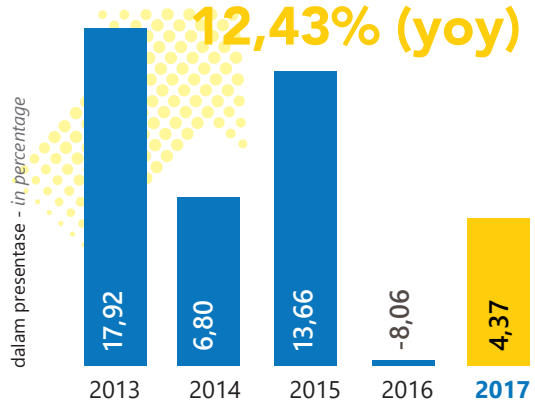

Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga
Loan to Deposit Ratio (LDR)

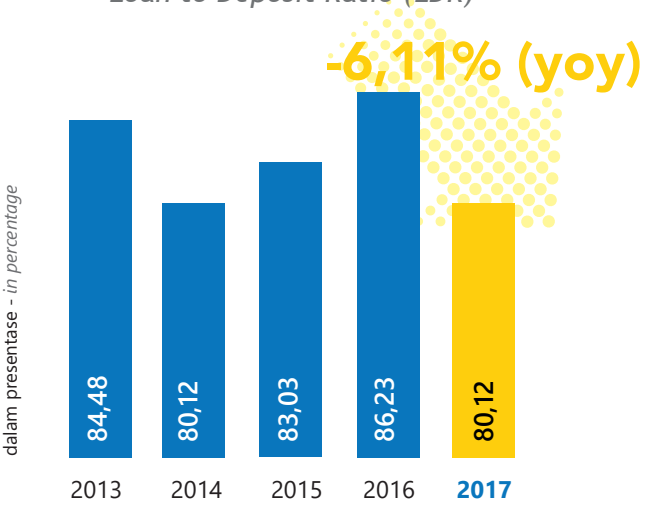

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
Operational Expense to Operational Income (OEOI)

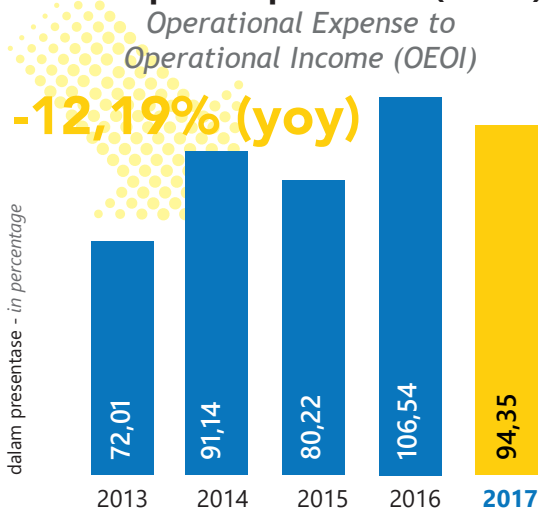

Kemampuan Membayar Hutang
The Ability to Pay Debt

Kemampuan bank untuk membayar semua kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang digambarkan dalam perhitungan rasio *likuiditas*, *solvabilitas* dan *rentabilitas*.

The bank's ability to pay all liabilities, both short and long term, is illustrated in the calculation of liquidity ratios, solvency and profitability.

1. RASIO *LIKUIDITAS*

Rasio *Likuiditas* menggambarkan kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Rasio *Likuiditas* diukur melalui perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan nasabah (LDR) untuk mengetahui kemampuan Bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menyimpan dananya dengan kredit dan pembiayaan yang telah diberikan kepada para debitur sebagai sumber *likuiditas*nya.

1. LIQUIDITY RATIO

The Liquidity Ratio reflects the Bank's ability to meet its short-term obligations or matured liabilities. The Liquidity Ratio is measured by comparison between the amount of lending to the amount of customer deposits (LDR) to determine the ability of the Bank to repay the liabilities to the customers who have kept the funds with the loan and financing provided to the debtor as a source of liquidity.

Rasio Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)

Sampai dengan akhir tahun 2017, LDR Bank Papua tercatat sebesar 80,12%. Terjadi penurunan dibandingkan tahun 2016. Dalam ketentuan batas bawah LDR sebesar 78% dan batas atas LDR sebesar 92%, sehingga rasio LDR Bank Papua pada tahun 2017 sebesar 80,12% mencerminkan bahwa *likuiditas* Bank Papua dalam kondisi baik yang artinya Bank mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.

Loan to Third Party Fund Ratio (LDR)

Until the end of 2017, LDR Bank Papua was recorded at 80.12%. There was a decrease compared to 2016. In the lower limit of LDR by 78% and the upper limit of LDR by 92%, so the ratio of LDR of Bank Papua in 2017 of 80.12% reflects that the liquidity of Bank Papua is in good condition which means the Bank is able to fulfill its term obligations in short.

2. RASIO *SOLVABILITAS*

Rasio *Solvabilitas* menggambarkan kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau kemampuan Bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi Bank. Rasio *Solvabilitas* diukur melalui Rasio Kecukupan Modal (CAR), merupakan salah satu indikator kesehatan dari modal Bank yang menunjukkan seberapa besar modal Bank telah memadai untuk menunjang kebutuhannya dan sebagai dasar untuk menilai prospek kelanjutan usaha Bank.

2. SOLVENCY RATIO

The Solvency Ratio represents the Bank's ability to meet its long-term liabilities or the ability of the Bank to fulfill its obligations in the event of liquidation of the Bank. Solvency Ratio measured through the Capital Adequacy Ratio (CAR), is one of the health indicators of Bank capital showing how much Bank capital has been sufficient to support its needs and as a basis for assessing the prospects for continued Bank business.

Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Sampai dengan akhir tahun 2017, rasio kecukupan modal Bank Papua adalah sebesar 17,99% naik dari angka sebesar 17,28% di tahun 2016. Berdasarkan Rasio Kecukupan Modal tersebut, Bank Papua telah memenuhi kewajiban regulasi untuk menyediakan kecukupan modal sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2. Kewajiban penyediaan kecukupan modal tersebut diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA). Rasio Kecukupan Modal yang meningkat ditahun 2017 menunjukkan kemampuan Bank Papua untuk mengatasi risiko khususnya risiko kredit, pasar dan operasional.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Until the end of 2017, the Bank's capital adequacy ratio is 17.99% up from 17.28% in 2016. Based on the Capital Adequacy Ratio, Bank Papua has fulfilled the regulatory obligation to provide a capital adequacy of 9% to less than 10% of the RWA, for a Bank with a rating profile of risk 2. The obligation for provision of capital adequacy is stipulated in Bank Indonesia Circular Letter no. 14/37 / DPNP dated December 27, 2013 regarding Minimum Capital Adequacy Ratio as per the Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) Risk and Compliance Profile. The increased Capital Adequacy Ratio in 2017 illustrates the ability of Bank Papua to address risks particularly credit, market and operational risks.

Rasio Kredit Bermasalah (NPL) dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Rasio Kredit Bermasalah (NPL) terdiri dari NPL gross dan NPL net. NPL gross membandingkan jumlah kredit yang berstatus kurang lancar, diragukan dan macet terhadap jumlah kredit yang disalurkan. Sedangkan NPL net hanya membandingkan jumlah kredit yang berstatus macet terhadap jumlah kredit yang disalurkan.

Sampai dengan akhir tahun 2017, rasio NPL gross Bank Papua mengalami penurunan menjadi sebesar 14,72% dari angka sebelumnya sebesar 15,03% di tahun 2016. Meskipun berdasarkan rasio NPL gross yang tercatat pada tahun 2017 sangat tinggi, namun kolektibilitas piutang Bank Papua terus diupayakan agar memiliki risiko kemungkinan tidak tertagih kecil.

Non-performing Loan (NPL) Ratios and Receivable Collectibility Rate

The Non-performing Loan (NPL) ratio consists of gross and net NPLs. Gross NPLs compare the number of non-current loans, doubtful and loss to the amount of lending. While the NPL net only compares the amount of credit with a loss to the amount of lending.

Until the end of 2017, the gross NPL ratio of Bank Papua decreased to 14.72% from the previous figure of 15.03% in 2016. Although based on the gross NPL ratio recorded in 2017 is very high, but the collectibility of Bank Papua continues to be pursued in order to have risks small uncollectible possibility.

3. RASIO *RENTABILITAS*

Rasio *Rentabilitas* menggambarkan tingkat profitabilitas dan efisiensi usaha yang dicapai oleh Bank. Rasio *Rentabilitas* untuk menggambarkan tingkat profitabilitas diukur melalui rasio *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE) dan *Net Interest Margin* (NIM), sedangkan untuk menggambarkan tingkat efisiensi usaha diukur melalui rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

3. RENTABILITY RATIO

The Profitability ratio describes the level of profitability and business efficiency achieved by the Bank. The profitability ratio is measured by Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) and Net Interest Margin (NIM), while the business efficiency level is measured by Operating Expense to Operating Income (OEOI) ratio.

Rasio *Rentabilitas* Atas Aktiva (ROA)

Rasio *Rentabilitas* Atas Aktiva (ROA) Bank Papua mengalami peningkatan dari -0,61% menjadi 0,61% di tahun 2017. Peningkatan ini disebabkan pencapaian laba sebelum pajak yang maksimal terhadap ketersediaan aset. Pencapaian laba sebelum pajak yang maksimal dipengaruhi oleh tingginya pendapat bunga dan operasional bank dan turunnya CKPN.

Return on Assets Ratio (ROA)

Bank Papua's Return-to-Asset (ROA) ratio increased from -0.61% to 0.61% in 2017. This increase was attributed to the achievement of maximal profit before tax on asset availability. Achievement of maximal profit before tax is influenced by high interest rate and bank operational and CKPN decline.

Rasio *Rentabilitas* Atas Ekuitas (ROE)

Rasio *Rentabilitas* Atas Ekuitas (ROE) Bank Papua mengalami peningkatan dari -8,06% menjadi 4,37% di tahun 2017. Peningkatan ini disebabkan pencapaian laba setelah pajak yang tumbuh terhadap modal inti Bank Papua. Perusahaan cukup mampu menghasilkan keuntungan besar bagi para pemegang saham melalui pembayaran dividen.

Return on Equity Ratio(ROE)

Bank Papua's Return on Equity (ROE) ratio increased from -8.06% to 4.37% in 2017. This increment was attributed to the achievement of after-tax earning that grew against Bank Papua's core capital. Companies are capable enough to generate big profits for shareholders through dividend payouts.

Rasio Pendapatan Bunga Bersih (NIM)

Rasio Pendapatan Bunga Bersih (NIM) Bank Papua mengalami penurunan dari 7,01% menjadi 7,16% di tahun 2017. Kondisi ini menggambarkan bahwa pendapatan bunga bersih bila dibandingkan dengan aset produktif dinilai masih sangat tinggi.

Net Interest Ratio (NIM)

The Bank Papua's Net Interest Ratio (NIM) decreased from 7.01% to 7.16% in 2017. This condition illustrates that net interest income when compared to earning assets is still considered very high.

Rasio Beban Operasi Terhadap Pendapatan Operasi (BOPO)

Rasio Beban Operasi Terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) Bank Papua mengalami penurunan yang signifikan dari 106,54% menjadi 94,35% di tahun 2017. Penurunan ini dikarenakan menurunnya beban bunga produk dan beban CKPN.

Operating Expense To Operating Income Ratio (OEOI)

The Operating Expense to Operating Income Ratio (OEOI) of Bank Papua has decreased significantly from 106.54% to 94.35% in 2017. This decrement is due to decreasing of CKPN product and CKPN expense.

Dari Rasio *Rentabilitas* Bank Papua ditahun 2017 tersebut, tergambar bahwa bank masih mampu membayar seluruh kewajibannya melalui profit yang didapat serta memaksimalkan upaya efisiensi oleh Bank.

From the Ratio of Rentability of Bank Papua in 2017, it is envisaged that banks are still able to pay all their obligations through profit earned and maximize efficiency efforts by the Bank.

Tinjauan Aspek Pemasaran Bank

Bank Marketing Aspects Overview

Strategi Pemasaran dan Posisi Bank di Industri Perbankan

Untuk menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat dan menjawab tuntunan pasar yang terus berubah, Perusahaan dituntut untuk melakukan inovasi dan peningkatan layanan sesuai dengan target marketnya. Salah satu aspek penting adalah dengan melakukan *customer targeting* dan *Customer Engagement* yang lebih baik. Melalui hal tersebut Perusahaan dapat mengetahui lebih baik mengenai kebutuhan dan preferensi nasabah serta memahami kondisi persaingan bisnis terkini, dan kepekaan organisasi bisnis terhadap pasar yang dihadapi. Hal tersebut diatas dilakukan agar strategi pemasaran yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga memberikan kemampuan bagi Perusahaan untuk mengembangkan bisnis yang berkelanjutan.

Marketing Strategy and Bank Position in Banking Industry

To face the increasingly fierce business competition and answer the ever changing market guidance, the Company is required to innovate and improve the service in accordance with its target market. One of the important aspects is to do customer targeting and customizing argument better. Through this, the Company can better understand customers' needs and preferences as well as understand the current state of business competition, and the business organization's sensitivity to the markets it faces. The above is done so that the marketing strategy can be run effectively and efficiently so as to provide the ability for the Company to develop a sustainable business.

Dari sisi penghimpunan dana, Perusahaan fokus pada akusisi dana murah (CASA) dengan melakukan program-program untuk menghimpun tabungan antara lain *promo event*, *partnership* dengan Pemerintah dan Perusahaan nasional maupun swasta untuk kesempatan *cross selling* dan *point redemption partner*, *debit card usage campaign* serta program inovatif lainnya. Untuk penghimpunan giro, Perusahaan mengedepankan fasilitas *cash management sistem* yang memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan transaksi finansialnya secara transparan dan akuntabel serta berusaha untuk menjadikan Perusahaan sebagai *main operating account*. Pengumpulan CASA juga dilakukan melalui aktivitas *Value Chain*, Payroll, Channel, dan EDC.

From the fund-raising side, the Company focuses on the acquisition of low-cost funds (CASA) by conducting programs to raise savings such as promo events, partnerships with Government and national and private companies for cross selling opportunities and point redemption partners, debit card usage campaign and programs other innovative. From the collection of current accounts, the Company prioritizes cash management system facility which facilitates Local Government in conducting its transparent and accountable financial transactions and strives to make the Company as a main operating account. CASA fundraising is also done through Value Chain, Payroll, Channel, and EDC activities.

Fokus Perusahaan dalam pengumpulan dana murah (CASA) menghasilkan komposisi CASA terhadap total dana pihak ketiga di tahun 2017 terus dipertahankan dan ditingkatkan. Hal ini memberikan kapabilitas bagi Perusahaan untuk bersaing di industri dengan memberikan harga yang lebih kompetitif kepada nasabahnya. Dengan strategi tersebut Perusahaan yakin mendapatkan nasabah-nasabah yang berkualitas baik sehingga kualitas aset dapat terjaga.

The focus of the Company on the cheap fundraising (CASA) resulted in CASA's composition of total third party funds in 2017 continues to be maintained and improved. This gives the Company the ability to compete in the industry by providing more competitive pricing to its customers. With this strategy, the Company is confident to get good quality customers so that asset quality can be maintained.

Penetrasi Pasar

Penetrasi pasar dilakukan antara lain dengan *customer engagement*, pembiayaan dan pendanaan melalui *value chain*, peningkatan layanan kepada nasabah agar *customer experience* meningkat, serta membangun aliansi antar divisi dalam peluncuran produk yang inovatif, serta menjalin kerjasama dengan mitra *merchant* melalui penawaran dan program promosi yang menarik.

Market Penetration

Market penetration includes customer engagement, financing and funding through value chains, improved customer service for increased customer experience, and building inter-divisional alliances in innovative product launches, and collaborating with merchant partners through attractive offers and promotional programs.

Perusahaan kedepannya akan terus menitikberatkan pengembangan, dan peningkatan Perbankan digital baik secara transaksi, fitur dan kapabilitas maupun jumlah pengguna dalam mendukung program gerakan non tunai dari Pemerintah. Beberapa keuntungan yang diyakini Perusahaan dengan mengembangkan perbankan digital antara lain adalah kecepatan layanan yang tidak terbatas oleh lokasi dan jam kerja sehingga memudahkan penggunanya, efisiensi biaya, serta *corporate branding* yang dapat menjangkau lebih luas dengan media perbankan digital.

Future companies will continue to emphasize development, and enhancement of digital banking both in transactions, features and capabilities as well as the number of users in support of the Government's non-cash movement program. Some of the advantages that the Company believes in developing digital banking include the unlimited speed of services by location and working hours, making it easier for its users, cost efficiency, and corporate branding to reach a broader reach with digital banking media.

Pengembangan Produk

Perusahaan juga terus berupaya memberikan nilai tambah melalui berbagai inovasi produk dan layanan perbankan untuk memberikan yang terbaik bagi nasabah dan senantiasa melakukan inovasi yang berkelanjutan untuk produk, layanan, serta bundling yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen

Product Development

The Company also continues to provide added value through various product innovations and banking services to provide the best for our customers and continuously innovate for products, services and bundling tailored to the changing needs of consumers in the market. In addition the service concept is developed thoroughly

dipasar yang terus berubah. Selain itu konsep layanan dikembangkan secara menyeluruh baik itu layanan berbasis konvensional maupun channel.

Integrasi, Sinergi dan Aliansi

Sinergi diantara unit bisnis juga terus dikembangkan untuk menggali peluang yang ada dengan melakukan *customer engagement* dari segmen bisnis yang berbeda diantara basis nasabah yang telah dimiliki, seperti melakukan *cross selling* dan *value chain* antar unitbisnis di dalam Perusahaan dalam rangka penawaran produk dan layanan.

Kerja sama dan koordinasi *cross business* unit merupakan aspek penting dalam mendorong penjualan produk induk dan memperluas jaringan nasabah. Koordinasi antara unit bisnis seperti yang dilakukan unit *Transaction Banking* membantu menghubungkan rantai antara principal, distributor, supplier baik itu untuk layanan pembiayaan maupun pendanaan. Sementara itu *cross product penetration* juga dilakukan untuk produk-produk retail.

Service Excellence

Inovasi dan layanan yang terus dibangun merupakan komitmen Perusahaan untuk senantiasa menciptakan *customer centric* dan memberikan *customer experience* terbaik. Selain itu juga Perusahaan terus meningkatkan *customer banking experience* secara keseluruhan melalui investasi teknologi yang unggul, serta peningkatan layanan dan fitur dari produk. Semua ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam memberikan pelayanan dan inovasi yang berkelanjutan baik produk dan layanan selama lebih dari 50 tahun di Perbankan Indonesia.

Layanan cepat, akurat, mudah, aman dan ramah (CAMAR) juga menjadi tema budaya kerja didalam Perusahaan tidak hanya untuk unit sales namun juga untuk unit support dalam melakukan perkerjaan sehari-hari.

Biaya Pemasaran

Dari sisi biaya pemasaran, Perusahaan akan terus melakukan upaya untuk melakukan efisiensi biaya dari Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan, salah satunya adalah dengan *smart promotion* dan *advertising*. Efisiensi biaya yang terkait dengan biaya promosi dilakukan dengan cara melakukan Kegiatan promosi berbagai produk secara bersamaan namun memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, dari sisi media komunikasi, beberapa inisiatif penting juga dilakukan termasuk menggunakan media - media digital dan sosial media secara terintegrasi melalui *official account* sehingga

whether it is a conventional or channel based service.

Integration, Synergy and Alliance

The synergy among business units is also continuously developed to explore existing opportunities by engaging customer engagement from different business segments between existing customer bases, such as cross selling and value chain among business units within the Company in order to offer products and services.

The cooperation and coordination of cross business units are an important aspect in driving the sale of the parent product and expanding the customer network. Coordination between business units such as the Transaction Banking unit helps connect the chains between principals, distributors, suppliers for both financing and funding services. Meanwhile, cross product penetration is also done for retail products.

Service Excellence

Innovation and continuously built services are the Company's commitment to always create customer centric and provide the best customer experience. In addition, the Company continues to improve the overall customer banking experience through superior technology investments, as well as improved service and product features. All this is done as a form of commitment of the Company in providing continuous service and innovation both products and services for more than 50

Fast, accurate, easy, safe and friendly service (CAMAR) is also a cultural theme of work within the Company not only for unit sales but also for support units in doing daily work.

Marketing Cost

In terms of marketing costs, the Company will continue to make efforts to perform cost efficiency of the Bank Business Plan that has been established, one of which is with smart promotion and advertising. The cost efficiency related with promotional costs is done by doing the promotional activities of various products simultaneously but give maximum results. In addition, in terms of communication media, several important initiatives are also carried out including using digital media and social media are integrated through the official account so that cost per contact can be suppressed. As for the traditional

cost per contact bisa ditekan. Sedangkan untuk media tradisional, optimalisasi jumlah dan lokasi billboard juga dilakukan.

Dengan langkah-langkah tersebut di atas, biaya *advertising* dan *promotion* tercatat turun dari Rp31.3 milyar di tahun 2016 menjadi Rp14 milyar di tahun 2017 atau turun sebesar 55,3%. Untuk kedepannya Perusahaan akan terus meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan kanal digital untuk melakukan aktifitas promosi.

Promosi

Promosi merupakan hal yang sangat penting bagi Perusahaan dalam melakukan strategi komunikasi sehingga nasabah bisa mendapatkan informasi yang relevan mengenai produk dan layanannya. Dalam menjalankan komunikasinya, Perusahaan selalu mengemas informasi di dalam sebuah marketing komunikasi yang terintegrasi. Kampanye marketing komunikasi yang terintegrasi, baik berupa produk maupun layanan, ditayangkan dan disebar secara *above the line (ATL)* yakni melalui media tradisional seperti televisi, radio, dan *out of home media channel,* dan juga media digital seperti corporate website. *Groundactivation* seperti *corporate event* termasuk sales marketing dan pembukaan booth di acara-acara tertentu juga menjadi salah satu cara komunikasi *below the line (BTL)*. Perusahaan juga mengoptimalkan penggunaan media milik sendiri seperti ATM channel, poster, dan website termasuk 1 (satu) unit bis yang disumbangkan kepada Universitas Cenderawasih. Terlebih lagi, dirasa krusial bagi perusahaan dalam mengedukasi karyawannya sehingga seluruh staff Bank Papua mengerti mengenai produk dan layanan yang sedang dikomunikasikan. Strategi di internal dilakukan menggunakan whatsapp group yang disebar ke seluruh cabang di Indonesia.

Pangsa Pasar

Pada tahun 2017, pangsa pasar Bank Papua dari sisi Dana Pihak Ketiga sebesar 39,69%, sedangkan dari sisi Kredit yang Diberikan mencapai 33 %.

Pada tahun 2018 strategi dalam penghimpunan dana bisnis Ritel Bank Bank Papua adalah sebagai berikut.

a. Peningkatan *Customer Base*
   Tahun 2018 pertumbuhan *customer base ritel* diharapkan dapat mengurangi ketergantungan sumber pendanaan dari dana Giro Pemerintah Daerah secara bertahap dengan memfokuskan peningkatan pengelolaan segmen mass, massaffluent dan Upper.
b. Peningkatan Volume Dana
   1. Mendukung Program Pemerintah sesuai surat

media, optimization of the number and location of billboards is also done.

With the above measures, advertising and promotion costs decreased from Rp31,3 billion in 2016 to Rp14 billion in 2017, or down by 55.3%. In the future, the Company will continue to improve and optimize the use of digital channels for promotional activities.

Promotion

Promotion is very important for the Company in conducting communication strategy so that customers can get relevant information about their products and services. In carrying out its communications, the Company always packs the information in an integrated marketing communications. Integrated marketing communications campaigns, whether in the form of products or services, are broadcasted and spread Above The Line (ATL) through traditional media such as television, radio and out of home media channels, as well as digital media such as corporate websites. Groundactivation such as corporate events including sales, marketing and opening of booths on certain occasions is also one of the Below The Line (BTL) communication methods. The company also optimizes the use of its own media such as ATM channels,posters, and websites, including 1 (one) base unit donated to Cenderawasih University. Moreover, it is crucial for the company to educate its employees so that all Bank Papua staff understand about the products and services communicated. Internal strategy is done using whatsapp group spread across branches in Indonesia.

Market share

To 2017, Bank Papua's market share from the Third Party Fund side amounted to 39.69%, while in terms of Lending reached 33%.

In 2018, the strategy for collecting funds from Bank Retail Bank business is as follows.

a. Improved Customer Base
   In 2018, retail customer base growth is expected to reduce the dependence on funding sources from the Current Account Government gradually by focusing on improving the management of mass, mass affluent and upper segments.
b. Increased Fund Volume
   1. To support Government Program pursuant to the

Edaran Mendagri Nomor : 910/1866SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi ;

2. Implementasi *Cash Management System* Kas Daerah untuk membantu PEMDA dalam pengelolaan Keuangan Daerah agar lebih cepat, akurat dan mudah sehingga menghasilkan laporan yang transparan baik disisi pengeluaran maupun penerimaan;
3. Implementasi CMS diharapkan seluruh rekanan/ vendor PEMDA terkait APBD akan diwajibkan pembayaran proyeknya melalui rekening di Bank Papua, selanjutnya dilakukan upaya agar seluruh dana aktivitas transaksinya melalui rekening yang ada di Bank Papua;
4. Penambahan fitur berupa notifikasi;
5. Implementasi e-samsat pada samsat online Provinsi Papua dan Papua Barat;
6. Optimalisasi Program Kartu Pegawai Ektronik (KPE);
7. Menjaga dan mengembalikan kepercayaan Pemerintah Daerah agar pengelolaan kas daerah dan Pendapatan Asli Daerah seluruh provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Daerah se-Tanah Papua hanya di Bank Papua;
8. *Value chain*, debitur atau rekanan PEMDA disarankan untuk memiliki rekening di Bank Papua (baik suplier atau pembeli) sehingga memudahkan dalam sistem pembayaran dengan cara pemindahbukuan;
9. Program Undian Tabungan SIMPEDA ;
10. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan segmentasi nasabah dana (*mass, uppermass, affulent, Priority)*;
11. Melakukan *selling day*;
12. Co branding kerjasama, *partnership* dengan Bank Besar Nasional;
13. Menetapkan *sales/Account Officer* untuk masing-masing segmentasi pelayanan.

c. Peningkatan Kualitas Rekening
Peningkatan kualitas rekening secara langsung akan berdampak positif pada peningkatan saldo rata-rata nasabah termasuk meningkatkan pendapatan Bank dari *fee based income*.

Oleh karena itu pada tahun 2018 akan lebih difokuskan kepada :

1) Peningkatan kelekatan nasabah atas kepemilikan 4 produk dan layanan khusus kewajiban atas penerimaan *fasilitas e-channel*.
2) Melakukan repartriasi nasabah *lowermass* melalui aktivitas rekening pasif melalui telemarketing dengan pemberian program khusus.

Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number: 910 / 1866SJ dated April 17, 2017 on Implementation of Non-Cash Transaction to Provincial Government;

2. *Implementation of Cash Management System of Regional Cash to assist LGS in the management of Regional Finance to be more rapid, accurate and easy to produce transparent reports both on the expenditure and receipt side;*
3. *CMS Implementation is expected that all Local Regional Government / regional Income and Expenditure Budget related partners / vendors will be required to pay their projects through an account at Bank Papua, then proceed to make all their transactions through Bank Papua's account;*
4. *Added feature in the form of notification;*
5. *Implementation of e-samsat on online smut Papua and West Papua Province;*
6. *Optimization of the Employee Cards Program (KPE);*
7. *Maintain and restore the confidence of local governments for the management of regional cash and local revenue of all provinces, municipalities and regencies and municipals governments of Papua just in Bank Papua;*
8. *The value chain, debtor or partner of the LG is advised to have an account at Bank Papua (either a supplier or a buyer) to facilitate the payment system by way of overbooking;*
9. *SIMPEDA Savings Sweepstakes Program;*
10. *Improving services to the public based on customer segmentation of funds (mass, upper mass, affluent, Priority);*
11. *Selling day Program;*
12. *Co branding of cooperation, partnership with Big National Bank;*
13. *Establish a Sales / Account Officer for each segment of the service.*

c. *Account Quality Improvement, Improving the quality of accounts directly will have a positive impact on increasing the average balance of customers, including increasing the Bank's income from fee based income.*

Therefore, in the year 2018 will be more focused to:

1) *Increased customer deepening to the ownership of 4 special products and service obligation on receipt of e-channel facilities.*
2) *Repatriate lower mass customers through passive account activity through telemarketing with special programming.*

d. *Funding* Bisnis Proses

Untuk menunjang implementasi dari setiap kebijakan di atas maka harus di dukung dengan bisnis proses yang menunjang baik bagi supervisor maupun pada para marketing. Pada tahun 2018 dukungan terhadap *funding* bisnis proses dapat dilakukan melalui :

1) Proses monitoring atas pencapaian kinerja cabang yang dilakukan secara periodik guna mengarahkan cabang atas strategi yang harus dilakukan kedepannya.
2) Bekerjasama dengan pihak pembinaan cabang dan Sumber Daya Manusia dalam melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan cabang atas produk dan layanan.
3) Mengembangankan produk, layanan dan aplikasi yang dapat membantu cabang dalam aktivitas pemasaran produk guna meningkatkan pertumbuhan DPK, rekening dan transaksi perbankan.

e. Strategi Peningkatan CASA (*Current Account and saving Account)*

Dengan adanya himbauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pembatasan maksimum suku bunga simpanan di perbankan menjadikan tantangan dan peluang bersaing yang lebih sehat antar perbankan di Indonesia termasuk Bank Papua untuk dapat meningkatkan penghimpunan dana murah di masyarakat. Tahun 2018 dana murah yang berasal dari Giro dan Tabungan akan menjadi fokus dalam penghimpunan dana sehingga komposisi CASA Bank Papua akan tumbuh sesuai target yang diharapkan. Adapun strategi yang akan digunakan guna untuk mencapai target CASA tersebut antara lain:

1) Produk Peningkatan Volume Dana
   Peningkatan volume DPK akan fokus kepada 3 (tiga) produk Simpanan yaitu Giro, Tabungan SIMPEDA dan Tabungan SIMANJA. Ketiga produk ini merupakan produk unggulan dan memiliki portofolio volume dana yang besar diantara produk DPK lainnya. Dengan Fokus pada 3 (tiga) produk ini maka diharapkan dapat mempercepat peningkatan volume dana.
2) Program Penjualan
   Peluncuran program-program penjualan yang fokus pada produk Tabungan dan Giro yang bertujuan untuk akuisisi nasabah baru (*new acquisition*), mempertahankan dan meningkatkan saldo (*customer retention)* sehingga peningkatan CASA dapat dicapai pada tahun 2018.

d. Funding Business Process

To support the implementation of any policy above it must be supported by business processes that support both for supervisors and the marketing. In 2018 support for funding business processes can be done through:

1) The monitoring process of branch performance achievement conducted periodically to direct the branch of the strategy that must be done in the future.
2) Cooperate with branch guidance and human resources in conducting socialization to improve the branch's knowledge of products and services.
3) Develop products, services and applications that can assist branches in product marketing activities to increase growth in deposits, accounts and banking transactions.

e. CASA (Current Account and saving Account) Upgrade Strategy

With the appeal of the Financial Services Authority (OJK) on the maximum limitation of deposit interest rates in banks, it makes sounder challenges and opportunities among banks in Indonesia including Bank Papua Bank to increase the low-cost fund in society. In 2018, low-cost funds coming from Current Account and Saving will be the focus of fund raising so that CASA Bank Papua composition will grow according to the expected target. The strategies that will be used to achieve the CASA target area:

1) Funding Volume Improvement Product
   The improvement of funding volume will focus on 3 (three) Savings products, namely Current Account, SIMPEDA savings and SIMANJA savings. These three products are excellent products and have a large volume of funds portfolio among other TPF products. Focusing on 3 (three) of these products is expected to accelerate the increase in the volume of funds.
2) Sales Program
   The launch of sales programs focused on Savings and Current accounts aimed at acquiring new customers, maintaining and improving customer retention so that CASA (Current Account and saving Account) upgrades can be achieved by 2018.

Beberapa program penjualan guna meningkatkan volume dana pada tahun 2017 yaitu:
- Program *cash back*.
- Program penjualan produk Tabungan SIMANJA.
- Program kegiatan *gathering* nasabah prioritas.
- Program *Sponsorship*.

Some sales programs to increase the volume of funds in 2017 are:
- *Cash back program.*
- *SIMANJA Saving Program sales program.*
- *Priority customer gathering program.*
- *Sponsorship Program.*

Kegiatan *sponsorship* di tahun 2017 yang telah dilakukan oleh Divisi Pemasaran sebagai berikut :

Sponsorship activities in 2017 that have been conducted by the Marketing Division as follows:

No	KATEGORI SPONSORSHIP	REALISASI				*SPONSORSHIP CATEGORY*
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Seni Budaya	Rp5.000.000		Rp89.750.000	Rp19.500.000	*Art and culture*
2	Pendidikan	Rp870.000	Rp133.545.901	Rp37.750.000		*Education*
3	Olahraga		Rp24.500.000	Rp56.000.000	Rp19.000.002	*Sports*
4	Umum	Rp11.000.000	Rp35.000.000	Rp78.040.000	Rp18.575.000	*General*
5	Persipura Jayapura (Liga 1 Gojek Traveloka 2017)		Rp3.300.000.000	Rp3.300.000.000	Rp1.650.000.000	*Persipura Jayapura (League 1 GojekTraveloka 2017)*
6	Persidafon Jayapura (Liga 3)			Rp50.000.000		*Persidafon Jayapura (League 3)*
7	Perseka Manokwari (Liga 2 Gojek Traveloka 2017)			Rp150.000.000		*Perseka Manokwari (League 2 GojekTraveloka 2017)*
8	Yahukimo FC (liga 2 Gojek Traveloka 2017)			Rp150.000.000		*Yahukimo FC (league 2 Gojek Traveloka 2017)*
9	Persigubin Pegunungan Bintang Liga 2 Gojek Traveloka)			Rp150.000.000		*Persigubin Pegunungan Bintang(League 2 Gojek Traveloka)*
10	Sponsor HUT RI kabupaten Mappi				Rp150.000.000	*RI Anniversary of Mappi Regency Sponsor*
	TOTAL KESELURUHAN	**Rp16.870.000**	**Rp3.493.045.901**	**Rp4.061.540.000**	**Rp1.857.075.002**	**TOTAL**

3) Evaluasi dan *Repackage* Produk

Untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap produk simpanan di Bank, Bank Papua serta dalam rangka untuk dapat bersaing dengan produk dana di Bank lain maka akan dilakukan proses evaluasi dan penyempurnaan produk-produk yang dimiliki serta fitur produk di dalamnya bersama divisi terkait.

Evaluasi dan *repackage* produk ini dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan dapat pasar serta dapat meningkatkan CASA, Bank Papua sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

f. Peningkatan *Fee Based Income*

Untuk menunjang peningkatan *Fee Based Income* maka kerjasama aliansi marketing dengan *strategic partner* dan pemasaran kartu ATM/Debit Bank Papua terus ditingkatkan.

3) Evaluation and Repackage of Products

To fulfill customer's needs for deposit products at Bank, Bank Papua and in order to compete with a fund product in other Bank, it will be evaluated and perfected the products owned and the product features in it with related division.

Evaluation and repackage of this product can meet the needs that are expected to market and can increase CASA (Current Account and saving Account), Bank Papua in accordance with the target set.

f. Increased Fee Based Income

To support the improvement of Fee Based Income, the cooperation of marketing alliances with strategic partnerships and marketing of Bank ATM / Debit Card Papua continues to be improved.

Realisasi Pemasaran Kartu ATM/Debit Bank Papua

Kartu ATM/Debit yang diterbitkan Bank Papua sebagai instrumen keuangan non tunai yang terdiri dari kartu ATM/Debit konvensional. Untuk mendukung pertumbuhan Bisnis Bank Papua, Divisi Pemasaran melalui Departemen E-Banking berusaha seoptimal mungkin untuk memproduksi dan mendistribusikan semua permintaan Kartu ATM/Debit dari Kantor Cabang dengan tepat waktu.

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah kartu ATM yang telah diterbitkan Bank Papua tercatat sebesar 413.473 kartu dan mengalami penurunan 19,25% atau sebanyak 79.601 kartu jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 493.074 kartu. Penurunan jumlah kartu ATM/ Debit Bank Papua tersebut, disebabkan karena pada tanggal 30 Agustus 2017 Bank Papua telah melakukan *cleansing* data kartu-kartu lama sebanyak 124.586 kartu. Dimana *cleansing* data tersebut bertujuan untuk :

1. Menjaga integritas data antara *core banking* sistem dengan aplikasi CMS, yang berpengaruh terhadap akurasi pelaporan jumlah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) .
2. Menghindari risiko atas penyalahgunaan kartu-kartu ATM/Debit Bank Papua yang masih memiliki status aktif, tetapi sudah tidak memiliki status rekening aktif/rekening sudah tutup.

Sehingga secara perhitungan, terdapat pertumbuhan kartu baru sebesar 12,21% atau sebesar 368.488 kartu di tahun 2017.

Realization of ATM / Debit Card Marketing of Papua Bank

ATM / Debit Card issued by Bank Papua as a non-cash financial instrument consisting of conventional ATM / Debit cards. To support the growth of Bank Papua's business, the Marketing Division through the E-Banking Department strives to optimally produce and distribute all ATM / Debit Card requests from the Branch Office in a timely manner.

Until the end of 2017, the number of ATM cards issued by Bank Papua was recorded at 413,473 cards and decreased -19.25% or as much as -79.601 cards when compared to the year 2016 which amounted to 493,074 cards. The decrease in the number of ATM / Debit cards from the Papua Bank is due to that on 30 August 2017 Bank Papua has cleansed the data of the old cards as many as 124,586 cards. Where the cleansing data aims to:

1. *Maintain data integrity between core banking systems with CMS applications, which affect the accuracy of reporting the number of Card-Based Payment Instruments (APMK).*
2. *Avoiding the risk of misuse of ATM / Debit cards Bank Papua still has an active status, but has no active account status / account has been closed.*

So in calculation, there is a new card growth of 12.21% or by 368.488 cards in 2017.

No	KETERANGAN	TAHUN					
		2015	YoY	2016	YoY	2017	YoY
1	Jumlah Nasabah Tabungan	900.811	9,86%	1.052.895	14,44%	1.155.777	8,90%
2	Jumlah Pemegang Kartu ATM	440.752	12,72%	493.074	10,61%	413.473	-19,25%

Bank Papua telah mempersembahkan berbagai pilihan Kartu Debit Bank Papua dengan desain baru yang terinspirasi dari ukiran kayu tradisional khas Papua, dipersembahkan untuk kenyamanan dan keamanan transaksi nasabah.

Bank Papua has presented a wide selection of Bank Papua Debit Card with new designs inspired from traditional Papuan wooden carvings, dedicated to the convenience and security of customer transactions.

Segmentasi Bank Papua Debit Card adalah fitur tambahan bagi produk tabungan dan giro perorangan yang dirancang guna memberikan suatu bentuk layanan khusus bagi nasabah dengan maksud mengadakan suatu diversifikasi terhadap layanan Kartu ATM/Debit sesuai dengan segmentasi nasabah.

Segmentation of Bank Papua Debit Card is an additional feature for personal savings and grow products designed to provide a special form of customer service with the intention of organizing a diversification of ATM / Debit Card services according to customer segmentation.

Divisi Pemasaran melalui kantor-kantor cabang Bank Papua yang tersebar luas baik di tanah papua maupun diluar tanah papua, telah memasarkan berbagai segmentasi Bank Papua Card dengan rincian sebagai berikut :

Marketing Division through branch offices of Bank Papua are widespread in the land of Papua, has been marketing various segmentation Bank Papua Card with the following details:

No	KETERANGAN	TAHUN					
		2015	YoY	2016	YoY	2017	YoY
1	Kartu Debit Platinum Crystal External	555	120,24%	820	32,32%	1.045	21,53%
2	Kartu Debit Platinum Crystal Internal	60	71,43%	60	0,00%	78	23,08%
3	Kartu Debit Platinum	1.552	38,20%	2.020	23,17%	2.207	8,47%
4	Kartu Debit Gold	8.412	36,05%	11.755	28,45%	13.240	11,21%
5	Kartu Debit Silver	353.037	10,59%	385.874	8,51%	292.867	-31,76%
6	Kartu *Debit Blue*	13.360	28,86%	18.967	25,47%	22.050	13,98%
7	Kartu Debit Tabunganku	22.029	52,37%	29.558	25,47%	36.864	19,82%
8	Kartu Debit KPE / Co. Branding Lainnya	41.339	5,04%	41.505	0,40%	40.692	-2,00%
9	Kartu Debit persipura	242	-99,94%	2.195	88,97%	2.596	15,45%
10	Kartu debit Tabungan Mahasiswa	166		310	46,45%	1.834	83,10%
	TOTAL	**440.752**		**493.065**		**413.473**	

PRESENTASE *CARDHOLDER* PERSEGMENTASI KARTU ATM/DEBIT Bank Papua

PERCENTAGE CARD HOLDER PERSEGMENTASI ATM CARD / DEBIT Bank Papua

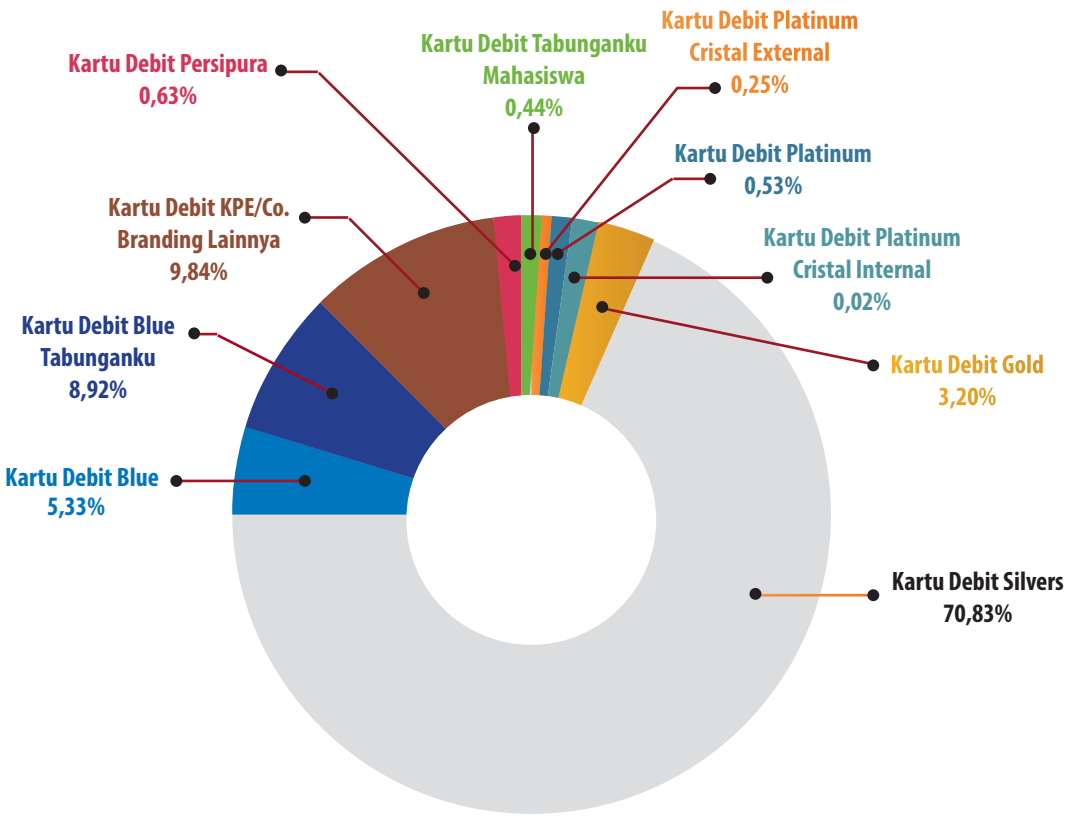

Perkembangan Transaksi Kartu ATM

Sebagai salah satu bagian dari strategi dalam meningkatkan kemampuan transaksi perbankan, Bank Papua secara berkesinambungan meningkatkan layanan e-Banking melalui New Debit Card Bank Papua. Sampai dengan bulan November tahun 2017, transaksi perbankan melalui kartu ATM/Debit Bank Papua khusus untuk transaksi penarikan tunai tercatat sebesar Rp7.119 milyar. Sementara transaksi transfer interbank dan transfer antarbank tercatat sebesar Rp1.946 milyar dan Rp4.192 milyar atau naik sebesar 0,57% dari tahun sebelumnya sebesar Rp4.168 milyar. Untuk transaksi belanja dan transaksi payment tercatat masing-masing sebesar Rp137 milyar dan Rp55 milyar.

The Development of ATM Card Transactions

As part of a strategy to improve the banking transaction capability, Bank Papua continually improves e-banking services through New Debit Card Bank Papua. Up to November 2017, banking transactions through Bank ATM / Debit cards specifically for cash withdrawal transactions amounted to Rp7.119 billion. Interbank transfers and interbank transactions were recorded in Rp1.946 billion and Rp4.192 billion, up 0.57% from the previous year amounted to Rp4.168 billion. For shopping transactions and payment transactions recorded each of the Rp137 billion and Rp55 billion.

PRESENTASE NILAI TRANSAKSI MELALUI KARTU ATM/DEBIT Bank Papua Bank Papua

PERCENTAGE OF TRANSACTION VALUE THROUGH ATM CARD / DEBIT Bank Papua

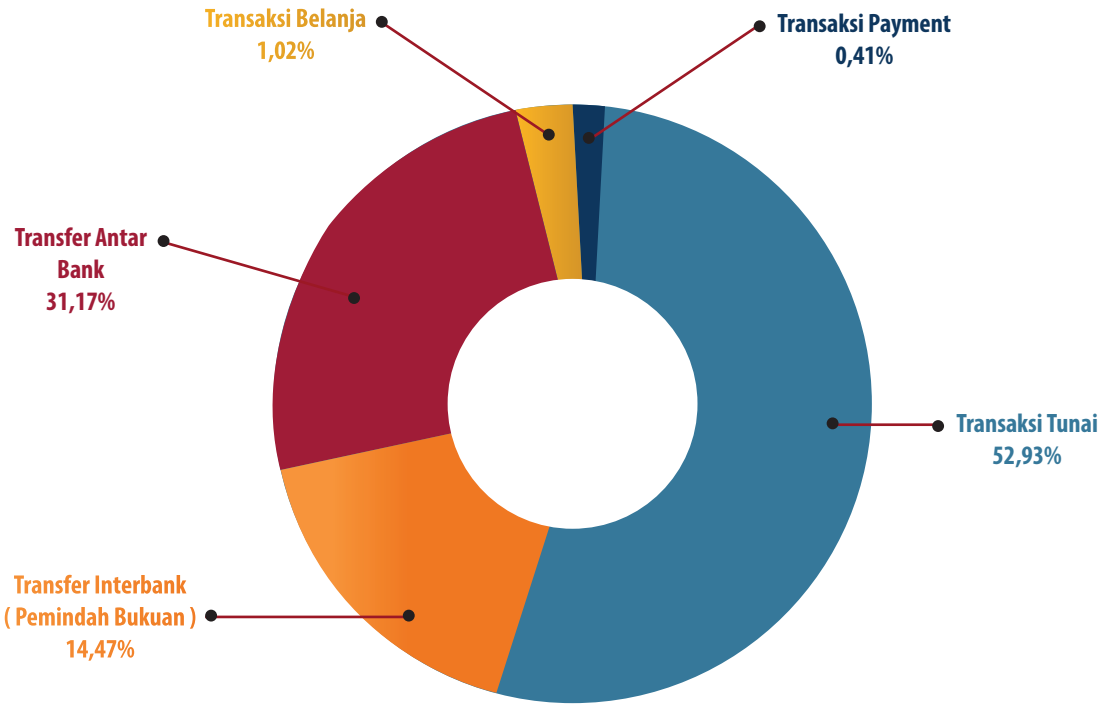

Varian Produk Kartu ATM

1. Kartu Debit Platinum Crystal External dan kartu Debit VISA Platinum Crystal External
   Dirancang khusus bagi Pejabat Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Universitas, Rumah Sakit, maupun nasabah serta Kolega Bisnis Bank Papua yang Utama. Memberikan limit penarikan dan pembelanjaan yang lebih tinggi dan beberapa layanan tambahan seperti fasilitas layanan *airport executive lounge* pada beberapa bandar udara domestik di Indonesia.

ATM Card Product Variants

1. *Crystal External Platinum Debit Card and VISA Platinum Crystal External Debit Card*
   Designed specifically for Local Government Officials, Central Government, Universities, Hospitals, as well as customers and the Primary Business Colleagues of Bank Papua. Provides higher withdrawal and spending limits and additional services such as airport executive lounge facilities at several domestic airports in Indonesia.

2. Kartu Debit Platinum Crystal Internal dan kartu Debit VISA Platinum Crystal Internal
   Diperuntukan khusus untuk lingkungan Bank Papua, diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi , Kepala Divisi, Kepala Cabang, serta pejabat/staf lainnya sesuai dengan keputusan Direksi . Memberikan limit penarikan dan pembelanjaan yang lebih tinggi dan beberapa layanan tambahan seperti fasilitas layanan *airport executive lounge* pada beberapa bandar udara domestik di Indonesia.

2. *Crystal Internal Platinum Debit Card and VISA Platinum Crystal Internal Debit Card*
   Intended specifically for the environment of Bank Papua, granted to the Board of Commissioners, Directors, Heads of Divisions, Branch Managers, and other officials / staff in accordance with the Board of Directors' decisions. Provides higher withdrawal and spending limits and additional services such as airport executive lounge facilities at several domestic airports in Indonesia.

3. Kartu Debit Platinum dan Kartu Debit VISA Platinum
   Membuka jalan bagi nasabah Bank Papua untuk menikmati berbagai kemudahan dan pengalaman gaya hidup yang memukau. Ditambah lagi limit penarikan dan pembelanjaan yang memanjakan nasabah Bank Papua, layanan executive lounge dan serangkaian keuntungan menarik lainnya.

3. *Platinum Debit Card and VISA Platinum Debit Card*
   Open the way for customers of Bank Papua to enjoy the ease and experience of a fascinating lifestyle. Plus the withdrawal and spending limit that spoils Bank Papua customers, executive lounge services and a host of other interesting benefits.

4. Kartu Debit Gold dan Kartu Debit VISA Gold
   Nikmati kenyamanan lebih dalam hidup dengan limit pembelanjaan yang lebih tinggi dan layanan dana tunai saat nasabah Bank Papua bepergian.

4. Debit Gold and VISA Gold Debit Card
Enjoy more convenience in life with higher spending limits and cash services when customers of Bank Papua travel.

5. Kartu Debit Silver dan Kartu Debit VISA Silver
   Baik digunakan untuk berlibur, berbelanja ataupun bersantap bersama keluarga ataupun rekan bisnis, diterima di jutaan lokasi di seluruh dunia, sehingga nasabah Bank Papua dapat menggunakannya untuk hampir semua transaksi yang nasabah inginkan.

5. Silver Debit Card and VISA Silver Debit Card
Whether used for vacation, shopping or dining with family or business associates, it is accepted at millions of locations around the world, so that Bank Papua customers can use it for virtually all transactions customers want.

6. Kartu *Debit Blue*
   Dengan limit transaksi yang sedikit lebih rendah, sangat cocok digunakan untuk nasabah yang ingin membatasi jumlah transaksi hariannya.

6. Blue Debit Card
With a slightly lower transaction limit, it is suitable for customers who want to limit the number of daily transactions.

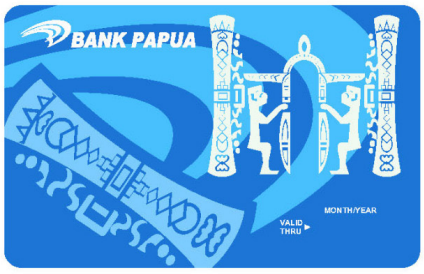

7. Kartu Debit TabunganKu
   Kartu TabunganKu diterbitkan kepada nasabah yang memiliki rekening tabunganku. Dimana rekening ini dikhususkan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan. Rekening TabunganKu hadir untuk menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

7. *Tabunganku Debit Card*
   Tabunganku Card is issued to customers who have my savings account. Where this account is reserved for individuals with easy and light requirements. TabunganKu account is present to grow the culture of saving and improve the welfare of the community and not subject to monthly administrative fees.

8. Kartu Debit Pensiun
   Kartu Pensiun Card dirancang khusus untuk nasabah e-Dapem di Bank Papua sesuai ketentuan yang berlaku.

8. *Retirement Debit Card*
   Retirement Cards are designed specifically for e-Dapem customers in Bank Papua in accordance with applicable regulations.

9. Kartu Debit Tabungan Mahasiswa
   Kartu Tabungan Mahasiswa diberikan kepada perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama dengan Bank Papua. Sehingga Kartu Tabungan Mahasiswa dapat berfungsi sebagai Kartu Anjungan Tunai Mandiri, disamping berfungsi sebagai kartu identitas mahasiswa.

9. *Student Savings Debit Card*
   Student Savings Card is given to universities that have established cooperation with Bank Papua. So the Student Savings Card can function as Automated Teller Machine Card, in addition to functioning as a student identity card.

10. Kartu Debit DPRD

Kartu khusus yang diberikan kepada instansi pemerintah, yang telah menjalin kerja sama dengan Bank Papua. Kartu ini sama seperti kartu identitas yang dapat berfungsi sebagai Kartu Anjungan Tunai Mandiri disamping berfungsi sebagai kartu identitas pegawai.

10. DPRD Debit Card

Special cards given to government agencies, which have established cooperation with Bank Papua. This card is the same as an identity card that can function as a Automatic Teller Machine Card in addition to functioning as an employee identity card.

11. Kartu Debit KPE/Co. Branding lainnya

Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik yang dilegitimasi oleh peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008, dapat dipergunakan sebagai kartu identitas PNS dan penerimaan pensiun PNS serta untuk pelayanan di bidang kepegawaian, pengendalian data kepegawaian serta perbankan. Bank Papua mempersembahkan berbagai fasilitas pendukung guna memaksimalkan fungsi KPE untuk aktifitas perbankan, sehingga KPE juga dapat berfungsi sebagai kartu ATM Bank Papua.

11. Other KPE / Co Debit Card.

Other Branding Electronic Civil Servant Card which legitimized by regulation of Head of BKN Number 7 Year 2008, can be used as an identity card of civil servant and civil servant retirement as well as for service in the field of personnel, data controlling of staffing and banking. Bank Papua offers various supporting facilities to maximize KPE's function for banking activities, so that KPE can also function as an ATM card of Bank Papua.

12. Kartu Debit Persipura

Kartu Persipura didesain secara khusus untuk dipersembahkan kepada nasabah Bank Papua, khususnya kepada Persipura mania. Kartu Persipura diterbitkan sebagai bukti komitmen Bank Papua yang menjadi sponsor klub sepak bola Persipura Jayapura dan untuk memajukan olah raga khususnya sepak bola di Papua.

12. Persipura Debit Card

Persipura card is specially designed to be dedicated to customers of Bank Papua, especially to Persipura mania. Kartu Persipura published as evidence of Bank Papua's commitment to sponsor the football club Persipura Jayapura and to promote sports, especially football in Papua.

Selain banyaknya pilihan desain dan segmentasi kartu ATM/Debit Bank Papua, yang tersedia tersebut di atas. Untuk limitasi transaksi dari masing-masing kartu, dibedakan-bedakan juga. Hal ini bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam memilih dan mengatur kebutuhan akan transaksi keuangannya. Dimana jika nasabah ingin lebih berhemat dan tidak ingin untuk bertransaksi dalam jumlah yang besar, maka dapat memilih produk kartu ATM/*Debit Blue*. Selain limit transaksi yang kecil, nasabah juga diuntungkan karena bank tidak mengenakan biaya administrasi dan pinalty untuk segmentasi produk kartu tersebut. Kartu ATM/ Debit Bank Papua diterima di jutaan ATM/EDC berlogo PLUS/Visa/Visa Electron baik di Indonesia maupun di luar negeri dan di ATM berlogo ATM BERSAMA, ATM berlogo ATM PRIMA dan EDC berlogo PRIMA DEBET, termasuk di Jaringan ATM dan EDC Bank Papua di seluruh Indonesia.

In addition to the many design options and segmentation of Bank Papua ATM / Debit cards, which are available above. To limit the transaction of each card, differentiated as well. It aims to facilitate the customers in selecting and managing the need for financial transactions. Where if the customer wants more frugality and do not want to transact in large quantities, then can choose ATM card / Debit card products. In addition to the small transaction limit, customers also benefit because the bank does not charge administrative fees and penalties for segmenting the card product. Bank Papua ATM Debit/Card accepted at millions ATM / EDC with PLUS / Visa / Visa Electron logo in Indonesia and abroad and in ATM with BERSAMA logo, ATM PRIMA logo and EDC logo PRIMA DEBET, including ATM and EDC Bank Papua throughout Indonesia.

Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Bank Papua terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan pengaduan nasabah yang berhubungan dengan transaksi melalui kartu ATM/Debit dan memberikan solusi yang tepat dan dalam waktu yang singkat.

Divisi Pemasaran telah mempunyai unit kerja yang khusus menangani pengaduan nasabah terkait transaksi melalui kartu ATM/Debit Bank Papua, yaitu pada unit *Card Center* / Departemen E-Banking yang dilengkapi dengan kebijakan dan standard operasional yang komprehensif dan handal untuk memberikan kualitas dan layanan yang terbaik.

Unit *Card Center* pada tahun 2017 tercatat telah menerima sebanyak 8.275 komplain nasabah yang tidak terkait dengan transaksi dan 380 komplain nasabah yang terkait dengan transaksi dalam penggunaan kartu ATM/Debit Bank Papua. Jumlah ini lebih tinggi 17,31% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana jumlah komplain nasabah tidak terkait transaksi pada tahun 2016 adalah sebanyak 6,926 komplain dan komplain nasabah yang terkait dengan transaksi adalah sebanyak 231 komplain.

Customer Complaints Service and Settlement

Bank Papua continually strives to improve customer complaint services related to transactions through ATM / Debit cards and provide the right solution and in a short time.

The Marketing Division already has a special unit that handles customer complaints related to transactions through ATM / Debit cards from Bank Papua, namely the Card Center / E-Banking unit equipped with comprehensive and reliable operational policies and standards to provide the best quality and service.

The Card Center unit in 2017 has received 8,275 complaints from clients, unrelated to the transaction and 380 customer complaints related to transactions with the use of Bank Papua ATM / Debit cards. This number is 17.31% higher than the previous year. Where the number of clients' complaints not related to transactions in 2016 was 6,926 complaints and customer complaints related to the transaction were 231 complaints.

NO	KETERANGAN	TAHUN			
		2015	2016	2017	YoY
1	Penerimaan Keluhan Nasabah Tidak Terkait Transaksi	8,275	6,926	8,275	16,30%
2	Penerimaan Keluhan Nasabah Terkait Transaksi	270	231	380	39,21%
	TOTAL	**8,545**	**7,157**	**8,655**	**17,31%**

PENERIMAAN KELUHAN NASABAH
DI UNIT CARD CENTER - Departemen E- BANKING TAHUN 2017

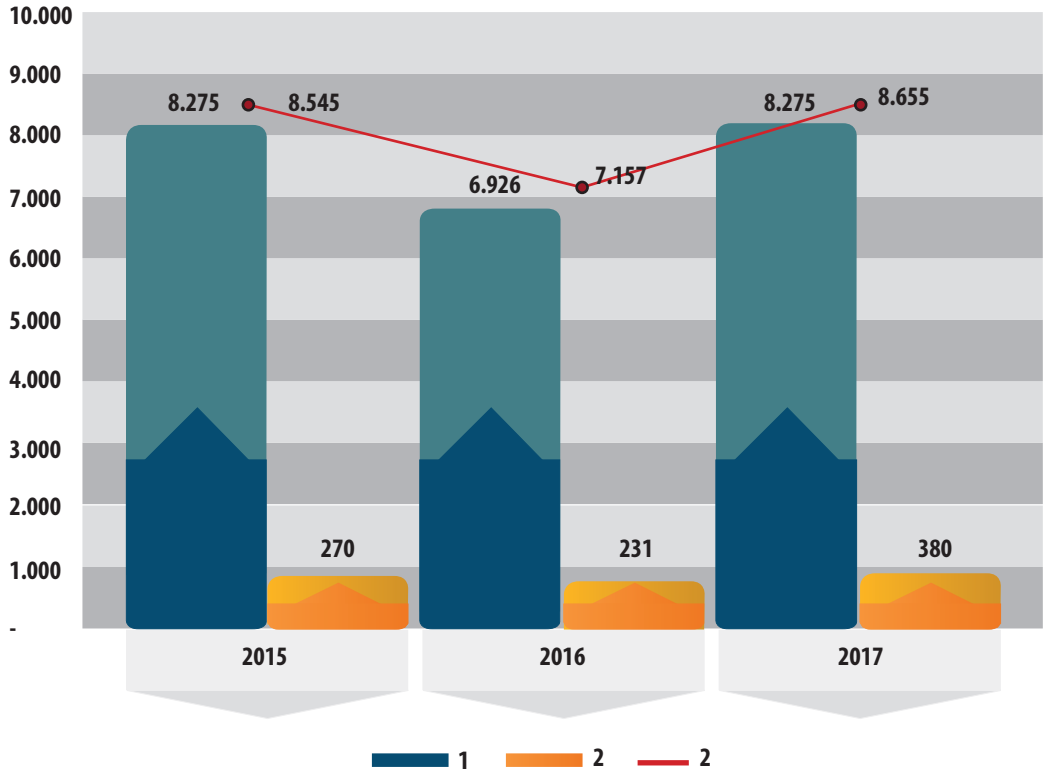

Peningkatan jumlah keluhan nasabah yang masuk ke layanan *Card Center* Bank Papua, seiring dengan jumlah nasabah pemegang kartu ATM/Debit Bank Papua. Unit pengaduan kartu disamping melayani kebutuhan informasi dan keluhan nasabah pemegang kartu serta berusaha juga untuk memberikan edukasi dini mengenai keamanan dalam menggunakan kartu ATM bagi nasabah Bank Papua. Divisi Pemasaran secara aktif telah membuat sejumlah pamlet/lembar himbauan seperti "Tips Penting dan Kiat Aman Bertransaksi Menggunakan Kartu ATM Bank Papua" untuk ditempel/dipasang pada ruangan terminal ATM yang mudah untuk dilihat nasabah. Yang diharapkan dapat membantu nasabah dalam bertransaksi dengan lebih aman dan terhindar dari penipuan atau tindakan kejahatan.

Increased number of complaints of customers who enter the Bank Papua Card Center service, along with the number of customers holding the card ATM / Debit Bank Papua. The card complaint unit besides serves the information needs and complaints of the cardholder customers and also tries to provide early education about the security in using ATM cards for Bank Papua customers. The Marketing Division has actively created a number of pamphlets / appeal sheets such as "Tips for Secure and Tips for Secure Transactions Using Bank Papua ATM Cards" to be affixed / installed in ATM terminal rooms that are easy for customers to see. Expected to assist customers in transacting more safely and avoid fraud or crime.

Tinjauan Informasi Keuangan dan Non Keuangan Lainnya

Financial and Other Non Finance Information Overview

STRUKTUR MODAL & KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

Dalam kebijakan permodalan Bank Papua selalu disinkronkan dengan rencana strategis jangka panjang dan mengalokasikan modal secara efsien pada segmen bisnis yang memiliki potensi untuk memberikan profl yang optimal. Bank Papua memastikan memiliki kecukupan modal untuk dapat memenuhi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Bank mengacu kepada regulasi Bank Indonesia dalam melakukan perhitungan kecukupan modal untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Untuk risiko kredit, Bank menggunakan pendekatan Standar Basel II (*Standardized Approach*).

CAPITAL STRUCTURE & CAPITAL STRUCTURE POLICY

In the capital policy, Bank Papua is always synchronized with long-term strategic plans and allocate capital efficiently to business segments that have the potential to provide optimal profl. The Bank Papua ensures sufficient capital to meet loan risk, market risk and operational risk. The Bank refers to Bank Indonesia regulation in performing capital adequacy calculation for loan risk, market risk and operational risk. For loan risk, the Bank uses the Basel II Standard approach .

Sebagai gambaran, struktur permodalan Bank Papua di tahun 2017 menjadi sebagaimana tabel berikut:

As an illustration, the capital structure of Bank Papua in 2017 becomes as the following table:

PERTUMBUHAN STRUKTUR PERMODALAN BANK PAPUA TAHUN 2015-2017 (RpJUTA)
GROWTH OF CAPITAL STRUCTURE OF BANK PAPUA 2015-2017 (RpMILLION)

No.	Keterangan	2015	2016	2017	*Information*
1	Modal Inti (Tier 1)	2.660.236	2.815.138	2.214.826	*Core Capital (Tier 1)*
2	Modal Pelengkap (Tier 2)	153.789	139.607	121.096	*Complementary Capital (Tier 2)*
3	Modal Pelengkap Tambahan (Tier 3)	-	-	-	*Additional Supplementary Capital (Tier 3)*
4	Aset tertimbang menurut risiko				*Assets weighted by risk*
	Tanpa memperhitungkan risiko pasar	9.881.699	10.821.036	7.818.241	*Without taking into account market risk*
	Dengan memperhitungkan risiko pasar	7.766	103.749	50.896	*Taking into account market risk*
	Dengan memperhitungkan risiko operasional	2.727.641	3.108.257	3.272.933	*Taking into account operational risk*
5	Rasio kecukupan modal				*Capital adequacy ratio*
	Tanpa memperhitungkan risiko pasar	28,37 %	22,73 %	29,88 %	*Without taking into account market risk*
	Dengan memperhitungkan risiko pasar	28,35 %	22,52%	29,68%	*Taking into account market risk*
	Dengan memperhitungkan risiko operasional	22,22 %	17,53 %	20,96 %	*Taking into account operational risk*
6	Rasio modal inti terhadap asset tertimbang tanpa memperhitungkan risiko	26,97 %	26,02 %	28,33 %	*The ratio of core capital to weighted assets without taking into account the risks*

Modal Inti terdiri dari modal disetor, tambahan modal disetor, cadangan umum dan 50% saldo laba setelah dikurangi dengan selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) dan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset produktif. Modal inti Bank Papua pada tahun 2017 adalah sebesar Rp2.214.826 juta sedangkan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp2.815.138 juta. Modal pelengkap terdiri dari cadangan umum PPA. Pada tahun 2017, modal pelengkap Bank Papua adalah sebesar Rp121.096 juta sedangkan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp139.607 juta.

Core Capital consists of paid up capital. additional paid-in capital. general reserves and 50% retained earnings after deducting the less of between the Allowance for Assets Losses (PPA) and allowance for impairment losses on earning assets. The core capital of Bank Papua in 2017 is Rp2,214,826 million while in 2016 it was Rp2,815,138 million. Complementary capital consists of general reserves of PPA. In 2017, the complementary capital of Bank Papua is Rp121,096 million. while in 2016 it was Rp139,607 million.

Sebagaimana uraian data diatas, posisi rasio CAR Bank Papua sampai dengan Desember 2017 berada pada level 17,99%, yang artinya cukup memadai. Meskipun demikian Bank masih membutuhkan penambahan modal disetor untuk dapat bersaing dengan bank-bank lain serta dapat memenuhi Peraturan Bank Indonesai No.14/26/Pbi/2013 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan modal inti bank). Untuk hal ini, berbagai upaya penguatan struktur modal yang berasal dari penambahan setoran modal dari Pemegang Saham dan peningkatan laba ditahan terus menerus diupayakan oleh Bank Papua.

As the data above, the position of CAR ratio of Bank Papua up to December 2017 is at the level of 17.99%, which means sufficient. However, the Bank still needs additional paid-in capital to be able to compete with other banks and to comply with Bank Indonesia Regulation No.14 / 26 / Pbi / 2013 on Business Activities and Office Networks based on bank's core capital. For this purpose, various efforts to strengthen the capital structure derived from the addition of capital injection from the Shareholders and the increase in retained earnings are continuously pursued by Bank Papua.

PERKEMBANGAN SUKU BUNGA DASAR KREDIT(SBDK)

Selama tahun 2017, Suku Bunga Dasar Kredit Bank Papua beberapa kali mengalami perubahan. Hal tersebut seiring dengan adanya peningkatan dan penurunan suku bunga BI rate. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/1/DPNP Januari 2013 perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit, berikut ini table Suku Bunga Dasar Kredit *Prime Lending Rate* Bank Papua dari tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

DEVELOPMENT OF PRIME LENDING RATE (SBDK)

During 2017, the Prime Lending Rate of Bank Papua has been amended several times. This is in line with the increase and decrease in the BI rate rate. Based on Bank Indonesia Circular Letter No.15 / 1 / DPNP January 2013 regarding Transparency of Basic Interest Rate Information of Credit, the following table Prime Lending Rate of Bank Papua from 31 January 2017 to 31 December 2017.

PERKEMBANGAN SUKU BUNGA DASAR KREDIT
PRIME LENDING RATE

Periode	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
				KPR	Non KPR
31-Jan-17	11,16%	11,40%	15,70%	11,80%	12,83%
28-Feb-17	11,35%	11,69%	15,99%	12,09%	13,07%
31-Mar-17	11,34%	11,64%	16,00%	12,10%	12,91%
30-Apr-17	11,34%	10,95%	14,90%	11,44%	12,09%
31-May-17	11,34%	12,39%	16,35%	12,87%	13,56%
30-Jun-17	11,34%	11,98%	15,73%	12,34%	13,10%
31-Jul-17	11,34%	11,24%	14,87%	11,41%	12,01%
31-Aug-17	11,34%	12,38%	15,41%	11,65%	12,18%
30-Sep-17	11,34%	13,20%	16,00%	12,52%	12,22%
31-Oct-17	11,34%	13,20%	15,98%	12,51%	12,23%
30-Nov-17	11,34%	13,74%	16,73%	13,28%	13,03%
31-Dec-17	11,34%	10,82%	12,49%	9,32%	10,76%

Catatan:
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SDBK dalam kredit konsumsi non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA).

Note:
Prime Lending Rate (SBDK) is used as the basis for determining the interest rate of credit to be imposed by the Bank to the customer. SBDK does not take into account the component of risk premium estimation of the amount depending on the Bank's assessment of the risk of each debtor or group of debtors. Thus, the interest rate of the loan imposed to the debtor is not necessarily the same as the SDBK in the non-mortgage consumption loan excluding the channeling of funds through credit card and unsecured credit (KTA).

MATERIALITAS PENINGKATAN USAHA

Sepanjang tahun 2017 ini, dalam Kegiatan operasionalnya Bank Papua terfokus pada peningkatan kinerja perusahaan. Materialitas peningkatan usaha Bank Papua adalah pendapatan bunga & operasional sebesar Rp2.294.936 juta yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp2.220.021 juta.

MATERIALITY OF BUSINESS IMPROVEMENT

Throughout the year 2017, in its operational activities of Bank Papua focused on improving the performance of the company. Materiality improvement of Bank Papua business is interest income & operational amounting to Rp2,294,936 million which increase compared to year 2016 equal to Rp2,220,021 million.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN USAHA

Selama tahun 2017 tidak terdapat dampak signifikan perubahan harga (*pricing*) terhadap pendapatan usaha atau pendapatan bersih Bank Papua, serta laba operasional perusahaan, sebagaimana yang diungkap dalam laporan Kantor Akuntan Publik (KAP) Perseroan sebagaimana terlampir.

IMPACT OF CHANGES OF PRICE ON BUSINESS REVENUES

During 2017 there is no significant impact on price changes (pricing) on business income or net income of Bank Papua, and operating income of the company, as disclosed in the report of the Public Accounting Firm (KAP) of the Company as attached.

HAPUS BUKU

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit atau hubungan antara Bank Papua dengan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapus bukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya.

WRITTEN OFF

Lending written off when there is no realistic prospect of loan repayment or the relationship between Bank Papua and the debtor has expired. Unpaid loan is written off by debiting the allowance for impairment losses. The reversal of loans written off during the year is credited with adjusting the allowance for impairment losses. The receipt of the return on the lending which has been written off in previous years is recorded as other operating income.

Kredit yang diberikan yang telah dihapusbukukan oleh Bank Papua dicatat sebagai pinjaman yang diberikan ekstra-komptabel di dalam rekening administratif. Bank Papua terus melakukan usaha penagihan atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan tersebut. Total saldo hapus buku pada 31 Desember 2017 & 2016 masing -masing sebesar Rp849.856 juta dan Rp93.931 juta.

Loans written off by Bank Papua are recorded as extra-comptable loans in the administrative account. Bank Papua continues to make a collection effort on the loan which has been written off. Total written off balance at December 31, 2017 & 2016 amounted to Rp849.856 million and Rp93.931 million, respectively.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Investasi barang modal Bank Papua antara lain bertujuan untuk pengembangan jaringan kantor layanan, serta pendukung operasional bank melalui pembelian sejumlah aset tetap atau untuk menambah nilai aset tetap yang diharapkan kedepannya dapat memberikan nilai manfaat bagi perusahaan. Seluruh transaksi investasi barang modal dilakukan dalam mata uang rupiah, sehingga bank tidak memiliki risiko nilai tukar mata uang asing dalam transaksi belanja barang modal.

CAPITAL GOODS INVESTMENT BONDING

Capital goods Investment of Bank Papua, among others, aims to develop a network of service offices, as well as supporting bank operations through the acquisition of fixed assets or to add value of fixed assets expected in the future can provide value for the benefit of the company. All capital investment transactions are done in rupiah currency, so the bank does not have foreign exchange rate risk in capital expenditure transactions. The funding source of capital investment of Bank Papua is budgeted annually in the bank's business plan and has been

Sumber pendanaan investasi barang modal Bank Papua dianggarkan setiap tahunnya di dalam Rencana Bisnis Bank dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan. Unit pelaksana belanja investasi barang modal adalah Divisi Umum dibawah supervisi Direktur Keuangan. Realisasi investasi barang modal Bank Papua tergambar sebagaimana tabel berikut:

submitted to the The funding source of capital investment of Bank Papua is budgeted annually in the Bank's Business Plan and has been submitted to the Financial Services Authority. Implementing unit of capital goods investment expenditure is General Division under supervision of Director of Finance. The realization of capital investment of Bank Papua is illustrated as the following table:

REALISASI INVESTASI BANK PAPUA TAHUN 2013-2017 (RpJUTA)
REALIZATION OF PAPUA BANK INVESTMENT IN 2013-2017 (RpMILLION)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Growth		Description
							Nominal	%	
Tanah	24.474	25.614	27.528	33.146	36.949	36.949	-	0,00%	*Land*
Bangunan Kantor	186.620	191.067	215.563	265.842	272.420	280.348	7.928	2,91%	*Office building*
Perumahan dinas	13.517	15.093	17.533	17.910	20.171	21.234	1.063	5,27%	*Housing services*
Kendaraan bermotor	12.681	14.607	13.907	14.710	14.978	15.416	438	2,92%	*Motor vehicle*
Inventaris Kantor	135.901	157.827	184.491	202.589	215.648	224.042	8.394	3,89%	*Office inventory*
Inventaris rumah dinas	5.798	6.597	6.316	6.805	6.909	7.921	1.012	14,65%	*Inventory of official housing*
Inventaris lainnya	1.044	1.655	1.981	3.242	6.077	7.145	1.068	17,57%	*Other inventory*
Inventaris dalam penyelesaian	200	5.007	1.301	1.643	1.946	2.475	529	27,18%	*Inventory in progress*
Bangunan dalam penyelesaian	8.699	27.419	20.989	7.345	11.091	18.720	7.629	68,79%	*Building in progress*
Total	**388.934**	**444.886**	**489.609**	**553.232**	**586.189**	**614.250**	**28.061**	**4,79%**	**Total**

Realisasi investasi dan belanja modal Bank Papua mengalami peningkatan sebesar 4,79% yakni Rp586.189 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp614.250 juta pada tahun 2017. Peningkatan ini disebabkan adanya pembelian tanah, gedung kantor, kendaraan dinas, dan perlengkapan kantor yang tujuannya untuk peningkatan pelayanan dan operasional bank.

The realization of investment and capital expenses of Bank Papua increased by 4.79% to Rp586,189 million in 2016 to Rp614,250 million in 2017. This increase was due to the purchase of land, office buildings, official vehicles and office equipment for the purpose of increasing service and bank affiliate.

REALISASI PEROLEHAN DAN RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Sampai dengan 31 Desember 2017, Bank Papua tidak pernah menerbitkan surat hutang atau obligasi, sehingga bank tidak memperoleh dan menggunakan dana hasil penawaran umum melalui penerbitan surat hutang atau obligasi.

REALIZATION AND PLANNING OF PUBLIC OFFERING FUND

As of December 31, 2017, Bank Papua never issues debentures or bonds, so the bank does not obtain and use proceeds from the public offering through the issuance of debenture or bonds.

BUY BACK SHARES DAN *BUY BACK* OBLIGASI

Sampai dengan 31 Desember 2017, Bank Papua tidak melakukan *Buy Back Shares* dan *Buy Back* Obligasi, sehingga bank tidak memperoleh dan menggunakan dana dari *Buy Back Shares* dan *Buy Back* Obligasi.

PENGENDALIAN BOPO

Dalam beberapa tahun terakhir, rasio BOPO Bank Papua telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan makin turunnya rasio BOPO. Sebagai tindakan untuk meminimalisir pengeluaran biaya-biaya, maka semua pengeluaran biaya baik untuk penyaluran kredit maupun penggunaan biaya perusahaan dilakukan dengan memperhitungkan azas manfaatnya. Dengan upaya tersebut rasio BOPO dapat diturunkan secara signifikan menjadi sebesar 94,35% ditahun 2017 2017 dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2016 BOPO mencapai 106,54%.

INFORMASI MATERIAL ANTARA LAIN MENGENAI:INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, RESTRUKTURISASI HUTANG/ MODAL

- Ekspansi : Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Papua tidak melakukan ekspansi usaha yang material.
- Divestasi : Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Papua tidak melakukan divestasi usaha yang material.
- Akuisisi : Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Papua tidak melakukan akuisisi usaha yang material.
- Restrukturisasi hutang dan modal : Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Papua tidak melakukan restrukturisasi hutang dan modal usaha yang material.

INFORMASI KEUANGAN YANG TELAH DILAPORKAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Selama tahun 2017, tidak ada informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi di Bank Papua.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Selama tahun 2017, tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan Bank Papua.

BUY BACK SHARES AND *BUY BACK BONDS*

As of December 31, 2017, Bank Papua did not conduct Buy Back Shares and Buy Back Bonds, so the bank did not obtain and use funds from Buy Back Shares and Buy Back Bonds.

OEOI CONTROLLING

In recent years, the ratio of OEOI Bank Papua has shown encouraging results with the decreasing ratio of OEOI. As an action to minimize expenses, all expenditures either for lending or the use of company expenses are made by taking into account the principle of benefits. With these efforts the OEOI ratio can be significantly reduced to 94.35% by 2017 2017 compared to the previous year in 2016 BOPO reached 106.54%.

MATERIAL INFORMATION AMONG OTHER: INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTATION, ACQUISITION, RESTRUCTURE LOAN / CAPITAL

- *Expansion: Until the end of 2017, Bank Papua did not expand its material business.*
- *Divestment: Until the end of 2017, Bank Papua did not divest the material business.*
- *Acquisition: Until the end of 2017, Bank Papua did not acquire a material business.*
- *Debt and capital restructuring: As of the end of 2017, Bank Papua did not restructure its debt and material capital.*

FINANCIAL INFORMATION THAT HAS BEEN REPORTED WHICH CONTAINS EXTRAORDINARY AND RARELY EVENT

During 2017, no financial information has been reported which contains extraordinary and rare events in Bank Papua.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS THAT HAPPENED AFTER DATE OF ACCOUNTANT REPORT

During 2017, no material information and facts occurred after the date of the accountant report of Bank Papua.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN YANG DILAKSANAKAN PERUSAHAAN (ESOP/MSOP)

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Nomor : 07/SK/RUPS-BPD/IV/2013 tanggal 26 April 2013 tentang Peralihan Status Hukum Saham Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tahun 2013 disetujui program kepemilikan saham yang dimiliki oleh karyawan Bank Papua yang tercatat melalui Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Bank Papua Berdikari dengan saham sebanyak 8.593 lembar saham atau sebesar Rp42.965.000.000,- dengan komposis 4,38% dari total saham Bank Papua. Sampai dengan 31 Desember 2017 saham sebanyak 10.893 lembar saham atau sebesar Rp54.465.000.000,- dengan komposisi 2,85%.

STOCK OWNERSHIP PROGRAM BY EMPLOYEES AND / OR EMPLOYED MANAGEMENT (ESOP / MSOP)

Based on the resolutions of the SGM Number: 07 / SK / RUPS-BPD / IV / 2013 dated 26 April 2013 regarding the Transition of Legal Status of Shares of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua of 2013 approved a share ownership program owned by Bank Papua employees registered through Legal Entity Multipurpose Cooperative of Bank Papua Equals with 8,593 shares of stock or Rp42,965,000,000, - with 4.38% composition of total shares of Bank Papua. Until December 31, 2017 shares of 10.893 shares or Rp54,465,000,000, - with composition 2.85%.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam menjalankan usahanya, Bank Papua melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan.

Penerapan PSAK yang direvisi tersebut memberikan pengaruh terhadap pengungkapan terkait dalam laporan keuangan Bank Papua. Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank Papua jika:

a. Suatu pihak yang secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank Papua; (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Bank Papua; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank Papua;
b. Suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank Papua;
c. Suatu pihak yang merupakan ventura bersama di mana Bank Papua sebagai venturer;
d. Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank Papua;
e. Suatu pihak dalam entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam huruf (a) atau (e);

MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND TRANSACTIONS WITH AFFILIATION PARTIES

In carrying out its business, Bank Papua conducts transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 "Related Party Disclosures". This revised SFAS requires disclosure of related parties, transactions and balances, including commitments in the financial statements.

The adoption of the revised PSAK affects the related disclosures in the financial statements of Bank Papua. A party is deemed to be related to Bank Papua if:

a. A party which directly, or indirectly through one or more intermediaries, a party (i) controls, or is controlled by, or is under common control, with Bank Papua; (ii) have significant influence over Bank Papua; or (iii) having joint control over Bank Papua;

b. A party in the same business group as Bank Papua;

c. A party which is a joint venture in which the Bank Papua as a venturer;
d. A party is a member of the key management personnel of Bank Papua;
e. A party in a controlled entity, jointly controlled or significantly influenced by any entity, directly or indirectly, an individual as described in letters (a) or

f. Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank Papua atau entitas terkait Bank Papua.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(e);

f. A party is a post-employment benefit plan for employee benefits from Bank Papua or an entity related to Bank Papua.

This transaction is based on terms agreed by both parties, where such terms may not be the same as other transactions conducted with non-related parties.

The details of the nature of the relationship and the type of transactions with related parties are as follows:

PIHAK BERELASI *RELATED PARTIES*	JENIS HUBUNGAN *TYPES OF RELATION*	UNSUR TRANSAKSI PIHAK BERELASI *RELATED PARTY TRANSACTIONS*
Pemerintah Provinsi Papua & Papua Barat *Provincial Government of Papua & West Papua*	Pemegang Saham Pengendali *Controlling Shareholder*	a. Simpanan Giro b. Simpanan Deposito Berjangka c. Beban Bunga *a. Current Account* *b. Time Deposit* *c. Interest Expense*
Karyawan Kunci *Key Employee*	Direksi , Komisaris, Pemimpin Cabang, Wakil Kepala Cabang, Kepala Divisi *Directors, Commissioners, Heads of Branch, Heads of Divisions*	a. Pinjaman Kredit b. Penempatan dana dalam bentuk tabungan d. Beban bunga *a. Loan* *b. Loan placements in form of savings* *c. Interest income, and* *d. Interest Expense*

Sampai dengan akhir Desember 2017, Transaksi dengan Pihak Berelasi di Bank Papua disampaikan pada laporan Auditor tahun 2017 pada buku laporan tahunan ini.

Until the end of December 2017, Transactions with Related Parties at Bank Papua shall be submitted to the Auditor's report in 2017 in this annual report book.

Penerbitan & Perubahan Peraturan Internal Yang Berpengaruh Terhadap Perusahaan

Sepanjang tahun 2017 terdapat beberapa penerbitaan dan perubahan peraturan internal yang mana ketentuan tersebut memiliki pengaruh yang cukup signifikan atas pelaksanaan operasional Bank, antara lain sebagai berikut:

1) Surat Keputusan Direksi Bank Papua yang diterbitkan di tahun 2017:

Publishing & Changing Internal Rules That Affect Against Companies

Throughout 2017 there are several internal regulatory issues and changes which have significant influence over the Bank's operational operations, including the following:

1) Board of Directors Decree of Bank Papua issued in 2017:

SURAT KEPUTUSAN Direksi BANK PAPUA YANG DITERBITKAN DI TAHUN 2017 *DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PAPUA BANKS PUBLISHED IN 2017*			
Nomor SK	Tanggal	Perihal	*Subject*
01/DIR-BPD/I/2017	03 Januari 2017	Kredit Wira Bhakti	*Wira Bhakti Loan*
02/DIR-BPD/I/2017	30 Januari 2017	Pembukaan Kantor Kas Okbibab di wilayah Kantor Cabang Oksibil	*Opening of Okbibab Cash Office in Oksibil Branch Office*
02.A/DIR-BPD/II/2017	07 Februari 2017	Perubahan kedua lampiran Surat Keputusan Direksi No. 69/DIR-BPD/IX/2015 tentang stanhdar operating Prosedure (SOP) Struktur Organisasi	*Second Amendment to BOD Decree Letter No. 69 / DIR-BPD / IX / 2015 concerning stanhdar operating Procedure (SOP) Organizational Structure*
04/DIR-BPD/II/2017	14 Februari 2017	Perpanjangan masa tugas komite Dewan komisaris	*Extension of the term of the BOC committees*
04.A/DIR-BPD/II/2017	17 Februari 2017	Pembukaan Kantor Kas Wapoga di wilayah	*Opening of the Wapoga Cash Office in the region*
05/DIR-BPD/II/2017	24 Februari 2017	Revisi penunjukan panitia pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)	*Revision of the appointment of the organizing committee of the Extraordinary Shareholders General Meeting (ESGM)*
06/DIR-BPD/II/2017	27 Februari 2017	Tim Pengembangan dan Pengelola Website	*Website Development and Management Team*

SURAT KEPUTUSAN Direksi BANK PAPUA YANG DITERBITKAN DI TAHUN 2017
DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PAPUA BANKS PUBLISHED IN 2017

Nomor SK	Tanggal	Perihal	*Subject*
07.1/DIR-BPD/ III/2017	10 Maret 2017	*Counterpart* Team Dalam Rangka Pengembangan Pembangunan Struktur Organisasi	*Counterpart Team In The Framework Of Development Of Organizational Structure Development*
08/DIR-BPD/III/2017	17 Maret 2017	Komite Pertimbangan Pegawai	*Employee Advisory Committee*
08.A/DIR-BPD/ III/2017	20 Maret 2017	Pembukaan Kantor Kas Sinak	*Opening Sinak Cash Office*
09/DIR-BPD/III/2017	29 Maret 2017	Penunjukan Panitia Pelaksana Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan	*Appointment of the Executive Committee of the Annual Shareholders General Meeting (AGM)*
10/DIR-BPD/III/2017	29 Maret 2017	Penunjukan Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi (RAKOR)	*Appointment of Coordinating Committee for Coordination Meeting (RAKOR)*
11.1/DIR-BPD/ III/2017	29 Maret 2017	Struktur Organisasi dan Profil Pekerjaan (Job *Profile*)	*Organizational Structure and Job Profile (Job Profile)*
12/DIR-BPD/IV/2017	11 April 2017	Pembayaran Bonus Kantor Cabang Tahun 2016	*Bonus Payment of Branch Office 2016*
13/DIR-BPD/IV/2017	13 April 2017	Pembayaran Jasa Produksi Tahun 2016 kepada pegawai dan Pegawai kontrak Waktu Tertentu	*Payment of Production Services 2016 to employees and employees of contracts of Certain Time*
14/DIR-BPD/IV/2017	18 April 2017	Pelaksanaan Hapus Buku Kredit Macet Tahun 2017	*Implementation of the Loss of Loss Credit Fiscal Year 2017*
15/DIR-BPD/IV/2017	18 April 2017	Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Direksi No. 15/DIR-BPD/II/2017 tentang pedoman pengadaan Barang/Jasa	*Second Amendment to BOD Decree No. 15 / DIR-BPD / II / 2017 on guidelines for procurement of Goods / Services*
16/DIR-BPD/IV/2017	20 April 2017	Hasil Business Meeting evaluasi Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja Triwulan I Tahun 2017 dan Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2017	*Business Meeting Evaluation Result of Quarter IV of 2016 First Quarter Performance of 2017 and Revision of Bank Business Plan (RBB) Year 2017*
17/DIR-BPD/V/2017	10 Mei 2017	Pencabutan Surat Keputusan Direksi No. 21.A/ DIR-BPD/III/2014 tentang tim satuan tugas (*Task Force Team*) Penghimpunan Dana Pihak Ketiga	*Revocation of Directors Decree No. 21.A / DIR-BPD / III / 2014 on the taskforce team (Task Force Team) Third Party Funding*
18/DIR-BPD/V/2017	10 Mei 2017	Pencabutan Surat Keputusan Direksi No. 18/DIR-BPD/VI/2015 tentang wewenang pemberian *special rate* bunga deposito	*Revocation of BOD Decree No. 18 / DIR-BPD / VI / 2015 on the authority of granting special rate of deposit interest*
19/DIR-BPD/V/2017	12 Mei 2017	Batas Usia Pensiun Pegawai	*Age Limit Employee Retirement*
20/DIR-BPD/V/2017	31 Mei 2017	Rumah Dinas bagi Direksi dan Pejabat	*Home Office for BOD and Officials*
21/DIR-BPD/V/2017	31 Mei 2017	Kendaraan Dinas bagi Direksi dan Pejabat di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua	*Official Vehicle for BOD and Officials at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua*
22/DIR-BPD/V/2017	17 Mei 2017	Penunjukan team pengadaan barang dan jasa pekerjaan pengadaan outsourching jasa keamanan (Security) di lingkungan kantor pusat dan kantor cabang utama jayapura	*Appointment of procurement team of goods and services procurement work outsourching security services in the environment of head office and main branch office jayapura*
23/DIR-BPD/V/2017	17 Mei 2017	Penunjukan team pengadaan barang dan jasa pekerjaan pengadaan outsourching jasa keamanan (security) di lingkungan kantor cabang Nabire	*Appointment of procurement team of goods and services procurement job outsourching security services in the Nabire branch office environment*
24/DIR-BPD/V/2017	17 Mei 2017	Kewenangan transaksi tunai, pemindahbukuan dan otorisasi sesuai tingkatan user pada sistem core banking	*Authority cash transactions, transfer and authorization according to user level on the core banking system*
25/DIR-BPD/V/2017	22 Mei 2017	Pembentukan komite manajemen resiko	*Establishment of risk management committees*
26/DIR-BPD/V/2017	23 Mei 2017	Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI)	*Information Technology Steering Committee (KPTI)*
27/DIR-BPD/V/2017	23 Mei 2017	Perbaikan Rencana Bisnis Bank tahun buku 2017-2019	*Improvement of Business Plan bank year 2017-2019*
28/DIR-BPD/VI/2017	06 Juni 2017	Pembagian wilayah kerja	*Division of work area*
29/DIR-BPD/VI/2017	12 Juni 2017	Pengangkatan komite dewan komisaris	*Appointment of the commissioners committee*
30/DIR-BPD/VI/2017	14 Juni 2017	Kewenangan memutus kredit dan menandatangani perjanjian kredit	*Authority to cut credit and sign credit agreement*
31/DIR-BPD/VI/2017	19 Juni 2017	Pengangkatan saudara Sanggenafa Max sebagai pengurus dana Pensiun BPD Papua	*The appointment of Sanggenafa Max's brother as a pension fund of BPD Papua*

SURAT KEPUTUSAN Direksi BANK PAPUA YANG DITERBITKAN DI TAHUN 2017
DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PAPUA BANKS PUBLISHED IN 2017

Nomor SK	Tanggal	Perihal	*Subject*
32/DIR-BPD/VI/2017	20 Juni 2017	Perubahan atas surat keputusan Direksi Nomor 24/DIR-BPD/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Kewenangan transaksi tunai, pemindahbukuan dan otorisasi sesuai tingkatan user pada sistem core banking	*Amendment to BOD Decree No. 24 / DIR-BPD / V / 2017 of the Board of Directors dated May 17, 2017 on the Authority of cash transactions, book-entry and authorization at the user level of the core banking system*
33/DIR-BPD/VI/2017	22 Juni 2017	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	*People's Business Loan (KUR)*
34/DIR-BPD/VII/2017	04 Juli 2017	Penunjukan team pengadaan barang dan jasa pekerjaan pengadaan outsourching jada cleaning service dilingkungan kantor pusat dan kantor cabang utama jayapura	*Appointment of procurement team of goods and services procurement job outsourching jada cleaning service environment head office and main branch office jayapura*
35/DIR-BPD/VII/2017	04 Juli 2017	Pembentukan team penyelesaian kredit karyawan PT. Freeport Indonesia &Privatisinya	*Establishment of PT. Freeport Indonesia & its private*
36/DIR-BPD/VII/2017	04 Juli 2017	Segmentasi Bank Papua Card	*Segmentation of Bank Papua Card*
37/DIR-BPD/VII/2017	12 Juli 2017	Standard Operating Procedure (SOP) Struktur Organisasi	*Standard Operating Procedure (SOP) Organizational Structure*
39/DIR-BPD/VII/2017	17 Juli 2017	Segmentasi Kredit	*Credit Segmentation*
40/DIR-BPD/VII/2017	19 Juli 2017	Komite dan Keputusan Kredit	*Committees and Credit Decisions*
41/DIR-BPD/VII/2017	24 Juli 2017	Susunan kepanitiaan Pengadaan Kalender dan Agenda	*The organizational structure of Calendar Procurement and Agenda*
42/DIR-BPD/VII/2017	24 Juli 2017	Tim Penagihan kredit extracomtable	*The extracomtable credit collection team*
43/DIR-BPD/VII/2017	31 Juli 2017	Perubahan Suat keputusan Direksi No. 25.A/ DI-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kedit	*Amendment to the Board of Directors' decision. 25.A / DI-BPD / III / 2012 on the Implementation Handbook (BPP) Kedit*
43.1/DIR-BPD/ VII/2017	31 Juli 2017	Penetapan Remunerasi anggota komite dewan komisaris yang bukan berasal dari anggota dewan komisaris	*Determination of Remuneration of committee members of committee of commissioners who are not from members of the board of commissioners*
43.2/DIR-BPD/ VIII/2017	21 Agustus 2017	Pembentukan Panitia penghapusan barang inventaris	*Establishment of Inventory removal committee*
44/DIR-BPD/VIII/2017	02 Agustus 2017	Kredit pegawai wira bhakti	*Wira bhakti Credit employees*
45/DIR-BPD/VIII/2017	03 Agustus 2017	Pedoman business continuity plan (BCP) & Disasterrecove Plan (DRP) BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP	*BI-RTGS business continuity plan (BCP) & Disasterrecove Plan (DRP) manual, BI-SSSS, BI-ETP*
46/DIR-BPD/VIII/2017	08 Agustus 2017	Perubahan sk Direksi nomor : 64/DIR-BPD/IX/2015 tentang pedoman transaksi repurchase Agreement (REPO)/Reverse Repurchase Agreement (Reverse Repo)	*Changes in directorship sk number: 64 / DIR-BPD / IX / 2015 on guidelines for repurchase agreement (REPO) / Reverse Repurchase Agreement (Reverse Repo)*
46.1/DIR-BPD/ VIII/2017	15 Agustus 2017	Tim Pengadaan IT Blueprint Periode 2017-2021	*Procurement Team of IT Blueprint Period 2017-2021*
46.2/DIR-BPD/ VIII/2017	15 Agustus 2017	Tim pengadaan pedoman perusahaan manajemen risiko teknologi informasi	*Team procurement guidelines enterprise information technology risk management*
48/DIR-BPD/VIII/2017	28 Agustus 2017	Perubahan surat keputusan Direksi Nomor : 37/DIR-BPD/VII/2017 tentang Standard Operating Prosedure (SOP) Struktur Organisasi	*Change of Directors Decision Letter Number: 37 / DIR-BPD / VII / 2017 regarding Standard Operating Procedure (SOP) Organizational Structure*
49/DIR-BPD/IX/2017	04 September 2017	Tim *Counterpart* penyusunan redefinisi visi, misi dan *corporate plan* tahun 2018-2022	*The Counterpart team of drafting redefinition vision, mission and corporate plan 2018-2022*
50/DIR-BPD/IX/2017	04 September 2017	Tim pengadaan barang dan jasa (jasa konsultasi) penyusunan redefinisi visi, misi dan *corporate plan* tahun 2018 - 2022	*Team for procurement of goods and services (consultation services) the preparation of the vision, mission and corporate plan redefinition in 2018 - 2022*
50.1/DIR-BPD/ IX/2017	11 September 2017	Penutupan kantor cabang pembantu kelapa gading di wilayah kantor cabang utama jakarta	*Closing the Kelapa Gading sub-branch office in the main branch office area of jakarta*
50.2/DIR-BPD/ IX/2017	11 September 2017	Penutupan kantor cabang pembantu manga dua di wilayah kantor cabang utama jakarta	*Closing of Mangga Dua sub-branch offices in the main branch office area of Jakarta*
50.3/DIR-BPD/ IX/2017	11 September 2017	Penutupan kantor cabang pembantu Gading Serpong di wilayah kantor cabang utama jakarta	*Closing of Gading Serpong sub-branch office in the main branch office of Jakarta*

SURAT KEPUTUSAN Direksi BANK PAPUA YANG DITERBITKAN DI TAHUN 2017
DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PAPUA BANKS PUBLISHED IN 2017

Nomor SK	Tanggal	Perihal	*Subject*
51/DIR-BPD/IX/2017	12 September 2017	Tim pendampingan dalam rangka pemeriksaan umum tahun 2017 otoritas jasa keuangan provinsi papua dan papua barat	*Assistance team in the framework of the general examination of 2017 provincial financial services authority of Papua and West Papua*
52/DIR-BPD/IX/2017	12 September 2017	Tim pendampingan dalam rangka pemeriksaan badan pemeriksa keuangan perwakilan provinsi papua pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tahun 2017	*Assistance team in the framework of the examination of the financial auditing agency representative of Papua province at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua in 2017*
53/DIR-BPD/IX/2017	26 September 2017	Perubahan pertama lampiran I surat keputusan Direksi nomor 43.A/DIR-BPD/VIII/2015 tentang bentuk dan ketentuan surat dinas	*The first amendment of appendix I of decision letter of directors number 43.A / DIR-BPD / VIII / 2015 on the form and the provisions of the official letter*
54/DIR-BPD/IX/2017	29 September 2017	Ketentuan mutasi, rotasi, promosi dan demosi pegawai di lingkungan kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Papua	*Terms of mutation, rotation, promotion and demotion of employees in the work environment of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua*
54.1/DIR-BPD/X/2017	03 Oktober 2017	Panitia pelaksana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun 2017	*Executing Committee of Extraordinary Shareholders General Meeting (ESGM) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua 2017*
54.2/DIR-BPD/X/2017	03 Oktober 2017	Panitia pelaksana Business Meeting PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun 2017	*Executive Committee of Business Meeting PT. Bank Pembangunan Daerah Papua 2017*
55/DIR-BPD/X/2017	17 Oktober 2017	Peraturan dana pension dari dana pension PT. Bank Pembangunan daerah papua	*Regulation of pension fund from pension fund of PT. Development Bank Papua*
56/DIR-BPD/X/2017	23 Oktober 2017	Wewenang pengoperasian system Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) Generasi II, system kliring nasional bank Indonesia (SKNBI) generasi II, bank indonesia *Scripless securities settlement system* (BI-SSSS) Generasi II, dan Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP) dan Guava System PT. Bank Pembangunan Daerah Papua	*The authority to operate the Bank Indonesia system of Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) Generation II, the second-generation Indonesian Banking Clearing System (SKNBI) II, Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) Generation II, and Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI -ETP) and Guava System PT. Bank Pembangunan Daerah Papua*
56.1/DIR-BPD/X/2017	31 Oktober 2017	Tim pendampingan dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 31 Desember 2017 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace & Karunawan	*Team assistance in the framework of examination of financial statements of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Fiscal Year 31 December 2017 by Public Accounting Firm (KAP) Hertanto, Grace & Karunawan*
57/DIR-BPD/XI/2017	01 November 2017	Peraturan Perjalanan Dinas PT. Bank Pembangunan Daerah Papua	*Official Travel Regulations of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua*
58/DIR-BPD/XI/2017	03 November 2017	Tim Pengelola Official Account Sosial Media PT. Bank Pembangunan Daerah Papua	*Media Official Social Media Manager Team PT. Bank Pembangunan Daerah Papua*
58.1/DIR-BPD/ XI/2017	07 November 2017	Penunjukan team pengadaan barang dan jasa pekerjaan pengadaan outsourching jasa keamanan (security) di lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.	*Appointment of team goods and services procurement work outsourching security services (security) in the environment of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.*
59/DIR-BPD/XI/2017	14 November 2017	Hasil Business meeting evaluasi kinerja triwulan III Tahun 2017 dan pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah Papua	*Results Business meeting performance evaluation quarter III Year 2017 and discussion of business plan bank (RBB) Year 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah Papua*
61/DIR-BPD/XI/2017	23 November 2017	Pemberlakuan pembuatan kode billing pajak dengan sarana *host to host* ke Direktorat Jenderal pajak pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua	*The application of tax billing code by means of host to host to Directorate General of tax at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua*

2) Surat Edaran Direksi Bank Papua yang diterbitkan di tahun 2017

2) Circular Letter of the Board of Directors of Bank Papua issued in 2017

SURAT KEPUTUSAN Direksi BANK PAPUA YANG DITERBITKAN DI TAHUN 2017
DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PAPUA BANKS PUBLISHED IN 2017

Nomor SE	Tanggal	Perihal	*Subject*
01/SE-BPD/II/2017	03 Februari 2017	Pelaksanaan Mitigasi Risiko Kredit Pegawai	*Implementation of Employee Risk Mitigation*
02/SE-BPD/II/2017	14 Februari 2017	Pemberitahuan hari libur nasional dalam rangka PILKADA Tahun 2017	*Notification of national holidays in the Election Year 2017*
04/SE-BPD/IV/2017	06 April 2017	Kewenangan memutus dan penghentian sementara kredit	*Authority to decide and suspend credit*
05 /SE-BPD/IV/2017	12 April 2017	Libur khusus memperingati hari paskah ke-2	*Special holiday commemorate the 2nd Easter day*
06 /SE-BPD/IV/2017	26 April 2017	Kewenangan memutus kredit	*Authority to decide credit*
08/SE-BPD/VI/2017	02 Juni 2017	Libur Khusus memperingati Pentakosta ke-2	*Special Holidays commemorate Pentecost 2*
09/SE-BPD/VI/2017	06 Juni 2017	Pengaturan *Likuiditas* Dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri 1438 H	*Liquidity Management for Idul Fitri 1438 H*
11//SE-BPD/VI/2017	19 Juni 2017	Cuti bersama dan libur hari raya idul fitri 1438 Hijriiah tahun 2017	*Joint leave and Idul Fitri holidays 1438 Hijriiah in 2017*
13/SE-BPD/VII/2017	28 Juli 2017	Penggunaan Connecting user digital sertificate hard token & digital certificate soft token BI-RTGS, BI-SSSS dan BI-ETP	*Use of Connecting user digital token & digital certificate license of BI-RTGS soft token, BI-SSSS and BI-ETP*
14/SE-BPD/IX/2017	05 September 2017	Laporan system layanan informasi keuangan	*Report of financial information service system*
15/SE-BPD/IX/2017	08 September 2017	Penjelasan atas keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua nomor 39/DIR-BPD/VII/2017 tentang Segmentasi Kredit	*Explanation on BOD Decree of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua number 39 / DIR-BPD / VII / 2017 on Credit Segmentation*
17/SE-BPD/X/2017	25 Oktober 2017	Libur khusus memperingati HUT GKI di Tanah Papua	*Special holiday commemorating the GKI anniversary in Tanah Papua*
19/SE-BPD/XI/2017	17 November 2017	Libur khusus memperingati Hari Otonomi Khusus Papua	*Special holidays commemorate Papua's Special Autonomy Day*
28/SE-BPD/I/2017	09 Januari 2017	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)	*Annual Income Tax Income Tax Payer (WPOP)*

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN

Laporan keuangan Bank tunduk dan patuh serta telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interprestasi Standar Akuntasi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntasi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) termasuk Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI).

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan intern adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan disajikan sesuai dengan praktek yang lazim berlaku dalam industri perbankan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini ikhtisar PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh DSAK -IAI yang relevan untuk bank, namun ada yang telah berlaku dan ada yang belum berlaku efektif untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017:

CORPORATE ACCOUNTING POLICIES

The financial statements of the Bank are subservient and compliant and have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Indonesian Accounting Standards Board (IAI) including Accounting Guidelines Indonesian Banking (PAPI).

The accounting policies adopted in the preparation of interin financial statements are consistent with the accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the years ended 31 December 2017 and 2016 and are presented in accordance with prevailing practices in the banking industry and the 2008 Indonesian Banking Accounting Guidelines (PAPI) issued by Bank Indonesia.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

the following summaries of SFAS and ISAK issued by DSAK -IAI that are relevant to the bank, but some of which have prevailed and which are not yet effective for the financial statements ending December 31, 2017:

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrument keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.
- PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang asset pendasarnya (*underlying assets*) bernilai-rendah.

- Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan. Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-cash
- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan; estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya.
- PSAK 15 (Penyesuaian 2017): Investasi pada Entias Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pada saat pengakuan awal entitas dapat memilih untuk mengukur investasinya pada nilai wajar atas dasar investasi-per-investasi.

- *PSAK 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9, effective January 1, 2020 with early application is permitted. This SFAS regulates the classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of the contractual cash flows and the business model of the entity; method of credit loss expectation for impairment resulting in more timely, relevant and understandable information by users of financial statements; accounting for hedges that reflects better entity risk management by introducing more general requirements based on management considerations.*
- *PSAK 73: Leases, adopted from IFRS 16, effective January 1, 2020 with early application permitted to entities which have also applied PSAK 72: Revenues from Contracts with Customers. This SFAS establishes the principles of recognition, measurement, presentation and disclosure of leases by introducing a single accounting model by requiring to recognize right-of-use assets and lease liabilities. There are two optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities, namely: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.*

- *PSAK 2 Amendment: Cash Flow Statement on Disclosure Initiative, effective January 1, 2018 with early application is permitted. This Amendment requires an entity to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes to liabilities arising from financing activities, including changes arising from cash flows or non-cash changes*
- *Amendment of PSAK 46: Income Tax on Deferred Tax Assets Recognition for Unrealized Losses, effective January 1, 2018 with early application is permitted. This amendment clarifies that to determine whether the taxable gain will be available so that the deductible temporary differences can be utilized; an estimate of the likelihood of future taxable profits may include the recovery of some of the entity's assets beyond its carrying amount.*
- *SFAS 15 (2017 Adjustment): Investments in Joint Venture Associations and Voters, effective January 1, 2018 with early application is permitted This adjustment clarifies that at the time of initial recognition the entity may choose to measure its investment at fair value on an investment-per-investment basis.*

- Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71 Instrumen Keuangan dengan PSAK 62 Kontrak Asuransi, berlaku efektif 1 Januari 2020. Amandemen ini mengizinkan yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerapkan pengecualian sementara dari PSAK 71 (*deferral approach*) atau memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis (*overlay approach*) untuk aset keuangan yang ditetapkan
- Amandemen PSAK 53 – Pembayaran Berbasis Saham: Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan. Amandemen ini bertujuan untuk memperjelas perlakuan akuntansi terkait klasifikasi dan pengukuran transaksi pembayaran berbasis saham

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank Papua masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank Papua.

- *Amendments to SFAS 62: Insurance Contracts on Implementing SFAS 71 Financial Instruments under PSAK 62 Insurance Contracts, effective January 1, 2020. This amendment permits those who meet certain criteria to apply temporary exclusion from PSAK 71 (deferral approach) or choose to apply a overlay approach for defined financial assets*

- *Amendment of PSAK 53 - Share-based Payments: Classification and Measurement of Stock-Based Payment Transactions, effective January 1, 2018 with early application is permitted. This amendment aims to clarify the accounting treatment related to the classification and measurement of stock-based payment transactions*

At the time of issuance of the financial statements, Bank Papua is still studying the possible impacts of the adoption of the new standards and those revisions as well as its impact on the financial statements of Bank Papua.

PERISTIWA PENTING YANG JARANG TERJADI

Sesuai dengan Surat OJK Nomor SR-8/D.03/2017 Tanggal 21 April 2017 Perihal Penetapan Status Bank Saudara dalam Pengawasan Intensif, maka Bank Papua berstatus Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) oleh OJK.

IMPORTANT EVENTS RARELY HAPPENED

In accordance with Letter of OJK Number SR-8 / D.03 / 2017 dated 21 April 2017 Regarding Establishment of Status of Bank in Intensive Monitoring, Bank Papua is in the Bank Under Intensive Monitoring (BDPI) by OJK.

PERUBAHAN-PERUBAHAN PENTING YANG TERJADI

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 6 Maret 2017 memilih dan memutuskan lima orang Direksi Bank Papua menggantikan dua Direksi sebelumnya dengan susunan Direksi adalah sebagai berikut:

1. **F. ZENDRATO**
   Sebagai DIREKTUR UTAMA
2. **SADAR SEBAYANG**
   Sebagai DIREKTUR BISNIS
3. **RUDHY DHARMA**
   Sebagai DIREKTUR KEUANGAN
4. **ISAK SEMUEL WOPARI**
   Sebagai DIREKTUR OPERASIONAL
5. **JEFRY SANI PITHER SIING**
   Sebagai DIREKTUR KEPATUHAN

Dengan terpilih dan diputuskannya lima orang Direksi tersebut, maka berakhirlah masa tugas Sharly Andris Parrangan dan Frens Mambrisau, SE, MM.

IMPORTANT CHANGES

Based on the resolution of the Extraordinary Shareholders General Meeting (ESGM) dated March 6, 2017 elect and decide five Board of Directors of Bank Papua to replace the two previous directors with the composition of the Board of Directors are as follows:

1. ***F. ZENDRATO***
   As PRESIDENT DIRECTOR
2. ***SADAR SEBAYANG***
   As BUSINESS DIRECTOR
3. ***RUDHY DHARMA***
   As FINANCE DIRECTOR
4. ***ISAK SEMUEL WOPARI***
   As BANKING OPERATION DIRECTOR
5. ***JEFRY SANI PITHER SIING***
   As COMPLIANCE DIRECTOR

With the election and decision of the five Directors, the end of the task Sharly Andris Parrangan and Frens Mambrisau, SE, MM.

Tinjauan Prospek Usaha Perusahaan

Business Prospect Review

PROSPEK USAHA

Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan prioritas pembangunan 2018 oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi prospek utama perusahaan. Sinergi antara program Pemerintah Daerah dengan Rencana Bisnis Bank Papua bisa mendorong bangkitnya perekonomian daerah dalam rangka pengembangan ekonomi yang mandirian di setiap daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota di Papua dan Papua Barat. Untuk itu, Bank Papua selalu melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) setempat, guna menselaraskan program utama Bank Papua, khususnya pembiayaaan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat dan penyediaan infrastruktur.

BUSINESS PROSPECT

The Central Government Work Plan and 2018 development priorities by the Provincial Government of Papua and West Papua are the main prospects of the company. The synergy between the Local Government program and the business plan of Bank Papua could encourage the rise of the regional economy in the context of developing an independent economy in every region of the Province, Regency and Municipal in Papua and West Papua. To that end, Bank Papua always intensive coordination with Local Government (Provincial, Regency and Municipal) local, in order to align the main program of Bank Papua, especially funding in order to fulfill basic services in education, health, people economy and infrastructure provision.

STRATEGI DAN RENCANA KERJA 2018

Bank Papua sebagai suatu lembaga keuangan yang beroperasi di daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan di Nusantara akan terus berupaya menjadi Bank yang kuat, unggul dan terpercaya, serta mengintegrasikan dengan program-program BPD Transformasi untuk menjadi bank yang terbaik dengan hasil yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk itu arah kebijakan Bank Papua pada tahun 2018 adalah dengan memfokuskan pada langkah-langkah strategis yang akan ditempuh, antara lain :

1. Bank Papua Fokus dan Berkomitmen dalam menurunkan *Non Performing Loan* (NPL) Gross 7,62% dan NPL Net 1,52% pada tahun 2018.
2. Penghimpunan Dana Pihak ketiga (DPK), yaitu dengan melakukan langkah-langkah :
   - Optimalisasi penghimpunan DPK masyarakat melalui mengefektifkan marketing/funding officer dalam memahami serta megaplikasikan langkah teknis pelaksanaan pemasaran produk dengan target disamping meningkatkan standar performa tenaga marketing
   - Rekruitmen tenaga pemasaran menjadi perpanjangan tangan dalam menjalankan program yang dibentuk oleh Divisi Pemasaran untuk menghimpun DPK dari masyarakat dapat maksimal
   - Pemberian *Special Rate* sebagai daya tarik nasabah dan optimalisasi penghimpunan DPK serta membantu dalam melakukan ekspansi bisnis.

STRATEGY AND WORK PLAN 2018

Bank Papua as a financial institution operating in the regions of Papua Province and West Papua Province and in the archipelago will continue to strive to become a strong, superior and trusted Bank, and integrate with BPD Transformation programs to become the best bank with results in accordance with set target. For that purpose the policy of Bank Papua in 2018 is to focus on the strategic steps that will be pursued, among others:

1. *Bank Papua Focus and Committed to lower Non Performing Loan (NPL) Gross 7.62% and NPL Net 1.52% in 2018.*
2. *Collection of Third Party Funds (TPF), namely by taking steps:*
   - *Optimizing the collection of TPF community through the effectiveness of marketing / funding officer in understanding and application of technical step implementation of product marketing with the target in addition to improving performance standards of marketing personnel*
   - *Recruitment of marketing personnel into an extension of the hand in running a program established by the Marketing Division to collect TPF from the public can be maximized*
   - *Providing Special Rate as the customer's appeal and optimizing the collection of TPF and assisting in expanding the business.*

- Mendukung program Pemerintah sesuai surat Edaran Mendagri Nomor: 910/1866SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi
- Melakukan promosi Program Canvasing, Open Counter dan Advertising
- Memberikan kewenangan biaya promosi kepada masing-masing kantor cabang guna menyelenggarakan *gathering community* dengan perusahaan-perusahaan nasional, multinasional dan pemerintah daerah. Pendekatan ini dalam rangka menjaga hubungan dengan pemilik dana dan dana yang telah disimpan di Bank Papua perlu dikelola dengan baik.
- Menjalin kerjasama dengan Mitra Kerja untuk menghimpun DPK Bank Papua.
- Menetapkan *Sales / Acount Oficer* untuk masing-masing segmentasi pelayanan.

3. Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan langkah-langkah sebagai berikut :
   - Komitmen Penurunan *Non Performing Loans* (NPL) tahun 2018 dengan *Risk* Tolerance 6,58% dari target NPL Gross 4,85%.
   - Penyempurnaan implementasi kredit *Four Ayes Principle*, Penagihan dan Restrukturisasi Kredit serta Rencana Hapus Buku Kredit tahun 2018 sebesar Rp556.940 juta.
   - Segmentasi pengelolaan Kredit (Kredit Konsumer & UMKM, Kredit komersial kecil s.d 5 milyar di kelola Kantor Cabang, Diatas 5 milyar di kelola oleh Divisi)
   - Wewenang kepala Cabang dan Kepala KCP untuk memutus kredit, di prioritaskan Kredit Konsumtif yang ada payroll atau pembayaran gaji di Bank Papua (terutama pegawai Pemda), dan kredit UMKM (s/d Rp500 juta), KPR LKPP, sedangkan kredit komersial, kecil sesuai *track record* & ditetapkan dengan SK tersendiri secara Individual.
   - Melakukan upaya penjualan asset/agunan debitur NPL untuk menurunkan nilai kredit.
   - Memenuhi kekurangan CKPN kredit bagi debitur NPL. Pembentukan LGD minimal 100% untuk kredit kualitas macet yang tidak ada prospek lagi.
   - Pemberian kredit kepada pengusaha di Papua dan Papua Barat yang bonafide
   - Fokus pembiayaan di Tanah Papua.
   - Pembatasan pemberian kredit (*house limit*) yaitu: individu Rp50 milyar dan group Rp75 milyar, kecuali untuk kredit sindikasi infrastruktur Dalam memutus kredit harus selalu ada unit bisnis dan unit risiko bisnis, sehingga ada check & balance,

- *Supporting the Government program in accordance with Minister of Domestic Affairs Circular Letter Number: 910 / 1866SJ dated April 17, 2017 on Implementation of Non-Cash Transaction at Provincial Government*
- *Promoting Canvasing Program, Open Counter and Advertising*
- *Providing authority of promotion cost to each branch office to organize a gathering community with national, multinational and local government companies. This approach in keeping with the owners of funds and funds that have been stored in Bank Papua needs to be managed properly.*

- *Establish cooperation with Partners to collect TPF Bank Papua.*
- *Establish Sales / Acount Oficer for each service segmentation.*

3. *Non Performing Loans Settlement with the following steps:*
   - *The decrease of Non Performing Loans (NPL) in 2018 with Risk Tolerance 6.58% from 4.85% Gross NPL target.*
   - *Improved implementation of Four Ayes Principle credit, Credit Collection and Restructuring and Written off Lending Plan 2018 of Rp556,940 million.*
   - *Segmentation of Credit Management (Consumer Loan & SMEs, Small Commercial Loan till 5 billion in managed by Branch Offices, Above 5 billion managed by Division)*
   - *Branch and Sub Branch Manager to terminate loan, prioritize existing payroll loans or payroll at Bank Papua (especially local government employees), and MSME loan (up to Rp500 million), KPR LKPP, while small commercial loans according to the track record & set with its Decree SK Individually.*

   - *Make efforts to sell assets / collateral of NPL debtors to lower credit score.*
   - *Fulfilling CKPN loan deficiencies for NPL debtors. Establishment of LGD at least 100% for loss loan quality that no longer prospects.*

   - *Provision of loans to entrepreneurs in Papua and West Papua are bona fide.*
   - *The focus of financing in Tanah Papua.*
   - *Limitations of loan (house limit) are: individual Rp50 billion and group Rp75 billion; except for infrastructure syndication loans In deciding on loan there should always be business units and business risk units, so there are checks & balances,*

termasuk pengaturan kewenangan serta keputusan *Full Committee*
- Kredit > Rp50 milyar akan dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris
- Menetapkan Kredit *Recovery Plan* sebagai *action plan* sebagai program kerja divisi kredit khusus dengan target penyelesaian sampai dengan Triwulan IV yang terdiri dari 224 debitur dengan total saldo 502 milyar

4. Meningkatkan kualitas dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dengan penyempurnaan bidang Managemen SDM agar sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan Bank Papua dalam menopang kegiatan bisnisnya.
5. Pengembangan Teknologi Informasi yang mendukung kualitas atas pengembangan produk dan layanan perbankan sehingga fungsi Teknologi Informasi Bank Papua secara maksimal digunakan guna menopang/menumbuhkan bisnis perusahaan
6. Menjaga hubungan kemitraan yang baik dengan para *Stakeholders/Customer* dengan memberikan pelayanan yang baik secara cepat dan tepat
7. Sesuai dengan Surat OJK Nomor SR-8/D.03/2017 Tanggal 21 April 2017 Perihal Penetapan Status Bank Saudara dalam Pengawasan Intensif, maka :
   a. Bank Papua tidak akan mengeluarkan kredit baru, kecuali :
      1. Kredit Konsumsi dan atau Kredit KPR yang memiliki Pay roll gaji melalui Bank Papua.
      2. Kredit KPR Sejahtera yang merupakan Program Pemerintah dan Kredit Konstruksi Pembangunan Rumah (KKPR) dengan tujuan mendukung produksi Rumah Sejahtera.
      3. Kredit Sindikasi dengan *arranger* bank dengan rating KPMR kredit sangat memadai.
      4. Kredit Modal Kerja Konstruksi kepada debitur dan/ atau grup debitur yang menerima pekerjaan dari Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah untuk proyek-proyek di Provinsi Papua dan Papua Barat.
      5. Kredit Usaha Mikro dan Kecil termasuk Kredit Usaha Rakyat; dan
      6. Kredit Produktif selain yang disebutkan di atas sampai dengan plafond Rp1 milyar untuk setiap debitur dan maksimal Rp3 milyar untuk setiap grup debitur.

including the arrangement of authority as well as the decision of the Full Committee
- *Loan> Rp50 billion will be consulted to the Board of Commissioners*
- *Establish Loan Recovery Plan as action plan as a work program of special credit division with completion target up to Quarter IV consisting of 224 debtors with total balance 502 billion*

4. *Improving the quality and management of human resources (HR) with a reliable improvement of the field of HR Management in accordance with the provisions and needs of Bank Papua in sustaining its business activities.*
5. *Development of Information Technology that supports the quality of product development and banking services so that the function of Information Technology Bank Papua is maximally used to sustain / grow the company's business*
6. *Maintain good partnership relationship with the Stakeholders / Customer by providing good service quickly and accurately*
7. *Pursuant to Letter of OJK Number SR-8 / D.03 / 2017 dated 21 April 2017 Regarding Establishment of Status of Bank in Intensive Supervision, then:*
   a. Bank Papua will not issue new loan except:
      1. *Consumer Loans and / or Mortgage Loans that have Payroll Payroll through Bank Papua*
      2. *KPR Prosperous Credit which is the Government Program and Mortgage and Construction Loan (KKPR) for the purpose of supporting the production of House of Welfare.*
      3. *Syndication Loans with bank arranger with credit rating of KPMR is very adequate.*
      4. *Construction Working Capital Loan to debtor and / or group of debtor receiving job from Central Government and / or Local Government for projects in Papua and West Papua Province.*
      5. *Micro and Small Business Loans including People's Business Loans; and*
      6. *Productive Loans other than those mentioned above up to Rp1 billion for each debtor and a maximum of Rp3 billion for each group of debtors.*

b. Guna menjalankan tatakelola perkreditan yang teratur dan aman, maka direncanakan penetapan limit memutus kredit bagi pejabat bank disetiap unit kerja dengan rencana rincian kewenangan sebagai berikut :
   1. Komite Direksi (lengkap) : > 50 milyar
   2. Komite Direksi (tiga Direksi) : s/d 50 milyar
   3. Komite Direksi (dua Direksi) : s/d 30 milyar
   4. Divisi Risiko Bisnis : s/d 10 milyar
   5. Divisi Kredit Khusus : s/d 3 milyar
   6. Divisi Komersial dan Korporasi : s/d 10 milyar
   7. Divisi Pengembangan Ekonomi Rakyat : s/d 1 milyar
   8. Kantor Cabang Tipe A : s/d 3 milyar
   9. Kantor Cabang Tipe B: s/d 2.5 milyar
   10. Kantor Cabang Tipe C: s/d 2 milyar
   11. Kantor Cabang Tipe D: s/d 1 milyar

Berdasarkan beberapa point diatas diharapkan Bank Papua akan segera keluar dari status Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) oleh OJK. Selain hal tersebut diatas maka untuk mendukung pencapaian Rencana Bisnis Bank di Tahun 2018 perlu adanya produktivitas karyawan dan profesionalisme dalam meningkatkan kinerja perusahaan maka diperlukan adanya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai alat untuk memastikan kelangsungan perusahaan serta untuk menjaga kepentingan nasabah. Bank Papua tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan manajemen risiko terhadap seluruh aspek operasional perusahaan.

b. In order to run a regular and secure loan management, it is planned to set limits on termination of credit for bank officials in each work unit with the plan details of the following authorities:

1. Director's Committee (full):> 50 billion
2. Director's Committees (3 Directors): upto 50 billion
3. Director's Committees (2 Directors): upto 30 billion
4. Business Risk Division: upto 10 billion
5. Special Loan Division: upto 3 billion
6. Commercial & Corporate Division: upto 10 billion
7. People's Economic Development Division: upto 1 billion
8. Branch Office Type A: upto 3 billion
9. Branch Offices Type B: upto 2,5 billion
10. Branch Office Type C: upto 2 billion
11. Branch Offices Type D: upto billion

Based on the above points, it is hoped that Bank Papua will soon be released from the status of the Bank Under Intensive Monitoring (BDPI) by OJK. In addition to the above, in order to support the achievement of the Bank Business Plan in 2018, it is necessary to have employee productivity and professionalism in improving the performance of the company, it is necessary to implement Good Corporate Governance (GCG) as a tool to ensure the company's continuity and to safeguard the interest of customers. Bank Papua remains concerned with prudential principles by applying risk management to all aspects of the company's operations.

Tinjauan Pendukung Bisnis

Business Support Review

Orientasi pada Nilai Tambah dan Perbaikan Terus Menerus

Orientation on Added Value and Continuous Improvement

BANK PAPUA

Bersama Papua Membangun Negeri

Selalu kreatif dan inovatif dalam berpikir dan bertindak dengan melakukan pembaharuan dan perbaikan untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang dilakukan secara terus menerus.

Always creative and innovative in thinking and acting by doing renewal and improvement to provide added value to the company that is done continuously.

Tinjauan Sumber Daya Manusia
Human Resources Overview

Profil Sumber Daya Manusia

Zaman sudah berubah dan paradigma selalu bergerak. Paradigma Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpusat pada manusia tidak lagi melihat pekerja sebagai faktor produksi yang dieksploitasi semaksimal mungkin dengan biaya minimal. Pekerja dipandang sebagai aset utama bergeraknya suatu perusahaan. Pekerja dipandang dan dimanusiakan sebagai suatu pribadi yang unik dan membutuhkan pengelolaan yang unik juga.

Bank Papua sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian menyadari bahwa perusahaan yang sukses mengelola SDM tidak hanya memberikan gaji yang layak bagi pekerja, namun paham bahwa kebutuhan pekerja tidak hanya berhubungan dengan masalah finansial. Perusahaan juga harus memberikan rasa aman, memberikan penghargaan akan jati diri, pengakuan sosial, dan pemberian peluang aktualisasi diri bagi pekerja. Hasilnya sungguh luar biasa, dimana pekerja bekerja dengan mentalitas yang pantang menyerah dan penuh energi yang berlimpah ruah. Para pekerja tidak hanya menjalankan tugas yang harus dikerjakan tetapi berlomba-lomba memberikan seluruh kemampuannya untuk kemajuan perusahaan.

Human Resource Profile

Times have changed and paradigms are always moving. Human Resource Paradigm centered no longer sees workers as exploited production factors to the maximum extent possible at minimal cost. Workers are seen as the main assets of a company's move. Workers are viewed and humanized as a unique person and require unique management as well.

Bank Papua as a company that upholds humanistic values realizes that companies that successfully manage human resources not only provide a decent salary for workers, but understand that the needs of workers are not only related to money. Companies must also provide a sense of security, an appreciation of identity, social recognition, and the provision of self-actualization opportunities for workers. The result is remarkable, where employees work with an abundance mentality. Unyielding mentality and abundant energy. The workers not only perform the task to be done, but compete to give all their ability to progress the company.

Untuk itu, Manajemen Bank Papua berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam mengelola Sumber Daya Manusia yang dimiliki sesuai dengan tujuan perusahaan.

To that end, the Bank Papua Management is committed to implementing these principles in managing the Human Resources owned in accordance with the company's objectives.

Blue Print Sumber Daya Manusia (SDM)

Berbicara mengenai manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di Bank Papua, maka tak terlepas dari *blue print* manajemen SDM. Dimulai dari rekrutmen, pengembangan pegawai, pola karier, dan penghargaan kepada pegawai. Semuanya merupakan satu mata rantai yang harus dikembangkan ke depan. *Blue print* atau Cetak Biru Sumber Daya Manusia yang diterapkan Bank Papua adalah Manajemen SDM Berbasis Kompetensi. Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (MSDM-BK) dapat didefinisikan sebagai "suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian aktivitas tenaga kerja mulai dari rekruitmen sampai dengan pensiun dimana proses pengambilan keputusannya didasarkan pada informasi kebutuhan kompetensi jabatan dan kompetensi individu untuk mencapai tujuan perusahaan.

Human Resources (HR) Blue Print

Speaking of Human Resource Management (HR) at Bank Papua, it cannot be separated from HR management blue print. Starting from recruitment, employee development, career patterns, and rewards to employees. Everything is one link that must be developed in the future. Blueprint of human resources applied by Bank Papua is a Competency Based Human Resource Management. Speaking of Human Resource Management (HR) at Bank Papua, it cannot be separated from blue print HR management. Starting from recruitment, employee development, career patterns, and rewards to employees. Everything is one link that must be developed in the future. Blueprint or Blue print of human resources applied by Bank Papua is a Competency Based Human Resource Management.

Dalam MSDM-BK keputusan yang diambil dan aktivitas yang dilaksanakan selalu mengacu kepada kebutuhan kompetensi jabatan dan kompetensi individu yang terukur dan dapat teramati validitasnya berdasarkan perilaku seseorang yang bekerja dalam suatu organisasi.

In the MSDM-BK decisions are taken and the activities carried out always refers to the needs of competencies and the ability of individual competences are measurable and can be observed validity based on the behavior of someone who works in an organization.

Blue Print Sistem MSDM – BK Terintegrasi

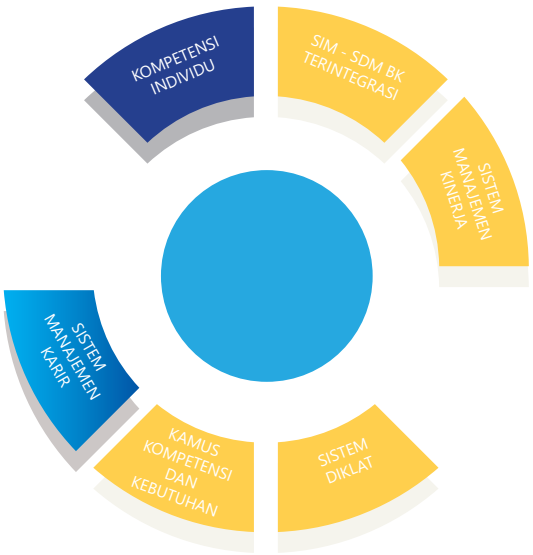

Keterangan *Blue Print* Sistem MSDM Berbasis Kompetensi Terintegrasi:

- Kompetensi individu karyawan adalah kemampuan berperilaku seseorang dalam berbagai situasi yang cukup konsisten untuk satu periode waktu yang cukup panjang dan bukan hal yang kebetulan sesaat semata dan dapat ditunjukkan dengan hasil kerja atau karya, pengetahuan, keterampilan, perilaku, karakter, sikap, motivasi dan atau bakatnya.
- Sistem Manajemen Kinerja untuk menghitung *Key Performance Indicator* (KPI) seseorang yang perhitungannya dengan periode perencanaan (aspek finansial, kompetensi, pelayanan pelanggan, proses bisnis internal)
- Sistem Manajemen Karir merupakan sistem untuk mengelola pegawai dari masuk, berkarya sampai dengan keluar Perusahaan, mengatur penempatan pegawai dengan prinsip "*The right Person at The Right Place at the right time*" dengan memperhatikan prestasi, kompetensi, dan prospek / dampak mutasi (individu dan organisasi)
- Sistem Kompensasi berbasis kompetensi berdasarkan 3 aspek yaitu::
  1. *Pay For Person.*
  2. *Pay For Position.*
  3. *Pay For Performance.*
- Assesment Potensi dan Kompetensi Pegawai diukur berdasarkan:
  1. Referensi dan profesional.
  2. Assesment Center.
  3. Psikotes.
  4. Wawancara.
  5. Penilaian.
  6. Kuesioner.
  7. Biodata.
- Sistem Manajemen Talenta adalah suatu sistem yang memungkinkan organisasi untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, di waktu yang tepat dan dengan strategi yang tepat.

The description of Blue Print Integrated Competency Based MSDM System:

- *The individual employee's competence is the ability to behave in a variety of fairly consistent situations for a rather long period of time and can be demonstrated by the work or work, knowledge, skills, behavior, character, attitude, motivation and / or his talent.*
- *Performance Management System to calculate Key Performance Indicator (KPI) of a person whose calculation with the planning period (financial aspect, competence, customer service, internal business process)*
- *Career Management System is a system for managing employees from entry, work to exit the Company, arranging employee placement under the principle of "The Right Person at The Right Place at the right time" with regard to achievements, competencies, and prospects / impacts of mutations (individuals and organizations)*
- *Compensation system based on 3 aspects:*
  1. *Pay For Person.*
  2. *Pay For Position.*
  3. *Pay For Performance.*
- *Employee Potential and Competency Assessment is measured by:*
  1. *References and professionals.*
  2. *Assessment Center.*
  3. *Psychotest.*
  4. *Interview.*
  5. *Assessment.*
  6. *Questionnaire.*
  7. *Biodata.*
- *Talent Management System is a system that enables organizations to put the right people in the right position, at the right time and with the right strategy.*

Pengembangan SDM

Perusahaan menyadari bahwa sasaran jangka panjang perusahaan tidak dapat dicapai tanpa dimilikinya karyawan yang kompeten, memiliki integritas tinggi, memiliki etos kerja yang baik, mampu bekerja sama dan senantiasa menerapkan prinsip pembelajaran berkelanjutan dalam setiap aktivitas kerjanya, serangkaian kebijakan dan aktivitas strategis pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi penyempurnaan struktur organisasi dan uraian tugas menyelenggarakan rekrutmen dan seleksi calon karyawan, membenahi prosedur dan sistem pengelolaan SDM, serta menyempurnakan program pembinaan, pendidikan dan pelatihan karyawan yang berbasiskan

Human Resource Development

The Company recognizes that its long-term goals cannot be achieved without having competent employees, high integrity, good work ethic, able to cooperate and constantly apply sustainable learning principles in every work activity, a set of policies and strategic activities of Human Resource Management) which includes improving the organizational structure and job descriptions of recruitment and selection of candidates, improving HR management procedures and systems, and refining the competency-based competency-building, education and training programs.

kompetensi.

Hal ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan salah satu misi perusahaan, yaitu mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan profesional untuk menjamin ketersedian tenaga kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan dengan melakukan pengelolaan sebagai berikut:

1. Melakukan analisa terhadap kebutuhan tenaga kerja secara periodik agar efisiensi jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan tetap terjaga.
2. Menerapkan sistem seleksi yang sangat ketat dan adil dalam setiap tahapan proses rekrutmen calon karyawan.
3. Melakukan penilaian yang objektif terhadap kinerja karyawan secara berkala, yang hasilnya dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan salah satu komponen gaji bulanan serta penentuan kenaikan golongan dan jabatan karyawan.
4. Melakukan GAP analysis untuk memastikan kesesuaian tingkat kompetensi yang dimiliki karyawan dengan kebutuhan pekerjaan.
5. Merencanakan dan melaksanakan program pelatihan untuk peningkatan kompetensi teknis dan manajerial serta sikap kerja karyawan.

Perusahaan mendorong karyawan bekerja secara profesional yang berorientasi pada produktivitas dan efisiensi. Selain itu, perusahaan menyediakan berbagai fasilitas keagamaan, olahraga dan kesenian yang dapat dipergunakan oleh karyawan sebagai media untuk bersosialisasi, menyalurkan hobi dan mengembangkan diri. Perusahaan juga mengadakan berbagai kegiatan sosial yang melibatkan seluruh karyawan seperti peringatan hari ulang tahun perusahaan melalui pekan olahraga dan seni, peringatan hari besar keagamaan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Semua hal tersebut menjadi Kebijakan khusus manajemen dalam hal pengelolaan Sumber Daya Manusia yang diarahkan agar memiliki integritas yang tinggi guna menjaga kebersamaan dan kelangsungan perusahaan dari hal-hal yang dapat merugikan pribadi maupun perusahaan.

Lingkungan Kerja Menyenangkan Bagi Pegawai

Lingkungan kerja yang menyenangkan sangat penting bagi karyawan. Hal ini menjadi penentu dalam baik atau tidak nya kinerja karyawan. Untuk itu, Bank Papua melalui Divisi SDM membangun Lingkungan kerja yang menyenangkan dengan menekan beberapa konsep sebagai berikut ini:

1. Membangun Komunikasi yang Baik

This is done as an effort to realize one of the company's mission, namely to develop competent and professional human resources to ensure the availability of manpower with the competence required by the company by managing as follows:

1. *Perform analysis on the labor requirement periodically in order to keep the efficiency and the quantity of labor required.*
2. *Implement a very rigorous and fair selection system in every stage of the recruitment process of prospective employees.*
3. *Perform an objective assessment of the performance of employees on a regular basis, the results serve as the basis for calculation of one component of monthly salary and the determination of the increase of class and employee position.*
4. *Conduct GAP analysis to ensure the suitability level of the employee's competence with the needs of the job.*
5. *Plan and implement training programs to improve technical and managerial competence and employee work attitude.*

The company encourages employees to work professionally oriented to productivity and efficiency. In addition, the company provides a variety of religious facilities, sports and art that can be used by employees as a medium for socializing, channeling hobbies and develop themselves. The Company also conducts various social activities involving all employees such as corporate anniversary commemorations through sports and arts week, religious festivals and other activities.

All these things become a special management policy in terms of Human Resource management directed to have a high integrity to maintain corporate togetherness and sustainability of things that can harm personal and corporate.

Comfortable Working Environment for Employees

A comfortable working environment is important to employees. Even so, one of the determinants in the good or bad performance of employees. To that end, Bank Papua through the Human Resource Division builds a Comfortable Working Environment by pressing several concepts as follows:

1. *Building Good Communication*

Komunikasi yang baik adalah dasar dari sebuah kerjasama. Jika komunikasi baik sudah tercipta, maka antar rekan kerja akan seperti sahabat.

2. Merancang Tempat Kerja yang Nyaman
   Bagus tidaknya hasil kerja seorang pegawai terkadang ditentukan apakah ia nyaman dengan tempat (ruangan) kerjanya. Melalui Divisi SDM, Bank Papua memberikan fasilitas ruang yang nyaman bagi karyawan.
3. Dukungan dari Pihak Manajemen
   Kenyamanan kerja para karyawan harus pula didukung oleh pihak manajemen. Hal ini berkaitan dengan peraturan kerja dan kesejahteraan bagi karyawan. Caranya, dengan memberikan kesejahteraan yang telah dijanjikan pada karyawan.
4. Lingkungan Kerja yang Berorientasi pada Hasil
   Di dalam sebuah lingkungan kerja yang beriorientasi pada hasil, karyawan bebas melakukan apa pun sepanjang ia memenuhi target sesuai tenggat waktu yang ditentukan perusahaan.
5. Ciptakan Kebersamaan
   Menciptakan kebersamaan dalam perusahaan sebagai sebuah tim. Banyak hal yang dilakukan, yakni mengadakan *office gathering* atau *team building*.

Good communication is the basis of cooperation. If good communication is created, then co-workers will be like friends.

2. *Designing a Comfort Workplace*
   Good job of an employee is sometimes determined whether he is comfortable with the place (space) work. Through the Human Resource Division, Bank Papua provides convenient space for employees.

3. *Support from Management*
   Employee comfort should also be supported by the management. This relates to employment and welfare regulations for employees. Its manner, by providing welfare that has been promised to employees.

4. *Results-Oriented Work Environment*
   In a result-oriented work environment, employees are free to do anything as long as they meet targets within the company's specified deadlines.

5. *Create Togetherness*
   Creating corporate togetherness as a team. Many things done, namely holding an office gathering or team building.

Komposisi Pegawai

Jumlah Pegawai

Sampai dengan tahun 2017 jumlah pegawai Bank Papua sebanyak 2.565 orang, yang terdiri dari 2.343 Pegawai tetap dan 189 pegawai kontrak serta 33 honor diperbantukan yang ditempatkan diseluruh Kantor Bank Papua, dengan jumlah pegawai seperti tergambar pada tabel dibawah ini:

Employee Composition

Number of Employees

Up to 2017 the number of Bank Indonesia employees is 2,565 persons, consisting of 2,343 permanent employees and 189 contract employees and 33 honorarium placed throughout the Bank Papua Office, with the number of employees as illustrated in the table below:

JUMLAH PEGAWAI BANK PAPUA DARI TAHUN 2013-2017
NUMBER OF EMPLOYEES OF BANK PAPUA FROM 2013-2017

No	Status Pegawai	Total 2013	Total 2014	Total 2015	Total 2016	Total 2017	*Employee Status*
1	Pegawai Tetap	1.916	1.875	2.211	2.426	2.343	*Permanent employee*
2	Profesional Hire	-	-	-	-	1	*Pkwt*
3	PKWT/Kontrak	69	446	341	237	188	
	Sub Total	1.985	2.321	2.552	2.663	2.532	*Sub-Total*
4	HDP	36	40	38	38	33	*HDP*
Jumlah		**2.021**	**2.361**	**2.590**	**2.701**	**2.565**	

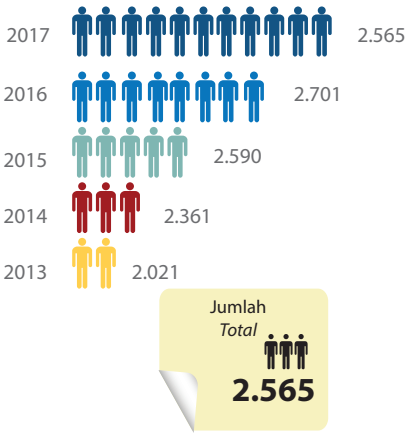

Dibandingkan dengan tahun 2016, secara total terjadi penurunan jumlah pegawai tetap sebanyak 136 orang atau 5,04% di tahun 2017.

Compared to 2016, the total number of permanent employees decreased by 136 people or 5.04% in 2017.

Komposisi Pegawai Bank Papua Berdasarkan Suku

The composition of the Bank Papua by Employee Tribe

KOMPOSISI PEGAWAI BANK PAPUA BERDASARKAN SUKU DARI TAHUN 2013-2017
COMPOSITION OF PAPUA BANK EMPLOYEES BY TRIBE FROM 2013-2017

SUKU	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
PAPUA	985	1.163	1.261	1.335	1.155
NON PAPUA	1.036	1.198	1.329	1.366	1.410
JUMLAH	**2.021**	**2.361**	**2.590**	**2.701**	**2.565**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Bank Papua memiliki pegawai dengan tingkat pendidikan yang bervariasi dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Doktoral untuk mengakomodir kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan. Sampai dengan tahun 2017, komposisi pegawai Bank Papua berdasarkan jenjang pendidikan seperti terlihat dalam tabel dibawah ini:

Number of Employees by Education Level

Bank Papua has employees with varying levels of education from elementary school level to doctoral level to accommodate the needs of workers in accordance with the needs. Until 2017, the composition of Bank Papua employees based on education level as shown in the table below:

JUMLAH PEGAWAI BANK PAPUA BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN DARI TAHUN 2013-2017
NUMBER OF EMPLOYEES OF BANK PAPUA BASED ON EDUCATION LEVEL FROM 2013-2017

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TOTAL 2013	TOTAL 2014	TOTAL 2015	TOTAL 2016	TOTAL 2017	*EDUCATIONAL LEVEL*
1	DOKTOR (S3)	-	-	1	1	1	*DOCTORAL (S3)*
2	PASCA SARJANA (S2)	45	53	60	67	69	*POST GRADUAT (S2)*
3	SARJANA (S1)	1.281	1.645	1.897	2.061	1.990	*BACHELOR DEGREE)*
4	DIPLOMA (D4)	1	2	2	1	1	*DIPLOMA (D4)*
5	DIPLOMA (D3)	111	120	120	112	105	*DIPLOMA (D3)*
6	DIPLOMA (D1)	2	2	3	3	3	*DIPLOMA (D1)*
7	SMA / SEDERAJAT	570	529	498	447	389	*SENIOR HIGH / EQUAL*
8	SMP / SEDERAJAT	5	5	4	4	3	*JUNIOR HIGH / EQUAL*
9	SD / SEDERAJAT	6	5	5	5	4	*ELEMENTARY / EQUAL*
TOTAL		**2.021**	**2.361**	**2.590**	**2.701**	**2.565**	

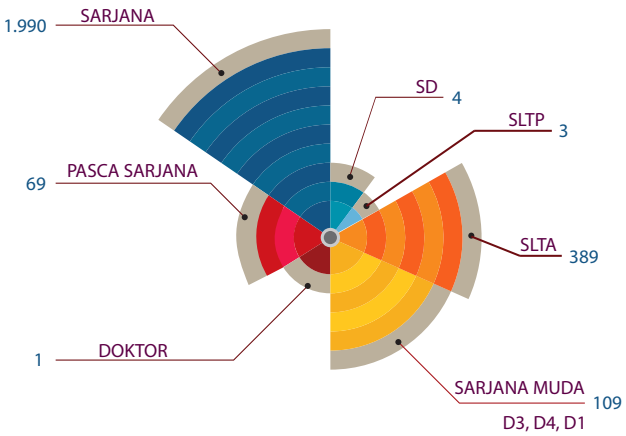

Terjadi penambahan pegawai untuk jenjang pasca sarjana sebanyak 2 orang dan pengurangan pegawai pada jenjang sarjana sebanyak 71 orang, pada jenjang SMA sederajat sebanyak 58 orang, pada jenjang SMP sederajat sebanyak 1 orang, serta pada jenjang SD sederajat sebanyak 1 orang.

There was an increase in the number of employees for the graduate level as much as 2 people and the reduction of the employee at the bachelor level as many as 71 people, at the equivalent of 58 senior high school level, at the junior high school equivalent of 1 person, as well as in elementary school level equal to 1 person.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Bank Papua memiliki pegawai dengan tingkat usia produktif yang bervariasi. Sampai dengan tahun 2017, komposisi pegawai berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

Ditahun 2017, pegawai pada usia 26-30 tahun dan 31 sampai 35 tahun mendominasi komposisi total pegawai, yang artinya pegawai dengan usia muda dan produktif lebih banyak.

Employee Composition by Age

Bank Papua has employees with varying productive age. Up to 2017, the composition of employees by age is as follows:

By 2017, employees at the age of 26-30 years and 31-35 years dominate the total composition of employees, which means younger and more productive employees.

KOMPOSISI PEGAWAI BANK PAPUA BERDASARKAN USIA DARI TAHUN 2013-2017
COMPOSITION OF EMPLOYEES OF BANK PAPUA BY AGE FROM 2013-2017

NO	JENJANG USIA	JML 2013	JML 2014	JML 2015	JML 2016	JML 2017
1	21 – 25	464	448	362	281	280
2	26 – 30	702	921	1.102	1.173	1.128
3	31 – 35	339	467	571	663	638
4	36 – 40	151	152	163	181	173
5	41 – 45	186	173	175	166	151
6	46 – 50	123	137	136	120	115
7	> 50	56	63	81	117	80
TOTAL		**2.021**	**2.361**	**2.590**	**2.701**	**2.565**

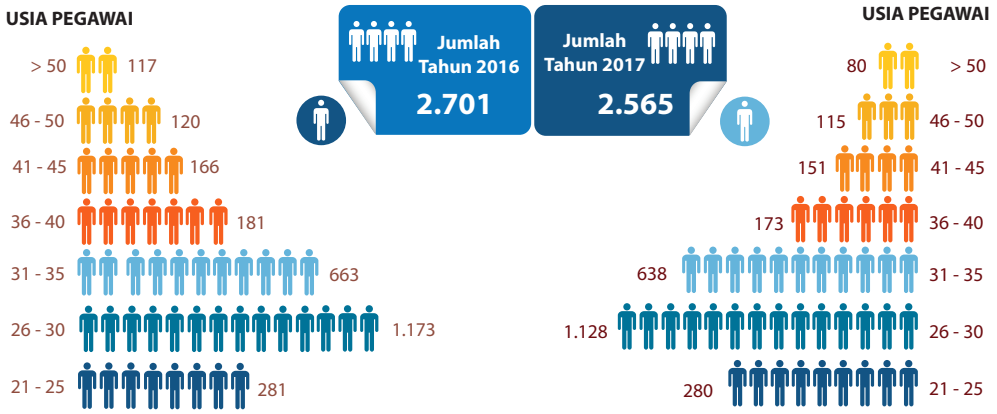

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan

Bank Papua memiliki jenjang karir untuk setiap jabatan. Sampai dengan tahun 2017, komposisi pegawai berdasarkan Jenjang Jabatan adalah sebagai berikut:

Employee Composition by Job Title

Bank Papua has a career path for every position. Up to 2017, the composition of employees by Level of Position is as follows:

KOMPOSISI PEGAWAI BANK PAPUA BERDASARKAN JENJANG JABATAN DARI TAHUN 2013-2017
COMPOSITION OF EMPLOYEES OF BANK PAPUA BASED ON LEVEL OF POSITION FROM 2013-2017

NO	JABATAN	JML 2013	JML 2014	JML 2015	JML 2016	JML 2017	*POST*
	STRUKTURAL						*STRUCTURAL*
1	KEPALA DIVISI	14	15	16	15	18	*HEAD OF DIVISION*
2	KEPALA CABANG	29	33	35	37	38	*BRANCH MANAGER*
3	WAKIL KEPALA CABANG	2	2	2	2	1	*THE HEAD OF THE BRANCH*
4	KEPALA DEPARTEMEN	128	141	148	174	173	*HEAD OF DEPARTMENT*
5	KEPALA UNIT	110	124	139	125	110	*HEAD OF UNIT*
6	KEPALA CABANG PEMBANTU	56	69	72	70	69	*HEAD OF THE HEARING BRANCH*
7	KEPALA KANTOR KAS	65	75	91	102	111	*CASH OFFICE HEAD OFFICE*
8	PEG. MASA PERSIAPAN PENSIUN	6	7	8	13	6	*PENSION PREPARATION EMPLOYEE*
	FUNGSIONAL						*FUNCTIONAL*

KOMPOSISI PEGAWAI BANK PAPUA BERDASARKAN JENJANG JABATAN DARI TAHUN 2013-2017
COMPOSITION OF EMPLOYEES OF BANK PAPUA BASED ON LEVEL OF POSITION FROM 2013-2017

9	FUNGSIONAL	74	83	87	76	206	*FUNCTIONAL*
10	PEJABAT DI PERBANTUKAN	1	1	-	4	-	*OFFICIALS OFFERED*
NO	**JABATAN**	**JML 2013**	**JML 2014**	**JML 2015**	**JML 2016**	**JML 2017**	*POST*
	STAF						*STAFF*
11	STAF	1.432	1.326	1.613	1.812	1.612	*STAFF*
	SUB TOTAL	**1.916**	**1.875**	**2.211**	**2.426**	2.344	*SUB-TOTAL*
12	KONTRAK / PKWT	69	446	341	233	188	*CONTRACT / PKWT*
	SUB TOTAL	**1.985**	**2.321**	**2.552**	**2.663**	2.532	*SUB-TOTAL*
	HONOR DIPERBANTUKAN (HDP)						*HONOR OFFERED (HDP)*
13	HDP	36	40	38	38	33	
	JML TOTAL	**2.021**	**2.361**	**2.590**	**2.701**	**2.565**	**TOTAL JML**

Karena adanya pengembangan organisasi, proses mutasi, promosi, dan pensiun di tahun 2017, terjadi perubahan komposisi pegawai berdasarkan jenjang Jabatan, yakni pegawai untuk jabatan Kepala Divisi menjadi 18 orang, Kepala Departemen sebanyak 177 orang dan Kepala Kantor Kas menjadi 110 orang.

Due to the development of the organization, the process of mutation, promotion and retirement in 2017, there is a change in the composition of employees based on Position, namely the employee for the position of Head of Division to 18 people, 177 Department Heads and Head of Cash Office to 110 people.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan (GRADE)

Sampai dengan tahun 2017, karena adanya pengembangan Divisi, serta adanya promosi, rotasi, dan masa pensiun karyawan, maka komposisi pegawai berdasarkan tingkat jabatan tergambar seperti tabel dibawah ini:

Number of Employees by Level of Position (GRADE)

Until 2017, due to the development of the Division, as well as the promotion, rotation, and retirement of employees, the composition of employees based on the level of office is illustrated as the table below:

JUMLAH PEGAWAI BANK PAPUA BERDASARKAN TINGKAT JABATAN (GRADE) DARI TAHUN 2013-2017
NUMBER OF EMPLOYEES OF BANK PAPUA BY LEVEL OF POSITION (GRADE) FROM 2013-2017

	GRADE	JUMLAH 2013	JUMLAH 2014	JUMLAH 2015	JUMLAH 2016	JUMLAH 2017
1	15	10	10	12	14	12
2	14	19	21	19	18	17
3	13	38	37	33	34	25
4	12	35	38	38	43	32
5	11	47	53	61	58	65
6	10	53	61	77	69	62
7	9	88	76	66	90	82
8	8	42	55	64	64	70
9	7	97	77	60	39	38
10	6	81	138	184	202	240
11	5	36	39	173	292	293
12	4	597	776	964	1.096	1.039
13	3	77	96	203	246	298
14	2	396	394	254	160	68
15	1	3	4	3	1	2
16	0	402	486	379	275	222
	TOTAL	**2.021**	**2.361**	**2.590**	**2.701**	**2.565**

Ditahun 2017, terjadi pengurangan pegawai cukup besar pada grade 15, 13, dan 12. Dibandingkan tahun 2016 yang masing-masing besar penurunannya adalah 14,29%, 26,47% dan 25,58%

In the Year 2017, there was a substantial reduction of employees on the 15th, 13th and 12th grade. Compared to 2016 which were 14.29%, 26.47% and 25.58% respectively,

Pendidikan dan Pelatihan yang sudah dilaksanakan di tahun 2017

Guna meningkatkan kompetensi seluruh pegawainya, maka Bank Papua ditahun 2017 menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal, diantaranya:

Education and Training that has been implemented in 2017

To improve the competence of all employees, Bank Papua in 2017 provides education and training both by internal and external parties, including:

1. Diklat Internal

1. Internal Training

REALISASI DIKLAT INTERNAL TAHUN 2017
REALIZATION OF INTERNAL TRAINING 2017

NO	NAMA KEGIATAN	JENIS KOMPETENSI / *COMPETENCY TYPES*	PENYELENGGARA / *ORGANIZER*	*NAME OF ACTIVITIES*
1	IHT - Program Indonesia Pintar	Teknis / *Technical*	Divisi Pemasaran	*IHT - Smart Indonesia Program*
2	IHT - Manajemen Perubahan	Teknis / *Technical*	Bapak Daniel Saputro	*IHT - Management*
3	IHT - Strategi Bisnis	Teknis / *Technical*	Daniel Saputro	*Change*
4	IHT : Sosialisasi dan Training ELOS	Penyegaran / *Freshment*	PT. Linkadata	*IHT - Business Strategy*
5	IHT - Sosialisasi Sistem Layanan Infromasi Keuangan	Penyegaran / *Freshment*	PT. Collega Inti Prtama Dan Divisi Akuntansi	*IHT: ELOS Socialization and Training*
6	IHT - Aspek Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah For Supervisor	Teknis / *Technical*	Divisi Kredit Khusus, Divisi Hukum dan Divisi Kredit	*IHT - Socialization of Financial Information Service System*
7	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I	Teknis / *Technical*	Multi Talenta *Consulting* dan LSPP	*IHT - Legal Aspects of Troubled Loan Settlement For Supervisor*
8	IHT- Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko (Refreshment) Batch Iii	Penyegaran / *Freshment*	PT. Multi Talenta *Consulting*	*Level I Risk Management Certification Exam*
9	IHT - Menyusun Modul Pelatihan	Teknis / *Technical*	PT. Indolatih Management	*IHT- Maintenance Program Risk Management Certification (Refreshment) Batch Iii*
10	IHT - Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Batch I Dan Batch Ii	Penyegaran / *Freshment*	Divisi Pemasaran	*IHT - Preparing Training Modules*
11	IHT - Refreshment Manajemen Risiko	Penyegaran / *Freshment*	PT. Multi Talenta *Consulting*	*IHT - Stimulus Housing Self Help (Bsps) Batch I And Batch Ii*
12	IHT - Sosialisasi SOP KPR Sejahtera SMF - BPD	Penyegaran / *Freshment*	PT. Sarana Multi Griya Finansial Dan Divisi Pengembangan Ekonomi Rakyat (Per)	*IHT - Risk Management Refreshment*
13	IHT - Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1- 4	Penyegaran / *Freshment*	Multi Talenta *Consulting* dan LSPP	*IHT - Socialization of Prosperous Prosecutor Smf - Bpd*
14	IHT - Analisa Kredit Batch I	Teknis / *Technical*	BCA LS	*IHT - Risk Management Certification Maintenance Program Level 1-4*
15	IHT - Analisa Kredit Batch Ii	Teknis / *Technical*	BCA LS	*IHT - Loan Analysis Batch I*
16	IHT - Analisa Kredit Batch Iii	Teknis / *Technical*	BCA LS	*IHT - Loan ANALYSIS OF BATCH III*
17	IHT - Administrasi Kredit Batch Ii	Teknis / *Technical*	Divisi Hukum	*IHT - BED Loan ADMINISTRATION II*
18	IHT - *Four Eyes Principle* dan Segmentasi Kredit (Jayapura)	Teknis / *Technical*	Divisi Kredit dan Divisi Risiko Bisnis	*Four Eyes Principle and Loan Segmentation (Jayapura)*
19	IHT - *Four Eyes Principle* dan Segmentasi Kredit (Sorong)	Teknis / *Technical*	Divisi Kredit dan Divisi Risiko Bisnis	*Four Eyes Principle and Loan Segmentation (Sorong)*
20	IHT - Sosialisasi Standar Layanan	Penyegaran / *Freshment*	Divisi Pembinaan Cabang	*Socialization of Service Standards*

REALISASI DIKLAT INTERNAL TAHUN 2017
REALIZATION OF INTERNAL BY 2017

NO	NAMA KEGIATAN	Jenis Kompetensi / *Competency Types*	PENYELENGGARA / *ORGANIZER*	*NAME OF ACTIVITIES*
21	IHT - Sosialisasi BI-RTGS, SKN BI dan DHN TNP	Penyegaran / *Freshment*	Divisi Treasury & Internasional	*BI-RTGS Socialization, BI SKN And DHN TNP*
22	IHT - Sertifikasi Internal Audit Dasar I	Teknis / *Technical*	Yayasan Pendidikan Internal Audit	*IHT - Internal Audit Basic Certification I.*
23	IHT - Pembekalan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I	Teknis / *Technical*	PT. Multi Talenta *Consulting*, Pt Talents Indonesia dan BSMR	*Training of Level I Risk Management Certification Examination*
24	IHT - Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I	Penyegaran / *Freshment*	Badan Sertifikas Manajemen Risiko	*Level I Risk Management Certification Exam*
25	IHT-Basic Human Resources Manajemen	Teknis / *Technical*	PT. Johnson Indonesia	*IHT-Basic Human Resources Management*
26	IHT - Perhitungan Aktuaria Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak Dan Implementasi PSAK 24, "imbalan kerja"	Penyegaran / *Freshment*	PT. Dian Artha Tama	*Inhouse Training Severance Actuarial Compensation, Working Period, Money Reimbursement and Implementation of PSAK 24, "employee benefits"*
27	IHT - PSAK 71	Teknis / *Technical*	Herbert Sitorus	*IHT - PSAK 71*
28	IHT - *Good Corporate Governance*	Teknis / *Technical*	PT. Strategic Development Group (SDG)	*IHT - Good Corporate Governance*
29	IHT - Pengelolaan *Liquidity Risk* Dalam Rangka Implementasi Pelaksanaan Kerangka Regulasi Basel III	Teknis / *Technical*	PT. Synergi Daya Utama	*Liquidity Risk Management for Implementation of Basel III Regulatory Framework Implementation*
30	IHT - Workshop Transformasi Bank Papua	Penyegaran / *Freshment*	PT. Talents Indonesia	*Bank Papua Transformation Workshop*
31	IHT - Sosialisasi Four Eyes Principles	Penyegaran / *Freshment*	Divisi Risiko Bisnis	*IHT - Socializing Four Eyes Principles*
32	IHT -Loan Exposure Limit	Teknis / *Technical*	PT. Talents Indonesia	*IHT -Loan Exposure Limit*
33	IHT *Training Need Analysis*	Teknis / *Technical*	PT. Indolatih Management	*IHT Training Need Analysis*
34	IHT - *Risk Based Audit*	Teknis / *Technical*	PT. Leinad Aganis	*IHT - Risk Based Audit*

2. Diklat External

2. External Training

REALISASI DIKLAT EKSTERNAL TAHUN 2017
REALIZATION OF EXTERNAL TRAINING 2017

NO	NAMA KEGIATAN	JENIS KOMPETENSI / *COMPETENCY TYPES*	PENYELENGGARA / *ORGANIZER*	*NAME OF ACTIVITY*
1	Seminar Nasional Dua Hari "Peran KPK, PPATK dan Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU"	Penyegaran / *Freshment*	Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Kajian Keuangan Nasional (DPP LKKN)	*National Seminar of Two Days "The Role of KPK, PPATK and Corporations in the Prevention and Eradication of TPPU"*
2	Pelatihan "PSAK 24"	Teknis / *Technical*	PT. Media Edutama Indonesia	*Training "PSAK 24"*
3	Seminar Sosialisasi POJK Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun dan manfaat lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun	Penyegaran / *Freshment*	Direktorat Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan IKNB OJK	*The POJK Socialization Seminar Number 5 / POJK.05 / 2017 on Contributions, Pension Benefits and other benefits held by the Pension Fund*
4	Pelatihan Pra Purnabhakti	Teknis / *Technical*	PT. Kautsar Inti Prima	*Pre Purnabhakti Training*
5	Seminar "Penilaian *Mutual Evaluation Review* terhadap Indonesia oleh APG dan Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang & Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia"	Penyegaran / *Freshment*	Divisi Pemasaran dan Aliansi Strategis Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	*Seminar on "Mutual Evaluation Review Assessment of Indonesia by APG and Risk Assessment of Crime of Money Laundering & Crime of Terrorism Financing in Indonesia"*
6	Seminar "Indonesia Banking Expo (IBEX) 2017"	Penyegaran / *Freshment*	Asbanda	*Seminar "Indonesia Banking Expo (IBEX) 2017"*
7	"Bimbingan Teknis Bidang P4GN Lingkungan Swasta dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba"	Penyegaran / *Freshment*	BNN Provinsi Papua	*"Technical Guidance of P4GN Field of Private Environment in Efforts of Community Empowerment of Drugs"*
8	"Seminar Persiapan Penerapan PSAK 71"	Penyegaran / *Freshment*	Direktur Penelitian Selaku Plh. Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	*"Seminar on Preparing for PSAK 71"*
9	"Sosialisasi Ketentuan Bank Umum"	Teknis / *Technical*	Direktur Penelitian Selaku Plh. Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	*"Socialization of the Provisions of Commercial Banks"*
10	"Workshop Sekretaris Direktur / Komisaris"	Penyegaran / *Freshment*	Direktur *Risk* Managament Guard (RMG)	*"Workshop of the Secretary of Director / Commissioner"*
11	"Pelatihan Keprotokolan dan Table Manners"	Teknis / *Technical*	Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua	*"Protocol Training and Table Manners"*
12	pelatihan program khusus (fast track) dan uji kompetensi program khusus sertifikasi treasury dealer	Teknis / *Technical*	ACI dan LSPP	*Special course training (fast track) and competency test specialist certification program treasury dealer*
13	pelatihan program khusus (fast track) dan uji kompetensi program khusus sertifikasi treasury dealer	Teknis / *Technical*	ACI dan LSPP	*Special course training (fast track) and competency test specialist certification program treasury dealer*
14	Workshop Penerapan PSAK 71 (IFRS 9)	Penyegaran / *Freshment*	ASBANDA	*Workshop on Implementation of PSAK 71 (IFRS 9)*
15	Seminar Internasional 2017 dengan tema Changing Consumer Behavior Through *Financial* Literacy, *Financial* Inclusion, and Consumer Protection	Penyegaran / *Freshment*	OJK	*International Seminar 2017 with the theme of Changing Consumer Behavior Through Financial Literacy, Financial Inclusion, and Consumer Protection*
16	Sertifikasi Kompetensi Bidang Treasury Dealer,	Teknis / *Technical*	ACI Indonesia	*Competency Certification Field Treasury Dealer,*
17	*Sharing Session* peran CMO dalam Transformasi BPD SI	Penyegaran / *Freshment*	ASBANDA	*Sharing Session role of CMO in Transformation BPD SI*

REALISASI DIKLAT EKSTERNAL TAHUN 2017 *REALIZATION OF EXTERNAL TRAINING 2017*				
NO	NAMA KEGIATAN	Jenis Kompetensi / *Competency Types*	PENYELENGGARA / *ORGANIZER*	*NAME OF ACTIVITY*
18	training eksternal Database Programming With DB2	Teknis / *Technical*	PT. Intercas *Consulting*	*Training external Database Programming With DB2*
19	Review dan Implementasi Regulasi Terbaru Perhitungan KPMM dan ATMR Risiko Kredit, dan Operasional terhadap Pengelolaan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)	Teknis / *Technical*	PT *Risk Management* Guard dan PT. Collega Inti Pratama	*Review and Implementation of Latest Regulation Calculation of KPMM and Risk Loan Loan Risk, and Operational to Management of Commercial Bank Monthly Report (LBU)*
20	Seminar BPDSI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda	Penyegaran / *Freshment*	ASBANDA	*Seminar BPDSI and Withdrawal of National Lottery Simple Savings*
21	The 1st PR indonesia Confrence dan Workshop : the power of credibility dan trust	Penyegaran / *Freshment*	PT. Media Pr Indonesia	*The 1st PR Indonesia Confrence and Workshop: the power of credibility and trust*
22	Workshop RMI	Penyegaran / *Freshment*	PT. *Risk* Management International	*RMI Workshop*
23	Konferensi Nasional The Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA) 2017	Teknis / *Technical*	The Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA)	*National Conference of The Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA) 2017*
24	Workshop Tehnik-Tehnik Pelaksanaan *Self Assessment* dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)	Penyegaran / *Freshment*	PT. *Risk* Management International	*Workshop on Self Assessment Implementation Techniques and Preparation of Good Corporate Governance Implementation Report (GCG)*
25	Pelatihan Nasional Dua Hari Implementasi Penyusunan dan Penerapan Struktur Serta Skala Upah Sesuai dengan Permenaker No.1 Tahun 2017 Beserta Prakteknya	Teknis / *Technical*	Lembaga Informasi Peraturan Publik	*National Training of Two Days Implementation of Preparation and Application of Structure And Wage Scale In accordance with Permenaker No.1 Year 2017 and its Practice*
26	Workshop PSAK Terkini Sesuai Konvergensi IFRS per 1 Januari 2017	Penyegaran / *Freshment*	Ikatan Akuntan Indonesia	*Recent PSAK Workshop Based on IFRS Convergence as of January 1, 2017*
27	Workshop Manajemen Penataan dan Penghapusan serta Penyelesaian Sengketa Asset Perusahaan	Penyegaran / *Freshment*	Fokus Training	*Management Workshop on Setup and Removal and Settlement of Company Assets Disputes*
28	Workshop Manajemen Rumah Tangga Perusahaan	Penyegaran / *Freshment*	Pusdiklat Perusahaan Indonesia	*Company Household Management Workshop*
29	*Performance* Management	Teknis / *Technical*	Mitra Kelola Insani	*Performance Management*
30	Seminar Persiapan Penerapan PSAK 71	Penyegaran / *Freshment*	Otoritas Jasa Keuangan	*Seminar Preparation Of PSAK Application 71*
31	Workshop Pengaturan Dan Simulasi Penghitungan Giro Wajib Minimum	Penyegaran / *Freshment*	Bank Indonesia	*Workshop Settings And Simulation Of Calculations For Minimum Compulsory*
32	Workshop Perbaikan Rating Tingkat Kesehatan Bank Melalui ICAAP Dan GCG	Penyegaran / *Freshment*	Training Equivalent	*Workshop Improving Rating Of Bank Sound Rate Through ICAAP and GCG*
33	Undangan Seminar BPDSI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda di Bandung	Penyegaran / *Freshment*	ASBANDA	*Invitation Seminar BPDSI and Withdrawal of Sweepstakes National Savings Savings in Bandung*
34	eCommerce, eChannel, *Fintech* Updates 2017 & Trends 2018	Teknis / *Technical*	Sharing Vision Bandung	*eCommerce, eChannel, Fintech Updates 2017 & Trends 2018*
35	*Basic Treasury*	Teknis / *Technical*	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	*Basic Treasury*
36	seminar dan rapat anggota iyakkapi	Penyegaran / *Freshment*	IYAKKAPI	*Seminar And Meeting Of Membership Members*

REALISASI DIKLAT EKSTERNAL TAHUN 2017
REALIZATION OF EXTERNAL TRAINING 2017

NO	NAMA KEGIATAN	JENIS KOMPETENSI / *COMPETENCY TYPES*	PENYELENGGARA / *ORGANIZER*	*NAME OF ACTIVITY*
37	System Pengembangan Job Grading	Teknis / *Technical*	PT. Johnson Indonesia	*System Job Grading Development*
38	Forum Group Discussion (Fgd) Dan Workshop Transformasi Humas *Capital* Bpd Si	Penyegaran / *Freshment*	ASBANDA	*Forum Group Discussion (FGD) And Workshop Transformation Of Capital BPD Si*
39	Audit Internal Untuk Membangun Satuan Pengawasan Internal (Spi) Dapen Yang Kuat Dan Handal	Teknis / *Technical*	Pelaksana Pusat Kajian Pengembangan SDI	*Internal Audit For Building Internal Supervision Unit (STRI) Dapen Strong And Reliable*
40	Seminar Nasional Political Economy Outlook 2017 (Masa Depan Consumer Banking Di Era Disrupsi)	Teknis / *Technical*	The Consumer Banking School	*National Political Seminar Economy Outlook 2017 (Future Consumer Banking In Era Discrete)*
41	Peran Strategis Manajemen Dokumen Di Era Digital	Teknis / *Technical*	Otoritas Jasa Keuangan	*Strategic Role Of Document Management In Digital Era*
42	Undangan Pelatihan Operasional Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* (BI - SSS)	Teknis / *Technical*	Bank Indonesia	*Invitation Of Operational Training Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System (BI - SSS)*
43	Konsinyering Menyusun Pedoman Dan Rencana Kerja CMO	Teknis / *Technical*	ASBANDA	*Konsinyering Build Guidelines And CMO Work Plans*
44	Uji Kompetensi Treasury Dealer	Teknis / *Technical*	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	*Competence Treasury Dealer Test*
45	Training Sertfifikasi Treasury Dealer	Teknis / *Technical*	ACI *Financial* Marketing Association Indonesia	*Training Treasury Dealer Certification*
46	How To Design An Accurate Banking *Business* Plan : Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB)	Teknis / *Technical*	Infobank	*How To Design An Accurate Banking Business Plan: Developing Bank Bank Plan (RBB)*

Beban Biaya Tenaga Kerja di Tahun 2017

Biaya tenaga kerja yang telah dikeluarkan Bank selama tahun 2017 adalah sebesar Rp573.920 milyar yang digunakan untuk biaya tenaga kerja sebesar Rp562.807 milyar dan biaya pendidikan dan pelatihan sebesar Rp11.113 milyar.Terjadi peningkatan biaya yang sgnifikasn dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni Rp18.782 milyar karena naiknya biaya tenaga kerja sebesar 6,65% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut tergambar pada tabel dibawah ini.

Labor Expenses in 2017

The labor costs incurred by the Bank during 2017 amounted to Rp573,920 billion used for labor costs of Rp562,807 billion and education and training costs of Rp11,113 billion. There was a significant increase in cost compared to the previous year of Rp18,782 billion due to rising labor costs by 6.65% from a year earlier. This is illustrated in the table below.

BEBAN TENAGA KERJA SELAMA TAHUN 2013-2017
LABOR COSTS DURING THE YEAR 2013-2017

KETERANGAN	TAHUN					*INFORMATION*
	2013	2014	2015	2016	2017	
BIAYA TENAGA KERJA	510.851.604.927	426.625.980.382	490.357.598.159	527.695.533.008	562.807.014.986	*LABOR COSTS*
BIAYA DIKLAT	44.284.034.833	40.224.678.676	25.242.141.737	27.443.041.059	11.113.867.090	*COST OF DIKLAT*
JUMLAH	**555.135.639.760**	**466.850.659.058**	**515.599.739.896**	**555.138.574.067**	**573.920.882.076**	*AMOUNT*

Kesejahteraan Pegawai

Sebagai salah satu cara memotivasi pegawai, maka Bank melalui Divisi SDM menjalankan program kesejahteraan karyawan maupun sistem Remunerasi dan Kompensasi. Beberapa pembayaran selain gaji yang telah diberikan perusahaan kepada pegawai selama tahun 2017 antara lain.

Employee Welfare

As one way to motivate employees, Bank through the Human Resources Division runs an employee welfare program and Remuneration and Compensation system. Some payments other than salary that the company has given to employees during 2017, among others.

1. Pembayaran Jasa Produksi.
2. Pembayaran Penghargaan Masa Pengabdian 15,25 dan 30 Tahun.
3. Pembayaran THR.
4. Pembayaran Pakaian Dinas.
5. Pembayaran Biaya Berobat.
6. Pembayaran Uang Cuti.

Penilaian Kinerja Pegawai

Bank menetapkan standarisasi penilaian kinerja pegawai menggunakan kamus dan *balance scorecard* untuk setiap jabatan yang disebut dengan istilah *Key Performance Indicator* (KPI). Penilaian ini sangat mempengaruhi jenjang karir, promosi, dan rotasi masing-masing pegawai. Namun penilaian ini sedang dalam proses perbaikan dan perubahan untuk lebih memberikan nilai-nilai keadilan bagi seluruh pegawai.

Reward & Punishment

Sistem *reward & punishment* dari manajemen penting untuk diterapkan oleh Bank Papua. Sistem *reward & punishment* membantu manajemen dalam mewujudkan visi, misi, strategi, dan tujuan perusahaan. Selain itu, sistem *reward & punishment* dari manajemen menjadi alat manajemen untuk dapat memberikan pengaruh kepada karyawan agar bertindak positif guna pencapaian tujuan perusahaan. Karyawan akan kooperatif apabila manajemen dapat mengembangkan dan mengelola karyawan dengan tepat, sehingga target bank dapat berjalan sesuai harapan manajemen.

Sistem *reward & punishment* dari manajemen juga dirancang untuk memotivasi karyawan agar tujuan perusahaan tercapai. *Reward* merupakan salah satu alat pengendalian penting yang digunakan oleh perusahaan untuk memotivasi personel agar mencapai tujuan perusahaan dengan perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Sedangkan *punishment* merupakan sesuatu yang tidak disukai/disenangi oleh karyawan untuk menghasilkan efek jera sehingga tidak akan melakukan perbuatan dan kesalahan yang sama. Bentuk-bentuk *punishment* antara lain kehilangan pekerjaan, tidak menerima kenaikan gaji, dihapus dari daftar karyawan yang akan dipromosi, kegagalan mendapatkan *reward*, ancaman pemecatan, dan lain sebagainya.

Pemberian *reward* and *punishment* sistem di Bank Papua didasarkan pada penilaian kinerja karyawan (*merit-based sistem*). Bank menetapkan cara yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan-karyawannya, salah satunya penggunaan *Key Performance Indicators*. Hasil penilaian kinerja berupa angka lebih memudahkan perusahaan untuk memberikan *reward* and *punishment* sistem

1. *Payment of Production Services.*
2. *Award Payments Period of Service 15.25 and 30 Years.*
3. *Payment of THR.*
4. *Payment of Office Clothes.*
5. *Payment of Medical Expenses.*
6. *Payment of Leave Money.*

Employee Performance Assessment

Banks set the standard of employee performance assessment using a dictionary and balance scorecard for each position called Key Performance Indicator (KPI). This penile greatly affects the career ladder, promotion, and rotation of each employee. But this assessment is in the process of improvement and change to give more values of justice for all employees.

Reward & Punishment

The reward & punishment system of management is important to be implemented by Bank Papua. The reward & punishment system assists management in realizing the company's vision, mission, strategy, and objectives. In addition, reward & the punishment system from management becomes a management tool to give influence to employees to act positively to achieve company goals. Employees will be cooperative if management can develop and manage employees appropriately, so the target bank can run as expected management.

The reward & punishment system of management is also designed to motivate employees to achieve corporate goals. The reward is one of the important control tools used by companies to motivate personnel to achieve corporate goals with behavior in accordance with what is expected by the company. While punishment is something that is disliked / liked by employees to produce a deterrent effect that will not do the same deeds and mistakes. Forms of punishment include job loss, not receiving a pay raise, removed from the list of employees to be promoted, failure to get rewards, threats of dismissal, and so forth.

The reward and punishment system in Bank Papua is based on employee performance assessment (merit-based system). The Bank sets out the means used to assess the performance of its employees, one of which is the use of key performance indicators. The results of performance assessment in the form of numbers more facilitate the company to provide a reward and punishment system to

kepada karyawan. Sedangkan untuk kesalahan bersifat pelanggaran hukum, maka manajemen memberikan tindakan tegas.

employees. While for errors or violations of the law, then the management provides a decisive action.

Dalam aktivitas dan operasional bank selama tahun 2017, Bank telah memberikan *reward & punishment* sebagai berikut:

In bank activities and operations during 2017, the Bank has provided the following rewards & punishments:

a. *Reward*

a. Reward

***REWARD* BAGI PEGAWAI BANK PAPUA DITAHUN 2017** *REWARD FOR BANK PAPUA EMPLOYEES IN 2017*				
NO	**KETERANGAN**	**JUMLAH**	**NOMINAL**	*INFORMATION*
1	Penghargaan 15 Tahun	40	1.232.381.127	*15 Years Award*
2	Penghargaan 25 Tahun	47	1.808.805.318	*25 Years Award*
3	Penghargaan 30 Tahun	2	45.590.588	*30 Years Award*
SUB TOTAL			**3.086.777.033**	*SUB-TOTAL*
1	Jaspro	2.760	67.579.345.096	*Production Services*
TOTAL			**70.666.122.129**	*TOTAL*

b. *Punishment*

b. Punishment

***PUNISHMENT* BAGI PEGAWAI BANK PAPUA DITAHUN 2017** *PUNISHMENT FOR BANK PAPUA EMPLOYEES IN 2017*			
NO	**JENIS HUKUMAN**	**JUMLAH**	*TYPES OF PUNISHMENT*
1	Teguran Lisan	34	*Verbal Warning*
2	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	0	*Not Satisfied Statements Written*
3	Teguran Tertulis Berupa Surat Peringatan I	129	*1St Written Warning*
4	Teguran Tertulis Berupa Surat Peringatan II	62	*2Nd Written Warning*
5	Teguran Tertulis Berupa Surat Peringatan III	55	*3Rd Written Warning*
6	Teguran Tertulis	72	*Written Warning*
7	Penundaan Gaji Berkala Untuk Paling Lama 1 Tahun	51	*Delays Of Salary Appliance For Most 1 Years*
8	Penundaan Kenaikan Pangkat Paling Lama 1 Tahun	7	*Delay Of Promotion Most Longer Device Of 1 Years*
9	Penurunan Grade Setingkat Lebih Rendah Dari Peringkat Sebelumnya	7	*Downgrade Lower Than Position Before*
10	Penurunan Grade 2 (Dua) Tingkat Lebih Rendah Dari Peringkat Sebelumnya	7	*Downgrade 2 (Two) Lower Than Position Before*
11	Pemutusan Hubungan Kerja	58	*Work Termination*
	Total	**482**	**Total**

Kesempatan & Peluang yang Sama

Untuk pengembangan kompetensi karyawan, Bank Papua selalu berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawainya agar bisa mengembangkan potensi dirinya guna menunjang karir diperusahaan. Bank membuat kebijakan design ketentuan promosi, dimana sistem atau metode yang memformulasikan indikator-indikator dari parameter yang terukur dalam rangka pemilihan kandidat pegawai yang memiliki *high performance* dan *high qualification* untuk dipromosi seperti tergambar pada skema dibawah ini.

Equal Opportunities

To the development of employee competence, Bank Papua is always committed to provide equal opportunities to all employees to develop their potential to support the company's career. The Bank develops a design policy of promotional provisions, in which a system or method that formulates indicators of measurable parameters in the selection of candidates of employees who have high performance and high qualification to be promoted as illustrated in the scheme below.

Desain Ketentuan Promosi
Promotion Design Terms

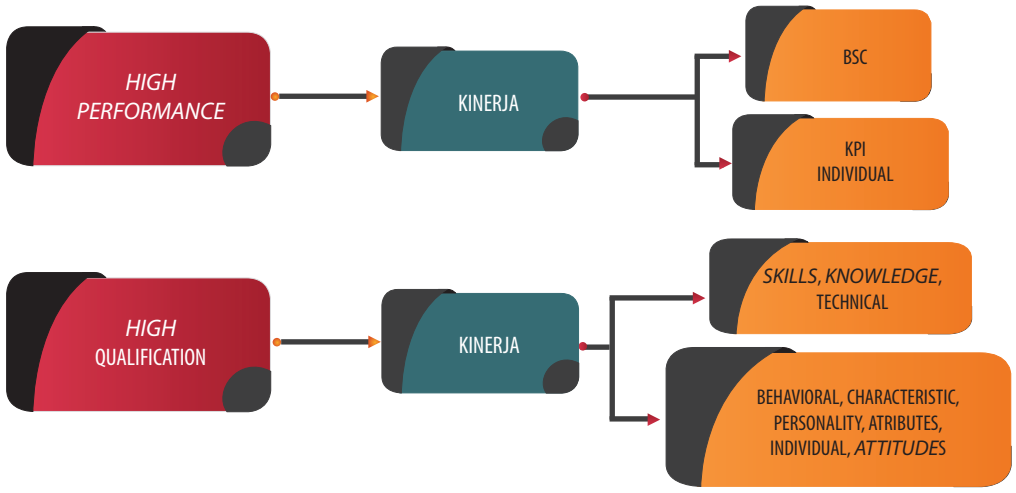

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2018

Dengan berbagai problematika yang harus dihadapi, maka harus bisa dipastikan Bank Papua harus tetap Survive dan kompetitif. Ini menjadi tanggungjawab semua karyawan bersama manajemen. Sumber Daya Manusia harus diperkuat untuk menghadapi tantangan tersebut sehingga perusahaan dapat keluar dari berbagai masalah dan menjadi pemenang. Bertransformasi dan kembali pada *track* yang seharusnya adalah kuncinya. Semuanya harus kompak, kerja keras dan meningkatkan produktivitas demi menghadapi tantangan kedepan melalui beberapa program yang disusun pada tahun 2018 yang diantaranya:

1. Program Implementasi Budaya Kerja
   Dalam rangka mencapai visi dan misinya, Bank Papua telah memiliki 7 (tujuh) nilai-nilai dasar yang menjadi nilai inti dari Budaya Kerja Bank Papua, yaitu:
   - Melayani,
   - Efisiensi,
   - Responsif,
   - Kewirausahaan,
   - Asas Manfaat,
   - Risiko Yang Diperhitungkan,,
   - Bekerja Sama

Secara berkala dan berkesinambungan akan dilakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Standar layanan secara menyeluruh di seluruh cabang untuk mendukung program Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk implementasi Budaya Kerja, maka dalam penerapannya serta untuk mengefektifkan transformasi Budaya Kerja, maka dianggap perlu untuk pengembangan dan pemberdayaan *change agent* (Agen Perubahan)

Human Resource Development Program in 2018

With the various problems that must be faced, it must be certain that Bank Papua must remain Survive and competitive. This is the responsibility of all employees with management. Human Resources must be strengthened to face the challenge so that the company can get out of various problems and become a winner. Transforming and returning to the track is the key. Everything must be compact, work hard and improve productivity in order to face future challenges through several programs compiled in 2018 which includes:

1. *Work Culture Implementation Program*
   In order to achieve its vision and mission, Bank Papua already has 7 (seven) basic values that are the core values of the Working Culture of Bank Papua:
   - *Serve,*
   - *Efficiency,*
   - *Responsive,*
   - *Entrepreneurship,*
   - *The Principle of Benefit,*
   - *Counted Risks and,*
   - *Cooperation*

Periodically and continuously will be monitored and evaluated the application of comprehensive Service Standards in all branches to support Human Resource Management program. For the implementation of the Work Culture, in its application and to streamline the Work Culture, it is deemed necessary for the development and empowerment of change agents so that it is necessary to set up the management

sehingga perlu dibuat pedoman pengelolaan/peraturan mengenai *Change Agent* dan standar layanan. Dengan demikian secara berkala akan dilakukan forum diskusi untuk evaluasi program masing-masing. Disamping itu akan diimplementasikan pengukuran standar layanan dengan menggunakan sistem Aplikasi CAMAR.

guidelines/rules on Change Agent and service standards. Thus, a discussion forum will be held regularly for each program evaluation. Besides, it will be implemented standard service measurement by using CAMAR Application system.

2. Program Pendidikan & Pelatihan

   Dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi, pegawai (SDM) Bank Papua selalu dilibatkan dalam pendidikan atau pelatihan Intern maupun Ekstern yang diprogramkan secara tahunan maupun triwulanan. Program pendidikan maupun pelatihan ini disesuaikan dengan memperhatikan Gap pada matriks kompetensi pegawai per jabatan serta disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Program pendidikan maupun pelatihan yang diberikan kepada pegawai meliputi :

   - Pendidikan Manajemen berbasis kompetensi, yang harus dimiliki semua level pegawai dan dikembangkan terus menerus.
   - Diklat kepemimpinan karir, yang harus dimiliki oleh pegawai disesuaikan dengan pekerjaan posisi/jabatan.
   - Diklat teknis, yang harus dimiliki oleh pegawai disesuaikan dengan pekerjaan/fungsional.
   - Diklat penyegaran, merupakan kompetensi umum yang harus dimiliki posisi/jabatan tertentu.

   Beberapa langkah strategis terkait pendidikan dan pelatihan bagi pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua :

   a. *e-Learning*

      Dengan memanfaatkan teknologi, Divisi SDM bekerja sama dengan Divisi Teknologi Informasi berencana untuk mengembangkan pembelajaran menggunakan fasilitas *e-Learning*. Keuntungan bagi perusahaan yang dapat dirasakan dengan mengembangkan sistem pembelajaran ini adalah :

      - Efisiensi pelaksanaan diklat.
      - Mudah karena fasilitas *e-Learning* dapat diakses oleh semua pegawai di tempat kerjanya masing-masing.
      - Fleksibel karena materi pembelajaran dapat diakses kapan saja oleh semua pegawai yang ingin meningkatkan kompetensinya.
      - Meningkatkan inisiatif pegawai untuk terus meningkatkan kompetensi guna menunjang peningkatan kualitas kerjanya.

2. Education & Training Program

In an effort to improve competence, Bank Papua (SDM) employees are always involved in Internal and External education or training programmed on an annual or quarterly basis. This education and training program is adjusted to pay attention to the Gap on the employee competency matrix per position and tailored to the needs of the company.

The education and training programs provided to include employees:

- *Competence-based Management Education, which must be owned by all levels of staff and continuously developed.*
- *Career leadership training, which must be owned by employees tailored to the job position.*
- *Technical training, which must be owned by employees with work / functional adjustment.*
- *Refreshment training, is a general competence that must be owned by a certain position.*

Some strategic steps related to education and training for employees of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua:

a. e-Learning

By utilizing technology, the HR Division in collaboration with the Information Technology Division plans to develop learning using e-Learning facilities. Benefits for companies that can be felt by developing this learning system are:

- *Efficiency of training implementation.*
- *Easy because the e - Learning facility is accessible to all employees in their respective workplace.*
- *Flexible because the available learning materials can be accessed at any time by all employees who want to improve their competence.*
- *Increase employee initiatives to continuously improve competence to support the improvement of work quality.*

b. Melakukan *assessment* pegawai untuk mengetahui level kompetensi masing-masing pegawai. Hasil *assessment* pegawai akan digunakan untuk menyusun analisa kebutuhan pendidikan pegawai atau *Training Need Analysis* (TNA) secara tepat sehingga tujuan peningkatan kompetensi pegawai dapat tercapai secara efektif.

c. Melakukan proses standarisasi mutu diklat Bank Papua sesuai standar ISO. Dengan adanya standarisasi mutu diklat maka diharapkan sistem pelaksanaan diklat Bank Papua semakin baik, dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi diklat.

b. Perform an employee assessment to determine the level of competence of each employee. Employee assessment results will be used to develop an appropriate employee education needs analysis or training needs analysis (TNA) so that the objectives of increasing employee competency can be achieved effectively.

c. Conduct standardization process of quality of Bank Papua training according to ISO standard. With the standardization of the quality of education and training, it is expected that the implementation of the training system of Bank Papua will be better, starting from planning to evaluation of the training.

Program Diklat Tahun 2018

Bank merencanakan biaya pendidikan dan pelatihan pada tahun 2018 mencapai lebih kurang 5% dari total biaya tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang mensyaratkan Bank menyiapkan dana minimal 5% dari total biaya tenaga kerja. Recana pendidikan dan pelatihan yang disusun untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Diklat Internal

Training Program of 2018

The Bank plans, education and training expenses in 2018 to reach approximately 5% of total employees expenses. This is in accordance with the provisions that require the Bank to prepare at least 5% of the total cost of labor. The educational and training records set for 2018 are as follows:

1. Internal Training

JADWAL PROGRAM DIKLAT IHT TAHUN 2018
SCHEDULE PROGRAM PROGRAM IHT IN 2018

NO		JENIS PENDIDIKAN	SASARAN PESERTA / *PARTICIPANTS TARGET*	PESERTA / *PARTICIPANTS*	*EDUCATION TYPE*
A	KOMPETENSI DASAR / *BASIC COMPETENCIES*				
	1	Orientasi Pelanggan			*Customer Orientation*
	2	*Comunication Skills For Leadership*	Kepala Divisi, Kepala Cabang	54	*Comunication Skills For Leadership*
	3	*Comunication Skills*	Staf Pemasaran, Analis dan SDM Umum KC	150	*Comunication Skills*
	4	Orientasi Perubahan (*character & culture Building*)			*Changes Orientation (charakter & culture Building)*
	5	*Change Agen For Leader*	Kepala Divisi, Kepala Cabang, Direksi	62	*Change Agent For Leader*
	6	Komunikasi Bisnis			*Business communication*
	7	Kerjasama TIM (*Team building*)			*Cooperation Team (Team Building)*
B	KOMPETENSI KEPEMIMPINAN KARIER / *COMPETENCY OF CAREER LEADERSHIP*				
	1	*Leadership Skills*			*Leadership Skills*
	2	*Relationship Building*	Kepala Cabang Hasil Assesment	15	*Relationship Building*
	3	*Leadership*	Kepala Cabang Hasil Assesment & Kacab yang belum Assesment	30	*Leadership*
	4	NLP (Neuro Leguistic Program)	Kepala Cabang Hasil Assesment & Kacab yang belum Assesment & Kpl. Dep	30	*NLP (Neuro Leguistic Program)*
	5	*Coaching & Conseling*	Pejabat Struktural yang belum pernah ikut	150	*Coaching & Counseling*
	6	Bisnis & Strategi			*Business & Strategy*
	7	Strategi Bisnis	Kpl.Dep PER dan Kadep Pendukung Operasi, Kepala KCP, Kacab,	35	*Business strategy*
	8	Pengelolaan SDM			*Human Resource Management*
	9	Training For Trainer	sudah mengikuti pelatihan modul	35	*Training For Trainer*

JADWAL PROGRAM DIKLAT IHT TAHUN 2018
SCHEDULE PROGRAM PROGRAM IHT IN 2018

NO		JENIS PENDIDIKAN	SASARAN PESERTA / *PARTICIPANTS TARGET*	PESERTA / *PARTICIPANTS*	*EDUCATION TYPE*
C	KOMPETENSI TEKNIS / *TECHNICAL COMPETENCY*				
	Operasi Bisnis				***Business Operations***
	1	Analis Kredit PER & Komersial	Staf Analis & Unit Pengendali dan admin kredit	120	*PER & Commercial Loan Analyst*
	2	Pembinaan & Penyelamatan Kredit	Staf PPK	90	*Loan Guarantee & Rescue*
	3	Pembinaan & Penyelamatan Kredit for Supervisor	Kanit, KCP & Kadept	135	*Coaching & Rescuing Loan for Supervisor*
	4	Administrasi Kredit	Staf Administrasi Kredit	110	*Loan Administration*
	5	Elos (Elektronik Loan Origination System)	Kadep Per dan Komersial, Kepala KCP, Analis Kredit Mikro, Analis Kredit Konsumer, Administrasi Kredit	178	*Elos (Electronic Loan Origination System)*
	6	SLIK (System Layanan Informasi Keuangan)	CS, Staf Administrasi Kredit (Pelaporan), Petugas SLIK	170	*SLIK (Financial Information Services System)*
	7	Analisa Laporan Keuangan Perusahaan	Analis Kredit, Kelompok Kredit KPR,Unit Pendukung Kredit PER,Kelompok Kredit Program,Staf Kredit Bermasalah, Divisi Akuntansi,pejabat kredit,admin kredit	250	*Financial Statement Analysis*
	8	Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan	Analis Kredit, Kelompok Kredit KPR,Unit Pendukung Kredit PER,Kelompok Kredit Program,Staf Kredit Bermasalah	150	*Prepare the Company's Financial Statement*
	9	Sertifikasi Analis Kredit (Masker > 3 tahun)	Analis Kredit senior	25	*Certification of Loan Analyst (Masker> 3 years)*
	11	Restrukturisasi Penyelamatan Kredit	Penyelamatan Kredit	60	*Restructuring of Loan Rescue*
	12	Relationship Manager Kredit Komersial	Kredit Korporasi dan Komersial	35	*Relationship Manager Commercial Loans*
	13	Penyegaran Workshop untuk Analis Kredit	Analis Kredit, Account Officer Komersial	150	*Workshop for Loan Analyst*
	14	Four Eyes Principles	Pejabat Kredit, Kepala KCP dan Kanit Kredit	150	*Four Eyes Principles*
	Treasury				***Treasury***
	1	Pelatihan ALMA untuk kepala Cabang	Kepala Cabang	37	*ALMA training for Branch Manager*
	2	Perencanaan dan Risiko Bonds		20	*Planning and Risks Bonds Participants*
	Pengembangan				***Development***
	1	Effective Marketing Planning	Staf Pemasaran Produk dan Jasa, Staf Divisi Pemasaran, Kadep & Kanit Pemasaran KC dan KP	150	*Effective Marketing Planning*
	SDM & Umum				***HR & General***
	Kepatuhan & Manajemen Risiko				*Compliance & Risk Management*
	1	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	Kredit & Struktural	100	*Risk Management Certification Training Level 1*
	2	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	Struktural	100	*Risk Management Certification Training Level 2*
	3	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	Struktural	30	*Risk Management Certification Training Level 3*
	4	Grafonomi	CS, Teller	150	*Grafonomy*
	5	Audit Internal Dasar II	SKAI	30	*Basic Internal Audit II*
	6	Teknik Investigasi	SKAF, SKAI	45	*Investigation Technique*
	7	Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)	Staf Hukum Senior	2	*Special Education Profession Advocate (PKPA)*
	8	GCG (*Good Corporate Governance*)	Staf dan Pejabat Divisi Kepatuhan & RM	30	*GCG (Good Corporate Governance)*

JADWAL PROGRAM DIKLAT IHT TAHUN 2018 *SCHEDULE PROGRAM PROGRAM IHT IN 2018*					
NO	JENIS PENDIDIKAN		SASARAN PESERTA / *PARTICIPANTS TARGET*	PESERTA / *PARTICIPANTS*	*EDUCATION TYPE*
D	DIKLAT PENYEGARAN / *REPLACED REFILLABLE*				
	Sosialisasi Ketentuan-Ketentuan Baru				***Socialization Of New Provisions***
	1	Ujian Sertifikasi level 1	Kredit & Struktural	100	*Level 1 Certification Exam*
	2	Ujian Sertifikasi level 2	Struktural	100	*Level 2 Certification Exam*
	3	Ujian Sertifikasi level 3	Struktural	50	*Level 3 Certification Exam*
	4	Refresment	Struktural	200	*Refresment*
	5	Program lain karena kebijakan Manajemen / dari Divisi lain yang diluar rencana		100	*Other programs due to Management policies / from other Divisions are out of plan*

2. Diklat External *2. Diklat External*

JADWAL PROGRAM DIKLAT EXTERN TAHUN 2018 *SCHEDULE EXTERN PROGRAM IN 2018*				
NO	JENIS PENDIDIKAN	SASARAN PESERTA / *PARTICIPANTS TARGET*	PESERTA / *PARTICIPANTS*	*TYPE OF EDUCATION*
	Operasi Bisnis			*Business Operations*
1	Pembiayaan Perkapalan		2	*Ship Financing*
2	Pembiayaan SPBU		2	*Gas station Financing*
3	Pembiayaan Agribisnis		2	*Agribusiness Financing*
4	Pembiayaan Perhotelan		2	*Hospitality Financing*
5	Analisa Kredit Komersial & Korporasi		2	*Commercial & Corporate Loan Analysis*
6	Appraisal		2	*Appraisal*
7	Analisa Pasar Perbankan		2	*Banking Market Analysis*
8	Analisis Kredit Retail & UMK		2	*Retail Loan Analysis & UMK*
9	Etika Bankir	Kompor dan Risiko Bisnis	4	*Bankers Ethics*
10	Aspek Hukum Perbankan & Aspek Perkreditan Dikaitkan dengan Risiko Reputasi & Risiko Hukum		3	*Legal Aspects of Banking & Loan Aspects Associated with Legal Reputation & Risk Risks*
11	Analisa Modal Perdangangan Pengecer / Konsep Cash F*low*	Kompor dan Risiko Bisnis	4	*Capital Analyze of Retailer / Cash Flow Concept*
12	Analisa Kredit Investasi	Kompor dan Risiko Bisnis	4	*Investment Loan Analysis*
13	Analisa Kredit Bidang Perikanan	Kompor dan Risiko Bisnis	4	*Loan Analysis of Fishery Field*
14	Analisa KMK Konstruksi dan Standby Loan Kredit Konstruksi	Kompor dan Risiko Bisnis	4	*KMK Construction Analysis and Standby Loan Construction Loan*
15	Strategi Manajemen Risiko Kredit / Risiko Kredit BPR	Risiko Bisnis dan PER	4	*Loan Risk Management / Loan Risk Strategy of BPR*
16	Comprehensive *Loan Analysis*	Kompor dan Risiko Bisnis	4	*Comprehensive Loan Analysis*
17	Managing *Risk* In Commercial and Corporate Lending	Risiko Bisnis dan Kredit khusus	4	*Managing Risk In Commercial and Corporate Lending*
18	Essentials For The Management *Loan Risk*	Risiko Bisnis dan Kredit khusus	4	*Essentials For The Management Loan Risk*
19	Pembiayaan Pinjaman, Aspek hukum dan Kredit Sindikasi	Pembinaan Kredit	2	*Loan Financing, Legal Aspects and Syndication Loans*

JADWAL PROGRAM DIKLAT EXTERN TAHUN 2018 *SCHEDULE EXTERN PROGRAM IN 2018*				
NO	JENIS PENDIDIKAN	SASARAN PESERTA / *PARTICIPANTS TARGET*	PESERTA / *PARTICIPANTS*	*TYPE OF EDUCATION*
	TREASURY			*TREASURY*
1	Basic Treasury		6	*Basic Treasury*
2	Bond Dealer		3	*Bond Dealers*
3	Basic Alma	Treasury dan Risiko Bisnis	4	*Basic Alma*
4	Dynamic Alma	Treasury dan Risiko Bisnis	4	*Dynamic Alma*
4	Manajemen Treasury		2	*Treasury Management*
5	Strategi Investasi Obligasi		2	*Bond Investment Strategy*
6	Cash F*low* and Treasury Management	Treasury dan Risiko Bisnis	4	*Cash Flow and Treasury Management*
7	Managing *Loan Risk* In Treasury Product And Derifative Instrument	Treasury dan Risiko Bisnis	4	*Managing Loan Risk In Treasury Product And Derivative Instruments*
8	Program Khusus (Fast Track)		2	*Special Program (Fast Track)*
	KEPATUHAN & MANAJEMEN RISIKO			*COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT*
1	Penilaian Lembar Kerja GCG		2	*Assessment of GCG Worksheet*
2	Tingkat Kesehatan Bank (TKB)		2	*Bank Health Level (TKB)*
3	Profil Risiko Bank		2	*Bank Risk Profile*
4	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum		2	*Minimum Capital Requirement*
5	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Kredit (ATMR Kredit)		2	*Weighted Assets According to Loan Risk (ATMRR)*
6	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Kredit (ATMR Pasar)		2	*Weighted Assets According to Loan Risk (ATMR Market)*
7	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Kredit (ATMR *Likuiditas*)		2	*Weighted Assets According to Loan Risk (Liquidity ATMR)*
8	Kepatuhan & GCG		4	*Compliance & GCG*
9	Money Laundry & APU - PPT		2	*Money Laundry & APU - PPT*
	PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN			*PLANNING AND DEVELOPMENT*
1	Penyusunan Konsep & Aplikasi Bisnis Plan		2	*Preparation of Concepts & Applications Business Plan*
2	Strategy Marketing Management	Renbang & BPC	3	*Strategy Marketing Management*
3	Analisa Laporan Keuangan		2	*Analysis of financial statements*
4	Project Management		2	*Project Management*
5	Manajemen Riset		2	*Research Management*
6	Problem Solving &Decision Making		2	*Problem Solving & Decision Making*
7	Kualiti Manajemen Kontrol Sistem		2	*Quality Management System Control*
8	Analisa Benefit *Cost* Proyek		2	*Analysis of Benefit Cost Project*
9	Survey / Riset Kepuasan Pelanggan		2	*Survey / Research Customer Satisfaction*
11	Brand Equity Research		2	*Brand Equity Research*
	TEKNIK INFORMASI			*INFORMATION TECHNIQUE*
1	Sisco Certifield Network Associate (CCNA)		2	*Sisco Certifield Network Associate (CCNA)*
2	System Analyst, Design & Infrastructure Library TI		2	*System Analyst, Design & Infrastructure IT Library*
3	International Standard,ISO/IEC 20000:IT service Management		2	*International Standard, ISO / IEC 20000: IT service Management*
4	Penetration Testing: pengujian kelemahan sistem informasi perusahaan		2	*Penetration Testing: testing the weaknesses of enterprise information sistems*
5	Managing Control Object For IT (COBIT) Version 4.1		2	*Managing Control Object For IT (COBIT) Version 4.1*
6	ISO 27000-Information Security Management System		2	*ISO 27000-Information Security Management System*
7	ISO 14001:Understanding and implementing ISO 14001		2	*ISO 14001: Understanding and implementing ISO 14001*
8	Basic VSAT System		2	*Basic VSAT System*
9	Database Programming with VB.NET		2	*Database Programming with VB.NET*

JADWAL PROGRAM DIKLAT EXTERN TAHUN 2018
SCHEDULE EXTERN PROGRAM IN 2018

NO	JENIS PENDIDIKAN	SASARAN PESERTA / *PARTICIPANTS TARGET*	PESERTA / *PARTICIPANTS*	*TYPE OF EDUCATION*
10	EC-Council Network Security Administrator (ENSA)		2	*EC-Council Network Security Administrator (ENSA)*
11	Fundamental JAVA Programing		2	*JAVA Programming Fundamentals*
	SUMBER DAYA MANUSIA			*HUMAN RESOURCES*
1	Analisa Beban Kerja	Renbang SDM & PBC	3	*Workload Analysis*
2	Compesation& Benefits Strategy		2	*Compesation & Benefits Strategy*
3	Psychology for non psychologits		2	*Psychology for non psychologits*
4	Career & Development System	SDM	2	*Career & Development System*
5	Pengembangan Sistem Penilaian KPI		2	*Development of KPI Assessment System*
6	Basic Human Resources Management		2	*Basic Human Resources Management*
7	*E-Learning*	Diklat & IT	4	*E-Learning*
8	Sistem Manajemen Mutu (ISO) Diklat		2	*Quality Management System (ISO) Training*
9	Evaluating Training		2	*Evaluating Training*
10	Competency *Based* HRM / CBHRM	SDM	3	*Competency Based HRM / CBHRM*
11	Manajemen Penyelenggaran Diklat		2	*Management Training Management*
12	PSAK 24		2	*PSAK 24*
13	Hubungan Industrial		2	*Industrial relations*
14	Teknik konseling untuk karyawan		2	*Counseling techniques for employees*
15	Penyusunan Matriks Kompetensi		3	*Competency Matrix Compilation*
16	Salary Administration		3	*Salary Administration*
17	Corporate Culture		2	*Corporate Culture*
18	Proses PHK Efektif dan Perhitungan Pesangon		3	*Effective Layoff Process and Severance Calculation*
19	Coaching, Conseling & Mentoring	Admin SDM & PBC	3	*Coaching, Counseling & Mentoring*
20	*Know Your Employee*		2	*Know Your Employee*
	UMUM			*GENERAL*
1	Sertifikasi Keahlian Teknik atau SKA		2	*Certification of Technical Expertise or SKA*
2	Manajemen konstruksi		2	*Construction management*
3	Cara menyusun HPS		2	*How to set up HPS*
4	Penerapan Sistem Outsourching, dan penilaian Kinerja Outsourcing serta mampu membuat strategy Outsourcing Management		2	*Implementation of Outsourching System, and Outsourcing Performance assessment and able to create Outsourcing Management strategy*
5	Genset Operation & Maintenance		4	*Genset Operation & Maintenance*
6	PPH 21 - 2017 Update		2	*PPH 21 - 2017 Update*
7	Manajemen Inventaris Perbankan		2	*Inventory Management Banking*
8	Sertifikasi Pengadaan barang dan Jasa		4	*Certification Procurement of goods and services*
	AKUNTANSI			**ACCOUNTING**
1	Akuntansi Pajak	Kadiv & Kadept	2	*Tax Accounting*
2	PSAK 71	Akuntansi & SDM	2	*PSAK 71*
3	LHB, Perubahan Sandi dan LHBU		2	*LHB, Password Change and LHBU*
4	Sistem Keuangan dan Akuntansi		2	*Financial System and Accounting*
5	Tax Planning		2	*Tax Planning*
6	Manajemen Perpajakan		2	*Tax Management*
7	LKPBU Dan Workshop Laporan		2	*LKPBU And Report Workshop*
8	Sertifikasi Breverd A dan B	Akuntansi	2	*Breverd Certification A and B*
9	Penyusunan SPT 25 Tahunan Pasal 25		2	*Preparation of 25 Year Annual Tax Return 25*
10	*Cost* Analysis & Control System		2	*Cost Analysis & Control System*
11	Standar Akutansi Keuangan		2	*Financial Accounting Standards*

JADWAL PROGRAM DIKLAT EXTERN TAHUN 2018 *SCHEDULE EXTERN PROGRAM IN 2018*				
NO	JENIS PENDIDIKAN	SASARAN PESERTA / *PARTICIPANTS TARGET*	PESERTA / *PARTICIPANTS*	*TYPE OF EDUCATION*
12	Finance berbasis Komputer		2	*Computer-based Finance*
	AUDITOR			*AUDITOR*
1	Audit Pengadaan Barang Dan Jasa		3	*Procurement Audit*
2	Audit Investigatif Atas Kecurangan Pada Korporasi		3	*Investigative Audit of Fraud on Corporations*
3	Audit Treasury		3	*Treasury Audit*
4	Audit Internal Dasar I		3	*Basic Internal Audit I*
5	Audit SDM		3	*HR Audit*
6	Audit Intern Tingkat Lanjutan I		3	*Internal Audit Advanced Level I*
7	Audit Intern Tingkat Lanjutan II		3	*Advanced Internal Audit II*
8	Audit Intern Tingkat Manajerial		3	*Managerial Internal Audit*
7	Seminar Internal Auditor		3	*Internal Auditor Seminar*
8	Audit IT		3	*IT Audit*
9	Dasar-dasar Audit Internal		3	*Fundamentals of Internal Audit*
	ANTI FRAUD			*ANTI FRAUD*
1	Digital Forensic Tools And Technique		3	*Digital Forensic Tools And Technique*
2	Psikologi Dan Teknik Komunikasi Audit		3	*Psychology And Technical Communication Audit*
3	Certified Forensic Auditor (CFrA)		3	*Certified Forensic Auditor (CFrA)*
4	Teknik Analisa Forensik Untuk Mendeteksi Kecurangan		3	*Forensic Analysis Techniques For Detecting Cheating*
5	Best Pratices In Fraud		4	*Best Pratices In Fraud*
6	Police and Procedures to Prevent Fraud		4	*Police and Procedures to Prevent Fraud*
7	Pelatihan Fraud Audititing 2		3	*Fraud Audititing Training 2*
8	Teknik Wawancara, Permintaan Keterangan Dan Pembuatan Berita Acara Dalam Audit Investigasi		3	*Interview Techniques, Requests for Information and Proceedings of the Minutes of Investigation Audit*
9	Management Fraud		3	*Management Fraud*
10	Building Fraud Audit Using *Risk* Assesment		3	*Building Fraud Audit Using Risk Assessment*
	SEKPER			*CORSEC*
1	Government Affair		3	*Government Affair*
2	*Corporate Secretary*: Menghadapi Bisnis Global		2	*Corporate Secretary: Facing Global Business*
3	Profesional Public Relation		2	*Professional Public Relations*
4	CSR Communication Melalui Cyber Media		2	*CSR Communication Through Cyber Media*
5	Corporate Identity Management		3	*Corporate Identity Management*
6	Membangun Kemitraan dengan *stakeholders* dan mengelola konflik CSR		2	*Building Partnerships with stakeholders and managing CSR conflicts*
7	Penanganan krisis melalui hubungan Media		2	*Handling crisis through Media relations*
8	Profesional Secretary Basic		6	*Professional Secretary Basic*
9	Public Speaking for Secretary		6	*Public Speaking for Secretary*
10	Report Writing *Skills* For Secretary		6	*Report Writing Skills For Secretary*
11	*Corporate Communication* and Reputation		4	*Corporate Communication and Reputation*
12	Strategic Media Planning For PR		4	*Strategic Media Planning For PR*

JADWAL PROGRAM DIKLAT EXTERN TAHUN 2018
SCHEDULE EXTERN PROGRAM IN 2018

NO	JENIS PENDIDIKAN	SASARAN PESERTA / *PARTICIPANTS TARGET*	PESERTA / *PARTICIPANTS*	*TYPE OF EDUCATION*
	PEMASARAN			*MARKETING*
1	*Financial* Message ISO 8583 From PHP		2	*Financial Message ISO 8583 From PHP*
2	E - Banking		2	*E - Banking*
3	Pengembangan Teknologi Berbasis Chip		2	*Development of Chip Based Technology*
4	Pemrograman Java Tingkat Advance		2	*Java Programming Advance Level*
5	Host Security Module (HSM)		2	*Host Security Module (HSM)*
6	Handling Complain		2	*Handling Complain*
7	Managing Marketing Plan		2	*Managing Marketing Plan*
8	Experiential Marketing In Banking Industry		2	*Experiential Marketing In Banking Industry*
9	Intergrated Marketing Communication		2	*Intergrated Marketing Communication*
10	Riset Efektivitas Promosi		2	*Promotion Effectiveness Research*
11	Market *Risk* Modelling		2	*Market Risk Modeling*
12	Desain Pemasaran		2	*Marketing Design*
13	Effective Lobbying & Negotiation Skill		3	*Effective Lobbying & Negotiation Skill*
14	Pemasaran Online & Strategi Komunikasi Digital		3	*Online Marketing & Digital Communication Strategy*
15	Competitive marketing strategy		3	*Competitive marketing strategy*
16	Personalisasi Kartu Chip		3	*Personalize Chip Card*
17	Creating *Funding* Program		2	*Creating Funding Program*
	PEMBINAAN CABANG			*BRANCH FOUNDING*
1	MSDM For Non SDM		3	*MSDM For Non HR*
2	Service Excellence		2	*Service Excellence*
3	Publik Speaking	PBC & Budker SDM	3	*Public Speaking*
4	*Team building*		3	*Team Building*
	HUKUM			*LEGAL*
1	Kepailitan : Permohonan,Pengurusan dan, Pemberesan Asset		2	*Bankruptcy: Application, Arrangement and, Asset Delivery*
2	Strategi Litigasi Perdata		2	*Civil Litigation Strategy*
3	Legal Due Dilegence		2	*Legal Due Dilegence*
4	Taktik dan Strategi Penaganan Perdata diluar Pengadilan dan di Pengadilan		2	*Tactics and Strategies of Civil Handling Outside the Court and in Courts*
5	Memahami Aspek-aspek Hukum Perkreditan		2	*Understanding the Legal Aspects of Loan*
1	Persiapan Pensiun & Kewirausahaan		20	*Retirement Preparation & Entrepreneurship*
2	Program pendidikan untuk Pegawai Berprestasi (studi lanjut S2)		5	*Educational program for outstanding employees (advanced study S2)*
3	Pincab dan SESPIBANK		10	*Pincab and SESPIBANK*
4	Program lain karena kebijakan Manajemen / dari Divisi lain yang diluar rencana		20	*Other programs due to Management policies / from other Divisions are out of plan*

Tinjauan Teknologi Informasi
Information Technology Overview

Profil Teknologi Informasi

Pada saat ini Teknologi Informasi (TI) sudah begitu canggih dan memegang peran penting di berbagai bidang terutama di bidang bisnis yakni Perbankan. Peran teknologi informasi untuk bidang perbankan sangatlah penting dan bahkan mustahil untuk pisahkan dikarenakan hampir seluruh mekanisme dalam pelaksanaan dan pemrosesan data sudah dalam bentuk informasi dimana hanya dengan teknologi informasi tersebut dapat diselesaikan.

Industri perbankan Indonesia saat ini dipandang tengah mengalami masa transformasi signifikan yang didorong oleh Teknologi Informasi. Keberadaan Teknologi Informasi menjadi pendorong utama tranformasi bank dalam tiga sampai dengan lima tahun ke depan. Keberadaan Teknologi Informasi Bank Papua dipandang sebagai jalan untuk menyamakan arena persaingan dengan bank-bank yang lebih besar. Caranya adalah dengan menyediakan kanal baru untuk menjangkau nasabah sambil menurunkan biaya akuisisi nasabah dan pelayanan.

Information Technology Profile

At this time Information Technology (IT) has been so sophisticated and plays an important role in various fields, especially in the business field of Banking. The role of information technology in the banking sector is very important and even impossible to separate because almost all the mechanisms in the implementation and processing of data are in the form of information where only with the information technology can be completed.

Indonesia's banking industry is currently considered experiencing a significant transformation period that is driven by Information Technology. The existence of Information Technology becomes the main driver of bank transformation in the next three to five years. The existence of Information Technology Bank Papua is seen as a way to equate the competition arena with the big banks. The trick is to provide new channels to reach customers while lowering customer acquisition and service costs.

Bergabungnya Bank Papua dalam program Transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Seluruh Indonesia yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, memungkinkan pengembangan Teknologi Informasi dengan menyediakan kanal baru untuk menjangkau berbagai segmen nasabah dengan cara berbagi biaya di antar BPD. Pengembangan bersama Program Teknologi Informasi bagi seluruh BPD ini dapat menjadikan produk-pruduk BPD sejajar dengan bank-bank pesaing lainnya.

The incorporation of Bank Papua into the All-Indonesia Regional Development Bank (BPD) Transformation Program initiated by the Financial Services Authority, enables the development of Information Technology by providing new channels to reach different segments of customers by sharing costs among BPDs. The joint development of the Information Technology Program for all BPDs can make BPD's products parallel to other competing banks.

Peran Strategi TI Dalam Mendukung Bisnis Bank Tahun 2017

Dalam rangka mendukung proses Bisnis Bank Papua, maka peran strategis Teknologi Informasi (TI) melalui memperkuat infrastruktur teknologi informasi diantaranya:

1) Proses Pembangunan *Electronic Loan System* (E-Los) yaitu suatu sistem yang akan digunakan dalam proses analisis kredit oleh Divisi PER untuk dipergunakan dalam menganalisis kredit Konsumer, Program dan UMK, sedangkan untuk Kredit Produktif sedang dalam proses perencanaan.
2) Pembangunan Data *Warehouse / Management Information System* (MIS) Bank Papua, yaitu suatu media yang akan dapat digunakan untuk mendukung Divisi Manajemen Risiko untuk pengelolaan *profile* risiko, Divisi Kepatuhan untuk keperluan pelaporan APU/PTT, Divisi Perencanaan dan Pengembangan untuk penyusunan dan monitoring Rencana Bisnis Bank (RBB)
3) Dalam penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional (SKN) yang saat ini dikelola oleh Kantor Cabang Utama maka pada tahun 2017 dikelola oleh Divisi Treasury dan Internasional.
4) Peningkatan security aplikasi dan jaringan.
5) *Capacity planning bandwidth*.

The Role of IT Strategy in Supporting Bank Business 2017

In order to support the business process of Bank Papua, the strategic role of Information Technology (IT) through strengthening the information technology infrastructure in between:

1) Electronic Loan System Development Process (E-Los) is a system that will be used in the loan analysis process by PER Division to be used in analyzing consumer loan, Program and MSE, while for Productive Loan is in the planning process.

2) Data Development Warehouse / Management Information System (MIS) of Bank Papua, a medium that will be used to support the Risk Management Division for risk profile management, Compliance Division for APU / PTT reporting purposes, Planning and Development Division for preparation and monitoring Plan Business Bank (RBB)

3) In the operation of the National Clearing System (SKN) which is currently managed by the Main Branch Office, then in 2017 is managed by the Treasury and International Division.
4) Increased application and network security.
5) Capacity planning bandwidth.

Dampak Pengembangan TI Bagi Bisnis Perusahaan

Dengan adanya peran strategis Teknologi Informasi (TI) dalam mendukung proses Bisnis Bank Papua, maka bank mampu meningkatkan kegiatan operasional dan layanan yang lebih memudahkan bagi pegawai dan nasabah khususnya.

Impact of IT Development for Corporate Business

With the strategic role of Information Technology (IT) in supporting the business process of Bank Papua, the bank is able to improve operational activities and services that make it easier for employees and customers in particular.

Biaya – Biaya Yang Telah Dikeluarkan Di Tahun 2017

Bank telah menginvestasikan dana pada beberapa bidang yakni untuk Penggunaan Aplikasi baru, Peralatan Baru, dan Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui sosialisasi, seminar, dan pelatihan sebagai asset yang sangat berharga.

Expenses that have been issued in 2017

The Bank has invested funds in several areas is for New Application Use, New Equipment, and Increased Human Resource competence through socialization, seminars, and training as a very valuable asset.

Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi

Manajemen risiko dalam bank tidak hanya dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko, tetapi keputusan yang dihasilkan harus lebih stratejik dan turut berkontribusi dalam mendukung bisnis dan organisasi, serta menjadikan perusahaan lebih siap dan adaptif dalam menghadapi persaingan serta dapat memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Iinformasi Oleh Bank Umum, maka Bank Papua menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi, yang mencakup:

a) Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
b) Kecukupan kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi;
c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan Teknologi Informasi; dan
d) Sistem pengendalian intern atas penggunaan Teknologi Informasi.

Bank telah menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan Teknologi Informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya Teknologi Informasi. Disamping itu, Bank Papua juga melakukan audit Teknologi Informasi yang dilakukan auditor intern secara periodik.

Rencana Kerja Strategis Pengembangan IT Pada Tahun 2018

Sesuai Rencana Strategis Teknologi Informasi dalam mendukung rencana strategis kegiatan usaha Bank, beberapa program kerja prioritas yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank ditahun 2018 diantaranya:

1. Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
   - Mengisi personil sesuai susunan struktur organisasi Divisi Teknologi yang baru.
   - Memperkuat kemampuan internal untuk kecepatan mengakomodir kebutuhan pelayanan.
   - Menyiapkan personil yang cukup dan berkompeten untuk persiapan kemandirian.
   - Melakukan sertifikasi dan training personil TI, untuk pengembangan kompetensi pegawai.

Risk Management in the Use of Information Technology

Risk management in banks is not only in identifying and reducing risks, but the resulting decisions must be more strategic and contribute to supporting businesses and organizations, and making the company more prepared and adaptive in the face of competition and can meet the applicable regulations.

Referring to the Financial Services Authority Regulation No. 38 / POJK.03 / 2016 on the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology By Commercial Bank, Bank Papua applies effective risk management in the use of Information Technology, which includes:

a) Active supervision of the BOD and BOC;
b) Adequacy of policies, standards and procedures for the use of Information Technology;
c) The adequacy of the process of identifying, measuring, monitoring and controlling the risks of the use of Information Technology; and
d) Internal control system on the use of Information Technology.

The Bank has implemented integrated risk management in every stage of the use of Information Technology since the process of planning, procurement, development, operation, maintenance, termination and elimination of Information Technology resources. In addition, Bank Papua also conducts Information Technology audits conducted by internal auditors on a periodic basis.

IT Strategic Development Work Plan In 2018

In accordance with the Information Technology Strategic Plan in support of the Bank's strategic business plan, several priority work programs listed in the Bank's business plan in 2018 include:

1. *Institutional Development and Human Resources*
   - *Filling personnel according to the new organizational structure of the Technology Division.*
   - *Strengthen the internal capability for speed to accommodate service needs.*
   - *Prepare sufficient and competent personnel to prepare for independence.*
   - *Certification and training of IT personnel, for the development of employee competency.*

2. Pengembangan E-Channel
   - Memperluas dan memperbanyak agen-agen atau *merchant* untuk difasilitasi dengan perangkat maupun aplikasi pembanyaran non tunai.
   - Menambah fitur-fitur pembayaran dalam menu mesin ATM (Tagihan Telepon, Tagihan pihak ketiga lainnya).
   - Kerja sama dengan pihak ketiga untuk menambah channel layanan kepada masyarakat luas.
3. Pengembangan Layanan Publik Online
   - Merealisasikan rencana implementasi internet Banking.
   - Merealisasikan rencana implementasi Mobile Banking.
   - Merealisasikan rencana implementasi Laku Pandai.
   - Kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan layanan public dalam rangka menambah jumlah *feebase income*.
   - *Digital Banking*.
4. Menambah Perangkat ATM Tunai dan Setoran Tunai
   - Mengimplementasikan mesin ATM baru sesuai kebutuhan yang telah dianggarkan.
   - Mengimplementasikan mesin ATM Setoran tunai, sesuai kebutuhan.
   - Mengimplementasikan penambahan mesin ATM kas keliling sesuai kebutuhan.
5. Mengembangan Jaringan Komunikasi
   - Melakukan pengganti dari Vsat IP ke Fiber Optic di beberapa wilayah yang sudah terpasang jaringan FO.
   - Meningkatkan ke kantor layanan yang belum terpasang, sesuai anggaran.

2. Development of E-Channel
   - *Expand and add more agents or merchants to be facilitated with non cash payment tools and applications.*
   - *Adding features of the menu in the ATM machine manual (Telephone Bill, Other Third Party Charges).*
   - *Cooperation with third parties to add service channels to the wider community.*

3. Development of Online Public Services
   - *Realizing Internet Banking implementation plan.*
   - *Implementing Mobile Banking Implementation Plan.*
   - *Realization of branchless banking implementation plan.*
   - *Cooperation with third parties to improve public services in order to increase the amount of fee base income.*
   - *Digital Banking*
4. Adding Cash ATM and Cash Deposit
   - *Implement new ATM machines as per budgeted requirements.*
   - *Implement ATM machine Cash deposit, as needed.*
   - *Implementing the addition of ATM cash machines as needed.*
5. Developing Communication Network
   - *Substitute from Vsat IP to Fiber Optic in some areas already installed FO network.*
   - *Upgrading to an unassigned service office, within budget.*

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance Implementation Report

BANK PAPUA

Bersama Papua Membangun Negeri

Jujur, Tulus, Terbuka dan Berempati

Honest, Sincere,Open and Empathy

Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan menghindari penyelewengan wewenang jabatan dan konflik kepentingan. Tulus dalam memberikan pelayanan dan terbuka dalam menerima saran/kritik yang membangun serta berempati terhadap kebutuhan dan keluhan nasabah.

Uphold the values of honesty and avoid misuse of authority of the positions and conflicts of interest. Sincere in providing services and open in receiving suggestions / criticisms that build and empathize with customer needs and complaints.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank Papua

Bank Papua Good Corporate Governance Implementation Report

PENDAHULUAN

Bank Papua berkomitmen meningkatkan kualitas penerapan tata kelola secara berkelanjutan sesuai standar dan praktik internasional yang patut diteladani dengan mengedepankan visi Bank menjadikan Bank Komersial yang kuat unggul dan terpercaya.

Bank Papua meyakini bahwa semangat penerapan tata kelola yang baik melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Profesionalitas, serta Kewajaran dan Kesetaraan, akan meningkatkan kualitas perusahaan. Kualitas tersebut utamanya dapat dinilai dari keberdayaan fungsi dan kemandirian organ perusahaan, keputusan-keputusan manajemen yang dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesadaran dan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, serta nilai perusahaan yang optimal bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

PRELIMINARY

Bank Papua is committed to improving the quality of the implementation of sustainable governance in line with international standards and exemplary practices by prioritizing the Bank's vision of making a strong and reliable Commercial Bank.

Bank Papua believes that the spirit of implementing good corporate governance through management based on the principle of Transparency, Accountability, Responsibility, Professionalism, and Fairness and Equity, will improve the quality of the company. These qualities can be primarily judged by the empowerment of the function and independence of the company's organs, management decisions based on high moral values and applicable legislation, corporate social awareness and responsibility towards society and environmental sustainability, and optimal corporate value for shareholders and other stakeholders.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang tercermin di setiap kegiatan usaha merupakan perwujudan visi Bank Papua untuk menjadi bank pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja, serta misi Bank Papua untuk menjadi acuan tata kelola yang baik. Bank Papua meyakini bahwa pelaksanaan tata kelola yang baik yang menyeluruh di setiap jenjang organisasi akan sangat mendukung upaya Bank Papua dalam mewujudkan sasaran bisnis serta memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam jangka panjang.

KOMITMEN DAN KONSISTENSI PENERAPAN TATA KELOLA

Guna mendukung dan mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di atas, Bank Papua berupaya mengimplementasikan pelaksanaannya secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam setiap aktifitas dan operasional pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yakni seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan sampai pada pegawai tingkatan paling bawah.

Penerapan tata kelola yang baik Bank Papua untuk tahun 2017 diarahkan pada komitmen terhadap upaya perbaikan dan peningkatan penerapan tata kelola yang baik Bank Papua yang meliputi seluruh aspek penilaian antara lain upaya pemantapan fungsi Kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit, penerapan manajemen risiko serta transparansi kondisi keuangan bank. Diharapkan komitmen tersebut akan semakin memperkuat implementasi tata kelola yang baik dan memperbaiki kualitas komposit tata kelola yang baik Bank Papua, sehingga pada akhirnya penerapan tata kelola yang baik di Bank Papua menjadi suatu budaya yang berkembang dan dinamis.

DASAR ACUAN IMPLEMENTASI TATA KELOLA YANG BAIK

Sebagai dasar acuan penerapan tata kelola yang baik, Bank Papua berpedoman pada berbagai peraturan perundangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:46/ POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

The implementation of the good corporate governance principles reflected in every business activity is the embodiment of Bank Papua's vision to be a community-appointed bank that excels in service and performance, as well as the mission of Bank Papua to be a good corporate governance benchmark. Bank Papua believes that the implementation of good overall governance at every level of the organization will greatly support the efforts of Bank Papua in realizing its business goals and providing benefits to all stakeholders in the long term.

COMMITMENT AND CONSISTENCY OF GCG IMPLEMENTATION

In order to support and optimize the implementation of the good corporate governance principles above, Bank Papua seeks to implement its implementation thoroughly and continuously in all activities and operations at all levels or levels of the organization is all Bank members and managers, from the Board of Commissioners, the Board of Directors and to at the lowest level of staff.

The implementation of g Bank Papua GCG for the year 2017 is directed to the commitment to the improvement and improvement of the implementation of good corporate governance of Bank Papua covering all aspects of the assessment, among others, efforts to strengthen the Bank's compliance function against prevailing regulations, handling of conflict of interests, implementation of risk management and transparency of bank financial condition. It is expected that the commitment will further strengthen the implementation of good corporate governance and improve the quality of GCG banking composite of Bank Papua, so that in the end the implementation of good corporate governance in Bank Papua becomes a dynamic and evolving culture.

BASICS OF GCG IMPLEMENTATION

As a basis for the implementation of good corporate governance, Bank Papua is guided by various laws and regulations, including the following:

1. *Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act Number 10 of 1998 concerning Amendment to Act Number 7 of 1992 concerning Banking.*
2. *Law no. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company.*
3. *Regulation of the Financial Services Authority Number: 46 / POJK.03 / 2017 dated July 12, 2017 on the Implementation of Commercial Bank Compliance Function.*

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:01/ POJK.07/2013 tanggal 16 Juli 2017 tentang Perlindungan Konsumen sector jasa keuangan.
5. Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/ SEOJK.01/2017 tanggal 17 maret 2017 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:12/ POJK.01/2017 tanggal 16 maret 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme disektor jasa keuangan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
   POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum berikut perubahannya No. 8/14/ PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/ POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/ POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/ POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 27/ POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
12. Surat Edaran Bank Indonesia nomor. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
13. Surat Edaran OJK Nomor 27/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti.
14. Surat Edaran OJK nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, serta Komite-Komite Dewan Komisaris;
16. ASEAN Corporate *Governance Scorecard*;
17. Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

4. Regulation of the Financial Services Authority Number: 01 / POJK.07 / 2013 dated July 16, 2017 on Consumer Protection of the financial services sector
5. Circular letter of the OJK Number: 13 / SEOJK.01 / 2017 dated 17 March 2017 concerning the implementation of GCG for commercial banks
6. Regulation of the Financial Services Authority Number: 12 / POJK.01 / 2017 dated March 16, 2017 on the implementation of anti-money laundering and terrorism financing prevention programs in the financial services sector.
7. Regulation of the OJK Number 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of GCG for Commercial Banks.
The POJK for the Implementation of GCG for a Commercial Bank is an amendment to Bank Indonesia Regulation no. 8/4 / PBI / 2006 dated January 30, 2006 concerning the Implementation of GCG for Commercial Bank and its amendment no. 8/14 / PBI / 2006 dated October 5, 2006.
8. Regulation of the Financial Services Authority Number 4 / POJK.03 / 2016 dated January 26, 2016 concerning Rating of Commercial Bank Rating.
9. Regulation of Financial Services Authority number 5 / POJK.03 / 2016 dated January 26, 2016 concerning Bank Business Plan.
10. Regulation of the OJK No.18 / POJK.03 / 2016 dated March 16, 2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
11. Regulation of Financial Services Authority number 27 / POJK.03 / 2016 dated July 22, 2016 regarding Assessment of Ability and Fit for Main Parties of Financial Services Institutions.
12. Circular Letter of Bank Indonesia Number. 13/24 / DPNP dated October 25, 2011 concerning the Sound Rating of Commercial Bank.
13. Circular Letter of OJK Number 27 / SEOJK.03 / 2016 dated July 14, 2016 concerning Commercial Bank Operations Based on Core Capital.
14. Circular Letter of OJK No.40 / SEOJK.03 / 2016 dated September 26, 2016 concerning the Provision of Remuneration Governance for Commercial Banks.
15. Regulation of the Financial Services Authority which regulates the SGM, BOD and BOC, and Committees of the BOC;
16. ASEAN Corporate Governance Scorecard;
17. Articles of Association of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK

Untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan diperlukan landasan yang kuat bagi sebuah perusahaan. Untuk itu penerapan tata kelola yang baik sebagai kerangka utama dari pertumbuhan perusahaan harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan dengan berlandaskan pada prinsip Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*). Penerapan prinsip-prinsip tata kelola di Bank Papua dapat diuraikan sebagai berikut.

Transparansi

Bank diharuskan memiliki inisiatif dalam pengungkapan informasi material dan relevan baik yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan maupun informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi tersebut disampaikan dengan cepat, akurat, dan mudah diakses oleh siapapun. Komitmen dalam mewujudkan prinsip transparansi ditunjukkan oleh Bank Papua antara lain melalui:

1. Memiliki Divisi Sekretaris Perusahaan yang memiliki kewajiban untuk memastikan informasi perusahaan yang relevan telah tersampaikan kepada pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham dan masyarakat.
2. Memiliki website resmi perusahaan yang selalu diperbarui dalam menyajikan informasi sesuai standar transparansi dan publikasi yang ditetapkan oleh Regulator.
3. Senantiasa mengedepankan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan dan pengungkapan kondisi keuangan dan non keuangan secara tepat waktu kepada pemangku kepentingan.
4. Mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan tata kelola yang baik serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
5. Senantiasa menyajikan dan menyampaikan laporan kepada otoritas yang berwenang dan kepada pihak-pihak lainnya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku secara tepat waktu.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

To achieve sustainable growth requires a firm foundation for a company. Therefore, the implementation of good corporate governance as the main framework of the growth of the company should be applied consistently and continuously based on the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Professional and Fairness. The implementation of GCG principles in Bank Papua can be described as follows.

Transparency

Banks are required to have initiatives in disclosing material and relevant information both required by law and other important information that may affect decision-making by shareholders, loanors and other stakeholders. The information is delivered quickly, accurately, and easily accessible to anyone. The commitment to realize the transparency principle is shown by Bank Papua, among others through:

1. *Having a Corporate Secretary Division that has an obligation to ensure relevant company information has been communicated to stakeholders, including shareholders and the public.*
2. *Having a company's official website which is always updated in presenting information according to the standard of transparency and publication set by the Regulator.*
3. *Always prioritize transparency in corporate management and timely disclosure of financial and non financial conditions to stakeholders.*
4. *Disclose information including but not limited to vision, mission, business objectives, corporate strategy, financial condition, composition and compensation of management, controlling shareholder, share ownership by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners and members of their families in other companies and companies, risk management system, internal control and supervision system, good corporate governance system and implementation and compliance level, and important events that may affect the company's condition.*
5. *Always present and submit reports to the competent authority and to other parties as is the applicable law provisions in a timely manner.*

Akuntabilitas

Pengelolaan Bank Papua harus dilakukan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan Bank dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Perwujudan dari prinsip Akuntabilitas di Bank Papua tercermin antara lain melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Memiliki pedoman atau kebijakan yang menjadi pegangan bagi setiap organ perusahaan dan semua pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
2. Menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan dan semua pegawai secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan.
3. Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua pegawai memiliki kemampuan sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan perannya dalam pelaksanaan tata kelola yang baik.
4. Memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
5. Memiliki unit kerja yang mengelola anti fraud.
6. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan serta rencana kerja lainnya.
7. Memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment sistem*).

Pertanggungjawaban

Pengelolaan usaha Bank harus dipastikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Selain itu Pertanggungjawaban Bank juga berbentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini Bank Papua Mewujudkan Prinsip Pertanggungjawaban antara lain melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Senantiasa bertindak dengan prinsip kehati-hatian dan berpegang teguh pada hukum yang berlaku.
2. Memiliki kebijakan internal Bank sebagai panduan dan pedoman bagi pegawai dalam menjalankan aktivitas operasional Bank.
3. Memiliki Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan yang berfungsi sebagai *second line of defense* (*ex ante*) yaitu senantiasa memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap Komitmen yang dibuat oleh Bank kepada

Accountability

The management of Bank Papua must be done properly, measurable, and in accordance with the interests of the Bank while taking into account the interests of shareholders and other stakeholders. The embodiment of accountability principles in Bank Papua is reflected among others through the following matters:

1. *Having guidelines or policies that become the guidance for every organ of the company and all employees in carrying out their duties and responsibilities.*
2. *Determine the details of the duties and responsibilities of each company's organs and all employees clearly and in harmony with the company's vision, mission, values, and strategy.*
3. *Believing that all the organs of the company and all employees have capabilities in accordance with their duties, responsibilities, and roles in the implementation of good corporate governance.*
4. *Having an effective internal control system in the management of the company.*
5. *Having a working unit that manages anti fraud.*
6. *Prepare the Company's Long-Term Plan, Annual Work Plan and Corporate Budget and other work plans.*
7. *Having a performance measure for all levels of the company consistent with the business goals of the company, and has a reward and punishment system.*

Responsibility

The management of the Bank's business shall be ensured in accordance with applicable laws and regulations, sound Bank management principles. In addition, the Bank's liability also takes the form of awareness of the environment and the surrounding community. In this case the Bank Papua embodies the Principle of Accountability, among others, through the following matters:

1. *Always act with the principle of prudence and adhere to the applicable law.*
2. *Having internal policies of the Bank as guidance and guidance for employees in carrying out operational activities of the Bank.*
3. *Having an Internal Audit Work Unit, the Compliance Work Unit functioning as a second line of defense (ex ante) is to ensure that the policies, rules, systems and procedures and business activities undertaken by the Bank are in compliance with the provisions of Bank Indonesia, Applicable financial and statutory regulations, as well as ensuring the Bank's compliance with commitments made by the Bank to Bank Indonesia and / or other regulatory authorities.*

Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
4. Senantiasa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan melalui implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR).

Profesional

Dalam mewujudkan prinsip Profesional, manajemen dan seluruh individu dalam Bank memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/ tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank. Prinsip ini dipegang teguh oleh Bank Papua dalam hal :

1. Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua.
2. Mayoritas anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Direktur Utama maupun Direktur lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, karena tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali.
3. Bank telah memiliki aturan mengenai Benturan Kepentingan yang diatur di dalam Kode Etik Bank Papua sejak tahun 2004.

Kewajaran dan Kesetaraan

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) dipegang teguh oleh Bank Papua yang diwujudkan dalam setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan, perwujudan prinsip Kewajaran dan Kesetaraan di Bank Papua antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
2. Memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

4. *Always contribute positively to the community and care about environmental sustainability through the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR).*

Professional

In realizing the principle of Professional, management and all individuals within the Bank are competent, able to act objectively, and free from influence / pressure from any party (independent) and have a high commitment to develop the bank. This principle is firmly upheld by Bank Papua in terms of:

1. *The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners does not have a family relationship up to the second degree.*
2. *The majority of members of the Board of Commissioners is Independent Commissioners. The President Director and other Directors are independent of the controlling shareholder because they have no financial relationship, management, share ownership and / or family relationship with the controlling shareholders.*
3. *The Bank already has rules on the Conflict of Interest that are governed by the Bank Papua Code of Conduct since 2004.*

Fairness and Equality

Fairness and equality Principles held firmly by Bank Papua embodied in every decision taken shall always take into account the interests of the majority shareholder and provide protection to minority shareholders and other stakeholders of fraud and transactions in contravention of applicable laws and regulations. Overall, the embodiment of the principle of Fairness and Equity in Bank Papua includes, among other things, the following:

1. *Taking into account the interests of all stakeholders based on the principle of equality and equal treatment.*
2. *Provide an opportunity for all stakeholders to provide input and convey an opinion to the interests of the Bank and open access to information in accordance with the fairness principle.*

KOMITMEN DAN TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA BANK PAPUA

Penerapan tata kelola Bank Papua mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan perusahaan secara konsisten yang ditujukan untuk memacu kinerja, meningkatkan kepercayaan investor, melindungi kepentingan *stakeholders*, serta dapat lebih memberikan kontribusi positif kepada industri keuangan dan perekonomian nasional.

Bank Papua berkomitmen meningkatkan kualitas penerapan tata kelola secara berkelanjutan sesuai standar dan praktik internasional yang patut diteladani dengan mengedepankan kekokohan finansial, kualitas aktiva dan strategi yang unggul sebagai elemen kunci menghadapi tantangan persaingan global dan meraih pertumbuhan berkelanjutan.

COMMITMENT AND OBJECTIVES OF BANK PAPUA'S GCG IMPLEMENTATION

The implementation of Bank Papua's GCG promotes ethics and integrity in consistent corporate management aimed at spurring performance, enhancing investor confidence, protecting stakeholders' interests, and contributing positively to the national financial industry and the economy.

Bank Papua is committed to improving the quality of sustainable governance practices in line with internationally accepted standards and practices by promoting financial strength, asset quality and superior strategies as a key element in facing the challenges of global competition and achieving sustainable growth.

PERJALANAN IMPLEMENTASI TATA KELOLA BANK PAPUA

Peletakan Dasar-Dasar

Sejak diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, dan diubah oleh OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank Papua sudah menerapkan tata kelola Bank yang baik dengan berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku.

Implementasi tata kelola Bank yang baik memerlukan komitmen dari top management dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Jajaran manajemen berusaha membangun pondasi tata kelola Bank yang baik *(Aspek Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome)*) yang ditandai dengan beberapa langkah yaitu :

1. Bank Papua telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam hal komposisi dan persyaratan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta unit kerja lainnya.
2. Bank Papua memiliki kebijakan terkait tata kelola Bank yang baik seperti Pedoman Pelaksanaannya, Kode Etik Insan Bank Papua, Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi , Keputusan Struktur Organisasi serta tugas pokok dan fungsi masing-masing divisi/unit, serta kebijakan lainnya.

THE JOURNEY OF BANK PAPUA'S GCG IMPLEMENTATION

Laying the Basics

Since the issuance of Bank Indonesia Regulation No. 8/14 / PBI / 2006 concerning Amendment to Bank Indonesia Regulation no. 8/4 / PBI / 2006 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks and amended by OJK under the Regulation of the Financial Services Authority Number 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, Bank Papua has implemented manage a good Bank in accordance with the applicable law.

Implementation of Bank's GCG requires commitment from top management and the whole range of organizations. Implementation starts from the determination of the basic policy (strategic policy) and code of ethics that must be obeyed by all parties in the company. Management ranks are trying to build a good foundation of Bank's GCG (Aspects of Governance Structure and Governance Process) which is characterized by several steps:

1. *Bank Papua has complied with applicable legal provisions in terms of composition and requirements of members of the Board of Directors and Board of Commissioners and other work units.*
2. *Bank Papua has policies related to Bank's GCG such as the Implementation Manual, the Code of Insan Bank Papua, the Code of Conduct for the Board of Commissioners and the Board of Directors, the Decision of the Organizational Structure and the duties and functions of each division / unit, and other policies.*

3. Pembentukan Komite-komite di level Dewan Komisaris yaitu :
   - Komite Audit;
   - Komite Pemantau Risiko;
   - Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Memiliki staf ahli dan GCG yang membantu manajemen dalam mendukung pelaksanaan Tata Kelola Bank yang baik.
5. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melaksanakan keterbukaan informasi secara jelas, akurat, dan tepat waktu, antara lain dalam publikasi Laporan Keuangan, informasi maupun peristiwa atau fakta material, Laporan Tahunan, Laporan GCG (selanjutnya laporan pelaksanaan tata kelola), serta laporan-laporan lainnya yang diwajibkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
7. Melaksanakan *self assessment* terhadap penerapan GCG (selanjutnya untuk periode Desember 2017 Bank melakukan *self assessment* atas penerapan Tata Kelola Bank), dan menyusun laporan pelaksanaan tata kelola setiap akhir tahun untuk pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
8. Bank Papua memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang berfungsi sebagai *second line of defense* (*ex ante*) yang bertugas untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Papua telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Di awal tahun 2017 telah dilakukan penjaringan untuk mencari calon Komisaris Bank Papua.

Unit Kerja Pengelola

Berdasarkan keputusan Direksi nomor 101.A/DIRBPD/XI/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Good Corporate Governance* (GCG) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dinyatakan bahwa unit kerja pengelola GCG (tata kelola Bank) di Bank Papua berada di Divisi Kepatuhan.

Penerapan Tata Kelola Berkelanjutan

Penerapan tata kelola yang baik secara berkelanjutan merujuk pada upaya untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas Aspek *(Aspek Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome)* sehingga menghasilkan hasil yang diharapkan. Bank Papua selalu berupaya untuk meningkatkan penerapan tata kelola yang baik setiap tahunnya, sehingga akan menjadi sebuah budaya bagi setiap organ perusahaan tanpa perlu adanya paksaan.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan Bank dalam rangka penerapan tata kelola berkelanjutan antara lain adalah :

3. *Establishment of Committees at the level of the Board of Commissioners:*
   - *Audit Committee;*
   - *Risk Oversight Committee;*
   - *Remuneration and Nomination Committee.*
4. *Having an expert staff and GCG who assists management in supporting good implementation of Good Corporate Governance.*
5. *Implementation of the Shareholder General Meetings in accordance with prevailing laws and regulations.*
6. *Implement information disclosure clearly, accurately, and on time, among others, in the publication of Financial Statements, information or material events or facts, Annual Reports, GCG Reports (hereinafter reports on the implementation of governance), as well as other reports required under the provisions applicable.*
7. *Carry out a self-assessment of GCG implementation (hereinafter for the period of December 2017 the Bank conducts self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance), and prepares a report on the implementation of governance at the end of each year for reporting to OJK.*
8. *Bank Papua has a Compliance Work Unit functioning as a second line of defense (ex ante) in charge of ensuring that the policies, regulations, systems and procedures and business activities undertaken by Bank Papua are in accordance with applicable laws and regulations.*

9. *At the beginning of 2017, a network of candidates for the commissioners of Bank Papua has been conducted.*

Management Unit

Based on the decision of the Board of Directors number 101.A/DIRBPD/XI/2013 dated 29 November 2013 on Good Corporate Governance (GCG) Manual of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua stated that the GCG management unit (Bank's GCG) in Bank Papua is in the Compliance Division.

The Implementation of Sustainable Governance

The implementation of good corporate governance in a sustainable manner refers to efforts to improve the effectiveness and quality of the Aspects of Governance Structure and Aspects of Governance Process so as to produce the expected results. Bank Papua always strives to improve the implementation of good corporate governance every year, so it will become a culture like every organ company without the need for coercion.

The steps taken by the Bank in the framework of implementing sustainable governance include:

1. Bank Papua akan selalu melakukan penyempurnaan terhadap pedoman pelaksanaan program APU & PPT dan kebijakan penerapan program APU & PPT agar memenuhi kewajiban Bank dalam penerapan APU PPT.
2. Guna meningkatkan pemahaman pegawai dalam hal penerapan prinsip *Know Your Customer/*KYC dan *Know Your Employee*/KYE Bank selalu memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai guna memberikan pengetahuan dan pemahaman agar dapat mencegah pemanfaatan Bank baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam tindak pidana kejahatan dan praktek pencucian uang.
3. Melakukan sosialisasi terhadap optimalisasi Penanaman Budaya *Awarness* (Budaya Peka) terhadap Risiko bagi seluruh Insan Bank Papua.
4. Bank Papua telah memiliki Satuan Kerja Anti Fraud yang senantiasa menjalankan strategi anti fraud antara lain dengan:
   a. Penanganan fraud dan pelaporan kejadian fraud kepada otoritas yang berwenang secara rutin dan tepat waktu;
   b. Melakukan penandatanganan pakta integritas oleh segenap Insan Bank Papua;
   c. Melaksanakan strategi pengendalian fraud melalui program *Monday Reminder* (MORE), program Anti Fraud Sharing (AFSS), program *Alert System* (PAS), program Buku Saku Bank Papua (BAS) serta Forum Anti Fraud (FAF);
   d. Memberikan sosialisasi *Whistle Blowing System* (WBS) sebagai sarana pelaporan penyimpangan/ pelanggaran yang bersifat rahasia dan memiliki mekanisme perlindungan pelapor.
5. Mengoptimalkan fungsi dan peran Staf Manajemen Risiko di Kantor Cabang.
6. Memastikan Kepatuhan Bank terhadap Komitmen/ Janji dengan Bank Indonesia (BI) dan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) khususya dalam pemenuhan kewajiban pelaporan *self assessment* Tata Kelola dan laporan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. Melakukan penyesuaian atas ketentuan dan kebijakan internal Bank terkait adanya perubahan dan pemberlakuan atas beberapa kebijakan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

1. Bank Papua will always make improvements to the guidelines for APU & PPT program implementation and policy implementation of APU & a PPT program to fulfill the Bank's obligation in APU PPT implementation.
2. To improve the understanding of employees in terms of application of Know Your Customer / KYC principles and Know Your Employee / KYE Bank always provide training and socialization to employees to provide knowledge and understanding in order to prevent the Bank's use either intentionally or unintentionally in criminal acts and money laundering practices.
3. To socialize the optimization of Culture Awareness (Culture of Sensitive) to the Risks for all Insan Bank Papua.
4. Bank Papua already has an Anti Fraud Working Unit which has always run anti fraud strategy, among others by:
   a. Handling fraud and reporting fraud incidents to authorized authorities on a regular and timely basis;
   b. Signing integrity pact by all human of Bank Papua;
   c. Implement fraud control strategies through Monday Reminder (MORE) programs, Anti Fraud Sharing (AFSS) programs, Alert System (PAS) programs, Human Bank Papua Pocket Book (BAS) and Anti Fraud Forum (FAF);
   d. Providing Whistle Blowing System (WBS) socialization as a means of fraud reporting/ violations that are confidential and have a mechanism of protection of the complainant.
5. Optimizing the functions and roles of Risk Management Officers in Branch Offices.
6. Ensure the Bank's Compliance with Commitments / Appointments with Bank Indonesia (BI) and / or the Financial Services Authority (OJK) specifically in compliance with the reporting of the Governance self-assessment report and the Governance Report to OJK.
7. Adjusting the Bank's internal policies and regulations relating to the amendment and enforcement of several policies of Bank Indonesia and the Financial Services Authority.

Tahapan Implementasi Tata Kelola Bank

Strategi implementasi tata kelola Bank merupakan strategi dalam jangka panjang, gambaran dan arahan kepada Bank mengenai garis besar strategi implementasi tata kelola yang baik secara terintegrasi, serta memberikan gambaran mengenai peta praktik tata kelola Bank saat ini dan rencana peningkatan implementasi tata kelola Bank di masa mendatang. Bank Papua telah menyusun strategi implementasi tata kelola yang baik yang konsisten dan sesuai dengan tujuan serta sasaran Bank dalam *businees plan* maupun *strategic plan*. Strategi implementasi tata kelola Bank yang baik selama tahun 2017 dilaksanakan antara lain dengan inisiatif antara lain (1) Perlindungan terhadap hak Pemegang Saham, (2) Optimalisasi peran dan fungsi Dewan Komisaris, Direksi dan Komite, (3) Peningkatan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal, (4) Efektivitas penanganan pengaduan nasabah dan (5) Peningkatan fungsi kepatuhan.

Secara umum tahapan implementasi penerapan tata kelola Bank Papua saat ini dapat dilihat sebagai berikut :

Stages of Bank Governance Implementation

The Bank's GCG implementation strategy is a long-term strategy, overview and direction to the Bank on the outline of an integrated good corporate governance implementation strategy, and provides an overview of current Bank's GCG practices and plans for improving future Bank's GCG implementation. Bank Papua has developed a consistent and consistent implementation of good corporate governance strategies that meet the Bank's goals and objectives in its business plan and strategic plan. The Bank's good corporate governance implementation strategy during 2017 was implemented, among others, by initiatives, among others (1) Protection of Shareholders' rights, (2) Optimizing the roles and functions of the Board of Commissioners, Directors and Committees, (3) Enhancing the function of risk management and internal control , (4) Effectiveness of customer complaint handling and (5) Improvement of the compliance function.

In general, the implementation stages of the implementation of the Bank Papua GCG can be seen as follows:

1. *Awareness*
   Bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman awal mengenai pentingnya implementasi tata kelola yang baik bagi insan Bank Papua sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bersama dalam penerapan tata kelola Bank yang baik yang berkelanjutan. Kegiatan *Awareness* dilakukan mulai dari pegawai baru melalui Pendidikan Dasar Perbankan sampai dengan dilaksanakannya refreshment bagi pegawai. Pelaksanaan *Awareness* tersebut didokumentasikan dalam bentuk laporan formal sebagai bukti yang diperlukan dalam kegiatan *assessment* atas penerapan tata kelola Bank maupun penyusunan Annual Report.
2. Implementasi
   Kegiatan implementasi tata kelola yang baik diformulasikan dalam bentuk revitalisasi proses bisnis, restrukturisasi organisasi serta tindak lanjut rekomendasi atas hasil *assessment*. Kegiatan implementasi tata kelola Bank Papua tersebut diwujudkan dalam beberapa aktivitas, antara lain :
   a. Menyusun dan menyempurnakan berbagai kebijakan dan prosedur pengelolaan bank, mencakup bidang dana, bidang kredit dan pengendalian internal, dll

1. *Awareness*
   Aims to introduce and provide a preliminary understanding of the importance of implementing good corporate governance for the people of Bank Papua so as to foster mutual awareness in the implementation of sustainable good corporate governance of Bank. Awareness activities are conducted starting from new employees through the Basic Education Banking until the implementation of refreshment for employees. The implementation of Awareness is documented in the form of a formal report as evidence required in the assessment activities on the implementation of the Bank's GCG as well as the preparation of the Annual Report.
2. *Implementation*
   Good corporate governance implementation activities are formulated in the form of business process revitalization, organizational restructuring and follow-up recommendations on assessment results. The implementation of the governance of Bank Papua is realized in several activities, among others:
   a. Compile and refine various bank management policies and procedures, including funding, loan and internal controls, etc.

b. Menata struktur organisasi yang sejalan dengan praktek terbaik dalam tata kelola perusahaan untuk meningkatkan kinerja bank dengan :
   - Membentuk Komite Anti Fraud yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Tujuannya adalah sebagai penguatan sistem pengendalian intern Bank yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian Fraud;
   - Menciptakan dan membangun iklim budaya kerja yang etis dan bertanggungjawab, seperti menandatangani Surat Pernyataan Independensi Direksi dan Dewan Komisaris, serta mengkoordinasikan penandatanganan Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Kode Etika Kepatuhan (*Code of Conduct)*;
   - Adanya kebijakan sistem pengendalian kecurangan, termasuk di dalamnya sistem perlindungan terhadap pelaporan pelanggaran.

c. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi *self-assessment* atas penerapan tata kelola Bank dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi *self-assessment* sebelumnya.

Untuk lebih membumikan budaya patuh atas penerapan tata kelola yang baik pada seluruh insan dan *stakeholders*, Bank Papua telah melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya implementasi tata kelola yang baik, mengkomunikasikan dan menginternalisasikan berbagai kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan terkait tata kelola Bank yang baik. Bentuk sosialisasi tersebut dilakukan melalui media cetak berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam aktivitas sosialisasi penerapan tata kelola yang baik.

Pelaksanaan sosialisasi didokumentasikan dalam bentuk laporan formal sebagai bukti yang diperlukan dalam kegiatan *assessment* atas penerapan tata kelola Bank maupun penyusunan Annual Report.

3. Monitoring Implementasi

Monitoring pelaksanaan implementasi atas penerapan tata kelola bank di Bank Papua dilakukan pada seluruh tahapan proses melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa melakukan monitoring atas penerapan tata kelola Bank agar berjalan secara konsisten dan efektif.

Melalui Komite Audit, Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif atas efektivitas implementasi atas penerapan tata kelola Bank yang dilaksanakan oleh Direksi . Demikian juga Direksi secara terus-menerus

b. Organize organizational structure in line with best practices in corporate governance to improve bank performance by:
   - *Establish an Anti-Fraud Committee directly responsible to the President Director. The objective is to strengthen the Bank's internal control system which in its application is the Fraud control system;*
   - *Create and build an ethical and responsible workplace culture climate, such as signing the Independence Statement of the Board of Directors and Board of Commissioners, and coordinating the signing of the Statement of Compliance with the Code of Conduct Code;*
   - *The existence of the fraud control system policy, including the system of protection against violation reporting.*

c. Implement follow-up recommendations of self-assessment of implementation of Bank's GCG and follow-up evaluation of previous self-assessment recommendations.

To better embed the culture of compliance with the application of good corporate governance to all human beings and stakeholders, Bank Papua has conducted socialization aimed at providing an understanding of the importance of implementing good corporate governance, communicating and internalizing various policies, programs and implementation of activities related to Bank's GCG. The form of socialization is done through the print media in coordination with the parties who have interests in the socialization activities on the implementation of good corporate governance.

The implementation of socialization is documented in the form of formal reports as evidence required in the assessment activities on the implementation of the Bank's GCG as well as the preparation of the Annual Report.

3. Monitoring Implementation

Monitoring implementation of the GCG implementation in Bank Papua conducted at all stages of the process through coordination with the parties concerned. The Board of Directors and Board of Commissioners shall continuously monitor the implementation of the Bank's GCG in order to run consistently and effectively.

Through the Audit Committee, the Board of Commissioners exercises active oversight of the effectiveness of the implementation of the Bank's GCG practices implemented by the BOD continuously

memastikan dan memonitor atas penerapan tata kelola Bank berjalan sesuai dengan strategi yang ditetapkan.

4. *Assessment*
   Assessment atas penerapan tata kelola Bank dilakukan guna mengidentifikasi dan mengukur implementasi penerapan tata kelola Bank sehingga diperoleh gambaran praktek tata kelola terkini dan menindaklanjuti rekomendasi sebagai langkah perbaikan atas implementasi atas penerapan tata kelola Bank di masa depan. Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa *Assessment* atas penerapan tata kelola Bank telah dilaksanakan secara efektif.

   Assessment atas penerapan tata kelola Bank dilakukan melalui kegiatan *self*-assesment dalam rangka mengidentifikasi pelaksanaan tata kelola dengan melakukan pengukuran pelaksanaan dan penerapannya sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, yaitu dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

5. *Disclosure*
   Disclosure merupakan kompilasi laporan atas pelaksanaan atas penerapan tata kelola Bank selama periode satu tahun. Dalam hal pengungkapan, Direksi dan Dewan Komisaris telah memastikan bahwa isi Laporan Tahunan telah memuat seluruh informasi terkait dengan laporan pelaksanaan tata kelola Bank sesuai dengan standar pengungkapan informasi.

Penyusunan Laporan pelaksanaan tata kelola Bank yang sudah dilaporkan (untuk periode tahun 2016, 2015, 2014, 2013 dst) disusun sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 April 2006, sedangkan untuk Penyusunan Laporan pelaksanaan tata kelola Bank periode 2017 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 /POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

ensures and monitors the implementation of the Bank's GCG in accordance with the established strategy.

4. *Assessment*
   Assessment of the implementation of Bank's GCG is conducted to identify and measure the implementation of Bank GCG implementation so as to obtain an overview of current governance practices and follow up recommendations as a remedy for implementation of the future Bank GCG implementation. The Board of Directors and the Board of Commissioners ensure that the Assessment of the implementation of the Bank's GCG has been effectively implemented.

   Assessment of the implementation of Bank GCG is done through self-assessment activities in order to identify the implementation of governance by measuring the implementation and application according to the Circular of the Financial Services Authority, which is conducted periodically every 1 (one) year.

5. *Disclosure*
   Disclosure is a compilation of reports on the implementation of the Bank's GCG implementation over a one-year period. In the case of disclosure, the Board of Directors and the Board of Commissioners have ensured that the contents of the Annual Report contain all information related to the Bank's implementation report of governance in accordance with the disclosure standard.

Preparation of Report on the implementation of reported Bank's GCG (for the period of 2016, 2015, 2014, 2013 and so forth) shall be prepared in accordance with Bank Indonesia Regulation Number 8/4 / PBI / 2006 dated January 30, 2006 as amended by Bank Indonesia Regulation Number 8/14 / PBI / 2006 dated April 5, 2006, while for the Preparation of Bank Management's implementation report for the period of 2017 is prepared in accordance with the Decree of the Financial Services Authority Number 55 / POJK.03 / 2016 dated December 7, 2016 concerning the Implementation of GCG for Commercial and regulation of the Financial Services Authority Number 45 /POJK.03/2015 concerning the GCG Implementation in the Provision of Remuneration for Commercial Banks.

Penerapan Tata Kelola Bank Papua

Dalam penerapan tata kelola, Bank Papua memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola, serta proses pelaksanaan tata kelola yang memadai guna terwujudnya hasil tata kelola yang berkualitas yang akan terus-menerus ditingkatkan.

Implementation of Bank Papua GCG

In implementing the GCG, Bank Papua has a governance structure and infrastructure, as well as a process of implementing adequate governance for the realization of quality governance outcomes that will be continuously improved.

Struktur Tata Kelola

- Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi struktur Dewan Komisaris, Direksi dan komite - komite yang memadai dan sesuai kebutuhan dan peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan;
- Tugas pokok, tanggungjawab, dan fungsi organ-organ Bank memadai dan ditetapkan dalam Kebijakan, Pedoman dan Tata Tertib. Kebijakan, prosedur dan sistem informasi manajemen Bank Papua tersedia dan mendukung kegiatan operasional Bank;
- Pedoman Tata Kelola, Kerangka manajemen risiko, kecukupan pengendalian internal, fungsi kepatuhan dan fungsi audit internal yang memadai dengan penugasan audit ekstern yang sesuai persyaratan;
- Ketersediaan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait/penyediaan dana besar, benturan kepentingan dan aspek transparansi;
- Rencana strategis dan bisnis sejalan dengan visi dan misi Bank Papua.

Proses Tata Kelola

- Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggungjawab organ-organ Bank Papua memadai sehingga dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian
- Proses penggantian dan pengangkatan Komisaris, Direksi dan Komite sesuai ketentuan yang berlaku;
- Peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
- Ketersediaan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait/penyediaan dana besar, benturan kepentingan dan aspek transparansi;
- Rencana strategis dan bisnis sejalan dengan visi dan misi Bank Papua.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan melalui proses persetujuan kredit secara normal
- Manajemen risiko telah diterapkan dengan baik sehingga risiko-risiko yang mungkin timbul dapat dikelola;
- Pengungkapan informasi keuangan, non keuangan, produk Bank, pengaduan nasabah secara lengkap, akurat dan proporsional;
- Penyusunan rencana strategis dan bisnis dilakukan secara realistis, komprehensif dan terukur yang disetujui Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada pemegang saham

Hasil Tata kelola

- Kinerja Bank yang positif mencakup *rentabilitas*, efisiensi dan permodalan;
- Kegiatan Bank bebas dari intervensi pemilik dan pihak terkait lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- Pengungkapan kondisi keuangan dan non keuangan serta informasi penting lainnya yang didukung dengan website Bank yang informatif dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan;
- Kepatuhan dan pengelolaan risiko yang memadai serta tindak lanjut hasil audit sesuai komitmen;
- Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan dan memberi manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi Pemangku Kepentingan.

Sosialisasi Tata Kelola Bank

Untuk mewujudkan tata kelola Bank yang baik dan merata di seluruh elemen perusahaan, Bank Papua dengan memastikan Penerapan GCG kepada seluruh insan Bank Papua dengan cara melakukan sosialisasi tata kelola Bank yang menyeluruh. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Kampanye tata kelola yang baik melalui media internal Bank Papua secara berkala, poster, buku saku, *sharing session* dan media–media lain yang mudah diakses.
2. Penyediaan Aplikasi *Compliance Information System* (CIS) terdiri dari modul Kepatuhan Kantor Cabang dan modul Kepatuhan Divisi (Kantor Pusat). Modul Kepatuhan Kantor Cabang terdiri dari sub modul penilaian kepatuhan atas sejumlah aktivitas di unit kerja KC baik yang bersifat operasional dan non operasional.

Good Corporate Governance Socialization

To realize good and equitable Bank GCG in all elements of the company, Bank Papua by ensuring the implementation of GCG to all Bank Papua personnel by conducting a comprehensive socialization of Bank's GCG. This socialization is done in the following way:

1. *Good corporate governance campaign through Bank Papua internal media on a regular basis, posters, handbooks, sharing sessions and other easily accessible media.*
2. *Compliance Information System (CIS) Application Compliance consists of KC Compliance modules and Compliance Division module (Head Office). The Branh Office Compliance Module consists of a sub-regulator for compliance assessment of a number of activities in the KC work unit, both operational and non-operational.*

Fokus Penerapan Tata Kelola Bank Papua Tahun 2017

Focus on Bank Papua GCG's Implementation in 2017

Penerapan tata kelola Bank Papua pada tahun 2017 berfokus pada peningkatan dan penyempurnaan pelaksanaan tata kelola yang baik dengan mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan perusahaan. Fokus tata kelola Bank Papua di tahun 2017, antara lain :

1. Memastikan Penerapan GCG kepada seluruh insan Bank Papua;
2. Mengoptimalkan fungsi dan peran Staf Manajemen Risiko di Kantor Cabang;
3. Melakukan sosialisasi terhadap optimalisasi Penanaman Budaya *Awarness* (Budaya Peka) terhadap Risiko bagi seluruh Insan Bank Papua;
4. Implementasi *Risk Based Approach*;
5. Penyajian Pelaporan Manajemen Risiko berupa Tingkat Kesehatan Bank;
6. Memastikan Kepatuhan Bank terhadap Komitmen/ Janji dengan Bank Indonesia (BI) dan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagai bentuk komitmen dalam penerapan tata kelola Bank yang baik, Bank Papua telah memiliki struktur tata kelola perusahaan yang senantiasa disesuaikan dengan praktik-praktik yang lazim berlaku didunia perbankan.

The implementation of Bank Papua GCG in 2017 focuses on improvement and completion the implementation of good corporate governance by promoting ethics and integrity in corporate management. The focus of GCG of Bank Papua in 2017, among others:

1. *Ensuring the Implementation of GCG to all people of Bank Papua;*
2. *Optimizing the function and role of Risk Management Officer in Branch Offices;*
3. *To socialize the optimization of Awareness Culture Culture (Culture Sensitive) to Risk for all people of Bank Papua;*
4. *Implementation of Risk Based Approach;*
5. *Presentation of Risk Management Reporting in the form of Bank Soundness;*
6. *Ensure Bank Compliance with Commitments / Appointments with Bank Indonesia (BI) and / or Financial Services Authority (OJK).*

As a commitment to the implementation of good corporate governance, Bank Papua has a corporate governance structure that is constantly adapting to the prevailing practices in the banking world.

Penilaian Penerapan Tata Kelola Bank Papua

Assessment of the Bank Papua Governance's Implementation

Bank Papua senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan terbaik dalam penerapan tata kelola Bank mengacu kepada ketentuan otoritas yang berlaku bagi Bank dan yang sesuai dengan kebutuhan praktik di industri Perbankan, sehingga penerapan tata kelola yang baik di Bank Papua dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hasil penilaian atas penerapan tata kelola Bank yang dilakukan melalui *self assessment* menjadi masukan dalam memetakan dan meningkatkan praktik tata kelola yang baik di Bank Papua berdasarkan hasil rekomendasi yang diberikan.

Penilaian (*Self Assessment*) atas penerapan tata kelola Bank untuk periode tahun 2017 mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Papua untuk periode laporan *Self Assessment* tahun 2017 melakukan penilaian atas penerapan tata kelola Bank yang mencakup parameter/indikator penilaian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi ;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana pada pihak terkait (*related party*) dan debitur besar (*large exposure*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan;
11. Rencana Strategis Bank.
12. penyampaian laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku.

Untuk periode Desember 2017, Bank Papua telah melaksanakan *self assessment* atas penerapan tata kelola Bank dan berdasarkan hasil *self assessment* tersebut yang diukur dari 3 (tiga) aspek *Governance* (*Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome*), dapat disimpulkan bahwa manajemen Bank Papua telah melakukan penerapan tata kelola Bank secara umum **"BAIK"**. Bank Papua telah memenuhi ketiga aspek *governance* tersebut. Hal tersebut tercermin dalam hasil *governance outcome* dari masing-masing kriteria/indikator yang memberikan hasil yang

Bank Papua always adapts to the best developments in the implementation of the Bank's GCG refers to the regulatory provisions applicable to the Bank and that are in accordance with the needs of practice in the banking industry, so that the application of good corporate governance in Bank Papua from year to year has increased. The results of the assessment of the implementation of the Bank's GCG through self assessment is an input in mapping and improving good corporate governance practices in Bank Papua based on the recommendations made.

The Self Assessment of the implementation of Bank's GCG for the period of 2017 refers to the Regulations of the Financial Services Authority and OJK Circular on the Implementation of GCG for Commercial Banks.

Based on this, Bank Papua for the Self Assessment report period 2017 evaluates the implementation of Bank GCG, including the following indicators of valuation:

1. *Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners;*
2. *Implementation of the BOD's duties and responsibilities;*
3. *Completeness & performance of the Committee's duties;*
4. *Handling of conflict of interest;*
5. *Implementation of the compliance function;*
6. *Implementation of internal audit function;*
7. *Implementation of the external audit function;*
8. *Risk management function, including internal control system;*
9. *Provision of funds to related parties and large exposure;*
10. *Transparency of financial and non-financial conditions;*
11. *Bank's Strategic Plan.*
12. *The delivery of governance implementation reports at the end of every financial year.*

*For the period of December 2017, Bank Papua has conducted a self assessment on the implementation of Bank's GCG and based on the results of the self assessment as measured from 3 (three) aspects of Governance (Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome), it can be concluded that the management of Bank Papua has implemented the Bank's general governance "**GOOD**". Bank Papua has fulfilled all three aspects of governance. This is reflected in the results of the governance outcome of each criterion / indicator that gives sufficient results and affects the achievement*

memadai dan berpengaruh terhadap pencapaian hasil kinerja sesuai ekspektasi pemangku kepentingan. Kekuatan pelaksanaan atas penerapan tata kelola Bank Papua ada pada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh manajemen Bank serta pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Bank yang diatur di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum berikut lampirannya.

Untuk 11 (sebelas) kriteria/indikator pelaksanaan atas penerapan tata kelola, Bank Papua telah melakukan penilaian terhadap 11 (sebelas) kriteria/indikator tersebut sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum berikut lampirannya.

of performance results according to stakeholder expectations. The strength of implementation of the implementation of governance of Bank Papua is in the policies generated by the management of the Bank and its implementation in accordance with the GCG principles as set forth in Circular Letter of the Financial Services Authority Number 13 /SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Commercial Bank and its attachment.

For 11 (eleven) implementation criteria / indicators for the implementation of GCG, Bank Papua has conducted an assessment of the 11 (eleven) criteria / indicators in accordance with the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 13 /SEOJK.03/2017 concerning Implementation GCG for Commercial Bank and its attachment.

LAPORAN SELF ASSESMENT PELAKSANAAN GCG PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA POSISI 31 DESEMBER 2017
SELF ASSESMENT REPORT IMPLEMENTATION OF GCG PT. DEVELOPMENT BANK PAPUA POSITION 31 DECEMBER 2017

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI	*RATED ASPECT*
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggungjawab Dewan Komisaris	3	10%	0,30	*Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners*
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggungjawab Direksi	2	20%	0,47	*Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors*
3	Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite	3	10%	0,27	*Completeness and Implementation of Committee Duties*
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	10%	0,20	*Handling Conflict of Interest*
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	3	5%	0,15	*Implementation of Bank Compliance Function*
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	3	5%	0,13	*Implementation of Internal Audit Function*
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	3	5%	0,15	*Implementation of External Audit Function*
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3	7.5%	0,23	*Implementation of Risk Management Function Including Internal Control System*
9	Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar	2	7.5%	0,18	*Prudential Principles In Provision of Funds To Related Parties And Provision of Large Exposure*
10	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal	2	15%	0,35	*Transparency of Financial and Non Financial Condition, GCG Implementation Report and Internal Reporting*
11	Rencana Strategis Bank	3	5%	0,13	*The Bank's Strategic Plan*
	NILAI KOMPOSIT | PREDIKAT			**2,55 | 3**	*COMPOSITE SCORE | PREDICATE*

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dan penerapan prinsip Tata Kelola Bank umum, maka secara umum kelemahan tersebut tidak berdampak signifikan namun memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank. Karena kelemahan-kelemahan tersebut akan berdampak terhadap peran aktif pengawasan bank dan Rencana Bisnis Bank untuk semester II tahun 2017.

*Reflecting Management Bank has implemented a generally **good** Governance implementation. This is reflected in the adequate fulfillment of GCG principles. If there are weaknesses and the implementation of Commercial Bank principles, then the general weaknesses do not have a significant impact but require considerable attention from bank management. Because these weaknesses will have an impact on the active role of bank supervision and Bank Business Plan for the second half of 2017.*

A. *Governance Structure*

No	ASPEK YANG DINILAI / *RATED ASPECT*	ASPEK POSISITIF / *POSITIVE ASPECTS*	ASPEK NEGATIF / *NEGATIVE ASPECTS*	NILAI / *VALUE*
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggungjawab Dewan Komisaris *Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners*	1. Seluruh Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia (dibuktikan dengan dokumen KTP masing-masing Anggota Dewan Komisaris) • Pdt.Lipiyus Biniluk.S.Th.M.Th No: KTP 9103010808630005 alamat : Komp Stakin Sentani RT 001 RW 004 Kelurahan Hinekombe Sentani Kabupaten Jayapura • drh. Constant Karma No KTP : 9171012403540002 alamat : Jl. Nirwana RT 001 RW 004 Angkasapura Jayapura) *1. All Members of the Board of Commissioners are domiciled in Indonesia (as evidenced by the ID document of each member of the Board of Commissioners)* • *Pdt.Lipiyus Biniluk.S.Th.M.Th No: KTP 9103010808630005 Address: Komp Stakin Sentani RT 001 RW 004 Hinekombe Sentani Sub-district of Jayapura Regency* • *drh. Constant Karma No KTP: 9171012403540002 Address: Jl. Nirwana RT 001 RW 004 Angkasapura Jayapura)*	Sampai Bulan Desember 2017 Bank tidak memiliki Komisaris Independen sehingga tidak sesuai dengan POJK No 55/POJK.03/2016 tanggal 17 Desember 2016 tentang tata kelola Bank Umum. *Until December 2017, the Bank does not have an Independent Commissioner, so it is not in accordance with the POJK No. 55 / POJK.03 / 2016 dated December 17, 2016 concerning the governance of Commercial Banks.*	*2*
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggungjawab Direksi *Duties and Responsibilities of BOD*	1. Direksi Telah memiliki kebijakan dan prosedur yang cukup memadai bagi kegiatan usaha bank. 2. Direksi telah membentuk Divisi Pembinaan Cabang & Divisi Risiko Bisnis. 3. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. *1. Board of Directors having adequate policies and procedures for bank operations.* *2. Board of Directors has established a Division of Branch Development & Business Risk Division.* *3. Members of the Board of Directors have the willingness and ability to conduct continuous learning in order to increase knowledge about banking and the latest developments related to the field of finance / other that support the implementation of duties and responsibilities.*	-	*1*

No	ASPEK YANG DINILAI / *RATED ASPECT*	**ASPEK POSISITIF /** *POSITIVE ASPECTS*	**ASPEK NEGATIF /** *NEGATIVE ASPECTS*	NILAI / *VALUE*
3	Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite *Completeness and Implementation Committee's tasks*	1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki pengetahuan sistem Remunerasi dan/atau nominasi dan Pejabat Eksekutif anggota komite mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan nominasi serta telah mengikuti pelatihan terkait remunerasi. 2. Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik dengan telah lulus fit and proper test dan bukti kelulusan di dokumentasikan cukup baik. *1. Remuneration and Nomination Committee members have knowledge of Remuneration and / or nomination system and Executive Officers of the committee members know the terms of remuneration and nomination system and have followed remuneration related training.* *2. Members of the Audit Committee have good integrity, morals and morals by having passed the fit and proper tests and the evidence of graduation is documented fairly well.*	1. Sesuai SK Direksi No 29/DIR-BPD/VI/2017 Tentang Pengangkatan Komite Dewan Komisaris, telah membentuk komite untuk membantu Komisaris dalam melakukan pengawasan namun dalam hal merangkap jabatan dirangkap oleh 1 komisaris non independen pada Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi 2. Jumlah Anggota Komite Dewan Komisaris tidak sesuai dengan PBI tentang GCG yaitu Komite Dewan Komisaris harus di Ketuai oleh Komisaris Independen sehingga sampai dengan Pelaporan Tata Kelola Bank Semester II tahun 2017, belum ada pemilihan Komisaris Indepeden. *1. In accordance with the Decree of the Board of Directors No. 29 / DIR-BPD / VI / 2017 On Appointment of the Committee of the Board of Commissioners, has established a committee to assist the Board of Commissioners in conducting oversight, but in the case of concurrent positions held with 1 non-independent commissioner on the Audit Committee, Risk Oversight Committee; Remuneration & Nomination Committee* *2. The number of members of the Board of Commissioners Committee is inconsistent with the PBI on GCG, which is the Board of Commissioners Committee to be Charged by Independent Commissioners so that by the Reporting of Bank Governance of Semester II of 2017, there has been no election of Commissioner of Indepeden.*	*1*
4	Penanganan Benturan Kepentingan *Handling of Conflict of Interest*	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan Bank Papua dengan SK Direksi No 60/DIR-BPD/IX/2008 dan BPP Benturan Kepentingan dengan SK Direksi No. 101.A/DIR-BPD/XI/2013 tentang Pedoman Benturan kepentingan *The Bank already has a conflict of interest policy and procedure that binds every member of Bank Indonesia's management and employees to SK Direksi No 60 / DIR-BPD / IX / 2008 and BPP Conflict of Interest with SK Board of Directors No. 101.A / DIR-BPD / XI / 2013 concerning the Guidance on Conflict of Interest Guidelines*	-	*2*
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank *Implementation of Bank Compliance Function*	Sesuai struktur Bank Papua tahun 2017 Divisi Kepatuhan Independen terhadap Satuan Kerja Operasional dimana secara struktur berada dibawah Direktur Kepatuhan dan lansung melaporkan semua kegiatan perusahaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. *In accordance with the structure of Bank Papua in 2017 the Independent Compliance Division of the Operational Work Unit, which is structurally under the Compliance Director and directly reports all of the Company's activities to the Board of Directors and Board of Commissioners.*	-	*2*

No	ASPEK YANG DINILAI / *RATED ASPECT*	**ASPEK POSISITIF** / *POSITIVE ASPECTS*	**ASPEK NEGATIF** / *NEGATIVE ASPECTS*	NILAI / *VALUE*
6	Penerapan Fungsi Audit Intern *Implementation of Internal Audit Function*	1. Struktur organisasi, SKAI sudah berada dibawah supervisi Direktur Utama berdasarkan surat keputusan Direksi nomor 68/DIR-BPD/IX/2015 2. Divisi SKAI sudah independen terhadap satuan kerja operasional berdasarkan surat keputusan Direksi nomor 68/DIR-BPD/IX/2015 *1. The organizational structure, the SKAI is under the supervision of the President Director based on the decision letter of the Board of Directors number 68 / DIR-BPD / IX / 2015* *2. Division of Internal Audit Unit is independent of the operational work unit based on the Directors Decree number 68 / DIR-BPD / IX / 2015*	Bank telah menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup berkualitas pada SKAI dengan Jumlah 20 orang Auditor sedangkan yang memiliki sertifikasi QIA belum semua Auditor *The Bank has been providing Human Resources (HR) of sufficient quality on SKAI with Number 20 Auditor while having certifications QIA not all Auditor.*	*2*
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern *Implementation of External Audit Function*	Dewan Komisaris telah menunjuk KAP sebagai Auditor Eksternal Independen untuk Tahun Penilaian dan memberikan jasa Audit kepada Bank Papua. *The Board of Commissioners has appointed KAP as Independent External Auditor for the Year of Assessment and provides Audit services to Bank Papua.*	---	1
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern *Implementation of Risk Management Including Internal Control System*	Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan dan telah diformalkan dan didukung dengan dokumentasi yang baik. Namun masih sangat minim dalam hal kecukupan pemenuhan kuantitas SDM pada setiap jenjang organisasi yang ada. *The Bank already has an adequate organizational structure to support the application of good Risk Management and Internal Control including SKAI, SKMR and Risk Management Committee and Compliance Unit and has been formalized and supported with good documentation. But still very minimal in terms of adequacy of the fulfillment of the quantity of human resources at each level of existing organizations.*	Bank telah memiliki Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko yang memadai namun belum efektif diterapkan *The Bank already has adequate, but not yet effective, Policies, Procedures and Stipulation of Risk Limit*	*2*

No	ASPEK YANG DINILAI / *RATED ASPECT*	ASPEK POSISITIF / *POSITIVE ASPECTS*	ASPEK NEGATIF / *NEGATIVE ASPECTS*	NILAI / *VALUE*
9	Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar *Prudential Principle in the Provision of Funds To Related Parties and Provision of Large Exposure*	1. Bank Telah memiliki Komite Kredit dan Divisi Kredit untuk memantau dan untuk melaksanakan operasional Pemberian kredit. 2. Bank Telah Memiliki Kebijakan Penyediaan Dana Pihak Ketiga. *1. Already have a bank Credit Committee and the Loan Division to monitor and to implement the operational extension of loan.* *2. Bank Has Had Provision Policy Third Party Funds.*	1. Masih terdapatnya pelanggaran atas aturan internal bank terhadap peraturan PBI/OJK 2. Penempatan karyawan dalam jabatan tidak sesuai dengan kompetensi yang diberikan. *1. There is still a violation of the bank's internal rules against PBI / OJK regulations* *2. Placement of employees in positions not in accordance with the competencies provided.*	2
10	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal *Transparency of Financial and Non Financial, GCG Implementation and Internal Reporting*	1. Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.03/2016, pasal 66 huruf b yaitu : Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat berkedudukan di kantor pusat Bank. 2. Terdapat sistem informasi yang handal didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dan IT security sistem yang memadai. *1. The Bank has prepared a GCG Implementation Report at the end of each book year with coverage in accordance with the prevailing provisions and submits a report on the implementation of the governance to the Financial Services Authority Number 55 / POJK.03 / 2016, article 66 letter b, namely: Financial Services or the Office of the Local Financial Services Authority in accordance with the territory of the head office of the Bank.* *2. There is a reliable information system supported by competent human resources and adequate IT security systems.*	1. Belum ada data yang menunjukan bahwa bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. 2. Belum tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu sesuai kebutuhan dan didukung dengan dokumentasi yang baik. *1. There are no data showing that the bank already has policies and procedures concerning the procedure of transparency of financial and non financial condition yet.* *2. There are not complete, accurate, and timely internal reporting as required and supported by good documentation yet.*	*2*
11	Rencana Strategis Bank *Strategic Plan*	1. Bank Telah memiliki *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank 2. *Corporate Plan* Telah di setujui oleh Direksi 3. Rencana Bisnis Bank telah di dukung oleh Modal yang cukup *1. Bank Has Bank Business Plan and Plan.* *2. Corporate Plan Approved by the Board of Directors.* *3. Business Plan The Bank has been supported by sufficient Capital.*	---	2

B. *Governance Process*

No	ASPEK YANG DINILAI / *RATED ASPECT*	ASPEK POSISITIF / *POSITIVE ASPECTS*	ASPEK NEGATIF / *NEGATIVE ASPECTS*	NILAI / *VALUE*
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggungjawab Dewan Komisaris *Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners*	1. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk membantu Pegawasan Dewan Komisaris terhadap Bank 2. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank namun hanya terbatas pada pemberian nasihat dan pemberian keputusan kredit kepada Pihak terkait. *1. The Board of Commissioners has established an Audit Committee, Risk Oversight Committee and Remuneration and Nomination Committee to assist Board of Commissioners' Supervision of Banks* *2. The BoC is not involved in the decision making of Bank operations, but is limited to providing advice and loan decisions to the Parties concerned.*	1. Dewan Komisaris telah cukup melaksanakan pengawasan terkait pengawasan tugas dan tanggungjawab Direksi diantaranya pemantauan terhadap NPL dan CKPN Kredit namun belum secara efektif memberikan masukan kepada Direksi terhadap Operasional Bank yang telah dituangkan dalam Notulen Rapat Gabungan dan hasil Notulen belum di dokumentasikan dengan baik. 2. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan agenda Rapat namun belum secara efektif membahas permasalahan Bank dan hasil Rapat belum di Dokumentasikan dengan baik dan belum secara Transparan untuk menggungkapkan hasil yang telah di putus. *1. The Board of Commissioners has adequately conducted supervision related to the supervision of the duties and responsibilities of the Board of Directors, such as monitoring NPL and Loan CKPN but has not effectively provided input to the Banking Operations Directors which has been stated in the Minutes of the Joint Meeting and the Minutes results have not been properly documented.* *2. Implementation of the Board of Commissioners Meeting has been conducted in accordance with the agenda of the Meeting but has not effectively discussed the Bank's problems and the Meeting has not been Documented properly and not Transparently to disclose the outcome.*	*2*
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggungjawab Direksi *Duties and Responsibilities of Directors*	Direksi telah menyusun Rencana Jangka Panjang dan Rencana Bisnis Bank secara Realistis dan komprehensif dengan memperhatikan unsur kehati-hatian. *The Board of Directors has drawn up the Bank's Long Term Plan and Business Plan Realistically and comprehensively with due regard to the element of prudence.*	1. Pelaksanaan Pengawasan yang di lakukan Direksi masih belum efektif oleh jaringan organisasi dimana masih terdapat fraud dan pelanggaran yang di lakukan oleh Pegawai dan belum tercapainya target-target bisnis Bank. 2. Bank sampai dengan akhir periode laporan, Bank masih berada dalam status BDPI. *1. Implementation of supervision conducted by the Board of Directors is still not effected by the network of organizations where there are still fraud and violations committed by Employees and not reaching the Bank's business targets.* *2. Banks until the end of the reporting period, the Bank is still in BDPI status.*	3

No	ASPEK YANG DINILAI / *RATED ASPECT*	**ASPEK POSISITIF** / *POSITIVE ASPECTS*	**ASPEK NEGATIF** / *NEGATIVE ASPECTS*	NILAI / *VALUE*
3	Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite *Completeness and Implementation Committee's tasks*	Dewan Komisaris telah memberikan Rekomendasi penunjukan KAP guna melakukan pemeriksaan keuangan Bank Papua tahun buku 2016 dan untuk periode laporan menelaah hasil keputusan RUPS untuk penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan tahun buku 2017. *The Board of Commissioners has provided the recommendation for appointment of KAP to conduct the financial audit of Bank Papua for book year 2016 and for the reporting period to review the result of the GMS decision for the appointment of KAP for Financial Report Audit 2017.*	Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun sistem prosedur penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi namun belum efektif berjalan dapat dilihat dari hasil RUPS, dalam pencalonan dan pengangkatan anggota Direksi , maupun anggota Dewan Komisaris dan sampai dengan Desember 2017 Komposisi Dewan Komisaris berjumlah 2 orang dan tidak sesuai dengan Kebijakan tentang GCG bahwa jumlah Anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang. *The Remuneration and Nomination Committee has established a system of replacement procedures for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors but has not been effective in running as can be seen from the Shareholders General Meeting, in nominating and appointing members of the Board of Directors, as well as members of the Board of Commissioners and up to December 2017 Composition of the Board of Commissioners is 2. The policy on GCG that the number of members of the Board of Commissioners is at least 3 persons.*	*2*
4	Penanganan Benturan Kepentingan *Handling of Conflict of Interest*	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi , dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank. *In the event of a conflict of interest, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and the Executive Officer shall not take any action that may prejudice or reduce the bank's profits.*	-	*3*
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank *Implementation of Bank Compliance Function*	Direksi telah menyetujui kebijakan kepatuhan bank dengan membuat buku Kode Etik Pengurus dan Pegawai (*Code Of Conduct*) yang sudah dibagikan kepada seluruh Insan Bank Papua. *The Board of Directors has approved the Bank's compliance policy by creating a Code of Conduct which has been distributed to all people of Bank Papua.*	-	*3*
6	Penerapan Fungsi Audit Intern *Implementation of Internal Audit Function*	SKAI telah melakukan Audit Internal pada setiap unit/kegiatan operasional Bank. *SKAI has conducted an Internal Audit on every unit / operational activities of the Bank.*	Dari jumlah Audit yang ada pada SKAI belum memenuhi syarat/ketentuan yang diperlukan sebagai Auditor. *Of the number of Audits in the SKAI have not met the requirements / conditions required as an Auditor.*	*3*

No	ASPEK YANG DINILAI / *RATED ASPECT*	ASPEK POSISITIF / *POSITIVE ASPECTS*	ASPEK NEGATIF / *NEGATIVE ASPECTS*	NILAI / *VALUE*
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern *Implementation of External Audit Function*	Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan professional, telah sesuai ketentuan dan cukup didukung dengan dokumentasi yang baik namun belum menyerahkan dokumen pendukung terkait PKS dan profil KAP. *The Public Accountant has conducted the audit independently and professionally, is in accordance with the provisions and is supported by good documentation, but has not submitted supporting documents related to the MOU and KAP profile.*	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris namun belum didukung dengan dokumen dari KAP. *The appointment of a Public Accountant and Public Accountant Firm by obtaining approval from the Shareholders General Meeting based on the recommendation of the Audit Committee through the Board of Commissioners but not yet supported by documents from KAP.*	2
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern *Implementation of Risk Management Including Internal Control System*	Dewan Komisaris memiliki tugas & tanggungjawab yang jelas, diantaranya : menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala terdapat dalam Laporan Dewan Komisaris terhadap OJK tentang Evaluasi. *The Board of Commissioners has clear duties and responsibilities, including: approving Risk Management policy, including Risk Management strategy and framework set in accordance with risk appetite and risk tolerance, evaluating Risk Management policy and Risk Management Strategy, evaluate the accountability of the Board of Directors and provide direction for improvement of the implementation of Risk Management policy periodically contained in the Board of Commissioners' Report on OJK's Evaluation.*	Bank belum sepenuhnya dilakukan sehingga Bank perlu terus meningkatkan penerapan system pengendalian intern yang menyeluruh mengingat hingga saat ini masih ada temuan berulang, pelanggaran & fraud. *The Bank has not been fully implemented so that the Bank needs to continuously improve the implementation of a comprehensive internal control system since there are still recurring findings, violations & fraud.*	*3*
9	Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar *Prudential Principle in the Provision of Funds To Related Parties and Large Exposure Provision.*	Pemberian Penyediaan Dana Pihak ketiga telah sesuai tahapan operasional yang ada. *Provision of Provision of Funds Third parties are in line with the existing operational stages.*	Pemberian Kredit Belum Memperhatikan Rekomendasi-rekomendasi dari bagian MRI dan Kepatuhan. *Lending Not Yet Taking Recommendations from MRI and Compliance division.*	*2*

No	ASPEK YANG DINILAI / *RATED ASPECT*	ASPEK POSISITIF / *POSITIVE ASPECTS*	ASPEK NEGATIF / *NEGATIVE ASPECTS*	NILAI / *VALUE*
10	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal *Transparency of Financial and Non Financial, GCG Implementation and Internal Reporting*	Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders* sesuai dengan ketentuan. *The Bank has transparent financial and non-financial conditions to stakeholders in accordance with the provisions.*	1. Belum terdapat SOP terkait tata cara transparansi keuangan dan non-keuangan yang dilaksanakan tersebut. 2. Belum terdapat dokumentasi yang mendukung transparansi yang telah dilakukan oleh pihak bank *1. There are no SOPs related to the financial and non-financial transparency procedures implemented.* *2. There is no documentation that supports transparency that has been done by the bank.*	*2*
11	Rencana Strategis Bank *Strategic Plan*	Bank telah menyusun rencana realitas, komprehensif, dan terukur. Hal ini dapat terlihat dari laporan-laporan yang telah disampaikan Direksi kepada Pemegang Saham maupun pihak Regulator, serta penerapan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal secara optimal dalam pengambilan kebijakan dimana hal ini bisa dilihat pada : • Rencana Bisnis Bank telah disusun secara baik berdasarkan pencapaian bank secara realistis atas dasar keputusan/ koordinasi seluruh jajaran unit kerja sampai dengan tingkat Direksi maupun Komisaris. • Penyusunan Rencana Bisnis Bank telah memperhitungkan keadaan ekonomi secara global dan arahan kebijakan pemerintah serta kondisi obyektif daerah. *The Bank has developed a reality plan, comprehensive and measurable. This can be seen from reports submitted by the Board of Directors to Shareholders or Regulators, as well as prudent and responsive application of prudential principles and responses to internal and external changes in policy making which can be seen in:* • *The Bank's Business Plan has been well-structured based on realistic bank achievement based on the decision / coordination of the whole range of work units up to the level of Directors and Commissioners.* • *Preparation of the bank's business plan has taken into account the state of the global economy and the direction of government policy as well as the objective conditions of the region.*	1. Kurangnya supervisi dan informasi yang berjenjang dalam pengawasan pencapaian Rencana Bisnis Bank. 2. Belum optimalnya penanganan penyelesaian kredit bermasalah yang menimbulkan tingginya Ratio NPL. *1. Lack of supervision and tiered information in supervision of Bank Business Plan achievement.* *2. Non-optimal handling of non-performing loan settlement which led to high NPL Ratio.*	*3*

C. *Governance Outcome*

No	ASPEK YANG DINILAI / *RATED ASPECT*	**ASPEK POSISITIF /** *POSITIVE ASPECTS*	**ASPEK NEGATIF /** *NEGATIVE ASPECTS*	NILAI / *VALUE*
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggungjawab Dewan Komisaris. *Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.*	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris secara Independen dan tidak ada Intervensi dari pemilik. *Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners are independent and there is no intervention from the owners.*	Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris namun belum di dukung dengan baik sehingga pelaksanaan penilaian dilakukan tidak berdasarkan Notulen hasil Rapat Dewan Komisaris. *Implementation of the Board of Commissioners 'Meeting has been set forth in the Board of Commissioners' Meeting and has not been properly supported so that the implementation of the assessment is conducted not based on the Minutes from the Meeting of the Board of Commissioners.*	*1*
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggungjawab Direksi *Duties and Responsibilities of BOD.*	1. Direksi telah mempertanggungjawabkan setiap Pelaksanaan Kegiatan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. 2. Seluruh tanggungjawab pelaporan bank ke pihak internal dan eksternal telah di sampaikan oleh Direksi *1. The Board of Directors has been accountable for the Implementation of the BoC and Shareholders.* *2. The entire responsibility of bank reporting internally and externally has been conveyed by the Board of Directors*	1. Direksi masih belum mencapai target yang telah di tentukan dan disetujui oleh *stakeholder*. 2. Direksi masih minim dalam pengawasan di dalam monitoring tindaklanjut atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab di satuan pelaksanaan kegiatan Operasional perusahaan *1. The Board of Directors has yet to reach the target that has been set is approved by the stakeholders.* *2. The BOD still minimal oversight in monitoring follow up execution of tasks and responsibilities in the unified implementation of the Operational Companies*	*3*
3	Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite *Completeness and Implementation Committee's tasks*	1. Rapat telah dilaksanakan sesuai tugas dan tanggungjawab yang diatur dalam Pedoman Kerja masing-masing Komite Dewan Komisaris. 2. Hasil Pengawasan Komite telah berjalan cukup efektif dan telah memberikan Rekomendasi kepada Direksi melalui Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi . *1. The meetings have been conducted in accordance with the duties and responsibilities set forth in the respective Working Guidelines of the Committees of the Board of Commissioners.* *2. The Committee's Oversight Outcome has been quite effective and has provided Recommendation to the Board of Directors through the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors.*	Hasil rapat yang telah dilaksanakan belum didokumentasikan dengan baik sehingga belum transparansi. *The results of meetings that have been held have not been properly documented so that they are not transparent.*	*2*

No	ASPEK YANG DINILAI / *RATED ASPECT*	**ASPEK POSISITIF /** *POSITIVE ASPECTS*	**ASPEK NEGATIF /** *NEGATIVE ASPECTS*	NILAI / *VALUE*
4	Penanganan Benturan Kepentingan. *Handling of Conflict of Interest.*	Untuk periode Laporan Tata Kelola Semester II tahun 2017 tidak ditemukan Benturan Kepentingan terhadap kebijakan yang telah diputuskan. *For the reporting period of Governance of Semester II of 2017, there is no Conflict of Interest to the policy that has been decided.*	1. Dalam hal penilaian belum dinilai secara jelas dari operasional terkait benturan kepentingan. 2. Belum adanya sosialisasi yang berkelanjutan terkait penilaian benturan kepentingan dari Manajemen kepada Karyawan Bank Papua *1. In the event that the appraisal has not been clearly assessed from the operations regarding the conflict of interest.* *2. The absence of continuous socialization related to the assessment of conflict of interest from Management for Employees of Bank Papua*	2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank. *Implementation of Bank Compliance Function.*	Bank telah melakukan Budaya Kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan operasional Bank dan telah menyelesaikan hasil temuan kepada regulator. *The Bank has conducted a Compliance Culture in decision making and operational activities of the Bank and has completed the findings to the regulator.*	1. Berdasarkan data, untuk hasil temuan Laporan SKAF sebanyak 14 terdiri dari : • Pelanggaran terkait kredit : 3 temuan • Penyalahgunaan Dana Nasabah : 6 temuan • Pelanggaran SOP : 4 temuan • Penggelapan : 1 temuan 2. Sanksi Pegawai Periode Semester II Tahun 2017 berjumlah 31 pelanggaran, terdiri dari : • Pelanggaran terkait kredit : 3 pelanggaran. • Penyalahgunaan Dana Nasabah : 2 pelanggaran. • Pelanggaran SOP : 14 pelanggaran. • Penggelapan : 2 pelanggaran. • Indisipliner : 10 pelanggaran. *1. Based on the data, for the findings of 14 SKAF Reports consist of:* • *Loan related infringement : 3 findings* • *Customer Fund Abuse: 6 findings* • *Breach of SOP: 4 findings* • *Embezzlement: 1 findings* *2. Employee Sanctions for the Period Semester II of 2017 amounted to 31 violations, consisting of:* • *Loan-related infringement: 3 violations.* • *Customer Fund Abuse: 2 violations.* • *Breach of SOP: 14 violations.* • *Embezzlement: 2 violations.* • *Indiscipline: 10 violations.*	*2*
6	Penerapan Fungsi Audit Intern *Implementation of Internal Audit Function*	SKAI telah melaksanakan Audit Umum dan Khusus cukup memadai dan Independen. *The Internal Audit Unit (SKAI) has conducted the General and Special Audit adequately and independently.*	Dari hasil Audit masih terdapat temuan yang sama (temuan yang berulang) *From the audit results there are still the same findings (recurring findings)*	*2*

No	ASPEK YANG DINILAI / *RATED ASPECT*	**ASPEK POSISITIF /** *POSITIVE ASPECTS*	**ASPEK NEGATIF /** *NEGATIVE ASPECTS*	NILAI / *VALUE*
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern *Implementation of External Audit Function*	1. KAP telah menggambarkan Keadaan Permasalahan yang terjadi berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan menyampaikan temuan melalui Rapat Direksi dengan Notulen Rapat No 1/RG-DK-BPD/2017 tanggal 13 Maret 2017 2. Auditor telah memenuhi aspek-aspek yang dipersyaratkan dan bertindak obyektif dalam melakukan audit. *1. KAP has described the Problem Situation that occurred based on the results of the audit conducted by submitting the findings through the Board of Directors Meeting with Minutes of Meeting No. 1 / RG-DK-BPD / 2017 dated March 13, 2017* *2. The auditor has fulfilled the required and objective aspects of the audit.*	---	2
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern *Implementation of Risk Management Including Internal Control System*	Dewan komisaris memiliki tugas dan tanggungjawab yang jelas dan ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*), mengevaluasi kebijakan manajemen Risiko dan strategi manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen Risiko secara berkala terdapat dalam laporan Dewan Komisaris terhadap OJK tentang evaluasi. *The Board of Commissioners has clear duties and responsibilities set out in accordance with risk appetite and risk tolerance, evaluates risk management policies and risk management strategies, evaluates the accountability of the Board of Directors and provides guidance on improvements in the implementation of risk management policies periodically contained in the Board of Commissioners' report on OJK on evaluation.*	Bank belum sepenuhnya menerapkan manajemen Risiko terhadap risiko kepatuhan secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Mengingat hingga saat ini masih ada temuan berulang, pelanggaran, fraud. *The Bank has not fully implemented risk management on compliance risk effectively, which aligns with business policy objectives, size and complexity of business and bank capability. Given that there are still recurring findings, violations, fraud.*	*3*
9	Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar. *Prudential Principle in the Provision of Funds To Related Parties and Provision of Large Exposure*	Laporan telah dilaporkan kepada pihak regulator secara berkala. *Reports have been regularly reported to the regulatory authorities.*	Bank belum sepenuhnya menekan kualitas kredit yang menyebabkan tingginya CKPN kredit bank. *The Bank has not fully suppressed the loan quality which caused the high CKPN of bank loan.*	*2*

No	ASPEK YANG DINILAI / *RATED ASPECT*	**ASPEK POSISITIF /** *POSITIVE ASPECTS*	**ASPEK NEGATIF /** *NEGATIF ASPECTS*	NILAI / *VALUE*
10	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal *Transparency of Financial and Non Financial, GCG Implementation and Internal Reporting.*	1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders* sesuai dengan ketentuan. 2. Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada *homepage* Bank. 1. *The Bank has transparent financial and non-financial conditions to the stakeholders in accordance with the provisions.* 2. *Transparency of reports has been conducted in a timely manner with coverage as provided in the Bank's home page.*	Dokumentasi setiap transparansi belum dilaksanakan *Documentation of any transparency has not been implemented.*	2
11	Rencana Strategis Bank *Strategic Plan.*	Terdapat pencapaian permodalan yang melebihi standar minimum PBI untuk permodalan. *There is an achievement of capital that exceeds the minimum standard PBI for capital.*	1. Rencana Bisnis Bank belum menggambarkan keadaan dan kondisi bank sebenarnya sehingga tidak mencerminkan pertumbuhan bank secara berkesinambungan. 2. Rencana Bisnis Bank belum memberikan manfaat secara ekonomis untuk *stakeholder* dikarenakan mencapai Rencana Bisnis Bank yang minimal 1. *The bank's business plan has not yet described the actual condition and condition of the bank so that it does not reflect the bank's continuous growth.* 2. *The bank's business plan has not provided economic benefits to stakeholders due to achieving a minimal bank business plan.*	*3*

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK PAPUA

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Papua mencakup seluruh aspek pelaksanaan tata kelola di Bank Papua yang disusun dengan mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, ASEAN GCG *Scorecard*, dan *best practices* pelaksanaan tata kelola yang berlaku secara universal. Penerbitan laporan pelaksanaan tata kelola Bank Papua merupakan bagian dari tanggungjawab Bank Papua terhadap pelaksanaan prinsip transparansi kepada pemangku kepentingan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Bank Papua merupakan Badan Usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kota dan Kabupaten setanah Papua serta KSU Bank Papua Berdikari, dimana kepemilikan saham terbesar dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua. Setiap pemegang saham mempunyai hak yang sama untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, mengajukan usul pencalonan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, menerima deviden serta menerima sisa kekayaan hasil likuidasi dengan memperhatikan jenis saham yang dimilikinya.

Sampai dengan akhir Desember 2017 Pemerintah Provinsi Papua memiliki 77.721 Lembar saham, dengan kepemilikan sahamnya sebesar 19,40 %. Secara lebih rinci Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali dilihat pada bagian Komposisi Pemegang Saham pada Laporan Tahunan ini.

BANK PAPUA GCG IMPLEMENTATION REPORT

The Report on the Implementation of Bank Papua GCG covers all aspects of the implementation of governance at Bank Papua, drawn up in accordance with the provisions of the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, ASEAN GCG Scorecard, and best practices of universally applicable governance. The issuance of the report on the implementation of governance of Bank Papua is part of the responsibility of Bank Papua towards the implementation of the principle of transparency to stakeholders and comply with the prevailing laws and regulations.

INFORMATION ABOUT THE MAJOR SHAREHOLDERS AND CONTROLS

Bank Papua is a Business Entity owned by the Government of Papua Province, Provincial Government of West Papua, Municipal and Regency Government of Papua and KSU Bank of Papua Berdikari, where the largest share ownership is owned by the Government of Papua Province. Each shareholder has the same right to vote in the General Meeting of Shareholders, to propose the nomination of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, to receive dividends and to receive residual proceeds of the proceeds of liquidation with due regard to the type of shares held.

Until the end of December 2017 the Provincial Government of Papua has 77,721 shares, with ownership of 20.37%. More details of Major Shareholder and Controller Information are presented in the Shareholders' Composition section of this Annual Report

Struktur Tata Kelola Bank Papua

Bank Papua GCG Structure

Struktur dan mekanisme tata kelola di Bank Papua mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, *benchmark* di peers group yang memiliki reputasi bagus, serta praktik yang berlangsung di perusahaan. Struktur tata kelola Bank Papua sebagai Perseroan Terbatas mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terdiri dari tiga organ, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum pengambilan keputusan bagi pemegang saham perseroan;
2. Dewan Komisaris sebagai Pengawas Perseroan;
3. Direksi sebagai Pengurus Perseroan;

yang posisinya sejajar dan memiliki fungsi saling *check and balances*. Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, masing-masing komite Dewan Komisaris bekerja sesuai dengan ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris. Sedangkan Direksi terutama Direktur Kepatuhan dibantu oleh jajaran manajemen bank yang bertugas untuk mengelola, mengendalikan, mengawal, dan bertanggungjawab atas implementasi penerapan tata kelola Bank yang dibantu oleh Komite di bawah Dewan Komisaris, Komite di bawah Direksi , Sekretaris Perusahaan, dan Divisi-Divisi yang bersentuhan dengan tata kelola Bank.

The governance structure and mechanism at Bank Papua refers to the prevailing laws and regulations, benchmarks in reputable peers of groups, and practices in the company. The governance structure of Bank Papua as a Limited Liability Company refers to Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company (UUPT) consisting of three organs, namely:

1. *Shareholders General Meeting (ESGM) as a forum for decision making for shareholders of the company;*
2. *Board of Commissioners as Company's Supervisor;*
3. *Board of Directors as Company Board;*

whose position is parallel and has a mutual check and balances function. The Board of Commissioners has established committees to assist and enhance the oversight function undertaken by the Board of Commissioners. In carrying out its duties and obligations, each committee of the Board of Commissioners works in accordance with the scope of the duties of the committee concerned, which is stipulated in the Decision Letter of the Board of Commissioners. Meanwhile, the Board of Directors, especially the Director of Risk and Compliance, is assisted by a range of bank managements responsible for managing, controlling, overseeing and responsible for implementation of the Bank's GCG practices, assisted by Committees under the Board of Commissioners, Committees under the Board of Directors, Corporate Secretary, divisions in contact with Bank's GCG.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perusahaan yang merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan. Pemegang saham melalui RUPS memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi , mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris, Direksi , mengesahkan perubahan Anggaran Dasar, memberikan persetujuan atas Laporan Direksi , Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan, menetapkan alokasi penggunaan laba, menunjuk dan menetapkan biaya jasa akuntan publik, menetapkan jumlah dan jenis kompensasi serta fasilitas pengurus, serta kewenangan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kepengurusan organisasi Bank Papua menganut sistem 2 (dua) badan yaitu Dewan Komisaris dan Direksi dengan wewenang dan tanggungjawab yang jelas sesuai dengan fungsinya sebagai mana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank. Hubungan kerja antara keduanya adalah hubungan *check and balances* secara independen dengan prinsip bahwa kedua badan tersebut mempunyai kedudukan yang setara.

Jenis RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham di Bank Papua terdiri dari :

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)
   RUPS ini diadakan setahun sekali setelah penutupan tahun buku yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, dengan pembahasan antara lain mengenai :
   a. Laporan Tahunan,
   b. Usulan penggunaan Laba Bersih,
   c. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS Tahunan
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa)
   RUPSLB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseoran atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Direksi wajib menyelenggarakan RUPSLB sesuai permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau Pemegang Saham.

Selain RUPS yang dilakukan dengan kehadiran seluruh Organ Perseroan secara fisik, dikenal juga RUPS dimana pelaksanaannya tidak memerlukan kehadiran seluruh organ secara fisik. RUPS tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama.

SHAREHOLDER GENERAL MEETING

The Shareholder General Meetings, hereinafter referred to as SGM, is the organ of the company which is a forum for shareholders to make decisions. Shareholders through the SGM have exclusive jurisdiction not granted to the Board of Directors and Board of Commissioners, including the authority to appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and Board of Directors, to evaluate the performance of the Board of Commissioners, Board of Directors, to approve the amendments of the Articles of Association, to approve the Board of Directors, The Board of Commissioners and the Financial Statements of the Company, determines the allocation of profit utilization, appoints and stipulates the cost of the services of a public accountant, determines the amount and type of compensation and management facilities, as well as other authorities stipulated by the law.

The management of the organization of Bank Papua embraces a system of 2 (two) bodies: the Board of Commissioners and the Board of Directors with clear authority and responsibilities in accordance with its function as mandated in the laws and regulations of the Bank. The working relationship between the two is the independent check and balances relationship with the principle that the two bodies are of equal standing.

Type of SGM

The Shareholder General Meetings at Bank Papua consists of:

1. *Annual Shareholder General Meetings (Annual SGM)*

   This SGM is held once a year after the closing of the financial year audited by a Public Accountant, with discussions such as:
   a. Annual report,
   b. Proposed use of Net Earning,
   c. Other matters that require AGM approval

2. *Extraordinary Shareholder General Meetings (Extraordinary SGM)*
   ESGM may be held at any time based on the need for the interest of the Company at the request of the Board of Commissioners and / or Shareholders. The Board of Directors shall convene the ESGM at the written request of the Board of Commissioners or Shareholders.

In addition to the Shareholder General Meetings held in the presence of all organs of the Company physically, also known as SGM where the implementation does not require the presence of all organs physically. The SGM has the same legal power.

Tata cara Pemanggilan RUPS

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), maka Bank Papua melaksanakan pemanggilan RUPS dengan tata cara sebagai berikut :

1. Waktu RUPS
   RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
2. Pemanggilan RUPS
   a. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.
   b. Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.
   c. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
   d. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.
   e. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat.
3. Tempat RUPS
   a. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.
   b. Tempat RUPS sebagaimana dimaksud terletak di wilayah negara Republik Indonesia.
   c. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
4. Agenda Rapat
   a. Dalam panggilan RUPS dicantumkan acara dan agenda pembahasan rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
   b. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.

Procedures of SGM Calling

Referring to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company (UUPT), Bank Papua shall invoke the SGM in the following manner:

1. *SGM Time*
   Annual Shareholder General Meetings shall be held within 6 (six) months after the end of the financial year.
2. *SGM Calling*
   a. The Board of Directors shall invoke the shareholders before holding the SGM.
   b. In certain cases, the SGM invitation may be made by the Board of Commissioners or shareholders based on the appointment of the chairman of the district court.
   c. The Calling of the SGM shall be made within a period of not later than 14 (fourteen) days prior to the date of the Shareholder General Meetings, taking no account of the date of the calling and the date of the Shareholder General Meetings.
   d. The Calling of the SGM shall be made by registered letter and / or by advertisement in the newspaper.
   e. In the SGM, the date, time, place, and eyes of the meeting are included.
3. *Place of SGM*
   a. The SGM is held at the place of domicile of the Company or where the Company carries out its principal business activities as defined in the articles of association.
   b. Where the SGM referred to is located in the territory of the Republic of Indonesia.
   c. If the SGM is present and / or represented by all shareholders and all shareholders agree to the holding of a SGM with a certain agenda, the SGM may be held wherever regardless of the applicable provisions.
4. *Meeting Agenda*
   a. The SGM shall include the event and the agenda of the meeting discussed with the notification that the material to be discussed in the SGM is available at the Company's office from the date of the invitation of the SGM until the date of the Shareholder General Meetings.
   b. The Company is required to provide copies of the material as intended in the above provision to shareholders free of charge upon request.

Hubungan Bank Dengan Pemegang Saham

Untuk meningkatkan nilai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka Bank Papua menjamin hak yang dimiliki para Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan melalui pengambilan keputusan RUPS dalam upaya-upaya untuk mendorong kewajaran dan transparansi perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran Dasar Perseroan.

Relationship of the Bank With Shareholders

To enhance the value of the Shareholder General Meetings (SGM), Bank Papua guarantees the right of shareholders to participate in the management of the company through the decision of the SGM in efforts to promote the fairness and transparency of the company as regulated in legislation and budget basis of the company.

Akuntabilitas Pemegang Saham

Akuntabilitas Pemegang Saham Bank Papua dipahami sebagai berikut:

1. Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggungjawab Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Tata kelola perusahaan yang baik dilaksanakan oleh Pemegang Saham sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
3. Pemegang Saham memiliki tanggungjawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Bank yang baik dalam proses pengelolaan perusahaan.

Accountability of Shareholders

Accountability of Shareholders of Bank Papua is understood as follows:

1. *Shareholders shall not interfere with the operation of the Company which is the responsibility of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.*
2. *Good corporate governance is exercised by the Shareholder in accordance with their powers and responsibilities.*
3. *Shareholders have the responsibility to monitor the implementation of good corporate governance principles in the management process of the company.*

Hak-Hak Pemegang Saham

Dengan kewenangan yang ada, maka Pemegang Saham mempunyai hak-hak antara lain:

1. Hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS;
2. Hak untuk meminta informasi tentang mata acara RUPS;
3. Hak untuk mengajukan usul-usul untuk dibahas dalam acara RUPS;
4. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS;
5. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Perseroan, secara tepat waktu dan teratur;
6. Hak untuk menerima sebagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya

Shareholder Rights

With the available authority, the Shareholder has the following rights:

1. *The right to request the convening of the Shareholder General Meetings;*
2. *The right to request information about the Shareholder General Meetings agenda;*
3. *The right to propose proposals to be discussed in the Shareholder General Meetings agenda;*
4. *The right to attend and vote in the SGM;*
5. *The right to obtain information concerning the Company, in a timely and regular manner;*
6. *The right to receive a portion of the Company's profits to shareholders in the form of dividends and other profit sharing*

Prosedur Pengumpulan Suara (*Voting*)

Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (*one share one vote*). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*).

Voting Procedure

Any shares with voting rights shall have one share one vote. Shareholders may exercise their voting rights at the time of decision making, especially in voting.

Adapun prosedur pengambilan suara (*voting*) tersebut tetap menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Dalam hal pengumpulan suara (*voting*) secara terbuka, dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara. Hal ini telah menjadi pedoman yang selalu dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Papua.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2017

Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2017 tergambar sebagaimana uraian di bawah ini.

1. Tanggal diumumkan disurat kabar.
   a. RUPS LB dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2017 diterbitkan di harian Cenderawasih Pos, tanggal terbit 20 dan 21 Februari 2017 serta perubahan tanggal pemanggilan RUPS LB di harian Cenderawasih pos, tanggal terbit 22 Februari 2017.
   b. RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2017, terbit di harian Cenderawasih Pos, tanggal terbit 8 dan 9 Mei 2017.
   c. Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan 2017.
2. Tanggal Undangan RUPS.
   a. Pada tanggal 21 Februari 2017, manajemen Bank Papua mengundang seluruh pemegang saham untuk menghadiri RUPS tanggal 06 Maret 2017.
   b. Pada tanggal 08 Mei 2017, manajemen Bank Papua mengundang seluruh pemegang saham untuk menghadiri RUPS tanggal 30 Mei 2017.
   c. Pada tanggal 08 Juni 2017, manajemen Bank Papua mengundang seluruh pemegang saham untuk menghadiri RUPS tanggal 16 Juni 2017.
3. Waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS Tahun 2017.
   Pelaksanaan RUPS Tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu :
   a. Pada tanggal 06 Maret 2017, bertempat di Hotel Sahid Jayapura.
   b. Pada tanggal 30 Mei 2017, bertempat di Hotel Sahid Jayapura.
   c. Pada tanggal 16 Juni 2017, bertempat di Aston New Hotel Kabupaten Manokwari
4. Nama Notaris
   a. Tanggal 06 Maret 2017, notaris yang digunakan adalah H. Tri Mulyadi, SH., M.Kn.
   b. Tanggal 16 Juni 2017, notaris yang digunakan adalah Lilis Heryeni.

The voting procedure has still maintained the independence or freedom of shareholders. In the case of voting in an open manner, it is done by raising the hand in accordance with the instruction of choice offered by the Shareholder General Meetings (SGM). Meanwhile, in the voting is closed to the decision that requires confidentiality or at the request of shareholders, by using a sound card. This has become an ever-present guideline in the Shareholder General Meetings (SGM) of Bank Papua.

The Holding of 2017 SGM

The stages of the implementation of the Shareholder General Meetings of 2017 are illustrated as described below.

1. Date announced in the newspaper.
   a. Extraordinary Shareholder General Meetings held on March 6, 2017, published in Cenderawasih Pos daily, dated 20 and 21 February 2017 and Changes to the date of the LM General Meeting held in Cenderawasih Post, dated 22 February 2017.
   b. The Annual Shareholder General Meetings held on 16 June 2017, published in Cenderawasih Pos daily, dated May 8 and 9, 2017.
   c. Table of 2017 Annual SGM.
2. Invitation Date of the SGM.
   a. On February 21, 2017, the management of Bank Papua invited all shareholders to attend the Shareholder General Meetings on March 6, 2017.
   b. On May 8, 2017, the management of Bank Papua invited all shareholders to attend the AGM on 30 May 2017.
   c. On 08 June 2017, the management of Bank Papua invited all shareholders to attend the AGM on 16 June 2017.
3. Time and place of the Shareholder General Meetings of 2017.
   The implementation of SGM of 2017 is held 3 times, namely:
   a. On 06 March 2017, held at Hotel Sahid Jayapura.
   b. On May 30, 2017, held at Hotel Sahid Jayapura.
   c. On June 16, 2017, held at Aston New Hotel Manokwari District
4. Notary's name
   a. Dated March 6, 2017, the notary used is H. Tri Mulyadi, SH., M.Kn.
   b. Dated June 16, 2017, the notary used is Lilis Heryeni.

Mekanisme & Hasil Perhitungan Suara RUPS Tahun 2017

Setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat kepada Pemimpin rapat sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda Rapat.

Dalam perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2017

RUPS Tahunan 2017 dihadiri oleh Komisaris Utama dan seluruh anggota Dewan Komisaris, termasuk Ketua dan anggota Komite yang ada di bawah Dewan Komisaris, serta Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham Bank Papua atau yang mewakili.

Agenda dan Keputusan RUPS – LB Tahun 2017

a. Hasil keputusan RUPS-LB tanggal 06 Maret 2017
   - Nomor 01/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
   - Nomor 02/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
   - Nomor 03/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
   - Nomor 04/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengangkatan Direktur Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
   - Nomor 05/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
   - Nomor 06/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengangkatan Direktur Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
   - Nomor 07/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
   - Nomor 08/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengesahan Setoran Modal yang belum didukung oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
   - Nomor 09/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Penggunaan Cadangan Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Mechanism & Vote Count Results of 2017 SGM

Each Shareholder or Shareholder's Powerholder has the right to ask and / or submit an opinion to the Chairman of the meeting before a vote is held for each agenda of the Meeting.

In a vote counting, 1 (one) share gives the holder the right to issue 1 (one) vote, if one shareholder owns more than 1 (one) share, the concerned is required to vote 1 (one) time only and the vote represents the entire number of shares owned.

Attendance at the 2017 SGM

The 2017 Annual Shareholder General Meetings is attended by the President Commissioner and all members of the BOC, including the Chairman and members of the Committees under the BOC, as well as the President Director and the entire BOD and attended by all shareholders of Bank Papua or its representatives.

Agenda and Resolution of SGM - LB Year 2017

a. Result of the ESGM resolutions dated March 06, 2017
   - *Number 01 / SK / ESGM-BPD / III / 2017 concerning the Extraordinary SGM of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.*
   - *Number 02 / SK / ESGM-BPD / III / 2017 on the Organizational Structure of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.*
   - *Number 03 / SK / ESGM-BPD / III / 2017 concerning Appointment of President Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.*
   - *Number 04 / SK / ESGM-BPD / III / 2017 regarding Appointment of Business Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.*
   - *Number 05 / SK / ESGM-BPD / III / 2017 regarding Appointment of Finance Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.*
   - *Number 06 / SK / ESGM-BPD / III / 2017 regarding Appointment of Banking Operational Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.*
   - *Number 07 / SK / ESGM-BPD / III / 2017 regarding Appointment of Compliance Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.*
   - *Number 08 / SK / ESGM-BPD / III / 2017 concerning Ratification of Capital Deposits not yet supported by the Shareholder General Meetings of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.*
   - *Number 09 / SK / ESGM-BPD / III / 2017 on Use of General Reserves of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.*

- Nomor 10/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pemberhentian dengan hormat Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Nomor 11/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pemberhentian dengan hormat Direktur Umum dan Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Nomor 12/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 12/SK/RUPS-BPD/V/2014 tentang Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

b. Hasil keputusan RUPS tanggal 16 Juni 2017
- Nomor 01/SK/RUPS-BPD/VI/2017 tentang Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Nomor 02/SK/RUPS-BPD/VI/2017 tentang Pengesahan Laporan Keuangan dan Penggunaan Laba PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2016.
- Nomor 03/SK/RUPS-BPD/VI/2017 tentang Perubahan ke II Surat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 12/SK/RUPS-BPD/V/2014 tentang Remunerasi Direksi dan Dewan komisaris serta Kenaikan manfaat pensiun bagi Pegawai Pensiunan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Nomor 04/SK/RUPS-BPD/VI/2017 tentang Pengesahan setoran modal yang belum didukung oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Nomor 05/SK/RUPS-BPD/VI/2017 tentang Rencana Setoran modal Tahun 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Nomor 06/SK/RUPS-BPD/VI/2017 tentang Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2016.
- Nomor 07/SK/RUPS-BPD/VI/2017 tentang Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2017.
- Nomor 08/SK/RUPS-BPD/VI/2017 tentang Persetujuan Penggunaan Cadangan umum PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Nomor 09/SK/RUPS-BPD/VI/2017 tentang Nama Calon Anggota Dewan komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

- *Number 10 / SK / ESGM-BPD / III / 2017 Concerning Honorable Dismissal of Compliance Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.*
- *Number 11 / SK / ESGM-BPD / III / 2017 concerning Dismissal with respect to General and Operations Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.*
- *Number 12 / SK / ESGM-BPD / III / 2017 concerning Amendment to Decision Letter of Shareholder General Meetings. 12 / SK / SGM-BPD / V / 2014 concerning Remuneration of BOD and BOC of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.*

b. *Result of the AGM resolutions dated June 16, 2017*
- *Number 01 / SK / SGM-BPD / VI / 2017 on the Order of Shareholder General Meetings of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.*
- *Number 02 / SK / SGM-BPD / VI / 2017 concerning Ratification of Financial Statements and Profit Use PT. Bank Pembangunan Daerah Papua 2016 Fiscal Year.*
- *Number 03 / SK / SGM-BPD / VI / 2017 concerning Amendment to the Second Shareholder General Meetings. 12 / SK / RUPS-BPD / V / 2014 concerning the Remuneration of BOD and BOC and Increase of pension benefits for Retired Employees of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.*
- *Number. 04 / SK / SGM-BPD / VI / 2017 concerning Ratification of capital payments not yet supported by the Shareholder General Meetings of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.*
- *Number 05 / SK / SGM-BPD / VI / 2017 concerning Plan of Paid in Capital Year 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.*
- *Number 06 / SK / SGM-BPD / VI / 2017 regarding Tantiem of BOD and BOCof PT. Bank Pembangunan Daerah Papua 2016 Fiscal Year.*
- *Number 07 / SK / SGM-BPD / VI / 2017 regarding the granting of authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accounting Firm which will conduct Audit on Financial Statement of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua 2017 Fiscal Year.*
- *Number 08 / SK / SGM-BPD / VI / 2017 concerning Approval of Use General Reserve PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.*
- *Number 09 / SK / SGM-BPD / VI / 2017 regarding Name of Candidate Member of BOC of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.*

Tindakan Pengurus Yang Memerlukan Persetujuan RUPS

Tindakan-tindakan Direksi dibawah ini memerlukan persetujuan RUPS yang nilai transaksinya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, adalah sebagai berikut:

1. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
2. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan.

Selain hal di atas beberapa tindakan dibawah ini memerlukan persetujuan RUPS setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris, yakni :

1. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain;
2. Mendirikan anak perusahaan;
3. Melepas penyertaan modal pada anak perusahaan;
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan;
5. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
6. Membentuk yayasan, organisasi dan atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perseroan yang berdampak bagi Perseroan;
7. Pengusulan dan penetapan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

Pelaksanaan RUPS Tahunan Sebelumnya (2016) dan Realisasinya

Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di 2016 tergambar di dalam uraian di bawah ini.

Board Actions Requiring Approval of the SGM

The actions of the Board of Directors below require the approval of the SGM, whose transaction value of more than 50% (fifty percent) of the total assets of the Company in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not, are as follows:

1. Transfer of the Company's assets; or
2. To guarantee the Company's debt.

In addition to the above, the following actions require the approval of the SGM after obtaining written responses from the Board of Commissioners, namely:

1. *Conduct equity participation in other companies;*
2. *Establish a subsidiary;*
3. *To dispose of equity participation in subsidiaries;*
4. *Merger, consolidation, acquisition, separation and dissolution of subsidiaries;*
5. *To establish and change the Company's logo;*
6. *Establish foundations, organizations and / or associations either directly or indirectly related to companies that affect the Company;*
7. *Proposing and determination to become a candidate for members of the BOD and BOC;*

Implementation of the previous Annual SGM (2016) and its Realization

The implementation stages of the Company's Annual Shareholder General Meetings in 2016 are illustrated in the description below.

TABEL PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN 2016
TABLE OF 2016 ANNUAL SHAREHOLDER GENERAL MEETINGS

Pengumumam / *Announcement*	**Undangan /** *Invitation*	**Pelaksanaan /** *Implementation*	**Hasil RUPS /** *Results of the GMS*
Diumumkan melalui iklan di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional. *Announced through advertisements in Indonesian daily newspapers with national circulation.*	Disampaikan melalui surat tercatat kepada seluruh pemegang saham. *Delivered by registered mail to all shareholders.*	RUPS tahunan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2016. *The annual SGM was held on May 19, 2016.*	Dimuat di dalam akta Notaris No. 18 tanggal 19 Mei 2016. *Issued in Notarial Deed No. 18 dated May 19, 2016.*

Setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat kepada Pemimpin rapat sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda Rapat. Dalam perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Pada RUPS Tahunan ini Bank Papua telah menunjuk Maryatie Simanjuntak, SH selaku Notaris yang mencatat seluruh aktifitas RUPS Tahunan.

Each Shareholder or Shareholder's Powerholder has the right to ask and / or submit an opinion to the Chairman of the meeting before a vote is held for each agenda of the Meeting. In a vote counting, 1 (one) share gives the holder the right to issue 1 (one) vote, if one shareholder owns more than 1 (one) share, the concerned is required to vote 1 (one) time only and the vote represents the entire number of shares owned. At this Annual SGM, Bank Papua has appointed Maryatie Simanjuntak, SH as a Notary who records all the activities of the AGM.

RUPS Tahunan 2016 dihadiri oleh Komisaris Utama dan seluruh anggota Dewan Komisaris, termasuk Ketua dan anggota Komite yang ada di bawah Dewan Komisaris, serta Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham Bank Papua atau yang mewakili.

The 2016 Annual SGM was attended by the President Commissioner and all members of the Board of Commissioners, including the Chairman and members of the Committees under the BOC, as well as the President Director and the entire BOD and attended by all shareholders of Bank Papua or its representatives.

Di dalam pelaksanaan RUPS tahun 2016 dibahas beberapa agenda sebagai berikut :

1. Pemberian Kuasa Kepada Dewan Komisaris untuk menentukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah - Papua tahun buku 2016.
2. Pembahasan laporan kinerja Direksi .
3. Pengesahan setoran modal yang belum disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
4. Penepatan Rencana setoran Modal Tahun 2017.
5. Perubahan Penghargaan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yang akan mengakhiri Masa Jabatan.
6. Penjelasan Dewan Komisaris tentang Pencalonan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
7. Panduan pemilihan Calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

In the implementation of the SGM in 2016 discussed several agenda as follows:

1. *Provision of Proxy to the BOC to determine the Public Accounting Firm as Auditor of Financial Statements of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua fiscal year two thousand sixteen (2016).*
2. *Discussion on the performance reports of the BOD.*
3. *Ratification of capital payments not yet approved by the Shareholder General Meetings (SGM).*
4. *Accelerated Plan of Paid in Capital Deposit year two thousand sixteen.*
5. *Changes in the Remuneration Award of the BOD and BOC that will terminate the term of office.*
6. *Explanation of the BOC on the Candidacy of Members of the BOD and Members of the BOC.*
7. *Guidance on the election of Candidate Members of BOD and BOC.*

Berdasarkan agenda pembahasan RUPS tersebut, Rapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui rancangan tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
2. Memberhentikan dengan hormat Dr. Johan Kafiar selaku Direktur Utama Bank Papua dan Dra. Regina Aryesam selaku Direktur Pemasaran PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
3. Menunjuk pelaksana tugas Direktur Utama dan Pelaksana Tugas Direktur Pemasaran adalah Sharly Andris Parrangan, SE (Direktur Umum dan Operasional).

Based on the agenda of the discussion of the SGM, the Meeting decided the following matters:

1. *Approving the draft of the Shareholder General Meetings of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.*
2. *Discontinue Dr. Johan Kafiar as President Director of Bank Papua and Dra. Regina Aryesam as Marketing Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.*
3. *Appoints the executor of the duties of the President Director and Acting President Director is Sharly Andris Parrangan, SE (General Affair and Banking Operations Director).*

4. Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris akan dilakukan setelah *fit and Proper Test*.
5. Untuk mengurangi kerugian Bank yang terjadi saat ini diupayakan :
   a. Menempatkan tenaga ahli analisis kredit dengan kompetensi khusus (sesuai jenis kredit yang disalurkan).
   b. Menetapkan nilai jaminan kredit lebih besar dari jumlah pemberian kredit yang diberikan (khusus untuk kredit dengan nilai besar/kredit produktif).
   c. Agar Bank proaktif memberitahukan kepada Walikota/Bupati apabila kredit yang diberikan untuk pekerjaan yang dilakukan di wilayah Kota/ Kabupaten yang bersangkutan.
6. Bank diminta untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem IT untuk memberikan pelayanan maksimal dan menghindari dari terjadinya transaksi elektronik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
7. Menerima laporan keuangan tahun buku 2015 yang telah diaudit KAP sebagai bahan kajian *stakeholders* dalam mengambil keputusan menerima laporan pertanggungjawaban Kinerja Direksi Bank Papua untuk tahun buku 2015.
8. Mengesahkan penggunaan laba bersih tahun 2015 sebagai berikut :
   a. Deviden dan Dana Pembangunan sebesar 70% (tujuh puluh persen).
   b. Cadangan sebesar 30% (tiga puluh persen)
9. Mengesahkan rincian setoran modal.

Pelaksanaan RUPS Tahunan tersebut telah dicatat dalam akta Berita Acara RUPS Tahunan Bank Papua Nomor 18 tanggal 19 Mei 2016 dan seluruh keputusan hasil RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tahun 2016, telah direalisasikan pada tahun 2017.

4. Determination of the BOD and BOC shall be made after the fit and Proper Test.
5. To reduce the Bank losses incurred currently being pursued:
   a. Placing expert loan analysis with special competence (according to the type of lending).
   b. Establish a loan guarantee value greater than the amount of lending (especially for loan with large value / performing loan).
   c. In order for the Bank proactively notify the Regent / Mayor if the loan is given for the work done in the area of the Regency / Municipal concerned.
6. Banks are required to improve and develop IT systems to provide maximum service and avoid the occurrence of irresponsible electronic transactions.
7. Receiving financial reports in book 2015 that have been audited by KAP as a study material of stakeholders in making decisions and rejecting the report of the Performance of BOD of Bank Papua for book 2015.
8. Approve the use of 2015 net income for the following:
   a. Dividend and development fund of 70% (seventy percent).
   b. Reserves of 30% (thirty percent).
9. Approve the details of paid in capital.

The Annual SGM has been recorded in the Deed of Annual General Meeting of Bank Indonesia No. 18 dated May 19, 2016 and all decisions of the Annual SGM and Extraordinary SGM held in 2016 have been realized in 2017.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi . Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai pihak yang bertugas atau berfungsi melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham khususnya serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada umumnya. Hal tersebut untuk memastikan Perseroan dikelola oleh Direksi sesuai dengan harapan Pemegang Saham.

Setiap anggota Dewan Komisaris harus memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan dan komitmen untuk menyediakan waktu dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, peran Dewan Komisaris sangat strategis. Oleh karena itu, komposisi Dewan Komisaris Perseroan harus memungkinkan pengambil keputusan yang efektif tepat dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat menganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi .

Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki fungsi, tugas dan tanggungjawab yang jelas sesuai dengan Anggaran Dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS, yang tertuang dalam Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada pemegang saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Bank secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, diatur bahwa Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris antara lain meliputi :

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is an organ of the Bank responsible for general and / or special surveillance in accordance with the Articles of Association and advises the Board of Directors. The Board of Commissioners shall supervise the management policy, the general management of the party in charge of supervising and advising the Board of Directors on behalf of the Company and the Shareholders in particular and the stakeholders in general. This is to ensure that the Company is managed by the Board of Directors in accordance with the expectations of the Shareholders.

Each member of the Board of Commissioners must have high integrity, knowledge, ability and commitment to make time in carrying out its duties. Thus, the role of the Board of Commissioners is very strategic. Therefore, the composition of the Board of Commissioners of the Company should enable effective and effective decision-makers. In addition, the Board of Commissioners is also required to act independently, in the sense that there is no conflict of interest which may interfere with its ability to perform its duties independently and critically, whether in relation to each other or to the Board of Directors.

Duties and Responsibilities of the BOC

The Board of Commissioners has clear functions, duties and responsibilities in accordance with the Articles of Association and the authority granted by the SGM, set out in the Working Manual of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Board of Commissioners is responsible to the shareholders in overseeing the Board of Directors' policies on the Bank's operations in general which refers to the business plan approved by the Board of Commissioners and OJK, and ensures compliance with all applicable laws and regulations.

In the Decree of the Financial Services Authority Number 55 / POJK.03 / 2016 dated December 7, 2016 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, it is stipulated that the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners are among others:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi .
4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :
   a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum; dan.
   b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
7. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan :
   a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau.
   b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
8. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara optimal.

Secara garis besar, tugas pokok Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan, ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan usaha Bank serta melakukan tugas secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS, yaitu dengan:

1. The Board of Commissioners shall carry out its duties and responsibilities independently.
2. The Board of Commissioners shall ensure that good implementation of Good Corporate Governance is implemented in every Bank's business activities at all levels or levels of the organization.
3. The BOC shall exercise supervision over the implementation of the duties and responsibilities of the BOD and provide advice to the BOD.
4. In implementing the supervision as referred to in paragraph (2), the Board of Commissioners shall direct, monitor and evaluate the implementation of the Bank's strategic policy.
5. In conducting the supervision as referred to in paragraph (2), the Board of Commissioners is prohibited to participate in the decision making of operational activities of the Bank, except:
   a. provision of funds to related parties as stipulated in the provisions concerning the maximum limit of commercial bank lending; and
   b. other matters specified in the Bank's statutes or laws and regulations.
6. The BOC shall ensure that the BOD has followed up on the audit findings and recommendations of the Bank's internal audit work unit, external auditors, the results of the supervision of the Financial Services Authority and / or the results of oversight of other authorities.
7. The Board of Commissioners shall report to the Financial Services Authority no later than 7 (seven) working days after it is found:
   a. violation of laws and regulations in finance and banking; and / or
   b. circumstances or predictions of circumstances that may compromise the viability of the Bank's business.
8. The BOC shall provide sufficient time to carry out its duties and responsibilities optimally.

In general, the main duties of the Board of Commissioners cover the following matters.

1. To supervise the management of the Company, the management of the Company by the Board of Directors includes supervision on the implementation of Long Term Plan (RJP), Annual Work Plan and Budget (RKAP), Articles of Association and Resolutions of the Shareholder General Meetings, regulations and regulations for the Bank's purpose and the business objectives of the Bank and performs the duties specifically granted to them under the Articles of Association, legislation and / or resolutions of the SGM by:

a. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Bisnis Bank (kebijakan kepengurusan oleh Direksi);
b. Mengawasi efektivitas penerapan tata kelola Bank yang baik;
c. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
d. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi , serta memberikan nasihat kepada Direksi ;
f. Memantau kepatuhan perseroan terhadap peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan serta komitmen kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau perjanjian;
g. Mengusulkan auditor eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan auditor eksternal.

2. Menyusun pembagian tugas diantara Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing Anggota Dewan Komisaris.
3. Menyusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris setiap tahun.
4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada RUPS.
5. Mengungkapkan kepemilikan saham bank maupun perusahaan lainnya sesuai ketentuan.
6. Dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok usahanya dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajaran di bidang perbankan.

a. Supervise and advise the Board of Directors in conducting Bank business activities (Board of Directors);
b. Overseeing the effectiveness of the implementation of Bank's GCG;
c. Approve and evaluate Risk Management policy;
d. Evaluate and decide on the application of the Board of Directors relating to transactions requiring the approval of the Board of Commissioners;
e. Carry out supervision on the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, and provide advice to the Board of Directors;
f. Monitoring the Company's compliance with regulations of Bank Indonesia / Financial Services Authority and legislation and commitments to Bank Indonesia / Financial Services Authorities and other parties in accordance with laws and / or agreements;
g. Proposes an external auditor to be approved in the SGM and monitor the execution of the external auditor's assignment.

2. Prepare the division of tasks among members of the Board of Commissioners in accordance with the expertise and experience of each member of the Board of Commissioners.
3. Develop work programs and performance targets of the Board of Commissioners each year.
4. Responsible for the execution of the duties of the Board of Commissioners to the SGM.
5. To disclose the ownership of shares of the bank or other companies in accordance with the provisions.
6. It is prohibited to use the bank for personal, family, or business interests in a manner contrary to banking legislation and fairness.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Pengungkapan ***Board Manual***)

Pedoman Dewan Komisaris berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi berikut organ kelengkapannya. Pedoman kerja & tata tertib Dewan Komisaris merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi Bank Papua dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) tata kelola Bank yang baik.

The Guideline of Board of Commissioners (Disclosure Board Manual)

The Guidelines of the Board of Commissioners shall comprise the principles of corporate law, prevailing laws and regulations, the directions of the Shareholders and the Articles of Association governing the work of the Board of Commissioners and the Board of Directors and their respective organs. The Board of Commissioners' Code of Conduct & Code of Conduct is the result of the codification of the various regulations applicable to Bank Papua and the best practices of Bank's GCG.

Tujuan Pedoman Dewan Komisaris adalah mempermudah Dewan Komisaris dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris berikut organ kelengkapannya. Untuk itu pengembangannya haruslah selalu dilakukan sesuai kebutuhan Perseroan. Perubahan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar. Mengingat Pedoman Dewan Komisaris merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai ketentuan secara rinci yang terdapat dalam Anggaran Dasar, Arahan Pemegang Saham yang ditetapkan dalam RUPS, dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam Pedoman Dewan Komisaris ini. Prinsip itikad baik, penuh tanggungjawab dan *fiduciary duties, skill and care* yang inheren dengan pemegang jabatan Dewan Komisaris adalah prinsip umum yang harus tetap dihormati oleh organ Perseroan yang bertugas mengawasi dan mengurus Perseroan.

The objective of the Board of Commissioners Guidelines is to make it easier for the Board of Commissioners to understand the regulations relating to the working procedures of the Board of Commissioners and its organs. Therefore, its development should always be done according to the needs of the Company. The changes made must be based on applicable regulations and do not violate the provisions of the Articles of Association. Given that the Board of Commissioners' Guidelines is a compilation of the principles of corporate law, in practice it must be consistent with the prevailing laws and regulations. The detailed provisions contained in the Articles of Association, Shareholder Directives specified in the SGM, and other legal provisions remain binding, although not specifically described in this Code of Conduct. The principle of good faith, full of responsibility and fiduciary duties, skill and care that is inherent with the holder of the Board of Commissioners is a general principle that must be respected by the Company's organs responsible for overseeing and managing the Company.

Adapun isi dari Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Visi, Misi, Tujuan.
2. Fungsi.
3. Persyaratan & Komposisi Dewan Komisaris.
4. Etika Jabatan.
5. Tugas & Kewajiban Dewan Komisaris.
6. Hak & Wewenang Dewan Komisaris.
7. Rapat Dewan Komisaris.
8. Hubungan Kerja Antara Dewan Komisaris Dan Direksi .
9. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris.
10. Komite-Komite Dewan Komisaris.
11. Sekretariat Dewan Komisaris.

The contents of the Working Manual of the BOC and the BOD, among others, regulate the following matters:

1. *Vision, Mission, Purpose.*
2. *Function.*
3. *Requirements & Composition of the BOC.*
4. *Ethics of Position.*
5. *Duties & Obligations of the Board of Commissioners.*
6. *Rights & Authority of the Board of Commissioners.*
7. *Board of Commissioners Meeting.*
8. *Working Relationship Between the Board of Commissioners and the Board of Directors.*
9. *Performance Evaluation of the BOC.*
10. *Board of Commissioners Committees.*
11. *Secretariat of the Board of Commissioners.*

BEBERAPA PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS YANG DIMUAT DI DALAM *BOARD MANUAL*
SOME GUIDELINES BOARD OF COMMISSIONERS WORK CONTAINED IN BOARD MANUAL

	Hak dan Wewenang Dewan Komisaris *Rights and Privileges BOC*	Kewajiban Dewan Komisaris *Liabilities Board of Commissioners*
1	Berwenang memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi *Authorized to examine books, letters of evidence, inventory of goods, check and match the state of the cash (for verification purposes) and other securities and know all actions that have been executed by the Board of Directors*	Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang (RJP) Bank, Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan, serta rencana lainnya, yang disiapkan Direksi , sesuai dengan visi dan misi Bank *Provide an opinion and approval of Long Term Plan (RJP) Bank, Bank Business Plan (RBB) and the Work Plan and Budget (CBP) Annual and any other plans, prepared by the Board of Directors, in accordance with the vision and mission of the Bank*
2	Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Bank *Entering buildings and pages or other places used or controlled by Bank*	Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar *Under certain conditions, the Board shall organize the Annual Meeting and other SGM accordance with his authority as stipulated in the legislation and the Articles of Association*
3	Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat Bank di bawah Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan *Request information and / or clarification of the Board of Directors and / or officers of the Bank under the Board of Directors on all issues related to the management of the Company*	Melaporkan kepada RUPS mengenai kinerja Bank disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh *Reporting to the Shareholder General Meetings of the Bank's performance with suggestions regarding corrective measures to be taken*
4	Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi . *Knowing all the policies and actions has been and will be run by a Board of Directors.*	Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Bank *Propose to the AGM the appointment of the Public Accountant to audit the books of the Bank*
5	Meminta Direksi menghadiri Rapat Dewan Komisaris *Request the Board of Directors attended the Board Meeting*	Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan Bank *Researching and studying and responding to regular reports and the Annual Report was prepared by the Directors and signed the Bank Annual Report*
6	Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Pejabat di bawah Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Bank, baik dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan Dewan Komisaris, tanpa terlebih dahulu harus sepengetahuan Direksi *Request information and / or explanations of officials under the Board of Directors on all issues related to the management of the Bank, both in the context of the duties and authority of the Board of Commissioners, without first having the knowledge of the Board of Directors*	Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta *Provide explanations, opinions and suggestions to the General Meeting regarding the Annual Report, if requested*

BEBERAPA PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS YANG DIMUAT DI DALAM *BOARD MANUAL* *SOME GUIDELINES BOARD OF COMMISSIONERS WORK CONTAINED IN BOARD MANUAL*		
	Hak dan Wewenang Dewan Komisaris *Rights and Privileges BOC*	**Kewajiban Dewan Komisaris** *Liabilities Board of Commissioners*
7	Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank *Temporarily terminate the members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association*	Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya *Make treatise Board Meeting and keeps a copy*
8	Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kebutuhan Bank *Established an Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee, Risk Oversight Committee, and other committees if deemed necessary to pay attention to the needs of the Bank*	Memberikan laporan tentang tugas pengawas yang telah dilakukan selama tahun buku kepada RUPS *Provides reports on the supervisory duties that have been made during the financial year to the SGM*
9	Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Bank, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku *Using experts for certain things and in a certain period at the expense of the Bank, if it deems necessary and to the provisions of the applicable*	Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS *Carry out other obligations in the framework of the task of monitoring and providing advice, provided they do not conflict with the provisions of legislation Statutes, and the decision of the AGM*
10	Melakukan tindakan Pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank *Bank Handling performs actions under certain circumstances for a certain period of time in accordance with the Bank's Articles*	Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi , termasuk laporan hasil audit intern Perseroan *Verifying the periodic reports and the annual report prepared by the Directors, including internal audit reports of the Company*
11	Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan *Attending the meeting of the Board of Directors and provide opinions on the matters discussed*	Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, audit ekternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan *Ensuring that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit unit, external audit, monitoring reports from Bank Indonesia / Financial Services Authority*
12	Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS *Carry out other surveillance authority is not contrary to the legislation, Statutes, and / or resolution of the GMS*	Memberitahukan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang perundangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. *Inform Bank Indonesia / Financial Services Authority no later than seven (7) working days after the discovery of violations of laws and regulations in the financial sector and state or estimate the banking circumstances that may jeopardize the Bank.*

Etika Kerja Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris memiliki etika kerja sebagai berikut :

1. Dilarang mengambil keuntungan dari Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak-pihak lain yang dapat menciderai atau mengurangi keuntungan dan reputasi Bank Papua dan perusahaan anak.
2. Dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank Papua selain remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank Papua pada saat pernyataan dibuat.

Work Ethics of the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners have the following work ethic:

1. *It is prohibited to take advantage of the Bank for personal, family, and / or other parties' interests that may injure or diminish the benefits and reputation of Bank Papua and its subsidiaries.*
2. *It is prohibited to take and / or receive personal benefits from Bank Papua other than remuneration and other facilities as stipulated in the Shareholder General Meetings.*
3. *It is prohibited to directly or indirectly make false statements regarding material facts or to disclose material facts so that statements made are not misleading about the state of Bank Papua at the time of the declaration.*

Kriteria Dewan Komisaris

Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat ;
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
   e. Anggota Dewan Komisaris pernah tidak terima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
   f. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan.

Criteria of the Board of Commissioners

The person who may be appointed as a member of the BOCis an individual who meets the requirements at the time of appointment and during his tenure:

1. *Having good character, morals, and integrity;*
2. *Ability to perform legal acts;*
3. *Within 5 (five) years before the appointment and during his tenure;*
   a. *Never declared bankrupt.*
   b. *Never become a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners who is found guilty of causing a company to be declared bankrupt.*
   c. *Never be punished for committing a crime that is detrimental to state finances and / or related to the financial sector.*
   d. *Has never been a member of the BOD and / or a member of the BOC who during his term has never held the Annual Shareholder General Meetings.*
   e. *Any member of the Board of Commissioners has not been accepted by the Shareholder General Meetings or has not given any responsibility as a member of the BOD and / or members of the BOC to the SGM.*
   f. *Never caused a company obtaining license, approval or registration from OJK does not fulfill the obligation to submit an annual report and / or financial report to OJK.*
4. *Have a commitment to comply with the Laws and Regulations.*

5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank.
6. Syarat lain berdasarkan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank.

Prosedur Pengangkatan Dewan Komisaris

Seluruh pengangkatan dan atau penggantian anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi. Anggota komite remunerasi dan nominasi yang memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Kriteria utama dalam mempertimbangkan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris adalah integritas, kompetensi, profesionalisme, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setiap pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris senantiasa memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris berdasarkan Surat Gubernur Papua selaku Pemegang Saham Pengendali sekaligus mewakili seluruh Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 10/SUS-GUB PAPUA/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 perihal Periode Menjabat Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, yaitu sebagai berikut :

5. *Having knowledge and / or expertise in the field required by the Bank.*
6. *Other requirements under UUPT, laws and regulations in the Capital Market and Regulations related to the Bank's business activities.*

Procedure of Appointment of BOC

All appointments and or replacements of members of the BOC shall be conducted through the Shareholder General Meetings (SGM). Any proposal for the appointment and / or reimbursement of members of the BOC to the Shareholder General Meetings shall take into account the recommendations of the remuneration and nomination committees. Members of the remuneration and nomination committee who have a conflict of interest with the recommended proposal shall disclose in the recommended proposal. The members of the BOC must meet the requirements of fit and proper test according to the Financial Services Authority Regulation regarding the Capability and Poor Assessment for the Main Parties of the Financial Services Institution.

The main criteria for considering the appointment and / or replacement of members of the BOC are the integrity, competence, professionalism and financial reputation in accordance with the fit and proper test requirements set by the Financial Services Authority. Any appointment and / or replacement of members of the BOC shall always take into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

Number and Composition of the BOC

Composition of the BOC based on the Letter of the Governor of Papua as the Controlling Shareholder as well as representing all Shareholders of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Number: 10 / SUS-GUB PAPUA / VIII / 2016 dated August 19, 2016 regarding Period Serving Board of Commissioner of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, as follows:

TABEL KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
COMPOSITION BOARD OF COMMISSIONERS BOARD

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Domisili *Domicile*	Tanggal Pengangkatan *Appointment Date*	Periode *Period*
Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th	Komisaris Utama *President commissioner*	Papua	14 November 2014	Periode 1
drh. Constant Karma	Komisaris *Commissioner*	Papua	26 Juni 2015	Periode 2

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Papua.

Pengangkatan Dewan Komisaris tersebut telah melalui proses rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Bank belum memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, antara lain :

1. Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia;
3. Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh presiden komisaris atau komisaris utama;
4. Dewan Komisaris wajib terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen;
5. Komisaris Independen wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris;

Keberagaman Dewan Komisaris

Penetapan komposisi anggota Dewan Komisaris Bank Papua dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank serta perundang-undangan yang berlaku. Komposisi tersebut didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, dan latar belakang guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Bank Papua memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang dan oleh karenanya nominasi kandidat anggota Dewan Komisaris dikaji serta dievaluasi dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, maupun sumber rekomendasi awal.

Kriteria Dewan Komisaris seluruh pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris disetujui oleh RUPS dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia/OJK.

Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum, dan Ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi , dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

All members of the BOC are domiciled in the working area of Bank Papua Head Office.

The appointment of the BOC has been through the recommendation process of the Remuneration and Nomination Committee. The amount and composition of the BOC of the Bank have complied with the Regulation of the Financial Services Authority Number 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of GCG for Commercial Banks,

1. *Banks are required to have members of the BOC with a minimum of 3 (three) persons and are at most equal to the number of members of the Board of Directors;*
2. *All members of the BOC of the Bank are domiciled in Indonesia;*
3. *The BOC shall be led by the President Commissioner or the President Commissioner;*
4. *The BOC shall consist of Independent Commissioners and Non-Independent Commissioners;*
5. *Independent Commissioners shall be at least 50% (fifty percent) of the total members of the BOC;*

Diversity of the Board of Commissioners

Determination of the composition of members of the Board of Commissioners of Bank Papua shall be conducted by considering the needs and complexity of the Bank and applicable legislation. The composition is based on banking knowledge, expertise, professional experience, and background support the effectiveness of the duties of the Board of Commissioners. Bank Papua provides equal opportunities to all and therefore the nomination of candidates for members of the Board of Commissioners is reviewed and evaluated in the same way, regardless of gender, race, or source of initial recommendations.

The criteria of the Board of Commissioners of all appointments and / or replacements of members of the Board of Commissioners are approved by the SGM with reasonable integrity, competence, professionalism and financial reputation in accordance with the requirements and fit and proper test determined by Bank Indonesia / OJK.

In addition, all members of the BOC of the Bank have met the requirements as members of the Board of Commissioners in accordance with the Law of Limited Liability Company Number 40 Year 2007, Bank Indonesia Regulation concerning Commercial Banks, and OJK Provisions on Capability and Compliance Assessment for Prospective Controlling Shareholders, Board of Directors, and Candidate Members of the BBOC of the Bank.

Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, diatur bahwa Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota Direksi .

Berdasarkan hal tersebut Semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi , maupun pemegang saham pengendali. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali, dan seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Financial Relationships, Stewardship and Families

In accordance with the Decree of the Financial Services Authority Number 55 / POJK.03 / 2016 dated December 7, 2016 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, it is stipulated that the majority of the members of the BOC are prohibited from having a family relationship up to the second degree with fellow members of the BOC and / or members Board of Directors.

Based on this matter All current members of the BOC have no family relationship up to the second degree with other members of the BOC, Board of Directors, or controlling shareholder. The majority of the members of the BOC has no financial relationship with the controlling shareholders, and all members of the BOC have no financial relationship with other members of the BOC and Board of Directors as can be seen in the table below:

DEWAN KOMISARIS *BOARD COMMISSIONER*	HUBUNGAN KELUARGA DENGAN *FAMILY RELATIONSHIP WITH*						HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN *FAMILY RELATIONSHIP WITH*					
	Dewan Komisaris *Board Commissioner*		Direksi *Board of Directors*		Pemegang Saham Pengendali *Controlling shareholders*		Dewan Komisaris *Board Commissioner*		Direksi *Board of Directors*		Pemegang Saham Pengendali *Controlling shareholders*	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
drh. Constant Karma	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Status Independensi Dewan Komisaris

Fungsi Dewan Komisaris Independen di perusahaan bertujuan untuk dapat mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih obyektif serta menghindari berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Sebagai Komisaris Independen maka anggota Komisaris harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum memuat :

1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi , anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen
2. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang

Independence Status of the BOC

The function of the Board of Independent Commissioners of the company aims to encourage the creation of a more objective work environment and to avoid various interests including the interests of shareholders and other stakeholders. As Independent Commissioner, the member of the Commissioner must be able to be free from conflict of interest as stated in the Regulation of the Financial Services Authority Number 55 /POJK.03/2016 concerning Application of Governance for Commercial Bank contains:

1. *Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, share ownership and / or family relationships with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners and / or controlling shareholder, or relationship with the Bank that may affect the ability to act independently*
2. *Independent Party is a party outside the Bank who*

tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi , anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen

3. Komisaris Independen wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
4. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal :
   a. Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
   b. Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.
5. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud di atas wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

has no financial relationship, stewardship, share ownership and / or family relationships with members of the Board of Directors, members of the BOC and / or controlling shareholder, or relationship with the Bank that may affect the ability to act independently

3. Independent Commissioners shall be at least 50% (fifty percent) of the total members of the BOC.

4. Independent Commissioner who has served for 2 (two) consecutive term periods may be reappointed in the following period as Independent Commissioner in case:
   a. Meeting of members of the BOC considers that Independent Commissioners can still act independently; and
   b. The Independent Commissioner declares in the SGM regarding the relevant independence.
5. The independence statement of the Independent Commissioners referred to above shall be disclosed in the report on the GCG implementation.

Kepemilikan Saham

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum diatur bahwa Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Senada dengan kebijakan OJK di atas Bank mewajibkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Sepanjang periode laporan tidak ada kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris pada Bank Papua atau Bank lain atau lembaga keuangan bukan Bank atau perusahaan lain dengan komposisi sebesar atau lebih dari 5% dari modal disetor. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham sesuai ketentuan transparansi dimaksud. Rincian Kepemilikan Saham Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Shareholding

Under the Regulation of the Financial Services Authority Number 55 /POJK.03/2016 concerning the GCG Implementation for Commercial Banks, it is stipulated that members of the BOC are required to disclose the ownership of shares of 5% (five percent) or more, either to the Bank or to the bank and company others, domiciled within and outside the country.

In line with the above OJK policy, the Bank requires members of the BOC and the Board of Directors to disclose their share ownership, either to the Company or to other companies, domiciled inside and outside the country in a report that must be updated annually.

During the reporting period there is no share ownership by members of the BOC at Bank Papua or other Bank or non-Bank financial institution or other company with a composition of or more than 5% of paid up capital. The members of the BOC do not have shares in accordance with the provisions of the transparency. Share Ownership Details of the BOC are as follows:

NAMA *NAME*	JABATAN DI BANK PAPUA *POSITION AT BANK PAPUA*	KEPEMILIKAN SAHAM *SHAREHOLDING*	
		Ya	Tidak
Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th	Komisaris Utama		√
drh. Constant Karma	Komisaris		√

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, diatur bahwa anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi , anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif :

1. Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
2. Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud di atas dalam hal :

1. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi , anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
2. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
3. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki rangkap jabatan di luar dari yang diperkenankan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dual Position of Board of Commissioners

Under the Regulation of the Financial Services Authority Number 55 /POJK.03/2016 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, it is stipulated that members of the BOC are prohibited from double positions as members of the Board of Directors, BOC or Executive Officers:

1. *In financial institutions or financial companies, whether banks or non-banks;*
2. *On more than 1 (one) non-financial institution or non-financial company, both domiciled within and outside the country.*

Excluding the dual position referred to above in the case of:

1. *Members of the BOC shall be members of the Board of Directors, members of the BOC or Executive Officers exercising supervisory functions in 1 (one) non-bank subsidiary company controlled by the Bank;*
2. *Non-Independent Commissioners perform the functional duties of Bank shareholders in the form of legal entities in the Bank's business group; and / or*
3. *Members of the BOC hold positions in nonprofit organizations or institutions.*

The duties in the positions and functions referred to above may be exercised insofar as they do not neglect the execution of duties and responsibilities as members of the BOC of the Bank.

Throughout 2017 there are no members of the BOC who have multiple positions outside of those permitted by the Financial Services Authority regulations.

NAMA *NAME*	JABATAN DI BANK PAPUA *POSITIION IN BANK PAPUA*	RANGKAP JABATAN DI LUAR DARI YANG DIPERKENANKAN OJK *DUAL POSITIONS OUTSIDE OF ALLOWABLE BY OJK*	
		Ya	Tidak
Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th	Komisaris Utama		√
drh. Constant Karma	Komisaris		√

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan & Kepatutan (*fit and proper test*) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan diatur bahwa Calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya. Calon anggota Dewan Komisaris yang belum memperoleh persetujuan OJK, dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris Bank walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Permohonan untuk memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan diajukan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan tentang Uji Kemampuan & Kepatutan (*fit and proper test*) dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan calon Komisaris Bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan di atas. Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon Komisaris Bank apabila calon tersebut menjalani :

a. Proses hukum;
b. Proses penilaian kemampuan dan kepatutan;dan/atau
c. Proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.

Penghentian tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Bank.

Anggota Dewan Komisaris yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Assessment of Ability and Compliance

On the Regulation of Bank Indonesia Number 12/23 / PBI / 2010 on the fit and proper test and the Financial Services Authority Regulation Number 27 / POJK.03 / 2016 dated July 22, 2016 on the Assessment of Ability and Poverty for the Main Parties of the Institution Financial Services is stipulated that the Candidate of the BOC shall obtain approval from the Financial Services Authority prior to carrying out its actions, duties and functions. Prospective members of the BOC who have not obtained OJK approval shall be prohibited from performing any actions, duties and functions as members of the BOC of the Bank despite being approved and appointed by the GMS.

The request for approval by the Financial Services Authority shall be filed by the Bank to the Financial Services Authority, accompanied by the documents required under the provisions of Bank Indonesia and / or the Financial Services Authority on the fit and proper test and the Assessment of Ability and Powers for Parties Main Financial Services Institution.

Implementation of the fit and proper test of the candidate for the BOC of the Bank shall be conducted by the Financial Services Authority in accordance with the provisions of Bank Indonesia and / or the Financial Services Authority above. The Financial Services Authority shall terminate the fit and proper test of the candidate for the BOC if the candidate is to:

a. legal proceedings;
b. the process of fit and proper test, and / or
c. the reassessment process as there are indications of integrity issues, financial feasibility, financial reputation, and / or competence.

Such termination shall be notified in writing to the Bank.

Members of the BOC who have obtained approval from the Financial Services Authority, indicate that each member of the BOC has adequate integrity, competence and financial reputation, can be seen in the table below:

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUHAN
ASSESSMENT OF ABILITY AND COMPLIANCE

Nama *Name*	Pelaksana *Organizer*	Hasil *Result*
Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
drh. Constant Karma	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus

Untuk proses pengangkatan Komisaris berikutnya, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/ POJK.03/2016 Tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada Bank dalam bentuk penetapan disetujui atau tidak disetujui.

For the appointment of the next Commissioner, under the Regulation of the Financial Services Authority Number 27 / POJK.03 / 2016 dated July 22, 2016 regarding Appraisal of Ability and Fit for the Principal Party of the Financial Services Institution, the Financial Services Authority notifies the results of a fit and proper test to the Bank in the form approved or unapproved.

Program Kerja Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2017 Dewan Komisaris Bank Papua memiliki program kerja sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi dan persetujuan Rencana Korporasi & Rencana Bisnis serta melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian Rencana Bisnis.
2. Melakukan monitoring terhadap Penanganan tindakan fraud yang terjadi.
3. Melakukan monitoring Kemajuan pengendalian NPL di Kantor Cabang.
4. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap :
   a. Rencana Bisnis Bank;
   b. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan;
   c. Ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS;
   d. Peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan bisnis Bank;
5. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan, ketentuan Bank Indonesia/OJK dan/atau keputusan RUPS.
6. Menyusun Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada RUPS.
8. Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP), Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diusulkan Direksi .
9. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi , termasuk laporan hasil audit intern Perseroan.
10. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/OJK .
11. Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
12. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank.

Work Program of the Board of Commissioners

Throughout 2017, the Board of Commissioners of Bank Papua has the following work programs:

1. *Conduct evaluation and approval of the Corporate Plan & Business Plan as well as supervise the process of achieving the Business Plan.*
2. *Monitoring the handling of fraud actions that occur.*
3. *Monitoring Progress of NPL control in Branch Offices.*
4. *Oversight of the management policy, the course of the Company's management by the Board of Directors includes supervision of:*
   a. *Bank Business Plan;*
   b. *Annual Work Plan and Corporate Budget (RKAP);*
   c. *Provisions of Articles of Association and Resolutions of the SGM;*
   d. *Legislation, for the benefit of the Company and in accordance with the Bank's business objectives and objectives;*
5. *To perform the tasks specifically granted to him, according to the Articles of Association, legislation, the provisions of Bank Indonesia / OJK and / or decisions of the SGM.*
6. *Prepare Supervisory Reports of the Board of Commissioners.*
7. *Responsible the execution of the duties of the Board of Commissioners to the SGM.*
8. *Provide opinions and suggestions in writing to the SGM regarding the Company's Long Term Plan (RJP), Bank Business Plan (RBB) and Corporate Work Plan and Budget (RKAP) proposed by the BOD.*
9. *To examine and review the periodic reports and Annual Report prepared by the BOD, including reports on internal audit results of the Company.*
10. *Ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Company's Internal Audit Work Unit, external auditors, Bank Indonesia / OJK supervisory results.*
11. *Ensure that established committees perform their duties effectively.*
12. *Evaluate the Bank's performance.*

Rekomendasi/Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Sebagai bagian dari tugas dan tanggungjawab, Dewan Komisaris Perseroan terus proaktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi dan memberikan masukan kepada Direksi . Bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris tentunya mengacu pada implementasi atas rekomendasi yang telah diberikan Dewan Komisaris terhadap Direksi maupun melalui komite-komite yang dibentuk.

Pada periode Januari sampai dengan Desember 2017, Dewan Komisaris melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembahasan terkait Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2016.
2. Pembahasan terkait struktur organisasi Bank Papua.
3. Membahas persiapan Rapat umum Pemegang Saham.
4. Membahas hasil Kantor Akuntan Publik (KAP) Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2017.
5. Melakukan pembahasan Remunerasi, Mutasi Pegawai dan Modal Disetor.
6. Membahas Penyelesaian Kredit Bermasalah.
7. Melakukan pembahasan Realisasi RBB Triwulan I Tahun 2017.
8. Melakukan pembahasan Tindak lanjut Hasil RUPS.

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris berfungsi sebagai forum bagi para anggota untuk mengambil keputusan secara kolektif. Rapat ini juga dapat berfungsi sebagai suatu mekanisme untuk membahas kinerja Direksi dalam menangani perusahaan. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris diselenggarakan baik secara internal Dewan Komisaris dan rapat gabungan dengan mengundang Direksi serta rapat bersama para pejabat Bank Papua yang terkait lainnya.

Dewan Komisaris Bank Papua mengadakan pertemuan internal secara berkala sesuai kebutuhan dan membahas hal-hal yang memerlukan arahan serta rekomendasi Dewan Komisaris.

Frekuensi Pertemuan Anggota Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2017 Dewan Komisaris secara internal telah menyelenggarakan 8 (delapan) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut :

Recommendation / Implementation of Duties of Board of Commissioners

As part of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners continues to proactively monitor the performance of the Board of Directors and provide input to the Board of Directors. The form of supervision conducted by the Board of Commissioners must refer to the implementation of recommendations made by the Board of Commissioners to the Board of Directors and through established committees.

In the period of January to December 2017, the BoC has done the following:

1. *Discussing the Financial Statement Date December 31, 2016*
2. *Discussing the Bank Papua organizational structure.*
3. *Discussing the preparation of the Shareholder General Meetings.*
4. *Discussing the results of Public Accountant Firm (KAP) Quarterly Financial Report of 2017.*
5. *Discussing the Remuneration, Employee Mutation and Paid-in Capital.*
6. *Discussing Non Performing Loans Settlement.*
7. *Discussing the Realization of RBB for First Quarter of 2017.*
8. *Discussing the Follow-up of SGM Results.*

Board of Commissioners Meeting

The Board of Commissioners Meeting serves as a forum for members to make decisions collectively. This meeting can also serve as a mechanism to discuss the performance of the Board of Directors in handling the company. The Board of Commissioners' meetings is held internally by the Board of Commissioners and joint meetings by inviting BOD and meetings with other relevant Bank Papua officials.

The Board of Commissioners of Bank Papua holds regular internal meetings as required and discusses matters that require the direction and recommendation of the Board of Commissioners.

Frequency of Meetings of BOD Members at the Meeting of the Board of Commissioners

During 2017 the Board of Commissioners has internally held 8 (eight) meetings with attendance as follows:

FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN TINGKAT KEHADIRANNYA
FREQUENCY MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND LEVELS OF THEIR ATTENDANCE

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	
			Total	%
Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th	Komisaris Utama	8-7	8-7	90%
drh. Constant Karma	Komisaris	8-8	8-8	100%

Dengan agenda rapat sebagai berikut : *With the meeting agenda as follows:*

Hari/ Tanggal *Day/ Date*	Jam *Time*	Tempat *Place*	Peserta Rapat *Attendance*	Agenda Rapat	*Meeting Agenda*
Senin, 13 Maret 2017	10.00 Wit	Ruang Rapat Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Direksi Unit Kerja Terkait	a. Laporan Struktur Organisasi b. Laporan KAP c. Persipura	*a. Organizational Structure Report* *b. KAP Report* *c. Persipura*
Rabu, 14 Juni 2017	10.00 Wit	Ruang Rapat Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Direksi Unit Kerja Terkait	Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	*Preparation of Shareholder General Meetings (SGM)*
Jumat, 28 Juli 2017	11.00 Wit	Ruang Rapat Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Direksi Unit Kerja Terkait	1. Pembahasan tentang Realisasi Penagihan Kredit setelah adanya Surat Persetujuan Dewan Komisaris Tanggal 7 April 2017 tentang Hapus Buku Kredit Macet Tahun 2017 sebesar Rp.1.585.953.120.915,- 2. Saran Komisaris kepada Direksi Bank Papua dalam Pelaksanaan *Action Plan* BDPI	*1. Discussion on the Realization of Loan Billing after the Approval Letter of the Board of Commissioners dated April 7, 2017 regarding the Loss of Loan Agreement Book of 2017 amounting to Rp.1.585.953.120.915, -* *2. Suggestion of the Board of Commissioners to the Board of Directors of Bank Papua in the Implementation of BDPI's Action Plan*
Rabu, 18 Okt 2017	10.00 Wit	Ruang Rapat Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Direksi Unit Kerja Terkait	1. Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Kredit Konsumtif & Kontrakting Bank Papua 2. Penjelasan Direksi Bank Papua Tentang : a. Penyelesaian Kredit Bermasalah (NPL) dan Penagihan Kredit Posisi September 2017 b. Perkembangan dari Penyerahan Penanganan Debitur Berskala Besar Yang Telah Diaudit Khusus Kepada Kepolisian RI Via OJK Provinsi Papua & Papua Barat c. Hasil Verifikasi Pengakhiran Program Taspen Life d. Perkembangan Penanganan Penyelesaian Permasalahan KK Lereh - KC Sentani Part 1 & 2 e. Pengembalian Kerugian Perusahaan Dari Pelaku Fraud	*1. Strategy to Increase Consumer Loan Growth & Contrakting Bank Papua* *2. Explanation of the Board of Directors of Bank Papua About:* *a. Settlement of Non Performing Loan (NPL) and Loan Positioning September 2017* *b. Development of Hand Over Handling of Large Scale Debtors Special Audited to the Police of the RI Via OJK Papua & West Papua Provinces* *c. Verification Result of Taspen Life Program Termination* *d. Development of Problem Solving Handling of KK Lereh Kreens - KC Sentani Part 1 & 2* *e. Return of Company Losses From Fraud Actors*

Hari/ Tanggal *Day/ Date*	Jam *Time*	Tempat *Place*	Peserta Rapat *Attendance*	Agenda Rapat	*Meeting Agenda*
Selasa,31 Okt 2017	11.00 Wit	Ruang Rapat Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Direksi Unit Kerja Terkait	Pembahasan Surat Bupati Manokwari No. 584/1.075 Tanggal 25 Oktober 2017	*Discussion of Manokwari Regent's Letters No. 584 / 1,075 On October 25, 201*
Kamis, 2 November 2017	10.00 Wit	Ruang Rapat Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Direksi Unit Kerja Terkait		
Rabu, 27 Desember 2017	10.00 Wit	Ruang Rapat Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Direksi Unit Kerja Terkait	Pembahasan Neraca Akhir Tahun Buku 2017	*Discussion of End of Fiscal Year 2017*
Kamis, 28 Desember 2017	11.00 Wit	Ruang Rapat Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Direksi Unit Kerja Terkait	Pembahasan Neraca Akhir Tahun Buku 2017	*Discussion of End of Fiscal Year 2017*

Rapat di atas merupakan rapat Dewan Komisaris yang berdasarkan Anggaran Dasar Bank telah memenuhi kuorum, sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan yang mengikat.

Hasil rapat dituangkan di dalam risalah rapat dan di dokumentasikan dengan baik, termasuk jika terdapat adanya *dissenting opinion*, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan para peserta rapat, selanjutnya hasil rapat merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan.

Keputusan Dewan Komisaris

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris terus mendorong pelaksanaan keputusan pengawasan dan penasehatan yang semakin efektif. Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris telah mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain :

1. Persetujuan Perpanjangan masa tugas komite Dewan komisaris.
2. Persetujuan pelaksanaan Hapus Buku Kredit Macet Tahun 2017.
3. Persetujuan remunerasi.
4. Pemberian saran dan Persetujuan Rancangan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2017
5. Persetujuan Perbaikan Rencana Bisnis Bank tahun buku 2017-2019.
6. Persetujuan Pengangkatan komite dewan komisaris.
7. Persetujuan Penetapan Remunerasi anggota komite dewan komisaris yang bukan berasal dari anggota dewan komisaris.
8. Pemberian saran dan Persetujuan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2017.

The above meeting is a meeting of the Board of Commissioners, which based on the articles of association of the Bank has fulfilled the quorum, so the resulting decision is a binding decision.

The outcome of the meeting is set forth in the minutes of the meeting and well documented, including if there is a dissenting opinion, and is distributed to all members of the Board of Commissioners and the meeting participants, then the results of the meeting are recommendations and / or advice that can be implemented.

Decision of the Board of Commissioners

As part of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners continues to encourage the implementation of more effective supervisory and advisory decisions. Throughout the year 2017, the Board of Commissioners has issued several policies, among others:

1. *Approval Extension of the term of committee of the Board of Commissioners.*
2. *Approval on the implementation of the Loss of Loan Loss Book of 2017.*
3. *Approval of remuneration.*
4. *Provision of advice and approval of Bank Business Plan (RBB) in 2017*
5. *Approval of Improvement of Business Plan of bank year 2017-2019.*
6. *Approval Appointment of the BOC committee.*
7. *Approval of the Stipulation of the Remuneration of committee members of the BOC who are not from the members of the BOC.*
8. *Provision of advice and approval of Corporate Budget Work Plan (RKAP) in 2017.*

9. Persetujuan penunjukan KAP dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 31 Desember 2017.

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Program orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diberikan oleh Perseroan karena latar belakang Anggota Dewan Komisaris yang merupakan representasi dari beberapa Pemegang Saham. Tujuan program orientasi adalah agar para Anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif. Ketentutan tentang program orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Untuk Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, wajib diberikan program orientasi mengenai kondisi Bank secara umum.
2. Program orientasi Dewan Komisaris antara lain meliputi :
   a. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Bank yang baik dan *Business* Ethics di Bank;
   b. Keterangan mengenai tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris serta hal lain yang tidak diperbolehkan;
   c. Gambaran mengenai Bank berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Bank, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Bank, risiko, pengendalian internal dan masalahmasalah strategis lainnya;
   d. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit;
   e. Program orientasi dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Bank, kunjungan ke Kantor Cabang/Kantor Wilayah/ Divisi, pengkajian dokumen Bank atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

Mengingat sepanjang periode pelaporan ini, tidak terdapat pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru, maka secara khusus Bank Papua tidak menyelenggarakan pelaksanaan Program orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris, namun beberapa aspek yang menjadi bagian program orientasi Dewan Komisaris telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Bank Papua yang ada saat ini, antara lain meliputi Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Bank yang baik dan *Business* Ethics di Bank, presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Bank, kunjungan ke Kantor Cabang/Kantor Wilayah/ Divisi, pengkajian dokumen Bank, dan lain-lain.

9. *Approval of KAP appointment in the framework of examination of financial statements of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Fiscal Year 31 December 2017.*

Orientation Program For New Commissioners

The orientation program for new members of the Board of Commissioners is given by the Company due to the background of Members of the Board of Commissioners who are representatives of several Shareholders. The purpose of the orientation program is for the members of the Board of Commissioners to get to know each other and establish cooperation as a solid, comprehensive and effective team. Conclusions about the orientation program include the following.

1. *For newly appointed members of the BOC, an orientation program shall be provided concerning the condition of the Bank in general.*
2. *The Board of Commissioners' orientation programs include the following:*
   a. *Implementation of the principles of Bank's GCG and Business Ethics in the Bank;*
   b. *Information on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and other matters not allowed;*
   c. *The Banks description of the Bank's objectives, nature and scope of activities, financial performance, strategy, short-term and long-term plans, risks, internal controls and other strategic issues;*
   d. *Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies and the Audit Committee;*
   e. *Orientation programs may include presentations, meetings, visits to Bank facilities, visits to Branch Offices / Regional Offices / Divisions, review of Bank documents or other programs deemed appropriate to the needs.*

Considering that during this reporting period, there is no appointment of new members of the Board of Commissioners, Bank Papua does not specifically conduct the orientation program for members of the Board of Commissioners, but some aspects of the Board of Commissioners' orientation program have been conducted by the Board of Commissioners of the Bank Papua, among others, includes the implementation of GCG principles and Business Ethics at Banks, presentations, meetings, visits to Bank facilities, visits to Branch Offices / Regional Offices / Divisions, reviews of Bank documents, and others.

Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Dengan latar belakang Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai pihak yang mewakili Pemegang Saham, maka peningkatan kompetensi bagi masing-masing Dewan Komisaris sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena antar Anggota Dewan Komisaris tidak saling mengenal dan/atau belum pernah bekerja dalam satu tim sebelumnya. Dewan Komisaris mendapat kesempatan untuk mengikuti program pelatihan, seminar atau *workshop* yang diadakan secara internal maupun diselenggarakan oleh institusi eksternal.

Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris Bank Papua telah mengikuti beberapa program peningkatan kompetensi sebagaimana tabel sebagai berikut :

BOC Competence Improvement

Against the background of Members of the Board of Commissioners from various parties representing Shareholders, the increase of competence for each Board of Commissioners is very important to be implemented. This is because the members of the Board of Commissioners do not know each other and / or have never worked in a team before. The Board of Commissioners shall have the opportunity to participate in training programs, seminars or workshops held internally or organized by external institutions.

Throughout 2017, the Board of Commissioners of Bank Papua has participated in several competency improvement programs as follows:

PELATIHAN & SEMINAR PADA TAHUN 2017 *SEMINAR & TRAINING IN 2017*			
Jenis Pelatihan	Lembaga Penyelenggara *Organizer*	Tanggal & Tahun Pelaksanaan *Date & Year*	*Training Type*
Seminar *Fintech* 2017	Jakarta	24 Mei 2017	*Seminar Fintech 2017*
Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	BSMR	20-21 Juli 2017	*Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2*

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, maka penilaian kinerja Dewan Komisaris senantiasa dilakukan secara periodik oleh beberapa lembaga independen diantaranya :

1. Penilaian Kinerja Para Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan;
2. Penilaian Kinerja melalui audit kinerja oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
3. Penilaian Kinerja melalui audit kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
4. Penilaian Kinerja melalui audit kinerja oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Untuk penilaian sendiri (*self assessment*) Kinerja Dewan Komisaris Bank secara independen dilakukan oleh Divisi Kepatuhan guna melengkapi laporan penilaian sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan tata kelola Bank yang baik (GCG) sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir yang mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Bank menilai pelaksanaan Tugas Dan Tanggungjawab Dewan Komisaris sebagai berikut :

Performance Assessment of the BOC

As part of the implementation of good corporate governance, performance assessment of the Board of Commissioners are always conducted periodically by several independent institutions including:

1. *Performance of Shareholders Assessment through Annual Shareholder General Meetings (ASGM);*
2. *Performance Assessment through performance audit by the Financial Services Authority (OJK);*
3. *Performance Assessment through performance audit by the Supreme Audit Board (BPK);*
4. *Performance Assessment through a performance audit by the Financial and Development Supervisory Board (BPKP).*

For self assessment The performance of the Board of Commissioners of the Bank is independently performed by the Compliance Division in order to complete the self assessment report on the implementation of Bank's GCG (GCG) in accordance with the period of Bank Sound Rating in the last 1 (one) year referring to the Circular of the Financial Services Authority Number 13 / SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

The Bank assesses the implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners as follows:

No	Komponen GCG	Nilai *Value*	Bobot *Score*	Perolehan Nilai *Total Score*	*GCG Component*
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggungjawab Dewan Komisaris	3	1 0%	0.30	*Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners*

Dengan Peringkat 3 artinya:

- Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan tata tertib kerja dalam BPP GCG Buku 2 tentang Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk membantu Pegawasan Dewan Komisaris terhadap Bank.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank namun hanya terbatas pada pemberian nasihat dan pemberian keputusan kredit kepada Pihak terkait termasuk pejabat Eksekutif.
- Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris secara Independen dan tidak ada Intervensi dari pemilik
- Dewan Komisaris telah cukup melaksanakan pengawasan terkait pengawasan tugas dan tanggungjawab Direksi diantaranya pemantauan terhadap NPL dan CKPN Kredit namun belum secara efektif memberikan nasihat kepada Direksi terhadap Operasional Bank yang telah dituangkan dalam Notulen Rapat Gabungan dan hasil Notulen belum di dokumentasikan dengan baik
- Risalah Rapat Dewan Komisaris namun belum di dukung dengan baik sehingga pelaksanaan penilaian dilakukan tidak berdasarkan Notulen hasil Rapat Dewan Komisaris.
- Hasil Rapat Dewan Komisaris belum Transparansi menyampaikan yang menjadi tugas fungsi Dewan Komisaris terkait Pengawasan Bank.

Pengungkapan kebijakan *self assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris.

Remunerasi Dewan Komisaris

Kebijakan Remunerasi

Penetapan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris didasarkan pada kinerja masing-masing anggota dengan mempertimbangkan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris. Formulasi remunerasi mengacu kepada kebijakan internal Bank Papua, peraturan eksternal yang berlaku, *industry comparison* serta mempertimbangkan kinerja Bank Papua. Komite Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan

With rating 3 means:

- *Implementation of Duties and Responsibilities of the BOC is stipulated in the Guidelines and work order in the GCG BPP Book 2 of the BOC.*
- *The BOC has established an Audit Committee, Risk Oversight Committee, and the Remuneration and Nomination Committee to assist BOC's Supervision of Bank.*
- *The BOC is not involved in the decision making of Bank operations, but is limited to providing advice and loan decisions to the Parties concerned including Executive Officers.*
- *Independent Execution of Duties and Responsibilities of the BOC and no Interventions from the owners.*
- *The BOC has adequately conducted supervision related to the supervision of the duties and responsibilities of the Board of Directors, such as monitoring NPL and Loan CKPN but not effectively giving advice to the Board of Directors on Bank Operations as set forth in the Minutes of Joint Meeting and the Minutes result has not been properly documented*
- *Minutes of Meeting of the BOC but not yet properly supported so that the implementation of the assessment is conducted not based on the Minutes of Meeting of the BOC.*
- *The result of the BOC Meeting has not Transparency submitted to the duties of the BOC related to Bank Supervision.*

The disclosure of the self-assessment policy on the performance of the BOC is conducted not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the performance of its duties, but also to give confidence to shareholders or investors for the efforts to improve the performance of the BOC.

BOC Remuneration

Remuneration Policy

The amount of remuneration of members of the BOC is based on the performance of each member by considering the duties and responsibilities of the BOC. The remuneration formulation refers to the internal policies of Bank Papua, applicable external regulations, industry comparison and considers the performance of Bank Papua. The Remuneration Committee recommends to the BOC and submits it to the Shareholder General Meetings for approval. The execution and distribution of remuneration shall be conducted by the President

persetujuan. Pelaksanaan dan pembagian remunerasi dilakukan oleh Komisaris Utama.

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris yang diatur di dalam kebijakan remunerasi Dewan Komisaris Bank Papua meliputi kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank adalah Gaji, Tunjangan Rutin, Tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura dan Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, yang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah seluruh kebijakan remunerasi, dan fasilitas lainnya.

Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi ini menjadi tolok ukur *Stakeholders* dalam menilai kesesuaian remunerasi dengan hasil kinerja Bank yang dikelola Komisaris dan Direksi Bank. Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan, antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi dan fasilitas asuransi kesehatan.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Untuk saat ini Bank memberikan remunerasi kepada anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan tanggung jawab dan capaian kerja masing-masing. Besaran remunerasi ditetapkan untuk menjaga mekanisme *check and balance* antara kedua organ perseroan tersebut agar tetap terjaga. Prosedur penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris Bank Papua sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris meminta Komite Remunerasi dan Nominasi untuk melakukan kajian remunerasi dan nominasi bagi anggota Dewan Komisaris.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun rekomendasi remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan kepada Dewan Komisaris, remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris membahas usulan Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
6. RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris.

Commissioner.

Remuneration policies and other facilities for the BOC under the remuneration policy of the BOC of Bank Papua include remuneration and other facilities for members of the BOC determined by the Bank's Shareholders General Meeting are Salaries, Routine Allowances, Tantiem and other facilities in non- Type of remuneration and other facilities for all members of the BOC, which includes the number of members of the BOC, the total number of remuneration policies, and other facilities.

Disclosure of this package / remuneration policy becomes the benchmark of Stakeholders in assessing the appropriateness of remuneration with the results of the Bank's performance managed by Commissioners and Board of Directors of the Bank. Other facilities are defined as non-financial facilities, such as housing facilities, transport facilities and health insurance facilities.

Remuneration Determination Procedure

For the time being, the Bank provides remuneration to members of the BOC with due regard to their respective responsibilities and work achievements. The amount of remuneration is set to keep the check and balance mechanism between the two organs of the company in order to stay awake. The procedure for determining the remuneration of members of the BOC of Bank Papua is as follows:

1. *The BOC requested the Remuneration and Nomination a remuneration and nomination assessments to conduct remuneration review for the BOC members.*
2. *The Remuneration and Nomination Committee shall prepare a remuneration recommendation for the BOC members.*
3. *The Remuneration and Nomination Committee proposes to the BOC, remuneration for the BOC members.*
4. *The BOC discussed the proposals of the Remuneration and Nomination Committee.*
5. *The BOC proposes remuneration for the BOC members to the SGM.*
6. *The SGM sets a remuneration for the BOC members.*

Mekanisme Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris
The mechanism for Determining the Remuneration of BOC Members

Komponen Remunerasi & Fasilitas Lainnya

Seluruh Anggota Dewan Komisaris menerima paket remunerasi yang dibayarkan secara berkala, terdiri dari Gaji, Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Kendaraan, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Cuti dan Tantiem. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank Papua adalah: Gaji, Tunjangan Rutin, Tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura;
2. Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, yang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris.

Jumlah seluruh kebijakan remunerasi, dan fasilitas lainnya tersajikan pada tabel di bawah ini :

Remuneration & Other Facilities

All Members of the BOC receive remuneration packages paid periodically, consisting of Salaries, Housing Allowances and Vehicle Allowances, Holiday Allowances, Leave Allowances and Tantiem. The remuneration policies and other facilities for the BOC are as follows:

1. *Remuneration policies and other facilities for members of the BOC stipulated by the Annual Shareholder General Meetings of Bank Papua are: Salaries, Routine Benefits, Tantiem and other facilities in non-permanent form;*
2. *Type of remuneration and other facilities for all members of the BOC, which includes the number of members of the BOC.*

The amount of all remuneration policies, and other facilities is presented in the table below:

PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS *PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS*			
Jenis Penerimaan	Jumlah Komisaris *Jumlah Komisaris*	Nominal (Rp) *Nominal (Rp)*	*Jenis Penerimaan*
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, penghasilan tetap lainnya dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	2	4.195.462.408,-	*1. Remuneration (salary, bonus, routine allowance, tantiem, other fixed income and other facilities in non-natura form)*
2. Fasilitas lain seperti perumahan, transportasi, kesehatan dan lain-lain : a. Yang dapat dimiliki b. Yang tidak dapat dimiliki	2	-	*2. Other facilities such as housing, transportation, health and others: a. Can be owned. b. Can not be owned.*
Jumlah Penerimaan	**2**	**4.195.462.408,-**	*Jumlah Penerimaan*

Remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, adalah sebagai berikut :

The one-year remuneration grouped in the range of income levels is as follows:

JUMLAH REMUNERASI *TOTAL OF REMUNERATION*		
dalam 1 tahun	**Jumlah Komisaris**	**in 1 Year**
Di atas Rp2 milyar	1	*Above Rp2 billion*
Di atas Rp1 milyar s.d 2 milyar	-	*Rp1 billion upto Rp2 billion*
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 milyar	1	*Rp500 million upto Rp1 billion*
Rp500 juta ke bawah	-	*upto Rp500 million*
Total	**2**	**Total**

Penyesuaian Ketentuan Remunerasi Dewan Komisaris

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tersebut Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan Remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum. Informasi kebijakan Remunerasi yang wajib diungkapkan paling sedikit mencakup :

1. Komite Remunerasi antara lain:
   a. Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggungjawab;
   b. Jumlah rapat yang dilakukan; dan
   c. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun;
2. Proses penyusunan kebijakan Remunerasi yang meliputi:
   a. Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi;
   b. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya; dan
   c. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya;
3. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri;
4. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi:
   a. Jenis risiko utama (*key risk*) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi;
   b. Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur;
   c. Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel; dan
   d. Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya apabila ada;

Adjustment of the BOC Remuneration Provisions

In the Rules of Financial Services Authority Number 45 / POJK.03 / 2015, Banks are required to disclose Remuneration policy information in the annual report on the implementation of governance as stipulated in the provisions governing the implementation of governance for commercial banks. Remuneration policy information that must be disclosed must include at least the following:

1. *The Remuneration Committee includes:*
   a. Names of members, composition, duties and responsibilities;
   b. Number of meetings conducted; and
   c. Remuneration paid to members of the Remuneration Committee for 1 (one) year;
2. *The process of formulating a Remuneration policy which includes:*
   a. A review of the background and objectives of the Remuneration policy;
   b. Review of Remuneration policy in the previous year, together with its improvements; and
   c. Mechanism to ensure that the Remuneration for Personnel in the control unit is independent of the supervised work unit;
3. *Remuneration policy coverage and its implementation per business unit, by region and in subsidiaries or branch offices located overseas;*
4. *Remuneration related with risks that include:*
   a. The type of key risk used in applying the Remuneration;
   b. Criteria for determining the types of major risks, including those for difficult risks measured;
   c. Impact of key risk determination on Variable Remuneration policy; and
   d. A change in the determination of the main types of risk compared to last year and the reasons, if any;

5. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi:
   a. Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja;
   b. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu; dan
   c. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi;
6. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi:
   a. Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarannya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut; dan
   b. Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (malus), atau ditarik kembali apabila sudah dibayarkan (*clawback*);
7. Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, apabila Bank menggunakan jasa konsultan ekstern;
8. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal;
9. Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi:
   a. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut; dan
   b. Penjelasan apabila terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel di antara para Direksi , Dewan Komisaris dan/atau Pegawai;
10. Jumlah Direksi , Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominalnya;
11. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material *risk takers*;
12. *Shares option* yang dimiliki Direksi , Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif;
13. Rasio gaji tertinggi dan terendah;
14. Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi , calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja ;
15. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan;
16. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank;

5. *Performance measurement is associated with Remuneration which includes:*
   a. Areview of the Remuneration policy related with performance appraisal;
   b. Methods of linking individual Remuneration to Bank performance, work unit performance and individual performance; and
   c. A description of the method used by the Bank to state that agreed performance cannot be achieved so that adjustment of remuneration is required and the amount of remuneration adjustment if such condition occurs;
6. *Remuneration Adjustment is related with Performance and Risk which includes:*
   a. A policy on variable remuneration suspended, the magnitude, and criteria for determining the amount; and
   b. Deferred suspended variable remuneration of a Bank policy pending payment (malus), or withdrawn when it is paid (clawback);
7. *Name of external consultant and consultant duties related to Remuneration policy, if Bank uses the services of external consultants;*
8. *Remuneration Package and facilities received by the BOD and BOC cover the structure of Remuneration and details of the nominal amount;*
9. *Variable Remuneration, including:*
   a. The form of Variable Remuneration and the reasons for choosing the form; and
   b. Explanation if there are differences in the provision of Variable Remuneration among Directors, Board of Commissioners and / or Employees;
10. *The Number of Directors, Board of Commissioners and Personnel receiving Variable Remuneration for 1 (one) year, and total nominal;*
11. *Position and number of parties who become material risk takers;*
12. *Shares option owned by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Executive Officers;*
13. *Ratio of highest and lowest salaries;*
14. *The number of recipients and the total amount of the Variable Remuneration will be granted by the Bank to prospective Directors, candidates for Board of Commissioners and / or prospective Employees during the first 1 (one) year of work;*
15. *Number of employees affected by termination of employment and total nominal of severance pay;*
16. *Total Deferred Variables Remuneration, consisting of cash and / or shares or stock-based instruments issued by the Bank;*

17. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun;
18. Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam satu tahun meliputi:
    a. Remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel;
    b. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan
    c. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank;
19. Informasi kuantitatif mengenai :
    a. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;
    b. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan;
    c. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

17. Total Deferred Variable Remuneration paid for 1 (one) year;

18 Details of Remuneration given within one year include:
a. Fixed or variable remuneration;
b. Deferred and not deferred remuneration; and
c. Remuneration forms provided in cash and / or shares or stock-based instruments issued by the Bank;

19. Quantitative information on:
a. The remaining total Remuneration remained with either exposed implicit or explicit adjustments;
b. Total Remuneration deductions caused by explicit adjustments during the reporting period;
c. Total Remuneration deductions caused due to implicit adjustments during the reporting period.

Pemberlakuan POJK di atas untuk Bank BUKU 1 dan Bank BUKU 2 yang bukan merupakan Bank Asing adalah sejak tanggal 1 Januari 2017.

The above POJK enforcement for Bank BUKU 1 and Bank BUKU 2 which is not a Foreign Bank is from 1 January 2017.

Untuk memenuhi POJK tersebut maka Bank akan melakukan penyesuaian kebijakan remunerasi Pengurus Bank yang berlaku saat ini yang disesuaikan dengan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, dan pelaporan pelaksanaannya akan disampaikan pada laporan Tata Kelola Bank tahun 2018.

To fulfill the POJK, the Bank will adjust the current Bank Management remuneration policy in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority Number 45 / POJK.03 / 2015 concerning the Application of Good Corporate Governance in Remuneration for Commercial Banks, and the reporting of its implementation will be submitted to the Bank's 2018 Governance report.

Kebijakan Pengunduran Diri & Pemberhentian Dewan Komisaris

Policy of Resignation & Discharge of the Board of Commissioners

Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya, apabila anggota Dewan Komisaris terlibat dalam kejahatan keuangan. Yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan yakni adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Resignation of the Board of Commissioners

Any member of the Board of Commissioners may resign from office, if a member of the Board of Commissioners is involved in a financial crime. What is meant by engaging in financial crime is the existence of the status of convicted members of the Board of Commissioners from the authorities. Such financial crimes as manipulation and various forms of embezzlement in the financial services activities and Money Laundering Crime Act as referred to in Law Number 8 Year 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crime.

Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada

The resignation of members of the Board of Commissioners shall be made by prior written notice to the Bank. However,

Bank. Namun demikian, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak terbebas dari setiap tanggungjawab yang melekat padanya hingga pengunduran dirinya diterima oleh RUPS.

the member of the Board of Commissioners concerned is not relieved of any responsibility attached to it until his resignation is accepted by the GMS.

Ketentuan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris telah diatur di dalam Pedoman kerja & tata tertib Dewan Komisaris khususnya yang menyangkut tentang etika jabatan. Kebijakan ini diterapkan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha Bank. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Bank Papua. Dengan adanya kebijakan ini dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan perusahaan, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga.

The resignation of members of the Board of Commissioners has been regulated in the Code of Conduct & the Board of Commissioners, especially those concerning the ethics of the office. This policy is implemented to assist in the smooth running of legal process and to ensure that the legal process does not interfere with the Bank's business activities. In addition, in terms of morality, this policy builds an ethical culture within the Bank Papua. With this policy can increase the confidence of corporate stakeholders, so that the integrity of the company will be maintained.

Sampai dengan akhir tahun 2017, tidak ada Dewan Komisaris Bank Papua yang mengundurkan diri karena terlibat dalam kejahatan keuangan.

Until the end of 2017, there is no Board of Commissioners of Bank Papua who resigned for engaging in financial crimes.

Pemberhentian Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan apabila :

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar Perseroan;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
4. Dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Mengundurkan diri;
6. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.

Di luar dari alasan pemberhentian di atas, jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila :

1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatannya berakhir;
3. Dinyatakan pailit atau berada dalam pengampunan (tidak lagi cakap untuk melakukan tindakan hukum) berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
4. Pengunduran dirinya efektif;
5. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris, termasuk salah satunya karena memangku jabatan rangkap yang dilarang;
6. Pemberhentian Dewan Komisaris berdasarkan putusan pihak regulator.

Dismissal of the Board of Commissioners

Each member of the Board of Commissioners may be dismissed if:

1. *Can not perform its duties properly;*
2. *Not implementing the provisions of the laws and regulations of the Company;*
3. *Engage in actions that harm the Company and / or the State;*
4. *To be found guilty by a court decision having a permanent legal power;*
5. *Resign;*
6. *The dismissal of members of the Board of Commissioners may also be made on the basis of a SGM decision.*

Apart from the reasons for the dismissal above, the position of the member of the Board of Commissioners shall automatically terminate if:

1. *Passed away;*
2. *The term of office ends;*
3. *To be declared bankrupt or in remission (no longer competent to take legal action) based on a court decision;*
4. *His resignation is effective;*
5. *No longer fulfilling requirements as a member of the Board of Commissioners, including one for holding dual positions that are prohibited;*
6. *The dismissal of the Board of Commissioners based on the decision of the regulator.*

Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi adalah hubungan *check and balances* terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam pengelolaan perusahaan dengan didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dalam rangka mewujudkan hubungan tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi mengagendakan pertemuan berkala dalam bentuk rapat koordinasi untuk membahas dan memutus persoalan-persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan operasional perusahaan. Agenda yang menjadi pokok bahasan dalam pertemuan-pertemuan tersebut antara lain rencana bisnis, operasional, peluang usaha, dan isu-isu strategis yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris. Selain itu, rapat koordinasi tersebut merupakan forum dimana Dewan Komisaris dapat membahas laporan-laporan periodik Direksi serta memberikan tanggapan, catatan dan nasihat kepada Direksi yang dituangkan dalam risalah rapat.

BOC Relationship with the BOD

The working relationship between the Board of Commissioners (BOC) and the Board of Directors (BOD) is the connection of checks and balances related to the implementation of their respective duties and responsibilities in the management of the company based on the principle of transparency. In order to realize the relationship, the BOC and the BOD scheduled regular meetings in the form of coordination meetings to discuss and decide on important issues concerning business continuity and company operations. The agenda which is the subject of the meetings are business plan, operational, business opportunity, and strategic issues requiring approval from the BOC. In addition, the coordination meeting is a forum where the BOC can discuss periodic reports of the BOD and provide responses, notes and advice to the BOD as outlined in the minutes of the meeting.

Kebijakan Dewan Komisaris Mengenai Suksesi Direksi

Pergantian Direksi Perseroan tunduk dan patuh berdasarkan mekanisme yang di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain diatur di dalam UU Perseroan Terbatas, Bank Papua memiliki kebijakan suksesi Direksi untuk mengidentifikasi pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi untuk menjadi Direksi melalui *Talent Review* Program. Masing-masing anggota Direksi diwajibkan untuk menyampaikan minimal 2 (dua) orang calon pengganti yang kemudian dievaluasi untuk mengidentifikasi kompetensi dan *skill gap* masing-masing calon. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, akan disiapkan program pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing calon. Calon-calon pengganti tersebut akan dikelompokkan dalam *talent inventory* untuk direkomendasikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris Bank Papua. Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Papua, menjalankan fungsi nominasi berdasarkan kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi . Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi baik calon dari internal maupun dari eksternal.

Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.

BOC Policy Concerning the Succession of the BOD

Substitution of the BOD of the Company is deferred and complies with the mechanisms stipulated by laws and regulations, such as Law no. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. In addition to being regulated under the Limited Liability Company Law, Bank Papua has a succession policy of the BOD to identify executive officers who have the potential to become a BoD through the Talent Review Program. Each member of the BOD is required to submit at least 2 (two) substitute candidates who are then evaluated to identify the competencies and skills of each candidate. Based on the results of these evaluations, will be prepared development programs in accordance with the needs of each candidate. The replacement candidates will be grouped into talent inventory to be recommended to the Nomination and Remuneration Committee of the BOC of Bank Papua. The Nomination and Remuneration Committee of Bank Papua, performs a policy-based nomination function and criteria needed in the process of nomination of candidates for members of the BOD. One of the policies that can support the Nomination process as referred to is the succession policy of members of the BOD, both internal and external candidates.

The policy of succession aims to maintain the continuity of the regeneration process or leadership cadre in the company in order to maintain the business sustainability and long-term goals of the company.

INFORMASI MENGENAI KOMISARIS INDEPENDEN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dijelaskan bahwa Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi , anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen, sedangkan Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi , anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Keberadaan Dewan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Selaku Komisaris Independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola Bank yang baik, pemegang saham dalam RUPS menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap bank dan kelompok usaha bank yang tidak melakukan kegiatan usaha bank. Selain itu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 / POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum disebutkan bahwa Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria anggota Dewan Komisaris yang juga merupakan Komisaris Independen antara lain adalah sebagai berikut :

1. Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris

INFORMATION ON INDEPENDENT COMMISSIONERS

Based on the Decree of the Financial Services Authority Number 55 / POJK.03 / 2016 dated December 7, 2016 regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, it is explained that the Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, ownership and / The Board of Directors, other members of the Board of Commissioners and / or controlling shareholder, or relationship with the Bank that may affect the ability to act independently, whilst the Independent Party is a party outside the Bank who has no financial, management, share ownership and / or family relationships with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and / or controlling shareholders, or relationships with the Bank that may affect the ability of those concerned to act independently.

The existence of the Independent Board of Commissioners is intended to encourage the creation of a more objective work climate and environment and to place fairness and equity among various interests including the interests of shareholders and other stakeholders. The Independent Commissioner must be free from conflict of interest. In order to support the implementation of Bank's GCG, the shareholders in the SGM shall appoint an Independent Commissioner with the amount and terms as stipulated in the prevailing law and regulation in order to carry out supervisory duties on banks and business groups of banks that do not engage in bank operations. In addition, in the Financial Services Authority Regulation Number 55 /POJK.03/2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, it is mentioned that the Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, share ownership and or family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and or other controlling shareholder or other relationship that may affect his ability to act independently.

Determination of Independent Commissioners

The criteria for members of the Board of Commissioners who are also Independent Commissioners are as follows:

1. *Independent Commissioners shall be at least 50% (fifty percent) of the total members of the Board of Commissioners*

2. Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
3. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
4. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
5. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi , atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Memenuhi persyaratan Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
7. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
9. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud di atas wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
10. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
11. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal :
    a. Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
    b. Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.
12. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud diatas wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

2. *Members of the Board of Commissioners who have no financial relationship, management relationship, shareholder relationship, family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and / or Controlling Shareholders or relations with the Bank, which may affect their ability to act independently;*
3. *Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of Issuers or Public Companies within the last 6 (six) months, except for re-appointment as Independent Commissioner of Issuers or Public Companies in the next period ;*
4. *Not having any share directly or indirectly in the Issuer or Public Company;*
5. *Not having an Affiliation relationship with Issuer or Public Company, member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, or major shareholder of issuer or Public Company;*
6. *Meet the requirements of Independent Commissioners as stipulated in applicable regulations;*
7. *No direct or indirect business relationship relating to the Issuer or Public Company's business activities.*
8. *Non-Independent Commissioner may become Independent Commissioner after fulfilling the requirements as Independent Commissioner.*
9. *Non-Independent Commissioners who shall be appointed as Independent Commissioners as referred to above shall have a cooling off period of 6 (six) months.*
10. *The transition from a Non-Independent Commissioner to an Independent Commissioner shall be subject to the approval of the Financial Services Authority*
11. *The Independent Commissioner who has served for 2 (two) consecutive term periods may be reappointed in the next period as the Independent Commissioner in case:*
    a. *A meeting of members of the Board of Commissioners considers that the Independent Commissioner can still act independently; and*
    b. *The Independent Commissioner declares in the SGM regarding the relevant independence.*
12. *The independence statement of the Independent Commissioner as referred above shall be disclosed in the report on the implementation of GCG.*

Pernyataan Komisaris Independen

Masing-masing anggota Komisaris Independen telah membuat Surat Pernyataan Independen yang memuat bahwa masing-masing anggota Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa salah satu Komisaris Independen memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independens, maka yang bersangkut bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen nya dan bersedia untuk diganti, dan selanjutnya pernyataan ini disampaikan kepada OJK.

Independensi Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris Bank Papua telah memenuhi kondisi-kondisi yang menunjukkan independensi mereka yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Papua maupun kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain baik di dalam maupun luar negeri.
2. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari Bank Papua selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
3. Anggota Dewan Komisaris mampu menjalankan tugas, menyatakan pendapat atau melaporkan kinerja sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris secara independen tanpa dikendalikan oleh pemegang saham utama perusahaan.
4. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan perihal independensinya yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi , dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Adapun uraian penjelasannya adalah sebagai berikut:

Statement of Independent Commissioners

Each Independent Commissioner has made an Independent Statement which states that each member of Independent Commissioner has no financial relationship, management relationship, share ownership and / or family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and / or Controlling Shareholders or relations with the Bank, which may affect its ability to act independently as stipulated in the provisions of the Implementation of Governance for Commercial Banks.

In the future, it is found that one Independent Commissioner has financial, management, share ownership and / or family relationships with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and / or Controlling Shareholders or the relationship with the Bank, which may affect his or her ability to act independently , then the concerned shall be willing to give up his Independent Commissioner's position and willing to be replaced, and furthermore this statement shall be communicated to OJK.

Independence of the Board of Commissioners

Each member of the Board of Commissioners of Bank Papua has fulfilled the conditions that indicate their independence, namely:

1. *The members of the Board of Commissioners have disclosed the ownership of shares of 5% (five percent) or more in Bank Papua and their shareholding in other companies either domestically or abroad.*
2. *Members of the Board of Commissioners shall not take and / or receive personal benefits from Bank Papua other than remuneration and other facilities determined by the SGM.*
3. *Members of the Board of Commissioners shall be able to perform their duties, express opinions or report on performance as stipulated by the Board of Commissioners independently without being controlled by the main shareholders of the company.*
4. *The members of the Board of Commissioners have disclosed the independence of having no financial, management, share ownership and / or family relationships with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and or any controlling shareholder or relationship with the Bank that may affect its ability to act independently. The explanation is as follows:*

Hubungan Keluarga dan Keuangan *Family Relations and Finance*

DEWAN KOMISARIS *BOARD COMMISSIONER*	**HUBUNGAN KELUARGA DENGAN** *FAMILY RELATIONSHIP WITH*						**HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN** *FINANCIAL RELATIONSHIP WITH*					
	Dewan Komisaris *Board Commissioner*		Direksi *BOD*		**Pemegang Saham *Pengendali*** *Controlling shareholders*		**Dewan Komisaris** *Board Commissioner*		Direksi *Directors*		**Pemegang Saham *Pengendali*** *Controlling shareholders*	
	Ya	**Tidak**	**Ya**	**Tidak**	**Ya**	**Tidak**	**Ya**	**Tidak**	**Ya**	**Tidak**	**Ya**	**Tidak**
Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
drh. Constant Karma	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Kepemilikan Saham di atas 5% *Shareholding above 5%*

Nama *Name*	**Saham di Bank** *Shares in Bank*	**Saham di Perusahaan Lain** *Shares in Other Companies*
Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th	Nihil	Nihil
drh. Constant Karma	Nihil	Nihil

Rangkap Jabatan *Multiple Positions*

Nama *Name*	**Nama Perusahaan** *Company Name*	**Jabatan** *Position*	**Keterangan** *Information*
Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th	Nihil	Nihil	-
drh. Constant Karma	Nihil	Nihil	-

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under Board of Commissioner

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Bank, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Penetapan dan pembentukan Seluruh komite tersebut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

To support the implementation of the BOC's oversight function of the management of the Bank, the BOC is assisted by the Audit Committee, Risk Oversight Committee and Remuneration and Nomination Committee. Establishment and establishment All of these committees are in accordance with the OJK Decree No. 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of GCG for Commercial Banks.

Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris terdiri dari :

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Remunerasi & Nominasi.

Committees under the Board of Commissioners consist of:

1. Audit Committee;
2. Risk Oversight Committee;
3. Remuneration & Nomination Committee.

Untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme pengawasan organisasi oleh Dewan Komisaris Bank Papua mengangkat anggota Komite sesuai dengan SK Nomor: 29/DIR-BPD/ VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 maka anggota komite sebelumnya dinyatakan tidak aktif.

To provide an overview of the organizational oversight mechanism by the Board of Commissioners of Bank Papua to appoint members of the Committee in accordance with Decree No. 29 / DIR-BPD / VI / 2017 dated June 12, 2017, the previous committee members are declared inactive.

KOMITE AUDIT

Berdasarkan pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dijelaskan bahwa Komite Audit beranggotakan paling sedikit satu orang Komisaris Independen, satu orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Keuangan atau Akuntansi dan satu orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Hukum atau Perbankan, Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

AUDIT COMMITTEE

Based on Article 41 of the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, it is explained that the Audit Committee consists of at least one Independent Commissioner, one person from an Independent Party having expertise in finance or accounting and one person from an Independent Party possesss legal or banking expertise The audit committee is led by an Independent Commissioner and also serves as a member of the audit committee must have good integrity, morals and morals.

Komite Audit Bank Papua adalah komite yang membantu Komisaris dalam pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal dan efektifitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal. Anggota Komite Audit diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Audit adalah memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Tidak ada anggota Direksi bank maupun anggota Direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Audit. Sesuai ketentuan bahwa minimal anggota Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap sebagai anggota, seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian

The Audit Committee of Bank Papua is a committee that assists the BOC in oversight of matters relating to financial information, internal control system and audit effectiveness of external and internal auditors. Members of the Audit Committee are appointed by the BOD based on the decision of the BOC meeting. The general criteria to be appointed as an Audit Committee is to have good integrity, morals and morals. No member of the BOD of a bank nor any member of the BOD of another bank who is a member of the Audit Committee. In accordance with the provision that at least the members of the Audit Committee shall be composed of an Independent Commissioner as Chairman and also a member, an Independent Party has expertise in finance or accounting

di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Sepanjang tahun 2017, anggota Komite Dewan Komisaris Bank Papua berjumlah 4 (empat) orang, 2 (dua) orang anggota Komisaris dan dua orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Utama dan seluruh keanggotaan Komite Audit telah memenuhi pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

A. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Terhitung mulai tanggal 12 Juni susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank Papua diubah menjadi sebagai berikut, berdasarkan SK Direksi Nomor.29/DIR-BPD/VI/2017 tentang pengangkatan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun adalah sebagai berikut:

and an independent Party having expertise in law or banking.

Throughout 2017, members of the Committees of the Board of Commissioners Bank Papua's consisted of four members of the BOC and two independent persons with expertise in finance and accounting. The Audit Committee is led by the President Commissioner and all members of the Audit Committee have complied with section 41 of the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 dated December 7, 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

A. Structure and Membership of the Audit Committee

As of June 12, the Membership of the Risk Oversight Committee of Bank Papua shall be amended as follows, in accordance with Decree No. 29 / DIR-BPD / VI / 2017 of the Board of Directors of the Board of Commissioners of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua for a period of 3 (three) years are as follows:

SUSUNAN KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE COMPOSITION

Jabatan *Position*	Nama *Name*	Keterangan	*Information*
Ketua	Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th	Komisaris Utama	*President Commissioner*
Anggota	drh. Constant Karma	Komisaris	*Commissioner*
Anggota	Jonathan Sesa, SE	Pihak Independen	*Independent Party*
Anggota	Marthin Yanis Warikar, SE	Pihak Independen	*Independent Party*

B. Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Secara umum, persyaratan keanggotaan Komite Audit Bank adalah sebagai berikut :

1. Memiliki integritas yang tinggi, akhlak, moral, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Bersifat independen dan profesional, baik dalam penampilan (*in appearance*) maupun dalam kenyataan (*in act*);
3. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntasi atau keuangan atau perbankan;
4. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan terkait lainnya;

B. Qualification of Educational and Working Experience of Audit Committee

In general, the membership requirements of the Bank Audit Committee are as follows:

1. *Having high integrity, morals, morals, abilities, knowledge and experience adequate in accordance with educational background, and able to communicate well;*
2. *Be independent and professional, both in appearance and in the act;*
3. *A member of the Audit Committee has a background in accounting or finance or banking education;*
4. *Having a sufficient knowledge to read and understand financial statements;*
5. *Having adequate knowledge of the laws and regulations of the capital market and other relevant laws and regulations;*

6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit, dan atau jasa konsultansi lain kepada Bank dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris;
7. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham akibat peristiwa hukum maka jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkannya kepada pihak lain;

6. Not a person in the Public Accounting Firm, Legal Consultant Office, or any other party providing audit services, non-audit services, and or other consultancy services to the Bank within the last 6 (six) months prior to appointment by the Commissioner;

7. Not having shares, directly or indirectly, to the Company. In the event that a member of the Committee obtains shares due to a legal event, the maximum period of 6 (six) months after the acquisition of such shares shall be transferred to the other party;

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut :

The educational qualifications and work experience of the Chairman and Members of the Audit Committee are as follows:

Nama *Nama*	Pendidikan *Pendidikan*	Pengalaman Kerja	*Pengalaman Kerja*
Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th	Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar, tahun 1993	Penasehat spiritual Pemerintah Provinsi Papua selama 10 tahun berturut-turut tahun 2006 sampai sekarang, Direktur di Yayasan Global Ministries Indonesia tahun 1997 sampai sekarang.Tim penyusun PERDASI dan PERDASUS Provinsi Papua, Panitia tim seleksi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua.	*Papua Provincial spiritual advisor for 10 consecutive years 2006 until now, Director at Global Ministries Indonesia Foundation 1997 to present. Tim compilers PERDASI and PERDASUS Papua Province, Selection team team members of Papua People's Assembly (MRP) Papua Province.*
drh. Constant Karma	S1/Kedokteran UGM, tahun 1981	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Dati I Irian Jaya tahun 1997, Wakil Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi Dati I Irian Jaya tahun 2000, Kepala Dinas Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2006, Staff Ahli Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2009, Sekretaris Daerah Provinsi Papua tahun 2010	*Head of Livestock Service Office of Irian Jaya Province in 1997, Vice Governor of Irian Jaya Province in 2000, Head of Livestock Service Office of Papua Province Regional Government in 2006, Expert Staff of Papua Province Local Government in 2009, Papua Province Regional Secretary 2010*
Jonathan Sesa, SE	S1/Sarjana Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 1987	Sebelum diangkat menjadi anggota Komite Audit, yang bersangkutan adalah Pensiunan Pegawai Bank Papua, dimana Jabatan terakhirnya adalah Kepala Divisi Akuntansi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.	*Prior to his appointment as a member of the Audit Committee, he was a retired Bank Papua Employee, whose last position was Head of Accounting Division of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.*
Marthin Yanis Warikar, SE	S1/Sarjana Ekonomi Universitas Cenderawasih Jayapura, tahun 1999	Sebelum diangkat menjadi anggota Komite Audit, yang bersangkutan adalah Pensiunan Pegawai Bank BNI tahun 2015, dimana Jabatan terakhirnya adalah Wakil Pemimpin Cabang Baubau, Sulawesi Tenggara pada tahun 2011.	*Prior to his appointment as a member of the Audit Committee, he was a Retired Employee of Bank BNI in 2015, where his last position was Baubau Deputy Branch Manager, Southeast Sulawesi in 2011.*

C. Independensi Komite Audit

1. Komite Audit Perseroan terdiri dari 4 (empat) orang, yang diketuai oleh Komisaris Utama, 1 (satu) orang Komisaris Bank serta dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen;
2. Kompetensi/kualifikasi sebagai anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan bahwa setiap anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang baik dan memiliki pengetahuan serta pengalaman yang cukup, paling tidak dalam salah satu bidang

C. Independence of the Audit Committee

1. The Company's Audit Committee consists of 4 (four) persons, led by the President Commissioner, 1 (one) Commissioner of the Bank and assisted by 2 (two) members of the Audit Committee from independent parties;
2. Competence / qualification as a member of the Audit Committee has fulfilled the requirement that each member of the Audit Committee should have good integrity and possess sufficient knowledge and experience, at least in one area of audit, banking,

audit, perbankan, keuangan, atau akuntansi, serta memiliki pengetahuan serta pengalaman yang cukup dalam bidang-bidang lain yang dianggap perlu dalam melaksanakan tugasnya;

3. Anggota Komite Audit dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen;
4. Anggota Komite Audit tidak ada berasal dari Direksi Bank Papua maupun dari bank lain;
5. Rangkap jabatan anggota Komite Audit dari pihak Independen telah memperhatikan dan mempertimbangkan kompetensi, kriteria, independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab;
6. Khusus bagi anggota Komite Audit dari pihak Independen, dimintakan untuk membuat surat pernyataan independensi yang ditandatangani diatas materai.

D. Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, diatur bahwa Komite Audit Bank wajib untuk :

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap :
   a. Pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern;
   b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;
   c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan;
   d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan otoritas jasa keuangan guna memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris
3. Wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Komite Audit Bank Papua bertugas mengevaluasi, mengidentifikasi hal-hal yang

finance or accounting, as well as having knowledge and experience sufficient in other areas deemed necessary in the performance of its duties;

3. The members of the Audit Committee of an independent party have no financial, management, share ownership and / or family relationship with the BOC, BOD and / or Controlling Shareholders which may affect their ability to act independently;

4. Members of the Audit Committee are not from the BOD of Bank Papua or other banks;
5. Dual positions of members of the Audit Committee of the Independent Party have taken into consideration and consider the competence, criteria, independence, confidentiality, code of conduct and execution of duties and responsibilities;
6. Especially for members of the Audit Committee of Independent parties, are required to make a statement of independence signed on stamp duty.

D. Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Based on the Decree of the OJK No. 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of GCG for Commercial Banks, it is stipulated that the Bank's Audit Committee is obliged to:

1. Conduct monitoring and evaluation of audit planning and implementation and monitoring of follow-up audit results in order to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of the financial reporting process.
2. Must monitor and evaluate at least to :
   a. Implementation of internal audit works unit tasks;
   b. The suitability of audit implementation by the public accounting firm with audit standard;
   c. The suitability of financial statements with financial accounting standards;
   d. The implementation of the follow-up actions by the BOD on the findings of the internal audit work unit, public accountant, and supervisory results of the Keuanganguna Service Authority provides recommendations to the BOC
3. It is obligatory to recommend the appointment of public accountant and public accountant's office to the BOC to be submitted to the SGM.

In line with the Regulation of the Financial Services Authority, the Bank's Audit Committee is responsible for evaluating, identifying matters of special concern

memerlukan perhatian khusus serta memberikan pendapat secara profesional yang independen kepada Komisaris di bidang laporan keuangan dari Direksi , auditor internal, auditor eksternal, dan objektivitas akuntan publik.

Diantara tugas dan tanggungjawab Komite Audit antara lain adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh SKAI;
2. Meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI;
3. Memberikan persetujuan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin SKAI oleh Direksi dan dilaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
4. Menyetujui *Internal Audit Charter*, menanggapi rencana Audit Intern dan masalah-masalah yang ditemukan oleh Auditor Intern serta menentukan pemeriksaan khusus oleh SKAI, apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
5. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal audit tidak menindaklanjuti laporan SKAI;
6. Memastikan bahwa manajemen menjamin baik Auditor Ekstern maupun Intern dapat bekerja sesuai dengan Standar Audit yang berlaku;
7. Memastikan independensi dan obyektivitas akuntan publik
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan publik, serta melakukan evaluasi terhadap kandidat minimal 3 (tiga) tahun sekali untuk menjaga kemandirian dari akuntan publik yang ditunjuk;
9. Memastikan kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
10. Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat;
11. Mengevaluasi kebijakan pengendalian risiko.

E. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit 2017

Sepanjang tahun 2017 Komite Audit telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Membahas dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan Rencana Bisnis tahun 2017;
2. Membahas dan melakukan kajian atas kecukupan perencanaan dan pelaksanaan audit oleh SKAI;
3. Membahas isu-isu signifikan terhadap laporan keuangan dan menelaah efektifitas kinerja auditor eksternal (KAP);
4. Melakukan pemantauan dan mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan audit

and providing independent professional opinion to the Commissioner in the field of financial statements of the BOD, internal auditors, external auditors and the objectivity of public accountants.

Among the duties and responsibilities of the Audit Committee are as follows:

1. *Evaluating the findings of inspections by the SKAI;*
2. *Requests the BOD to follow up the findings of the SKAI examination;*
3. *To approve the appointment and dismissal of the SKAI Leaders by the BOD and to be reported to the Financial Services Authority;*
4. *Approved the Internal Audit Charter, responding to the Internal Audit plan and the issues encountered by the Internal Auditor and determining special inspections by the Internal Audit Unit, in the case of alleged fraud, deviations from applicable laws and regulations;*
5. *Take the necessary steps in the event that the audit does not follow up on the SKAI report;*
6. *Ensure that management guarantees both the External and Internal Auditors can work in accordance with the applicable Audit Standards;*
7. *Ensure the independence and objectivity of public accountants;*
8. *Provide recommendations to the BOC regarding the appointment of public accountants, and to evaluate candidates at least 3 (three) years to maintain independence from appointing public accountants;*
9. *Ensure adequate audits by public accountants to ensure that all important risks have been considered;*
10. *Ensure that management has performed its business in accordance with sound Bank management principles;*
11. *Evaluate risk control policies.*

E. Audit Committee Activity Report 2017

Throughout the year 2017, the Audit Committee has implemented various activities in order to carry out the following duties and responsibilities:

1. *Discuss and evaluate the achievement of the implementation of the Business Plan 2017;*
2. *Discuss and review the adequacy of planning and implementation of the audit by the SKAI;*
3. *Discuss significant issues with the financial statements and reviews the effectiveness of the performance of the external auditors (KAP);*
4. *Conducting monitoring and encouraging the completion of the follow up of audit results internally*

intern & ekstern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk keandalan pelaporan keuangan;
5. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan berupa laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
6. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
7. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada RUPS;

and internally in order to assess the adequacy of internal controls including the reliability of financial reporting;
5. *Reviewing financial information in the form of financial statements, projections and other financial information;*
6. *Reviewing the company's compliance with regulations relating to corporate activities;*
7. *Provide recommendations on the appointment of Public Accountant Firm (KAP) to the BOC to be submitted to the SGM*

Rapat Komite Audit

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, Komite Audit menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan yang dipimpin oleh ketua Komite Audit. Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Selama tahun 2017, Komite Audit telah menyelenggarakan empat kali rapat dengan frekuensi dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat sebagai berikut :

Audit Committee Meetings

In accordance with the Audit Committee Charter, the Audit Committee conducts meetings in accordance with the needs presided by the chair of the Audit Committee. The decision of the Audit Committee Meeting shall be taken pursuant to the consensus deliberation. During 2017, the Audit Committee has held four meetings with the frequency and attendance of the committee members in the meeting as follows:

Hari/Tanggal *Date and time*	Peserta *Participants*		Agenda Rapat	*Meeting agenda*
Selasa, 13 Maret 2017	Lipiyus Biniluk, M.Th drh. *Cos*tant Karma Anthon Tanggaguling Bachrum Harahap Bambang Setyowanto Yuliana D. Yembise Sri Utami Richard Goszal Hamsah M. Hairunnisa	(Ketua Komite) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (SKAI) (SKAI) (SKAI) (SKAI) (SKAI) (SKAI)	Pembahasan Hasil Audit KAP tahun 2016	*Discussion on KAP Audit Results 2016*
Senin, 19 Juni 2017	Lipiyus Biniluk, M.Th drh. Constant Karma Jonathan Sesa Marthin Yanis Warikar Ivan B. Simamora	(Ketua Komite) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota Komite Pemantau Risiko)	Pembahasan Penunjukan Jasa Audit KAP Tahun 2017	*Discussion of Appointment of KAP Audit Service Year 2017*
Kamis, 22 Juni 2017	Lipiyus Biniluk, M.Th drh. Constant Karma Jonathan Sesa Marthin Yanis Warikar Ivan B. Simamora	(Ketua Komite) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota Komite Pemantau Risiko)	- Pembahasan dan Simulasi Laporan Keuangan semester I Tahun 2017 untuk rencana hapus buku - Penentunan KAP Tahun 2017	- *Discussion and Simulation of Financial Statements for the first semester of 2017 for written off* - *KAP 2017 Preparation*
Jumat, 14 Juli 2017	Lipiyus Biniluk Constant Karma Jonathan Sesa Marthin Yanis Warikar Ivan B. Simamora	(Ketua Komite) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota Komite Pemantau Risiko)	- Menentukan KAP tahun 2017 - Pembahasan rencana hapus buku	- *Determine KAP 2017* - *Discussion of written off plan*
Selasa, 8 Agustus 2017	Lipiyus Biniluk Constant Karma Jonathan Sesa Marthin Yanis Warikar Ivan B. Simamora	(Ketua Komite) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota Komite Pemantau Risiko)	- Pembahasan laporan semester I tahun 2017 serta Evaluasi Neraca bulan Juli 2017	- *Discussion of the first semester report in 2017 and the Evaluation of Balance Sheet in July 2017*

Hari/Tanggal *Date and time*	Peserta		Agenda Rapat	*Meeting agenda*
Rabu. 6 September 2017	Lipiyus Biniluk Constant Karma Jonathan Sesa Marthin Yanis Warikar Ivan B. Simamora	(Ketua Komite) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota Pemantau Risiko)	Evaluasi Neraca Konsolidasi Bank Papua periode 31 Agustus 2017	*Evaluation of Consolidated Balance Sheet of Bank Papua period 31st August 2017*
Rabu, 18 Oktober 2017	Lipiyus Biniluk Constant Karma Jonathan Sesa Marthin Yanis Warikar Ivan B. Simamora	(Ketua Komite) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota Komite Pemantau Risiko)	Rapat gabungan terkait Penyelesaian Kredit Bermasalah (NPL) serta penagihan Kredit per September 2017	*Composite meetings related to Non Performing Loan Settlement (NPL) as well as Loan collection per September 2017*
Senin, 20 November 2017	Lipiyus Biniluk Constant Karma Jonathan Sesa Marthin Yanis Warikar Ivan B. Simamora	(Ketua Komite) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota Komite Pemantau Risiko)	Komite Dewan Komisaris rapat awal pelaksanaan KAP Tahun 2017 perihal "Kick Off Meeting KAP Hertanto, Direksi dan Komite Dewan Komisaris membahas pelaksanaan Audit Tahun 2017	*Board of Commissioners Committee of the initial meeting of KAP 2017 regarding Kick Off Meeting KAP Hertanto, Board of Directors and Board of Commissioners Committee discussed the implementation of Audit Year 2017*
Selasa, 12 Desember 2017	Lipiyus Biniluk Constant Karma Jonathan Sesa Marthin Yanis Warikar Ivan B. Simamora	(Ketua Komite) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota Komite Pemantau Risiko)	exit meeting tentang hasil pokok-pokok pemeriksaan TI	*Exit meeting on the results of IT audit*
Kamis, 14 Des 2017	Lipiyus Biniluk Constant Karma Jonathan Sesa Marthin Yanis Warikar	Ketua Komite) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota Komite Pemantau Risiko)	Membahas dan membuat analisa Laporan laba/rugi trend bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober tahun 2017	*Discuss and analyze the July / August, October, and October 2017 earnings / loss reports*

G. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran setiap anggotanya Komite Audit secara fisik dalam rapat disajikan di dalam tabel berikut ini :

G. Meeting Frequency and Attendance Level of Meetings

The frequency of meetings and attendance of each member of the Audit Committee physically at the meeting is presented in the following table:

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN KOMITE AUDIT
FREQUENCY MEETING AND LEVEL OF AUDIT COMMITTEE ATTENDANCE

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jumlah Rapat *Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*	Persentase (%) *Percentage (%)*
Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th	Ketua Komite / *Chairman*	10	10	100%
drh. Constant Karma	Anggota / *Member*	10	10	100%
Jonatan Sesa, SE	Anggota / *Member*	10	9	90%
Marthin Yanis Warikar, SE	Anggota / *Member*	10	9	90%
Ivant B. Simamora S.Sos	Anggota / *Member*	10	9	90%

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Berdasarkan pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dijelaskan bahwa Komite Pemantau Risiko beranggotakan paling sedikit satu orang Komisaris Independen, satu orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan satu orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Komite pemantau risiko diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota. Anggota komite pemantau risiko wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja yang telah disusun pada unit kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap eksposure risiko Bank, baik operasional maupun non operasional. Komite Pemantau Risiko dibentuk bertujuan melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi dan saran atas berbagai kegiatan perusahaan sehingga perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Direksi .

RISK OVERSIGHT COMMITTEE

Based on Article 42 of the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning the Application of Governance for Commercial Banks, it is explained that the Risk Oversight Committee shall consist of at least one Independent Commissioner, one Independent Party with expertise in finance and one Independent Party having expertise in risk management. The Risk Oversight Committee is led by an Independent Commissioner who doubles as a member. Members of the risk oversight committee shall have good integrity, morals, and good morals.

The Risk Oversight Committee is established to ensure that the framework established in the risk management unit has provided adequate protection against the Bank's risk exposure, both operational and non-operational. The Risk Oversight Committee is formed to evaluate the suitability of risk management policy with the implementation of the policy and to monitor and evaluate the execution of the Risk Management Committee and Risk Management Working Unit tasks to provide recommendations and suggestions on various activities of the company so that the Board of Commissioners' and supervisory functions of the Board of Directors.

A. Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Terhitung mulai tanggal 12 Juni susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank Papua diubah menjadi sebagai berikut, berdasarkan SK Direksi Nomor.29/DIR-BPD/VI/2017 tentang pengangkatan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun adalah sebagai berikut:

A. Structure and Membership of the Risk Oversight Committee

As of June 12, the Membership of the Risk Oversight Committee of Bank Papua shall be amended as follows, in accordance with Decree No. 29 / DIR-BPD / VI / 2017 of the Board of Directors of the Board of Commissioners of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua for a period of 3 (three) years are as follows:

SUSUNAN KOMITE PEMANTAU RISIKO
THE COMPANY OF RISK OVERSIGHT COMMITTEE

Jabatan *Position*	Nama *Nama*	Keterangan	*Information*
Ketua	Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th	Komisaris Utama	*President Commissioner*
Anggota	drh. Constant Karma	Komisaris	*Commissioner*
Anggota	Jonathan Sesa, SE	Pihak Independen	*Independent Party*
Anggota	Ivant B. Simamora, S.Sos	Pihak Independen	*Independent Party*

B. Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Secara umum persyaratan keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank adalah sebagai berikut :

1. Memiliki integritas yang tinggi, akhlak, moral, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang

B. Educational Qualification and Work Experience of Risk Oversight Committee

In general, the membership requirements of the Bank's Risk Oversight Committee are as follows:

1. *Having high integrity, morals, morals, abilities, knowledge and experience adequate in accordance with educational background, and able to*

pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Bersifat independen dan profesional, baik dalam penampilan (*in appearance*) maupun dalam kenyataan (*in act*);
3. Masing-masing pihak Independen memiliki keahlian di bidang keuangan dan keahlian di bidang manajemen risiko;
4. Tidak berasal dari anggota Direksi , baik pada Bank yang sama maupun pada Bank lain;

communicate well;

2. *Be independent and professional, both in appearance (in appearance) and in reality (in the act);*
3. *Each Independent Party has expertise in finance and expertise in risk management;*
4. *Not from members of the Board of Directors, either at the same Bank or other Banks;*

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

The educational qualifications and work experience of the Risk Oversight Committee members are as follows:

Nama *Name*	Pendidikan *Education*	Pengalaman Kerja	*Work experience*
Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th	Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar, tahun 1993	Penasehat spiritual Pemerintah Provinsi Papua selama 10 tahun berturut-turut tahun 2006 sampai sekarang, Direktur di Yayasan Global Ministries Indonesia tahun 1997 sampai sekarang. Tim penyusun PERDASI dan PERDASUS Provinsi Papua, Panitia tim seleksi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua.	*Papua Provincial spiritual advisor for 10 consecutive years in 2006 until now, Director at Global Ministries Indonesia Foundation 1997 until now. The drafting team of Provincial Regulation and Provincial Regulation of Papua Province, Committee of Papuan Papua People Assembly team (MRP) selection team.*
drh. Constant Karma	S1/Sarjana Kedokteran UGM, tahun 1981	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Dati I Irian Jaya tahun 1997, Wakil Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi Dati I Irian Jaya tahun 2000, Kepala Dinas Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2006, Staff Ahli Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2009, Sekretaris Daerah Provinsi Papua tahun 2010.	*Head of the Livestock Service Office of Irian Jaya Province in 1997, Vice Governor of of Irian Jaya Province in 2000, Head of Livestock Service of Papua Province Local Government in 2006, Expert Staff of Papua Province Local Government in 2009, Papua Province Secretary in 2010.*
Jonathan Sesa, SE	S1/Sarjana Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 1987	Sebelum diangkat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko, yang bersangkutan adalah Pensiunan Pegawai Bank Papua, dimana Jabatan terakhirnya adalah Kepala Divisi Akuntani PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.	*Prior to his appointment as a member of the Risk Oversight Committee, he was a retired Bank Papua employee, whose last position was Head of Accounting Division of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.*
Ivant B. Simamora, S.Sos	S1/Sarjana Administrasi Bisnis Universitas Atmajaya, tahun 2003	Sebelum diangkat menjadi angota Komite Pemantau Risiko, yang bersangkutan adalah Pensiunan Pegawai Bank Victoria Internasional, Dimana jabatan terakhirnya adalah Branch Manager at Bank Vctoria International.Tbk Jakarta Barat 11480	*Prior to being appointed as a member of the Risk Oversight Committee, he was a retired employee of Victoria International Bank, where his last position was Branch Manager at Bank Vctoria International.Tbk West Jakarta 11480*

C. Independensi Komite Pemantau Risiko

Independensi Komite Pemantau Risiko Bank Papua adalah sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko Bank terdiri dari 4 (empat) orang, yang diketuai oleh Komisaris Utama, 1 (satu) orang Komisaris Bank serta dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen;
2. Memenuhi kriteria integritas, akhlak, dan moral yang baik yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
3. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

C. Independence of the Risk Oversight Committee

Independence of the Risk Oversight Committee of Bank Papua is as follows:

1. *The Bank's Risk Oversight Committee shall consist of 4 (four) persons, led by the President Commissioner, 1 (one) Commissioner of the Bank and assisted by 2 (two) members of the Risk Oversight Committee from independent parties;*
2. *Meeting the criteria of integrity, good morals and morals as required in the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks;*
3. *Not having financial, management, share ownership*

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen;
4. Anggota Komite Pemantau Risiko tidak ada yang berasal dari Direksi Perseroan maupun dari Bank lain;
5. Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan tidak merangkap jabatan atau terafiliasi sebagai pejabat dalam struktur organisasi Perseroan;
6. Rangkap jabatan anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen telah memperhatikan dan mempertimbangkan kompetensi, kriteria, independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab;
7. Khusus bagi anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak Independen, dimintakan untuk membuat surat pernyataan independensi yang ditandatangani diatas materai.

D. Tugas dan Tanggungjawab Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, diatur bahwa Komite Audit Bank wajib untuk :
1. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank; dan
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Selain tugas dan tanggungjawab yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.03/2016 di atas Komite Pemantau Risiko Bank Papua membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam penerapan manajemen risiko agar dapat terlaksana secara efektif, serta menyarankan langkah–langkah antisipatif yang harus diambil Direksi dalam pengelolaan risiko.

Diantara tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko antara lain adalah :
1. Melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko bank dan memonitor pelaksanaannya;
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
3. Mendorong pemberdayaan fungsi manajemen

and / or family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors and / or Controlling Shareholders or the relationship with the Bank, which may affect its ability to act independently;
4. *Members of the Risk Oversight Committee shall be absent from the Board of Directors of the Company or from other Banks;*
5. *Members of the Risk Oversight Committee The Company does not hold concurrent positions or affiliation as an official in the organizational structure of the Company;*
6. *Members of the Risk Oversight Committee of independent parties have taken into consideration and consider the competence, criteria, independence, confidentiality, code of ethics and performance of duties and responsibilities;*
7. *Particularly for members of the Risk Oversight Committee of the Independent Party, be required to make a statement of independence signed on stamp duty.*

D. Duties and Responsibilities of Risk Oversight Committee

Based on the Decree of the OJK No. 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of GCG for Commercial Banks, it is stipulated that the Bank's Audit Committee is obliged to:
1. *Evaluation of conformity between risk management policy and implementation of Bank policy; and*

2. *Monitoring and evaluation of the implementation of the tasks of risk management committees and risk management units to provide recommendations to the Board of Commissioners.*

The tasks and responsibilities set forth in the Financial Services Authority Regulation No. 55 / POJK.03 / 2016 above the Risk Oversight Committee of Bank Papua assist in the implementation of the supervisory and fostering function of the Board of Commissioners against the Board of Directors and its staff in the implementation of risk management in order to be effected effectively, and suggest anticipatory measures that the Board of Directors must take on risk management.

Among the duties and responsibilities of the Risk Oversight Committee are among others:
1. *Evaluate the bank's risk management policy and monitor its implementation;*
2. *Evaluate the suitability of risk management policies with the implementation of the policy, in order to provide recommendations to the Board of Commissioners;*
3. *Encourage the empowerment of risk management*

risiko Bank Papua;
4. Melakukan pemantauan atas seluruh risiko akibat perubahan-perubahan indikator dalam pasar (suku bunga, kurs dan sebagainya) untuk memastikan perubahan tersebut tidak mengganggu kestabilan Bank Papua;
5. Melakukan pemantauan atas segenap risiko Bank Papua.;
6. Dapat mengakses data dan informasi dari manajemen Bank Papua, yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas pemantauan risiko;
7. Melakukan tugas khusus lainnya yang terkait dengan pemantauan manajemen risiko Bank Papua.

E. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko 2017

Sepanjang tahun 2017 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko bank dan memonitor pelaksanaannya;
2. Melakukan pemantauan atas seluruh risiko akibat perubahan-perubahan indikator dalam pasar (suku bunga, kurs dan sebagainya) untuk memastikan perubahan tersebut tidak mengganggu kestabilan Bank Papua;
3. Melakukan pemantauan atas segenap risiko Bank Papua;
4. Bersama dengan Divisi Manajemen Risiko melakukan pembahasan Laporan Profil Risiko Bank.

F. Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan yang dipimpin oleh ketua Komite. Keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Selama tahun 2017, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 6 kali rapat dengan frekuensi dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat sebagai berikut :

functions of Bank Papua;
4. *Monitoring all risks due to changes in indicators in the market (interest rates, exchange rates and so on) to ensure that changes do not disrupt the stability of Bank Papua;*
5. *To monitor all risk of Bank Papua;*
6. *Can access data and information from the management of Bank Papua, which is required in carrying out the task of risk monitoring;*
7. *Perform other specific tasks related to monitoring of risk management of Bank Papua.*

E. Report on the Activities of the Risk Oversight Committee 2017

Throughout the year 2017, the Risk Oversight Committee has implemented various activities in order to carry out the following tasks and responsibilities:

1. *Evaluate the bank's risk management policy and monitor its implementation;*
2. *Monitoring all risks due to changes in indicators in the market (interest rates, exchange rates and so on) to ensure such changes do not disrupt the stability of Bank Papua;*
3. *Monitoring all risks of Bank Papua;*
4. *Together with the Risk Management Division discussing Bank Risk Profile Report.*

F. Meetings of the Risk Oversight Committee

The Risk Oversight Committee conducts meetings in accordance with the needs led by the cchairman. The decision of the Risk Oversight Committee Meeting is based on consensus deliberation. During 2017, the Risk Oversight Committee has conducted 6 meetings with the frequency and attendance of the following committee members in the meeting as follows:

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO
AGENDA MEETING OF RISK OVERSIGHT COMMITTEE

Tanggal Rapat *Meeting Date*	Peserta Rapat *Meeting Participants*		Agenda Rapat	*Meeting Agenda*
Kamis, 26 Juli 2017	1. Lipiyus Biniluk, M.Th 2. drh. Constant Karma 3. Jonathan Sesa, SE 4. Ivant B. Simamora, S.Sos 5. Marthin Yanis Warikar, SE	1. (Ketua Komite) 2. (Anggota) 3. (Anggota) 4. (Anggota) 5. (Aggota Komite Audit)	Komite membuat laporan semester I tahun buku 2017 Bahas rencana hapus buku	*The Committee prepares the report for first semester of fiscal year 2017* *Discuss deleted plan*
Selasa, 17 Oktober 2017	1. Lipiyus Biniluk, M.Th 2. drh. Constant Karma 3. Jonathan Sesa, SE 4. Ivant B. Simamora, S.Sos 5. Marthin Yanis Warikar, SE 6. Kepala Divisi Manajemen Risiko	1. (Ketua Komite) 2. (Anggota) 3. (Anggota) 4. (Anggota) 5. (Aggota Komite Audit) 6. Perwakilan Divisi Manajemen Risiko	Rapat Komite Dekom bersama Divisi Manajemen Risiko tentang: pembahasan profil risiko Bank Papua TRW III tahun 2017	*Meeting of the Board of Commissioners Committee with Risk Management Division on: discussion of risk profile of Bank Papua Quarter III 2017*

Tanggal Rapat *Meeting Date*	Peserta Rapat *Meeting Participants*		Agenda Rapat	*Meeting Agenda*
Rabu, 18 Oktober 2017	1. Lipiyus Biniluk, M.Th 2. drh. Constant Karma 3. Jonathan Sesa, SE 4. Ivant B. Simamora, S.Sos 5. Marthin Yanis Warikar, SE 6. Direksi Bank Papua	1. (Ketua Komite) 2. (Anggota) 3. (Anggota) 4. (Anggota) 5. (Aggota Komite Audit) 6. Anggota Dewan Direksi	Rapat gabungan Komite Dekom dengan Direksi untuk membahas: 1. Strategi meningkatkan pertumbuhan kredit konsumtif & kontrakting Bank Papua 2. Penjelasan Direksi Bank Papua tentang: penyelesaian kredit bermasalah (NPL) dan penagihan kredit posisi September 2017.	*Joint Committee BOC meeting with the BOD to discuss:* *1. Strategy to increase the growth of consumptive loan & contract of bank Papua* *2. Explanation of the BOD of Bank Papua on: the settlement of non performing loans (NPL) and loan collection position of September 2017.*
Senin, 30 Oktober 2017	1. Lipiyus Biniluk, M.Th 2. drh. Constant Karma 3. Jonathan Sesa, SE 4. Ivant B. Simamora, S.Sos 5. Marthin Yanis Warikar, SE	1. (Ketua Komite) 2. (Anggota) 3. (Anggota) 4. (Anggota) 5. (Aggota Komite Audit)	Rapat Komite Dekom membahas tentang: penetapan waktu rapat gabungan mengenai rencana penarikan dana setoran modal pemda Kab Manokwari.	*The meeting of the BOC discussed: the determination of the joint meeting time regarding the fund withdrawal plan of Manokwari Regency government capital.*
Kamis, 2 November 2017	1. drh. Constant Karma 2. Jonathan Sesa, SE 3. Ivant B. Simamora, S.Sos 4. Marthin Yanis Warikar, SE	1. (Anggota) 2. (Anggota) 3. (Anggota) 4. (Aggota Komite Audit)	Membuat laporan aktivitas Komite Dekom dari Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).	*Reporting the activities of the Board of Commissioners Committee of the Risk Management Unit (SKMR).*
Selasa, 12 Desember 2017	1. Lipiyus Biniluk, M.Th 2. drh. Constant Karma 3. Jonathan Sesa, SE 4. Ivant B. Simamora, S.Sos 5. Marthin Yanis Warikar, SE 6. Direksi Bank Papua 7. Kepala Divisi Teknologi Informasi	1. (Ketua Komite) 2. (Anggota) 3. (Anggota) 4. (Anggota) 5. (Anggota) Komite Audit) 6. Anggota Dewan Direksi 7. Kepala Divisi TI Bak Papua	Rapat gabungan Komisaris, Komite, Direksi , Divisi dan OJK exit meeting tentang hasil pokok-pokok pemeriksaan TI	*Joint Meeting of BOC, Committees, BOD, Divisions and OJK exit meeting on the results of IT examination*

G. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran setiap anggota Komite Pemantau Risiko secara fisik dalam rapat disajikan di dalam tabel berikut ini :

G. Meeting Frequency and Attendance Level of Meetings

The frequency of meetings and attendance of each member of the Physical Risk Oversight Committee in the meeting are presented in the following table:

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN KOMITE PEMANTAU RISIKO *FREQUENCY MEETING AND LEVEL OF ATTENDANCE OF RISK OVERSIGHT COMMITTEE*				
Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jumlah Rapat *Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*	Persentase (%) *Percentage (%)*
Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th	Ketua / *Chairman*	6	5	90%
drh. Constant Karma	Anggota / *Member*	6	6	100%
Jonathan Sesa, SE	Anggota / *Member*	6	6	100%
Ivant B. Simamora, S.Sos	Anggota / *Member*	6	6	100%

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Berdasarkan pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dijelaskan bahwa Komite remunerasi dan nominasi beranggotakan paling sedikit satu orang Komisaris Independen, satu orang Komisaris, dan satu orang Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Sumber Daya Manusia atau satu orang perwakilan pegawai. Komite remunerasi dan nominasi diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota. Dalam hal anggota komite remunerasi dan nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Papua diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk untuk membantu Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kualifikasi dan proses nominasi serta remunerasi Komisaris dan Direksi . Komite ini juga mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas remunerasi Direksi untuk diajukan kepada RUPS guna mendapatkan persetujuan untuk diangkat menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Tidak ada Direksi bank maupun Direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

A. Struktur dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk susunan kenggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Papua diubah berdasarkan SK Direksi Nomor 29/DIR-BPD/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 berjumlah 3 (tiga) orang 2 (dua) orang anggota Komisaris dan 1 (satu) orang adalah Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia (SDM).

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Based on article 43 of the OJK No.55 / POJK.03 / 2016 dated December 7, 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, it is explained that the remuneration and nomination committee comprises at least one Independent Commissioner, one Commissioner and one Executive Officer which in charge of human resources or a representative employee. The remuneration and nomination committee is led by an Independent Commissioner and a member. In the event that members of the remuneration and nomination committee are determined by more than 3 (three) persons, the Independent Commissioner shall be at least 2 (two) members.

Members of the Remuneration and Nomination Committee of the Bank Papua are appointed by the BOD based on the decision of the BOC' meeting. The formation of the Remuneration and Nomination Committee is conducted to comply with the provisions of the OJK No. 55 / POJK.03 / 2016 dated December 7, 2016 concerning the Implementation of GCG for Commercial Banks.

The Nomination and Remuneration Committee was established to assist the BOC in exercising supervisory functions on matters relating to the qualifications and nomination process and the remuneration of Commissioners and Directors. The Committee also evaluates and recommends to the BOC the remuneration of the BOD to be submitted to the SGM for approval to be appointed as the Remuneration and Nomination Committee is to have good integrity, morals and morals. No BOD or BOD of other banks are members of the Remuneration and Nomination Committee.

A. Structure and Membership of Remuneration and Nomination Committee

For the membership of the Remuneration and Nomination Committee of Bank Papua amended by Decree of the BOD Number 29 / DIR-BPD / VI / 2017 dated June 12, 2017 amounting to 3 (three) persons 2 (two) members of the BOC and 1 (one) person is the Leader of the Division of Human Resources (HR).

SUSUNAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI *COMMITTEE OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE*			
Jabatan *Position*	Nama *Name*	Keterangan	*Information*
Ketua / *Chairman*	Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th	Komisaris Utama	*President Commissioner*
Anggota / *Member*	drh. Constant Karma	Komisaris	*Commissioner*
Anggota / *Member*	Jonathan Auparay	Divisi SDM	*Human Resources Division*

B. Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Keanggotaan seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak terpisah melainkan menjadi satu kesatuan. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki kompetensi dan pengetahuan mengenai sistem remunerasi, sistem nominasi dan succession plan Bank Papua.

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

B. Qualification of Educational and Working Experience of Remuneration and Nomination Committee

Membership of all Remuneration and Nomination Committee members is not separate but becomes a unity. Members of the Remuneration and Nomination Committee have the competence and knowledge of the remuneration system, the nomination system and the succession plan of Bank Papua.

The educational qualifications and work experience of the Remuneration and Nomination Committee members are as follows:

Nama *Name*	Pendidikan	Pengalaman Kerja	*Work experience*
Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th	Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar, tahun 1993	Penasehat spiritual Pemerintah Provinsi Papua selama 10 tahun berturutturut tahun 2006 sampai sekarang, Direktur di Yayasan Global Ministries Indonesia tahun 1997 sampai sekarang.Tim penyusun PERDASI dan PERDASUS Provinsi Papua, Panitia tim seleksi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua.	*Papua Provincial spiritual advisor for 10 consecutive years in 2006 until now, Director at Global Ministries Indonesia Foundation 1997 until now. The drafting team of Provincial Regulation and Provincial Regulation of Papua Province, Committee of Papuan Papua People Assembly team (MRP) selection team.*
drh. Constant Karma	S1/Kedokteran UGM , tahun 1981	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Dati I Irian Jaya tahun 1997, Wakil Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi Dati I Irian Jaya tahun 2000, Kepala Dinas Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2006, Staff Ahli Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2009, Sekretaris Daerah Provinsi Papua tahun 2010	*Head of the Livestock Service Office of Irian Jaya Province in 1997, Vice Governor of of Irian Jaya Province in 2000, Head of Livestock Service of Papua Province Local Government in 2006, Expert Staff of Papua Province Local Government in 2009, Papua Province Secretary in 2010.*
Jonathan Auparay	S1/Sarjana Manajemen Perusahaan STIE Otto & Geisler Jayapura, Tahun 2005	Menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia sejak 21 Juni 2017, Kepala Kantor Cabang Bintuni pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 05 Oktober 2015 serta Kepala Kantor Cabang Waren pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tanggal 16 Mei 2013	*Occupied as Head of Human Resource Division since June 21, 2017, Head of Bintuni Branch Office at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since 05 October 2015 and Branch Manager of Waren at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua since May 16, 2013*

C. Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yang diketuai oleh Komisaris Utama, 1 (satu) orang Komisaris Bank serta dibantu oleh Kepala Divisi SDM yang memiliki kompetensi dan pengetahuan mengenai sistem remunerasi, sistem nominasi dan *succession plan* Bank Papua;
2. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki kompetensi dan pengetahuan mengenai sistem remunerasi, sistem nominasi dan *succession plan* Perseroan, tata kelola Bank dan Budaya Kerja;
3. Susunan Komposisi, keahlian dan kriteria independensi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, dimana seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

D. Tugas dan Tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, diatur bahwa tugas utama Komite Remunerasi dan Nominasi adalah membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris khusus tentang penetapan Remunerasi dan Nominasi di Bank. Diantara tugas dan tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain adalah :

1. Terkait Fungsi Nominasi
   a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
   b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
   c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit serta anggota komite pemantau risiko kepada Dewan Komisaris.

C. Independence of Remuneration and Nomination Committee

1. *The Bank's Remuneration and Nomination Committee consist of 3 (three) persons, led by the President Commissioner, 1 (one) Commissioner of the Bank and assisted by Head of HR Division with competence and knowledge of remuneration system, nomination system and succession plan of Bank Papua;*
2. *The Remuneration and Nomination Committee members have the competence and knowledge of the remuneration system, the nomination system and the succession plan of the Company, the Bank's GCG and Work Culture;*
3. *The composition, expertise and independence criteria of the Remuneration and Nomination Committee are in accordance with the provisions of Bank Indonesia and the OJK, in which all members of the Remuneration and Nomination Committee have no financial, management, share ownership and / or family relationship with the BOC, BOD and / or Controlling Shareholder or relationship with the Bank, which may affect its ability to act independently.*

D. Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee

Based on the Decree of the OJK No. 55 / POJK.03 / 2016 dated December 7, 2016 regarding the Implementation of GCG for Commercial Banks, it is stipulated that the main task of the Remuneration and Nomination Committee is to assist the BOC duties on the determination of Remuneration and Nomination at the Bank. Among the duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee are among others:

1. Related Nominated Functions

   a. To prepare and provide recommendations on the system and procedure for the selection and / or replacement of members of the BOC and BOD to the BOC to be submitted to the Shareholder General Meetings;

   b. Provide recommendation on candidate members of the BOD and / or candidate members of the BOC to the BOC to be submitted to the SGM; and

   c. Provide recommendations on the Independent Party who will be a member of the audit committee as well as a member of the risk oversight committee to the BOC.

2. Terkait Fungsi Remunerasi
   a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;
   b. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
      - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
      - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi ;
   c. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan; dan
   d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

E. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2017 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi anggota Komite yang dimiliki Dewan Komisaris;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi anggota Komite yang dimiliki Dewan Komisaris;
3. Mereview panduan seleksi serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi ;
4. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota pengurus Bank kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

F. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2017

Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan yang dipimpin oleh ketua Komite Remunerasi dan Nominasi. Keputusan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Berdasarkan program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2017, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat dengan frekuensi dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat sebagai berikut :

2. Related Functions of Remuneration
   a. Evaluating remuneration policy based on performance, risk, fairness with peer group, target, and long term strategy of Bank, fulfillment of reserves as regulated in legislation and future potential of Bank earnings;
   b. Delivering evaluation and recommendation to the BOC regarding
      - *Remuneration policy for the BOC and BOD to be submitted to the Shareholder General Meetings;*
      - *Remuneration policy for Executive Officers and employees as a whole to be submitted to the BOD;*
   c. Ensure that the remuneration policy is in accordance with the provisions; and
   d. Conduct periodic evaluations of the implementation of remuneration policies.

E. Report on the Implementation of Remuneration and Nomination Activities

Throughout 2017, the Remuneration and Nomination Committee has implemented various activities in order to carry out the following tasks and responsibilities:

1. *To evaluate the remuneration policies of members of the Committee owned by the BOC;*
2. *Provide recommendations to the BOC regarding the remuneration of members of the Committees held by the BOC;*
3. *Reviewing the selection and select and / or reimbursement guidelines for members of the BOC and BOD;*
4. *Provide recommendation to candidate members of Bank management to the BOC to be submitted to the SGM.*

F. Meetings of the Remuneration and Nomination Committee 2017

The Remuneration and Nomination Committee held meetings in accordance with the needs led by the chairman of the Remuneration and Nomination Committee. The decision of the Audit Committee Meeting shall be taken pursuant to the consensus deliberation. Based on the work program of the Remuneration and Nomination Committee during 2017, the Remuneration and Nomination Committee has held 4 (four) meetings with the frequency and attendance of the committee members in the meeting as follows:

AGENDA RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI *AGENDA OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE MEETINGS*			
Tanggal Rapat *Meeting Date*	**Peserta Rapat/** *Meeting Participants*	**Agenda Rapat**	*Meeting Agenda*
Jumat, 10 Maret 2017	1. drh. Constant Karma (Ketua Komite) 2. Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th (Anggota) 3. Jonathan Auparay (Anggota) 4. Divisi Renbang Team Divisi Perencanaan dan Pengembangan	Rapat Pembahasan Struktur Organisasi Baru Bank Papua	*Discussion Meeting of New Banking Organization Structure of Bank Papua*
Selasa, 2 Mei 2017	1. drh. Constant Karma (Ketua Komite) 2. Lipiyus Biniluk, M.Th (Anggota) 3. Jonathan Auparay (Anggota)	Pembahasan Pencalonan Dewan Komisaris Papua Periode 2017 -2020	*Discussion of the nomination of the Board of Commissioners of Bank Papua Period 2017 - 2020*
Selasa, 9 Juni 2017	1. drh. Constant Karma (Ketua Komite) 2. Lipiyus Biniluk, M.Th (Anggota) 3. Jonathan Auparay (Anggota)	1. Pembahasan Calon Komisaris Bank Papua tahun 2017 2. Pembahasan tentang tugas Komite Dewan Komisaris	1. *Discussion of the Candidate of the Commissioner of Bank Papua in 2017* 2. *Discussion of the duties of the Board of Commissioners committee*
Selasa, 13 Juni 2017	1. Lipiyus Biniluk, M.Th (Ketua Komite) 2. drh. Constant Karma (Anggota) 3. Jonathan Auparay (Anggota)	Rapat Persiapan RUPS di Manokwari	*Preparation Meeting of Shareholders General Meeting in Manokwari*

G. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran setiap anggotanya Komite Remunerasi dan Nominasi secara fisik dalam rapat disajikan di dalam tabel berikut ini :

G. Meeting Frequency and Attendance Level of Meetings

The frequency of meetings and attendance of each member of the Remuneration and Nomination Committee in the physical meeting is presented in the following table:

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI *FREQUENCY MEETING AND LEVEL OF ATTENDANCE OF THE REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE*				
Nama / *Name*	**Jabatan/** *Position*	**Jumlah Rapat/** *Number of Meetings*	**Jumlah Kehadiran/** *Number of Attendance*	**Persentase (%) /** *Percentage (%)*
Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th	Ketua / *Chairman*	4	4	100%
drh. Constant Karma	Anggota / *Member*	4	4	100%
Jonathan Auparay	Anggota / *Member*	4	4	100%

Uraian Direksi
Board of Director Description

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggungjawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang. Tugas, wewenang, tanggungjawab dan hal-hal lain yang terkait dengan Direksi dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The BOD shall be the organ of the company which is solely responsible for the maintenance of the company for the interests and purposes of the company in accordance with the provisions of the articles of association. The Board of Director (BOD) is responsible and collectively responsible for managing the company. The BOD is responsible for the management of the company in order to generate added value and ensure business sustainability. Each member of the BOD performs the duties and decides in accordance with the division of duties and authorities. Duties, authorities, responsibilities and other matters relating to the BOD are conducted in accordance with the Bank's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi melalui Dewan Komisaris. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Direksi diberi wewenang dan tanggungjawab yang jelas sesuai Anggaran Dasar yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

The appointment of members of the BOD shall be conducted by the Shareholder General Meetings (SGM) after considering the recommendation of the Nomination Committee through the BOC. The BOD shall be responsible for the execution of its duties to the SGM. In carrying out its duties, the BOD is given clear authority and responsibility in accordance with the Articles of Association which are guided by the prevailing laws and regulations.

Kriteria Direksi

Kriteria atau persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Bank pada prinsipnya diatur di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Bank Indonesia. Di dalam Anggaran Dasar Bank anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus serta persyaratan lainnya dan beberapa syarat tambahan bagi Direktur Kepatuhan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia terkait Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Criteria of the BOD

Criteria or requirements to be eligible for membership of the Bank's BOD are principally regulated in the Limited Liability Company Law, the articles of association of the Bank and the Bank Indonesia Regulation. In the Bank's articles of association, members of the BOD shall meet the general requirements, special requirements and other requirements and additional terms for the Compliance Director as stipulated in the Bank Indonesia Regulation concerning the Commercial Bank Compliance Function.

Direksi Bank Papua seluruhnya berdomisili di Jayapura-Papua, dan seluruh anggota Direksi Bank Papua telah memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat). Seluruh pengangkatan dan/atau penggantian Direksi dilakukan melalui RUPS. Kriteria utama dalam mempertimbangkan pengangkatan dan/atau penggantian Direksi adalah integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan persyaratan sebagai berikut:

The BOD of Bank Papua is entirely domiciled in Jayapura-Papua, and all members of the BOD of Bank Papua have 5 (five) years experience in operations as Executive Officer of the Bank (excluding Rural Banks). All appointments and / or replacements of the BOD shall be made through the SGM. The main criteria for considering the appointment and / or replacement of the BOD are integrity, competence and financial reputation in accordance with the fit and proper test requirements set forth by the Financial Services Authority, under the following conditions:

KRITERIA/PERSYARATAN Direksi *CRITERIA REQUIREMENTS OF DIRECTORS*		
Persyaratan Integritas *Integrity Requirements*	**Persyaratan Kompetensi Competency Requirements**	**Persyaratan Reputasi Keuangan** *Terms of Financial Reputation*
Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan. *Having a good character and morals, among other things, the attitude complies with regulatory requirements, including never being convicted of a Specific Crime within 20 (twenty) years prior to nomination.*	Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya. dan/atau *Knowledge in the field of banking adequate and relevant to the position. and / or*	Tidak memiliki kredit macet. dan *Not having bad loan. and*
Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku . *Having the commitment to comply with the legislation in force.*	Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan. *Experience in banking and / or finance.*	Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menye-babkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. *Has never been declared bankrupt or become the Board of Directors or Commissioners found guilty of causing the company to be declared bankrupt, within the last 5 (five) years before being nominated.*
Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat. *Committed to the development of sound Bank operations.*		
Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) *fit and proper test*. *Not included in the Disqualified List (DTL) fit and proper test.*		
Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 23 /PBI/2010 Tentang Uji Kemampuan Dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) *Committed to not going to do and / or repeat offenses and / or measures referred to in Article 27 and Article 28 of Bank Indonesia Regulation Number 12/23 / PBI / 2010 Concerning Ability And Proper Test (Fit And Proper Test)*		

Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) senantiasa memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi.

Any proposed replacement and / or appointment of members of the BOD by the BOC to the Shareholder General Meetings (SGM) shall always consider the recommendations of the remuneration and nomination committees.

Dasar Pengangkatan Direksi

Setiap penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif bank. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan penilaian

Basic Appointment of BOD

Any replacement and / or appointment of a member of the BOD by the BOC to the Shareholder General Meetings (ASGM) must consider the recommendations of the remuneration and nomination committee. The majority of the members of the BOD shall have at least 5 (five) years experience in the operational field and the lowest as the Executive Officer of the bank. Each member of the BOD shall comply with the requirements of a fit and

kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Pengangkatan anggota Direksi selain harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi dilakukan berdasarkan akta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan Bank Indonesia dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Khusus untuk Direktur Kepatuhan, berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Jumlah dan Komposisi Direksi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, diatur bahwa Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia dan wajib dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.

Untuk periode Desember 2017 Direksi Bank Papua berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Papua.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 6 Maret 2017 memilih dan memutuskan lima orang anggota Direksi Bank Papua adalah sebagai berikut:

proper test according to the Financial Services Authority Regulation concerning the Assessment of Ability and Fit for the Principal Party of the Financial Services Institution.

The appointment of the members of the BOD in addition to the recommendations of the remuneration committee and the nomination shall be based on the deed of approval of the SGM meeting for a period of 4 (four) years and may be reappointed for the second term after paying attention to Bank Indonesia without prejudice to the right of the SGM to terminate at any time by mentioning the reason. Specifically to the Compliance Director, under the Regulation of the Financial Services Authority No. 46 / POJK.03 / 2017 dated July 12, 2017 on the Implementation of Commercial Bank Compliance Function.

Number and Composition of the BOD

In accordance with the Decree of the OJK No. 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning Application of Governance for Commercial Banks, it is stipulated that Banks are required to have members of the BOD with a minimum of 3 (three) persons. All members of the BOD shall be domiciled in Indonesia and shall be presided over by the President Director or the President Director.

For the period of December 2017, the BOD of Bank Papua shall be 5 (five) persons consisting of 1 (one) President Director and 4 (four) Directors. All members of the BOD are domiciled in the working area of Bank Indonesia Head Office.

Based on the decision of the Extraordinary Shareholders General Meeting (ESGM) PT. Bank Pembangunan Daerah Papuadated March 6, 2017 elect and decide five members of the BOD of Bank Papua are as follows:

Nama *Name*	**Jabatan** *Position*	**Domisili** *Domicile*	**Tanggal Pengangkatan** *Date of Appointment*	**Periode** ***Periode***
F. Zendrato	Direktur Utama / *President Director*	Papua	06 Maret 2017	Periode 1
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis / *Business Director*	Papua	06 Maret 2017	Periode 1
Rudhy Dharma	Direktur Keuangan / *Financial Director*	Papua	06 Maret 2017	Periode 1
Isak Semuel Wopari	Direktur Operasional / *Banking Operation Director*	Papua	06 Maret 2017	Periode 1
Jefri Sani Pither Siing	Direktur Kepatuhan / *Compliance Director*	Papua	06 Maret 2017	Periode 1

Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Papua.

All members of the BOD are domiciled in the working area of Bank Indonesia Head Office.

Jumlah dan komposisi anggota Direksi tersebut diatas telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, antara lain:

1. Jumlah anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang;
2. Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia;
3. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
4. Setiap anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali;
5. Semua anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan dan institusi keuangan sebagai Pejabat Eksekutif dan tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi , atau Pejabat Eksekutif pada Bank atau perusahaan lain termasuk sebagai Komisaris pada anak perusahaan Bank Papua;
6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain yang dibuktikan dengan penandatanganan surat pernyataan;
7. Direksi telah mengangkat anggota Komite atas dasar keputusan rapat Dewan Komisaris;
8. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi . Surat kuasa kepada Pemimpin Divisi dan/atau Pemimpin Cabang bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar tugas operasional Bank Papua, namun tidak mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi .

Keberagaman Keahlian, Pengetahuan, serta Pengalaman Direksi

Komposisi Direksi Bank Papua merupakan kombinasi karakteristik, baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karakteristik tersebut tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Direksi . Komposisi Direksi Bank Papua juga memperhatikan kebutuhan Perusahaan. Keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman Direksi digambarkan pada tabel dibawah ini :

The number and composition of the members of the BOD has complied with the Decree of the OJK No. 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks,

1. *BOD members consist of more 3 (three) persons;*
2. *All members of the BOD are domiciled in Indonesia;*
3. *Any proposal for the replacement and / or appointment of members of the BOD by the BOC to the SGM by taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee;*
4. *Each member of the BOD shall not have any family relationship up to the second degree of the members of the BOD and / or members of the BOC and come from independent parties to the Controlling Shareholder;*
5. *All members of the BOD have more than 5 (five) years of experience in banking operations and financial institutions as Executive Officers and do not have dual positions as Commissioners, Directors or Executive Officers at Bank or other companies including as Commissioner of a subsidiary of Bank Papua ;*
6. *Members of the BOD either individually or jointly do not own shares exceeding 25% of the paid up capital of other companies as evidenced by the signing of a statement;*
7. *The BOD has appointed members of the Committee on the basis of the decision of the BOC meeting;*
8. *The BOD shall not grant the general authority to any other party resulting in the transfer of duties and functions of the BOD. Power of Attorney to Division Leaders and / or Branch Managers aims to facilitate and smoothen the operational tasks of Bank Papua, but not to result in the transfer of duties and functions of the BOD.*

Diversity of Expertise, Knowledge, and Experience of BOD

The composition of the Bank Papua's BOD is a combination of characteristics, both in terms of the BOD or members of the BOD individually, in accordance with the needs of the company. Such characteristics are reflected in the determination of the skills, knowledge, and experience required for the BOD. The composition of the BOD of Bank Papua also concerns the needs of the Company. The diversity of expertise, knowledge, and experience of the BOD is illustrated in the table below:

No.	Nama *Name*	Latar Belakang Pendidikan *Educational background*	Jabatan terakhir	*Last position*
1	F. Zendrato	Pasca Sarjana STIE IPWI Jakarta	CEO Region/Pemimpin Wilayah Jakarta Kota, di Bank BNI dari 19 September 2013 s/d 30 November 2014.	*CEO Region / Regional Leader of Jakarta City, at Bank BNI from 19 September 2013 to 30 November 2014.*
2	Sadar Sebayang	Pasca Sarjana Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia Jakarta	Kepala Biro *Corporate Credit Risk Management*, di Bank BCA sejak 1 Desember 2010	*Head of Corporate Bureau of Credit Risk Management, at Bank BCA since December 1, 2010*
3	Rudhy Dharma	Sarjana Universitas Krisnadwipayana	Koordinator Wilayah/Kakanwil Jakarta, di PT. Bank JTRUST IND sejak bulan Juli 2016	*Area Coordinator/Regional Head of Jakarta, at PT. Bank JTRUST IND since July 2016*
4	Isak Semuel Wopari	Pasca Sarjana Universitas Cenderawasih	Kepala Satuan Kerja Anti Fraud (SKAF) Bank Papua sejak tahun 2016	*Chairman of the Anti-Fraud Working Unit (SKAF) of Bank Papua since 2016*
5	Jefri Sani Pither Siing	Sarjana Universitas Cenderawasih	Kepala Kantor Bank Papua Cabang Timika sejak Maret 2016	*Timika Brancnh Manager of Bank Papua since March 2016*

Direktur yang Membawahi bidang Akuntansi Dan Keuangan

Khusus untuk Direktur Keuangan dan Direktur Operasional yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan, maka yang bersangkutan telah memiliki kualifikasi keahlian dan juga pengetahuan di bidang akuntansi, dimana yang bersangkutan punya pengalaman sebagai pemimpin cabang dan berbagai seminar dan pelatihan yang telah ia ikuti.

Director in charge of Accounting and Finance

Especially for the Finance Director and Banking Operation Director in charge of accounting or finance, the relevant person has qualified expertise as well as knowledge in accounting, where he has experience as a branch manager and various seminars and training he / she has participated in.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/ PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 /POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan diatur bahwa :

1. Calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi yaitu bertindak mewakili Bank dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank dan/atau mengambil keputusan penting yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank;
2. Calon anggota Direksi yang belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi Bank walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS;
3. Permohonan untuk memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan diajukan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;

Assessment of Ability and Compliance

In Regulation of Bank Indonesia Number 12/23 / PBI / 2010 concerning Fit and proper Test and Regulation of the Financial Services Authority Number 27 / POJK.03/2016 About Assessment of Ability and Compliance for Main Parties Financial Service Institution stipulates that :

1. *A candidate for a member of the BOD shall obtain approval from the Financial Services Authority prior to carrying out its actions, duties and functions as a member of the BOD, namely acting on behalf of the Bank in making decisions legally binding on the Bank and / or taking important decisions affecting the Bank's financial condition;*
2. *Prospective members of the BOD who have not been approved by the Financial Services Authority shall be prohibited from performing any actions, duties and functions as members of the BOD, the Bank despite having been approved and appointed by the SGM;*
3. *The request for approval by the Financial Services Authority shall be filed by the Bank with the Financial Services Authority, together with the documents required under applicable Bank Indonesia and / or Financial Services Authorities;*

4. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan calon Direksi Bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
5. Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon Direksi Bank apabila calon tersebut menjalani :
   a. Proses hukum;
   b. Proses penilaian kemampuan dan kepatutan;dan/ atau
   c. Proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.

   Penghentian tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Bank.
6. Calon Direksi yang dihentikan penilaian kemampuan dan kepatutannya oleh Otoritas Jasa Keuangan, dapat dicalonkan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi Direksi apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses sebagaimana dimaksud angka 5 di atas.
7. Pemberitahuan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas hasil uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada Bank dalam bentuk penetapan disetujui atau tidak disetujui.
8. Berdasarkan hal tersebut seluruh anggota Direksi Bank Papua telah lulus *fit and proper test* tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

4. Implementation of the fit and proper test of the candidates for the BOD of the Bank shall be conducted by the OJK in accordance with applicable provisions of Bank Indonesia and / or the applicable OJK.
5. The Financial Services Authority shall terminate the fit and proper test of the candidate for the BOD of the Bank if the candidate is subjected to:
   a. Legal proceedings;
   b. The process of fit and proper test, and / or
   c. The reassessment process as there are indications of integrity issues, financial feasibility, financial reputation, and / or competence.

Such termination shall be notified in writing to the Bank.
6. A Candidate of the BOD who has been suspended from the Financial Services Authority's ability and proper judicial review may be re-nominated to the Financial Services Authority to become a BOD if the person concerned has completed the process referred to item 5 above.
7. Notification by the Financial Services Authority of the fit and proper test results to the Bank in the form of approved or unapproved decision.
8. Based on this, all members of the BOD of Bank Papua have passed the fit and proper test without notice and have obtained approval from the Financial Services Authority, indicating that each member of the BOD has adequate integrity, competence and financial reputation.

TABEL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUHAN
CAPABILITY AND** COMPLIANCE **ASSESSMENT

Nama ***Name***	**Pelaksana** ***Orgnanizer***	**Hasil** ***Result***
F. Zendrato	Otoritas Jasa Keuangan / *Financial Services Authority*	Lulus / *Passed*
Sadar Sebayang	Otoritas Jasa Keuangan / *Financial Services Authority*	Lulus / *Passed*
Rudhy Dharma	Otoritas Jasa Keuangan / *Financial Services Authority*	Lulus / *Passed*
Isak Semuel Wopari	Otoritas Jasa Keuangan / *Financial Services Authority*	Lulus / *Passed*
Jefri Sani Pither Siing	Otoritas Jasa Keuangan / *Financial Services Authority*	Lulus / *Passed*

Independensi Direksi

Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan, serta hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali. Direksi Bank Papuas senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank Papua, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.

Direksi tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi , Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali, yang meliputi :

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali;
4. Hubungan afiliasi antara anggota DewanKomisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Independensi Direksi dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Independence of the Board of Directors

The assessment of independence is based on the relevant linkages to management, ownership and / or financial relationships, and family relationships with controlling shareholders. The BOD of Bank Papuas has always acted independently, in the sense that it has no conflict of interest that could interfere with its ability to perform its duties independently and critically, both in relation to each other and the relationship to the Board of Commissioners.

The BOD has no financial relationship, management relationship, share ownership and / or family relationship with other members of the BOC, BOD and / or Controlling Shareholders or relationship with the Bank so that it can perform its duties and responsibilities independently.

The BOD shall not assume dual positions as President Director or other Directors of State-Owned Enterprises, Regional and Private Companies or other positions related to the management of the Company, as well as structural positions, and other functional positions at central and local government agencies / agencies and other positions in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company and other applicable laws and regulations.

Affiliated relationships between members of the BOD, BOC and Principal Shareholders and / or controllers, including:

1. *Affiliation relationships between members of the BOD and other members of the BOD;*
2. *Affiliation relationships between members of the BOD and members of the BOC;*
3. *Affiliation relationships between members of the BOD and the Principal Shareholders and / or controllers;*
4. *Affiliation relationships between members of the BOC and other members of the BOC; and*
5. *Affiliation relationships between members of the BOC and the Principal Shareholders and / or controllers.*

The independence of the BOD can be seen in the table below:

HUBUNGAN AFILIASI Direksi
BOD AFFILIATION RELATIONSHIP

Nama *Name*	Hubungan Keluarga Dengan *Family Relationship With*						Hubungan Keuangan Dengan *Family Relationship With*						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan lain *Relationship Management with Other companies*	
	Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		Direksi *Director*		Pemegang Saham Pengendali *Controlling shareholders*		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		Direksi *Director*		Pemegang Saham Pengendali *Controlling shareholders*			
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
F. Zendrato	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Sadar Sebayang	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Rudhy Dharma	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Isak Semuel Wopari	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Jefri Sani Pither Siing	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Kepemilikan Saham Direksi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum diatur bahwa setiap anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di atas Bank Papua mewajibkan anggota Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank Papua, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 7 ayat (3) anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
Untuk periode 31 Desember 2017, kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada :

1. Bank Papua;
2. Bank lain;
3. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
4. Perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Share Ownership of the Board of Directors

Based on the Decree of the Financial Services Authority Number 55 / POJK.03 / 2016 dated December 7, 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, it is stipulated that each member of the Board of Directors shall disclose a share ownership of 5% (five percent) or more, either to the Bank or at banks and other companies, domiciled in and outside the country.

In compliance with the Financial Services Authority Regulations above Bank Papua requires members of the Board of Directors to disclose their shareholdings, either Bank Papua, other Banks, Non-Bank Financial Institutions and other companies, domiciled within and outside the country. In accordance with the Regulation of the OJK No. 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning the implemwntation of GCG for Commercial Banks Article 7 paragraph (3) members of the Board of Directors either individually or jointly are prohibited from owning shares exceeding 25% at another company.
For the period of December 31, 2017, the share ownership of members of the Board of Directors amounting to 5% or more of the paid up capital, which includes the type and number of shares in:

1. *Bank Papua;*
2. *Other banks;*
3. *Non-Bank Financial Institution;*
4. *Other companies, domiciled within and outside the country, can be viewed through the table below.*

KEPEMILIKAN SAHAM Direksi (KEPEMILIKAN SAHAM MENCAPAI 5% ATAU LEBIH). *BOD SHARE OWNERSHIP (SHARE OWNERSHIP OF 5% OR MORE).*				
Nama *Name*	KEPEMILIKAN SAHAM *SHARE OWNERSHIP*			
	Bank Papua	Bank Lain *Other Bank*	Lembaga Keuangan Bukan Bank *Non-Bank Financial Institutions*	Perusahaan Lain *Other Companies*
F. Zendrato	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Sadar Sebayang	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rudhy Dharma	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Isak Semuel Wopari	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jefri Sani Pither Siing	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Rangkap Jabatan Direksi

Berdasarkan pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, ditegaskan bahwa Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi , anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal Direksi yang bertanggungjawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Direksi Bank.

Seluruh Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi , atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, sebagaimana tabel di bawah ini.

BOD Dual Position

Based on Article 7 of the Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, it is stipulated that members of the BOD are prohibited from serving concurrently as members of the BOD, BOC or Executive Officers at banks, or other institution, excluding multiple positions in the event that the BOD is responsible for supervising the Bank's participation in a subsidiary company, performing functional duties of being a member of the BOC of a non-bank subsidiary company controlled by the Bank, as long as it does not result in the neglect of the performance of duties and responsibilities answered as a member of the BOD of the Bank.

All Directors of the Bank do not have dual positions as members of the BOC, BOD, or Executive Officers at other banks, companies and / or institutions, as the table below.

RANGKAP JABATAN PADA Direksi *DUAL POSITION ON THE BOARD OF DIRECTORS*					
Nama *Name*	Jabatan di Bank Papua *Position at Bank Papua*	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain *Position on Company / Other Agencies*	Perusahaan/ Lembaga Lain *Other Companies / Institutions*	Keterangan	*Information*
F. Zendrato	-	-	-	Tidak Terdapat Rangkap Jabatan	*No Multiple Positions*
Sadar Sebayang	-	-	-	Tidak Terdapat Rangkap Jabatan	*No Multiple Positions*
Rudhy Dharma	-	-	-	Tidak Terdapat Rangkap Jabatan	*No Multiple Positions*
Isak Semuel Wopari	-	-	-	Tidak Terdapat Rangkap Jabatan	*No Multiple Positions*
Jefri Sani Pither Siing	-	-	-	Tidak Terdapat Rangkap Jabatan	*No Multiple Positions*

Pengelolaan Benturan Kepentingan

Berdasarkan penjelasan pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum diatur bahwa yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi , anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank.

Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota Direksi , anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi yang terdapat benturan kepentingan. Namun demikian, dalam hal keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dalam setiap keputusan. Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, Bank wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi , anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.

Atas hal tersebut maka Anggota Direksi hendaknya senantiasa :

1. Wajib mendahulukan kepentingan ekonomis Perseroan di atas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga maupun pihak lainnya;
2. Tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan;

Conflict of Interest Management

Based on the explanation of article 63 of the Decree of the Financial Services Authority Number 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, it is stipulated that the meaning of a conflict of interest is, among other things, the difference between the Bank's economic interests and the private economic interests of shareholders, , members of the Board of Commissioners, Executive Officers, and / or parties related to the Bank.

This provision is basically intended to ensure that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and Executive Officers do not participate in making a decision on situations and conditions of conflict of interest. However, in the case of a permanent decision to be taken, the parties concerned shall prioritize the Bank's economic interests and prevent the Bank from possible losses or possible loss of profits of the Bank and shall disclose the condition of conflicts of interest in any decision. In this regard, the granting of preferential treatment to parties certain parties outside the procedures and conditions fall under the category of conflict of interest that incur a Bank's loss or reduce the Bank's profits, such as providing interest rates that are inconsistent with the procedures and regulations.

In order to improve the quality of decision-making processes by the Board of Directors and the quality of the oversight process by the Board of Commissioners, the Bank shall ensure the availability and adequacy of internal reporting supported by an adequate management information system.

In the event of a conflict of interest, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and Executive Officers are prohibited from taking actions that may harm the Bank or reduce the Bank's profits and shall disclose any conflict of interest in any decision.

For that matter, the members of the Board of Directors shall always:

1. *Obliging to prioritize the economic interests of the Company over the economic interests of the person or family or other parties;*
2. *Not to take advantage of the position for personal gain or for the benefit of another person or party that is contrary to the interests of the Company;*

3. Menyampaikan informasi yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
4. Mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan;
5. Tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan;
6. Berusaha untuk tidak ikut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Bank.

3. To convey information containing its shareholdings and / or family of 5% (five percent) or more at the Bank or other companies domiciled in and outside the country;

4. Disclose financial and family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and / or the controlling shareholders of the Company;
5. Not taking any action that could harm the Company or reduces the profits of the Company and shall disclose any conflict of interest in any decision in the event of a conflict of interest;

6. Seek not to participate in deliberations and decision-making containing conflict of interest elements that may harm the interests of the Bank.

Tugas dan Tanggungjawab Direksi

1. Kebijakan Umum

   Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

   Direksi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus selalu:
   a. Dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
   b. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
   c. Mematuhi tata urutan peraturan internal Perseroan.
   d. Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.
   e. Menetapkan susunan organisasi Perseroan di tingkat pusat maupun cabang dan tata kerja perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
   f. Bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan Perseroan.
   g. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
   h. Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
   i. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
   j. Memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities of the BOD

1. General Policy

The Board of Directors shall be fully responsible in performing its duties in the interest of the Company in achieving its aims and objectives.

The Board of Directors in performing its duties and obligations must always:
a. In good faith and full of responsibility to perform the duties for the interests and business of the Company.
b. Subject to the provisions of applicable laws and regulations, Articles of Association and the resolutions of the SGM and ensure that all activities of the Company are in compliance with the provisions of applicable laws and regulations, the Articles of Association and the resolutions of the SGM.
c. Obey the order of the Company's internal regulations.
d. Carry out the management of the Company for the interests and purposes of the Company.
e. Establish the Company organizational structure at the central and branches level and working procedures of the company with the BOC approval.
f. Acting as chairman in the management of the Company.
g. Maintain and manage the Company's assets.
h. Responsible for carrying out its duties in the interests of the Company in achieving its goals and objectives.
i. Represent the Company both inside and outside the court.
j. Pay attention to inputs provided by the BOC.

k. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan tertentu.
l. Menerapkan *good corporate governance* secara konsisten.
m. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
n. Bertanggungjawab secara pribadi atas kelalaiannya yang merugikan kepentingan Perseroan.

2. Tugas Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut :
   a. Tugas pokok Direksi adalah :
      • Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut;
      • Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
   b. Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
   c. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab melaksanakan tugasnya dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
   d. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan usaha Perseroan.

3. Tugas Direksi lainnya berdasarkan *best practices* adalah sebagai berikut:
   a. Membuat dan memelihara risalah umum pemegang saham dan risalah rapat Direksi serta menyelenggarakan pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi Perseroan.
   b. Membuat, melaksanakan, memonitor, dan mengendalikan anggaran dan rencana strategis Perseroan termasuk rencana tahunan, rencana jangka menengah, dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
   c. Menyusun sistem akuntansi yang memenuhi prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan,

k. Carry out any actions and deeds, whether regarding the management or ownership of the Company's assets and binds the Company with other parties and / or other parties by the Company, with certain restrictions.
l. Apply good corporate governance consistently.

m. Mandatory to hold and maintain a Special Register containing information concerning share ownership of members of the Board of Directors and BOC and their families within the Company and / or other companies and the date on which the shares are obtained.
n. Personally Responsible personally for his negligence which is detrimental to the interests of the Company.

2. The duties of the BOD under the Company's Articles of Association are as follows:
   a. The main duties of the BOD are:
      • *Carry out the management of the Company for the purposes and objectives of the Company and acting as the chairman in the management;*
      • *To maintain and manage the Company's assets;*
   b. The BOD is fully responsible in performing its duties for the benefit of the Company in achieving the Company's objectives and objectives.

   c. Each member of the BOD shall in good faith and full responsibility carry out its duties in accordance with the applicable Laws and Regulations.

   d. Each member of the BOD shall be fully liable in private if the person concerned is guilty or negligent in performing his duties for the benefit of business of the Company.

3. Other Directors' duties based on best practices are as follows:
   a. Establish and maintain the Shareholder General Meetings and minutes of meetings of the BOD and organize the Company's books and administration in accordance with the prevailing norms for the Company.
   b. Create, implement, monitor and control the Company's budget and strategic plan, including the annual plan, medium-term plan, and long-term Corporate Plan (RJPP).
   c. Establish an accounting system that meets the principles of internal control, especially the separation of functions of management, recording, storage and supervision as well as

penyimpanan dan pengawasan serta prinsip-prinsip syariah untuk transaksi berdasarkan syariah.

d. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut tata cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta setiap kali diminta oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
e. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan atau berdasarkan petunjuk oleh/dalam RUPS.
f. Mengajukan kepada Dewan Komisaris usul penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan Perseroan untuk tahun buku berikutnya.

4. Tugas Direksi Terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sebagai berikut:
   a. Direksi wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham.
   c. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan, terutama laporan keuangan baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar serta setiap kali diminta oleh RUPS. Menandatangani Laporan Tahunan, dalam hal Direktur tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya.
   d. Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan atau RUPS Luar Biasa.
   e. Mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi .
   f. Menyediakan materi RUPS kepada pemegang saham dan materi tersebut di atas diberikan secara cuma-cuma bagi pemegang saham jika diminta.
   g. Memberikan Risalah RUPS kepada Pemegang Saham jika diminta oleh Pemegang Saham.
   h. Meminta persetujuan RUPS jika PT. Bank Papua ingin membeli kembali saham yang telah

sharia principles for sharia transactions.

d. Providing accountability and all information about the Company's circumstances and progress in the form of a report on the Company's activities, including financial statements, either in the form of annual reports or in other periodic reports in accordance with the procedures and time specified in the Company's Articles of Association and each time requested by the Shareholder General Meetings .
e. Carry out other obligations in accordance with the Company's Articles of Association or directed by / in the SGM.
f. Apply to the BOC the proposal of the Public Accountant to audit the financial condition of the Company for the following fiscal year.

4. BOD Duties Related to the Shareholder General Meetings
   a. The BOD shall hold and maintain the Shareholder Register and documents relating to the SGM in accordance with the provisions of the law.
   b. Provide periodic reports in a manner and time in accordance with applicable provisions and other reports each time requested by the Shareholder.
   c. Providing accountability and all information about the circumstances and the course of the Company, in particular the financial statements in the form of annual reports or in the form of other periodic reports in the manner and time specified in the Articles of Association and each time requested by the SGM. Signing the Annual Report, in the event that the Director does not sign the Annual Report, it must be mentioned the reason.
   d. Calling and holding an Annual SGM and or Extraordinary SGM.
   e. Announced in 2 (two) Indonesian newspapers published in the domicile of the Company as stipulated by the BOD.
   f. Provide SGM material to shareholders and the above materials are provided free of charge to shareholders if requested.
   g. Provides Minutes of SGM to Shareholders if requested by the Shareholders.
   h. Requesting approval of SGM if PT. Bank Papua wants to buy back shares that have been issued,

dikeluarkan, termasuk pengalihannya.

i. Meminta persetujuan RUPS jika PT. Bank Pembangunan Daerah Papuaingin menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal Perseroan.

j. Mengajukan semua dokumen Perseroan yang diperlukan dalam RUPS Tahunan.

k. Membuat dan memelihara Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi .

5. Tugas Direksi Terkait dengan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

a. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

b. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

d. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

e. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Direksi paling kurang wajib membentuk:
   1) Satuan Kerja Audit Intern;
   2) Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
   3) Satuan Kerja Kepatuhan.

f. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

g. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.

h. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1) Proyek bersifat khusus;
   2) Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggungjawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
   3) Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

i. Direksi wajib menyediakan data dan informasi

including the transfer.

i. Requesting approval of SGM if PT. Bank Papua wants to increase or decrease the amount of capital of the Company.

j. Submit all the Company documents required in the Annual SGM.

k. Creat and maintain the Minutes of SGM and Board of Directors Meeting Minutes.

5. BOD Duties Related to the Implementation of Good Corporate Governance

a. The BOD shall be fully responsible for the implementation of the Bank's management.

b. The BOD shall manage the Bank in accordance with its authorities and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and prevailing laws and regulations.

c. The BOD shall implement the principles of Good Corporate Governance in every Bank's business activities at all levels or levels of the organization.

d. The BOD shall follow up the audit findings and recommendations of the Bank's internal audit work units, external auditors, the results of supervision by Bank Indonesia and / or the results of supervision of other authorities.

e. In the framework of implementing the principles of Good Corporate Governance, the BOD must at least form:
   1) Internal Audit Unit;
   2) Risk Management Work Unit and Risk Management Committee; and
   3) Compliance Unit.

f. The BOD shall be responsible for the performance of their duties to shareholders through the Shareholder General Meetings.

g. The BOD shall disclose to employees of Bank policies that are strategists in the field of personnel.

h. The BOD are prohibited from using individual and / or professional advisors as consultants unless they meet the following requirements:

   1) Projects are special;
   2) Based on a clear contract, which at least covers the scope of work, responsibilities and duration of work and expenses;

   3) The Consultant is an Independent Party and is qualified to undertake a project of a special nature.

i. The BOD shall provide accurate, relevant and timely

yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

j. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi .

k. Pedoman dan tata tertib kerja dimaksud paling kurang wajib mencantumkan:
   - Pengaturan etika kerja: merupakan prosedur yang mengatur etika kerja Direksi .
   - Waktu kerja: merupakan prosedur yang mengatur waktu kerja Direksi .
   - Pengaturan rapat: merupakan prosedur yang mengatur pengelolaan rapat (dari proses perencanaan sampai dengan monitoring tindak lanjut rapat).

l. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggungjawab seluruh anggota Direksi .

6. Tugas Direksi Terkait dengan Modal Minimum Bank antara lain:
   a. Direksi wajib memastikan bahwa Bank telah beroperasi dengan modal di atas modal minimum sebagaimana yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
   b. Dalam hal terjadi keadaan dimana modal Bank dibawah modal minimum sebagaimana ketentuan Bank Indonesia, maka Direksi wajib membuat dan melaksanakan *action plan* pemenuhan modal minimum secara konsisten.

7. Tugas Direksi Terkait dengan Manajemen Risiko antara lain:
   a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Perseroan. Review kebijakan dan strategi manajemen risiko dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara signifikan.
   b. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
   c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Perseroan secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan penyampaian laporan

data and information to the BOC.

j. The BOD shall have binding guidelines and work rules for each member of the BOD.

k. Such guidelines and work rules, should at least include:
   - *Work ethics regulation: is a procedure that governs the work ethic of the BOD.*
   - *Working time: is a procedure that governs the working time of the BOD.*
   - *Meeting arrangements: are the procedures governing the management of meetings (from the planning process to follow-up monitoring of meetings).*

l. All decisions made by the BOD in accordance with the guidelines and work order are binding and are the responsibility of all members of the BOD.

6. BOD Duties Related with the Bank's Minimum Capital include:
   a. The BOD shall ensure that the Bank has operated with capital above the minimum capital as determined by Bank Indonesia.

   b. In the event of a condition in which the Bank's capital is below the minimum capital as stipulated by Bank Indonesia, the BOD shall establish and implement a minimum capital compliance action plan consistently.

7. BOD'Duties Related to Risk Management include:

   a. Establish a written and comprehensive risk management policy and strategy, including the establishment and approval of overall risk limits, per type of risk and per functional activities (business activities) of the Company. A review of risk management policies and strategies is undertaken at least once a year or in higher frequency in the event of significant changes in factors affecting the Company's business activities.

   b. Develop Risk Management policies and strategies in writing and comprehension;
   c. Responsible for the implementation of risk management policy and risk exposure taken by the Company as a whole, including evaluating and providing risk management strategy based on reports submitted by Risk Management Unit and submission of report of responsibility to Board of Commissioner on a quarterly basis;

pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara triwulanan;

d. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi ;
e. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
f. Memastikan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
g. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi;
h. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan :
   - Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
   - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
   - Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko.
i. Dalam rangka melaksanakan tanggungjawabnya tersebut Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Bank.

8. Tugas Direksi Terkait dengan Tingkat Kesehatan Bank antara lain:
   Direksi wajib melaksanakan kegiatan usaha Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.

9. Tugas Direksi Terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja antara lain:
   a. Menyiapkan visi, misi, tujuan, strategi dan budaya Perseroan.
   b. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
   c. Menyiapkan rencana pengembangan Perseroan tepat pada waktunya.
   d. Mengupayakan tercapainya sasaran-sasaran jangka panjang yang tercantum dalam *Corporate Plan*.
   e. Menyiapkan pada waktunya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (yang merupakan penjabaran tahunan dari *Corporate Plan*), untuk

d. Evaluate and decide on transactions requiring the approval of the BOD;
e. Develop a culture of Risk Management at all levels of the organization;
f. Ensure the improvement of human resource competencies related to Risk Management;

g. Ensure that the Risk Management function has operated independently, which is reflected in part by the separation of functions between the Risk Management Unit that identifies, measures, monitors and controls the risk with the work units conducting and completing transactions;

h. Conduct periodic reviews to ensure:

- *Accuracy of Risk Assessment methodology;*
- *Adequacy of management information system implementation; and*
- *Accuracy of policies, procedures and determination of Risk limits.*

i. In order to carry out its responsibilities, the BOD shall have an adequate understanding of the Risks attached to all functional activities of the Bank and capable of taking the necessary actions in accordance with the Bank Risk profile.

8. BOD duties Related to Bank Sound Rating are:
The BOD shall conduct the Bank's business activities on the basis of prudential principles and take the necessary steps to maintain or improve the Bank's Soundness.

9. BOD Duties Related with Strategy and Work Plan are:

a. Preparing the Company's vision, mission, objectives, strategy and culture.
b. To undertake and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with its purpose and objectives and business activities.
c. Prepare the Company's development plan on time.
d. Seeking to achieve the long-term goals listed in Corporate Plan.
e. Prepare in due course the Company's Work Plan and Budget (which is the annual action of Corporate Plan), to be subsequently submitted to

selanjutnya disampaikan kepada Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.

f. Menyusun Rencana Bisnis untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Komisaris untuk disahkan. Direksi berkewajiban untuk melaksanakan rencana bisnis secara efektif dalam pengelolaan Perseroan.

g. Mengupayakan tercapainya target-target jangka pendek yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB)

the Commissioners for approval.

f. Prepare a Business Plan for subsequent submission to the BOC for ratification. The BOD is obligated to implement the business plan effectively in the management of the Company.

g. Strive to achieve the short-term targets listed in the Annual Work Plan and Budget (RKAT).

10. Tugas Direksi terkait dengan Kualitas Aktiva Bank antara lain :

a. Membuat dan mengajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan kebijakan mengenai kualitas aktiva kredit, surat berharga, penempatan, dan kebijakan mengenai restrukturisasi kredit, hapus buku, dan hapus tagih.

b. Memberikan persetujuan atas prosedur mengenai kualitas aktiva kredit, surat berharga, penempatan, dan kebijakan mengenai restrukturisasi kredit, hapus buku, dan hapus tagih.

c. Melaksanakan kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten.

10. BOD' Duties Related to the Quality of Bank Assets are :

a. Make and submit to the BOC for approval of policies regarding the quality of loan assets, securities, placements, and policies regarding loan restructuring, write off, and write off.

b. Approve procedures regarding the quality of loan assets, securities, placements, and policies regarding loan restructuring, write off, and write off.

c. Implement the policies and procedures consistently.

11. Tugas Direksi terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) antara lain :

1. Membuat dan mengajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan atas kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
2. Memberikan persetujuan atas prosedur mengenai mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
3. Melaksanakan kebijakan dan prosedur tersebut secara konsekuen.
4. Meminta persetujuan Dewan Komisaris dalam penyediaan dana kepada pihak terkait.
5. Memastikan bahwa Bank tidak membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan Bank untuk memberikan penyediaan dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK.
6. Mengungkapkan dan melaporkan anggota keluarga dan perusahaan yang dimilikinya yang dikategorikan sebagai pihak terkait kepada Bank Indonesia.

11. BOD' Duties Related to Legal Lending Limit (BMPK) are :

1. Make and submit to the BOC for approval of policies regarding the provision of funds to related parties and the provision of large funds (large exposure).

2. Approval of procedures regarding the provision of funds to related parties and the provision of large funds (large exposure).

3. Implement the policies and procedures consistently.
4. Request approval from the BOC in providing funds to related parties.
5. Ensure that the Bank does not establish an engagement or agreement or stipulate requirements requiring the Bank to provide the provision of funds which would result in the violation of the BMPK.
6. Disclose and report on family members and companies they have categorized as related parties to Bank Indonesia.

12. Tugas Direksi terkait dengan Transparansi Kondisi Keuangan Bank antara lain:

12. BOD' Duties Related to Transparency of Bank Financial Condition are :

Direksi wajib melakukan pemenuhan ketentuan mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank, antara lain :

a. Pembuatan dan penyajian :
   - Laporan Tahunan;
   - Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;
   - Laporan Keuangan Konsolidasi.
   - Laporan kepada Bank Indonesia
   - Laporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan

   meliputi seluruh aspek yang wajib diungkapkan dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
b. Melakukan tindak lanjut atas temuan hasil audit.

13. Tugas Direksi terkait dengan Penerapan Prinsip antara lain :
    a. Melakukan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain dibidang keuangan setelah mendapatkan persetujuan RUPS dengan berpedoman kepada Perundang-undangan yang berlaku.
    b. Memperhatikan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan risiko hukum dan risiko *likuiditas*.
    c. Membuat kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara.
    d. Terlibat langsung dalam perumusan kebijakan kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara dimaksud dan bertanggungjawab dalam pelaksanaannya.
    e. Meminta persetujuan Dewan Komisaris atas Kebijakan tersebut diatas.
    f. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan usaha bank atau perusahaan lain yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Bank dan melaporkan hasil monitoring maupun evaluasinya kepada Dewan Komisaris.
    g. Mengusulkan tindakan pengamanan lebih lanjut kepada Dewan Komisaris apabila bank atau perusahaan lain dimaksud mengalami penurunan usaha.
    h. Melakukan tindakan pengamanan apabila bank atau perusahaan lain tempat penyertaan modal mengalami penurunan usaha.

14. Tugas Direksi terkait Penyertaan Modal Sementara untuk Mengatasi Akibat Kegagalan Kredit antara lain:
    a. Melakukan Penyertaan Modal Sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
    b. Memperhatikan hal-hal berikut dalam penyertaan Modal Sementara :

The BOD shall fulfill the provisions concerning Transparency of Bank Financial Condition, among others:

a. Creation and presentation:
   - *Annual report;*
   - *Quarterly Published Financial Report;*
   - *Consolidated Financial Statements.*
   - *Report to Bank Indonesia*
   - *Report To The Financial Services Authority*

   covers all aspects that must be disclosed and submitted to relevant parties in a complete, accurate, and timely manner.
b. Follow up on audit findings.

13. BOD Duties Related with the Implementation of Principles include:
a. Conduct equity participation in a Bank or other company in the field of finance after obtaining approval of the SGM by referring to applicable legislation.
b. Taking into account the prevailing laws and regulations with due regard to legal risk and liquidity risk.
c. Making Temporary Equity Participation and Temporary Equity Participation policy.
d. Engages directly in the formulation of activity policy of Equity Participation and Temporary Equity Participation intended and responsible in its implementation.
e. Requesting approval from the BOC on the Policy above.
f. Monitor and evaluate the development of the business of a bank or other company partly owned by the Bank and report its monitoring and evaluation results to the BOC.
g. Proposes further safeguard action to the BOC if the bank or other such company has decreased its business.
h. Take security measures if banks or other companies where equity participation has decreased business.

14. BOD Duties Relatedwith Temporary Equity Participation to Overcome the Failure of Loan are :
a. Conduct Temporary Equity Participation to resolve a loan failure after obtaining approval from the BOC.
b. Take note of the following in Temporary Equity Participation:

- Sifatnya hanya untuk mengatasi kegagalan kredit debitur kurang lancar, diragukan atau macet.
- Diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dimaksudkan untuk mengembalikan kewajiban debitur.
- Harus menarik kembali penyertaannya setelah jangka waktu 5 (lima) tahun atau sebelum 5 (lima) tahun apabila perusahaan debitur tempat Penyertaan Modal Sementara telah memperoleh laba komulatif.
- Dihapusbukukan setelah 5 (lima) tahun dengan persetujuan Dewan Komisaris apabila pengembalian kredit belum terselesaikan.

c. Memonitor penyelesaian kredit debitur tempat Penyertaan Modal Sementara.
d. Melaporkan hasil monitoring perkembangan Penyertaan Modal Sementara dimaksud kepada Dewan Komisaris.
e. Memperhatikan risiko hukum dan risiko *likuiditas*.

15. Tugas Direksi terkait dengan Etika Berusaha dan Anti Korupsi
    a. Direksi berkewajiban untuk mengembangkan dan memimpin penerapan *Good Corporate Governance*.
    b. Direksi dilarang untuk memberikan, menawarkan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah dan pihak-pihak lain yang mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Tugas Direksi terkait dengan Sistem Pengendalian Intern
    a. Direksi Bank mempunyai tanggungjawab menciptakan dan memelihara Sistem Pengendalian Intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian intern yang ditetapkan Bank.
    b. Sementara itu Direktur Kepatuhan wajib berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati -hatian.
    c. Melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris;
    d. Mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan

- *It's only to solve the debtor loan failure substandard, doubtful or loss.*
- *Processed in accordance with applicable laws and regulations.*
- *Intended to return the debtor's obligations.*
- *Must withdraw its participation after a period of 5 (five) years or before 5 (five) years if the debtor company where Temporary Equity Participation has earned a cumulative profit.*
- *Written off after 5 (five) years with the approval of the BOC if the loan repayment has not been settled.*

c. Monitor the settlement of the debtor loan where Temporary Equity Participation.
d. Reporting the results of the monitoring of the development of Temporary Equity Participation to the BOC.
e. Pay attention to legal risk and liquidity risk.

15. BOD Duties Related to the Ethics of Business and Anti-Corruption
a. The BOD is obliged to develop and lead the implementation of Good Corporate Governance.
b. The BOD are prohibited from giving, offering or receiving directly or indirectly, anything of value to government officials and other parties affecting or in return for what they have done and other actions in accordance with applicable laws and regulations.

16. BOD' Duties Related to Internal Control System
a. The BOD of the Bank has the responsibility of creating and maintaining an effective Internal Control System and ensuring that the system is operating safely and in accordance with the Bank's internal control objectives.
b. Meanwhile, the Compliance Director must play an active role in preventing any irregularities committed by management in establishing policies related to the principle of caution.
c. Implement policies and strategies approved by the BOC;
d. Develops procedures to identify, measure, monitor, and control risks faced by the Bank;

mengendalikan risiko yang dihadapi Bank;
e. Memelihara suatu struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggungjawab dan hubungan pelaporan yang jelas;
f. Memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten;
g. Menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian intern; dan
h. Memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern.

Dalam rangka melaksanakan tanggungjawab tersebut, Direksi harus melakukan langkah-langkah, antara lain :
a. Menugaskan para manajer/pejabat dan staf yang bertanggungjawab dalam kegiatan atau fungsi tertentu untuk menyusun kebijakan dan prosedur pengendalian intern terhadap kegiatan operasional serta kecukupan organisasi;
b. Melakukan pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa para manajer/pejabat dan pegawai telah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan;
c. Mendokumentasikan dan mensosialisasikan struktur organisasi yang secara jelas menggambarkan jalur kewenangan dan tanggungjawab pelaporan serta menyelenggarakan suatu sistem komunikasi yang efektif kepada seluruh jenjang organisasi Bank;
d. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi pengendalian intern telah dilaksanakan oleh manajer/pejabat dan pegawai yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai;
e. Melaksanakan secara efektif langkah perbaikan atau rekomendasi dari auditor intern dan atau auditor ekstern, antara lain dengan cara menugaskan pegawai yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya.

17. Tugas Direksi terkait Penugasan Direktur Kepatuhan
a. Bank wajib menugaskan salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan.
b. Pengangkatan dan pemberhentian Direktur Kepatuhan dilakukan oleh RUPS dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
c. Direktur Kepatuhan bertugas dan bertanggungjawab sekurang-kurangnya untuk:
   • Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah

e. Maintaining an organizational structure that reflects clear authority, responsibility and reporting relationships;
f. Ensure that effective delegation of powers is supported by consistent application of accountability;
g. Establish policies and strategies and procedures of internal control; and
h. Monitor the adequacy and effectiveness of the internal control system.

In order to carry out these responsibilities, the BOD shall take the following steps:

a. Assigning managers / officers and staff responsible in certain activities or functions to develop internal control policies and procedures for operational activities and adequacy of the organization;

b. Exercising effective controls to ensure that managers / officers and employees have developed and implemented established policies and procedures;

c. Documenting and socializing organizational structures that clearly define the channels of authority and responsibility for reporting and to establish an effective communication system for all levels of the Bank's organization;

d. Taking appropriate steps to ensure that the activities of the internal control functions have been carried out by managers / officials and employees with sufficient experience and capacity;

e. Effectively implementing remedial measures or recommendations from internal auditors and / or external auditors, among others, by assigning employees responsible for carrying them out.

17. The BOD Duties Related to the Assignment of the Compliance Director
a. Bank is required to assign one of the members of the BOD as Compliance Director.
b. The appointment and dismissal of the Compliance Director shall be conducted by the SGM by obtaining prior approval from Bank Indonesia.
c. The Compliance Director is responsible and responsible for at least:
   • *To stipulate the necessary steps to ensure that the Bank has complied with all Bank Indonesia*

memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
- Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia.

d. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Direktur Kepatuhan wajib mencegah Direksi agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
e. Direktur Kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

18. Tugas Direksi terkait Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB)
    a. Menciptakan struktur pengendalian intern.
    b. Menjamin terselenggaranya fungsi Audit Intern dalam setiap tingkatan manajemen.
    c. Menindaklanjuti temuan Audit Intern sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

19. Tugas Direksi terkait dengan Laporan-laporan Perseroan

    Praktek *good corporate governance* mensyaratkan dilakukannya pengungkapan secara akurat dan tepat waktu terhadap semua aspek yang berhubungan dengan Perseroan, termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengelolaan Perseroan.

    Laporan- laporan yang dibawah pengawasan oleh Direksi adalah sebagai berikut:
    a. Laporan Tahunan

       Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan mencakup materi sebagai berikut :
       - Laporan keuangan dan kegiatan operasional Perseroan.
       - Tujuan Perseroan.
       - Kepemilikan saham mayoritas dan hak suara dari pemegang saham.
       - Latar belakang Anggota Dewan Komisaris dan Direksi .
       - Faktor-faktor risiko utama yang dapat diprediksikan.

regulations and other laws and regulations applicable in the context of prudential principles;

- *Monitor and maintain that the Bank's business activities do not deviate from the prevailing provisions;*
- *Monitor and maintain the Bank's compliance with all agreements and commitments made by the Bank to Bank Indonesia.*

d. In performing the duties, the Compliance Director shall prevent the BOD from pursuing policy and / or determining decisions that deviate from Bank Indonesia regulations and other prevailing laws and regulations.

e. The Compliance Director is obliged to report the implementation of its duties and responsibilities regularly to the President Director with a copy to the BOC.

18. The BOD Duties Related to Implementation of Bank Internal Audit Function (SPFAIB)
a. Creating internal control structures.
b. Ensure the implementation of Internal Audit function in every management level.
c. Following up the findings of the Internal Audit in accordance with the policy or direction given by the BOC.

19. The BOD Duties Related to the Company's Reports

Good corporate governance practice requires accurate and timely disclosure of all aspects related to the Company, including financial condition, performance, ownership and management of the Company.

Reports under the supervision of directors are as follows:
a. Annual report

Disclosure of information in the annual report includes the following materials:
- *Financial reports and operational activities of the Company.*
- *Goal of the Company.*
- *Ownership of majority shares and voting rights of shareholders.*
- *Background of Members of the BOC and BOD.*
- *The predominant risk factors are predictable.*

- Isu-isu utama mengenai tenaga kerja dan *stakeholders* lain
- Struktur dan kebijakan pengelolaan Perseroan
- Frekuensi rapat Dewan Komisaris maupun Direksi yang diadakan, dan tingkat kehadiran setiap anggotanya dalam rapat tersebut
- Review pelaksanaan total paket kompensasi Direktur dan Dewan Komisaris
- Laporan kegiatan Komite Audit

b. Laporan Keuangan Perseroan
Laporan Keuangan Perseroan terdiri dari Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan, dan Laporan Triwulanan.
c. Laporan-Laporan Bank Umum

20. Tugas Direksi terkait dengan Kondisi yang Dapat Membahayakan Kelangsungan Usaha Bank
Direksi wajib mengelola Bank secara sehat dan menghindarkan Bank dari keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank tersebut antara lain adalah hal-hal yang dapat menyebabkan Bank dinyatakan dalam Status Pengawasan Intensif (*Intensive Supervision*) dan/atau Status Pengawasan Khusus (*Special Surveillance*), yaitu memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

a. Memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat dalam penilaian tingkat kesehatan Bank;
b. Memiliki permasalahan aktual dan atau potensial berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan risiko (*composite risk*);
c. Terdapat pelampauan dan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit dan menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan Bank dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai;
d. Memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, namun Bank dinilai mengalami permasalahan *likuiditas* yang mendasar;
e. Dinilai memiliki permasalahan profitabilitas yang mendasar;
f. Memiliki kredit bermasalah (*non-performing loan*) secara neto lebih dari 5% (lima perseratus) dari total kredit.
g. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus).
h. Rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, dengan perkembangan

- *Major issues concerning labor and other stakeholders*
- *Company's management structure and policies*
- *The frequency of meetings of the BOC and the BOD held, and the attendance of each member at the meeting*
- *Review the implementation of the total compensation package of Directors and BOC*
- *Report on the activities of the Audit Committee*

b. Financial Report of the Company
The Company's Financial Statements consist of Annual Financial Report, Annual Financial Report, and Quarterly Report.
c. Reports of Commercial Banks

20. The BOD Duties Related to Conditions that may Endanger the Bank's Business Continuity
The BOD shall manage the Bank in a healthy manner and avoid the Bank from the circumstances or forecasts of circumstances that may jeopardize the Bank's business continuity.

Matters which may compromise the Bank's business continuity, include among others things that may cause the Bank to be expressed in its Intensive Supervision Status and / or Special Surveillance Status, which satisfies one of the following criteria:

a. Having an unhealthy or unsound rating in the Bank soundness rating;
b. Having actual or potential problems based on an assessment of composite risk;

c. There is an exceedance and or violation of the Legal Lending Limit and in the opinion of Bank Indonesia the proposed settlement measures of the Bank are deemed unacceptable or impossible to achieve;
d. Having a minimum statutory reserve requirement in rupiah equal to or greater than the ratio set for the Bank Minimum Reserve Requirement, but the Bank is assessed to experience fundamental liquidity problems;
e. Assessed to have a fundamental profitability problem;
f. Having a net non-performing loans of more than 5% (five percent) of the total loan.

g. The Capital Adequacy Ratio ratio is less than 8% (eight percent).
h. The statutory reserve requirement ratio in rupiah is less than the ratio set for the Bank's Minimum Reserve Requirement, with deteriorated developed

yang memburuk dalam waktu singkat atau berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengalami permasalah *likuiditas* yang mendasar.

21. Tugas Direksi terkait Hubungan dengan *Stakeholders*
    a. Memastikan terjaminnya hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan Pekerja, Pengguna Jasa, Pemasok, Nasabah dan *stakeholders* lainnya.
    b. Memastikan Perseroan melakukan tanggungjawab sosialnya.
    c. Memastikan Perseroan memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan.
    d. Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perseroan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.
    e. Dalam mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk Pekerja, Perseroan tidak melakukan diskriminasi karena latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
    f. Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan/*harrasment*).

22. Tugas Direksi terkait Sistem Akuntansi dan Pembukuan
    a. Menyusun sistem akuntansi yang sesuai berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan
    b. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan untuk menghasilkan penyelenggaraan pembukuan yang tertib, kecukupan modal kerja dengan biaya modal yang efisien, struktur neraca yang baik dan kokoh, penyajian laporan dan analisa keuangan tepat waktu dan akurat serta prinsip-prinsip lain sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan.

in a short period of time or based on Bank Indonesia's assessment of underlying liquidity problems.

21. The BOD Duties Related to Stakeholders Relationship

a. Ensure the guarantee of stakeholder rights arising under applicable legislation and / or agreements made by the Company with Workers, Service Users, Suppliers, Customers and other stakeholders.

b. Ensure the Company carries out its social responsibility.
c. Ensure that the Company takes into account the interests of various stakeholders.

d. Ensure that the Company's assets and business locations and other facilities comply with applicable laws and regulations regarding environmental conservation, occupational health and safety.
e. In employing, determining salaries, providing training, establishing career paths, and determining other terms of employment for Workers, the Company does not discriminate because of the ethnic background of a person, religion, sex, age, disability of a person or any other special circumstances protected by laws and regulations.

f. The BOD shall provide a working environment free from all forms of pressure (harassment).

22. The BOD Duties Related to Accounting System

a. Develop an appropriate accounting system based on the principles of internal control, especially separation of the functions of management, recording, storage, and supervision
b. Conduct and maintain the Company's books and administration to produce orderly bookkeeping, adequacy of working capital with efficient capital cost, good balance sheet structure and robust, timely and accurate presentation of reports and financial analysis and other principles in accordance with the prevailing norms a company.

23. Tugas Direksi terkait dengan Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
    a. Menetapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah.
    b. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah telah diterapkan dan dilaksanakan oleh unit terkait secara konsisten.
    c. Menerapkan kriteria *high risk* country, *high risk business*, dan *high risk customer.*
    d. Menetapkan kewenangan untuk memberikan keputusan akhir atas transaksi yang mencurigakan.
    e. Memastikan bahwa pejabat dan karyawan Perseroan memiliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
    f. Terhadap hal-hal yang disebutkan sebelumnya Direksi dapat memberikan pelimpahan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.

24. Tugas Direksi terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang/Transaksi Keuangan yang Mencurigakan.
    Direksi memimpin segenap upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kewaspadaan. Upaya peningkatan kewaspadaan dilakukan dengan cara :
    a. Identifikasi dan verifikasi nasabah/pengguna jasa keuangan.
    b. Identifikasi Transaksi Keuangan mencurigakan dan transaksi tunai dalam jumlah tertentu.
    c. Pelaporan transaksi keuangan.
    d. Menatausahakan dokumen.
    e. Pelatihan karyawan.
    f. Berkoordinasi secara erat dengan PPATK untuk hal-hal yang terkait dengan sistem dan kebijakan untuk waspada.
    g. Memastikan bahwa internal audit dan unit kerja *compliance* (kepatuhan) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan operasional sistem dan kebijakan intern Perseroan.
    h. Direksi dilarang memberitahukan kepada nasabahnya atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK (*Anti Tipping Off*).

25. Terkait dengan Perkreditan
    a. Menyusun atau bertanggungjawab atas penyusunan rencana perkreditan yang akan dituangkan dalam rencana kerja bank yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai

23. The BOD Duties Related to the Implementation of Know Your Customer Principles
    a. Establish Know Your Customer Knowledge Policy.
    b. Ensure that the Know Your Customer Principles policies and procedures have been implemented and implemented by related units consistently.
    c. Applying high risk country, high risk business, and high risk customer criteria.
    d. Determine the authority to make final decisions on suspicious transactions.
    e. Ensure that Company officers and employees have the knowledge and expertise required in the application of Know Your Customer Principles.
    f. With regard to the aforementioned matters, the BOD may grant delegation of authority in accordance with applicable regulations.

24. The BOD Duties Related to the Eradication of Criminal Act of Money Laundering / Suspicious Financial Transaction.
    The BOD leads all efforts to eradicate money laundering crime. One way is to increase alertness. Efforts to increase vigilance are done by:
    a. Identification and verification of customers / users of financial services.
    b. Identification of Suspicious Financial Transactions and certain amount of cash transactions.
    c. Financial transaction reporting.
    d. Administering documents.
    e. Employee training.
    f. Coordinate closely with PPATK for matters relating to systems and policies to be vigilant.
    g. Ensure that internal audit and compliance work units monitor the implementation and operation of the Company's internal systems and policies.
    h. The BOD is prohibited from notifying its customers or other persons either directly or indirectly in any way regarding any suspicious financial transactions that are being prepared or submitted to PPATK (Anti Tipping Off).

25. Related with Loan
    a. Arrange or be responsible for the preparation of loan plans that will be outlined in the work plan of the bank to be submitted to Bank Indonesia and ensure that the implementation is in accordance with the plan.

dengan rencana.

b. Menyusun atau bertanggungjawab atas penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang memuat semua aspek yang tercantum di dalam PPKPB dan sekurang-kurangnya mencantumkan masukan yang disampaikan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).
c. Memastikan bahwa KPB telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.
d. Bertanggungjawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran yang disampaikan KKP.
e. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditan yang ditemukan oleh SKAI.
f. Memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan.
g. Menetapkan anggota KKP dan Komite Kredit (KK).
h. Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dewan Komisaris disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan sekurang-kurangnya mengenai :
   - Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
   - Perkembangan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur tertentu.
   - Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah.
   - Penyimpangan dalam pelaksanaan KPB.
   - Temuan-temuan penting dalam perkreditan yang dilaporkan oleh SKAI.
   - Pelaksanaan dari rencana perkreditan sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
   - Penyimpangan/pelanggaran ketentuan di bidang perkreditan.

26. Terkait dengan Tugas dan Kewajiban Lain
    Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board Manual Direksi

Secara lebih rinci, Pedoman dan tata tertib kerja Direksi diatur dalam *Board Manual* yang mengatur tentang Panduan dan Pedoman kerja & tata tertib Direksi berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang

b. Prepare or be responsible for the preparation of the Bank Loan Policy (CDE) which contains all aspects contained in the PPKPB and at least include feedback submitted by the Loan Policy Committee (CTF).

c. Ensure that CDE has been implemented and implemented consistently and consistently.
d. Responsible for the implementation of improvement measures for the evaluation and suggestions submitted by the CTF.
e. Ensure the implementation of corrective measures for various irregularities in loan funded by SKAI.

f. Ensure bank obedience to laws and regulations applicable in the field of loan.

g. Establishes members of the CTF and Credit Committee (KK).
h. Report periodically and in writing to the BOC with corrective measures that have been, are, and will be carried out at least on :

- *The development and quality of the loan portfolio as a whole.*
- *The development of loan quality provided to parties related to the Bank and certain borrowers.*
- *Loans in special surveillance and non performing loan.*
- *Fraud in CDE implementation.*
- *Important findings in lending reported by SKAI.*
- *Implementation of the loan plan as set forth in the Bank's work plan submitted to Bank Indonesia.*
- *Fraud of provisions in the field of loan.*

26. Related with Other Tasks and Obligations
Carrying out other obligations in accordance with the provisions set forth in the Articles of Association and which are stipulated by the Shareholder General Meetings pursuant to the prevailing laws and regulations.

Board Manual Board of BOD

In more detail, the Directors' Manual and Code of Conduct are governed by the Board Manual, which regulates the Guidelines and Code of Conduct & the Board of Directors contains compilations of principles of corporate law, prevailing rules of law, the directions of the

berlaku, arahan Pemegang Saham dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Komisaris dan Direksi berikut organ kelengkapannya. Pedoman kerja & tata tertib Direksi merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi Bank Papua dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) tata kelola Bank yang baik.

Shareholders and the Articles of Association governing the working procedure BOC and Board of Directors and its completeness organs. The Board of Directors' Code of Conduct & Code of Conduct is the result of the codification of the various regulations applicable to Bank Papua and the best practices of Bank's GCG.

Pedoman kerja & tata tertib Direksi bertujuan untuk mempermudah Direksi dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan Direksi . Pengkinian manual haruslah selalu dilakukan sesuai kebutuhan Perseroan. Perubahan-perubahan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar serta berdasarkan kesepakatan Dewan Komisaris dengan Direksi . Mengingat pedoman Direksi merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Directors' guidelines and rules of conduct are intended to facilitate the Board of Directors in understanding the regulations relating to the Board of Directors. Manual updating should always be done as required by the Company. The amendments shall be based on the applicable regulations and shall not violate the provisions of the Articles of Association and in accordance with the agreement of the BOC with the Board of Directors. Since the Board of Directors' guidance is a compilation of the principles of corporate law, in practice it must be consistent with the prevailing laws and regulations.

Berbagai ketentuan secara rinci yang terdapat dalam Anggaran Dasar, arahan Pemegang Saham yang ditetapkan dalam RUPS, dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam Pedoman Direksi ini. Prinsip itikad baik, penuh tanggungjawab dan *fiduciary duties, skill and care* yang inheren dengan pemegang jabatan Direksi adalah prinsip umum yang harus tetap dihormati oleh organ Perseroan yang bertugas mengawasi dan mengurus Perseroan.

The detailed provisions contained in the Articles of Association, the directions of the Shareholders specified in the SGM, and other legal provisions remain binding, although not specifically described in this Board of Directors Manual. The principles of good faith, full responsibility and fiduciary duties, skill and care that are inherent to the holder of the Board of Directors are general principles that must be respected by the Company's organs responsible for overseeing and managing the Company.

Adapun isi dari *Board Manual* bagian Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :

I. Visi dan misi;
II. Fungsi;
III. Komposisi & persyaratan Direksi ;
IV. Independensi (kemandirian) Direksi ;
V. Etika jabatan;
VI. Tugas & kewajiban Direksi ;
VII. Hak & wewenang;
VIII. Penetapan kebijakan pengurusan perseroan Direksi ;
IX. Pendelegasian wewenang di antara Direktur Perseroan;
X. Pembagian tugas Direksi ;
XI. Rapat Direksi ;
XII. Komite-komite Direksi ;
XIII. Hubungan kerja antara Dewan Komisaris & Direksi ;
XIV. Penggunaan saran profesional.

The contents of the Board Manual of the Board of Directors, among others, regulate the following matters:

I. Vision and mission;
II. Function;
III. Composition & requirements of the BOD
IV. Independence of the BOD
V. Ethics of office;
VI. Duties & obligations of the Board of Directors;
VII. Rights & powers;
VIII. Determination of the Company's management policy of the Board of Directors;
IX. Delegation of authority among Directors of the Company;
X. Division of the Board of Directors' duties;
XI. Board of Directors' Meeting;
XII. Committees of the Board of Directors;
XIII. Working relationship between Board of Commissioners & Directors;
XIV. Use of professional advice.

Rapat Direksi

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Rapat Direksi adalah rapat yang dilaksanakan oleh Direksi yang berkenan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Agenda rapat didasarkan pada almanak peristiwa (*calendar of events*) Direksi dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan;
2. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi ;
3. Panggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat;
4. Pemanggilan untuk Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan;
5. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang Direksi ;
6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya;
7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri dan diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi ;
8. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara

BOD Meeting

Frequency and Attendance of the BOD Meeting

Meetings of the BOD are meetings held by the BOD with respect to the performance of their duties and functions. The agenda of the meeting is based on the alignment of the BOD' (calendar of events) events and other matters deemed necessary, under the following conditions:

1. *A meeting of the BOD may be held at any time were deemed necessary upon the request of one or more members of the BOD or at the written request of a member of the BOC or more by mentioning the matters to be discussed;*
2. *The calling of the BOD Meeting shall be conducted by a member of the BOD entitled to represent the BOD;*
3. *The calling of the Meeting of the BOD shall be in writing and submitted or submitted directly to each member of the BOD with adequate receipt, or by registered mail or courier service or by telex, facsimile or e-mail no later than 3) days before the meeting, not counting the date of the call and the date of the meeting or in a shorter time if urgent. Such calling is not required for scheduled meetings based on prior BOD' resolutions or if all members of the BOD are present at the meeting;*
4. *A calling for a Meeting of the BOD shall include the event, date, time and place of the meeting. Meetings of the BOD may be held at the place of domicile of the Company or place of business of the Company;*
5. *All meetings of the BOD shall be led by the President Director, and in the event that the President Director is absent or absent, the BOD' Meeting is led by one of the Directors;*
6. *A member of the BOD may be represented in a Meeting of the BOD only by other members of the BOD by virtue of a power of attorney. A member of the BOD may only represent another member of the BOD;*
7. *The meeting of the BOD is valid and entitled to take binding decisions if attended and represented by more than ½ (one half) of the total members of the BOD;*
8. *Decisions of the Meeting of the BOD shall be taken by deliberation for consensus. If a decision based on deliberations for consensus is not reached, then a decision shall be made by vote by vote agreeing to more than 1/2 (one half) of the number of valid votes issued at the meeting;*

yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan;

9. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Ketua Rapat yang menentukan.

9. If the voters agree and who disagree as much, then the Chair of the Meeting shall decide.

Sepanjang tahun 2017, Direksi telah menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 19 kali rapat, dengan rincian sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Throughout the year 2017, the BOD has held 19 meetings of the BOD, with details as outlined below.

Hari/Tanggal *Day/Date*	Tempat / *Place*	Peserta Rapat / *Attendance*	Agenda Rapat	*Meeting Agenda*
Rabu, 18 Januari 2017	Ruang Rapat Kasuari, Lt.4, Gedung Bank Papua Kantor Pusat	Plt. Direktur Utama (Sharly A. Parrangan), Direktur Kepatuhan (Frens Mambrisau), dan Seluruh Kepala Divisi)	Divisi IT (Implementasi Standar Chip), Divisi PER (Rencana Pengadaan Sistem E-FLPP serta Pelaksanaan *Host To Host* Data E-FLPP), Divisi Kredit (Perbandingan KKR dan KKR Berpotensi NPL Periode Desember 2015-Desember 2016, KKR Per Cabang Periode 31 Desember 2016, KKR yang berpotensi NPL s.d 31 Januari 2017, Nominatif KKR yang akan Jatuh Tempo s.d 31 Januari 2017	*IT Division (Implementation of Chip Standard), PER Division (E-FLPP System Procurement Plan and Implementation of Host To Host Data E-FLPP), loan Division (Comparison of KKR and KKR Potential NPL Period December 2015-December 2016, KKR Per Branch Period 31 December 2016, potential NPLs from January 31, 2017, Nominative KKR that will be due January 31, 2017*
Senin, 06 Februari 2017	Ruang Rapat Kasuari, Lt.4, Gedung Bank Papua Kantor Pusat	Plt. Direktur Utama (Sharly A. Parrangan), Direktur Kepatuhan (Frens Mambrisau), DAN Seluruh Kepala Divisi)	Divisi Pemasaran (Standarisasi Neon Box), Divisi Kredit Khusus (Progress Penyelesaian Kredit Bermasalah Tahun 2017), Divisi Kredit (Kredit Kualitas Rendah per Tanggal 23 Januari 2017, Pembiayaan Kredit Kontrakting Tahun 2016 yang belum Lunas), Divisi PER (Progress ELOS), SKAI (Tindak lanjut Temuan)	*Division of Marketing (Standardization of Neon Box), Special Credit Division (Progress of Non Performing Credit Loan Year 2017), Loan Division (Low Quality Credit as of January 23, 2017, Contract Financing 2016 Unsuccessed Credit), PER (Progress ELOS) Division, (Follow-up Findings)*
Selasa, 07 Maret 2017	Ruang Rapat Kasuari, Lt.4, Gedung Bank Papua Kantor Pusat	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, dan seluruh Kepala Divisi	Strukturisasi Organisasi Baru Bank Papua	*New Organization Structure of Bank Papua*
Jumat, 10 Maret 2017	Ruang Rapat Mambruk, Lt.4, Gedung Bank Papua	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, dan seluruh Kepala Divisi	Kewenangan Direksi dan Limit Kewenangan Pemberian Kredit	*Authority of Directors and Limits of Credit Lending Authority*
Kamis, 16 Maret 2017	Ruang Rapat Kasuari, Lt.4, Gedung Bank Papua Kantor Pusat	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, dan seluruh Kepala Divisi	Penetapan Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa (Divisi Umum), Penetapan Kewenangan Komite terkait SDM (Divisi Sumber Daya Manusia)	*Determination of Authority of Goods / Services Procurement (General Division), Determination of Authority of Related Human Resources Committee (HRD Division)*

Hari/Tanggal *Day/Date*	Tempat / *Place*	Peserta Rapat / *Attendance*	Agenda Rapat	*Meeting Agenda*
Senin, 20 Maret 2017	Ruang Rapat Kasuari, Lt.4, Gedung Bank Papua Kantor Pusat	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, dan seluruh Kepala Divisi	Revisi RBB Bank Papua Tahun 2017 (Divisi Perencanaan dan Pengembangan)	*Revision of RBB Bank Papua Year 2017 (Div RBG)*
Jumat, 28 April 2017	Ruang Rapat Kasuari, Lt.4, Gedung Bank Papua Kantor Pusat	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, dan seluruh Kepala Divisi	Penyampaian Hasil *Prudential Meeting* dengan OJK	*Submission of Prudential Meeting Result with OJK*
Rabu, 04 Mei 2017	Ruang Rapat Kasuari, Lt.4, Gedung Bank Papua Kantor Pusat	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, dan seluruh Kepala Divisi	Simulasi *Stress Test* NPL & Hapus Buku	*NPL Stress Test Simulation & Clear Books*
Jumat, 12 Mei 2017	Ruang Rapat Mambruk, Lt.4, Gedung Bank Papua	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, dan seluruh Kepala Divisi	Penyampaian Hasil Investigasi Khusus dengan SKAI, Pembahasan tentang Perubahan ketentuan Masa Persiapan Pensiun (MPP), Pembahasan tentang Konsep Aturan Rumah dan Kendaraan Dinas	*Submission of Special Investigation Results with SKAI, Discussion on the Amendment of Retirement Preparation Period (MPP), Discussion on Concept of House Rules and Vehicle Service*
Selasa, 23 Mei 2017	Ruang Rapat Kasuari, Lt.4, Gedung Bank Papua Kantor Pusat	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, dan seluruh Kepala Divisi	Laporan & Evaluasi penyaluran Kredit KPR-FLPP, Evaluasi *Action Plan* Bank Papua sesuai Surat OJK No. SR-8/D.03/2017 tgl 21 April, Design ATM Center	*Reports & Evaluation of KPR-FLPP Loans, Evaluation of Action Plan of Bank Papua in accordance with Letter of OJK No. SR-8 / D.03 / 2017 dated April 21st, ATM Center Design*
Senin, 19 Juni 2017	Ruang Rapat Kasuari, Lt.4, Gedung Bank Papua Kantor Pusat	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, dan seluruh Kepala Divisi	Evaluasi *Action Plan* Bank Papua sesuai Surat OJK No. SR-8/D.03/2017 tgl 21 April 2017	*Evaluation of the Action Plan of Bank Papua in accordance with Letter of OJK No. SR-8 / D.03 / 2017 dated 21 April 2017*
Senin, 03 Juli 2017	Ruang Rapat Kasuari, Lt.4, Gedung Bank Papua Kantor Pusat	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, dan seluruh Kepala Divisi	Evaluasi Penurunan Kualitas Kredit Per 30 Juni 2017, dan lain-lain	*Evaluation of Credit Impairment Quality As of 30 June 2017, and others*
Rabu, 02 Agustus 2017	Ruang Rapat Kasuari, Lt.4, Gedung Bank Papua Kantor Pusat	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, dan seluruh Kepala Divisi	Pengadaan Kalender dan Agenda Bank Papua Tahun 2018, Presentasi tentang Transformasi Bank Papua	*Procurement of Calendars and Agenda of Bank Papua 2018, Presentation on Transformation of Bank Papua*
Rabu, 09 Agustus 2017	Ruang Rapat Kasuari, Lt.4, Gedung Bank Papua Kantor Pusat	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, dan seluruh Kepala Divisi	Presentasi Program Taspen Life bagi Pegawai Bank Papua oleh Divisi Sumber Daya Manusia	*Taspen Life Program Presentation for Bank Indonesia Officers by HR Division*

Hari/Tanggal *Day/Date*	Tempat / *Place*	Peserta Rapat / *Attendance*	Agenda Rapat	*Meeting Agenda*
Selasa, 26 September 2017	Ruang Rapat Kasuari, Lt.4, Gedung Bank Papua Kantor Pusat	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, dan seluruh Kepala Divisi	Transaksi-Transaksi koreksi mutasi rekening pada system OLIBS, Hasil Pertemuan Direktur Utama Bank Pappua dengan Direksi Bank DKI Jakarta, Buku Tabungan Bank Papua, Pelaksanaan *Business* Meeting, Kredit yang Jatuh Tempo, Kredit Mama Papua Pola Grameen Bank, dan lain-lain	*Account Transaction on OLIBS System, Results of Meeting of Managing Director of Bank Pappua with Board of Directors of Bank DKI Jakarta, Saving Book of Bank Papua, Business Meeting Implementation, Loose Maturity, Mama Papua Credit Grameen Bank Pattern, and others*
Rabu, 27 September 2017	Ruang Rapat Kasuari, Lt.4, Gedung Bank Papua Kantor Pusat	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, dan seluruh Kepala Divisi	Program Gemas Simanja dan Program Official Account oleh Divisi Pemasaran, Usulan Perubahan SK Direksi tentang Rumah Dinas bagi Pejabat Bank Papua, Usulan Perubahan SK Direksi tentang Perjalanan Dinas bagi Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Papua, dan lain-lain	*Gemas Simanja Program and Official Account Program by Marketing Division, Proposed Changes in Directors 'Decree on Home Houses for Officials of Bank Papua, Proposed Changes in Directors' Decree on Official Travels for Commissioners, Directors and Employees of Bank Papua, and others*
Senin,09 Oktober 2017	Ruang Rapat Kasuari, Lt.4, Gedung Bank Papua Kantor Pusat	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, dan seluruh Kepala Divisi	Pemberian bantuan hukum atas pelaksanaan tugas kedinasan kepada Pejabat dan Pegawai Bank Papua yang terlibat dalam kasus Hukum	*Providing legal assistance for the performance of official duties to the Officials and Officers of Bank Papua involved in the case of the Law*
Jumat, 27 Oktober 2017	Ruang Rapat Mambruk, Lt.4, Gedung Bank Papua	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, dan seluruh Kepala Divisi	Penyaluran Kredit KPR-FLPP, SDM terkait pelatihan-pelatihan Kepala Cabang, Kepala Departemen dan Analis Kredit */Account Officer* (AO), dan lain-lain	*Distribution of KPR-FLPP Credit, HR related training Branch Head, Head of Department and Analyst Redir / AO, and others*
Selasa, 27 November 2017	Ruang Rapat Kasuari, Lt.4, Gedung Bank Papua Kantor Pusat	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, dan seluruh Kepala Divisi	Pembahasan Rencana Pembukaan dan Penutupan Kantor Tahun 2018 yang akan dicantumkan pada Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Papua Tahun 2018	*Discussion of Opening and Closing Plan of Office 2018 that will be included in Business Plan Bank (RBB) of Bank Papua Year 2018*

Frekuensi Rapat Diresi dan Tingkat Kehadirannya

Frequency of Meetings of Diression and Level of Presence

Nama Direksi	Jabatan		Jumlah Rapat	Kehadiran	
				Total	%
Direksi Lama/ *Old Board of Directors*					
Sarly A Parrangan	Plt. Direktur Utama	*Plt. President Director*	19	2	11%
Frens Membrisau	Direktur Kepatuhan	*Director of Compliance*	19	2	11%
Direksi Baru/ *New Board of Directors*					
F. Zendrato	Direktur Utama	*President Director*	19	17	89%
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	*Business Director*	19	17	89%
Rudhy Dharma	Direktur Keuangan	*Director of Finance*	19	17	89%
Isak S. Wopari	Direktur Operasioanl	*director of Operations*	19	17	89%
Jefri Sani P.S.	Direktur Kepatuhan	*Director of Compliance*	19	17	89%

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Bagi Anggota Direksi yang baru diangkat, diberikan orientasi atas kondisi Bank secara umum. Program orientasi meliputi antara lain pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Bank yang baik dan *Business* Ethics di Perseroan, gambaran mengenai Bank berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Bank, *Competitive advantage*, risiko pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya yang dinilai perlu, penjelasan atas kewajiban, tugas, tanggungjawab dan hak-hak Direksi . Program orientasi dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Kantor Cabang/Kantor Wilayah/Divisi, ke fasilitas Bank, pengkajian dokumen Bank atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

Orientation Program for New BOD

For newly appointed members of the Board of Directors, orientation is given to the conditions of the Bank in general. The orientation program includes among others the implementation of Banking GCG principles and Business Ethics in the Company, the Banks description of the Bank's objectives, nature, and scope of activities, financial performance, strategy, short-term and long-term plans, Competitive advantage, risk internal controls and other strategic issues deemed necessary, an explanation of the duties, duties, responsibilities and rights of the Board of Directors. Orientation programs may be presentations, meetings, visits to Branch Offices / Regional Offices / Divisions, to Bank facilities, assessment of bank documents or other programs deemed appropriate to the needs.

Pengembangan Kompetensi Direksi

kebijakan Peningkatan kompetensi dalam hal ini berupa Program Pelatihan dan Seminar dinilai penting agar Direksi dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari lini bisnis Perseroan, mengantisipasi masalah yang timbul dikemudian hari bagi sustainabilitas Bank.

Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait dengan fungsi dan tugasnya, selama tahun 2017 Direksi telah mengikuti berbagai program pelatihan, konferensi, seminar atau workshop, yang dapat disajikan sebagai berikut :

Competence Development of BOD

The policy of competence improvement in the form of the Training Program and Seminar is considered important so that the Board of Directors can always update information about the latest developments of the Company's business lines, anticipate future problems for the sustainability of the Bank.

To enhance the insights and knowledge related to its functions and duties, during 2017 the Board of Directors has attended various training programs, conferences, seminars or workshops, which can be presented as follows:

PROGRAM PELATIHAN DAN SEMINAR
SEMINAR AND TRAINING PROGRAM

Direksi *Board of Director*	Materi Pendidikan Seminar/Pelatihan *Seminar/Training Content*	Waktu Pelaksanaan *Execution time*	Nama Penyelenggara *Organizer*
F. Zendrato	SESPIBANK	23 Februari 2007	LPPI
	Business Process	23 Maret 2017	Talents Indonesia
	Treasury (ALMA)	28 Maret 2017	Lembaga Sertifikasi profesi perbankan
	Treasury (ALMA)	28 Maret 2017	ACI *Financial* Market Association Indonesia
	Pengelolaan Tugas/Operasi (UTama)	07 April 2017	OJK Pusat
	Business Process	04 Mei 2017	OJK Provinsi Papua dan Papua Barat
	Pengelolaan Perubahan (Utama)	26 Juli 2017	Asosiasi Bank Pembangunan daerah (asbanda)
	Akuntansi Perbankan	10 November 2017	Bank Papua
	Business Process	15 November 2017	Talents Indonesia
Sadar Sebayang	*Business process*	23 Maret 2017	ASBANDA
	Akuntansi Perbankan	10 November 2017	Bank Papua
	Business Process	15 November 2017	Talens Indonesia

PROGRAM PELATIHAN DAN SEMINAR *SEMINAR AND TRAINING PROGRAM*			
Direksi *Board of Director*	**Materi Pendidikan Seminar/Pelatihan** *Seminar/Training Content*	**Waktu Pelaksanaan** *Execution time*	**Nama Penyelenggara** *Organizer*
Rudhy Dharma	Manajemen Risiko Level IV	21 Mei 2016	BSMR
	Manajemen Risiko Level V	28 Mei 2016	BSMR
	Treasury (ALMA)	25 Maret 2017	ACI *Financial* Market Association Indonesia
	Treasury (ALMA)	25 Maret 2017	Lembaga Sertifikasi profesi perbankan
	Akuntansi Perbankan	05 Oktober 2017	OJK Pusat
	Akuntansi Perbankan	10 November 2017	Bank Papua
	Business Process	15 November 2017	Talents Indonesia
Isak Semuel Wopari	*Business Process*	26 Agustus 2017	Talens Indonesia
	Akuntansi Perbankan	10 November 2017	Bank Papua
	Business Process	15 November 2017	Talents Indonesia
Jefri Sani Pither Siing	Kepatuhan	06 September 2017	LPPI
	Akuntansi Perbankan	10 November 2017	Bank Papua
	Business Process	15 November 2017	Talents Indonesia

Penilaian Kinerja Direksi

Pengukuran keberhasilan kinerja Direksi merupakan hasil kerja kolegial seluruh anggota Direksi yang tercermin dalam satu kesatuan pada pencapaian/ realisasi atas Rencana Bisnis Bank (RBB) secara tahunan dan kebijakan umum Direksi . Selain itu, keberhasilan kinerja Direksi dapat diukur melalui hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang mencakup aspek profil risiko, *Good Corporate Governance*, *rentabilitas* dan permodalan Bank. Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi antara lain adalah Dewan Komisaris, RUPS, OJK dan beberapa lembaga independen.

Untuk pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penilaian kinerja Direksi disampaikan kepada pemegang saham setiap tahun sebagaimana yang termuat di dalam akta RUPS Tahunan yang diselenggarakan Bank setiap tahunnya.

Di samping penilaian Direksi disampaikan kepada RUPS, penilaian kinerja Dewan Direksi juga dilakukan secara periodik oleh beberapa lembaga independen diantaranya :

1. Penilian Kinerja melalui audit kinerja oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Penilian Kinerja melalui audit kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
3. Penilian Kinerja melalui audit kinerja oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Sampai dengan akhir Desember 2017, seluruh anggota Direksi tidak mendapat sanksi atau penilaian buruk dari ketiga lembaga tersebut, dan juga oleh para Pemegang Saham.

BOD Performance Assessment

Measurement of the performance success of the BOD is the result of collegial work of all members of the BOD reflected in one unity on the achievement / realization of the Bank Business Plan (RBB) on an annual basis and the general policy of the BOD. In addition, the performance of the BOD' performance can be measured through the Bank Rating result which includes the risk profile aspect, Good Corporate Governance, Bank's profitability and capital. Parties that conduct assessment on the performance of the BOD are among the others BOC, SGM, OJK and several independent institutions.

For the BOD' accountability to the SGM is a manifestation of corporate management accountability in the implementation of GCG principles. The performance appraisal of the BOD shall be submitted to shareholders annually as contained in the Annual SGM deed held every year by the Bank.

In addition to the BOD assessment submitted to the SGM, the BOD' performance appraisal is also conducted periodically by several independent institutions including:

1. *Performance Evaluation through performance audit by the Financial Services Authority (OJK);*
2. *Performance Evaluation through performance audit by the Supreme Audit Board (BPK);*
3. *Performance Evaluation through performance audit by the Financial and Development Supervisory Board (BPKP)*

Until the end of December 2017, all members of the BOD shall not be subject to any sanction or bad judgment of the three institutions, as well as by the Shareholders.

Kebijakan Remunerasi Direksi

Prosedur Penetapan Remunerasi

Pengungkapan kebijakan remunerasi Direksi untuk periode laporan tahun 2017 masih mengacu pada kebijakan Penerapan Tata Kelola Bagi Bagi Bank Umum sebagaimana diatur di dalam POJK Nomor 55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bagi Bank Umum.

Penetapan remunerasi Direksi direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mengacu kepada prinsip-prinsip remunerasi Bank Papua dan hasil penilaian atas pencapaian target (*goal setting*), peraturan yang berlaku, *industry comparison*, dan kinerja Bank Papua. Rekomendasi komite tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris, untuk kemudian disampaikan dan mendapatkan persetujuan RUPS.

Proses penetapan remunerasi Direksi digambarkan sebagai berikut :

Directors Remuneration Policy

Remuneration Determination Procedure

Disclosure of the BOD remuneration policy for the reporting period of 2017 still refers to the policy on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks as stipulated in POJK Number 55 / POJK.03 / 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

Determination of remuneration of the BOD is recommended by the Nomination and Remuneration Committee with reference to the principles of remuneration of Bank Papua and the results of the assessment of target setting, applicable regulations, industry comparison, and performance of Bank Papua. The recommendations of the committee are submitted to the BOC, to be submitted and obtained approval from the SGM.

The process of determining the remuneration of the BOD is described as follows:

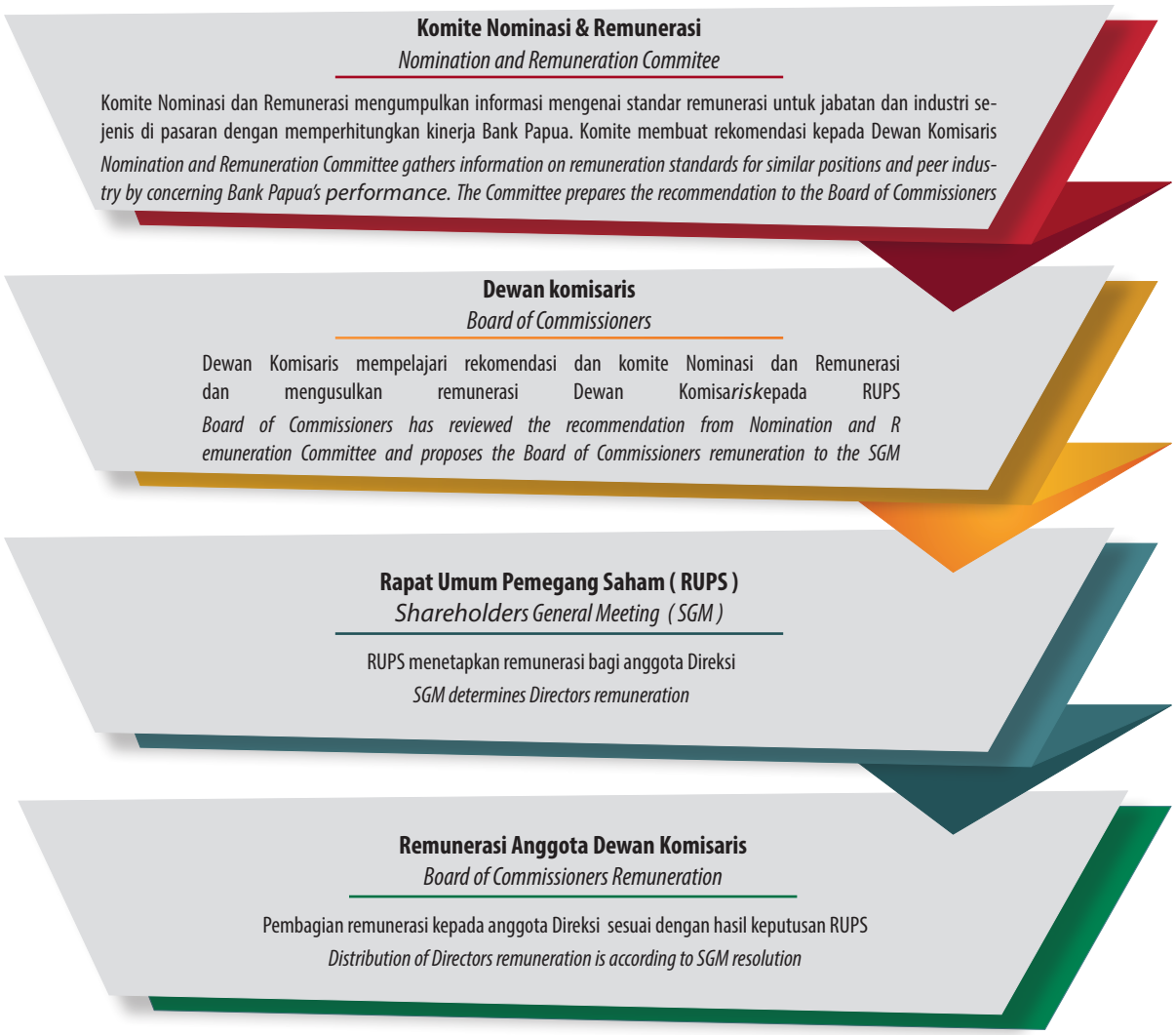

Struktur Remunerasi Direksi

Seluruh Direksi menerima paket remunerasi yang dibayarkan secara berkala, terdiri dari Gaji, Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Kendaraan, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Cuti dan Tantiem. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Direksi yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank Papua adalah: Gaji, Tunjangan Rutin, Tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura;
2. Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh Direksi , yang mencakup jumlah anggota Direksi , jumlah seluruh kebijakan remunerasi, dan fasilitas lainnya tersajikan pada tabel dibawah ini :

BOD Remuneration Structure

All Directors receive remuneration packages paid periodically, consisting of Salary, Housing Allowances and Vehicle Allowances, Holiday Allowances, Leave Allowances and Tantiem. Remuneration policies and other facilities for the Board of Directors are as follows:

1. *Remuneration policies and other facilities for the Board of Directors stipulated in the Annual Shareholders General Meeting of Bank Papua are: Salaries, Routine Benefits, Tantiem and other facilities in non-permanent form;*
2. *Type of remuneration and other facilities for all Directors, including the number of members of the Board of Directors, the total number of remuneration policies, and other facilities are presented in the table below:*

JUMLAH YANG DITERIMA Direksi DALAM 1 TAHUN *TOTAL INCOME BY BOD IN 1 YEAR*		
Jenis Penerimaan *Income Type*	**Jumlah Direksi** *Total of BOD*	**Nominal (Rp)** *Amount*
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, penghasilan tetap lainnya dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	5	7.753.719.800,-
2. Fasilitas lain dalam bentuk Natura (perumahan, transportasi, perawatan kesehatan, dsb) yang :	5	0
-Dapat dimiliki	0	0
-Tidak Dapat dimiliki	0	0
Total Penerimaan	**10**	**7.753.719.800,-**

Nominal Komponen Remunerasi Direksi

Untuk jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam tahun 2017 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut :

BOD Nominal Components

For the total number of members of the Board of Directors and Board of Commissioners receiving remuneration package in 2017 which are grouped in the range of income levels, as follows:

KELOMPOK NOMINAL KOMPONEN REMUNERASI Direksi *NOMINAL GROUP OF REMUNERATION COMPONENTS OF THE BOD*	
Remunerasi Dalam 1 tahun *Remuneration Within 1 year*	**Jumlah Direksi** *Total of BOD*
Di atas Rp2 milyar	-
Di atas Rp1 milyar s.d 2 milyar	5 orang
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 milyar	-
Rp500 juta ke bawah	-

Informasi Lain Terkait Dampak Kebijakan Remunerasi

Pada periode 2017 tidak terdapat intervensi pemilik, perselisihan internal ataupun permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi dari pada Perseroan.

Other Information Related to the Impact of Remuneration Policy

During the period of 2017 there was no private ownership, internal disputes or problems arising as a result of the Company's remuneration policy.

Penyesuaian Ketentuan Remunerasi Direksi

Terkait dengan pengaturan kebijakan remunerasi untuk Direksi Bank yang berlaku saat ini, dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, maka untuk penyampaian laporan atas penerapan tata kelola Bank Papua untuk periode laporan tahun berikutnya, Bank Papua akan mengungkapkan informasi kebijakan Remunerasi Direksi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola tersebut dengan memperhatikan dan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tersebut Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan Remunerasi Direksi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum. Informasi kebijakan Remunerasi yang wajib diungkapkan paling sedikit mencakup :

1. Komite Remunerasi antara lain:
   a. Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggungjawab;
   b. Jumlah rapat yang dilakukan; dan
   c. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun;
2. Proses penyusunan kebijakan Remunerasi yang meliputi:
   a. Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi;
   b. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya; dan
   c. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya;
3. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri;
4. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi:
   a. Jenis risiko utama (*key risk*) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi;
   b. Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur;
   c. Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel; dan
   d. Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada;

Adjustment of the BOD Remuneration Terms

In relation to remuneration policy setting for the current BOD of Banks and the Regulation of the Financial Services Authority Number 45 / POJK.03 / 2015 regarding the Implementation of Good Corporate Governance in Remuneration for Commercial Banks, the reporting on the implementation of the governance of Bank Papua for the period next year's report, Bank Papua will disclose information on the Directors Remuneration policy in the annual report on the implementation of the governance with due regard and reference to the Financial Services Authority Regulation Number 45 / POJK.03 / 2015 on the Implementation of Good Corporate Governance in Remuneration for Commercial Banks.

On the Regulation of the Financial Services Authority Number 45 / POJK.03 / 2015, Banks are required to disclose information on the Directors Remuneration policy in the annual report on the implementation of governance as stipulated in the provisions regulating the implementation of good corporate governance for commercial banks. Remuneration policy information that must be disclosed must include at least the following:

1. *The Remuneration Committee includes:*
   a. *Names of members, composition, duties and responsibilities;*
   b. *Number of meetings conducted; and*
   c. *Remuneration paid to members of the Remuneration Committee for 1 (one) year;*
2. *The process of formulating a Remuneration policy which includes:*
   a. *A review of the background and objectives of the Remuneration policy;*
   b. *Review of Remuneration policy in the previous year, together with its improvements; and*
   c. *Mechanism to ensure that the Remuneration for Personnel in the control unit is independent of the supervised work unit;*
3. *Remuneration policy coverage and its implementation per business unit, by region and in subsidiaries or branch offices located overseas;*
4. *Remuneration is associated with risks that include:*
   a. *The type of key risk used in applying the Remuneration;*
   b. *Criteria for determining the types of major risks, including those for difficult risks measured;*
   c. *Impact of key risk determination of Variable Remuneration policy; and*
   d. *Changes in the determination of the main types of risk compared to last year and the reasons, if any;*

5. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi:
   a. Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja;
   b. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu; dan
   c. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi;
6. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi:
   a. Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarannya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut; dan
   b. Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (malus), atau ditarik kembali apabila sudah dibayarkan (*clawback*);
7. Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, apabila Bank menggunakan jasa konsultan ekstern;
8. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal;
9. Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi:
   a. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut; dan
   b. Penjelasan apabila terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel di antara para Direksi , Dewan Komisaris dan/atau Pegawai;
10. Jumlah Direksi , Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya;
11. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material *risk takers*;
12. *Shares option* yang dimiliki Direksi , Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif;
13. Rasio gaji tertinggi dan terendah;
14. Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi , calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja ;
15. Jumlah Pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan;
16. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank;

5. *Performance measurement is associated with Remuneration which includes:*
   a. A review of the Remuneration policy associated with performance appraisal;
   b. Methods in linking individual Remuneration to Bank performance, work unit performance and individual performance; and
   c. A description of the method used by the Bank to state that agreed performance cannot be achieved so that adjustment of remuneration is required and the amount of remuneration adjustment if such condition occurs;

6. *Remuneration Adjustment is associated with Performance and Risk which includes:*
   a. A policy on variable remuneration suspended, the magnitude, and criteria for determining the amount; and
   b. Deferred suspended variable remuneration of a Bank policy pending payment (malus), or withdrawn when it is paid (clawback);

7. *Name of external consultant and consultant duties related to Remuneration policy, if Bank uses the services of external consultants;*
8. *Remuneration Package and facilities received by the BOD and BOC cover the structure of Remuneration and details of the nominal amount;*
9. *Variable Remuneration, including:*
   a. the form of Variable Remuneration and the reasons for choosing the form; and
   b. explanation if there are differences in the provision of Variable Remuneration among Directors, BOC and / or Employees;

10. *The Number of Directors, BOC and Personnel receiving Variable Remuneration for 1 (one) year, and total nominal;*
11. *Position and number of parties who become material risk takers;*
12. *Share option owned by the BOD, BOC, and Executive Officers;*
13. *Ratio of highest and lowest salaries;*
14. *The number of recipients and the total amount of the variable Remuneration will be granted by the Bank to prospective Directors, candidates for BOC and / or prospective Employees during the first 1 (one) year of work;*
15. *Number of employees affected by termination of employment and total nominal of severance pay;*
16. *Total Deferred Variables Remuneration, consisting of cash and / or shares or stock-based instruments issued by the Bank;*

17. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun;
18. Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam satu tahun meliputi:
    a. Remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel;
    b. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan
    c. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank;
19. Informasi kuantitatif mengenai :
    a. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;
    b. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan;
    c. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

17. Total Deferred Variable Remuneration paid for 1 (one) year;

18. Details of Remuneration given within one year include:
    a. Fixed or variable remuneration;
    b. Deferred and undeferred remuneration; and
    c. Remuneration forms provided in cash and / or shares or stock-based instruments issued by the Bank;

19. Quantitative information on:
    a. The remaining total Remuneration remained with either exposed implicit or explicit adjustments;
    b. Total Remuneration deductions caused by explicit adjustments during the reporting period;
    c. Total Remuneration deductions caused due to implicit adjustments during the reporting period.

Pemberlakuan POJK di atas untuk Bank BUKU 1 dan Bank BUKU 2 yang bukan merupakan Bank Asing adalah sejak tanggal 1 Januari 2017.

The above POJK enforcement for Bank BUKU 1 and Bank BUKU 2 which is not a Foreign Bank is from 1 January 2017.

Untuk memenuhi POJK tersebut maka Bank akan melakukan penyesuaian kebijakan remunerasi Pengurus Bank yang berlaku saat ini yang disesuaikan dengan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

To comply with the POJK, the Bank will adjust the remuneration policy of the current Management of Banks in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority Number 45 / POJK.03 / 2015 concerning the Application of Good Corporate Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks.

Hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris

Hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris adalah hubungan *check and balances* terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam pengelolaan perusahaan dengan didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dalam rangka mewujudkan hubungan tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi mengagendakan pertemuan berkala dalam bentuk rapat koordinasi untuk membahas dan memutus persoalan-persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan operasional perusahaan. Agenda yang menjadi pokok bahasan dalam pertemuan tersebut antara lain rencana bisnis, operasional, peluang usaha, dan isu-isu strategis yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris. Selain itu, rapat koordinasi tersebut merupakan forum dimana Dewan Komisaris dapat membahas laporan-laporan periodik Direksi serta memberikan tanggapan, catatan dan nasihat kepada Direksi yang dituangkan dalam risalah rapat.

Relationship of BOD with BOC

The working relationship between the BOD and the BOC is the connection of checks and balances related to the implementation of their respective duties and responsibilities in the management of the company based on the principle of transparency. In order to realize the relationship, the BOC and the BOD scheduled regular meetings in the form of coordination meetings to discuss and decide on important issues concerning business continuity and company operations. The agenda on which the meetings were discussed included business plans, operations, business opportunities, and strategic issues requiring the approval of the BOC. In addition, the coordination meeting is a forum where the BOC can discuss periodic reports of the BOD and provide responses, notes and advice to the BOD as outlined in minutes of meetings.

Kebijakan Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian anggota Direksi Bank diatur berdasarkan Pedoman Kerja & Tata Tertib Direksi (Manual Direksi) tentang etika jabatan.

Secara umum uraian mengenai mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian anggota Direksi secara umum diatur sebagai berikut :

1. Setiap anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan pemberitahuan tertulis;
2. Direksi diminta untuk mengundurkan diri apabila Anggota Direksi terlibat dalam kejahatan keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran anggota Direksi dimaksud dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri;
4. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
5. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggungjawab setelah memperoleh pembebasan tanggungjawab dari RUPS Tahunan;
6. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank atau terdapat indikasi melakukan kerugian Bank atau melalaikan kewajibannya;
7. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan;
8. Dalam RUPS, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
9. Jabatan Anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila: Meninggal dunia; Masa jabatannya berakhir; Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Policy of Resignation and Dismissal of BOD

The mechanism of resignation and dismissal of members of the BOD of the Bank shall be governed by the Code of Conduct & the Rules of BOD on the ethics of office.

In general the description of the mechanism of resignation and dismissal of members of the BOD in general is regulated as follows:

1. *Each member of the BOD shall be entitled to withdraw from his / her position before his / her term expires by written notice;*
2. *The BOD shall be required to resign if the members of the BOD are involved in financial crimes such as manipulation and various forms of embezzlement in the financial services activities as well as the Money Laundering Crime Act as referred to in Law Number 8 Year 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crime;*
3. *The Bank shall convene the Shareholders General Meeting to decide upon the resignation of the members of the BOD in no more than 90 (ninety) days after receipt of the letter of resignation;*
4. *Before the resignation is effective, the members of the BOD concerned shall remain obligated to complete their duties and responsibilities in accordance with the Statutes and the rules of law;*
5. *The resigning BOD shall be free from liability after obtaining the exemption from the Responsibility of the Annual SGM;*
6. *Members of the BOD may be temporarily dismissed by the BOC by stating the reasons for their actions in contravention with the Bank's Articles of Association or any indication of loss of the Bank or neglecting its obligations;*
7. *A temporary suspended member of the BOD shall not be authorized to exercise the Bank for the Bank's interest in accordance with the purposes and objectives of the Company and to represent the Company in or out of court;*
8. *In the SGM, the members of the BOD concerned shall be given an opportunity to defend themselves;*
9. *Position of Members of the BOD by itself terminates if: Died; His term ended; Covered under an ability under a court decision or no longer fulfilling the requirements as a member of the BOD under applicable laws and regulations;*

Komite di Bawah Direksi
Committess under Board of Directors

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi dapat dibantu oleh berbagai Komite sesuai kebutuhan Perseroan. Adapun persyaratan pembentukan Komite-Komite Direksi adalah sebagai berikut :

1. Eksistensi komite tidak dilarang oleh Anggaran Dasar Bank Papua;
2. Beranggotakan lebih dari satu orang;
3. Eksistensi komite ini bertujuan untuk membantu, tetapi tidak dapat membebaskan tanggungjawab Direksi ;
4. Komite tidak menjalankan tugas-tugas Direksi yang tidak dapat didelegasikan (*non-delegable*). Di antara tugas-tugas Direksi yang tidak dapat didelegasi adalah melakukan dan atau menyetujui tindakan-tindakan penting terhadap Perseroan, misalnya dalam hal merger dan akuisisi, perubahan Anggaran Dasar, likuidasi Perseroan dan lain-lain.

Komite-komite yang dibentuk Direksi antara lain adalah sebagai berikut.

Komite Manajemen Risiko

Merupakan komite yang membantu Direksi dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan aktiva dan pasiva dalam berbagai macam kegiatan perbankan yang mengandung tingkat risiko termasuk untuk mengidentifikasi seluruh risiko yang berasal dari segenap kegiatan usaha unit-unit bisnis Perseroan, menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko menetapkan kebijakan pengendalian risiko, dan memonitor dampak dari implementasi kebijakan dan strategi terhadap parameter risiko tertentu secara berkala.

Komposisi

Komposisi Komite Manajemen Risiko berdasarkan SK Direksi No: 25/DIR-BPD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017

Ketua	: Direktur Utama
Wakil Ketua	: Direktur Kepatuhan
Sekretaris	: Kepala Divisi Manajemen Risiko
Wakil Sekretaris	: Kepala Divisi Kepatuhan
Anggota	: 1. Direktur Bisnis
	2. Direktur Kepatuhan
	3. Direktur Operasional
	4. Kepala Divisi Hukum
	5. Kepala Satuan Kerja Audit Intern

In performing its duties and functions, the Board of Directors may be assisted by various Committees as required by the Company. The requirements for the establishment of the BoD Committees are as follows:

1. *The existence of the committee shall not be prohibited by the Statutes of Bank Papua;*
2. *Members of more than one person;*
3. *The existence of this committee aims to assist, but cannot relieve the responsibility of the Board of Directors;*
4. *The Committee shall not perform the duties of the Board of Directors, which are cannot delegate. Among the duties of the Board of Directors who are not eligible is to commit and or approve important actions against the Company, for example, in the case of mergers and acquisitions, amendments to the Articles of Association, the liquidation of the Company and others.*

Committees established by the Board of Directors are as follows.

Risk Management Committee

It is a committee that assists the Board of Directors in establishing policies relating to asset and liability management in various banking activities containing risk levels, including identifying all risks arising from the business activities of the business units of the Company, establishing risk management policies and strategies establishing control policies risk, and monitor the impact of policy implementation and strategy on certain risk parameters on a regular basis.

Composition

Composition of the Risk Management Committee based on Decree of the Board of Directors No: 25 / DIR-BPD / V / 2017 dated May 22, 2017

Chairman	*: President Director*
Vice Chairman	*: Compliance Director*
Secretary	*: Head of Risk Management Division*
Deputy Secretary	*: Chief Compliance Division*
Members	*: 1. Business Director*
	2. Compliance Director
	3. Banking Operation Director
	4. Head of legal division
	5. Head of Internal Audit Unit

Anggota tidak tetap komite Manajemen Risiko :

Non-permanent member of the Risk Management Committee:

1	Bidang Risiko Kredit	Kepala Divisi Komersial & Korporasi	*Head of Commercial & Corporate Division*
		Kepala Divisi Pengembangan ekonomi Rakyat	*Head of People's Economic Development Division*
		Kepala Divisi Risiko Bisnis	*Head of Business Risk Division*
		Kepala Divisi Kredit Khusus	*Head of Special Loan Division*
2	Bidang Risiko Pasar & *Likuiditas*	Kepala Divisi Treasury & International	*Head of Treasury & International Division*
		Kepala Divisi Pemasaran	*Head of Marketing Division*
		Kepala Divisi Akuntansi	*Head of Accounting Division*
3	Bidang risiko Operasional dan Risiko Lainnya	Kepala Divisi Teknologi Informasi	*Head of Information Technology Division*
		Kepala Divisi Umum	*Head of General Affair Division*
		Kepala Divisi Pembinaan Cabang	*Branch Manager Development Division*
		Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan	*Head of Corporate Secretary Division*
		Kepala Divisi Perencanaan & Pengembangan	*Head of Planning & Development Division*
		Kepala Satuan Kerja Anti Fraud	*Head of Anti Fraud Working Unit*

Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab

Wewenang Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait manajemen resiiko, paling kurang meliputi :

Authority, Duties and Responsibilities

The competence of the Risk Management Committee is to evaluate and provide recommendations to the President Director regarding risk management, at least including:

No	Wewenang	Authority
1	Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi risiko (*risk Tolerance*), kerangka manajemen risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;	*Preparation of risk management policies and changes, including risk management strategies, risk appetite and risk tolerance, risk management frameworks and contingency plans to anticipate abnormal conditions;*
2	Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko dan tingkat kesehatan Bank dan tidak efektinya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi	*Completion of the Risk Management processes periodically or incidentally as a result of a change in the Bank's external and internal conditions affecting the capital adequacy, risk profile and soundness of the Bank and the ineffectiveness of risk management implementation based on evaluation results*
3	Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan	*Determination of business policies and / or decisions that deviate from normal procedures, such as a significant exceedance of business expansion compared to a predetermined business plan*

Tugas dan tanggungjawab Komite Manajemen Risiko adalah :

The duties and responsibilities of the Risk Management Committee are:

No	Tugas dan Tanggungjawab	Duties and responsibilities
1	Mengadakan pertemuan secara berkala	*Holding regular meetings*
2	Memantau besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara sesuai dengan toleransi risiko Bank yang telah ditetapkan	*Monitoring the amount or maximum risk exposure that must be transferred in accordance with the Bank's risk tolerance that has been determined*
3	Mengkaji dan mengambil tindakan yang diperlukan atas laporan profil risiko secara triwulan dan laporan tingkat kesehatan bank secara semesteran dari Divisi Manajemen Risiko	*Review and take necessary action on quarterly risk profile reports and bank-level health reports by the semester of the Risk Management Division*
4	Mengkaji dan mengambil tindakan yang diperlukan atas laporan pelampauan limit yang dibuat dan diserahkan oleh *risk taking* unit melalui Divisi Manajemen Risiko	*Review and take necessary action to the limit exceeding reports made and submitted by the risk taking unit through the Risk Management Division*
5	Merekomendasikan penetapan metode dan / parameter pengukuran risiko	*Recommends the establishment of risk measurement methods and / parameters*
6	Memberikan rekomendasi laporan kepada Direktur utama mengenai analisis eksposur risiko Bank & dampaknya	*Provide recommendation report to President Director on analysis of Bank risk exposure & its impact*
7	Menentukan parameter risiko, dan menetapkan *capital at risk*	*Determine the risk parameters, and set capital at risk*
8	Mengkaji penerapan manajemen risiko	*Review the implementation of risk management*
9	Memastikan bahwa strategi usaha jangka panjang disesuaikan dengan berbagai kebijakan risiko	*Ensure that long-term business strategies are align with various risk policies*
10	Mengkaji konsentrasi risiko bank secara keseluruhan dan melaporkan ke Direktur utama	*Assess the concentration of bank risk as a whole and report to the main Director*
11	Mengkaji kelayakan kredit dari *counterparties* bank secara keseluruhan	*Assess the loanworthiness of the bank counter parties as a whole*
12	Membahas penetapan limit dan alokasi modal serta pelanggaran/ pengawasan terhadap kepatuhan	*Discuss the determination of limits and allocations of capital and compliance / compliance violations*
13	Mengkaji berbagai kebijakan risiko, metodologi untuk pengukuran risiko	*Review various risk policies, methodologies for risk measurement*
14	Mengkaji hasil *stress testing* untuk risiko *likuiditas*, risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional	*Assess stress testing results for liquidity risk, market risk, loan risk and operational risk*
15	Mendokumentasikan keseluruhan keputusan komite	*Documenting the overall decision of the committee*

Pelaksanaan Kegiatan Komite Manajemen Risiko

Sepanjang periode laporan Komite Manajemen Risiko melakukan :

Implementation of the activities of the Risk Management Committee

Throughout the reporting period the Risk Management Committee shall:

No	Tanggal *Date*	Kegiatan Komite Manajemen Risiko	*Activities of the Risk Management Committee*
1	19 Januari 2017	Pembahasan Profil Risiko Periode Desember 2016	*Discussion of Risk Profile Period December 2016*
2	25 Januari 2017	Pembahasan Tingkat kesehatan Bank Periode Desember 2016	*Discussion on Bank Sound Ratings Period December 2016*
3	21-Apr-17	Pembahasan Profil Risiko PT. BPD Papua Periode Maret 2017	*Discussion of Risk Profile PT. BPD Papua Period March 2017*
4	25 Juli 2017	Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank PT. BPD Papua Periode Juni 2017	*Discussion of Bank Sound Rating PT. BPD Papua Period June 2017*
5	29 Desember 2017	Pembahasan Kebijakan manajemen risiko PT. BPD Papua dan Manajemen Permodalan Bank Tahun 2017	*Discussion The risk management policy of PT. BPD Papua and Bank Capital Management in 2017*

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran *Meeting Frequency and Attendance Level*

Nama Direksi *BOD Name*	Jabatan *Posisition*	Jumlah Rapat *Meeting*	Kehadiran / *Attendance*	
			Total	%
F. Zendrato	Direktur Utama / *President Director*	5 kali	3	60,00
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis / *Business Director*	5 kali	1	20,00
Rudhy Dharma	Direktur Keuangan / *Finance Director*	5 kali	3	60,00
Isak S. Wopari	Direktur Operasional / *Banking Operation Director*	5 kali	3	60,00
Jefri Sani P.S.	Direktur Kepatuhan / *Compliance Director*	5 kali	3	60,00

Komite Teknologi Sistem Informasi

Merupakan komite yang berfungsi untuk mengelola risiko operasional yang berhubungan dengan teknologi (risiko teknologi) melalui perumusan dan penetapan kebijakan/strategi pengembangan serta pengelolaan sistem teknologi informasi dalam rangka memenuhi kebutuhan unit-unit dan menyesuaikan dengan tuntutan kepuasan nasabah dan pasar.

Information Systems Technology Committee

It is a committee that functions to manage operational risks related to technology (technology risk) through the formulation and stipulation of policy / strategy development and management of information technology system in order to meet the needs of units and adjust to customer satisfaction and market demand.

Struktur dan Keanggotaan

Ketua : Direktur Operasional
Sekretaris : Kepala Divisi Teknologi Informasi
Anggota : 1. Direktur Kepatuhan
2. Direktur Keuangan
3. Divisi Akuntansi
4. Divisi Kredit
5. Divisi Perencanaan & Pengembangan
6. Divisi Treasury dan Internasional
7. Divisi Umum
8. Divisi Manajemen Risiko
9. Divisi Pengembangan Ekonomi Rakyat
10. Divisi Risiko Bisnis
11. Divisi Pemasaran
12. Divisi Pembinaan Cabang

Structure and Membership

Chairman : Banking Operation Director
Secretary : Head of Information Technology Division
Members : 1. Compliance Director
2. Finance Director
3. Accounting Division
4. Loan Division
5. Planning & Development Division
6. Treasury and International Division
7. General Affair Division
8. Risk Management Division
9. People's Economic Development Division
10. Business Risk Division
11. Marketing Division
12. Branch Development Division

Uraian Tugas dan Tanggungjawab

Tugas dan tanggungjawab Komite Teknologi Sistim Informasi adalah :

Job Description and Responsibility

The duties and responsibilities of the Information Systems Technology Committee are:

No	Tugas dan Tanggungjawab	Duties and responsibilities
1	Rencana strategis teknologi Informasi yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank	*Information technology strategic plan which is in line with the Bank's strategic business plan*
2	Perumusan kebijakan, standar dan prosedur teknologi informasi yang utama	*Formulation of key information technology policies, standards and procedures*
3	Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi	*The suitability of an Information Technology project approved with the Information Technology Strategic Plan*
4	Keseusaian antara pelaksanaan proyek teknologi informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project Charter*)	*Competence between the implementation of information technology projects with the agreed project plan (project Charter)*
5	Kesesuaian antara teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha bank	*The compatibility between information technology with the needs of management information systems as well as the needs of bank business activities*
6	Efektifitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi bank pada sektor teknologi informasi agar investasi bank pada sektor teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis	*The Effectiveness of measures to minimize risks of bank investment in the information technology sector so that bank investment in the information technology sector contributes to the achievement of business objectives*
7	Pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatan kinerja teknologi informasi, dan	*Monitoring on the performance of information technology and efforts to improve the performance of information technology, and*
8	Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki bank	*Adequacy and allocation of resources owned by banks*

Pelaksanaan Rapat Komite Teknologi Sistem Informasi

Implementation of Information Systems Technology Committee Meeting

Tanggal	Materi Rapat	*Meeting Content*
06 Februari 2017	- Laporan Progres Proyek penyelesaian *switching* bekerjasama dengan Artajasa yang dilaporkan oleh PT. Artajasa Pembayaran Elektronis. - Rencana migrasi *switching* Bank Papua tanggal 17 Februari 2017	- *Progress Report The switching completion project in collaboration with Artajasa reported by PT. Artajasa Pembayaran Elektronis.* - *Migration switching plan of Bank Papua dated February 17, 2017*
04 September 2017	- Live DRC di Jatiluhur - Pembiayaan Maintenance 100 ATM	- *Live DRC in Jatiluhur* - *Maintenance Financing of 100 ATM*
07 Juni 2017	- Implementasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Upgrade ATM Standard NSICCS - Kartu Visa (10.000) - Rencana Pengadaan Hardware dan Lisensi untuk DRC Jayapura - Pengadaan Konsultan Penyusunan *Blue Print* Teknologi Informasi	- *Implementation of Population Data and Civil Registration* - *Upgrade Standard NSICCS ATM* - *Visa card (10,000)* - *Hardware Procurement Plan and License for DRC Jayapura* - *Procurement Consultant of Blue Print Information Technology*

Komite Perkreditan

Merupakan komite yang membantu Direksi dalam menetapkan usulan kebijakan, sistem manajemen dan prosedur kredit, menetapkan besarnya *loan risk premium* per produk dan sektoral serta menetapkan batas tertinggi tarif bunga kredit, menetapkan portfolio/ exposure/sectoral limit untuk masing-masing industri dan menetapkan alat pengukuran dan pengendalian risiko kredit dan batasannya.

Credit Committee

It is a committee that assists the Board of Directors in establishing policy proposals, management systems and loan procedures, establishing loan risk premiums for each product and sector and establishing the highest loan interest rates, establishing a portfolio / exposure / sectoral limit for each industry and establishing measurement tools and control of loan risk and its limits.

Struktur dan Keanggotaan

Komposisi Komite Kredit Direksi :

1. Komite Kredit 2 (dua) Direksi : Direktur Bisnis dan Direktur Keuangan
2. Komite Kredit 3 (tiga) Direksi : Direktur Bisnis, Direktur Keuangan dan Direktur Operasional
3. Komite Kredit Direksi Lengkap : Direktur Utama, Direktur bisnis, Direktur Keuangan dan Direktur Operasional

Pejabat Pemutus	:	1. Direktur Utama 2. Direktur Bisnis 3. Direktur Keuangan 4. Direktur Operasional
Non *voting* member	:	Direktur Kepatuhan
Ketua	:	Divisi Komersial dan Korporasi
Sekretaris	:	Kepala Departemen Kredit Korporasi & Sindikasi
Anggota	:	1. Kepala Divisi Risiko Bisnis 2. Kepala Divisi PER 3. Kepala Divisi Kredit Khusus 4. Kepala Departemen Kredit komersial 5. Kepala Departemen Risiko Bisnis Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi 6. Analis Risiko Bisnis 7. Relationship Manager (RM)
Non *voting* member :		1. Kepala Divisi Kepatuhan 2. Kepala Divisi Manajemen Risiko 3. Kepala Divisi Hukum

Structure and Membership

Composition of Credit Committee of BOD:

1. *Credit Committee 2 (two) Directors: Business Director and Finance Director*
2. *Credit Committee 3 (three) Directors: Business Director, Finance Director and Operational Director*
3. *Credit Committee of the Board of Directors Complete: President Director, Business Director, Finance Director and Operational Director*

Official Breaker	:	*1. President Director* *2. Business Director* *3. Finance Director* *4. Banking Operation Director*
Non voting member	:	*Compliance Director*
Chairman	:	*Commercial and Corporate Division*
Secretary	:	*Head of Corporate Credit & Indication Department*
Members	:	*1. Head of Business Risk Division* *2. Head of PER Division* *3. Head of Special Credit Division* *4. Head of Commercial Loan Department* *5. Head of Risk Department Business Commercial Loans, Corporations and Syndications* *6. Business Risk Analyst* *7. Relationship Manager (RM)*
Non voting member :		*1. Head of Compliance Division* *2. Head of Risk Management Division* *3. Head of Legal Division*

Uraian Tugas dan Tanggungjawab

Tugas Komite Kredit adalah sebagai berikut :

Job Description and Responsibility

The task of the Credit Committee is as follows:

No	Tugas	*Task*
1	Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan atas pengusulan permohonan kredit, perpanjangan, restrukturisasi, pemberian keringanan, penghapusan kredit sesuai dengan wewenang/jenis kredit yang ditetapkan oleh komite kredit	*Provide recommendation of approval or rejection of the proposed loan application, extension, restructuring, granting of waivers, written off in accordance with the authority / type of loan set by the loan committee*
2	Memastikan bahwa kredit yang diberikan sesuai dengan kebijakan perkreditan Bank dan Pedoman pelaksanaan kredit dan asas-asas perkreditan yang sehat serta selalu mempertimbangkan kondisi/aspek *likuiditas* bank	*Ensure that the loans are provided in accordance with the Bank's loan policies and guidelines on the implementation of loan and sound loan principles and always consider the condition / aspect of bank liquidity*

Tanggungjawab Komite Kredit adalah sebagai berikut :

The responsibilities of the Credit Committee are as follows:

No	Tanggungjawab	*Responsible*
1	Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian rekomendasi persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat, konsekuen dan konsisten	*Carry out the task, especially in relation to the provision of loan approval recommendations based on professional proficiency honestly, objectively, thoroughly, consistently and consistently*
2	berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas	*concerned with loan applicants to give loan approval that is only a formality*

Pelaksanaan Rapat Komite Perkreditan

Implementation of Credit Committee Meetings

Tanggal *Date*	Materi Rapat	*Meeting Material*
05 Jan 2017	Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Pemda	*Extension of Local Government Loan Period*
05 Jan 2017	Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Pemda	*Extension of Local Government Loan Period*
06 Jan 2017	Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Pemda	*Extension of Local Government Loan Period*
25 Jan 2017	Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Pemda	*Extension of Local Government Loan Period*
26 Jan 2017	Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Pemda Teluk Bintuni	*Renewal of Loan Period of Bintuni Bay Local Government*
10 Feb 2017	Suku Bunga Khusus & Keringanan Biaya Provisi	*Special Interest Rates & Provision Fee Fees*
24 Feb 2017	Perpanjagan Jangka Waktu Permasalahan Kredit	*Extension of Loan Period*
06 Mart 2017	Suku Bunga Khusus	*Special Interest Rate*
21 Mart 2017	Peninjauan Jangka waktu kredit	*Review Loan period*
21 Mart 2017	Perpanjangan jangka waktu kredit	*Extension of loan term*
27 Mart 2017	Kredit Pemda Peninjauan add jangka waktu	*Local Government Loan Review add time period*
31 Mart 2017	Kredit Pemda Perpanjangan jangka waktu	*Local Government Loan Renewal period*
04 Mei 2017	KMK RC Perpanjangan Jangka waktu	*KMK RC Renewal Duration*
10 Mei 2017	KMK RC Perpanjangan Jangka waktu	*KMK RC Renewal Duration*
16 Mei 2017	KMK RC add Jangka waktu + *Special rate*	*KMK RC add Duration + Special rate*
16 Mei 2017	Perpanjangan jangka waktu KMK R/C	*Extension of KMK R / C*
02 Juni 2017	KMK RC add Jangka Waktu	*KMK RC add Timeframe*
13 Juni 2017	Sindikasi	*Syndication*
19 Juni 2017	KMK Schedule	*KMK Schedule*
20 Juni 2017	KMK RC	*KMK RC*
03 Juli 2017	Add KMK RC	*Add KMK RC*
04 Juli 2017	Kontruksi	*Construction*
12 Juli 2017	Add KMK RC	*Add KMK RC*
14 Juli 2017	Add Jangka waktu KMK RC	*Add Duration KMK RC*
17 Juli 2017	Add Jangka waktu KMK RC	*Add Duration KMK RC*
19 Juli 2017	KMK RC (Reviuew)	*KMK RC (Reviuew)*
19 Juli 2017	KMK RC	*KMK RC*
25 Juli 2017	KMK Kontrakting	*KMK Kontrakting*

Komite ALCO

Merupakan komite yang membantu Direksi dalam memberikan petunjuk pengelolaan aktiva dan kewajiban Perseroan dengan memperhitungkan risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko posisi dan risiko *likuiditas*, serta mematuhi ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, melakukan fungsi *Asset and Liabilities Management* (ALMA) yang dapat meliputi *liquidity management, gap management, forex management, earning and investment management* dengan mengevaluasi perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi dan dampaknya kepada posisi Bank Papua; menghitung *cost of funds*, menetapkan *base lending rate* dan bunga giro, tabungan dan deposito; dan menetapkan *internal funds transfer price*.

Struktur dan Keanggotaan

Susunan Pengurus ALCO adalah sebagai berikut :

Ketua I : Direktur Utama
Ketua II : Direktur Bisnis
Ketua III : Direktur Keuangan
Sekretaris : Kepala Divisi Treasury & Internasional
Anggota :1. Direktur Operasional
2. Direktur Kepatuhan
3. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan
4. Kepala Divisi Komersial dan Korporasi
5. Kepala Divisi Kredit Khusus
6. Kepala Divisi Risiko Bisnis
7. Kepala Divisi Teknologi Informasi
8. Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Rakyat
9. Kepala Divisi Manajemen Risiko
10. Kepala Divisi Pemasaran
11. Kepala Divisi Pembinaan Cabang
12. Kepala Divisi Akuntansi
13. Kepala Divisi Kepatuhan
14. Kepala Cabang Utama Jayapura

ALCO Committee

It is a committee that assists the Board of Directors in providing guidance on the management of the Company's assets and liabilities by taking into account interest rate risk, exchange rate risk, position risk and liquidity risk, and complying with the provisions of Bank Indonesia and the Financial Services Authority, performing the Asset and Liabilities Management (ALMA) including liquidity management, gap management, forex management, earning and investment management by evaluating the development and prospects of economic indicators and their impact on the position of Bank Papua; calculate cost of funds, establish base lending rate and current account, savings and time deposit; and establish internal funds transfer price.

Structure and Membership

The organizational structure of ALCO is as follows:

Chairman I: President Director
Chairman II: Business Director
Chairman III: Finance Director
Secretary: Head of Treasury & International Division
Member: 1. Banking Operation Director
2. Compliance Director
3. Head of Planning and Development Division
4. Head of Commercial and Corporate Division
5. Head of Special Loan Division
6. Head of Business Risk Division
7. Head of Information Technology Division
8. Head of People's Economic Development Division
9. Head of Risk Management Division
10. Head of Marketing Division
11. Branch Manager Development Division
12. Head of Accounting Division
13. Head of the Compliance Division
14. Head of Main Branch of Jayapura

Uraian Tugas dan Tanggungjawab

Tugas Komite ALCO adalah sebagai berikut :

Job Description and Responsibility

The duties of the ALCO Committee are as follows:

No	Tugas	Task
1	Menetapkan tujuan global Bank, menetapkan strategi dan kebijakan pengendalian kekayaan dan kewajiban keuangan Bank (ALMA)	*Setting the Bank's global objectives, establishing the Bank's financial assets and liability strategy (ALMA)*
2	Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan bank telah disusun secara berkesinambungan dalam ALMA sesuai dengan tujuan Bank dan Perkembangan perbankan	*Review and review whether bank guidelines and policies have been developed on an ongoing basis in ALMA in accordance with Bank goals and Banking developments*
3	Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko dan eksposur Asset/Liability Management	*Review the balance sheet structure and review the risks and exposure of Asset / Liability Management*
4	Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi,suku bunga dan nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan	*Looking at forecasts and projections of economic circumstances, interest rates and exchange rates to guide the policy set*
5	Menetapkan batas dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada :	*Establish limits and risk management and control guidelines that impact on:*
	a) Risiko *Likuiditas* (*Liquidity Management*)	*Liquidity Risk (Liquidity Management)*
	b) Risiko Suku Bunga (*Gap Management*)	*Interest Rate Risk (Gap Management)*
	c) Risiko Portofolio (*Earning & Investment Management*)	*Portfolio Risk (Earning & Investment Management)*
6	Mereview dan menetapkan suku bunga kredit dan suku bunga dana	*Review and set interest rates on loans and interest rates*
7	Menetapkan batas (limit) Primary Reserves (GWM, Nostro, dan Kas)	*Establish the limit of Primary Reserves (GWM, Nostro, and Cash)*
8	Menetapkan batas (limit) Secondary reserve serta instrumentnya	*Setting the limit of Secondary reserve and its instrument*
9	Menetapkan batas (limit) Gap serta instrumentnya	*Setting Gap limits and instruments*
10	Menetapkan batas (limit) Kredit serta penyebarannya	*Establish loan limits and their distribution*
11	Menetapkan batas KPMM (CAR) untuk risiko pasar (Risiko suku bunga dan risiko nilai tukar)	*Establish a CAR limit for market risk (Interest rate risk and exchange rate risk)*
12	Menetapkan harga transfer dana internal *(Internal fund transfer rate*) atau harga rekening antar kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang bank	*Determine the price of internal funds transfer (Internal fund transfer rate) or inter-office account price in spurring the efficiency of bank branch management*
13	Meninjau kembali *performance* dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan bank guna mengkaji dampak keputusan ALCO terhadap tujuan Bank dan terhadap kepatuhan peraturan internal bank maupun terhadap kepatuhan regulasi	*Review the performance and position of bank's financial wealth and liabilities to assess the impact of ALCO's decisions on the Bank's objectives and on compliance with bank internal regulations and regulatory compliance*
14	Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALCO dan tujuan bank	*Adopt strategy adjustments, limitations and implementation guidelines and policies in order to achieve the ALCO objectives and bank goals*

Tanggungjawab Komite ALCO adalah sebagai berikut :

The responsibilities of the ALCO Committee are as follows:

No	Tanggungjawab	*Responsible*
1	Menetapkan tujuan ALMA, membuat keputusan ALMA, memantau kegiatan dan menelaah hasil pelaksanaan kebijakan ALMA	*set ALMA objectives, make ALMA decisions, monitor activities and review the implementation of ALMA policies*

Pelaksanaan Kegiatan Komite ALCO / *Implementation of the activities of the ALCO Committee*

Tanggal Rapat	Berlaku	Materi Rapat	*Meeting Content*
28 Des 2016	3-Jan-17	- Portofolio Asset dan Liability - Evaluasi suku bunga, dana pihak ketiga (Giro, tabungan, deposito) dan kredit - Penetapan *funds transfer price* (bunga RAK), giro wajib minimum (GWM) dan CKPN pinjaman bulan Desember 2016 - Strategi triwulan IV 2016 dan triwulan I 2017	- *Asset and Liability Portfolio* - *Evaluate interest rates, third party funds Current Account, savings deposits, deposits) and credits* - *Determination of the funds transfer price (RAK interest), statutory reserve requirement (GWM) and CKPN loan in December 2016* - *Strategy of the fourth quarter of 2016 and the first quarter 2017*
27-Jan-17	1-Feb-17	- Portofolio Asset dan Liability - Evaluasi suku bunga, dana pihak ketiga (Giro, tabungan, deposito) dan kredit - Penetapan *funds transfer price* (bunga RAK), giro wajib minimum (GWM) dan CKPN pinjaman bulan januari 2017 - Strategi pendanaan dan pelayanan kredit triwulan I tahun 2017	- *Asset and Liability Portfolio* - *Evaluate interest rates, third party funds (Current Accounts, savings deposits, deposits) and credits* - *Determination of the funds transfer price (RAK interest), minimum reserve requirement (GWM) and CKPN loan of January 2017* - *Financing strategies and credit services for the first quarter of 2017*
27-Feb-17	01 Mart 2017	- Portofolio Asset dan Liability - Evaluasi suku bunga, dana pihak ketiga (Giro, tabungan, deposito) dan kredit - Penetapan *funds transfer price* (bunga RAK), giro wajib minimum (GWM) dan CKPN pinjaman bulan Februari 2017 - Strategi pendanaan dan pelayanan kredit triwulan I tahun 2017	- *Asset and Liability Portfolio* - *Evaluate interest rates, third party funds (Current Accounts, savings deposits, deposits) and credits* - *Determination of the funds transfer price (RAK interest), minimum reserve requirement (GWM) and CKPN loan in February 2017* - *Financing strategies and credit services for the first quarter of 2017*
30 Maret 2017	1-Apr-17	- Portofolio Asset dan Liability - Evaluasi suku bunga, dana pihak ketiga (Giro, tabungan, deposito) dan kredit - Penetapan *funds transfer price* (bunga RAK), giro wajib minimum (GWM) dan CKPN pinjaman bulan Maret 2017 - Strategi pendanaan dan pelayanan kredit triwulan I tahun 2017	- *Asset and Liability Portfolio* - *Evaluate interest rates, third party funds (Current Accounts, savings deposits, deposits) and credits* - *Determination of the funds transfer price (RAK interest), minimum reserve requirement (GWM) and CKPN loan in March 2017* - *Financing strategies and credit services for the first quarter of 2017*
25-Apr-17	01 Mei 2017	- Portofolio Asset dan Liability - Evaluasi suku bunga, dana pihak ketiga (Giro, tabungan, deposito) dan kredit - Penetapan *funds transfer price* (bunga RAK), giro wajib minimum (GWM) dan CKPN pinjaman bulan April 2017 - Strategi pendanaan dan pelayanan kredit triwulan II tahun 2017	- *Asset and Liability Portfolio* - *Evaluate interest rates, third party funds (Current Accounts, savings deposits, deposits) and credits* - *Determination of the funds transfer price (RAK interest), minimum statutory reserves (GWM) and CKPN loans in April 2017* - *Financing strategies and credit services for the second quarter of 2017*
26 Mei 2017	01 Juni 2017	- Portofolio Asset dan Liability - Evaluasi suku bunga, dana pihak ketiga (Giro, tabungan, deposito) dan kredit - Penetapan *funds transfer price* (bunga RAK), giro wajib minimum (GWM) dan CKPN pinjaman bulan Mei 2017 - Strategi pendanaan dan pelayanan kredit triwulan II tahun 2017	- *Asset and Liability Portfolio* - *Evaluate interest rates, third party funds (Current Accounts, savings deposits, deposits) and credits* - *Determination of the funds transfer price (RAK interest), minimum reserve requirement (GWM) and CKPN loan in May 2017* - *Financing strategies and credit services for the second quarter of 2017*

Tanggal Rapat	Berlaku	Materi Rapat	*Meeting Content*
22 Juni 2017	01 Juli 2017	- Portofolio Asset dan Liability	- *Asset and Liability Portfolio*
		- Evaluasi suku bunga, dana pihak ketiga (Giro, tabungan, deposito) dan kredit	- *Evaluate interest rates, third party funds (Current Accounts, savings deposits, deposits) and credits*
		- Penetapan *funds transfer price* (bunga RAK), giro wajib minimum (GWM) dan CKPN pinjaman bulan Juni 2017	- *Determination of the funds transfer price (RAK interest), minimum reserve requirement (GWM) and CKPN loan in June 2017*
		- Strategi pendanaan dan pelayanan kredit triwulan II tahun 2017	- *Financing strategies and credit services for the second quarter of 2017*
28 Juli 2017	02 Agust 2017	- Portofolio Asset dan Liability	- *Asset and Liability Portfolio*
		- Evaluasi suku bunga, dana pihak ketiga (Giro, tabungan, deposito) dan kredit	- *Evaluate interest rates, third party funds (Current Accounts, savings deposits, deposits) and credits*
		- Penetapan *funds transfer price* (bunga RAK), giro wajib minimum (GWM) dan CKPN pinjaman bulan Juli 2017	- *Determination of the funds transfer price (RAK interest), the mandatory minimum reserve requirement (GWM) and CKPN loan in July 2017*
		- Strategi pendanaan dan pelayanan kredit triwulan III tahun 2017	- *Strategy of funding and credit services for the third quarter of 2017*
30 Agust 2017	1-Sep-17	- Portofolio Asset dan Liability	- *Asset and Liability Portfolio*
		- Evaluasi suku bunga, dana pihak ketiga (Giro, tabungan, deposito) dan kredit	- *Evaluate interest rates, third party funds (Current Accounts, savings deposits, deposits) and credits*
		- Penetapan *funds transfer price* (bunga RAK), giro wajib minimum (GWM) dan CKPN pinjaman bulan Agustus 2017	- *Determination of the funds transfer price (RAK interest), minimum reserve requirement (GWM) and CKPN loan in August 2017*
		- Strategi pendanaan dan pelayanan kredit triwulan III tahun 2017	- *Strategy of funding and credit services for the third quarter of 2017*
28-Sep-17	01 Okt 2017	- Portofolio Asset dan Liability	- *Asset and Liability Portfolio*
		- Evaluasi suku bunga, dana pihak ketiga (Giro, tabungan, deposito) dan kredit	- *Evaluate interest rates, third party funds (Current Accounts, savings deposits, deposits) and credits*
		- Penetapan *funds transfer price* (bunga RAK), giro wajib minimum (GWM) dan CKPN pinjaman bulan September 2017	- *Determination of the funds transfer price (RAK interest), minimum reserve requirement (GWM) and CKPN loans in September 2017*
		- Strategi pendanaan dan pelayanan kredit triwulan III tahun 2017	- *Strategy of funding and credit services for the third quarter of 2017*
27 Okt 2017	1-Nov-17	- Portofolio Asset dan Liability	- *Asset and Liability Portfolio*
		- Evaluasi suku bunga, dana pihak ketiga (Giro, tabungan, deposito) dan kredit	- *Evaluate interest rates, third party funds (Current Accounts, savings deposits, deposits) and credits*
		- Penetapan *funds transfer price* (bunga RAK), giro wajib minimum (GWM) dan CKPN pinjaman bulan Oktober 2017	- *Determination of the funds transfer price (RAK interest), minimum reserve requirement (GWM) and CKPN loan in October 2017*
		- Strategi pendanaan dan pelayanan kredit triwulan IV tahun 2017	- *Strategy of funding and credit services for the fourth quarter of 2017*
24-Nov-17	04 Des 2017	- Portofolio Asset dan Liability	- *Asset and Liability Portfolio*
		- Evaluasi suku bunga, dana pihak ketiga (Giro, tabungan, deposito) dan kredit	- *Evaluate interest rates, third party funds (Current Accounts, savings deposits, deposits) and credits*
		- Penetapan *funds transfer price* (bunga RAK), giro wajib minimum (GWM) dan CKPN pinjaman bulan November 2017	- *Determination of the funds transfer price (RAK interest), minimum reserve requirement (GWM) and CKPN loan in November 2017*
		- Strategi pendanaan dan pelayanan kredit triwulan IV tahun 2017	- *Strategy of funding and credit services for the fourth quarter of 2017*

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Nama Direksi *BOD Name*	Jabatan *Posisition*	Jumlah Rapat *Meeting*	Kehadiran / *Attendance*	
			Total	%
F. Zendrato	Direktur Utama / *President Director*	12 kali	8	66,67
Sadar Sebayang	Direktur Bisnis / *Business Director*	12 kali	8	66,67
Rudhy Dharma	Direktur Keuangan / *Finance Director*	12 kali	8	66,67
Isak S. Wopari	Direktur Operasional / *Banking Operation Director*	12 kali	7	58,33
Jefri Sani P.S.	Direktur Kepatuhan / *Compliance Director*	12 kali	6	50,00

Komite Pertimbangan Pegawai

Merupakan komite yang membantu Direksi dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Direksi mengenai tindaklanjut penetapan sanksi kepada pegawai yang terbukti lalai atau melanggar ketentuan yang berlaku, usulan nominasi pegawai yang akan dipromosi maupun mutasi berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan, pertimbangan kepada Direksi mengenai keberatan dan/atau peninjauan kembali yang diajukan oleh pegawai atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya dan pertimbangan kepada Direksi mengenai rehabilitasi sanksi bagi pegawai.

Struktur dan Keanggotaan

Ketua : Direktur Operasional
Wakil Ketua : Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
Sekretaris : 1. Kepala Departemen Administrasi SDM
2. Kepala Departemen Perencanaan dan Pengembangan SDM
Anggota : 1. Kepala Satuan Kerja Audit Intern
2. Kepala Divisi Hukum
3. Kepala Divisi Kepatuhan
4. Ketua Satuan Kerja Anti Fraud

Uraian Tugas dan Tanggungjawab

Tugas Komite Pertimbangan Pegawai adalah sebagai berikut :

Employee Advisory Committee

It is a committee that assists the Board of Directors in providing advice and consideration to the Board of Directors regarding the follow-up of sanctions to employees who are proven negligent or in violation of applicable provisions, proposals of nominees to be promoted or mutations based on requirements and competence of office, consideration to the Board of Directors regarding objection and / or review returns filed by the employee for the sanctions imposed on him and consideration to the Board of Directors regarding the rehabilitation of sanctions for employees.

Structure and Membership

Chairman : Banking Operation Director
Vice Chair : Head of Human Resources Division
Secretary : 1. Head of HR Administration Department
2. Head of Human Resources Planning and Development Department
Members : 1. Head of Internal Audit Working Unit
2. Head of Legal Division
3. Head of Compliance Division
4. Head of Anti Fraud Working Unit

Job Description and Responsibility

The tasks of the Employee Advisory Committee are as follows:

No	Tugas dan Tanggungjawab	*Duties and Responsibilities*
1	Melaksanakan penelitian terhadap hasil temuan auditor baik intern maupun ekstern yang memerlukan tindak lanjut dalam penetapan sanksi	*Conducting research on the findings of both internal and external auditors that require follow-up in the determination of sanctions*
2	Memberikan saran dan pertimbangan kepada Direksi mengenai tindaklanjut penetapan sanksi kepada pegawai yang terbukti lalai atau melanggar ketentuan yang berlaku	*Providing advice and consideration to the Board of Directors regarding the follow-up of sanctions imposed on employees who are proven negligent or in violation of provisions*
3	Menyampaikan pertimbangan kepada Direksi berupa usulan nominasi pegawai yang akan dipromosi maupun mutasi berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan	*Delivering consideration to the Board of Directors in the form of proposed nominees of employees to be promoted and mutations based on the requirements and competence of office*
4	Memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Direksi mengenai keberatan dan/atau peninjauan kembali yang diajukan oleh pegawai atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya	*Inspect and give consideration to the Board of Directors regarding the objection and / or review submitted by the employee for the sanction imposed against him*
5	Memberikan pertimbangan kepada Direksi mengenai rehabilitasi sanksi bagi pegawai	*Providing consideration to the Board of Directors regarding the rehabilitation of sanctions for employees*

Pelaksanaan Rapat *Implementation of the Meeting*

Tanggal Rapat	Materi Rapat	*Meeting Content*
23 Maret 2017	KPP tentang Alih tugas pegawai	*KPP on the assignment of employees*
02 April 2017	KPP tentang Alih tugas pegawai	*KPP on the assignment of employees*
29 Mei 2017	KPP tentang Alih tugas pegawai	*KPP on the assignment of employees*
06 Juni 2017	KPP tentang Alih tugas pegawai	*KPP on the assignment of employees*
26 Juli 2017	KPP tentang Alih tugas pegawai	*KPP on the assignment of employees*
20 November 2017	KPP tentang Alih tugas pegawai	*KPP on the assignment of employees*
29 November 2017	KPP tentang Alih tugas pegawai	*KPP on the assignment of employees*
15 Desember 2017	KPP tentang Alih tugas pegawai	*KPP on the assignment of employees*

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Kelancaran komunikasi antara bank dengan *stakeholders* merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan penerapan tata kelola Bank yang baik. Fungsi komunikasi adalah merupakan salah satu fungsi penting dari Sekretaris Perusahaan. Fungsi utama Sekretaris Perusahaan adalah memberikan pelayanan kepada *stakeholders* atas setiap informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan kondisi bank dan memberikan akses terhadap informasi berkaitan dengan bank yang relevan. Disamping itu, keberadaan Sekretaris Perusahaan juga untuk mengingatkan Direksi tentang tanggungjawabnya untuk melaksanakan penerapan tata kelola Bank yang baik.

The smooth communication between banks and stakeholders is a very important factor in the implementation of Bank's GCG implementation. The communication function is one of the important functions of the Corporate Secretary. The main function of the Corporate Secretary is to provide services to stakeholders for any information required in relation to the condition of the bank and to provide access to relevant bank related information. In addition, the existence of the Corporate Secretary is also to remind the Board of Directors of its responsibilities to implement the implementation of Bank's GCG.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Divisi Sekretaris Perusahaan berada di bawah Direktur Utama dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan akuntabilitas dan tanggungjawab Direksi yang terkait dengan Kesekretariatan, Kehumasan dan Protokoler di Bank Papua atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perbankan dan kegiatan sosial Perusahaan dan laporan pelaksanaan tugasnya disampaikan pula kepada Dewan Komisaris.

Organizational Structure of Corporate Secretary

The Corporate Secretary Division is under the President Director and is responsible for implementing the accountability and responsibilities of the Board of Directors related to the Secretariat, Public Relations and Protocol at Bank Papua on the provisions of the prevailing laws and regulations, particularly banking regulations and social activities of the Company, and reports on the execution of their duties submitted to the Board of Commissioners.

Berdasarkan SK Direksi No. 11.1/DIR-BPD/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Struktur Organisasi Bank Papua, dijabarkan pula struktur organisasi di unit kerja Divisi Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut :

Based on BOD Decree No. . 68 / DIR-BPD / IX / 2015 on the Organizational Structure of Bank Papua, also described the organizational structure in the work unit of the Corporate Secretary Division, as follows:

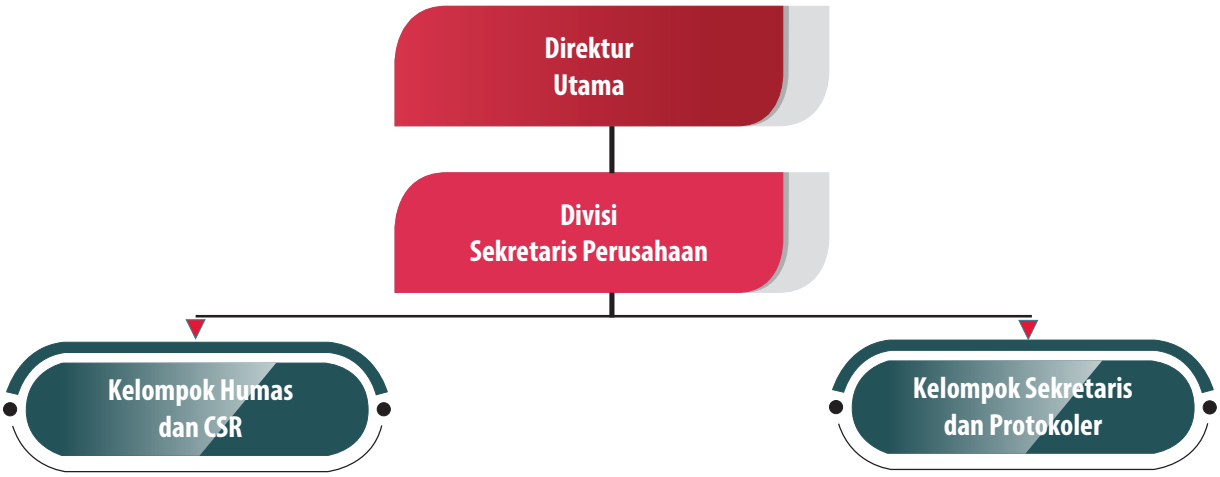

Fungsi :

- Public Relation
- Pengaduan Nasabah dan Website
- CSR
- Governent Relation

Fungsi :

- Sekretaris
- Protokoler
- Agendaris

Kepala Divisi sekretaris Perusahaan membawahi dua kelompok yaitu Kelompok Humas & CSR dan Kelompok Sekretaris dan Protokoler. Kelompok Humas dan CSR membawahi fungsi Public Relation, Pengaduan Nasabah dan Website, Central Telepon, CSR dan Goverment Relation sedangkan Kelompok Sekretaris dan Protokoler membawahi fungsi Sekretaris, Protokoler, agendaris dan fungsi Pendukung dan Pelaporan.

Head of Division of the secretary of the company oversees two groups namely Public Relations & CSR and Secretary and Protocol Group. Public Relations and CSR groups oversee the functions of Public Relation, Customer Complaint and Website, Central Phone, CSR and Goverment Relation while Secretary and Protocol Group oversees the functions of Secretary, Protocol, agendary and Supporting and Reporting functions.

Profil Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Profile

Dra. Ellen B.F. Marande
Kepala Divisi
Head of Division

52 tahun. Lahir di Limboto pada tanggal 09 Februari 1965. Bekerja di Bank Papua sejak tahun 1992. Menjabat sebagai Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan sejak tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan SK Direksi Nomor 32.1/KEPEG/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Ahli Tugas Pegawai. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Administrasi Negara di Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 1989.

Mengikuti dan memiliki Sertifikat Manajemen Risiko antara lain:
- Manajemen Risiko Tingkat IV Penyelenggara BSMR pada tanggal 28 September 2015.
- Sertifikasi Pimpinan Cabang Angkatan 169 LPPI pada Tanggal 17 Februari 2012.

52 years. Born in Limboto on February 09, 1965. She has been working at Bank Papua since 1992. Occupied as Head of Corporate Secretary Division from 27 February 2017 based on Decree of the Board of Directors Number 32.1 / KEPEG / I / 2017 dated January 20, 2017 regarding Employee Duties Experts. Graduated with a Bachelor degree in State Administration at Sam Ratulangi University in Manado in 1989.

Following and having Risk Management Certificates include:
- *Risk Management Level IV organized by BSMR on 28 September 2015.*
- *Branch Manager Certification Batch 169 organized by LPPI on 17 February 2012.*

Riwayat Jabatan Singkat Sekretaris Perusahaan

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya, Bank Papua sebagai perusahaan milik pemerintah daerah telah membentuk Divisi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang berperan sebagai penghubung Bank dengan para investor, Pemerintah Daerah, regulator dan masyarakat. Sekretaris Perusahaan Bank Papua saat ini dijabat oleh Dra. Ellen B.F. Marande dengan riwayat jabatan singkat sebagai berikut :

Brief History of Corporate Secretary

To improve services to the community and other stakeholders, Bank Papua as a local government-owned company has established a Corporate Secretary Division that acts as a Bank liaison with investors, Local Government, regulators and the public.Corporate Secretary of Bank Papua is currently held by Dra. Ellen B.F. Marande with brief position history as follows:

RIWAYAT JABATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN *CORPORATE SECRETARY BRIEF POSITION*			
No	**Nama Jabatan**	**Tahun**	***Position Name***
1	Staf *Customer* Service	1991	*Customer Service Staff*
2	Staf Pelaksana	1992	*Implementing Staff*
3	Staf Jasa dan Penghasilan	1994	*Staff Services and Income*
4	Kepala Seksi Gaji dan penghasilan	1996	*Head of Salary and income Section*
5	Kepala Seksi Perencanaan dan Pembinaan	1998	*Head of Planning and Development Section*
6	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan	1999	*Head of Education and Training Section*
7	Ass Training Officer	2000	*Ass. Training Officer*
8	Ass Secretary	2000	*Ass. Secretary*
9	Ass Account Officer	2000	*Ass. Account Officer*
10	Ass Research & Development Officer	2003	*Ass Research & Development Officer*
11	Staf Pengembangan Jaringan	2005	*Network Development Officer*
12	Kepala Unit Pemasaran Produk dan Kredit	2008	*Head of Product and Credit Marketing Unit*
13	Kadep Sekretaris Perusahaan dan Protokol	2009	*Kadep Corporate Secretary and Protocol*
14	Kepala Cabang Pembantu Adepura	2010	*Branch Manager Adepura*
15	Kepala Departemen Pengelolaan Proyek	2012	*Head of Project Management Department*
16	Kepala Departemen Pengembangan	2014	*Head of Development Department*
17	Senior Spesialis Humas dan CSR	2015	*Senior PR Specialist and CSR*
18	Kepala Cabang Teminabuan	2015	*Teminabuan Branch Manager*
19	Kadep Pembinaan & Supervisi Kredit	2016	*Head of Coaching & Credit Supervision Department*
20	Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan	2017	*Head of Corporate Secretary Division*

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Selaku Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Dra. Ellen B.F. Marande telah mengikuti sejumlah pelatihan dan seminar antara lain sebagai berikut :

Corporate Secretary Improvement Program

As Head of Corporate Secretary Division, Dra. Ellen B.F. Marande has attended a number of training and seminars, among others, as follows:

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI *COMPETENCE IMPROVEMENT PROGRAMS*			
No	**Nama Pendidikan** *Training Type*	**Penyelenggara** *Organizer*	**Tahun** *Year*
1	Transformasi Bank Papua	Talent Indonesia	2017
2	*The Power of Credibility and Trust*	PT. Media PR Indonesia	2017
3	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Bacth I	PT. Multi Talenta *Consulting*	2017
4	IHT-PAPI 2008 & PSAK 55	PT. InfoBank	2016
5	Assesment Potensi & Kompetensi Pegawai Calon Pemimpin Divisi	PT. Aplikasi Sistem Bisinis	2014
6	Aplikasi Penyusunan Studi Kelayakan	Pusat Training Perbankan	2014
7	Penyusunan Kamus Kompetensi	PT. Aplikasi Sistem Bisinis1	2014
8	IHT-Manajemen Proyek	Divisi Pengambangan	2013
9	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko	Talent Indonesia	2013
10	Jasa Konsultansi Penyusunan KPI	PT. Jhonson Indoenesia	2013
11	Ujian Sertifikasi Barang dan Jasa	Lembaga Pengembangan & Konsultansi	2013
12	Project Manajemen Dengan Microsoft Project	Expertindo	2012
13	Assesment Profiling	PT. Magnify Solution	2012
14	*Leadership Skill* Pemimpin Cabang	LPPI JKT	2012
15	*Fraud Auditing*	YPIA	2011

Tugas dan Tanggungjawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggungjawab Sekretaris Perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Pemegang Saham/Government Relation
   a. Mengupdate Daftar Pemegang Saham dan kepemilikan sahamnya di Bank Papua;
   b. Melaksanakan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
   c. Mengarahkan seluruh aspek penyelenggaraan acara RUPS agar acara RUPS dapat berjalan dengan baik;
   d. Menetapkan agenda dan materi terkait penyelengaraan RUPS untuk memastikan kesesuaian materi dengan peraturan yang berlaku.
2. Membangun Citra dan Reputasi Perusahaan
   a. Menetapkan strategi implementasi program *corporate communication* untuk publik umum dan media massa agar reputasi Perusahaan dapat terjaga dengan baik di mata Pemangku Kepentingan;
   b. Melaksanakan strategi implementasi program *corporate communication* Bank Papua.
3. Membangun Komunikasi Eksternal
   a. Sebagai mediator atau perwakilan antara Bank dengan lembaga atau institusi eksternal;
   b. Menetapkan strategi dan implementasi publikasi untuk publik, investor dan masyarakat agar reputasi perusahaan dapat terjaga dengan baik;
   c. Menetapkan strategi dan implementasi iklan di media massa agar reputasi perusahaan dapat terjaga dengan baik;
   d. Mengelola isi situs website Bank Papua untuk memastikan ketersediaan data secara lengkap serta kemudahan akses bagi publik, investor dan masyarakat.
4. Membangun Komunikasi Internal
   a. Sebagai mediator antara manajemen kepada pegawai, dan Direksi kepada komisaris;
   b. Mengelola media komunikasi internal (majalah dan intranet/portal) untuk berkontribusi dalam penciptaan iklim kerja yang baik;
   c. Mengarahkan event internal perusahaan untuk terlaksananya event dengan baik;
   d. Mengarahkan dokumentasi perusahaan untuk memastikan ketersediaan database dokumentasi perusahaan.
5. Pengelolaan Program CSR (*Corporate Sosial Responsibility*).

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary are as follows:

1. *Shareholder Relation / Government Relations:*
   a. *Updating Shareholder List and its shareholding in Bank Papua;*
   b. *To conduct the Shareholders General Meeting;*
   c. *To direct all aspects of the SGM event in order for SGM to run properly;*
   d. *Establishes agendas and contents related to the conduct of the SGM to ensure material compliance with applicable regulations.*
2. *Building Corporate Image and Reputation*
   a. *Establishing corporate communication program implementation strategy for the public and mass media so that the Company's reputation can be well maintained in the eyes of Stakeholders;*
   b. *Implement the implementation strategy of the Bank's communication communication program.*
3. *Building External Communications*
   a. *As mediator or representative between Bank and external institution or institution;*
   b. *Establish publication strategies and implementation of publications, investors and the public so that the company's reputation can be well maintained;*
   c. *Establish an advertising strategy and implementation in the mass media so that company reputation can be well maintained;*
   d. *Manage the contents of the Bank Papua website website to ensure complete data availability as well as easy access for the public, investors and the public.*
4. *Building Internal Communication*
   a. *As a mediator between management to employees, and directors to commissioners;*
   b. *Managing internal communication media (magazines and intranets / portals) to contribute to the creation of a good working climate;*
   c. *Directing the company's internal events for proper event implementation;*
   d. *Direct the company's documentation to ensure the availability of the company's documentation database.*
5. *Management of Corporate Social Responsibility (CSR) Program.*

6. Administrasi Kesekretariatan Perusahaan
   a. Penanggungjawab atas kegiatan pengelolaan kesekretariatan di Dewan Komisaris;
   b. Penanggungjawab atas kegiatan pengelolaan kesekretariatan di Direksi ;
   c. Mengarahkan administrasi kesekretariatan perusahaan untuk memastikan ketersediaan dokumen secara lengkap termasuk penyampaian materi rapat Direksi maupun Dewan Komisaris;
7. Protokoler
   Penanggungjawab atas kegiatan Protokoler berkaitan dengan jadwal kegiatan Direksi , mengkoordinir acara-acara yang berhubungan dengan Direksi dan pihak intern/ekstern/ *stakeholder*.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut.

1. Melakukan Konferensi Pers, Konferensi pers adalah acara khusus yang dibuat sebagai sarana untuk mengumumkan, menjelaskan, mempertahankan atau mempromosikan kebijaksanaan dengan maksud untuk mengukuhkan pengertian dan penerimaan publik pada pihak pemrakarsa acara;
2. Melakukan Publick Expose / Paparan Publik, yaitu suatu pemaparan umum kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja perusahaan tercatat. Tujuannya, agar informasi mengenai kinerja perusahaan tersebut tersebar secara merata. Setiap perusahaan tercatat wajib melakukan public expose tahunan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun yang dapat dilaksanakan pada hari yang sama dengan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS);
3. Melakukan Siaran pers, yaitu penyampaian tulisan ataupun rekaman yang ditujukan langsung pada media massa dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar dipublikasikan di media massa;
4. Melakukan Liputan Media (Berita Foto & Berita Tulis);
5. Melakukan Kunjungan Ke Media;
6. Menyelenggarakan HUT Bank Papua ke - 51 Tahun;
7. Menyelenggarakan HUT RI ke 72;
8. Menyelenggarakan Kegiatan Bank Papua Club;
9. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Papua/

6. *Administration of Corporate Secretariat*
   a. Responsible for the secretariat management activities of the Board of Commissioners;
   b. Responsible for secretarial management activities on the Board of Directors;
   c. To direct the administration of corporate secretarial to ensure the full availability of documents, including the submission of meeting material of the BOD and BOC;
7. *Protocol*
   Responsible for Protocol activities related to the schedule of activities of the Board of Directors, coordinating events related to the Board of Directors and internal / external / stakeholders.

Implementation of Corporate Secretary Duties

Some of the activities undertaken by the Corporate Secretary throughout 2017 are as follows.

1. *Conducting Press Conferences, Press conferences are special events created as a means of announcing, explaining, maintaining or promoting policy with a view to establishing public understanding and acceptance on the part of the initiator of the event;*
2. *Conducting a Publick Expose, which is a public exposure to the public to explain the performance of listed companies. The goal, so that information about the company's performance is spread evenly. Each company is required to conduct an annual public expose of at least 1 time per year, which may be executed on the same day as the Shareholders General Meeting (SGM);*
3. *Conducting press releases, namely the delivery of writing or recording directed directly to the mass media with the aim to announce something that has news value to be published in the mass media;*
4. *Conducting Media Coverage (News Photos & Writing News);*
5. *Performing Media Visits;*
6. *Holding the 51st Anniversary of Bank Papua;*
7. *Holding the 72nd Anniversary of RI's;*
8. *Holding Bank Papua Club;*
9. *To hold a Shareholders General Meeting (SGM) of Bank Papua,*

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Keberadaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh pejabat dan pegawai Bank, yang dirancang untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (fraud) dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Existence of Internal Control System

The Internal Control System is a supervisory process mechanism established by the Bank's management on an ongoing basis whose implementation is affected by the Board of Commissioners, the Board of Directors and all Bank officials and employees, designed to provide reasonable assurance to safeguard and secure the Bank's assets, accurate, improve compliance with applicable regulations, reduce the impact of financial losses, fraud, including fraud and prudential violations, and improve organizational effectiveness and improve cost efficiency.

Sistem pengendalian intern perlu mendapat perhatian bank, mengingat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan usaha bank ialah adanya berbagai kelemahan dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern bank, antara lain :

1. Kurangnya pengawasan, tidak jelasnya akuntabilitas dari pengurus bank dan kegagalan dalam mengembangkan budaya pengendalian intern pada seluruh jenjang organisasi.
2. Kurang memadainya pelaksanaan identifikasi dan penilaian atas risiko dari kegiatan operasional Bank.
3. Tidak ada atau gagalnya suatu pengendalian pokok terhadap kegiatan operasional bank, seperti pemisahan fungsi, otorisasi, verifikasi dan kaji ulang atas *risk exposure* dan kinerja bank.
4. Kurangnya komunikasi dan informasi antar jenjang dalam organisasi bank, khususnya informasi di tingkat pengambil keputusan tentang penurunan kualitas *risk exposure* dan penerapan tindakan perbaikan.
5. Kurang memadainya atau kurang efektifnya program audit intern dan kegiatan pemantauan lainnya.
6. Kurangnya komitmen manajemen bank untuk melakukan proses pengendalian intern dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan bank.

The Internal control system needs to get the attention of banks, considering that one of the factors causing the difficulties of bank business is the existence of various weaknesses in the implementation of the bank's internal control system, among others:

1. *Lack of supervision, unclear accountability of bank managers and failure to develop a culture of internal control at all levels of the organization.*
2. *Inadequate implementation of risk identification and assessment of the Bank's operational activities.*
3. *There is no or failure of any principal control over the bank's operational activities, such as segregation of functions, authorization, verification and review of risk exposures and bank performance.*
4. *Lack of communication and information among levels within the organization of banks, especially information on the level of decision makers about the decrease in the quality of risk exposure and the application of corrective action.*
5. *Inadequate or ineffective internal audit programs and other monitoring activities.*
6. *Lack of bank management commitment to conduct internal control process and apply strict sanctions against violation of prevailing regulations, policies and procedures established by the bank.*

Definisi *internal control* menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan Direksi , manajemen, dan staff, untuk membuat reasonable *assurance* mengenai :

The definition of internal control, according to the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) is a process undertaken by boards of directors, management and staff to create reasonable assurance on:

1. Efektifitas dan efisiensi operasional;
2. Reliabilitas pelaporan keuangan;
3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku.

Dari definisi tersebut, maka pengendalian intern Bank Papua merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (*on going basis*), guna :

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
5. Meningkatkan efektifitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern bertujuan antara lain sebagai berikut :

1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku artinya bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan pemerintah otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan peraturan intern yang ditetapkan Bank sendiri;
2. Memastikan tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu;
3. Memastikan efektivitas kegiatan usaha Bank khususnya dalam menggunakan asset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian;
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh;
5. Mengurangi dampak kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Sistem pendendalian internal Bank Papua mengacu kepada sistem pengendalian internal dari COSO. Sistem pengendalian internal artinya: “suatu proses,yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lainnya dari sebuah entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan/jaminan yang wajar berkaitan dengan pencapaian tujuan dalam beberapa kategori.

Pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan atau jaminan yang wajar berkaitan dengan pencegahan atau deteksi dini terhadap pengambilan, penggunaan, atau penghilangan yang tidak terotorisasi

1. Operational effectiveness and efficiency;
2. Reliability of financial reporting;
3. Compliance with applicable laws and regulations.

From these definitions, the internal control of Bank Papua is a supervisory mechanism established by bank management on an ongoing basis, in order to:

1. *Maintain and secure the assets of the bank.*
2. *Ensure more accurate reporting.*
3. *Improve compliance with applicable regulations.*
4. *Reduce the impact of financial / loss, irregularities including fraud / fraud, and prudential violation.*
5. *Improve organizational effectiveness and improve cost efficiency.*

Purpose of Internal Control System

Internal Control System aims at among others as follows:

1. *Ensuring that the Bank's compliance with prevailing laws and regulations means that all business operations of the Bank have been carried out in accordance with prevailing laws and regulations, whether issued by the government of the Bank's supervisory authority or any of the Bank's policies, rules and regulations, own;*
2. *Ensuring the availability of correct, complete and timely financial and management information;*
3. *Ensuring the effectiveness of the Bank's business activities, especially in the use of assets and other resources in order to protect the Bank from the risk of loss;*
4. *Increasing the effectiveness of risk culture in the organization as a whole;*
5. *Reduce the impact of losses, irregularities, including fraud and prudential violations.*

The internal control system of Bank Papua refers to the internal control system of COSO. The internal control system means: "a process, influenced by the Board of Commissioners, management, and other personnel of an entity, designed to provide reasonable assurance with regard to achieving objectives in several categories.

Internal controls are designed to provide reasonable assurance or assurance regarding the prevention or early detection of unauthorized take, use, or removal of a

terhadap asset perusahaan, sehingga dapat memberikan pengaruh yang material terhadap laporan keuangan.

Pihak yang Terlibat

Pihak-pihak yang terlibat dalam Pengendalian Internal Bank adalah Dewan Komisaris, manajemen, dan pihak-pihak lainnya yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, serta menyatakan bahwa tanggungjawab atas penetapan, penjagaan, dan pengawasan sistem Pengendalian Internal adalah tanggungjawab manajemen.

Untuk kategori efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, maka Dewan Komisaris dibantu Komite Audit bertanggungjawab membantu komisaris dalam pengawasan atas hal-hal yang terkait sistem pengendalian internal. Disamping itu, fungsi utama Divisi SKAI adalah membantu tugas Direktur Utama dan Komisaris, serta seluruh tingkatan manajemen dalam memastikan kecukupan sistem pengendalian internal bank. Dan juga, dengan adanya Satuan Kerja Anti Fraud akan melengkapi fungsi sistem pengendalian intern Bank Papua. Berdasarkan penelaahan dan pembahasan di dalam beberapa pertemuan yang telah dilakukan, maka Komite Audit berpendapat bahwa Bank telah memiliki sistem pengendalian internal yang memadai.

Komponen Pengendalian Internal

Penerapan Sistem Pengendalian Internal di Bank Papua yang efektif meliputi 5 (lima) komponen yang saling berhubungan untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
   Pondasi dari komponen ini meliputi beberapa faktor diantaranya :
   a. Integritas dan Etika;
   b. Komitmen untuk meningkatkan kompetensi;
   c. Dewan komisaris dan komite audit;
   d. Filosofi manajemen dan jenis operasi;
   e. Kebijakan dan praktek Sumber Daya Manusia.

Komponen ini merupakan pondasi awal untuk pengembangan Sistem *Internal Control* dengan menyediakan disiplin dan struktur yang bersifat fundamental. Hal ini diantaranya mencakup: Integritas dan Nilai Etika, Komitmen terhadap Kompetensi, Berfungsinya Auditor, Filosofi Manajemen dan Gaya Kepemimpinan, Struktur Organisasi, Pemberian Wewenang dan Tanggungjawab, Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia (SDM). Ketiadaan satu atau lebih unsur yang penting dari lingkungan pengendaliaan akan menyebabkan sistem tidak efektif, meskipun terdapat kekuatan dari sisi empat komponen pengendalian

company's assets, so as to have a material effect on the financial statements.

Party Involved

The parties involved in the Bank's Internal Control are the Board of Commissioners, the management, and others supporting the achievement of the objectives of the organization, and stating that the responsibility for establishing, maintaining and supervising the Internal Control system is the responsibility of management.

For categories Effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial statements and compliance with applicable laws and regulations, the BOC assisted by the Audit Committee is responsible for assisting the commissioners in oversight of matters relating to the internal control system. In addition, the main function of the Division of Internal Audit is to assist the duties of the President Director and Commissioners, as well as all levels of management in ensuring the adequacy of the bank's internal control system. And also, with the Anti Fraud Work Unit will complete the function of internal control system of Bank Papua. Based on the review and discussion in several meetings that have been conducted, the Audit Committee is of the opinion that the Bank already has an adequate internal control system.

Components of Internal Control

The implementation of the Internal Control System at Bank Papua effectively includes 5 (five) interrelated components to support the achievement of corporate objectives, namely:

1. *Control Environment*
   The foundation of this component includes several factors including:
   a. Integrity and Ethics;
   b. Commitment to improve competence;
   c. Board of commissioners and audit committee;
   d. Management philosophy and type of operation;
   e. Human resources policies and practices.

This component is the initial foundation for the development of Internal Control System by providing fundamental discipline and structure. These include: Ethical Integrity and Values, Commitment to Competence, Auditor Functioning, Management Philosophy and Leadership Style, Organizational Structure, Authorization and Responsibility, Human Resource Policy and Practices (HR). The absence of one or more important elements of the driving environment will cause the system to be ineffective, despite the strength of the other four internal control components. The effectiveness of Internal Control is a function of the controlling environment

internal yang lain. Efektivitas *Internal Control* merupakan fungsi dari unsur lingkungan pengendalian terhadap individual yang menciptakan, mengadministrasikan, dan memonitor pengendalian. Suatu organisasi perlu menetapkan lingkungan pengendalian yang dikomunikasikan kepada pegawai dan diperkuat dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
Komponen ini merupakan identifikasi dan analisis yang dilakukan oleh manajemen terhadap risiko terkait dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian risiko organisasi dapat dilakukan melalui identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko-risiko yang relevan terhadap penyusunan laporan keuangan yang secara wajar disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum. Proses penilaian risiko harus mempertimbangkan kejadian dan keadaan baik yang bersifat eksternal dan internal yang mungkin timbul dan secara tidak baik mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dan laporan keuangan. Risiko organisasi dapat berasal dari perubahan dalam lingkungan operasi, personil baru, sistem informasi baru, pertumbuhan organisasi yang cepat, teknologi baru, dan lain-lain.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
Komponen ini berupa kegiatan, kebijakan, prosedur dan praktek yang menjamin pencapaian tujuan institusi. Kegiatan ini memungkinkan pengambilan berbagai tindakan yang diperlukan untuk mengelola risiko terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian berlangsung di seluruh organisasi, semua tingkatan dan pada semua fungsi yang ada. Kegiatan ini mencakup rentang kegiatan mulai dari pengesahan, kewenangan, verifikasi, rekonsiliasi, pengkajian ulang kinerja, pengamanan aktiva dan pemisahan tugas. Kegiatan pengendalian yang dapat dilakukan diantaranya penelaahan kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik dan pemisahan fungsi.

Aktivitas Pengendalian terdiri dari kebijakan dan prosedur yang menjamin karyawan melaksanakan arahan manajemen. Aktivitas Pengendalian meliputi review terhadap sistem pengendalian, pemisahan tugas dan pengendalian terhadap Sistem informasi. Pengendalian terhadap Sistem informasi meliputi dua cara, yakni :
a. *General controls*, mencakup kontrol terhadap akses, perangkat lunak, dan system development;
b. *Application controls,* mencakup pencegahan dan

elements against the individual that creates, administers, and monitors the control. An organization needs to establish a control environment that is communicated to employees and strengthened in the implementation of daily activities.

2. Risk Assessment
This component is the identification and analysis conducted by the management of the risks associated with the achievement of objectives that have been set. Assessment of organizational risk can be made through the identification, analysis and management of risks relevant to the preparation of financial statements that are reasonably presented in accordance with generally accepted accounting principles. The risk assessment process should take account of external and internal events and circumstances that may arise and adversely affect the entity's ability to record, process, summarize and report financial data consistent with management assertions and financial statements. Organizational risks can come from changes in operating environments, new personnel, new information systems, rapid organizational growth, new technology, and more.

3. Control Activities
These components are activities, policies, procedures and practices that ensure the achievement of institutional objectives. This activity allows the taking of various actions necessary to manage the risks to the achievement of organizational goals. Control activities take place throughout the organization, all levels and on all functions. This activity covers a range of activities ranging from authorization, authority, verification, reconciliation, performance review, asset security and job separation. Control activities that can be done include performance improvement, information processing, physical control and segregation of functions.

Control Activities consist of policies and procedures that ensure employees carry out management directives. Control activities include a review of the system of control, separation of duties and control of the information system. Control of the information system includes two ways, namely:

a. General controls, including control over access, software, and system development;
b. Application controls, including the prevention and

deteksi transaksi yang tidak terotorisasi. Berfungsi untuk menjamin kelengkapan, akurasi, autorisasi and validasi dari proses transaksi yang terjadi.

detection of unauthorized transactions. Serves to ensure completeness, accuracy, authorization and validation of the transaction process.

4. Informasi dan Komunikasi

Komponen ini mendukung semua komponen pengendalian lainnya dengan mengkomunikasikan tanggungjawab pengendalian kepada seluruh pegawai dan menyediakan informasi dalam sebuah bentuk dan kerangka waktu yang mengizinkan orang menyelesaikan tugasnya. Sistem informasi yang ada menghasilkan laporan-laporan yang berisi informasi mengenai kegiatan organisasi, keuangan dan informasi yang ada hubungannya dengan kepatuhan, yang memungkinkan penggunaannya untuk menjalankan dan mengendalikan organisasi. Informasi ini tidak hanya berhubungan dengan data yang dihasilkan internal, tetapi juga mengenai peristiwa-peristiwa eksternal, kegiatan-kegiatan dan kondisi yang dibutuhkan untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan pelaporan untuk pihak luar. Komunikasi yang efektif juga harus terjadi dalam bentuknya yang luas, mengalir ke bawah, melintasi berbagai tingkatan dalam organisasi dan juga ke atas. Semua pegawai harus menerima informasi atau pesan dari Manajemen secara jelas yang menegaskan bahwa tanggungjawab menjalankan kontrol harus dilakukan secara sangat serius. Pegawai harus mengerti peran mereka dalam sistem *Internal Controls*, sama seperti kegiatan masing-masing secara individual memiliki hubungan dengan pekerjaan orang lain. Pegawai harus memiliki alat atau media untuk mengkomunikasikan informasi ke atasan mereka. Mereka juga butuh untuk berkomunikasi secara efektif dengan pihak luar, seperti halnya pelanggan, pemasok (vendor), pemilik saham dan regulator.

4. Information and Communication

This component supports all other control components by communicating control responsibilities to all employees and providing information in a form and a time frame that allows people to complete their tasks. The existing information system produces reports containing information on organizational, financial and information activities that are related to compliance, which allows its use to run and control the organization. This information not only deals with internally generated data, but also on external events, activities and conditions required to inform decision-making and reporting to outside parties. Effective communication must also take place in its broadest form, flowing down, across various levels within the organization as well as upwards. All employees must receive information or messages from Management clearly stating that the responsibility for carrying out controls should be taken very seriously. Employees must understand their role in the Internal Control system, just as each individual's activities have relationships with the work of others. Employees must have the tools or media to communicate information to their superiors. They also need to communicate effectively with outsiders, as well as customers, suppliers (vendors), shareholders and regulators.

5. Pengawasan (*Monitoring*)

Komponen ini memberikan kepastian yang memadai bahwa tujuan suatu organisasi dapat tercapai, manajemen harus memonitor sistem *Internal Control* untuk menentukan apakah sistem beroperasi seperti yang diinginkan dan dimodifikasi agar sesuai dengan perubahan dalam kondisi. Pemantuan merupakan suatu proses yang menilai mutu sistem *Internal Control* sepanjang waktu. Pemantuan mencakup personil yang tepat untuk menilai disain dan operasi pengendalian dengan dasar yang tepatwaktu dalam mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Pengawasan ini juga melibatkan unsur eksternal terhadap *Internal Controls* yang dilakukan oleh manajemen atau pihak lain di luar proses serta pelaksanaan metodologi independen seperti prosedur atau standar cheklist yang biasa dilakukan oleh pegawai dalam proses.

5. Monitoring

This component provides adequate assurance that an organization's objectives can be achieved, management must monitor the Internal Control system to determine whether the system operates as desired and modified to suit changes in conditions. Assistance is a process that assesses the quality of the Internal Control system over time. It includes the right personnel to assess the design and operation of the control on a timely basis in taking the necessary corrective action. This oversight also involves external elements of the Internal Controls performed by management or other parties outside the process as well as the implementation of independent methodologies such as procedures or standard checks that employees normally perform in the process.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian dan langkah-langkah pengurus bank dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional bank.

Unsur-unsur lingkungan pengendalian meliputi:

1. Struktur organisasi yang memadai.
2. Gaya kepemimpinan dan filosofi manajemen bank.
3. Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi seluruh pegawai.
4. Kebijakan dan prosedur Sumber Daya Manusia .
5. Atensi dan arahan manajemen bank dan komite lainnya, seperti Komite Manajemen Risiko.
6. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional bank dan penerapan manajemen risiko.

Bentuk Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur dan praktek yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai Bank bahwa arahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian dapat membantu Direksi termasuk Komisaris Bank dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bank. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional.

Kaji Ulang Manajemen

Direksi Bank secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari pejabat dan pegawai sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang kemajuan (realisasi) dibandingkan dengan target yang akan dicapai, seperti laporan keuangan dibandingkan dengan rencana anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi segera mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya (fraud).

Kaji Ulang Kinerja Operasional

Kaji ulang dilakukan terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh satuan kerja manajemen risiko. Kaji ulang ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern dengan frekuensi yang lebih tinggi, baik kaji ulang secara harian, mingguan maupun bulanan. Kaji ulang ini termuat dalam hasil pemeriksaan rutin yang diselenggarakan oleh SKAI.

Control Environment

The control environment reflects the overall commitment, behavior, awareness and steps of bank's board in implementing the bank's operational control activities. Elements of the control environment include:

1. *Adequate organizational structure.*
2. *Leadership style and bank management philosophy.*
3. *Integrity and ethical values and competence of all employees.*
4. *Human resources policies and procedures.*
5. *Attention and direction of the management of banks and other committees, such as the Risk Management Committee.*
6. *External factors affecting bank operations and implementation of risk management.*

Forms of Control Activities and Functions Separation

The control activities include policies, procedures and practices that give Bank officers and officers confidence that the direction of the Board of Commissioners and Board of Directors has been effectively implemented. Control activities may assist the Board of Directors, including the Board of Commissioners in managing and controlling risks that may affect performance or result in loss of the Bank. Separation of function is intended so that every person in his position does not have the opportunity to perform and hide mistakes or irregularities in the implementation of its duties at all levels of the organization and all steps of operational activities.

Management Review

The Board of Directors periodically requests for information (explanation) and operational performance reports from officials and employees so as to enable it to review progress (realization) against the targets to be achieved, such as financial statements as compared to the established budget plan. Based on the review, the Board of Directors immediately detects problems such as control weaknesses, financial report errors or other fraud.

Operational Performance Review

A review of risk assessment (risk profile report) generated by the risk management unit. This review is conducted by the Higher-frequency Internal Audit Unit, either daily, weekly or monthly review. This review is contained in the results of routine inspections conducted by SKAI.

Pemisahan Fungsi

Aktivitas pemisahan fungsi yang merupakan bagian dalam aktifitas pengendalian yang dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional yaitu sebagai berikut :

1. Mematuhi prinsip pemisahan fungsi ini, yang dikenal sebagai "*Dual Control*".
2. Menetapkan prosedur (kewenangan), termasuk penetapan daftar petugas yang dapat mengakses suatu transaksi atau kegiatan usaha yang berisiko tinggi.
3. Menghindari pemberian wewenang dan tanggungjawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Tujuan Penerapan Sistem Pengendalian Internal

1. Efektivitas dan efisiensi operasional Bank yang menjamin semua kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan bank maupun kebijakan, ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh bank sendiri.
2. Keandalan pelaporan keuangan dalam menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya guna rangka melindungi bank dari risiko kerugian.
4. Mengurangi dampak kerugian akibat penyimpangan yang dapat terjadi termasuk kecurangan/fraud dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
5. Efektifitas budaya risiko guna mengidentifikasi kelemahan dan menilai potensi penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

1. Dewan Komisaris
   Dewan komisaris mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :
   a. Mengesahkan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan dan strategi usaha bank secara keseluruhan;
   b. Memahami risiko utama yang dihadapi bank, menetapkan tingkat risiko yang dapat ditolerir

Functional Separation

Activity of separation of functions which is part of control activities intended for every person in his position has no chance to do and hide mistakes or deviations in the implementation of his duties at all levels of the organization and all steps of operational activities are as follows:

1. *Comply with the principle of separation of this function, known as "Dual Control".*
2. *Establish procedures (authority), including the establishment of a list of officers who can access a transaction or a high-risk business activity.*
3. *Avoid giving authority and responsibility which may result in conflict of interest.*

Purpose of Implementing Internal Control System

1. *Effectiveness and operational efficiency of the Bank is ensuring that all business activities are carried out in accordance with prevailing laws and regulations, whether issued by the government, the bank supervisory authority or the policies, internal rules and procedures established by the bank itself.*
2. *The reliability of financial reporting in providing the correct, complete, timely and relevant reports required in order to make appropriate and accountable decisions.*
3. *Compliance with applicable laws and regulations, in order to increase effectiveness and efficiency in the use of assets and other resources in order to protect the bank from the risk of loss.*
4. *Reduce the impact of losses due to irregularities that may occur, including fraud and prudential violations.*
5. *The effectiveness of risk culture to identify weaknesses and assess potential deviations early and reassess the policy and procedures of the Bank on an ongoing basis.*

Supervision by Management and Culture of Control

1. *Board of Commissioners*
   The Board of Commissioners has the following responsibilities:
   a. *Periodically ratify and review the Bank's overall business policy and strategy;*
   b. *Understand the key risks facing the bank, establish a tolerable level of risk (risk tolerance)*

(*risk tolerance*) dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko tersebut;

c. Mengesahkan struktur organisasi;
d. Memastikan bahwa Direksi telah memantau efektifitas pelaksanaan sistem pengendalian intern.

Dalam rangka memenuhi tanggungjawab tersebut, maka dewan komisaris:

a. Harus dapat bersikap obyektif serta memiliki pengetahuan dan kemampuan serta keingintahuan mengenai kegiatan usaha dan risiko bank;
b. Harus berperan secara aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan bank yang dapat mengurangi efektifitas sistem pengendalian intern, seperti adanya hambatan dalam arus informasi dari bawahan kepada pimpinan dan kelemahan dalam pelaksanaan fungsi keuangan, hukum dan audit intern;
c. Secara berkala mengadakan pertemuan dengan Direksi dan pejabat eksekutif bank untuk membahas efektifitas sistem pengendalian intern;
d. Melakukan kaji ulang terhadap hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian intern yang dibuat oleh Direksi , SKAI dan auditor ekstern;
e. Secara berkala melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti dengan tepat atas temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh regulator / otoritas bank, auditor intern dan auditor ekstern;
f. Secara berkala melakukan kaji ulang terhadap validitas strategi bank yang telah ditetapkan.

2. Direksi

Direksi mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:

a. Melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris;
b. Mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang dihadapi bank;
c. Memelihara suatu struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggungjawab dan hubungan pelaporan yang jelas;
d. Memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitasyang konsisten;

and ensure that the Board of Directors has taken the necessary steps to identify, measure, monitor and control those risks;

c. Legalize the organizational structure;
d. Ensure that the board of directors has monitored the effectiveness of the implementation of the internal control system.

In order to fulfill these responsibilities, the board of commissioners:

a. Must be objective and have knowledge and capability and curiosity about business activities and bank risks;

b. must play an active role to ensure the improvement of bank problems that can reduce the effectiveness of the internal control system, such as obstacles in the flow of information from subordinates to the leadership and weaknesses in the implementation of financial, legal and internal audit functions;

c. regularly meet with directors and bank executives to discuss the effectiveness of the internal control system;

d. reviewing the evaluation results of internal controls made by directors, SKAIs and external auditors;
e. periodically make efforts to ensure that the Board of Directors has properly followed up the findings and recommendations submitted by regulators / bank authorities, internal auditors and external auditors;
f. periodically review the validity of the established bank strategy.

2. Board of Directors

The Board of Directors has the following responsibilities:

a. Implement policies and strategies approved by the Board of Commissioners;
b. Develops procedures to identify, measure, monitor and control the risks faced by banks;

c. Maintaining an organizational structure that reflects clear authority, responsibility and reporting relationships;
d. Ensure that effective delegation of powers is supported by consistent application of accountability;

e. Menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian intern; dan
f. Memantau kecukupan dan efektifitas dari sistem pengendalian intern.

Dalam rangka melaksanakan tanggungjawab tersebut, Direksi harus melakukan langkah-langkah, antara lain :

a. Menugaskan para pejabat yang bertanggungjawab dalam kegiatan atau fungsi tertentu untuk menyusun kebijakan dan prosedur pengendalian intern terhadap kegiatan operasional serta kecukupan organisasi;
b. Melakukan pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa para pejabat dan pegawai telah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan;
c. Mendokumentasikan dan mensosialisasikan struktur organisasi yang secara jelas menggambarkan jalur kewenangan dan tanggungjawab pelaporan serta menyelenggarakan suatu sistem komunikasi yang efektif kepada seluruh jenjang organisasi bank;
d. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi pengendalian intern telah dilaksanakan oleh manajer/pejabat dan pegawai yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai;
e. Melaksanakan secara efektif langkah perbaikan atau rekomendasi dari auditor intern dan atau auditor ekstern, antara lain dengan cara menugaskan pegawai yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya.

Evaluasi Atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal di Bank Papua dilakukan oleh Komite Audit. Hasil evaluasi atas efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal tersebut menjadi salah satu dasar Dewan Komisaris menilai efektifitas Sistem Pengendalian Internal di Bank Papua dan untuk menentukan perbaikan dan penyempurnaan kedepannya.

Berdasarkan penelaahan dan pembahasan di dalam beberapa pertemuan yang telah dilakukan, maka Komite Audit berpendapat bahwa saat ini Bank telah memiliki sistem pengendalian internal yang memadai.

e. Establishing policies and strategies and procedures of internal control; and
f. Monitor the adequacy and effectiveness of the internal control system.

In order to carry out these responsibilities, the Board of Directors shall take the following steps:

a. Assigns responsible officials in certain activities or functions to develop policies and procedures of internal control over operational activities and the adequacy of the organization;

b. Exercise effective controls to ensure that officials and employees have developed and implemented established policies and procedures;

c. Documenting and socializing the organizational structure that clearly defines the lines of authority and responsibility for reporting and conducting an effective communication system for all levels of bank organization;

d. Taking appropriate measures to ensure that the activities of the internal control functions have been undertaken by managers / officials and employees who have sufficient experience and capacity;

e. Effectively implementing improvement measures or recommendations from internal auditors and / or external auditors, among others by assigning employees responsible for carrying them out.

Evaluation of the Effectiveness of Internal Control Systems

Evaluation of the effectiveness of the implementation of the Internal Control System at Bank Papua is conducted by the Audit Committee. The evaluation of the effectiveness of the implementation of the Internal Control System becomes one of the foundations of the Board of Commissioners to assess the effectiveness of the Internal Control System in Bank Papua and to determine future improvements and improvements.

Based on the review and discussion in several meetings that have been conducted, the Audit Committee is of the opinion that the Bank currently has an adequate internal control system.

Laporan Audit Intern
Internal Audit Report

Dalam rangka menegakkan prinsip kehati-hatian mengelola, menjaga dan mengamankan kegiatan usaha bank serta menjalankan prinsip tata kelola Bank yang baik yaitu prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*, maka diperlukan adanya pelaksanaan fungsi audit intern bank yang efektif. Pelaksanaan fungsi audit intern bank diwujudkan dengan dibentuknya Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Papua yang mengacu kepada Bab III Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

In order to uphold the prudent principles of managing, maintaining and securing the bank's business activities and implementing Bank's GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independency and fairness principles, it is necessary to have an effective bank internal audit function. Implementation of the bank's internal audit function is manifested by the establishment of the Bank Internal Audit Unit (SKAI) of Bank Papua referring to Chapter III Article 9 of Bank Indonesia Regulation Number 1/6 / PBI / 1999 dated September 20, 1999 on the Assignment of Compliance Director and Standards Implementation Implementation of Internal Audit Function of Commercial Banks.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Papua berfungsi untuk membantu semua tingkat manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif dengan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, saran serta informasi berkenaan dengan kondisi pengendalian serta hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas usaha bank. SKAI merupakan bagian dari struktur pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen Bank.

The Bank Internal Audit Unit (SKAI) serves to assist all levels of management in carrying out its responsibilities effectively by providing analysis, assessment, recommendations, advice and information regarding the conditions of control and matters relating to the business activities of the bank. The Internal Audit Unit is a part of the internal control structure and constitutes all activities related to the audit and reporting of audit results concerning the implementation of coordinated control structures within each level of the Bank's management.

Peranan SKAI adalah membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. Dalam pelaksanaannya, Auditor mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, Teknologi Informasi, tata kelola Bank yang baik, dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang di-review kepada semua tingkatan manajemen. Di samping itu, SKAI berfungsi untuk mengidentifikasikan segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. SKAI juga berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern bank yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya dan mendorong terwujudnya bank yang sehat. Keterlibatan SKAI sebagai konsultan tidak berarti bahwa objek yang telah dikonsultasikan akan dikecualikan sebagai objek audit.

The role of the Internal Audit Unit is to assist the President Director and the Board of Commissioners by outlining operations, planning, implementation and monitoring of the audit results. In doing so, the Auditor represents the views and interests of his profession by making analysis and research in the areas of finance, accounting, operations, Information Technology, Good Bank's GCG, and other activities through on-site inspection and off-site monitoring, improvements and objective information about the activities reviewed to all levels of management. In addition, the SKAI serves to identify all possibilities to improve and improve the efficient use of resources and funds. SKAI also serves as a consultant for the bank's internal parties in need, especially regarding the scope of its duties and encourage the establishment of a sound bank. SKAI's involvement as a consultant does not mean that the object that has been consulted will be excluded as an audit object.

Struktur dan Kedudukan SKAI

Struktur dan kedudukan Satuan Kerja Audit Intern diatur dan ditetapkan berdasarkan SK. Direksi Nomor: 11.1/DIR-BPD/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dipimpin oleh seorang Kepala SKAI setingkat Pemimpin Divisi (diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK), dengan struktur organisasi sebagai berikut.

Structure and SKAI Position

The structure and position of the Internal Audit Division are regulated and stipulated in accordance with SK. Board of Directors Number: 11.1 / DIR-BPD / III / 2017 dated March 29, 2017 on Organizational Structure of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua

The Internal Audit Unit (SKAI) is led by a Head of Internal Audit Unit (Division Head of Divisions) (appointed and dismissed by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners and reported to OJK), with the following organizational structure.

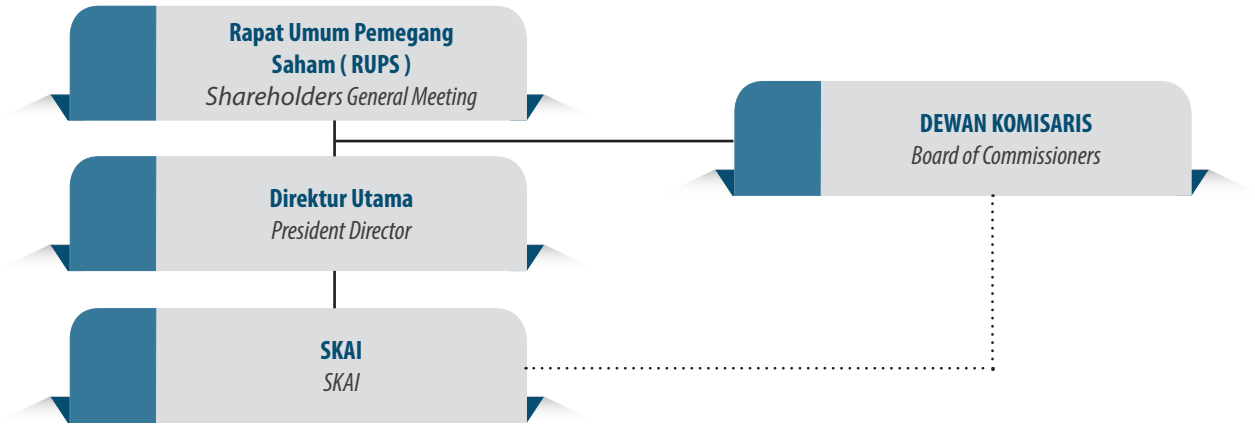

Unit kerja SKAI sendiri memiliki 6 (enam) unit dalam mendukung kegiatan operasional Kepala SKAI yaitu Quality Assurance, Departemen Pendukung, Koordinator Teknis Kantor Pusat, Koordinator Teknis Wilayah I, Koordinator Teknis Wilayah II dan Koordinator Teknis Wilayah III.

The SKAI work unit itself has 6 (six) units in supporting the operational activities of Head of SKAI that is Quality Assurance, Supporting Department, Technical Coordinator of Head Office, Technical Coordinator Area I, Area Technical Coordinator II and Area Technical Coordinator III.

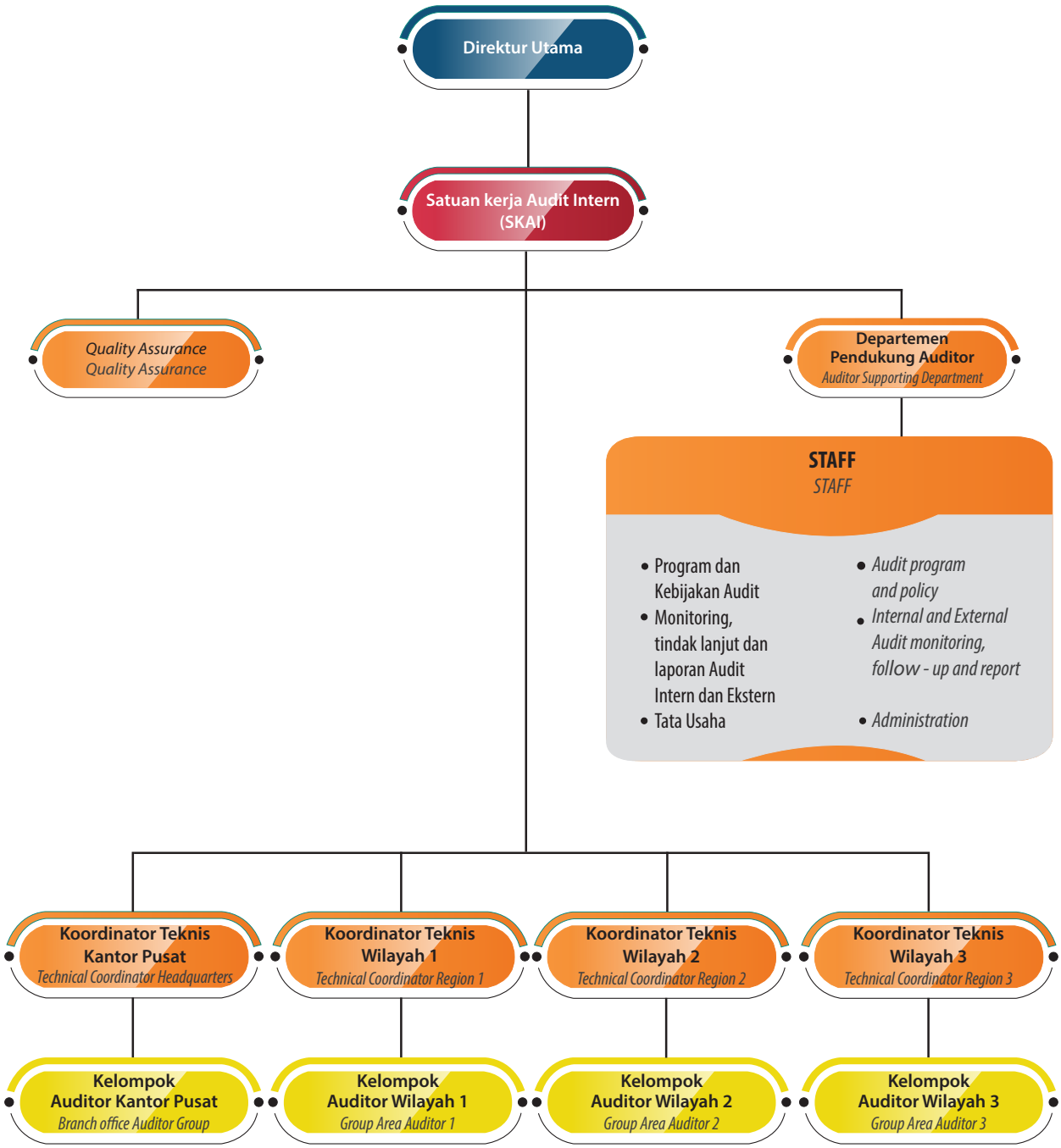

- Auditor SDM & Umum
- Auditor TI
- AuditorKredit
- Auditor Keuangan

- Auditor SDM & Umum
- Auditor TI
- AuditorKredit
- Auditor Keuangan

- Auditor SDM & Umum
- Auditor TI
- AuditorKredit
- Auditor Keuangan

- Auditor SDM & Umum
- Auditor TI
- AuditorKredit
- Auditor Keuangan

Kepala SKAI bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Kedudukan, mekanisme, tugas & wewenang SKAI termasuk transparansi serta kejelasan merupakan hal yang signifikan dalam pengelolaan Bank, sehingga kebijakan audit intern yang berkaitan dengan tanggungjawab, wewenang serta tingkat independensi telah dinyatakan dalam *Internal Audit Charter* yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2013 yang disusun berdasarkan PBI Nomor 1/6/ PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB).

The Head of the Internal Audit Unit shall be directly responsible to the President Director. To support independence and ensure smooth audit and authority in monitoring follow-up, the SKAI can communicate directly with the Board of Commissioners to inform audit-related matters. The position, mechanism, duties and authority of the Internal Audit Unit including transparency and clarity are significant in the Bank's management, so that the internal audit policy related to responsibility, authority and independence level has been stated in the Internal Audit Charter signed by the President Director and approved by the Board of Commissioners as of December 31, 2013, prepared under PBI Number 1/6 / PBI / 1999 dated September 20, 1999 concerning the assignment of Compliance Director and Standard of Implementation of Bank Internal Audit Function (SPFAIB).

Profil Kepala SKAI
Head of SKAI Profile

Yunus Bunga Todingallo, SE
Kepala
Chairman

54 tahun. Lahir di Toraja pada tanggal 06 Juli 1963. Bekerja di Bank Papua sejak tahun 1991. Menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sejak 09 Juni 2017 sesuai SK Nomor:179/KEPEG/V/2017 pada tanggal 19 Mei 2017 tentang Ahli Tugas Pegawai. Pendidikan terakhir Ekonomi Manajemen di Universitas Negeri Cenderawasih Manokwari tahun 1987.

54 years old. Born in Toraja on July 6, 1963. Working in Bank Papua since 1991. Served as Head of Internal Audit Unit since June 9, 2017 in accordance with Decree No. 179 / KEPEG / V / 2017 on May 19, 2017 regarding expert duty employees. Last Education in Management Economics at Cenderawasih Manokwari State University in 1987.

Adapun perjalanan Carier di Bank Papua, mulai bergabung sejak Januari tahun 1990, sejumlah tugas dan jabatan yang pernah diemban selama berkarya di Bank Papua kurang lebih 27 Tahun yang lalu yaitu sebagai staf Perencanaan, Auditor, Kepala Bagian Perkreditan di Cabang Manokwari, Kepala Bagian Keuangan Dana dan Jasa di Cabang Manokwari, Kepala Unit Pengelolaan Kredit Bermasalah di Cabang Utama Jayapura, Kepala Departemen Bisnis Cabang Merauke, Senior Executif Satuan Kerja Anti Fraud, Kepala Cabang Bintuni, Kepala Divisi Manajemen Resiko dan saat ini sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

The traveling Carier at Bank Papua, began to join since January 1990, a number of duties and positions that have been held during work at Bank Papua approximately 27 Years ago as a staff of Planning, Auditor, Head of Credit at Manokwari Branch, Head of Finance Fund and Services at the Manokwari Branch, Head of the Troubled Credit Management Unit at Main Branch of Jayapura, Head of Business Department of Merauke Branch, Senior Executive of Anti Fraud Unit, Head of Branch of Bintuni, Head of Risk Management Division and currently Head of Internal Audit Unit.

Sejumlah pendidikan carier yang pernah diikuti antara lain cukup banyak dan variatif, namun beberapa pendidikan carier seperti Sertifikasi BSMR Level 1-4, Sertifikasi Audit Qualified Internal Auditor (QIA), Sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE), Sekolah Pimpinan Cabang tahun 2006, Sekola Pemimpin Bank (SESPI BANK) tahun 2016 dan beberpa seminar nasional tentang Audit yaitu Seminar Nasional Internal Audit (SENIA), Seminar NAsional Institut Internal Auditor (IIA) dan Seminar Nasional Ikatan Auditor Intern BAnk (IAIB)

A number of carier educations that have been followed are numerous and varied, but some carier education such as BSMR Certification Level 1-4, Qualified Internal Auditor Certification (QIA) Certification, Certified Fraud Examiner (CFE) Certification, Branch Leadership School 2006, Sekola Leader Bank (SESPI BANK) in 2016 and several national seminars on Audit, namely the National Seminar on Internal Audit (SENIA), the International Seminar of the Institute of Internal Auditors (IIA) and the National Seminar of the Association of Internal Auditors BAnk (IAIB)

Visi dan Misi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Papua memiliki visi "menjadi mitra professional yang memberikan nilai tambah (*added value*) dalam pencapaian visi perusahaan". Sedangkan misi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Papua adalah :

1. Untuk menjaga dan memenuhi kepentingan bank dan masyarakat pemilik dana dengan baik dan aman; dan
2. Untuk memastikan bahwa operasi-operasi bank telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang tinggi melalui pemberian jasa "*assurance and consulting*" secara independen dan objektif kepada manajemen dan Komisaris Bank Papua, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah, efisiensi operasi bank, efektivitas manajemen risiko, serta proses pengendalian dan pengelolaan bank yang baik (*good corporate governance*).

Internal Audit Charter

Standar Profesional Internal Audit Nomor 1000 menyatakan bahwa tujuan, wewenang dan tanggungjawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam *Internal Audit Charter* dan harus mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi. Piagam Audit Satuan Kerja Audit Intern Bank Papua ditetapkan berdasarkan Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2013.

Di dalam *Internal Audit Charter* Bank Papua dimuat antara lain sebagai berikut :

1. Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
2. Ketentuan mengenai tugas dan tanggungjawab SKAI membantu anggota Manajer dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggungjawab secara efektif;
3. Uraian dan penjelasan mengenai visi SKAI untuk menjadi mitra profesional yang memberikan nilai tambah dalam mencapai visi perusahaan;
4. Uraian dan penjelasan mengenai misi SKAI untuk menjaga dan memenuhi kepentingan bank dan masyarakat pemilik dana dengan baik dan aman;
5. Uraian dan penjelasan mengenai ruang lingkup audit dalam melakukan review atas manajemen risiko, sistem pengendalian intern, serta proses tata kelola perusahaan yang baik dan system informasi;
6. Uraian dan penjelasan mengenai tugas dan tanggungjawab dalam melakukan review aktivitas perusahaan dalam interval waktu tertentu guna memastikan bahwa fungsi-fungsi perencanaan,

Vision and Mission of Internal Audit Unit (SKAI)

The Bank Internal Audit Unit (SKAI) of Bank Papua has a vision of "becoming a professional partner that adds value to the achievement of the company's vision". While the mission of the Internal Audit Working Unit (SKAI) of Bank Papua is:

1. *To maintain and satisfy the interests of the bank and the community of the owner of the funds properly and safely; and*
2. *To ensure that bank operations have been carried out in accordance with high standards through the provision of "assurance and consulting" services independently and objectively to the management and Commissioner of Bank Papua, thereby increasing the added value, efficiency of bank operations, the effectiveness of risk management, and good corporate governance.*

Internal Audit Charter

Professional Standards Internal Audit Number 1000 states that the objectives, powers and responsibilities of the internal audit function should be formally stated in the Internal Audit Charter and must be approved by the Chairman and Board of Trustees of the Organization. The Audit Charter of the Internal Audit Unit of Bank Papua shall be determined by virtue of the joint decision of the Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2013.

Inside the Internal Audit Charter of Bank Papua are contained as follows:

1. *Provisions concerning the appointment and dismissal of Lead SKAI by the President Director with the approval of the Board of Commissioners and reported to the Financial Services Authority;*
2. *Provisions on the duties and responsibilities of the Internal Audit Unit assist the members of the Manager and the Board of Commissioners in carrying out their responsibilities effectively;*
3. *Description and explanation of SKAI's vision to become a professional partner that provides added value in achieving the company's vision;*
4. *Description and explanation of SKAI's mission to safeguard and fulfill the interests of the bank and the public of the fund owner properly and safely;*
5. *Description and description of the scope of the audit in reviewing the risk management, internal control system, and good corporate governance and information system;*
6. *Description and explanation of duties and responsibilities in reviewing the company's activities within a certain time interval to ensure that planning,*

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian telah dilaksanakan sesuai dengan instruksi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen serta selaras, baik dengan tujuan perusahaan maupun dengan standar praktik pengelolaan perusahaan yang baik;

7. Uraian dan penjelasan mengenai wewenang penuh untuk mengaudit semua fungsi dalam unit kerja serta memiliki akses untuk memeriksa semua catatan, karyawan dan fisik aset-aset yang terkait dengan pelaksanaan auditnya.

organizing, directing and controlling functions has been carried out in accordance with the instructions, policies and procedures established by management and aligned, company or to good corporate management practice standards;

7. *Description and explanation of the full authority to audit all functions within the work unit and have access to examine all records, employees and physical assets related to the conduct of the audit.*

Pedoman Kerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Pedoman Kerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) disusun berlandaskan pada Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) tahun 1999. Pedoman ini merupakan penjabaran dari Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) dan akan terus dimutakhirkan dengan memperhatikan perkembangan praktik perbankan umumnya dan Bank Papua khususnya. Di samping itu, untuk melengkapi pedoman ini, SKAI dan para auditornya harus pula memperhatikan Standar Profesi Audit Internal (SPAI) yang diterbitkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, dan *Standards For The Professional Practice of Internal Auditing* dari The Institute of Internal Auditor.

Internal Audit Unit Work Guidelines (SKAI)

The Working Guidelines of the Internal Audit Unit (SKAI) shall be prepared based on Bank Indonesia Regulation no. 1/6 / PBI / 1999 dated September 20, 1999 concerning the Assignment of the Compliance Director and the Bank's Internal Audit Function Standard (SPFAIB) in 1999. These guidelines are the elaboration of the Internal Audit Charter and will continue to be updated with pay attention to the development of banking practices in general and Bank Papua in particular.
In addition, to complement these guidelines, SKAI and its auditors should also take into consideration the Internal Audit Professional Standards (SPAI) published by the Consortium of Internal Audit Organizations, and Standards for The Professional Practice of Internal Auditing by The Institute of Internal Auditors.

Peranan dan Fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Peranan SKAI

SKAI merupakan bagian dari struktur pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pelaporan hasil audit. Peranan SKAI khususnya di Bank Papua adalah membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam menjabarkan secara operasional, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. Dalam pelaksanaannya auditor mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, Teknologi Informasi, tata kelola Bank yang baik, dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang di-review kepada semua tingkatan manajemen. Di samping itu, SKAI berfungsi untuk mengidentifikasikan segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Selain itu, SKAI dapat berperan sebagai konsultan

Roles and Functions of Internal Audit Unit (SKAI)

The role of SKAI

The Internal Audit Unit is part of the internal control structure and constitutes all activities related to the audit and reporting of audit results. The role of the Internal Audit Unit in Bank Papua is to assist the President Director and the Board of Commissioners in elaborating operations, planning, implementation and monitoring of the audit results. In doing so, the auditor represents the views and interests of his profession by making analysis and research in finance, accounting, operations, Information Technology, Bank's GCG, and other activities through on-site inspection and off-site monitoring, and objective information about the activities reviewed to all levels of management. In addition, the SKAI serves to identify all possibilities to improve and improve the efficient use of resources and funds. In addition, the Internal Audit Unit may serve as a consultant for the bank's internal parties in need, especially those concerning the scope of its duties and encourage the establishment of a sound bank. SKAI's involvement as a consultant does not mean that

bagi pihak-pihak intern bank yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya dan mendorong terwujudnya bank yang sehat. Keterlibatan SKAI sebagai konsultan tidak berarti bahwa objek yang telah dikonsultasikan akan dikecualikan sebagai objek audit. Agar fungsi SKAI berjalan dengan baik diperlukan pengaturan tanggungjawab dan wewenang pengawasan antara Dewan Komisaris dan Direksi .

the object that has been consulted will be excluded as an audit object. In order for the functioning of the Internal Audit Unit to work properly, there is a need for regulatory responsibility and supervisory authority between the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Fungsi SKAI

Fungsi Audit Internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggungjawabnya. Independensi akan meningkat jika fungsi Audit Internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap Pimpinan dan Dewan Komisaris. Satuan Kerja Audit Intern Bank Papua independen terhadap unit kerja operasional. Kepala SKAI bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala SKAI dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

SKAI Function

The Internal Audit function should be placed in a position that allows the function to fulfill its responsibilities. Independence will increase if the Internal Audit function has adequate communication access to the Leaders and the Board of Commissioners. Division of SKAI Bank Papua is independent of the operational work unit. The Head of the Internal Audit Unit shall be directly responsible to the President Director and may communicate directly with the Board of Commissioners and the Audit Committee. The appointment, replacement or dismissal of the Head of the Internal Audit Unit shall be conducted by the President Director with the approval of the Board of Commissioners and reported to OJK. This is in accordance with Article 11 Paragraph 3 of Bank Indonesia Regulation Number 1/6 / PBI / 1999 dated September 20, 1999 concerning the Assignment of the Compliance Director and the Implementation of Standard for the Implementation of the Internal Audit Function of Commercial Banks.

Efektivitas pelaksanaan fungsi SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Kaji ulang terakhir oleh pihak eksternal dilakukan pada tahun 2015 dan akan dilaksanakan lagi pada tahun 2018.

The effectiveness of the implementation of the SKAI function and its compliance with SPFAIB is reviewed by an independent external party at least once in 3 (three) years. The last review by external parties was conducted in 2012 and will be implemented again in 2016.

Wewenang Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

1. Melakukan pengkajian ulang dan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian intern aktivitas bank tanpa campur tangan dan paksaan dari manajemen;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen, catatan, dan informasi yang berhubungan langsung dengan pekerjaan karyawan dan sumber-sumber lainnya yang dibutuhkan untuk melengkapi audit intern;
3. Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan operasional bank, dan semua tingkatan manajemen dan kepegawaian;
4. Memasuki atau menghubungi semua unit kerja dan akses ke semua program komputer dan system informasi yang digunakan bank;
5. Menentukan dan melakukan berbagai metode, cara, teknik, dan pendekatan audit yang diperlukan;
6. Memeriksa dan mengkaji semua prosedur dan

The authority of the Internal Audit Unit (SKAI)

1. *Review and evaluate the adequacy of internal control system of bank activities without interference and coercion from management;*
2. *Conduct an examination of all documents, records, and information relating directly to the employee's work and other resources required to complete the internal audit;*
3. *Conduct an examination of all bank operations, and all levels of management and staffing;*
4. *Entering or contacting all work units and access to all computer programs and information systems used by the bank;*
5. *Determine and perform the necessary audit methods, means, techniques and approaches;*
6. *Review and review all management procedures and*

kebijakan manajemen terkait dengan objek yang diaudit;
7. Melakukan pemeriksaan terhadap hubungan dan perjanjian kerja sama dengan pihak lain;
8. Melaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit atas segala hambatan ataupun campur tangan dari pihak lain. Dan juga melaporkan segala permasalahan yang terjadi maupun yang akan timbul;
9. Melaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit atas setiap kegagalan manajemen dalam mengambil tindakan koreksi ataupun kegagalan dalam menindak lanjuti hasil audit;
10. Meminta bantuan tenaga ahli/profesional dari dalam ataupun luar bank;
11. Meminta bantuan personil dari berbagai divisi/ departemen/cabang dimana mereka melaksanakan tugas audit.

Tanggungjawab Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

1. Melakukan pengkajian/analisis untuk menentukan/ memastikan sejauh mana sistem pengendalian intern dapat dilaksanakan;
2. Melakukan review mengenai keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasi serta cara-cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan pelaporan informasi tersebut;
3. Melakukan review atas sistem yang telah disusun untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur, undang-undang dan peraturan -peraturan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap operasi dan pelaporan dan untuk menetapkan apakah perusahaan mematuhi system tersebut;
4. Memastikan kebenaran data dan informasi keuangan, usaha pengamanan harta, dan ketaatan terhadap prosedur dan kebijakan Direksi yang berlaku;
5. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan penggunaan sumber daya dan dana;
6. Meyakinkan bahwa prosedur dan kebijakan bank dan perjanjian kerja sama dengan pihak lain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Memberikan masukan dan informasi yang objektif terkait dengan hasil pemeriksaan;
8. Menjaga kerahasiaan data dan informasi hasil pemeriksaan hingga dipublikasikan oleh manajemen;

policies related to the object being audited;

7. *Conduct an examination of relations and cooperation agreements with other parties;*
8. *Report to the President Director, the Board of Commissioners, and the Audit Committee for any obstacles or interference from other parties. And also report any problems that occur or that will arise;*

9. *Report to the President Director, the Board of Commissioners, and the Audit Committee for any failure of management to take corrective action or failure to follow up the audit result;*

10. *Requests expert / professional assistance from inside or outside the bank;*
11. *Ask for personal assistance from various divisions / departments / branches where they perform the audit task.*

Responsibilities of Internal Audit Unit (SKAI)

1. *Conduct an assessment / analysis to determine / confirm the extent to which the internal control system can be implemented;*
2. *Reviewing the reliability and integrity of financial and operational information and the means used to identify, measure, classify and report such information;*

3. *Reviewing the system that has been developed to ensure compliance with policies, plans, procedures, laws and regulations that have a significant impact on operations and reporting and to determine whether the company complies with the system;*

4. *Ensure the veracity of financial data and information, security of assets, and compliance with applicable Board of Directors' procedures and policies;*

5. *Identify all possibilities to improve and improve the efficiency, effectiveness, and economics of the use of resources and funds;*

6. *Ensure that bank procedures and policies and agreements with other parties are not contrary to applicable laws and regulations;*

7. *Provide objective input and information related to the results of the examination;*
8. *Maintain the confidentiality of data and information on the results of the examination until published by management;*

9. Mereview dan memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh manajemen dalam menanggapi hasil pemeriksaan dan rekomendasi, baik hasil pemeriksaan Auditor Intern maupun Auditor Ekstern;
10. Menyusun standar kinerja fungsi audit intern serta pemutakhirannya dan secara konsisten membantu bank dengan menggunakan standar tersebut;
11. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit kepada Otoritas Jasa Keuangan pada setiap semesternya dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
12. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan permasalahan yang cukup signifikan dan mempengaruhi kelangsungan hidup bank, tanpa menunggu selesainya pelaksanaan audit intern;
13. Melakukan kegiatan konsultasi kepada manajemen terkait dengan proyek-proyek khusus dan melakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan permintaan manajemen.

9. Review and monitor the implementation of follow-up by management in response to the results of the examination and recommendation, whether the results of the Internal Auditor or External Auditor;
10. Prepare the performance standards of the internal audit function and its updating and consistently assist the bank by using such standards;
11. Submit implementation reports and audit results to the Financial Services Authority in each semester by obtaining prior approval from the President Director, Board of Commissioners, and the Audit Committee;

12. Submit reports to the President Director, Board of Commissioners, Audit Committee and Bank Indonesia / Financial Services Authority, if significant problems are found and affect the survival of the bank, without waiting for the completion of the internal audit;

13. Conducting consulting activities to management related to specific projects and perform special inspection in accordance with the request of management.

Komposisi dan Kualifikasi Pegawai SKAI

SKAI terus berupaya untuk memenuhi dan menyediakan auditor yang memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risiko baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang. Pemenuhan sumber daya yang berkompeten dilakukan dengan menetapkan kualifikasi/ kompetensi yang diperlukan dalam proses rekrutmen pegawai SKAI secara berkala. Untuk meningkatkan kualitas SDM dilakukan melalui pendidikan, pelatihan & program sertifikasi, mengikutk sertakan dalam seminar – seminar terkait audit dan fraud sehingga dapat meningkatkan kompetensi para auditor yang mencakup *knowledge* (pengetahuan), *skills* (keterampilan), dan *attitude* (sikap kerja).

Sepanjang tahun 2017 SKAI didukung dengan total pegawai sebanyak 31 anggota termasuk Kepala SKAI, dengan jenjang jabatan, pengalaman, pendidikan, usia dan kualifikasi/ sertifikasi yang beragam.

Composition and Qualification of SKAI Staff

SKAI continuously strives to fulfill and provide auditors who have the competence and integrity in accordance with the needs and risk levels of both the Head Office and the Branch Offices. The fulfillment of competent resources is made by determining the qualifications / competencies required in the recruitment process of SKAI staff periodically. To improve the quality of human resources through education, training and certification programs, engage in seminars related to audit and fraud so as to improve the competence of auditors that includes knowledge, skills, and attitude.

Throughout 2017, the SKAI is supported by a total of 31 members including the Head of SKAI, with various levels of position, experience, education, age and qualification / certification.

Komposisi Jumlah Pegawai *Number of Employees Composition*

JUMLAH PEGAWAI SKAI *SKAI NUMBER OF EMPLOYEES*			
No	Jabatan	Jumlah	*Position*
1	Kepala SKAI	1 Orang	*Head of SKAI*
2	*Quality Assurance*	2 Orang	*Quality Assurance*
3	Koordinator Teknis	4 Orang	*Technical Coordinator*
4	Kepala Departemen Pendukung Auditor	1 Orang	*Head of Auditor Supporting Department*
5	Senior Executive Auditor	2 Orang	*Senior Executive Auditor*
6	Senior Spesialis Auditor	3 Orang	*Senior Auditor Specialist*
7	Spesialis Auditor	2 Orang	*Auditor Specialist*
8	Senior Officer	5 Orang	*Senior Officer*
9	Staf Monitoring	2 Orang	*Staff Monitoring*
10	Officer	7 Orang	*Officer*
11	Pelaksana	2 Orang	*Executor*
Jumlah		**31 Orang**	**Total**

Jenjang Pendidikan Pegawai *Level of Staff Education*

JENJANG PENDIDIKAN PEGAWAI SKAI *SKAI EMPLOYEES EDUCATION*			
No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	*Educational level*
1	SMU/SMA	0	*Senior HIgh School*
2	Sarjana	28	*Bachelor*
3	Pasca Sarjana	3	*Postgraduate*
4	Doktor	0	*Doctor*
Jumlah		**31 Orang**	**Total**

Sertifikasi Profesi Pegawai SKAI *SKAI Employee Professional Certification*

SERTIFIKASI PROFESI PEGAWAI SKAI *SKAI EMPLOYEES CERTIFICATION*			
No	Sertifikasi	Jumlah	*Certification*
1	BSMR Level 1	5	*BSMR Level 1*
2	BSMR Level 2	4	*BSMR Level 2*
3	BSMR Level 3	11	*BSMR Level 3*
4	BSMR Level 4	4	*BSMR Level 4*
5	BSMR Level 5	0	*BSMR Level 5*
6	Internal Audit Dasar I	21	*Internal Audit Basis I*
7	Internal Audit Dasar II	3	*Internal Audit Basis II*
8	Internal Audit Lanjutan I	2	*Internal Audit Continuation I*
9	Internal Audit Lanjutan II	1	*Internal Audit Continue Ii*
10	CFE	1	*CFE*
11	QIA	2	*QIA*
12	Non Sertifikasi	2	*Non Certification*

Pengembangan Potensi & Kompetensi

Telah menjadi kebutuhan organisasi untuk mengembangkan potensi dan kompetensi jajarannya. Untuk Divisi SKAI, selama tahun 2017 Bank Papua telah memberikan kesempatan kepada anggota Divisi SKAI untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Auditor, diantaranya :

1. Sertifikasi Audit Intern TK Dasar 1.
2. Dasar-dasar pemeriksaan I.
3. Up Grading Petugas Pemeriksa Intern Bank.
4. Penilaian Kesehatan Bank Berbasis Risiko.
5. Akuntansi Perbankan, PSAK 50 &55 Revisi 2006.
6. *Business Process*, Sistem Informasi manajemen Audit (SIMA).
7. Kepatuhan, Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris Bacth I.
8. Pemeriksaan Intern/Audit, Audit Treasury.
9. Kepatuhan, Teknik Deteksi, Identifikasi,analisa fraud & *Money laundering*.
10. Perencanaan Karir, Asesment Potensi & Kompetensi Pegawai Calon pemimpin Divisi.
11. *Business Process*, Transformasi Bank Papua.
12. *Business Process*, Persiapan Pra Purnabakti Batcth I.
13. Manajemen Risiko, Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko.
14. Akuntansi Perbankan, PAPI 2008 & PSAK 55 Revisi Batch 1.

Pelaksanaan Kegiatan Audit

Standar Pelaksanaan

Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern Bank Papua berpedoman pada *Internal Audit Charter* yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2013. Efektivitas pelaksanaan fungsi SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Kaji ulang terakhir oleh pihak eksternal dilakukan pada tahun 2015 dan akan dilaksanakan lagi pada tahun 2018.

Ruang Lingkup Pelaksanaan

Ruang lingkup audit meliputi seluruh aktivitas operasional perbankan yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi menimbulkan risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya dengan baik kepentingan Bank Papua dan masyarakat meliputi risiko kredit, operasional, strategi, reputasi, hukum dan risiko lainnya. Meliputi kegiatan operasional segenap Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, *Payment Point*, Divisi *Corporate Secretary* dan Satuan Kerja lain di Kantor Pusat. Audit dititikberatkan pada sumber daya yang digunakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, termasuk efisiensi sumber daya, efektivitas pencapaian

Potential & Competence Development

It has become an organization's need to develop the potential and competence of its staff. To the Division of SKAI, during 2017 Bank Papua has given the opportunity to members of the SKAI Division to attend Auditor education and training, including:

1. *Internal Audit Certification of Primary Level 1.*
2. *Inspection basics I.*
3. *Up Grading of Bank Internal Auditors.*
4. *Risk-Based Bank Rating.*
5. *Accounting for Banking, PSAK 50 & 55 Revised 2006.*
6. *Business Process, Management Information System Audit (SIMA).*
7. *Compliance, Anti Money Laundering & Terrorist Financing Prevention Bacth I.*
8. *Internal Audit / Audit, Treasury Audit.*
9. *Compliance, Detection Technique, Identification, Fraud & Money laundering analysis.*
10. *Career Planning, Assessment of Potential & Competence of Candidate for Division Leaders.*
11. *Business Process, Transformation of Bank Papua.*
12. *Business Process,Pre-Retirement Preparation Batcth I.*
13. *Risk Management, Risk Management Certification Maintenance Program.*
14. *Accounting for Banking, PAPI 2008 & SFAS 55 Revised Batch 1.*

Implementation of Audit Activities

Implementation Standards

The activities of the Internal Audit Division are guided by the Internal Audit Charter signed by the President Director and approved by the Board of Commissioners as of December 31, 2013. The effectiveness of the implementation of the Internal Audit Unit and its compliance with the SPFAIB is reviewed by an independent external party at least once in 3 (three) years . The last review by external parties was conducted in 2012 and will be implemented again in 2016.

Scope of Implementation

The scope of the audit covers all banking operations that directly or indirectly potentially pose risks that are expected to affect the level of good implementation of the interests of Bank Papua and the community including loan risk, operations, strategy, reputation, law and other risks. Includes the operational activities of all Branch Offices, Sub-Branch Offices, Cash Offices, Payment Point, Corporate Secretary Division and other Work Units at Head Office. Audit is focused on the resources used to achieve the stated objectives, including resource efficiency, the effectiveness of target achievement and compliance with the prevailing regulations both internal and external. Internal Audit helps the organization achieve

target dan peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal. Audit Intern membantu organisasi mencapai tujuannya melalui aktivitas audit internal (*assurance dan consulting*) dan aktivitas investigasi.

1. *Assurance*
   Melakukan pengujian secara obyektif terhadap bukti-bukti dalam rangka menyediakan penilaian yang independen atas *internal control*, penerapan *risk management*, dan proses *governance* dalam organisasi.
2. *Consulting*
   Memberikan jasa advisory yang terkait dengan aktivitas auditee/unit kerja, dimana sifat dan ruang lingkupnya disepakati dengan auditee/unit kerja dan bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki *internal control*, penerapan *risk management*, dan proses *governance*, tanpa mengambil alih tanggungjawab operasional.
3. Investigasi
   Aktivitas pengumpulan bukti-bukti dengan menggunakan teknik Investigasi atas hasil analisa awal terhadap indikasi dan/atau fraud yang terjadi. Investigasi bertujuan untuk mengungkapkan modus operandi, penyebab, potensi kerugian, pelaku dan pihak lain yang terlibat. Investigasi mencakup perolehan bukti dan pernyataan, penulisan laporan, pemberian kesaksian atas temuan serta monitoring tindak lanjut yang diperlukan.

Metode Audit

SKAI menerapkan metode audit dengan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*), termasuk pemahaman yang lebih baik akan kuantitas manajemen, karakteristik bisnis dan risiko yang dihadapi bank, serta memastikan bahwa risiko-risiko telah diidentifikasi secara benar. Metode ini berfokus pada proses bisnis (*business process-focused*), dan dalam penilaian risiko dan pelaksanaan auditnya diarahkan pada area-area yang sangat menentukan kesuksesan bisnis obyek audit. Penerapan audit berbasis risiko bertujuan :

1. Meningkatkan nilai (*value*) yang diberikan kepada obyek audit, karena metodologi ini mencakup risiko bisnis utama;
2. Menghemat waktu pelaksanaan audit pada area-area yang berisiko rendah yang berdampak pada efisiensi bisnis utama;
3. Melakukan penilaian serta penelaahan terhadap risiko yang ada secara lebih menyeluruh dalam menjaga serta mengurangi risiko bank;
4. Menilai apakah temuan serta rekomendasi akan sejalan dengan tujuan utama bank (*corporate objectives*);
5. Memberikan kesempatan lebih besar dalam

its goals through internal audit activities (assurance and consulting) and investigative activities.

1. *Assurance*
   Conduct objective testing of evidence in order to provide independent assessments of internal control, implementation of risk management, and governance processes within the organization.
2. *Consulting*
   Providing advisory services related to audit activities / work units, where their nature and scope agree with the audit / work unit and aims to provide added value and improve internal control, the implementation of risk management, and governance process, without taking over operational responsibilities.
3. *Investigation*
   Evidence collection activities using Investigation techniques for initial analysis of indications and / or fraud. Investigations are aim to reveal the modus operandi, causes, potential losses, offenders and other parties involved. Investigations include obtaining evidence and statements, report writing, testimony of findings and follow-up monitoring as necessary.

Audit Method

SKAI applies audit methods using a risk-based audit approach, including a better understanding of the quantity of management, business characteristics and risks faced by banks, and ensuring that risks are correctly identified. This method focuses on business processes (focused process), and in risk assessment and implementation of the audit is directed to the areas that determine the business success of the audit object. The implementation of risk-based audit aims:

1. *Increase the value assigned to the audit object, as this methodology encompasses major business risks;*
2. *Saves the timing of the audit on low-risk areas that impact on key business efficiency;*
3. *Conduct a more comprehensive assessment and review of risks in maintaining and reducing bank risks;*
4. *Assess whether the findings and recommendations will be in line with the bank's objectives (corporate objectives);*
5. *Provide greater opportunities for benchmarking and*

melakukan kaji banding (*benchmarking*) dan menggunakan praktik teraik (*best practices*);
6. Memposisikan IAD sebagai agen perubahan bagi bank (*corporate change agent*);
7. Menjadikan IAD sebagai tempat pelatihan terbaik bagi pejabat Bank;
8. Menghindari terjadinya duplikasi pekerjaan/ overlap antara Auditor intern Auditor ekstern yang disebabkan kurangnya koordinasi dan berbedanya metodologi audit yang digunakan antara keduanya.

Pelaksanaan Audit

Ruang lingkup pekerjaan audit oleh SKAI mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan organisasi Perseroan. Pekerjaan audit tersebut dilakukan melalui pendekatan *risk-based* audit dengan melihat risiko yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia, yaitu: Risiko Kredit. Risiko Pasar, Risiko likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik dan Risiko Kepatuhan. Pelaksanaan audit dilakukan oleh tim Auditor dari Kantor Pusat yang ditugaskan ke kantor-kantor cabang beserta Auditor Cabang yang berada di Kantor Cabang. Pelaksanaan Audit dibedakan menjadi general audit dan special audit (audit pendalaman).

Cakupan Audit sepanjang tahun 2017 yang telah dilakukan meliputi kegiatan audit sebagai berikut :
1. Melakukan audit umum (general audit) pada :
   a. Kantor Cabang Wasior.
   b. Kantor Cabang Kasonaweja.
   c. Kantor Cabang Mulia.
   d. Kantor Cabang Keppi.
   e. Kantor Cabang Agats.
   f. Kantor Cabang Wagethe.
   g. Kantor Cabang Ilaga.
   h. Kantor Cabang Dekai.
   i. Kantor Cabang Marauke.
   j. Kantor Cabang Teminabuan.
   k. Kantor Cabang Aimas.
   l. Kantor Cabang Serui.
   m. Kantor Cabang Makasar.
   n. Kantor Cabang Abepura.
   o. Divisi Kredit.
   p. Divisi Teknologi Informasi.
   q. Divisi Sumber Daya Manusia.
   r. Divisi Akuntansi.
   s. Divisi Umum.
   t. Divisi Treasury & Internasional.
   u. Divisi Perencanaan & Pengembangan.
2. Melakukan audit Teknologi Informasi pada :
   a. Kantor Cabang Wasior.
   b. Kantor Cabang Mulia.
   c. Kantor Cabang Waghete.
   d. Kantor Cabang Marauke.
   e. Kantor Cabang Dekai.
   f. Kantor Cabang Teminabuan.
   g. Kantor Cabang Aimas

using best practices;

6. Position the IAD as a change agent for the bank (corporate change agent);
7. Make the IAD the best training place for Bank officials;

8. Avoiding duplication of work / overlap between Internal Auditor External auditor caused by lack of coordination and different audit methodology used between the two.

Implementation of Audit

The scope of audit work by SKAI covers all aspects and elements of the organization's activities. The audit work is conducted through a risk-based audit approach by looking at the risks referred to in Bank Indonesia Regulation, namely: Credit Risk. Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk and Compliance Risk. The audit is performed by the Auditor team from the Head Office assigned to branch offices along with the Branch Auditor located at the Branch Office. Audit implementation is divided into general audit and special audit (in-depth audit).

Audit coverage throughout 2017 that has been conducted includes the following audit activities:
1. Conduct a general audit (general audit) on:
   a. Wasior Branch Office.
   b. Kasonaweja Branch Office.
   c. Mulia Branch Office.
   d. Keppi Branch Office.
   e. Agats Branch Office.
   f. Wagethe Branch Office.
   g. Ilaga Branch Office.
   h. Dekai Branch Office.
   i. Marauke Branch Office.
   j. Teminabuan Branch Office.
   k. Aimas Branch Office.
   l. Serui Branch Office.
   m. Makassar Branch Office.
   n. Abepura Branch Office.
   o. Loan Division.
   p. Information Technology Division.
   q. Human Resources Division.
   r. Accounting Division.
   s. General Affair Division.
   t. Treasury & International Division.
   u. Planning & Development Division.
2. Conducting an Information Technology audit on:
   a. Wasior Branch Office.
   b. Mulia Branch Office.
   c. Waghete Branch Office.
   d. Marauke Branch Office.
   e. Dekai Branch Office.
   f. Teminabuan Branch Office.
   g. Aimas Branch Office.

Fungsi Audit Eksternal
External Audit Function

Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Untuk memastikan pelaksanaan efektifitas fungsi audit ekstern maka Bank telah memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. RUPS tahun 2016 memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris antara lain untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik sebagai auditor ekstern yang independen untuk memeriksa laporan keuangan Bank Papua tahun 2017;
2. Bank telah memberikan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan periode Januari sampai dengan Desember 2017 kepada Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit;
3. Proses pemilihannya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Bank.

Penunjukan Akuntan Publik

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Keuangan Bank Papua untuk tahun buku 2017 telah dilakukan oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Implementation of External Audit Function

To ensure the effectiveness of the external audit function, the Bank has complied with the provisions concerning the relationship between the Bank, Public Accounting Firm and the Financial Services Authority as stipulated in the Bank Indonesia provisions concerning Transparency of Bank Financial Condition by doing the following:

1. *The SGM of 2016 provides approval to the Board of Commissioners, among others, to appoint Public Accounting Firm as an independent external auditor to review the financial statements of Bank Papua in 2017;*
2. *The Bank has provided audit assignments to the Annual Financial Statements for the period of January to December 2017 to the Public Accounting Firm approved by the Board of Commissioners in accordance with the recommendations of the Audit Committee;*
3. *The voting process is conducted in accordance with the mechanism of procurement of goods and services applicable. In order to ensure the independence and quality of audit results, the designated External Auditor may not have a conflict of interest with the Bank.*

Appointment of Public Accountant

The appointment of a Public Accounting Firm to audit Bank Finance of Papua for the fiscal year 2017 has been undertaken by an independent, competent, professional and objective public accountant in accordance with the Standards of Professional Public Accountants, as well as the established work agreement and scope of

Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan serta selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, maka secara rutin dilakukan pertemuan-pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Bank Papua selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Akuntan Publik, Komite Audit dan Manajemen Bank Papua untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

the audit. In order for the audit process in accordance with the Standards Professional Accountant and the work agreement and the scope of the audit that has been established and completed in accordance with the target time set, then routinely conducted meetings that address some significant issues significant. Bank Papua always strives to improve communication between Public Accountant, Audit Committee and Management of Bank Papua to minimize the constraints that occur during the audit process.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi aspek-aspek :
1. Kapasitas KAP;
2. Legalitas perjanjian kerja;
3. Ruang lingkup audit;
4. Standar Profesional Akuntan Publik; dan
5. Komunikasi antara KAP dengan pihak terkait.

Berdasarkan kriteria tersebut, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace dan Karunawan yang telah memperoleh izin dari Departemen Keuangan dan terdaftar di Otoritas Pengawas Bank sebagai auditor eksternal untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank Papua untuk periode 31 Desember 2017. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan Bank direalisasikan melalui perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan antara pihak Bank Papua dengan Kantor Akuntan Publik.

Assignment of audits to Public Accountants and Firm has met the following aspects:
1. *Capacity of KAP;*
2. *Legality of employment agreement;*
3. *The scope of the audit;*
4. *Professional Standards of Certified Public Accountants;*
5. *Communication between KAP and related parties.*

Based on these criteria, the Board of Commissioners has appointed Public Accounting Hertanto, Grace dan Karunawan who have obtained permission from the Ministry of Finance and registered with the Supervisory Authority of the Bank as an external auditor to audit the financial statements of Bank Papua for the period of December 31, 2017. The appointment of Public Accountant Office in order to audit the Bank's Annual Financial Report is realized through the agreement work in accordance with the provisions between the parties of Bank Papua with the Public Accounting Firm.

Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Bank tepat waktu, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

The appointed Public Accounting Firm has submitted the audit result and management letter to the Bank on time, able to work independently, meet the professional standards of the public accountant and the work agreement and the scope of the audit.

Kantor Akuntan Publik Periode 5 Tahun Terakhir

Berikut disampaikan nama Akuntan Publik yang telah ditunjuk Bank Papua secara independen sebagai auditor ekstern untuk memeriksa laporan keuangan Bank Papua di 5 tahun terakhir :

Public Accounting Firm for the Last 5 Years

The following is the name of a Public Accountant who has been appointed by Bank Papua independently as an external auditor to review the financial statements of Bank Papua in the last 5 years:

KANTOR AKUNTAN PUBLIK PERIODE 5 TAHUN TERAKHIR
PUBLIC ACCOUNTANT OFFICER FOR LAST 5 YEARS

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik	Opini	
2017	Hertanto, Grace dan Karunawan	Wajar Tanpa Pengecualian	*Fairly in All Material Respect*
2016	Prof. Dr. H. Tb. Hasanuddin, M.Sc & Rekan	Wajar Tanpa Pengecualian	*Fairly in All Material Respect*
2015	Prof. Dr. H. TB Hasanuddin M.Sc & Rekan	Wajar Tanpa Pengecualian	*Fairly in All Material Respect*
2014	Hertanto, Sidik & Rekan	Wajar Tanpa Pengecualian	*Fairly in All Material Respect*
2013	Hertanto, Sidik & Rekan	Wajar Tanpa Pengecualian	*Fairly in All Material Respect*

Kantor auditor yang ditunjuk Bank Papua tidak memberikan jasa lain kecuali jasa audit atas Laporan Keuangan Bank Papua.

The Office of the auditor appointed by Bank Papua does not provide any other services, except the audit services of the Financial Report of Bank Papua.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Ekstern dan Kepatuhan Bank

Dalam upaya untuk memenuhi prinsip transparasi dan akuntabilitas serta memenuhi ketentuan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, maka diperlukan hasil audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan oleh pihak independen, yaitu Kantor Akuntan Publik. Hasil audit atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada OJK.

Effectiveness of External Audit and Bank Compliance Implementation

In an effort to fulfill the principles of transparency and accountability and comply with the provisions of the Articles of Association of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, audit results of financial statements performed by independent parties, ie Public Accounting Firm are required. The results of the audit of the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2017 will then be submitted to the OJK.

Dasar Pelaksanaan transparansi laporan keuangan untuk tahun buku 2017 yang berdasarkan pada ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/ POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Basic Implementation of transparency of financial statements for fiscal year 2017 based on the provisions of Bank Indonesia and the Financial Services Authority is as follows:

1. *Regulation of the Financial Services Authority No. 6 / POJK.03 / 2015 dated March 31, 2015 concerning Transparency and Publication of Bank Reports.*
2. *Regulation of the Financial Services Authority No. 32 / POJK.03 / 2016 dated 8 August 2016 on Amendment to the Rule of the Financial Services Authority Number 6 / POJK.03 / 2015 on Transparency and Publication of Bank Reports.*
3. *Regulation of the Financial Services Authority Number 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of GCG Banks.*

Tindak Lanjut Temuan Auditor dan Pemeriksa Eksternal

Secara periodik Bank Papua diawasi dan diperiksa oleh institusi eksternal baik dari pemerintah maupun non-pemerintah yang secara independen memberikan rekomendasi perbaikan untuk dapat ditindak lanjuti. Institusi yang melakukan pemeriksaan berkala di Bank Papua adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk secara independen. Tindak lanjut dari hasil pemeriksaan pihak eksternal pada tahun 2017 tersebut dimonitor oleh SKAI dan Divisi Kepatuhan, yang kemudian dilaporkan kepada Direksi untuk disampaikan kepada pihak pemeriksa sebagai progress perbaikan yang sudah dilakukan sesuai rekomendasi dan komitmen yang disepakati.

Follow-up on Auditor Findings and External Inspector

Periodically, the Bank Papua is supervised and examined by external institutions from both government and non-governmental organizations who independently provide recommendations for improvements to be followed up. Institutions that conduct periodic checks at Bank Papua are the Financial Services Authority (OJK), the Supreme Audit Agency (BPK), and the independently appointed independent Public Accounting Firm. The follow-up of the external audit results in 2017 is monitored by the SKAI and the Compliance Division, which are then reported to the Board of Directors to be submitted to the examiner as progress improvements are made according to the agreed recommendations and commitments.

Sampai dengan akhir Desember 2017, Bank memiliki 232 temuan dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut :

As of December 2017, the Bank has 232 findings with the following completion rates:

REKAPITULASI TEMUAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA PER 31 DESEMBER 2017
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUARECAPITULATION FINDINGS PER 31 DECEMBER 2017

No	NAMA LEMBAGA YANG MEMERIKSA	JUMLAH TEMUAN	STATUS TINDAK LANJUT							
			STL		DTL		BTL		TDTL	
1	OTORITAS JASA KEUANGAN	222	89	40%	7	3%	126	57%	0	0%
2	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	10	2	23%	0	0%	8	78%	0	0%
	TOTAL	**232**	**91**	**39%**	**7**	**3%**	**134**	**58%**	**0**	**0%**

Fungsi Manajemen Risiko
Risk Management Function

Risk Management atau manajemen risiko adalah suatu aktivitas untuk mengendalikan risiko dengan melalui suatu proses untuk identifikasi, pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan *risk management*, kerugian yang mungkin terjadi diharapkan dapat dimitigasi dan diminimalisir dengan baik.

Risk Management is an activity to control risk through a process for identification, measurement, evaluation and monitoring of the portfolio to estimate potential losses that may occur. So with risk management, possible losses are expected to be mitigated and minimized as well.

Penerapan sistem Manajemen Risiko Bank saat ini mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 18/ POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 / SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, serta secara konsisten menselaraskan program kerja bank sejalan dengan program-program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang diinisiasikan oleh Bank Indonesia/ OJK dalam upaya terwujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien. Tuntutan perbankan internasional melalui BIS (*Bank for Internasional Setlement*) untuk menyerapkan "*25 base core principles*" secara tidak langsung mendorong bank-bank untuk segera menerapkan konsep manajemen risiko dalam menjalankan usahanya. Semakin kompleksnya produk dan aktifitas bank maka risiko yang dihadapi Bank akan semakin meningkat. Peningkatan risiko tersebut perlu diimbangi dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai. Sehingga peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko bank akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank berbasis risiko.

The current implementation of the Bank's Risk Management system refers to OJK Regulation No. 18 / POJK.03 / 2016 dated March 16, 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks and Circular of the Financial Services Authority Number 34 /SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 concerning Implementation Risk Management for Commercial Banks consistently aligning the bank's work program in line with the Indonesian Banking Architecture Program (API) initiated by Bank Indonesia / OJK in an effort to realize a sound, strong and efficient banking system. International banking demands through BIS (Bank for International) Setlement) to adopt "25 basel core principles" indirectly encourage banks to immediately apply the concept of risk management in running their business. The more complex the products and activities of the bank, the risks faced by the Bank will increase. Such risks need to be balanced with the quality of the application of adequate risk management. Thus, improving the quality of bank risk management implementation will support the effectiveness of risk-based bank supervision framework.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Tata kelola risiko Bank yang berlandaskan prinsip tata kelola Bank yang baik terwujud dari terlibatnya seluruh organ Bank dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Bank, baik Komisaris dan Komite Pemantau Risiko maupun Direksi dan Komite Manajemen Risiko.

Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko dan Direksi melalui rapat Komite Manajemen Risiko bertanggungjawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan skala usaha Bank. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses

Organizational Structure of Risk Management

Bank risk management based on GCG principles is the result of involvement of all Bank organs in the management of risk management. This can be seen from the composition of the Bank's risk management organization, both the BOC and the Risk Oversight Committee as well as the BOD and the Risk Management Committee.

The BOC through the meetings of the Risk Oversight Committee and the BOD through the meetings of the Risk Management Committee is responsible for ensuring that the implementation of Risk Management is adequate in accordance with Bank Risk characteristics, complexity and risk profile. BOC and BOD takes an active role in the

manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Bank melalui Kualitas Penerapan Manajemen Risiko meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko dan kecukupan sistem informasi manajemen serta kecukupan sistem pengendalian internal.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko (KMR) bertugas dan bertanggungjawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pedoman kebijakan manajemen risiko Bank (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko *Likuiditas*, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi), melakukan evaluasi kesesuaian antara pedoman kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat dengan Divisi Manajemen Risiko secara berkala membahas isu-isu terkini, Profil Risiko Triwulanan Bank, Tingkat Kesehatan Bank dan hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko Bank.

Risk Oversight Committee

The Risk Oversight Committee is responsible for providing recommendations to the BOC by evaluating the Bank's risk management policy guidelines (Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Strategic Risk, Compliance Risk and Reputation Risk) the suitability between the Bank's risk management policy guidelines and their implementation and monitoring and evaluating the performance of the Risk Management Committee's tasks. In performing its duties and responsibilities, the Risk Oversight Committee holds meetings with the Risk Management Division periodically discusses current issues, the Bank's Quarterly Risk Profile, Bank Sound Rating and matters relating to risk management of the Bank.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) berperan aktif dalam memberikan rekomendasi terkait risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. KMR terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/ aktivitas baru sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan.

Komite Manajemen Risiko (RMR) beranggotakan Direksi dan Kepala Divisi yang merupakan Anggota Tetap maupun Anggota Tidak Tetap, yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko yang efektif pada Bank Papua;
2. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;
3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko;
4. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
5. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku mengenai penerapan Manajemen Risiko;

Risk Management Committee

The Risk Management Committee (RMR) plays an active role in providing recommendations regarding the risks inherent in the policies to be determined by the BOD as well as providing an evaluation of the provisions deemed less appropriate to the latest developments and adjustments are required. RMR is actively involved in conducting risk assessments inherent in each new product and / or service / activity so that the Bank can perform the necessary mitigation measures.

The Risk Management Committee (RMR) consists of the BOD and Head of Division who are Permanent Members as well as Non-Permanent Members with the following duties and responsibilities:

1. *Responsible for the effective implementation of Risk Management at Bank Papua;*
2. *Develop Risk Management policies and strategies;*
3. *Responsible for the implementation of Risk Management policy and risk exposure;*
4. *Establish the necessary measures to ensure that the Bank has complied with all regulations of Bank Indonesia / Financial Services Authority and other laws and regulations related to the application of Risk Management;*
5. *Monitor and maintain that the Bank's business activities do not deviate from the applicable provisions on the application of Risk Management;*

6. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan yang menyangkut penerapan Manajemen Risiko;
7. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal;
8. Berwenang dan bertanggungjawab terhadap perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala, sebagaimana diatur/ dipersyaratkan di dalam Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
9. Mengembangkan budaya risiko pada seluruh jenjang organisasi.

6. Monitor and maintain the Bank's compliance with all agreements and commitments made by the Bank to the Financial Services Authority concerning the application of Risk Management;
7. Establish matters related to business decisions that deviate from normal procedures;
8. Authorized and responsible for the improvement or completion of the implementation of risk management carried out on a regular basis, as regulated / required in the Risk Management Implementation Standard Guidelines for Commercial Banks;

9. Develop a risk culture at all levels of the organization.

Divisi Manajemen Risiko

Organisasi dalam pengelolaan manajemen risiko di Bank Papua dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab dalam pengelolaan risiko, yaitu Direktur Kepatuhan. Untuk membantu Direktur Kepatuhan, Bank telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yaitu Divisi Manajemen Risiko yang bertanggungjawab kepada Direksi , untuk melakukan fungsi evaluasi pengelolaan risiko secara independen.

Risk Management Division

The organization in risk management at Bank Papua is led by a Director who is responsible for risk management, namely the Compliance Director. To assist the Compliance Director, the Bank has established a Risk Management Work Unit (SKMR), the Risk Management Division that is responsible to the BOD, to perform an independent risk management evaluation function.

Profil Kepala Divisi Manajemen Risiko
Head of Risk Management Profile

Imran, SE
Kepala Divisi
Head of Division

51 tahun. Lahir di Mario pada tanggal 23 Januari 1966. Bekerja di Bank Papua sejak tahun 1991. Menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko sejak 12 Juni 2017 berdasarkan SK Direksi Nomor: 179/KEPEG/V/2017 pada tanggal 19 Mei 2017 tentang Ahli Tugas Pegawai. Pendidikan Sarjana Ekonomi Umum di Univesitas Hasanuddin Makassar tahun 1990.
Jenjang jabatan dan pendidikan yang dilalui adalah : Staf pelaksana kredit, Acc. Officer Kredit Umum Biro Kredit, Staf Analis Kredit Umum, Staf Pelaksana Kredit, Kepala Seksi Akuntansi, Assitance Finance Officer Kel. Akuntansi, Kepala Seksi Akuntansi, Kepala Unit Pembinaan Kredit, Kepala Departemen Pendukung Operasi Cabang Utama Jayapura, Kepala Departemen Program PER Kantor Pusat, Kepala Departemen Pengembangan Produk, jasa dan layanan lainnya Kantor Pusat, Kepala Cabang Mulia, Kepala Administrasi Infrastruktur dan Fasilitas Kantor Pusat, Kepala Departemen Pengadaan Kantor Pusat dan terakhir sejak bulan Juni 2017 sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko sampai dengan saat ini.

51 years old. Born in Mario on 23 January 1966. Has worked at Bank Papua since 1991. Occupied as Head of Risk Management Division since June 12, 2017 based on Decree of the BOD Number: 179 / KEPEG / V / 2017 on May 19, 2017 regarding Employee Duties. Education Bachelor of Public Economics at Hasanuddin University Makassar in 1990.
The level of position and education that is passed are: Staff implementing loan, Acc. Loan General Officer Loan Bureau, General Loan Analyst Staff, Loan Implementing Staff, Accounting Section Chief, Assitance Finance Officer Kel. Accounting, Accounting Section Head, Head of Loan Development Unit, Head of Operations Supporting Branch of Jayapura, Head of Program Department PER Head Office, Head of Product Development Department, Other Services and Services Head Office, Branch Manager Mulia, Head of Infrastructure Administration and Facilities Head Office, Head of Procurement Department Head Office and last since June 2017 as Head of Risk Management Division until now.

Tugas dan Tanggungjawab Divisi Manajemen Risiko

Tugas dan tanggungjawab Divisi Manajemen Risiko yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi ;
2. Melakukan pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing*;
3. Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap prosesManajemen Risiko;
4. Melakukan pengkajian usulan aktivitas dan/atau produk baru;
5. Melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern (*internal model*);
6. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan/atau kepada komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
7. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus dan komite Manajemen Risiko secara berkala.
8. Melakukan *Stress testing* dan Mengetahui dampak perubahan kondisi eksternal yang cukup signifikasn terhadap kinerja dan permodalan bank

Duties and Responsibilities of the Risk Management Division

Duties and responsibilities of the Risk Management Division, are among others as follows:

1. *To monitor the implementation of a Risk Management strategy approved by the BOD;*
2. *Monitoring Composite positions, per type of Risk, and per type of functional activities and perform stress testing;*
3. *Conduct periodic reviews of the Risk Management process;*
4. *Reviewing proposals of new activities and / or products;*
5. *Evaluate the accuracy of the model and the validity of the data used to measure the Risk, for the Bank using the internal model model;*
6. *Provide recommendations to the operational risk-taking unit and / or to the Risk Management Committee, in accordance with their respective authority; and*
7. *Prepare and submit Risk profile reports to specially designated directors or directors and the Risk Management Committee on a regular basis*

.

8. *Conducting Stress testing and Knowing the impact of changes in external conditions that are significant to the performance and capital of banks*

Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko Bank Papua bertujuan untuk mendukung Bank dalam mencapai pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, sehingga dapat lebih mengoptimalkan *shareholder value*. Pendekatan yang dilakukan dalam mendukung penerapan manajemen risiko Bank Papua secara efektif adalah dengan melakukan pendekatan komprehensif untuk mengelola risiko-risiko Bank secara menyeluruh, meningkatkan kinerja dalam mengelola ketidakpastian, meminimalisir ancaman dan memaksimalkan peluang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip manajemen risiko paling kurang mencakup 4 pilar, yaitu :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi ;
   Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko diantaranya melalui penetapan struktur organisasi yang mencerminkan secara jelas mengenai batas wewenang, tanggungjawab dan fungsi, serta independensi antar unit bisnis dengan unit kerja manajemen risiko, melakukan persetujuan dan peninjauan berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko yang mencakup tingkat toleransi

Implementation of Risk Management

The implementation of Bank Papua risk management aims to support the Bank in achieving healthy and sustainable growth so as to further optimize shareholder value. The approach taken to support the effective implementation of risk management of Bank Papua is to undertake a comprehensive approach to manage the Bank's risks comprehensively, improve performance in managing uncertainty, minimize threats and maximize opportunities without neglecting risk management principles at least covering four pillars, that is :

1. *Active supervision of the BOC and the BOD;*
   The BOC and the BOD are responsible for the effectiveness of Risk Management implementation through the establishment of an organizational structure that clearly reflects the limits of authority, responsibility and function, and the independence of business units with risk management work units, approves and regular reviews of risk strategies and policies which includes the Bank's level of tolerance for risk and economic cycles, is responsible for

Bank terhadap risiko dan siklus perekonomian, bertanggungjawab untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan risiko dengan cara menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko, memantau dan mengendalikan risiko dan mengevaluasi penerapan kebijakan dan strategi, dan membentuk komite-komite yang bertujuan untuk yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi guna mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
   Penerapan Manajemen Risiko didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Kebijakan Manajemen Risiko disusun sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha Bank, strategi bisnis dan *risk appetite* Bank. Dalam rangka pengendalian Risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki Bank harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko dan dilengkapi dengan toleransi Risiko dan limit Risiko. Penetapan toleransi Risiko dan limit Risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan strategi Bank secara keseluruhan.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko;
   Pedoman kebijakan pengendalian risiko telah memberikan acuan proses identifikasi dan pengukuran risiko secara memadai. Bank telah mengukur dan memantau secara rutin dengan mempertimbangkan berbagai komponen risiko dan telah disusun secara akurat dan disampaikan tepat waktu kepada Komite Manajemen Risiko/Direksi . Dalam proses penerapan manajemen risiko di atas telah didukung oleh Sistem informasi Manajemen Risiko yang merupakan bagian dari sistem informasi manajemen sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh;
   Bank memiliki struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggungjawab Satuan Kerja yang menangani manajemen risiko. Di dalam organisasi yang dimiliki, terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara Unit Kerja Operasional (*bussines unit*) dengan Satuan Kerja yang melaksanakan pengendalian. Hanya pejabat yang ditunjuk saja yang memiliki wewenang untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko. Kerangka pengelolaan risiko dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kemampuannya berfungsi sesuai

implementing risk strategies and policies by outlining and communicating risk policies and strategies, monitoring and controlling risks and evaluating the application of policies and strategies, and establishing committees aimed at assisting the implementation of the duties of the BOC and the BOD to support the effective implementation of Risk Management.

2. *Adequacy of policies, procedures and limit setting;*
   The implementation of Risk Management is supported by a framework that includes Risk Management policies and procedures and defined risk limits clearly in line with the Bank's vision, mission and business strategy. Risk Management Policy is prepared in accordance with the characteristics, activities and complexity of the Bank's business activities, business strategy and risk appetite. In order to effectively control the Risk, the policies and procedures of the Bank shall be based on Risk Management strategy and complemented by Risk tolerance and Risk Limit. Determination of Risk tolerance and Risk Limit is done by taking into account the level of Risk to be taken and the Bank's overall strategy.

3. *Adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes and Risk Management information system;*
   Risk control policy guidelines have provided an adequate reference process of risk identification and measurement. The Bank has measured and monitored regularly taking into account various risk components and has been prepared accurately and submitted on time to the Risk Management Committee / BOD. In the process of applying the above risk management has been supported by Risk Management Information System, which is part of management information system as needed in the framework of effective Risk Management implementation.

4. *Comprehensive internal control system;*
   The Bank has an organizational structure that clearly describes the limits of authority and responsibility of the Working Unit managing risk management. Within the organization, there is a clear separation of functions between the Operational Unit (bussiness unit) and the Working Unit exercising control. Only designated officers have the authority to access, modify and modify the risk measurement model. The risk management framework is evaluated periodically to ensure that its capabilities function according to the established standards and monitor the follow-up findings of Bank Indonesia / OJK audit findings.

standar yang ditetapkan dan memantau tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jenis Risiko Yang Dihadapi Bank

Terdapat 8 jenis risiko yang dihadapi Bank dan harus dikelola dengan baik. Kedelapan jenis risiko tersebut diantaranya *inherent risk* yang meliputi: risiko kredit, risiko *likuiditas*, risiko pasar, risiko operasional, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko reputasi.

Berikut penjelasan mengenai risiko-risiko tersebut dan upaya pengelolaannya.

Risiko Kredit

Risiko Kredit merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Untuk mengantisipasi terekseposnya Risiko Kredit, Bank menerapkan kebijakan *four eyes principle* (pemisahan fungsi) untuk meningkatkan keandalan sistem pengendalian intern dalam Penerapan Manajemen Risiko Bank, khususnya untuk Risiko Kredit.

Risiko Pasar

Risiko Pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Dalam melakukan pengukuran risiko pasar, Bank menggunakan perhitungan Standard Method untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk Risiko Pasar. Risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dikelola dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia/OJK.

Risiko *Likuiditas*

Risiko *Likuiditas* merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko *Likuiditas* dapat disebabkan antara lain oleh :

1. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
2. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yangberasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Type of Risk Faced by Bank

There are 8 types of risks faced by the Bank and must be managed properly. These eight types of risk are called inherent risks which include: loan risk, liquidity risk, market risk, operational risk, strategic risk, compliance risk, legal risk and reputation risk.

The following explains the risks and management efforts.

Credit Risk

Credit Risk is a risk that occurs due to failure of the debtor and / or other party in fulfilling the obligation to the Bank. To anticipate the exposure of Credit Risk, the Bank implements a four eyes principle policy to improve the reliability of the internal control system in Bank Risk Management Implementation, especially for Credit Risk.

Market Risk

Market Risk represents a risk on the balance sheet position and administrative account, including derivative transaction, due to overall changes of market condition, including risk of change of the option price. In measuring market risk, the Bank uses Standard Method calculations to calculate the Minimum Capital Requirement (KPMM) for Market Risk. Exchange rate risk arising from fluctuations in exchange rates is managed by maintaining a Net Open Position in accordance with Bank Indonesia / OJK regulations.

Liquidity Risk

Liquidity Risk is a risk due to the inability of the Bank to meet the obligations due from sources of cash flow and / or of high quality liquid assets that can be mortgaged, without disrupting the activities and financial condition of the Bank. The inability to obtain sources of cash flow funding thus incurring Liquidity Risk can be caused by among others by:

1. *Inability to generate cash flows arising from productive assets or derived from the sale of assets, including liquid assets; and / or*
2. *Inability to generate cash flow derived from fund raising, Bank transactions, and borrowings received.*

Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank dalam rangka menghitung kebutuhan modal minimum untuk Risiko Operasional, Bank menerapkan metode Pendekatan Indikator Dasar (Basic Indicator Approach), sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar yang merupakan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional Dihitung dengan Pendekatan Indikator Dasar (PID).

Operational Risk

Operational risk is a risk due to the inadequacy and / or malfunction of internal processes, human error, system failure, and / or the presence of external events affecting the Bank's operations. In order to calculate the minimum capital requirement for Operational Risk, the Bank applies the Basic Indicator Approach method, in accordance with the provisions set forth in Circular Letter of the Financial Services Authority Number 24 /SEOJK.03/2016 dated July 14, 2016 regarding Risk Weighted Assets Calculations for Operational Risk Using the Basic Indicator Approach, which is an amendment to the Bank Circular Indonesia Number 11/3 / DPNP dated January 27, 2009 concerning Risk Weighted Assets Calculations (ATMR) for Operational Risk Calculated by Basic Indicator Approach (PID).

Risiko Hukum

Risiko Hukum merupakan risiko akibat tuntutan dan/atau kelemahan aspek yuridis dimana Risiko Hukum dapat bersumber dari perikatan yang dilakukan oleh Bank. Bank melaksanakan identifikasi Risiko Hukum berdasarkan faktor-faktor risiko yang meliputi tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis. Pengukuran Risiko Hukum dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko bersama-sama dengan Divisi Hukum berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Legal Risk

Legal Risk is a risk due to the demands and / or weaknesses of the juridical aspects in which Legal Risk may originate from the engagement by the Bank. The Bank carries out the identification of Legal Risk based on risk factors that include lawsuits and the existence of juridical aspects of weakness. Legal Risk Measurement is carried out by the Risk Management Division together with the Legal Division, based on an evaluation report on the analysis of individual legal cases against contingent liabilities arising from legal claims.

Risiko Stratejik

Risiko Stratejik merupakan risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko stratejik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko stratejik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi serta operasional dan jasa melalui *business* plan yang disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Strategic Risk

Strategic Risk is a risk due to the Bank's inaccuracy in the taking and / or execution of a strategic decision and failure in anticipating changes in the business environment. Strategic risk identification is based on strategic risk factors in certain functional activities, such as lending, treasury and investment activities and services through a business plan developed by the Strategic Planning Division as a description of the General Policy of the BOD.

Risiko Kepatuhan

Dalam mengidentifikasi risiko kepatuhan, Divisi Kepatuhan membuat daftar peraturan dan hukum yang berlaku pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan ketentuan dari Bank Indonesia/OJK dan pihak eksternal lainnya yang berlaku. Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi

Compliance Risk

In identifying compliance risks, the Compliance Division makes a list of laws and regulations applicable to all work units in accordance with the provisions of Bank Indonesia / OJK and other applicable external parties. Measurement of compliance risk is performed to measure

kerugian yang disebabkan oeh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan ini termasuk me-review ketentuan Bank dan keluhan nasabah yang pernah diterima Bank. Direktur Kepatuhan dengan dibantu oleh Divisi Kepatuhan secara teratur meninjau kembali aspek kepatuhan Bank, dan khususnya transaksi-transaksi yang mencurigakan atau yang tidak wajar. Bank Papua sepenuhnya mematuhi undang-undang anti pencucian uang dan kebijakan mengenalnasabah (*know your customer* policy) yang berlaku di Indonesia.

potential losses caused by non compliance and inability of the Bank to comply with applicable regulations. The amount of compliance risk is estimated based on the Bank's ability to meet all the rules in the past and future. These activities include reviewing Bank regulations and customer complaints that have been received by the Bank. The Compliance Director with the assistance of the Compliance Division regularly reviews the Bank's compliance aspects, and in particular suspicious or unusual transactions. The Bank Papua fully complies with the anti-money laundering laws and know-your-customer policies applicable in Indonesia.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari berbagai aktivitas diantaranya kejadian-kejadian yang merugikan reputasi Bank (misal pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis dan keluhan nasabah) serta hal-hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi, misalnya kelemahan pada tata kelola perusahaan, budaya perusahaan dan praktik bisnis Bank. Salah satu upaya pengendalian risiko reputasi adalah senantiasa menjaga kepuasan nasabah dengan cara melakukan penilaian secara berkala terhadap service level yang dilakukan oleh frontliner di setiap kantor cabang.

Reputation Risk

Reputation risk is a risk caused by a decrease in the level of stakeholder confidence sourced from various activities including events adverse to the Bank's reputation (eg, negative news in the mass media, violations of business ethics and customer complaints) as well as other matters that may cause reputational risk, for example weaknesses on corporate governance, corporate culture and Bank business practices. One effort to control reputation risk is to always maintain customer satisfaction by way of periodic assessments of service level performed by frontliner in every branch office.

Upaya Untuk Mengelola Risiko

Sebagai bank yang memiliki visi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah berfokus pada pemberian kredit pada sektor Konsumer dan UMKM, dengan aset yang didominasi oleh kredit mikro dan kecil yang sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis seperti inflasi dan persaingan dengan produk dari Bank lain. Upaya dalam meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan pengelolaan risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan dan tetap memperhatikan prinsip tata kelola Bank yang baik.

Efforts To Manage Risk

As a bank that has a vision of encouraging regional economic growth and participating in developing small and medium enterprises focuses on lending to the consumer and SME sectors, with assets dominated by micro and small loans that are heavily influenced by changes in business climate such as inflation and competition with products from Another bank. Efforts to minimize the negative impacts are based on prudent risk management to ensure sound and sustainable growth of Bank performance while maintaining Bank's GCG principles.

Pengelolaan Risiko Kredit

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, Bank telah mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar sebagai perubahan

Credit Risk Management

As a follow up to the implementation of Pillar 1 Basel II, the Bank has implemented loan risk measurement using the Standardized Approach as stipulated in the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 42 / SEOJK.03/2016 dated September 28, 2016 regarding Guidelines on Weighted Risk Asset Calculation for Credit Risk Using the Standard Approach as an amendment to the Circular Letter No. SE. 13/6 / DPNP dated February 18,

atas SE BI No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar. Bank secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan untuk kredit Bank dan pembiayaan sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit. Pemantauan risiko kredit di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko kredit terhadap limit risiko kredit.

2011 concerning Risk Weighted Asset Calculation (RWA) Guidelines for Credit Risk using the Standard Approach. The Bank regularly reviews and updates the Risk Management Policy Guidelines as well as the Loan Policy Guidelines and Financing for Bank loan and financing as part of the risk assessment process. Credit Risk Exposure has been monitored since the loan granting process until the maturity of the loan. Monitoring loan risk includes evaluating loan risk exposure to loan risk limits.

Pengelolaan Risiko Pasar

Pengelolaan risiko pasar pada Bank secara umum ditujukan untuk meminimalkan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Bank. Sesuai dengan regulasi dan mengingat bank tidak memiliki konsolidasi dengan anak perusahaan, maka pengelolaan risiko pasar hanya mencakup pengelolaan risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Risiko suku bunga yang dikelola oleh Bank sebagian besar berasal dari posisi *banking book* dan sebagian kecil berasal dari posisi *trading book*. Sedangkan risiko nilai tukar yang dikelola oleh bank hampir secara keseluruhan berasal dari posisi *banking book*.

Terkait dengan pengelolaan risiko pasar, Bank telah memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (*Assets and Liabilities Commmite* atau ALCO). Dalam hal ini, ALCO secara berkala membahas antara lain suku bunga dan pengelolaan risiko pasar pada Bank, terutama yang bersumber dari posisi *banking book*. Sebagai bagian dari pengelolaan risiko pasar, Bank melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pasar, yang dilakukan oleh unit bisnis dan/atau Divisi Manajemen Risiko. Identifikasi risiko pasar salah satunya dilakukan untuk setiap produk atau aktivitas yang termasuk dalam kategori produk atau aktivitas baru. Bank melakukan pengukuran risiko pasar dengan menggunakan metode standar sebagaimana yang diatur oleh regulator dan analisis sensitivitas. Pengukuran risiko pasar dengan metode standar ditujukan untuk menghitung Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) risiko pasar. Portofolio yang diperhitungkan dalam penentuan KPMM risiko pasar terdiri dari portofolio *trading book* untuk risiko suku bunga serta *portofolio trading book* dan *banking book* untuk risiko nilai tukar. Dalam rangka mengukur risiko suku bunga, analisis sensitivitas yang dilakukan oleh Bank ditujukan untuk mengukur dampak dari perubahan suku bunga pasar terhadap laba (rugi) dan ekuitas bank, dengan asumsi bahwa suku bunga pada kurva imbal hasil mengalami perubahan paralel.

Market Risk Management

The market risk management at the Bank is generally intended to minimize the negative impacts of changes in market conditions on Bank assets and capital. In accordance with the regulation and considering that banks have no consolidation with the subsidiaries, the management of market risk shall include the management of interest rate risk and exchange rate risk. The interest rate risk managed by the Bank is largely derived from the position of the banking book and a small portion derived from the trading book position. While the exchange rate risk managed by banks is almost entirely derived from the position of banking book.

In relation to market risk management, the Bank has an Asset and Liabilities Commmittee (ALCO) Committee. In this case, ALCO periodically discusses, among others, interest rates and market risk management at the Bank, especially those sourced from the banking book position. As part of market risk management, the Bank identifies, measures, monitors and controls on market risk, conducted by the business unit and / or Risk Management Division. One market risk identification is performed for each product or activity that is included in the new product activity or category. The Bank measures market risk using standard methods as regulated by the regulator and sensitivity analysis. Market risk measurement by standard method is intended to calculate the Capital Adequacy (KPMM) of market risk. The portfolio calculated in the determination of market risk KPMM consists of a trading book portfolio for interest rate risk and trading book and banking book portfolio for exchange rate risk. In order to measure interest rate risk, the sensitivity analysis undertaken by the Bank is intended to measure the impact of changes in market interest rates on the bank's profit (loss) and equity, assuming that the interest rate on the yield curve is parallel. In order to measure exchange rate risk, a sensitivity analysis conducted by the Bank to measure the impact of exchange rate changes on the Bank's profit (loss). In order to complement the market risk measurement by standard methods and sensitivity

Sedangkan dalam rangka mengukur risiko nilai tukar, analisis sensitivitas yang dilakukan oleh Bank untuk mengukur dampak perubahan nilai tukar terhadap laba (rugi) Bank. Guna melengkapi pengukuran risiko pasar dengan metode standar dan analisis sensitivitas, Bank melakukan *stress testing* guna menilai ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan suku bunga dan nilai tukar yang ekstrim, dengan skenario mengacu pada ketentuan regulator dan skenario internal bank.

analysis, the Bank conducts stress testing to assess the Bank's resilience in the face of extreme changes in interest rates and exchange rates, with scenarios referring to regulatory requirements and bank internal scenarios.

Dalam rangka mengendalikan atau membatasi eksposur risiko pasar, Bank melakukan pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.

In order to control or limit market risk exposures, the Bank monitors the policies, procedures and limits, a comprehensive and effective management information system to maintain the Bank's sound internal condition.

Pengelolaan Risiko *Likuiditas*

Sebagai bagian pengelolaan risiko *likuiditas*, Bank memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (*Assets and Liabilities Commmite* atau ALCO), melakukan pengelolaan *likuiditas* dan secara berkala membahas pengelolaan risiko *likuiditas* pada Bank. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan risiko *likuiditas*, Bank memiliki Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko *Likuiditas*, yang merupakan bagian dari Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Bank. Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko *Likuiditas* mengatur antara lain pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan manajemen risiko *likuiditas*, proses manajemen risiko *likuiditas*, serta kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko *likuiditas* Bank melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko *likuiditas*. Identifikasi risiko *likuiditas* pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui jumlah dan trend kebutuhan *likuiditas* serta sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Dalam rangka mengelola risiko *likuiditas*, Bank melakukan pemantauan risiko *likuiditas* secara berkala, yang dilakukan oleh Divisi Treasury. Bank Papua telah mengoptimalkan pengelolaan treasury untuk menjaga *likuiditas* dengan melakukan penempatan dana pada beberapa instrument keuangan yang lebih likuid.

Liquidity Risk Management

As part of the management of liquidity risk, the Bank has an Asset and Liabilities Commmity (ALCO) Committee, conducts liquidity management and periodically discusses the management of liquidity risk at the Bank. As a guideline for liquidity risk management, the Bank has a Liquidity Risk Management Policy Manual, which is part of the Bank's Risk Management Policy Guidelines. The Liquidity Risk Management Policy Manual provides for the active supervision of the BOC and the BOD in the implementation of liquidity risk management, liquidity risk management process, as well as policies, procedures and the determination of the liquidity risk limit of the Bank to identify, measure, monitor and control liquidity risk. The identification of liquidity risk is basically aimed at knowing the amount and trend of liquidity needs and funding sources available to meet the needs. In order to manage liquidity risk, the Bank monitors liquidity risk on a regular basis, conducted by the Treasury Division. Bank Papua has optimized treasury management to maintain liquidity by placing funds on some of the most liquid financial instruments.

Pengelolaan Risiko Operasional

Mitigasi terhadap Risiko Operasional dilakukan oleh seluruh satuan kerja Bank. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur merupakan salah satu bentuk mitigasi Risiko Operasional. Divisi Manajemen Risiko memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko yang memadai dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu. Bank Papua memastikan memiliki kecukupan modal untuk dapat memenuhi risiko operasional. Bank mengacu kepada regulasi Bank Indonesia dan OJK dalam melakukan perhitungan kecukupan modal untuk risiko operasional. Dalam rangka meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional, Bank secara berkala melakukan review terhadap *Business* Contiunity Plan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum sebagai perubahan atas SE BI Nomor : 9/30/ DPNP tanggal 12 Desember 2007 perihal Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank umum.

Operational Risk Management

Mitigation against Operational Risk is performed by all Bank working units. Compliance with policies and procedures is one form of Operational Risk mitigation. The Risk Management Division ensures that the Bank has adequate risk management policies and procedures in conducting transactions and activities accurately, efficiently and on time. Bank Papua ensures that it has sufficient capital to meet operational risks. Bank refers to the regulation of Bank Indonesia and OJK in calculating the capital adequacy of operational risk. In order to improve the Quality of Operational Risk Management Implementation, the Bank periodically reviews the Business Contiunity Plan in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 38 / POJK.03 / 2016 dated December 1, 2016 regarding Risk Management Implementation in the Use of Information Technology by Commercial Bank as a change of Circular Letter of Bank Indonesia Number: 9/30 / DPNP dated December 12, 2007 concerning Guidelines on the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks.

Pengelolaan Risiko Hukum

Pemantauan Risiko Hukum dilaksanakan dengan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Bank. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi Risiko Hukum. Dalam melaksanakan pengendalian Risiko Hukum, Divisi Hukum memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan review secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain guna memeriksa kembali obyektifitas dan validitas hubungan dalam kontrak dan perjanjian tersebut.

Legal Risk Management

Legal Risk Monitoring is conducted by evaluating the effectiveness of policy implementation, procedures and compliance with policies, legal regulations and Bank limits. Regular monitoring of all Legal Risk positions. In exercising Legal Risk control, the Legal Division provides legal and recommendation advice to each division and work unit and periodically reviews contracts and agreements between the Bank and other parties to review the objectivity and validity of the relationship in the contract and the agreement.

Pengelolaan Risiko Stratejik

Identifikasi Risiko Stratejik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor Risiko Stratejik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi serta operasional dan jasa melalui *business* plan yang disusun sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD). Pengukuran Risiko Stratejik dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan.

Strategic Risk Management

Strategic Risk Identification is based on Strategic Risk factors in certain functional activities, such as lending, treasury and investment activities and operations and services through a business plan compiled as an elaboration of the General Policy of the BOD (KUD). Strategic Risk Measurement is performed based on the Bank's performance achieved by comparing the actual results with the established targets.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengukuran Risiko Kepatuhan dilakukan terhadap potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan eksternal yang berlaku. Besarnya Risiko Kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk mereview semua penalti, litigasi, dan keluhan nasabah yang pernah diterima Bank. Dalam pengendalian Risiko Kepatuhan, Unit kerja Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen Risiko Kepatuhan dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan Risiko Kepatuhan

Compliance Risk Management

Measurement of Compliance Risk is made against potential losses caused by non-compliance and inability of the Bank in compliance with applicable external regulations. The amount of Compliance Risk is estimated based on the Bank's ability to meet all the rules in the past and future. These activities include reviewing all penalties, litigation, and customer complaints the Bank has ever received. In Compliance Risk Management, the Risk Management Unit and the Compliance Division are tasked with evaluating the effectiveness of Compliance Risk management implementation by periodically monitoring all types of activities that may potentially lead to Compliance Risk

Pengelolaan Risiko Reputasi

Identifikasi Risiko Reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan informasi yang material (*Disclosure requirement*), keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan Bank dalam melayani nasabah, dan sistem komunikasi Bank dan memenuhi semua ketentuan yang berlaku. Pengukuran Risiko Reputasi dilakukan berdasarkan hasil *Assessment* terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada reputasi Bank.

Reputation Risk Management

Reputation Risk Identification is performed on risk factors attached to functional activities that include disclosure requirements, customer complaints to Bank services, employee behavior of the Bank in serving customers, and the Bank's communication system and meeting all applicable requirements. Reputation Risk Assessment is based on Assessment results on factors that affect the Bank's reputation.

Pengawasan Aktif Direksi Dan Dewan Komisaris

Active Supervision of BOD and BOC

Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

Berdasarkan pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dinyatakan bahwa wewenang dan tanggungjawab bagi Direksi adalah sekurang-kurangnya :

1. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
3. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi ;
4. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;

Authority and Responsibility of the BOD

Based on Article 7 of the Financial Services Authority Regulation Number 18 /POJK.03/2016 Concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, it is stated that the authority and responsibility for the BOD is at least:

1. *Develop Risk Management policies and strategies in writing and comprehensively;*
2. *Responsible for the implementation of risk management policy and risk exposure taken by the Bank as a whole;*
3. *Evaluate and decide on transactions that require the approval of the BOD;*
4. *Develop a culture of Risk Management at all levels of the organization;*

5. Memastikan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
6. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
7. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan :
   a. keakuratan metodologi penilaian Risiko;
   b. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
   c. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.
8. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Bank.

Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Berdasarkan pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dinyatakan bahwa wewenang dan tanggungjawab bagi Dewan Komisaris adalah sekurang-kurangnya:

1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan
3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

5. *Ensure the improvement of human resource competencies related to Risk Management;*
6. *Ensure that the Risk Management function has operated independently; and*
7. *Conduct periodic reviews to ensure:*
   a. *accuracy of risk assessment methodology;*
   b. *adequacy of Risk Management information system implementation; and*
   c. *accuracy of Risk Management policies and procedures and the establishment of Risk limits.*
8. *Having an adequate understanding of the Risks attached to all functional activities of the Bank and capable of taking necessary actions in accordance with Bank Risk profile.*

Authority and Responsibility of the BOC

Based on Article 7 of the Financial Services Authority Regulation Number 18 /POJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks, it is stated that the authority and responsibility for the BOC is at least:

1. *Approve and evaluate Risk Management policy;*
2. *Evaluate the BOD' responsibility for the implementation of Risk Management policy; and*
3. *Evaluate and decide on the application of the BOD relating to transactions that require the approval of the Board of Commissioners.*

Mitigasi Risiko Bank Papua Tahun 2017

NO	BIDANG KEGIATAN	TINDAKAN MITIGASI RISIKO	*ACTION OF RISK MITIGATION*
I	Bidang Perkreditan	· Bank akan berfokus pada kredit berisiko rendah berupa kredit konsumtif, terutama kepada instansi yang payrol gajinya dibayarkan melalui Bank Papua, sedangkan pemberian kredit produktif/ komersial dibatasi dengan sangat hati-hati dengan Komposisi kredit konsumtif sebesar 53% dan kredit produktif sebesar 47% dari total portofilio kredit. Akan disesuaikan dengan RBB tahun 2017.	· *The Bank will focus on low-risk loan in the form of consumer loan, especially to institutions whose payroll salaries are paid through papua banks, whereas the provision of productive / commercial loans is cautiously limited by Consumer loan composition of 53% and performing loans of 47% of total portofilio loan. Will be adjusted to RBB 2017.*
		· Bank lebih fokus untuk penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah.	· *Banks are more focused on rescue and settlement of non performing loan.*
		· Bank wajib menghindari risiko konsentrasi kredit.	· *Banks are required to avoid risk of loan concentration.*
II	Bidang Penghimpunan Dana	· Kegiatan penghimpunan dana akan lebih difokuskan pada dana yang bersumber dari masyarakat (Giro, Tabungan dan Deposito) yang memiliki maturity yang lebih panjang dan tetap mempertahankan Dana Pemda.	· *Fundraising activities will be more focused on community-sourced funds (Current Account, Saving, Time Deposit) which have longer maturity and retain local government funds.*
		· Komposisi sumber pendanaan bank diharapkan akan lebih didominasi oleh dana masyarakat yang memiliki maturity yang lebih panjang jika dibandingkan dengan Dana Pemda dalam rangka meminimalisir mismatch sumber dan penggunaan dana untuk peningkatan keamanan *likuiditas* bank.	· *The composition of bank funding sources is expected to be more dominated by public funds that have a longer maturity when compared with LG funds in order to minimize source mismatch and use of funds w*
		· Komposisi sumber dana bank yang dihimpun dari masyarakat diharapkan mencapai target 60% dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Akan disesuaikan dengan RBB.	· *The composition of bank fund sources collected from the public is expected to reach the target of 60% of Third Party Funds (TPF). Will be adjusted to RBB.*
III	Bidang Treasury	· Karena kondisi Bank Papua yang masih lebih fokus sebagai bank konvensional, sehingga kegiatan pengelolaan dana berupa pembelian Surat berharga pemerintah.	· *As the condition of Bank Papua is still more focused as a conventional bank, so the fund management activities in the form of purchases of government securities.*
		· Penempatan dana di pasar uang pada Bank yang memiliki kualitas rating dan tingkat kesehatan yang baik.	· *Placement of funds in the money market in Banks that have a rating quality and good health level.*
		· Menjaga *likuiditas* yang cukup.	· *Maintain sufficient liquidity.*
IV	Bidang Pengembangan Produk	· Pembatasan produk dan aktivitas baru.	· *Restrictions on new products and activities.*
		· Pembatasan Pembukaan Jaringan Kantor, kecuali yang direkomendasikan Pemda.	· *Restrictions on Opening of the Office Network, except as recommended by LG.*
		· Melakukan kaji ulang terhadap jaringan kantor diluar Papua dan Papua Barat.	· *Review the office network outside Papua and West Papua.*
		· Untuk sementara waktu hanya dapat melakukan peningkatan kualitas terhadap produk yang sudah ada (*existing*).	· *For the time being can only improve the quality of existing products.*
		· Pembatasan kegiatan dimaksud akan disesuaikan dengan status pengawasan Bank.	· *The limitation of such activities shall be adjusted to the Bank's supervisory status.*

NO	BIDANG KEGIATAN	TINDAKAN MITIGASI RISIKO	*ACTION OF RISK MITIGATION*
V	Bidang Teknologi Informasi	· Penyelesaian IT *Blue Print*. · Pengembangan Bisnis Berbasis Tehnology. · Peningkatan Layanan Bank dengan memaksimalkan *core banking* system olibs 724. · Mempersiapkan system teknologi baru untuk jangka panjang (*core banking*) yang berdaya saing tinggi. · Menyelesaikan aplikasi untuk ketersedian DWH untuk kebutuhan analisis dalam rangka pengembangan produk. · Melakukan uji coba Rencana pemulihan Bencana (*Disaster Recovery*).	· *IT Blue Print Completion.* · *Business Development Based on Tehnology.* · *Improved Bank Services by maximizing core banking system olibs 724.* · *Preparing a new technology system for the long term (core banking) is highly competitive.* · *Completed the application for the availability of DWH for analysis requirements in order to develop the product.* · *Conducting a Disaster Recovery trial.*
VI	Bidang Investasi	Kegiatan investasi akan dilakukan pembatasan dalam rangka pemulihan Bank sesuai dengan saran dari Regulator sebagai berikut: · Melakukan pembatasan terhadap investasi dengan nilai diatas Rp1 milyar. · Khusus terhadap investasi pembangunan kantor Cabang Bintuni akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. · Tidak Melakukan Pembukaan Jaringan Kantor Baru, kecuali rekomendasi Pemerintah Daerah. · Melakukan review terhadap kontrak dengan pihak ketiga, terutama sewa mobil untuk pejabat dan operasional.	*Investment activities will be subject to restrictions in relation to the Bank's recovery in accordance with the advice of the Regulator as follows:* · *Restrict investment with value above Rp1 billion.* · *Especially for the investment of Bintuni branch office development will be coordinated with related working unit.* · *Not Opening New Office Networks, except for recommendations from LGs.* · *Conduct review of contracts with third parties, especially rental cars for officials and operations.*
VII	Bidang Pengendalian	· Melakukan Review kebijakan dan prosedur bank agar sesuai dengan ketentuan. · Menindaklanjuti temuan auditor intern dan ekstern. · Meningkatkan permodalan Bank sesuai peraturan otoritas. · Penyempurnaan Profil risiko dan Tingkat Kesehatan Bank. · Menyelesaikan kasus-kasus Fraud. · Menyelesaikan kasus kasus hukum. · *Zero Tolerance For Fraud*.	· *Reviewing bank policies and procedures to comply with the requirements.* · *Follow up the findings of internal and external auditors.* · *Increase Bank capital according to regulatory authority.* · *Improved risk profile and Bank Soundness.* *Finalize Fraud cases.* · *Completed case law cases.* · *Zero Tolerance For Fraud.*

Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2017

Bank Papua sudah menerapkan sistem manajemen risiko dengan bekerja sama dengan unit bisnis sebagai partner kerja yaitu dengan membentuk manajemen risiko cabang. Dengan demikian terlaksanakannya penerapan bisnis yang mempunyai orientasi manajemen risiko, diharapkan penerapan manajemen risiko menjadi harmonis.

Dalam mengelola bank juga dipelukan harmonisasi antara pengembangan bisnis dan *risk management*, agar terdapat iklim kerja yang terkendali dengan baik sehingga tujuan akhir memperoleh laba secara berkesinambungan dapat dicapai. Bank menyadari dengan cara ukur apapun, soal risiko tidak dapat diprediksi secara tepat. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan tetap diperlukan *judgment* yang berkembang sesuai dengan bertambahnya pengalaman. Dengan demikian, Bank Papua sebagai langkah mitigasi risiko menggabungkan antara ilmu pengukuran risiko dengan seni dalam setiap pengambilan keputusan penting sehingga keputusan dapat diambil dengan relatif cepat tanpa meninggalkan perhitungan kuantitatif sebagai dasar dan bagian dari pengambilan keputusan tersebut.

Dengan manajemen risiko seperti diuraikan diatas, bank dapat melakukan identifikasi unit bisnis atau produk mana yang memberikan nilai tambah terbesar bagi bank sehingga bank dapat mengonsentrasikan pengembangan pada unit yang memberikan nilai tambah yang paling besar, atau dimana bank memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaing. Dengan demikian, bank dapat melakukan alokasi model dan sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien dalam upaya memberikan imbal hasil optimal bagi para *stakeholders*.

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Untuk meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia, Bank telah melaksanakan program pengembangan SDM di bidang pendidikan dan pelatihan bagi pejabat manajemen risiko dan mengikutsertakan seluruh pegawai (sesuai *job specification*) khususnya dilingkungan Divisi Manajemen Risiko, dalam rangka sertifikasi manajemen risiko. Bank juga secara berkala mengadakan pendidikan dan pelatihan serta aktif mengikutsertakan staf dan pejabatnya dalam seminar yang terkait dengan manajemen risiko maupun Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.

Effectiveness of Risk Management Implementation Year 2017

Bank Papua has implemented a risk management system in collaboration with business units as a working partner by establishing branch risk management. Thus the implementation of business that has a risk management orientation, it is expected that the implementation of risk management becomes harmonious.

In managing the bank also dipelukan harmonization between business development and risk management, so there is a well controlled working climate so that the ultimate goal of obtaining profits on an ongoing basis can be achieved. Banks realize by any measure, the risk is not predictable accurately. Therefore, in making decisions still needed judgment that evolves in accordance with increasing experience. Thus, Bank Papua as a risk mitigation step combines risk measurement with art in every important decision making so that decisions can be taken relatively quickly without leaving a quantitative account as the basis and part of the decision making.

With risk management as described above, banks can identify which business units or products provide the greatest added value to the bank so that the bank can concentrate the development on the unit that gives the largest added value, or where the bank has advantages compared to competitors. Thus, banks can allocate their models and resources more efficiently in an effort to provide optimal returns for stakeholders.

Development of Competence in Risk Management

To improve human resource development, the Bank has implemented human resource development programs in education and training for risk management officers and includes all employees (in accordance with job specification), especially within the Risk Management Division, in the context of risk management certification. The Bank also periodically conducts education and training and actively engages staff and officials in seminars related to risk management and Risk Management Certification Exams.

Pengembangan kompetensi yang diikuti anggota Divisi Manajemen Risiko selama 2017, sebagai berikut :

1. Pelatihan Manajemen Risiko *Likuiditas*.
2. Pelatihan Manajemen Risiko Operasional & Lainnya.
3. Pelatihan Manajemen Risiko Pasar.
4. Pelatihan Manajemen Risiko Kredit.
5. Pelatihan KPMM & ICAAP.
6. Sekolah Pimpinan Bank.
7. Sertifikasi Manajemen Risiko Level I.
8. Refreshing Sertifikasi Manajemen Risiko disemua level terdiri dari level I, II, III dan IV.
9. In House Training untuk Staff Manajemen Risiko Cabang.

The development of competencies attended by members of the Risk Management Division during 2017, as follows:

1. *Liquidity Risk Management Training.*
2. *Operational & Other Risk Management Training.*
3. *Market Risk Management Training.*
4. *Credit Risk Management Training.*
5. *Training of KPMM & ICAAP.*
6. *Bank Management School.*
7. *Risk Management Certification Level I.*
8. *Refreshing Risk Management Certification at all levels consists of levels I, II, III and IV.*
9. *In House Training for Risk Management Staff Branch.*

Strategi Atas Profil Risiko

1. Berdasarkan Sk Direksi No. 47/DIR-BPD/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penilaian Profil Risiko Cabang Bank Papua, dimana penilaian profil risiko cabang mulai dilaksanakan berdasarkan data indikator keuangan dan dimasukkan pada aplikasi profil risiko cabang berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penilaian Profil Risiko Cabang;
2. Penilaian profil risiko cabang merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap delapan jenis risiko yang melekat pada cabang yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko *likuiditas*, risiko strategik dan risiko reputasi;
3. Penilaian profil risiko cabang ini merupakan *self assessment* yang dilakukan oleh seluruh cabang Bank Papua, untuk selanjutnya direview, validasi dan dimonitor oleh Divisi Manajemen Risiko. Profil risiko cabang ini juga akan dimanfaatkan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sebagai referensi dalam perencanaan audit berbasis risiko;
4. Prosedur penilaian tingkat profil risiko cabang adalah sebagai berikut :
   a. Menetapkan bobot masing-masing risiko dan bobot parameter masing-masing risiko.
   b. Jenis data yang dinilai adalah bersifat kuantitatif dan kualitatif.
   c. Setiap parameter kuantitatif dan kualitatif harus dianalisis secara komprehensif yang menyatakan kondisi factual penilaian pada periode tertentu.
   d. Hasil penilaian masing-masing parameter risiko akan membentuk nilai peringkat profil risiko cabang
5. Setelah dilakukan penilaian profil risiko cabang kemudian dikonsolidasi menjadi penilaian profil risiko bank;

Strategy on Risk Profile

1. *Based on Board of Directors Sk. 47 / DIR-BPD / VI / 2012 dated June 15, 2012 on Risk Profile of Bank Papua Branch, where the risk profile of the branches was implemented based on financial indicators data and incorporated in the branch risk profile application based on the Company Manual (BPP) Risk Profile Branch Rating ;*
2. *Assessment of branch risk profile is a comprehensive and structured assessment of eight types of inherent risk to branches: loan risk, operational risk, market risk, legal risk, compliance risk, liquidity risk, strategic risk and reputation risk;*
3. *Assessment of risk profile of this branch is a self-assessment conducted by all branches of Bank Papua, for further review, validation and monitoring by the Risk Management Division. This branch risk profile will also be utilized by the Internal Audit Unit (SKAI) as a reference in risk-based audit planning;*
4. *Procedures for assessing the branch risk profile level are as follows:*
   a. *Sets the weight of each risk and the weight of each risk parameter.*
   b. *The types of data assessed are quantitative and qualitative.*
   c. *Each quantitative and qualitative parameter must be comprehensively analyzed stating the factual condition of the assessment in a given period.*
   d. *The assessment results of each risk parameter will form the value of the branch risk profile rating*
5. *After a risk profile assessment of the branch is subsequently consolidated into an assessment of the bank's risk profile;*

Bank dapat memberikan perhatian khusus pada salah satu atau beberapa parameter risiko per periode laporan dengan memberikan bobot lebih besar dibandingkan parameter lainnya. Penentuan bobot faktor atau parameter dirumuskan dan disahkan oleh Rapat Komite Manajemen Risiko

Banks may pay particular attention to one or more of the risk parameters per reporting period by giving greater weight than other parameters. Determination of factor or parameter weighting is formulated and validated by the Risk Management Committee Meeting

Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan Bank dinilai dengan memperhatikan terdapat empat parameter penilaian yaitu profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), *rentabilitas* (*earnings*) dan permodalan (*capital*). Pedoman dan alat pengukuran tingkat kesehatan Bank dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan SE BI 13/24/DPNP perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Bank Sound Rating

The Bank's Sound rating is assessed by considering four assessment parameters: risk profile, Good Corporate Governance (GCG), earnings and capital. The Bank sound rating guidelines and measuring instruments are conducted under the Regulation of the Financial Services Authority Number 4 / POJK.03 / 2016 dated January 26, 2016 concerning Rating of Bank Rating and Bank Indonesia BI 13/24 / DPNP concerning the Rating of Commercial Banks.

Berikut disampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan Bank untuk periode Desember 2017.

The following is presented on the Bank soundness assessment for the period of December 2017.

A. Summary Report

A. Summary Report

I. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

I. Rating of Bank Soundness

No	FAKTOR	Peringkat *(Rating)*	
		JUNI 2017	*DESEMBER 2017*
1	Profil Risiko	4	3
2	*Good Corporate Governance*	3	2
3	*Rentabilitas*	3	2
4	Permodalan	4	3
	Nilai Komposit	**3**	**3**
Deskripsi			
Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain: profil risiko, penerapan GCG, *rentabilitas*, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. *Reflecting the condition of the Bank that is generally healthy enough to be judged sufficiently able to deal with the significant negative impacts of changes in business conditions and other external factors is reflected in the rating of assessment factors, among others: risk profile, GCG implementation, profitability and capital which are generally sufficient good. If there are weaknesses then the general weakness is quite significant and if not successfully addressed properly by the management may disrupt the continuity of the bank's business.*			

II. Analisis Faktor

1. *Risk Profile*
   Profil Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Papua semester II tahun 2017 berada pada PK-3 (*Moderate*) hal ini dikarenakan :
   a. Dampak dari penetapan Bank Dalam Pengawasan Intensif, potensi risiko inherent secara keseluruhan masih cukup tinggi. Hal tersebut karena adanya pembatasan-pembatasan dalam aktivitas bisnis Bank.
   b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara komposit dinilai cukup memadai, terdapat kelemahan yang cukup signifikan dari segi tata kelola namun telah dilakukan beberapa perbaikan terutama kebijakan-kebijakan dibidang perkreditan.
2. GCG
   Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dan penerapan prinsip Tata Kelola Bank umum, maka secara umum kelemahan tersebut tidak berdampak signifikan namun memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank. Karena kelemahan-kelemahan tersebut akan berdampak terhadap peran aktif pengawasan bank dan Rencana Bisnis Bank untuk semester II tahun 2017.

3. *Capital*
   Penilaian Permodalan Bank semester II tahun 2017 dinilai memadai, terdapat beberapa faktor penilaian antara lain :
   a. Kecukupan Modal Bank
      1. Rasio Modal dibagi ATMR mengalami kenaikan sebesar 4.80% dari laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar 19.15% menjadi 23.95% pada Desember 2017.
      2. Rasio Modal Inti terhadap Total ATMR mengalami kenaikan sebesar 4.85% dari periode sebelumnya Juni 2017 sebesar 18.17% menjadi 23.02% pada Desember 2017.
      3. Rasio Penangan aset produktif bermasalah mengalami penurunan sebesar 12.51% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar 28.13% menjadi 15.62% pada Desember 2017.
      4. Rasio penangan Aset Kualitas Rendah mengalami penurunan sebesar 28.74% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar 81.00% menjadi 52.26% pada Desember 2017.

II. Factor Analysis

1. Risk Profile
Risk Profile of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua second semester of 2017 is in PK-3 (Moderate) this is because:
a. The impact of the Bank's decision on Intensive Supervision, the potential for inherent risk overall remains high. This is due to limitations in the Bank's business activities.

b. Quality of Composite Risk Management Implementation is considered sufficient, there are significant weaknesses in terms of governance but has made some improvements, especially policy-kebijaka in the field of loan.

2. GCG
Reflecting Management Bank has implemented a generally good Governance implementation. This is reflected in the adequate fulfillment of GCG principles. If there are weaknesses and the implementation of Bank Mandiri principles, then the general weaknesses do not have a significant impact but require considerable attention from bank management. Because these weaknesses will have an impact on the active role of bank supervision and Bank Business Plan for the second half of 2017.

3. Capital
Bank Capital Assessment in the second semester of 2017 is considered adequate, there are several assessment factors, among others:
a. Adequacy of Bank Capital
1. Capital Ratios divided by RWA increased by 4.80% from the previous report of June 2017 by 19.15% to 23.95% in December 2017.

2. The Core Capital Ratio to Total RWA increased by 4.85% from the previous period of June 2017 by 18.17% to 23.02% in December 2017.

3. Handling ratio of non performing assets decreased by 12.51% from the previous reporting period of June 2017 by 28.13% to 15.62% in December 2017.

4. The Ratio of Low Quality Assets has decreased by 28.74% from the previous report period of June 2017 by 81.00% to 52.26% in December 2017.

b. Pengelolaan Permodalan :
   1. Bank sudah mempunyai kebijakan yang tertuang dalam SK Direksi Nomor 75/DIR-BPD/XII/2017 tentang Kebijakan Manajemen Permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang mengatur mengenai sumber-sumber permodalan baik internal maupun eksternal, termasuk dukungan dari pemegang saham serta tindakan yang dilakukan bank pada saat modal berada di bawah target yang ditetapkan.

c. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam hal permodalan :
   1. Dewan Komisaris belum dapat memastikan bahwa bank memiliki modal yang memadai untuk mendukung pertumbuhan bisnis bank.
   2. Komisaris belum melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan, strategi dan prosedur pengelolaan modal dan melakukan penyesuaian apabila dibutuhkan.

4. *Earnings*

Penilaian *Earnings* Bank Semester II tahun 2017 dinilai kurang memadai, hal ini didasarkan pada beberapa penilaian :

a. Kinerja *Rentabilitas*
   1. *Return on Assets* (ROA) mengalami penurunan sebesar 2.39% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar -7.24% menjadi -9.63% pada Desember 2017.
   2. Return on Equities (ROE) mengalami penurunan sebesar 16.55% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar -64.29% menjadi -80.84% pada Desember 2017.
   3. *Net Interest Margin* (NIM) mengalami kenaikkan sebesar 21.29% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar 23.00% menjadi 44.29% pada Desember 2017.
   4. Rasio BOPO mengalami kenaikan sebesar 7.22% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar 100.49% menjadi 107.71% pada Desember 2017.

b. Sumber-sumber yang mendukug *Rentabilitas*
   1. Pendapatan bungan bersih terhadap total Semester II tahun 2017 mengalami kenaikkan sebesar 20.27% dari periode sebelumnya Juni 2017 sebesar 21.45% menjadi 41.72% pada Desember 2017.
   2. Pendapatan Operasional Selain Pendapatan Bunga Dibagi Rata-rata Total Aset Semester II tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 9.93% dari periode sebelumnya Juni

b. Capital Management:
   1. Bank has a policy as stipulated in the Decree of the Board of Directors Number 75 DIR-BPD / XII / 2017 regarding Capital Management Policy of PT BPD Papua which regulates the sources of capital both internal and external, including support from shareholders and actions taken by banks at a time when the capital is below the target set.

c. Matters that need attention in terms of capital:
   1. The Board of Commissioners has not been able to ensure that the bank has sufficient capital to support the bank's business growth.
   2. The Board of Commissioners has not conducted periodic evaluations of capital management policies, strategies and procedures and made adjustments where necessary.

4. Earnings

The assessment of Earnings Bank Semester II of 2017 is considered insufficient, it is based on several assessments:

a. Profitablility Performance
   1. Return on Assets (ROA) decreased by 2.39% from the previous reporting period of June 2017 by -7.24% to -9.63% in December 2017.
   2. Return on Equities (ROE) decreased by 16.55% from the previous reporting period of June 2017 by -64.29% to -80.84% in December 2017.
   3. Net Interest Margin (NIM) experienced an increase of 21.29% from the previous report period of June 2017 of 23.00% to 44.29% in December 2017.
   4. OEOI ratio increased by 7.22% from the previous reporting period of June 2017 by 100.49% to 107.71% in December 2017.

b. Resources that earn Rentability
   1. Net interest income to total Semester II of 2017 increased by 20.27% from the previous period of June 2017 by 21.45% to 41.72% in December 2017.
   2. Operating Income In addition to Interest Income Divided The Average Total Assets in the second semester of 2017 decreased by 9.93% from the previous period of June 2017

2017 sebesar 3.98% menjadi 13.91% pada Desember 2017.

3. Rasio Beban Overhead Semester II tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 10.03% dari periode sebelumnya Juni 2017 sebesar 12.70% menjadi 22.73% pada Desember 2017.
4. Rasio Beban Pencadangan dibandingkan Rata-rata total aset Semester II tahun 2017 mengalami kenaikkan sebesar 6.77% dari periode sebelumnya Juni 2017 sebesar 83.57% menjadi 90.34% pada Desember 2017.

c. Komponen-komponen yang mendukung *rentabilitas*
   1. Rasio Core ROA Semester II tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 21.22%% dari periode sebelumnya Juni 2017 sebesar 11.57%% menjadi -9.68% pada Desember 2017.
   2. Secara prospek *rentabilitas*, Bank memiliki kemampuan dalam mengelola sumber *rentabilitas*, namun dengan kondisi yang saat ini dihadapi Bank mengenai meningkatnya risiko kredit maka bank diwajibkan membentuk CKPN yang cukup besar yang bersumber dari pendapatan Bank. Sehingga kondisi ini sangat mempengaruhi menurunkan kinerja *rentabilitas* Bank dan mengurangi porsi permodalan Bank dimasa mendatang.

d. Manajemen *Rentabilitas*
   1. Secara prospek *rentabilitas*, Bank memiliki kemampuan dalam mengelola sumber *rentabilitas* yang ada saat ini dan memiliki perencanaan yang terukur dalam mempertahankan dan meningkatkan *rentabilitas*, namun dengan kondisi yang dihadapi Bank terhadap peningkatan risiko kredit maka bank diwajibkan membentuk CKPN yang cukup besar yang bersumber dari pendapatan Bank. Sehingga kondisi ini sangat berpotensi menurunkan kinerja *rentabilitas* Bank dan mengurangi komposisi permodalan.

by 3.98% to 13.91% in December 2017.

3. *The Overhead Ratio of Overhead Expenses for the second semester of 2017 decreased by 10.03% from the previous period of June 2017 by 12.70% to 22.73% in December 2017.*
4. *Reserves Expense Ratio compared to the Average Total Assets of Semester II of 2017 experienced an increase of 6.77% from the previous period of June 2017 of 83.57% to 90.34% in December 2017.*

c. Components that support profitability

1. *Core Ratio of Semester II of 2017 decreased by 21.22 %% from the previous period of June 2017 by 11.57 %% to -9.68% in December 2017.*

2. *In terms of profitability prospect, the Bank has the capability to manage the source of profitability, but with the conditions currently faced by the Bank regarding the increased loan risk, the bank is required to establish a substantial CKPN derived from the Bank's income. So that this condition is very affect to reduce the performance rentability of Bank and reduce the portion of Bank capital in the future.*

d. Profitability Management

1. *In terms of profitability prospect, the Bank has the ability to manage the current sources of profitability and has measurable planning in maintaining and increasing rentability, but with the conditions faced by the Bank to increase loan risk, the bank is required to establish a substantial CKPN derived from revenue Bank. Thus, this condition could potentially reduce the Bank's profitability performance and reduce the composition of capital.*

B. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

I. Peringkat komposit keseluruhan faktor posisi Desember 2017

B. Composite Rating of Bank Soundness

I. The overall composite ranking of position factors as December 2017

NO	FAKTOR	PERINGKAT(RATING)
1	*Risk Profile*	3
2	GCG	2
3	*Capital*	2
4	*Earnings*	3
	NILAI KOMPOSIT	**3**

ANALISIS

Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain: profil risiko, penerapan GCG, *rentabilitas*, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.

Reflecting the generally healthy condition of the Bank to adequately address the significant negative impacts of changes in business conditions and other external factors is reflected in the ratings of assessment factors, including: risk profiles, the application of GCG, profitability, and capital which are generally sufficient good. If there are weaknesses then the general weakness is quite significant and if not successfully addressed properly by the management may disrupt the continuity of the bank's business.

II. Peringkat komposit Profil Risiko posisi Desember 2017

II. Composite Rating Risk Profile position December 2017

LAPORAN PENILAIAN PROFIL RISIKO PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA POSISI : 31 DESEMBER 2017
RISK PROFILE ASSESSMENT REPORT PT. DEVELOPMENT BANK PAPUA POSITION: 31 DECEMBER 2017

No	Jenis Risiko	Periode Sekarang Desember 2017				Komposit	
		Inherent Risk		Kualitas Penerapan Management Risiko			
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	PK
1	Risiko Kredit	3,81	ModHi	2,92	Fair	3,45	PK-3
2	Risiko Pasar	1,64	*Low*Mod	2,06	Satisfactory	1,80	PK-2
3	Risiko *Likuiditas*	2,50	*Low*Mod	2,00	Satisfactory	2,30	PK-2
4	Risiko Operasional	3,32	*Moderate*	2,76	Fair	3,09	PK-3
5	Risiko Hukum	1,54	*Low*Mod	2,25	Satisfactory	1,82	PK-2
6	Risiko Stratejik	3,39	*Moderate*	3,00	Fair	3,24	PK-3
7	Risiko Kepatuhan	2,67	*Moderate*	2,50	Fair	2,60	PK-3
8	Risiko Reputasi	2,30	*Low*Mod	2,26	Satisfactory	2,28	PK-2
Nilai Komposit		**2,82**	*MODERATE*	**2,54**	**FAIR**	**2,71**	**PK-3**

ANALISIS

Profil Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Papua semester II tahun 2017 berada pada **PK-3 (*Moderate*)** hal ini dikarenakan :

1. Dampak dari penetapan Bank Dalam Pengawasan Intensif, potensi risiko inherent secara keseluruhan masih cukup tinggi. Hal tersebut karena adanya pembatasan-pembatasan dalam aktivitas bisnis Bank.
2. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara komposit dinilai cukup memadai, terdapat kelemahan yang cukup signifikan dari segi tata kelola namun telah dilakukan beberapa perbaikan terutama kebijaka-kebijakan dibidang perkreditan.

*Risk Profile of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua second semester of 2017 is in **PK-3 (Moderate)** this is because:*

1. *Impact of Banking Under Intensive Monitoring, the potential for inherent risk overall remains high. This is due to limitations in the Bank's business activities.*
2. *Quality of Composite Risk Management Implementation is considered adequate, there are significant weaknesses in terms of governance but has made some improvements, especially policy-kebijaka in the field of loan.*

ANALISIS RISIKO KREDIT	
Peringkat Risiko:	*Moderate*
Inherent Risk	ModHi
Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis Bank, potensi kerugian yang dihadapi dari risiko kredit sampai dengan semester II tahun 2017 tergolong cukup tinggi (*Moderate*), Kondisi ini terjadi akibat beberapa faktor antara lain : A. Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi 1. Total aset Bank per Desember 2017 sebesar Rp20.460.831.218.730,- bila dibandingkan posisi per Juni 2017 sebesar Rp25.476.968.076.746,- terjadi penurunan aset sebesar Rp5.016.136.858.016,-. Komponen penurunan asset bersumber dari penurunan Dana Pihak Ketiga khususnya Giro Pemda. 2. Total kredit yang diberikan per Desember 2017 sebesar Rp13.270.907.914.148,- bila dibandingkan posisi Juni 2017 sebesar Rp12.856.430.640.591,- terjadi kenaikan sebesar Rp414.477.273.557,- 3. Rasio Aset per Akun Neraca dibandingkan dengan Total lebih didominasi oleh akun Kredit yang diberikan dimana terjadi kenaikan sebesar 14.40% dari periode sebelumnya Juni 2017 sebesar 50.46% menjadi 64.86% pada Desember 2017. 4. Rasio Kredit kepada debitur inti mengalami kenaikan sebesar 2.24% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar 17.79% menjadi 20.03% pada Desember 2017. 5. Rasio Kredit per sektor ekenomi dibandingkan dengan total kredit didominasi oleh sektor rumah tangga dimana mengalami kenaikan sebesar 3.05% dari periode sebelumnya Juni 2017 sebesar 26.90% menjadi 29.95% pada Desember 2017. Hal ini sesuai dengan *risk appetite* Direksi untuk fokus pada kredit konsumtif. 6. Total Kredit Bank masih didominasi oleh portofilio tagihan kepada korporasi, tetapi terdapat penurunan sebesar 4.88% dari periode sebelumnya Juni 2017 sebesar 50.60% menjadi 45.72% pada Desember 2017. B. Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan 1. Rasio AYDA mengalami kenaikkan sebesar 0.18% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar 0.45% menjadi 0.63% pada Desember 2017, adanya penambahan nominal AYDA dan pengaruh total aset Bank yang mengalami penurunan. 2. Rasio Kredit Kualitas Rendah (KKR) mengalami perbaikan sebesar 7.63% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar 30.40% menjadi 22.77% pada Desember 2017. 3. Rasio NPL (gross) mengalami perbaikan sebesar 2.58% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar 17.10% menjadi 14.52% pada Desember 2017. Rasio NPL Gross masih diatas komitmen Bank terhadap OJK yang menetapkan NPL gross harus berada dibawah kisaran 12.50% 4. Rasio NPL nett mengalami perbaikan sebesar 3.78% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar 7.59% menjadi 3.81% pada Desember 2017. 5. Rasio CKPN atas kredit mengalami kenaikkan sebesar 0.64% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar 10.79% menjadi 11.43% pada Desember 2017. C. Strategi Penyedian Dana dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana 1. Bank sudah menetapkan portofolio kredit tahun 2017 dengan komposisi kredit konsumtif sebesar 53% dan kredit produktif sebesar 47% dari total portofilio kredit. 2. Bank belum dapat menerbitkan produk baru untuk mempertahankan posisi pasar akibat bank yang dikategorikan Dalam Pengawasan Intensif oleh regulator (OJK). 3. Bank sudah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penyedia dana, dan Bank juga sudah berusaha menjajaki kerjasama non Pemerintah seperti Rumah Sakit, Perguruan tinggi dan Pihak Swasta lainnya. D. Faktor Eksternal 1. Dengan permasalahan kredit yang dialami Bank saat ini yang mempengaruhi pertumbuhan Bisnis, sehingga bank dinilai rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi, pasar, peraturan regulasi yang mempengaruhi tingkat suku bunga sehingga berdampak pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya.	*Considering the Bank's business activities, the potential losses faced by loan risk up to the second semester of 2017 are quite high (Moderate). This condition occurs due to several factors including:* *A. The Composition of the Asset Portfolio and the Level of Concentration* *1. Total Bank assets per December 2017 of Rp20,460,831,218,730, - when compared to the position as per June 2017 of Rp25,476,968,076,746, - an asset decrease of Rp5.016.136.858.016, -. The component of asset reduction is sourced from the decline of Third Party Funds, especially Giro Pemda.* *2. Total lending per December 2017 of Rp13,270,907,914,148, - when compared to the position of June 2017 of Rp12,856,430,640,591, - an increase of Rp414.477.273.557, -* *3. Asset Ratios per Account Balance compared to Total is dominated by Loans account which increased by 14.40% from the previous period of June 2017 by 50.46% to 64.86% in December 2017.* *4. Ratio of Loan to core borrowers increased by 2.24% from the previous reporting period of June 2017 by 17.79% to 20.03% in December 2017.* *5. Ratio of Loan per eco-nomic sector compared to total loan is dominated by household sector which increased by 3.05% from the previous period of June 2017 by 26.90% to 29.95% in December 2017. This is in accordance with the Directors' risk appetite to focus on consumer loan.* *6. Total Bank Loans is still dominated by portfolio bill to the corporation, but there was a decrease of 4.88% from the previous period of June 2017 by 50.60% to 45.72% in December 2017.* *B. Quality of Provision of Funds and Adequacy of Reserves* *1. The ratio of ORE had increased by 0.18% from the previous reporting period in June 2017 by 0.45% to 0.63% in December 2017, the nominal addition of AYDA and the decreasing total assets of the Bank.* *2. The Low Quality Loan Ratio (KKR) has improved by 7.63% from the previous reporting period of June 2017 by 30.40% to 22.77% in December 2017.* *3. NPL ratio grossed by 2.58% from the previous reporting period of June 2017 of 17.10% to 14.52% in December 2017. Gross NPL ratio is still above the Bank's commitment to OJK that stipulates gross NPL should be below 12.50%* *4. NPL ratio improved by 3.78% from the previous reporting period in June 2017 of 7.59% to 3.81% in December 2017.* *5. CKPN's ratio of loan increased by 0.64% from the previous reporting period of June 2017 by 10.79% to 11.43% in December 2017.* *C. Fund Provision Strategies and Sources of Fund Provision* *1. The Bank has established its loan portfolio in 2017 with a consumptive loan composition of 53% and performing loans of 47% of total loan portfolio.* *2. The Bank has not been able to issue new products to maintain its market position due to banks categorized under the Regulatory Oversight (OJK).* *3. The Bank has established cooperation with the Central Government and Local Government as a provider of funds, and the Bank has also tried to explore non-governmental cooperation such as hospitals, universities and other private parties .* *D. External Factors* *1. With the current loan problems faced by the Bank that affect the growth of the Business, the bank is considered vulnerable to changes in economic conditions, markets, regulatory regulations affecting interest rates, thus impacting the borrower's ability to repay the loan.*

ANALISIS RISIKO KREDIT

Kualitas Penerapan Management Risiko	Fair
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko terhadap Risiko Kredit semester II tahun 2017 dinilai cukup memadai, hal ini didasarkan pada beberapa faktor penilaian, antara lain :	*The Quality of Risk Management Implementation on Credit Risk in second semester of 2017 is considered sufficient, it is based on several assessment factors, among others:*
A. Tata kelola risiko kredit : 1. Manajemen sedang berupaya dalam perbaikan kredit kualitas rendah, kredit bermasalah dan penagihan kredit extra comtable (excom) yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan Bank. 2. Bank sementara melakukan perbaikan pengelolaan kredit melalui penerapan metode *four eyes principle* sesuai SK Direksi Nomor 43/ DIR-BPD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit PT BPD Papua. 3. Komposisi Dewan Komisaris yang tidak lengkap terutama kekosongan komisaris independen sehingga Bank belum dapat melakukan kaji ulang kebijakan penyediaan dana dalam jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak terkait. 4. Bank sudah mempunyai kebijakan tentang tata kelola terhadap 25 debitur inti (*large exposure*) baik secara konsolidasi kantor pusat maupun oleh masing-masing kantor cabang yang tertuang dalam SK Direksi Nomor 72/DIR-BPD/XII/2017 tentang Tata Kelola Debitur Besar. 5. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pada pelaksanaan aktivitas kredit/ penyediaan dana telah dilakukan antara lain dengan penempatan Manajemen Risiko di Kantor Cabang. .	*A. Credit risk management:* *1. Management is working on improving low quality credit, non performing loans and extra comtable (excom) credit collection that may affect the Bank's revenue growth.* *2. The Bank is temporarily improving credit management through the implementation of the four eyes principle method in accordance with Decree of the Board of Directors Number 43 / DIR-BPD / VII / 2017 dated July 31, 2017 on Amendment to Directors Decree No. 25.A / DIR-BPD / III / 2012 on Book Implementation Guidance (BPP) Credit PT BPD Papua.* *3. Composition of the Board of Commissioners which is incomplete, especially the vacancy of independent commissioners so that the Bank has not been able to review the policy of provision of funds in large quantities or to be given to related parties.* *4. The Bank already has a policy on governance of 25 major debtors either consolidated by the head office or by each branch office as stipulated in Decree of the Board of Directors Number 72 / DIR-BPD / XII / 2017 on Big Debtor Management.* *5. The process of identification, measurement, monitoring and control of risk in the implementation of credit / funding activities has been done, among others, by placing Risk Management in Branch Offices.*
B. Kerangka Manajamen Risiko : 1. Bank sudah menjalankan aktivitas administrasi kredit secara optimal seperti pemantauan perijinan, dokumen yang telah jatuh tempo, pemenuhan persyaratan, pengarsipan dokumen, dan monitoring proses pengikatan agunan sehingga dalam proses administrasi dan pendokumentasian dinilai sudah memadai. 2. Bank telah mengimplementasikan penerapan Four Eyes Principle. 3. *Corporate Plan* yang ada saat ini perlu dilakukan penyempurnaan sesuai kondisi objektif perusahaan.	*B. Risk Management Framework:* *1. The Bank has carried out optimum credit administration activities such as licensing monitoring, matured documents, compliance requirements, document archiving, and monitoring of collateral bundling processes so that the administration and documentation process is considered adequate.* *2. The Bank has implemented the implementation of Four Eyes Principle.* *3. The current Corporate Plan needs to be refined according to the company's objective condition.*
C. Proses Manajamen Risiko : 1. Bank sudah optimal dalam mengembangkan identifikasi risiko kredit secara portofilio yang mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi tingkat risiko kredit akibat kegagalan *counterparty* pada masa yang akan datang. 2. Pengkinian/ review parameter terhadap rating kredit dinilai kurang memadai karena parameter yang digunakan sudah tidak sesuai dengan kondisi Bank saat ini. 3. Masih terdapat kelemahan dalam melakukan penilaian jaminan atau agunan karena kurangnya kompetensi SDM dalam melakukan penilaian agunan secara internal. 4. Bank sudah memiliki kebijakan internal mengenai Kewajiban debitur menyampaikan laporan keuangan in house/ KAP tetapi pelaksanaannya belum dilakukan secara efektif oleh seluruh cabang dan kantor pusat sehingga bank selalu terlambat dalam menanggani kredit yang mulai teridentifikasi penurunan nilai.	*C. Risk Management Process:* *1. The Bank has been optimal in developing portofilio credit risk identification considering factors affecting the level of credit risk due to counterparty failures in the future.* *2. The updating of parameter to credit rating is considered inadequate because the parameters used are not in accordance with the current condition of the Bank.* *3. There is still a weakness in assessing collateral or collateral due to lack of human resources competence in conducting internal collateral valuation.* *4. The Bank already has an internal policy regarding the Borrower's Obligation to submit the in-house / KAP financial statements but its implementation has not been effectively implemented by all branches and the head office so that the bank is always late in handling the identified credit of impairment.*
D. Kecukupan sistem pengendalian risiko : 1. Bank sudah melakukan kaji ulang terhadap kewenangan dalam pemberian kredit yang tertuang dalam SK Direksi nomor 30/DIR-BPD/ VI/2017 tentang Kewenangan Memutus Kredit dan Menandatangani Perjanjian Kredit PT BPD Papua. 2. Kecukupan proses pengendalian terhadap risiko kredit dan konsistensi sesuai dengan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, terutama proses restrukturisasi kredit, metode dan konsistensi pencadangan kerugian, dan pengendalian terhadap recovery kredit bermasalah melalui penguasaan agunan dan penagihan. 3. Bank belum mempunyai sistem informasi manajemen risiko kredit dalam melakukan monitoring/ early warning system (EWS).	*D. Adequacy of risk control system:* *1. The Bank has reviewed the authority in the provision of credit as stipulated in the Decree of the Board of Directors number 30 / DIR-BPD / VI / 2017 on the Authority to Break the Credit and Signed the Credit Agreement of PT BPD Papua.* *2. Adequacy of controlling process to credit risk and consistency in accordance with risk level and risk tolerance, especially credit restructuring, method and consistency of reserve reserve, and control of non performing loan recovery through collateral and billing control.* *3. The Bank does not have a credit risk management information system in monitoring / early warning system (EWS).*

ANALISIS RISIKO PASAR	
Peringkat Risiko:	*Low*Mod
Inherent Risk	*Low*Mod
Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis Bank, potensi kerugian yang dihadapi dari risiko pasar sampai dengan semester II tahun 2017 tergolong rendah (*Low* to *Moderate*), Kondisi ini terjadi akibat beberapa faktor antara lain : A. Volume dan Komposisi portofolio 1. Rasio Aset Trading, Aset Derivatif, Aset Fair *Value* Option (FVO) terhadap total aset mengalami kenaikan sebesar 4.67% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar 81.50% menjadi 86.17% pada Desember 2017. 2. Rasio Kewajiban Trading, Kewajiban Derivatif, Kewajiban Fair *Value* Option (FVO) terhadap total kewajiban mengalami penurunan sebesar 4.32% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar 85.78% menjadi 81.46% pada Desember 2017. B. Strategi dan kebijakan bisnis terkait karateristik trading 1. Posisi trading Bank di Pasar dikategorikan kurang aktif karena lebih menjaga *likuiditas* di akhir tahun. 2. Aktivitas treasury terhadap pengelolaan dana berupa penempatan yang besifat jangka pendek seperti pada Bank Indonesia (FASBI, SDBI), antar Bank, Surat Utang Negara dan korporasi (MTN, Obligasi) dinilai cukup aman, sehingga kemungkinan kerugian yang timbul sebagai akibat default (gagal bayar) tergolong rendah/kecil, selain itu dipengaruhi oleh Bank yang belum dalam kategori bank devisa dan aktivitas trading yang selalu dilakukan review atas evaluasi aktivitas sebelumnya. 3. Kegiatan pengelolaan dana oleh Divisi Treasury dan Internasional terhadap produk-produk yang dinilai sensitif oleh bank adalah pergerakan suku bunga pasar berupa simpanan nasabah, obligasi pemerintah dan korporasi serta suku bunga kredit, telah dilakukan pemantauan secara intensif dan telah diakomodir melalui kebijakan rapat ALCO, sehingga signifikasi penerimaan pendapatan bank sebagai akibat dari perubahan suku bunga pasar tergolong rendah. 4. Price/ harga yang diperuntukan kepada *customer* untuk mendapatkan suatu produk barang/jasa dari Bank sangatlah berfariatif hal ini tergantung dari segmentasi produk yang diperuntukan sesuai dengan kebutuhan agar dapat meminimalisir Risiko. Untuk segmentasi produk Bank Papua masih memasarkan produk konfensional dan produk-produk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. 5. Aktivitas trading pada Bank sudah dilakukan review atas evaluasi aktivitas sebelumnya dan petugas yang melakukanaktivitas trading sudah memenuhi persyaratan dan kompetensi yang disyaratkan. 6. Selain itu nasabah Korporasi Bank Papua tidak berpengaruh terhadap sensitivitas pasar, hal ini disebabkan nasabah korporasi yang ada didominasi oleh Pemerintah Daerah yang merupakan pemilik saham terbesar dan dapat dilihat dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga khususnya Giro.	*Considering the Bank's business activities, the potential losses faced from market risk until the second semester of 2017 are low (Low to Moderate). This condition occurs due to several factors including:* *A. Volume and Composition of the portfolio* *1. Ratio of Trading Assets, Derivative Assets, Fair Value Option (FVO) assets to total assets increased by 4.67% from the previous report period of June 2017 by 81.50% to 86.17% in December 2017.* *2. Trading Liabilities Ratios, Derivative Liabilities, Fair Value Option (FVO) liabilities to total liabilities decreased by 4.32% from the previous reporting period of June 2017 by 85.78% to 81.46% in December 2017.* *B. Business strategies and policies related to trading characteristics* *1. The position of Bank trading in the Market is categorized as less active because it maintains liquidity at the end of the year.* *2. Treasury activities on the management of funds in the form of short-term placements such as Bank Indonesia (FASBI, SDBI), inter-Bank, State Debt and Corporate (MTN, Bond) are considered safe enough, so the possibility of losses arising from default pay) is low / small, otherwise it is influenced by Banks that are not in the category of foreign exchange banks and trading activities are always conducted a review of the evaluation of previous activities.* *3. Fund management activities by the Treasury and International Division on products considered sensitive by banks are the movement of market interest rates in the form of customer deposits, government and corporate bonds and lending rates, has been intensively monitored and has been accommodated through the ALCO meeting policy, so the significance of bank revenue revenues as a result of changes in market interest rates is low.* *4. Price / price intended to customer to get a product of goods / services from Bank is very berfariatif this depends on segmentation of product that is intended in accordance with requirement in order to minimize Risk. For product segmentation, Bank Papua still markets conventional products and products issued by Bank Indonesia.* *5. Trading activity at the Bank has been reviewed for evaluation of previous activities and officers conducting trading activities have met the requirements and competencies required.* *6. In addition, Bank's Corporate Bank customers have no effect on market sensitivity, this is because the existing corporate customers are dominated by the Regional Government which is the largest shareholder and can be seen from the growth of the Third Party Fund especially Giro.*

ANALISIS RISIKO PASAR

Kualitas Penerapan Management Risiko	Satisfactory
Kualitas Penerapan Manajamen Risiko Pasar semester II tahun 2017 dinilai memadai, hal ini didasarkan pada beberapa faktor antara lain: A. Tata Kelola Risiko 1. Direksi sudah menetapkan strategi Manajemen Risiko Pasar dengan mempertimbangkan strategi trading, posisi pasar, dan komposisi instrumen produk. 2. Direksi Bank sudah dapat memastikan bahwa Kebijakan dan prosedur manajemen risiko pasar sudah mencakup untuk aktivitas trading harian, jangka menengah maupun jangka panjang. Selain itu Komisaris Bank telah diinformasikan secara berkala oleh Direksi mengenai eksposur risiko suku bunga dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan pengendalian. B. Kerangka Manajemen Risiko : 1. Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar sudah mencakup strategi seluruh aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Pasar yang signifikan. 2. Penetapan struktur organisasi, perangkat dan kelengkapan unit yang terkait dengan Manajemen risiko pasar sudah disesuaikan dengan karateristik dan kompleksitas kegiatan usaha bank. Struktur organisasi yang telah ada memastikan bahwa satuan kerja yang berfungsi pengendalian adalah independen terhadap satuan kerja yang melakukan suatu transaksi (*risk taking* unit). 3. Dalam rangka melengkapi Komite Manajemen Risiko khususnya terkait pengelolaan risiko pasar Bank sudah memiliki komite manajemen aset dan kewajiban/ ALCO yang juga bertugas melakukan pengelolaan risiko suku bunga. C. Proses Manajemen Risiko: 1. Bank telah memiliki proses identifikasi Risiko yang disesuaikan dengan Risiko Pasar yang melekat pada aktivitas Bisnis Bank yang meliputi Risiko suku bunga, dan nilai tukar. 2. Kuantitas dan kualitas pegawai pelaksana unit manajemen risiko belum seimbang dengan kualitas pegawai pelaksana aktivitas yang terkait dengan risiko pasar, dimana unit manajemen risiko pasar belum secara penuh memahami model pengukuran risiko pasar yang kompleks sesuai dengan produk bank. 3. Bank perlu melakukan pengembangan dan pelatihan pegawai termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang Treasury dan Manajemen Risiko Pasar. D. Sistem Pengendalian Risiko pasar : 1. Bank sudah memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan transaksi dan proses terkait dengan market *risk* dilakukan dengan mengacu pada kebijakan, prosedur, dan limit yang telah ditetapkan serta Penerapan prinsip pemisahan fungsi telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten.	*The Quality of the Application of Market Risk Management in the second semester of 2017 is considered sufficient, it is based on several factors, among others:* *A. Risk Management* *1. The Board of Directors has established a Market Risk Management strategy with consideration of trading strategy, market position, and product instrument composition.* *2. The Board of Directors of the Bank has been able to ensure that market risk management policies and procedures are included for daily trading activities, medium and long term. In addition, the Board of Commissioners of the Bank has been regularly informed by the Board of Directors regarding interest rate risk exposure in the context of the implementation of monitoring and control.* *B. Risk Management Framework:* *1. Risk Management Strategy for Market Risk already includes all activity strategies that have significant Market Risk exposure.* *2. Determination of organizational structure, equipment and unit equity related to market risk management has been adjusted to the characteristics and complexity of the bank's business activities. The existing organizational structure ensures that the controlling working unit is independent of the unit taking a transaction (risk taking unit).* *3. In order to complete the Risk Management Committee particularly related to market risk management the Bank already has an asset management and liability / ALCO committee which is also in charge of managing interest rate risk.* *C. Risk Management Process:* *1. The Bank has established a Risk identification process in accordance with Market Risk attached to the Bank's business activities including interest rate risk and exchange rate.* *2. The quantity and quality of the implementing staff of the risk management unit has not been balanced with the quality of the executing staff of activities related to market risk, where the market risk management unit has not fully understood the complex market risk measurement model according to the bank's products.* *3. Banks need to develop and train employees including adequate managerial succession plans and remuneration to ensure the availability of competent employees in the field of Treasury and Market Risk Management.* *D. Control Systems Market risk:* *1. The Bank already has an adequate internal control system to ensure that transactions and processes related to market risk are carried out with reference to established policies, procedures and limits and Adoption of the principle of segregation of functions is adequate and consistent.*

ANALISIS RISIKO *LIKUIDITAS*	
Peringkat Risiko:	*Low*Mod
Inherent Risk	*Low*Mod
Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan Bank mengalami Risiko *Likuiditas* tergolong rendah sampai dengan semester II tahun 2017 , hal ini didasarkan pada beberapa faktor antara lain : A. Komposisi dari Aset, Kewajiban, dan Transaksi Rekening Administratif 1. Aset Likuid Primer dan Aset Likuid Sekunder dibandingkan Total Aset mengalami penurunan sebesar 12.74% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar 36.21% menjadi 23.47% pada Desember 2017. 2. Aset Likuid Primer dan Aset Sekunder dibandingkan Pendanaan Jangka Pendek mengalami penurunan sebesar 13.43% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar 42.26% menjadi 28.83% pada Desember 2017. 3. Aset Likuid Primer dan Aset Sekunder dibagi Pendanaan Non Inti mengalami penurunan sebesar 13.39% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar 42.21% menjadi 28.82% pada Desember 2017. 4. Aset likuid Primer dibandingkan Pendanaan Non Inti Jangka Pendek mengalami penurunan sebesar 6.55% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar 25.77% menjadi 19.22% pada Desember 2017. 5. Pendanaan Non Inti terhadap Total Pendanaan mengalami penurunan sebesar 4.71% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar 74.83% menjadi 70.12% pada Desember 2017. 6. Pendanaan Non Inti terhadap Total Aktiva Produktif mengalami penurunan sebesar 19.28% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar 109% menjadi 89.72% pada Desember 2017. 7. Rasio LFR mengalami kenaikan sebesar 20.25% dari periode sebelumnya Juni 2017 sebesar 59.32% menjadi 79.57% pada Desember 2017. B. Konsentrasi aset dan kewajiban 1. Sumber-sumber pengembalian dana menjadi potensi besar meningkatkan risiko *likuiditas* karena permasalahan kredit. 2. Dana Pihak Ketiga bank lebih terkonsentrasi pada pendanaan non inti antara lain giro Pemda. C. Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan 1. Bank sudah memiliki kebijakan Contigency *Funding* Plan (CFP) dan sudah menjalin kerjasama dengan Bank dan atau Pihak lain sebagai sumber pendanaan pada situasi krisis.	*Considering the Bank's business activities, it is likely that the Bank will experience low Liquidity Risk as of the second semester of 2017, this is based on several factors including:* *A. Composition of Assets, Liabilities and Administrative Account Transactions* *1. Primary Liquid Assets and Secondary Liquid Assets compared to Total Assets decreased by 12.74% from the previous report period in June 2017 by 36.21% to 23.47% in December 2017.* *2. Primary Liquid Assets and Secondary Assets compared to Short-Term Funding decreased by 13.43% from the previous report period in June 2017 by 42.26% to 28.83% in December 2017.* *3. Primary Liquid Assets and Secondary Assets divided by Non-Core Funding decreased by 13.39% from the previous report period of June 2017 by 42.21% to 28.82% in December 2017.* *4. Primary liquid assets compared to Non-Short Term Funding decreased by 6.55% from the previous reporting period of June 2017 by 25.77% to 19.22% in December 2017.* *5. Non-Core Funding to Total Funding decreased by 4.71% from the previous reporting period of June 2017 by 74.83% to 70.12% in December 2017.* *6. Non-Core Funding to Total Earning Assets decreased by 19.28% from the previous reporting period of June 2017 by 109% to 89.72% in December 2017.* *7. The LFR ratio increased by 20.25% from the previous period of June 2017 by 59.32% to 79.57% in December 2017.* *B. Concentration of assets and liabilities* *1. Sources of refunds become a big potential increase liquidity risk due to credit problems.* *2. Third Party Funds of banks are more concentrated in non core funding, among others, giro Pemda.* *C. Vulnerability to Funding Needs* *1. The Bank already has a Contigency Funding Plan (CFP) policy and has established cooperation with the Bank and / or other parties as a source of funding in crisis*

ANALISIS RISIKO *LIKUIDITAS*

Kualitas Penerapan Management Risiko	Satisfactory
Kualitas Penerapan Manajamen Risiko *Likuiditas* semester II tahun 2017 dinilai memadai, hal ini didasarkan pada beberapa faktor antara lain : A. Tata kelola risiko 1. Bank telah merumuskan strategi manajemen risiko *likuiditas* dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, serta memastikan bahwa eksposur risiko *likuiditas* dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain. 2. Pengawasan Komisaris terhadap kondisi *Likuiditas* masih perlu ditingkatkan melalui pemantauan secara berkala baik pada situasi normal maupun pada situasi krisis. B. Kerangka manajemen risiko 1. Bank sudah memiliki strategi pengelolaan *likuiditas* yang memadai mencakup strategi pendanaan, manajemen aset likuid berkualitas tinggi sebagai agunan, dan rencana pendanaan darurat (Contingency *Funding* Plan/CFP) yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 58/DIR-BPD/XII/2016 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Likuditas PT BPD Papua dan ketentuan OJK mengenai Pemenuhan AL/NCD. 2. Bank telah memiliki komite pengelolaan *likuiditas* yang bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan *likuiditas* Bank berupa SSG dan ALCO. 3. Kebijakan pengelolaan risiko *likuiditas* sudah disusun sesuai dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, dan kemampuan Sumber Daya Manusia. C. Proses Manajemen risiko : 1. Bank telah melakukan identifikasi dan analisis atas setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas fungsional yang mengandung risiko likuiditas dan melakukan perhitungan likuiditas. 2. Kuantitas dan kualitas pegawai pelaksana unit manajemen risiko belum seimbang dengan kualitas pegawai pelaksana aktivitas yang terkait dengan risiko likuiditas, dimana unit manajemen risiko likuiditas belum secara penuh memahami model pengukuran dan stress test risiko likuiditas yang kompleks sesuai dengan produk bank. D. Sistem pengendalian risiko : 1. Bank sudah memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan transaksi dan proses terkait dilakukan dengan mengacu pada kebijakan, prosedur, dan limit yang telah ditetapkan serta Penerapan prinsip pemisahan fungsi telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten. 2. Masih terdapat kekurangan dalam kecukupan metode, asumsi dan indikator pengukuran risiko *likuiditas* termasuk *stress testing* sehingga berdamapak terhadap kelemahan dalam proses identifikasi dalam pengendalian intern.	*The Adjustment Quality of Liquidity Risk Management in the second semester of 2017 is considered adequate, based on several factors, among others:* *A. Risk management* *1. The Bank has formulated a liquidity risk management strategy taking into account risks to be taken and risk tolerance, as well as ensuring that liquidity risk exposures are managed in a controlled manner in accordance with internal policies and procedures as well as legislation and other provisions.* *2. Commissioners' supervision of Liquidity conditions still needs to be improved through regular monitoring both in normal situations and in crisis situations.* *B. Risk management framework* *1. The Bank already has adequate liquidity management strategy including funding strategy, high quality liquid asset management as collateral, and contingency funding plan (CFP) as stated in Directors Decree No. 58 / DIR-BPD / XII / 2016 Licudity Risk Management Policy of PT BPD Papua and OJK provisions concerning AL / NCD Compliance.* *2. The Bank has a liquidity management committee responsible for performing the Bank's liquidity management in the form of SSG and ALCO.* *3. Liquidity risk management policies have been prepared in accordance with the mission, business strategy, capital adequacy, and ability of My Source of Man.* *C. Risk Management Process:* *1. The Bank has conducted identification and analysis of every banking products and transactions and functional activities that contain liquidity risk and perform liquidity calculations.* *2. The quantity and quality of the implementing staff of the risk management unit has not been balanced with the quality of the executing staff of activities related to the liquidity risk, whereby the liquidity risk management unit has not fully understood the measurement model and the stress test of the complex liquidity risk in accordance with the bank's products.* *D. Risk control system:* *1. The Bank already has an adequate internal control system to ensure that transactions and related processes are conducted with reference to established policies, procedures and limits and Adoption of the principle of segregation of functions is adequate and consistent.* *2. There are still shortcomings in the adequacy of methods, assumptions and indicators of liquidity risk measurements including stress testing so as to pose weaknesses in the process of identification in internal control.*

ANALISIS RISIKO OPERASIONAL	
Peringkat Risiko:	*Moderate*
Inherent Risk	*Moderate*
Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Operasional tergolong cukup tinggi sampai dengan semester II tahun 2017, hal ini didasarkan pada beberapa faktor antara lain : A. Karaterisitik dan Kompleksitas Bisnis 1. Skala usaha Bank saat ini sudah memiliki 37 cabang dan 1 Kantor Pusat. 2. Pengembangan Bisnis Bank saat ini masih terkendala akibat Penetapan Bank Dalam Pengawasan Intensif oleh regulator (OJK) dan konsentrasi Bank yang sedang fokus terhadap perbaikan permasalahan kredit, tetapi terkait dengan operasional Bank masih berjalan dengan Baik. 3. Corporate action dan pengembangan bisnis baru kurang agresif, hal ini dikarenakan bank sedang konsen terhadap perbaikan permasalahan kredit. 4. Pemanfaatan tenaga outsourcing dinilai cukup kompleks hal ini dikarenakan kesiapan SDM bank yang belum siap untuk menangani hal-hal yang strategis terutama dibidang teknologi informasi serta perlu investasi yang besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap vendor. 5. Pengalihan pekerjaan pengelolaan DC, DRC dan *core banking* system (Olibs 724) diserahkan hanya pada satu vendor yaitu PT Colega Inti Pratama secara full outsourching sehingga berdampak kurangnya kemandirian bank dalam pengelolaan database. 6. Telah dilakukan penutupan 3 Kantor Cabang Pembantu yang dinilai tidak produktif yaitu KCP Kelapa Gading, KCP Mangga Dua, dan KCP Serpong. B. Sumber Daya Manusia 1. Telah dilakukan review pada system manajemen SDM yang terkait dengan assessment, pemetaan karir dan system penilaian KPI. Untuk assessment telah dilaksanakan pada level Kepala Cabang dan Kepala Depaartemen di Cabang, sedangkan untuk pemetaan karir dan penerapan KPI sedang dalam proses review 2. Masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan Diklat yang belum mengoptimalkan pegawai internal untuk memberikan training dan melakukan pelatihan melalui *e-learning*. 3. Masih terdapat kekosongan personil di unit-unit kerja tertentu sehingga terjadi rangkap jabatan dan pekerjaan. C. Teknologi Informasi 1. Bank belum pernah melakukan uji coba system security secara professional dengan menggunakan tenaga ahli eksternal untuk melakukan uji coba ketahanan system dari serangan kejahatan IT namun untuk mengatasi kondisi tersebut pelaksanaan uji security (Penetration Test) telah dianggarkan dalam RBB tahun 2018. 2. Terdapat kejadian tidak beroperasinya Kantor Cabang Wasior selama 2 hari yang disebabkan rusaknya perangkat komunikasi/ modem online. D. Fraud 1. Fraud Eksternal sebanyak 1 kasus dengan potensi kerugian sebesar Rp23.101.487.000,-. Kejadian ini terjadi akibat tidak adanya verifikasi staf analis kredit konsumer dan tidak adanya kontrol dari pimpinan terhadap pengajuan kredit pegawai ekstern. 2. Fraud Internal sebanyak 12 kasus dengan total kerugian sebesar Rp.7.888.760.294,- Fraud Internal ini terjadi diakibatkan staf yang kurang menguasai SOP, adanya kecurangan, gaya hidup yang berlebihan serta kurangnya kontrol dari pimpinan diunit kerja. E. Kejadian Eksternal 1. Bank belum memiliki sistem yang dapat memperhitungkan kerugian materialitas atas setiap kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan perasional Bank.	*Considering the Bank's business activities, the possible losses faced by the Bank from Operational Risk are quite high until the second half of 2017, this is based on several factors including:* *A. Characteristics and Business Complexity* *1. The business scale of the Bank currently has 37 branches and 1 Head Office.* *2. The Bank's business development is currently constrained by the Bank's Regulation on Intensive Supervision by the regulator (OJK) and the focus of the Bank focusing on improving credit problems, but in relation to the Bank's operations is still running well.* *3. Corporate action and new business development less aggressive, this is because the bank is concentrating on improving credit problems.* *4. Utilization of outsourced personnel is considered quite complex this is because the readiness of human resources banks are not ready to handle the things that are strategic especially in the field of information technology and need a large investment to reduce dependence on vendors.* *5. The transfer of DC management, DRC and core banking system (Olibs 724) is assigned to only one vendor, ie PT Colega Inti Pratama in full outsourcing, thus impacting the lack of bank independence in database management.* *6. The closure of 3 Sub-Branch Offices considered unproductive is Kelapa Gading KCP, KCP Mangga Dua, and KCP Serpong.* *B. Human Resources* *1. A review of the HR management system related to assessment, career mapping and KPI assessment system has been conducted. For assessment has been done at the level of Head of Branch and Head of Department in Branch, while for career mapping and application of KPI is in the process of review* *2. There is still a weakness in the implementation of Training that has not optimized internal employees to provide training and conduct training through e-learning.* *3. There is still a vacancy of personnel in certain work units resulting in double positions and jobs.* *C. Information Technology* *1. The Bank has never conducted a professional system security test by using external experts to conduct a system durability test from an IT crime attack but to overcome these conditions the implementation of the security test (Penetration Test) has been budgeted in RBB 2018.* *2. There was no operation of Wasior Branch Office for 2 days due to damaged communication device / online modem.* *D. Fraud* *1. External Fraud of 1 case with potential loss of Rp23.101.487.000,-. This incident occurred as a result of the lack of verification of the consumer credit analyst staff and the absence of control from the leadership of the credit application of external employees.* *2. Internal fraud sebanayak 12 cases with a total loss of Rp.7.888.760.294, - Internal fraud occurs due to staff who lack SOP master, the fraud, excessive lifestyle and lack of control from the leadership diunit work.* *E. External Events* *1. The Bank does not have a system that can take into account the materiality loss of any external event affecting the Bank's perational activities.*

ANALISIS RISIKO OPERASIONAL

Kualitas Penerapan Management Risiko	Fair
Kualitas Penerapan Manajamen Risiko Operasional semester II tahun 2017 dinilai cukup memadai, hal ini didasarkan pada beberapa faktor antara lain:	*The Quality of Implementation of Operational Risk Management in the second semester of 2017 is considered sufficient, it is based on several factors, among others:*
A. Tata Kelola Risiko :	*A. Risk Management:*
1. Direksi Bank sudah optimal dalam menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas kejadian Risiko Operasional sehingga mudah dalam melakukan identifikasi dan mitigasi dalam pencegahan potensi risiko operasional.	1. *The Board of Directors of Bank has been optimal in creating objective disclosure culture on Operational Risk event so it is easy to identify and mitigate in preventing potential operational risk.*
2. Direksi sudah menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan *punishment* yang efektif dan konsisten serta terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko yang optimal.	2. *The Board of Directors has established a reward policy including remuneration and punishment that is effective and consistent and integrated in the performance appraisal system in order to support the implementation of optimal risk management.*
B. Kerangka Manajemen Risiko :	*B. Risk Management Framework:*
1. Bank sudah cukup efektif menerapkan fungsi system *dual control* terutama pada penerapan Manajemen Risiko dibidang teknologi informasi yang berpotensi menimbulkan fraud.	1. *Bank has been effective enough to implement the function of dual control system, especially on the application of Risk Management in the field of information technology that has the potential to cause fraud.*
2. Masih terjadi kesalahan pencatatan akuntansi akibat dari kurangnya kompetensi SDM terhadap system pencatatan.	2. *There is still a mistake accounting recording due to lack of competence of human resources to the system of recording.*
3. Bank sudah melakukan review terhadap kebijakan manajemen risiko operasional terhadap pengendalian umum dan pengendalian spesifik mengingat bahwa banyak penyimpangan yang berpotensi meningkatkan risiko operasional bank dimasa mendatang yang tertuang dalam SK Direksi Nomor 74/DIR-BPD/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Kebijakan Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.	3. *The Bank has reviewed the operational risk management policy on general control and specific control considering that many irregularities potentially increase bank operational risk in the future as stipulated in Decree of the Board of Directors Number 74 / DIR-BPD / XII / 2017 dated December 29, 2017 on Policy Risk Management PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.*
4. Bank sudah memiliki kebijakan *Business* Contigency Management (BCM) dan sudah disosialisasikan pada sebagian besar cabang/ unit kerja.	4. *The Bank already has a Business Contigency Management (BCM) policy and has been socialized in most branches / work units.*
5. Bank sudah menjalankan kebijakan tentang penggunaan asuransi terhadap fisik asset namun belum secara keseluruhan.	5. *The Bank has implemented a policy on the use of insurance against physical assets but not as a whole.*
6. Telah dilakukan penyempurnaan/ review terhadap beberapa kebijakan dibidang perkreditan, Sumber Daya Manusia, dan manajemen risiko teknologi informasi.	6. *Improved / reviewed some policies in the field of credit, Human Resources, and information technology risk management.*
C. Proses Manajemen Risiko :	*C. Risk Management Process:*
1. Bank sudah memiliki fungsi pencatatan data atas setiap frekuensi dan dampak yang mempengaruhi eksposur risiko operasional berupa kegagalan dan kesalahan system, kelemahan system administrasi, kegagalan hubungan dengan nasabah, fraud, kesalahan perhitungan dan rekayasa akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran.	1. *The Bank already has data recording function on each frequency and impact affecting operational risk exposure in the form of failure and system error, weakness of administration system, failure of relationship with customer, fraud, miscalculation and accounting engineering, delay and payment settlement error.*
2. Bank telah melakukan identifikasi dan pengukuran terkait dengan turnover pegawai, karateristik nasabah bank, lingkungan eksternal, trend industry, struktur pasar dan kondisi ekonomi, sosial dan politik namun belum optimal dalam penerapannya.	2. *The Bank has made identification and measurement related to employee turnover, bank customer characteristics, external environment, industry trend, market structure and economic, social and political conditions but not yet optimal in its application.*
D. Sistem Pengendalian Risiko :	*D. Risk Control Systems:*
1. Bank telah menerapkan system rotasi dan mutasi secara rutin sebagai early warning untuk menghindari *self*-dealing, persekongkolan atau penyembunyian suatu dokumentasi atau transaksi yang tidak wajar.	1. *The Bank has implemented rotation and mutation system routinely as an early warning to avoid self-dealing, conspiracy or concealment of any unusual documentation or transactions.*

ANALISIS RISIKO HUKUM	
Peringkat Risiko:	*Low*Mod
Inherent Risk	*Low*Mod
Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Hukum tergolong rendah sampai dengan Semester II tahun 2017, hal ini didasarkan pada beberapa faktor antara lain : A. Faktor litigasi 1. Total potensial kerugian Bank Papua akibat perkara gugatan di Pengadilan sampai dengan bulan Desember 2017 adalah sebesar Rp295.238.094.210,-, sedangkan posisi Modal bank per Desember 2017 sebesar Rp2.557.459.836.702,-. maka potensi kerugian yang mungkin dialami oleh bank akibat dari besar gugatan tersebut dibandingkan dengan modal Bank sebesar 11.54%. 2. Sesuai data historis penanganan kasus litigasi selama semester II tahun 2017 kerugian akibat permasalahan hukum telah berhasil dimitigasi sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh Bank karena suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum. 3. Bahwa selama ini sebagian besar gugatan perdata dimenangi oleh Bank Papua, dan sampai dengan saat ini belum ada kerugian yang harus dibayar oleh Bank Papua dan kemenagan tersebut disebabkan karena dasar gugatan dari Penggugat yang tidak kuat serta manajemen Bank melalui kuasa hukumnya telah melakukan pembelaan secara maksimal. B. Faktor kelemahan perjanjian/ perikatan 1. Semua perkara perdata yang berkaitan dengan perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 2. Bahwa untuk membuat suatu perjanjian, Bank telah membangun mekanisme perjanjian melalui kajian-kajian dari unit kerja terkait dan perjanjian yang dibuat selama ini tidak pernah dimaksud untuk merugikan kedua belah pihak, karena masing-masing berada pada posisi bebas atau tidak berada dibawah tekanan. 3. Pada dasarnya perjanjian dibuat mencerminkan kesepakatan antara para pihak yang didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak serta klausula-klausula lainnya yang wajib dipatuhi oleh masing-masing pihak. 4. Selama ini tidak ada perjanjian yang dibuat yang tidak dilaksanakan, yang terjadi adalah wanprestasi dari salah satu pihak. 5. Selama ini setiap perjanjian selalu didukung dengan dokumen-dokumen asli maupun dokumen pendukung lainnya dan dapat menjadi bukti hukum dalam perkara di pengadilan. 6. Perjanjian yang dibuat Bank telah dilakukan review ulang dengan maksud untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang terjadi selama dalam pelaksanaan perjanjian. C. Faktor ketiadaan perundangan-undangan 1. Bahwa semua produk yang dikeluarkan oleh Bank telah mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, sehingga risiko yang terjadi dapat diukur. 2. Bank menggunakan Best Practice atau suatu standar perjanjian (Perjanjian Baku).	*Taking into consideration the Bank's business activities, the possible losses faced by the Bank from Legal Risk are low to Semester II of 2017, this is based on several factors including:* *A. Litigation factor* *1. The total potential loss of Bank Papua due to lawsuit case in Court until December 2017 is Rp295,238,094,210, -, while the position of bank capital per December 2017 amounted to Rp2,557,459,836,702, -. then the potential losses that may be experienced by the bank resulting from the large lawsuit compared to the Bank's capital of 11.54%.* *2. According to historical data handling cases of litigation during the second semester of 2017 losses due to legal issues have been successfully mitigated so that no losses suffered by the Bank due to a verdict from the court that has had the power of law.* *3. Whereas most civil lawsuits have been won by Bank Papua, and until now there has been no loss to be paid by Bank Papua and the winner is due to the underlying claim of the Plaintiff that is not strong and the management of the Bank through its legal counsel has conducted a defense maximum.* *B. The weakness factor of agreement / engagement* *1. All civil cases relating to the agreement have met the terms of the validity of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code .* *2. That in order to make an agreement, the Bank has established a mechanism of agreement through studies of related work units and agreements made so far have not been intended to harm either party, as each is in a free position or not under pressure.* *3. In essence, the agreement is made to reflect agreement between the parties in which there are rights and obligations of each party and other clauses which must be respected by each party.* *4. So far no agreements have been made that have not been implemented, which is the default of either party.* *5. All agreements have always been supported with original documents and other supporting documents and may be legal evidence in court cases.* *6. The agreement made by the Bank has been reviewed for the purpose of covering the weaknesses that occurred during the implementation of the agreement.* *C. Factors in the absence of legislation* *1. That all products issued by the Bank have referred to the applicable legislation, so that the risks may be measured.* *2. Bank uses Best Practice or a standard agreement (Raw Agreement).*

ANALISIS RISIKO HUKUM

Kualitas Penerapan Management Risiko	Satisfactory
Kualitas Penerapan Manajamen Risiko Hukum Semester II tahun 2017 dinilai memadai, hal ini didasarkan pada beberapa faktor antara lain :	*The Quality of the Application of Legal Risk Management for Semester II of 2017 is considered adequate, it is based on several factors, among others:*
A. Tata Kelola Risiko : 1. Tingkat Risiko hukum yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis Risiko yang bersedia diambil oleh Bank dalam rangka mencapai sasaran Bank termasuk dalam penetapan limit.	*A. Risk Management:* *1. The level of Legal Risk to be taken is the level and type of Risk that the Bank is willing to take in order to achieve the Bank's objectives including the determination of the limit.*
B. Kerangka Manajemen Risiko : 1. Strategi Manajemen Risiko Hukum disusun berdasarkan prinsip-prinsip umum yang berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Bank, dan juga mempertimbangkan Organisasi Bank.	*B. Risk Management Framework:* *1. The Legal Risk Management Strategy is structured on the basis of long-term, general-oriented principles to ensure the viability of the Bank's business, as well as to consider the Bank Organization.*
2. Penerapan sistem penilaian risiko hukum dilakukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan memastikan kepatuhan dilakukan dengan pendelegasian wewenang kepada unit-unit terkait dengan aktivitas yang mempunyai dampak risiko hukum.	*2. Implementation of a legal risk assessment system undertaken to support the decision-making process and ensure compliance is made by delegating authority to units linked to activities that have a legal risk impact.*
3. Masih terdapat kelemahan dalam hal evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur pengendalian risiko hukum secara berkala yang disesuaikan dengan perkembangan eksternal dan internal Bank, seperti perubahan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.	*3. There are still weaknesses in the evaluation and updating of legal risk control policies and procedures on a regular basis adjusted to the Bank's external and internal developments, such as changes to prevailing laws and regulations.*
C. Proses Manajemen Risiko : 1. Bank sudah melakukan pencatatan dan penatausahaan setiap kejadian, termasuk proses litigasi yang terkait dengan Risiko Hukum beserta potensi jumlah kerugian yang diakibatkan atas kejadian.	*C. Risk Management Process:* *1. The Bank has registered and administered any incident, including litigation process related to Legal Risk and the potential amount of loss caused by the incident.*
2. Bank sudah menerapkan sanksi secara konsisten dalam pemberian sanksi terhadap pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan ekstern dan intern serta kode etik internal Bank.	*2. The Bank has consistently applied sanctions in imposing sanctions on employees who have been found to have committed irregularities and violations of external and internal provisions and the Bank's internal code of conduct.*
D. Sistem Pengendalian Risiko : 1. Bank sudah melakukan kaji ulang terhadap kelemahan-kelemahan perjanjian/ perikatan namun belum ditindak lanjuti oleh *risk taking* unit.	*D. Risk Control Systems:* *1. The Bank has reviewed the weaknesses of the agreement / engagement but has not been followed up by the risk taking unit.*

ANALISIS RISIKO STRATEJIK	
Peringkat Risiko:	*Moderate*
Inherent Risk	*Moderate*
Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Stratejik tergolong cukup tinggi sampai dengan semester II tahun 2017, hal ini didasarkan pada beberapa faktor antara lain : A. Kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis 1. Bank telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa keuangan sebagai Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) sehingga Bank sangat dibatasi dalam melakukan pengembangan bisnis dalam segala lini dan akan mempengaruhi pencapaian Bisnis Bank yang telah disusun. 2. Adanya kondisi saat ini dimana terdapat permasalahan kredit yang cukup signifikan yang tercermin dari rasio NPL gross masih diatas 12.50% yang disyaratkan oleh regulator. 3. Belum adanya penyesuaian *Corporate Plan* dengan mempertimbangkan kondisi Bank terkini. B. Strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah 1. Untuk menghindarkan risiko yang besar, Bank melakukan kegiatan usaha pada pangsa pasar yang telah dikenal sebelumnya dan menyusun perencanaan strategi yang mengedepankan kehati-hatian dengan berfokus pada kredit berisiko rendah dengan Komposisi kredit konsumtif sebesar 53% dan kredit produktif sebesar 47% dari total portofilio kredit. C. Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) 1. Rasio pencapaian Deposito terhadap rencana semester II tahun 2017 sebesar 72.65%. 2. Rasio pencapaian Tabungan terhadap rencana semester II tahun 2017 sebesar 97.58%. 3. Rasio pencapaian Giro terhadap rencana semester II tahun 2017 sebesar 102.77%. 4. Rasio pencapaian Kredit yang diberikan terhadap rencana semester II tahun 2017 sebesar 102.79%. 5. Rasio pencapaian Pendapatan terhadap rencana semester II tahun 2017 sebesar 96.51%. 6. Rasio pencapaian Laba terhadap rencana semester II tahun 2017 sebesar -514.80%. 7. Rasio pencapaian Aset terhadap rencana semester II tahun 2017 sebesar 95.26%.	*Taking into account the Bank's business activities, the possible losses faced by the Bank from Strategic Risk are quite high until the second half of 2017, this is based on several factors including:* *A. Compliance strategy with business environment conditions* *1. The Bank has been established by the Financial Services Authority as a Bank Under Intensive Control (BDPI) so that the Bank is severely restricted in conducting business development in all lines and will affect the achievement of the Bank Business that has been compiled.* *2. The existence of current conditions where there are significant credit problems reflected in the gross NPL ratio is still above 12.50% required by the regulator.* *3. The absence of adjustment of Corporate Plan by considering the latest Bank condition.* *B. High-risk strategies and low-risk strategies* *1. To avoid major risks, the Bank conducts business activities on previously known market segments and prepares prudential prudential strategy planning with a focus on low-risk credit with 53% consumptive credit composition and productive loans of 47% of total portfolio credit.* *C. Achievement of Bank Business Plan (RBB)* *1. The ratio of achievement of Deposits to the plan in the second semester of 2017 amounted to 72.65%.* *2. The ratio of achievement of Savings to the plan in the second half of 2017 amounted to 97.58%.* *3. The ratio of achievement of Demand deposits to the plan for the second semester of 2017 amounted to 102.77%.* *4. Loan Achievement Ratio given to the second half plan of 2017 amounted to 102.79%.* *5. Ratio of achievement of Revenue to the plan of second semester of 2017 amounted to 96.51%.* *6. Ratio of achievement Profit against plan of second half of 2017 is -514.80%.* *7. Asset Achievement Ratio to the second semester plan of 2017 amounted to 95.26%.*

ANALISIS RISIKO STRATEJIK	
Kualitas Penerapan Management Risiko	Fair
Kualitas Penerapan Manajamen Risiko Stratejik Semester II tahun 2017 dinilai cukup memadai, hal ini didasarkan pada beberapa faktor antara lain : A. Tata Kelola Risiko : 1. Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan peningkatan efisiensi disegala sektor namun hal tersebut tidak mempengaruhi pencapaian target laba akibat pembebanan biaya CKPN yang cukup signifikan. B. Kerangka Manajemen Risiko : 1. Bank telah melakukan identifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis sehingga dapat mengantisipasi perubahan tersebut melalui kebijakan kepada unit-unit teknis. 2. Bank telah membuat pengukuran kekuatan dan kelemahan Bank yang terkait dengan posisi daya saing, posisi Bisnis Bank di industri perbankan, dan kinerja keuangan. C. Proses Manajemen Risiko : 1. Bank telah memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan stratejik dan direview secara berkala. 2. Bank sudah melakukan review terhadap kuantitas dan kualitas SDM dalam hal penempatan pegawai melalui rotasi dan mutasi secara rutin pada setiap *risk taking* unit. D. Sistem Pengendalian Manajemen risiko : 1. Bank telah melaksanakan sistem pengendalian intern di bidang perkreditan secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko Bank dengan mengacu pada prinsip pemisahan fungsi (four eyes principle) yang telah ditetapkan dalam SK Direksi Nomor 43/DIR-BPD/VII/2017 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit PT BPD Papua tanggal 31 Juli 2017. 2. Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko sudah mencakup antara lain penetapan wewenang dan tanggungjawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit.	*The Quality of Implementation of Strategic Risk Management in Semester II of 2017 is considered sufficient, it is based on several factors, among others:* *A. Risk Management:* *1. The Board of Commissioners and the Board of Directors have increased efficiency in all sectors but it does not affect the achievement of profit targets due to the significant imposition of CKPN fees.* *B. Risk Management Framework:* *1. The Bank has identified and responded to changes in the business environment so as to anticipate such changes through policies to technical units.* *2. The Bank has made measurements of Bank strengths and weaknesses related to competitive position, Bank's business position in the banking industry, and financial performance.* *C. Risk Management Process:* *1. The Bank has ensured that its management information system is adequate to support strategic planning and decision-making processes and periodically reviewed.* *2. The Bank has reviewed the quantity and quality of human resources in terms of placement of employees through rotation and mutation on a regular basis at any risk taking unit.* *D. Risk Management Control Systems:* *1. The Bank has implemented internal control system in the field of credit effectively in the application of Bank Risk Management with reference to the principle of separation of the functions (four eyes principle) as stipulated in the Decree of the Board of Directors Number 43 / DIR-BPD / VII / 2017 regarding the Credit Implementation Manual PT BPD Papua on July 31, 2017.* *2. Internal control system in the application of Risk Management includes among others the determination of authority and responsibility for monitoring compliance of policies, procedures and limits.*

ANALISIS RISIKO KEPATUHAN

Peringkat Risiko:	*Moderate*
Inherent Risk	*Moderate*
Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kepatuhan tergolong cukup tinggi sampai dengan semester II tahun 2017, hal ini didasarkan pada beberapa faktor antara lain : 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris belum terpenuhi sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan POJK tentang Tata Kelola Bank. 2. Pemegang saham sudah menetapkan komposisi calon Dewan Komisaris namun masih menunggu keputusan hasil *fit and proper test* oleh OJK. 3. Sampai dengan semester II tahun 2017 Bank telah dikenakan sanksi berupa denda sebanyak Rp358.000.000,- hal ini disebabkan permasalahan sistem interface SID yang tidak mengupdate data yang telah dilakukan *cleansing*. 4. Sampai dengan hasil pemeriksaan OJK tahun 2017 masih ditemukan adanya ketidakpatuhan Bank terhadap komitmen pemeriksaan tahun 2016 yang belum selesai ditindak lanjuti, sehingga perbaikan atas setiap kebijakan yang diperlukan untuk penyempurnaan tidak segera ditindaklanjuti oleh Bank. 5. Masih ditemukan adanya ketidakpatuhan terhadap pemenuhan mekanisme pengelolaan agunan/ jaminan kredit yang belum konsisten dikelola dengan baik mulai dari pencatatan, pengikatan, penginputan agunan ke sistem dan penyimpanan dalam khasanah atau ruang khusus. 6. Masih adanya kejadian fraud yang cukup signifikan, salah satu penyebabnya adalah adanya kelemahan dari aspek pengendalian dan pengawasan (otorisasi) atasan terhadap bawahan yang kurang efektif (pengalaman dan kompetensi) serta masih ada penerapan teknologi informasi yang kurang mengendepankan prinsip *dual control*. 7. Masih terdapat ketidakpatuhan terhadap batas waktu dan ketidaksesuaian data pelaporan seperti laporan SID, APU dan PPT. 8. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor ekternal belum sesuai dengan komitmen waktu yang telah disepakati.	*Taking into account the Bank's business activities, the Bank's possible losses from Compliance Risk are quite high until the second half of 2017, this is based on several factors including:* 1. *The number of members of the Board of Commissioners has not been fulfilled in accordance with the Company's Articles of Association and POJK on Good Corporate Governance.* 2. *The shareholders have determined the composition of the candidates for the Board of Commissioners but are still awaiting the decision of the fit and proper test results by OJK.* 3. *Up to the second semester of 2017, the Bank has been liable to a fine of Rp358.000.000, - this is due to the problem SID interface system that does not update the data that has been done cleansing.* 4. *Up to the result of OJK inspection year 2017 still found the existence of non-compliance of Bank to commit inspection year 2016 which have not yet been completed follow up, so improvement of every policy needed for improvement not immediately followed up by Bank.* 5. *Non compliance to fulfillment of collateral management mechanisms / credit guarantees that have not been consistently well managed starting from recording, binding, inputting collateral to the system and storage in khasanah or special room.* 6. *There is still a significant fraud incident, one of the causes is the weakness of the supervisory and supervisory (supervisory) aspects of the subordinate less effective (experience and competence) and there is still the application of information technology that less mengendepankan dual control principle.* 7. *There is still non-compliance with deadlines and non-compliance of reporting data such as SID, APU and PPT reports.* 8. *The follow up of audit findings by internal auditors and external auditors is not in accordance with the agreed time commitments.*

ANALISIS RISIKO KEPATUHAN

Kualitas Penerapan Management Risiko	Fair
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko terhadap Risiko Kepatuhan semester II 2017 dinilai cukup memadai, hal ini didasarkan pada beberapa faktor antara lain : A. Tata Kelola Risiko : 1. Dewan Komisaris dan Direksi belum dapat memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif dan tepat waktu, hal ini dikarenakan setiap permasalahan yang timbul tidak diikuti dengan penyusunan *action plan* oleh masing-masing unit kerja terkait sebagai bagian dari proses tindak lanjut dan pemantauan. 2. Dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan, Direksi telah memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Bank. B. Kerangka Manajemen Risiko : 1. Direksi telah mengkomunikasikan strategi Manajemen Risiko terkait risiko kepatuhan secara efektif kepada seluruh satuan kerja, manajer, dan staf yang relevan agar dipahami secara jelas. 2. Bank sudah melakukan review terhadap efektifitas kecukupan dan kesesuaian kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank agar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan terutama di Bidang Perkreditan. C. Proses Manajemen Risiko : 1. Bank telah melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Kepatuhan terhadap jenis dan kompleksitas kegiatan usaha Bank. D. Sistem Pengendalian Risiko : 1. Bank sudah memiliki sistem pengendalian intern untuk risiko kepatuhan, antara lain untuk memastikan tingkat responsif bank terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum dan ketantuan perundang-undangan. 2. Bank belum efektif dalam melakukan review kelengkapan dokumen kredit/ *compliance* check list pada unit operasional Bank.	*The Quality of Implementation of Risk Management on Compliance Risk in the second semester of 2017 is considered sufficient, it is based on several factors, among others:* *A. Risk Management:* 1. *The Board of Commissioners and the Board of Directors have not been able to ensure that any compliance issues that arise can be completed effectively and on time, this is because any problems that arise are not followed by the preparation of an action plan by each related work unit as part of the follow-up process and monitoring.* 2. *In preparing the Compliance Risk Management policy, the Board of Directors has provided clear direction on the level of Risk to be taken and Bank Risk tolerance.* *B. Risk Management Framework:* 1. *The Board of Directors has communicated the Risk Management strategy related to effective compliance risk to all relevant work units, managers and staff to be clearly understood.* 2. *The Bank has reviewed the effectiveness and adequacy of the Bank's policies, systems and procedures to comply with laws and regulations, especially in the field of credit.* *C. Risk Management Process:* 1. *The Bank has identified and analyzed several factors that may increase the exposure of Compliance Risk to the type and complexity of the Bank's business activities.* *D. Risk Control Systems:* 1. *The Bank already has an internal control system for compliance risk, among others to ensure the bank's responsiveness to deviations of generally accepted standards and legal assistance.* 2. *The Bank has not been effective in reviewing the completeness of credit documents / compliance check list on the Bank's operational unit.*

ANALISIS RISIKO REPUTASI	
Peringkat Risiko:	*Low*Mod
Inherent Risk	*Low*Mod
Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko reputasi tergolong rendah sampai dengan semester II tahun 2017, kondisi ini terjadi akibat : 1. Bank telah berupaya dalam meningkatkan kredibilitas baik kepada pemegang saham maupun para *stakeholders* mengenai kinerja Bank, walaupun secara secara *rentabilitas* Bank saat ini yang kurang memadai dikarenakan permasalahan kredit. 2. Manajemen Bank telah menerapkan kebijakan remunerasi dan *punishment* terhadap pelanggaran etika bisnis terutama yang berkaitan dengan kejadian fraud, dan memperbaiki kebijakan terhadap kelemahan kontrol internal serta mensosialisasikan dampak kejadian fraud terhadap reputasi Bank sebagai dasar penilaian masyarakat dalam penyimpan dana. 3. Rasio kredit bermasalahan yang sudah mengalami trend penurunan yang cukup baik akan sangat berdamapak terhadap perbaikan kualitas pada risiko kredit sehingga akan mempengaruhi risiko reputasi Bank dimasa mendatang. 4. Bank sudah memiliki unit kerja yang khusus menangani keluhan nasabah namun belum adanya kajian penyebab tingginya frekuensi keluhan nasabah, sehingga tidak adanya solusi yang cepat tertangani atas setiap keluhan nasabah tersebut.	*Taking into account the business activity undertaken, the possibility of losses faced by the Bank from reputational risk is low until the second half of 2017, this condition occurs due to:* *1. The Bank has endeavored in enhancing the credibility of both shareholders and stakeholders regarding the Bank's performance, although the Bank's current likelihood is inadequate due to credit problems.* *2. The Bank's management has implemented remuneration and punishment policies against business ethics violations, especially those related to fraud incidents, and improving policies on internal control weaknesses and socializing the impact of fraud incidents on the Bank's reputation as a basis for public appraisal in depositors.* *3. The ratio of non-performing loans that have experienced a fairly good decline trend will be very harmful to the quality improvement in credit risk so that it will affect the Bank's reputation risk in the future.* *4. The Bank already has a special unit to handle customer complaints but there is no review of the causes of the high frequency of customer complaints, in the absence of a solution that is quickly handled for each customer complaint.*

ANALISIS RISIKO REPUTASI	
Kualitas Penerapan Management Risiko	Satisfactory
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko terhadap Risiko Reputasi semester II tahun 2017 dinilai memadai, hal ini didasarkan pada beberapa kelemahan antara lain : A. Tata Kelola Risiko : 1. 1. Direksi sudah mengupayakan memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko Reputasi kepada satuan kerja yang membawahi pengendalian risiko reputasi, untuk mengantisipasi potensi risiko reputasi atas kondisi Bank saat ini. B. Kerangka Manajemen Risiko : 1. Bank belum menetapkan toleransi risiko reputasi yang merupakan penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil, termasuk dalam penetapan limit. 2. Pelaksanaan Manajemen Risiko Reputasi kepada satuan kerja yang membawahi pengendalian risiko reputasi dinilai belum maksimal nampak pada belum adanya kebijakan Bank yang mengatur tentang tata cara pengelolaan dan penanganan reputasi berdasarkan dampak skala dan kompleksitas pemberitaan. C. Proses Manajemen Risiko : 1. Bank sudah memiliki data statistik atas kejadian/ publikasi negatif yang terkait dengan risiko reputasi namun belum dilakukan analisa proyeksi potensi kerugian sehingga proses identifikasi, pengukuran, dan pengendalaian risiko reputasi tidak berjalan dengan maksimal. 2. Bank telah memiliki prosedur pelaporan atas publikasi negatif atau kejadian yang menimbulkan risiko reputasi termasuk tata cara penyelesaian. D. Sistem Pengendalian : 1. Bank sudah memiliki kebijakan komunikasi yang tepat dalam rangka menghadapi berita/ publikasi yang bersifat negatif atau mencegah informasi yang cenderung kontraproduktif.	*The Quality of Risk Management Implementation on Reputation Risk in second semester of 2017 is considered adequate, it is based on several weaknesses, among others:* *A. Risk Management:* *1. The Board of Directors has made an effort to pay attention to the implementation of Reputation Risk Management to the work units responsible for the reputation risk management to anticipate potential reputational risks to the Bank's current condition.* *B. Risk Management Framework:* *1. The Bank has not established a reputation risk tolerance which is a description of the level of Risk to be taken, including in the determination of the limit.* *2. Implementation of Reputation Risk Management to work units underlying reputation risk management is not maximized yet seen in the absence of a Bank policy that regulates the procedure of management and handling reputation based on the impact of scale and complexity of news.* *C. Risk Management Process:* *1. The Bank already has statistical data on negative events / publications related to reputation risk but has not been analyzed for potential loss projections so that the process of identifying, measuring, and managing reputation risk does not work maximally.* *2. The Bank already has reporting procedures for negative publications or events that pose reputational risks including settlement procedures.* *D. Control System:* *1. The Bank already has an appropriate communication policy in order to face negative news / publications or prevent information that tends to be counterproductive.*

III. Peringkat komposit GCG pada posisi Desember 2017

III. The GCG composite rankings in December 2017 position

LAPORAN SELF ASSESMENT PELAKSANAAN GCG PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA POSISI : 31 DESEMBER 2017
SELF ASSESMENT REPORT IMPLEMENTATION OF GCG PT. DEVELOPMENT BANK PAPUA POSITION: 31 DECEMBER 2017

No	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	PEROLEHAN NILAI	*RATED ASPECT*
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2	0,20	*Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners*
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	2	0,40	*Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors*
3	Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite	3	0,27	*Completeness and Implementation of Committee Duties*
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	0,17	*Handling Conflict of Interest*
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	0,12	*Implementation of Bank Compliance Function*
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	0,12	*Implementation of Internal Audit Function*
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	0,08	*Implementation of External Audit Function*
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3	0,20	*Implementation of Risk Management Function Including Internal Control System*
9	Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar	2	0,15	*Prudential Principles In Provision of Funds To Related Parties And Provision of Large Funds*
10	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal	2	0,30	*Transparency of Financial and Non Financial Condition, GCG Implementation Report and Internal Reporting*
11	Rencana Strategis Bank	3	0,13	*The Bank's Strategic Plan*
	Nilai Komposit | Predikat	**2**	**2,13**	***Composite** Value | **Predicate***

ANALISIS

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dan penerapan prinsip Tata Kelola Bank umum, maka secara umum kelemahan tersebut tidak berdampak signifikan namun memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank. Karena kelemahan-kelemahan tersebut akan berdampak terhadap peran aktif pengawasan bank dan Rencana Bisnis Bank untuk semester II tahun 2017.

IV. Peringkat komposit *earnings* pada posisi Desember 2017

IV. Composite earnings rating as of December 2017

LAPORAN PENILAIAN EARNINGS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA POSISI : 31 DESEMBER 2017
EARNINGS ASSESSMENT REPORT PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA POSITION: 31 DECEMBER 2017

No	KOMPONEN		RASIO	PERINGKAT	COMPONENT
1	Kinerja Bank Dalam Menghasilkan Laba (*Rentabilitas*)			4	*Bank Performance In Generating Profit (Profitability)*
	1	*Return on Assets* (ROA)	-9,63 %	5	*Return on Assets (ROA)*
	2	Return on Equities (ROE)	-80,84 %	5	*Return on Equities (ROE)*
	3	*Net Interest Margin* (NIM)	44,29 %	2	*Net Interest Margin (NIM)*
	4	Rasio Efisiensi (BOPO)	107,71 %	5	*Efficiency Ratio (BOPO)*
	5	Kinerja Komponen Laba (*Rentabilitas*) Aktual terhadap Proyeksi Anggaran	-	4	*Actual Component Profit (Actual) Performance of Budget Projection*
	6	Kemampuan Komponen Laba (*Rentabilitas*) dalam Meningkatkan Permodalan	-	3	*Profit Components Capability (Profitability) in Increasing Capital*
2	Sumber-Sumber Yang Mendukung *Rentabilitas*		3		*Resources That Support Profitability*
	1	Pendapatan Bunga bersih dibagi Rata-rata total aset	41,72 %	2	*Net interest income divided by Average total assets*
	2	Pendapatan Operasional selain pendapatan bunga (net) dibagi Rata-rata total aset	13,91 %	2	*Operating Income in addition to interest income (net) divided by Average assets total*
	3	Rasio Beban Overhead	22,73 %	3	*Overhead Expense Ratio*
	4	Rasio Beban Pencadangan	90,34 %	5	*Backup Load Ratio*
	5	Rasio non-core *Earnings*	0,00 %	2	*Non-core Earnings ratios*
3	Stabilitas (*Sustainability*) Komponen-Komponen Yang Mendukung *Rentabilitas*		3		*Stability (Sustainability) Components Supporting Profitability*
	1	Core ROA	-9,68 %	3	*Core ROA*
	2	Prospek *Rentabilitas* di masa datang	-	2	*Prospects for future profitability*
4	Manajemen *Rentabilitas*		3		*Profitability Management*
	1	Kemampuan Bank dalam mengelola *rentabilitas*	-	3	*The Bank's ability to manage profitability*
Nilai Komposit | Predikat				**3**	***Composite** Value | **Predicate***

ANALISIS

Penilaian Earning Bank Semester II tahun 2017 dinilai kurang memadai, hal ini didasarkan pada beberapa penilaian :

A. Kinerja *Rentabilitas*

1. *Return on Asset*s (ROA) mengalami penurunan sebesar 2.39% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar -7.24% menjadi -9.63% pada Desember 2017.
2. Return on Equities (ROE) mengalami penurunan sebesar 16.55% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar -64.29% menjadi -80.84% pada Desember 2017.
3. *Net Interest Margin* (NIM) mengalami kenaikkan sebesar 21.29% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar 23.00% menjadi 44.29% pada Desember 2017.
4. Rasio BOPO mengalami kenaikan sebesar 7.22% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar 100.49% menjadi 107.71% pada Desember 2017.

B. Sumber-sumber yang mendukug *Rentabilitas*

1. Pendapatan bungan bersih terhadap total Semester II tahun 2017 mengalami kenaikkan sebesar 20.27% dari periode sebelumnya Juni 2017 sebesar 21.45% menjadi 41.72% pada Desember 2017.
2. Pendapatan Operasional Selain Pendapatan Bunga Dibagi Rata-rata Total Aset Semester II tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 9.93% dari periode sebelumnya Juni 2017 sebesar 3.98% menjadi 13.91% pada Desember 2017.
3. Rasio Beban Overhead Semester II tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 10.03% dari periode sebelumnya Juni 2017 sebesar 12.70% menjadi 22.73% pada Desember 2017.
4. Rasio Beban Pencadangan dibandingkan Rata-rata total aset Semester II tahun 2017 mengalami kenaikkan sebesar 6.77% dari periode sebelumnya Juni 2017 sebesar 83.57% menjadi 90.34% pada Desember 2017.

C. Komponen-komponen yang mendukung *rentabilitas*

1. Rasio Core ROA Semester II tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 21.22%% dari periode sebelumnya Juni 2017 sebesar 11.57%% menjadi -9.68% pada Desember 2017.
2. Secara prospek *rentabilitas*, Bank memiliki kemampuan dalam mengelola sumber *rentabilitas*, namun dengan kondisi yang saat ini dihadapi Bank mengenai meningkatnya risiko kredit maka bank diwajibkan membentuk CKPN yang cukup besar yang bersumber dari pendaptan Bank. Sehingga kondisi ini sangat mempengaruhi menurunkan kinerja *rentabilitas* Bank dan mengurangi porsi permodalan Bank dimasa mendatang.

D. Manajemen *Rentabilitas*

1. Secara prospek *rentabilitas*, Bank memiliki kemampuan dalam mengelola sumber *rentabilitas* yang ada saat ini dan memiliki perencanaan yang terukur dalam mempertahankan dan meningkatkan *rentabilitas*, namun dengan kondisi yang dihadapi Bank terhadap peningkatan risiko kredit maka bank diwajibkan membentuk CKPN yang cukup besar yang bersumber dari pendapatan Bank. Sehingga kondisi ini sangant berpotensi menurunkan kinerja *rentabilitas* Bank dan mengurangi komposisi permodalan.

Assessment of Bank Earning in the second semester of 2017 is considered inadequate, it is based on several assessments:

A. Performance of Rentability

1. *Return on Assets (ROA) decreased by 2.39% from the previous reporting period of June 2017 by -7.24% to -9.63% in December 2017.*
2. *Return on Equities (ROE) decreased by 16.55% from the previous reporting period of June 2017 by -64.29% to -80.84% in December 2017.*
3. *Net Interest Margin (NIM) experienced an increase of 21.29% from the previous report period of June 2017 of 23.00% to 44.29% in December 2017.*
4. *BOPO ratio increased by 7.22% from the previous reporting period of June 2017 by 100.49% to 107.71% in December 2017.*

B. Resources that support Rentability

1. *Net interest income to total Semester II of 2017 increased by 20.27% from the previous period of June 2017 by 21.45% to 41.72% in December 2017.*
2. *Operating Income In addition to Interest Income Divided The Average Total Assets in the second semester of 2017 decreased by 9.93% from the previous period of June 2017 by 3.98% to 13.91% in December 2017.*
3. *The Overhead Ratio of Overhead Expenses in the second semester of 2017 decreased by 10.03% from the previous period of June 2017 by 12.70% to 22.73% in December 2017.*
4. *Reserves Expense Ratio compared to the Average Total Assets of Semester II of 2017 experienced an increase of 6.77% from the previous period of June 2017 of 83.57% to 90.34% in December 2017.*

C. Components that support profitability

1. *Core Ratio of Semester II of 2017 decreased by 21.22 %% from the previous period of June 2017 by 11.57 %% to -9.68% in December 2017.*
2. *In terms of profitability prospect, the Bank has the capability to manage the source of profitability, but with the conditions currently faced by the Bank regarding the increased credit risk, the bank is required to establish a substantial CKPN derived from the Bank's income. So that this condition is very affect to reduce the performance rentability of Bank and reduce the portion of Bank capital in the future.*

D. Profitability Management

1. *In terms of profitability prospect, the Bank has the ability to manage the current sources of profitability and has measurable planning in maintaining and increasing rentability, but with the conditions faced by the Bank to increase credit risk, the bank is required to establish a large CKPN derived from revenue Bank. Thus, this condition could potentially reduce the Bank's profitability performance and reduce the composition of capital.*

V. Peringkat komposit *capital* pada posisi Desember 2017

V. The composite capital rating at December 2017 position

LAPORAN PENILAIAN CAPITAL PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA POSISI : 31 DESEMBER 2017 *CAPITAL ASSESSMENT REPORT PT. DEVELOPMENT BANK PAPUA POSITION: 31 DECEMBER 2017*				
NO	KOMPONEN		PERINGKAT	*KOMPONEN*
1	Kecukupan Modal Bank		2	*Kecukupan Modal Bank*
	1	Rasio Kecukupan Modal	3	*Rasio Kecukupan Modal*
	a	Modal dibagi ATMR	2	*Modal dibagi ATMR*
	b	Modal inti (Tier-1) dibagi ATMR	2	*Modal inti (Tier-1) dibagi ATMR*
	c	Penanganan aset produktif bermasalah	2	*Penanganan aset produktif bermasalah*
	d	Penanganan aset kualitas rendah	4	*Penanganan aset kualitas rendah*
	2	Kecukupan modal bank untuk mengantisipasi potensi sesuai profil Risiko	2	*Kecukupan modal bank untuk mengantisipasi potensi sesuai profil Risiko*
	a	Kecukupan modal Bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko	2	*Kecukupan modal Bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko*
2	Pengelolaan Permodalan		3	*Pengelolaan Permodalan*
	1	Manajemen permodalan Bank	2	*Manajemen permodalan Bank*
	2	Kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal dan sumber eksternal	3	*Kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal dan sumber eksternal*
NILAI KOMPOSIT | PREDIKAT			**2**	**NILAI KOMPOSIT | PREDIKAT**

ANALISIS

Penilaian Permodalan Bank semester II tahun 2017 dinilai memadai, terdapat beberapa faktor penilaian antara lain :

A. Kecukupan Modal Bank

1. Rasio Modal dibagi ATMR mengalami kenaikan sebesar 4.80% dari laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar 19.15% menjadi 23.95% pada Desember 2017.
2. Rasio Modal Inti terhadap Total ATMR mengalami kenaikan sebesar 4.85% dari periode sebelumnya Juni 2017 sebesar 18.17% menjadi 23.02% pada Desember 2017.
3. Rasio Penangan aset produktif bermasalah mengalami penurunan sebesar 12.51% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar 28.13% menjadi 15.62% pada Desember 2017.
4. Rasio penangan Aset Kualitas Rendah mengalami penurunan sebesar 28.74% dari periode laporan sebelumnya Juni 2017 sebesar 81.00% menjadi 52.26% pada Desember 2017.

B. Pengelolaan Permodalan :

1. Bank sydah mempunyai kebijakan yang tertuang dalam SK Direksi Nomor 75?DIR-BPD/XII/2017 tentang Kebijakan Manajemen Permodalan PT BPD Papua yang mengatur mengenai sumber-sumber permodalan baik internal maupun eksternal, termasuk dukungan dari pemegang saham serta tindakan yang dilakukan bank pada saat modal berada di bawah target yang ditetapkan.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam hal permodalan :

1. Dewan Komisaris belum dapat memastikan bahwa bank memiliki modal yang memadai untuk mendukung pertumbuhan bisnis bank.
2. Komisaris belum melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan, strategi dan prosedur pengelolaan modal dan melakukan penyesuaian apabila dibutuhkan.

Bank Capital Assessment in the second semester of 2017 is considered adequate, there are several assessment factors, among others:

A. Adequacy of Bank Capital

1. *Capital Ratios divided by RWA increased by 4.80% from the previous report of June 2017 by 19.15% to 23.95% in December 2017.*
2. *Core Capital Ratio to Total RWA increased by 4.85% from the previous period of June 2017 by 18.17% to 23.02% in December 2017.*
3. *Handling ratio of non performing loans decreased by 12.51% from the previous report period of June 2017 by 28.13% to 15.62% in December 2017.*
4. *The Ratio of Low Quality Assets has decreased by 28.74% from the previous report period of June 2017 by 81.00% to 52.26% in December 2017.*

B. Capital Management:

1. *Bank Sydah has a policy as stipulated in the Decree of the Board of Directors Number 75 DIR-BPD / XII / 2017 regarding Capital Management Policy of PT BPD Papua which regulates the sources of capital both internal and external, including support from shareholders and actions taken by banks at a time when the capital is below the target set.*

Matters that need attention in terms of capital:

1. *The Board of Commissioners has not been able to ensure that banks have sufficient capital to support the bank's business growth.*
2. *The Commissioner has not conducted periodic evaluations of capital management policies, strategies and procedures and made adjustments where necessary.*

Penilaian Profil Risiko

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, pasal 24 diatur bahwa :

1. Bank wajib menyampaikan laporan profil Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan;
2. Laporan profil Risiko disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember;
3. Laporan profil Risiko disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan;
4. Namun dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank menyampaikan laporan profil Risiko di luar jangka waktu yang ditetapkan di atas.

Berdasarkan POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Penetapan penilaian peringkat Risiko merupakan dasar bagi Bank untuk mengategorikan peringkat Risiko Bank. Peringkat Risiko bagi Bank dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat, yaitu yaitu 1 (*low*), 2 (*low* to *moderate*), 3 (*moderate*), 4 (*moderate* to *high*) dan 5 (*high*) untuk tingkat risiko inheren dan predikat risiko komposit. Sedangkan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu 1 (strong), 2 (satisfactory), 3 (fair), 4 (marginal) dan 5 (unsatisfactory).

Untuk periode Desember 2017 penilaian Profil Risiko Bank Papua berada pada Predikat Komposit 3 (Moderat) hal ini dikarenakan sebagai dampak permasalahan yang dihadapi Bank pada bidang perkreditan sehingga berdampak terhadap risiko lainnya.

Risk Profile Assessment

In accordance with OJK Regulation Number 18 / POJK.03 / 2016 dated March 16, 2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks, article 24 stipulated that:

1. *Banks are required to submit Risk profile reports to the Financial Services Authority;*
2. *The Risk profile report is submitted quarterly for the positions of March, June, September, and December;*
3. *The Risk profile report shall be submitted no later than 15 (fifteen) working days after the end of the reporting month;*
4. *Where necessary, however, the Financial Services Authority may request the Bank to submit a Risk profile report beyond the period specified above.*

Based on POJK No. 18 / POJK.03 / 2016 dated March 16, 2016 Implementation of Risk Management for Commercial Banks, Risk rating appraisal is the basis for the Bank to categorize Bank Risk rating. The risk rating for the Bank is categorized into 5 (five) ratings, namely 1 (low), 2 (low to moderate), 3 (moderate), 4 (moderate to high) and 5 (high) for inherent risk level and predicate of composite risk . As for the ranking of risk management application quality, it is categorized into five ratings: 1 (strong), 2 (satisfactory), 3 (fair), 4 (marginal) and 5 (unsatisfactory).

For the period of December 2017 the assessment of Bank Risk Profile of Papua is in Predicate Composite 3 (Moderat) this is because as the impact of problems faced by the Bank in the field of loan thereby affecting other risks.

LAPORAN PROFIL RISIKO BANK
BANK RISK PROFILE REPORT

Jenis Risiko	Periode Desember 2017					
	Risiko Inheren	Predikat	Kualitas Manajemen Risiko		Komposit	Peringkat Komposit(Pk)
	Nilai		Nilai	Predikat	Nilai	
Risiko Kredit	3,81	ModHi	2,92	Fair	3,45	PK-3
Risiko Pasar	1,64	*Low*Mod	2,06	Satisfactory	1,80	PK-2
Risiko *Likuiditas*	2,50	*Moderate*	2,00	Fair	2,30	PK-2
Risiko Operasional	3,32	*Moderate*	2,76	Fair	3,09	PK-3
Risiko Hukum	1,54	*Low*Mod	2,25	Fair	1,82	PK-2
Risiko Stratejik	3,39	*Moderate*	3,00	Fair	3,24	PK-3
Risiko Kepatuhan	2,67	*Moderate*	2,50	Fair	2,60	PK-3
Risiko Reputasi	2,30	*Moderate*	2,26	Satisfactory	2,28	PK-2
NILAI KOMPOSIT	**2,82**	*MODERATE*	**2,54**	**FAIR**	**2,71**	PK-3

ANALISIS

Penilaian Profil Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Papua periode Desember 2017 berada pada Predikat **Komposit 3 (Moderat)** hal ini dikarenakan sebagai dampak permasalahan yang dihadapi Bank pada bidang perkreditan sehingga berdampak terhadap risiko lainnya.

*Assessment of Risk Profile of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua period December 2017 is in Predicate **Composite 3 (Moderat)** this is because as the impact of problems faced by Bank in loan field so that impact to other risk.*

Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG)

Untuk penyampaian Penilaian atas penerapan tata kelola Bank Bank Papua dilakukan untuk periode laporan tahun 2017 masih mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum. Meskipun secara ketentuan Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagai bentuk perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.

Namun mengingat bahwa pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, untuk Bank Papua baru diberlakuan untuk penerapan tata kelola Bank periode 2017, maka secara umum penerapan tata kelola Bank tahun 2016 cukup baik, yang tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip penerapan tata kelola Bank tersebut.

Tata Kelola Bank tahun 2017 mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank. Karena Kelemahan-kelemahan signifikan tersebut akan berdampak terhadap RBB Tahun 2017.

Penilaian *Rentabilitas* (*Earnings*)

Kondisi *rentabilitas* Bank Papua memadai dan pencapaian laba lebih besar dari pada periode Desember 2016. Untuk peringkat Komposit *Rentabilitas* Bank Papua, tergambarkan sebagai berikut :

Good Corporate Governance (GCG) Assessment

For the submission of Assessment on the implementation of Bank Bank Papua governance conducted for the reporting period of 2017 still refers to Bank Indonesia Regulation Number 8/4 / PBI / 2006 concerning Implementation of GCG for Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation Number 8/14 / PBI / 2006 and Circular Letter of Bank Indonesia Number 15/15 / DPNP dated 29 April 2013 on the Implementation of GCG for Commercial Banks. Although the provisions of the Financial Services Authority have issued Regulation of Financial Services Authority Number 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks as a form of amendment to Bank Indonesia Regulation Number 8/14 / PBI / 2006.

However, considering the enactment of the Financial Services Authority Regulation No. 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, for the newly enacted Bank for implementation of Bank's GCG for the period of 2017, then generally the implementation of Bank 2016 governance quite well, as reflected in the adequate fulfillment of the Bank's principles of governance.

The Bank's GCG in 2017 reflects the Bank's Management has implemented a generally good implementation of Good Corporate Governance. This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. If there is a weakness in the application of the principle of Good Corporate Governance, then the weakness is quite significant and require sufficient attention from the management of the Bank. Because of these significant weaknesses will have an impact on RBB Year 2017.

Earnings Assessment

The condition of profitability of Bank Papua is adequate and the profit achievement is greater than in the period of December 2016. Profitability for the Composite ranked the Bank Papua, described as follows :

NO		KOMPONEN	PERINGKAT
1	Kinerja Bank Dalam Menghasilkan Laba (*Rentabilitas*)		3
	1	*Return on Assets* (ROA)	3
	2	Return on Equities (ROE)	3
	3	*Net Interest Margin* (NIM)	2
	4	Rasio Efisiensi (BOPO)	2
	5	Kinerja Komponen Laba (*Rentabilitas*) Aktual terhadap Proyeksi Anggaran	4
	6	Kemampuan Komponen Laba (*Rentabilitas*) dalam Meningkatkan Permodalan	3
2	Sumber-Sumber Yang Mendukung *Rentabilitas*		3
	1	Pendapatan Bunga bersih dibagi Rata-rata total aset	3
	2	Pendapatan Operasional selain pendapatan bunga (net) dibagi Rata-rata total aset	5
	3	Rasio Beban Overhead	2
	4	Rasio Beban Pencadangan	3
	5	Rasio non-core *Earnings*	1
3	Stabilitas (*Sustainability*) Komponen-Komponen Yang Mendukung *Rentabilitas*		4
	1	Core ROA	5
	2	Prospek *Rentabilitas* di masa datang	2
4	Manajemen *Rentabilitas*		3
	1	Kemampuan Bank dalam mengelola *rentabilitas*	3
NILAI KOMPOSIT | PREDIKAT			**3**

ANALISIS

Penilaian Earning Bank periode Desember 2016 dinilai cukup memadai, kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja Bank dalam menghasilkan laba dan mendukung pertumbuhan permodalan Bank dimasa mendatang dinilai masih cukup. Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penilaian *rentabilitas* bank anatara lain :

1. Posisi *Return on Assets* Bank periode Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 0.4% dari periode laporan sebelumnya Juni 2016 sebesar 1.91% menjadi 1.51% pada Desember 2016, hal ini disebabkan karena adanya penurunan laba Bank dari periode Juni 2016 sebesar Rp449.065.676.920,- menjadi sebesar Rp359.566.689.651,- pada Desember 2016.
2. Posisi Return on Equities Bank periode Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 2.07% dari periode laporan sebelumnya Juni 2016 sebesar 10.90% menjadi 8.83% pada Desember 2016. Hal ini disebabkan adanya penurunan laba bersih bulan Juni 2016 sebesar Rp317.245.882.328,- menjadi sebesar Rp230.363.745.695.-.
3. Posisi *Net Interest Margin* (NIM) periode Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 0.15% dari periode laporan sebelumnya Juni 2016 sebesar 7.52% menjadi 7.37% pada Desember 2016.
4. Rasio BOPO Bank periode Desember 2016 mengalami kenaikkan sebesar 4.16% dari periode laporan sebelumnya Juni 2016 sebesar 79.81% menjadi 83.97% pada Desember 2016.
5. Posisi Pendapatan bungan bersih terhadap total aset periode Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 0.06% dari periode laporan sebelumnya Juni 2016 sebesar 6.97% menjadi 6.91% pada Desember 2016.
6. Rasio Pendapatan Operasional Selain Pendapatan Bunga (net) Dibagi Rata-rata Total Aset periode Desember 2016 mengalami kenaikkan sebesar 0.11% dari periode laporan sebelumnya Juni 2016 sebesar 0.68% menjadi 0.79% pada Desember 2016.
7. Rasio Beban Overhead dibagi rata-rata Total Aset periode Desember 2016 mengalami kenaikkan sebesar 1.58% dari periode laporan sebelumnya Juni 2016 sebesar 2.89% menjadi 4.47% pada Desember 2016.
8. Rasio Beban Pencadangan terhadap total aset periode Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 5.43% dari periode laporan sebelumnya Juni 2016 sebesar 11.8% menjadi 6.37% pada Desember 2016.

Terhadap stabilitas earning dan prospek *rentabilitas* bank dimasa mendatang diharapkan bank dapat meningkatkan pengelolaan terhadap sumber *rentabilitas* yang ada saat ini dan menyusun perencanaan yang terukur dalam mempertahankan dan meningkatkan *rentabilitas*, serta upaya mengendalikan biaya operasional yang berpotensi mengurangi sumber *rentabilitas* dan permodalan bank.

The Bank's Earning Rating for the period of December 2016 is considered sufficient. This condition illustrates that the Bank's performance in generating profit and supporting the Bank's future capital growth is still sufficient. There are several things to consider in the assessment of bank rentability among others:

1. *The position of Return on Assets Bank for the period of December 2016 has decreased by 0.4% from the previous report period in June 2016 by 1.91% to 1.51% in December 2016, this is due to the decrease in Bank profit from June 2016 period of Rp449,065,676,920, - to be Rp359.566.689.651, - in December 2016.*
2. *The position of Return on Equities Bank in the period of December 2016 has decreased by 2.07% from the previous report period in June 2016 by 10.90% to 8.83% in December 2016. This is due to a decrease in net profit in June 2016 of Rp317.245.882.328, - to be Rp230.363.745.695.-.*
3. *Net Interest Margin (NIM) position in December 2016 decreased by 0.15% from the previous report period in June 2016 by 7.52% to 7.37% in December 2016.*
4. *Bank's OEOI ratio for the period of December 2016 experienced an increase of 4.16% from the previous reporting period of June 2016 of 79.81% to 83.97% in December 2016.*
5. *Net Interest Income to total asset for the period of December 2016 decreased by 0.06% from the previous report period in June 2016 by 6.97% to 6.91% in December 2016.*
6. *Ratio of Operating Income In addition to Interest Income (net) Shared Average Total Assets for December 2016 experienced an increase of 0.11% from the previous report period in June 2016 by 0.68% to 0.79% in December 2016.*
7. *Ratio of Overhead Expenses divided by average Total Assets for the period of December 2016 has increased by 1.58% from the previous reporting period in June 2016 by 2.89% to 4.47% in December 2016.*
8. *Reserve Expense Ratio to total assets for the period of December 2016 decreased by 5.43% from the previous report period in June 2016 by 11.8% to 6.37% in December 2016.*

With regard to earnings stability and prospect of bank rentability in the future, it is expected that banks can improve the management of the current source of rentability and develop measurable planning in maintaining and increasing profitability, as well as controlling operational costs that potentially reduce the source of bank profitability and capital.

Penilaian Permodalan (*Capital*)

Bank Papua memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan, kompleksitas dan skala usaha Bank Papua. Untuk peringkat Komposit Permodalan Bank Papua, tergambarkan sebagai berikut :

Capital Assessment

Bank Papua has adequate capital and adequacy of capital to its risk profile, which is accompanied by strong capital management in accordance with the complexity and scale of the business of Bank Papua. For the ranking of Bank Papua Capital Composite, it is described as follows:

NO	KOMPONEN		PERINGKAT
1	Kecukupan Modal Bank		2
	1	Rasio Kecukupan Modal	3
	a	Modal dibagi ATMR	1
	b	Modal inti (Tier-1) dibagi ATMR	1
	c	Penanganan aset produktif bermasalah	3
	d	Penanganan aset kualitas rendah	5
	2	Kecukupan modal bank untuk mengantisipasi potensi sesuai profil risiko	2
	a	Kecukupan modal Bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko	2
2	Pengelolaan Permodalan		3
	1	Manajemen permodalan Bank	2
	2	Kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal dan sumber eksternal	3
NILAI KOMPOSIT | PREDIKAT			**2**

ANALISIS

Penilaian Permodalan Bank periode Desember 2016 dinilai memadai terhadap profil risikonya disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank. Hal ini didasarkan pada :

1. Rasio Total Modal dibagi ATMR mengalami kenaikan sebesar 11.84% dari laporan sebelumnya Juni 2016 sebesar 19.65% menjadi 31.49% pada Desember 2016.
2. Rasio Modal Inti terhadap Total ATMR mengalami kenaikkan sebesar 10.48% dari periode sebelumnya Juni 2016 sebesar 18.64% menjadi 29.12% pada Desember 2016.
3. Total ATMR 3 (tiga) risiko material sebesar Rp13.943.394.133.091,- dan modal minimum yang dibutuhkan (8% dari total ATMR) sebesar Rp1.115.471.530.647,- sedangkan Modal yang dimiliki oleh Bank sebesar Rp2.621.808.241.334,-, sehingga Bank masih memiliki surplus modal sebesar Rp1.180.976.323.212,38 dengan posisi CAR = 18,80%.
4. Berdasarkan hasil *self Assessment* profil risiko Bank posisi Juni 2016 berada pada peringkat 3 (PK-3), sehingga untuk memenuhi peraturan Regulator yang berlaku, maka Kecukupan Pemenuhan Modal Minumum (KPMM) Bank ditambah *Capital* Buffer yang wajib dimiliki sesuai penilaian Bank sebesar 11,83%.

The Bank's Capital Assets for the period of December 2016 is considered adequate to its risk profile accompanied by strong capital management in accordance with the characteristics, business scale, and complexity of the Bank's business. It is based on:

1. *The ratio of Total Capital divided by ATMR has increased by 11.84% from the previous report of June 2016 by 19.65% to 31.49% in December 2016.*
2. *Core Capital Ratio to Total RWA increased by 10.48% from the previous period of June 2016 by 18.64% to 29.12% in December 2016.*
3. *Total RWA 3 (three) material risk of Rp13,943,394,133,091, - and the minimum required capital (8% of total RW) of Rp1.115.471.530.647, - while the Capital owned by the Bank is Rp2.621.808.241.334, -, so the Bank still has a capital surplus of Rp1,180,976,323,212,38 with CAR position = 18,80%.*
4. *Based on the result of self assessment of risk profile of Bank position of June 2016 is ranked 3 (PK-3), so to fulfill regulation of applicable regulation, the Minimum Capital Adequacy Ratio (KPMM) of Bank plus Capital Buffer must be owned according to Bank rating 11.83%.*

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Evaluasi atas efektivitas Sistem Manajemen Risiko dilakukan secara berkala oleh Komite Pemantau Risiko meliputi aktivitas :

1. Review dan monitoring implementasi manajemen risiko;
2. Penyusunan Laporan Analisa Risiko dan Kepatuhan secara berkala;
3. Rapat pembahasan terkait risiko di tingkat Direksi maupun Dewan Komisaris;
4. Melakukan pengukuran implementasi budaya risiko melalui survey kepada sejumlah responden.

Sedangkan Divisi Manajemen Risiko sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko sebagai berikut :

1. Dalam setiap pengambilan keputusan/ tindakan Bank harus mempertimbangkan risiko usaha, maka setiap kebijakan dan aktivitas harus dilakukan kajian manajemen risiko;
2. Secara rutin melakukan kajian terhadap draft kebijakan, revisi kebijakan dan produk/aktivitas baru dari satuan kerja operasional;
3. melakukan sosialisasi *Risk Awareness* dan *Risk Culture* sebagai upaya dalam membangun budaya risiko pada setiap aktivitas;
4. Melakukan pemantauan terhadap posisi Risiko *Likuiditas* Bank;
5. Melakukan pemantauan terhadap eksposur Risiko Bank;
6. Menilai pelaksanaan efektivitas sistem manajemen risiko dengan laporan profil risiko yang meliputi pengelolaan risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko *likuiditas*, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko stratejik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
7. Membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program tata kelola Bank;
8. Melaporkan Laporan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum);
9. Membentuk unit kerja Manajemen Risiko cabang pada seluruh unit operasional Bank yang mana bertanggungjawab menyusun laporan profil risiko cabang dan membuat kajian manajemen risiko yang masih dalam lingkup wewenang cabang;
10. Memberi penugasan kepada masing-masing satuan kerja dan divisi untuk melakukan penilaian profil risiko Bank dan selanjutnya akan di review oleh Divisi Manajemen Risiko.

Evaluation of the Implementation of Risk Management System

Evaluation of the effectiveness of the Risk Management System shall be conducted periodically by the Risk Oversight Committee covering the following activities:

1. *Review and monitor the implementation of risk management;*
2. *Preparation of periodic Risk and Compliance Analysis Reports;*
3. *Risk-sharing discussions at the Board of Directors and Board of Commissioners level;*
4. *Measuring the implementation of risk culture through surveys to a number of respondents.*

While the Risk Management Division as the Risk Management Unit evaluates the effectiveness of the risk management system as follows:

1. *In any decision-making the Bank shall consider business risks, any policies and activities shall be subject to a risk management review;*
2. *Regularly review the policy draft, revision of new policies and products / activities of the operational work unit;*
3. *Socialize Risk Awareness and Risk Culture as an effort to build risk culture in every activity;*
4. *Monitoring the Bank's Liquidity Risk position;*
5. *Monitoring Bank risk exposure;*
6. *Assess the implementation of the effectiveness of risk management system with risk profile report which includes risk management for loan risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputation risk and strategic risk as regulated in OJK Regulation No. 18 / POJK. 03/2016 dated March 16, 2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks;*
7. *Establish and implement an integrated corporate risk management program that is part of the implementation of the Bank's GCG program;*
8. *KPMM Report (Minimum Capital Adequacy Requirement);*
9. *Establish a branch risk management unit at all operational units of the Bank which is responsible for preparing reports of branch risk profiles and making risk management studies still within the scope of branch authority;*
10. *Assign assignments to each work unit and division to conduct a risk profile assessment of the Bank and subsequently to be reviewed by the risk management division.*

Kecukupan Sistem Informasi Manajemen

Dalam rangka mendukung proses evaluasi efektivitas Sistem Manajemen Risiko, Bank Papua sudah menerapkan sistem manajemen risiko dengan bekerja sama dengan unit bisnis sebagai partner kerja yaitu dengan membentuk manajemen risiko cabang. Dengan demikian, unit manajemen risiko mempunyai orientasi bisnis dan unit bisnis juga mempunyai orientasi manajemen risiko, diharapkan penerapan manajemen risiko menjadi harmonis.

Dalam mengelola bank juga diperlukan harmonisasi antara pengembangan bisnis dan *risk management*, agar terdapat iklim kerja yang terkendali dengan baik sehingga tujuan akhir memperoleh laba secara berkesinambungan dapat dicapai. Bank menyadari dengan cara ukur apapun, soal risiko tidak dapat diprediksi secara tepat. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan tetap diperlukan *judgment* yang berkembang sesuai dengan bertambahnya pengalaman. Dengan demikin, Bank Papua sebagai langkah mitigasi risiko menggabungkan antara ilmu pengukuran risiko dengan seni dalam setiap pengambilan keputusan penting sehingga keputusan dapat diambil dengan *relative* cepat tanpa meninggalkan perhitungan kuantitatif sebagai dasar dan bagian dari pengambilan keputusan tersebut.

Dengan manajemen risiko seperti diuraikan diatas, bank dapat melakukan identifikasi unit bisnis atau produk mana yang memberikan nilai tambah terbesar bagi bank sehingga bank dapat mengonsentrasikan pengembangan pada unit yang memberikan nilai tambah yang paling besar, atau dimana bank memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaing. Dengan demikian, bank dapat melakukan alokasi model dan sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien, dalam upaya memberikan imbal hasil optimal bagi para *stakeholders*.

Adequacy of Management Information Systems

In order to support the process of evaluating the effectiveness of the Risk Management System, Bank Papua has implemented a risk management system in collaboration with the business unit as a working partner by establishing branch risk management. Thus, the risk management unit has a business orientation and business units also have a risk management orientation, it is expected that the implementation of risk management becomes harmonious.

In managing the bank also required a harmonization between business development and risk management, so there is a well controlled working climate so that the ultimate goal of obtaining profits on an ongoing basis can be achieved. Banks realize by any measure, the risk is not predictable accurately. Therefore, in making decisions still needed judgment that evolves in accordance with increasing experience. Thus, Bank Papua as a risk mitigation step combines risk measurement with art in every important decision making so that decisions can be taken relatively quickly without leaving a quantitative account as the basis and part of the decision making.

With risk management as described above, banks can identify which business units or products provide the greatest added value to the bank so that the bank can concentrate the development on the unit that gives the largest added value, or where the bank has advantages compared to competitors. Thus, banks can allocate their models and resources more efficiently, in an effort to provide optimal returns for stakeholders.

Fungsi Kepatuhan
Compliance Function

Kegiatan usaha Bank terus mengalami perubahan dan peningkatan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan sehingga kompleksitas kegiatannya semakin tinggi. Kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin meningkat tersebut mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar. Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha Bank yang semakin besar, diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut. Upaya-upaya tersebut dapat bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) sangat diperlukan untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha Bank yang diperkirakan akan terjadi. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan peran dan Fungsi Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan dalam pengelolaan Risiko Kepatuhan.

The Bank's business activities continue to experience changes and improvements in line with the development of information technology, globalization, and financial market integration so that the complexity of its activities is higher. The increasing complexity of the Bank's business activities has resulted in greater challenges and risk exposures. Given the growing challenges and risks of the Bank's business, various efforts are needed to mitigate these risks. Such efforts can be both preventive (ex-ante) and curative (ex-post). An ex-ante effort is needed to reduce or minimize the potential risks of the Bank's business activities that are expected to occur. Therefore it is necessary to increase the role and Compliance Function as well as the compliance work unit in the management of Compliance Risk.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK Nomor: 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, diatur Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) maupun kuratif (*ex-post*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan Prinsip Syariah (bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah), serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
Pengelolaan Risiko Kepatuhan yang baik dan tepat waktu diharapkan dapat meminimalisasi dampak risiko sedini mungkin. Dengan demikian peran dan Fungsi Kepatuhan maupun satuan kerja kepatuhan ke depan tidak hanya melihat suatu kejadian yang bersifat preventif (*ex-ante*) melainkan juga harus mampu mengelola Risiko Kepatuhan agar sejalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pursuant to Regulation of Financial Service Authority Number POJK Number: 46 / POJK.03 / 2017 concerning Implementation of Compliance Function of Commercial Bank, regulated Compliance Function is a series of actions or measures that are ex-ante (preventive) and curative (ex-post) to ensure that the policies, regulations, systems, procedures and business activities conducted by the Bank are in compliance with the provisions of the Financial Services Authority and the prevailing laws and regulations, including in accordance with the Sharia Principles (for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units) Bank compliance with commitments made by the Bank to the Financial Services Authority and / or other regulatory authorities.
A good and timely Compliance Risk Management is expected to minimize the impact of risk as early as possible. Thus the role and Compliance Function as well as future compliance work units not only see an event that is preventive (ex-ante) but also must be able to manage the Compliance Risk in line with the prevailing regulations.

Lingkup Fungsi Kepatuhan

Pokok-pokok Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan fungsi kepatuhan pada Bank Umum adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;

Scope of Compliance Function

The Principles of the Financial Services Authority Regulations for the implementation of compliance functions with Commercial Banks are as follows:

1. *To realize the implementation of Compliance Culture at all levels of organization and business activities of the Bank;*
2. *Managing the Compliance Risk faced by the Bank;*

3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; dan
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
5. Pelaksanaan fungsi kepatuhan menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan, Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan agar menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*).

3. Ensure that the policies, regulations, systems and procedures and business activities undertaken by the Bank are in compliance with the provisions of the Financial Services Authority and the provisions of laws and regulations, including the Sharia Principles for sharia commercial banks and sharia business units; and
4. Ensure the Bank's compliance with commitments made by the Bank to the Financial Services Authority and / or other regulatory authorities.
5. Implementation of the compliance function emphasizes the active role of all compliance organization elements consisting of the Board of Commissioners, the Director in charge of the Compliance Function, the Compliance Unit and compliance working units to manage compliance risks in order to avoid conflict of interest.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Struktur organisasi Fungsi Kepatuhan Bank Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum serta telah diatur dalam kebijakan internal bank yang terdiri atas :

1. Direktur Kepatuhan adalah anggota Direksi yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membawahi Fungsi Kepatuhan Bank dan Satuan Kerja Kepatuhan pada Bank.
2. Divisi Kepatuhan adalah Unit Kerja di Kantor Pusat yang merupakan Satuan Kerja Kepatuhan pada Bank dan bertugas melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank.
3. Dewan Komisaris adalah yang melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Hukum serta Satuan Kerja Anti Fraud sebagaimana yang tergambar pada struktur dibawah ini:

Organizational Structure Compliance Function

Organizational Structure Bank Compliance Function Referring to the Regulation of OJK No: 46 / POJK.03 / 2017 concerning Implementation of Compliance Function of Commercial Banks and has been regulated in internal bank policy consisting of:

1. Compliance Director is a member of the BOD that has been approved by the Financial Services Authority, to oversee the Compliance Function of the Bank and the Compliance Unit at the Bank.
2. Compliance Division is a Work Unit at the Head Office which is a Compliance Unit at the Bank and is in charge of performing Bank Compliance Function.
3. The Board of Commissioners shall exercise active oversight of the implementation of the Bank's Compliance Function.

To perform its functions, duties and responsibilities, the Compliance Director is assisted by the Compliance Division, Risk Management Division and Legal Division and the Anti Fraud Work Unit as illustrated in the following structure:

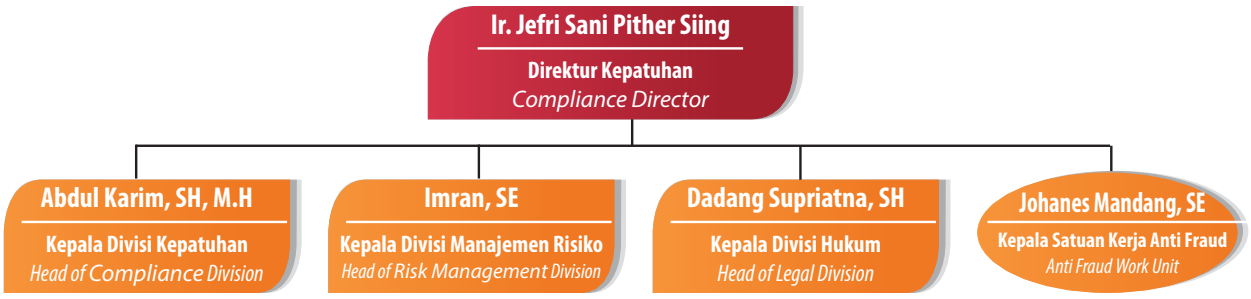

Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Independensi dan Kriteria

Pasal 7

1. Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi.
2. Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.
3. Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dilarang membawahi fungsi:
   a. Bisnis dan Operasional;
   b. Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank;
   c. Treasury;
   d. Keuangan dan Akuntansi;
   e. Logistik dan pengadaan barang atau jasa;
   f. Teknologi informasi; dan/atau
   g. Audit intern
4. Calon Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan wajib memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan, Pemberhentian, dan/atau Pengunduran Diri Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Pasal 9

Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan di Bank dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan. Proses pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan Perseroan telah dilaksanakan dan diatur sebagai berikut :

1. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan mengacu pada ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Umumdan telah melalui *Fit and Proper Test* sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku;
2. Dalam hal Direktur Kepatuhan untuk sementara tidak dapat menjalankan tugas jabatannya, maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali;

Director in Charge of Compliance Function

Independence and Criteria

Article 7

1. *The Director in charge of the Compliance Function shall comply with the requirements of independence.*
2. *President Director and / or Vice President Director may not concurrently serve as Director in charge of Compliance Function.*
3. *Directors in charge of the Compliance Function are prohibited from functioning:*
   a. *Business and Operations;*
   b. *Risk management making decisions on the Bank's business activities;*
   c. *Treasury;*
   d. *Finance and Accounting;*
   e. *Logistics and procurement of goods or services;*
   f. *Information Technology; and / or*
   g. *Internal Audit*
4. *Prospective Directors in charge of Compliance Functions shall have adequate integrity and knowledge of the provisions of the Financial Services Authority and the provisions of legislation.*

Appointment, Termination, and / or Resignation of the Director in charge of the Compliance Function

Article 9

The Director in charge of the Compliance Function at the Bank is executed by the Compliance Director. The process of appointment, dismissal and / or resignation of the Director in charge of the Company's Compliance Function has been implemented and regulated as follows:

1. *The appointment, dismissal and / or resignation of the Director in charge of the Compliance Function shall refer to the stipulations concerning the appointment, dismissal and / or resignation of members of the Board of Directors as referred to in the Bank Indonesia provisions regulating Commercial Banks and through the Fit and Proper Test in accordance with the provisions Applicable Bank Indonesia;*

2. *In the event that the Compliance Director is temporarily unable to perform his / her job duties, the execution of the respective duties shall be temporarily supersed by another Director until the Compliance Director may perform his / her duties again;*

3. Dalam hal Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan mengundurkan diri atau habis masa jabatannya, maka Bank segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan, ditunjuk salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan;
4. Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan, tidak dirangkap oleh Direktur Utama dan atau Wakil Direktur Utama dan atau Direktur yang membawahi fungsi-fungsi yang dapat mempengaruhi independensinya;
5. Setiap penggantian jabatan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan senantiasa dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. In the event that the Director in charge of the Compliance Function withdraws or terminates his term of office, the Bank shall immediately appoint a substitute of the Director in charge of the Compliance Function and during the process of the replacement of the Director in charge of the Compliance Function, one of the other Directors shall temporarily exercise the duties of the Director in charge of the Function Obedience;
4. Director performing duties as Director in charge of the Compliance Function, shall not be acloaned by the President Director and or the Vice President Director and / or the Director in charge of functions which may affect his independence;

5. Any change of position of Director in charge of the Compliance Function shall always be reported to the Financial Services Authority.

Profil Singkat Direktur Kepatuhan Bank Papua

Direktur Kepatuhan Bank Papua saat ini dijabat oleh Jefri Sani Pither Siing, Lahir di Palu, 17 Agustus 1963. Terhitung tanggal 06 Maret 2017 resmi menjabat sebagai Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua periode 2017-2021. Menyelesaikan pendidikan Sarjana tahun 1989 di Universitas Cenderawasih. Jabatan terakhir Kepala Kantor Bank Papua Cabang Timika sejak Maret 2016.

Brief Profile of Bank Papua Compliance Director

The Compliance Director of Bank Papua is currently held by Jefri Sani Pither Siing, Born in Palu, August 17, 1963. As of March 6, 2017, he was the Compliance Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua period 2017-2021. Graduated with a Bachelor degree in 1989 at Cenderawasih University. The last position was Timika Branch Manager since March 2016.

Tugas dan Tanggungjawab

POJK Nomor: 46 /POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tetang PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN BANK UMUM

Tugas dan tanggungjawab Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan, paling kurang mencakup :

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi ;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan

Duties and Responsibilities

POJK Number: 46 /POJK.03/2017 dated July 12, 2017 THE IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE FUNCTIONS OF COMMERCIAL BANK

The duties and responsibilities of the Director in charge of the Compliance Function shall, at a minimum include:

1. To formulate strategies to encourage the creation of a Bank Compliance Culture;
2. Propose compliance policies or compliance principles to be determined by the Board of Directors;

3. Establish compliance systems and procedures that will be used to develop the Bank's internal rules and guidelines;
4. Ensure that all Bank policies, regulations, systems, procedures and activities are in compliance with Bank Indonesia regulations and prevailing laws and regulations, including Sharia Principles for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
5. Minimizing Bank Compliance Risk;
6. Takes precautions so that policies and / or decisions taken by the Board of Directors of Banks or the heads of Foreign Bank Branch Offices do not deviate from Bank Indonesia regulations and prevailing laws and

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bertindak sebagai koordinator atas penerapan Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha Bank untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
8. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara triwulanan dan laporan Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Satuan Kerja Kepatuhan

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya, Direktur Kepatuhan Bank dibantu oleh satuan kerja Kepatuhan yang dalam hal ini adalah Divisi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan merupakan unit independen yang membantu pelaksanaan tugas dari Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan Bank dipimpin oleh Kepala Divisi yang telah memenuhi kriteria sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana yang diatur dalam dalam POJK No. 46/ POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan beserta Divisi Kepatuhan wajib memegang teguh independensi dalam memberikan pendapat tanpa memihak kepada kepentingan pihak lain, menjunjung tinggi integritas serta tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/ golongan di luar kepentingan Bank. Pejabat dan staf di satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggungjawab Fungsi Kepatuhan.

Kriteria & Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Kriteria kepala satuan kerja kepatuhan:
1. Memenuhi persyaratan independensi;
2. Menguasai ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan; dan
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*compliance culture*).

regulations;
7. *To act as coordinator for the implementation of Risk Management and Compliance Function on all business activities of the Bank to achieve good corporate governance;*
8. *Perform other tasks related to the Compliance Function.*

In relation to the implementation of its duties and responsibilities, the Compliance Director has submitted a report on the implementation of the Compliance Director's duties to the President Director with copies to the Board of Commissioners on a quarterly basis and the Compliance Director's report to the Financial Services Authority (OJK) each semester within the stipulated deadline.

The Compliance Work Unit

To perform its functions, duties and responsibilities, the Compliance Director of the Bank is assisted by a Compliance work unit in this case the Compliance Division. The Compliance Unit is an independent unit assisting with the performance of the duties of the Director in charge of the Compliance Function and directly responsible to the Director in charge of the Compliance Function. The Bank's Compliance Work Unit is led by a Head of Division who has met the criteria as Head of the Compliance Work Unit as stipulated in POJK No. 46 / POJK.03 / 2017 dated July 12, 2017 on the Implementation of Commercial Bank Compliance Function.

In performing the compliance function, the Compliance Director and the Compliance Division are required to uphold the independence of giving an impartial opinion to the interests of others, upholding integrity and not using information obtained for personal / group interests other than the Bank's interests. Officials and staff in the compliance work unit are prohibited from being placed in a position to face the conflict of interest in performing the Compliance Functional responsibilities.

Criteria & Appointment of Head of Compliance Unit

Criteria for head of compliance work unit:
1. *Meet the requirements of independence;*
2. *Mastering the provisions of Bank Indonesia and prevailing laws and regulations;*
3. *Not performing any other duties outside of the Compliance Function; and*
4. *Having a high commitment to implement and develop Compliance Culture (compliance culture).*

Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian kepala satuan kerja kepatuhan wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia/OJK.

The appointment, dismissal or replacement of the compliance work unit shall be reported to Bank Indonesia / OJK.

Profil Singkat Kepala Divisi Kepatuhan Bank Papua

Divisi Kepatuhan Bank Papua dipimpin oleh seorang Kepala Divisi Kepatuhan yaitu Abdul Karim, Lahir di Karumbu Wawo (Bima) pada tanggal 18 Juni 1964. Bekerja di Bank Papua sejak tahun 1991. Menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan sejak tanggal 20 April 2012 berdasarkan SK Direksi Nomor: 72/KEPEG/IV/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Ahli Tugas Pegawai. Memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Cenderawasih tahun 1990 dan Magister Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2011 dan saat ini sedang mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum / S3 di Universitas Hasanuddin Makassar.

Brief Profile of Head Compliance Division of Bank Papua

The Compliance Division of Bank Papua was led by a Chief Compliance Division, Abdul Karim, Born in Karumbu Wawo (Bima) on June 18, 1964. Worked at Bank Papua since 1991. Served as Chief Compliance Division since 20 April 2012 based on Decree of Directors Number: 72 / KEPEG / IV / 2012 dated 20 April 2012 on the Employee Duties Experts. Obtained his law degree at Cenderawasih University in 1990 and Magister of Law at Hasanuddin University Makassar in 2011 and is currently attending Doctoral Program of Law / Doctoral Science at Hasanuddin University Makassar.

Tugas dan Tanggungjawab

Dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan, Divisi Kepatuhan secara umum bertanggungjawab untuk :

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Duties and responsibilities

In order to implement the Compliance Function, the Compliance Division is generally responsible for:

1. *Make steps in order to support the creation of Compliance Culture in all Bank business activities at every level of the organization;*
2. *To identify, measure, monitor and control the Compliance Risk by referring to Bank Indonesia regulation concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks;*
3. *Assess and evaluate the effectiveness, adequacy, and conformity of policies, regulations, systems and procedures owned by the Bank with applicable laws and regulations;*
4. *Review and / or recommend updating and refining policies, provisions, systems and procedures held by the Bank in accordance with Bank Indonesia regulations and prevailing laws and regulations, including Sharia Principles for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;*
5. *Make efforts to ensure that the Bank's policies, regulations, systems and procedures, and operations are in conformity with Bank Indonesia regulations and prevailing laws and regulations;*
6. *Perform other tasks related to the Compliance Function.*

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka meningkatkan budaya kepatuhan Bank, satuan kerja kepatuhan telah menyusun program kerja Fungsi Kepatuhan untuk tahun 2017 yang meliputi serangkaian aktifitas pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh manajemen dan pegawai Perseroan bertanggungjawab mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan. Sepanjang tahun 2017 Bank senantiasa telah melakukan sosialisasi Budaya Kepatuhan secara berkelanjutan kepada pegawai Perseroan yang bertujuan untuk meningkatkan *Awareness* tentang Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan aktifitasnya pada masing-masing unit kerja diantaranya melalui pembekalan dan internalisasi kepatuhan dalam pembekalan pegawai baru maupun dalam training refreshment bagi pegawai *existing* yang dilakukan melalui metode in class training.
2. Satuan Kerja Kepatuhan Bank berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko yang merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko Perseroan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Efektivitas pengelolaan risiko kepatuhan dimuat dalam Laporan Profil Risiko Kepatuhan.
3. Melakukan kajian atas seluruh draft kebijakan yang akan diterbitkan serta produk dan aktifitas baru yang akan diluncurkan, kajian dimaksud adalah untuk upaya memastikan bahwa kebijakan serta produk dan aktifitas baru dimaksud telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan Regulator dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Senantiasa memberikan sosialisasi atas ketentuan pihak eksternal yang baru dikeluarkan oleh regulator serta Peraturan Perundang-undangan. Materi sosialisasi yang disampaikan adalah ringkasan pokok-pokok ketentuan eksternal serta gap analysis dengan ketentuan internal Perseroan. Materi sosialisasi tersebut disampaikan kepada unit kerja terkait untuk memastikan penerapan ketentuan tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak regulator .
5. Melakukan pengkajian dan penilaian terhadap kebijakan dan ketentuan internal Perseroan yang berlaku sebagai bagian dari rangkaian proses untuk menciptakan dan membangun budaya kepatuhan dari setiap unit bisnis di dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, serta untuk memastikan bahwa peraturan regulator yang terkait telah diterapkan dalam aktivitas unit bisnis.

Implementation of Compliance Job Program

In order to improve the Bank's compliance culture, the compliance work unit has established a Compliance Function work program for 2017 that includes a series of implementation activities as follows:

1. *All management and employees of the Company are responsible for realizing the Compliance Culture. Throughout the year 2017, the Bank continuously disseminates the Compliance Culture to employees of the Company which aims to increase Awareness of Compliance in carrying out its duties and activities in each work unit such as through debriefing and internalization of compliance in the provision of new employees and in training refreshment for existing employees which is done through in-class training method.*
2. *The Bank's Compliance Work Unit coordinates with the Risk Management Division which is the Company's Risk Management Unit to identify, measure, monitor and control compliance risks by referring to the Bank Indonesia Regulation concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks. The effectiveness of compliance risk management is contained in the Compliance Risk Profile Report.*
3. *Review the entire draft policy to be issued and new products and activities to be launched, the review is to ensure that the new policies and products and activities are in compliance with the provisions of the Regulatory and Legislation.*
4. *Always provide socialization on the provisions of external parties issued by new regulators and legislation. The socialization material presented is a summary of the main points of the external provisions and gap analysis with internal requirements of the Company. The socialization material is submitted to the relevant work unit to ensure the application of the provisions as stipulated by the regulator.*
5. *Conduct assessment and assessment of the Company's internal policies and regulations as part of a series of processes to create and build a culture of compliance from each business unit in carrying out its daily duties, and to ensure that relevant regulatory regulations have been applied in unit activities business.*

6. Menjalankan fungsi monitoring untuk memastikan agar pelaksanan suatu produk atau transaksi sesuai dengan kebijakan internal dan peraturan Regulator yang berlaku.
7. Berupaya untuk memenuhi seluruh komitmen kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa keuangan dan otoritas yang berwenang lainnya. Untuk memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator dan otoritas berwenang tersebut, Divisi Kepatuhan Bank secara terus menerus melakukan monitoring kepada unit-unit kerja terhadap seluruh komitmen yang diwajibkan. Bentuk komitmen tersebut dapat berasal dari hasil audit, surat Bank Indonesia, Otoritas Jasa keuangan dan otoritas yang berwenang lainnya maupun kewajiban pelaporan sesuai ketentuan regulator yang berlaku. Hasil dari pemantauan terhadap pemenuhan komitmen dilaporkan secara berkala dalam Laporan Kepatuhan kepada Otoritas Jasa keuangan, Direksi dengan tembusan Dewan Komisaris.

6. Perform a monitoring function to ensure that the implementation of a product or transaction complies with the applicable internal policies and regulations of the Regulator.
7. Attempts to fulfill all commitments to Bank Indonesia, the Financial Services Authority and other competent authorities. To ensure compliance with commitments made to the regulator and the competent authority, the Bank's Compliance Division continually monitors the work units for all required commitments. Such commitments may result from audit results, Bank Indonesia letter, Financial Services Authority and other authorized authorities as well as reporting obligations in accordance with applicable regulatory requirements. The results of monitoring of commitment fulfillment are reported periodically in the Compliance Report to the Financial Services Authority, the Board of Directors with a copy of the Board of Commissioners.

Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan berupaya untuk melakukan pengembangan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia dilingkungan Satuan Kerja Kepatuhan melalui keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan sertifikasi kepatuhan, seminar baik yang diselenggarakan oleh internal Bank maupun pihak eksternal. Adapun program pengembangan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia tahun 2017 yang telah dilaksanakan oleh pegawai dan pejabat Divisi Kepatuhan adalah sebagai berikut :

Complaiance Function Competence Development

The Compliance Unit seeks to develop the competence and quality of Human Resources within the Compliance Working Unit through participation in education, compliance certification training, seminars organized by internal Banks and external parties. The competency development program and quality of Human Resources in 2017 that have been implemented by employees and officials of the Compliance Division are as follows:

PENGEMBANGAN KOMPETENSI FUNGSI KEPATUHAN
COMPETENCE DEVELOPMENT OF COMPLIANCE FUNCTION

No	Jenis Pengembangan Kualitas SDM	Peserta	Penyelenggara
1	Administrasi Kredit Batch 2	Pegawai Mpp	PT. Multi Talenta *Consulting*
2	Analisa Kredit	Kepala Divisi Kepatuhan	Talents Indonesia
3	Transformasi Bank Papua	Kepala Departemen Apu & Ppt (KYC)	Daniel Saputro
4	*Good Corporate Governance* (GCG)	Kepala Departemen Apu & Ppt (KYC)	PT. Multi Talenta *Consulting*
5	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko	Pegawai Divisi Kepatuhan	PT. Multi Talenta *Consulting*
6	Sosialisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik)	Pegawai Spesialis Pengaduan Nasabah	PT. Dian Artha Tama
7	Workshop Pengaturan Dan Simulasi Perhitungan Giro Wajib Minimum (Gwm)	Pegawai Spesialis Pengaduan Nasabah	Talents Indonesia
8	Sosialisasi Dan Operasional BI-RTGS, SKNBI, DHN dan TNP	Pegawai Divisi Kepatuhan	Kementerian Keuangan Ri Kanwil Maluku Papua
9	Sosialisasi *Four Eyes Principle* Dan Segmentasi Kredit	Kepala Departemen Kepatuhan	Bank Papua
10	Sosialisasi *Four Eyes Principle* Dan Segmentasi Kredit	Kepala Departemen Kepatuhan	PT. Dian Artha Tama
11	*Good Corporate Governance* (GCG)	Kepala Departemen Kepatuhan	PT. Synergi Daya Utama
12	Sosialisasi Dan Operasional BI-RTGS, SKNBI, DHN dan TNP	Senior Executive Spesialis Kebijakan Dan Prosedur	PT. Multi Talenta *Consulting*
13	Pembinaan Dan Penyelamatan Kredit Bermasalah	Pegawai Spesialis Monitoring Dan Pelaporan GCG	PT. Multi Talenta *Consulting*

Penyesuaian Dengan Peraturan Yang Ada

Bank telah menyediakan secara lengkap pedoman, sistem dan prosedur untuk seluruh unit kerja, baik operasional maupun non operasional, yang senantiasa ter up date dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dan perundang–undangan yang berlaku. Untuk mendukung pelaksanaan berbagai aturan tersebut, bank mencanangkan pelaksanaan fungsi konsultatif dan sosialisasi, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dan akan diupayakan secara bertahap dengan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan Bank.

Sepanjang tahun 2017, Bank telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap PBI/POJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta pemenuhan komitmen yang disepakati, baik kepada pihak internal maupun eksternal, serta melakukan perubahan beberapa ketentuan internal bank sehingga sesuai dengan ktentuan regulator dan kondisi saat ini, yaitu kebijakan terkait :

1. Perubahan *standar operating Prosedure* (SOP) Struktur Organisasi;
2. Perpanjangan masa tugas komite Dewan komisaris;
3. Struktur Organisasi dan Profil Pekerjaan (Job *Profile*);
4. Pelaksanaan Hapus Buku Kredit Macet Tahun 2017;
5. Perubahan pedoman pengadaan Barang/Jasa;
6. Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2017;
7. Wewenang pemberian *special rate* bunga deposito;
8. Kewenangan transaksi tunai, pemindahbukuan dan otorisasi sesuai tingkatan user pada sistem core banking;
9. Segmentasi Bank Papua Card;
10. Pedoman *business* continuity plan (BCP) & Disasterrecove Plan (DRP) BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP;
11. Perubahan pedoman transaksi repurchase Agreement (REPO)/Reverse Repurchase Agreement (Reverse Repo);
12. Ketentuan mutase, rotasi, promosi dan demosi pegawai di lingkungan kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
13. Wewenang pengoperasian system Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) Generasi II, system kliring nasional Bank Indonesia (SKNBI) generasi II, bank indonesia *Scripless securities settlement system* (BI-SSSS) Generasi II, dan Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP) dan Guava System PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;

Pemberlakuan pembuatan kode billing pajak dengan sarana *host to host* ke Direktorat Jenderal pajak pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua

Adjustments With Existing Rules

The Bank has provided a complete set of guidelines, systems and procedures for all work units, both operational and non-operational, which are always up to date and in accordance with applicable laws and regulations. To support the implementation of the various rules, the bank proclaimed the implementation of consultative and socialization functions, so that the established targets can be realized and will be pursued gradually with priority scale in accordance with the needs of the Bank.

Throughout the year 2017, the Bank has sought to maintain compliance with applicable PBI / POJK and legislation, other internally defined compliance standards, provisions on Good Corporate Governance, as well as the fulfillment of agreed commitments, both to internal parties as well as external, and make changes to some internal provisions of the bank so that in accordance with the provisions of the regulator and the current conditions, namely related policies:

1. *Changes in stanhdar Operating Procedure (SOP) Organizational Structure;*
2. *Extension of the commissioner committee duties;*
3. *Organizational Structure and Job Profile;*
4. *Implementation of the written off 2017;*
5. *Changes in procurement of Goods/Services guidelines;*
6. *Revised Bank Business Plan (RBB) Year 2017;*
7. *Authority granting special rate of deposit interest;*
8. *Authority of cash transactions, book-entry and authorization at the user's level of the core banking system;*
9. *Bank Papua Card Segmentation;*
10. *BI-RTGS business continuity plan (BCP) & Disasterrecove Plan (DRP) manual, BI-SSSS, BI-ETP;*
11. *Changes to repurchase agreement (REPO) / Reverse Repurchase Agreement (Reverse Repo) transaction guidelines;*
12. *Terms of mutation, rotation, promotion and demotion of employees in the working environment of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;*
13. *The authority to operate the Bank Indonesia system of Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) Generation II, the second-generation Indonesian Banking Clearing System (SKNBI) II, Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) Generation II, and Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP) and Guava System PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;*

The application of tax billing code by means of host to host to Directorate General of tax at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua

Walaupun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, menyangkut pemahaman dan disiplin pegawai maupun sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku, dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktek-praktek prinsip tata kelola perusahaan yang Baik dan budaya kepatuhan benar-benar melekat dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Secara umum pelaksanaan kepatuhan telah berjalan baik dengan meningkatnya pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian, adanya percepatan waktu penyelesaian uji kepatuhan terhadap rancangan prosedur dan kebijakan, analisa dampak peraturan eksternal terhadap kebijakan internal Bank dengan sistem dan frekuensi yang lebih baik.

Nevertheless, there are still things that need to be improved, regarding the understanding and discipline of employees and the control system for the implementation of the applicable regulations, so that continuous improvements will continue to be implemented so that the implementation of Good Corporate Governance principles and compliance cultures is really inherent in implementation of daily work. In general, compliance implementation has been running well with the increased implementation of prudential principles, the acceleration of compliance test time to the design of procedures and policies, analysis of the impact of external regulations on the Bank's internal policies with better system and frequency.

Indikator Kepatuhan

Berkaitan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian, kegiatan operasional Bank selama tahun 2017 tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat tercermin dari :

Compliance Indicators

In connection with the implementation of the prudential principle, the Bank's operational activities during 2017 do not deviate from the prevailing provisions, it can be reflected from:

INDIKATOR LIMIT RISIKO RASIO BANK
RISK LIMIT INDICATORS RATIO BANK

No.	Parameter/Eksposur Risiko	*Risk* Appetite	*Risk* Tolerance	Pertimbangan	*Consideration*
1	KPMM	14%	>18.5%	Bentuk perwujudan dalam penerapan visi misi Bank	*Form of embodiment in the implementation of the mission vision of the Bank*
2	*Non Performing Loan* (NPL) Gross	4.85%	<7.75%	Bentuk perwujudan bank dalam penyelesaian kredit bermasalah	*Form of bank embodiment in the settlement of non performing loan*
3	*Non Performing Loan* (NPL) Net	2.48%	<3.11%	Batas maksimum regulator rasion NPL net 5%.	*The maximum limit of NPL net rate regulator is 5%.*
4	BOPO	78%	<85%	Menjaga tingkat efisiensi Bank	*Maintain Bank efficiency*
5	ROA	3.20%	>1.65%	Menjaga kestabilan pertumbuhan dan kelangsungan usaha Bank tanpa mengabaikan risiko bisnis yang dihadapi.	*Maintaining the stability of growth and business continuity of the Bank without ignoring the business risks faced.*
6	ROE	22.53%	>11.27%	Bentuk perwujudan dalam pencapaian visi dan misi Bank.	*Form of embodiment in achieving the vision and mission of the Bank.*
7	NIM	8.53%	>6.53%	Bentuk perwujudan dalam pencapaian visi dan misi Bank.	*Form of embodiment in achieving the vision and mission of the Bank.*
8	LDR	78%	<92%	Batas bawah ketentuan BI = 78%	*The lower limit of BI terms = 78%*

Dari parameter yang ditetapkan Bank Indonesia, rata-rata rasio Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2017 menunjukkan tingkat rasio Bank yang sehat dan tidak ada pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku

From the parameters set by Bank Indonesia, the average Bank Rating ratio of 2017 indicates a sund level of Bank ratios and no significant violations against the provisions of Bank Indonesia or other applicable laws and regulations

Benturan Kepentingan

Bank Papua memiliki ketentuan tentang Pencegahan terjadinya benturan kepentingan di lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 60/DIR-BPD/IX/2008 tanggal 23 September 2008 dan telah memiliki Buku Pedoman Kerja Benturan Kepentingan Buku III, SK Direksi

Conflict of Interest

Bank Papua has provisions on the prevention of conflict of interest in the environment of PT. Bank Pembangunan Daerah Papuain accordance with the Decree of the Board of Directors Number 60 / DIR-BPD / IX / 2008 dated 23 September 2008 and already has the Workbook of Conflicts of Interest Book III, SK Directive No.101.A /

No.101.A/DIR-BPD/XI/2013 yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi karyawan dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan dan sesama karyawan dan jenis transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

DIR-BPD / XI / 2013 which may is used as a guide for employees in dealing with customers, partners and fellow employees and types of transactions that contain potential conflicts of interest.

Kode Etik Insan Bank

Bank Papua telah memiliki *Code Of Conduct* yang dikenal dengan sebutan 'Kode Etik Bank Papua' yang didalamnya memuat serangkaian nilai dan perilaku yang harus dipenuhi segenap Insan Bank Papua sesuai SK Direksi No.70/DIR-BPD/XII/2004 tentang Kode Etik Bank Papua (*Code Of Conduct*).

Bank Code of Conduct

Bank Papua has a Code of Conduct known as the ' Bank Papua Code of Conduct' which contains a set of values and behaviors that must be fulfilled by all Bank Papua Insiders in accordance with Decree No.70 / DIR-BPD / XII / 2004 of the Board of Bank Indonesia (Code of conduct).

Larangan Menerima Dan/Atau Memberi Hadiah

Dalam SK Direksi No.70/DIR-BPD/XII/2004 tentang Kode Etik (*Code Of Conduct*) Bank Papua sudah memuat tentang pemberian/ atau penerimaan hadiah baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk uang, barang, atau sesuatu yang berharga maupun jamuan kepada nasabah, pemasok, atau pejabat pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan/ berpotensi berkurangnya Independensi atau Objektifitas dalam pengambilan keputusan

Prohibition of Gratification

In the Decree of the Board of Directors No.70 / DIR-BPD / XII / 2004 concerning the Code of Conduct of Bank Papua has included the giving or receipt of prize gifts, either directly or indirectly in the form of money, goods, or something valuable or entertainment to customers, suppliers, or government officials with a view to influencing the decision-making process / potentially reducing Independence or Objectivity in decision making

Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Bank terus berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang dan Peraturan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan terorisme (PPT) yang berlaku, dan berupaya untuk turut mencegah, mendeteksi serta melaporkan kepada pihak berwenang. Untuk mendukung hal tersebut Bank telah memiliki Departemen Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) yang berada di bawah Divisi Kepatuhan.

Anti Money Laundering Program (APU) and Terrorism Financing Prevention (PPT)

The Bank continues to commit itself to implement the Laws and Regulations on the applicable Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Prevention (PPT) Program, and seeks to help prevent, detect and report to the authorities. To support this, the Bank has a Department of Anti Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (APU-PPT) under the Compliance Division.

Beberapa aktivitas terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Some activities related to the Implementation of Anti Money Laundering (APU) Program and Counter Terrorism Financing (PPT) throughout 2017 are as follows:

Laporan Pelaksanaan APU & PPT

1. Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan

Sesuai dengan Undang Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan POJK Nomor 12/ POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Bagi Bank Umum maka Bank Papua telah melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan ke Pusat Pelaporan dan Analisis

APU & PPT Implementation Report

1. Liabilities of Financial Transactions Reporting

In accordance with Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering and POJK Number 12 / POJK.01 / 2017 on the Implementation of Anti-Money Laundering Program of Terrorism Financing Prevention in Financial Services Sector,Program Absorption For Commercial Banks, Bank Papua has implemented reporting obligations of financial transactions to the Financial

Transaksi Keuangan (PPATK) dalam bentuk Laporan LTKT (Laporan Transaksi Keuangan Tunai) dan LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan).

Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK) in the form of LTKT Report (Cash Transaction Report) and LTKM (Financial Transaction Report Suspicious).

Penyampaian Laporan LTKT oleh setiap Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu ke Departemen APU PPT Divisi Kepatuhan Kantor Pusat dilakukan secara on line melalui aplikasi APU PPT dan selanjutnya dilaporkan ke PPATK oleh Departemen APU PPT Divisi Kepatuhan melalui aplikasi GRIPS PPATK.

Submission of LTKT Report by each Branch Office and Sub-Branch Office to APU Department of PPT Head Office Compliance Division is done on line through APU PPT application and subsequently reported to PPATK by APU Department of PPT Compliance Division through GRIPS PPATK application.

Untuk penyampaian Laporan LTKM dilakukan oleh Divisi Kepatuhan berdasarkan:

a. Hasil analisa LTKM yang disampaikan oleh Kantor Cabang/KCP atas transaksi yang diidentifikasi memenuhi unsur mencurigakan.
b. Permintaan yang disampaikan PPATK ke Bank Papua

Pelaporan LTKM ke PPATK oleh Departemen APU PPT dilakukan melalui aplikasi GRIPS CTR Client dan dilengkapi dengan pengiriman dokumen pendukung LTKM yang berupa bukti rekening koran, copy warkat transaksi, informasi profil nasabah dan profil (WIC) penyetor dan hal-hal lain yang terkait dengan proses analisa transaksi yang memenuhi unsur mencurigakan.

For the submission of the LTKM Report conducted by the Compliance Division by:

a. The results of the LTKM analysis submitted by the Branch Office / KCP to the identified transactions meet the suspicious elements.
b. Request submitted by PPATK to Bank Papua

LTKM Reporting to PPATK by APU PPT Department is done through GRIPS CTR Client application and completed with the submission of LTKM supporting documents in the form of proof of checking account, transaction copy certificate, customer profile information and WIC profile and other matters related to the analysis process transactions that meet suspicious elements.

Penyampaian LTKT dan LTKM selama periode laporan adalah sebagai berikut :

Submission of LTKT and LTKM during the reporting period is as follows:

PELAPORAN INFORMASI TRANSAKSI KEUANGAN (YOY) PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA - SEMESTER II TAHUN 2017
FINANCIAL TRANSACTION INFORMATION REPORTING (YOY) PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA - SECOND SEMESTER OF 2017

PERIODE tahun 2017	Periode		FLUKTUATIF	
	31 Des' 2017	31 Des' 2016	(YoY)	(%)
LTKT	16.680	17.065	(385)	-2,26%
LTKM	66	329	(263)	-79,94%
Total	**16.746**	**17.394**	**(648)**	**-3,73%**

Pelaporan Informasi Transaksi Keuangan (YoY)
Financial Transaction Information Reporting (YoY)

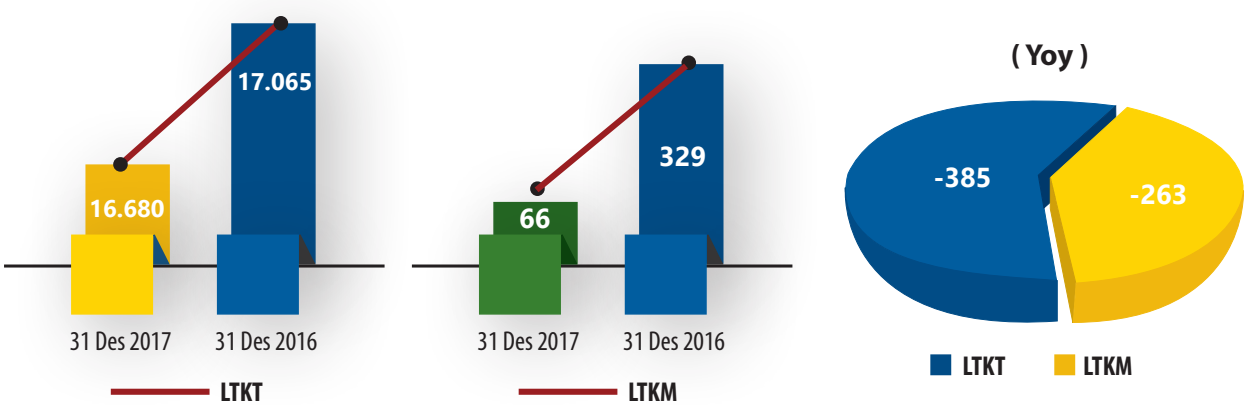

2. Pelaporan SIPESAT PPATK

Sesuai dengan Peraturan Kepala PPATK (PERKA) No. 02/1.02/PPATK/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) maka setiap Bank wajib menyampaikan laporan SIPESAT ke PPATK secara periodik triwulanan.

Selama tahun 2017 Bank Papua telah menyampaikan Laporan SIPESAT sebanyak 4 (Empat) kali yaitu : Periode Triwulan I (Januari-Maret 2017) dan Periode Triwulan II (April –Juni 2017), Triwulan III (Juli – September), Triwulan IV (Oktober – Desember).

2. Reporting SIPESAT PPATK

In accordance with the Regulation of Head of PPATK (PERKA) No. 02 / 1.02 / PPATK / 2014 concerning Integrated Services User Information System (SIPESAT), each Bank shall submit SIPESAT report to PPATK on a quarterly basis.

During 2017 Bank Papua has submitted SIPESAT Report 4 (Four) times, namely: First Quarter (January-March 2017) and Second Quarter (April-June 2017), Third Quarter (July - September), Quarter IV (October - December).

PELAPORAN INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA - SEMESTER II TAHUN 2017
USER INFORMATION REPORTING INTEGRATED SERVICES PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA - SECOND SEMESTER OF 2017

PERIODE 2017	Laporan SIPESAT (nasabah)		FLUKTUATIF	
	31 Des' 2017	31 Des' 2016	(YoY)	(%)
Triwulan I	10.854	5.887	4.967	84,37%
Triwulan II	16.983	17.564	(581)	-3,31%
Triwulan III	32.642	35.890	(3.248)	-9,05%
Triwulan IV	16.655	59.689	(43.034)	-72,10%
Total	**77.134**	**119.030**	**(41.896)**	**-35,20%**

Pelaporan Informasi Pengguna Jasa Terpadu
Reporting Integrated Services User Informationv

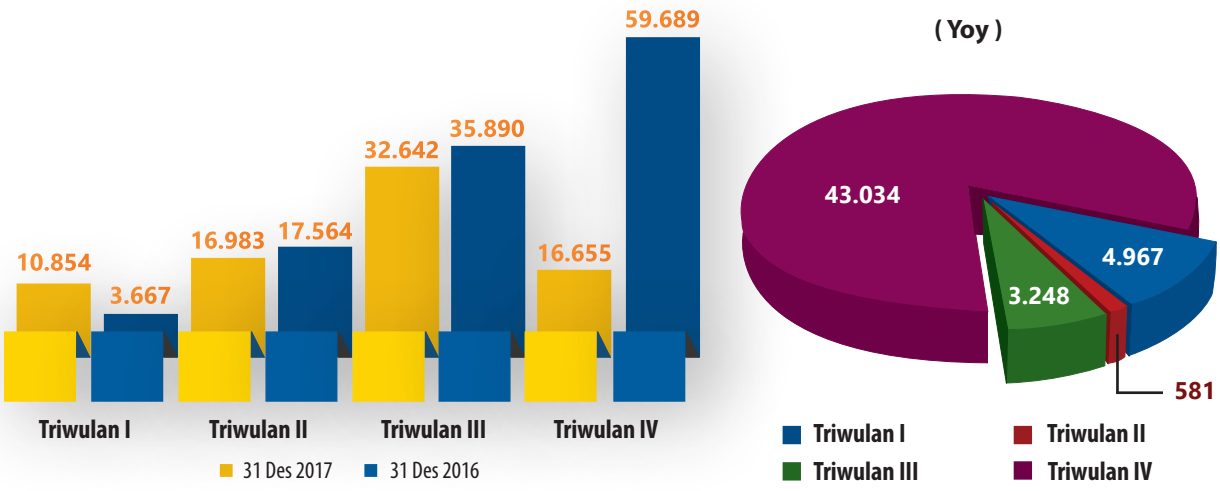

Penyampaian laporan SIPESAT dilakukan secara online oleh Departemen APU PPT melalui fasilitas *Secured Email Communication* (SEC) PPATK oleh petugas yang ditunjuk dan memiliki fasilitas login SEC PPATK. Khusus untuk Pelaporan SIPESAT Triwulan IV, tidak dilakukan melalui fasilitas SEC tetapi melalui pelaporan SIPESAT berbasis web.

Submission of SIPESAT report is done online by APU Department of PPT through PPATK Secured Email Communication (SEC) facility by appointed officer and has SEC PPATK login facility. Specifically for SIPESAT Reporting for the 4th Quarter, not through the SEC facility but through web-based SIPESAT reporting.

PENANGANAN PENGADUAN NASABAH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA - SEMESTER II TAHUN 2017 *HANDLING CUSTOMER COMPLAINT PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA - SECOND SEMESTER OF 2017*				
PERIODE 2017	JUMLAH PENGADUAN NASABAH		FLUKTUATIF	
	31 Des' 2017	31 Des' 2016	(YoY)	(%)
Triwulan I	145	105	40	38,10%
Triwulan II	89	98	-9	-9,18%
Triwulan III	124	232	-108	-46,55%
Triwulan IV	116	213	-97	-45,54%
Total	**474**	**648**	**-174**	**-26,85%**

Penanganan Pengaduan Nasabah
Penanganan Pengaduan Nasabah

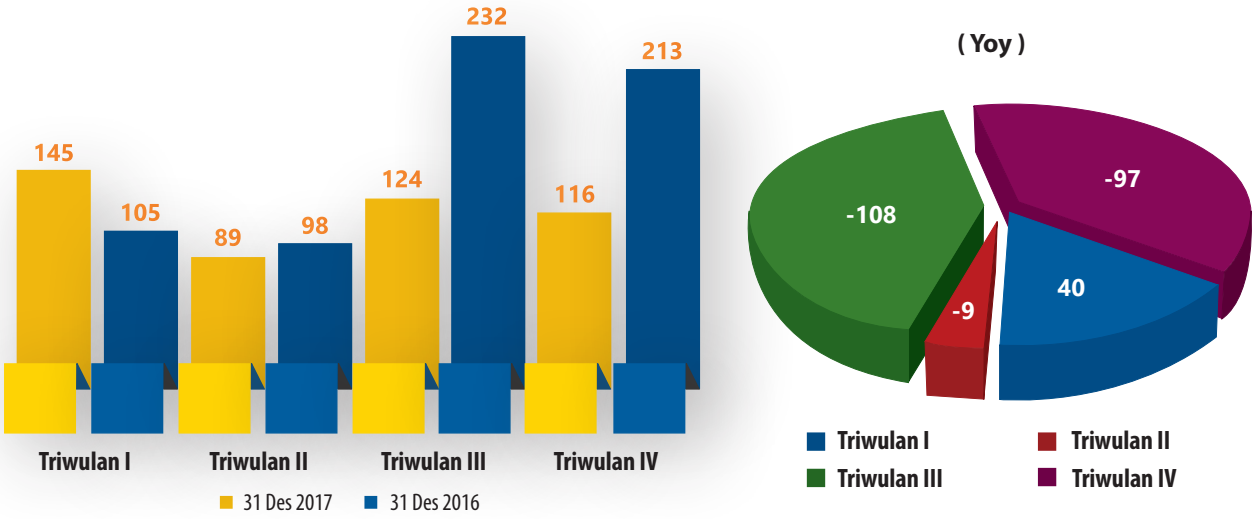

3. Pemenuhan permintaan data /Informasi dari PPATK dan KPK-RI

Selain melaksanakan kewajiban pelaporan LTKT dan LTKM ke PPATK, dalam rangka pelaksanaan program APU PPT maka Bank Papua melalui Divisi Kepatuhan senantiasa menindaklanjuti permintaan data dan informasi yang disampaikan oleh PPATK dalam rangka analisis transaksi.

Demikian pula Divisi Kepatuhan menindaklanjuti permintaan KPK RI dalam rangka melakukan Pemblokiran Debet terhadap rekening, Safe Deposit Box dan segala bentuk investasi serta catatan keuangan lainnya.

4. Sosialisasi APU PPT

Menindaklanjuti kewajiban untuk memberikan pelatihan kepada pegawai Bank Papua dalam penerapan program APU-PPT sebagaimana diatur dalam POJK Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan serta POJK Nomor: 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum,

3. Fulfillment of data / information request from PPATK and KPK-RI

In addition to implementing LTKT and LTKM reporting obligations to PPATK, in order to implement the PPU APU program, Bank Papua through the Compliance Division will always follow up on data and information requests submitted by PPATK in the framework of transaction analysis.

Similarly, the Compliance Division is following up on the request of KPK RI in order to block Debit on account, Safe Deposit Box and all other forms of investment and financial records.

4. Socialization of APU PPT

Following the obligation to provide training to Bank Indonesia staff in the implementation of the APU-PPT program as stipulated in POJK Number: 12 / POJK.01 / 2017 dated March 16, 2017 on the Implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program in Financial Services Sector and POJK Number: 55 / POJK.03 / 2016 dated December 7, 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, then

maka selama tahun 2017 Departemen APU-PPT Divisi Kepatuhan Bank Papua bekerjasama dengan beberapa Kepala Kantor Cabang Bank Papua telah memberikan sosialisasi tentang Program APU-PPT dengan beberapa tahap yakni:

Adapun materi yang diberikan adalah :

a. Materi tentang Undang Undang dan ketentuan terkait program APU PPT.
b. Teknik , Tipologi dan modus Pencucian Uang.
c. Ketentuan Internal tentang Pelaksanaan APU PPT Bank Papua (BPP APU PPT).

in 2017 the APU-PPT Department of Compliance Division of Bank Papua in cooperation with several Heads of Bank Papua Branch Offices has provided socialization on the APU-PPT Program with several stages namely:

The material provided is:

a. Material about the Act and the provisions related to APU PPT program.
b. Technique, Typology and Money Laundering mode.
c. Internal Provisions on Implementation of PPU PPU Bank Papua (BPP APU PPT).

5. Tindak lanjut temuan Audit

Departemen APU PPT Divisi Kepatuhan juga telah menindaklanjuti temuan hasil audit pihak ekternal seperti OJK, BPK RI dan PPATK yang terkait dengan penerapan APU PPT.

Tindak lanjut yang dilakukan adalah antara lain dengan melakukan penyempurnaan pada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) APU PPT melalui SK Direksi No.32/DIR-BPD/VI2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dan Revisi Aplikasi APU PPT Versi 132-05.098.2015.008.004 PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan melakukan sejumlah penyempurnaan pada aplikasi APU PPT Bank Papua dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh auditor, seperti :

a. Penyempurnaan modul laporan transaksi keuangan yang dikecualikan
b. Penyempurnaan menu PEP
c. Penambahan modul monitoring rekening bersaldo nol
d. Penyempurnaan modul monitoring transaksi yang wajib dilaporkan LTKT.

5. Follow up Audit findings

The APU Department of PPT Compliance Division has also followed up on external audit findings such as OJK, BPK RI and PPATK related to APU PPT implementation.

The follow up actions include improving the Company's Code of Manual (BPP) of PPU APU through the Decree of the Directors No.32 / DIR-BPD / VI2016 concerning the Guidelines of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Companies (APU-PPT) and Revisions Application of PPU APT Version 132-05.098.2015.008.004 PT.Bank Papua and made a number of improvements in the application of PPU APU Bank Papua by taking into account the recommendations given by the auditor, such as:

a. Completion of the excluded transaction module
b. Improved PEP menu
c. The addition of a zero-balance account monitoring module
d. Completion of transaction monitoring modules that LTKT is required to report.

6. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Nasabah

Divisi Kepatuhan berkordinasi dengan Kantor Cabang Pelapor dan Divisi/Unit Kerja terkait dalam melakukan penanganan dan penyelesaian atas pengaduan yang disampaikan nasabah baik secara lisan dan tertulis.

Untuk pemantauan pengaduan nasabah dan publikasi negatif yang sampaikan oleh nasabah dan masyarakat melalui website resmi Bank Papua dilakukan melalui kordinasi antara Divisi Kepatuhan dengan Divisi Sekretaris Perusahaan serta unit pengelola website Bank Papua.

Sesuai ketentuan PBI Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tanggal

6. Implementation of Customer's complaint handling

The Compliance Division coordinates with the Branch Office of the Reporting Entity and the relevant Division / Work Unit in handling and completing complaints submitted by the customer both orally and in writing.

For monitoring customer complaints and negative publications submitted by customers and the public through the Bank's official website is conducted through coordination between the Compliance Division with the Corporate Secretary Division as well as the Bank Papua website management unit.

In accordance with the provisions of PBI Number 10/10 / PBI / 2008 concerning Amendment to Bank

20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah maka pelaksanaan kewajiban Pelaporan Penanganan Pengaduan Nasabah disampaikan Bank Papua ke Bank Indonesia secara periodik triwulanan melalui mekanisme Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU).

Selain itu, pada periode Simester I 2017 Departemen APU PPT Divisi Kepatuhan telah melakukan pelaporan terkait Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah ke OJK secara Online melalui aplikasi SIPEDULI OJK sebanyak 2 (Dua) kali yaitu Periode Triwulan I (Januari – Maret) dan Triwulan II (April – Juni).

Komitmen untuk Meningkatkan *Know Your Customer* (KYC) dalam Penerapan Program APU dan PPT

1. *Know Your Customer*/KYC mencegah pemanfaatan Bank baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam praktek kejahatan dan untuk mencegah terjadinya pencucian uang. Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerapan prinsip pengenalan nasabah adalah melaksanakan sosialisasi secara berkesinambungan serta membentuk tim pengkinian data nasabah Bank Papua. Untuk memudahkan akses data nasabah maka dalam *Core banking* System 724 telah dibuat menu khusus pengkinian data nasabah untuk memonitor data nasabah yang belum dikinikan serta guna mengantisipasi praktek kejahatan dalam perbankan dengan mengacu pada Pedoman Penerapan APU dan PPT yang sudah ada.
2. Membantu meningkatkan pemahaman tentang tata cara pelaporan LHKPN di lingkungan PT. Bank Papua.
3. Meningkatkan kesadaran Kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN.

Indonesia Regulation Number 7/7 / PBI / 2005 dated January 20, 2005 regarding Completion of Customer Complaints, the implementation of Reporting Complaints Handling Report submitted by Bank Papua to Bank Indonesia quarterly through Reporting mechanism Head Office of Commercial Bank (LKPBU). In addition, in the period of First Quarter 2016 APU Department of PPT Compliance Division has conducted reporting related to Handling and Completion of Customer Complaints to OJK Online through SIPEDULI OJK application as much as 2 (two) times that Period of Quarter I (January - March) and Quarter II (April - June).

Commitment to Increase Know Your Customer (KYC) in APU and PPT Program Implementation

1. *Know Your Customer / KYC prevents the Bank's use either intentionally or unintentionally in criminal practice and to prevent money laundering. Efforts that will be made to improve the application of the principle of introduction of the customer is to carry out socialization on an ongoing basis and form a team updating of customer data of Bank Papua. To facilitate the access of customer data, Core banking System 724 has created a special menu of customer data updating to monitor customer data that has not been updated and to anticipate the practice of crime in banking by referring to the Guidelines for Implementation of APU and PPT that already exist.*
2. *Assist to improve understanding of LHKPN reporting procedures in PT. Bank Papua.*
3. *Increase awareness Compliance with LHKPN reporting.*

Sosialisasi Kepatuhan dan APU PPT

Menindaklanjuti kewajiban untuk memberikan pelatihan kepada pegawai Bank Papua dalam penerapan program APU-PPT sebagaimana diatur dalam POJK Nomor: 12/ POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan serta POJK Nomor: 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka selama tahun 2017 Departemen APU-PPT Divisi Kepatuhan Bank Papua bekerjasama dengan beberapa Kepala Kantor Cabang Bank Papua telah memberikan sosialisasi tentang Program APU-PPT dengan beberapa tahap yakni:

Socialization of Compliance and PPU APU

Following the obligation to provide training to Bank Indonesia staff in the implementation of the APU-PPT program as stipulated in POJK Number: 12 / POJK.01 / 2017 dated March 16, 2017 on the Implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program in Financial Services Sector and POJK Number: 55 / POJK.03 / 2016 dated December 7, 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, then in 2017 the APU-PPT Department of Compliance Division of Bank Papua in cooperation with several Heads of Bank Papua Branch Offices has provided socialization on the APU-PPT Program with several stages namely:

Tempat & Tanggal	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Pemateri *Brazer*	*Number of participants*	*Name of activity*
Wamena, 21 Oktober 2017	Sosialisasi Kepatuhan dan APU - PPT terkait: 1. Pelaporan TKT & TKM pengaduhan Nasabah / Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen 2. Form Pengaduan Nasabah Kredit, AMPK dan Tata cara serta ketentuan penanganan dan penyelesaian, penyelesaian pengaduan konsumen pada nasabah baik dikantor cabang dan kantor pusat 3. Form Pengisihan Pengaduan Nasabah, BPP APU - PPT Revisi Aplikasi pertanggal 30 Desember 2016 4. Materi Kode Etik, Tata Kelola Bank & TKB 5. Buku Saku KPK yang wajib diketahui oleh seluruh Karyawan dalam rangka pengadaan barang dan Jasa serta pengertian Gratifikasi.	37 Pegawai Bank Papua Cabang Wamena	1. Eko Budhi Ariyanto (Senior Specialis Kebijakan & Prosedur) 2. Danansiko J Paruntung (Kepala Departemen APU-PPT) 3. Markus H Fakdawer (Officer 1 KYC)	*37 Bank Wamena Branch Officer*	*Socialization of Compliance and APU - related PPT:* *1. Reporting of TKT & TKM Customer complaints / Handling and Complaints Settlement of Consumers* *2. Loan Card Complaint Form, AMPK and Procedures and conditions of handling and settlement, completion of customer complaints at both the branch office and the head office* *3. Customer Complaint Registration Form, BPP APU - PPT Revised Application dated December 30, 2016* *4. Code of Conduct, Good Corporate Governance & TKB* *5. KPK Pocket Books that must be known by all employees in the framework of procurement of goods and Services and understanding of Gratification.*
Merauke, 04 November 2017	Sosialisasi Kepatuhan dan APU - PPT	64 Pegawai Bank Papua Cabang Merauke	1. Eko Budhi Ariyanto (Senior Specialis Kebijakan & Prosedur) 2. Danansiko J Paruntung (Kepala Departemen APU-PPT 3. Fernand Aqman Waromi (Specialis APU-PPT)	*64 Employee of Bank Papua Merauke Branch*	*Socialization of Compliance and APU - PPT*
Timika, 08 Desember 2017	Sosialisasi Kepatuhan dan APU - PPT	37 Pegawai Bank Papua Cabang Timika	1. Eko Budhi Ariyanto (Senior Specialis Kebijakan & Prosedur) 2. Suparno (Senior Specialis KYC) 3. Markus H Fakdawer (Officer 1 KYC)	*37 Employees of Bank Papua Branch Timika*	*Socialization of Compliance and APU - PPT*

KEBIJAKAN ANTI FRAUD

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada perbankan, khususnya Fraud yang dapat merugikan nasabah atau Bank Papua, maka diperlukan peningkatan efektifitas pengendalian intern, sebagai upaya meminimalkan risiko Fraud dengan cara menerapkan strategi anti Fraud. Selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan pencegahan Fraud telah dilaksanakan Bank, antara lain melalui penerapan Manajemen Risiko khususnya sistem pengendalian intern dan pelaksanaan tata kelola yang baik. Namun demikian, agar penerapannya menjadi efektif masih diperlukan upaya peningkatan agar pencegahan Fraud tersebut benar-benar menjadi fokus perhatian dan budaya di Bank pada seluruh aspek organisasi, baik oleh Manajemen maupun karyawan.

Penerapkan Strategi Anti Fraud yang dilakukan Bank saat ini merupakan pelaksanaan atas diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/ DPNP tanggal 9 Desember 2011 dan Surat Keputusan Direksi Nomor: 02.A /DIR-BPD/II/2017, tanggal: 07 Februari 2017 perihal Standar Operasional Prosedur Pencegahan Anti Fraud. Melalui unit Satuan Kerja Anti Fraud, maka penerapan Strategi Anti Fraud diwujudkan oleh manajemen Bank sebagi bentuk komitmen perusahaan dalam mengendalikan Fraud yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian Fraud yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal Bank.

Efektifitas pengendalian Fraud dalam bisnis proses merupakan tanggungjawab Manajemen, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang fraud oleh Manajemen agar dapat memberikan arahan dan menumbuhkan *Awareness* untuk pengendalian risiko fraud pada Bank. Strategi anti Fraud merupakan wujud komitmen manajemen Bank dalam mengendalikan Fraud yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian Fraud. Strategi ini menuntut Manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian Fraud dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.

Kebijakan Umum Anti Fraud

Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud (frauder) memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis perbuatan yang tergolong fraud adalah kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi,

ANTI FRAUD POLICY

In order to prevent the occurrence of cases of operational irregularities in the banking sector, especially Fraud which can harm customers or Bank Papua, it is necessary to increase the effectiveness of internal controls, as an effort to minimize the risk of Fraud by applying anti-Fraud strategy. So far, both directly and indirectly, the implementation of Fraud prevention has been implemented by the Bank, among others through the implementation of Risk Management, especially internal control system and good corporate governance implementation. However, in order for its effective implementation there is still a need for increased efforts to prevent Fraud is really the focus of attention and culture in the Bank on all aspects of the organization, both by Management and employees.

The implementation of the Bank's Anti-Fraud Strategy is currently the implementation of the issuance of Bank Indonesia Circular Letter no. 13/28 / DPNP dated December 9, 2011and Decree of the Board of Directors Number: 02.A / DIR-BPD / II / 2017 dated February 7, 2017 regarding Standard Operating Procedures Anti Fraud Prevention.. Through the Anti Fraud Unit Unit, the implementation of Anti Fraud Strategy is realized by Bank management as a form of company commitment in controlling Fraud applied in the form of Fraud control system which is part of Bank's internal control system.

Fraud control effectiveness in the business process is the responsibility of Management, so it takes a proper and comprehensive understanding of fraud by the Management in order to provide direction and foster Awareness for fraud risk control at the Bank. Anti Fraud strategy is a manifestation of Bank management commitment in controlling Fraud applied in the form of Fraud control system. This strategy calls for Management to mobilize resources for the Fraud control system to be implemented effectively and sustainably.

Anti Fraud General Policy

Fraud is a deliberate act or omission to mislead, deceive or otherwise manipulate a bank, customer, or other party, taking place in a bank environment and / or using bank facilities resulting in a bank, customer, or other party suffering loss and / or frauder obtains financial benefits either directly or indirectly. The types of deeds classified as fraud are cheating, fraud, embezzlement of assets, information leakage, banking crime (tipibank), and other actions that can be equalized.

tindak pidana perbankan (tipibank), dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Strategi anti fraud adalah strategi bank dalam mengendalikan fraud yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya fraud dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi fraud yang tersusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian fraud. Penerapan strategi anti fraud merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko, khususnya yang terkait dengan aspek sistem pengendalian intern.

An anti fraud strategy is a bank strategy in controlling fraud that is designed with reference to the process of fraud taking into account the characteristics and scope of the fraud potential that is composed comprehensively and integratively implemented in the form of fraud control system. Implementation of anti fraud strategy is part of the implementation of risk management, especially related to internal control system aspect.

Keberhasilan strategi anti fraud dipengaruhi oleh lingkungan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif sehingga semua pihak yang terkait dapat berperan dengan baik dalam mengimplementasikan sistem pengendalian fraud.

The success of anti fraud strategy is influenced by the environment that supports the creation of conducive conditions so that all related parties can play well in implementing the fraud control system.

Implementasi Strategi Anti-Fraud Bank Papua dijabarkan melalui 3 (tiga) pilar strategi pengendalian fraud yang saling berkaitan yaitu:

1. Fungsi Pencegahan.
2. Fungsi Deteksi dan Investigasi, Pelaporan.
3. Fungsi Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut.

Implementation of Anti-Fraud Strategy Papua Bank is spelled out through 3 (three) pillars of interconnected fraud control strategy:

1. *Prevention Function.*
2. *Detection and Investigation Functions, Reporting.*
3. *Monitoring, Evaluation and Follow-up Functions.*

Kebijakan Strategi Anti Fraud Bank Papua merupakan wujud komitmen Direksi dalam pengendalian fraud. Direksi tidak memberikan toleransi pada setiap bentuk fraud baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank Papua. Satuan Kerja Anti Fraud sebagai koordinator dalam penerapan Strategi Anti Fraud melakukan monitoring secara konsisten penerapan Strategi Anti Fraud di Bank Papua. Dengan penerapan Strategi Anti Fraud secara konsisten diharapkan dapat menekan angka kejadian fraud.

The Anti-Fraud Strategy of Bank Papua is a manifestation of the commitment of the Board of Directors in controlling fraud. The Board of Directors does not tolerate any form of fraud either from internal or external Bank Papua. The Anti Fraud Working Unit as the coordinator in the implementation of the Anti Fraud Strategy monitors consistently the application of the Anti Fraud Strategy in Bank Papua. With the application of Anti Fraud Strategy consistently expected to suppress the number of fraud incidents.

Struktur Organisasi Dan Pertanggungjawaban

Untuk mendukung efektifitas penerapan strategi anti Fraud, Bank memiliki unit kerja yang menangani implementasi strategi anti Fraud yaitu Satuan Kerja Anti Fraud yang berada lansgung di bawah supervisi Direktur Utama, akan melengkapi fungsi sistem pengendalian intern Bank Papua.

Organizational Structure and Accountability

To support the effectiveness of the implementation of anti-Fraud strategy, the Bank has a working unit that handles the implementation of anti-Fraud strategy namely the Anti Fraud Work Unit located lansgung under the supervision of the President Director. will complement the function of internal control system of Bank Papua.

Dalam pembentukan unit atau fungsi tersebut paling kurang sebagai berikut :

1) Pembentukan unit atau fungsi dalam struktur organisasi telah disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank;
2) Penetapan uraian tugas dan tanggungjawab yang jelas;
3) Pertanggungjawaban unit atau fungsi tersebut langsung kepada Direktur Utama, serta hubungan

In the establishment of such units or functions at least as follows:

1) The establishment of units or functions within the organizational structure has been adjusted to the characteristics and complexity of the Bank's business activities;
2) Stipulation of clear job description and responsibilities;
3) The responsibility of the unit or function directly to the President Director, as well as the communication

komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris

4) Pelaksanaan tugas pada unit atau fungsi tersebut harus dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi, integritas, dan independensi, serta didukung dengan pertanggungjawaban yang jelas

and reporting relationship directly to the Board of Commissioners

4) Implementation of duties on the unit or function must be performed by human resources who have competence, integrity, and independence, and supported with clear accountability

Struktur Organisasi SKAF sesuai Lampiran Surat Keputusan Direksi No: 11.1/DIR-BPD/III/2017 tanggal 29 Maret 2017.

Organizational Structure of SKAF as per Attachment of Decree of Directors No: 11.1 / DIR-BPD / III / 2017 dated March 29, 2017.

Tugas dan Tanggungjawab

Tugas dan tanggungjawab Satuan Kerja Anti Fraud diantaranya :

1. Bertanggungjawab atas Penerapan Strategi Anti Fraud diantaranya :
   a. Fungsi Pencegahan;
   b. Fungsi Deteksi;
   c. Fungsi Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi;
   d. Fungsi Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut.
2. Satuan Kerja Anti Fraud menjadi pengelola dan pelaksanan *whistleblowing system* (WBS). Satuan Kerja Anti Fraud menghimpun data dan/ atau informasi pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran (WBS) berupa :
   a. Jumlah laporan yang masuk;
   b. Jumlah laporan yang ditindak lanjuti;
   c. Jumlah laporan yang tidak ditindak lanjuti dan alasannya;
   d. Jumlah laporan hasil awal yang ditindak lanjuti.

Duties and Responsibilities

The tasks and responsibilities of the Anti Fraud Work Unit are:

1. Responsible for Implementation of Anti Fraud Strategy such as:
   a. Prevention Function;
   b. Detection Function;
   c. Functions of Investigation, Reporting and Sanctions;
   d. Monitoring, Evaluation and Follow-up Functions.
2. The Anti Fraud Work Unit becomes the manager and implementer of whistleblowing system (WBS). The Anti Fraud Working Unit collects data and / or information on the implementation of violation reporting system (WBS) in the form of:
   a. Number of incoming reports;
   b. Number of reports being followed up;
   c. Number of reports not followed up and why;
   d. The number of preliminary results reports are followed up.

Program Pencegahan Tindakan Fraud

Pencegahan Fraud yang dilakukan oleh Bank sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Anti Fraud *Awareness*

   Dalam rangka menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan Fraud oleh seluruh pihak terkait, Bank menetapkan strategi yang terdiri dari :

   a. Anti Fraud *Statement*.

   · Anti Fraud *Statement* terdiri dari :
   - Anti fraud *statement* Direksi dan Komisaris.
   - Anti fraud *statement* pegawai.
   - Anti fraud *statement* ditandatangani oleh seluruh pegawai Bank dan disosialisasikan pada semua tingkatan organisasi Bank secara berkala minimal 2 kali setahun oleh Divisi Kepatuhan berkoordinasi dengan Divisi Sumber Daya Manusia.
   - Anti Fraud *Statement* dievaluasi oleh Divisi Kepatuhan secara berkala minimal 2 kali setahun.
   - Hasil evaluasi kepatuhan anti fraud *statement* menjadi sebagai salah satu bahan laporan penerapan strategi anti fraud.

   · Sosialisasi Anti Fraud *Statement*

   Sosialisasi dilakukan sekurang-kurangnya memuat :
   - Latar belakang pelaksanaan sosialisasi.
   - Data dan informasi untuk pertimbangan Direksi .
   - Usul saran yang memuat jadwal pelaksanaan sosialisasi, peserta sosialisasi, instruktur sosialisasi dam mekanisme pelaksanaan sosialisasi.
   - Pelaksanaan sosialisasi dibuktikan dengan surat pemberitahuan pelaksanaan sosialisasi ke unit kerja berikut daftar pegawai yang mengikuti, daftar absensi pegawai yang mengikuti, dokumentasi/photo pelaksanaan sosialisasi.
   - Setelah sosialisasi dilaksanakan, setiap pegawai diharuskan untuk menandatangani pernyataan kepatuhan/komitmen terhadap pelaksanaan strategi anti fraud.

   b. Program *Employee Awareness*

   · Program *Employee Awareness* dilakukan dalam bentuk :
   - Pelatihan, Workshop atau seminar untuk meningkatkan pemahaman terkait fraud.
   - Melakukan publikasi internal terkait anti fraud.

   · Rencana program *Employee Awareness* disusun oleh SKAF yang didasarkan pada hasil evaluasi penerapan strategi anti fraud.

Fraud Action Prevention Program

Fraud prevention conducted by the Bank shall at least include the following matters:

1. Anti Fraud Awareness

In order to raise awareness about the importance of Fraud prevention by all related parties, the Bank established a strategy consisting of:

a. Anti Fraud Statement.

· *Anti Fraud Statement consists of:*
- *Anti fraud statement of Directors and Commissioners.*
- *Anti fraud employee statement.*
- *Anti fraud statement signed by all Bank employees and socialized at all levels of the Bank organization periodically at least 2 times a year by the Compliance Division in coordination with the HR Division.*
- *Anti Fraud Statement is evaluated by the Compliance Division periodically at least 2 times a year.*
- *The result of compliance evaluation of anti fraud statement become as one of material report of applying of anti fraud strategy.*

· *Socialization of Anti Fraud Statement*

Socialization shall be carried out at least containing:
- *Socialization implementation background.*
- *Data and information for the consideration of the Board of Directors.*
- *Suggestion suggestion containing schedule of socialization, socialization participants, socialization instructor and socialization implementation mechanism.*
- *Implementation of socialization is evidenced by a notification letter of socialization to the work unit following the list of employees who follow, list attendance of employees who follow, documentation / photo implementation of socialization.*
- *After the socialization is implemented, every employee is required to sign a statement of compliance / commitment to the implementation of anti fraud strategy.*

b. Employee Awareness Program

· *Employee Awareness Program is conducted in the form of:*
- *Training, Workshop or seminar to improve fraud related understanding.*
- *Conduct internal publications related to anti fraud.*

· *Employee Awareness program plan prepared by SKAF based on evaluation result of applying anti fraud strategy.*

- Pelaksanaan program *Employee Awareness* terkait dengan pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh Divisi Sumber Daya Manusia berdasarkan rekomendasi dari SKAF.
- Pelaksanaan program *Employee Awareness* terkait dengan publikasi internal dilakukan oleh Divisi Kepatuhan dalam bentuk penyampaian artikel melalui media system anti fraud atau media publikasi bank.
- Pelatihan, Workshop atau seminar sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh :
  - Pihak Internal.
  - Pihak Eksternal.
  - Pihak luar yang menyelenggarakan atau diminta untuk menyelenggarankan pelatihan, workshop atau seminar.
- Pelaksanaan pelatihan, workshop atau seminar terkait anti fraud dilaksanakan secar berkala, konsisten dan berkelanjutan.
- Divisi SDM melakukan evaluasi terhadap program *Employee Awareness* secara berkala dan hasil evaluasi disampaikan kepada Direktur Opersional dan ditembusankan kepada SKAF dan Divisi Kepatuhan.
- Evaluasi dilakukan dalam bentuk :
  - Pengujian terkait pemahaman pegawai terhadap strategi anti fraud setelah dilakukan sosialisasi.
  - Analisis dan kaji ulang terhadap efektifitas program *employee awareness*.

c. Program *Customer* Dan *Third Party Awareness*

- Program *Customer Awareness* dilakukan dalam bentuk :
  - Pembuatan brosur, stiker dan banner anti fraud
  - Pemberitahuan dalam bentuk notifikasi SMS
- Program *Customer Awareness* dilakukan oleh Divisi Sekretaris Perusahaan berdasarkan memo permintaan dari SKAF.
- Pengadaan brosur, stiker dan banner anti fraud dilakukan oleh Divisi Umum sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
- Program *Customer Awareness* dievaluasi secara berkala oleh Divisi Sekretaris Perusahaan melalui penyampaian kuesioner kepada nasabah.
- Laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program *Customer Awareness* disampaikan kepada Direkstur Utama dan ditembuskan ke SKAF, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan.
- Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki program *customer awareness* selanjutnya.

- *Implementation of the Employee Awareness program related to education and training is conducted by the Human Resources Division based on recommendations from SKAF.*
- *Implementation of the Employee Awareness program related to the internal publication is conducted by the Compliance Division in the form of article submission through anti-fraud media system or bank publication media.*
- *Training, Workshop or seminar as mentioned above is implemented by:*
  - *Internal Party.*
  - *External parties.*
  - *Outsiders who organize or are asked to advise training, workshops or seminars.*

- *Implementation of training, workshops or seminars related to anti fraud is conducted periodically, consistently and continuously.*
- *HR Division conducts periodic Employee Awareness evaluations and evaluation results submitted to the Director of Opersional and submitted to SKAF and Compliance Division.*

- *Evaluation is done in the form of:*
  - *Testing related to employees' understanding of anti fraud strategy after socialization.*
  - *Analysis and review of the effectiveness of the employee awareness program.*

c. *Customer And Third Party Awareness Program*

- *Customer Awareness Program is done in the form of:*
  - *Making brochures, stickers and anti fraud banners*
  - *Notification in the form of SMS notification*
- *Customer Awareness Program is conducted by Corporate Secretary Division based on request memo from SKAF.*
- *Procurement of brochures, stickers and anti fraud banners shall be conducted by the General Affair Division in accordance with the provisions of procurement of goods and services applicable.*
- *Customer Awareness Program is periodically evaluated by the Corporate Secretary Division through the delivery of questionnaires to customers.*
- *Evaluation report on the implementation of Customer Awareness program submitted to the Main Director and forwarded to SKAF, Risk Management Division and Compliance Division.*
- *Evaluation results are used as input material to improve customer awareness program next.*

- Program *Third Party Awareness* dilakukan kepada vendor, supplier, *merchant* dan rekanan bahwa Bank telah menerapkan kebijakan SKAF dan tidak mentolerir segala bentuk fraud.
- Program *Thrid Party Awareness* dilakukan melalui penandatanganan pakta integritas dalam pengadaan barang dan jasa, third party gathering dan service meeting & gathering.

2. Identifikasi Kerawanan
   a. Identifikasi kerawanan dilakukan terhadap seluruh aktivitas yang mengandung risiko fraud baik yang bersumber dari aktivitas Bank.
   b. Identifikasi kerawanan dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko berdasarkan hasil kajian risiko terhadap produk dan / atau aktivitas Bank.
   c. Identifikasi kerawanan sebagaimana dimaksud pada poin diatas, disampaikan ke Direktur Kepatuhan dan ditembuskan ke SKAF.
   d. Identifikasi kerawanan minimal berisikan :
      - Nama produk dan/atau aktivitas.
      - Satuan Kerja Perumus produk dan/atau aktivitas.
      - Proses bisnis yang berpotensi menimbulkan fraud.
      - Hasil kajian risiko.

- *Third Party Awareness Program is conducted to vendors, suppliers, merchants and partners that the Bank has implemented SKAF policy and does not tolerate any form of fraud.*
- *Thrid Party Awareness Program is conducted through the signing of integrity pact in the procurement of goods and services, third party gathering and service meeting & gathering.*

2. Identification of vulnerability
   a. Identification of vulnerability is made to all activities that contain fraud risks either sourced from the Bank's activities.
   b. Vulnerability identification is performed by the RMDivision based on the results of a risk assessment of the Bank's products and / or activities.
   c. Identification of vulnerability as referred to in the above points, submitted to the Compliance Director and forwarded to SKAF.
   d. Minimal vulnerability identification contains:
      - *Product name and / or activity.*
      - *Work Unit for the formulation of products and / or activities.*
      - *Business processes that potentially lead to fraud.*
      - *Results of risk assessment.*

Realisasi Program Kerja Satuan Kerja Anti Fraud

Realisasi program Kerja Satuan Kerja Anti Fraud pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Realization of Work Program of Anti Fraud Working Unit

The realization of the Anti Fraud Work Unit program in 2017 is as follows:

	BIDANG PENCEGAHAN *(PREVENTION)*	
1	Melakukan sosialisasi anti fraud *statement*	*To socialize anti fraud statement*
2	Melaksanakan program *employee Awareness*	*Implement employee awareness program*
3	Meningkatkan kemampuan dan pemahaman ttg *employee Awareness*	*Improve the ability and understanding of employee awareness*
4	Meningkatkan kemampuan dan pemahanan tentang Program *Customers & Third Party Awareness*	*Improve capability and retention of the Customers & Third Party Awareness Program*
5	Meningkatkan kewaspadaan atas setiap kegiatan bank yang mengandung kerawanan	*Increase awareness of any bank activities that contain vulnerabilities*
6	Meningkatkan pemahaman ttg maksud dan tujuan program *know your employee* oleh Divisi SDM	*Improving understanding of the intent and purpose of know your employee program by Human Resources Division*
7	Meningkatkan pemahaman dibidang employ assistant dan penerapannya oleh Divisi SDM	*Increase understanding in the field of employ assistant and its application by Human Resources Division*
8	Memastikan setiap temuan internal dan eksternal telah ditindaklanjuti dengan benar	*Ensure every internal and external findings have been properly acted upon*
9	Meningkatkan pemahaman atas Tingkat Kesehatan Bank (TKB)	*Increase understanding of Bank Sound Rating (TKB)*
10	Meningkatkan pemahaman pegawai tentang bahaya/dampak fraud	*Improve employee understanding about the dangers / impacts of fraud*

BIDANG PENCEGAHAN *(PREVENTION)*		
1	Meningkatkan Pemahaman pegawai terhadap pentingnya dan manfaat system WBS untuk mencegah terjadinya fraud	*Increase Employees' understanding of the importance and benefits of the WBS system to prevent fraud*
2	Meningkatkan kemampuan dan pemahaman untuk mendeteksi kegiatan bank yang memiliki kerawanan fraud	*Improve ability and understanding to detect bank activities that have fraud vulnerability*
3	Meningkatkan kemampuan dan pemahaman atas produk/ kegiatan bank yang berisiko tinggi	*Improve the ability and understanding of high risk products / activities of banks*
4	Melakukan monitoring kredit meningkatkan kemampuan dan pemahaman terhadap produk kredit Bank Papua	*Loan monitoring enhances the capability and understanding of the bank loan product of Papua*
5	Melakukan monitoring pengadaan barang dan jasa agar kegiatan pengadaan barang dan jasa, efektif, efisien dan berkualitas	*Monitoring the procurement of goods and services so that the procurement activities of goods and services, effective, efficient and quality*
6	Melakukan monitoring inventaris agar kegiatan pengelolaan inventaris milik bank, tertib administrasi maupun lokasi penempatannya diseluruh unit kerja	*Monitoring of inventory for inventory management activities owned by banks, orderly administration and location placement throughout the work unit*
7	Melakukan monitoring rekening pasif agar rekening pasif yang ada, dikelola dengan baik dan bebas dari penyalagunaan	*Monitoring of passive accounts for existing passive accounts, well managed and free from misuse*
8	Melakukan monitoring rekening titipan agar rekening-rekening titipan yang ada dikelola sesuai dengan ketentuan dan bebas dari penyalagunaan	*Monitoring deposit account so that existing deposit accounts are managed in accordance with the provisions and free from misuse*
9	Melakukan monitoring program CSR agar pengelolaan CSR lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	*Monitoring CSR programs for the management of CSR more effectively and in accordance with applicable regulations*
10	Melakukan monitoring transaksi pasar agar kegiatan transaksi pasar lebih efektif, menghasilkan return yang maksimal serta nyaman	*Monitoring market transactions to make market transaction activity more effective, generate maximum return and comfortable*
11	Melakukan monitoring laporan keuangan agar laporan keuangan lebih akurat terpercaya	*Monitoring the financial statements for more accurate reliable financial statements*
12	Mlakukan monitoring front end control dan back and control agar proses pront end control dan back and control lebih, akurat dan complit	*Implement front end control and back and control monitoring in order to process the pront end control and back and control more, accurate and complit*

BIDANG INVESTIGASI DAN LAPORAN *(INVESTIGATION & REPORTING)*		
1	Melakukan Investigasi terhadap laporan yang diterima	*INVESTIGATING the reports received*
2	Menyampaikan laporan tepat waktu, tepat sasaran dan akurat	*Deliver reports on time, on target and accurate*
3	Memastikan setiap pemberian sanksi oleh manajemen terlaksana dengan benar	*Ensure any sanction by management is done correctly*

Whistleblowing System

Whistleblowing System

Dasar Pembentukan

Upaya penting dilakukan oleh Bank Papua dalam menegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah berupaya mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan dalam operasional perbankan khususnya fraud yang dapat merugikan bank dan *stakeholder*. Sehubungan dengan hal tersebut, maka bank mengatur penanganan pengaduan pelanggaran oleh insan Bank Papua dan masyarakat dalam suatu keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi , yakni Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. 95/DIR-BPD/XII/2012, No. 123/DKBPD/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Basis of Establishment

An important effort by Bank Papua in upholding the principles of Good Corporate Governance is to prevent the occurrence of cases of irregularities in banking operations, especially fraud which may harm banks and stakeholders. In relation with, the bank regulates the handling of complaints of violations by Bank Papuans and the public in a joint decision of the Board of Commissioners and the Board of Directors, namely Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners. 95 / DIR-BPD / XII / 2012, No. 123 / DKBPD / 2012 dated December 14, 2012 on Whistleblowing System PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Lingkup Pengaduan

Satuan Kerja Anti Fraud adalah unit kerja yang menangani langsung Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Bank Papua. Satuan Kerja Anti Fraud berupaya untuk membangun dan menerapkan *whistleblowing system* (WBS) yaitu suatu sistem yang mengelola pengaduan atau pengungkapan mengenai perilaku melawan hukum dan/atau perbuatan tidak etis atau tidak semestinya, yang digunakan untuk mengoptimalkan peran pengurus dan pegawai Bank Papua dan mitra kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Bank Papua. Lingkup pengaduan/pengungkapan yang ditindak lanjuti dalam *whistleblowing system* (WBS), meliputi :

1. Melanggar peraturan perundang-undangan, meliputi pemalsuan tanda tangan, korupsi, penggelapan, mark-up, penggunaan narkoba, perusakan barang dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Melanggar pedoman etika bank, meliputi benturan kepentingan, pelecehan, terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang dan nilai etik lainnya;
3. Melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum;
4. Melanggar kebijakan dan prosedur operasional bank;
5. Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun nonfinansial;
6. Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja.

Scope of Complaint

The Anti Fraud Working Unit is a working unit that directly handles the Whistleblowing System in Bank Papua. The Anti Fraud Working Unit seeks to establish and implement whistleblowing systems (WBS), a system that manages complaints or disclosures about unlawful or unethical behavior and / or actions that are used to optimize the roles of officials and employees of Bank Papua and its partners in reveals the violations that occurred in the environment of Bank Papua. The scope of complaints / disclosures that are followed up in whistleblowing systems (WBS), include:

1. *Violate legislation, including signature fraud, corruption, embezzlement, mark-ups, drug use, destruction of goods and violation of other laws and regulations;*
2. *Violate bank ethics guidelines, including conflicts of interest, harassment, engaging in prohibited community activities and other ethical values;*
3. *Violates generally accepted accounting principles;*
4. *Violate bank operational policies and procedures;*
5. *Other fraudulent acts which may result in financial or nonfinancial losses;*
6. *Occasions that compromise safety.*

Keberadaan *Whistleblowing System*

Bagi Bank Papua, keberadaan WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa keberadaan WBS bagi Bank Papua diharapkan menjadi sistem yang efektif dalam mengungkapkan terjadinya berbagai bentuk kecurangan dan mampu menyelesaikannya dalam waktu singkat serta bertujuan untuk :

1. Menerapkan budaya kerja Bank Papua secara konsisten khususnya pelaksanaan nilai budaya integritas;
2. Memperkuat lingkungan pengawasan dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak citra PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dalam rangka menjaga serta melindungi aset/ kepentingan Bank Papua;
3. Mempermudah manajemen untuk menangani secara cepat dan efektif pelanggaran yang terjadi di lingkungan Bank Papua sekaligus memberdayakan serta mengoptimalkan penyelesaian secara internal Bank Papua sebelum dilakukan penyelesaian secara eksternal melalui jalur hukum yang dianggap perlu;
4. Meningkatkan reputasi Bank Papua.

Prosedur Pengelolaan *Whistleblowing System*

Berdasarkan SK Direksi Nomor: 02.A /DIR-BPD/II/2017, tanggal: 07 Februari 2017 dijabarkan tentang Prosedur Pengelolaan *whistleblowing System* sebagai berikut:

1. *Whistleblowing System* merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Bank oleh pelapor pelanggaran.
2. Pada saat melakukan identifikasi dan investigasi terhadap laporan pengaduan, Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Uji sumber pengaduan (misal: cek identitas, kredibilitas, kemampuan mengetahui kecurangan tersebut, dan keandalan dari si pelapor/pengadu)
   b. Tentukan apakah pelapor mengetahui informasi dari tangan pertama (secara pribadi mengetahui terjadinya kecurangan) atau dari pihak lain.
   c. Tentukan apa motif dari pelapor (balas dendam, cemburu, jengkel, uang).
   d. Waspada, apabila pelapor meminta uang sebelum memberi penjelasan lebih jauh. Jangan memberikan *reward* sebelum informasi yang akurat diberikan dan dikonfirmasi dengan saksi yang dapat dipercaya dan dengan dokumen.

The existence of Whistleblowing System

For Bank Papua, the existence of WBS is part of the internal control system in preventing the occurrence of irregularities. In other words it can be said that the existence of WBS for Bank Papua is expected to be an effective system in disclosing the occurrence of various forms of cheating and able to finish it in a short time and aims to:

1. *Implementing the work culture of Bank Papua consistently especially the implementation of cultural values of integrity;*
2. *Strengthen the supervisory environment and encourage reporting on matters that may cause financial loss including matters that may damage the image of PT. Regional Development Banks in order to safeguard and protect the assets / interests of Bank Papua;*
3. *Facilitate management to deal quickly and effectively with violations occurring within the Bank Papua as well as to empower and optimize internal settlement of Bank Papua prior to external settlement through legal means deemed necessary;*

4. Improve the reputation of Bank Papua.

Whistleblowing System Management Procedures

Based on the BOD Decree No: 02.A / DIR-BPD / II / 2017, date: 07 February 2017 described about Whistleblowing System Management Procedures as follows:

1. *Whistleblowing System is a disclosure of acts of violation or disclosure of unlawful acts, unethical / immoral conduct or other acts which may harm the Bank by a whistleblower.*
2. *When identifying and investigating complaints reports, the Anti Fraud Detection and Investigation Group takes the following steps:*
   a. *Test the complaint source (eg identity check, credibility, ability to know the cheating, and reliability of the reporter / complainant).*
   b. *Determine whether the complainant is aware of the information from the first hand (personally aware of fraud) or from other parties.*
   c. *Determine what the motive of the reporter (revenge, jealousy, annoyance, money).*
   d. *Watchful, if the complainant asks for money before giving further explanation. Do not give rewards before accurate information is provided and confirmed with reliable witnesses and with documents.*

e. Uji lebih jauh dugaan kecurangan tersebut dengan sumber independen dan dokumen.
f. Jangan mengambil tindakan disiplin tanpa catatan lengkap mengenai tuduhan kecurangan, termasuk identitas pelapor dan keterangan tertulisnya (keterangan lisan tidak cukup).
g. Konfirmasi tuduhan tersebut melalui dokumen dan pengakuan/testimony (tertulis dan berkaitan dengan) saksi-saksi lain yang mengetahuinya.
h. Lakukan pendekatan dengan pemasok atau pihak-pihak lain yang diduga terlibat untuk memperoleh jawaban dan kerjasama mereka.
i. Lakukan interview terhadap karyawan yang diduga terlibat untuk mengetahui versinya mengenai dugaan kecurangan tersebut (misalnya, apakah pemasok yang mengajukan penawaran atau karyawan yang menetapkan harga dari pemasok).

3. Pelapor menyampaikan tindakan pelanggaran kepada SKAF, melalui aplikasi *Whistleblowing System*, minimal berisikan data dan/atau informasi sebagai berikut:
   a. Identitas terlapor mencakup:
      1. Nama
      2. Jabatan
   b. Informasi pelanggaran
   c. Pihak-pihak yang terlibat
   d. Perkiraan kerugian yang terjadi
   e. Tempat dan waktu kejadian

Berdasarkan laporan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud diatas, Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud melakukan identifikasi awal. Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud menyusun rekomendasi hasil identifikasi awal kepada pejabat berwenang sesuai dengan kategori terlapor(Sebagaimana dimaksud pada *Whistleblower* dalam kapasitasnya sebagai saksi berhak mendapatkan perlindungan saksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang berlaku).

Berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud diatas, pejabat yang berwenang memutuskan tindak lanjut tehadap hasil identifikasi awal.

Untuk keputusan identifikasi awal yang dilanjutkan ketahap investigasi, Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud melakukan investigasi secara internal dan/ atau berkerja sama atau melimpahkan kepada external investigator untuk melakukan investigasi.

e. Further test the alleged fraud with independent sources and documents.
f. Do not take disciplinary action without a full account of allegations of fraud, including the identity of the complainant and his or her written statement (oral information is insufficient).
g. Confirmation of such allegations through documents and testimony (written and related to) other witnesses who know it
h. Approach with suppliers or other parties allegedly involved to obtain their answers and cooperation.

i. Conduct interviews with employees suspected of involvement in knowing his or her version of the alleged fraud (for example, whether the supplier is bidding or the employee determines the price of the supplier).

3. The Reporting Entity shall submit the act of violation to SKAF, through the Whistleblowing System application, shall contain at least the following data and / or information:
a. The reported identity includes:
1. Name
2. Position
b. Breaking information
c. Parties involved
d. Estimated losses incurred
e. Place and time of the incident

Based on reports of violations referred to above, the Anti Fraud Detection and Investigation Group made an initial identification. The Anti Fraud Detection and Investigation Group prepares the recommendation of the result of initial identification to the authorized official in accordance with the category reported (As meant in Whistleblower in his capacity as a witness is entitled to witness protection as provided for in the applicable Witness and Victim Protection Act).

Based on the results of the recommendations as mentioned above, the competent authority decides the follow-up to the initial identification result.

For initial identification decisions that continue investigation stage, the Anti Fraud Detection and Investigation Group investigates internally and / or cooperates or delegates to external investigators to investigate.

4. Pelapor menyampaikan tindakan pelanggaran kepada SKAF yang berwenang melalui telepon, SMS, e-mail, dan laporan langsung dengan nomor dan alamat yang telah ditetapkan. Petugas yang berwenang menerima laporan melalui media sebagaimana diatas dan mencatat data dan/atau informasi minimal sebagai berikut :
   a. Identitas terlapor mencakup :
      (1) Nama
      (2) Jabatan
   b. Informasi pelanggaran.
   c. Pihak-pihak yang terlibat.
   d. Perkiraan kerugian yang terjadi.
   e. Tempat dan waktu kejadian.

Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud diinput kedalam aplikasi *whistleblowing system*. Berdasarkan laporan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud diatas, Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud melakukan identifikasi awal. Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud menyusun rekomendasi hasil identifikasi awal kepada pejabat berwenang sesuai dengan kategori terlapor (Sebagaimana dimaksud pada Whistle b*low*er dalam kapasitasnya sebagai saksi berhak mendapatkan perlindungan saksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang berlaku). Berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud diatas, pejabat yang berwenang memutuskan tindak lanjut tehadap hasil identifikasi awal. Untuk keputusan identifikasi awal yang dilanjutkan ketahap investigasi, Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud melakukan investigasi secara internaldan/ atau bekerja sama dengan external investigator untuk melakukan investigasi.

5. Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud menghimpun data dan/atau informasi pelaksanaan Sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) berupa :
   a. Jumlah laporan pelanggaran yang masuk
   b. Jumlah laporan yang ditindak lanjuti
   c. Jumlah laporan yang tidak ditindaklanjuti dan alasannya
   d. Jumlah laporan hasil identifikasi awal yang ditindaklanjuti

Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud mentabulasikan data dan/atau informasi sebagaimana yang dimaksud diatas. Berdasarkan data dan/ atau informasi yang telah ditabulasikan, Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud menyusun analisis efektifitas pelaksanaan Sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang minimal mencakup :

4. The Reporting Entity shall submit the act of violation to the SKAF authorized by telephone, SMS, e-mail, and direct reports with specified number and address. The authorized officer receives the report through the media as above and records the minimum data and / or information as follows:
   a. The reported identity includes:
      (1) Name:
      (2) Position:
   b. Breaking information.
   c. Parties involved.
   d. Estimated losses incurred.
   e. Place and time of the incident.

The data and / or information referred to is inputted into the whistleblowing system application. Based on reports of violations referred to above, the Anti Fraud Detection and Investigation Group made an initial identification. The Anti Fraud Detection and Investigation Group prepares the recommendation of the result of initial identification to the authorized official in accordance with the category reported (As meant in Whistle blower in his capacity as a witness is entitled to witness protection as provided for in the applicable Witness and Victim Protection Act). Based on the results of the recommendations as mentioned above, the competent authority decides the follow-up to the initial identification result. For the initial identification decision to be continued in the investigation phase, the Anti Fraud Detection and Investigation Group investigates internally and / or cooperates with external investigators to investigate.

5. Anti Fraud Detection and Investigation Group collects data and / or information on implementation of whistleblowing system in the form of:

   a. Number of infringement reports logged in
   b. Number of reports being followed up
   c. Number of non-actionable reports and why

   d. The number of initial identification results that are acted upon

Anti Fraud Detection and Investigation Group tabulates the data and / or information as mentioned above. Based on tabulated data and / or information, the Anti Fraud Detection and Investigation Group developed an analysis of the effectiveness of the implementation of a whistleblowing system that includes at least:

a) Perkembangan jumlah laporan yang masuk.
b) Perkembangan jumlah laporan yang memenuhi kriteria untukditidaklanjuti.
c) Usul saran perbaikan terhadap pelaksanaan *whistleblowing system*.
d) Hasil analisis sebagaimana dimaksud diatas dilakukan secara bulanan untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

Suprise Audit

1. Bagi unit kerja yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya fraud, dilakukan pemeriksaan melalui Suprise Audit yakni audit yang dilakukan secara mendadak atau acak dan bersifat rahasia.
2. Pelaksanaan suprise audit diputuskan oleh Direktur Utama berdasarkan rekomendasi yang diajukan oleh SKAF.
3. Rekomendasi pelaksanaan suprise audit minimal memuat:
   - Latar belakang dilaksanakannya suprise audit.
   - Data dan informasi auditee dan pedukung lainnya.
   - Analisis dan kesimpulan.
   - Rekomendasi dan usul saran.
4. Satuan Kerja Anti Fraud menghimpun data dan/atau informasi berupa :
   a. Hasil identifikasi kerawanan yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko.
   b. Hasil audit rutin yang berisikan tingkat pelanggaran yang tinggi dan memiliki kecendrungan (trend) yang meningkat.
   c. Hasil kuisioner risiko fraud yang disampaikan oleh pimpinan unit kerja.
5. Berdasarkan data dan/atau informasi pada butir (4) diatas, Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud menyusun rekomendasi pelaksanaan Surprise Audit.
6. Rekomendasi Surprise Audit yang telah ditandatangani oleh Kepala SKAF diserahkan kepada Direktur Utama untuk dimintakan keputusan.
7. Untuk rekomendasi yang telah disetujui, selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk pelaksanaan Suprise Audit.
8. Pelaksana Suprise Audit menyusun laporan hasil Suprise Audit kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada SKAI.

a) The progress of the number of incoming reports.
b) The progress of the number of reports that meet the criteria to be discontinued.
c) Proposed suggestion of improvement to the implementation of whistleblowing system.
d) The results of the above-mentioned analysis shall be submitted on a monthly basis for subsequent submission to the President Director and Board of Commissioners with a copy to the Compliance Director.

Suprise Audit

1. For work units at high risk or prone to the occurrence of fraud, inspection through Suprise Audit is an audit conducted on a sudden or random and confidential.

2. The implementation of suprise audit is decided by the President Director based on the recommendation submitted by SKAF.
3. The recommended suprise audit implementation shall contain:
   - *The background of the suprise audit.*
   - *Auditee and other supporting data and information.*
   - *Analysis and conclusions.*
   - *Recommendations and suggestions.*
4. The Anti Fraud Work Unit collects data and / or information in the form of:
   a. The results of vulnerability identification by the Risk Management Division.
   b. The results of routine audits that contain high levels of violations and have a trend is increased.
   c. Results of fraud risk questionnaires submitted by the head of the work unit.

5. Based on the data and / or information in point (4) above, Anti Fraud Detection and Investigation Group shall prepare the recommendation of Surprise Audit implementation.
6. Recommendation of Audit Surprise signed by the Head of SKAF shall be submitted to the President Director for decision.
7. For the approved recommendation, it shall be followed up in the form of Suprise Audit.
8. Executing Suprise Audit shall prepare Suprise Audit report to the President Director and forwarded to SKAI.

Satuan Kerja Anti Fraud menyusun analisis hasil evaluasi berdasarkan data tersebut diatas, yang minimal berisikan :

a. Analisis tingkat pelanggaran dan akar permasalahan
b. Usul, saran dan/atau rekomendasi mencakup:
   - Tindakan untuk menekan tingkat pelanggaran
   - Saran perbaikan terkait pelaksanaan suprise audit.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diatas disampaikan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan.

Surveillance System

1. Untuk memantau dan menguji efektifitas kebijakan anti fraud, dilakukan dengan *Surveillance System* yakni suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa.
2. Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud menghimpun data dan/atau informasi. berupa:
   a. Hasil identifikasi kerawanan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko.
   b. Hasil penilaian audit intern terkait aktivitas yang memiliki tingkat pelanggaran yang cendrung (trend) meningkat dan berpotensi fraud.
   c. Hasil laporan keluhan nasabah yang disampaikan oleh Divisi Sekretaris Perusahaan.
3. Berdasarkan data dan/atau informasi pada angka 2) diatas, Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud menyusun rekomendasi pelaksanaan Surveillance System.
4. Rekomendasi *Surveillance System* yang telah ditandatangani oleh Kepala SKAF diserahkan kepada Direktur Utama untuk dimintakan keputusan.
5. Rekomendasi yang telah disetujui, selanjutnya ditindaklanjuti. Mekanisme tindak lanjut pelaksanaan *Surveillance System* mengacu skenario yang telah ditetapkan.
6. Pelaksana *Surveillance System* menyusun laporan hasil *Surveillance System* yang disampaikan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada SKAI.
7. Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud menyusun analisis hasil evaluasi berdasarkan data tersebut diatas, yang minimal berisikan :
   a. Analisis terkait skenario pelaksanaan *surveillance system.*
   b. Usul, saran dan/atau rekomendasi mencakup saran perbaikan terkait pelaksanaan *Surveillance System.*
8. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud angka 7) diatas disampaikan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada SKAI.

The Anti Fraud Task Force compiles an evaluation analysis based on the above data, which at least contains:

a. Analysis of violation rates and root causes.
b. Proposals, suggestions and / or recommendations include:
   - *Measures to suppress infringement rates*
   - *Suggestions related to suprise audit implementation.*

The results of the evaluation referred to above are submitted to the President Director and forwarded to the Compliance Director.

Surveillance System

1. To monitor and test the effectiveness of anti fraud policy, conducted with Surveillance System that is an action of examination or examination done without known or realized by party tested or checked.

2. Anti Fraud Detection and Investigation Group collects data and / or information. in the form:
   a. Results of vulnerability identification submitted by the Risk Management Division.
   b. The results of internal audit assessments related to activities that have a violation rate that tends increased and potentially fraud.
   c. The results of the customer complaints submitted by the Corporate Secretary Division.
3. Based on the data and / or information in item 2) above, Anti Fraud Detection and Investigation Group shall prepare the recommendation of Surveillance System implementation.
4. Surveillance System Recommendation which has been signed by SKAF Chairman submitted to the President Director for decision request.
5. Recommendations that have been approved, then followed up. The follow-up mechanism of Surveillance System implementation refers to a predefined scenario.
6. Executing Surveillance System shall prepare Surveillance System report submitted to the President Director and forwarded to SKAI.
7. Anti Fraud Detection and Investigation Group compiles analysis of evaluation results based on the above data, which at least contains:
   a. Analysis of scenario related surveillance system implementation
   b. Proposals, suggestions and / or recommendations include suggestions for improvements related to the implementation of the Surveillance System.
8. The evaluation result as referred to number 7) above shall be submitted to the President Director and forwarded to the Internal Audit Unit.

Kewenangan Penanganan Laporan

Kewenangan penangan laporan pelanggaran ada pada :

1. Kepala SKAF, jika terlapor pegawai selain pejabat eksekutif;
2. Direktur Utama jika terlapor adalah pejabat eksekutif dan Dewan Komisaris;
3. Dewan Komisaris jika terlapor adalah Direksi .
   a. Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud melakukan kegiatan Investigasi, laporan dan Rekomendasi Sanksi atas terjadinya Fraud yang dilakukan oleh pejabat/karyawan Bank;
   b. Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud wajib menyusun kebijakan standar investigasi, mekanisme laporan yang efektif atas pelaksanaan invetigasi Fraud serta rekomendasi sanksi secara internal yang tepat pada pihak yang terlibat Fraud;
   c. Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud mengajukan darft kebijakan dan kegiatan Investigasi, laporan dan rekomendasi Sanksi kepada Direktur Utama serta disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk koordinasi guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan diberlakukannya kebijakan serta pengenaan sanksi pelaku Fraud;
   d. Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud menyusun program, laporan atas Investigasi, serta rekomendasi sanksi Fraud kepada Direktur Utama serta disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk koordinasi;
   e. Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud menindaklanjuti atas rekomendasi Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas laporan dan sanksi kepada pejabat/karyawan yang melakukan Fraud kepada Unit/Divisi yang terkait untuk penyelesaian Fraud;
   f. Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud menyampaikan laporan Fraud kepada OJK atas persetujuan Direktur Utama serta dukungan Dewan Komisaris;
   g. Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud melakukan dokumentasi semua kegiatan, laporan, surat-surat baik yang berasal dari unit lain maupun yang berasal dari internal, serta surat/dokumen yang berasal dari pihak eksternal, sehingga dokumen yang tersusun rapih dan mudah diperoleh akan memberikan kesempurnaan dalam laporan atas investigasi dan pengenaan sanksi terjadinya Fraud yang merugikan Bank Papua, maupun pihak lain yang berhubungan bisnis.

Authority for Handling Reports

The authority of the violation report handler is on:

1. *Head of SKAF, if reported by an employee other than an executive officer;*
2. *President Director if reported is an executive officer and Board of Commissioners;*
3. *The BOC if reported is the BOD :*
   a. *The Anti Fraud Detection and Investigation Group conducts Investigation, Reporting and Recommendation sanctions for Fraud committed by officials / employees of the Bank;*
   b. *The Anti Fraud Detection and Investigation Group is obliged to formulate standardized investigative policies, effective reporting mechanisms on the implementation of Fraud investigations as well as the appropriate internal recommendations of sanctions to the parties involved in Fraud;*
   c. *The Anti Fraud Detection and Investigation Group submits the policy and Investigation activities, reports and recommendations of Sanctions to the President Director and submitted to the Board of Commissioners as a form of coordination in order to obtain the approval and approval of the enforcement of policies and the imposition of Fraud perpetrators;*
   d. *Anti Fraud Detection and Investigation Group compiles programs, reports on Investigations, as well as recommendations of Fraud sanctions to the President Director and submitted to the Board of Commissioners as a form of coordination;*
   e. *The Anti Fraud Detection and Investigation Group follows up on the recommendation of the President Director and the Board of Commissioners on reports and sanctions to officials / employees who commit Fraud to the Unit / Division concerned for the settlement of Fraud;*
   f. *The Anti Fraud Detection and Investigation Group submits the Fraud report to OJK with the approval of the President Director and the support of the Board of Commissioners;*
   g. *The Anti Fraud Detection and Investigation Group documents all activities, reports, letters from both internal and external units, and external documents / documents, so that the neatly arranged and easily obtained documents will give perfection in reports on the investigation and imposition of sanctions against Fraud that are harmful to Bank Papua, as well as other parties related to the business.*

4. Proses
   a. Investigasi
      - Investigasi dilakukan untuk menentukan apakah suatu kecurigaan, pengaduan atau dugaan atas suatu pelanggaran, kecurangan, kejahatan telah terjadi dan menentukan pihak-pihak yang bertanggungjawab.
      - Pelaksana investigasi adalah Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud tanpa atau bersama dengan Satuan Kerja Audit Intern.
      - Prosedur Pelaksanaan Investigasi mengacu kepada Pedoman PelaksanaanInvestigasi Audit Internal yang berlaku.
   b. Laporan
      - Laporan atas hasil investigasi dan peristiwa/ kejadian fraud dilaksanakan melalui 2 mekanisme :
        a. laporan secara internal yakni kepada Direksi .
        b. laporan kepada OJK.
      - Laporan atas Pelaksanaan Investigasi dapat berupa :
        a. Terbukti ditemukannya kejadian fraud apabila terbukti ditemukan adanya kejadian fraud , maka laporan disampaikan kepada Direksi dan juga OJK.
        b. Tidak terbukti ditemukannya kejadian fraud apabila tidak terbukti ditemukannya kejadian fraud, maka laporan hanya disampaikan kepada Direksi .
      - Laporan dilakukan oleh SKAF kepada Direktur Utama secara tertulis dan dilakukan pada kesempatan pertama saat terbukti ditemukan terjadinya fraud .
      - Laporan disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
        a. Akurat dalam arti bahwa seluruh materi laporan misalnya menyangkut kecurangan atau kejahatan yang terjadi serta informasi penting lainnya, termasuk penyebutan nama, tempat atau tanggal adalah benar sesuai dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan;
        b. Jelas dalam arti bahwa laporan harus disampaikan secara sistematik dan setiap informasi yang disampaikan mempunyai hubungan yang logis. Sementara itu, istilah-istilah yang bersifat teknis harus dihindari dan kalau tidak bisa dihindari harus dijelaskan secara memadai;
        c. Tidak memihak dalam arti bahwa laporan tidak mengandung bias atau prasangka dari yang menyusun laporan atau pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi

4. Process
   a. Investigation
      - *Investigations are conducted to determine whether a suspicion, a complaint or allegation of an offense, a fraud, a crime has occurred and determines the parties responsible.*
      - *The investigator is the Anti Fraud Detection and Investigation Group without or with the Internal Audit Unit.*
      - *The Implementation Procedure of Investigation refers to the applicable Internal Audit Implementation Guidelines.*

   b. Reports
      - *Reports on investigations and fraud events are implemented through two mechanisms:*
        a. reports internally to the Board of Directors.
        b. report to OJK.
      - *Reports on the Implementation of Investigations may be:*
        a. Proven evidence of fraud incidents if found to be found fraud incident, then the report submitted to the Board of Directors and also OJK.
        b. No evidence of fraud incidents is found if no evidence of fraud is found, then the report is only submitted to the BOD.
      - *Reports made by the SKAF to the President Director in writing and conducted on the first occasion when proven to be found fraud.*
      - *The report is prepared under the following conditions:*
        a. Accurate in the sense that all report materials such as fraudulent or criminal incidents and other important information, including the mention of a name, place or date are correct in accordance with the evidence already collected;
        b. Clearly in the sense that the report should be submitted systematically and any information submitted has a logical relationship. In the meantime, technical terms should be avoided and inevitably should be adequately explained;
        c. Impartial in the sense that the report contains no bias or prejudice from those who compile reports or other parties that may affect the results of the report. The

hasil laporan. Laporan hanya memuat fakta-fakta dan tidak memuat opini atau pendapat pribadi auditor;

d. Relevan dalam arti bahwa laporan hanya mengungkap informasi yang berkaitan langsung dengan kecurangan atas kejahatan yang terjadi.
e. Tepat waktu dalam arti bahwa laporan harus disusun segera setelah pekerjaan dilapangan selesai dilaksanakan dan segera disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

- Laporan peristiwa fraud minimal memuat :
  a. Nama pelaku.
  b. Bentuk penyimpangan/jenis fraud.
  c. Tempat/lokasi kejadian.
  d. Informasi terkait motif/modus pelaku.
  e. Kronologis kasus (didukung dengan dokumen pendukung).
  f. Pihak-pihak yang terlibat.
  g. Indikasi kerugian.
  h. Usulan tindak lanjut/tuntutan.
  i. Tempat, tanggal, dan tanda tangan.
- Laporan fraud kepada OJK dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah peristiwa fraud diketahui oleh Bank, apabila :
  a. Fraud diperkirakan berdampak signifikan terhadap Bank (dengan kerugian material lebih besar atau sama dengan 500 juta Rupiah) dan nasabah (dengan kerugian material lebih besar atau sama dengan 10 juta Rupiah) dan Nasabah; dan/atau
  b. Berpotensi menjadi perhatian publik (akan atau telah dipublikasikan di media cetak, elektronik, dan media website)

c. Pengenaan Sanksi Bagi Pelaku Fraud
- Pengenaan sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera baik kepada pelaku fraud maupun kepada pegawai atau pengurus bank yang berniat melakukan fraud .
- SKAF berdasarkan hasil investigasi, menetapkan pelaku fraud dan menyampaikannya kepada Direksi untuk diberikan keputusan.
- Komite Pertimbangan Pegawai (KPP) bertanggungjawab merekomendasikan bentuk sanksi yang diberikan kepada pelakufraud.
- Pemberian sanksi didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, resposibility, independensi dan *fairness*.
- Prosedur Pemberian Sanksi mengacu kepada Pedoman Disiplin Pegawai.

report only contains facts and does not contain any opinion or opinion of the auditor;

d. Relevant in the sense that the report only discloses information directly related to the fraud for the crime that occurred.

e. Timely in the sense that the report should be prepared as soon as the field work is completed and immediately delivered to the interested parties.

- *Reports of minimum fraud events include:*
  a. Name of the perpetrator.
  b. Forms of fraud.
  c. Place / location of the incident.
  d. Related information motif / perpetrator mode
  e. Chronological case (supported with supporting documents)
  f. Parties involved.
  g. Indication of loss.
  h. Proposed follow-up.
  i. Place, date, and signature.
- *The fraud report to OJK shall be conducted no later than 3 (three) working days after the fraud event is known by the Bank, if:*
  a. Fraud is expected to have a significant impact on the Bank (with a material loss greater than or equal to 500 million Rupiah) and customers (with material losses greater than or equal to 10 million Rupiah) and the Customer; and / or
  b. Potentially a public concern (to be or has been published in print, electronic, and website media)

c. Imposition of Sanctions For Fraud Actors
- *The imposition of sanctions aims to provide a deterrent effect either to the perpetrators of fraud or to employees or bank administrators who intend to conduct fraud.*
- *SKAF based on the results of the investigation, determine the perpetrators of fraud and submit it to the Board of Directors for a decision.*
- *The Committee for Consideration of Employees (KPP) is responsible for recommending the form of sanctions given to the perpetrators.*
- *Sanctions are based on principles of transparency, accountability, resposibility, independence and fairness.*
- *Sanctions Procedure refers to the Employee Discipline Guidelines.*

d. Pemantauan
- Pemantauan tindak lanjut terhadap kejadian-kejadian fraud dilakukan oleh Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud.
- Pemantauan dilakukan terhadap :
  a. Sanksi/tindakan yang diambil/ dikenakan terhadap pelaku fraud serta penerapannya.
  b. Konsistensi pelaksanaan sanksi.
  c. Akar permasalahan dalam penerapan tindak lanjut peristiwa fraud.
  d. Kecendrungan (trend) kejadian fraud terkait dengan adanya penegakan hukum (*law enforcement*).
- Hasil pemantauan digunakan untuk melihat efektifitas penegakan hukum dilingkungan internal bank dan sebagai bahan masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan.
- Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud menyerahkan Draft Laporan Pemantauan tindak lanjut terhadap peristiwa fraud kepada Kepala SKAF untuk diperiksa dan ditandatangani. Jika terdapat perubahan Draft Laporan Pemantauan tindak lanjut terhadap peristiwa fraud dikembali ke Petugas SKAF untuk di perbaiki.
- Laporan Pemantauan tindak lanjut terhadap peristiwa fraud yang telah ditandatangani diserahkan kepada direktur Utama sebagai bahan masukan terkait Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud .

e. Evaluasi
- Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan penyebab terjadinya fraud serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam penerapan strategi anti fraud.
- Evaluasi terhadap sistem pengendalian fraud dilakukan secara berkala minimal mencakup :
  a. Efektifitas program anti fraud *awareness*, yang mencakup :
     1. Pelaksanaan anti fraud *statement*.
     2. Program *employee awareness*.
     3. Program *customer awareness*
  b. Efektifitas identifikasi kerawanan.
  c. Efektifitas *know your employee*.
  d. Efektifitas Program Bantuan Pegawai.
  e. Efektifitas sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing system*).
  f. Efektifitas *Surprise Audit*.
  g. Efektifitas *Surveillance System*.

d. Monitoring
- *Follow-up monitoring of fraud events was conducted by the Anti Fraud Detection and Investigation Group.*
- *Monitoring conducted on:*
  a. Sanctions / actions taken / applied to fraud perpetrators and their application.
  b. Consistent implementation of sanctions.
  c. The root of the problem in the application of follow-up fraud events.
  d. Trend of fraud events is related to law enforcement.
- *The results of monitoring are used to see the effectiveness of law enforcement within the bank's internal environment and as input material to make improvements.*
- *The Anti Fraud Detection and Investigation Group submitted a Draft Monitoring Report of the follow-up to the fraud incident to the Head of SKAF for review and signature. If there is a change of Draft Monitoring Report follow up on fraud events returned to SKAF Officer for repair.*
- *A follow up monitoring report on a signed fraud event is submitted to the President Director as input for the Implementation of the Anti Fraud Strategy.*

e. Evaluation
- *Evaluation aims to identify the weaknesses and causes of fraud and to determine the necessary corrective measures in applying anti fraud strategies.*
- *The valuation of the fraud control system shall be conducted periodically at least covering:*
  a. The effectiveness of the anti fraud awareness program, which includes:
     1. Implementation of anti fraud statement
     2. Employee awareness program.
     3. Customer awareness program.
  b. Effectiveness of vulnerability identification.
  c. Effectiveness of know your employee.
  d. Effectiveness of Employee Assistance Program.
  e. Effectiveness of the whistleblowing system.
  f. Effectiveness of Audit Surprise.
  g. Effectiveness Surveillance System.

f. Tindak Lanjut
- Mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian fraud untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali fraud karena kelemahan yang serupa.
- Unit kerja mengirimkan laporan/data/ informasi terkait pelaksanaan tindak lanjut peristiwa fraud yang dilaksanakan oleh unit kerja kepada SKAF.
- Laporan evaluasi operasional oleh SKAF diatas disusun paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan laporan dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Sedangkan Laporan Evaluasi Manajemen disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Data/informasi/dokumen terkait dengan peristiwa fraud disimpan dalam lemari tahan api dan hanya dapat diakses oleh Kepala SKAF dan/atau Direksi atau pihak yang diberi wewenang oleh Direksi .

f. Follow-up
- *A follow-up mechanism based on the evaluation of fraud events to correct weaknesses and strengthen internal control systems to prevent recurrence of fraud due to similar weaknesses.*
- *The work unit sends a report / data / information regarding the implementation of follow-up fraud events carried out by the work unit to SKAF.*
- *The operational evaluation report by the above SKAF is prepared no later than 10 (ten) working days after the reporting month and submitted to the President Director and the Board of Commissioners with a copy to the Compliance Director. The Management Evaluation Report is submitted to the Board of Commissioners.*
- *The data / information / documents related to the fraud event are stored in a fireproof cabinet and can only be accessed by the Chairman of the SKAF and / or the Board of Directors or the party authorized by the Board of Directors.*

Penyampaian Pelaporan Pelanggaran

Pelaporan Pelanggaran dapat ditujukan kepada Satuan Kerja Anti Fraud melalui :

Fraud Reporting Submission

The Fraud Reporting can be addressed to the Anti Fraud Task Force through:

Aplikasi *Whistleblowing System*

Telephone	:	0967-532011 (ext 757,754,737)
Faxsimile	:	0967-522264
Email	:	skaf.bankpapua@yahoo.com Info-saf@bankpapua.co.id
Surat	:	Satuan Kerja Anti Fraud, Lantai 7 Gedung PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, Jl. A. Yani No. 5 – 7, Jayapura

Setiap laporan yang disampaikan paling kurang berisikan data dan informasi sebagai berikut :
1. Identitas Pelapor antara lain nama lengkap, Nomor Induk Kepegawaian (NIK), tempat/tanggal lahir, dan unit kerja pelapor serta ditandatangani oleh Pelapor;
2. Uraian tindak pelanggaran;
3. Terlapor dan pihak-pihak yang terlibat;
4. Tempat dan waktu kejadian;
5. Dokumen pendukung dan/atau bukti-bukti lainnya.

Each report submitted contains at least the following data and information:
1. *The identity of the Reporting Entity shall include full name, Employment Number (NIK), place / date of birth, and reporting work unit and signed by the Reporting Party;*
2. *Description of the offense;*
3. *The Reported Party and the parties involved;*
4. *Place and time of occurrence;*
5. *Supporting documents and / or other evidence.*

Administrasi Penerimaan Pelaporan

Seluruh proses penerimaan laporan pengaduan, diadministrasikan secara baik oleh petugas WBS. Catatan penerimaan laporan pengaduan, memuat sekurangnya :

1. Nomor registrasi;
2. Tanggal penerimaan;
3. Petugas penerima;
4. Deskripsi singkat.

Publikasi dan Sosialisasi

Bank wajib mempublikasikan serta mensosialisasikan Kebijakan Pengelolaan Laporan Pelanggaran kepada seluruh pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua maupun *stakeholder* melalui media perusahaan seperti :

1. Mencetak, mensosialisasikan dan mendistribusikan dokumen kebijakan ini;
2. Website perusahaan;
3. Forum internal pegawai;
4. Aplikasi Strategi Anti Fraud PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;

Perlindungan

Bank memberikan perlindungan terhadap pelapor baik secara fisik, pekerjaan, maupun penerimaan dan fasilitas yang diterima pelapor. Perlindungan kepada Pelapor adalah hak dari Pelapor guna memberikan rasa aman kepada Pelapor terkait dengan ancaman atau tindakan yang didapat akibat dari laporan pelanggaran yang disampaikan. Perlindungan bagi pelapor dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran. Dalam hal Pelapor menerima ancaman terhadap fisik, pekerjaan, maupun penerimaan dan fasilitas yang diterima pelapor, maka Pelapor dapat menyampaikan permohonan perlindungan kepada Penanggung Jawab WBS, yakni Pemimpin Satuan Kerja Anti Fraud.

Reward dan *Punishment* Bagi Pelapor dan Terlapor

Bank dapat memberikan penghargaan kepada pelapor terkait dengan informasi pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan Bank dapat diselamatkan. Bentuk dan besaran penghargaan yang diberikan diputuskan melalui kebijakan Direksi setalah mendapat rekomendasi dari Satuan Kerja Anti Fraud.

Punishment diberikan kepada pelaku fraud yang telah diputus oleh manajemen Bank dalam Rapat Direksi Khusus (RDK). Pemberian sanksi didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi dan *fairness*. Prosedur Pemberian Sanksi mengacu kepada Pedoman Disiplin Pegawai. Pengenaan sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera baik kepada pelaku fraud maupun kepada pegawai atau pengurus bank yang berniat melakukan fraud.

Reporting Admission Administration

The whole process of receipt of complaint reports, well administered by WBS officers. Records of receipt of the complaint report, containing at least:

1. *Registration number;*
2. *The date of receipt;*
3. *Receiving Officer;*
4. *Short description.*

Publication and Socialization

Banks are required to publish and socialize the Policy on Report Management of Breach to all employees of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua as well as stakeholders through corporate media such as:

1. *Printing, disseminating and distributing this policy document;*
2. *Company website;*
3. *Internal forum of employees;*
4. *Application of Anti Fraud Strategy PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;*

Protection

The Bank provides protection to the complainant, physically, occupation, or receipt and facilities received by the complainant. Protection to the Reporting Party is the right of the Reporting Party to provide security to the Reporting Entity in relation to the threats or actions that result from the reported violation. Protection for complainants is intended to encourage the courage to report offenses. In the event that the Reporting Entity receives a threat to the physical, occupational, or receiving and receiving facilities of the complainant, the Reporting Entity may submit a request for protection to the WBS Work Officer, the Head of the Anti Fraud Working Unit.

Reward and Punishment for Whistleblower and Reported Parties

The Bank may reward the complainant in relation to proven infringement information so that the Bank's assets / finances can be saved. The form and magnitude of the award shall be decided through the policy of the Board of Directors upon the recommendation of the Anti Fraud Unit.

Punishment is granted to the fraud perpetrators who have been terminated by the Bank's management in the Special Board of Directors Meeting (RDK). Sanctions are based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. Sanctions Procedure refers to the Employee Discipline Guidelines. The imposition of sanctions aims to provide a deterrent effect either to the perpetrators of fraud or to employees or bank administrators who intend to perform fraud.

Efektifitas dan Perbaikan Whistleblowing System

1. Satuan Kerja Anti Fraud menghimpun data dan/ atau informasi pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran (WBS) berupa :
   a. Jumlah laporan yang masuk.
   b. Jumlah laporan yang ditindak lanjuti.
   c. Jumlah laporan yang tidak ditindak lanjuti dan alasannya,
2. Satuan Kerja Anti Fraud menyusun efektifitas pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran (WBS) yang mencakup :
   a. Perkembangan jumlah laporan yang masuk.
   b. Perkembangan jumlah laporan yang memenuhi kriteria untuk ditindak lanjuti.
   c. Usul saran perbaikan terhadap pelaksanaan WBS.

SKAF membuat laporan efektifitas pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran (WBS) setiap bulan dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Utama

Untuk meningkatkan *Awareness* dan mengoptimalkan fungsi yang ada maka secara berkala dilakukan sosialisasi ke segenap pegawai antara lain melalui poster, buku saku, *sharing session* dan media-media lain yang mudah diakses. Dengan adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran ini, efektifitas yang dirasakan adalah terdeteksinya kecurangan-kecurangan dalam waktu yang relatif singkat dan lebih rinci, sehingga sangat mempermudah proses pengawasan dilakukan di internal, karena cakupan aktivitas dan jumlah karyawan yang sangat banyak. Dengan adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran maka dapat mencegah an mengurangi perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian *financial* atau non *financial* terhadap perusahaan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Effectiveness and Improvement of Whistleblowing System

1. The Anti Fraud Work Unit collects data and / or information on the implementation of violation reporting system (WBS) in the form of:
   a. Number of incoming reports.
   b. Number of reports being followed up.
   c. The number of reports that were not followed up and why,
2. The Anti Fraud Task Force establishes the effectiveness of the implementation of the WBS reporting system which includes:
   a. The progress of the number of incoming reports.
   b. The progress of the number of reports that meet the criteria for follow up.
   c. Proposed suggestions for improvement of WBS implementation.

The SKAF reports the effectiveness of the implementation of the reporting violation system (WBS) every month and submitted to the Compliance Director and Board of Commissioners with a copy to the President Director

To improve awareness and optimize the existing functionality, periodically socialization to all employees, among others, through posters, pocket books, sharing sessions and other media that is easily accessible. With this Reporting System of Violation, the perceived effectiveness is the detection of frauds in a relatively short time and more detailed, so it is very easier for the monitoring process is done internally, because the scope of activity and the number of employees very much. With the Reporting System of Violation, it can prevent the reduction of actions that can cause financial or non financial losses to companies such as Corruption, Collusion and Nepotism.

Data *Whistleblowing System*

Laporan yang masuk ke SKAF kebanyakan menggunakan *whistleblowing system* berupa Surat Resmi dan di email ke SKAF dan beberapa sudah ditindaklanjuti. Berikut ini adalah data *whistleblowing system* selama tahun 2016 dan 2017.

Whistleblowing System Data

Reports that go to SKAF mostly use whistleblowing system in the form of Official Letters and in emails to SKAF and some have been acted upon. The following is the whistleblowing system data for 2016 and 2017.

DATA *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Tahun *Year*	Jumlah Laporan Yang Masuk *Number of Incoming Reports*	Sudah Ditindaklanjuti (STL) *Already Followed*	Belum Ditindaklanjuti (BTL) *Not Followed Yet*
2016	13	10	3
2017	25	17	8

Skema & Mekanisme *Whistleblowing System*

Setiap pegawai Bank dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Bank lainnya yang terjadi di lingkungan Bank sesuai dengan bentuk tindak pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS. Mekanisme pelaporan tergambar pada skema dibawah ini :

Scheme & Whistleblowing System Mechanism

Any Bank employee may report any violations committed by other Bank employees occurring within the Bank in accordance with any form of infringement that may be reported through the WBS. The reporting mechanism is illustrated in the scheme below:

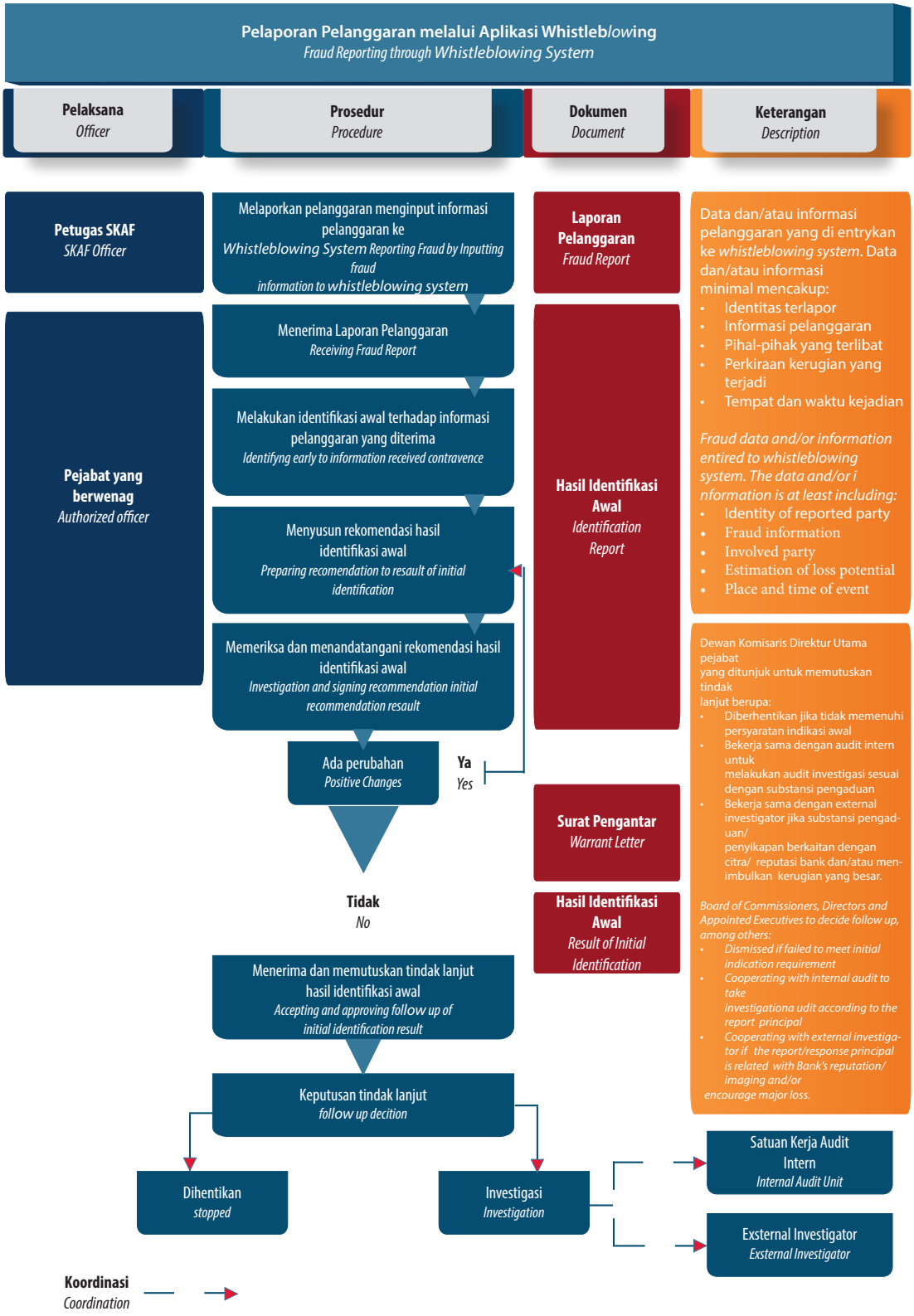

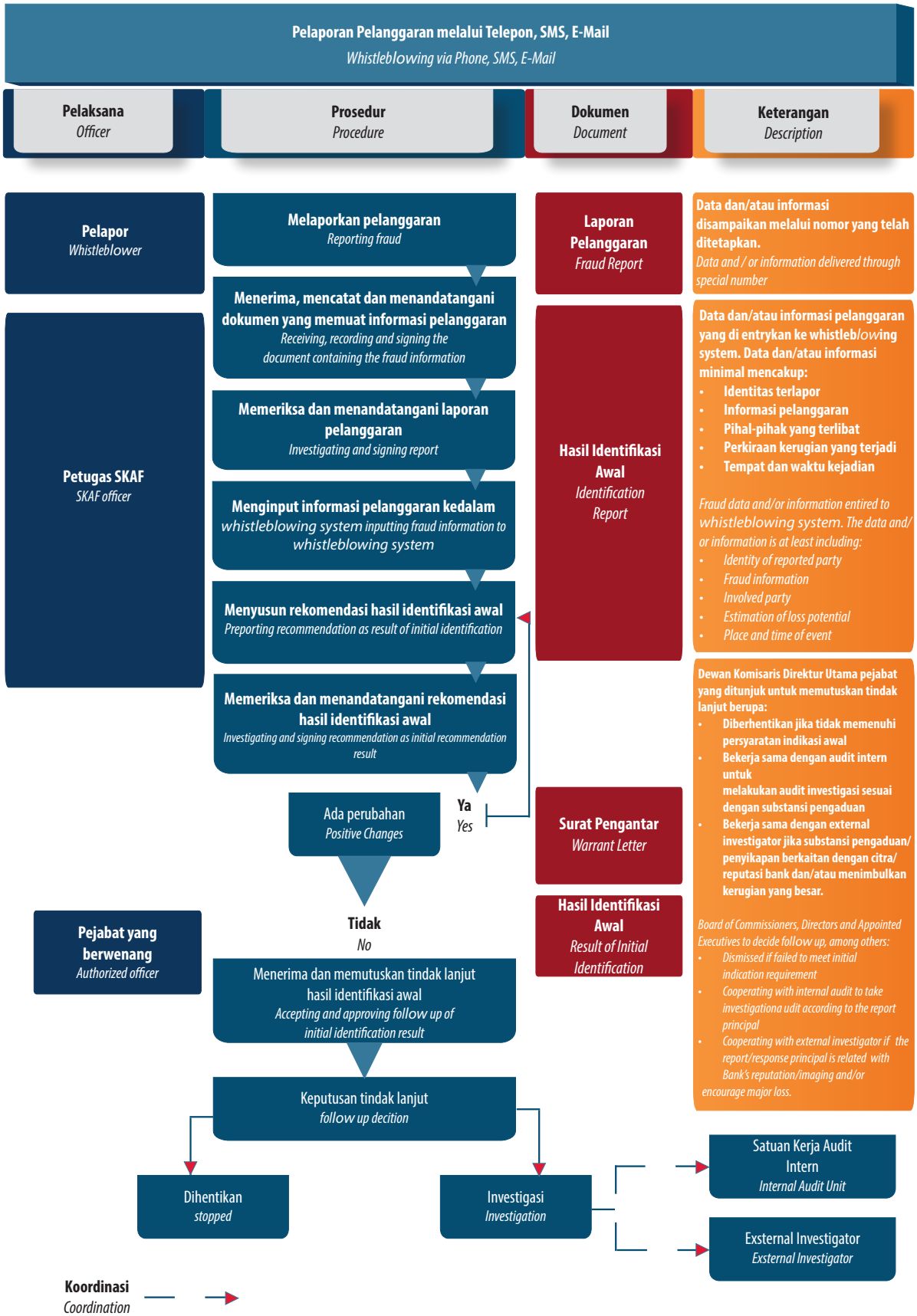
Pelaporan Pelanggaran melalui Telepon, SMS, E-Mail
Whistleblowing via Phone, SMS, E-Mail
Pelaksana
Officer
Prosedur
Procedure
Dokumen
Document
Keterangan
Description
Pelapor
Whistleblower
Melaporkan pelanggaran
Reporting fraud
Laporan Pelanggaran
Fraud Report
Data dan/atau informasi disampaikan melalui nomor yang telah ditetapkan.
Data and / or information delivered through special number
Menerima, mencatat dan menandatangani dokumen yang memuat informasi pelanggaran
Receiving, recording and signing the document containing the fraud information
Petugas SKAF
SKAF officer
Memeriksa dan menandatangani laporan pelanggaran
Investigating and signing report
Hasil Identifikasi Awal
Identification Report
Data dan/atau informasi pelanggaran yang di entrykan ke whistleblowing system. Data dan/atau informasi minimal mencakup:
Identitas terlapor
Informasi pelanggaran
Pihal-pihak yang terlibat
Perkiraan kerugian yang terjadi
Tempat dan waktu kejadian
Fraud data and/or information entered to whistleblowing system. The data and/or information is at least including:
Identity of reported party
Fraud information
Involved party
Estimation of loss potential
Place and time of event
Menginput informasi pelanggaran kedalam whistleblowing system inputting fraud information to whistleblowing system
Menyusun rekomendasi hasil identifikasi awal
Preporting recommendation as result of initial identification
Memeriksa dan menandatangani rekomendasi hasil identifikasi awal
Investigating and signing recommendation as initial recommendation result
Ya
Yes
Ada perubahan
Positive Changes
Surat Pengantar
Warrant Letter
Dewan Komisaris Direktur Utama pejabat yang ditunjuk untuk memutuskan tindak lanjut berupa:
Diberhentikan jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal
Bekerja sama dengan audit intern untuk melakukan audit investigasi sesuai dengan substansi pengaduan
Bekerja sama dengan external investigator jika substansi pengaduan/ penyikapan berkaitan dengan citra/ reputasi bank dan/atau menimbulkan kerugian yang besar.
Board of Commissioners, Directors and Appointed Executives to decide follow up, among others:
Dismissed if failed to meet initial indication requirement
Cooperating with internal audit to take investigationa udit according to the report principal
Cooperating with external investigator if the report/response principal is related with Bank's reputation/imaging and/or encourage major loss.
Tidak
No
Hasil Identifikasi Awal
Result of Initial Identification
Pejabat yang berwenang
Authorized officer
Menerima dan memutuskan tindak lanjut hasil identifikasi awal
Accepting and approving follow up of initial identification result
Keputusan tindak lanjut
follow up decition
Satuan Kerja Audit Intern
Internal Audit Unit
Dihentikan
stopped
Investigasi
Investigation
Exsternal Investigator
Exsternal Investigator
Koordinasi
Coordination

Internal Fraud
Internal Fraud

Untuk pencegahan dan pemberantasan fraud Bank telah mengimplementasikan pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, sanksi, dan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Program seperti pelatihan *fraud awareness, audit internal, quality assessment, Know Your Employee, tone of the top* dan komitmen manajemen senior melalui e-mail kepada seluruh karyawan sudah dijalankan secara rutin.

For prevention and eradication of fraud Banks have implemented prevention, detection, investigation, reporting, sanctions, and monitoring, evaluation and follow-up. Programs such as fraud awareness training, internal audit, quality assessment, Know Your Employee, tone of the top and senior management commitment through e-mail to all employees are routinely executed.

Sampai dengan akhir Desember 2017, jumlah penyimpangan internal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Until the end of December 2017, the number of internal deviations can be seen in the table as follows:

JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD) YANG TERJADI (Rupiah dalam jutaan)
THE AMOUNT OF INTERNAL FRAUD (Rupiah in millions)

Nama Produk	Jumlah Kasus Yang Dilakukan						*Product Name*
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap		
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	
Total Fraud			**22**	**12**	**3**	**1**	***Total Fraud***
Telah diselesaikan			10	7	2	1	*Completed*
Dalam proses penyelesaian di internal			12	5	1		*In the internal completion process*
Belum diupayakan penyelesaiannya							*The solution has not been attempted yet*
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum							*Has been followed up through legal process*

Dari keseluruhan kasus tersebut bank tidak mengalami kerugian finansial atau mendapat dampak negatif yang sangat besar akibat dari insiden tersebut.

Of these cases the bank did not suffer financial losses or had a major negative impact from the incident.

Pengenaan Sanksi Bagi Pelaku Fraud

1. Pengenaan sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera baik kepada pelaku fraud maupun kepada pegawai atau pengurus bank yang berniat melakukan fraud .
2. SKAF berdasarkan hasil investigasi, menetapkan pelaku fraud dan menyampaikannya kepada Direksi untuk diberikan keputusan.
3. Komite Pertimbangan Pegawai (KPP) bertanggungjawab merekomendasikan bentuk sanksi yang diberikan kepada pelakufraud.
4. Pemberian sanksi didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, resposibility, independensi dan *fairness*.
5. Prosedur Pemberian Sanksi mengacu kepada Pedoman Disiplin Pegawai.

Pemantauan

1. Pemantauan tindak lanjut terhadap kejadian-kejadian fraud dilakukan oleh Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud.
2. Pemantauan dilakukan terhadap:
   a. Sanksi/tindakan yang diambil/dikenakan terhadap pelaku fraud serta penerapannya.
   b. Konsistensi pelaksanaan sanksi.
   c. Akar permasalahan dalam penerapan tindak lanjut peristiwa fraud.
   d. Kecendrungan (trend) kejadian fraud terkait dengan adanya penegakan hukum (*law enforcement*).
3. Hasil pemantauan digunakan untuk melihat efektifitas penegakan hukum dilingkungan internal bank dan sebagai bahan masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan.
4. Kelompok Deteksi dan Investigasi Anti Fraud menyerahkan Draft Laporan Pemantauan tindak lanjut terhadap peristiwa fraud kepada Kepala SKAF untuk diperiksa dan ditandatangani. Jika terdapat perubahan Draft Laporan Pemantauan tindak lanjut terhadap peristiwa fraud dikembali ke Petugas SKAF untuk di perbaiki.
5. Laporan Pemantauan tindak lanjut terhadap peristiwa fraud yang telah ditandatangani diserahkan kepada Direktur Utama sebagai bahan masukan terkait Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud.

Imposition of Sanctions For Fraud Actors

1. *The imposition of sanctions aims to provide a deterrent effect either to the perpetrators of fraud or to employees or bank administrators who intend to conduct fraud.*
2. *SKAF based on the results of the investigation, determine the fraud perpetrators and submit it to the Board of Directors for a decision.*
3. *The Committee on Consideration of Employees (KPP) is responsible for recommending the form of sanctions given to the perpetrators.*
4. *Giving sanction is based on the principle of transparency, accountability, resposibility, independence and fairness.*
5. *Sanctions Procedure refers to the Employee Discipline Guidelines.*

Monitoring

1. *Follow-up monitoring of fraud events is conducted by the Anti Fraud Detection and Investigation Group.*

2. *Monitoring conducted on:*
   a. Sanctions / actions taken / applied to fraud perpetrators and their application.
   b. Consistent implementation of sanctions.
   c. The root of the problem in the application of follow-up fraud events.
   d. Trend of fraud events is related to law enforcement.

3. *Monitoring results are used to see the effectiveness of law enforcement within the bank's internal environment and as input material to make improvements.*
4. *Anti Fraud Detection and Investigation Group submits a Draft Monitoring Report of the follow-up to the fraud incident to the Chair of SKAF for review and signature. If there is a change of Draft Monitoring Report follow up on fraud events returned to SKAF Officer for repair.*

5. *Reports Follow-up monitoring of signed fraud events is submitted to the President Director as input for the Implementation of the Anti Fraud Strategy.*

Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan penyebab terjadinya fraud serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam penerapan strategi anti fraud. Evaluasi terhadap sistem pengendalian fraud dilakukan secara berkala minimal mencakup:

1. Efektifitas program anti fraud *awareness*, yang mencakup :
   a. Pelaksanaan anti fraud *statement*.
   b. Program *employee awareness*.
   c. Program *customer awareness*
2. Efektifitas identifikasi kerawanan.
3. Efektifitas *know your employee*.
4. Efektifitas Program Bantuan Pegawai.
5. Efektifitas sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing system*).
6. Efektifitas Surprise Audit.
7. Efektifitas Surveillance System.

Tindak Lanjut

Mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian fraud untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali fraud karena kelemahan yang serupa. Unit kerja mengirimkan laporan/data/informasi terkait pelaksanaan tindak lanjut peristiwa fraud yang dilaksanakan oleh unit kerja kepada SKAF. Laporan evaluasi operasional oleh SKAF diatas disusun paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan laporan dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Sedangkan Laporan Evaluasi Manajemen disampaikan kepada Dewan Komisaris. Data/informasi/dokumen terkait dengan peristiwa fraud disimpan dalam lemari tahan api dan hanya dapat diakses oleh Kepala SKAF dan/atau Direksi tau pihak yang diberi wewenang oleh Direksi .

Evaluation

Evaluation aims to identify the weaknesses and causes of fraud and to determine the necessary corrective measures in applying anti fraud strategies. Evaluation of the fraud control system shall be conducted periodically at least covering:

1. *The effectiveness of the anti fraud awareness program, which includes:*
   a. Implementation of anti fraud statement.
   b. Employee awareness program.
   c. Customer awareness program.
2. *Effectiveness of vulnerability identification.*
3. *Effectiveness of know your employee.*
4. *Effectiveness of Employee Assistance Program.*
5. *Effectiveness of the whistleblowing system.*
6. *Effectiveness of Audit Surprise.*
7. *Effectiveness Surveillance System.*

Follow-up

A follow-up mechanism based on the evaluation of fraud events to correct weaknesses and strengthen internal control systems to prevent recurrence of fraud due to similar weaknesses. The work unit sends a report / data / information regarding the implementation of follow-up fraud events carried out by the work unit to SKAF. The operational evaluation report by SKAF is formulated no later than 10 (ten) working days after the reporting month and submitted to the President Director and the Board of Commissioners with a copy to the Compliance Director. The Management Evaluation Report is submitted to the Board of Commissioners. Data / information / documents related to fraud events are stored in fireproof cabinets and can only be accessed by the Chairman of SKAF and / or Board of Directors or the party authorized by the Board of Directors.

Etika Perusahaan
Code of Conduct

Pengaturan dan implementasi penerapan tata kelola Bank yang baik (GCG) memerlukan komitmen dari top management dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan.

Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan tata kelola Bank yang baik.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Papua mengupayakan penerapan standar etika terbaik sesuai dengan pedoman perilaku dan etika bisnis untuk menunjang pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada setiap insan Bank Papua.

Keberadaan Kode Etik Bank Papua

Kode Etik Bank Papua ditetapkan oleh manajemen untuk dapat digunakan sebagai panduan bagi segenap insan Bank Papua dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar etika yang tinggi yang berlaku di dalam bisnis entitas secara umum, dengan harapan akan membawa pengaruh bagi pertumbuhan kedepannya secara sehat. Peluncuran kode etik sejak tahun 2004, diharapkan menjadi momentum yang tepat bagi seluruh insan Bank Papua untuk melakukan perubahan dan penyesuaian kearah sikap dan perilaku yang lebih berintegritas, efisien dan efektif.

Penerapan kode etik oleh seluruh insan Bank Papua dimaksudkan untuk :

a. Mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku.
b. Menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan benturan kepentingan atau potensi munculnya benturan kepentingan.
c. Menjaga kerahasiaan informasi Bisnis Bank Papua dan Informasi yang berkaitan dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan Bank Papua.

Sedangkan isi dan nilai-nilai Kode Etik Bank Papua, yakni:

1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Kebijakan.
2. Hubungan dengan pelanggan eksternal.
3. Hubungan dengan pelanggan internal.
4. Hubungan dengan masyarakat sekitar
5. Hubungan industrial yang baik antara perusahaan dengan insan Bank Papua.

Setting and implementing Bank's GCG implementation requires commitment from top management and the whole range of organizations. Implementation starts from the determination of the basic policy (strategic policy) and code of ethics that must be obeyed by all parties in the company.

For Indonesian banks, adherence to a code of ethics embodied in a single word and deed, is an important factor as a foundation for the implementation of Bank's GCG.

In conducting its business activities, Bank Papua seeks to apply the best ethical standards in accordance with business conduct and ethics guidelines to support the implementation of Good Corporate Governance in every human Bank Papua.

The existence of the Bank Papua Code of Conduct

The Code of Conduct of the Bank Papua is set by management to be used as a guide for all Bank Papua employees in behaving and behaving in accordance with the high ethical standards applicable in the entity business in general, in the hope of bringing a sound growth for the future. The launching of ethical codes since 2004, is expected to be the right momentum for all human Bank Papua people to make changes and adjustments to more integrity, efficient and effective attitudes and behaviors.

Implementation of code of ethics by all human Bank Papua is intended to:

a. Comply with all applicable laws and regulations.

b. Avoiding activities that may cause a conflict of interest or potential conflict of interest.

c. Maintain the confidentiality of business information of Bank Papua and Information relating to parties having business relationship with Bank Papua.

While the contents and values of the Bank Papua Code of Conduct, namely:

1. *Compliance with Laws and Policies.*
2. *Relationship with external customers.*
3. *Relationships with internal customers.*
4. *Relationships with surrounding communities*
5. *Good industrial relations between companies and the all human Bank Papua.*

6. Kebijakan Periklanan/Promosi.
7. Kerahasiaan informasi.
8. Ketepatan Pembukaan.
9. Transaksi dengan Nasabah dan Pemasok.
10. Benturan Kepentingan.
11. Pemberian Hadiah.
12. Penerimaan Hadiah.
13. Kontribusi dan Aktivitas Politik.

Kode Etik kepada Karyawan dan Upaya Penegakannya

Pedoman Kode Etik Bank Papua mengandung penerapan standar etika bisnis dalam hubungan dengan berbagai *stakeholder* yaitu :

1. Kepatuhan terhadap peraturan.
   a. Seluruh Pengurus dan Insan Bank Papua harus melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan bank yang berlaku.
   b. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Direksi dan pegawai bank melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan bank sesuai ketentuan yang berlaku.
   c. Bank Papua telah melakukan pencatatan atas harta, hutang dan modal secara benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
2. Penerapan Standar Layanan bagi seluruh Insan Bank Papua.
3. Kerahasiaan dan Informasi Perusahaan.
   Seluruh Insan Bank Papua senantiasa memanfaatkan data dan informasi bank untuk meningkatkan corporate *value* dan pengambilan keputusan dengan cara menjaga kerahasiaan informasi perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta kelaziman dalam dunia usaha dengan cara :
   a. Menggunakan sistem keamanan data yang terbaik.
   b. Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada *stakeholders* dengan tetap mempertimbangkan kepentingan bank.
   c. Menghindari penyebarluasan data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti
   d. Bekerja.
   e. Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan perusahaan pada saat berhenti bekerja.
   f. Menjaga kerahasiaan informasi kepada konsumen.

   Setiap pengurus dan seluruh insan Bank Papua dilarang menyalah gunakan informasi yang berkaitan dengan bank dan mengungkapkan informasi yang menjadi perusahaan yang diperolehnya selama menjabat, kecuali informasi tersebut diperlukan

6. *Advertising / Promotion Policy.*
7. *Confidentiality of information.*
8. *Opening accuracy.*
9. *Transactions with the Customer and Supplier.*
10. *Conflict of Interest.*
11. *Awarding.*
12. *Revenue Receipt.*
13. *Political Contributions and Activities.*

Code of Conduct to Employees and Enforcement Efforts

The Code of Conduct of the Bank Papua contains the application of business ethics standards in relation to various stakeholders, namely:

1. *Regulatory compliance.*
   a. *All Bank's board and human Bank Papua must implement the prevailing laws and regulations of the bank.*
   b. *The Board of Commissioners shall ensure that the Board of Directors and employees of the bank implement the laws and regulations of the bank in accordance with applicable regulations.*
   c. *Bank Papua has recorded the assets, debt and capital correctly in accordance with the accounting principles applicable.*
2. *Implementation of Service Standards for all Human Bank Papua.*
3. *Confidentiality and Company Information.*
   All human Bank Papua always use bank data and information to improve corporate value and decision making by maintaining the confidentiality of company information in accordance with laws and regulations, Bank Indonesia regulations and Financial Services Authority, as well as business practices in the world by:

   a. *Using the best data security system.*

   b. *Provide relevant and proportional information to stakeholders by considering bank interests.*

   c. *Avoid dissemination of data and information to other unauthorized parties either during work or after quitting*
   d. *Work.*
   e. *Submit all data associated with the company at the time of stopping working.*
   f. *Maintain confidentiality of information to consumers.*

   Every member of the Board and all human Bank Papua are prohibited from misusing information relating to the bank and disclosing the information they have acquired during their term of office, unless such information is required for examination and

untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan, atau tidak lagi menjadi rahasia milik bank.

4. Penanganan benturan kepentingan Pegawai senantiasa menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan dengan cara :
   a. Mematuhi peraturan, sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
   b. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai Bank Papua harus senantiasa mendahulukan kepentingan Bank Papua diatas kepentingan pribadi dan keluarga, maupun pihak lainnya.
   c. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Pegawai Bank Papua dilarang menyalah gunakan jabatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain.
5. Pemberian dan penerimaan hadiah Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Papua dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung kepada pejabat Negara dan atau individu yang mewakili mitra bisnis yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Pegawai Bank Papua dapat memberikan hadiah/ cindera mata dan entertainment kepada pihak lain dengan syarat menunjang kepentingan bank, tidak dimaksudkan untuk menyuap, telah dianggarkan dalam Rencana Bisnis Bank, dan apabila dalam bentuk hadiah/cinderamata berupa benda maka harus mencantumkan logo/nama bank.

Setiap pengurus dan pegawai Bank Papua dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan, baik langsung ataupun tidak langsung dari mitra bisnis yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Donasi oleh Bank ataupun pemberian suatu asset perusahaan kepada partai politik atau seorang atau lebih calon anggota legislatif maupun eksekutif, hanya boleh dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam batas kepatutan sebagaimana ditetapkan oleh bank, donasi untuk amal dapat dibenarkan.

Setiap tahun bagi Pengurus dan Pegawai Bank Papua diharuskan membuat pernyataan tahunan Pegawai Bank Papua tentang Kode Etik Bank Papua yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor: 64/DIR-BPD/IX/2013 Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Di dalam kode etik juga diatur mengenai bagaimana cara Bank untuk memperkuat Budaya Perusahaan, yaitu dengan :

investigation in accordance with laws and regulations, or no longer confidential to the bank.

4. *Handling of conflicts of interest Employees always avoid conditions, situations or impressions of conflicts of interest and abuse of position by:*
   a. Comply with rules, systems and procedures established.
   b. In performing its duties and obligations, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors and employees of Bank Papua must always prioritize the interests of Bank Papua above personal and family interests, as well as other parties.
   c. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors and employees of Bank Papua are prohibited from misusing their position for personal, family and other interests.
5. *The granting and receiving of prizes of Commissioners, Directors and Officers of Bank Papua shall be prohibited from giving or offering anything, directly or indirectly to State officials and or individuals representing business partners intended to influence decision making. Bank Papuan employees may provide gifts / gifts and entertainment to other parties on condition of supporting the interests of the bank, not intended to bribe, have been budgeted in the Bank Business Plan, and if in the form of gift / souvenir in the form of objects then must include logo / bank name.*

Every manager and employee of Bank Papua is prohibited from receiving anything for the interest, directly or indirectly from business partners that can influence decision making. Bank donations or the granting of a company's assets to a political party or one or more legislative or executive candidates shall be permitted only in accordance with the laws and regulations. In the limit of decency as established by the bank, donations to charities may be justified.

Every year for the Board and Officers of Bank Papua are required to make an annual statement of Bank Indonesia Officers on the Bank Papua Code of Conduct as set forth in the Decision Letter of the Board of Directors number: 64 / DIR-BPD / IX / 2013 About Compliance Manual (BPP) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

In the code of conduct is also regulated on how the Bank to strengthen the Corporate Culture, namely by:

1. Melakukan evaluasi terhadap Rumusan Nilai dan perilaku Utama Budaya Kerja.
2. Perancangan PIN teladan Kepatuhan (perumusan Kriteria dan evaluasi).
3. Diusulkan kepada unit terkait untuk melakukan penilaian terhadap pencanangan budaya patuh

Pernyataan Budaya Perusahaan

Pernyataan mengenai Budaya Perusahaan telah disahkan secara resmi melalui Peraturan Direksi nomor : 70/DIR-BPD/XII/2004 tanggal 27 Desember 2004 yang setiap tahunnya wajib bagi pengurus dan seluruh insan Bank Papua untuk menandatangani pernyataan dimaksud.
Budaya kerja Bank Papua yaitu: "Berpikir, Bertindak secara Bisnis" yang memiliki makna:
"Memikirkan dan melakukan setiap tindakan professional yang memberikan nilai tambah kepada semua pihak yang terkait dengan Bank Papua".

Budaya kerja Bank Papua didasarkan kepada nilai - nilai:

1. Melayani
   Pelayanan yang tulus kepada setiap orang dengan cepat, tepat & efektif yang dilakukan oleh semua unit kerja dan insan Bank Papua secara terus menerus guna kepuasan semua pihak terkait.
2. Efisien
   Melakukan setiap tindakan secara terencana, dilandasi dengan kejujuran untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi perusahaan.
3. Responsif
   Tanggap terhadap perubahan, memberikan solusi cepat dan tepat serta peka terhadap situasi internal dan eksternal yang berhubungan dengan perusahaan
4. Kewirausahaan
   Jiwa wirausaha yang sudah melekat dalam pribadipribadi seorang pegawai yang mampu menangkap, mengembangkan dan menciptakan peluang guna menghasilkan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan.
5. Asas Manfaat
   Menetapkan skala prioritas dan melaksanakannya dengan memanfaatkan sumber daya jangka pendek dan jangka panjang untuk kepentingan perusahaan.
6. Risiko yang diperhitungkan
   Setiap tindakan harus memberikan nilai tambah bagi perusahaan dengan memperhitungkan risiko.
7. Kerjasama
   Tindakan yang dilakukan bersama-sama oleh insan Bank Papua (dengan memanfaatkan perbedaan dan kemajemukan) untuk mencapai kinerja perusahaan yang optimal

1. *Evaluate the Value Formula and Main Behavior of Work Culture.*
2. *Designing exemplary PIN Compliance (formulation of Criteria and evaluation).*
3. *It is proposed to the relevant unit to carry out an assessment of culturally declared culture*

Corporate Culture Statement

The Statement on Corporate Culture has been officially ratified through the Board of Directors Regulation No. 70 / DIR-BPD / XII / 2004 dated December 27, 2004, which is mandatory for every member of the Bank and the entire Bank Papua to sign the statement.
The work culture of Bank Papua is: "Thinking, Acting Business" which has meaning:
"Thinking and doing every professional action that adds value to all parties associated with Bank Papua".

The work culture of Bank Papua is based on values:

1. *Serving*
   Sincere service to everyone quickly, appropriately & effectively by all units of work and people of Bank Papua continuously to the satisfaction of all related parties.
2. *Efficient*
   Perform every action in a planned, based on honesty to obtain optimal benefits for the company.
3. *Responsive*
   Responding to change, providing quick and precise solutions and sensitive to internal and external situations related to the company
4. *Entrepreneurship*
   The entrepreneurial spirit that is embedded in the personal personality of an employee who is able to capture, develop and create opportunities to generate economic value-added for the company.
5. *Benefit Principle*
   Establish priority scale and implement it by utilizing short and long term resources for the benefit of the company.
6. *Risk are taken into account*
   Each action must provide added value to the company taking into account the risks.
7. *Cooperation*
   The actions undertaken jointly by the human Bank Papua (by utilizing diversity and pluralism) to achieve optimum corporate performance

KEBIJAKAN TENTANG SELEKSI PEMASOK ATAU VENDOR

Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor di Bank Papua diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, 15/DIR-BPD/IV/2017 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Direksi Nomor: 15/DIR-BPD/II/2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Setiap kegiatan seleksi pemasok atau vendor untuk pengadaan barang atau jasa, maka Pejabat Pembuat Komitmen di Bank akan membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, sumber pendanaan, jangka waktu pelaksanaan, dan spesifikasi teknis, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.

Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar perusahaan memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik dengan mekanisme pengadaan yang transparan.

POLICY ABOUT SELECTION OF SUPPLIERS OR VENDORS

Policies on supplier selection or vendors in Bank Papua are regulated in the Decree of the Board of Directors of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, Number: 15 / DIRBPD / II / 2013 on Guidelines for Procurement of Goods and Services within PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Any supplier or vendor selection activity for the procurement of goods or services, the Committing Officer at the Bank will create a Terms of Reference (KAK) containing background, purpose and objectives, legal basis, funding source, implementation period, and technical specifications, and fulfillment of rights relating to suppliers or vendors.

The policy of supplier or vendor selection is useful to ensure that the company obtains the necessary goods or services at competitive prices and good quality with a transparent procurement mechanism.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada prinsipnya merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara Negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016.

LHKPN tersebut disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;

STATE ADMINISTRATION WEALTH REPORT (LHKPN)

The State Administration Wealth Report (LHKPN) is in principle a report that must be submitted by the State organizers regarding the assets they hold when they first serve, transfers, promotions and pensions. Other obligations that accompany LHKPN are to announce the assets and are willing to be examined for their assets. The Obligation of the State Operator to report the assets is regulated in:

1. *Law Number 28 Year 1999 concerning the Implementation of Clean and Free State of Corruption, Collusion and Nepotism;*
2. *Law Number 30 Year 2002 regarding Corruption Eradication Commission; and*
3. *Decision of the Corruption Eradication Commission Number: KEP. 07 / KPK / 02/2005 on the Procedures for Registration, Examination and Announcement of State Administration's Property Wealth Report Wealth of State Operator as amended by Regulation of KPK Number 7 Year 2016.*

LHKPN is submitted to the Corruption Eradication Commission (KPK). The State Operator as referred to in Article 2 of Law Number 28 Year 1999 is as follows:

1. *State Official of the Supreme State Institution;*
2. *State Official of a State High Institution;*
3. *Minister;*
4. *Governor;*
5. *Judge;*

6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi :
   a. Direksi , Komisaris dan pejabat struktural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
   b. Pimpinan Bank Indonesia;
   c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
   d. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   e. Jaksa;
   f. Penyidik;
   g. Panitera Pengadilan

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Bank Papua telah menerbitkan ketentuan tentang kewajiban pelaporan LHKPN bagi pegawai BPD Papua melalui SK Direksi No. 39/DIR-BPD/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sekaligus membentuk tim pengelola LHKPN Bank Papua dan salah satu anggotanya adalah Divisi Kepatuhan c.q Kepala Departemen APU-PPT. Selama periode Oktober – Desember 2016, tim LHKPN Bank Papua terdiri dari Tim Divisi Kepatuhan dan Divisi SDM melaksanakan kegiatan sosialisasi sekaligus pengisian LHKPN ke seluruh kantor cabang dalam rangka pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Other state officials in accordance with applicable laws and regulations; and
7. Other officials who have strategic functions in relation to the state administration in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, which include:
   a. Board of Directors, Commissioners and other structural officials in accordance with State-Owned Enterprises and Regional-Owned Enterprises;
   b. Head of Bank Indonesia;
   c. Leader of State Universities;
   d. Echelon I officials and other officials who are equated in the civilian, military and police environments of the Republic of Indonesia;
   e. Attorney;
   f. Investigator;
   g. Clerk of court

Based on the above provisions, Bank Papua has issued provisions on reporting obligations of LHKPN for BPD Papua employees through Decree No. BOD. 39 / DIR-BPD / VIII / 2016 dated 24 August 2016 regarding Obligation to Report the Wealtgh of PT. The Bank Pembangunan Daerah Papua as well as forming the LHKPN Bank Papua management team and one of its members is the Compliance Division c.q Head of the APU-PPT Department. During the period of October - December 2016, LHKPN team of Bank Papua consists of Compliance Division Team and HR Division conducting socialization activities as well as charging LHKPN to all branch offices in the framework of execution of LHKPN submission obligation in accordance with applicable provisions.

PENCEGAHAN TINDAKAN KORUPSI & GRATIFIKASI

Dalam rangka penguatan penerapan tata kelola Bank yang baik, Bank Papua melalui penerapan etik telah menegaskan kembali Larangan Tindakan Korupsi & Gratifikasi bagi seluruh jajaran Bank Papua. Hal ini terkait dengan komitmen bersama sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Nilai-nilai Budaya Perusahaan, yang antara lain mengatur mengenai *conflict of interest*, larangan penyalahgunaan jabatan dan pengaturan integritas karyawan Bank sangat menyadari perlunya menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan nasabah, rekanan dan seluruh *stakeholder* dengan memperhatikan etika dan menghindarkan diri dari hal-hal yang menjurus pada tindakan yang dikategorikan sebagai gratifikasi dan menciptakan budaya anti korupsi.

PREVENTION OF CORRUPTION ACTION & GRATIFICATION

In the context of strengthening the implementation of Bank's GCG, Bank Papua through the application of ethics has reaffirmed the Prohibition on Corruption & Gratification Action for all levels of Bank Papua. This is related to the joint commitment as set forth in the Company's Code of Conduct and Corporate Values, which among others regulates the conflict of interest, the prohibition of employee abuse and the integrity of the employees. The Bank is well aware of the need to maintain good relationships with customers, partners and all stakeholders with due regard to ethics and avoidance of things that lead to actions that are categorized as gratification and create an anti-corruption culture.

LAPORAN GRATIFIKASI UNTUK PERIODE 2016 DAN 2017
GRATIFICATION REPORTS FOR THE 2016 AND 2017 PERIODS

Tahun	Jumlah laporan Yang Masuk	Sudah Ditindaklanjuti/Sanksi	Belum Ditindaklanjuti/ DalamProses Report
2016	-	-	-
2017	2	2	-

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Transactions Containing Conflict of Interest

Bank senantiasa menjunjung tinggi integritas pribadi dan profesionalisme yang luhur, yang dituangkan dalam bentuk kebijakan internal mengenai Pedoman Kode Etik dan Nilai-nilai Budaya Perusahaan yang wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran Komisaris, Direksi , Pejabat Eksekutif, karyawan maupun para pihak yang terkait kerjasama dengan Bank. Pedoman Kode Etik dan Tingkah Laku telah mengatur hal-hal yang harus dihindari untuk mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas, termasuk dalam pengambilan keputusan.

The Bank continues to uphold the integrity of personal and professionalism, which is set forth in the form of internal policies concerning Code of Conduct and Corporate Cultural Values that must be complied with by all members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Executive Officers, employees and parties related to cooperation with the Bank. The Code of Conduct and guidelines have set out things to avoid in order to prevent potential conflict of interest in any activity, including in decision making.

Benturan kepentingan terjadi apabila pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi , Pejabat Eksekutif, Pegawai Pengambil Keputusan atau seorang Pelaksana membuat suatu keputusan dan dalam keputusan tersebut menyangkut kepentingan pribadi dari pihak yang bersangkutan termasuk kepentingan anggota keluarganya. Dalam hal pihak yang seharusnya mengambil keputusan memiliki benturan kepentingan terhadap Bank, maka pihak tersebut wajib mengungkapkan benturan kepentingannya sekaligus tidak diperbolehkan melibatkan diri dalam setiap tahapan pengambilan keputusan dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang dapat merugikan bank karena sangat besar kemungkinan bahwa keputusan tersebut tidak independen, sehingga berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan bank.

A conflict of interest occurs when an owner, a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors, an Executive Officer, a Decision Maker or an Executive undertakes a decision and in that decision concerning the personal interest of the party concerned including the interests of his / her family members. In the event that the party that is supposed to take a decision has a conflict of interest to the Bank, the party must disclose the conflict of interest and not be allowed to engage in any stage of decision making and shall not be allowed to engage in actions that may be detrimental to the bank as it is highly probable that the decision is not independent, potentially harm or reduce bank profits.

Unsur pokok yang harus dipenuhi oleh seluruh pegawai dan manajemen dalam pengelolaan benturan kepentingan adalah sebagai berikut :

1. Patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku, budaya perusahaan dan ketentuan internal perusahaan;
2. Menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan; dan
3. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan maupun informasi yang terkait dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan.

The key elements that all employees and management have to meet in the management of a conflict of interest are as follows:

1. *Comply and abide by applicable laws and regulations, corporate culture and internal company requirements;*
2. *Avoid activities that may cause a conflict of interest; and*
3. *Keep and maintain the confidentiality of company information as well as information related to parties that have business relations with the company.*

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diwujudkan dalam setiap kegiatan Bank, antara lain Dewan Komisaris Bank tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK Bank Umum dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank maupun peraturan perundangan yang berlaku. Dewan Komisaris Bank juga wajib melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan. Sepanjang tahun 2017, tidak terdapat laporan mengenai adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Compliance with laws and regulations is realized in every activity of the Bank, among others, the Board of Commissioners of the Bank is not involved in the decision making of operational activities, except in the case of provision of funds to related parties as stipulated in the provisions of Bank Indonesia concerning LLL and other matters specified in the Bank's Articles of Association and prevailing laws and regulations. The Board of Commissioners of the Bank is also required to disclose in the event of a conflict of interest. Throughout 2017, there were no reports of any conflict of interest transactions.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN
TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICT OF INTEREST

Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Trensaksi	Nilai transaksi (Rp)	Keterangan
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Buy Back Shares dan *Buy Back* Obligasi
Buy Back Shares and Buy Back Bonds

Sampai dengan 31 Desember 2017, Bank Papua tidak melakukan *Buy Back Shares* dan *Buy Back Obligasi,* sehingga bank tidak memperoleh dan menggunakan dana dari *Buy Back Shares* dan *Buy Back* Obligasi.

As of December 31, 2017, Bank Papua did not conduct Buy Back Shares and Buy Back Bonds, so the bank did not obtain and use funds from Buy Back Shares and Buy Back Bonds.

***BUY BACK* SHARE DAN *BUY BACK* OBLIGASI**

Penjelasan Kebijakan *Buy Back* Obligasi	Jumlah *Buy Back* Obligasi	Harga *Buy Back*	Peningkatan Laba dari hasil *Buy Back* Obligasi (jutaan Rp)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Shares Option
Shares Option

Sampai dengan akhir Desember 2017, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki saham pada Bank Papua, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar daerah Provinsi Papua dan Papua Barat. Selama dan dalam periode tahun pelaporan 2017 tidak terdapat opsi untuk membeli saham Bank Papua oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

Until the end of December 2017, members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Bank did not own shares in Bank Papua, other Banks, Non-Bank Financial Institutions, and other companies domiciled both within and outside the provinces of Papua and West Papua. During and in the period of reporting year 2017, there is no option to purchase shares of Bank Papua by members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and Executive Officers conducted through the offering of shares or stock option offering in the framework of granting compensation to members of the Board of Commissioners, Directors and Executive Officers of the Bank .

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Provision of Funds to Related Parties and Large Funds

Sesuai dengan pasal 57 dan 58 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum diatur bahwa dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi Direksi dan Dewan Komisaris Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan.

In accordance with Articles 57 and 58 of the OJK No.55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, it is stipulated that in order to avoid the failure of the Bank business as a result of the concentration of provision of funds and increase the independence of the BOD and BOC of the Bank of potential intervention from related parties, Banks are required to apply prudential principles in the provision of funds, among others by applying the deployment or diversification of the provision of funds provided.

Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar (*large exposures*) wajib berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.

Implementation of the provision of funds to related parties and / or the provision of large exposures shall be guided by the provisions regulating the maximum limit of lending of commercial banks.

Berdasarkan ketentuan OJK di atas Bank telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sesuai dengan :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006.

Under the above OJK provisions, the Bank has implemented prudential principles in the provision of funds to related parties and the provision of large exposure funds in accordance with:

1. *Regulation of the OJK No. 55 / POJK.03 / 2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks;*
2. *Bank Indonesia Regulation Number 7/3 / PBI / 2005 concerning the Legal Lending Limit for Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation Number 8/13 / PBI / 2006.*

Bank telah menetapkan kebijakan intern mengenai BMPK dan pengalokasian dana untuk pihak terkait serta debitur inti. Selain itu, untuk meningkatkan dan mempermudah pengawasan terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait, Bank menyusun dan melakukan pengkinian daftar rincian pihak terkait secara terus menerus yang mempunyai hubungan pengendali dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan atau keuangan.

The Bank has established internal policies regarding LLL and allocation of funds to related parties and core debtors. In addition, to enhance and facilitate supervision of the provision of funds to related parties, the Bank prepares and updates the continuous list of details of related parties which have a controlling relationship with the Bank, either directly or indirectly, through ownership, management and or financial relationships.

Selama tahun 2017, Bank tidak pernah melanggar atau melampaui BMPK. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perihal BMPK dimaksud di atas secara konsekwen dan tepat waktu. Tabel di bawah ini menjelaskan penyediaan dana kepada pihak terkait maupun debitur individu dan grup di Bank Papua selama tahun 2017.

During 2017, the Bank has never violated or exceeded the LLL. The Bank has periodically submitted the report to the Financial Services Authority (OJK) regarding the above mentioned LLL consequently in a timely manner. The table below describes the provision of funds to related parties as well as individual and group debtors at Bank Papua during 2017.

No	Penyediaan Dana	Jumlah		*Provision of Funds*
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)	
1	Kepada Pihak Terkait	49	720.065	*To the Related Party*
2	Kepada debitur inti : a. Individu b. Group	 37 13	 2.666.379 903.751	*To the core debtor:* *a. Individual* *b. Group*

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Transparency of Financial Condition and Non Financial Bank

Bank telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan kepada para *Stakeholders* termasuk laporan keuangan publikasi dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada pihak-pihak terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan dan para *Stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh laporan kondisi keuangan dan non keuangan telah disampaikan secara transparan kepada publik melalui berbagai sarana media cetak maupun elektronik, termasuk publikasi laporan keuangan di website yang tersedia secara tepat waktu, lengkap dan akurat. Transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan tersebut diantaranya adalah Laporan Tahuan, Laporan Publikasi, Info Produk dan Jasa Bank, serta info seputar kegiatan Bank yang dimuat pada halaman website, majalah, brosur, dan banner perusahaan.

The Bank has made transparency to the financial and non financial condition to Stakeholders including the financial statements of the publication and has submitted the report to related parties such as the Financial Services Authority and the Stakeholders in accordance with applicable regulations. All reports of financial and non-financial conditions have been submitted transparently to the public through various means of print and electronic media, including the publication of financial reports on the website available in a timely manner, complete and accurate. Transparency to the financial and non financial condition are Tahuan Report, Publication Report, Bank Product and Services Info, and info about Bank activities that are published on website, magazine, brochure and company banner.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Highest and Lowest Salary Ratio

Untuk perbandingan/ratio gaji antara gaji Dewan Komisaris tertinggi dengan yang terendah, gaji Direksi tertinggi dengan yang terendah, gaji pegawai tertinggi dengan yang terendah, dan antara gaji Direksi tertinggi dengan gaji pegawai yang tertinggi sepanjang tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

For the ratio / salary ratio between the highest and highest salaries of the BOC, the highest salaries of the BOD with the lowest, the highest salaries with the lowest, and between the highest salaries of the BOD and the highest salaries of employees throughout 2017 can be seen in the following table.

Jabatan	Gaji (Rp) *Salary*		Rasio Perbandingan (%) *Compare Ratio*	*Position*
	Tertinggi *HIghest*	Terendah *Lowest*		
Gaji Dewan Komisaris	75.000.000	67.500.000	111%	*Salaries of the Board of Commissioners*
Gaji Direksi	150.000.000	135.000.000	111%	*Salary of the Board of Directors*
Gaji Pegawai Tetap	30.290.011	2.563.996	1,181%	*Fixed Employee Salary*
Gaji Pegawai Tidak Tetap	35.000.000	2.300.000	1,522%	*Non-Permanent Employee Salaries*
Gaji Direksi Tertinggi & Pegawai Tetap Tertinggi	150.000.000	30.290.011	495%	*Highest Board of Directors & Employees Highest salaries*

Permasalahan Hukum
Legal Issues

Sepanjang tahun 2017, jumlah permasalahan hukum (perdata, pidana dan PHI) yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut.

Throughout the year 2017, the number of legal issues (civil, criminal and PHI) that have been completed (already has a permanent legal force) and which are still in the process of completion can be presented through the table as follows.

KASUS HUKUM YANG DIHADAPI BANK
LEGAL CASES FACED BANK

Permasalahan Hukum	Jumlah								Legal Issues
	PHI		Perdata		Perdata Khusus		Pidana		
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	1	12	0	0	0	2	2	*Completed (already has a fixed legal force)*
Dalam proses penyelesaian	2	1	9	23	1	6	5	4	*In the process of completion*
Total	**2**	**2**	**21**	**23**	**1**	**6**	**7**	**6**	**Total**

Perkara Penting Yang Dihadapi

Dari beberapa perkara/permasalahan hukum tersebut di atas, tidak terdapat perkara penting yang mencakup perkara/gugatan yang sedang dihadapi oleh perusahaan, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat, sehingga tidak terdapat atau tidak ada sanksi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat.

Important Cases Faced

Of the cases mentioned above, there are no important cases covering the case / suit being faced by the company, member of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners in office, so that there is no or no sanctions imposed on the company, members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners in office.

Rencana Strategis Bank
The Bank's Strategic Plan

Dalam rangka mencapai tujuan usaha yang berpedoman kepada visi dan misi yang telah ditetapkan Bank perlu menyusun dan menetapkan sasaran strategis dan seperangkat nilai-nilai perusahaan (*corporate values*). Selanjutnya sasaran strategis dan nilai-nilai perusahaan dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Bisnis, sebagai landasan dan acuan untuk melaksanakan kegiatan operasional sesuai visi dan misi Bank.

In order to achieve business goals that are guided by the vision and mission set by the Bank, it is necessary to establish and define strategic objectives and a set of corporate values. Furthermore, the strategic objectives and corporate values are further elaborated in the Business Plan, as the basis and reference for conducting operational activities in accordance with the Bank's vision and mission.

Dalam rangka mencapai tujuan sesuai visi dan misi, penyusunan Rencana Bisnis Bank perlu dilakukan secara matang dan realistis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Selain itu, perencanaan harus dilakukan Bank secara komprehensif sehingga lebih mencerminkan kompleksitas usaha dan dapat menampung arah pengembangan usaha Bank. Rencana Bisnis yang komprehensif juga dapat meningkatkan fleksibilitas operasional Bank dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin tinggi.

In order to achieve the goals in accordance with the vision and mission, the preparation of the Bank Business Plan needs to be done carefully and realistically while maintaining the principles of prudence and implementation of risk management. In addition, the Bank's planning should be done comprehensively in order to better reflect the business complexity and can accommodate the Bank's business development. A comprehensive Business Plan can also increase the Bank's operational flexibility in the face of increasingly competitive business.

Dalam penyusunan Rencana Bisnis, Bank juga harus mempertimbangkan faktor eksternal dan faktor internal yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank sehingga dapat menghasilkan rencana yang realistis. Rencana Bisnis yang realistis merupakan salah satu upaya dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif, khususnya risiko stratejik.

In preparing the Business Plan, the Bank should also consider external factors and internal factors that directly or indirectly affect the viability of the Bank's business so as to produce a realistic plan. A realistic Business Plan is one of the efforts to effectively implement risk management, especially strategic risk.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa di tahun 2017 pihak Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 / POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank. Dengan diterbitkannya POJK tersebut Bank perlu memenuhi ketentuan tersebut yang diseleraskan dengan Rencana Bisnis Bank.

Based on the foregoing, in 2017 the Financial Services Authority has issued the Financial Services Authority Regulation Number 5 /POJK.03/2016 dated January 26, 2016 regarding the Bank's Business Plan. With the issuance of the POJK, the Bank is required to comply with the provisions that are in accordance with the Bank's Business Plan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /POJK.03/2016 tersebut penyusunan Rencana Bisnis Bank harus disusun secara realistis dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris, dan dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank Papua. Rencana Bisnis Bank yang disusun haruslah memuat hal-hal yang diatur di dalam POJK Nomor 5 /POJK.03/2016 tersebut antara lain meliputi :

a. Ringkasan eksekutif;
b. Kebijakan dan strategi manajemen;
c. Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini;

Under the Regulation of the Financial Services Authority Number 5 / POJK.03/2016, the preparation of the Bank Business Plan must be prepared realistically and approved by the Board of Commissioners, and communicated to shareholders and all levels of the existing organization in Bank Papua. The Bank's Business Plan must contain the items set forth in the POJK Number 5 /POJK.03/2016 covering among others:

a. Executive summary;
b. Management policies and strategies;
c. Implementation of risk management and current Bank performance;

d. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
e. Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
f. Rencana pendanaan;
g. Rencana penanaman dana;
h. Rencana penyertaan modal;
i. Rencana permodalan;
j. Rencana pengembangan organisasi dan Sumber Daya Manusia;
k. Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
l. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
m. Informasi lainnya.

Target Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Adapun target Jangka Pendek Bank Papua adalah program-program yang akan dilakukan dalam tahun 2017 pada RBB dan untuk target Jangka Menengah adalah program multy years Bank Papua apabila program-program yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya namun tidak terealisasi pada RBB tahun berjalan, maka akan dilaksanakan pada RBB tahun berikutnya, hal ini perlu dilakukan dalam mendukung arah kebijakan strategis Bank Papua yang terinci adalah

d. Projected financial statements and assumptions used;
e. Projected ratios and other specified items;
f. Funding plan;
g. Plans for investment;
h. Paid in Capital plan;
i. Capital plan;
j. Organizational development plans and human resources;
k. Plan of product issuance and / or implementation of new activity;
l. Plan for development and / or change of office network; and
m. Other information.

Short Term and Medium Term Target

The Short Term Target of Bank Papua is the programs that will be conducted in 2017 on RBB and for the Medium Term Target is a multy years program of Bank Papua if the programs that have been established in the previous year but not realized in the RBB of the current year, it will be implemented in the next year's RBB, this needs to be done in support of the strategic direction of the Bank Papua strategic policy

No	Action Plan	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Action Plan
1	Memperkuat Landasan Operasional Bank Papua dengan pemenuhan 4 Pilar			*Strengthening the Operational Platform of Bank Papua of 4 Pillars*
	a. Peningkatan Jumlah Variasi Produk dan Layanan	√	√	*a. Increasing the Number of Variations of Products and Services*
	b. *Likuiditas* yang Terjaga serta Aman	√		*b. Maintain and Safe Liquidity*
	c. Pembukaan Jaringan Kantor dan Delivery Channel	√	√	*c. Opening of Office Network and Delivery Channel*
	d. Penyempurnaan Struktur Organisasi	√		*d. Improved Organizational Structure*
2	Program Transformasi yang telah ditetapkan dalam *Corporate Plan* melalui 10 Program Utama			*Transformation Program that has been set in Corporate Plan through 10 Main Programs*
	a. Memperkuat modal inti	√	√	*a. Strengthening core capital*
	b. Penajaman rumusan budaya kerja	√		*b. Sharpen the work culture formula*
	c. Merumuskan dan memulai implementasi struktur organisasi baru	√	√	*c. Formulate and begin implementation of the new organizational structure*
	d. Merumuskan dan memulai implementasi model bisnis dan proses bisnis baru	√	√	*d. Formulate and begin implementation of new business models and business processes*
	e. Memperkuat kompetensi dan leadership personil	√	√	*e. Strengthening the competence and leadership of personnel*
	f. Mereview *blue print* arsitektur IT & mulai memperkuat Sistem dan infrastruktur IT	√	√	*f. Review the blue print of IT architecture & begin to strengthen IT systems and infrastructure*
	g. Memperkuat *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)	√	√	*g. Strengthening GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)*
	h. Persiapan Rebranding		√	*h. Rebranding Preparation*
	i. Bank Devisa	√	√	*i. Foreign Exchange Bank*
	j. Persiapan dan pembukaan cabang serta peningkatan status cabang di Tanah Papua maupun diluar Tanah Papua	√	√	*j. Preparation and opening of branches and improvement of branch status in Tanah Papua and outside Papua Land*
3	Peningkatan Efektifitas dan Kapabilitas dalam Rangka Bank Regional Champion Jilid III			*Improved Effectiveness and Capability in the Framework of Regional Bank Champion Volume III*

No	*Action Plan*	Jangka Pendek	Jangka Menengah	*Action Plan*
	a. Strategi Peningkatan Model Guna Memperkuat Ketahanan Kelembagaan			*a. Model Improvement Strategies To Strengthen Institutional Resilience*
	1. Diagnosa kondisi Bank Papua saat ini dan tantangan ke depan	√	√	*1. Diagnose the current condition of the Bank of Papua and the challenges ahead*
	2. Sosialisasi kepada *Stakeholder* dan Shared Holder	√	√	*2. Socialization to Stakeholders and Shared Holder*
	3. Menyusun strategic holding dan finacial holding Road Map Bank Papua	√	√	*3. Establish strategic holding and finacial holding of Road Map Bank Papua*
	4. Piloting Project Strategic and *Financial* Holding		√	*4. Piloting Project Strategic and Financial Holding*
	b. Human *Capital* Development			*b. Human Capital Development*
	1. Standarisasi Rekrutmen		√	*1. Standardization of Recruitment*
	2. Pengembangan training dan development	√	√	*2. Development of training and development*
	3. Pengembangan system *performance* management (KP)	√	√	*3. Development of performance management system (KP)*
	4. Pengembangan careerpath & talent management	√	√	*4. Development of careerpath & talent management*
	5. Pengembangan corporate culture & *code of conduct*	√	V	*5. Development of corporate culture & code of conduct*
	c. Product and Service Development			*c. Product and Service Development*
	1. Pengembangan produk dan layanan	√	√	*1. Development of products and services*
	2. Pengembangan kartu kredit		√	*2. Credit card development*
	3. Service Excellence	√	√	*3. Service Excellence*
	4. Marketing Communication		√	*4. Marketing Communication*
	d. Teknologi Informasi dan *Management Information System* (MIS)			*d. Information Technology and Management Information System (MIS)*
	1. Banking Transaction	√	√	*1. Banking Transaction*
	2. Office Automation	√	√	*2. Office Automation*
	3. Security System	√	√	*3. Security System*
	4. Integrasi Core Bangking System		√	*4. Core Bangking System Integration*
	e. *Good Corporate Governance* (GCG) and *Risk Management*			*e. Good Corporate Governance (GCG) and Risk Management*
	1. Standarisasi *Risk Management* Policy		√	*1. Standardization of Risk Management Policy*
	2. Standarisasi *Good Corporate Governance* Policy	√	√	*2. Standardization of Good Corporate Governance Policy*
	3. Standarisasi *Internal Control* Policy	√	√	*3. Standardization of Internal Control Policy*
	4. Standarisasi Anti fraud dan Whistle B*l*ower Management	√	√	*4. Standardization of Anti fraud and Whistle Blower Management*
	5. Standarisasi tugas pokok dan fungsi Direksi dan Komisaris dan Organisasi	√	√	*5. Standardization of the main duties and functions of the Board of Directors and Commissioners and the Organization*
	6. Penerapan fungsi *Quality Assurance*	√	√	*6. Implementation of Quality Assurance function*
	7. *Risk Based Audit*	√	√	*7. Risk Based Audit*
	8. Standarisasi Penilaian *Risk Based* Banking Rating (RBBR)	√	√	*8. Standardization of Risk Based Banking Rating (RBBR)*
4	Memperbaiki Kualitas Kredit Secara Keseluruhan			*4. Improve Credit Quality Overall*
	a. Mereview kebijakan kredit	√		*a. Review the credit policy*
	b. Meningkatkan kompetensi analis dan pejabat kredit	√	√	*b. Increase the competence of analysts and credit officers*
	c. Penagihan	√	√	*c. Billing*
	d. Restrukturisasi	√		*d. Restructurisation*
	e. Penjualan aset atau jaminan kredit	√		*e. Sale of asset or credit guarantee*
	f. Monitoring terhadap kredit yang telah diberikan	√	√	*f. Monitoring of credit already provided*
	g. Evaluasi proses pemberian kredit	√	√	*g. Evaluate lending process*

Sedangkan untuk target jangka panjang Bank belum memiliki sumber pendanaan yang mencukupi untuk mendukung penerapan rencana stratejik Bank Papua untuk jangka panjang tersebut.

As for the long-term target, the Bank does not have sufficient funding sources to support the implementation of the Bank's strategic plan for the long term.

Langkah Strategis Yang Akan Ditempuh

Beberapa langkah strategis yang akan ditempuh dalam rangka merealisasikan arah kebijakan Bank Papua sehingga visi dan misi Bank Papua serta Program BPD Transformasi dapat terpenuhi, adalah sebagai berikut :

1. Strategic peningkatan modal guna memperkuat ketahanan kelembagaan.
   a. Mengawal Komitmen setoran modal 4 Trilyun dengan kunjungan kerja secara intensif kepada pemerintah daerah dan provinsi serta para pengelola keuangan daerah, dengan memberikan laporan keuangan publikasi triwulanan sehingga para pemilik mengetahui keberadaan Bank Papua;
   b. Kepada pemegang saham yang telah memenuhi Komitmen Setoran Modal diberikan penghargaan/ *reward*, sebagai ucapan terima kasih atas perhatian dan dukungan kepada Bank Papua.
2. Kebijakan dan strategi yang di koordinir Divisi Sumber Daya Manusia, meliputi sebagai berikut :
   a. Menerima Calon Pegawai sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia pada tahun berjalan, dengan didasarkan pada jumlah kebutuhan untuk memenuhi pengembangan struktur organisasi, jumlah Sumber Daya Manusia yang pensiun, yang meninggal, yang di PHK, dan yang mengundurkan diri, sehingga antara penambahan dengan kebutuhan tidak terjadi missmacth dan selalu terjaga kuotanya;
   b. Dilakukan Penerimaan Prohire pada unit kerja yang mempunyai dampak signifikan terhadap perusahaan, antara lain : Kredit Khusus, IT, Analis Kredit, Auditor dan Dealer Treasury;
   c. Pengembangan bakat, kompetensi, dan promosi untuk Sumber Daya Manusia yang telah memenuhi target KPI-nya sebagai penghargaan;
   d. Penilaian Kinerja Pegawai secara lebih optimal melalui sistem berbasis online bekerjasama dengan Pihak Ketiga melalui Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SMK);
   e. Penerapan Aplikasi Sistem Karir dan Suksesi;
   f. Melakukan pengembangan keahlian melalui training and development :
      - Bidang Perkreditan yaitu memberikan pendidikan khusus analisa kredit sesuai dengan segmentasi sektor kredit yang diberikan pendidikan dan training Kredit Konsumer, Kredit Program dan UKM, Kredit Produktif sesuai dengan sektornya.

Strategic Steps will Take

Some strategic steps that will be taken in order to realize the policy direction of Bank Papua so that the vision and mission of Bank Papua and BPD Transformation Program can be fulfilled, are as follows:

1. *Strategic capital enhancement to strengthen institutional resilience.*
   a. Guarding the Commitment of 4 trillion Trillion in capital with intensive work visits to local and provincial governments and local finance managers, providing quarterly publication financial reports so owners know the existence of Bank Papua;
   b. To shareholders who have fulfilled the Capital Deposit Commitment are awarded / rewarded, as a thank you for their attention and support to Bank Papua.
2. *Policies and strategies that are coordinated by the Human Resource Division, covering the following:*
   a. Accepting Candidates for Employees in accordance with the needs of Human Resources in the current year, based on the number of needs to meet the development of the organizational structure, the number of retired human resources, the dead, the layoffs, and the withdrawal, so that between the addition to the needs does not occur missmacth and always awake quota;
   b. Acceptance of Prohire on the work unit that has a significant impact on the company, among others: Special Loans, IT, Loan Analyst, Auditor and Treasury Dealer;
   c. Development of talent, competence, and promotion for human resources who have met their KPI targets as rewards;
   d. Employee Performance Appraisal more optimally through online based system in cooperation with Third Party through Application of Performance Management System (SMK);
   e. Career System Application and Succession;
   f. Develop skills through training and development:
      - *Loan field is to provide special education loan analysis in accordance with the segmentation of the loan sector provided education and training Consumer Loan, Program Loans and SMEs, Loans Productive in accordance with its sector.*

- Bidang Pemasaran yaitu memberikan pendidikan khusus yang menyangkut pemasaran produk dana dan jasa.
- Bidang Dealer yaitu memberikan pendidikan khusus yang menyangkut penempatan dana di pasar uang dan modal.
- Bidang programer, analis teknologi informasi dan networking.
- Bidang Auditor, Manajemen Risiko, Kepatuhan, Hukum yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
- Bidang Teller, *Customer* Service untuk meningkatkan layanan, *service excelent*.
- Bidang akuntansi, perencanaan keuangan, perpajakan dan pengadaan.
- Bidang umum untuk memenuhi pengembangan bisnis, sekretaris, serta umum.
- Leadership, strategy untuk semua yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional bisnis

g. Meningkatkan pengetahuan di bidang perkreditan, pasar uang dan modal, perekonomian bagi para pengambil keputusan baik di dalam negeri maupun di luar negeri melalui workshop, seminar;

h. Implementasi Sistem Manajemen Talenta dengan melakukan talent shooting, sehingga kebutuhan para Manajer Lini, Middle dan Top akan terpenuhi secara dini;

3. Pengembangan product dan layanan juga sangat penting dalam mendukung kesuksesan operasional Bank Papua, karena itu dalam implemetasinya akan dikoordinir oleh beberapa Divisi yang berhubungan langsung dengan kebijakan dan strategi ini.
   a. Mengembangkan produk dan service perbankan yang sesuai dengan kebutuhan Bank Papua dengan mendasari pada riset terpadu yang dilakukan baik oleh Divisi Perencanaan dan Pengembangan maupun dari Divisi-Divisi lainnya;
   b. Melakukan tinjauan *Pricing* produk secara berkala dengan memperhatikan kondisi persaingan antar Bank melalui rapat ALCO;
   c. Mensosialisasikan produk-produk dan jasa bank kepada masyarakat dalam bentuk program edukasi maupun pengadaan program-program lainnya yang lebih menarik seperti *Gathering Comunity*;

- *Marketing field is to provide special education which involves marketing of fund products and services.*
- *Dealer field is to provide special education concerning the placement of funds in money and capital markets.*
- *Programmers field, information technology analysts and networking.*
- *Auditor's Field, Risk Management, Compliance, Laws appropriate to their educational background.*
- *Teller, Customer Service Field to improve service, service excelent.*
- *Accounting, financial planning, taxation and procurement field.*
- *General Affair fields to meet business development, secretary, and general.*
- *Leadership, strategy for all tailored to business operational needs*

g. Increase knowledge in the field of loan, money and capital markets, economics for decision makers both at home and abroad through workshops, seminars;

h. Implementation of Talents Management System by doing talent shooting, so the needs of Line, Middle and Top Managers will be met early;

3. The development of products and services is also very important in supporting the operational success of Bank Papua, therefore in its implementation will be coordinated by several Divisions that deal directly with these policies and strategies.
   a. Develop banking products and services that are in line with the needs of Bank Papua underpinning integrated research undertaken by the Planning and Development Division as well as from other Divisions;
   b. Conduct periodic Pricing review of products with due observance of inter-bank competition conditions through ALCO meetings;
   c. Socializing banking products and services to the community in the form of educational programs and the procurement of other more interesting programs such as Gathering Comunity;

d. Membuka jaringan kantor pada sentra-sentra ekonomi produktif seperti pasar-pasar dan kegiatan ekonomi masyarakat lainnya, maupun pada daerah baru yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah guna mendukung pembangunan Daerah maupun masyarakat umum dalam rangka membantu mempercepat pembangunan;
e. Menambah jaringan delivery channel baik berupa penambahan mesin ATM, EDC, CDM, Laku Pandai yang akan dikoordinir oleh Divisi Perencanaan dan Pengembangan, Divisi Teknologi Infromasi, Divisi Pemasaran;
f. Evaluasi dan monitoring terhadap Produk dan Layanan Bank secara berkala yang akan dilakukan baik oleh Divisi Perencanaan dan Pengembangan, Divisi Pemasaran maupun oleh Divisi lainnya;
g. Menjalin hubungan dan komunikasi yang baik antara Bank Papua dan PEMDA sebagai nasabah prima untuk menjaga penempatan dana tetap berada di Bank Papua dengan membuat mekanisme pelayanan dan protokoler khusus yang melayani nasabah PEMDA.

4. Peranan Teknologi dan Informasi ini sangat penting dalam rangka pengembangan operasional Bank, karena itu dalam melayani kebutuhan nasabah/ debiturnya harus disesuaikan dengan prilaku nasabah/debitur saat ini, karena itu dalam mengklasifikasikan nasabahnya perlu dilakukan pemetaan yang signifikan antara kebutuhan yang diminta dengan teknologi informasi yang dimiliki oleh Bank Papua, yang meliputi :
   a. Pemenuhan teknologi informasi untuk kebutuhan Pemerintah Daerah;
   b. Menyempurnakan aplikasi *payment point* dan sistem TI CKPN;
   c. Pemenuhan teknologi informasi untuk kebutuhan perusahaan korporasi, menengah dan kecil;
   d. Pemenuhan teknologi informasi untuk kebutuhan nasabah/debitur umum yang meliputi nasabah/ debitur kelas atas, menengah dan bawah;

d. Opening office networks in productive economic centers such as markets and other community economic activities, as well as new areas needed by local governments to support regional development as well as the general public in order to help accelerate development;

e. Adding a network of delivery channels in the form of addition of ATM machines, EDC, CDM, smart manners that will be coordinated by the Division of Planning and Development, Division of Information Technology, Marketing Division;
f. Evaluate and monitor the Bank's Products and Services on a regular basis that will be undertaken by both the Planning and Development Division, the Marketing Division as well as by other Divisions;
g. Establish good relationships and communication between Bank Papua and LG as prime customers to keep fund placements in Bank Papua by establishing a special service and protocol mechanism that serves LGs.

4. The role of Technology and Information is very important in the framework of the Bank's operational development, therefore in serving the needs of customers / borrowers must be adjusted to the behavior of customers / debtors at this time, therefore in classifying the customer needs to do a significant mapping between the requirements demanded by information technology owned by Bank Papua, which includes:
   a. Fulfillment of information technology for the needs of Local Government;
   b. Improve the application of payment points and IT systems CKPN;
   c. Fulfillment of information technology for corporate, medium and small enterprise needs;
   d. Fulfillment of information technology for the needs of customers / general debtor covering customers / debtor upper, middle and lower class;

e. Pemenuhan untuk kebutuhan intern Bank Papua yang akan dipergunakan untuk MIS yang akan mampu menelaah perkembangan pencapaian kinerja, pengukuran risiko, serta audit yang berbasis risiko yaitu dalam bentuk warehouse database;
f. Mengoptimalisasi *helpdesk* dengan memberikan informasi dengan cepat atas komplein nasabah;
g. Fokus terhadap realisasi dan optimalisasi Aplikasi Internet Banking, SMS Banking, dan Mobile Banking;

Karena itu pengembangan Teknologi Informasi Bank Papua akan difokuskan pada :

a. Pengembangan Fitur Aplikasi *Switching* dalam rangka Mengembangkan layanan payment sehingga bisa melayani kebutuhan nasabah secara komprehensif seperti pengembangan SMS Banking, Mobile Banking, *Payment Point Online Booking* (PPOB), Pengembangan Rekening Ponsel, Visa issuer dan pengembangan Fitur *Switching* lainnya;
b. Penguatan Keamanan Jaringan/ *Firewall*/ LAN, DC, & DRC & *Remote Link* yang dilakukan secara berkala;
c. Pengadaan dan Pengembangan *system* MIS meliputi : *User Requirement, Development*, Pengujian, Sosialisasi dan Implementasi;
d. Penguatan Keamanan Jaringan/ *Firewall/ LAN*, DC, & DRC & *Remote Link* yang dilakukan secara berkala;
e. Menyediakan *interface* yang akan menghubungkan antara aplikasi milik Divisi lain dengan data *ware house* Bank Papua.

5. Penyelenggaraan operasional Bisnis Bank Papua perlu diimbangi dengan implementasi GCG, *Risk Management* dan Kepatuhan, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Bank Papua terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan *Corporate Plan* yang telah ditetapkan oleh Bank Papua, namun tetap dalam koridor ketentuan yang berlaku, dengan menyelenggarakan :
   a. Memastikan penerapan tata kelola Bank kepada seluruh insan Bank Papua terlaksana guna peningkatan pemahaman dan penerapan GCG bagi setiap Insan Bank Papua dan *Stockholding*;
   b. Mengoptimalkan fungsi dan peran Staf Manajemen Risiko di Kantor Cabang yang bertanggungjawab kepada Divisi Manajemen Risiko Kantor Pusat sebagai perpanjangan tangan untuk memonitoring seluruh aktifitas operasional yang ada di Kantor Cabang dan dapat dilaporkan dalam Laporan Profil Risiko Cabang (PRC);

e. Fulfillment for internal needs of Bank Papua that will be used for MIS that will be able to review the progress of performance achievement, risk measurement, and risk-based audit that is in the form of database warehouse;
f. Optimizing helpdesk by providing information quickly on customer complein;
g. Focus on realization and optimization of Internet Banking Application, SMS Banking, and Mobile Banking;

Therefore the development of Information Technology Bank Papua will be focused on:

a. Development of Switching Application Features in order to develop payment services so that it can serve the needs of customers in a comprehensive manner such as the development of SMS Banking, Mobile Banking, Payment Point Online Booking (PPOB), Development of Mobile Accounts, Visa issuer and other Switching Features development;
b. Strengthening Network Security / Firewall / LAN, DC, & DRC & Remote Link regularly;
c. Procurement and Development of MIS system include: User Requirement, Development, Testing, Socialization and Implementation;
d. Strengthening Network Security / Firewall / LAN, DC, & DRC & Remote Link regularly;
e. Provides an interface that will connect between applications belonging to other Divisions with data warehouse Bank Papua.

5. Operation of Bank Indonesia's business operations needs to be balanced with the implementation of GCG, Risk Management and Compliance, so that activities undertaken by Bank Papua continue to grow and develop in accordance with the Corporate Plan set by Bank Papua, but still within the corridor of applicable regulations, by organizing :

a. Ensuring the implementation of Bank's GCG to all Bank Papua personnel is implemented to enhance understanding and implementation of GCG for every Insan Bank Papua and Stockholding;
b. Optimize the functions and roles of Risk Management Officers in Branch Offices that are responsible to the Head Office's Risk Management Division as an extension to monitor all operational activities in the Branch Office and may be reported in the Branch Risk Profile Report (PRC);

c. Melakukan sosialisasi terhadap optimalisasi Penanaman Budaya *Awarness* (Budaya Peka) terhadap Risiko bagi seluruh Insan Bank Papua dan meminimalisir potensi Risiko yang akan timbul di kemudian hari;
d. Implementasi *Risk Based Approach* sesuai kelompok nasabah (*Low, Moderate* dan *High*) dengan menggunakan system teknologi informasi;
e. Penyajian Pelaporan Manajemen Risiko berupa Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko, KPMM, ICAAP, & LED yang lebih komprehensif kepada pihak manajemen maupun pihak eksternal terkait, sebagai bahan dalam menentukan kebijakan Perusahaan. (8 risiko);
f. Memastikan Kepatuhan Bank terhadap Komitmen/ Janji dengan Bank Indonesia (BI) dan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meliputi :
   - Monitoring dan Pemantauan Penyelesaian Komitmen dan atau janji Bank pada BI dan Otoritas Pengawasan lainnya serta penerapan Budaya Kepatuhan Seluruh Unit Kerja Bank Papua.
   - Penyusunan *Compliance Information System* (CIS).
   - Sosialisasi *Compliance Information System* (CIS).
   - Pemantauan terhadap Rasio-Rasio Keuangan Bank.

c. To socialize the optimization of Awareness Culture implementation (Culture Sensitive) to the Risks for all Insan Bank Papua and minimize the potential Risks that will arise in the future;

d. Implementation of Risk Based Approach according to customer group (Low, Moderate and High) by using information technology system;

e. Presentation of Risk Management Reporting in the form of Bank Soundness, Risk Profile, KPMM, ICAAP, & LED more comprehensive to the management and related external parties, as material in determining the Company policy. (8 risks);
f. Ensure the Bank's Compliance with Commitments / Promises with Bank Indonesia (BI) and / or the Financial Services Authority (OJK) includes:
   - *Monitoring and Monitoring of Completion of Bank Commitment and / or promise to BI and other Supervision Authority and implementation of Compliance Culture of All Work Unit of Bank Papua.*
   - *Compliance Information System (CIS).*
   - *Socialization of the Compliance Information System (CIS).*
   - *Monitoring of Bank Financial Ratios.*

Akses Informasi

Access Information

Bank Papua telah menyediakan informasi kepada *stakeholders* yang memungkinkan *stakeholders* menggunakan haknya. Penyebaran informasi Bank Papua antara lain dilakukan melalui media sebagai berikut :

1. Perusahaan senantiasa memberikan kemudahan bagi *stakeholders* untuk mengakses informasi, diantaranya mengenai informasi finansial dan perusahaan, publikasi, produk dan aksi korporasi melalui website **www. bankpapua.co.id**
2. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Call Center 62 - 967 532011
3. Informasi melalui media lainnya, antara lain media massa (Siaran Pers), majalah/buletin internal, poster dan banner.
4. Bank Papua juga menyampaikan informasi melalui upaya transparansi penyampaian palaporan, laporan kepada regulator, analist meeting, konferensi pers, dan lain sebagainya.

Bank Papua has provided information to stakeholders that enable stakeholders to exercise their rights. Information dissemination of Bank Papua is done through the following media:

1. *The Company always provides convenience for stakeholders to access information, including financial and corporate information, publications, products and corporate actions through the website* ***www. bankpapua.co.id***
2. *For further information, please contact Call Center 62 - 967 532011*
3. *Information through other media, including mass media (Press Release), internal magazines / bulletins, posters and banners.*
4. *Bank Papua also convey information through transparency of submission of reports, reports to regulators, analyst meetings, press conferences, and so forth.*

Di dalam website bank telah menyampaikan informasi mengenai :

1. Corporate Identity
2. Produk dan Layanan
3. Laporan Tahunan, GCG dan CSR
4. Pengurus bank
5. Visi dan Misi Bank

In the bank's website has provided information on:

1. *Corporate Identity*
2. *Products and Services*
3. *Annual Report, GCG and CSR*
4. *Bank management*
5. *Vision and Mission of Bank*

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Perseroan, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi :

For more information about the Company, the general public and investors can contact:

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretry
Alamat Kantor :
Jl. Achmad Yani No. 5-7 Jayapura 99111
Nomor Telephon :
62-967 532011,533608,531944,532351
Nomor Fax :
Fax. 62-967 533019
Email : sekper@bankpapua.co.id

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Changes to the Laws and Regulations

Sepanjang tahun 2017 terdapat beberapa perubahan peraturan perundang-undangan baik dari Bank Indonesia maupun dari Otoritas Jasa Keuangan yang mana ketentuan tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar atas pelaksanaan operasional Bank, antara lain sebagai berikut :

Throughout the year 2016 there have been several amendments to legislation from Bank Indonesia and from the Financial Services Authority in which such provisions have substantial influence over the Bank's operational operations, including the following:

No	POJK	Tanggal	Tentang	*About*
1	POJK Nomor 51/ POJK.03/2017	18 Juli 2017	Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik	*Sustainable Financial Implementation for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies*
2	POJK Nomor 50/ POJK.03/2017	13 Juli 2017	Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) bagi Bank Umum	*Obligation of Fulfillment of Net Stable Funding Ratio for Commercial Banks*
3	POJK Nomor 46/ POJK.03/2017	12 Juli 2017	Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum	*Implementation of Commercial Bank Compliance Function*
4	POJK Nomor 45/ POJK.03/2017	12 Juli 2017	Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam	*Special Treatment of Loan or Bank Financing for Certain Regions in Indonesia Affected by Natural Disasters*
5	POJK Nomor 44/ POJK.03/2017	12 Juli 2017	Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/ atau Pengolahan Tanah	*Restrictions on the Provision of Loan or Financing by Commercial Banks for Land Procurement and / or Land Processing*
6	POJK Nomor 43/ POJK.03/2017	12 Juli 2017	Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank	*Follow-up Implementation of Bank Supervision*
7	POJK Nomor 42/ POJK.03/2017	12 Juli 2017	Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum	*Obligation of Preparation and Implementation of Loan Policy or Bank Financing for Commercial Banks*
8	POJK Nomor 41/ POJK.03/2017	12 Juli 2017	Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank	*Bank Check Requirements and Procedures*
9	POJK Nomor 40/ POJK.03/2017	12 Juli 2017	Kredit atau Pembiayaan kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan dengan Agunan Saham	*Loan or Financing to Securities Companies and Loan or Financing with Collateral Share*
10	POJK Nomor 39/ POJK.03/2017	12 Juli 2017	Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia	*Sole Ownership in Indonesian Banking*
11	POJK Nomor 38/ POJK.03/2017	12 Juli 2017	Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak	*Implementation of Consolidated Risk Management for Banks Conducting Control of Subsidiaries*
12	POJK Nomor 37/ POJK.03/2017	12 Juli 2017	Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan	*Utilization of Foreign Workers and Knowledge Transfer Program in the Banking Sector*
13	POJK Nomor 36/ POJK.03/2017	12 Juli 2017	Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal	*Prudential Principle in Capital Participation Activities*
14	POJK Nomor 18/ POJK.03/2017	26-Apr-17	Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	*Reporting and Requesting Debtor Information through the Financial Information Services System*
15	POJK Nomor 16/ POJK.03/2017	04-Apr-17	Bank Perantara.	*Intermediary Bank.*
16	POJK Nomor 15/ POJK.03/2017	04-Apr-17	Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum	*Stipulation of the Status and Follow Up of Commercial Bank Supervision*
17	POJK Nomor 13/ POJK.03/2017	27 Maret 2017	Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan	*Use of Public Accountant Services and Public Accountant Firm in Financial Services Activities*
18	POJK Nomor 12/ POJK.01/2017	16 Maret 2017	Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Terorisme disektor Jasa Keuangan	*Implementation of Anti Money Laundering & Terrorism Prevention Program in Financial Services*

No	SEOJK	Tanggal	Tentang	*About*
1	50/SEOJK.03/2017	27-Sep-17	Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.	*Reporting and Requesting Debtor Information through the Financial Information Services System.*
2	48/SEOJK.03/2017	15-Sep-17	Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar	*Guidelines for Calculating Net Claims Derivative Transactions in Weighted Risk Assets Calculations for Credit Risk by Using the Standard Approach*
3	44/SEOJK.03/2017	19 Juli 2017	Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia	*Sole Ownership in Indonesian Banking*
4	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/SEOJK.03/2017	19 Juli 2017	Prinsip Kehati-hatian dan Laporan dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak	*Prudential Principles and Reports in the Framework of Consolidated Risk Management Implementation for Banks Conducting Control of Subsidiaries*
5	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2017	19 Juli 2017	Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan	*Utilization of Foreign Workers and Knowledge Transfer Program in the Banking Sector*
6	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017	11 Juli 2017	Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan	*Procedures for Use of Public Accountant Services and Public Accountant Firm in Financial Services Activities*
7	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2017	7 Juli 2017	Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum	*Guidelines on Standards for Internal Control Systems for Commercial Banks*
8	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2017	7 Juli 2017	Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit	*Transparency of Basic Loan Interest Information*
9	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2017	7 Juli 2017	Persyaratan Bank Umum untuk Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing	*Requirements for Commercial Banks to Conduct Business Activities in Foreign Currency*
10	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017		Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan	*Implementation of Anti Money Laundering Program and Prevention of Terrorism Financing in the Banking Sector*
11	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017	6 Juni 2017	Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	*Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks*
12	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2017	06-Apr-17	Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis Antarnegara dengan Menggunakan Standar Pelaporan Bersama (Common Reporting Standard)	*Submission of Information of Foreign Clients on Taxation in the Intercity of Automatic Information Exchange by Using Common Reporting Standard*
13	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017	17 Maret 2017	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum	*Assessment of Commercial Bank Rating*
14	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017	17 Maret 2017	Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.	*Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.*
15	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2017	17 Maret 2017	Kepemilikan Saham Bank Umum	*Share Ownership of Commercial Banks*
16	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2017	17 Maret 2017	Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain	*Prudential Principles for Commercial Banks Conducting Partial Submission of Works to Others*
17	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/ SEOJK.03/2017	16 Januari 2017	Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana	*Implementation of Risk Management in Banks Conducting Activities Related to Mutual Funds*

No	Bank Indonesia	Tanggal	Tentang	*About*
18	19/18/PADG/2017	28 Desember 2017	Laporan Harian Bank Umum	*Commercial Bank Daily Report*
19	19/10/PBI/2017	06-Sep-17	Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank	*Implementation of Anti Money Laundering and the Prevention of Terrorism Financing for the Providers of Payment System Services Other Than Banks and Organizers of Non-Bank Foreign Exchange Activities*
20	19/9/PBI/2017	19 Juli 2017	Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang	*Commercial Issues and Transactions in Money Market*
21	1/9/PBI/2017	18-Apr-17	Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional	*Fifth Amendment To Bank Indonesia Regulation Number 15/15 / PBI / 2013 Concerning Statutory Reserves of Commercial Banks In Rupiah And Foreign Currency For Conventional Commercial Banks*
22	19/2/PBI/2017	16 Maret 2017	Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang	*Transaction of Certificates of Deposit in Money Market*
23	19/5/PBI/2017	12-Apr-17	Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar	*Treasury Certification and Application of Market Ethics Code*
24	19/3/PBI/2017	11-Apr-17	Pinjaman *Likuiditas* Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional	*Short Term Liquidity Loans for Conventional Commercial Banks*

Pemberian Dana untuk Kepentingan Sosial dan/ atau Kegiatan Politik

Provision of Funds for Social Responsibility and / or Political Activities

Dalam rangka mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan sekitarnya Bank Riau Kepri telah menyediakan dana untuk kegiatan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemuda, olahraga, seni, budaya dan kesehatan, dll.

In order to realize concern for the social environment and the surrounding Bank Riau Kepri has provided funds for social activities in order to improve the welfare of society, community empowerment, youth activities, sports, arts, culture and health, etc.

Pemberian dana kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan, yaitu:

1. Bank tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.
2. Sepanjang tahun 2017, Pemberian Dana untuk kegiatan social yang dikemas Bank Papua adalah dengan melaksanakan berbagai aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Funding of social activities and political activities during the reporting period, namely:

1. *The Bank does not provide funds for political activities.*
2. *Throughout the year 2017, Funding for social activities that is packaged Bank Papua is to carry out various activities of Corporate Social Responsibility (CSR).*

Secara garis besar aktivitas CSR, terkait :

1. Program Bina Lingkungan.
2. Program Kemitraan.
3. Penyaluran masing-masing program.
4. Unit khusus CSR

Outline of CSR activities, related:

1. Community Development Program.
2. Partnership Program.
3. Distribution of each program.
4. Special Unit of CSR

Akan disajikan pada bagian Laporan CSR yang disajikan pada bagian akhir laporan tata kelola Bank.

Will be presented in the CSR Reports section presented at the end of the Bank's GCG report.

Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* atas Penerapan Tata Kelola Bank

Conclusions General Results Self Assessment on the Implementation of Good Corporate Governance

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Sebagai Bentuk Perubahan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), Bank diwajibkan melaksanakan *Self Assessment* terhadap penerapan tata kelola Bank itu sendiri. Pelaporan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan Tata Kelola Bank Yang Baik dilakukan secara berkala sesuai dengan periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (TKB) yaitu periode Juni dan Desember setiap tahunnya.

With the issuance of Circular Letter of the Financial Services Authority Number: 13 / SEOJK.03 / 2017 dated March 17, 2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks as a Forms of Bank Indonesia Circular Letter Number 15/15 / DPNP dated 29 April 2013 on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Banks are required to implement Self Assessment on the implementation of the Bank's own governance. Self assessment report on the implementation of Good Corporate Governance shall be conducted periodically in accordance with the period of Commercial Bank Rating (TKB), which is the period of June and December of each year.

Untuk laporan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Bank dalam rangka laporan pelaksanaan Tata Kelola yang baik tahun 2017 disusun sesuai dengan format sebagaimana Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yaitu sebagai berikut :

For the Bank Self Assessment report in the framework of GCG implementation report of 2017 shall be prepared in accordance with the format as Appendix IV of Circular of the Financial Services Authority Number 13 /SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, as follows :

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI	*RATED ASPECT*
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggungjawab Dewan Komisaris	3	10%	0,30	*Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners*
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggungjawab Direksi	2	20%	0,47	*Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors*
3	Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite	3	10%	0,27	*Completeness and Implementation of Committee Duties*
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	10%	0,20	*Handling Conflict of Interest*
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	3	5%	0,15	*Implementation of Bank Compliance Function*
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	3	5%	0,13	*Implementation of Internal Audit Function*
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	3	5%	0,15	*Implementation of External Audit Function*
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3	7.5%	0,23	*Implementation of Risk Management Function Including Internal Control System*
9	Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar	2	7.5%	0,18	*Prudential Principles In Provision of Funds To Related Parties And Provision of Large Exposure*
10	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal	2	15%	0,35	*Transparency of Financial and Non Financial Condition, GCG Implementation Report and Internal Reporting*
11	Rencana Strategis Bank	3	5%	0,13	*The Bank's Strategic Plan*
	NILAI KOMPOSIT | PREDIKAT			**2,55 | 3**	*COMPOSITE SCORE | PREDICATE*

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dan penerapan prinsip Tata Kelola Bank umum, maka secara umum kelemahan tersebut tidak berdampak signifikan namun memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank. Karena kelemahan-kelemahan tersebut akan berdampak terhadap peran aktif pengawasan bank dan Rencana Bisnis Bank untuk semester II tahun 2017.

*Reflecting Management Bank has implemented a generally **good** Governance implementation. This is reflected in the adequate fulfillment of GCG principles. If there are weaknesses and the implementation of Bank Mandiri principles, then the general weaknesses do not have a significant impact but require considerable attention from bank management. Because these weaknesses will have an impact on the active role of bank supervision and Bank Business Plan for the second half of 2017.*

Tanggungjawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Peduli Lingkungan
Environmental care

Peka terhadap situasi lingkungan internal dan eksternal Bank dan mampu beradaptasi sehingga fungsi dan tanggungjawab Bank tetap terjaga.

Sensitive to the Bank's internal and external environment situation and able to adapt so that the Bank's functions and responsibilities are maintained.

Kepedulian Bank yang tinggi terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari komitmen perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Bank terhadap masyarakat. Sebagai bank yang telah melayani masyarakat sejak tahun 1966, Bank Papua berpartisipasi aktif dalam bentuk program tanggungjawab sosial Perusahaan. Kepedulian Bank Papua akan kondisi sosial kemasyarakatan, membuat perusahaan mengambil langkah bijaksana untuk terjun langsung kedalam permasalahan social kemasyarakatan. Semangat inilah yang mendasari pelaksanaan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/ CSR) selama ini.

The Bank's high awareness of social and environmental issues is an important part of the company's commitment to carry out its tasks and responsibilities to the community. As a bank that has served the public since 1966, Bank Papua actively participates in the form of corporate social responsibility programs. The concern of Bank Papua will be the social condition of society, making the company take wise step to go directly into social problems. This spirit underlies the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) program so far.

Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Tanggungjawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk perhatian suatu perusahaan atau organisasi terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat dengan bertanggungjawab pada dampak yang ditimbulkan dari aktifitas operasional perusahaan, di lingkungan perusahaan itu berada. Kebijakan penerapan Program CSR Bank Papua yang semula bersifat charity yang dikenal dengan bantuan kemasyarakatan, dirubah menjadi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang terdiri dari dua program, yakni Program Kemitraan yang disebut Program Mitra Bank Papua, dan Program Bina Lingkungan yang disebut dengan Program Bank Papua Peduli. Melalui program CSR Bank Papua ini, diharapkan dapat membentuk dan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, dengan menciptakan dan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan yang lebih sejahtera dan mandiri.

Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility (CSR) is a form of attention of a company or organization to the interests of society with responsibility for the impacts of the company's operational activities, within the company's environment. The policy of implementation of CSR Program of Bank Papua originally charity, known as social assistance, was transformed into Corporate Social Responsibility (CSR) Program consisting of two programs, namely Partnership Program called Partnership Program of Bank Papua, and Community Development Program called Bank Papua Cares Program. Through this Bank Papua CSR program, it is expected to establish and create sustainable societal welfare, by creating and engaging the spirit of synergy of all parties continuously in the more prosperous and more prosperous social, economic and environmental fields.

Program CSR

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) Bank Papua adalah Komitmen Bank Papua untuk membangun kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan sosial dimana Bank Papua berada yang dilakukan secara terpadu dengan kegiatan yang berkelanjutan melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

CSR Program

The Bank's Corporate Social Responsibility (CSR) Program is a commitment of the Bank Papua to build the quality of community life and the social environment in which Bank Papua is located in an integrated manner with sustainable activities through Partnership Program and Community Development Program.

Program Kemitraan Bank Papua adalah wujud kepedulian Bank Papua kepada masyarakat sekitarnya, terutama pengusaha Mikro dan pengusaha kecil serta kampung binaan dalam bentuk peningkatan dan penguatan kapasitas usaha, pengembangan sarana dan kelembagaan usaha serta kegiatan perluasan jaringan pemasaran dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha agar menjadi tangguh dan mandiri. Program ini ditangani langsung oleh Divisi Pengembangan Ekonomi Rakyat sedangkan

The Bank Papua Partnership Program is a manifestation of the concern of Bank Papua to the surrounding community, especially Micro and small business entrepreneurs as well as the developed villages in the form of business capacity and enhancement, the development of facilities and business institutions as well as the expansion of the marketing network in order to increase the business capability to become resilient and independent. This program is handled directly by the People's Economic Development Division while

Program Bina Lingkungan Bank Papua, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh Bank Papua. Program ini ditangani oleh Divisi Sekretaris Perusahaan.

The Community Development Program of Bank Papua, is a program of community social empowerment by Bank Papua. This program is handled by the Corporate Secretary Division.

Unit Pengelola Program CSR

Berdasarkan SK Direksi 11.1/DIR-BPD/III/2017 tentang Struktur Organisasi dan Profil Pekerjaan *(Job Profile)* PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, ditetapkan bahwa unit kerja pengelola Program CSR adalah Divisi Sekertaris Perusahaan Bagian Humas & CSR.

CSR Program Management Unit

Based on BOD 11.1 / DIR-BPD / III / 2017 on Organizational Structure and Work Profile of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, stipulated that the work unit of CSR Program management is Corporate Secretary Div. of Public Relations & CSR.

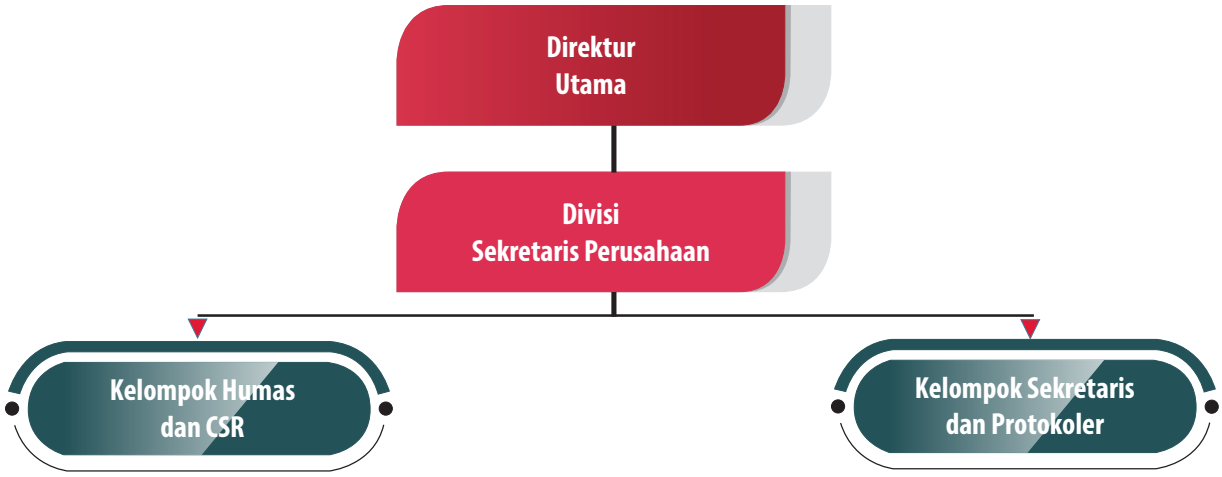

Fungsi :

- Public Relation
- Pengaduan Nasabah dan Website
- CSR
- Govenent Relation

Fungsi :

- Sekretaris
- Protokoler
- Agendaris

Dalam pelaksanaan Program Bina Lingkungan Bank Papua, seluruh kegiatan di koordinir oleh Divisi Sekretaris Perusahaan dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. Membuat Program Bina Lingkungan.
b. Membuat standar pelaksanaan Program Bina Lingkungan.
c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Program Bina Lingkungan.
d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan bantuan untuk Program Bina Lingkungan.
e. Menyiapkan dan mengkoordinir serta menyalurkan dana bantuan Program Bina Lingkungan.
f. Mengadministrasikan dan melakukan pembukuan atas Program Bina Lingkungan.
g. Menyampaikan laporan pelaksanaan program Bina Lingkungan kepada Direksi Bank Papua.

In the implementation of the Community Development Program of Bank Papua, all activities are coordinated by the Corporate Secretary Division with details of the following tasks:

a. Creating Community Development Program.
b. Make standard implementation of Community Development Program.
c. Develop Work Plan and Budget of Community Development Program.
d. Conducting evaluation and selection on the feasibility of assistance for Community Development Program.
e. Prepare and coordinate and distribute the Community Development Program assistance fund.
f. Administer and conduct bookkeeping of the Community Development Program.
g. Submit a report on the implementation of the Community Development program to the BOD Bank Papua.

Bentuk Penyaluran Dana CSR

Dana Program Bina Lingkungan yang tersedia setiap tahun akan disalurkan sepenuhnya untuk bantuan dengan ruang lingkup sebagai berikut :

a. Bantuan Korban Bencana Alam
   Yang dapat didanai adalah bencana alam yang menurut penilaian bank membutuhkan bantuan bank.
b. Bantuan Pendidikan & Olahraga
   Kriteria bantuan pendidikan diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi dan tidak mampu, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah, Pimpinan perguruan tinggi dimana pelajar/ mahasiswa tersebut menuntut ilmu dan surat keterangan dari lurah/Kepala Desa bagi pelajar/ mahasiswa tidak mampu. Bantuan dimaksud dapat berupa bea siswa, maupun bantuan peralatan sekolah.
c. Bantuan Peningkatan Kesehatan Bagi Masyarakat Tidak Mampu
   Peningkatan kesehatan diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Bantuan dimaksud berupa bantuan pengobatan berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau kepala desa serta surat keterangan dari Dokter maupun Rumah Sakit.
d. Bantuan Peningkatan Prasarana dan atau Sarana Umum
   Peningkatan sarana dan Prasarana umum diperuntukkan untuk masyarakat luas. Bantuan berupa sarana penunjang bagi masyarakat umum.
e. Bantuan Sarana Ibadah
   Bantuan sarana ibadah, baik berupa pembangunan sarana dan prasarana ibadah diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan perusahaan.
f. Bantuan Pelestarian Alam
   Bantuan pelestarian lingkungan dilakukan dalam bentuk penghijauan dan konservasi lingkungan.
g. Bantuan Kesejahteraan Sosial
   Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial :
   - Kemiskinan.
   - Ketelantaran.
   - Kecacatan.
   - Keterpencilan.
   - Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku.
   - Korban Bencana.
   - Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi.

CSR Funds Distribution

The Community Development Program funds that are available each year will be fully channeled for assistance with the following scope:

a. Natural Disaster Victim Donation
What can be funded is a natural disaster which, according to the bank's assessment, needs bank help.

b. Education & Sports Donation
The criteria for educational assistance are for high achieving and underprivileged students, as evidenced by a letter from the Principal, the Head of the college where the student is studying and a letter from the headman / village head for the poor students. Such assistance may be in the form of scholarships, as well as school equipment.

c. Health Improvement Donation for Disadvantaged People
Health improvement is for the poor. The aid is in the form of medical aid based on an incomplete letter from the Village Head or Village Head and a letter from Doctor and Hospital.

d. Improvement of Infrastructure and or Public Facilities
Improvement of public facilities and infrastructure is for the wider community. Donation in the form of supporting facilities for the general public.

e. Help Means of Worship
Aids of worship facilities, either in the form of the construction of facilities and infrastructure of worship given in accordance with the level of ability of the company.

f. Nature Conservation Donation
Environmental conservation assistance is conducted in the form of greening and environmental conservation.

g. Social Welfare Donation
Provision of Social Welfare Donation to individuals, families, groups and / or societies that have an inadequately humanitarian life and possess social criteria:
- *Poverty.*
- *Abandonment.*
- *Disability.*
- *Remoteness.*
- *Social Abuse and Behavioral Disorder.*
- *Disaster Victims.*
- *Victims of Violence, Exploitation and Discrimination.*

Tata cara penyaluran dana program Bina Lingkungan Bank Papua diatur sebagai berikut :

a. Bank Papua dalam hal ini Divisi Sekretaris Perusahaan dan atau bersama – sama dengan Kantor Cabang Bank Papua terlebih dahulu melakukan survei dan identifikasi sasaran dengan melihat kondisi dan kebutuhan di seluruh wilayah Bank Papua.
b. Dalam hal permohonan bantuan melalui Kantor Cabang, maka Kantor Cabang wajib melakukan kajian terhadap permohonan tersebut serta berkoordinasi dengan Divisi Sekretaris Perusahaan, untuk selanjutnya diusulkan kepada Direksi Bank Papua.
c. Khusus untuk bantuan bencana alam, Divisi Sekretaris Perusahaan dapat langsung mengusulkan dana bantuan kepada Direksi Bank Papua setelah melakukan survey di lokasi bencana alam dan tetap berkoordinasi dengan kantor-kantor cabang Bank Papua di lokasi bencana.
d. Pencairan dana CSR Bina Lingkungan dilakukan pemindahbukuan dari rekening biaya CSR ke rekening penerima di Bank Papua dan/atau berupa barang.
e. Pelaksanaan penyaluran Dana Program Bina Lingkungan dilakukan oleh Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Papua.

5. Kegiatan CSR

a. Bantuan Bidang Pendidikan
   - Bantuan CSR Renovasi Tugu Pendidikan-Lingkaran Abe Alumni SMA 4 JPR beserta Osis SMAN 4 Jayapura, pada tanggal 13 Februari 2017.
   - Bantuan dana CSR dalam rangka pengadaan unit komputer untuk SD YPPK Santo Petrus Argapura-Jayapura, pada tanggal 11 April 2017.
   - Bantuan CSR Kelompok Kerja Taman Kanak-Kanak (K3TK) se-Jayapura, pada tanggal 5 Mei 2017
   - Bantuan 2 buah unit komputer untuk SMU Negeri 4 Jayapura, pada tanggal 5 Mei 2017
   - Bantuan CSR untuk PAUD Mutiara Kasih Persemi GPDN En-Rimon Dok IX Jayapura, pada tanggal 3 November 2017.

Procedures for the distribution of funds for the Environmental Development Program of Bank Papua are regulated as follows:

a. Bank Papua in this case the Corporate Secretary Division and or together with the Bank Papua Branch Office shall first conduct a survey and target identification by looking at the conditions and needs in all areas of Bank Papua.
b. In the case of requests for assistance through a Branch Office, the Branch Office shall review the application and coordinate with the Corporate Secretary Division, to be subsequently proposed to the Board of Directors of Bank Papua.
c. Particularly for natural disaster relief, the Corporate Secretary Division can directly propose funding to the Board of Directors of Bank Papua after conducting a survey at the natural disaster site and keep coordinating with Bank Papua offices at the disaster site.
d. Disbursement of Environmental Development CSR funds shall be made from the account of CSR costs to the beneficiary account at Bank Papua and / or in the form of goods.
e. The implementation of the Community Development Program funding was undertaken by the Corporate Secretary Division of Bank Papua.

5. CSR Activities

a. Education Field
   - *CSR donation Renovation of Education Monument-Lingkaran Abe Alumni SMA 4 JPR and Osis SMAN 4 Jpr, on February 13, 2017.*
   - *CSR donation in the framework of procurement of computer unit for SD YPPK St. Peter Argapura-Jayapura, on 11 April 2017.*
   - *CSR donation of Kindergarten Level Working Group (K3TK) in Jayapura, on May 5, 2017*
   - *Donation 2 pieces of computer unit for SMU Negeri 4 Jayapura, on May 5, 2017*
   - *CSR Assistance for PAUD Mutiara Kasih Persemi GPDN En-Rimon Dok IX Jayapura, on November 3, 2017.*

b. Bantuan Bidang Agama

- Bantuan CSR dalam rangka pembinaan mental Gereja Bethel-Jayapura, pada tanggal 2 Februari 2017.
- Bantuan CSR berupa bahan bangunan GBI-Jayapura, pada tanggal 16 Februari 2017.
- Bantuan Dana CSR Wisata Rohani Klasis GKI Jayapura, pada tanggal 13 Maret 2017.
- Bantuan CSR dalam bentuk bahan bangunan untuk pembangunan gereja advent hari ke tujuh Yowanibi Doyo Baru, pada tanggal 22 Mei 2017.
- Bantuan CSR Pembangunan Gedung Gereja Pentakosta Jemaat Kana-Koya Barat, pada tanggal 18 Juli 2017.
- bantuan CSR dalam rangka pembangunan gedung gereja GKI Jemaat Yakhin Kleubouw-Sentani, pada tanggal 7 Agustus 2017.
- Bantuan CSR Kebakaran Pembelian 50 Sak Semen untuk Masjid Faijrul Islam Kotaraja, pada tanggal 9 Agustus 2017.
- Bantuan CSR dalam rangka pembangunan Gereja Sion Mapura Teminabuan Tahap Terakhir (100%), pada tanggal 22 Agustus 2017.
- Bantuan CSR Pembangunan Gedung Gereja Jemaat Patmos Daerah Bolakme, pada tanggal 24 Agustus 2017.
- Bantuan Raker Gereja Kemah Injil Indonesia Klasis Kota Jayapura, pada tanggal 30 Agustus 2017.
- Bantuan CSR Rehab Mesjid An-Nur Teminabuan Sorong-Selatan.
- Bantuan Dana Natal untuk Panitia Ebamukai & budaya Gereja Katedral Jayapura, pada tanggal 27 November 2017.
- Bantuan Pembangunan Mesjid Al-Wadissalam, pada tanggal 14 Desember 2017.
- Bantuan Renovasi Gereja Rehobot-Serui, pada tanggal 14 Desember 2017

b. Religion Field

- *CSR donation in the context of mentoring the Bethel-Jayapura Church, on 2 February 2017.*
- *CSR donation is a GBI-Jayapura building material, on February 16, 2017.*
- *CSR donation GKI Gans Klasis Spiritual Tour Jayapura, on March 13, 2017.*
- *CSR donation in the form of building materials for hari ke tujuh advent building church Yowanibi Doyo Baru, on May 22, 2017.*
- *CSR donation Building the Pentecosta Church Building of the Kana-Koya Barat, on July 18, 2017.*
- *CSR donation for the construction of the church building of the GKI Yakhin Kleubouw-Sentani, on 7 August 2017.*
- *CSR Support Fire Purchase 50 Sak Cement for Mosque Faijrul Islam Kotaraja, on August 9, 2017.*
- *CSR donation for construction building the Church of Zion Mapura Teminabuan, Finishing Stage (100%), on 22 August 2017.*
- *CSR donation of the Patmos Regional Church Building Bolakme District, on August 24, 2017.*
- *CSR donation for Workmeeting Gospel Church Indonesia Klasik Kota Jayapura, on August 30, 2017.*
- *CSR donation for Rehabilitation of Mosque An-Nur Teminabuan Sorong-Selatan.*
- *Christmas Fund donation for Ebamukai Organizing Committee & Culture Church of Jayapura Cathedral, on November 27, 2017*
- *Construction donation for Al-Wadissalam Mosque, on December 14, 2017.*
- *Renovation donation for Rehobot-Serui Church, on December 14, 2017*

c. Bidang Lingkungan/Alam
- Bantuan dana CSR Tahap I (50%) dalam rangka pembuatan Taman Hijau Kota Nabire, 23 Mei 2017.
- Bantuan CSR pembelian bahan bangunan untuk korban kebakaran Kel. Philipus Pamanggori-Hamadi, pada tanggal 07 Juli 2017.
- Bantuan CSR 1 unit Truck Sampah untuk Pemda Kabupaten Biak Numfor, pada tanggal 17 Agustus 2017.
- Bantuan CSR Musibah Kebakaran di Weref Jayapura, 1 November 2017.
- Bantuan CSR Lomba Lintas Alam Cycloop Wana Rally (CWR) Jayapura, pada tanggal 8 Desember 2017.

d. Bidang Olahraga
- Bantuan CSR untuk PBSI Kabupaten Boven Digoel untuk persiapan PON 2020, pada tanggal 23 Maret 2017.

e. Bidang Sosial
- Bantuan 2 komputer untuk rumah singgah yayasan PKBM Sentani, pada tanggal 10 Oktober 2017.
- Bantuan Kebakaran di Abepura an. Kel. Karel Arnol Wambrau.

f. Bidang Kesehatan
- Bantuan CSR untuk pembayaran sisa 70% pengadaan 1 unit mobil ambulance-Kabupaten. Waisai, pada tanggal 8 April 2017
- Bantuan Dana CSR Rumah Sakit AL- DR. Soedibjo Sard-Jayapura, pada tanggal 5 Mei 2017.
- Bantuan CSR makanan tambahan untuk masalah kesehatan yang bekerjasama dengan SATPOLAIR POLDA Jayapura, pada tanggal 23 Mei 2017
- Bantuan Genset 1 unit untuk puskesmas Kotaraja, pada tanggal 12 Oktober 2017.
- Bantuan CSR Pengobatan an. Siti Sara Hagar Nuboba Penderita Kanker, pada tanggal 9 November 2017.

c. Environment / Nature Field
- *CSR donation Phase I (50%) for the creation of Nabire City Green Garden, May 23, 2017*
- *CSR donation in purchasing building materials for fire victims Kel. Philipus Pamanggori-Hamadi, on July 7, 2017*
- *CSR donation 1 unit of Garbage Truck for the Local Government of Biak Numfor Regency, on August 17, 2017*
- *CSR donation Fire Donation at Weref Jayapura, November 1, 2017*
- *CSR donation Cycloop Wana Rally (CWR) Competition Jayapura, on December 8, 2017.*

d. Sports Field
- *CSR donation for PBSI Boven Digoel Regency for the preparation of PON 2020, on March 23, 2017.*

e. Social Field
- *Donation 2 computers for shelter home PKBM Sentani Foundation, on October 10, 2017.*
- *Fire Donation in Abepura. Ex. Karel Arnol Wambrau.*

f. Health Field
- *CSR Donation for the remaining 70% procurement of 1 unit of ambulance-Waisai Regency, on April 8, 2017*
- *CSR Donation for DR. Soedibjo Sard Hospital-Jayapura, on May 5, 2017.*
- *CSR donation of Additional food for health issues in collaboration with SATPOLAIR POLDA Jayapura, on May 23, 2017*
- *Donation of Genset 1 unit for puskesmas Kotaraja, on 12 October 2017.*
- *CSR donation for Treatment on behalf Siti Sara Hagar Nuboba Cancer Patients, on November 9, 2017.*

Sampai dengan akhir Desember 2017, Bank Papua telah merealisasikan dana total sebesar Rp1.440.327.980; (satu milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) untuk kegiatan CSR, sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp4.993.459.927; (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) pada tahun 2016.

Until the end of December 2017, Bank Papua has realized a total fund of Rp440,327,980; (one billion four hundred forty million three hundred twenty seven thousand nine hundred and eighty rupiah) for CSR activity, slightly decreased from the previous year which amounted to Rp4,993,459,927; (four billion nine hundred ninety three million four hundred fifty nine thousand nine hundred and twenty seven rupiahs) by 2016.

Total realisasi dana CSR Bank Papua dengan rincian sebagai berikut :

Total realization of CSR funds of Bank Papua with details as follows:

URAIAN	2016	2017	Growth		*DESCRIPTION*
			Nominal	%	
PROGRAM BINA LINGKUNGAN	3.666.295.652	1.300.117.884	(2.366.177.768)	-64,54%	*ENVIRONMENTAL BINA PROGRAM*
1. Keagamaan	1.490.890.217	251.141.224	(1.239.748.993)	-83,15%	*1. Religious*
2. Pendidikan	436.483.028	57.680.000	(378.803.028)	-86,79%	*2. Education*
3. Olahraga	15.625.000	40.000.000	24.375.000	156,00%	*3. Sports*
4. Kesehatan	916.659.074	296.289.000	(620.370.074)	-67,68%	*4. Health*
5. Lingkungan	499.673.500	635.089.000	135.415.500	27,10%	*5. Environment*
6. Sosial	306.964.833	19.918.660	(287.046.173)	-93,51%	*6. Social*
PROGRAM KEMITRAAN	1.327.162.275	140.210.096	(1.186.952.179)	-89,44%	*PARTNERSHIP PROGRAMS*
Total Realisasi CSR	**4.993.457.927**	**1.440.327.980**	**(3.553.129.947)**	**-71,16%**	***Total Realized CSR***

Referensi Penyusunan Laporan Tahunan
Annual Report Reference

Referensi Laporan Tahunan *Annual Report Reference*			
No.	**Kriteria /** *Criteria*	**Penjelasan /** *Explanation*	**Hal/** *Page*
I	**Umum/** ***General***		
	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris. *The annual report is presented in the Indonesian language is good and true and recommended serving also in English*		✔
	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca. *The annual report is printed with good quality and using the type and size of letters are easy to read*		✔
	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas *The annual report clearly mentions corporate identities*	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman *The company name and the year the annual report is displayed in:* *1. The cover;* *2. Side;* *3. Cover the back; and* *4. Each page*	✔
	Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan *The annual report is displayed on the company's website*	Mencakup laporan tahunan terkini dan tahun-tahun sebelumnya *The annual report includes the current and previous years*	
II	**Ikhtisar Data Keuangan Penting /** ***Financial Highlights***		
	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun *Information the company's business results in the form of comparison for 3 (three) financial years, or since starting his business if the company carries on its business activities for less than 3 (three) years*	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi); 3. Total laba (rugi) komprehensif; dan 4. Laba (rugi) per saham. *Information includes among others:* *1. Sales / revenues;* *2. Income (loss);* *3. Total income (loss) Comprehensive; and* *4. Earnings (loss) per share.*	12
	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun *The company's financial position information in the form of comparison for 3 (three) financial years, or since starting his business if the company carries on its business activities for less than 3 (three) years*	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah *Asset*; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas. *Information includes among others:* *1. The amount of investments in associates;* *2. Total assets;* *3. Total liabilities; and* *4. The amount of equity.*	10
	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun *Financial ratios in the comparative period of 3 (three) financial years, or since starting his business if the company carries on its business activities for less than 3 (three) years*	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan *Information includes five (5) financial ratios are common and relevant toindustrial companies*	14-15

Referensi Laporan Tahunan *Annual Report Reference*			
No.	**Kriteria /** *Criteria*	**Penjelasan /** *Explanation*	**Hal/** *Page*
	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik *Stock price information in the form of Table.s and graphs*	1. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Jumlah saham yang beredar; b. Kapitalisasi pasar; c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan d. Volume perdagangan. 2. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan dan volume perdagangan saham untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir *1. The information in Table. form which contains:* *a. The number of shares outstanding;* *b. The market capitalization;* *c. The stock price high, low and closing; and* *d. The trading volume.* *2. The information in graphic form containing at least the closing prices and trading volumes for each quarter in 2 (two) last fiscal year*	17
	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir *Information on bonds, securities or convertible bonds that are still circulating in the two (2) last fiscal year*	Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk. *Information includes:* *1. Number of bonds / securities / convertible bonds outstanding (outstanding);* *2. The interest rate / yield;* *3. The maturity date; and* *4. Rating bonds / sukuk.*	17
III	**Laporan Dewan Komisaris dan Direksi/** ***Report of the Board of Commissioners and Board of Directors***		
	Laporan Dewan Komisaris *Report of the Board of Commissioners*	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada dibawah Dewan Komisaris; dan 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada). *Loading matters as follows:* *1. Assessment of the performance of the Board of Directors of the management company and the base assessment;* *2. The views over the company's business prospects prepared by the Board of Directors and the considerations;* *3. An assessment of the performance of the committees under the BoardCommissioner; and* *4. Changes in the composition of the Board of Commissioners and the reasons for the change (if any).*	22-29
	Laporan Direksi *Board of Directors Report*	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Penerapan tata kelola perusahaan; dan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada). *Loading matters as follows:* *1. Analysis of the performance of the company, which include, among other things, policies ideally, a comparison between the results achieved with targeted, and the constraints faced by the company;* *2. Analysis of business prospects;* *3. Application of corporate governance; and* *4. Changes in the composition of the Board of Directors and the reasons for the change (if any).*	34-45

Referensi Laporan Tahunan *Annual Report Reference*			
No.	**Kriteria /** *Criteria*	**Penjelasan /** *Explanation*	**Hal/** *Page*
	Tanda tangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris *Signature member of the Board of Directors and Board of Commissioners*	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau: penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. *Loading matters as follows:* *1. Signature poured on a separate sheet;* *2. A declaration that the Board of Directors and Board of Commissioners takes full responsibility for the accuracy of the content of the annual report;* *3. Signed the Board of Directors and Board of Commissioners by name and title; and* *4. A written explanation in a separate letter from the concerned in the case there are members of the Board of Directors or the Board of Commissioners are not sign the annual report, or: written explanation in a separate letter from members of the other in terms there are no written explanation from the concerned.*	56
IV	Profil Perusahaan		
	Nama dan alamat lengkap perusahaan *Full name and address of the company*	Informasi memuat antara lain nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website *Contains information including name and address, zip code, no. Tel, no. Fax, email, and website*	60-61
	Riwayat singkat perusahaan *Brief history of the company*	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada) *Include: date / year of establishment, the name and corporate name change (if any)*	62-63
	Bidang usaha *Business fields*	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. *The descriptions of, among others:* *1. The business activities of the company according to the articles of association last;* *2. The business activities are carried out; and* *3. Products and / or services produced.*	72-76
	Struktur Organisasi *Organizational structure*	dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi *In chart form, include the name and position at least until the structure of the directors*	100-101
	Visi dan Misi Perusahaan *Vision and mission of the company*	Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; dan 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris. *includes:* *1. The company's vision;* *2. The company's mission; and* *3. Remarks that the vision and the mission has been approved by the Board of Directors / Board of Commissioners.*	67-68

Referensi Laporan Tahunan *Annual Report Reference*			
No.	**Kriteria /** *Criteria*	**Penjelasan /** *Explanation*	**Hal/** *Page*
	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris *Identity and brief resume of members of the Board of Commissioners*	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Pendidikan; 5. Pengalaman kerja; dan 6. Tanggal penunjukkan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris. *Information includes among others:* *1. Name;* *2. Position (including positions in companies or other institutions);* *3. Age;* *4. Education;* *5. Work experience; and* *6. Date of first appointment as a member of the Board of Commissioners.*	30-33
	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi *Identity and brief resume of members of the Board of Directors*	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur;	
		4. Pendidikan; 5. Pengalaman kerja; dan 6. Tanggal penunjukkan pertama kali sebagai anggota Direksi. *Information includes among others:* *1. Name;* *2. Position (including positions in companies or other institutions);* *3. Age;* *4. Education;* *5. Work experience; and* *6. Date of first appointment as member of the Board of Directors.*	46-53
	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan) *Number of employees (comparative 2 years) and a description of the Development of competence (eg aspects of education and training of employees)*	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Deskripsi dan data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan. *Information includes among others:* *1. The number of employees for each level of the organization;* *2. The number of employees for each level of education;* *3. The number of employees based on employment status;* *4. A description of the data and employee competence Development that has been* *performed by reflecting their equal opportunities to all employees; and* *5. The cost of Development of employee competencies that have been issued.*	143-145
	Komposisi Pemegang saham *Composition of shareholders*	Mencakup antara lain: 1. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; 2. Nama Direktur dan Komisaris yang memiliki saham; 3. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%; dan persentase kepemilikannya *Include:* *1. Name of shareholders that own 5% or more shares;* *2. Name of Director and Commissioner of own shares;* *3. The group public shareholder with a stake of each less than 5%; and percentage of ownership*	90-91

Referensi Laporan Tahunan *Annual Report Reference*			
No.	**Kriteria /** *Criteria*	**Penjelasan /** *Explanation*	**Hal/** *Page*
	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi *List of subsidiaries and / or an associate*	Informasi memuat antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham ; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). *Information includes among others:* *1. Name of the subsidiaries and / or associates;* *2. Percentage of share ownership;* *3. Description of the business areas the subsidiaries and / or associated company; and* *4. Description of subsidiaries operating status and / or an associate (have operating or not operating).*	146
	Struktur grup perusahaan *Structural Group of Companies*	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV), *The structure of group companies in the form of a chart that describes its subsidiaries, associated entities, joint ventures, and special purpose vehicle (SPV),*	146
	Kronologis pencatatan saham *Chronological listing of shares*	Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan saham; 2. Jenis tindakan korporasi (*Corporate* action) yang menyebabkan jumlah saham; 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan tahun buku; dan 4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. *Include:* *1. Chronology of stock listing;* *2. Type of corporate actions (corporate actions) which led to the number of shares;* *3. Change in number of shares from initial registration until fiscal year; and* *4. Name of the exchanges on which the company's shares are listed.*	146
	Kronologis pencatatan efek lainnya; *Chronological other effects;*	Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan efek lainnya; 2. Jenis tindakan korporasi (*Corporate* action) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya; 3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; 4. Nama Bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan 5. Peringkat efek. *Include:* *1. Chronology of recording other effects;* *2. Type of corporate actions (corporate actions) that cause changes in the number of other effects;* *3. Change in number of other effects of early registration until the end of the fiscal year;* *4. Name of Bursa where other securities are listed; and* *5. Ranked effect.*	147
	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal *Name and address of the agency and / or professions capital market*	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. *Information includes among others:* *1. Name and address of BAE / parties who administer the company's shares;* *2. The name and address of the Public Accounting Firm; and* *3. The name and address of company securities rating.*	147
	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala Nasional maupun Internasional *Awards received in the last fiscal year and / or certification is still valid in the last financial year both national and international*	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikat; 2. Tahun perolehan; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi). Information includes among others: 1. Name of the award and / or certificates; 2. In the acquisition; 3. The Agency appreciator and / or certificates; and 4. The validity period (for certification).	89

Referensi Laporan Tahunan *Annual Report Reference*			
No.	**Kriteria /** *Criteria*	**Penjelasan /** *Explanation*	**Hal/** *Page*
	Nama dan alamat entitas anak dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) *Name and address of its subsidiaries or branches or representative offices (if any)*	Memuat informasi antara lain: 1. nama dan alamat entitas anak; dan 2. nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang/perwakilan, agar diungkapkan *Contains information such as:* *1. The name and address of the subsidiary; and* *2. The name and address of the branch office / representative.* *Note: if the company does not have subsidiaries / branches / representatives, in order to be disclosed*	143-173
	Tinjauan operasi per segmen usaha *Review of operations per business segment*	Memuat uraian mengenai: 1. Produksi/kegiatan usaha; 2. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; 3. Penjualan/pendapatan usaha; dan 4. Profitabilitas. *Contain description of:* *1. Production / operations;* *2. Increase / decrease in production capacity;* *3. Sales / revenues; and* *4. Profitability.*	209-234
	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan *Description of the financial performance of companies*	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. *Asset* lancar, *Asset* tidak lancar, dan total *Asset*; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan 5. Arus kas. *Analysis of financial performance include comparisons between the performance the relevant financial year with the previous year and causes increase / decrease (in the form of narrative and Table.s), among others:* *1. Current assets, non-current assets and total assets;* *2. The short-term liabilities, long-term liabilities and total liabilities;* *3. Equity;* *4. Sales / revenues, expenses and income (loss), other comprehensive income and total net income (loss) Comprehensive; and*	238-261
	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan *Discussion and analysis of the ability to pay debts and receivable collection company, by presenting the relevant ratio calculation in accordance with the type of industrial companies*	Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang. *Explanation of :* *1. Ability to pay the debt, both short and long term; and* *2. Level of collectibility.*	262-264
	Bahasan tentang struktur modal (capital structure), dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy) *Discussion on the capital structure (capital structure), and management policies on capital structure (capital structure policy)*	Penjelasan atas: 1. Struktur modal (capital structure); dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies) dan dasar pemilihan kebijakan tersebut. *Explanation of:* *1. The capital structure (capital structure); and* *2. Management policy on capital structure (capital structure policies) and the basis for selecting the policy.*	281

Referensi Laporan Tahunan *Annual Report Reference*			
No.	**Kriteria /** *Criteria*	**Penjelasan /** *Explanation*	**Hal/** *Page*
	Bahasan mengenai ikatan material untuk investasi barang modal *Discussion of material commitments for capital investments*	Penjelasan tentang: 1. Tujuan dari ikatan tersebut; 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 3. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan *Explanation of:* *1. The purpose of such commitments;* *2. Sources of funds to meet these bonds;* *3. Currency denominated; and* *4. The steps the company plans to protect the risk of foreign currency related.* *Note: if the company does not have a bond investment-related goods capital in the last financial year to be disclosed*	283-284
	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir *Discussion of capital investments realized in the last fiscal year*	Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan *Explanation of:* *1. Type of capital investments;* *2. The investment objective of capital goods; and* *3. The value of capital investments incurred in the last fiscal year.* *Note: if there is no realization of capital investments, in order todisclosed*	285
	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku denga hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan *Information comparison between the target at the beginning of the fiscal year results achieved premises (realization), and the target or projected to be achieved for the coming year regarding revenue, earnings, capital structure, or other that are considered important for the company*	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam satu tahun mendatang Information includes among others: *1. Comparison between the targets at the beginning of the financial year with the results achieved (realized); and* *2. Target or projected to be achieved in the coming years*	194-195
	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan *Information and material facts occurring after the date of the auditor's report*	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan. *Description of important events after the date of the auditor's report, including its impact on the performance and business risk in the future.* *Note: if there is no important events after the date of the auditor's report, to be disclosed*	285
	Uraian tentang prospek usaha perusahaan *The description of the company's business prospects*	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya *The description of the company's prospects associated with the industry and the general economy quantitative supporting data from the data source to be trusted*	294-297
	Uraian tentang aspek pemasaran *Description of the marketing*	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar *Description of the marketing of products and / or services of other companies, including marketing strategy and market share*	265-280

Referensi Laporan Tahunan *Annual Report Reference*			
No.	**Kriteria /** *Criteria*	**Penjelasan /** *Explanation*	**Hal/** *Page*
	Uraian mengenai kebijakan Deviden dan jumlah Deviden kas per saham dan jumlah Deviden per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir *Description of the Devidend policy and the amount of cash Devidends per share and total Devidend per year declared or paid during the two (2) last fiscal year*	Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian Deviden; 2. Total Deviden yang dibagikan; 3. Jumlah Deviden kas per saham; 4. Payout ratio; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran Deviden kas untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian Deviden, agar diungkapkan alasannya *Containg description of:* *1. The Devidend distribution policy;* *2. Total Devidend;* *3. The amount of the cash Devidend per share;* *4. Payout ratio; and* *5. Date of the announcement and payment of cash Devidends for each year.* *Note: if there is no Devidend distribution, that disclosed the reason*	197-199
	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/ atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) *Employee stock ownership program and / or management held company (ESOP / MSOP)*	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga exercise. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan *Containg description of:* *1. The number of shares of ESOP / MSOP and realization;* *2. Duration;* *3. Terms of the employees and / or management of the beneficiaries; and* *4. The exercise price.* *Note: if it does not have such programs, in order to be disclosed*	286
	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) *Actual use of proceeds from public offering (in which case the company is obliged to submit reports on realization of the use of funds)*	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana (jika ada). *Containg description of:* *1. Total proceeds;* *2. Plan for the use of funds;* *3. Details of the use of funds;* *4. The balance of the funds; and* *5. Date of the AGM approval for the change of use of funds (if any).*	284
	Informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi atau restrukturisasi utang/modal *Information material investments, expansion, divestiture, merger / consolidation, acquisition or restructuring of debt / equity*	Memuat uraian mengenai: 1. Tujuan dilakukannya transaksi; 2. Nilai transaksi atau jumlah yang direstrukturisasi; dan 3. Sumber dana. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan *Containg description of:* *1. The purpose of the transaction;* *2. The value of the transaction or the amount to be restructured; and* *3. Source of funds.* *Note: if it does not have the intended transaction, in order to be disclosed*	285

Referensi Laporan Tahunan *Annual Report Reference*			
No.	**Kriteria /** *Criteria*	**Penjelasan /** *Explanation*	**Hal/** *Page*
	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi The transaction information material conflict of interest and / or transactions with affiliates	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan *Containg description of: description of:* *1. Name of the parties to a transaction and the nature of the affiliation;* *2. Description of the fairness of the transaction;* *3. Reasons for the transaction;* *4. Actual transactions during the period of the last fiscal year;* *5. The company's policy review on the mechanisms associated with the transaction; and* *6. Compliance regulations and related provisions.* *Note: if it does not have the intended transaction, in order to be disclosed*	286
	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan A description of the changes in legislation that significantly influence the company	Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perusahaan Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan *The description includes among others: changes in legislation and their impact on companies* *Note: if there is no change in the legislation that significantly, in order to be disclosed*	287-291
	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir *A description of the changes in accounting policies applied by the company in the last fiscal year*	Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi, agar diungkapkan *The description includes among others: changes in accounting policies, reasons and impact on the financial statements* *Note: if there are no changes in accounting policies, to be disclosed*	291-293
VI	Good Corporate Governance		
	Uraian Dewan Komisaris *Description Board of Commissioners*	Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan; 5. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris atau program orientasi bagi Komisaris baru; dan 6. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris). *The description includes among others:* *1. Description of responsibilities of the Board of Commissioners;* *2. Disclosure of the remuneration procedures;* *3. Structure of the remuneration shows the components of remuneration and the number ofnominal per component for each member of the Board of Commissioners;* *4. Frequency of meetings and attendance levels the Board inmeeting;* *5. The training program in order to increase the competence of the Board Commissioner or orientation program for new Commissioners; and* *6. Disclosure regarding the Board Charter (guidelines and work rules Board of Commissioners).*	369-395
	Informasi mengenai Komisaris Independen *Information about the Independency Commissioner*	Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. *Include among others:* *1. Criteria for determining the Independency Commissioner; and* *2. Statement of Independence each Independency Commissioner.*	396-399

Referensi Laporan Tahunan *Annual Report Reference*			
No.	**Kriteria /** *Criteria*	**Penjelasan /** *Explanation*	**Hal/** *Page*
	Uraian Direksi *Board of Directors description*	Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Frekuensi pertemuan dan Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan Direksi; 3. Frekuensi pertemuan dan Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan gabungan Direksi dan Dewan Komisaris; 4. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi atau program orientasi bagi Direksi baru; 5. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi); dan 6. Kebijakan mengenai suksesi Direksi. *The description includes among others:* *1. The scope of work and responsibilities of each member Board of Directors;* *2. Frequency of meetings and attendance rate of Board members in meeting of the Board of Directors;* *3. Frequency of meetings and attendance rate of Board members in a joint meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners;* *4. The training program in order to improve the competence of the Board of Directors ororientation program for new Directors;* *5. Disclosure regarding the Board Charter (guidelines and work rules Board of Directors); and* *6. Policies regarding the succession of Directors.*	417-454
	Assessment terhadap Dewan Komisaris dan Direksi *Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors*	Mencakup antara lain: 1. Prosedur pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; 2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; dan 3. Pihak yang melakukan assessment. *Include:* *1. The procedures of assessment of the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors;* *2. Criteria used in the implementation of the assessment of the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors; and* *3. The Parties undertake assessment.*	381, 421
	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi *The description of the remuneration policy for the Board of Directors*	Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi; 2. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Direksi; dan 3. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi. *Include:* *1. Disclosure of remuneration procedures;* *2. The remuneration structure that indicates the type and number of short-term benefits, post-employment, and / or other long-term for each member of the Board of Directors; and* *3. Disclosure of indicators for the remuneration of Directors.*	449
	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu *Information on major shareholders and controllers, either directly or indirectly, to the individual owner*	dalam bentuk skema atau diagram, kecuali untuk BUMN yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah *In a schematic or diagram, except for state-owned entirely by the government*	358

Referensi Laporan Tahunan *Annual Report Reference*			
No.	**Kriteria /** *Criteria*	**Penjelasan /** *Explanation*	**Hal/** *Page*
	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali *Disclosure of affiliation between the members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Main Shareholders and / or controllers*	Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan Include: *1. The relationship between the members of the Board of Directors affiliated with members of the Board of Directors;* *2. Affiliate Relations between members of the Board of Directors and Board of Commissioners* *3. The relationship between the members of the Board of Directors affiliated with Major Shareholder and / or control;* *4. The relationship between the members of the Board of Commissioners affiliation with members of other Commissioners; and* *5. The relationship between the members of the Board of Commissioners affiliated with Major Shareholder and / or controllers.* *Note: if it is not affiliated in question, in order to be disclosed*	378, 424
	Komite Audit *The Audit Committee*	Mencakup antara lain: 1. Nama dan jabatan anggota komite audit; 2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. *Include:* *1. Name and title of member of the audit committee;* *2. The educational qualifications and work experience of the audit committee members;* *3. The independence of audit committee members;* *4. Description of the tasks and responsibilities;* *5. Brief report of the activities of the audit committee; and* *6. Frequency of meetings and attendance levels of the audit committee.*	400-406
	Komite Remunerasi dan Nominasi *Nomination and Remuneration Committee*	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi. *Include:* *1. Name, position and brief resume of the members of the nominating committee and / or remuneration;* *2. The independence of members of the nominating committee and / or remuneration;* *3. Description of the tasks and responsibilities;* *4. Description of the nomination committee's activities and / or remuneration; and* *5. Frequency of meetings and attendance nomination and / or remuneration.*	412-413

Referensi Laporan Tahunan *Annual Report Reference*			
No.	**Kriteria /** *Criteria*	**Penjelasan /** *Explanation*	**Hal/** *Page*
	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan *Other committees under the Board of Commissioners held by the company*	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi anggota komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. *Include:* *1. Name, position and brief resume of the other committee members;* *2. The independence of the other committee members;* *3. Description of the tasks and responsibilities;* *4. Description of the activities of other committees; and* *5. Frequency of meetings and attendance of other committees.*	400-416
	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan *Description of the tasks and functions the Corporate Secretary*	Mencakup antara lain: 1. Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan; dan 3. Program pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi sekretaris perusahaan. *Include:* *1. The name and job title, a brief history of the Corporate Secretary;* *2. Description of the company secretarial duties; and* *3. The training program in order to develop the competence of the Corporate Secretary.*	467-471
	Uraian mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya *Description of the Shareholders General Meeting (AGM) of the previous year*	Mencakup antara lain: 1. Keputusan RUPS tahun sebelumnya; 2. Realisasi hasil RUPS pada tahun buku; dan 3. Alasan dalam hal terdapat keputusan RUPS yang belum direalisasikan. *Include:* *1. Decision SGM previous year;* *2. The realization of the AGM in the fiscal year; and* *3. Reason for the AGM decision has yet to be realized.*	360-368
	Uraian mengenai unit audit *Internal* *A description of the Internal audit unit*	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit *Internal*; 2. Jumlah pegawai (auditor *Internal*) pada unit audit *Internal*; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit *Internal*; 4. Kedudukan unit audit *Internal* dalam struktur perusahaan; 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan unit audit *Internal*; dan 6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit audit *Internal*. *Include:* *1. Name of the head of Internal audit unit;* *2. Number of employees (Internal auditor) the Internal audit unit;* *3. Certification as the Internal audit profession;* *4. The position of the Internal audit unit within the corporate structure;* *5. Brief report of the implementation of the Internal audit unit; and* *6. The lifting / dismiss the head of Internal audit unit.*	481-493

Referensi Laporan Tahunan *Annual Report Reference*			
No.	**Kriteria /** *Criteria*	**Penjelasan /** *Explanation*	**Hal/** *Page*
	Akuntan Publik *Certified Public Accountants*	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah periode akuntan publik telah melakukan audit laporan keuangan tahunan; 2. Jumlah periode Kantor Akuntan Publik telah melakukan audit laporan keuangan tahunan; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik; dan 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan Information includes among others: 1. The number of periods public accountant has audited financial statementsannual; 2. The number of periods Public Accounting Firm has audited reportannual financial; 3. The amount of fee for each type of service provided by accountants public; and 4. Other services provided audit services accountants in addition to annual financial statements. Note: if there is no other service in question, in order to be disclosed	494-496
	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan *A description of the corporate risk management*	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. *Include:* *1. A description of the risk management system applied by the company;* *2. A description of the evaluation conducted on the effectiveness of the risk management system;* *3. A description of the risks facing the company; and* *4. Efforts to manage these risks.*	497-541
	Uraian mengenai sistem pengendalian intern *A description of the Internal control system*	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara Internasional (COSO – *Internal* control framework); dan 3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern. *Include:* *1. A brief description of the Internal control system, among others, include both financial and operational control;* *2. Explanation of the suitability of the Internal control system with internationally recognized framework (COSO - Internal control framework); and* *3. A description of the evaluation conducted on the effectiveness of Internal control systems.*	472-480
	Uraian mengenai *Corporate* social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup *A description of the corporate social responsibility related to the environment*	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan; terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, dan lain-lain 3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. May include information about: *1. The policies set management;* *2. Activities undertaken; related environmental programs related to the operations of the company, such as the use of materials and energy that are environmentally friendly and recyclable, the company sewage treatment systems, and others* *3. Certification in the field of environmental owned.*	610-616

Referensi Laporan Tahunan *Annual Report Reference*			
No.	**Kriteria /** *Criteria*	**Penjelasan /** *Explanation*	**Hal/** *Page*
	Uraian mengenai *Corporate* social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja *A description of the corporate social responsibility associated with labor, health and safety*	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, dan lain-lain. May include information about: 1. The policies set management; and 2. The activities related to employment practices, health and safety, such as gender equality and employment opportunities, facilities and safety at work, employee turnover rates, the rate of workplace accidents, and others.	SR
	Uraian mengenai *Corporate* social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan *A description of the corporate social responsibility related to social and community Development*	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan; dan 3. Biaya yang dikeluarkan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain. *May include information about:* *1. The policies set management;* *2. Activities undertaken; and* *3. Costs incurred related to social and community Development, such as the use of local labor, community empowerment companies, repair facilities and social infrastructure, the form of donations, and others.*	SR
	Uraian mengenai *Corporate* social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen *A description of the corporate social responsibility associated with our responsibilities to consumers*	Mencakup antara lain: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain. Include: 1. The policies set management; and 2. The activities related to product liability, such as the health and safety of consumers, product information, facilities, number and countermeasures on consumer complaints, and others.	SR
	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan *Case in point being faced by the company, its subsidiaries, members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners who served during the period of annual report*	Mencakup antara lain: 1. pokok perkara/gugatan; 2. status penyelesaian perkara/gugatan; 3. pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan; dan 4. sanksi administrasi yang dikenakan kepada Entitas, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan Include: 1. The principal lawsuit / accusation; 2. The status of the settlement / accusation; 3. affect the condition of the company; and 4. The administrative sanction imposed on the Entity, the Board of Commissioners and Board of Directors, by the relevant authorities (capital markets, banking and others) in the last fiscal year (or there is a statement that is not subject to administrative sanctions). Note: in the absence of litigation, in order to be disclosed	594
	Akses informasi dan data perusahaan *Access to information and corporate data*	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, *Mailing list*, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya *A description of the availability of access to information and corporate data to the public, for example through the website (in Indonesian and English), the mass media, mailing lists, newsletters, analyst meetings, etc.*	603

Referensi Laporan Tahunan *Annual Report Reference*			
No.	**Kriteria /** *Criteria*	**Penjelasan /** *Explanation*	**Hal/** *Page*
	Bahasan mengenai kode etik *Discussion of the code of ethics*	Memuat uraian antara lain: 1. Isi kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Upaya penegakan dan sanksi pelanggaran kode etik; dan 5. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (*Corporate* culture) yang dimiliki perusahaan. *Includes a description, among others:* *1. Fill in the code of conduct;* *2. Disclosure that the code of conduct applies to all levels of the organization;* *3. The dissemination of codes of conduct;* *4. Efforts enforcement and sanction violations of the code of ethics; and* *5. Statement on the corporate culture (corporate culture) of the company.*	584-589
	Pengungkapan mengenai *whistleblowing system* *Disclosures regarding whistleblowing system*	Memuat uraian tentang mekanisme *whistleblowing system* antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi whistleblower; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya. Contains a description of the mechanisms of the whistleblowing system, among others: 1. Submission of reports of violations; 2. Protection of whistleblowers; 3. Handling of complaints; 4. Parties which manages the complaint; and 5. The number of complaints received and processed in the last fiscal year, andfollow-ups.	567-580
VII	**Informasi Keuangan/** ***Financial information***		
	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan *Statement of the Board of Directors and / or the Board of Commissioners on Responsibility for Financial Statements*	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan *Compliance with the relevant regulations concerning the Responsibility for Financial Statements*	KAP 3-4
	Opini auditor independen atas laporan keuangan *Independency auditor's opinion on the financial statements*	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik. *Description contains about:* *1. Name and signature;* *2. Date of Audit Report; and* *3. KAP license number and license number of Certified Public Accountants.*	KAP 5-6
	Deskripsi Auditor Independen di Opini *Description Independency Auditor in Opinion*	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik. *Description contains about:* *1. Name and signature;* *2. Date of Audit Report; and* *3. KAP license number and license number of Certified Public Accountants.*	KAP 10-17

Referensi Laporan Tahunan *Annual Report Reference*			
No.	**Kriteria /** *Criteria*	**Penjelasan /** *Explanation*	**Hal/** *Page*
	Laporan keuangan yang lengkap *Complete financial statement*	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan (neraca); 2. Laporan laba rugi komprehensif; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; dan 6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). *Contains a complete elements of financial statements:* *1. The statement of financial position (balance sheet);* *2. Statement of comprehensive income;* *3. Statement of changes in equity;* *4. Statement of cash flows;* *5. Notes to the financial statements; and* *6. Statement of financial position at the beginning of the earliest comparative period when an entity applies an accounting policy retrospectively or makes restatement of financial statement items, or when the entity reclassifies items in its financial statements (if relevant).*	KAP 1-115
	Perbandingan tingkat profitabilitas *Comparison of the level of profitability*	Perbandingan laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya *Comparison of* net *income (loss) for the year with the previous year*	KAP 3-4
	Laporan Arus Kas *Cash flow statement*	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. *Meet the following requirements:* *1. Grouping into three categories of activity: operating, investing and financing activities;* *2. The use of the direct method (direct method) to report cash flows from operating activities;* *3. The separation between the presentation of cash receipts and disbursements for a year or run on operating, investing and financing activities; and* *4. Disclosure of Non-cash transactions should be included in the notes to the financial statements.*	KAP 7-8
	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi *Summary of Accounting Policies*	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pengakuan pendapatan dan beban; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan. *Includes at least:* *1. Statement of compliance with IFRSs;* *2. Basis of measurement and preparation of financial statements;* *3. Recognition of income and expense;* *4. Employee benefits; and* *5. Financial Instruments.*	KAP 14-41

Referensi Laporan Tahunan *Annual Report Reference*			
No.	**Kriteria /** *Criteria*	**Penjelasan /** *Explanation*	**Hal/** *Page*
	Pengungkapan transaksi pihak berelasi *Disclosure of related party transactions*	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total *Asset* atau liabilitas. *Things are disclosed, among others:* *1. Name of related parties, and the nature and relationships with related parties;* *2. The transaction value and the percentage of total income and expensesRelated; and* *3. The balance amount and the percentage of the total assets or liabilities.*	KAP 89
	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan *Disclosures relating to taxation*	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; 4. Rincian *Asset* dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah *Asset* atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. *Things that should be disclosed:* *1. Reconciliation fiscal and current income tax expense calculation;* *2. Explanation of the relationship between expense (income) and income tax accounting;* *3. A statement that the taxable income (CGC) the reconciliation as basis for charging Agency Annual Income Tax Return;* *4. Details of the assets and the deferred tax liabilities recognized in the statement of financial position for all periods presented, and the amount of expense (income) Deferred tax recognized in the income statement if the number is not visible from the amount of deferred tax assets or liabilities are recognized in the statement of position finance; and* *5. Disclosure or no tax disputes.*	KAP 75-76
	Pengungkapan yang berhubungan dengan *Asset* tetap *Disclosures relating to fixed assets*	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar *Asset* tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar *Asset* tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan *Asset* tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. *Things that should be disclosed:* *1. The depreciation method used;* *2. A description of the accounting policies selected between the revaluation model and the cost model;* *3. The method and significant assumptions used in estimating the fair value of fixed assets (to the revaluation model) or disclosure of the fair value of fixed assets (to the cost model); and* *4. Reconciliation of the gross carrying amount and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and end of the period showing: addition, subtraction and reclassification.*	KAP 64-66

Referensi Laporan Tahunan *Annual Report Reference*			
No.	**Kriteria /** *Criteria*	**Penjelasan /** *Explanation*	**Hal/** *Page*
	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi *Disclosures relating to operating segments*	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, *Asset*, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, *Asset* segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. *Things that should be disclosed:* *1. General information covering factors used to identify reporTable. segment;* *2. The information about income, assets and liabilities reporTable. segment;* *3. Reconciliation of total segment revenues, reported segment profit or loss, segment assets, segment liabilities, and other segments of the material elements of the corresponding number in the entity; and* *4. Disclosures on the entity level, which includes information about products and / or services, geographical areas and major customers.*	KAP 52-63
	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan *Disclosures related to Financial Instruments*	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Persyaratan, kondisi dan kebijakan akuntansi untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 2. Klasifikasi instrumen keuangan; 3. Nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan; 4. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko; 5. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 6. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. *Things that should be disclosed:* *1. Terms, conditions and accounting policies for each class of financial instruments;* *2. Classification of financial instruments;* *3. The fair value of each class of financial instruments;* *4. Objectives and risk management policies;* *5. Explanation of risks associated with financial instruments: market risk, loan risk and liquidity risk; and* *6. Analysis of risks associated with financial instruments quantitatively.*	KAP 89-112
	Penerbitan laporan keuangan *Financial statements*	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. *Things are disclosed, among others:* *1. The date the financial statements were authorized for issue; and* *2. The party responsible for authorizing the financial statements.*	KAP 6

BANK PAPUA

Bersama Papua Membangun Negeri

LAPORAN KEUANGAN
FINANCIAL STATEMENTS
2017

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016,
dan 1 Januari 2016 / 31 Desember 2015
Beserta Laporan Audit Independen

FINANCIAL STATEMENTS

For the Years Ended
December 31, 2017, 2016
And January 1, 2016 / December 31,2015
With Independent Auditor's Report

BANK PAPUA
Bersama Papua Membangun Negeri

SURAT PENYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016
DAN 1 JANUARI 2016/31 DESEMBER 2015
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : F. Zendrato
   Alamat kantor : Jl. Ahmad Yani No. 5-7, Jayapura, Papua, Indonesia
   Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Ir. Sadar Sebayang
   Alamat kantor : Jl. Ahmad Yani No. 5-7, Jayapura, Papua, Indonesia
   Jabatan : Direktur Bisnis
3. Nama : Rudhy Dharma, SE
   Alamat kantor : Jl. Ahmad Yani No. 5-7, Jayapura, Papua, Indonesia
   Jabatan : Direktur Keuangan
4. Nama : Isak Semuel Wopari, SE, MM
   Alamat kantor : Jl. Ahmad Yani No. 5-7, Jayapura, Papua, Indonesia
   Jabatan : Direktur Operasional
5. Nama : Ir. Jefri Sanni Pither Siing
   Alamat kantor : Jl. Ahmad Yani No. 5-7, Jayapura, Papua, Indonesia
   Jabatan : Direktur Kepatuhan

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan:
   a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua tidak mengandung informasi yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
3. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal PT Bank Pembangunan Daerah Papua

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
AS OF DECEMBER 31, 2017, 2016
AND JANUARY 2016/DECEMBER 31, 2015
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

We the undersigned:

1. *Name : F. Zendrato*
   Office Address : Jl. Ahmad Yani No. 5-7, Jayapura, Papua, Indonesia
   Position : President Director
2. *Name : Ir. Sadar Sebayang*
   Office Address : Jl. Ahmad Yani No. 5-7, Jayapura, Papua, Indonesia
   Position : Business Director
3. *Name : Rudhy Dharma, SE*
   Office Address : Jl. Ahmad Yani No. 5-7, Jayapura, Papua, Indonesia
   Position : Financial Director
4. *Name : Isak Semuel Wopari, SE, MM*
   Office Address : Jl. Ahmad Yani No. 5-7, Jayapura, Papua, Indonesia
   Position : Operations Director
5. *Name : Ir. Jefri Sanni Pither Siing*
   Office Address : Jl. Ahmad Yani No. 5-7, Jayapura, Papua, Indonesia
   Position : Compliance Director

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements.*
2. *The financial statements have been prepared and presented in accordance with indonesian financial accounting standards, and:*
   a. All information in the PT Bank Pembangunan Daerah Papua financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
   b. The PT Bank Pembangunan Daerah Papua financial statements do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact;
3. *We are responsible for the PT Bank Pembangunan Daerah Papua internal control system.*

Thus this statement is made truthfully.

KANTOR PUSAT
Jl. A. Yani No. 5 - 7 Jayapura 99111, Kotak Pos 1536, Telp. 0967 - 532351 (hunting), Fax. 0967 - 533207, Telex. 76198
Website : http://www.bankpapua.co.id E-mail : info@bankpapua.co.id

Jayapura, 28 Febuari 2018/*Febuary 28, 2018*

Direktur Utama /
President Director

F. Zendrato

Direktur Bisnis/
Business Director

Ir. Sadar Sebayang

Direktur Keuangan /
Financial Director

Rudhy Dharma, SE

Direktur Operasional /
Operations Director

sak Semuel Wopari, SE, MM

Direktur Kepatuhan /
Compliance Director

Ir. Jefri Sanni Pither Siing

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN KEUANGAN
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
31 Desember 2017, dan 2016
1 Januari 2016 / 31 Desember 2015

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
FINANCIAL STATEMENTS
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
December 31, 2017 and 2016
January 1, 2016 / December 31, 2015

Daftar Isi

Halaman / Page

Table of Contents

Laporan Auditor Independen	6 - 9	*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan	10 - 11	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi Komprehensif	12 - 13	*Statements of Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Modal	14 - 15	*Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	16 - 17	*Statements of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan	18 - 124	*Notes to the Financial Statements*
Penyajian Kembali Laporan Keuangan 31 Desember 2016	125 - 137	*Accounting Position Paper*

HGK
Hertanto, Grace, Karunawan

Nomor/*Number*: 057.01.01/LAI-BPDP/HGK.HO/2018

Laporan Auditor Independen /
Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi /
The Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors

PT Bank Pembangunan Daerah Papua

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Papua ("The Company"), which comprise the statement of financial posisition as of December 31, 2017, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Management's responsibility for the financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Branch Office :
Jl. Belakang Olo No. 54 A
Olo, Padang Barat
Padang, Sumatera Barat 25112
Phone : (0751) 895 1312
Email : hgkpadang@hgkfirm.com
No : KEP.99/KM.1/2018

MEMBER TIAG
A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms

Head Office :
Palma Tower, 18th Floor Lot F&G
Jl. RA Kartini II-5 Kav. 06
TB Simatupang, Jakarta Selatan 12310
Phone : +6221-75930431 (Hunting)
+6221-75930432 (Hunting)
+6221-75930433 (Hunting)
Fax : +6221-75930434
Email : info@hgkfirm.com
NIUKAP : KEP-929/KM.1/2014 - S-30/MK.1/2015

Web : www.hgkfirm.com www.TIAGnet.com

HGK
Hertanto, Grace, Karunawan

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Auditing Standard established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.

An audit service involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors' consider internal control relevant to the preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

HGK
Hertanto, Grace, Karunawan

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Pembangunan Daerah Papua as of December 31, 2017, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Penekanan Suatu Hal

Emphasis of Matter

Kami mengarahkan perhatian ke Catatan 43 atas laporan keuangan terlampir, yang mengungkapkan bahwa Perusahaan melakukan reklasifikasi akun tertentu pada laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan laporan Laba Rugi dan penghasilan Komprehensif lainnya yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 yang menyebabkan laporan posisi keuangan tanggal 1 Januari 2016 disajikan pada laporan keuangan terlampir, sebagaimana dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

We draw your attention to Note 43 to the accompanying financial statements , which disclosed that the Company has reclassified certain account in the statements of financial position as of December 31, 2016 and statements of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2016 on the accompanying financial statements, as required by Indonesian Financial Accounting Standards. Our Opinion is not modified in respect of this matter.

Kami mengarahkan perhatian ke Catatan 44 atas laporan keuangan terlampir, yang menjelaskan tentang penyajian kembali angka-angka koresponding tanggal 31 Desember 2016 dan 1 Januari 2016/ 31 Desember 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 berkaitan dengan penyesuaian terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.46 (Revisi 2014) "Pajak Penghasilan" dan No.55 (Revisi 2014) "Instrument Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan telah diterapkan secara retrospektif. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

We draw your attention to Note 44 to the accompanying financial statements which, describe the rationable on the restatement of coresponding figures as of December 31,2016 and January 1, 2016/December 31, 2015 and for the year ended December 31, 2016 in relation to the adjustment of Statement of Financial Accounting Standard No.46 (Revised 2014) "Income Tax" and No.55 (Revised 2014) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and has been applied retrospectively. Our Opinion is not modified in respect to this matter.

HGK
Hertanto, Grace, Karunawan

Hal Lain

Laporan keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain, dengan opini wajar tanpa modifikasi atas laporan keuangan tertanggal 3 Maret 2017.

Other Matter

The accompanying financial statements of the Company on December 31, 2016 and for the year then ended were audited by other independent auditor, who expressed an unmodified opinion on such financial statements on March 3, 2017.

HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN

Drs. Hertanto, M.S. AK., CPA., CPMA., CA
Registrasi Akuntan Publik No. 0136 / *Public Accountant Registration No. 0136*

Jakarta, 28 Pebruari 2018 / *February 28, 2018*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2017, 2016, dan
1 Januari 2016 / 31 Desember 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2017, 2016, and
January 1, 2016 / December 31, 2015
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	31 Desember/ *December 31, 2017*	31 Desember/ *December 31, 2016*	1 Januari / *January 1, 2016* / 31 Desember / *December 31, 2015* (Disajikan kembali / *Restated*)	
ASET					***ASSETS***
Kas	*2d,3*	831,085,338,915	941,680,990,818	738,377,904,149	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	*2d,2e,4*	1,415,941,135,223	1,511,312,727,362	1,885,403,634,247	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain					*Current accounts with other banks*
- Pihak ketiga		6,303,099,349	45,126,492,866	7,717,047,925	*Third parties -*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai		-	-	-	*Less: allowance for impairment losses*
	2d,2e,5	6,303,099,349	45,126,492,866	7,717,047,925	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain					*Placement with Bank Indonesia and other banks*
- Pihak ketiga		2,949,937,783,825	2,776,699,622,303	2,309,972,512,598	*Third parties -*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai		-	-	-	*Less: allowance for impairment losses*
	2d,2f,6	2,949,937,783,825	2,776,699,622,303	2,309,972,512,598	
Efek - efek					*Marketable securities*
- Pihak ketiga		1,601,658,022,594	1,439,611,024,504	1,424,657,626,060	*Third parties -*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	*2d, 2g, 2v,7*	-	-	-	*Less: allowance for impairment losses*
		1,601,658,022,594	1,439,611,024,504	1,424,657,626,060	
Efek - efek yang dibeli dengan janji dijual kembali					*Marketable securities purchased under agreements to resell*
- Pihak ketiga		1,007,587,061,460	511,137,613,326	822,169,197,900	*Third parties -*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	*2d,2h,2v ,8*	-	-	-	*Less: allowance for impairment losses*
		1,007,587,061,460	511,137,613,326	822,169,197,900	
Kredit yang diberikan:					*Loans:*
- Pihak berelasi		720,064,603,857	636,140,957,029	215,387,005,377	*Related parties -*
- Pihak ketiga		12,550,843,310,291	13,573,698,828,560	12,991,789,690,944	*Third parties -*
Jumlah kredit yang diberikan		13,270,907,914,148	14,209,839,765,589	13,207,176,696,321	*Total loans*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	*2j,9m*	(1,506,740,709,523)	(1,672,561,369,094)	(927,584,117,994)	*Less: allowance for impairment losses*
	2c,2d, 2i,2v,9	11,764,167,204,625	12,537,278,416,495	12,279,592,578,327	
Aset tetap		614,250,402,812	586,189,683,956	553,235,733,236	*Fixed assets*
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	*2j,2u,2v, 10*	(329,238,580,071)	(296,887,704,891)	(265,102,668,135)	*Less: Accumulated depreciation*
		285,011,822,741	289,301,979,065	288,133,065,101	
Aset Lain-lain	*2d, 2u, 11, 2k*	539,121,142,387	559,701,128,066	601,615,362,681	*Other Assets*
JUMLAH ASET		**20,400,812,611,119**	**20,611,849,994,805**	**20,357,638,928,988**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2017 dan 2016, dan
1 Januari 2016 / 31 Desember 2015
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2017 and 2016, and
January 1, 2016 / December 31, 2015
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	31 Desember/ *December 31, 2017*	31 Desember/ *December 31, 2016*	1 Januari / *January 1, 2016* / 31 Desember / *December 31, 2015* (Disajikan kembali / *Restated*)	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Liabilitas segera	*2d,2l,12, 18*	664,353,874,572	566,370,002,731	978,223,672,727	*Obligations due Immediately*
Simpanan nasabah	*2c,2d,18*				*Deposits from customers*
- Pihak berelasi	*2m,2n,*	4,665,773,515,784	4,603,860,473,652	3,829,685,887,857	*Related parties -*
- Pihak ketiga	*13*	11,897,941,129,934	11,873,254,171,624	11,957,527,415,418	*Third parties -*
Simpanan dari bank lain	*2c,2d,*				*Deposits from other banks*
- Pihak ketiga	*2m,2n,14*	91,860,065,287	92,364,544,884	119,150,596,498	*Third parties -*
Pinjaman yang diterima					*Borrowings*
- Pihak ketiga	*2d,2o,15*	8,594,623,291	325,000,000,000	235,142,919,867	*Third parties -*
Liabilitas lain-lain	*2s, 2v, 2t, 17*	397,285,691,567	781,745,730,812	432,575,751,604	*Other liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		17,725,808,900,435	18,242,594,923,703	17,552,306,243,971	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS					***EQUITY***
Modal saham					*Share capital*
Seri A - nilai nominal Rp5.000 per saham					*Class A- Rp5,000 per value per share*
Seri B - nilai nominal Rp5.000 per saham					*Class B- Rp5,000 per value per share*
Modal dasar					*Share capital - authorized*
Seri A - 728.000 saham					*Class A - 728.000 shares*
Seri B - 72.000 saham					*Class B - 72.000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh					*Issued and fully paid*
Seri A					*Class A*
- 2015 : 287.728 saham					*2015 : 287,728 shares -*
- 2016 : 329.472 saham					*2016 : 329,472 shares -*
- 2017 : 370.677 saham					*2017 : 370.677 shares -*
Seri B					*Class B*
- 2015 : 9.993 saham					*2015 : 9,993 shares -*
- 2016 : 10.293 saham					*2016 : 10,293 shares -*
- 2017 : 10.893 saham	*19*	1,907,850,000,000	1,698,825,000,000	1,490,605,000,000	*2017 : 10.893 shares -*
Tambahan modal disetor	*19*	95,306,705,785	58,170,973,957	96,160,156,478	*Additional paid-up capital*
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek - efek dan Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual, setelah pajak tangguhan		38,388,187	5,451,686,149	3,340,224,349	*Unrealized gain on available-for-sale marketable securities and Government Bonds net of deferred tax*
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria atas Program Manfaat Pasti		(305,784,454,661)	(257,513,000,218)	(55,462,409,108)	*Actuary gains (Losses) on defined benefit plans*
Saldo Laba					*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya		864,320,411,214	1,101,024,856,154	887,346,517,193	*Appropriated reserve*
Belum ditentukan penggunaannya		113,272,660,159	(236,704,444,940)	383,343,196,105	*Unappropriated reserve*
JUMLAH EKUITAS		2,675,003,710,684	2,369,255,071,102	2,805,332,685,017	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		20,400,812,611,119	20,611,849,994,805	20,357,638,928,988	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise

	Catatan / *Notes*	2017	2016	
PENDAPATAN BUNGA				***INTEREST INCOME***
Pendapatan bunga	*2p,21*	2,114,796,003,571	2,088,660,627,046	*Interest income*
Beban bunga	*2p,22*	(431,052,372,455)	(445,923,935,984)	*Interest expenses*
Jumlah pendapatan bunga - bersih		**1,683,743,631,116**	**1,642,736,691,063**	***Total interest income***
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				***OTHER OPERATING INCOME***
Pendapatan operasional lainnya	*2q,21*	81,555,627,635	31,005,442,483	*Other operational income*
Pendapatan provisi dan komisi	*21*	98,584,856,797	100,355,741,584	*Provision and commission income*
Beban provisi dan komisi	*22*	(1,330,955,063)	(1,820,699,876)	*Provisions and commission expenses*
Jumlah pendapatan operasional lainnya		**178,809,529,370**	**129,540,484,191**	***Total other operating income***
PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI				***PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES***
Aset produktif	*23*	(687,937,075,886)	(864,997,323,414)	*Productive assets*
Aset non produktif	*23*	-	(15,000,000,000)	*Non productive assets*
Jumlah pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai		**(687,937,075,886)**	**(879,997,323,414)**	***Total provision for impairment loses***
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				***OTHER OPERATING EXPENSES***
Tenaga kerja dan tunjangan	*26*	(479,966,786,768)	(468,366,610,246)	*Salaries and allowances*
Umum dan administrasi	*25*	(446,804,692,527)	(521,682,933,329)	*General and administrative*
Penyusutan dan amortisasi	*24*	(38,670,963,854)	(40,620,235,041)	*Depreciation and amortization*
Imbalan manfaat karyawan	*30*	(82,840,228,218)	(59,328,922,762)	*Post-employment benefits*
Jumlah beban operasional lainnya		**(1,048,282,671,367)**	**(1,089,998,701,378)**	***Total Other operating expenses***
LABA (RUGI) OPERASIONAL		**126,333,413,233**	**(197,718,849,538)**	***OPERATING INCOME (LOSSES)***
PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL				***NON OPERATING INCOMES (EXPENSES)***
Pendapatan bukan operasional	*27*	21,203,649,074	59,610,975,181	*Non operating incomes*
Beban bukan operasional	*28*	(3,151,355,007)	(5,972,491,285)	*Non operating expenses*
Jumlah pendapatan (beban) bukan opersional		**18,052,294,067**	**53,638,483,896**	***Total non operating revenues (ecpenses)***
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		**144,385,707,300**	**(144,080,365,642)**	***INCOME (LOSSES) BEFORE TAX***
BEBAN PAJAK				***TAX EXPENSES***
Pajak kini	*18c*	(40,762,423,000)	(68,632,389,250)	*Current income tax*
Manfaat (Beban) pajak tangguhan	*18c,e*	9,649,375,859	(23,991,690,048)	*Deffered income tax*
Jumlah beban pajak		**(31,113,047,141)**	**(92,624,079,298)**	***Total income tax expenses***
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		**113,272,660,159**	**(236,704,444,940)**	***INCOME (LOSSES) FOR THE YEARS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise

	Catatan / *Notes*	2017	2016	
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN:				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE):***
Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		64,361,939,258	(128,180,498,698)	*Remeasurement of post employment benefit*
Manfaat (beban) Pajak Tangguhan atas Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		(16,090,484,815)	(24,805,287,718)	*Deffered income tax Remeasurement of post employment benefit*
Pos - pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will be reclassified to profit or loss***
Peningkatan (Penurunan) nilai wajar Surat Berharga		(5,400,501,900)	5,451,686,149	*Increasing (Decreasing) of fair value on marketable securities*
Manfaat (beban) Pajak Tangguhan atas Peningkatan (Penurunan) nilai wajar Surat Berharga		12,796,062	-	*Deffered income tax Increasing (Decreasing) of fair value on marketable securities*
Jumlah penghasilan (beban) komprehensif lain		42,883,748,605	(147,534,100,267)	***Total other comprehensif Income (expenses)***
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		156,156,408,764	(384,238,545,207)	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR***
LABA PER SAHAM				***EARNING PER SHARE***
Laba operasional	32	315,336	(562,662)	*Operating Income*
Laba bersih	32	282,735	(673,606)	*Net income*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
Years Ended December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian	Catatan / *Notes*	Modal Disetor / *Paid-in Capital*	Tambahan Modal Disetor / *Additional Paid-in Capital*	Keuntungan (Rugi) yang belum Direalisasi atas Efek-efek dan Obligasi Pemerintah dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual, Setelah Pajak Tangguhan / *Unrealized Losses on Available-for-Sale Marketable Securities and Government Bonds Net of Deferred Tax*	Keuntungan (Kerugian) Aktuaria atas Program Manfaat Pasti / *Other Equity - Actuary gains (Losses) on defined benefit plans*	Saldo Laba Ditentukan Penggunaannya / *Retained Earning Appropriated*	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya / *Retained Earning Unappropriated*	Jumlah Ekuitas / *Total Equity*	*Description*
Saldo per 31 Desember 2016		**1,698,825,000,000**	**58,170,973,957**	**5,451,686,149**	**(257,513,000,218)**	**1,101,024,856,154**	**(236,704,444,940)**	**2,369,255,071,102**	***Balance December 31, 2015***
Setoran Modal Sebelum RUPS 2017		-	37,135,731,828	-	-	-	-	37,135,731,828	*Paid in capital before GSHM 2017*
Pengesahan Setoran Modal oleh RUPS		209,025,000,000	-	-	-	-	-	209,025,000,000	*Shareholders' approval on paid in capital*
Laba komprehensif tahun berjalan		-	-	(5,413,297,962)	(48,271,454,443)	-	-	(53,684,752,405)	*Comprehensif Income*
Pembagian Laba Tahun 2017									*Net income 2016 distribution:*
Cadangan Umum	*20*	-	-	-	-	(236,704,444,940)	236,704,444,940	-	*General reserve*
Dividen	*20*	-	-	-	-	-	-	-	*Dividend*
Dana CSR	*20*	-	-	-	-	-	-	-	*Corporate social responsibility fund*
Laba bersih Tahun berjalan		-	-	-	-	-	113,272,660,159	113,272,660,159	*Current year net income*
Saldo per 31 Desember 2017		**1,907,850,000,000**	**95,306,705,785**	**38,388,187**	**(305,784,454,661)**	**864,320,411,214**	**113,272,660,159**	**2,675,003,710,684**	***Balance December 31, 2017***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (Continued)
Years Ended December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian	Catatan / *Notes*	Modal Disetor / *Paid-in Capital*	Tambahan Modal Disetor / *Additional Paid-in Capital*	Keuntungan (Rugi) yang belum Direalisasi atas Efek-efek dan Obligasi Pemerintah dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual, Setelah Pajak Tangguhan / *Unrealized Losses on Available-for-Sale Marketable Securities and Government Bonds Net of Deferred Tax*	Keuntungan (Kerugian) Aktuaria atas Program Manfaat Pasti / *Other Equity - Actuary gains (Losses) on defined benefit plans*	Saldo Laba Ditentukan Penggunaannya / *Retained Earning Appropriated*	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya / *Retained Earning Unappropriated*	Jumlah Ekuitas / *Total Equity*	*Description*
31 Desember 2015		**1,490,605,000,000**	**96,160,156,478**	**3,340,224,349**	**(55,462,409,108)**	**887,346,517,193**	**383,343,196,106**	**2,805,332,685,018**	***Balance December 31, 2015***
odal Sebelum RUPS 2016		-	(37,989,182,521)	-		-	-	(37,989,182,521)	*Paid in capital before GSHM 2016*
odal Setelah RUPS 2016		-	-	-		-	-	-	*Paid in capital after the GSHM 2016*
an Setoran Modal oleh RUPS		208,220,000,000	-	-		-	-	208,220,000,000	*Shareholders' approval on paid in capital*
Penerapan PSAK 24 'rospektif		-	-	-	(202,050,591,110)	-	-	(202,050,591,110)	*The Effect of restropective application OF PSAK 24*
an Modal Disetor PS		-	-	-		-	-	-	*Shareholders' approval on paid in capital Adjustment*
belum Direalisasi atas Efek-Obligasi Pemerintah dalam k Tersedia untuk Dijual, Pajak Tangguhan		-	-	2,111,461,800		-	-	2,111,461,800	*Unrealized losses on available-for-sale marketable securities and Government Bonds net of deferred tax*
i Laba Tahun 2016									*Net income 2016 distribution:*
n Umum	*20*	-	-	-		213,678,338,961	(213,678,338,961)	-	*General reserve*
	20	-	-	-		-	(169,664,857,145)	(169,664,857,145)	*Dividend*
R	*20*	-	-	-		-	-	-	*Corporate social responsibility fund*
) bersih Tahun berjalan		-	-	-		-	(236,704,444,940)	(236,704,444,940)	*Current year net income (Loss)*
31 Desember 2016		**1,698,825,000,000**	**58,170,973,957**	**5,451,686,149**	**(257,513,000,218)**	**1,101,024,856,154**	**(236,704,444,940)**	**2,369,255,071,102**	***Balance December 31, 2016***

tas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN ARUS KAS
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Jumlah disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
STATEMENT OF CASH FLOWS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	2017	2016	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan Bunga, Provisi, dan Komisi	2,213,380,860,369	2,135,142,253,249	*Recipt From Interest, Fees, and Commissions*
Pembayaran Bunga, Provisi, dan Komisi	(432,383,327,518)	(498,126,611,960)	*Payment of Interest, Fees, and Commissions*
Pembayaran Kepada Karyawan	(479,966,786,768)	(587,073,907,817)	*Payment of Employee's Benefit*
Pembayaran Beban Umum dan Administrasi	(441,670,019,341)	(581,115,131,724)	*Payment of General and Administrative Expenses*
Penerimaan Kredit Hapus Buku	61,106,237,937	6,251,244,819	*Recoveries from Loan Debt Written - off*
Penerimaan Operasional Lainnya	20,449,389,698		
Penerimaan Bukan Operasional	14,151,166,569	81,202,795,999	*Receipts from Non Operating Income*
Pembayaran Pajak Penghasilan	(40,762,423,000)	(119,517,840,129)	*Payment of Income Tax*
Penerimaan Kas Sebelum Perubahan dalam Aset dan Liabilitas Operasi	**914,305,097,946**	**436,762,802,437**	***Receipts from Cash Before Changes in Operating Assets and Liabilities***
Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi:			*Decreasing (increasing) in assets:*
Penempatan pada Bank Lain	(173,238,161,522)	(466,727,109,705)	*Placement with Other Bank*
Surat Berharga	(167,447,499,990)	(8,678,744,465)	*Marketable Securities*
Reverse Repo	(496,449,448,134)	311,031,584,574	*Reverse Repo*
Kredit yang Diberikan	89,075,263,482	(1,002,663,089,268)	*Loans*
Aset Lain-lain	43,248,621,347	(10,591,946,369)	*Other Assets*
Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi	**(704,811,224,817)**	**(1,177,629,305,233)**	***Decreasing (Increasing) in Assets***
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasi:			*Increasing (Decreasing) in Operating Liabilities:*
Simpanan:	86,095,520,845	663,115,290,386	*Deposits:*
Liabilitas Segera	97,983,871,841	(411,853,669,996)	*Current Liabilities*
Liabilitas Lain-lain	(531,662,206,721)	349,169,979,209	*Other Liabilities*
Kenaikan (Penurunan) Liabililtas Operasi	**(347,582,814,035)**	**600,431,599,599**	***Increasing (Decreasing) in Operating Liabilities***
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**(138,088,940,906)**	**(140,434,903,197)**	***Cash Net Provided from Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembelian Aset Tetap	(36,503,601,772)	(39,353,030,729)	*Acquisition of Fixed Assets*
Penjualan Aset Tetap	46,550,000	-	*Proceeds from Sale of Fixed Assets*
Arus Kas Bersih (digunakan) Diperoleh dari Aktivitas Investasi	**(36,457,051,772)**	**(39,353,030,729)**	***Net Cash (Used In) Provided From Investing Activities***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
LAPORAN ARUS KAS
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Jumlah disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
STATEMENT OF CASH FLOWS
Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	2017	2016	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pencairan (Pelunasan) Pinjaman yang Diterima Subordinasi	(316,405,376,709)	89,857,080,134	*Receiving (Settlement) of Borrowing*
Penambahan Modal Disetor	246,160,731,828	170,230,817,479	*Additional Paid up Capital*
Pembayaran Deviden	-	(213,678,338,961)	*Payment of Dividend*
Arus Kas Bersih (Digunakan) Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**(70,244,644,881)**	**46,409,558,652**	***Net cash (used in) provided from Financing Activities***
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	**(244,790,637,559)**	**(133,378,375,274)**	***Net Increase in Cash and Cash Equivalents***
Kas dan Setara Kas awal tahun	2,498,120,211,046	2,631,498,586,321	*Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year*
Kas dan Setara Kas akhir tahun	**2,253,329,573,487**	**2,498,120,211,046**	***Cash and Cash Equivalents at The End of the Year***
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:			*Cash and Cash Equivalents at the End of The Year:*
Kas	831,085,338,915	941,680,990,818	*Cash*
Giro Bank Indonesia	1,415,941,135,223	1,511,312,727,362	*Current Accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank Lain	6,303,099,349	45,126,492,866	*Current Accounts with other banks*
Jumlah kas dan setara kas	**2,253,329,573,487**	**2,498,120,211,046**	*Total cash and cash equivalents*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Bank

PT Bank Pembangunan Daerah Papua ("Bank Papua") pada awalnya didirikan di Indonesia dengan nama "Bank Pembangunan Daerah Irian Barat", berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat Nomor: 37/GIB/1966 tanggal 13 April 1966 tentang Bank Pembangunan Daerah, dengan modal dasar Rp4.000.000 dan Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya Nomor: 1 Tahun 1970.

Selanjutnya "Bank Pembangunan Daerah Irian Barat" berubah nama menjadi "Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya" pada tahun 1970, berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: 7 Tahun 1976 Tanggal 30 Oktober 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya, dengan modal dasar menjadi Rp500.000.000.

Kemudian "Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya" berubah nama menjadi "Bank Pembangunan Daerah Papua" pada tahun 2002, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor: 2 tahun 2002 Tanggal 21 Mei 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Papua, dengan modal dasar Rp150.000.000.000.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Bank Papua melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Sirkulasi Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Papua dihadapan Maryatie Simanjuntak, S.H., tanggal 12 Agustus 2014 dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-05850.40.21-2014 dan Nomor: AHU-28059.40.22-2014 Tanggal 5 September 2014, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Modal Dasar Bank Papua menjadi Rp4.000.000.000.000.

b. Lingkup Usaha

Berdasarkan anggaran dasar, tujuan Bank Papua adalah berusaha di bidang perbankan. Untuk mencapai tujuannya ini, Bank Papua menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit;
- Menerbitkan Surat Pengakuan Utang;
- Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment of Bank Papua

In the beginning PT Bank Pembangunan Daerah Papua ("Bank Papua") was established as local bank under the name of "Bank Pembangunan Daerah Irian Barat" according to the Decree of Governor of West Irian Province, No. 37/GIB/1966 dated April 13, 1966 concerning Provincial Development Bank with a paid up capital of Rp4,000,000 and Local Regulation of Irian Jaya Province No. 1 year 1970.

Further, the name of "Bank Pembangunan Daerah Irian Barat" changed into "Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya" according to Province Regulation of Irian Jaya (First Degree) No. 7 year 1976 dated October 30, 1976 concerning Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya with paid up capital in the amount of Rp500,000,000.

Subsequently "Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya" change its name again into "Bank Pembangunan Daerah Papua" made in 2002 according to Local Province Regulation No.2 year 2002 dated May 21, 2002 concerning Bank Pembangunan Daerah Papua with a paid up capital of Rp150,000,000,000.

In the latest amendment made to Bank Papua Articles of Association as refer to the Deed of Declaration of the General Meeting of Stockholders made in the circulation letter about the changes of article of association of PT Bank Pembangunan Daerah Papua on notarial deed dated July 21, 2013 of Maryatie Simanjuntak, S.H., which already approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No.AHU-05850.40.21-2014 and No. AHU-28059.40.22-2014 dated September 5, 2014 concerning the approval on changes of the article of association, paid capital to become Rp4,000,000,000,000 of the Bank Papua.

b. Scope of Business

Based on the articles of association, the objectives of Bank Papua is to provide banking services. To achieve this objective, Bank Papua provides its services as follows:

- *Accumulating fund from people in the form of current account, time deposit, certificate deposit, saving and / or other form similarly;*
- *Providing loans;*
- *Issues letter of debt;*
- *Purchase, sell, or provide guarantees on its own risk for the interest of its customers;*
- *Transfer of money on its own funds or its customers;*
- *Placement of fund, to borrow fund from or to lend fund to other banks, by issuing a note, thru telecomunication either with wessel or check or other devices;*
- *Receiving payment from receivable of marketable securities and perform yield calculations with or between concerning parties;*
- *Provides safe deposit services for valuable goods and marketable security;*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Lingkup Usaha (lanjutan)

- Melakukan kegiatan penitipan dana untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (Garansi);
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- Membeli agunan melalui badan lelang, baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank Papua, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan serta sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dana pensiun yang berlaku;
- Membantu Pemerintah Daerah dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Papua dan Papua Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Daerah Tingkat II Papua dan Papua Barat;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Jaringan Kantor

Kantor pusat Bank Papua berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 5-7 Jayapura, Papua. Pada tanggal 31 Desember 2017, Bank Papua memiliki 37 (tiga puluh tujuh) kantor cabang, sebagai berikut:

1. Kantor Cabang Utama Jayapura
2. Kantor Cabang Utama Manokwari
3. Kantor Cabang Jakarta
4. Kantor Cabang Sorong
5. Kantor Cabang Merauke
6. Kantor Cabang Biak
7. Kantor Cabang Fak Fak
8. Kantor Cabang Wamena
9. Kantor Cabang Serui
10. Kantor Cabang Nabire
11. Kantor Cabang Timika
12. Kantor Cabang Sentani
13. Kantor Cabang Kaimana
14. Kantor Cabang Teminabuan
15. Kantor Cabang Bintuni
16. Kantor Cabang Sarmi
17. Kantor Cabang Arso
18. Kantor Cabang Waisai
19. Kantor Cabang Mulia
20. Kantor Cabang Enarotali
21. Kantor Cabang Agats
22. Kantor Cabang Aimas
23. Kantor Cabang Keppi
24. Kantor Cabang Karubaga
25. Kantor Cabang Waren
26. Kantor Cabang Oksibil

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Scope of Business (continued)

- *Accepting placement of funds on behalf of other party based on an agreement;*
- *Conducting placement of fund from customer to another, in form of marketable securities which is not recorded in stock exchange;*
- *Buying collateral through auction agency, either all or in part in the event the debtor does not fulfill its obligations to Bank Papua, provided that collateral is liquidated immediately purchased;*
- *Conduct activities of equity participation in banks or other companies in the field of venture, securities companies, insurance companies, clearing (settlement) companies in compliance with the terms defined by the regulator;*
- *Conduct activities to address the temporary capital due to credit failure, in condition that Bank Papua must be pull back its shares to meet the provisions stipulated by the regulator;*
- *Act as a founder of pension fund in accordance with provision on valid regulation concerning pension fund;*
- *Supporting Local Government to develop Bank Perkreditan Rakyat (Citizen Credit Bank) owned by Local Province Government (First Degree) and Local Regency Government (Second Degree) of Papua and West Papua;*
- *Other activity which is commonly done by bank as long as agree with valid regulations;*

c. Office Network

Bank Papua's head office is located at Jl. Ahmad Yani No. 5-7 Jayapura, Papua. As of December 31, 2017, Bank Papua has 37 (thirty seven) branch offices, as follows:

1. *Jayapura Main Branch Office*
2. *Manokwari Main Branch Office*
3. *Jakarta Branch Office*
4. *Sorong Branch Office*
5. *Merauke Branch Office*
6. *Biak Branch Office*
7. *Fak Fak Branch Office*
8. *Wamena Branch Office*
9. *Serui Branch Office*
10. *Nabire Branch Office*
11. *Timika Branch Office*
12. *Sentani Branch Office*
13. *Kaimana Branch Office*
14. *Teminabuan Branch Office*
15. *Bintuni Branch Office*
16. *Sarmi Branch Office*
17. *Arso Branch Office*
18. *Waisai Branch Office*
19. *Mulia Branch Office*
20. *Enarotali Branch Office*
21. *Agats Branch Office*
22. *Aimas Branch Office*
23. *Keppi Branch Office*
24. *Karubaga Branch Office*
25. *Waren Branch Office*
26. *Oksibil Branch Office*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Jaringan Kantor (lanjutan)

27. Kantor Cabang Surabaya
28. Kantor Cabang Makassar
29. Kantor Cabang Tanah Merah
30. Kantor Cabang Kasonaweja
31. Kantor Cabang Manado
32. Kantor Cabang Yogyakarta
33. Kantor Cabang Abepura
34. Kantor Cabang Ilaga
35. Kantor Cabang Waghete
36. Kantor Cabang Wasior
37. Kantor Cabang Dekai

d. Organisasi dan Struktur Manajemen

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Bank Papua pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th.
Komisaris	drh. Constant Karma
Direksi	
Direktur Utama	F. Zendrato
Direktur Bisnis	Ir. Sadar Sebayang
Direktur Keuangan	Rudhy Dharma, SE
Direktur Operasional	Isak Semuel Wopari, SE.MM
Direktur Kepatuhan	Ir. Jefri Sanni Pither Siing

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada 31 Desember 2017 didasarkan oleh:

1) Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor:06 tanggal 13 Juli 2017;
2) Surat Keputusan RUPS Nomor: 05/SK/RUPS-LB/BPD/XI/2014 tentang Pengangkatan Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
3) Surat Keputusan RUPS Nomor: 09/SK/RUPS-LB/BPD/VI/2015 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris drh. Constant Karma PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
4) Surat Keputusan RUPS Nomor: 02/SK/RUPS-BPD/III/2017 tentang Struktur Organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
5) Surat Keputusan RUPS Nomor: 03/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengangkatan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
6) Surat Keputusan RUPS Nomor: 04/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengangkatan Direktur Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
7) Surat Keputusan RUPS Nomor: 05/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
8) Surat Keputusan RUPS Nomor: 06/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengangkatan Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
9) Surat Keputusan RUPS Nomor: 07/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua;

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Office Network (continued)

27. Surabaya Branch Office
28. Makassar Branch Office
29. Tanah Merah Branch Office
30. Kasonaweja Branch Office
31. Manado Branch Office
32. Yogyakarta Branch Office
33. Abepura Branch Office
34. Ilaga Branch Office
35. Waghete Branch Office
36. Wasior Branch Office
37. Dekai Branch Office

d. Organizational and Management Stucture

The Board of Commissioners, Board of Directors and the Audit Committee of Bank Papua as of December 31, 2017 are as follows:

The Board of Commissioners	
Commissioner	Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th.
Commissioner	drh. Constant Karma
The Board of Directors	
President Director	F. Zendrato
Business Director	Ir. Sadar Sebayang
Financial Director	Rudhy Dharma, SE
Operations Director	Isak Semuel Wopari, SE.MM
Compliance Director	Ir. Jefri Sanni Pither Siing

Board of Commissioners and Board of Directors on December 31, 2017 based upon:

1) Deed General Meeting Extraordinary Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Papua No.06 dated Juli 13, 2017;
2) GMS Decree No. 05/SK/RUPS-LB/BPD/XI/2014 on the Appointment of President Commisioner of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
3) GMS Decree No. 09/SK/RUPS-LB/BPD/VI/2015 on the Appointment of drh Constant Karma as Member of the Board of Commissioners PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
4) GMS Decree No. 02/SK/RUPS-BPD/III/2017 on the Appointment of Organizational Stucture of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
5) GMS Decree No. 03/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 on Appointment of Members of the President Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
6) GMS Decree No. 04/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 on Appointment of Members of the Business Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
7) GMS Decree No. 05/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 on Appointment of Members of the Finance Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
8) GMS Decree No. 06/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 on Appointment of Members of the Operations Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
9) GMS Decree No. 07/SK/RUPSLB-BPD/III/2017 on Appointment of Members of the Compliance Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Organisasi dan Struktur Manajemen (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada 31 Desember 2017 didasarkan oleh: (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 29/DIR-BPD/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung tanggal pengangkatan sebagai berikut:

Komite Remunerasi Dan Nominasi		
Ketua	Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th.	
Anggota	drh. Constant Karma	
Anggota	Jonathan Auparay	
Komite Pemantau Risiko		
Ketua	Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th.	
Anggota	drh. Constant Karma	
Anggota	Jonathan Sesa, SE	
Anggota	Ivan B. Simamora, S. Sos	
Komite Audit		
Ketua	Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th.	
Anggota	drh. Constant Karma	
Anggota	Jonathan Sesa, SE	
Anggota	Marthin Yanis Warikar, SE	

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Bank Papua untuk per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th.	
Komisaris	drh. Constant Karma	
Direksi		
Pelaksana Tugas Direktur Utama	Sharly Andris Parrangan, SE	
Pelaksana Tugas Direktur Pemasaran	Sharly Andris Parrangan, SE	
Direktur Umum dan Operasional	Sharly Andris Parrangan, SE	
Direktur Kepatuhan	Frens Mambrisau, SE. MM	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada 31 Desember 2016 didasarkan oleh:

1) Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 22 tanggal 14 November 2014;
2) Surat Keputusan RUPS Nomor: 05/SK/RUPS-LB/BPD/XI/2014 tentang Pengangkatan Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
3) Surat Keputusan RUPS Nomor: 04/SK/RUPS-LB/BPD/XI/2012 tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
4) Surat Gubenur Nomor: 584/14340/SEI tanggal 21 November 2016 tentang Perpanjangan Masa Kerja Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
5) Surat Keputusan RUPS Nomor: 06/SK/RUPS-LB/BPD/VIII/2013 tentang Pengangkatan Direktur Umum dan Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
6) Surat Keputusan RUPS Nomor: 09/SK/RUPS-LB/BPD/V/2016 tentang Penunjukan Sdr. Sharly Andris Parrangan, SE sebagai Direktur Utama dan Pelaksana tugas Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
7) Surat Keputusan RUPS Nomor: 09/SK/RUPS-LB/BPD/VI/2015 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris drh. Constant Karma PT Bank Pembangunan Daerah Papua;

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Organizational and Management Stucture (continued)

Board of Commissioners and Board of Directors on December 31, 2017 based upon: (continued)

Based on the Decree of Directors No. 29/DIR-BPD/VI/2017 dated June 12, 2017 concerning Appointment of Member of Board of Commissioner Committee of the PT Bank Pembangunan Daerah Papua for a term of 3 (three) years from the date of appointment as follows:

Remuneration and Nomination Committee		
Chairman	Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th.	
Member	drh. Constant Karma	
Member	Jonathan Auparay	
Risk Monitoring Committee		
Chairman	Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th.	
Member	drh. Constant Karma	
Member	Jonathan Sesa, SE	
Member	Ivan B. Simamora, S. Sos	
Audit Committee		
Chairman	Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th.	
Member	drh. Constant Karma	
Member	Jonathan Sesa, SE	
Member	Marthin Yanis Warikar, SE	

The Board of Commissioners, Board of Directors and the Audit Committee of Bank Papua as of December 31, 2016 as follows:

The Board of Commissioners		
President Commissioner	Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th.	
Commissioner	drh. Constant Karma	
The Board of Directors		
Acting as President Director	Sharly Andris Parrangan, SE	
Acting as Marketing Director	Sharly Andris Parrangan, SE	
General and Operations Director	Sharly Andris Parrangan, SE	
Compliance Director	Frens Mambrisau, SE. MM	

Board of Commissioners and Board of Directors on December 31, 2016 based upon:

1) *Deed General Meeting Extraordinary Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Papua No. 22 dated November 14, 2014;*
2) *GMS Decree No. 05/SK/RUPS-LB/BPD/XI/2014 on the Appointment of President Commisioner of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;*
3) *GMS Decree No. 04/SK/RUPS-LB/BPD/XI/2012 on Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;*
4) *Governor Decree No. 584/14340/SEI on November 21, 2016 on The Working Period Extension of Compliance Director of PT Pembangunan Daerah Papua*
5) *GMS Decree No. 06/SK/RUPS-LB/BPD/VIII/2013 on the Appointment Operations General Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;*
6) *GMS Decree No. 9/SK/RUPS-LB/BPD/V/2016 on the Appointment of Sharly Andris Parrangan, SE as Acting official of president Director and Acting official of Marketing Director of PT Bank Pembangunan Daerah Papua;*
7) *GMS Decree No. 09/SK/RUPS-LB/BPD/VI/2015 on the Appointment of drh Constant Karma as Member of the Board of Commissioners PT Bank Pembangunan Daerah Papua;*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Organisasi dan Struktur Manajemen (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada 31 Desember 2017 didasarkan oleh: (lanjutan)

8) Surat dari Komisaris Utama Kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat Nomor: 54/DK-BPD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Masa Jabatan Dewan Komisaris Sdr. Frans Wanggai dan Sdr. George M. Satya Berakhir tanggal 21 Agustus 2016.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 01.A/DIR-BPD/I/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pengangkatan Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Masa jabatan Komite Dewan Komisaris yang bukan berasal dari Anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Bank adalah paling lama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal pengangkatan. Masa jabatan Anggota Komite Dewan Komisaris yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Organizational and Management Stucture (continued)

Board of Commissioners and Board of Directors on December 31, 2017 based upon: (continued)

8) President Commissioner Decree to Financial Service Authority (OJK) of Papua and West Papua Province No.54/DK-BPD/2016 on August 29, 2016 on Tenure Period of the Board of Commissioner Sdr. Frans Wanggai and George M. Satya which ended on August 21, 2016.

Based on the Decree of the Board of Directors No. 01.A/DIRBPD/I/2014 dated January 2, 2014 on the Appointment Committee of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Papua. The tenure of Committee of the Board of Commissioners who was not come from the Members of The Board of Commissioners and Bank Official is at most 3 three) years from appointment's date. The tenure of Members of The Board of Commissioners will be automatically ended simultaneously with the end of tenure as a Member of the Board of Commissioners.

Komite Remunerasi Dan Nominasi		***Remuneration and Nomination Committee***
Ketua	-	*Chairman*
Anggota	drh. Constant Karma	*Member*
Anggota	Pdt. Lipiyus Biniluk, Mth.	*Member*
Anggota	Abraham Krey	*Member*
Komite Pemantau Risiko		***Risk Monitoring Committee***
Ketua	-	*Chairman*
Anggota	drh. Constant Karma	*Member*
Anggota	Pdt. Lipiyus Biniluk, Mth.	*Member*
Anggota	Drs. Anthon Tangaguling, MM	*Member*
Anggota	Bambang Setyowanto, B.Sc	*Member*
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	-	*Chairman*
Anggota	drh. Constant Karma	*Member*
Anggota	Pdt. Lipiyus Biniluk, Mth.	*Member*
Anggota	Drs. Anthon Tangaguling, MM	*Member*
Anggota	Drs. Bachrum Harahap, MM	*Member*

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua Sdr. Prof. Dr. Ir. Frans Wanggai dan Sdr. George Menasye Satya, MSc., PhD. Tanggal 21 Agustus 2016, maka masa jabatan Anggota Komite Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

Based on the end of tenure of Member of the Board of Commissioners i.e Prof. Dr. Ir. Frans Wanggai and Sdr. George Menasye Satya, MSc., PhD. On August 21, 2016, the tenure of Members of Committee of The Board of Commissioners will be automatically ended simultaneously with the end of tenure as a Member of the Board of Commissioners.

Dengan berakhirnya masa jabatan Komite Dewan Komisaris yang bukan berasal dari Anggota Komite Dewan Komisaris dan Pejabat Bank Tanggal 02 Januari 2017 dengan Surat No. 02/DK-BPD/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang disampaikan kepada Direksi Bank Papua tentang Perpanjangan Masa Tugas Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua sampai adanya Anggota Komite Dewan Komisaris yang definitif.

By the tenure of Committee of the Board of Commissioners who was not come from the Members of Committee of The Board of Commissioners and Bank Official on January 2, 2017 with Decree No. 02/DK-BPD/2017 on January 18, 2017, which have submitted to the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Papua about an extension of the task of the Members of Committee of The Board of Commissioners PT Bank Pembangunan Daerah Papua until the existence of the definitive Members of Committee of the Board of Commissioners.

Bank Papua melakukan penyempurnaan struktur organisasi dan uraian jabatan yang dituangkan pada SK Direksi No. 11.1/DIR-BPD/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang menggantikan SK Direksi No. 68/DIR-BPD/IX/2015 tanggal 30 September 2015.

Bank Papua perfecting organizational structure and job descriptions set forth in Directors Decree No. 11.1/DIR-BPD/III/2017 dated April 29, 2017 according The Structure and Function Description PT Bank Pembangunan Daerah Papua which replaces Directors Decree No. 68/DIR-BPD/IX/2015 dated September 30, 2015.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Organisasi dan Struktur Manajemen (lanjutan)

Susunan pengurus Dewan Komisaris dan Direksi telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK", dahulu Bank Indonesia).

Jumlah pegawai Bank Papua adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

	Tetap/ *Permanent*	Tidak tetap/ *Non-Permanent*	Total	
2017	2343	189	2,532	*2017*
2016	2426	237	2,663	*2016*

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Organizational and Management Stucture (continued)

The members and composition of the Board of Commissioners and Directors were already approved by Otoritas Jasa Keuangan ("OJK", priviously Bank Indonesia).

The number of employees of Bank Papua are as follows (unaudited):

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan Bank Papua ini diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 28 Pebuari 2018.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan secara konsisten kecuali sebagaimana yang dijelaskan oleh Bank Papua dalam penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, sebagai berikut:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan disajikan dengan menggunakan praktek yang lazim berlaku dalam industri perbankan serta pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan Indonesia, juga standar akuntansi dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan konsep harga perolehan, yang dimodifikasi oleh aset keuangan tersedia untuk dijual dan aset dan liabilitas keuangan (termasuk instrumen derivatif) yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, serta disusun dengan dasar akrual.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dalam Rupiah penuh.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The financial statements of Bank Papua were completed and authorised for issuance by the Board of Directors on Febuary 28, 2018.

The principal accounting policies adopted and consistently applied by Bank Papua, except as explained below, in the presentation of the financial statements for the years ended December 31, 2017 and 2016 are set out below:

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements for the years ended December 31, 2017 and 2016 were prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (FAS) issued by the Indonesian Institute of Accountants.

The financial statements have been prepared in accordance with prevailing banking industry practices and accounting and reporting guidelines prescribed by the Indonesian banking regulatory authority, as well as accounting standards and Accounting Guidelines for Indonesian Banking Sector (PAPI) issued by the Indonesian Institute of Accountants.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, as except available-for-sale financial assets, and financial assets and liabilites (including derivative instruments) at fair value through profit or loss, and under the accrual basis of accounting.

The cash flows statement were prepared by direct method whereby cash flow classified into operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents classification consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks, placements with other bank and Certificates of Bank Indonesia maturing within three months from the date of acquisition, provided that they are not being pledged as collateral for borrowings nor restricted.

Currency used for this report in this financial statements is the Indonesia Rupiah (Rp). All figures presented in the financial statements, unless otherwise stated specifically, are full in Rupiah amount.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2017, Bank menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan ("PSAK") dan interpretasi standar akuntansi keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing - masing standar dan interpretasi.

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

1) Amandemen PSAK No. 3, Penyajian Laporan Keuangan tentang Laporan Keuangan Interim;
2) PSAK 24: Imbalan Kerja (Penyesuaian 2016);
3) PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan (Penyesuaian 2016);
4) PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan Penyesuaian 2016);

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank Papua melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Penerapan PSAK yang direvisi tersebut memberikan pengaruh terhadap pengungkapan terkait dalam laporan keuangan Bank Papua.

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank Papua jika:

a. suatu pihak yang secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank Papua; (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Bank Papua; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank Papua;

b. suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank Papua;

c. suatu pihak yang merupakan ventura bersama di mana Bank Papua sebagai *venturer*;

d. suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank Papua;

e. suatu pihak adalah anggota keluarga dekat individu yang diuraikan dalam huruf (a) atau (d);

f. suatu pihak dalam entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam huruf (a) atau (e);

g. suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank Papua atau entitas terkait Bank Papua.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards

On 1 January 2017, the Bank adopted new and revised statements of financial accounting standards ("SFAS") and interpretations of statements of financial accounting standards ("ISFAS") that are mandatory for application from that date. Changes to the accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

The adoption of these new and revised standards and interpretation did not result in substansial changes to Bank's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years:

1) Amendments to SFAS No. 3, Presentation of Financial Statements regarding Interim Financial Report.
2) SFAS 24: Employee Benefits (Improvement 2016).
3) SFAS 58: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operation (Improvement 2016).
4) SFAS 60: Financial Instrument - Disclosure (Improvement 2016).

c. Transaction with Related Parties

In the normal course of its business, Bank Papua implemented the changes on SFAS No. 7 "Related Party Disclosure". This revised SFAS requires the disclosures of related party relationship, transaction and balance with related parties, including commitments, in the financial statements.

Implementation of the revised SFAS has a impact to the related disclosure in the financial statements of Bank Papua.

The Bank Papua consider the following as their related parties:

a. a person who, directly or indirectly through one or more intermediaries, (i) controls, or controlled by, under common control with Bank Papua, (ii) has significant influence over Bank Papua, or (iii) has joint control over Bank Papua;

b. an entity which is a member of the same group as Bank Papua;

c. an entity which is a joint ventures of a third party in which Bank Papua have ventured in;

d. a member of key management personel of Bank Papua;

e. a close family member of the person described in clause (a) or (d);

f. an entity which is controlled, jointly controlled or significantly influenced, directly or indirectly by the person described in clause (a) or (e);

g. an entity which is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either Bank Papua or an entity related to Bank Papua.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank Papua jika: (lanjutan)

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 33 atas laporan keuangan.

d. Aset dan Liabilitas keuangan

Aset keuangan Bank Papua terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat-surat berharga, efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali, kredit yang diberikan, dan aset lain-lain (piutang lain-lain dan piutang bunga).

Liabilitas keuangan Bank Papua terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, pinjaman yang diterima, dan liabilitas lain-lain.

(i) Klasifikasi

Bank Papua mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan;
- Kredit yang diberikan dan piutang;
- Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo; dan
- Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan amortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Transaction with Related Parties (continued)

The Bank Papua consider the following as their related parties: (continued)

This transaction is made on the basis of terms agreed by both parties, where such terms are not the same as other transactions which may be undertaken with unrelated parties.

All material transactions and balances with the related parties are disclosed in the notes to financial statements those that relevant and its the detail are presented in Note 33 of the financial statements.

d. Financial Assets and Liabilities

Bank Papua's financial assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with other banks and Bank Indonesia, marketable securities, securities purchased under repo agreement, loans, and other assets (other receivables and interest receivables).

Bank Papua's financial liabilities consist of current liabilities, deposits from customers, deposits from other banks, borrowings from others, and other liabilities.

(i) Classification

Bank Papua classified its financial assets in the following categories on initial recognition:

- *Financial assets measured at fair value based on comprehensive income, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. financial assets designated as such upon initial recognition and financial assets as being held for trading purposes;*
- *Loans and receivables;*
- *Held-to-maturity investments; and*
- *Available-for-sale financial assets.*

Financial liabilities are classified into the following categories on initial recognition:

- *Financial liabilities which recognized at Fair Value based on comprehensive income, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. financial liabilities designated as such upon initial recognition and those classified as held-for-trading;*
- *Financial liabilities measured at amortized cost.*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Kelompok aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari aset dan liabilitas keuangan yang diperoleh atau dimiliki Bank Papua terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Bank Papua untuk segera dijual dalam waktu dekat yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Bank Papua mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Aset Keuangan dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Bank Papua mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Investasi yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini.

Aset keuangan tersedia untuk dijual

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non derivatif yang ditentukan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai salah satu dari kategori aset keuangan lain. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi komprehensif (yang merupakan bagian dari ekuitas) sampai dengan aset keuangan dihentikan pengakuannya atau sampai aset keuangan dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi.

Pendapatan bunga dihitung menggunakan suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat dari perubahan nilai tukar dari instrumen utang diakui pada laporan laba rugi. Untukinstrumen ekuitas, keuntungan atau kerugian yang timbul dan perubahan nilai tukar diakui pada laba rugi komprehensif (yang merupakan bagian dari ekuitas).

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Financial assets and liabilities at fair value through profit or loss

The sub-classification of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss consist of financial assets and liabilities that Bank Papua acquires or incurs principally for the purpose of selling or repurchasing in the near term, or holds as part of a portfolio that is managed together for short-term profit or position taking.

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- *those that Bank Papua intends to sell immediately or in the short term which are classified as held for trading, and those that initial recognition designates are measured at fair value based on income;*
- *those that Bank Papua upon initial recognition designates as available-for-sale investments; or*
- *those for which Bank Papua may not recover substantially all of its initial investment, other than because of loans and receivables had its value have declined, which shall be classified as available-for-trading.*

Held-to-maturity financial assets

Held-to-maturity investments consists of quoted non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity which Bank Papua has the positive intent and ability to hold until maturity. Investments intended to be held for an undetermined period are not included in this classification.

Available-for-sale-financial assets

The available-for-sale category consists of non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in one of the other categories of financial assets. After initial recognition, available-for-sale financial assets are measured at fair value with gains or losses being recognized in other comprehensive income (as part of equity) until the financial assets is derecognized or until the financial assets is determined to be impaired at which time the cumulative gain or loss previously reported in equity is included in the profit or loss.

Interest income is calculated using the effective interest rate and gains or losses arising from changes in exchange rate from debt instruments are recognized in the profit or loss. For equity instruments, gains and losses arising from change in exchange rate are recognized in other comprehensive income (as part of equity).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Liabilitas keuangan lain

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif saat pengakuan liabilitas.

Bank Papua menentukan klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

(ii) Pengakuan awal

a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu pada tanggal Bank Papua berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Bank Papua, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif (opsi nilai wajar). Selanjutnya, penetapan ini dapat diubah menjadi pinjaman yang diberikan dan piutang apabila memenuhi ketentuan sebagai pinjaman yang diberikan serta terdapat intensi dan kemampuan memiliki untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo. Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut:

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Other financial liabilities

Other financial liabilities are the financial liabilities that are not held for trading nor designated at fair value based on comprehensive income upon the liability recognition.

Bank Papua determines the classification of its financial assets and liabilities at initial recognition.

(ii) Initial recognition

a. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market (regular way purchases) are recognized on the settlement date, i.e., the date that Bank Papua commit to purchase or sell the assets.

b. Financial assets and financial liabilities are initially recognized at fair value. For those financial assets or financial liabilities not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added/deducted with directly attributable transaction costs to the issuance of financial assets or liabilities.

Transaction costs only include costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and an additional charge that would not occur if the instrument is not acquired or issued. For financial assets, transaction costs are added to the amount recognized in the initial recognition of the asset, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized on initial recognition of a liability. The transaction costs are amortized over the terms of the instrument based on the effective interest rate method and recorded as part of interest income for transaction costs related to the financial asset or as part of interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

Bank Papua, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value based on the profit or loss (fair value option). Subsequently, this designation can be changed into loans and receivables if hey meet the terms of the loans and there is intention and ability to hold for the foreseeable future or until maturity. The fair value option is only applied when the following conditions are met:

- *the application of the fair value option reduces or eliminates inconsistency valuation and recognition or accounting mismatch that would otherwise arise; or*
- *the financial assets and liabilities are part of the financial instruments portfolio whereby its the risks are managed and reported to key management based on the fair value basis; or*
- *the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcaled, but unable to measure the embedded derivative separately.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas keuangan (lanjutan)

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

a. Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

b. Kredit yang diberikan dan piutang serta Investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Bank mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (pass through arrangement); dan
- (a) Bank Papua telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Bank Papua tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Bank Papua telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau di bawah kesepakatan pelepasan (*pass-through arrangement*) dan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Bank Papua yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal antara Bank Papua dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi komprehensif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(iii) Subsequent measurement

a. Financial assets under classification of available-for-sale and financial assets and liabilities recognized at fair value through profit and loss are subsequently measured at its fair value.

b. Loans and receivables and held-tomaturity investments and other financial liabilities which are measured at amortized cost, are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Derecognition

a. Financial assets are derecognized when:
- *The contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or*
- *The Bank has transferred its rights to receive cash flows from the financial assets or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass through arrangement'; and*
- *Either (a) Bank Papua has transferred substantially all the risks and rewards of the assets, or (b) Bank Papua has neither transferred nor retained substantially all the risks and substantially all the risks and reward of the asset, but has transferred control of the asset.*

When Bank Papua has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of Bank Papua continuing involvement on the asset.

Loans or other financial assets are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between Bank Papua and the borrowers has ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses. Subsequent recoveries from loans previously written off, are added to the allowance for impairment losses account in the statement of financial position, if recovered in the current year and are recognized in the statements of comprehensive income as other operating income, if recovered after the statement of financial position date.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan suku bunga efektif.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laba rugi komprehensif.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam ekuitas, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

Bank Papua tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Bank sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Bank Papua tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dimana:

a. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali dimana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(iv) Discontinue of recognition (continued)

b. Financial liabilities are derecognized when they are extinguished, i.e. liabilities stated in the contract are released or cancelled or have expired.

Where an existing financial liability is replaced by another instrument from the same lender at a substantially different conditions, or at the condition of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference resulted from such an arrangement are recognized in the statements of comprehensive income respectively.

(v) Income and expense recognition

a. Interest income and expense on available-for-sale assets and financial assets and liabilities measured at amortized cost are recognised in the consolidated statement of comprehensive income using the effective interest method.

b. Unrealized gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are included in the statement of comprehensive income.

Unrealized gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are included in the statement of comprehensive income.

Unrealized gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are included in the statement of comprehensive income.

(vi) Reclassification of financial assets

Bank Papua tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Bank sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Bank Papua cannot classify any financial assets as held-to-maturity investments, if the entity has, during the current financial year or during the 2 (two) preceding financial years, sold or reclassified a significant amount of held-to-maturity investments before maturity (more than an insignificant in relation to the total amount of held-to-maturity invesments) other than sales or reclassifications that:

a. are so close to maturity or to the repurchase date of financial assets whereby changes on the rate of interest would not have a significant effect on the financial asset's fair value;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas keuangan (lanjutan)

(vi) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

b. terjadi setelah Bank Papua telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Bank Papua telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau

c. terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Bank Papua, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Bank Papua.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui sebagai laba/rugi tahun berjalan.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Bank Papua memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar *(arm's length transaction)* pada tanggal pengukuran.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(vi) Reclassification of financial assets (continued)

b. occur after Bank Papua has collected substantially all of the original principal of the financial assets according to the scheduled payments or Bank Papua has recieved early repayments; or

c. are attributable to an isolated event that is beyond Bank Papua's control, is non-recurring and could not have been reasonably anticipated by Bank Papua.

Reclassification of financial assets from held-to-maturity to available-for-sale category is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reported in equity and are amortized using effective interest method over the remaining life of the financial asset and at which time the accumulative gain or loss previously recognized in equity shall be recognized as current year profit/loss.

Reclassification of financial assets from available-for-sale to held-to-maturity classification are recorded at carrying amount. The unrealized gains or losses are amortised by using effective interest rate up to the maturity date of that instrument.

(vii) Offsetting

Financial assets and liabilities are offsetting to each other and the net amount is presented in the financial statement when, and only when, Bank Papua have a legal right to offset on the recognized amounts and there is an intention either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the Financial Accounting Standards.

(viii) Amortized cost measurement

The amortization cost of a financial asset or a financial liability is the amount of the financial asset or liability valued at initial recognition less principal repayments, added or deducted by the cumulative amortization using the effective interest rate method calculated by the difference between the initial recognized value with the maturity value, and deducted by impaired value.

(ix) Fair value measurement

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction on the measurement date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar. Nilai wajar dapat diperoleh dari *Interdealer Market Association* (IDMA) atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh *broker (quoted price)* dari *Bloomberg* atau *Reuters* pada tanggal pengukuran.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Bank menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

Bank menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen yang lebih kompleks, Bank menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar *overthe-counter, unlisted debt securities* (termasuk surat utang dengan derivatif melekat) dan instrumen utang lainnya yang pasarnya tidak aktif.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Hasil dari suatu teknik penilaian merupakan sebuah estimasi atau perkiraan dari suatu nilai yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan teknik penilaian yang digunakan mungkin tidak dapat menggambarkan seluruh faktor yang relevan atas posisi yang dimiliki Bank. Dengan demikian, penilaian disesuaikan dengan faktor tambahan seperti model *risk*, risiko likuiditas dan risiko kredit *counterparty*. Berdasarkan kebijakan teknik penilaian nilai wajar, pengendalian dan prosedur yang diterapkan, manajemen berkeyakinan bahwa penyesuaian atas penilaian tersebut di atas diperlukan dan dianggap tepat untuk menyajikan secara wajar nilai dari instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Data harga dan parameter yang digunakan didalam prosedur pengukuran pada umumnya telah direviu dan disesuaikan jika diperlukan, khususnya untuk perkembangan atas pasar terkini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(ix) Fair value measurement (continued)

When available, the Bank measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. The fair value can be obtained from IDMA's (Interdealer Market Association) quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg or Reuters on the measurement date.

If a market for a financial instrument is not active, the Bank establishes fair value using a valuation technique.

The Bank uses widely recognized valuation models for determining fair values of financial instruments of lower complexity, such as exchange value options and currency swaps. For these financial instruments, inputs into models are generally market-observable.

For more complex instruments, the Bank uses internally developed models, which are usually based on valuation methods and techniques generally recognized as standard within the industry. Valuation models are used primarily to value derivatives transacted in the over-thecounter market, unlisted debt securities (including those with embedded derivatives) and other debt instruments for which markets were or have become illiquid.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the fair value of another instrument which substantially has the same characteristics or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

The output of a valuation technique is an estimation or approximation of a value that cannot be determined with certainty, and the valuation technique employed may not fully reflect all factors relevant to the positions that the Bank holds. Valuations are therefore adjusted, with additional factors such as model risk, liquidity risk and counterparty credit risk. Based on the established fair value valuation technique policy, related controls and procedures applied, management believes that these valuation adjustments are necessary and considered appropriate to fairly state the values of financial instruments measured at fair value in the statement of financial position. Price data and parameters used in the measurement procedures applied are generally reviewed and adjusted, if necessary, particularly in view of the current market developments.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity* instruments tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan sebagai berikut:

a. Tingkat 1: Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

b. Tingkat 2: Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai suatu harga) atau secara tidak langsung (sebagai turunan dari harga).

c. Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
b. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
c. pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
d. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(ix) Fair value measurement (continued)

In cases when the fair value of unlisted equity instruments cannot be determined reliably, the instruments are carried at cost less impairment value. The fair value for loans and receivables as well as liabilities to banks and customers are determined using a present value model on the basis of contractually agreed cash flows, taking into account credit quality, liquidity and costs.

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on following level:

a. Level 1: Quted price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

b. Level 2: inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price).

c. Level 3: input for asset or liabilities based on unobservable inputs for the asset or liability.

(x) Allowance for impairment losses on Financial assets

At each consolidated statement of financial position date, the Bank assesses whether there is objective evidence that financial assets not carried at fair value through profit or loss are impaired. Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition of the asset, and that the loss event has an impact on the future cash flows on the asset that can be estimated reliably.

The criterias used by the bank to determine that there is objective evidence of impairment include:

a. significant financial difficulty of the issuer or obligor;

b. a breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
c. the lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;

d. it becomes probable that the borrower will enter into bankruptcy or other financial reorganisation;

e. the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:

1) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
2) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 sampai 12 bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah aset keuangan signifikan secara individual. Apabila aset keuangan signifikan secara individual, maka Bank akan menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

a) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Perhitungan penurunan nilai secara individual

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1) Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai; atau
2) Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk: (a) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; atau (b) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah yang direstrukturisasi.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(x) Allowance for impairment losses on Financial assets (continued)

f. observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease has yet been identified individually in the portfolio, including:

1) adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
2) national or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

The estimated period between the occurrence of the event and identification of loss is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 to 12 months, for exceptional cases, longer periods are needed.

The Bank first assesses whether the financial asset is individually significant. If the financial asset considered individually significant, the Bank will determines whether there is an objective evidence of individual impairment exist or not. If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for anindividually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

a) Financial assets carried at amortised cost

Individual impairment calculation

The Bank determines that loans should be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criterias is met:

1) Loans which individually have significant value and objective evidence of impairment; or
2) Restructured loans which individually have significant value.

Based on the above criterias, the Bank performs individual assessment for: (a) Corporate and middle loans which collectibility classified as substandard, doubtful and loss; or (b) Restructured corporate and middle loans.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

a) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara individual (lanjutan)

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tanpa memperhitungkan kerugian penurunan nilai dimasa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Jika persyaratan pinjaman yang diberikan, piutang atau efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
2. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai; atau
3. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, penilaian secara kolektif dilakukan untuk: (a) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus serta tidak direstrukturisasi; atau (b) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar usaha kecil dan konsumen.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(x) Allowance for impairment losses on Financial assets (continued)

a) Financial assets carried at amortised cost (continued)

Individual impairment calculation (continued)

The amount of impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment loss account and the amount of the loss is recognised in the profit or loss. If a loan or held-to-maturity financial assets has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.

If the terms of the loans, receivables or held-to-maturity marketable securities are renegotiated or otherwise modified because of financial difficulties of the borrower or issuer, impairment is measured using the original effective interest rate before the modification of terms.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralised financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

Collective impairment calculation

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criterias is met:

1. *Loans which individually have insignificant value;*
2. *Loans which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment; or*
3. *Restructured loans which individually have insignificant value.*

Based on the above criterias, the Bank performs collective assessment for: (a) Corporate and middle loans which collectibility classified as current and special mention, and have never been restructured; or (b) Retail and consumer loans.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

a) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis. Pengalaman kerugian historis disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini. Pinjaman yang diberikan dikelompokan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi dan tunggakan debitur.

Bank menggunakan metode analisis model statistik *migration analysis method* untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai.

Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Kredit bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan; atau
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

Sebagai panduan praktis, Bank dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(x) Allowance for impairment losses on Financial assets (continued)

a) Financial assets carried at amortised cost (continued)

Collective impairment calculation (continued)

Calculation of allowance for impairment losses on loans are collectively evaluated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Bank and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist. Financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the segmentation and past due status of the debtors, among others.

The Bank applies statistical model analysis method which is migration analysis to assess the allowance for impairment losses.

The Bank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flow if one of the following conditions is met:

1. *Loans are collateral dependent, i.e. if the source of loans repayment is only from the collateral; or*
2. *Foreclosure of collateral is most likely to occur and supported by legally binding collateral agreement.*

As a practical guideline, the Bank may measure impairment on the basis of an instrument's fair value using an observable market price. Losses are recognized in the profit or loss and reflected in an allowance for impairment losses account against financial assets carried at amortised cost. Interest income on the impaired financial assets continues to be recognized using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss.

When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss previously recognized is reversed through profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

b) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Dalam hal instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar investasi, di bawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian nilai pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan diakui pada periode terjadinya.

Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi atas investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual tidak dapat dibalik melalui laba

c) Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Bank Indonesia (OJK), Bank menerapkan Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang "Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum" yang berlaku sampai dengan 21 Agustus 2017.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(x) Allowance for impairment losses on Financial assets (continued)

b) Financial assets classified as available-for–sale

For financial assets classified as available-for-sale, the Bank assesses at each statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset or a Bank of financial assets is impaired.

In the case of equity instruments classified as available-for-sale financial assets, a significant or prolonged decline in the fair value of the investment below its cost is an objective evidence of impairment resulting in the recognition of an impairment loss. Impairment losses on available-for-sale marketable securities are recognized by transferring the cumulative loss that has been recognized directly in equity to the statement of profit or loss and other comprehensive income.

If in a subsequent period, the fair value of debt instrument classified as available-for-sale securities increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in consolidated profit or loss and other comprehensive income, the impairment loss is reversed and recognized in the period it occurred.

Impairment losses recognised in profit or loss for an investment in an equity instrument classified as available - for - sale shall not be reversed through profit or loss.

c) Recoveries of written-off financial assets

When a loan is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

In compliance with Bank Indonesia (OJK),Bank implements Bank Indonesia Regulation No.14/15/PBI/2012 dated 24 October 2012 about "Assessment of Commercial Banks' Asset Quality" and Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.11/POJK.03/2015 dated 21 August 2015 on "Prudential Provisions in relation to the National Economic Stimulus for Commercial Banks" which is valid until 21 August 2017.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Giro pada bank lain dan Bank Indonesia

Giro pada bank lain dan Bank Indonesia dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Giro pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan masing-masing sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

f. Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia

Penempatan pada bank lain terdiri dari *Deposito On Call (DOC)*, *Interbank Call Money (ICM)*, dan Deposito Berjangka. Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI).

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

g. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah

Efek -efek yang dimiliki terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi pemerintah, reksadana, dan obligasi lainnya yang diperdagangkan di bursa efek.

Surat pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal, surat berharga dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu tersedia untuk dijual, dimiliki hingga jatuh tempo atau nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Pengukuran Efek - efek dinyatakan berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut:

1. Efek - efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Bank Papua tidak mengklasifikasikan surat-surat berharga sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya Bank Papua telah menjual atau mereklasifikasi surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan (*more than insignificant*) sebelum jatuh tempo selain penjualan atau reklasifikasi yang telah dijelaskan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2011) yang dapat diaplikasikan dalam periode yang relevan.

   Penurunan yang signifikan atau jangka panjang atas nilai wajar surat-surat berharga untuk dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual dibebankan pada operasi tahun berjalan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Current accounts with other banks and Bank Indonesia

Current accounts with other banks and Bank Indonesia are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses. The current accounts with other banks and Bank Indonesia are classified as loans and receivables.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

f. Placements with other banks and Bank Indonesia

Placements with other banks consist of Deposito On Call (DOC), Interbank Call Money (ICM), and Time Deposit. Placements with Bank Indonesia consist of Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI).

Placements with other banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses. Placements with other banks and Bank Indonesia are classified as loans and receivables.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

g. Marketable securities and Government bonds

Marketable securities consist of Certificates of Bank Indonesia, government bonds, mutual funds, and bonds traded on the stock exchange.

Marketable securities are initially measured at fair value. Subsequently, marketable securities are accounted for depending on their classification as available-for-sale, held-to-maturity or fair value through profit or loss.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

Measurement of marketable securities is stated based on the classification of the securities as follows:

1. *Held-to-maturity marketable securities and Government Bonds are carried at amortized cost using the effective interest method. Bank Papua does not classify marketable securities or Government Bonds as held-to-maturity financial assets if Bank Papua has, during the current financial year or during the two preceding financial years, sold or reclassified more than an insignificant amount of held-to-maturity marketable securities or Government Bonds before maturity other than sale or reclassifications that are defined in SFAF No. 55 (Revised 2011).*

   Any significant or prolonged decline in the fair value of securities classified as held-to-maturity and available-for-sale is charged to profit and loss in the current year.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

g. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (lanjutan)

2. Surat-surat berharga dalam kategori nilai wajar melalui laporan laba rugi dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Pendapatan bunga dari surat-surat berharga dicatat dalam laporan laba rugi sesuai dengan persyaratan dalam kontrak.

   Atas penjualan portofolio surat-surat berharga untuk nilai wajar melalui laporan laba rugi, perbedaan antara harga jual dengan nilai pasar wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada tahun dimana surat-surat berharga tersebut dijual.

   Bank Papua melakukan pengukuran apabila terdapat indikasi penurunan nilai dengan menggunakan metodologi penurunan nilai.

   Untuk surat-surat berharga yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang teroganisir, nilai wajar tersebut umumnya ditentukan dengan mengacu pada harga penawaran pasar yang terjadi di bursa efek pada tanggal terdekat dengan tanggal laporan posisi keuangan, kemudian disesuaikan dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Untuk surat-surat berharga yang tidak mempunyai harga penawaran pasar, estimasi atas nilai wajar surat-surat berharga ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih surat-surat berharga tersebut. Bank Papua menggunakan harga penawaran pasar yang terjadi di bursa efek pada tanggal yang terdekat dengan tanggal pelaporan sebagai nilai wajar.

   Penurunan nilai wajar permanen atas surat-surat berharga untuk dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif periode berjalan.

   Surat berharga yang dipindahkan dari kelompok diperdagangkan ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada tanggal reklasifikasi telah tercatat sebagai penghasilan atau beban dan oleh karena itu tidak boleh dihapus. Untuk surat berharga yang dipindahkan dari kelompok nilai wajar melalui laporan laba rugi, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada tanggal pemindahan diakui sebagai penghasilan atau beban.

   Pemindahan surat berharga dari kelompok nilai wajar melalui laporan laba rugi ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat berdasarkan nilai wajar pada tanggal pemindahan, yang menjadi biaya amortisasi baru.

3. Surat-surat berharga yang diklasifikasikan sebagai investasi tersedia untuk dijual dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

   Perubahan nilai wajar lainnya diakui secara langsung dalam ekuitas sampai dengan surat-surat berharga tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Marketable securities and Government bonds (cotinued)

2. Fair value through profit or loss marketable securities are carried at fair value. Unrealized gains or losses resulting from changes in fair values are recognized in the current year statements of comprehensive income. The interest income from marketable securities is recorded in the statements of comprehensive income according to the terms of the contract.

Upon sale of portfolio of their value through profit or loss marketable securities, the difference between the selling price and the fair value is recognized as a gain or loss in the year when the marketable securities are sold.

Bank Papua assess if there is an indication of impairment using the impairment methodology.

For marketable securities that are actively traded in organized financial markets, fair value is generally determined by reference to quoted market bid prices by the stock exchanges at the date, adjusted for transaction costs necessary to realize the assets. For marketable securities where there is no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which is substantially the same or is calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of securities. Bank Papua used quoted market prices by the stock exchange at the date close to the reporting date as their fair value.

Any permanent decline in the fair value of securities held-to-maturity and available-for-sale is charged to the statements of comprehensive income in the period incurred.

For securities reclassified from the held-to-trading category to held-to-maturity category, unrealized gains or losses on the date of the reclassification have been recorded as income or expense and therefore shall not be reversed. For securities reclassified from the held-to-maturity category to fair value through profit or loss category, unrealized gains or losses on the date of the reclassification are recorded as income or expense.

The reclassification of marketable securities from fair value through profit or loss category to held-to-maturity category is recorded at fair value at the reclassification date, which becomes the new amortised cost.

3. Marketable securities classified as available-for-sale investment are stated at fair value. Interest income is recognized in the statements of income using the effective interest method. Foreign exchange gains or losses on available-for-sale on marketable securities and Government Bonds are recognized in the statements of comprehensive income.

Other fair value changes are recognized directly in equity until these marketable securities are sold or experiencing impairment, whereby the cumulative gains and losses previously recognized in equity must be recognized in the statements of comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Efek - efek yang dibeli dengan Janji dijual Kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali di masa tertentu di masa yang akan datang tidak diakui pada laporan posisi keuangan. Kas yang dibayarkan, termasuk bunga yang belum diamortisasi dicatat pada laporan keuangan dalam "Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali", yang menggambarkan substansi ekonomi transaksi sebagai pinjaman yang diberikan oleh Bank. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diamortisasi selama jangka waktu perjanjian menggunakan metode suku bunga efektif dan dicatat pada "Pendapatan bunga neto".

Jika kemudian efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dijual kepada pihak ketiga, maka kewajiban untuk mengembalikan surat berharga tersebut dicatat sebagai short sale dalam "Liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan", dan diukur pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang ada dimasukkan dalam "Pendapatan trading bersih".

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali (*Reverse Repo*) diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

i. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang dan bunganya setelah jangka waktu tertentu, dan tagihan yang berasal dari transaksi perdagangan yang telah jatuh tempo yang belum diselesaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari.

Pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pinjaman sindikasi dan pinjaman penerusan dicatat sesuai dengan porsi pinjaman yang risikonya ditanggung oleh Bank.

Restrukturisasi pinjaman yang diberikan

Restrukturisasi pinjaman yang diberikan meliputi modifikasi persyaratan pinjaman yang diberikan, konversi pinjaman yang diberikan menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya dan/atau kombinasi dari keduanya.

Saat persyaratan kredit telah dinegosiasi ulang atau dimodifikasi (kredit restrukturisasi), penurunan nilai yang ada diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah dan tidak lagi diperhitungkan sebagai kredit menunggak.

Manajemen secara berkelanjutan meriviu kredit yang dinegosiasi ulang untuk meyakinkan terpenuhinya seluruh kriteria dan pembayaran di masa depan. Kredit terus menjadi subjek penilaian penurunan nilai individual atau kolektif, dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif awal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Marketable securitas purchased under agreements to resell

Securities purchased under agreements to resell at a specified future date are not recognized in the statements of financial position. The consideration paid, including unamortized interest, is recorded in the statements of financial position, within "Marketable securities purchased under agreements to resell", reflecting the economic substance of the transaction as a loan by the Bank. The difference between the purchase and resale prices is amortized over the life of the agreement using the effective interest rate method and recorded in 'Net interest income'.

If securities purchased under agreements to resell are subsequently sold to third parties, the obligation to return the securities is recorded as a short sale in 'Financial liabilities held-for-trading' and measured at fair value with any gains or losses included in 'Net trading income'.

Marketable securities purchased under agreements to resell (Reverse Repo) are classified as loans and receivables.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

i. Loans

Loans represent funds provided or receivables that can be considered as equivalents, based on agreements or financing contracts with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with its interest after a specified period of time, and receivables from trading of financial instruments that already at maturity which have not been settled within 15 (fifteen) days.

Loans given which are initially measured at fair value plus its transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain the financial assets, and after the initial measurement at cost to be amortized using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Loans are classified as loans and receivables.

Syndicated loans and two step loans are recorded according to the proportion of risks borned by the Bank.

Loan restructuring

Loan restructuring may involve a modification of the terms of the loans, conversion of loans into equity or other financial instruments and / or a combination of both.

When the loan terms have been renegotiated or modified (restructured loans), any impairment is measured using the original effective interest rate as calculated before the modification of terms and the loan is no longer considered past due.

Management continuously reviews renegotiated loans to ensure that all criteria are met and the future payments are likely to occur. The loans continue to be subject to an individual or collective impairment assessment, calculated using the loan original effective interest rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Restrukturisasi pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi pinjaman yang diberikan yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan pinjaman yang diberikan hanya diakui bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang telah ditentukan dalam persyaratan pinjaman yang diberikan yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai pinjaman yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

Untuk restrukturisasi pinjaman yang diberikan bermasalah dengan cara konversi pinjaman yang diberikan yang diberikan menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya, kerugian dari restrukturisasi pinjaman yang diberikan diakui hanya apabila nilai wajar penyertaan saham atau instrumen keuangan yang diterima dikurangi estimasi biaya untuk menjualnya, adalah kurang dari nilai tercatat pinjaman yang diberikan.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
b. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau marjin;
c. Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
d. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
e Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan ,akibat kesulitan keuangan; atau
f. Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
    1) Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
    2) Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 sampai 12 bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Tunggakan bunga yang dikapitalisasi menjadi pokok pinjaman yang diberikan yang baru dalam rangka restrukturisasi pinjaman yang diberikan dicatat sebagai pendapatan bunga ditangguhkan dan akan diakui sebagai pendapatan dengan cara amortisasi secara proporsional berdasarkan persentase tagihan bunga *non-performing* yang dikapitalisasi terhadap pokok pinjaman yang diberikan baru dikalikan dengan angsuran pokok yang diterima.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Loans (continued)

Loan restructuring (continued)

Losses occured due to loan restructuring in respect of the modification of the terms of the loans are recognized only if the present value of total future cash flows which have been specified in the new terms of the loans, including both cash flow designated as interest and as loan principal, are less than the recorded amounts of loans before restructuring.

For loan restructuring experiencing problems by way of converting loans given into equity or other financial instruments, a loss on loan restructuring is recognized only if the fair value of the equity or other financial instruments received, deducted by estimated expenses to sell the equity or other financial instruments, is less than the recorded value of the loan.

The criteria used by the Bank to determine that there is objective evidence of impairment include:

a. Significant financial difficulty of the issuer or obligor;
b. A breach of contract, such as a default or delinquency in principal or margin payments;
c. The lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;
d. It becomes probable that the borrower will enter into bankruptcy or other financial reorganisation;
e The disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
f. Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease has not yet been identified individually in the portfolio, including:
    1) Adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
    2) National or local conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

The estimated period between the occurrence of the event and identification of loss is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 months to 12 months; in exceptional cases, longer periods are warranted.

Deferred interest, which is capitalized into loans given under new restructuring agreements, is recorded as deferred interest income and will be recognized as income at its amortized value proportionately based on the portion of interest receivable on non-performing that is capitalized into a loan principal times the instalments on loan repayment.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Restrukturisasi pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank Papua dalam restrukturisasi pinjaman yang diberikan bermasalah dicatat sebagai biaya pada saat terjadinya.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit atau hubungan antara Bank Papua dengan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya.

Selama tahun 2017 dan 2016, Bank Papua melakukan hapus buku atas pinjaman yang diberikan sebesar Rp849.856.607.959 dan Rp93.931.317.838

Penerimaan pokok (termasuk bunga) kredit hapus buku pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp4.737.999.757 dan Rp528.964.781

j. Aset tetap dan penyusutan

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Semua aset tetap berupa bangunan, disusutkan berdasarkan metode garis lurus, sedangkan untuk aset tetap selain bangunan disusutkan dengan metode saldo menurun berganda selama taksiran masa manfaat aset yang bersangkutan sebagai berikut:

	Tahun / Years	
Bangunan	10 - 20	*Buildings*
Kendaraan	8 - 16	*Vehicles*
Perlengkapan	8 - 16	*Office Equipment*

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen melakukan pengkajian ulang atas nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

i. Loans (continued)

Loan restructuring (continued)

Expenses incurred by Bank Papua on loan restructuring experiencing problems is recorded as expenses as incurred.

Loans are written off when there is no realistic prospect of collection or when Bank Papua's relationship with the borrowers has ceased. When loans are deemed uncollectible, they are written off against the related allowance for impairment losses. The recoveries of written-off loans in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses account. Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as other operating income.

During the year 2017 and 2016, Bank Papua has done any write-off for loans a amounted to Rp849,856,607,959 dan Rp93,931,317,838

Recoveries from loan debt write-off (include interest) as of December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp4,737,999,757 and Rp528,964,781 respectively.

j. Fixed assets and depreciaton

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss. Cost includes the replacement cost of a part of the fixed assets when the expenditure meets the criteria for recognition. When a significant inspection of the asset is performed, the cost of inspection is capitalized as part of the replacement cost of the asset's carrying amount, if the criteria for recognition are met. All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in the statements of income upon occurrence. At each financial year end, the assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate.

All fixed assets as building are depreciated using the straight-line method, whereas fixed assets except building are depreciated using the double decline methode over their expected useful lives as follows:

Land are stated at cost and not depreciated.

The carrying amounts of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of premises and equipment are reviewed by the management and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of each year, if necessary.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

j. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomis masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut dimasukkan ke dalam laba rugi untuk tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

Aset dalam penyelesaian

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

k. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih disajikan dalam akun "Aset Lain-lain" di dalam sub akun aset tidak produktif.

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan tersebut. Selisih lebih saldo pinjaman yang diberikan di atas nilai bersih yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun penyisihan kerugian penurunan nilai aset. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif.

l. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas, baik kepada masyarakat maupun kepada bank lain.

Akun ini diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Fixed assets and depreciaton (continued)

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset is directly included in the profit or loss when the item is derecognized.

Repairs and maintenance is charged to the profit or loss as incurred. The cost of major renovation and restoration is capitalized to the carrying amount of the related premises and equipment when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Construction in progress

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Premises and Equipment" account when the construction is completed and available for intended use. Assets under construction are not depreciated as these are not yet available for use.

k. Foreclosed collaterals

Foreclosed collaterals are included in the "Other Assets" account, in the non productive asset sub account.

Foreclosed collaterals are stated at net realizable value. Net realizable value is the fair value of the foreclosed collaterals less the estimated costs to sell the assets. The excess of loan receivable over the net realizable value of the foreclosed collateral is charged to allowance for impairment losses. The difference between the recorded amount of the foreclosed collateral and the proceeds from the sale of such collateral is recorded as a gain or loss at the time of colateral's sales.

Maintenance and repair costs are charged as an expense in the statements of income when incurred.

If there is permanent decline in value, the carrying amount of foreclosed collaterals is written down to recognize such permanent decline in value. Any such write-down is recognized in the statements of comprehensive income.

l. Liabilities due immediately

Liabilities due immediately are recorded at the time liabilities occured, either to public customers or other Banks.

This account is classified as other financial liabilities and is measured at cost to be amortized.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

m. Simpanan nasabah

Giro merupakan simpanan nasabah di Bank Papua yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan nasabah di Bank Papua yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui *counter* dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau dengan cara pemindahbukuan melalui *SMS Banking* jika memenuhi persyaratan yang disepakati, tetapi penarikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah di Bank Papua yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank Papua.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

n. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, *inter-bank call money* dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari atau 90 (sembilan puluh) hari, deposito berjangka, dan sertifikat deposito.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

o. Pinjaman yang diterima

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Deposits from customers

Current accounts represent customer's cash saved in Bank Papua that may be used as instruments of payments, and which may be withdrawn at any time by cheque or other orders of payments or transfers.

Saving account represent deposits of customer in Bank Papua that may only be withdrawn over the counter and Automated Teller Machine (ATM) or via SMS banking to order overbooking on accounts when certain agreed conditions are met, but which met not be withdrawn by cheque or other equivalent instruments, but which may not be withdrawn by cheque or other equivalent instruments.

Time deposits represent customer's deposits in Bank Papua that may be withdrawn at a certain time based on the agreement between the depositor and Bank Papua.

Deposits from customers are classified as financial liabilities which are measured at cost to be amortized using effective interest rate method. Additional costs directly attributable to the acquisition of deposits from customers are deducted from the amount of deposits.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

n. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to local and overseas banks, in the form of current accounts, inter-bank call money with original maturities of 90 (ninety) days or less, time deposits and certificates of deposits.

Deposits from other banks are classified as other financial liabilities which are measured at cost to be amortised using effective interest rate method. Additional costs directly attributable to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the amount of deposits.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

o. Borrowed fund

Borrowings are funds received from other banks, Bank Indonesia or other parties with payment obligation based on borrowings agreement.

Borrowings are initially recognized at its fair value and subsequently measured at cost to be amortized using the effective interest rate method. Cost to be amortized is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

p. Pendapatan bunga dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang *interest bearing* diakui pada laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank Papua mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian pinjaman yang diberikan di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Pinjaman yang diberikan yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 (sembilan puluh) hari atau lebih setelah jatuh tempo atau pinjaman yang diberikan yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan yang mengalami penurunan nilai (*impairment*) dan pendapatan bunga yang sudah diakui tetapi belum ditagih akan dibatalkan pada saat pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan yang mengalami penurunan nilai.

q. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi komprehensif.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi sebagai pendapatan operasional lainnya.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Interest income and interest expense

Interest income and expense for all interest-bearing financial instruments are recognized in the statements of comprehensive income using the effective interest rate method. The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instruments (or, where appropriate, a shorter period) to arrive at the carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, Bank Papua estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not to include future credit losses. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

If a financial asset or Bank Papua of similar financial assets has diminished its value as a result of impairment losses, interest income subsequently obtained is recognized based on the interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

Loans for which the principal or interest has been past due for 90 (ninety) days or more, or where reasonable doubt exists as to the timely collection, are generally classified as impaired loans, and interest accrued but not yet collected is reversed when a loan is classified as impaired loan.

q. Fees and commission income

Fees and commissions directly related to lending activities, or fee and commission income which relates to a specific period, is amortized over the term of contract using the effective interest method and classified as part of interest income in the statement of comprehensive income.

Fees and commissions income which are not related to lending activities or a specific period are recognised as revenues on the transaction date as other operating income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

r. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode posisi keuangan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal goodwill atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

t. Imbalan kerja dan dana pensiun

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti cuti panjang dan penghargaan dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang menjadi peserta program pensiun Bank Papua. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank Papua dan persyaratan minimum Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003, mana yang lebih tinggi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax are recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Deferred income tax is recognised, using the financial position method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted asat reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or if appealed or objected against, when the results of the appeal and objection are determined.

t. Employee benefits and pension plan

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined benefit plan and other long-term employee benefits

Post-employment benefits and other long-term employee benefits such as long service leave and awards are accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. The benefits are determined based on the Bank Papua's regulations and the minimum requirements of Labor Law No. 13/2003, whichever is higher.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

t. Imbalan kerja dan dana pensiun (lanjutan)

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaria ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*. Perkiraan liabilitas pada tanggal laporan posisi keuangan merupakan nilai kini imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan, dikurangi nilai wajar aset program dan keuntungan aktuaria yang tidak diakui yang disesuaikan, biaya jasa masa lalu yang belum menjadi hak (*vested*), biaya pemutusan kontrak kerja dan keuntungan / kerugian kurtailmen.

Biaya imbalan pasca-kerja yang diakui selama tahun berjalan terdiri dari biaya jasa kini, bunga atas liabilitas, keuntungan atau kerugian aktuaria dan biaya jasa lalu dan dikurangi dengan iuran pegawai dan hasil yang diharapkan dari aset program.

Bank menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Pendirian Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan dengan keputusan No. KEP-057/KM.17/2000 tanggal 14 Februari 2000. Jumlah kontribusi untuk dana pensiun adalah sebesar 7,5% dari penghasilan karyawan dan donasi dari pihak bank sebesar 17,5%. Beban manfaat pensiun meliputi beban jasa kini, beban amortisasi, beban jasa lalu, dan beban amortisasi koreksi perhitungan aktuaria. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus selama taksiran sisa masa kerja rata-rata peserta dana pensiun yang masih aktif bekerja. Penilaian liabilitas aktuaria menggunakan metode *Aggregated Cost Method-Modified*.

Penyisihan biaya jasa masa lalu ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa kerja rata rata yang diharapkan dari karyawan yang memenuhi syarat tersebut. Selain itu, penyisihan untuk biaya jasa kini dibebankan langsung pada operasi tahun/periode berjalan. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset dana pensiun, pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang melebihi batas 10% tersebut diakui atas dasar metode garis lurus selama ekspektasi rata-rata sisa masa kerja karyawan yang memenuhi syarat.

Keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu dari imbalan kerja jangka panjang lainnya langsung diakui pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

u. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif dan komitmen dan kontinjensi

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) No.13/658/DPNP/DPnP tanggal 23 Desember 2011, Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non-produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi), namun Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Employee benefits and pension plan (continued)

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the Projected Unit Credit Method. The estimated benefit liability at statements of financial position date represents the present value of the defined benefits obligation at statements of financial position date, less the fair value of plan assets, and adjusted for unrecognized actuarial gains, non-vested past service costs, termination costs and curtailment gain or loss.

The post-employment benefits expense recognized during the current year consists of current service cost, interest on obligation, actuarial gains or losses and past service costs and reduced by employees' contributions and expected return on plan assets.

The Bank run a defined benefit pension program for all its permanent employees. The Establishment of the Employee Pension Fund of PT Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya has been legalized by the Minister of Finance with the decree No. KEP-057/KM.17/2000 dated Februari, 14, 2000. Each employee should contribute 7.5 % from salary and Bank Papua donates 17.5 % of the salary.The cost of pension plan cover current service cost, amortization cost, past service cost, and amortization expense on actuarial corrections. Amortization is applied using the straight line method during the prediction of average work period of the corresponding pension fund participants which are still in active work. Actuarial liability valuation uses modified Aggregated Cost Method.

Provisions made pertaining to past service costs are deferred and amortized over the expected average remaining service years of the qualified employees. Furthermore, provisions for current service costs are directly charged to operations of the current year/period. Actuarial gains or losses arising from adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses at the end of the previous reporting period exceed 10% of the present value of the defined benefit obligations or 10% of the fair value of plan assets, at that date. The actuarial gains or losses in excess of the aforementioned 10% threshold are recognized on a straightline method over the expected average remaining service years of the qualified employees.

Actuarial gains or losses and past service costs from other long-term employee benefits are recognized directly in the statement of comprehensive income of the current period.

u. Allowance for impairment losses on nonearning assets and commitments and contingencies

In accordance with Bank Indonesia Circular Letter (SE-BI) No. 13/658/DPNP/DPnP dated December 23, 2011, the Bank is not required to provide an allowance for impairment losses on non-earning assets and administrative account transactions (commitments and contingencies), but the Bank should still calculate the allowance for impairment losses in accordance with the applicable accounting standards.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

v. Penurunan nilai aset non keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a. Kinerja yang rendah secara signifikan jika dibandingkan dengan ekspektasi dari hasil operasi historis maupun proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
b. perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
c. Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas).

Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

w. Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan akuntansi yang penting

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Impairment of non-financial assets

The Bank assess impairment on assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that which could trigger an impairment review include the following:

a. significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;

b. significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
c. significant negative industry or economic trends.

The Bank recognize an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's (or Cash Generating Unit's) fair value less costs to sell and its value in use

Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the Cash Generating Unit to which the asset belongs.

w. Use of estimates and consideration

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the consolidated financial statements these where require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experiences and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumption are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.

Key sources of estimation uncertainty:

a. Allowances for impairment losses of financial assets
In the calculation of allowance for impairment losses of financial assets, the specific condition of impaired counterparty is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

w. Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan akuntansi yang penting (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

a. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai terganggu, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan counterparty tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

b. Menentukan nilai wajar instrumen keuangan

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai hargapasar, Bank menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2d. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar menjadi kurang objektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, manajemen mempertimbangkan masukan dan asumsi diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup *feedback model* atas *likuiditas volatilitas* untuk transaksi derivatif dan tingkat diskonto yang berjangka waktu panjang, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

c. Imbalan kerja karyawan

Present value atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi asumsi tersebut akan mempengaruhi carrying amount atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Grup menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Use of estimates and consideration (continued)

Key sources of estimation uncertainty: (continued)

a. Allowances for impairment losses of financial assets (continued)

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experiences and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

b. Determining fair values of financial instruments

In determining the fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Bank uses the valuation techniques as described in Note 2d. For financial instruments that are traded infrequently and a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgement depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

The input for this model comes from observable market data. When observable market data are not available, management considers necessary inputs and ssumptions to determine the fair value. The above considerations include liquidity and volatility feedback model for erivative transactions and long term discount rate, the level of early payment and the level of default assumption.

c. Employee benefit

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net cost (income) for employee benefits include the discount rate. The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of Government Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liability.

Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

w. Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan akuntansi yang penting (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

d. Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi perpajakan

Bank menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi.

e. Umur ekonomis dari aset tetap

Bank Papua memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut. Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa. Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas. Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban operasional yang diakui.

f. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

g. Penurunan nilai aset non-keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

1) Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
2) Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
3) Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Use of estimates and consideration (continued)

Key sources of estimation uncertainty: (continued)

d. Significant judgement is required in determining the provision for taxes

The Bank provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit/loss.

e. Useful life of premises and equipment

Bank Papua estimate the useful lives of premises and equipment based on the period over which the assets are expected to be available for use. The estimated useful lives of premises and equipment are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the assets. In addition, astimation of the useful lives of premises and equipment is based on collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in estimates brought about by changes in factors mentioned above. The amounts and timing of recorded expenses for any period would be affected by changes in these factors and circumstences. A reduction in the estimated useful lives of premises and equipment would increase the recorded operating expenses.

f. Deferred Tax Asset

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic planning.

g. Impairment of non-financial assets

The Bank assesses impairment of assets whenever events or changes in circumstances that would indicates that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that the Bank considers important which could trigger an impairment review include the following:

1) Significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;

2) Significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
3) Significant negative industry or economic trends.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

w. Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan akuntansi yang penting (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

g. Penurunan nilai aset non-keuangan

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Use of estimates and consideration (continued)

Key sources of estimation uncertainty: (continued)

g. Impairment of non-financial assets

The Bank recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's (or cash-generating unit's) fair value less costs to sell and its value in use. Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the cash-generating unit to which the asset belongs.

3. KAS

Kas seluruhnya dalam mata uang rupiah, terdiri dari:

	2017	2016	
Kas Besar dan Kas Kecil	722,785,938,915	833,481,357,218	Cash on Strong Room and Teller
Kas pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	108,299,400,000	108,199,633,600	Cash in Automated Teller Machine (ATM)
Jumlah Kas	**831,085,338,915**	**941,680,990,818**	***Total Cash***

Saldo kas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dimiliki oleh Bank.

3. CASH

All of cash are denominated in Rupiah, consists of:

The Cash as of 31 December 2017 and 2016, is owned by the Bank.

4. GIRO PADA BANK INDONESIA

	2017	2016	
Rupiah	1,415,941,135,223	1,511,312,727,362	*Rupiah*
Jumlah Giro pada Bank Indonesia	**1,415,941,135,223**	**1,511,312,727,362**	***Total Current Accounts With Bank Indonesia***

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum. GWM disimpan dalam bentuk giro pada Bank Indonesia.

Pada tanggal - tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PBI No.17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015, 17/21/PBI/2015 tanggal 26 November 2015, 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016 dan 18/14/PBI/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dan PBI No. 19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017.

4. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

Bank is required to maintain statutory reserves in Rupiah for conventional banking. The statutory reserves are maintained in the form of current accounts with Bank Indonesia.

As of 31 December 2017 and 2016, the Bank's Minimum Statutory Reserve complies with Bank Indonesia (BI) Regulation No.13/10/PBI/2011 dated 9 February 2011 which has been amended with BI Regulation No. 15/15/PBI/2013 dated 24 December 2013 which have been further amended with PBI No. 17/11/PBI/2015 dated 25 June 2015, 17/21/PBI/2015 dated 26 November 2015, PBI No. 18/3/PBI/2016 dated 10 March 2016, PBI No. 18/14/PBI/2016 dated 18 August 2016 and PBI No. 19/6/PBI/2017 dated 17 April 2017 concerning Minimum Statutory Reserve of Commercial Banks with BI in Rupiah and foreign currency, which are as follows:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017
Giro Wajib Minimum:	
- GWM Primer	6.50%
Harian *)	5.00%
Rata - rata *)	1.50%
- GWM Sekunder **)	4.00%

*) Mulai Berlaku per 1 Juli 2017
**) Per 1 Juli 2017, *excess* GWM tidak diperhitungkan sebagai pemenuhan GWM Sekunder

GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. GWM Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa SBI, Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau *excess reserve* yang merupakan kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Primer dan GWM *Loan to Funding Ratio* (LFR). GWM LFR adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, jika LFR Bank dibawah minimum LFR target Bank Indonesia (80%) atau jika di atas maksimum LFR target BI (92%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif BI sebesar 14%.

Rasio GWM Bank Papua pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017
Giro Wajib Minimum:	
- GWM Primer	6.52%
Harian	5.00%
Rata - rata	1.52%
- GWM Sekunder	4.00%
- LFR	1.40%

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Bank Papua telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum.

5. GIRO PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan mata uang

	2017
Rupiah	6,303,099,349
Cadangan kerugian penurunan nilai	-
Neto	**6,303,099,349**

b. Berdasarkan hubungan

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, seluruh giro pada bank lain merupakan transaksi giro dengan pihak ketiga.

4. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

The Minimum Statutory Reserve Ratios as of December 31, 2017 dan 2016 required under Bank Indonesia regulations are as follows:

2016	
	Statutory Reserves:
6.50%	*Primary Minimum Statutory Reserve -*
-	*Daily*
-	*Average*
4.00%	*Secondary Minimum Statutory Reserve -*

*) Effactive on July 1, 2017
**) Starting July 1, 2017, axces GWM is not considered as Secondary Minimum Statutory reserve

Primary Minimum Statutory Reserve is a minimum reserve that should be maintained by the Bank in Current Accounts with Bank Indonesia. Secondary Minimum Statutory Reserve is the minimum reserves that should be maintained by the Bank, comprised of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Government Debenture Debt (SUN), Sharia Government Securities (SBSN), and/or excess reserve which represent the excess reserve of the Bank's Current Accounts in Rupiah over the Primary Minimum Statutory Reserve and the Minimum Statutory Reserve on Loan to Funding Ratio (LFR). The Minimum Statutory Reserve on LFR is the additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of Current Accounts with Bank Indonesia, if the Bank's LFR is below the minimum of LFR targeted by Bank Indonesia (80%) or if the Bank's LFR above the maximum of LFR targeted by BI (92%) and the Capital Adequacy Ratio (CAR) is below BI requirement of 14%.

The Statutory Reserves Ratios as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

2016	
	Statutory Reserves:
6.50%	*Primary Minimum Statutory Reserve -*
-	*Daily*
-	*Average*
4.00%	*Secondary Minimum Statutory Reserve -*
0.88%	*LFR -*

As of December 31, 2017 and 2016, Bank Papua has complied with Bank Indonesia regulations concerning the Statutory Reserves Ratio for Commercial Bank.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANK

a. By currency

2016	
45,126,492,866	*Rupiah*
-	*Allowance for impairment losses*
45,126,492,866	***Net***

b. By relationship

As of December 31, 2017 and 2016, the current accounts with other banks ballances represent current account transactions with third parties.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

c. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia

Seluruh giro pada bank lain pada tanggal - tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 diklasifikasikan lancar.

Bank Papua melakukan penilaian atas penurunan nilai giro pada bank lain secara individual berdasarkan bukti objektif adanya penurunan nilai.

Manajemen Bank Papua berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank-bank lain pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 tidak diperlukan.

d. Cadangan kerugian penurunan nilai

	2017	2016	
Saldo Awal	-	-	Beginning balance
Penyisihan selama tahun berjalan	-	-	Provision during the year
Saldo Akhir	-	-	**Ending balance**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

e. Kisaran tingkat suku bunga per tahun

	Rupiah/*Rupiah* %	
2017	0.00% - 1.25%	2017
2016	1.25% - 2.00%	2016

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang digunakan sebagai agunan.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANK (continued)

c. By Bank Indonesia's collectibility classification

All current accounts with other banks as of December 31, 2017 and 2016 were classified as current.

Bank Papua assessed impairment on current accounts with other banks individually based on whether an objective evidence of impairment exists.

Management of Bank Papua believes that the allowance for impairment losses on current accounts with other bank's as of December 31 2016 and 2017 are not required.

d. Allowance for impairment losses

As of December 31, 2017 and 2016 there are no current accounts with other banks balances which are used as collateral.

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

a. Berdasarkan jenis

	2017	2016	
Promes	2,210,000,000,000	1,425,000,000,000	Promissory notes
Fasilitas Bank Indonesia (FASBI)	639,937,783,825	1,351,699,622,303	Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI)
Deposito berjangka	100,000,000,000	-	Time deposits
Jumlah	2,949,937,783,825	2,776,699,622,303	Total
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	Allowance for impairment losses
Neto	**2,949,937,783,825**	**2,776,699,622,303**	**Net**

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain merupakan penempatan dalam mata uang Rupiah.

Rincian penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

	2017	2016	
Fasilitas Bank Indonesia (FASBI)	639,937,783,825	1,351,699,622,303	Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI)
Deposito berjangka :			Time deposit:
Bank Tabungan Negara	100,000,000,000	-	Bank Tabungan Negara
Jumlah deposito berjangka	100,000,000,000	-	Total time deposit

6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

a. By type

As of December 31, 2017 and 2016, the placement with Bank Indonesia and Other Banks are in Rupiah currency.

Details of placements with other banks and Bank Indonesia are as follows:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

	2017	2016	
Promes:			*Promissory notes:*
Bank CIMB Niaga	400,000,000,000	-	*Bank CIMB Niaga*
Bank Riau	350,000,000,000	300,000,000,000	*Bank Riau*
Bank Kalimantan Selatan	200,000,000,000	-	*Bank Kalimantan Selatan*
Bank Victoria	200,000,000,000	-	*Bank Victoria*
Bank Banten	125,000,000,000	-	*Bank Banten*
Bank Kalimantan Timur	105,000,000,000	-	*Bank Kalimantan Timur*
Bank Danamon	100,000,000,000	175,000,000,000	*Bank Danamon*
Bank Sulawesi Utara	100,000,000,000	75,000,000,000	*Bank Sulawesi Utara*
Bank Sulawesi tengah	100,000,000,000	50,000,000,000	*Bank Sulawesi tengah*
Bank Sulawesi Tenggara	100,000,000,000	50,000,000,000	*Bank Sulawesi Tenggara*
Bank Mega	100,000,000,000	-	*Bank Mega*
Bank Mega Syariah	100,000,000,000	-	*Bank Mega Syariah*
Bank Jtrust Tbk	80,000,000,000	-	*Bank Jtrust Tbk*
Bank Jambi	50,000,000,000	75,000,000,000	*Bank Jambi*
Bank Jawa tengah	50,000,000,000	-	*Bank Jawa tengah*
Bank Sumsel Babel	50,000,000,000	-	*Bank Sumsel Babel*
Bank Sumatra Utara	-	150,000,000,000	*Bank Sultra*
Bank OCBC NISP	-	100,000,000,000	*Bank OCBC NISP*
Bank NTB	-	100,000,000,000	*Bank NTB*
Bank Kalimantan Tengah	-	50,000,000,000	*Bank Panin*
Bank Sulawesi Selatan Barat	-	50,000,000,000	*Bank Sulawesi Selatan Barat*
Bank Maluku	-	50,000,000,000	*Bank Maluku*
Bank Sumatera Selatan	-	50,000,000,000	*Bank Sumatera Selatan*
Bank Bali	-	50,000,000,000	*Bank Bali*
Bank Nusa Tenggara Timur	-	50,000,000,000	*Bank Nusa Tenggara Timur*
Bank Yogyakarta	-	50,000,000,000	*Bank Yogyakarta*
Jumlah promes	2,210,000,000,000	1,425,000,000,000	*Total promisory notes*
Jumlah	2,949,937,783,825	2,776,699,622,303	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	*Allowance for Impairment Losses*
Neto	**2,949,937,783,825**	**2,776,699,622,303**	***Net***

b. Berdasarkan hubungan

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, seluruh penempatan pada bank lain merupakan penempatan pada pihak ketiga.

c. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia

Bank Papua melakukan penilaian atas penurunan nilai penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia secara individual dengan adanya bukti objektif penurunan nilai.

Seluruh penempatan pada bank lain pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 diklasifikasikan lancar.

d. Penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan

Tidak terdapat penempatan pada bank lain yang dijadikan jaminan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

e. Cadangan kerugian penurunan nilai

	2017	2016	
Saldo Awal	-	-	*Beginning balance*
Penyisihan selama tahun berjalan	-	-	*Provision during the year*
Saldo Akhir	**-**	**-**	***Ending balance***

6. *PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)*

a. By type continued)

b. By relationship

As of December 31, 2017 and 2016, the placements with other banks balances represent placements with third parties.

c. By Bank Indonesia's collectibility classification

Bank Papua assessed impairment in placements with other banks and Bank Indonesia individually based on whether an objective evidence of impairment exist.

All placement with other banks and Bank Indonesia as of December 31, 2017 and 2016 were classified as current.

d. Placements with other banks pledged as collateral

There were no placements with other banks that pledged as collateral as of December 31, 2017 dan 2016.

e. Allowance for impairment losses

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

f. Kisaran tingkat suku bunga dan setara bagi hasil per tahun

f. Range of annual interest and equal to profit sharing

	Rupiah/Rupiah %	
2017	3.50% - 5.70%	2017
2016	4.00% - 8.40%	2016

g. Klasifikasi jangka waktu penempatan berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo

g. Classification of placement period by residual period to maturity date

	2017	2016	
Penempatan Rupiah :			Rupiah Placement
sampai dengan 1 bulan	2,949,937,783,825	2,776,699,622,303	up to 1 month
1 - 3 bulan	-	-	1 to 3 months
3 - 12 bulan	-	-	3 to 12 months
Jumlah Penempatan	2,949,937,783,825	2,776,699,622,303	Total Placement
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	Allowance for Impairment Losses
Neto	**2,949,937,783,825**	**2,776,699,622,303**	**Net**

7. EFEK-EFEK

7. MARKETABLE SECURITIES

a. Berdasarkan jenis

a. By type

	2017		
	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	
Nilai wajar melalui laporan laba rugi			**Fair value through profit and loss statement**
Obligasi Pemerintah	-	-	Government Bonds
Jumlah nilai wajar melalui laporan laba rugi	-	-	**Total Fair value through profit and loss statement**
Tersedia untuk dijual			**Available - for - sale**
Reksadana	314,593,760,551	314,551,184,249	Mutual Fund
Tersedia untuk dijual	**314,593,760,551**	**314,551,184,249**	**Total**
Dimiliki hingga jatuh tempo			**Held-to-maturity**
Obligasi Korporasi sampai dengan jatuh tempo (setelah dikurangi / ditambah diskonto / premi yang diamortisasi sebesar RpNihil)	222,000,000,000	222,000,000,000	Held to Maturity of Corporate Bonds (net of amortized discount or premium of RpNihil)
Obligasi Pemerintah sampai dengan jatuh tempo (setelah dikurangi / ditambah diskonto / premi yang diamortisasi sebesar Rp1.155.005.007)	150,000,000,000	151,155,005,007	Held to Maturity of Government Bonds (net of amortized discount or premium of Rp1,155,005,007)
Sertifikat Deposito Bank Indonesia (setelah dikurangi / ditambah diskonto / premi yang diamortisasi sebesar Rp9.648.166.662)	923,636,000,000	913,951,833,338	Certificates Deposit of Bank Indonesia (net of unamortized discount or premium of Rp9,684,166,662)
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo	**1,295,636,000,000**	**1,287,106,838,345**	**Total held-to-maturity**
Jumlah efek-efek	**1,610,229,760,551**	**1,601,658,022,594**	**Total marketable securities**
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	Allowances for impairment losses
Efek-efek - bersih	**1,610,229,760,551**	**1,601,658,022,594**	**Marketable securities-net**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

7. *MARKETABLE SECURITIES (continued)*

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

a. *By Type (continued)*

	2016		
	Nilai Nominal/ *Nominal Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	
Nilai wajar melalui laporan laba rugi			***Fair value through profit and loss statement***
Obligasi Pemerintah	60,000,000,000	63,115,576,807	*Government Bonds*
Jumlah nilai wajar melalui laporan laba rugi	**60,000,000,000**	**63,115,576,807**	***Total fair value through profit and loss statement***
Tersedia untuk dijual			***Available - for - sale***
Reksadana	592,852,392,649	592,941,686,149	*Mutual Fund*
Total tersedia untuk dijual	**592,852,392,649**	**592,941,686,149**	***Total available - for - sale***
Dimiliki hingga jatuh tempo			***Held-to-maturity***
Sertifikat Bank Indonesia (setelah dikurangi / ditambah diskonto / premi yang diamortisasi sebesar Rp6.883.717.772)	207,000,000,000	200,116,282,228	*Certificates of Bank Indonesia (net of unamortized discount or premium of RpRp6,883,717,772)*
Obligasi Korporasi sampai dengan jatuh tempo (setelah dikurangi / ditambah diskonto / premi yang diamortisasi sebesar Rp253.330)	232,000,000,000	231,999,746,670	*Held to Maturity of Corporation Bonds (net of amortized discount or premium of Rp253,330)*
Obligasi Pemerintah sampai dengan jatuh tempo (setelah dikurangi / ditambah diskonto / premi yang diamortisasi sebesar Rp2.371.761.246)	200,000,000,000	202,371,761,246	*Held to Maturity of Government Bonds (net of amortized discount or premium of Rp2,371,761,246)*
Surat Perbendaharaan Negara (setelah dikurangi / ditambah diskonto / premi yang diamortisasi sebesar RpRp140.169.552)	100,000,000,000	99,859,830,478	*Government Treasury Bills (net of unamortized discount or premium of Rp140,169,552)*
Sertifikat Deposito Bank Indonesia (setelah dikurangi / ditambah diskonto / premi yang diamortisasi sebesar Rp793.859.074)	50,000,000,000	49,206,140,926	*Certificates Deposit of Bank Indonesia (net of unamortized discount or premium of Rp793,859,074)*
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo	**789,000,000,000**	**783,553,761,548**	***Total held-to-maturity***
Jumlah efek-efek	**1,441,852,392,649**	**1,439,611,024,504**	***Total marketable securities***
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	*Allowances for impairment losses*
Efek-efek - bersih	**1,441,852,392,649**	**1,439,611,024,504**	***Marketable securities-net***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

7. *MARKETABLE SECURITIES (continued)*

b. Berdasarkan hubungan

b. *By relationship*

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat transaksi efek-efek dengan pihak berelasi.

As of December 31, 2017 and 2016, there were no marketable securities transactions with related parties.

	2017	2016	
Pihak ketiga			***Third parties***
Obligasi	373,155,005,007	497,487,084,723	*Bonds*
Sertifikat Deposit Bank Indonesia	913,951,833,338	49,206,140,926	*Certificate Deposit of Bank Indonesia*
Reksadana	314,551,184,249	592,941,686,149	*Mutual funds*
Sertifikat Bank Indonesia	-	200,116,282,228	*Certificate of Bank Indonesia*
Surat Perbendaharaan Negara	-	99,859,830,478	*Government Treasury Bills*
Jumlah pihak ketiga	1,601,658,022,594	1,439,611,024,504	*Total third parties*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	*Allowances for impairment losses*
Jumlah	**1,601,658,022,594**	**1,439,611,024,504**	***Total***

c. Berdasarkan penerbit

c. *By issuer*

	2017	2016	
Pemerintah Republik Indonesia	465,706,189,256	858,429,024,202	*Government of the Republic of Indonesia*
Bank Indonesia	444,272,065,314	349,182,253,632	*Bank Indonesia*
PT Bank JTRUST Tbk	270,056,084,125	-	*PT Bank JTRUST Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	99,858,132,944	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	99,765,550,955	-	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
Korporasi	222,000,000,000	231,999,746,670	*Corporates*
Jumlah	1,601,658,022,594	1,439,611,024,504	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	*Allowances for impairment losses*
Jumlah	**1,601,658,022,594**	**1,439,611,024,504**	***Total***

d. Berdasarkan peringkat

d. *By rating*

	2017			
	Pemeringkat/ *Agencies*	Peringkat/ *Rating*	Nilai wajar/ Fair Value	
Nilai wajar melalui laporan laba rugi				***Fair value through profit and loss***
Obligasi				*Bonds*
Obligasi Pemerintah:	-	-	-	*Government Bonds*
Jumlah nilai wajar melalui laporan laba rugi			-	***Total Fair value through profit and loss***
Tersedia untuk dijual				***Available-for-sale***
Reksadana	-	-	314,551,184,249	*Mutual Funds*
Jumlah tersedia untuk dijual			**314,551,184,249**	***Total available-for-sale***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

7. *MARKETABLE SECURITIES (continued)*

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

d. By rating(continue)

	2017			
	Pemeringkat/ *Agencies*	Peringkat/ *Rating*	Nilai wajar/ Fair Value	
Dimiliki hingga jatuh tempo				***Held-to-maturity***
Sertifikat Deposit				*Certificate Deposit of*
Bank Indonesia	-	-	913,951,833,338	*Bank Indonesia*
Sub jumlah			913,951,833,338	*Sub total*
Obligasi				*Bonds*
Obligasi Pemerintah:				*Government Bonds:*
SR 008	Fitch	BBB+	50,427,948,796	*SR 008*
ORI12	Fitch	BBB+	40,451,241,002	*ORI12*
FR0069	Fitch	BBB+	60,275,815,209	*FR0069*
Sub jumlah			151,155,005,007	*Sub total*
Obligasi Korporasi:				*Corporate Bonds:*
Obligasi Berkelanjutan II Federal Internasional Finance Tahap IV Tahun 2016 seri B	Pefindo	AAA	20,000,000,000	*Obligasi Berkelanjutan II Federal Internasional Finance Tahap IV Tahun 2016 seri B*
Olbligasi berkelanjutan I BRI tahap II Tahun 2016	Pefindo	AAA	50,000,000,000	*Olbligasi berkelanjutan I BRI tahap II Tahun 2016*
Obligasi berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016	Pefindo	AA	20,000,000,000	*Obligasi berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016*
Olbligasi berkelanjutan I Bank DKI tahap I Tahun 2016	Fitch	A+	20,000,000,000	*Olbligasi berkelanjutan I Bank DKI tahap I Tahun 2016*
MTN II PT Kimia Farma (Persero) Tbk.Tahun 2016	Pefindo	AA-	30,000,000,000	*MTN II PT Kimia Farma (Persero) Tbk.Tahun 2016*
Olbligasi berkelanjutan II BTN tahap II th 2016	Pefindo	AA+	25,000,000,000	*Olbligasi berkelanjutan II BTN tahap II th 2016*
Olbligasi berkelanjutan I Bank Mandiri tahap I Tahun 2016	Pefindo	AAA	15,000,000,000	*Olbligasi berkelanjutan I Bank Mandiri tahap I Tahun 2016*
Olbligasi berkelanjutan I Bank Sulselbar tahap II Tahun 2016	Pefindo	A+	12,000,000,000	*Olbligasi berkelanjutan I Bank Sulselbar tahap II Tahun 2016*
Obligasi III Bank BTN Tahap 1 Tahun 2017 Seri A	Pefindo	AA+	20,000,000,000	*Obligasi III Bank BTN Tahap 1 Tahun 2017 Seri A*
MTN I Bank Jateng TH 2017 Seri A	Pefindo	AA-	10,000,000,000	*MTN I Bank Jateng TH 2017 Seri A*
Sub Jumlah			222,000,000,000	*Sub Total*
Jumlah obligasi			373,155,005,007	*Total bonds*
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo			**1,287,106,838,345**	***Total held to maturity***
Jumlah Efek-efek			**1,601,658,022,594**	***Total marketable securities***
Cadangan kerugian penurunan nilai			-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah Efek-efek - bersih			**1,601,658,022,594**	***Marketable securities - net***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

7. EFEK-EFEK (lanjutan) / **7. *MARKETABLE SECURITIES (continued)***

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan) / *d. By rating(continue)*

	2016			
	Pemeringkat/ *Agencies*	Peringkat/ *Rating*	Nilai wajar/ Fair Value	
Nilai wajar melalui laporan laba rugi				***Fair value through profit and loss***
Obligasi				*Bonds*
Obligasi Pemerintah:	-	-	63,115,576,807	*Government Bonds*
Jumlah nilai wajar melalui laporan laba rugi			**63,115,576,807**	***Total fair value through profit and loss***
Tersedia untuk dijual				***Available-for-sale***
Reksadana	-	-	592,941,686,149	*Mutual Funds*
Jumlah tersedia untuk dijual			**592,941,686,149**	***Total available-for-sale***
Dimiliki hingga jatuh tempo				***Held-to-maturity***
Sertifikat Bank Indonesia	-	-	200,116,282,228	*Certificate of Bank Indonesia*
Sertifikat Deposit Bank Indonesia	-	-	49,206,140,926	*Certificate Deposit of Bank Indonesia*
Surat Perbendahaaran Negara	-	Stabel	99,859,830,478	*Government Treasury Bills*
Obligasi				*Bonds*
Obligasi Pemerintah:				*Government Bonds:*
ORI011	-	Stabel	50,150,357,004	*ORI011*
ORI012	-	Stabel	40,984,576,542	*ORI012*
SR008	-	Stabel	50,757,346,583	*SR008*
FR069	-	Stabel	60,479,481,117	*FR069*
Jumlah			202,371,761,246	*Total*
Obligasi Korporasi:				*Corporate Bonds:*
Obligasi Berkelanjutan II Federal Internasional Finance Tahap IV Tahun 2016 Seri A	Pefindo	AAA	15,000,000,000	*Obligasi Berkelanjutan II Federal Internasional Finance Tahap IV Tahun 2016 Seri A*
Obligasi Berkelanjutan II Federal Internasional Finance Tahap IV Tahun 2016 Seri A	Pefindo	AAA	15,000,000,000	*Obligasi Berkelanjutan II Federal Internasional Finance Tahap IV Tahun 2016 Seri A*
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I tahun 2012	Pefindo	AA-	9,999,746,670	*Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I tahun 2012*
MTN II PT Kimia Farma (Persero) Tbk.Tahun 2016	Pefindo	AA-	30,000,000,000	*MTN II PT Kimia Farma (Persero) Tbk.Tahun 2016*
Obligasi Berkelanjutan II Federal Internasional Finance Tahap IV Tahun 2016 seri B	Pefindo	AAA	20,000,000,000	*Obligasi Berkelanjutan II Federal Internasional Finance Tahap IV Tahun 2016 seri B*
Olbligasi Berkelanjutan I BRI tahap II Tahun 201	Pefindo	AAA	50,000,000,000	*Olbligasi Berkelanjutan I BRI tahap II Tahun 2016*
Olbligasi Berkelanjutan II BTN tahap II Tahun 20	Pefindo	AA	25,000,000,000	*Olbligasi Berkelanjutan II BTN tahap II Tahun 2016*
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I tahun 2016	Pefindo	AA+	20,000,000,000	*Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I tahun 2016*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

7. EFEK-EFEK (lanjutan) / **7. *MARKETABLE SECURITIES (continued)***

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan) / *d. By rating(continue)*

	2016			
	Pemeringkat/ *Agencies*	**Peringkat/ *Rating***	**Nilai wajar/ Fair Value**	
Obligasi berkelanjutan I Bank DKI tahap I Tahun 2016	Pefindo	A+	20,000,000,000	*Obligasi berkelanjutan I Bank DKI tahap I Tahun 2016*
Obligasi berkelanjutan I Bank Mandiri tahap I Tahun 2016	Pefindo	idAAA	15,000,000,000	*Obligasi berkelanjutan I Bank Mandiri tahap I Tahun 2016*
Obligasi berkelanjutan I Bank Sulselbar tahap II Tahun 2016	Pefindo	A+	12,000,000,000	*Obligasi berkelanjutan I Bank Sulselbar tahap II Tahun 2016*
Sub Jumlah			231,999,746,670	*Sub total*
Jumlah obligasi			434,371,507,916	*Total bonds*
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo			**783,553,761,548**	***Total held to maturity***
Jumlah Efek-efek			**1,439,611,024,504**	***Total marketable securities***
Cadangan kerugian penurunan nilai			-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah Efek-efek - bersih			**1,439,611,024,504**	***Marketable securities - net***

e. Berdasarkan kolektibilitas / *e. By collectibility*

	2017			
	Pokok/ *Principal*	**Cadangan/ *Allowance***	**Bersih / *Net***	
Lancar	1,601,658,022,594	-	1,601,658,022,594	*Current*
Kurang lancar	-	-	-	*Substandard*
Macet	-	-	-	*Loss*
Jumlah	**1,601,658,022,594**	**-**	**1,601,658,022,594**	***Total***

	2016			
	Pokok/ *Principal*	**Cadangan/ *Allowance***	**Bersih / *Net***	
Lancar	1,439,611,024,504	-	1,439,611,024,504	*Current*
Kurang lancar	-	-	-	*Substandard*
Macet	-	-	-	*Loss*
Jumlah	**1,439,611,024,504**	**-**	**1,439,611,024,504**	***Total***

f. Cadangan kerugian penurunan nilai / *f. Allowance for impairment losses*

Perubahan Cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: / *The movements in the allowance for impairment losses are as follows:*

	2017	**2016**	
Saldo awal	-	(2,830,000,000)	*Beginning balance*
Pengembalian cadangan selama tahun berjalan	-	2,830,000,000	*Allowance repayment during the current year*
Saldo akhir	-	-	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk tersebut telah memadai. / *Management believe that the allowance for impairment losses is adequate.*

g. Tingkat suku bunga per tahun / *g. Annual interest rates*

	Rupiah/*Rupiah* %	
Suku bunga kontrak		*Contractual rate*
2017	7.10% - 9.25%	*2017*
2016	6.00% - 9.25%	*2016*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

h. Klasifikasi efek-efek berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh temponya adalah sebagai berikut:

7. *MARKETABLE SECURITIES (continued)*

h. Clasification of owned securities until maturity dates based on residual age until maturity date are as follows:

	2017	2016	
sampai dengan 1 bulan	627,548,837,526	-	*up to 1 month*
1 - 3 bulan	98,672,038,811	118,815,298,295	*1 to 3 months*
3 - 12 bulan	267,780,957,001	324,472,780,158	*3 to 12 months*
12 - 60 bulan	343,155,905,007	937,163,090,391	*12 to 60 months*
di atas 60 bulan	264,501,184,249	59,159,855,660	*over 60 months*
Jumlah efek-efek	1,601,658,022,594	1,439,611,024,504	*Total marketable securities*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah efek-efek - bersih	**1,601,658,022,594**	**1,439,611,024,504**	***Marketable securities - net***

8. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN DIJUAL KEMBALI

Rincian Efek-efek yang dibeli dengan Janji dijual Kembali pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

8. *MARKETABLE SECURITAS PURCHASED UNDER AGREEMENTS TO RESELL*

The details of Marketable securitas purchased under agreements to resell as of December 31, 2017 dan 2016 were as follows:

2017

Pihak Penjual/ *Counterparty*	Jangka Waktu/ *Period*	Tanggal Jual kembali/ *resell date*	Nilai Nominal/ *Nominal Amount*	Nilai Jual Kembali/ *resell amount*	Pendapatan bunga yang belum direalisasi/ *Unamalized interest income*	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*
Bank Indonesia						
Surat utang Negara/ *Goverment Bonds*						
SUN FR0070	14 hari/days	4-Jan-18	100,481,149,260	100,692,159,673	211,010,413	100,481,149,260
IDSD0903181825	28 hari/days	5-Jan-18	102,294,618,300	102,692,430,705	397,812,405	102,294,618,300
IDSD1603181825	14 hari/days	11-Jan-18	200,036,749,500	200,386,813,812	350,064,312	200,036,749,500
IDSD1603181825	21 hari/days	18-Jan-18	302,496,789,600	303,308,489,319	811,699,719	302,496,789,600
IDSD1603181825	28 hari/days	25-Jan-18	302,277,754,800	303,370,992,680	1,093,237,880	302,277,754,800
			1,007,587,061,460	**1,010,450,886,189**	**2,863,824,729**	**1,007,587,061,460**

2016

Pihak Penjual/ *Counterparty*	Jangka Waktu/ *Period*	Tanggal Jual kembali/ *resell date*	Nilai Nominal/ *Nominal Amount*	Nilai Jual Kembali/ *resell amount*	Pendapatan bunga yang belum direalisasi/ *Unamalized interest income*	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*
Bank Indonesia						
Surat utang Negara/ *Goverment Bonds*						
Jabar Banten						
BK-BAN	14 hari/days	10-Jan-17	220,387,087,800	221,077,021,822	689,934,022	220,387,087,800
BPD Kalitim - SAM	14 hari/days	12-Jan-17	80,180,576,100	80,430,026,781	249,450,681	80,180,576,100
BPD Kalitim - SAM	14 hari/days	12-Jan-17	30,694,437,000	30,789,930,804	95,493,804	30,694,437,000
BPD Kalitim - SAM	14 hari/days	12-Jan-17	43,776,214,776	43,912,407,444	136,192,668	43,776,214,776
BPD Kalitim - SAM	14 hari/days	12-Jan-17	45,583,297,650	45,725,112,354	141,814,704	45,583,297,650
Bank Indonesia -Jakarta	91 hari/days	31-Mar-17	90,516,000,000	91,797,304,267	1,281,304,267	90,516,000,000
			511,137,613,326	**513,731,803,472**	**2,594,190,146**	**511,137,613,326**

8. EFEK- EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI *(lanjutan)*

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali tersebut di atas diklasifikasikan sebagai lancar.

Tingkat suku bunga tetap tahunan :

	Persentase (%)
Suku bunga kontrak	
2017	4,50% - 5,40%
2016	7,00% - 8,50%

8. MARKETABLE SECURITAS PURCHASED UNDER AGREEMENTS TO RESELL (continued)

Securities purchased under agreements to resell are classified as current.

Annual fixed interest rates :

Contractual interest rate:	
2017	
2016	

9. KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Berdasarkan jenis dan transaksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga

	2017	2016	
Pihak berelasi			*Related parties*
Karyawan	15,316,312,853	-	*Employees*
Konsumsi	398,291,006	15,515,462,029	*Consumer*
Modal kerja	704,349,999,998	620,625,495,000	*Working capital*
Jumlah pihak berelasi	720,064,603,857	636,140,957,029	*Total related parties*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(720,038)	(636,139)	*Allowances for impairment losses*
Jumlah pihak berelasi - bersih	720,063,883,819	636,140,320,890	*Net related parties*
Pihak ketiga			*Third parties*
Modal kerja	3,041,464,653,182	4,320,131,340,337	*Working capital*
Konsumsi	6,396,730,332,443	5,783,983,283,890	*Consumer*
Investasi	1,752,575,824,001	2,079,797,376,772	*Investment*
Sindikasi	1,040,838,510,861	1,079,630,640,567	*Syndicated*
Karyawan	303,778,414,222	268,754,871,546	*Employees*
Program pemerintah	15,455,575,582	41,401,315,448	*Government programs*
Jumlah pihak ketiga	12,550,843,310,291	13,573,698,828,560	*Total third parties*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,506,739,989,485)	(1,672,560,732,955)	*Allowances for impairment losses*
Jumlah pihak ketiga - bersih	11,044,103,320,806	11,901,138,095,605	*Net third parties*
Jumlah kredit yang diberikan	**11,764,167,204,625**	**12,537,278,416,495**	***Total loans***

Pinjaman yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hipotik, hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito berjangka dan jaminan lainnya yang dapat diterima oleh Bank Papua.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain merupakan penempatan dalam mata uang Rupiah.

9. LOANS

a. By type and transactions with related parties and third parties

Loans were generally collateralized by registered mortgages, powers of attorney to mortgage or sell, current accounts, saving accounts, time deposits and by other guarantees that were accepted by Bank Papua.

As of December 31, 2017 and 2016, the placement with Bank Indonesia and Other Banks are in Rupiah currency.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) / ***9. LOANS (continued)***

b. Berdasarkan sektor ekonomi / *b. By economic sector*

	2017	2016	
Bukan lapangan usaha	2,751,108,796,887	4,803,998,128,280	*Not in business sector*
Perdagangan besar dan eceran	1,371,030,933,464	1,935,030,827,387	*Wholesale and groceries*
Konstruksi	1,341,483,419,590	1,699,557,583,250	*Construction*
Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	841,171,658,434	1,013,501,582,343	*Social culture, and other entertainment service*
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	985,703,947,723	1,083,667,888,000	*Hotel, food and beverages*
Industri Pengolahan	215,657,468,377	434,386,406,459	*Manufacturing Industry*
Pertanian, perburuan dan kehutanan	167,437,251,553	430,202,679,248	*Agriculture, hunting, and forestry*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	504,263,849,157	417,500,270,081	*Transportation, warehousing and communications*
Perantara keuangan	195,327,754,142	165,173,425,014	*Financial services*
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	405,905,430,006	127,266,455,642	*Government administration, defense and social securities*
Pertambangan dan penggalian	33,981,473,889	43,752,707,181	*Mining and excavation*
Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan	115,533,136,117	137,312,837,735	*Real estate, rent, and service company*
Listrik, gas dan air	21,786,237,978	22,641,299,364	*Electricity, gas and water*
Perikanan	13,513,445,088	19,203,794,141	*Fishery*
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	13,362,390,802	13,372,337,582	*Health and social service*
Jasa pendidikan	15,188,477,211	5,808,059,377	*Education service*
Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga dan kegiatan yang belum jelas batasannya	20,988,531,328	6,620,471,160	*Individual and household services and others activities*
Badan Internasional	60,061,607,452	155,987,939,227	*International services*
Rumah Tangga	3,985,910,199,974	1,484,110,476,772	*Household*
Kegiatan yang belum jelas batasannya	211,491,904,975	210,744,617,346	*Others activities*
Jumlah	13,270,907,914,148	14,209,839,785,589	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,506,740,709,523)	(1,672,561,369,094)	*Allowances for impairment losses*
Bersih	**11,764,167,204,625**	**12,537,278,416,495**	***Net***

c. Berdasarkan penilaian secara kolektif dan individual / *c. By assessment as collective and individual*

	2017	2016	
Pokok			***Principal***
Individu	981,870,256,922	174,179,976,910	*Individual*
Kolektif	12,289,037,657,226	14,035,659,808,679	*Collective*
	13,270,907,914,148	14,209,839,785,589	
Cadangan kerugian penurunan nilai			***Allowance for impairment losses***
Individu	(688,902,203,954)	(435,281,940,602)	*Individual*
Kolektif	(817,838,505,569)	(1,237,279,428,492)	*Collective*
	(1,506,740,709,523)	(1,672,561,369,094)	
Bersih	**11,764,167,204,625**	**12,537,278,416,495**	***Net***

d. Berdasarkan kolektibilitas / *d. By collectibility*

	2017			
	Pokok / *Principal*	Penyisihan / *Allowance*	Bersih / Net	
Lancar	9,906,997,075,697	5,240,784,972	9,901,756,290,725	*Current*
Dalam perhatian khusus	1,411,045,973,584	51,649,700,612	1,359,396,272,972	*Special mention*
Kurang lancar	70,035,757,858	35,850,388,697	34,185,369,161	*Substandard*
Diragukan	311,824,435,945	173,637,627,315	138,186,808,630	*Doubtful*
Macet	1,571,004,671,064	1,240,362,207,927	330,642,463,137	*Loss*
Jumlah	13,270,907,914,148	1,506,740,709,523	11,764,167,204,625	*Total*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) / ***9. LOANS (continued)***

d. Berdasarkan kolektibilitas (lanjutan) / *d. By collectibility (continued)*

	2016			
	Pokok / *Principal*	Penyisihan / *Allowance*	Bersih / Net	
Lancar	10,730,524,211,889	367,357,447	10,730,156,854,442	*Current*
Dalam perhatian khusus	1,343,988,904,553	98,826,250,950	1,245,162,653,603	*Special mention*
Kurang lancar	758,894,648,136	223,113,902,210	535,780,745,926	*Substandard*
Diragukan	36,694,596,655	24,949,466,996	11,745,129,659	*Doubtful*
Macet	1,339,737,424,356	1,325,304,391,491	14,433,032,865	*Loss*
Jumlah	14,209,839,785,589	1,672,561,369,094	12,537,278,416,495	*Total*

e. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas Bank Indonesia / *e. By types and collectibility of Bank Indonesia*

	2017					
	Lancar/*Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/*Loss*	Jumlah/*Total*
Konsumsi / *Consumer*	5,912,156,532,672	193,610,957,674	37,386,656,225	138,502,808,068	115,472,670,810	6,397,128,623,449
Modal kerja / *Working Capital*	2,539,754,994,222	240,034,304,219	28,141,459,041	50,862,432,597	884,647,413,110	3,743,440,603,189
Investasi / *Investment*	569,985,819,824	471,670,459,735	3,958,721,646	121,498,659,339	567,836,213,448	1,754,949,873,992
Sindikasi / *Syndicated*	538,951,495,454	501,887,015,407	-	-	-	1,040,838,510,861
Karyawan / *Employees*	313,616,241,373	3,191,872,953	457,909,484	958,863,300	869,839,966	319,094,727,076
Program Pemerintah / *Goverment Program*	12,531,992,151	651,383,597	92,011,462	1,674,640	2,178,533,730	15,455,575,581
Jumlah/*Total*	9,906,997,075,697	1,411,045,973,584	70,035,757,858	311,824,435,945	1,571,004,671,064	13,270,907,914,148
Penyisihan kerugian penurunan nilai / *Allowance for impairment losses*	(5,240,784,972)	(51,649,700,612)	(35,850,388,697)	(173,637,627,315)	(1,240,362,207,927)	(1,506,740,709,523)
Neto	9,901,756,290,725	1,359,396,272,972	34,185,369,161	138,186,808,630	330,642,463,137	11,764,167,204,625

	2016					
	Lancar/*Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/*Loss*	Jumlah/*Total*
Konsumsi / *Consumer*	5,641,280,430,367	78,325,958,658	10,336,999,628	7,600,707,871	46,439,187,369	5,783,983,283,891
Modal kerja / *Working Capital*	3,037,517,897,626	597,509,364,455	358,631,343,119	7,114,816,874	939,983,413,263	4,940,756,835,337
Investasi / *Investment*	661,793,757,538	664,596,392,517	389,233,143,298	8,545,259,515	355,628,823,803	2,079,797,376,771
Sindikasi / *Syndicated*	1,079,630,640,567	-	-	-	-	1,079,630,640,567
Karyawan / *Employees*	284,270,333,575	-	-	-	-	284,270,333,575
Program pemerintah / Government program	26,031,152,115	3,557,188,923	693,162,093	1,562,438,271	9,557,374,046	41,401,315,448
Jumlah / *Total*	10,730,524,211,888	1,343,988,904,553	758,894,648,136	24,823,222,531	1,351,608,798,481	14,209,839,785,589
Penyisihan kerugian penurunan nilai / *Allowance for impairment losses*	(367,357,447)	(98,826,250,950)	(223,113,902,210)	(24,949,466,996)	(1,325,304,391,491)	(1,672,561,369,094)
Neto	10,730,156,854,441	1,245,162,653,603	535,780,745,926	(126,244,465)	26,304,406,990	12,537,278,416,495

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

9. *LOANS (continued)*

e. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas Bank Indonesia

e. *By sector economic types and Collectibility of Bank Indonesia*

	2017						
	Lancar / *Current*	Dalam Perhatian Khusus / *Special Mention*	Kurang Lancar / *Substandard*	Diragukan / *Doubtful*	Macet /*Loss*	Jumlah /*Total*	
Pertanian, perburuan dan kehutanan	31,475,563,103	22,769,127,766	244,391,934	552,987,399	112,395,181,359	167,437,251,553	*Agriculture, hunting and forestry*
Perikanan	11,515,194,053	393,746,802	301,794,032	48,448,265	1,254,261,936	13,513,445,088	*Fishery*
Pertambangan dan penggalian	26,928,036,488	854,382,352	-	245,572,192	5,953,482,847	33,981,473,889	*Mining and excavation*
Industri Pengolahan	103,191,887,889	68,627,585,156	619,168,945	672,855,563	42,545,990,824	215,657,468,377	*Manufacturing Industry*
Listrik, gas dan air	21,112,664,013	372,573,965	301,000,000	-	-	21,786,237,978	*Utilities industry*
Konstruksi	770,916,094,269	124,439,364,733	2,230,003,553	27,337,987,721	416,559,969,314	1,341,483,419,590	*Construction*
Perdagangan besar dan eceran	868,839,253,304	92,554,735,164	20,116,469,443	23,959,816,578	365,561,657,975	1,371,030,933,464	*Wholesale and groceries*
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	94,705,509,270	619,380,825,684	3,137,220,812	116,150,004,543	152,330,387,414	985,703,947,723	*Hotel, food and beverages*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	337,266,790,267	12,549,687,980	309,723,703	277,869,013	153,859,778,195	504,263,849,157	*ransportation, warehousing and communication*
Perantara keuangan	195,261,953,241	-	-	-	65,800,901	195,327,754,142	*Financial services*
Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan.	93,103,371,046	15,004,218,365	3,108,371,155	138,134,944	4,179,040,607	115,533,136,117	*Real estate, rent and service company*
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.	405,650,834,709	254,595,297	-	-	-	405,905,430,006	*Government administration defense, and social securities*
Jasa pendidikan	14,425,926,296	54,772,291	11,270,112	-	696,508,512	15,188,477,211	*Education service*
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	7,216,922,599	3,894,151,541	-	-	2,251,316,662	13,362,390,802	*Health and social service*
Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	420,464,319,091	241,133,474,733	1,117,593,005	2,478,068,409	175,978,203,196	841,171,658,434	*Social culture, and other entertainment service*
Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga.	19,584,852,805	343,397,161	-	113,454,957	946,826,405	20,988,531,328	*Individual and household service*
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	39,029,246,432	6,164,705,021	653,457,930	491,117,535	13,723,080,534	60,061,607,452	*International and extra international services*
Kegiatan yang belum jelas batasannya	208,381,758,289	2,745,764,547	152,169,107	137240231	74,974,801	211,491,904,975	*Others activities*
Rumah Tangga	3,689,221,309,498	161,604,212,793	20,573,390,950	37,056,648,809	77,454,637,925	3,985,910,199,974	*Household*
Bukan lapangan usaha	2,548,705,591,035	37,904,671,223	17,159,733,177	102,164,229,788	45,173,571,666	2,751,108,796,887	*Not in business sector*
Jumlah	9,906,997,075,697	1,411,045,973,584	70,035,757,858	311,824,435,945	1,571,004,671,064	13,270,907,914,148	*Total*
Penyisihan kerugian	(5,240,784,972)	(51,649,700,612)	(35,850,388,697)	(173,637,627,315)	(1,240,362,207,927)	(1,506,740,709,523)	*Allowance for impairment*
Bersih	9,901,756,290,725	1,359,396,272,972	34,185,369,161	138,186,808,630	330,642,463,137	11,764,167,204,625	*Net*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

e. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas Bank Indonesia (lanjutan)

9. LOANS (continued)

e. By sector economic types and Collectibility of Bank Indonesia (continued)

	2016						
	Lancar / *Current*	Dalam Perhatian Khusus / *Special Mention*	Kurang Lancar / *Substandard*	Diragukan / *Doubtful*	Macet /*Loss*	Jumlah /*Total*	
Pertanian, perburuan dan kehutanan	110,380,224,198	40,608,659,727	633,094,162	88,352,663	278,492,348,498	430,202,679,248	*Agriculture, hunting and forestry*
Perikanan	15,068,378,054	1,315,573,561	274,399,171	131,242,259	2,414,201,096	19,203,794,141	*Fishery*
Pertambangan dan penggalian	21,839,277,408	18,857,455,964	69,176,901	1,975,874,048	1,010,922,860	43,752,707,181	*Mining and excavation*
Industri Pengolahan	228,274,492,151	40,096,024,766	475,902,941	1,146,794,201	164,393,192,400	434,386,406,459	*Manufacturing lidustry*
Listrik, gas dan air	20,915,408,123	499,986,581	-	-	1,225,904,660	22,641,299,364	*Utilities industry*
Konstruksi	1,139,793,931,821	196,812,990,590	30,575,786,131	3,814,262,880	328,560,611,828	1,699,557,583,250	*Construction*
Perdagangan besar dan eceran	1,069,595,917,093	357,615,351,805	249,366,044,387	12,513,741,618	245,919,772,484	1,935,030,827,387	*Wholesale and groceries*
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	587,040,703,674	311,931,015,880	160,677,513,346	1,437,793,513	22,580,861,587	1,083,667,888,000	*Hotel, food and beverages*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	126,567,076,426	126,135,330,049	347,300,131	1,361,098,627	163,089,464,848	417,500,270,081	*ransportation, warehousing and communication*
Perantara keuangan	165,173,425,014	-	-	-	-	165,173,425,014	*Financial services*
Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan.	114,836,235,825	11,708,568,982	5,860,102,989	-	4,887,929,939	137,312,837,735	*Real estate, rent and service company*
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.	127,266,455,642	-	-	-	-	127,266,455,642	*Government administration defense, and social securities*
Jasa pendidikan	4,926,712,282	422,953,201	-	-	458,393,894	5,808,059,377	*Education service*
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	12,139,471,602	1,224,522,474	-	-	8,343,506	13,372,337,582	*Health and social service*
Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	555,869,835,386	100,704,914,898	299,409,927,826	6,312,268,676	51,204,635,557	1,013,501,582,343	*Social culture, and other entertainment service*
Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga.	6,535,728,466	57,776,882	-	14,528,653	12,437,159	6,620,471,160	*Individual and household service*
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	113,529,917,192	12,292,473,193	828,400,525	297,931,646	29,039,216,671	155,987,939,227	*International and extra international services*
Kegiatan yang belum jelas batasannya	165,114,533,681	45,443,785,698	186,297,967	-	-	210,744,617,346	*Others activities*
Rumah tangga	1,410,074,611,628	46,614,097,083	6,324,377,779	1,510,225,778	19,587,164,504	1,484,110,476,772	
Bukan lapangan usaha	4,735,581,876,223	31,647,423,219	3,826,323,880	6,090,482,093	26,852,022,865	4,803,998,128,280	*Not in business*
Jumlah	10,730,524,211,889	1,343,988,904,553	758,894,648,136	35,694,586,655	1,339,737,424,356	14,209,839,785,589	*Total*
Penyisihan kerugian	(367,357,447)	(98,826,250,950)	(223,113,902,210)	(24,949,466,996)	(1,325,304,391,491)	(1,672,561,369,094)	*Allowance for impairment*
Bersih	10,730,156,854,442	1,245,162,653,603	535,780,745,926	11,745,129,659	14,433,032,865	12,537,278,416,495	*Net*

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) / 9. LOANS (continued)

f. Pinjaman bermasalah dan penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan sektor ekonomi / *Non-performing loans and allowance for impairment losses by economic sector*

	2017	2016	
Perdagangan, restoran dan hotel	409,637,943,996	507,819,558,489	*Trading, restaurants and hotels*
Industri Pengolahan	43,838,015,332	166,015,889,542	*Manufacturing*
Jasa pelayanan sosial	181,825,181,272	356,935,175,565	*Social services*
Konstruksi	446,127,960,588	362,950,660,839	*Construction*
Pertanian, perburuan dan kehutanan	113,192,560,683	279,213,795,323	*Agriculture, hunting, and forestry*
Jasa pendidikan	707,778,624	458,393,894	*Education service*
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	154,447,370,911	164,797,863,606	*Transportation, warehousing and communications*
Listrik, gas dan air	301,000,000	1,225,904,660	*Utilities*
Jasa dunia usaha	271,617,612,769	184,696,168,446	*Business services*
Perikanan	1,604,504,233	2,819,842,526	*Fishery*
Pertambangan	6,199,055,039	3,055,973,809	*Mining*
Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan	7,425,546,706	10,768,032,928	*Real estate, rent, and service company*
Perantara keuangan	65,800,901	-	*Financial services*
Badan Internasional	14,867,655,999	30,165,548,842	*International agencies*
Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga.	1,060,281,362	26,965,812	*Individual and household service*
Kegiatan yang belum jelas batasannya	364,384,139	186,297,967	*activities that have not been clearly defined*
Rumah Tangga	135,084,677,684	27,421,768,061	*household service*
Lain-lain	164,497,534,629	36,768,828,838	*Others*
Jumlah	1,952,864,864,866	2,135,326,669,147	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1,449,850,223,939)	(1,573,367,760,697)	*Allowances for impairment losses*
Bersih	503,014,640,927	561,958,908,450	*Net*

Rasio pinjaman bermasalah bruto (rasio NPL - bruto) Bank Papua, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, terhadap jumlah pinjaman pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang diberikan sebesar 14,72% dan 15,03%.

The ratio of gross non-performing loans (gross NPL ratio) of Bank Papua to total loans, based on Bank Indonesia Regulations (PBI) as of December 31, 2017 and 2016 were 14,72% and 15.03%. respectively.

g. Tingkat suku bunga per tahun / *Annual interest rates*

	Rupiah/*Rupiah* %	
Bunga kontrak		*Contractual interest*
2017	5.25% - 25.58%	*2017*
2016	5.00% - 24.47%	*2016*

Seluruh kredit yang diberikan pada tahun 2017 dan 2016 dalam mata uang Rupiah.

Loans for the years 2017 and 2016 all in Rupiah currency.

h. Kredit yang direstrukturisasi / *Restructured loans*

Berikut ini adalah jenis dan jumlah kredit yang diberikan yang telah direstrukturisasi per 31 Desember 2017 dan 2016:

Below is the type and amount of restructured loans as of December 31, 2017 and 2016:

	2017	2016	
Perpanjangan waktu Kredit yang diberikan	2,132,037,208,154	1,964,117,596,650	*Extension of loan maturity dates*
Jumlah	2,132,037,208,154	1,964,117,596,650	*Total*

Kredit yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

Restructured loans by collectibility are as follows:

	2017	2016	
Lancar	276,528,845,920	113,074,733,941	*Current*
Dalam perhatian khusus	946,476,625,655	1,041,900,530,327	*Special mention*
Kurang lancar	6,317,631,502	260,448,425,613	*Substandard*
Diragukan	117,740,160,196	6,722,843,456	*Doubtful*
Macet	784,973,944,881	541,971,062,313	*Loss*
Jumlah	2,132,037,208,154	1,964,117,595,650	*Total*

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *LOANS (continued)*

i. Jangka Waktu (sesuai dengan perjanjian kredit) / *Terms (based on agreements covering loan)*

	2017	2016	
Nilai Pokok			*Principal*
sampai dengan 1 tahun	2,107,652,704,007	2,632,851,388,952	*up to 1 year*
1 - 2 tahun	344,825,688,893	423,024,067,510	*1 to 2 years*
2 - 5 tahun	2,688,919,658,380	3,743,176,093,420	*2 to 5 years*
di atas 5 tahun	8,129,509,862,868	7,410,788,235,707	*over 5 years*
Jumlah kredit yang diberikan	13,270,907,914,148	14,209,839,785,589	*Total loan*

j. Sisa Umur Jatuh Tempo / *Remaining Period to Maturity*

	2017	2016	
Nilai Pokok			*Principal*
1 bulan	910,431,902,624	1,182,385,352,701	*1 month*
1 - 6 bulan	878,049,614,535	1,052,000,636,361	*1 to 6 months*
6 - 12 bulan	1,066,562,084,429	967,709,418,817	*6 - 12 months*
di atas 12 bulan	10,415,864,312,560	11,007,744,377,710	*over 12 months*
Jumlah kredit yang diberikan	13,270,907,914,148	14,209,839,785,589	*Total loan*

k. Kredit Program Pemerintah / *Government Credit Program*

Kredit Program Pemerintah terdiri dari kredit koperasi dan anggota, kredit ketahanan pangan, Kredit Modal Kerja (KMK) Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Investasi (KI) KUR, KMK KUR R/C Perdagangan, kredit KMK KUR Konstruksi dan KUR Mikro Modal Kerja dimana Pemerintah dapat menyediakan sebagian dan/atau keseluruhan dananya.

Government Credit Program consists of Member Cooperative Loans, Food Stability Loans, Working Capital Loans (KMK) Kredit Usaha Rakyat (KUR), Investment Loans (KI) KUR, KMK KUR Trading Loans, KMK KUR Construction Loans and KUR Micro Working Capital Loans which can be partially and/or fully funded.

l. Kredit sindikasi / *Syndicated loans*

Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain.

Syndicated loans represent loans provided to borrowers under syndication agreements with other banks.

Keikutsertaan Bank Papua dalam pinjaman sindikasi dengan bank lain pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.040.838.510.861 dan Rp1.079.630.640.567.

Bank Papua's participation in syndicated loans with other banks for the years ended December 31, 2017 and 2016 were respectively amounted to Rp1,040,838,510,861 dan Rp1,079,630,640,567.

Keikutsertaan Bank dalam pinjaman sindikasi dengan bank lain adalah sebagai berikut:

The Bank's percentage participation in syndicated loans with other banks is as follow:

	2017	2016	
Porsi Partisipasi	2.80% - 64.81%	4.00% - 65.00%	*Portion of Participation*

m. Cadangan kerugian penurunan nilai / *Allowance for impairment losses*

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	2017	2016	
Saldo awal	1,672,561,369,094	927,584,117,994	*Beginning balance*
Cadangan kerugian selama tahun berjalan	687,937,075,886	864,997,323,415	*Provision during the current year*
Pengembalian penyisihan selama tahun berjalan	(3,901,127,498)	(26,088,754,477)	*Allowance repayment during the current year*
Penghapusan selama tahun berjalan	(849,856,607,959)	(93,931,317,838)	*Write-offs during the current year*
Saldo akhir	1,506,740,709,523	1,672,561,369,094	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

n. Kredit yang diberikan yang dihapusbukukan

Kredit yang diberikan yang telah dihapusbukukan oleh Bank Papua dicatat sebagai pinjaman yang diberikan ekstra-komtabel di dalam rekening administratif. Bank Papua terus melakukan usaha penagihan atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan tersebut. Total saldo pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing - masing sebesar Rp22.747.596.373 dan Rp152.863.424.445

o. Fasilitas pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan dan bank lain

Bank Papua memiliki perjanjian pembiayaan dengan beberapa lembaga pembiayaan dan bank lain, yaitu:

	2017	2016	
Bank lain:			*Other banks:*
BPR Palu Lokadana Utama	161,059,387,356	132,259,443,021	*BPR Palu Lokadana Utama*
BPR Arfak Indonesia	59,409,195,831	79,992,014,294	*BPR Arfak Indonesia*
BPR Modern Express Ambon	33,028,240,045	62,022,674,250	*BPR Modern Express Ambon*
BPR Irian Sentosa	5,722,760,942	43,609,055,704	*BPR Irian Sentosa*
BPR Nusa Intim	3,979,961,884	7,882,662,807	*BPR Nusa Intim*
BPR Papua Mandiri Makmur	1,079,301,539	2,074,301,555	*BPR Papua Mandiri Makmur*
Jumlah	264,278,847,597	327,840,151,631	*Total*
Perusahaan pembiayaan:			*Multifinance company:*
PT Andalan Finance Indonesia	-	14,583,333,314	*PT Andalan Finance Indonesia*
Jumlah	-	14,583,333,314	*Total*
Jumlah	264,278,847,597	342,423,484,945	*Total*

p. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan

1) Sehubungan dengan diterbitkannya PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Edaran No. 7/14/DPnP tanggal 18 April 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit ("BMPK") Bank Umum, maka perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank Papua, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan atau keuangan, seperti Direksi, Kepala Departemen, Kepala Divisi dianggap sebagai pihak berelasi dengan Bank Papua. Berdasarkan peraturan tersebut, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak berelasi adalah 10% dari modal Bank Papua.

2) Pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat pemberian pinjaman yang melanggar / melampaui ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Indonesia.

3) Rasio kredit usaha kecil, mikro dan menengah terhadap jumlah kredit yang diberikan oleh Bank Papua per 31 Desember 2017 and 2016 sebesar 17,46% dan 21,09%.

9. LOANS (continued)

n. Loans written off

The loans written off by Bank Papua are recorded as extra-comptable (off statements of financial position) in the administrative account. Bank Papua continues to pursue the collection of loans previously written off. The outstanding balance as of December 31, 2017, and 2016 amounted to Rp22,747,596,373 and Rp152,863,424,445 respectively.

o. Financing facilities with multi-finance companies and other banks

Bank Papua has financing arrangements with several multi-finance companies and other banks, there are:

p. Other significant information related to loans

1) In relation to the issuance of Bank Indonesia Regulation No.7/3/PBI/2005 dated January 20, 2005 and the Circular Letter No. 7/14/DPnP dated April 18, 2005 on the Legal Lending Limit ("LLL") of Commercial Banks, companies which are directly or indirectly controlled by Bank Papua through ownership, management or financial, such as Director, Head Department, Head Division are considered related parties of Bank Papua. Under this regulation, the legal lending limit (LLL) for related parties borrowers is 10% of Bank Papua's capital.

2) For the years ended December 31, 2017 and 2016, there were no loans granted which breach / exceed the maximum Legal Lending Limit requirements of Bank Indonesia.

3) The micro, small and medium scale loans to total loans ratio for Bank Papua as of December 2017 and 2016 were 17.46% and 21.09% , respectively.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

p. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan (lanjutan)

4) Sektor usaha lainnya merupakan kredit konsumtif yang diberikan dalam bentuk Kredit Griya Bhakti, Kredit Purna Bhakti, Kredit Wira Bhakti serta kredit yang tidak dapat diklasifikasikan pada sektor-sektor di atas.
   - Kredit Griya Bhakti merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri berpenghasilan tetap untuk keperluan pembangunan dan renovasi rumah.
   - Kredit Abdi Bhakti merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada para karyawan Bank Papua berpenghasilan tetap untuk keperluan biaya sekolah, pembelian peralatan rumah tangga dan sebagainya.
   - Kredit Wira Bhakti merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri berpenghasilan tetap untuk keperluan konsumtif seperti biaya sekolah, pembelian peralatan rumah tangga dan sebagainya.

Adapun rincian kredit yang diberikan sektor lain-lain adalah sebagai berikut :

	2017	2016	
Wira Bhakti	4,342,186,348,632	3,995,803,641,464	*Wira Bhakti*
Griya Bhakti	443,976,432,350	478,134,867,410	*Griya Bhakti*
Abdi Bhakti	302,761,554,342	289,594,305,683	*Abdi Bhakti*
Purna Bhakti	57,550,780,349	46,231,124,137	*Purna Bhakti*
Kendaraan	6,893,530,373	993,310,628	*Vehicles*
Multiguna	2,590,556,021	3,250,154,861	*Multiguna*
Lain-lain	1,560,264,148,458	1,249,747,824,686	*Other*
Jumlah	6,716,223,350,525	6,063,755,228,869	*Total*

5) Kredit yang diberikan dijamin dengan deposito, agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan.

6) Kredit modal kerja dan investasi diberikan kepada debitur untuk kepentingan modal kerja dan pengadaan barang-barang modalnya.

7) Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kredit perorangan lainnya.

8) Kredit program pemerintah terdiri dari, kredit kepada Koperasi dan anggotanya, kredit pengusaha kecil dan mikro, kredit ketahanan pangan dan kredit program pemerintah PHBK. Saldo pinjaman yang diberikan dari program yang disalurkan dengan sistem *chanelling* dapat dirinci sebagai berikut:

	2017	2016	
KPP KKP-E Peternakan	8,850,746,087	13,623,506,665	*KPP KKP-E Farmer*
KPP KI KUR	2,242,430,402	7,771,350,973	*KPP KI KUR*
KPP KMK KUR	1,687,328,157	13,681,400,583	*KPP KMK KUR*
KPP KKP-E Perikanan	755,926,389	1,685,514,335	*KPP KKP-E Fishery*
KMK KUR Ritail	748,611,111	-	*KMK KUR Retail*
KPP KKP-E Pertanian	593,986,025	1,560,620,762	*KPP KKP -E Agruculture*
KPP KMK KUR R/C Perdagangan	-	2,093,750,665	*KPP KMK KUR R/C Trading*
KMK KUR Mikro	570,333,334	-	*KMK KUR Micro*
KUR Mikro Modal Kerja	6,214,075	950,271,450	*KUR - Working Capital*
KUR Mikro Investasi	-	11,468,506	*KUR Micro Investment*
KPP Koperasi dan Anggota	-	23,431,509	*KPP Cooperative and Member*
Total	**15,455,575,580**	**41,401,315,448**	***Total***

9. *LOANS (continued)*

p. Other significant information related to loans (continued)

4) Other business sector are consumer loans granted in form of Griya Bhakti Loan, Purna Bhakti Loan, Wira Bhakti Loan, and loan not classified in the above sector.
   - *The Griya Bhakti Loan is a Loan facility granted to government employees who have fixed income for the purpose of house development or renovation.*
   - *The Abdi Bhakti loan is a loan facility granted to Bank Papua Employees who fixed income for consumer usage such as school fees, purchasing of house appliances, etc.*
   - *The Wira Bhakti loan is a loan facility granted to fixed income Government Employees for consumer usage such us school fee, purchasing of home appliance, etc.*

The details of Other Sector loans are as follows :

5) Loans are secured by deposits, collateral bound by hypothecation or a power of attorney to sell, and other collateral banks commonly accept.

6) Working capital or investment loans are granted to the debtors for the purpose of working capital and procurement of capital goods.

7) Consumer credit consist of home loan, vehicle loan, and other personal loans.

8) Credit of government programs consist of credit to cooperations and its members, micro and small-scale business, food sustainability and government programs PHBK. Details of the channeling loans are as follows:

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

p. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan (lanjutan)

9) Kredit yang dijamin pemerintah adalah pinjaman yang diberikan yang dijamin oleh Pemerintah Propinsi, Kabupaten maupun Kota pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

10) Pinjaman yang diberikan kepada karyawan bank merupakan pinjaman yang diberikan untuk membeli rumah, kendaraan dan keperluan lainnya yang dibebani bunga pada tahun 2017 dan 2016 berkisar 4,56% - 11,40% per tahun dengan jangka waktu kredit berkisar 1 (satu) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun yang dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan dari karyawan yang bersangkutan.

11) Syarat, kondisi dan perlakuan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi sama dengan yang diberikan kepada pihak ketiga.

12) Kebijakan pemberian pinjaman yang diberikan ditetapkan dan dilaksanakan melalui proses analisa pinjaman yang diberikan yang mengacu pada prinsip kehati-hatian, kecukupan agunan pinjaman yang diberikan, asas-asas perpinjaman yang diberikanan yang sehat, ketentuan BMPK serta pemantauan dan evaluasi.

13) Persetujuan pemberian pinjaman yang diberikan dilakukan melalui suatu komite (komite pinjaman yang diberikan) yang melibatkan analis pinjaman yang diberikan, Kepala Bagian pinjaman yang diberikan, Kepala Bagian dana jasa, wakil pemimpin untuk KCU, pemimpin cabang divisi (untuk pinjaman yang diberikan yang melebihi wewenang cabang). Pengajuan persetujuan pinjaman yang diberikan dilakukan setelah data dari nasabah sudah diperoleh secara lengkap.

14) Bank Papua telah melakukan pembelian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (BPD Lampung) sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama antara Bank Papua dengan BPD Lampung sesuai dengan Akta Notaris Titiek Irawati S.S.H No.27 tanggal 6 Agustus 2010, perjanjian addendum I No.27 tanggal 27 April 2012 dan perjanjian addendum II No.103 tanggal 21 Desember 2012. Jumlah komitmen pembelian piutang ini sebesar Rp150.000.000.000. Sampai dengan 31 Desember 2013, jumlah realisasi pembelian piutang sebesar Rp75.007.212.794 yang terdiri dari 1.254 debitur. Selama tahun 2017 telah terdapat pelunasan dari debitur, yang terdiri dari pelunasan dipercepat dan pelunasan dikarenakan jatuh tempo pinjaman. Jumlah yang tercatat pada laporan keuangan per 31 Desember 2017 sebesar Rp136.437.590 yang terdiri dari 4 debitur.

Transaksi pembelian kredit tersebut merupakan transaksi *without recourse*. Semua hak, kepemilikan dan kepentingan atas kredit telah dialihkan kepada Bank Papua dan Bank Papua memperoleh seluruh keuntungan dan kerugian yang timbul dari kredit tersebut.

9. LOANS (continued)

p. Other significant information related to loans (continued)

9) Credit which guaranted by Government is the credit that guaranted by the Province Government, Regency and Municipalities Government as of December 31, 2017 and 2016 amounted RpNihil and RpNihil were respectively.

10) Credit to employees are for housing, vehicle, and other with interest rates at 2017 and 2016 ranging from 4.56% - 11.40% annually for one to eight years. Such loans will be repaid through salary cutting monthly for each employee receiving the loans.

11) Terms, conditions, and treatment of loans granted to related parties are similar to those granted to the third party.

12) Credit granted policies stated through an analysis process conforming to prudent policy, adequacy of collaterals, credit soundness, legal lending limit, monitoring and evaluation.

13) The approval of credit is conducted by credit committee involving credit analyst, chairman of development, fund service departement, vice general manager (for branches), general manager and division (when credit exceeding branch authority). The application is submitted when complete data from debtor has been completely received.

14) Bank Papua purchased loans from PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (BPD Lampung) based on the agreement between Bank Papua and BPD Lampung which was notarized under Notarial Deed No.27 dated August 6, 2010 of Titiek Irawati S.S.H, First addendum agreement No.27 dated April 27, 2010 and Second Addendum No. 103 dated December 21,2012. The total commitment of the loans purchased amounted to Rp150,000,000,000. Up to December 31,2013, the total realization of the loans of purchased amounted to Rp75,007,212,794 which consist of 1,254 debtors. During the year 2017 there were repayment of debtors, which consists of the advance payment and loan repayment due to the maturity. Total outstanding amount in the statements of financial position as of December 31,2017 was amounted to Rp136,437,590 which consist of 4 debtor.

The loans purchased transaction is a without recourse transaction. All right's, ownership's and interest of the loans are transferred to the Bank Papua and the Bank Papua obtains all benefits and risks on the loan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

p. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Setelah pengalihan kredit tersebut, BPD Lampung akan bertindak sebagai pengelola pembayaran dari debitur dan administrasikan dokumen kredit debitur sebagaimana tertuang dalam akta notaris Titiek Irawati S.S.H No.29 tanggal 6 Agustus 2010 tentang pengelolaan plutang antara Bank Papua dan BPD Lampung. Atas jasa pengelolaan piutang tersebut, BPD Lampung mendapat imbalan sebesar 4% dari setiap liabilitas bunga debitur yang telah disetor oleh BPD Lampung dan diterima oleh Bank Papua.

Dalam hal terjadi tunggakan dari debitur, BPD Lampung secara aktif berkewajiban untuk melakukan penagihan kepada debitur untuk kepentingan bank sesuai prosedur yang berlaku. Setelah pembelian kredit tersebut, BPD Lampung akan bertindak selaku pihak yang melakukan penagihan kepada debitur, memelihara dan mengadministrasikan tagihan secara tertib untuk kepentingan bank dan melakukan penyetoran atas pembayaran yang diterima dari debitur baik berupa angsuran, bunga dan atau liabilitas lainnya yang menjadi hak bank termasuk dalam pembayaran dipercepat dari debitur.

Pinjaman yang diberikan tersebut merupakan kredit konsumsi "PANTAS" (Pinjaman Aman Terbatas) yang disalurkan BPD Lampung kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ kota se-provinsi Lampung, dengan kriteria, (a) memiliki kolektibiltas 1 (satu) / lancar, (b) jaminan telah dilindungi oleh asuransi, (c) jangka waktu disesuaikan dengan sisa masa dinas setiap debitur. (d) suku bunga adalah sebesar suku bunga yang diatur dalam perjanjian kredit antara debitur dengan BPD Lampung, namun dibatasi minimal 10% (sepuluh persen).

15) Bank telah melakukan pembelian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (BPD Sumsel Babel) sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama antara Bank Papua dengan BPD Sumsel Babel sesuai dengan akta notaris Titiek Irawati S.S.H No.171 tanggal 24 Nopember 2012. Perjanjian Jual Beli Piutang No.053/P/DIR/2012, No.016/SE-BPD/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 dan Perjanjian Pengalihan Piutang No.054/P/DIR/2012, No.017/SE-BPD/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012. Jumlah komitmen pembelian piutang ini sebesar Rp500.000.000.000. Sampai dengan 31 Desember 2013, jumlah realisasi pembelian piutang sebesar Rp49.782.271.868 yang terdiri dari 595 debitur. Selama tahun 2014 telah terdapat pelunasan dari debitur, yang terdiri dari pelunasan dipercepat dan pelunasan dikarenakan jatuh tempo pinjaman. Jumlah yang tercatat pada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.408.026.233 yang terdiri dari 60 debitur.

Transaksi pembelian kredit tersebut merupakan transaksi *without recourse*. Semua hak, kepemilikan dan kepentingan atas kredit telah dialihkan kepada Bank Papua dan Bank Papua memperoleh seluruh keuntungan dan kerugian yang timbul dari kredit tersebut.

9. LOANS (continued)

p. Other significant information related to loans (continued)

After the purchase of loans, BPD Lampung act as an agent, or the party by managing the payment from debtors and administering the debtor's loans document based on notary deed No.29 dated August 6, 2010 of Titiek Irawati S.S.H. As an agent, BPD Lampung will receive a fee at 4% of every debtor interest obligation paid by BPD Lampung and received by the Bank Papua.

In the terms of debtors default, BPD Lampung is obliged to conduct the collection procedures from the debtors for the Bank's interest in accordance with the applicable procedures. After the purchase of loan, BPD Lampung will act as a party who collect from debtors,maintain and adminstrate the loan for the Bank's interest and transfer the payment received from the debtors such as principal, interest and other liabilities payment, including advance payment from debtors.

These loans are consumer loan "PANTAS" (Pinjaman Aman Terbatas) which are provided by BPD Lampung to government employees (PNS), member of House of Representatives of Province and municipalities / regencies in the province of Lampung with criteria of among others, (a) collectibility 1 (one) / current, (b) collateral covered by insurance, (c) period of loans adjusted by remaining official duty for each debtors, (d) interest rate based on loans agreement between debtor with BPD Lampung but is limited at least 10%.

15) Bank Papua purchased loans from PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (BPD Sumsel Babel) based on the agreement between the Bank Papua and BPD Sumsel Babel which was notarized under Notarial Deed No.171 dated November 24, 2012 of Titiek Irawati S.S.H,. Sales agreement No.053/P/DIR/2012, No.016/SE-BPD/XI/2012 dated November 28, 2012 and Cassie agreement No.054/P/DIR/2012, No.017/SE-BPD/XI/2012 dated November 28, 2012. The total commitment of the loans purchased amounted to Rp500,000,000,000. Up to December 31,2013, the total realization of the loans of purchased amounted to Rp49,782,271,868 which consist of 595 debtors. During the year 2014 there were repayment of debtors, which consists of the advance payment and loan repayment due to the maturity. The total outstanding amount in the statements of financial position as of December 31,2017 amounted to Rp2,408,026,233 which consist of 60 debtors.

The loans purchased transaction is a without recourse transaction. All right, ownership and interest of the loans are transferred to the Bank Papua and the Bank Papua obtains all benefits and risks on the loan.

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

p. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Setelah pengalihan kredit tersebut, BPD Sumsel Babel akan bertindak sebagai pengelola pembayaran dari debitur dan mengadministrasikan dokumen kredit debitur sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Titiek Irawati S.S.H No.171 tanggal 24 November 2012 tentang hal pengelolaan piutang antara Bank Papua dan BPD Sumsel Babel. Atas jasa pengelolaan piutang tersebut, BPD Sumsel Babel mendapat imbalan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari setiap liabilitas bunga debitur yang telah disetor oleh BPD Sumsel Babel dan diterima oleh Bank Papua.

Dalam hal terjadi tunggakan dari debitur, BPD Sumsel Babel secara aktif berkewajiban untuk melakukan penagihan kepada debitur untuk kepentingan Bank Papua sesuai prosedur yang berlaku. Setelah pembelian kredit tersebut, BPD Sumsel Babel akan bertindak selaku pihak yang melakukan penagihan kepada debitur, memelihara dan mengadministrasikan tagihan secara tertib untuk kepentingan Bank Papua dan melakukan penyetoran atas pembayaran yang diterima dari debitur baik berupa angsuran, bunga dan atau liabilitas lainnya yang menjadi hak Bank Papua termasuk dalam pembayaran dipercepat.

Kredit tersebut merupakan kredit yang disalurkan BPD Sumsel Babel kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-provinsi Sumsel Babel, dengan kriteria, (a) memiliki kolektibiltas 1 (satu) / lancar, (b) jangka waktu disesuaikan dengan jangka waktu kredit setiap debitur maksimal 180 (seratus delapan puluh) bulan sejak tanggal pengalihan, (c) suku bunga adalah sebesar suku bunga yang diatur dalam perjanjian kredit antara debitur dengan BPD Sumsel Babel.

9. LOANS (continued)

p. Other significant information related to loans (continued)

After the purchase of loans, BPD Lampung act as an agent, or the party which manages the payment from debtors and administrative the debtor's loans document based on deed No.171 dated November 24, 2012 of Titiek Irawati S.S.H. As an agent, Sumsel Babel will receive a fee at 30% (thirty percent) of every debtor interest obligation paid by BPD Sumsel Babel and received by the Bank Papua.

In the terms the debtors default, BPD Sumsel Babel is obliged to conduct the collection procedures from the debtors for the Bank Papua's interest in accordance with the applicable procedures. After the purchase of loan. BPD Sumsel Babel will act as a party who collect from debtors, maintain and adminstrate the loan for the Bank's interest and transfer the payment received from the debtors such as principal, interest and other liabilities payment, including advance payment from debtors.

These loans are consumptive loan which are provided by BPD Sumsel Babel to government employees (PNS), member of House of Representatives of Province and municipalities / regencies in the province of Sumsel Babel with criteria, (a) collectibility 1(one) / current, (b) period of loans adjusted for each debtor to maximum 180 (one hundred eighty) month since purchase date, (c) period of loans adjusted by remaining official duty between the debtor and BPD Sumsel Babel.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP / *10. FIXED ASSETS*

Rincian harga perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap adalah sebagai berikut :

Details of acquisition cost, accumulated depreciation, and book values of fixed assets is as follows:

	2017				
	Saldo Awal 1 Januari 2017 / *Beginning Balance January 1, 2017*	Penambahan / *Additions*	Pengurangan / *Disposals*	Reklasifikasi dan penyesuaian / *Reclasification and adjustment*	Saldo Akhir 31 Desember 2017/ *Ending Balance December 31, 2017*
Biaya perolehan (*Cost*)					
Tanah (*Land*)	36,948,650,376	-	-	-	36,948,650,376
Bangunan Kantor (*Buildings*)	272,420,564,241	11,009,435,716	3,225,375,471	143,550,000	280,348,174,486
Perumahan Dinas (*Houses*)	20,170,561,869	1,063,566,000	-	-	21,234,127,869
Kendaraan Bermotor (*Vehicles*)	14,978,335,222	437,794,625	-	-	15,416,129,847
Inventaris Kantor (*Office Equipment*)	215,647,752,762	8,394,861,716	-	-	224,042,614,478
Inventaris Rumah Dinas (*House Equipment*)	6,909,531,025	1,011,783,150	-	-	7,921,314,175
Inventaris Lainnya (*Others*)	6,077,507,385	1,212,724,000	-	(145,550,000)	7,144,681,385
Inventaris Dalam Penyelesaian (*Equipment In Progress*)	1,945,776,000	1,486,779,975	254,093,175	(703,850,000)	2,474,612,800
Bangunan Dalam Penyelesaian (*Building In Progress*)	11,091,005,076	11,886,656,590	1,738,038,799	(2,519,525,471)	18,720,097,396
Total biaya perolehan (*Total cost*)	586,189,683,956	36,503,601,772	5,217,507,445	(3,225,375,471)	614,250,402,812
Akumulasi penyusutan (*Accumulated depreciation*)					
Bangunan Kantor (*Buildings*)	90,148,673,979	13,643,180,135	3,225,375,471	-	100,566,478,643
Perumahan Dinas (*Houses*)	6,664,415,429	1,013,048,428	-	-	7,677,463,857
Kendaraan Bermotor (*Vehicles*)	12,319,555,014	1,270,356,144	-	-	13,589,911,158
Inventaris Kantor (*Office Equipment*)	179,795,862,019	17,341,487,537	-	-	197,137,369,556
Inventaris Rumah Dinas (*House Equipment*)	5,229,297,681	954,297,729	-	-	6,183,595,410
Inventaris Lainnya (*Others*)	2,729,880,769	1,353,880,678	-	-	4,083,761,447
Total akumulasi penyusutan (*Total accumulated depreciation*)	296,887,704,891	35,576,250,651	3,225,375,471	-	329,238,580,071
Nilai buku (*Book value*)	289,301,979,065				285,011,822,741

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan) / ***10. FIXED ASSETS (continued)***

	2016				
	Saldo Awal 1 Januari 2015 / Beginning Balance January 1, 2015	Penambahan / *Additions*	Pengurangan / *Disposals*	Reklasifikasi dan penyesuaian / *Reclasification and adjustment*	Saldo Akhir 31 Desember 2016 / Ending Balance December 31, 2016
Biaya perolehan (*Cost*)					
Tanah (*Land*)	33,146,070,376	3,802,580,000	-	-	36,948,650,376
Bangunan Kantor (*Buildings*)	265,842,275,282	7,248,512,695	670,223,936	-	272,420,564,241
Perumahan Dinas (*Houses*)	17,910,712,719	2,361,042,001	101,192,851	-	20,170,561,869
Kendaraan Bermotor (*Vehicles*)	14,710,225,086	710,580,136	442,470,000	-	14,978,335,222
Inventaris Kantor (*Office Equipment*)	202,589,699,273	17,379,666,084	4,306,968,875	(14,663,720)	215,647,752,762
Inventaris Rumah Dinas (*House Equipment*)	6,805,898,786	601,329,490	493,997,251	(3,700,000)	6,909,531,025
Inventaris Lainnya (*Others*)	3,242,599,378	2,837,033,008	2,125,001	-	6,077,507,385
Inventaris Dalam Penyelesaian (*Equipment In Progress*)	1,643,088,375	666,426,000	-	(363,738,375)	1,945,776,000
Bangunan Dalam Penyelesaian (*Building In Progress*)	7,345,163,961	3,745,841,115	-	-	11,091,005,076
Total biaya perolehan (*Total cost*)	553,235,733,236	39,353,030,729	6,016,977,914	(382,102,095)	586,189,683,956
Akumulasi penyusutan (*Accumulated depreciation*)					
Bangunan Kantor (*Buildings*)	77,068,708,094	13,079,965,885	-	-	90,148,673,979
Perumahan Dinas (*Houses*)	5,852,905,122	811,510,307	-	-	6,664,415,429
Kendaraan Bermotor (*Vehicles*)	10,917,876,222	1,401,678,792	-	-	12,319,555,014
Inventaris Kantor (*Office Equipment*)	164,786,225,677	15,007,360,977	-	2,295,365	179,795,882,019
Inventaris Rumah Dinas (*House Equipment*)	4,950,117,862	279,025,652	-	154,167	5,229,297,681
Inventaris Lainnya (*Others*)	1,526,835,156	1,203,045,611	-	-	2,729,880,769
Total akumulasi penyusutan (*Total accumulated depreciation*)	265,102,668,135	31,782,587,224	-	2,449,532	296,887,704,891
Nilai buku (*book value*)	288,133,065,101				289,301,979,065

Rincian keuntungan penjualan aset tetap adalah sebagai berikut: / *Details of gain on sale of fixed assets are as follows:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2017	2016	
Harga Jual	46,550,000	1,500,000	*Proceeds*
Nilai Buku	-	-	*Book Value*
Kerugian	**46,550,000**	**1,500,000**	***Loss***

Penjualan per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp46.550.000 dan Rp1.500.000 merupakan Aset Tetap yang dihapuskan pada tahun 2016 dan 2015.

The Sale as of December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp46,550,000 and Rp1,500,000 are Fixed Assets that were eliminated in 2016 and 2015.

Jumlah beban penyusutan aset tetap sebesar Rp35.575.652.526 dan Rp37.939.048.567 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

The balances of depreciation amounting to Rp35,575,652,526 and Rp37,939,048,567 as of 31 December 2017 and 2016, respectively.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap yang dimiliki Bank selama tahun berjalan karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Management believes that there is no impairment in the value of fixed assets owned by the Bank during the year because management believes that the carrying amounts of fixed assets do not exceed the estimated recoverable amount.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap Bank Papua pada tanggal - tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan pencurian kepada perusahaan-perusahaan asuransi.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 tidak terdapat aset tetap yang dijaminkan.

Rincian aset dalam penyelesaian pada tanggal - tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

10. FIXED ASSETS (continued)

As of December 31, 2017 and 2016, fixed assets of the Bank Papua were insured against risk of fire and theft.

As of December 31, 2017 and 2016 there were no fixed assets pledged as collateral.

The details of constructions in progress as of December 31, 2016 and 2017 are as follows:

31 Desember 2017	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	Akumulasi biaya/ Accumulated cost	*Estimasi penyelesaian/ Estimated completion*	*December 31, 2017*
Bangunan	62.60%	13,251,746,146	2017	*Building*
Inventaris	86.48%	2,074,612,800	2017	*Equipment*
Total		15,326,358,946		***Total***

31 Desember 2016	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	Akumulasi biaya/ Accumulated cost	*Estimasi penyelesaian/ Estimated completion*	*December 31, 2016*
Bangunan	67,08%	11,091,005,076	2016	*Building*
Inventaris	86,89%	1,945,776,000	2016	*Equipment*
Total		13,036,781,076		***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2017, bangunan dalam penyelesaian terdiri dari pembangunan gedung Kantor Cabang SP IV Timika, Kantor Cabang Pembantu Prafi, perencanaan Cabang Sentani dan Kantor Cabang Timika dan Inventaris dalam penyelesaian terdiri dari pengadaan IP CCTV Kantor Pusat, Aplikasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Online Serta Pengadaan Furniture Elektrikal Gedung KCP Prafi.

As of December 31, 2017, the building in progress consists of the construction of the Branch Office of SP IV Timika, the Prafi Maid Office, the planning of the Sentani Branch and the Timika Branch Office and Inventory is in progress from the procurement of IP CCTV Head Office, Application of Bank Business Plan (RBB) Online and Procurement of Electrical Furniture of KCP Prafi Building.

Pada tanggal 31 Desember 2016, bangunan dalam penyelesaian terdiri dari pembangunan Gedung Cabang Sentani dan Kantor Cabang Pembantu SP IV Timika, Perencanaan Pembangunan Kantor Cabang Pembantu SP IV Timika, serta bangunan dalam penyelesaian lainnya dan Inventaris dalam penyelesaian terdiri dari pengadaan Contact Center dan IP CCTV Kantor Pusat, Aplikasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Online, serta inventaris dalam penyelesaian lainnya.

As of December 31, 2016, Contruction in progress consist of development of building of Sentani Branch Office and SP IV Timika Sub Branch Office, Development's Planning for SP IV Timika Sub Branch Office, and other contruction in progres dan Equipment in Progress consist of Head Office Contact Center and IP CCTV procurement, and Online Bank Business Plan System procurement, and other equipment in progress.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET LAIN-LAIN / *11. OTHER ASSETS*

	2017	2016	
Aset tidak produktif	100,520,410,000	85,000,000,000	*Assets - non productive*
Taksiran pajak penghasilan badan lebih bayar (PPh 28A) (lihat Catatan 18.a)	72,785,772,367	73,993,500,989	*Estimated claimed tax refund (income tax art.28A) (see Note18.a)*
Aset pajak tangguhan (lihat Catatan 18.e)	89,849,913,766	64,122,849,154	*Deffered tax asset (see Note 18.e)*
Piutang bunga Pinjaman	38,427,315,959	46,738,733,207	*Interest receivables*
Uang muka lainnya	34,689,249,924	48,595,584,178	*Other prepayment*
Biaya dibayar di muka	17,044,736,953	21,361,481,977	*Prepaid expenses*
Beban ditangguhkan lainnya	7,887,935,059	8,752,701,197	*Deffered other expenses*
Bunga atas penempatan pada bank lain	3,953,943,325	8,695,644,509	*Placement and marketable securities accrued interest*
Persediaan lainnya	3,464,841,217	2,175,928,537	*Other inventory*
Persediaan kantor	2,248,256,089	2,253,074,684	*Office supplies*
Uang jaminan	2,112,870,000	2,155,370,000	*Security deposit*
Bunga atas penempatan pada bank lain	1,500,887,888	1,516,839,276	*Interest on placement at other bank*
Premium surat berharga dibayar dimuka	1,577,980	61,866,075	*Prepaid premium on marketable securities*
Uang muka pajak	-	4,251,190	*Taxes Prepayment*
Lainnya	164,633,431,860	194,273,303,093	*Printing matters*
Total	539,121,142,387	559,701,128,066	*Total*

Aset tidak produktif / *Assets - non productive*

Rincian atas aset tidak produktif adalah sebagai berikut: / *Details of assets - non productive are as follows:*

	2017	2016	
Agunan yang diambil alih	129,292,666,813	113,772,256,813	*Foreclosed assets*
Properti terbengkalai	169,210,927	169,210,927	*Abandoned property*
Total	129,461,877,740	113,941,467,740	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai:			*Allowance for impairment losses:*
Aset yang diambil alih	28,772,256,813	28,772,256,813	*Foreclosed assets*
Properti terbengkalai	169,210,927	169,210,927	*Abandoned property*
Total penyisihan	28,941,467,740	28,941,467,740	*Total allowance*
Bersih	**100,520,410,000**	**85,000,000,000**	***Net***

Saldo agunan yang diambil alih atau kompensasi pinjaman yang diberikan berupa tanah. Per 31 Desember 2017 Bank Papua melakukan penyisihan penghapusan AYDA untuk Kantor Cabang Merake dan Properti Terbengkalai untuk Kantor Pusat dan Kantor Cabang Merauke sesuai dengan PBI 14/15/PBI/2012 sebesar 100% dikarenakan telah diambil alih lebih dari 5 (lima) tahun.

Foreclosed assets comprise of land structure. As of December 31, 2017 Bank of Papua conduct of allowance for foreclosed assets for Merauke Branch Office and abandoned property for Head Office and Merauke Branch Office in accordance with PBI 14/15/PBI/2012 amounted to 100% because the item has been taken more than 5 (five) years.

Saldo aset tidak produktif per 31 Desember 2016 sebesar Rp129.461.877.740 terdiri dari Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebesar Rp129.292.666.813 dengan rincian Rp.100.000.000.000 untuk Kantor Cabang Utama Jayapura, Rp13.772.256.813 untuk Kantor Cabang Merauke dan Rp15.520.410.000 untuk Kator Cabang Jakarta dan properti terbengkalai sebesar Rp169.210.927 dengan rincian Kantor Pusat sebesar Rp89.887.050 dan Kantor Cabang Merauke sebesar Rp79.323.877. Dengan penyisihan penghapusan sebesar Rp28.941.467.740 dengan rincian untuk AYDA Rp13.772.256.813 dan properti terbengkalai sebesar Rp169.210.927.

Non productive assets as of December 31, 2017 amounted Rp129,461,877,740 consist of foreclosed assets in amount Rp129,292,666,813 with details Rp100,000,000,000 for Jayapura Main Branch Office and Rp13,772,256,813 for Merauke Branch Office and Rp15,520,410,000 for Jakarta Branch Office and abandoned property of Rp169.210.927 with details of Head Office for Rp89,887,050 and Merauke Branch Office of Rp79,323,877 With allowance for possible losses of Rp28,941,467,740 with details for foreclosed assets of Rp13,772,256,813 and Abandoned Property of Rp169,210,927.

Berdasarkan risalah Komite Kredit tanggal 18 Desember 2015 dan 13 Oktober 2017, diputuskan pengambil alihan agunan atau Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), dari PT Trah Maju Tama dan PT Njonja Meneer. Kesepakatan atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) tersebut belum dirumuskan dan disahkan dengan Akta Notaris tentang Akta Kesepakatan Penyerahan Secara Sukarela. Posisi liabilitas PT Trah Maju Tama dan PT Njonja Meneer per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp100.000.000.000 dan Rp15.520.410.000.

On December 18, 2015 and October 13, 2017, credit commitee decided to take over the collateral of PT Trah Maju Tama and PT Njonja Meneer as foreclosed asset. The agreement of foreclosed asset has not been ratified by Notarial Deed on Agreement of Voluntary Commitment. The liability of PT Trah Maju Tama and Njonja Meneer ended December 31, 2017 in amount Rp100,000,000,000 and Rp15,520,410,000.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Aset tidak produktif

Saldo agunan sebesar Rp119.000.439.998 dengan rincian sebagai berikut:

a. SHM No.09985 SU No.02781/2002, SHM No.0773 SU No.00350/2013,dan SHM No.4850 SU No.7547/1995 atas nama Sukron Hadiwijaya, total luas masing-masing 426 m2, 847 m2, dan 1.504 m2, terletak di Kel. Catur Tunggal Kab. Sleman Propinsi Jogjakarta, Kel. Sinduharjo Kab. Sleman Propinsi Jogjakarta, dan Kel. Condong Catur Kab. Sleman Propinsi Jogjakarta dengan nilai agunan Rp52.168.625.000.

b. SHM No.01891 atas nama Dasikun, total luas 7.500 m2, terletak di Kel. Skamto Kec. Arso Kab. Jayapura dengan nilai agunan sebesar Rp383.833.333.

c. SHM No.01895 atas nama Jauli, luas 7.500 M2, terletak di Kel. Skamto, Kec. Arso Kab. Jayapura dengan nilai agunan sebesar Rp383.333.333.

d. SHM No.01896 atas nama Suparno, luas 7.500 M2, terletak di Kel. Skamto, Kec. Arso Kab. Jayapura dengan nilai agunan sebesar Rp383.333.333.

e. SHM No.01897 atas nama Supardon, luas 7.500 M2, terletak di Kel. Skamto, Kec. Arso Kab. Jayapura dengan nilai agunan sebesa Rp383.333.333.

f. SHM No.01898 atas nama Tasman, luas 7.500 M2, terletak di Kel. Skamto, Kec. Arso Kab. Jayapura dengan nilai agunan sebesar Rp383.333.333.

g. SHM No.01899 atas nama Enar, luas 7.500 M2, terletak di Kel. Skamto, Kec. Arso Kab. Jayapura dengan nilai agunan sebesar Rp383.333.333.

h. Fiducia atas nama PT Trah Maju Tama berupa stok barang.

i. SHGB sebanyak 6 sertifikat terdiri dari No.11, 12, 13, 14, 15, 16 atas nama PT Purni Mekar Perkasa Jaya, luas masing-masing 24 M2 untuk 5 sertifikat dan 26 M2 untuk 1 sertifikat. Terletak di Desa Sambirejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri Propinsi Jawa Timur dengan nilai agunan masing-masing Rp344.000.000. Jatuh tempo tanggal 29 April 2043 untuk semua sertifikat.

j. SHGU No.002 atas nama PT Purni Mekar Perkasa Jaya dengan luas 5.005.530 M2. Terletak di Kel. Skamto Kec. Keerom Kab. Keerom Propinsi Papua.

Nilai atas kedua agunan tersebut di atas diperoleh dari hasil penilaian appraisal independen pada tahun 2015 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Guntur,Eki,Andri & Rekan.

Saldo agunan sebesar Rp15.216.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

a. SHGB No.497 atas nama PT Njonja Meneer, total luas 1.269m2, terletak di Jl. Raden Parag 177 kel. Mlatibaru dengan nilai agunan sebesar Rp5.156.000.000.

b. SHM No.504 dan 513 atas nama Charles Saerang, total luas 784m2, terletak di Kompleks bukit sari Jl bukit indah no.16 di Kel. Jagli Kec.Tembalang Kota Semarang dengan nilai agunan sebesar Rp4.550.000.000.

c. SHM No.842 atas nama Charles Saerang, total luas 807m2, terletak di Jl Bukit Wisnu di Kel. Jagli Kec.Tembalang Kota Semarang dengan nilai agunan sebesar Rp5.510.000.000.

Nilai atas agunan tersebut di atas diperoleh dari hasil penilaian appraisal independen pada tahun 2017 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi dan Rekan

11. OTHER ASSETS (continued)

Assets - non productive

Collateral position amounted to Rp119,000,439,998 are as follows:

a. Land ownership certificate (SHM) No.09985 SU No.02781/2002, SHM No.0773 SU No.00350/2013, and SHM No.4850 SU No.7547/1995 on behalf Sukron Hadiwijaya, the total area each of 426 m2, 847 m2, and 1.504 m2, located on Kel. Catur Tunggal Kab. Sleman Propinsi Jogjakarta, Kel. Sinduharjo Kab. Sleman Propinsi Jogjakarta, and Kel. Condong Catur Kab. Sleman Propinsi Jogjakarta with collateral amounted Rp52,168,625,000.

b. Land ownership certificate (SHM) No.01891 on behalf Dasikun, the total area of 7,500 M2, located on Kel. Skamto Kec. Arso Kab. Jayapura with collateral amounted Rp383,833,333.

c. Land ownership certificate (SHM) No.01895 on behalf Jauli, the total area of 7,500 M2, located on Kel. Skamto Kec. Arso Kab. Jayapura with collateral amounted Rp383,833,333

d. Land ownership certificate (SHM) No.01896 on behalf Suparno, the total area of 7.500 M2, located on Kel. Skamto Kec. Arso Kab. Jayapura with collateral amounted Rp383,833,333.

e. Land ownership certificate (SHM) No.01897 on behalf Supardon, the total area of 7.500 M2, located on Kel. Skamto Kec. Arso Kab. Jayapura with collateral amounted Rp383,833,333.

f. Land ownership certificate (SHM) No.01898 on behalf Tasman, the total area of 7.500 M2, located on Kel. Skamto Kec. Arso Kab. Jayapura with collateral amounted Rp383,833,333.

g. Land ownership certificate (SHM) No.01899 on behalf Enar, the total area of 7.500 M2, located on Kel. Skamto Kec. Arso Kab. Jayapura with collateral amounted Rp383,833,333.

h. Fiducia in stock of goods on behalf PT Trah Maju Tama.

i. Lands Right to Use certificate (SHGB) with 6 certificates consist of No.11, 12, 13, 14, 15, 16 on behalf PT Purni Mekar Perkasa Jaya, the total area each 24 M2 for 5 certificates and 26 M2 for 1 certificate. Located on Desa Sambirejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri, East Java with collateral each amounted Rp344,000,000. Maturity date on April 29, 2043 for all certificates.

j. SHGU No.002 on behalf PT Purni Mekar Perkasa Jaya with total area 5,005.530 M2. Located on Kel. Skamto Kec Keerom Kab. Keerom, Papua Province.

Value of both collateral mentioned above were obtained from the results of an independent appraisal in 2015 by the Office of Public Appraisal Service Guntur, Eki, Andri & Partner.

Collateral position amounted to Rp119,216,000,000 are as follows:

a. Lands Right to Use certificate (SHGB) No.497 on behalf PT Njonja Meneer, the total area of 1,269m2, located on Jl. Raden Parag 177 kel. Mlatibaru with collateral amounted Rp5,156,000,000.

b. Land ownership certificate (SHM) No.504 and 513 on behalf Charles Saerang, the total area of 784m2, located on Kompleks bukit sari Jl Bukit Indah No.16 in Kel. Jagli Kec. Temalang Semarang City with collateral amounted Rp4,550,000,000.

c. Land ownership certificate (SHM) No.842 on behalf Charles Saerang, the total area of 807m2, located on Jl Bukit Wisnu in Kel. Jagli Kec. Temalang Semarang City with collateral amounted Rp5,510,000,000.

Value of both collateral mentioned above were obtained from the results of an independent appraisal in 2015 by the Office of Public Appraisal Service Sih Wiryadi & Partner.

11. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Aset tidak produktif (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas aset - aset yang disebutkan di atas telah memadai.

Biaya dibayar dimuka

Per 31 Desember 2017, biaya dibayar dimuka sebesar Rp17.044.736.953 termasuk didalamnya merupakan sewa dibayar dimuka atas sewa kantor sebesar Rp14.672.482.368.

12. LIABILITAS SEGERA

Akun ini merupakan kewajiban Bank Papua yang harus segera dibayar, dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016	
Rekening titipan	521,300,482,109	415,434,003,033	*Accounts not yet setteld*
Liabilitas kepada Kantor Bendahara dan Kas Negara	126,413,616,667	134,017,096,573	*Liabilities to the State Treasury and Cash Office*
Setoran Jaminan yang telah jatuh tempo tetapi belum diambil nasabah	12,009,642,488	15,070,886,577	*Matured security deposits not yet collected by customers*
Utang Bunga	4,630,133,308	1,848,016,548	*Interest Payable*
Total liabilitas segera lainnya	**664,353,874,572**	**566,370,002,731**	***Total Obligation Due Immediatelly***

Titipan SPMU Kabupaten

Titipan SPMU Kabupaten merupakan rekening titipan yang bersumber dari kas atau giro pemda untuk pembayaran ke pihak ke 3 (tiga) namun belum dapat dibayarkan karena persyaratan administrasi belum lengkap atau belum adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Titipan Dana *Block Grand*

Titipan dana *Block Grand* merupakan rekening titipan yang bersumber dari dana otonomi khusus. Dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan program RESPEK di wilayah distrik, kelurahan dan kampung-kampung di Propinsi Papua dan Papua Barat.

Pengelolaan dana *Block Grand* di seluruh wilayah Propinsi Papua dan Papua Barat dilaksanakan oleh Bank Papua. Adapun seluruh biaya yang timbul menjadi tanggungan Bank Papua.

Per 31 Desember 2017 saldo titipan dana *Block Grand* sejumlah Rp15.882.631.600 terdiri dari penerimaan dana untuk penyaluran tahun 2017 sebesar Rp15.320.200.000, penyaluran tahun 2016 sebesar Rp362.431.600, penyaluran tahun 2012 sebesar Rp100.000.000 dan penyaluran tahun 2009 sebesar Rp100.000.000.

11. OTHER ASSETS (continued)

Assets - non productive (continued)

Management believes that the allowance for impairment losses on the respective assets outlined above is adequate.

Prepaid expenses

As of December 31, 2017, prepaid expenses amounted to Rp17,044,736,953 comprise of prepaid office rent amounted to Rp14,672,482,368.

12. OBLIGATION DUE IMMEDIATELY

This account consists of obligation due immediately of Bank Papua, is as follows:

Regency payment orders

Regency payment orders are account not yet settled sourced from local government current account appropriated for payment to third parties, but not yet drowed-down cause of administrative requirement or the absence of Fund Disbursement Order (SP2D).

Deposit Funds of Block Grand

Deposit funds of Block Grand are account not yet settled from the special autonomy fund. The funds are used for programs in the region RESPEK districts and villages in the provinces of Papua and West Papua.

Fund management Block Grand on the whole territory of Papua and West Papua Provinces held by Bank Papua. As for all the costs incurred to be dependents by Bank Papua.

As of December 31, 2017 the balance of deposit funds Block Grand amounted Rp15,882,631,600 consist of receiving funds for disbursements Rp15,320,200,000 for the year 2017, distribution in 2016 amounted of Rp362,431,600, distibution in 2012 amounted of Rp100,000,000 and the distribution in 2009 amount of Rp100,000,000.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

12. LIABILITAS SEGERA (lanjutan)

Per 31 Desember 2017 rincian dana *Block Grand* berdasarkan tahun penyaluran dan cabang adalah sebagai berikut:

12. OBLIGATION DUE IMMEDIATELY (continued)

as of Desember 31, 2017 details of Block Grant funds by year and branch distribution are as follows:

Cabang/*Branch*	Tahun Penyaluran/*Distribution Years*				Jumlah per 31 Desember 2017 / *Total as of December 31, 2017*
	2017	2016	2012	2009	
KC Keppi	-	362,431,600	-	-	362,431,600
KC Timika	15,120,200,000	-	-	-	15,120,200,000
KCU Manokwari	-	-	-	100,000,000	100,000,000
KC Aimas	-	-	100,000,000	-	100,000,000
KC Fak- Fak	200,000,000	-	-	-	200,000,000
Jumlah/Total	15,320,200,000	362,431,600	100,000,000	100,000,000	15,882,631,600

Titipan Lainnya

Titipan lainnya merupakan titipan atas SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang belum dicairkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017

Other Deposits

Other deposits are deposits of SP2D (Fund Disbursement Order) that have not been disbursed until December 31, 2017

13. SIMPANAN NASABAH

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang

13. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

a. By Type and Currency

	2017	2016	
Giro	7,641,692,701,316	7,033,794,898,839	*Current accounts*
Tabungan	6,572,269,528,693	6,287,063,640,707	*Saving accounts*
Deposito berjangka	2,349,752,415,709	3,156,256,105,730	*Time accounts*
Jumlah	**16,563,714,645,718**	**16,477,114,645,276**	***Total***

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Based on Law No. 24 dated 22 September 2004, effective on 22 September 2005, which was amended by the Government Regulation No. 3 dated 13 October 2008, the Indonesia Deposit Insurance Agency (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, which the amount of guarantee can be amended if the situation complies with the valid particular criterias.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 untuk per nasabah per bank.

Based on Government Regulation No. 66 Year 2008 dated 13 October 2008 regarding The Amount of Deposit Guaranteed by Indonesia Deposit Insurance Corporation, the amount of deposits covered by LPS is customer deposits up to Rp2,000,000,000 per depositor per bank.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Bank Papua adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

As of 31 December 2017 and 2016, Bank Papua was a participant of that guarantee program.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

13. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

13. *DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

b. Berdasarkan Hubungan / *b. By relationship*

	2017	2016	
Pihak berelasi			*Related parties*
Giro	3,295,328,083,999	3,010,422,248,674	*Current accounts*
Tabungan	11,882,382,701	8,205,640,499	*Saving accounts*
Deposito berjangka	1,358,563,049,084	1,585,232,584,479	*Time accounts*
Jumlah pihak berelasi	4,665,773,515,784	4,603,860,473,652	*Total related parties*
Pihak ketiga			*Third parties*
Giro	4,346,364,617,317	4,023,372,650,165	*Current accounts*
Tabungan	6,560,387,145,992	6,278,858,000,208	*Saving accounts*
Deposito berjangka	991,189,366,625	1,571,023,521,251	*Time accounts*
Jumlah pihak ketiga	11,897,941,129,934	11,873,254,171,624	*Total third parties*
Jumlah	**16,563,714,645,718**	**16,477,114,645,276**	***Total***

c. Berdasarkan jenis / *c. By type*

	2017	2016	
Giro			*Current accounts*
Pemerintah Kabupaten / Kota	2,400,112,959,459	2,277,324,556,526	*Local Regency Government*
Swasta	3,828,694,863,418	3,323,844,797,783	*Privates*
Pemerintah Provinsi	1,074,063,191,058	1,121,568,474,846	*Local Government*
Pemerintah Lainnya	275,160,068,878	224,948,631,501	*Other Government*
Lainnya	63,661,618,503	86,108,438,184	*Others*
Jumlah giro	7,641,692,701,316	7,033,794,898,839	*Total current accounts*
Tabungan			*Saving accounts*
Simpeda	2,583,659,371,430	2,702,240,932,288	*Simpeda*
Simanja	2,570,647,641,480	2,437,143,221,751	*Simanja*
Tabungan Dana Desa	495,622,286,963	224,008,885,882	*Tabungan Dana Desa*
Tabungan KPE	431,193,871,234	403,672,727,890	*Tabungan KPE*
Tabunganku	312,059,406,367	342,941,980,653	*Tabunganku*
Pemberdayaan Masyarakat	124,877,123,680	129,201,019,889	*Pemberdayaan Masyarakat*
Tabungan SIMPEL	29,410,494,485	14,223,385,098	*Tabungan SIMPEL*
Tabunganku LPMAK	11,671,746,638	12,970,876,260	*Tabunganku LPMAK*
Tabungan Simpel PIP PA	3,109,303,650	1,206,400,000	*Tabungan Simpel PIP PA*
Tabungan Simanja DAK BRS	2,910,000,000	-	*Tabungan Simanja DAK BRS*
Tabungan BSM SD	2,036,928,558	12,048,554,720	*Tabungan BSM SD*
Tabungan Simanja BSPS	1,854,270,000	97,500,000	*Tabungan Simanja BSPS*
Tabungan Simanja UNIPA	1,182,650,148	708,260,070	*Tabungan Simanja UNIPA*
Tabungan BSM SMA	337,129,340	303,867,259	*Tabungan BSM SMA*
Tabungan BSM SMP	992,863,986	4,836,855,739	*Tabungan BSM SMP*
Tabungan Simanja Asmat Pintar	388,158,707	-	*Tabungan Simanja Asmat Pintar*
Tabungan BSM SMK	189,074,970	1,303,694,970	*Tabungan BSM SMK*
Tabungan gaji Jakarta	118,991,543	120,994,455	*Tabungan gaji Jakarta*
Tabungan Simanja TNP	8,215,515	34,483,783	*Tabungan Simanja TNP*
Jumlah tabungan	6,572,269,528,693	6,287,063,640,707	*Total saving accounts*
Deposito berjangka			*Time deposit*
1 (satu) bulan	1,437,787,644,105	1,698,175,007,259	*1 (one) month*
3 (tiga) bulan	527,452,074,445	573,691,215,609	*3 (three) month*
6 (enam) bulan	180,848,658,470	83,977,116,874	*6 (six) month*
12 (dua belas) bulan	159,056,072,022	761,189,870,821	*12 (twelve) month*
24 (dua puluh empat) bulan	44,607,966,667	39,222,895,167	*24 (twenty four) month*
Jumlah deposito berjangka	2,349,752,415,709	3,156,256,105,730	*Total time deposit*
Jumlah	**16,563,714,645,718**	**16,477,114,645,276**	**Total**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

13. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

d. Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan

	2017	2016	
Giro	513,640,646,668	101,291,731,185	*Current accounts*
Tabungan	201,783,807,776	102,136,732,785	*Saving accounts*
Deposito berjangka	750,000,000	1,150,000,000	*Time accounts*
Jumlah	716,174,454,444	204,578,463,970	*Total*

d. Tingkat suku bunga per tahun

2017	2016
0.00% - 6.25%	0.00% - 6.68%

13. *DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

d. Deposits blocked and pledged as collateral

14. SIMPANAN DARI BANK LAIN

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang

	2017	2016	
Giro	89,793,117,835	84,249,645,543	*Current accounts*
Tabungan	1,726,947,452	5,116,899,341	*Saving accounts*
Deposito berjangka	340,000,000	2,998,000,000	*Time accounts*
Jumlah	**91,860,065,287**	**92,364,544,884**	***Total***

b. Berdasarkan Hubungan

	2017	2016	
Pihak ketiga			*Third parties*
Giro	89,793,117,835	84,249,645,543	*Current accounts*
Tabungan	1,726,947,452	5,116,899,341	*Saving accounts*
Deposito berjangka	340,000,000	2,998,000,000	*Time accounts*
Jumlah pihak ketiga	91,860,065,287	92,364,544,884	*Total third parties*
Jumlah	**91,860,065,287**	**92,364,544,884**	***Total***

c. Berdasarkan jenis

	2017	2016	
Giro			*Current accounts*
Bank Swasta Lainnya	46,841,644,590	44,410,669,822	*Other Private banks*
Bank pemerintah	42,761,424,510	39,569,828,833	*Government banks*
Bank BPD	190,048,735	269,146,888	*BPD banks*
Jumlah Giro	89,793,117,835	84,249,645,543	*Total current accounts*
Tabungan			*Saving accounts*
Tabungan bank lainnya	1,726,947,452	5,116,899,341	*Saving of other banks*
Jumlah tabungan	1,726,947,452	5,116,899,341	*Total saving accounts*
Deposito berjangka			*Time deposit*
1 (satu) bulan	-	100,000,000	*1 (one) month*
3 (tiga) bulan	42,000,000	1,072,000,000	*3 (three) month*
6 (enam) bulan	48,000,000	348,000,000	*6 (six) month*
12 (dua belas) bulan	250,000,000	250,000,000	*12 (twelve) month*
24 (dua puluh empat) bulan	-	1,228,000,000	*24 (twenty four) month*
Jumlah deposito berjangka	340,000,000	2,998,000,000	*Total time deposit*
Jumlah	**91,860,065,287**	**92,364,544,884**	**Total**

14. *DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

a. By Type and Currency

b. By relationship

c. By type

14. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)

d. Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan

	2017	2016	
Giro	21,633,232,434	17,500,000,000	Current accounts
Jumlah	21,633,232,434	17,500,000,000	Total

e. Tingkat suku bunga per tahun

2017	2016
0.00% - 5.80%	0.00% - 6.68%

14. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)

d. Deposits blocked and pledged as collateral

e. Annual interest rates

15. PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman diterima terdiri dari:

15. BORROWINGS

Borrowing consist of:

	2017	2016	
KUMK SUP-005	8,594,623,291	25,000,000,000	KUMK SUP-005
Pinjaman ICM Bank Umum	-	300,000,000,000	ICM Commercial Bank loans
Total pinjaman yang diterima	8,594,623,291	325,000,000,000	Total borrowing

a. Pinjaman KUMK SUP-005

Pinjaman yang berasal dari dana Surat Utang Pemerintah (SUP) No. SU-005/MK/1999 tanggal 29 Desember 1999 untuk digunakan dalam rangka pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK). Pemerintah diwakili oleh Direktur Jendral Pembendaharaan Departemen Keuangan telah memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp35.000.000.000 sesuai perjanjian pinjaman No.KP-23/DP3/2004 tanggal 26 Juli 2004 sebagaimana dan perubahan perjanjian pinjaman nomor: AMA-8/KP-023/DP3/2004 tanggal 15 Desember 2004 dan nomor: AMA-57/KP-023/DSMI/2009 tanggal 14 September 2009 serta perubahan nomor: AMA-82/KP-023/DSMI/2015 tanggal 12 Januari 2015. Jangka waktu pinjaman dari tanggal 26 Juli 2004 sampai dengan 10 Desember 2009 dan diperpanjang sampai dengan 10 Desember 2019 dengan tingkat suku bunga sesuai dengan suku bunga SBI berjangka 3 bulan yang dibayarkan setiap tri-wulan tanggal 10. Untuk angsuran pokok dibayar tiap tengah semester dimulai tanggal 10 Desember 2017 dan berakhir tanggal 10 Desember 2019. Pada tanggal 4 September 2017 dan 10 Desember 2017 dilakukan pengembalian pinjaman sebesar Rp15.000.000.000 dan Rp2.000.000.000 sehingga sisa pinjaman menjadi sebesar Rp8.000.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 jumlah pembayaran bunga sebesar Rp106.586.842 dan Rp2.184.449.885.

a. KUMK SUP-005 Borrowing

Borrowing from the Government Debt Securities (GDS) No.SU005/MK/1999 dated December 29, 1999 for the purpose of funding of Micro and Small Business Loans (KUMK). According to the borrowing agreement No.KP-23/DP3/2004 dated July 26, 2004 which modified with number AMA-8KP.023/DP3/2004 dated December 15, 2004, and AMA-57/KP-023/DSMI/2009 dated September 14, 2009 and AMA82/KP-023/DSMI/2015 tanggal Januari 12, 2015, the government represented by the Director General of Treasury of the Minister of Finance has granted a borrowing facility amounted to Rp35,000,000,000. The borrowing period from July 26, 2004 to December 10, 2009 and were rescheduled until December 10, 2019, with the interest rate is according to interest rate of Bank Indonesia Certificate, and the borrowing payments are on the 10th of every 3 months. For the payments of borrowing principal are made on the 10th of every six months, starting from December 10, 2017 until December 10, 2019. On April 4, 2017 adn December 10, 2017, bank has made repayment of the loan amounted to Rp15,000,000,000 and Rp2,000,000,000, so that the rest of the loans amounted to Rp8,000,000,000. As of December 31, 2017 and 2016, the amount of interest payment were Rp106,586,842 and Rp2,184,449,885.

b. Pinjaman ICM Bank Umum

Pada tanggal 31 Desember 2016 Terdapat saldo ICM Bank Umum sebesar Rp300.000.000.000 dan atas pinjaman tersebut telah dilunasi seluruhnya di tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Pinjaman ICM dari Pan Indonesia Bank Jakarta

- Senilai Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga 8,00%, Jangka waktu 22 Desember 2016 sampai dengan 05 Januari 2017. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 05 Januari 2017.
- Senilai Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga 8,00%, Jangka waktu 22 Desember 2016 sampai dengan 05 Januari 2017. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 05 Januari 2017.
- Senilai Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga 8,30%, Jangka waktu 22 Desember 2016 sampai dengan 05 Januari 2017. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 05 Januari 2017.

b. ICM Commercial Bank Loans

On December 31, 2016 There is a ICM Commercial Bank Amounted to Rp300,000,000,000 and above the loan was repaid in 2017 with the following details:

ICM loan from Pan Indonesia Bank Jakarta

- *Amounted Rp100,000,000,000 with an interest rate of 8.00%, due on January 5, 2016 This loan was fully repaid on January 5, 2017.*
- *Amounted Rp100,000,000,000 with an interest rate of 8.00%, due on January 5, 2016 This loan was fully repaid on January 5, 2017.*
- *Amounted Rp100,000,000,000 with an interest rate of 8.30%, due on January 5, 2016 This loan was fully repaid on January 5, 2017.*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

16. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI

a. Transaksi komitmen dan kontinjensi dalam kegiatan usaha Bank Papua yang dicatat pada *extra-comptable* adalah sebagai berikut:

	2017	2016	
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	554,511,187,611	574,575,909,350	*Unused loan facilities*
Bank garansi yang diterbitkan	151,694,264,701	290,882,925,424	*Bank guarantees issued*
Saldo Akhir Tahun	**706,205,452,312**	**865,458,834,774**	***Ending balance***

b. Perubahan estimasi kerugian pada komitmen dan kontinjensi:

	2017	2016	
Saldo awal tahun	-	-	*Beginning balance*
(Pembalikan Penyisihan) Penyisihan kerugian selama tahun berjalan	-	-	*(Reversal of provision) Provision during the current year*
Saldo Akhir Tahun	**-**	**-**	***Ending balance***

Berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP tentang Penyesuaian Pelaporan di LBU, penyajian di Laporan Keuangan, dan Perhitungan KPMM terkait dengan Penerbitan SE No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2012 mengenai Laporan Keuangan Publikasi Triwulan dan Bulanan Bank Umum tanggal 23 Desember 2012, Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) untuk aset non produktif dan Transaksi Rekening Administratif (TRA) tidak diperhitungkan lagi di posisi Laporan Keuangan (laporan posisi keuangan) dan Laporan Laba Rugi Bank.

Hal tersebut di atas dilakukan sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No.13/30/DPNP perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia (SE LKP) yang terbit tanggal 16 Desember 2012, maka sejak pelaporan posisi Desember 2012, LKP disajikan sesuai format pada Lampiran SE dimaksud.

Kolektibilitas atas transaksi komitmen dan kontijensi dalam kegiatan usaha bank yang mempunyai risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 digolongkan lancar. Manajemen bank berpendapat bahwa jumlah estimasi kerugian komitmen dan kontijensi adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak terealisasinya transaksi komitmen dan kontijensi.

16. ALLOWANCE FOR POSSIBLE ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Commitments and contingent transactionsin the normal course of Bank Papua's activities that have recorded on extra-comptable are as follows:

b. Movements of estimated losses on commitments and contingencies:

Based on the Letter of Bank Indonesia on 13/658/DPNP/IDPnP about Adjustment Reporting in LBU, the presentation of the financial statements, and the calculation of CAR associated with the issuance of the SE No. 13/30/DPNP dated December 16, 2012 concerning Quarterly Financial Reports and Monthly Commercial Bank dated December 23, 2012, allowance for assets (PPA) for non-productive assets and Off-statements of financial position Transaction (TRA) are not counted again in the position of Bank's Financial Statements (statements of financial position) and Income Statement.

The foregoing relates to the issuance of Bank Indonesia Circular Letter No.13/30/DPNP perihall Third Amendment to Bank Indonesia Circular Letter No. 3/30/DPNP dated December 14, 2001 concerning Quarterly Financial Report and Monthly Report of Commercial Banks and Terrtentu submitted to Bank Indonesia (SE CGC), published on December 16, 2012, since reporting positions December 2012, CGC is presented in conformity format with Appendix SE.

Collectibility of commitment and contingencies bearing credit risk as of December 31, 2017 and 2016 are classified as current. Management states that such estimates are adequate to cover the posible loss arising from such unrealized commitments and contingencies.

17 LIABILITAS LAIN-LAIN

Rincian akun liabilitas lain-lain adalah sebagai berikut:

17 OTHER LIABILITIES

Detail of other liabilities is as follows:

	2017	2016	
Liabilitas manfaat karyawan (lihat Catatan 30)	359,450,839,310	258,824,326,669	*Post-employment benefit (see Note 30)*
Rekening Titipan	19,321,826,446	429,246,215,685	*Accounts no yet settled*
Biaya yang masih harus dibayar	9,550,267,200	6,395,909,798	*Accrued expenses*
Bunga deposito	6,671,259,322	9,856,833,913	*Interest of time deposit*
Setoran jaminan	1,628,763,326	9,332,563,922	*Bonds*
Jasa produksi dan Tantiem Direksi dan Dewan Pengawas (lihat Catatan 26)	145,930,492	67,642,994,141	*Bonuses and Directors and Boards of Regulatory's tantiems (see Note 26)*
Pendapatan diterima dimuka	29,400,000	185,823,348	*Unearned revenues*
Lainnya	487,405,471	261,063,336	*Others*
Jumlah liabilitas lain-lain	397,285,691,567	781,745,730,812	*Total other liabilities*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

17 LIABILITAS LAIN-LAIN (lanjutan)

Titipan

Pada tanggal 31 Desember 2017 terdapat saldo titipan pada rekening titipan sebesar Rp19.321.826.446 terdiri dari titipan notaris yang berasal dari proses Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT), dan Asuransi Kredit masing - masing sebesar Rp10.281.947.076 dan Rp2.208.400.289.

Biaya yang masih harus dibayar

Biaya yang masih harus dibayar antara lain biaya kantor, listrik, air dan telekomunikasi.

17 OTHER LIABILITIES (continued)

Deposit

As of December 31, 2017, there is a deposit balance on deposit account amounted to Rp19,321,826,446consist of deposit from notary arises from the process of binding of mortgage (APHT) and Loan Assurance amounted to Rp10,281,947,076 and Rp2,208,400,289 respectively.

Accrued expenses

Acrued expenses consist of office exepenses, electrical, water and telecomunication.

18. PERPAJAKAN

18. TAXES

a. Uang Muka Pajak / *a. Prepaid Taxes*

	2017	2016	
PPh Pasal 28A	72,467,404,677	73,989,249,799	*Income tax article 28A*
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	318,367,690	4,251,190	*Value Added Tax (VAT)*
Jumlah	72,785,772,367	73,993,500,989	*Total*

b. Utang Pajak / *b. Taxes Payable*

	2017	2016	
PPN Keluaran	6,968,230,187	734,755,394	*VAT out*
PPh Lainnya	4,114,989,875	17,130,744,285	*Other income tax*
PPh Pasal 21	4,511,881,345	4,874,615,616	*Income tax article 21*
PPh 29 Badan	13,985,273,674	-	*Corporate income tax article 29*
Jumlah	29,580,375,081	22,740,115,295	*Total*

c. Beban Pajak Penghasilan - Bersih / *c. Current Income Tax Expenses - Net*

	2017	2016	
Pajak kini	(40,762,423,000)	(68,632,389,250)	*Current income tax*
Pajak tangguhan	9,649,375,859	(23,991,690,048)	*Deferred income tax*
Jumlah	(31,113,047,141)	(92,624,079,298)	*Total*

d. Perhitungan Pajak Kini / *d. Calculation of Current Corporate Income Tax*

	2017	2016	
Laba (Rugi) sebelum Pajak	144,385,707,300	270,571,976,563	*Income (loss) before income tax*
Beda Temporer			*Temporary differences*
Penyisihan beban imbalan kerja	82,840,228,218	19,046,528,780	*Provision for employee benefits*
Jumlah	82,840,228,218	19,046,528,780	*Total*
Beda Tetap			*Permanent differences*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	(64,176,242,785)	(15,088,948,343)	*Non - deductible expenses*
Jumlah beda tetap	(64,176,242,785)	(15,088,948,343)	*Total*
Laba kena pajak	163,049,692,733	274,529,557,000	*Taxable income*
Beban pajak penghasilan badan	40,762,423,000	68,632,389,200	*Corporate inceme tax expense*
Dikurangi pajak dibayar dimuka	(26,777,149,326)	(138,888,047,783)	*less prepaid tax*
Kurang (lebih) bayar pajak penghasilan badan	13,985,273,674	(70,255,658,583)	*Income tax (liability) /receivable*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

18. TAXES (continued)

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba komersial sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income tax expense with the result of computation of commercial income with prevailing tax rates is as follows:

	2017	2016	
Laba sebelum pajak penghasilan	36,096,426,825	67,642,994,141	*Income before income tax*
Beda Temporer			*Temporary differences*
Penyisihan beban imbalan kerja	20,710,057,055	4,761,632,195	*Provision for employee benefits*
Jumlah Beda temporer	20,710,057,055	4,761,632,195	*Total*
Beda Tetap			*Permanent differences*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	(16,044,060,934)	(3,772,237,086)	*Non - deductible expenses*
Jumlah beda tetap	(16,044,060,934)	(3,772,237,086)	*Total*
Beban Pajak Kini	40,762,423,000	68,632,389,250	*Current income tax*

e. Pajak tangguhan

e. Deffered tax

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Details of deffered tax asset and liabilities as of December 31, 2017 and 2016, are as follows:

	31 Desember 2017 / December 31, 2017			
	Saldo awal	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ *Credited (Charged) to Statement of Profit or Loss*	Dibebankan ke Ekuitas/ *Charges to Equity*	Saldo
Kenaikan (Penurunan) Nilai pasar Surat berharga Tersedia untuk dijual *Increase (Decrease) In Marketable Securities Available for sale*	-	-	(12,796,062)	(12,796,062)
Imbalan manfaat karyawan/ Post-employment benefit	64,122,849,154	9,649,375,859	16,090,484,815	89,862,709,828
Jumlah	**64,122,849,154**	**9,649,375,859**	**16,077,688,753**	**89,849,913,766**

	31 Desember 2016 / *December 31, 2016*			
	Saldo awal	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ *Credited (Charged) to Statement of Profit or Loss*	Dibebankan ke Ekuitas/ *Charges to Equity*	Saldo
Kenaikan (Penurunan) Nilai pasar Surat berharga Tersedia untuk dijual *Increase (Decrease) In Marketable Securities Available for sale*	-	-	-	-
Imbalan manfaat karyawan/ Post-employment benefit	63,309,251,484	(23,991,690,048)	24,805,287,718	64,122,849,154
Jumlah	**63,309,251,484**	**(23,991,690,048)**	**24,805,287,718**	**64,122,849,154**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

19. MODAL SAHAM / *19. SHARE CAPITAL*

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank Papua pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut:

The details of the Bank Papua's authorized capital stock and issued and fully paid capital stock as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	2017		
Nama Pemegang Saham / Name of Shareholder	**Jumlah Saham Ditempatkan dan disetor Penuh (Lembar) / *Total Issued and Fully paid (shares)***	**Persentase Kepemilikan / *Precentage of Ownership (%)***	**Jumlah Kepemilikan / *Total Ownership (%)***
Saham seri A/ *Class A shares*			
a. Provinsi Papua:			
Province of Papua:			
Pem.Prov. Papua	77,721	20.37	388,605,000,000
Pem.Kab. Jayawijaya	7,802	2.04	39,010,000,000
Pem.Kab. Merauke	11,477	3.01	57,385,000,000
Pem.Kota. Jayapura	10,079	2.64	50,395,000,000
Pem.Kab. Jayapura	9,616	2.52	48,080,000,000
Pem.Kab. Yapen	7,593	1.99	37,965,000,000
Pem.Kab. Puncak Jaya	9,950	2.61	49,750,000,000
Pem.Kab. Biak Numfor	4,605	1.21	23,025,000,000
Pem.Kab. Mimika	15,346	4.02	76,730,000,000
Pem.Kab. Asmat	8,200	2.15	41,000,000,000
Pem.Kab. Sarmi	8,500	2.23	42,500,000,000
Pem.Kab. Pegunungan Bintang	10,400	2.73	52,000,000,000
Pem.Kab. Mappi	5,400	1.42	27,000,000,000
Pem.Kab. Nabire	5,756	1.51	28,780,000,000
Pem.Kab. Paniai	3,700	0.97	18,500,000,000
Pem.Kab. Tolikara	7,631	2.00	38,155,000,000
Pem.Kab. Keerom	5,029	1.32	25,145,000,000
Pem.Kab. Waropen	4,800	1.26	24,000,000,000
Pem.Kab. Boven Digul	3,600	0.94	18,000,000,000
Pem.Kab. Yahukimo	2,591	0.68	12,955,000,000
Pem.Kab. Lanni Jaya	2,500	0.66	12,500,000,000
Pem.Kab. Supiori	3,398	0.89	16,990,000,000
Pem.Kab. Memberamo Raya	4,200	1.10	21,000,000,000
Pem.Kab. Nduga	3,333	0.87	16,665,000,000
Pem.Kab. Dogiyai	3,274	0.86	16,370,000,000
Pem.Kab. Intan Jaya	1,747	0.46	8,735,000,000
Pem.Kab. Puncak	3,400	0.89	17,000,000,000
Pem.Kab. Memberamo Tengah	1,036	0.27	5,180,000,000
Pem.Kab. Yalimo	1,419	0.37	7,095,000,000
Pem.Kab. Deiyai	1,200	0.31	6,000,000,000
Sub Jumlah/ *Total*	245,303	64.29	1,226,515,000,000
b. Provinsi Papua Barat:			
Province of West Papua:			
Pem.Prov. Papua Barat	46,128	12.09	230,640,000,000
Pem.Kab. Manokwari	10,128	2.65	50,640,000,000
Pem.Kab. Fak-Fak	8,285	2.17	41,425,000,000
Pem.Kab. Raja Ampat	13,238	3.47	66,190,000,000
Pem.Kab. Kaimana	6,000	1.57	30,000,000,000
Pem.Kab. Manokwari Selatan	875	0.23	4,375,000,000
Pem.Kab. Sorong	5,955	1.56	29,775,000,000
Pem.Kab. Sorong Selatan	7,800	2.04	39,000,000,000
Pem.Kab. Teluk Bintuni	10,100	2.65	50,500,000,000
Pem.Kab. Teluk Wondama	5,400	1.42	27,000,000,000
Pem.Kota Sorong	2,400	0.63	12,000,000,000
Pem.Kab. Maybrat	3,215	0.84	16,075,000,000
Pem.Kab. Tambrauw	2,850	0.75	14,250,000,000
Pem.Kab. Pegunungan Arfak	3,000	0.79	15,000,000,000
Sub Jumlah/ *Total*	125,374	32.86	626,870,000,000
Jumlah Saham seri A/ *Total Class A shares*	**370,677**	**97.15**	**1,853,385,000,000**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

19. SHARE CAPITAL (continued)

2017

Nama Pemegang Saham / Name of Shareholder	Jumlah Saham Ditempatkan dan disetor Penuh (Lembar) / *Total Issued and Fully paid (shares)*	Persentase Kepemilikan / *Precentage of Ownership (%)*	Jumlah Kepemilikan / *Total Ownership (%)*
Saham seri B/ *Class B shares*			
c. Koperasi Serba Usaha Bank Papua Berdikari	10,893	2.85	54,465,000,000
Jumlah Saham seri B/ *Total Class B shares*	**10,893**	**2.85**	**54,465,000,000**
Jumlahl Modal/*Capital*	**381,570**	**100**	**1,907,850,000,000**
Tambahan Modal Disetor / *Additional Paid up Capital*	**19,061**	**-**	**95,306,705,785**

Jumlah yang disetor oleh para Pemegang Saham sampai dengan 31 Desember 2017 mencapai Rp2.003.156.705.785.

Tambahan modal disetor sebesar Rp140.865.000.000 telah disahkan menjadi modal saham berdasarkan akta notaris Lilis Heryeni, SH, Sp1, M.Si no. 06 tanggal 13 Juli 2017, tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Akta notaris H. Tri Mulyadi, SH., M.Kn no. 10 tanggal 15 Maret 2017 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Tambahan modal disetor sebesar Rp95.306.705.785 merupakan setoran modal dari kabupaten di Papua selama tahun 2017 yang akan disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham di tahun 2018.

Total paid up by shareholders as of December 31, 2017 amounted to Rp2,003,156,705,785.

Additional paid-in capital of Rp140,865,000,000 thereon ratified into the capital stock by virtue of notary deed Lilis Heryeni, SH, Sp1, M.Si, no. 06 dated July 13, 2017, regarding Annual General Shareholder's Meeting of PT Bank Pembangunan Daerah Papua and virtue of notary deed H.Tri Mulyadi, SH., M.Kn no.10 dated March 15, 2017, regarding Extraordinary General Shareholder's Meeting of PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Additional paid-in capital of Rp95,306,705,785 is a capital contribution of new districts in Papua during 2017 which will be ratified at the General Meeting of Shareholders in 2018.

2016

Nama Pemegang Saham / Name of Shareholder	Jumlah Saham Ditempatkan dan disetor Penuh (Lembar) / *Total Issued and Fully paid (shares)*	Persentase Kepemilikan / *Precentage of Ownership (%)*	Jumlah Kepemilikan / *Total Ownership (%)*
Saham seri A/ *Class A shares*			
a. Provinsi Papua:			
Province of Papua:			
Pem.Prov. Papua	62,721	18.46	313,605,000,000
Pem.Kab. Jayawijaya	7,802	2.30	39,010,000,000
Pem.Kab. Merauke	9,877	2.91	49,385,000,000
Pem.Kota. Jayapura	10,079	2.97	50,395,000,000
Pem.Kab. Jayapura	8,312	2.45	41,560,000,000
Pem.Kab. Yapen	7,593	2.23	37,965,000,000
Pem.Kab. Puncak Jaya	8,550	2.52	42,750,000,000
Pem.Kab. Biak Numfor	4,605	1.36	23,025,000,000
Pem.Kab. Mimika	15,346	4.52	76,730,000,000
Pem.Kab. Asmat	8,200	2.41	41,000,000,000
Pem.Kab. Sarmi	8,500	2.50	42,500,000,000
Pem.Kab. Pegunungan Bintang	7,400	2.18	37,000,000,000
Pem.Kab. Mappi	4,900	1.44	24,500,000,000
Pem.Kab. Nabire	4,356	1.28	21,780,000,000
Pem.Kab. Paniai	3,700	1.09	18,500,000,000
Pem.Kab. Tolikara	6,419	1.89	32,095,000,000
Pem.Kab. Keerom	4,000	1.18	20,000,000,000
Pem.Kab. Waropen	4,200	1.24	21,000,000,000
Pem.Kab. Boven Digul	3,000	0.88	15,000,000,000
Pem.Kab. Yahukimo	2,591	0.76	12,955,000,000
Pem.Kab. Lanni Jaya	2,500	0.74	12,500,000,000
Pem.Kab. Suplori	2,866	0.84	14,330,000,000
Pem.Kab. Memberamo Raya	3,000	0.88	15,000,000,000
Pem.Kab. Nduga	3,333	0.98	16,665,000,000
Pem.Kab. Dogiyai	2,674	0.79	13,370,000,000

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

19. MODAL SAHAM (lanjutan) / ***19. SHARE CAPITAL (continued)***

Nama Pemegang Saham / Name of Shareholder	Jumlah Saham Ditempatkan dan disetor Penuh (Lembar) / *Total Issued and Fully paid (shares)*	Persentase Kepemilikan / *Precentage of Ownership (%)*	Jumlah Kepemilikan / *Total Ownership (%)*
	2016		
Saham seri A/ ***Class A shares (lanjutan)***			
a. Provinsi Papua:			
Pem.Kab. Intan Jaya	1,747	0.51	8,735,000,000
Pem.Kab. Puncak	3,400	1.00	17,000,000,000
Pem.Kab. Memberamo Tengah	1,036	0.30	5,180,000,000
Pem.Kab. Yalimo	1,419	0.42	7,095,000,000
Pem.Kab. Deiyai	600	0.18	3,000,000,000
Sub Jumlah / *Total*	214,726	63.20	1,073,630,000,000
b. Provinsi Papua Barat:			
Province of West Papua:			
Pem.Prov. Papua Barat	46,128	13.58	230,640,000,000
Pem.Kab. Manokwari	9,028	2.66	45,140,000,000
Pem.Kab. Fak-Fak	7,685	2.26	38,425,000,000
Pem.Kab. Raja Ampat	9,700	2.85	48,500,000,000
Pem.Kab. Kaimana	6,000	1.77	30,000,000,000
Pem.Kab. Manokwari Selatan	700	0.21	3,500,000,000
Pem.Kab. Sorong	5,755	1.69	28,775,000,000
Pem.Kab. Sorong Selatan	7,000	2.06	35,000,000,000
Pem.Kab. Teluk Bintuni	8,100	2.38	40,500,000,000
Pem.Kab. Teluk Wondama	4,800	1.41	24,000,000,000
Pem.Kota Sorong	2,400	0.71	12,000,000,000
Pem.Kab. Maybrat	2,800	0.82	14,000,000,000
Pem.Kab. Tambrauw	2,450	0.72	12,250,000,000
Pem.Kab. Pengunungan Arfak	2,200	0.65	11,000,000,000
Sub jumlah / *Total*	114,746	33.77	573,730,000,000
Jumlah Saham seri A/ ***Total Class A shares***	**329,472**	**96.97**	**1,647,360,000,000**
Saham seri B/ ***Class B shares***			
c. Koperasi Serba Usaha Bank Papua Berdikari	10,293	3.03	51,465,000,000
Jumlah saham seri B/ ***Total class B shares***	**10,293**	**3.03**	**51,465,000,000**
Jumlahl Modal/*Capital*	**339,765**	**100.00**	**1,698,825,000,000**
Tambahan Modal Disetor / ***Additional Paid up Capital***	**11,634**	-	**58,170,973,957**

Sehingga jumlah modal saham yang disetor oleh pemegang saham pada 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp1.756.995.973.957.

Tambahan modal disetor sebesar Rp 208.220.000.000 telah disahkan menjadi modal saham berdasarkan akta notaris Maryatie Simanjuntak, S.H., no. 18 tanggal 19 Mei 2016, tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Tambahan modal disetor sebesar Rp 58.170.973.957 merupakan setoran modal dari kabupaten di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat untuk memenuhi komitmen setoran modal tahun 2016 yang akan disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham di tahun 2017.

Total paid up by shareholders as of December 31, 2016 amounted to Rp1,756,995,973,957.

Additional paid-in capital of Rp 208.220.000.000 thereon ratified into the capital stock by virtue of notary deed Maryatie Simanjuntak, S.H., no. 18 dated May 19, 2016, regarding Annual General Shareholder's Meeting of PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Additional paid-in capital of Rp 58.170.973.957 is a capital contribution of new districts in Province of Papua and Province of West Papua which will be ratified at the General Meeting of Shareholders in 2017.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

20. PEMBAGIAN LABA BERSIH

Penggunaan laba tahun 2016 ditetapkan berdasarkan akta notaris Lilis Heryeni, SH, SP1, M.si No. 06 tanggal 13 Juli 2017 tentang risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

Berdasarkan keputusan RUPS tersebut diatas, penggunaan laba tahun 2017 dan 2016 ditetapkan sebagai berikut:

	2017	2016	
Dividen	0.00%	70.00%	*Dividends*
Cadangan umum	100.00%	30.00%	*General reserve*
CSR	0.00%	0.00%	*CSR*
Tantiem	0.00%	0.00%	*Tantiems*
Dana pendidikan	0.00%	0.00%	*Education scholarship*
Jumlah laba yang dibagikan	100%	100%	*Total earning distribution*

Tantiem untuk Dewan Komisaris dan Direksi PT BPD Papua untuk tahun buku 2016 tidak dibayarkan, dikarenakan mempertimbangkan kondisi bank dalam status Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) oleh Otoritas Jasa Keuangan. Serta menetapkan laba bersih tahun buku 2016 sebesar Rp233.984.700.000 dengan penggunaan seluruhnya untuk cadangan umum.

20. DISTRIBUTION OF NET INCOME

Net income distribution for the year 2016 was made based on virtue of notarial deed Lilis Heryeni, SH, SP1, M.Si No. 06 dated July 13, 2017 regarding General Shareholder's Extraordinary Meeting.

Based on the above General Shareholder's Meeting, the distributions of income for the financial years 2017 and 2016, were as follows:

Tantiem for the Board of Commissioners and Board of Directors of PT BPD Papua for the fiscal year 2016 is not paid, due to considering the condition of the bank in the status of the Bank Under Intensive Supervision (BDPI) by the Financial Services Authority. And set the net profit for the fiscal year 2016 amounting to Rp233,984,700,000 with the use of all for general reserves.

21 PENDAPATAN BUNGA DAN OPERASIONAL

21 INTEREST AND OPERATING INCOMES

	2017	2016	
Pendapatan Bunga			***Interest and Operating Income***
Pendapatan bunga kredit			*Loan interest income*
Bunga kredit konsumsi	1,051,960,931,602	874,901,125,114	*Consumer loans interest*
Bunga kredit modal kerja	354,731,582,594	437,439,683,051	*Working capital loans interest*
Bunga kredit investasi	153,458,112,474	163,266,848,806	*Investment loans interest*
Bunga kredit sindikasi	106,250,372,531	119,866,350,499	*Syndicated loans interest*
Bunga kredit karyawan	26,310,865,758	20,028,116,355	*Employee loans interest*
Bunga kredit program pemerintah	3,116,310,184	8,846,430,877	*Government program credit interest*
Jumlah pendapatan bunga kredit	1,695,828,175,143	1,624,348,554,702	*Total loan interest income*
Pendapatan bunga penempatan			*Placement interest income*
Bunga penempatan bank lain	115,812,340,299	164,956,126,636	*Placement interest other bank*
Bunga penempatan bank Indonesia	23,417,949,896	13,502,691,181	*Deposits interest*
Bunga Efek-efek	279,737,538,233	285,853,254,527	*Current accounts service*
Jumlah Pendapatan bunga penempatan	418,967,828,428	464,312,072,344	*Total Placement interest income*
Jumlah	2,114,796,003,571	2,088,660,627,046	*Total*
Pendapatan operasional lainnya			***Operational Income***
Pendapatan hapus buku	61,106,237,937	6,251,244,819	*Written off income*
Pendapatan operasional lainnya	18,146,470,555	21,591,820,818	*Other operational income*
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar yang belum direalisasi dan penjualan instrumen keuangan	2,302,919,143	3,162,376,846	*Unrealized gain (loss) on changes in fair value and sale of financial instruments*
Jumlah	81,555,627,635	31,005,442,483	*Total*
Pendapatan provisi dan komisi			***Provision and commisions income***
Provisi lainnya	72,247,312,285	76,408,044,857	*Other provision*
Hasil komisi	26,337,544,512	23,947,696,727	*Comissions*
Jumlah	98,584,856,797	100,355,741,584	*Total*
Jumlah pendapatan bunga dan operasional	**2,294,936,488,004**	**2,220,021,811,112**	***Total interest and operational income***

Pendapatan provisi dan komisi merupakan pendapatan provisi dan komisi selain dari aktivitas pinjaman yang diberikan.

Provision and comission income generated from activities other than loans.

22. BEBAN BUNGA DAN OPERASIONAL / 22. INTEREST AND OPERATING EXPENSES

	2017	2016	
Beban bunga dan operasional			***Interest and operating expenses***
Beban bunga			*Interest expenses*
Bunga pada pihak ketiga bukan bank	282,586,935,450	309,027,360,627	*Interest to third parties non bank*
Jasa giro pemerintah	137,554,104,797	122,057,239,517	*Government current deposit service*
Jasa giro swasta	7,203,953,587	8,955,067,750	*Private current deposit service*
Bunga pada bank lain	3,315,566,629	5,726,908,416	*Interest of other bank*
Jasa giro lainnya	391,811,992	157,359,674	*Other demand deposit service*
Jumlah beban bunga	431,052,372,455	445,923,935,984	*Total interest expenses*
Beban provisi dan komisi			*Provision and commisions expenses*
Komisi/Provisi pinjaman	252,512,760	332,405,783	*Loan provision /comissions*
Komisi/Provisi lainnya	1,078,442,303	1,488,294,093	*Other provision /comissions*
Jumlah beban provisi dan komisi	1,330,955,063	1,820,699,876	*Total provision and commisions expenses*
Jumlah beban bunga dan operasional	**432,383,327,518**	**447,744,635,860**	***Total interest and operating expenses***

23. PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI / 23. PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES

	2017	2016	
Pembentukan / (pembalikan) cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif:			*Provision / (recovery) for possible losses for productive assets:*
Pinjaman yang diberikan	687,937,075,886	864,997,323,414	*Loans*
Surat-surat berharga	-	-	*Marketable securities*
Jumlah	687,937,075,886	864,997,323,414	*Total*
Pembentukan / (pembalikan) cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non produktif:			*Provision / (recovery) for possible losses for non productive assets:*
Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	-	15,000,000,000	*Allowance collateral*
Properti Terbengkalai	-	-	*Abandonned property*
Jumlah	-	15,000,000,000	*Total*
Jumlah	687,937,075,886	879,997,323,414	*Total*

24. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI / 24. DEPRECIATION AND AMORTISATION EXPENSE

	2017	2016	
Beban penyusutan	35,576,250,651	37,939,048,567	*Depreciation expenses*
Beban amortisasi	3,094,713,203	2,681,186,474	*Amortisation expenses*
Jumlah	38,670,963,854	40,620,235,041	*Total*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *25. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2017	2016	
Beban umum kantor	124,268,866,178	138,368,459,372	*General expenses*
Beban riset dan pengembangan	78,798,065,649	95,195,979,494	*Research and development expenses*
Beban premi asuransi	49,981,994,268	48,813,892,997	*Insurance premium expenses*
Beban sewa	49,873,469,433	46,419,347,541	*Rent expenses*
Beban barang dan jasa	48,017,567,250	55,982,620,400	*Goods service expenses*
Beban pemeliharaan	36,523,763,259	33,098,637,185	*Maintenance expenses*
Beban promosi	20,150,490,075	42,099,506,100	*Promotion expenses*
Beban pendidikan dan pelatihan	11,113,867,090	27,443,041,059	*Education and training expenses*
Beban iuran-iuran	10,593,124,469	10,162,885,631	*Contribution expenses*
Beban lainnya	7,768,947,306	14,848,085,708	*Others expenses*
Beban perbaikan	3,905,462,150	3,409,484,067	*Repair expenses*
Beban pajak-pajak	3,878,757,680	4,837,553,690	*Taxes expenses*
Beban pembinaan karyawan	1,314,096,420	801,607,350	*Employees training expenses*
Beban retribusi	616,221,300	201,382,735	*Retribution expenses*
Beban Perluasan Modal	-	450,000	*The cost of repayment of capital*
Jumlah	446,804,692,527	521,682,933,329	*Total*

26. BEBAN TENAGA KERJA / *26. PERSONEL EXPENSES*

	2017	2016	
Upah tetap dan tidak tetap	183,704,479,168	197,786,091,813	*Salary and wages*
Iuran tenaga kerja	135,201,287,145	65,379,445,338	*Daily worker wages*
Upah kerja lainnya	144,791,138,720	136,959,719,967	*Other allowance*
Bonus dan insentif	16,269,881,735	68,241,353,128	*Bonus and incentives*
Jumlah	479,966,786,768	468,366,610,246	*Total*

Sesuai dengan kebijakan Bank, selain gaji, pegawai juga mendapatkan fasilitas dan tunjangan berupa Tunjangan Hari Raya (THR), fasilitas kesehatan, sumbangan kematian, tunjangan cuti, fasilitas jabatan untuk jabatan tertentu, program pensiun untuk pegawai tetap, insentif sesuai dengan kinerja pegawai dan Bank, dan manfaat untuk pegawai yang berhenti bekerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Under the Bank's policy, in addition to salaries, employees are entitled to allowances and benefits, such as yearly allowance (THR), medical reimbursements, death allowance, leave allowance, functional allowance for certain levels, pension plan for permanent employees and the Bank's performance, and post-employment benefits in accordance with prevailing Labor Law.

Termasuk di dalam beban gaji dan tunjangan terdapat gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi dan Komisaris Bank Papua dan Komite Audit.

Salaries and wages include salaries and other compensation benefits for the Board of Directors, and Commissioners of Bank Papua, and Audit Committee.

27. PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL / *27. NON OPERATING INCOMES*

	2017	2016	
Pendapatan bukan operasional lainnya	16,157,825,317	58,926,204,800	*Other non operating income*
Penerimaan bunga excomp	4,737,999,757	528,964,781	*Excomp interest income*
Penerimaan sewa	307,824,000	155,805,600	*Rent income*
Jumlah	21,203,649,074	59,610,975,181	*Total*

28. BEBAN BUKAN OPERASIONAL / *28. NON OPERATING EXPENSES*

	2017	2016	
Kerugian lainnya	3,147,905,007	5,815,911,285	*Others losses*
Kerugian aset rusak / hilang	3,450,000	156,580,000	*Asset losses*
Jumlah	3,151,355,007	5,972,491,285	*Total*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

29. TAGIHAN DAN LIABILITAS KOMITMEN KONTINJENSI

29. RECEIVABLES AND LIABILITIES ON COMMITMENT AND CONTINGENCIES

	2017	2016	
Komitmen			*Commitment:*
Liabilitas komitmen:			*Commitment liabilities*
Komitmen kredit yang belum ditarik	(554,511,187,611)	(574,575,909,350)	*Unused loan facility granted*
Liabilitas komitmen - neto	(554,511,187,611)	(574,575,909,350)	*Liabilities - net*
Tagihan kontinjensi :			*Contingencies recivables:*
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	528,193,901,957	447,701,400,840	*Interest receivable on non performing loan*
Liabilitas kontinjensi :			*Contingencies liabilities:*
Garansi yang diterbitkan:			*Quarantee granded:*
Pelaksanaan	(43,986,475,697)	(74,660,187,943)	*Performance*
Pemeliharaan	(30,574,132,030)	(67,548,903,058)	*Retention*
Uang muka	(36,545,194,372)	(110,530,337,600)	*Advanced payment*
Tender	(1,405,638,558)	(8,602,693,793)	*Tender*
Lainnya	(39,182,824,044)	(29,540,803,030)	*Others*
	(151,694,264,701)	(290,882,925,424)	
Liabilitas kontinjensi bersih	376,499,637,256	156,818,475,416	*Net contingencies liability*
Jumlah liabilitas komitmen dan kontinjensi - neto	(178,011,550,356)	(417,757,433,934)	*Total commitment and contingencies liability - net*

30 IMBALAN PASCA KERJA

30 POST-EMPLOYMENT BENEFIT

Program pensiun manfaat pasti

Bank Papua memiliki program pensiun manfaat pasti melalui Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Papua yang pesertanya meliputi semua karyawan yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah. Tujuan perhitungan ini adalah untuk menentukan kewajiban imbalan pasca kerja bagi PT. Bank Papua periode 01 Januari 2016 – 31 Desember 2016 dan 01 Januari 2017 – 31 Desember 2017 sesuai ketentuan PSAK-24 REVISI 2016.

Imbalan Pegawai dihitung berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Bank Papua yang diatur dalam Keputusan Direksi PT. Bank Papua No. 69/DIR-BPD/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dan telah disahkan dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep-564/NB.1/2015 tanggal 12 Nopember 2015.

Penilaian aktuaria atas manfaat pensiun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaris terdaftar, PT Dian Artha Tama, dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

Rekonsiliasi status pembiayaan atas program pensiun per 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan laporan aktuaria PT Dian Artha Tama masing-masing pada tanggal 28 Februari 2018 dan 24 Januari 2017 disajikan sebagai berikut:

Defined benefit pension plan

Bank Papua has a defined benefit pension plan through the Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Papua, with participants covering all employees who are aged 18 years or married. The purpose of these evaluations are determining the employment benefits for PT Bank Pembangunan Daerah Papua for period January 01, 2016 to December 31, 2016 and January 01, 2017 to December 31, 2017, in respect to PSAK - 24 Revision 2016.

Employee Benefits are calculated based on the Regulation of Dana Pensiun Bank Papua as stipulated in the Decree of the Board of Directors of PT. Bank Papua No. 69 / DIR-BPD / X / 2014 dated October 22, 2014 and has been ratified by the Decree of the Board of Commissioners of OJK No. Kep-564 / NB.1 / 2015 dated November 12, 2015.

The actuarial calculations of pension benefits for the years ended December 31, 2017 and 2016 were prepared by a registered actuarial consulting firm PT Dian Artha Tama using the "Projected Unit Credit" method.

A reconciliation of the funding status of the pension plan as of December 31, 2017 and 2016 based on the actuarial reports of PT Dian Artha Tama dated February 28, 2018 and January 24, 2017 respectively, are as follows:

	2017	2016	
Nilai wajar aset dana pensiun	597,681,109,146	500,694,251,781	*Fair value of pension plan assets*
Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai	(839,112,500,884)	(644,893,161,028)	*Present value of funded defined benefit obligation*
Selisih pendanaan	(241,431,391,738)	(144,198,909,247)	*Funding difference*
Biaya jasa lalu yang belum diakui	-	-	*Unrecognized actuarial past service cost*
Laba aktuaria yang belum diakui	-	-	*Unrecognized actuarial gain*
Beban dibayar di muka (cadangan)	**(241,431,391,738)**	**(144,198,909,247)**	***Prepaid (provision for) pension benefit cost***

30 IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) / *30 POST-EMPLOYMENT BENEFIT (continued)*

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan) / ***Defined benefit pension plan (continued)***

Rekonsiliasi atas perubahan beban dibayar di muka (cadangan) kewajiban imbalan pasca kerja selama tahun 2017 dan 2016 yang diakui di laporan posisi keuangan dana pensiun adalah sebagai berikut:

A reconsiliation of the movements of prepaid (provision for) pension benefit cost during year 2017 and 2016 that is recognized in pension fund financial position are follows :

	2017	2016	
Beban dibayar di muka (cadangan) awal tahun	(144,198,909,247)	(41,233,240,506)	*Prepaid (provision for) pension benefit cost at beginning of year*
Pembayaran Imbalan	-	-	*Payment*
Beban tahun berjalan	60,211,005,382	40,282,393,982	*Current year expenses*
Pendapatan Komprehensif lain	63,956,860,170	123,325,257,855	*Other Comprehensive income*
Kontribusi Pemberi Kerja	26,935,383,061	60,641,983,096	*Employer's contributions*
Beban dibayar di muka (cadangan) akhir tahun	(241,431,391,738)	(144,198,909,247)	*Prepaid (provision for) pension benefit cost at end of year*

Biaya imbalan pensiun yang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut:

Pension expenses recognized in the statements of comprehensive income, are as follows:

	2017	2016	
Biaya jasa kini	48,098,297,006	36,571,402,337	*Current service cost*
Biaya bunga	54,171,025,526	35,833,141,501	*Interest cost*
Hasil yang diharapkan dari aset	(42,058,317,150)	(32,122,149,856)	*Result are expected from asset*
Laba / Rugi Aktuaria	-	-	*Actuarial profit / loss*
Beban (pendapatan) yang diakui dalam laporan Rugi / Laba	60,211,005,382	40,282,393,982	*Expense (income) recognized in the Profit / Loss statement*

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan di atas adalah:

The key assumptions used in the above calculation are:

	2017	2016	
Tingkat kematian	GAM - 1971	GAM - 1971	*Mortality rate*
Tingkat cacat	0.025% per tahun/*per years*	0.025% per tahun/*per years*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	0.1 % per tahun/*per years*	0.1 % per tahun/*per years*	*Resignation rate*
Tingkat pensiun awal	1.0% per tahun/*per years*	1.0% per tahun/*per years*	*Early retirement rate*
Selisih usia	5 tahun/*years*	5 tahun/*years*	*Difference in age*
Kenaikan PhDP	5% per tahun/*per years*	5% per tahun/*per years*	*The increase PhDp*
Kenaikan manfaat pensiun bulanan	5% per tahun/*per years*	5% per tahun/*per years*	*The increase in monthly pension benefits*
Tingkat bunga			*Interest rate*
- Liabilitas	8.4% per tahun/*per years*	7.2% per tahun/*per years*	*Liability -*
- Aset	8.4% per tahun/*per years*	7.2% per tahun/*per years*	*Assets -*
Pajak dibayar	Dana Pensiun	Dana Pensiun	*Taxes paid*
Biaya	Tidak dibayar dari iuran	Tidak dibayar dari iuran	*Expenses*
Metode	*Projected Unit Credit*	*Projected Unit Credit*	*Method*

Imbalan kerja jangka panjang lainnya / ***Other long-term employee benefits***

Liabilitas atas imbalan kerja jangka panjang lainnya meliputi uang jasa, uang pisah dan pesangon sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 dan kompensasi lainnya.

The liability for other long-term employee benefits consisted of service payments, severance and termination benefits based on Labor Law No. 13/2003 and other compensations.

Penilaian aktuarial atas imbalan kerja jangka panjang lainnya pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dilakukan oleh konsultan aktuaria terdaftar, PT Dian Artha Tama dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" sebagaimana yang tercantum dalam laporan masing-masing pada tanggal 28 Febuari 2018 dan 24 Januari 2017.

The actuarial valuation of other long-term employee benefits for the years ended December 31, 2017 and 2016, was performed by registered actuarial consulting firm, PT Dian Artha Tama, using the "Projected Unit Credit" method as stated in its reports dated Febuary 28, 2018 and January 24, 2017.

Jumlah pegawai Bank Papua yang memiliki hak atas imbalan kerja adalah 2.351 orang dan 2.395 orang masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (tidak diaudit).

The total number of qualified employees of Bank Papua who are entitled to the benefits are 2,351 employees and 2,395 employees as of December 31, 2017 and 2016, respectively (unaudited).

30 IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) / 30 POST-EMPLOYMENT BENEFIT (continued)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan) / ***Other long-term employee benefits (continued)***

Biaya imbalan kerja yang dibebankan Bank Papua pada laporan laba rugi komprehensif: / *Employee benefit expense recognized by Bank Papua in the statements of income:*

	2017	2016	
Biaya jasa kini	13,196,653,897	10,978,783,168	*Current service cost*
Biaya bunga	9,432,568,939	8,067,745,612	*Interest cost*
Laba / Rugi Aktuaria	-	-	*Actuarial profit / loss*
Biaya Jasa Lalu			*Past service cost*
Non vested	-	-	*Non vested*
Beban (pendapatan) yang diakui dalam laporan Rugi / Laba	22,629,222,836	19,046,528,780	*Expense (income) recognized in the Profit / Loss statement*

Perubahan liabilitas yang diakui Bank Papua pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: / *The movements of the employee benefits liability recognized by in the statements of financial position are as follows:*

	2017	2016	
Nilai kini liabilitas	(118,019,447,572)	(112,292,487,368)	*Liability present value*
Nilai wajar aset	-	-	*Assets fair value*
Status pendanaan	(118,019,447,572)	(112,292,487,368)	*Status of funding*
Liabilitas transisi yang belum diakui		-	*Unrecognized transition liability*
Biaya jasa lalu yang belum diakui	-	-	*Unrecognized past service expenses*
Laba / Rugi Aktuaria yang belum diakui	-	-	*Profit / loss of unrecognized actuarial*
Biaya dibayar dimuka (Liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan	(118,019,447,572)	(112,292,487,368)	*Prepaid expenses (Liability) which is recognized in the statements of financial position*

Rekonsiliasi Biaya dibayar dimuka (cadangan) adalah sebagai berikut: / *Reconciliation Prepaid expenses (reserves) are as follows:*

	2017	2016	
Biaya dibayar dimuka (cadangan) awal	(112,292,487,368)	(89,641,617,914)	*Beginning balance Prepaid expenses (reseves)*
Pembayaran Imbalan	17,307,341,720	1,250,900,169	*Payment of benefit*
Beban (Pendapatan)	(22,629,222,836)	(19,046,528,780)	*Expenses (income)*
Pendapatan komprehansif lainnnya	(405,079,088)	(4,855,240,843)	*Expenses (income)*
Kontribusi pemberi kerja	-	-	*Employer's contributions*
Biaya dibayar dimuka (cadangan) akhir	(118,019,447,572)	(112,292,487,368)	*Ending Prepaid expenses (reseves)*

Asumsi utama yang digunakan untuk menghitung estimasi beban dan liabilitas tersebut adalah sebagai berikut: / *The key assumptions used in the calculation of the above estimated expense and liability are as follows:*

	2017	2016	
Asumsi ekonomi:			***Economic assumptions:***
Tingkat diskonto per tahun	8%	9%	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun	5%	5%	*Annual salary growth rate*
Asumsi lainnya:			***Other assumptions:***
Tingkat kematian	GAM - 1971	GAM - 1971	*Mortality rate*
Tingkat cacat	0.1% per tahun / per year	0.1% per tahun / per year	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri			*Resignation rate*
- Usia 18 - 44 tahun	0.1% per tahun / *per year*	0.1% per tahun / *per year*	*18 - 44 years old* -
- Usia 45 - 54 tahun	1.0% per tahun / *per year*	1.0% per tahun / *per year*	*45 - 54 years old* -
Kenaikan Gaji (upah)	5.0% per tahun / *per year*	5.0% per tahun / *per year*	
Kenaikan Bunga Kewajiban	8.4% per tahun / *per year*	7.2% per tahun / *per year*	*Interest rate liability*
Kenaikan Bunga Aset	0.0% per tahun / *per year*	0.0% per tahun / *per year*	*Interest rate Assets*
Metode	*Projected Unit Credit*	*Projected Unit Credit*	*Method*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

31. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan disajikan per kategori dari instrumen keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal pelaporan ini.

31. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The following table summarises the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities presented per category of financial instruments. The fair values disclosed are based on relevant information available as of December 31, 2017 and 2016, and are not updated to reflect changes in market conditions which have occured after this reporting date.

	2017		2016		
	Nilai Wajar / *Fair Value*	Nilai Tercatat / *Carrying Value*	Nilai Wajar / *Fair Value*	Nilai Tercatat / *Carrying Value*	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Kas	831,085,338,915	831,085,338,915	941,680,990,818	941,680,990,818	*Cash*
Nilai wajar melalui laporan laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Obligasi Pemerintah	-	-	60,000,000,000	63,115,576,807	*Government Bonds*
	-	-	60,000,000,000	63,115,576,807	
Tersedia untuk dijual					***Available-for-sale***
Reksadana	314,551,184,249	314,583,760,551	592,941,686,149	592,852,392,649	*Mutual funds*
Dimiliki hingga jatuh tempo					***Held-to-maturity***
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-	-	200,116,282,228	207,000,000,000	*Certificates of Bank Indonesia (SBI)*
Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	913,951,833,338	923,636,000,000	49,205,140,928	50,000,000,000	*Certificates Deposit of Bank Indonesia (SDBI)*
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	-	-	99,859,830,478	100,000,000,000	*GovernmentTreasury Bills (SPN)*
Obligasi Pemerintah	-	-	202,371,761,246	200,000,000,000	*Government Bonds*
Obligasi Korporasi	222,000,000,000	222,000,000,000	231,999,746,670	232,000,000,000	*Corporate Bonds*
Reverse Repo	1,007,587,061,460	1,007,587,061,460	511,137,613,326	511,137,613,326	*Reverse Repo*
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo	2,143,538,694,798	2,153,223,061,460	1,294,691,374,874	1,300,137,613,326	***Total available-for-sale***
Pinjaman dan piutang					***Loans and receivables***
Pinjaman yang diberikan	11,764,167,204,625	11,764,167,204,625	12,537,278,416,495	12,537,278,416,495	*Loans*
Giro pada Bank Indonesia	1,415,941,135,223	1,415,941,135,223	1,511,312,727,362	1,511,312,727,362	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada Bank Lain	6,303,099,349	6,303,099,349	45,126,492,866	45,126,492,866	
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	2,310,000,000,000	2,310,000,000,000	1,425,000,000,000	1,425,000,000,000	*Placement with other banks and Bank Indonesia*
Aset lain-lain *)	533,510,575,018	533,510,575,018	551,032,131,753	551,032,131,753	*Other assets *)*
Jumlah pinjaman dan piutang	16,029,922,014,215	16,029,922,014,215	16,069,749,770,489	16,069,749,768,476	***Total loans and receivables***
Jumlah	19,319,097,432,177	19,328,824,175,141	18,959,063,822,330	18,967,536,342,076	***Total***
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Liabilitas segera	664,353,874,572	664,353,874,572	566,370,002,731	566,370,002,731	*Obligation due immadiately*
Simpanan nasabah	16,563,714,645,718	16,563,714,645,718	16,477,114,645,276	16,477,114,645,276	*Deposits from customers*
Simpanan bank lain	91,860,065,287	91,860,065,287	92,384,544,884	92,384,544,884	*Deposits from other banks*
Pinjaman diterima	8,594,623,291	8,594,623,291	325,000,000,000	325,000,000,000	*Borrowings*
Liabilitas lain-lain **)	397,285,691,567	397,285,691,567	781,745,730,812	781,745,730,812	*Other liabilities **)*
Jumlah	17,725,808,900,435	17,725,808,900,435	18,242,594,923,703	18,242,594,923,703	***Total***

*) Aset lain-lain - neto terdiri dari piutang lain-lain dan piutang bunga.
**) Liabilitas lain-lain terdiri dari beban yang masih harus dibayar, setoran jaminan, utang bunga, dan utang lainnya.

*) *Other assets consist of other receivables and interest receivables.*
**) *Other liabilities consist of accrued expenses, guarantee deposits, interest payable, and other payables.*

31. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar:

Nilai wajar aset dan liabilitas tertentu selain surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diterima, dan obligasi subordinasi mendekati nilai tercatat karena instrumen keuangan tersebut memiliki jangka waktu tempo yang singkat dan memiliki tingkat bunga sesuai pasar.

Nilai wajar dari surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo ditentukan berdasarkan harga kuotasi pasar yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Nilai wajar dari pinjaman yang diterima dan obligasi subordinasi dihitung menggunakan arus kas yang didiskonto berdasarkan suku bunga pasar.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

a. Tingkat 1: Dikutip dari harga pasar di pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;

b. Tingkat 2: Yang melibatkan input selain dari harga kuotasi yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (seperti harga) atau tidak langsung (berasal dari harga);

c. Tingkat 3: Input untuk aset dan liabilitas yang tidak berdasarkan pada data yang dapat diobservasi di pasar (input yang tidak dapat diobservasi).

31. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

Fair values of certain assets and liabilities other than held-to-maturity marketable securities, borrowing, and subordinated bond approximate their carrying amounts due to short-term maturities of these financial instruments and due to the interest rate is at market rate.

The fair value of held-to-maturity marketable securities is determined on the basis of quoted market price as of December 31, 2017 and 2016.

The fair value of borrowing and subordinated bond is calculated using dicounted cash flows using market rate.

The table below shows the financial instrument recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

a. Level 1: Quoted (unadjusted) prices in active markets for identical financial assets or liabilities;

b. Level 2: Those involving inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices);

c. Level 3: Those with inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

	2017				
	Nilai Tercatat / Carrying Value	Nilai Wajar / Fair Value			
		Tingkat 1 / Level 1	Tingkat 2 / Level 2	Tingkat 3 / Level 3	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Nilai wajar melalui laporan laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Obligasi Pemerintah	-	-	-	-	*Government Bonds*
Tersedia untuk dijual					***Available-for-sale***
Reksadana	314,551,184,249	314,551,184,249	-	-	*Mutual funds*
Dimiliki hingga jatuh tempo					***Held-to-maturity***
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-	-	-	-	*Certificates of Bank Indonesia (SBI)*
Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	913,951,833,338	913,951,833,338	-	-	*Certificates Deposit of Bank Indonesia (SDBI)*
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	-	-	-	-	*Government Treasury bills (SPN)*
Obligasi Pemerintah	-	-	-	-	*Government Bonds*
Obligasi Korporasi	222,000,000,000	222,000,000,000	-	-	*Corporate Bonds*
Reverse Repo	1,007,587,061,460	1,007,587,061,460	-	-	*Reverse Repo*
	2,143,538,894,798	2,143,538,894,798	-	-	
Jumlah	2,458,090,079,047	2,458,090,079,047	-	-	***Total***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

31. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan) / *31. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)*

	2016				
	Nilai Tercatat / Carrying Value	Nilai Wajar / Fair Value			
		Tingkat 1 / Level 1	Tingkat 2 / Level 2	Tingkat 3 / Level 3	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Nilai wajar melalui laporan laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Obligasi Pemerintah	60,000,000,000	63,115,576,807	-	-	*Government Bonds*
Tersedia untuk dijual					***Available-for-sale***
Reksadana	592,941,666,149	592,941,666,149	-	-	*Mutual funds*
Dimiliki hingga jatuh tempo					***Held-to-maturity***
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	200,116,282,228	200,116,282,228	-	-	*Certificates of Bank Indonesia (SBI)*
Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	49,206,140,926	49,206,140,926	-	-	*Certificates Deposit of Bank Indonesia (SDBI)*
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	99,859,830,478	99,859,830,478	-	-	*Government Treasury Bills (SPN)*
Obligasi Pemerintah	202,371,761,246	202,371,761,246	-	-	*Government Bonds*
Obligasi Korporasi	231,999,746,670	231,999,746,670	-	-	*Corporate Bonds*
Reverse Repo	511,137,613,326	511,137,613,326	-	-	*Reverse Repo*
	1,294,691,374,874	1,294,691,374,874	-	-	
Jumlah	1,887,633,061,023	1,887,633,061,023	-	-	***Total***

32. LABA PER SAHAM / *32. EARNING PER SHARE*

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih kepada pemegang saham dengan jumlah saham biasa akhir tahun yang biasa beredar pada tahun yang bersangkutan.

Net earning per share is computed by dividing the net earning to the shareholders with total ordinary shares at end of year generally that outstanding during the related year.

	2017	2016	
Laba Operasional	126,333,413,233	(197,718,849,538)	*Operating Income*
Laba Bersih	113,272,660,159	(236,704,444,940)	*Net Income*

Jumlah rata-rata tertimbang lembar saham ditempatkan dan setor penuh:

Weighted average total of issued and fully-paid share units:

	2017	2016	
Rata-rata tertimbang lembar saham	400,631	351,399	*Weighted average*
Laba Operasional per saham	315,336	(562,662)	*Operating income per*
Laba bersih per saham	282,735	(673,606)	*Net income per share*

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI / *33. RELATED PARTY TRANSACTION*

	2017	2016	
Kredit			*Loan*
Karyawan kunci	15,316,312,853	15,515,462,029	*Key employees*
Persentase dari total kredit	0.13%	0.12%	*Percentage to total loans*
Simpanan			*Savings*
Karyawan kunci	4,665,773,515,784	2,079,797,376,772	*Key employees*
Persentase dari total Simpanan	28.17%	12.62%	*Percentage to total savings*
Pendapatan bunga			*Interest income*
Pendapatan bunga karyawan kunci	20,746,771,427	21,801,205,334	*Interest income key employees*
Persentase dari total pendapatan bunga	1.0%	1.0%	*Percentage to total interest income*

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

No.	Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
1.	Pemerintah Propinsi Papua	Pemegang Saham Pengendali	a. Simpanan Giro b. Simpanan Deposito Berjangka c. Beban Bunga
2.	Karyawan kunci	Direksi, Komisaris, Pemimpin Cabang, Wakil Kepala Cabang, Kepala Divisi	a. Pinjaman Kredit b. Penempatan dana dalam bentuk tabungan c. Pendapatan bunga, dan d. Beban bunga

33. RELATED PARTY TRANSACTION (continued)

Detailed of relation nature and type of transaction with related parties are as follows:

No.	*Related Parties*	*Types of Relation*	*Related Party Transactions*
1.	*The Government of Papua province*	*Controlling Shareholder*	*a. Demand Deposit* *b. Time Deposit* *c. Interest Expense*
2.	*Key Employees*	*Directors, Commisioners, Heads of Branch, Heads of Divisions.*	*a. Loan* *b. Fund placements in form of savings* *c. Interest Income, and* *d. Interest Expense*

34. MANAJEMEN KEUANGAN

a. Risiko Kredit

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dimana risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan / atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban mereka kepada Bank.

Bank Papua berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 26 september 2016 tentang : perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Bank Papua secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan untuk kredit Bank dan pembiayaan sebagai proses penilaian risiko.

Bank Papua memiliki rencana untuk melaksanakan *Credit Scoring Model* (CSM) ketika akan menjadi dasar untuk pemberian kredit dengan penerapan dari CSM, Bank Papua akan dapat memproses kredit secara masal untuk meningkatkan pelayanan dan akurasi data.

Langkah strategis lainnya dalam penerapan manajemen risiko kredit Bank adalah dengan melakukan penyebaran risiko kredit dan pengendalian konsentrasi kredit dengan meningkatkan portofolio kredit secara proporsional pada setiap segmen usaha dan jenis kredit.

Berikut ini adalah rasio atas *non-performing loan* pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

	2017	2016	
Rasio NPL - Bruto	14.72%	15.03%	*NPL Ratio - Gross*
Rasio NPL - Net	3.79%	3.95%	*NPL Ratio - Nett*

34. FINANCIAL MANAGEMENT

a. Credit Risk

Regulation of the Financial Services Authority Number 18 / POJK.03 / 2016 dated March 16, 2016 concerning the Application of Risk Management for Commercial Banks where credit risk is defined as the risk arising from the failure of the debtor and / or other parties in fulfilling their obligations to the Bank.

Bank Papua shall be guided by the Regulation of the Financial Services Authority Number 34 / POJK.03 / 2016 dated 26 September 2016 concerning: amendment to POJK Number 11 / POJK.03 / 2016 regarding Minimum Capital Requirement for Commercial Banks.

Bank Papua regularly review and update the Guidelines for Risk Management Policy and Guidelines for the Credit Policy and Financing Bank loans and financing as the risk assessment process.

Bank Papua has a plan to implement the Credit Scoring Model (CSM) when it will be the basis for loans to the application of the CSM, the Bank will be able to process credit Papua mass to improve service and accuracy of data.

Another strategic step in the Bank's credit risk management is to make the distribution of credit risk and credit concentration control by increasing the loan portfolio in proportion to each business segment and type of loan.

Below is the ratio of non-performing loans as of December 31, 2017 and 2016:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya.

Eksposur risiko kredit terhadap aset (nilai bersih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016	
Nilai wajar melalui laporan laba rugi			*Fair value through profit and loss*
Obligasi pemerintah	-	63,115,576,807	*Government bonds*
Dimiliki hingga jatuh tempo			*Hold to maturity*
Efek-efek	1,135,951,833,338	581,182,000,302	*Securities*
Obligasi pemerintah	-	202,371,761,246	*Government bonds*
Reverse Repo	1,007,587,061,460	511,137,613,326	*Reverse Repo*
Kredit dan piutang			*Loan and receivable*
Giro pada			*Current accounts with*
Bank Indonesia	1,415,941,135,223	1,511,312,727,362	*Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	6,303,099,349	45,126,492,866	*Current accounts with other bank*
Penempatan pada BI			*Placement with Bank Indonesia*
dan bank lain	2,949,937,783,825	2,776,699,622,303	*and other bank*
Kredit yang diberikan			*Loan*
Konsumer	5,015,661,006,140	4,828,746,413,026	*Consumer*
Modal kerja	3,743,440,603,189	4,940,756,835,337	*Working capital*
Investasi	1,754,949,873,992	2,079,797,376,772	*Investment*
Sindikasi	1,040,838,510,861	1,079,630,640,567	*Syndicated*
Pemilikan rumah	1,381,467,617,309	948,063,558,218	*Home loan*
Direksi dan karyawan	319,094,727,076	291,443,646,222	*Directors and employees*
Program Pemerintah	15,455,575,581	41,401,315,448	*Government programs*
Jumlah	19,786,628,827,343	19,900,785,579,802	*Total*

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

	2017	2016	
Fasilitas kredit yang belum digunakan	554,511,187,611	574,575,909,350	*Unused loan facilities*
Garansi yang diberikan	151,694,264,701	290,882,925,424	*Guarantees issued*
Jumlah	706,205,452,312	865,458,834,774	*Total*

Saldo tersebut menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Bank Papua pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya. Untuk aset pada laporan posisi keuangan, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bersih seperti yang diungkapkan pada laporan posisi keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, masing-masing sebesar 65,01% dan 67,48% adalah jumlah eksposur risiko kredit maksimum terhadap aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian yang berasal dari pinjaman yang diberikan.

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

a. Credit Risk (continued)

(i) The maximum exposure to credit risk without taking into account collateral and other credit support.

Credit risk exposure to assets (net value less allowance for impairment losses) on the statements of financial position as at December 31, 2017 and 2016 are as follows:

Credit risk exposures related to administrative accounts items as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

The amount above represents credit risk exposures at maximum of Bank Papua as of December 31, 2017 and 2016, without taking into account any collateral held or other credit enhancements. The exposures set out above are based on net carrying amounts of the assets as reported in the statements of financial position.

As of 31 December 2017 and 2016, the total maximum credit risk exposure in consolidated statement of financial position from loans is 65.01% and 67.48%, respectively.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya. (lanjutan)

Manajemen yakin akan kemampuan Bank untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari kredit yang diberikan, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Proses peningkatan pengelolaan kredit secara berkelanjutan melalui penyempurnaan proses kredit, pengembangan produk penyempurnaan organisasi perkreditan, peningkatan kemampuan SDM di bidang perkreditan dan pengembangan perangkat kredit berbasis Teknologi.
b. Bank Papua telah memiliki pedoman tertulis mengenai kebijakan dan proses kredit yang mencakup seluruh aspek pemberian kredit yang dilakukan. Setiap pemberian kredit harus senantiasa mengacu pada kebijakan tersebut
c. Bank Papua telah menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang selaras dengan sasaran strategis Bank, yang digunakan sebagai acuan tingkat risiko yang akan diambil Bank dalam pencapaian sasaran bisnis.
d. Bank Papua telah melakukan *stress test* risiko kredit untuk menilai kemampuan Bank bertahan dalam kondisi tidak normal serta sebagai alat untuk pengambilan keputusan Bank.
e. Bank Papua telah memiliki sistem deteksi dini permasalahan melalui "*early warning system*" dan pemantauan yang disiplin.
f. Seluruh kredit diberikan dengan agunan kecuali untuk jenis kredit tertentu seperti kartu kredit, personal loans dan fasilitas antar bank.

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

Saldo berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank Papua pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

a. Credit Risk (continued)

(i) The maximum exposure to credit risk without taking into account collateral and other credit support. (continued)

Management is confident in its ability to control and sustain exposure of credit risk to the Bank resulting from its loans based on the following:

a. The process of improving credit management in a sustainable manner by improving credit processes, product development credit organization improvement, credit capability improvement of human resources and development of technology based for credit application.
b. Bank Papua has a documented credit policies and manual procedures that cover all aspects of the Bank's lending activities. Each loan transactions must adhere to the requirements of the Bank's policy.
c. Bank Papua has set risk appetite and risk tolerance in accordance with the Bank's strategic objectives, which are used as a reference level of risk to be taken by the Bank in achieving business goals.
d. Bank Papua has done stress test on credit risk to assess the ability of Bank to stay in the non-normal condition and as an instrument for decision making for the Bank.
e. Bank Papua has an early problem detection system through "early warning system" and disciplined monitoring.
f. All loans are secured by collaterals, except for certain loans such as credit cards, personal loans and interbank loans.

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure

The following amount provide the details of the Bank Papua credit exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit enhancements), categorized based on industry sectors as of December 31, 2017 and 2016:

	2017				
	Pemerintah / *Government*	Bank / *Bank*	Perusahaan / *Company*	*Perseorangan /Individuals*	
Giro pada Bank Indonesia	1,415,941,135,223	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	6,303,099,349	-	-	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	2,310,000,000,000	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek - efek	913,951,833,338	75,000,000,000	147,000,000,000		*Marketable securities*
Reverse Repo	1,007,587,061,460				*Reverse Repo*
Reksadana			-		*mutual funds*
Obligasi pemerintah	151,155,005,007	-	-	-	*Government bonds*
Kredit yang diberikan	735,220,857,635	264,278,847,597	5,570,600,140,447	6,700,808,068,469	*Loans*
Jumlah	4,223,855,892,663	2,655,581,946,946	3,683,642,888,944	6,700,808,068,469	*Total*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

a. Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

	2016				
	Pemerintah / *Government*	Bank / *Bank*	Perusahaan / *Company*	*Perseorangan /individuals*	
Giro pada Bank Indonesia	1,511,312,727,362	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	45,126,492,868	-	-	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1,351,699,622,303	1,425,000,000,000	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek - efek	349,182,253,632	232,000,000,000	-	-	*Marketable securities*
Reverse repo	-	511,137,813,326	-	-	*Reverse repo*
Reksadana	-	-	592,941,686,149	-	*mutual funds*
Obligasi pemerintah	259,159,855,660	-	-	-	*Government bonds*
Kredit yang diberikan	620,625,495,000	327,840,151,631	7,193,120,521,492	6,068,253,617,466	*Loans*
	4,091,979,953,957	2,541,104,257,823	7,786,062,207,641	6,068,253,617,466	

Eksposur risiko kredit yang terkait dengan unsur rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Credit risk exposure relating to administrative account items as of December 31, 2017 and 2016, are as follows:

	2017				
	Pemerintah / *Government*	Bank / *Bank*	Perusahaan / *Company*	*Perseorangan / Individuals*	
Fasilitas kredit yang belum digunakan yang disediakan bagi atau dijamin oleh, dijamin dengan surat berharga yang diterbitkan oleh pihak-pihak lainnya.	58,317,421,391	-	495,973,884,493	219,881,727	*Unused loan facility that prepared by or guaranteed by marketable security issued by other parties*
Garansi yang diterbitkan	-	-	151,694,264,701	-	*Guarantee issued*
Jumlah	58,317,421,391	-	647,668,149,194	219,881,727	*Total*

	2016				
	Pemerintah / *Government*	Bank / *Bank*	Perusahaan / *Company*	*Perseorangan /individuals*	
Fasilitas kredit yang belum digunakan yang disediakan bagi atau dijamin oleh, dijamin dengan surat berharga yang diterbitkan oleh pihak-pihak lainnya	-	-	574,575,909,350	-	*Unused loan facility that prepared by or guaranteed by marketable security issued by other parties*
Garansi yang diterbitkan	-	-	290,882,925,424	-	*Guarantee issued*
Jumlah	-	-	865,458,834,774	-	*Total*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

(iii) Giro pada bank lain

Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan Bank Indonesia.

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

a. Credit Risk (continued)

(iii) Current accounts with other banks

As of December 31, 2017 and December 31, 2016, these financial assets is impaired either individually or collectively in accordance with Bank Indonesia.

	2017			
	Tidak mengalami penurunan nilai / *Not impaired*	Mengalami penurunan nilai / *Impaired*	Jumlah / *Total*	
Rupiah	6,303,099,349	-	6,303,099,349	*Rupiah*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	*Allowance for impairment losses*
Neto	6,303,099,349	-	6,303,099,349	*Net*

	2016			
	Tidak mengalami penurunan nilai / *Not impaired*	Mengalami penurunan nilai / *Impaired*	Jumlah / *Total*	
Rupiah	45,126,492,866	-	45,126,492,866	*Rupiah*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	*Allowance for impairment losses*
Neto	45,126,492,866	-	45,126,492,866	*Net*

(iv) Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain

Per 31 Desember 2017 dan 2016, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan Bank Indonesia.

(iv) Placement with other bank and Bank Indonesia

As of December 31, 2017 and 2016, these financial assets are not impaired individually as well as collectively according to Bank Indonesia regulations.

(v) Efek - efek

Per 31 Desember 2017 dan 2016, aset keuangan mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan Bank Indonesia.

(v) Marketable securities

As of December 31, 2017 and 2016, these financial assets are impaired individually as well as collectively according to Bank Indonesia regulations.

	2017			
	Tidak mengalami penurunan nilai / *Not impaired*	Mengalami penurunan nilai / *Impaired*	Jumlah / *Total*	
Sertifikat Bank Indonesia	-	-	-	*Certificates of Bank Indonesia*
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	913,951,833,338	-	913,951,833,338	Certificate Deposits *of Bank Indonesia*
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	-	-	-	*Treasury note bills (SPN)*
Reksadana	314,551,184,249	-	314,551,184,249	*Mutual Funds*
Obligasi	222,000,000,000	-	222,000,000,000	*Bonds*
Reverse Repo	1,007,587,061,460	-	1,007,587,061,460	*Reverse Repo*
Jumlah	2,458,090,079,047	-	2,458,090,079,047	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	*Allowance for impairment losses*
Neto	2,458,090,079,047	-	2,458,090,079,047	*Net*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

a. Credit Risk (continued)

	2016			
	Tidak mengalami penurunan nilai / *Not impaired*	Mengalami penurunan nilai / *Impaired*	*Total / Total*	
Sertifikat Bank Indonesia	200,116,282,228	-	200,116,282,228	*Certificates of Bank Indonesia*
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	49,206,140,926	-	49,206,140,926	Certificate Deposits *of Bank Indonesia*
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	99,859,830,478	-	99,859,830,478	*Treasury note bills (SPN)*
Reksadana	592,941,686,149	-	592,941,686,149	*Mutual Funds*
Obligasi	491,159,855,660	-	491,159,855,660	*Bonds*
Reverse Repo	511,137,613,326	-	511,137,613,326	*Reverse Repo*
Jumlah	1,944,421,408,767	-	1,944,421,408,767	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	*Allowance for impairment losses*
Neto	1,944,421,408,767	-	1,944,421,408,767	*Net*

(vi) Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

Per 31 Desember 2017 dan 2016, rekening administratif tidak mengalami penurunan nilai. (lihat Catatan 16)

(vi) Estimated losses on commitments and contingencies

As of December 31, 2017 and 2016, statements of financial position is not impaire. (see Note 16)

(vii) Kredit yang diberikan

Per 31 Desember 2017 dan 2016, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 55). Ikhtisar kredit yang diberikan yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut :

(vii) Loans

As of December 31, 2017 and 2016, these financial assets are impaired either individually or collectively in accordance with SFAS No. 55. Summary of loans granted on December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	2017			
	Tidak mengalami penurunan nilai / *Not Impaired*	Mengalami penurunan nilai / *Impaired*		
		Individual / *Individual*	Kolektif / *Collective*	Jumlah / *Total*
Pertanian, perburuan dan kehutanan / *Agriculture, hunting, and forestry*	167,437,251,553	-	-	167,437,251,553
Perikanan / *Fishery*	13,513,445,088	-	-	13,513,445,088
Pertambangan dan penggalian / *Mining and excavation*	33,981,473,889	-	-	33,981,473,889
Industri Pengolahan / *Manufacturing Industry*	215,657,468,377	-	-	215,657,468,377
Listrik, gas dan air / *Utilities industry*	21,786,237,978	-	-	21,786,237,978
Konstruksi / *Construction*	1,341,483,419,590	-	-	1,341,483,419,590
Perdagangan besar dan eceran / *Wholesale and groceries*	1,371,030,933,464	-	-	1,371,030,933,464
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum / *Hotel, food and beverages*	643,003,837,563	342,700,110,160	-	985,703,947,723
Transportasi, pergudangan dan komunikasi / *Transportation, warehousing, and communication*	504,263,849,157	-	-	504,263,849,157
Perantara keuangan / *Financial services*	195,327,754,142	-	-	195,327,754,142
Real estase, usaha persewaan, dan jasa perusahaan / *Real estate, rent, and service company*	115,533,136,117	-	-	115,533,136,117
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib / *Government administration, defense, and social securities*	405,905,430,006	-	-	405,905,430,006
Jasa pendidikan / *Education service*	15,188,477,211	-	-	15,188,477,211

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

(vii) Kredit yang diberikan (lanjutan)

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

a. Credit Risk (continued)

(vii) Loans (continued)

	2017			
	Tidak mengalami penurunan nilai / *Not Impaired*	Mengalami penurunan nilai / *Impaired*		
		Individual / *Individual*	Kolektif / *Collective*	Jumlah / *Total*
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial / *Healty and social service*	13,362,390,802	-	-	13,362,390,802
Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya / *social culture and other entertainment service*	841,171,658,434	-	-	841,171,658,434
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga / *Individual and household services*	20,988,531,328	-	-	20,988,531,328
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya / *International services*	60,061,607,452	-	-	60,061,607,452
Kegiatan yang belum jelas batasannya / *Others activities*	211,448,603,814		43,301,161	211,491,904,975
Rumah tangga/ *Household*	3,948,274,877,671		37,635,322,303	3,985,910,199,974
Bukan lapangan usaha / *Not in business sector*	2,746,388,406,057		4,720,390,830	2,751,108,796,887
Jumlah / *Total*	12,885,808,789,694	342,700,110,160.00	42,399,014,294.00	13,270,907,914,148
Penyisihan kerugian penurunan nilai / *Allowance for impairment losses*	(1,455,530,640,856)	(9,534,659,554)	(41,675,409,113)	(1,506,740,709,523)
Bersih / *Net*	11,430,278,148,838	333,165,450,606	723,605,181	11,764,167,204,625

	2016			
	Tidak mengalami penurunan nilai / *Not Impaired*	Mengalami penurunan nilai / *Impaired*		
		Individual / *Individual*	Kolektif / *Collective*	Jumlah / *Total*
Pertanian, perburuan dan kehutanan / *Agriculture, hunting, and forestry*	150,988,883,925	-	279,213,795,323	430,202,679,248
Perikanan / *Fishery*	16,383,951,615	-	2,819,842,526	19,203,794,141
Pertambangan dan penggalian / *Mining and excavation*	40,698,733,372	-	3,055,973,809	43,752,707,181
Industri Pengolahan / *Manufacturing Industry*	237,230,516,917	65,682,825,130	131,473,064,412	434,386,406,459
Listrik, gas dan air / *Utilities industry*	21,415,394,704	-	1,225,904,660	22,641,299,364
Konstruksi / *Construction*	1,336,608,922,411	3,248,817,002	359,701,843,838	1,699,557,583,251
Perdagangan besar dan eceran / *Wholesale and groceries*	1,427,211,268,898	12,604,650,000	495,214,908,489	1,935,030,827,387
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum / *Hotel, food and beverages*	812,247,289,020	86,724,430,534	184,696,168,446	1,083,667,888,000
Transportasi, pergudangan dan komunikasi / *Transportation, warehousing, and communication*	252,702,406,475	5,563,019,005	159,234,844,601	417,500,270,081
Perantara keuangan / *Financial services*	165,173,425,014	-	-	165,173,425,014
Real estase, usaha persewaan, dan jasa perusahaan / *Real estate, rent, and service company*	126,544,804,807	-	10,768,032,928	137,312,837,735
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib / *Government administration, defense, and social securities*	127,288,455,642	-	-	127,288,455,642
Jasa pendidikan / *Education service*	5,349,665,483	-	458,393,894	5,808,059,377
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial / *Health and social service*	13,372,337,582	-	-	13,372,337,582

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

(vii) Kredit yang diberikan (lanjutan)

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

a. Credit Risk (continued)

(vii) Loans (continued)

	2016			
	Tidak mengalami penurunan nilai / *Not Impaired*	Mengalami penurunan nilai / *Impaired*		
		Individual / *Individual*	Kolektif / *Collective*	Jumlah / *Total*
Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya / *Social culture, and other entertainment service*	656,574,750,284	-	356,926,832,059	1,013,501,582,343
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga / *Individual and household services*	6,593,505,348	-	26,965,812	6,620,471,160
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya / *International services*	125,822,390,385	-	30,165,548,842	155,987,939,227
Kegiatan yang belum jelas batasannya / *Others activities*	210,558,319,379	-	186,297,967	210,744,617,346
Rumah tangga/ *Household*	1,456,688,708,711	-	27,421,768,061	1,484,110,476,772
Bukan lapangan usaha / *Not in business sector*	4,767,229,299,442	-	36,768,828,838	4,803,998,128,280
Jumlah / *Total*	11,956,657,029,414	173,823,741,671	2,079,359,014,504	14,209,839,785,589
Penyisihan kerugian penurunan nilai / *Allowance for impairment losses*	(61,771,593,440)	(437,074,357,162)	(1,173,715,418,492)	(1,672,561,369,094)
Bersih / *Net*	11,894,885,435,974	(263,250,615,491)	905,643,595,012	12,537,278,416,495

(viii) Nilai wajar agunan

Bank Papua memiliki agunan atas pinjaman yang diberikan dalam bentuk kas, bangunan, kendaraan, hak tagih dan properti lainnya. Perkiraan nilai wajar dari agunan yang digunakan oleh Bank Papua didasarkan pada nilai agunan yang dinilai oleh penilai internal maupun eksternal.

(viii) Fair value of collateral

Bank Papua hold collateral against loans in the form of cash deposits, building, vehicle, receivables and others property. Estimates of fair value of collateral held by the Bank are based on the value of collateral assessed internally or externally by the independent appraisers.

(ix) Tabel di bawah menunjukkan kualitas kredit per jenis instrumen keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai (diluar cadangan kerugian penurunan nilai) :

(ix) The table below shows credit quality per class of financial assets (gross of allowance for impairment losses) that are neither past due nor impaired:

	2017				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai / *Neither pas due nor impaired*		Jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Pas-due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai / *Impaired*	Jumlah / *Total*
	Tingkat tinggi / *High grade*	Tingkat standar / *Standard grade*			
Nilai wajar melalui laporan laba rugi / *Fair value through profit and loss*					
Obligasi pemerintah / *Government bonds*	-	-	-	-	-
Dimiliki hingga jatuh tempo / *Held to maturity*					
Efek-efek / *Marketable*	1,135,951,833,338	-	-	-	1,135,951,833,338
Obligasi pemerintah / *Government bonds*	-	-	-	-	-
Tersedia untuk dijual / *Available - for - sale*					
Reksadana / *Mutual*	314,551,184,249	-	-	-	314,551,184,249

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

(ix) Tabel di bawah menunjukkan kualitas kredit per jenis instrumen keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai (diluar cadangan kerugian penurunan nilai) : (lanjutan)

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

a. Credit Risk (continued)

(ix) The table below shows credit quality per class of financial assets (gross of allowance for impairment losses) that are neither past due nor impaired: (continued)

	2017				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai / *Neither pas due nor impaired*		Jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Pas-due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai / *Impaired*	Jumlah / *Total*
	Tingkat tinggi / *High grade*	Tingkat standar / *Standard grade*			
Kredit dan piutang / *Loan and receivable*					
Giro pada BI / *Current account with Bank Indonesia*	1,415,941,135,223	-	-	-	1,415,941,135,223
Giro pada bank lain / *Current account with other banks*	6,303,099,349	-	-	-	6,303,099,349
Penempatan pada BI dan bank lain / *Placement with Bank Indonesia and other banks*	2,949,937,783,825	-	-	-	2,949,937,783,825
Kredit yang diberikan / *Loan*					
Konsumer / *Consumer*	-	5,912,156,532,672	-	484,972,090,777	6,397,128,623,449
Modal kerja / *Working capital*	-	2,539,754,994,222	-	1,203,685,608,967	3,743,440,603,189
Investasi / *Investment*	-	589,985,819,624	-	1,164,964,054,168	1,754,949,873,992
Karyawan / *Employee*	-	313,616,241,373	-	5,478,485,703	319,094,727,076
Sindikasi / *Syndicated*	12,534,457,144	526,417,038,310	-	501,887,015,407	1,040,838,510,861
Program Pemerintah / *Government Program*	-	12,531,992,151	-	2,923,583,430	15,455,575,581
Jumlah / *Total*	12,534,457,144	9,894,462,618,553	-	3,363,910,838,451	13,270,907,914,148
Cadangan kerugian penurunan nilai / *Allowance for impairment losses*	(12,534)	(5,240,772,438)	-	(1,501,499,924,551)	(1,506,740,709,523)
Netto / *Net*	12,534,444,610	9,889,221,846,115	-	1,862,410,913,900	11,764,167,204,625

*) terdiri dari tagihan dana pihak ketiga / *Consist of third party receivables*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

Tingkat tinggi

a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.

b) Pinjaman yang diberikan, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu kredit; debitur dengan tingkat stabilitas dan keragaman yang tinggi; memiliki akses setiap saat untuk memperoleh pendanaan dalam jumlah besar dari pasar terbuka; memiliki kemampuan membayar yang kuat dan rasio-rasio laporan posisi keuangan yang konservatif.

c) Efek-efek dan obligasi pemerintah yaitu efek-efek yang dikeluarkan oleh pemerintah, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam investment grade dengan rating minimal idBBB- (Pefindo) atau BBB- (Fitch).

Tingkat standar

a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank lokal yang tidak terdaftar di bursa.

b) Pinjaman yang diberikan, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan tidak pernah menunggak 90 hari atau lebih; akses terbatas ke pasar modal atau ke pasar keuangan lainnya; tingkat pendapatan dan kinerja keseluruhan tidak stabil; memiliki kemampuan membayar yang cukup.

c) Efek-efek dan obligasi Pemerintah yaitu efek-efek dan obligasi dengan rating antara idBB+ sampai dengan idB (Pefindo) atau BB+ sampai dengan B (Fitch).

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank

Posisi dana pihak ketiga, likuiditas aset, liabilitas kepada *counterparties* dan komitmen kredit kepada debitur merupakan sumber potensi likuiditas bagi Bank Papua. Ketidakmampuan untuk menghimpun dana dengan biaya wajar akan berdampak kepada profitabilitas Bank Papua. Bank Papua mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, dan agar senantiasa dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

a. Credit Risk (continued)

The credit quality are defined as follows:

High grade

a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with the Sovereign, transacted with reputable banks with low probability of insolvency.

b) Loans, interests receivables and third party receivables are borrowers with very satisfactory track record of loan repayment and whose accounts did not turn past due during the term of the loan; borrowers with high degree of stability and diversity; has access to raise substantial amounts of funds through public market at any time; very strong debt service capacity and has conservative statements of financial position ratios.

c) Securities and government bonds are securities issued by government, investment grade securities and bonds with a rating of at least idBBB- (Pefindo) or BBB- (Fitch).

Standard grade

a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with the local banks not listed in the stock exchange.

b) Loans, interests receivables and third party receivables are borrowers who have an average track record of loan repayment and whose account did not turn past due for 90 days and over; smaller corporations with limited access to public capital markets or to alternative financial market; volatility of earnings and overall performance; debt service capacity is adequate.

c) Securities and Government bonds are securities and bonds with a rating between idBB+ to idB (Pefindo) or BB+ to B (Fitch).

b. Liquidity Risk

Liquidity risk is defined as Risk as a result of the Bank's inability to meet the maturing obligations of cash flow fund sources and / or of high quality liquid assets that can be mortgaged, without disrupting the activities and financial condition of the Bank

The amounts of third party funds, asset liquidity, liabilities to counterparties and loan commitments to debtors are potential liquidity sources for the Bank. The incapability to raise funds with tolerable cost will impact the Bank Papua's profitability. The Bank manages its liquidity risk to fulfill each agreed financial liability on a timely basis and to maintain an adequate and optimum liquidity position at any time.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas mencakup antara lain pemeliharaan cadangan likuiditas yang optimal, penetapan strategi pendanaan serta memelihara akses pasar yang mencukupi. Likuiditas Bank Papua saat ini diukur melalui posisi *primary reserve* dan *secondary reserve*. Bank Papua memelihara *primary reserve* dan *secondary reserve* untuk memenuhi kebutuhan likuiditas baik penarikan dana tidak terduga maupun ekspansi aset. Bank Papua memelihara *primary reserve* dalam bentuk Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia dan Kas di cabang-cabang.

Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas disusun sesuai dengan aktivitas bisnis yang dilaksanakan unit kerja operasional dan memperhitungkan kebutuhan untuk ekspansi bisnis. Untuk mengetahui kemampuan, Bank Papua melakukan serangkaian skenario likuiditas yang mencakup kondisi normal dan tidak normal termasuk kondisi ekstrim/krisis. Selain melalui dana pihak ketiga, Bank Papua dapat memenuhi kebutuhan likuiditas melalui sumber-sumber dana alternatif seperti : sekuritisasi aset, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali ataupun melalui penjualan surat berharga seperti Surat Utang Negara (*Government bond*).

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (pokok saja) pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

b. Liquidity Risk (continued)

The policy on liquidity risk management covers, among others, the maintenance of optimum liquidity reserve, determination of funding strategy and maintaining an adequate access to the market. The Bank Papua current liquidity is measured through its primary and secondary reserves. The Bank maintains its primary and secondary reserves to fulfill its liquidity needs in order to satisfy unexpected withdrawals or expansion of assets. Bank Papua maintains its primary reserve through the minimum reserve requirements imposed by Bank Indonesia and cash in its branches.

The policy on liquidity risk management is prepared in accordance with the business activities carried out by operational units and considers the needs to expand the business. The `Bank Papua conducts liquidity scenarios which include normal, abnormal and extreme conditions. Bank Papua is able to fulfill liquidity needs through alternative sources of financing other than through third party funds, which include asset securitization, securities under repurchase agreements or sale of securities, including Government bonds.

The following maturity tables provide information about the expected maturities within which financial assets and liabilities (principal only) as of December 31, 2017 and 2016:

	2017					
	Nilai tercatat / *Carrying value*	Lainnya / *Others*	1 Bulan /*1 Month*	1 - 6 Bulan / *1 - 6 Months*	6 - 12 Bulan / *6 - 12 Months*	> 12 Bulan / *> 12 Months*
ASET / *ASSETS*						
Giro pada BI / *Current account with Bank Indonesia*	1,415,941,135,223	-	1,415,941,135,223	-	-	-
Giro pada Bank lain / *Current account with other banks*	6,303,099,349	-	6,303,099,349	-	-	-
Penempatan pada BI dan Bank lain / *Placement with Bank Indonesia and Other banks*	2,949,937,783,825	-	2,949,937,783,825	-	-	-
Surat-surat berharga - bruto / *Marketable securities - gross*						
Tersedia untuk dijual / *Available - for - sale*	314,551,184,249	314,551,184,249	-	-	-	-
Reverse Repo - bruto/ *Reverse Repo - gross*	1,007,587,061,460		1,007,587,061,460			
Kredit yang diberikan - bruto / *Loans - gross*	13,270,907,914,148	-	910,431,902,624	878,049,614,535	1,066,562,084,429	10,415,864,312,560
Bunga yang masih akan diterima / *Interest receivable*	43,883,725,152	43,883,725,152	-	-	-	-
Jumlah / *Total*	19,009,111,903,406	358,434,909,401	6,290,200,982,481	878,049,614,535	1,066,562,084,429	10,415,864,312,560
LIABILITAS / *LIABILITIES*						
Liabilitas segera / *Obligation due immediately*)*	664,353,874,572	-	664,353,874,572	-	-	-
Simpanan nasabah/ *Deposit from Customers*	16,563,714,645,718	14,213,662,230,009	1,437,787,644,105	708,300,732,915	159,056,072,022	44,607,966,667
Simpanan dari Bank Lain *Deposit from other customers*	91,860,065,287	91,520,065,287	-	90,000,000	250,000,000	-
Pinjaman yang diterima / *Borrowings*	8,594,623,291	8,594,623,291	-	-	-	-
Bunga yang masih harus dibayar / *Accrued interest*	4,163,130,682	4,163,130,682	-	-	-	-
Jumlah / *Total*	17,332,686,339,550	14,318,240,049,269	2,102,141,518,677	708,390,732,915	159,306,072,022	44,607,966,667
Perbedaan jatuh tempo / *Maturity difference*	1,676,425,563,856	(13,959,805,139,858)	4,188,059,463,804	169,658,881,620	907,256,012,407	10,371,256,345,893

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Likuiditas (lanjutan)

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

b. Liquidity Risk (continued)

	2016					
	Nilai tercatat / *Carrying value*	Lainnya / *Others*	1 Bulan /*1 Month*	1 - 6 Bulan / *1 - 6 Months*	6 - 12 Bulan / *6 - 12 Months*	> 12 Bulan / *> 12 Months*
ASET / *ASSETS*						
Giro pada BI / *Current account with Bank Indonesia*	1,511,312,727,362	-	-	1,511,312,727,362	-	-
Giro pada Bank lain / *Current account with other banks*	45,126,492,867	-	-	45,126,492,867	-	-
Penempatan pada BI dan Bank lain / *Placement with Bank Indonesia and Other banks*	2,776,699,622,303	-	-	2,776,699,622,303	-	-
Surat-surat berharga - bruto / *Marketable securities - gross*						
Nilai wajar melalui laporan laba rugi / Fair value through profit and loss	63,115,576,807	-	-	-	-	63,115,576,807
Dimiliki hingga jatuh tempo / *Held-to-maturity*	781,234,828,716	-	-	164,118,546,488	275,116,282,228	342,000,000,000
Tersedia untuk dijual / *Available - for - sale*	592,941,686,149	-	-	-	-	592,941,686,149
Reverse Repo	511,137,613,326	-	511,137,613,326	-	-	-
Kredit yang diberikan - bruto / *Loans - gross*	14,209,839,785,589	-	1,182,385,352,701	1,052,000,636,361	967,709,418,816	11,007,744,377,710
Bunga yang masih akan diterima / *Interest receivable*	56,951,216,992	56,951,216,992	-	-	-	-
Jumlah / *Total*	20,548,359,550,111	56,951,216,992	1,693,522,966,027	5,549,258,025,381	1,242,825,701,044	12,005,801,640,666
LIABILITAS / *LIABILITIES*						
Liabilitas segera / *Obligation due*	566,370,002,731	-	566,370,002,731	-	-	-
Simpanan nasabah/ *Deposit from Customers*	16,477,114,545,276	13,320,858,539,546	1,698,175,007,259	657,668,332,483	761,189,870,821	39,222,895,167
Simpanan dari Bank Lain *Deposit from other customers*	92,364,544,884	89,366,544,884	-	1,548,000,000	-	1,450,000,000
Pinjaman yang diterima / *Borrowing*	325,000,000,000	325,000,000,000	-		-	-
Bunga yang masih harus dibayar / *Accrued interest*	8,953,610,652	8,953,610,652	-	-	-	-
Jumlah / *Total*	17,469,802,803,543	13,744,178,695,082	2,264,545,009,990	659,216,332,483	761,189,870,821	40,672,895,167
Perbedaan jatuh tempo / *Maturity difference*	3,078,556,746,568	(13,687,227,478,090)	(571,022,043,962)	4,890,041,692,898	481,635,830,223	11,965,128,745,499

*) Terdiri dari titipan nasabah, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah

*) *Consists of deposit customers, time deposits and interest on time deposits which have not been taken by the customers.*

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada arus kas yang tidak didiskonto (pokok dan bunga):

The table below shows the remaining contractual maturities of financial liabilities based on undiscounted cash flows (principal and interest):

	2017					
	Jumlah / *Total*	*On demand*	1 Bulan / *1 Month*	1 - 6 Bulan / *1 - 6 Month*	6 - 12 Bulan / *6 - 12 Month*	> 12 Bulan / *> 12 Month*
Liabilitas segera / *Current liabilities* *)	664,353,874,572	664,353,874,572	-	-	-	-
Simpanan nasabah / *Deposits from customers*	18,563,714,645,718	14,213,962,230,009	1,437,787,644,105	708,300,732,915	159,056,072,022	44,607,966,667
Simpanan dari Bank Lain *Deposit from other customers*	91,860,065,287	91,520,065,287	-	90,000,000	250,000,000	-
Pinjaman yang diterima / *Borrowing*	8,594,623,291	-	-	-	-	8,594,623,291
Bunga yang masih harus dibayar / *Accrued interest*	4,630,133,309	4,630,133,309	-	-	-	-
Jumlah / *Total*	17,333,153,342,177	14,974,466,303,177	1,437,787,644,105	708,390,732,915	159,306,072,022	53,202,589,958

*) Terdiri dari titipan nasabah, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka

*) *Consists of customer deposit's, undistributed profit sharing, time deposits and interest on time deposits which have not collected by*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki Bank Papua. Secara umum Bank Papua terekspose pada risiko suku bunga dan risiko nilai tukar.

Bank Papua juga melakukan *stress-testing* untuk mengevaluasi kemampuan Bank Papua agar dapat mengikuti berbagai macam perubahan kondisi eksternal.

Termasuk di dalam risiko pasar adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan faktor-faktor pasar, seperti perubahan suku bunga dan perubahan nilai tukar mata uang.

a. Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat bunga timbul dari adanya kemungkinan bahwa perubahan tingkat suku bunga akan mempengaruhi arus kas masa depan dari nilai wajar instrumen keuangan.

Tabel di bawah ini merupakan kisaran tingkat suku bunga per tahun untuk aset dan liabilitas yang penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

c. Market Risk

Market risk is defined as the risk due to variable market factors and movements in the Bank Papua's portfolio. In general, the Bank Papua is exposed to interest rate and foreign currency risks.

Bank Papua also conducts stress-testing to evaluate the ability of the Bank Papua to keep up with various kinds of external condition changes.

Included in the market risk is the risk of price changes of financial instruments due to changes in market factors, such as changes in interest rates and changes in currency exchange rates.

a. Interest rate risk

Interest rate risks arise from the possibility that changes in interest rates will affect future cash flows of the fair values of financial instruments.

The table below summarizes the range of interest rates per annum for significant assets and liabilities for period ended December 31, 2017 and 2016:

	2017	2016	
ASET			***ASSETS***
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	3.50% - 5.70%	4.00% -8.40%	*Placements with Bank Indonesia and Other banks*
Efek-efek	7.10% - 9.25%	6.00% - 9.25%	*Marketable securities*
Obligasi pemerintah			*Government bonds*
Tingkat bunga tetap	7.10% - 9.25%	7.85% - 8.04%	*Fixed interest rate*
Reverse Repo	4,50% - 5,40%	5.6% - 8.05%	*Reverse Repo*
Kredit yang diberikan	5.25% - 25.58%	5.00% - 24.47%	*Loans*
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Simpanan nasabah	0.00% - 6.25%	0% - 6.98%	*Customer saving*
Simpanan dari bank lain	0.00% - 6.25%	0% - 6.98%	*Other cistomer saving*
Pinjaman diterima	5.25% - 25.58%	8.00% - 8.30%	*Borrowings*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko Pasar (lanjutan)

a. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank Papua terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

c. Market Risk (continued)

a. Interest rate risk (continued)

The tables below summarize the Bank Papua's exposure to interest rate risk (gross) (unaudited) as of December 31, 2017 and 2016:

	2017					
	< 3 bulan / *< 3 month*	3 - 12 Bulan / *3 - 12 Month*	> 12 Bulan / *> 12 Month*	Suku bunga tetap / *Fixed interest rate*	dikenakan bunga / *Non interest*	Jumlah / *Total*
Aset keuangan / *Financial Assets*						
Kas / *Cash*	831,085,338,915	-	-	-	-	831,085,338,915
Giro pada BI / *Current accounts with Bank Indonesia*	-	-	-	1,415,941,135,223	-	1,415,941,135,223
Giro pada bank lain / *Current accounts with other banks*	-	-	-	6,303,099,349	-	6,303,099,349
Penempatan pada BI dan Bank lain / *Placement with Bank Indonesia and other banks*	-	-	-	2,949,937,783,825	-	2,949,937,783,825
Efek-efek / *Marketable securities*	-	-	-	1,135,951,833,338	-	1,135,951,833,338
Obligasi pemerintah / *Government bonds*	-	-	-	-	-	-
Reksadana / *Mutual fund*	-	-	-	314,551,184,249	-	314,551,184,249
Reverse Repo	1,007,587,061,460					1,007,587,061,460
Kredit yang diberikan / *Loans*		2,107,652,704,007	11,163,255,210,141	-		13,270,907,914,148
Bunga yang masih harus diterima / Accrued interest receivable	43,883,725,152	-	-	-	-	43,883,725,152
Jumlah Aset keuangan / Total financial assets	1,882,556,125,527	2,107,652,704,007	11,163,255,210,141	5,822,685,035,984	-	20,976,149,075,660
Dikurangi / *Less*:						
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for impairment losses*	-	(318,505,167,144)	(1,188,235,542,379)	-		(1,506,740,709,523)
Bersih / *Netto*	1,882,556,125,527	1,789,147,536,863	9,975,019,667,762	5,822,685,035,984	-	19,469,408,366,138
Liabilitas keuangan / *Financial liabilities*						
Simpanan nasabah/ *Deposit from Customers*	2,146,088,377,020	159,056,072,022	44,607,966,697	14,213,962,230,009	-	16,563,714,645,718
Simpanan dari Bank Lain *Deposit from other customers*	90,000,000	250,000,000	-	91,520,065,287	-	91,860,065,287
Pinjaman yang diterima / *Borrowings*	-	-	8,594,623,291	-	-	8,594,623,291
Bunga yang masih harus dibayar / *Accrued interest*	-	-	-	4,630,133,309	-	4,630,133,309
Jumlah liabilitas keuangan / *Total financial liabilities*	2,146,178,377,020	159,306,072,022	53,202,589,988	14,310,112,428,605	-	16,668,799,467,605
Gap repricing suku bunga - kotor / *Gross interest repricing gap*	(263,622,251,493)	1,629,841,464,841	9,921,817,077,804	(8,487,427,392,620)	-	2,800,608,898,532

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

c. Resiko Pasar (lanjutan)

a. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

c. Market Risk (continued)

a. Interest rate risk (continued)

	2016					
	< 3 bulan / *< 3 month*	3 - 12 Bulan / *3 - 12 Month*	> 12 Bulan / *> 12 Month*	Suku bunga tetap / *Fixed interest rate*	dikenakan bunga / *Non interest*	Jumlah / *Total*
Aset keuangan / *Financial Assets*						
Kas / *Cash*	941,680,990,818	-	-	-	-	941,680,990,818
Giro pada BI / *Current accounts with Bank Indonesia*	-	-	-	1,511,312,727,362	-	1,511,312,727,362
Giro pada bank lain / *Current accounts with other banks*	-	-	-	45,126,492,866	-	45,126,492,866
Penempatan pada BI dan Bank lain / *Placement with Bank Indonesia and other banks*	-	-	-	2,776,699,622,303	-	2,776,699,622,303
Efek-efek / *Marketable securities*	-	-	-	581,234,828,716	-	581,234,828,716
Obligasi pemerintah / *Government bonds*	-	-	-	259,159,855,660	-	259,159,855,660
Reksadana / *Mutual fund*	-	-	-	592,941,686,149	-	592,941,686,149
Revese Repo	511,137,613,326	-	-	-	-	511,137,613,326
Kredit yang diberikan / *Loans*	-	3,122,786,844,369	5,018,799,323,754	6,068,253,617,466	-	14,209,839,785,589
Bunga yang masih harus diterima / *Accrued interest receivable*	56,951,216,992	-	-	-	-	56,951,216,992
Jumlah Aset keuangan / *Total financial assets*	1,509,769,821,136	3,122,786,844,369	5,018,799,323,754	11,834,728,830,522	-	21,486,084,819,781
Dikurangi / *Less*:						
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for impairment losses*	-	515,212,413,231	1,115,862,688,344	41,486,267,519	-	1,672,561,369,094
Bersih / *Netto*	1,509,769,821,136	3,637,999,257,600	6,134,662,012,098	11,876,215,098,041	-	23,158,646,188,875
Liabilitas keuangan / *Financial liabilities*						
Simpanan nasabah/ *Deposit from Customers*	2,355,843,339,742	761,189,870,821	39,222,895,167	13,320,858,539,546	-	16,477,114,645,276
Simpanan dari Bank Lain *Deposit from other customers*	1,548,000,000	-	1,450,000,000	89,366,544,884	-	92,364,544,884
Pinjaman yang diterima / *Borrowings*	-	-	325,000,000,000	-	-	325,000,000,000
Bunga yang masih harus dibayar / *Accrued interest*	-	-	-	1,181,069,881	-	1,181,069,881
Jumlah liabilitas keuangan / *Total financial liabilities*	2,357,391,339,742	761,189,870,821	365,672,895,167	13,411,406,154,311	-	326,181,069,881
Gap repricing suku bunga - kotor / *Gross interest repricing gap*	(847,621,518,606)	2,876,809,386,779	5,768,989,116,931	(1,535,191,056,270)	-	22,832,465,118,994

Analisis sensitivitas untuk beberapa faktor pasar menunjukkan bagaimana laba atau rugi dan ekuitas dapat dipengaruhi oleh perubahan dari beberapa faktor risiko sesuai dengan tabel di bawah ini. Secara umum, sensitivitas diestimasi dengan membandingkan suatu nilai awal ke nilai tertentu setelah perubahan tertentu dari faktor pasar, dengan mengasumsikan seluruh variabel lainnya tetap. Sensitivitas atas laporan laba rugi merupakan efek atas perubahan estimasi suku bunga atas laba rugi untuk suatu periode, berdasarkan nilai suku bunga mengambang atas aset dan liabilitas yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2017. Jumlah sensitivitas atas laporan laba rugi komprehensif didasarkan pada asumsi bahwa terdapat perubahan paralel dalam kurva penghasilan.

Sensitivity analysis for several market factors showing how profit or loss and equity could be affected by changes in the relevant risk factor are in the following tables below. In general, sensitivity is estimated by comparing an initial value to the value derived after a specified change in the market factor, assuming all other variables are constant. The sensitivity of the statement of income is the effect of the assumed changes in interest rates on the profit or loss for a period, based on the floating rate trading and non-trading financial assets and liabilities held by the Bank Papua as of December 31, 2017. The total sensitivity of statement of comprehensive income is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.

34. MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

c. Resiko Pasar (lanjutan)

a. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel dibawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif Bank Papua terhadap kemungkinan perubahan wajar atas suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga tetap pada tanggal 31 Desember 2017:

31 Desember 2017 / December 31, 2017	
Perubahan basis poin / *Change in basis point*	Dampak ke laporan laba rugi komprehensif / *Impact to statements of comprehensive income*
+ 100 bps	6,800
- 100 bps	(6,800)

b. Risiko nilai tukar

Bank Papua tidak memiliki saldo dan transaksi dalam mata uang asing. Dengan demikian, Bank Papua tidak menghadapi risiko valuta asing.

34. FINANCIAL MANAGEMENT(continued)

c. Market Risk (continued)

a. Interest rate risk (continued)

The table below demonstrates the sensitivity of the Bank Papua's statement of income and statement of comprehensive income to reasonably possible changes in interest rates for fixed rate financial assets and liabilities as of December 31, 2017:

b. Foreign exchange risk

Bank Papua do not have balances and transactions in foreign currencies. Thus, Bank Papua do not have foreign exchange risk.

35. RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang berasal dari proses internal, sumber daya manusia dan sistim atau dari kejadian eksternal yang tidak memadai atau gagal.

Para indentifikator risiko Bank Papua melibatkan pengelompokkan kejadian risiko operasional, risiko mengidentifikasi risiko operasional yang material di cabang konvensional dan melaporkannya ke *Chief Risk Officer* setiap bulan dalam bentuk *checklist*.

Bank menerapkan Basic Indicator Approach, yang didasarkan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dihitung dengan Pendekatan Indikator Dasar (PID), untuk menghitung kebutuhan modal minimum (CAR) untuk risiko operasional. Fungsi ini dilakukan oleh Divsi Manajemen Risiko .

Satuan Kerja Audit Internal Bank Papua bertanggung jawab untuk memantau risiko operasional dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. RMD memastikan bahwa identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan dan pengendalian proses telah efektif dalam setiap aktivitas fungsional, produk atau jasa baru.

Pengendalian dan mitigasi risiko operasional dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja Bank Papua. RMD bertugas untuk memastikan bahwa Bank Papua telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian dan mitigasi risiko operasional yang memadai yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu.

Terkait dengan kelangsungan usaha bila terjadi kondisi disaster (bencana), Bank Papua juga sudah mempunyai kebijakan Business Continuity Management (BCM), yaitu suatu mekanisme yang merupakan kombinasi antara strategi, kebijakan,dan prosedur yang dikembangkan untuk memastikan kelangsungan operasional dari fungsi-fungsi usaha yang kritikal pada tingkat layanan tertentu pada saat terjadi gangguan atau bencana. Kebijakan ini mencakup semua unit usaha Bank Papua

35. OPERATIONAL RISK

Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events.

The risk indentification of Bank Papua involves classifying operational risk events, identifying material operational risk at conventional branches and reporting them to the Chief Risk Officer on a monthly basis in the form of a checklist.

The Bank applies the Basic Indicator Approach, based on Circular Letter of Financial Services Authority Number 24 / SEOJK.03 / 2016 dated July 14, 2016 concerning Risk Weighted Asset Calculation (ATMR) for Operational Risk calculated by Basic Indicator Approach (PID), to calculate the need minimum capital (CAR) for operational risk. This function is performed by the Division of Risk Management.

The Bank Papua's Internal Audit Division is responsible for monitoring operational risk by conducting an appraisal on the implementation of risk management policies and procedures. The RMD ensures that the risk identification, measurement, monitoring and control processes are effective in each of the functional activities, new products or services.

Controlling and mitigating operational risk is conducted by unit within Bank Papua. RMD ensures that the Bank has adequate policies and procedures, which must be complied and carried out by each unit in conducting its daily transactions and activities in accurately, efficiently and timely manner.

In relation to business continuity in the event of a disaster condition, Bank Papua also has a Business Continuity Management (BCM) policy, a mechanism that combines strategies, policies and procedures developed to ensure the operational continuity of business functions. critical at a certain level of service in the event of a disruption or disaster. This policy covers all business units of Bank Papua

36. RISIKO HUKUM

Bank Papua melaksanakan identifikasi risiko hukum berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya risiko yang meliputi tuntutan hukum, tidak adanya peraturan regulasi hukum yang mendukung, dan kelemahan perjanjian. Di samping itu, setiap divisi bersama-sama dengan RMD dan Divisi Sekretariat Perusahaan secara berkala menganalisis dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum.

Pengukuran risiko hukum dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko bersama-sama Divisi Hukum berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap liabilitas kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Pemantauan risiko hukum dilaksanakan oleh RMD untuk mengevaluasi efektivitas dari implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Bank Papua. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi risiko hukum.

Dalam melaksanakan pengendalian risiko hukum, Divisi Hukum memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan reviu secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan mitra Bank Papua.

37. RISIKO REPUTASI

Identifikasi risiko reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup aspek keterbukaan, keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank Papua, perilaku karyawan Bank Papua dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi Bank Papua.

Pengukuran risiko reputasi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko reputasi. Risiko reputasi Bank Papua dikelolah oleh Divisi Manajemen Risiko dengan berkoordinasi dengan Divisi Sekretaris Perusahaan, dan dilaporkan ke Bank Indonesia.

Dalam rangka pemantauan risiko reputasi, di bangun sistem pemantauan reputasi yang dirancang agar dapat secara rutin memeriksa transaksi, peraturan, teknologi dan *trend*, perkembangan dan perubahan yang berpotensi mempengaruhi bisnis Bank Papua. Dalam hal ini, Bank Papua melakukan analisis kesenjangan antara kinerja Bank Papua dengan harapan pemangku kepentingan/pemegang saham pada umumnya dan nasabah khususnya, dan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi serta dengan mengoptimalkan fungsi Sekretariat Bank.

Dalam pengendalian risiko reputasi, satuan kerja yang berfungsi sebagai *corporate secretary* bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta untuk menjalankan fungsi *Public Service Obligation* (PSO) dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

36. LEGAL RISK

Bank Papua identifies legal risk based on Factor's causing risk's include legal litigation, absence of support in law or regulation and weaknesses agreement. At the same time, each division together with the RMD and Corporate Secretary Division, analyzes periodically the impact of changes in certain rules and regulations on Bank's legal risk exposures.

Legal risk measurement is conducted by the Management Risk Deivision and Corporate Secretary Division based on the evaluation report resulting from the analysis of individual legal cases on contingent liabilities arising from legal litigation.

Legal risk monitoring is conducted by the RMD to evaluate the effectiveness of policies, procedures and compliance with Bank Papua's policies and prevailing laws and regulations. Periodic monitoring is conducted on all legal risk exposures.

To mitigate legal risk, the Legal Division provides legal advice and recommendation to each division and risk taking units and conducts a regular review of agreements with counterparty.

37. REPUTATIONAL RISK

Reputational risk is identified on inherent risk factors associated to functional activities including transparency aspects, customer complaints against Bank Papua, employee attitude when providing services to customers and Bank Papua's communication systems.

Reputation risk measurement is based on the evaluation of the factors causing reputational risk. Bank of Papua's reputational risk is managed by the Risk Management Division, together with the Division of Corporate Secretariat and reported to Bank Indonesia.

In order to monitor the risk of reputation, a reputation built monitoring system is designed to routinely check transactions, regulatory, and technological trends, developments and changes that potentially affect the business of Bank Papua. In this case, Bank Papua perform a gap analysis between the performance of Bank Papua with stakeholders' expectations in general and customers in particular, and taking notes of the things that could potentially pose a reputation risk as well as by optimizing the function of Corporate Secretary of Bank.

In control reputational risk, the unit serves as corporate secretary is responsible for the implementation of policies relating to the handling and resolution of negative news or information to avoid counter-productive as well as for the functioning of the Public Service Obligation (PSO) in order to implement corporate social responsibility (Corporate Social Responsibility).

38. RISIKO STRATEJIK

Identifikasi risiko stratejik dilakukan berdasarkan faktor-faktor penyebab risiko pada aktifitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasuri dan investasi, serta operasional dan jasa. Kemudian, setiap divisi dan kantor cabang mencatat dan menatausahakan setiap kejadian terkait risiko stratejik dalam suatu *database* yang dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian pada suatu periode dan aktivitas fungsional tertentu.

Pengukuran risiko stratejik dilakukan berdasarkan kinerja Bank Papua, yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai (*expected result*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja fungsional individu, dan memeriksa kemajuan yang sudah dicapai dengan target yang telah ditetapkan.

Pemantauan risiko stratejik dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko secara berkala dengan mengidentifikasi strategi-strategi fungsional yang sedang dijalankan beserta target sasarannya. Selanjutnya Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi, divisi dan kantor cabang meriviu strategi dasar dan fokus pada perubahan manajemen Bank Papua, perkreditan korporasi, pembiayaan perdagangan, treasuri, operasional dan kekuatan serta kelemahan sistem teknologi informasi.

39. RISIKO KEPATUHAN

Dalam identifikasi risiko kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan membuat daftar peraturan dan hukum yang berlaku pada seluruh satuan kerja. Di samping itu, Satuan Kerja Kepatuhan menganalisis kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko untuk diriviu.

Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank Papua untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan ini termasuk meriviu semua penalti, litigasi, dan keluhan yang pernah diterima Bank Papua.

Dalam pemantauan risiko kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko serta Divisi Kepatuhan bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen risiko kepatuhan dengan memantau secara teratur seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan.

40. MANAJEMEN MODAL DAN RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan gearing ratio serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

Bank Papua mengatur struktur modal dan membuat penyesuaian atas perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko kegiatannya. Tidak terdapat perubahan tujuan, kebijakan dan proses dari tahun sebelumnya.

38. STRATEGIC RISK

Strategic Risk identification is based on the risk factors that cause the functional activities, such as activities of lending, treasury and investment, as well as the operations and services. Then, each division and branch offices record and administer all strategic risk-related events in a database that can be used to project potential losses over a period of specific and functional activity.

Strategic risk measurement is based on the performance of Bank Papua, by comparing the results achieved (expected result) with the actual results, evaluate the functional performance of individuals, and examine the progress that has been achieved with the set targets.

Strategic risk monitoring conducted by the Division of Risk Management at regular intervals by identifying functional strategies being executed along with its targets. Furthermore, the Board of Commissioners and Directors, divisions and branches reviewing basic strategy and focus on change management of the Bank Papua's, corporate lending, trade finance, treasury, operations and the strengths and weaknesses of information technology systems.

39. COMPLIANCE RISK

In compliance risk identification, the Compliance Unit made a list of rules and laws that apply to the entire unit. In addition, the Compliance Unit analyzes the events that led to the emergence of compliance risk and inform the matter to the Division of Risk Management and Risk Management Committee for review.

Compliance risk measurement performed to measure the potential losses caused by non-compliance and the inability of the Bank to comply with the regulations. The magnitude of compliance risks are estimated based on the Bank's ability to meet all the regulations of Bank Papua at the past and future. These activities include reviewing all penalties, litigation and complaints ever received by Bank Papua.

In monitoring compliance risk, Division of Risk Management, and Compliance Division tasked to evaluate the effectiveness of the implementation of risk management on a regular basis to monitor compliance with all kinds of activities that could potentially pose a risk compliance.

40. CAPITAL MANAGEMENT AND MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)

The Bank's capital management objectives is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investor, depositor, customer and market confidence. In managin its capital, the Bank considers factors such as: providing optimal capital rate of return to shareholders and maintaining a balance between high return gearing ratio and safety provided by a sound capital position.

Bank Papua's manages its capital structure and makes adjustments to it in the light changes in economic conditions and the risk characteristics of its activities. No changes were made in the objectives, policiesm and processes from the previous period.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

40. MANAJEMEN MODAL DAN RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Bank telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan.

Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum

Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum (Capital Adequacy Ratio (CAR)) adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (Risk - Weighted Assets (RWA)). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari Modal Inti ("Tier I") dan Modal Pelengkap ("Tier II") dikurangi penyertaan pada Entitas Anak. Sesuai dengan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2016 dan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, sejak akhir bulan September 2016, Cadangan Tujuan tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai komponen Modal Bank.

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

40. CAPITAL MANAGEMENT AND MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) (continued)

As of 31 December 2017 and 2016, the Bank has complied with all capital requirements.

Capital Adequacy Ratio

The Capital Adequacy Ratio (CAR) is the ratio of the Bank's capital over its Risk - Weighted Assets (RWA). Based on Bank Indonesia regulations, the total capital for credit risk consists of core capital (Tier I) and supplementary capital (Tier II) less investments in Subsidiaries. In accordance with OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016 and OJK Regulation No. 34/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks and OJK Circular Letter No.43/SEOJK.03/2016 on Transparency and Publication Conventional Commercial Bank Report, since the end of the month of September 2016, Specific Reserves can no longer be taken into account as a component of Capital Bank.

The capital adequacy ratio as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	2017	2016	
Aset tertimbang menurut risiko			*Risk weighted assets*
- Tanpa memperhitungkan risiko pasar	9,433,907,306,773	10,568,801,585,413	*Without market risk* -
- Dengan memperhitungkan risiko pasar	50,896,693,256	103,749,489,343	*With market risk* -
- Dengan memperhitungkan risiko operasional	3,389,625,349,014	3,277,364,280,928	*With operational risk* -
Modal			*Capital*
- Modal inti	2,195,629,675,993	2,274,600,811,953	*Core capital* -
- Modal pelengkap	119,838,032,097	136,454,436,435	*Supplementary capital* -
Jumlah modal	2,315,467,708,090	2,411,055,248,387	*Total capital*
Rasio kecukupan modal			*Capital adequacy ratio*
- Tanpa memperhitungkan risiko pasar	24.54%	22.81%	*Without market risk* -
- Dengan memperhitungkan risiko pasar	24.41%	22.59%	*With market risk* -
- Dengan memperhitungkan risiko operasional	17.99%	17.28%	*With operational risk* -
Rasio modal inti terhadap aset tertimbang tanpa memperhitungkan risiko pasar	23.27%	21.52%	*Ratio of core capital to risk weighted assets without market risk*
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia	11.00%	11.00%	*Minimum capital adequacy ratio required by Bank Indonesia*

41. KONTINJENSI

Dalam melakukan kegiatan, Perusahaan tidak terlepas dari berbagai perkara hukum dan tuntutan sehubungan dengan kepatuhan, kontrak, perjanjian, peraturan pemerintah, dan kepemilikan aset. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan posisi keuangan, terdapat tuntutan hukum yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan, terdiri atas:

a. Gugatan Perkara Perdata No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mrk tanggal 2 Juli 2014 pada Pengadilan Negeri Merauke An. Penggugat PT. Papan Mandiri dan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua c/q Bank Papua Kantor Cabang Merauke sebagai Tergugat I

   Inti materi Gugatan : membebaskan Penggugat dari kreditnya kepada PT Bank Papua untuk nilai sebagian atau seluruhnya, membatalkan proses hukum pemberian kredit, dan membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan atas agunan-agunan yang terbit atas APHT.

   Progres Penanganan Perkara : Telah ada Putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 27 April 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 42/PDT/2015/PT.JPR tanggal 20 Agustus 2015 yang pada intinya perkara ini dimenangkan PT. Bank Papua. Penggugat melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung, dan Divisi Hukum telah menjawab dengan Kontra Memori Kasasi. elanjutnya masih menunggu putusan Kasasi dari Mahkamah Agung.

b. Gugatan perkara Perdata No. 13/Pdt.G/2014/PN.Mrk tanggal 2 Juli 2014 di Pengadilan Negeri Merauke An. Penggugat PT. Papan Mandiri dan PT. Bank Papua Cabang Merauke selaku Tergugat I.

   Inti materi gugatan : Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) agunan atas kredit Penggugat kepada Bank Papua, menyatakan menunda atau menolak Permohonan Eksekusi yang mendasarkan Putusan Kasasi MA RI No. 2200 K/PDT/2013, Permohonan penebusan Sertifikat atas tanah dan bangunan berdiri di atasnya yang dijadikan jaminan atas kredit pada Bank Papua dengan tebusan sebesar Rp5.234.300.000.

   Progres penanganan perkara : telah ada Putusan Pengadilan Negeri Merauke, dan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 43/PDT/2015/PT.JPR tanggal 20 Agustus 2015 yang pada intinya perkara ini dimenangkan PT. Bank Papua. Penggugat melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung, dan Divisi Hukum telah menjawab dengan Kontra Memori Kasasi. Selanjutnya masih menunggu putusan Kasasi dari Mahkamah Agung.

c. Gugatan perkara perdata No. 577/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Desember 2014 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat an. Penggugat Larry Ridwan.

   Inti materi gugatan : Derden Verzet atau Perlawanan Lelang dari Pemilik Jaminan

   Progres penanganan perkara : Telah ada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Mei 2016 dan dimenangkan PT. Bank Papua (gugatan ditolak). Penggugat menyatakan banding, namun sampai saat ini belum ada memori Banding yang disampaikan kepada PT. Bank Papua.

41. CONTINGENCIES

In carrying out its business, The Company is not apart from any legal suits or claims concerned the compliance to contracts, agreements, government's law, and assets ownership. Up to statement of financial position completion date, there is several on-going lawsuits in the court, there are:

a. Lawsuit Civil Case No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mrk on July 2, 2014 in Merauke District Court the name of Plaintiff is PT. Papan Mandiri and PT. Bank Pembangunan Daerah Papua c/q Bank Papua Merauke branch office as defendants I.

   The essential of lawsuit material: exempt the plaintiff of its credit to PT Bank Papua to partially or completely value, cancel the process of granting credit law and cancel the certificate of Rights Dependent upon collateral-collateral that rises above the Deed of Mortgage.

   Progress of case completion: There was a decision of Merauke District Court on April 27, 2015 and the Jayapura High Court No. 42/PDT/2015/PT.JPR on August 20, 2015 that essentially won by PT. Bank Papua. The plaintiffs have file further legal action (appeal) to the High Court and The Corporate Secretary Division have aswered with Contra Appeal Memorandum. Furthermore, still waiting for the decision of Supreme Court Cassation

b. Lawsuit Civil Case No. 13/Pdt.G/2014/PN.Mrk on July 2, 2014 in Merauke District Court the name of Plaintiff is PT. Papan Mandiri and PT. Bank Pembangunan Daerah Papua c/q Bank Papua Merauke branch office as defendants I.

   Progress of case completion: Put sequestration (Conservatior Beslag) plaintiff's collateral for loan to Bank Papua, stated to postpone or reject the execution of Supreme Court Cassation Decision of Republic Indonesia No.2200 K/PDT/2013, request of certificate release of land and buildings on it which was sed as collateral for credit in Bank Papua with a ransom of Rp5.234.300.000.

   Progress of case completion: There was a decision of Merauke District Court, and the Jayapura High Court No.43/PDT/2015/PT.JPR on August 20, 2015 that essentially on by PT. Bank Papua. The plaintiffs have file further legal action (appeal) to the High Court and The Legal Division have wered with Contra Appeal Memorandum. Furthermore, still waiting for the decision of Supreme Court Cassation.

c. Lawsuit Civil Case No. 577/Pdt. G/2014/PN Jkt. on December 16, 2014 at Central Jakarta District Court with Lary Ridwan as Plaintiff.

   The contents of the lawsuit Material was Dergen Verzen or resistance from the owner auction guarantees.

   There has been a decision from Central Jakarta District Court on May 10, 2016 and won by PT. Bank Papua (the lawsuit has been rejected). The plaintiff stated to appeal, but until this time, there have been no appeal memorandum submitted to PT. Bank Papua.

41. KONTINJENSI (lanjutan)

d. Gugatan perkara perdata No. 04/Pdt.G/2015/PN.SRI tanggal 05 Mei 2015 pada Pengadilan Negeri Serui an. Penggugat Yosep De Haan dan Yusfin De Haan.

Inti Materi Gugatan : Perbuatan melawan hukum

Progres penanganan perkara : sudah ada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Serui tanggal 7 Maret 2016 yang intinya dimenangkan oleh Bank Papua. Penggugat melakukan Upaya Hukum Banding dan pihak Bank Papua telah memberikan kontra memori banding dan telah ada Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jayapura No. 21/PDT/2016/PT.JAP tanggal 12 Agustus 2016, dan selanjutnya Penggugat mengajukan Kasasi dan sementara masih menunggu putusan kasasi.

e. Gugatan perkara perdata No. 165/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 20 Mei 2015 pada Pengadilan Negeri Makassar an. Penggugat Umrah dan Suriati.

Inti Materi Gugatan : Perbuatan melawan hukum

Progres penanganan perkara : Telah ada putusan Pengadailan Negeri Makassar tanggal 8 Desember 2015 yang pada intinya dimenangkan PT. oleh Bank Papua. Penggugat melakukan upaya hukum Banding dan pihak Bank Papua telah memberikan Kontra Memori Banding dan dan telah terdapat Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar No.2/PDT/2016/PT.MKS yang dimenangkan oleh Bank Papua. Penggugat mengajukan kasasi dan Masih menunggu Keputusan

f. Gugatan Perkara Perdata Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Jap tanggal 10 Maret 2016 pada Pengadilan Negeri Jayapura atas nama Penggugat Agus Felle, dan kawan-kawan.

Inti materi gugatan: Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Bank Papua (Tergugat XXV) karena Penggugat menganggap Bank Papua telah menempati dan penguasai Ruko No. 260 dan Ruko No. 262 yang dipergunakan sebagai Kantor.

Progres Penanganan Perkara: telah ada putusan Pengadilan Negeri Jayapura 45/PN.Jap/2016 tanggal 7 Pebruari 2017 yang isinya gugatan penggugat ditolak. Penggugat mengajukan banding dan saat ini masih menunggu keputusan banding.

g. Gugatan Perkara Perdata Nomor : 298/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST tanggal 26 Mei 2016 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Penggugat Agus Abidin dan Sisca Rivlianty dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua c/q Bank Papua Kantor Cabang Jakarta sebagai Tergugat IV.

Inti materi Gugatan: Bahwa Tergugat IV tanpa adanya pembicaraan diawal dan tanpa sepengetahuan Para penggugat ternyata telah menyiapkan Akta No. 7 tentang Personal dan sebagai itikad baik meskipun Para Penggugat tidak menikmati fasilitas kredit mau menandatangani Perjanjian Kredit No. 06/332/2015 tanggal 20 Mei 2015. Pencairan kredit dikucurkan akan tetapi pencairan kredit tidak dipindah bukukan langsung ke rekening suplier sesuai perjanjian dan Tergugat IV tidak menangguhkan dan membatalkan pencairannya, maka penandatangan Akta No. 7 tentang Personal Guarantee tidak sesuai dengan Persetujuan Kredit.

Progres Penanganan Perkara: putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 7 Pebruari 2017 yang isinya gugatan penggugat ditolak sehingga dalam hal ini Bank Papua menang. Penggugat mengajukan banding dan saat ini masih dalam proses banding. Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru diberikan tanggal 8 Maret 2017 dan Bank Papua sudah memberi kontra memori banding.

41. CONTINGENCIES (continued)

d. Lawsuit Civil Case No. 04/Pdt.G/2015/PN.SRI on May 5, 2015 in Serui District Court, the name of Plaintiffs are Yosep De Haan dan Yusfin De Haan.

The essential of lawsuit material: Act against the law.

Progress of case completion: There was decision from Serui District Court on March 7, 2016 which essentially won by PT. Bank pembanggunan Daerah Papua. The plaintiffs have file further legal action (appeal) and The Corporate Secretary Division have aswered with Contra Appeal Memorandum, and also there was decision of further legal action (appeal) from Jayapura High Court No. 21/PDT/2016/PT.JAP on August 12, 2016. Furthermore, the plaintiffs filed cassation and for the while still waiting for the decision of cassation.

e. Lawsuit Civil Case No. 165/Pdt.G/2015/PN.Mks on May 20, 2015 in Makassar District Court, the name of Plaintiffs are Umrah and Suriati.

The essential of lawsuit material: Act against the law.

Progress of case completion: There was decision from Makassar District Court on December 8,2015 which essentially won by PT. Bank Pembanggunan Daerah Papua. The plaintiffs have file further legal action (appeal) and The Corporate Secretary Division have answered with Contra Appeal Memorandum, and there has been a Supreme Court Appeal Letter Makassar No.2 / PDT / 2016 / PT.MKS won by Bank Papua. The Plaintiffs filed an appeal and are still awaiting the Decision

f. Lawsuit Civil Case No. 45/Pdt.G/2016/PN.Jap on March 10, 2016 in Jayapura District Court, the name of Plaintiffs are Agus Felle cs.

The essential of lawsuit material: The plaintiff filed an act againts the law to Bank Papua (defendants XXV) because they considered Bank Papua has occupied and ruled Ruko No. 260 and Ruko No. 262 which has used as an Office.

Progress of case completion: there has been a decision of Jayapura District Court 45 / PN.Jap / 2016 dated February 7, 2017 that the plaintiff's claim is rejected. The Plaintiff filed an appeal and is currently pending an appeal decision.

g. Lawsuit Civil Case 298/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST on May 26, 2016 in Central Jakarta District Court, the name of Plaintiffs are Agus Abidin and Sisca Rivlianty. PT. Bank Pembangunan Daerah Papua c/q Bank Papua Jakarta branch office as Defendants IV.

he essential of lawsuit material: That Defendant IV without any preliminary talks and unbeknown by Plaintiffs have prepared the Acrtuarial Deed No. 7 regarding Personal and with good intention eventhough the plaintiff did not take benefit from credit facilities would sign Loan Agreement No. 06/332/2015 dated May 20, 2015. Disbursement of loans has been issued but not transferred directly to the account of the supplier according to the agreement and Defendant IV did not suspend and cancel the disbursement, so that the signing of the Actuarial Deed No. 7 of the Personal Guarantee was not in accordance with the Loan Agreement.

Progress of case completion: he decision of the Central Jakarta District Court Judge dated February 7, 2017 that the plaintiff's claim was rejected so that in this case the Bank of Papua wins. The Plaintiff filed an appeal and is currently in an appeal process. A copy of the Central Jakarta District Court ruling was granted on March 8, 2017 and Bank Papua has already given counter appeal.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

41. KONTINJENSI (lanjutan)

h. Gugatan Perkara Perdata Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Nab tanggal 14 Juli 2016 pada Pengadilan Negeri Nabire atas nama Penggugat Yulius Yogi dan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua c/q Bank Papua Kantor Cabang Nabire sebagai Tergugat V.

Inti Materi Gugatan: Bahwa Tegugat V ditarik sebagai Tergugat karena saat ini atas permintaan Kementrian Perhubungan terkait dana ganti rugi tanah Bandara Enarotali yang saat ini berada di rekening Wib Yogi dengan nomor rekening di Bank Papua Cabang Nabire sebesar Rp 32.300.000.000 (tiga puluh milyar tiga ratus juta rupiah) ditambah bunga sejak bulan Desember 2015, dalam posisi diblokir sehingga kepentingan Penggugat akan haknya atas dana ganti rugi tanah Bandara Enarotali maka Penggugat mohon Putusan Provisional agar PN. Nabire berkenan memerintahkan kepada Bank Papua Cabang Nabire (Tergugat V) untuk tetap memblokir dan tidak menyerahkan kepada pihak manapun dana ganti rugi tanah bandar udara Enarotali yang ada di rekening Wib Yogi.

Progres Penanganan Perkara: Gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat dituntut membayar biaya perkara sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sampai saat ini masih menunggu upaya hukum dari Penggugat

i. Gugatan Perkara Perdata Khusus Nomor: 06/Pdt.G/PN.Btl tanggal 6 Pebruari 2017 pada Pengadilan Negeri Bantul atas nama Penggugat Dwi Hastowo

Inti Materi Gugatan : Perbuatan melawan hukum

Progres Penanganan Perkara: telah ada Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 6/Pdt.Bth/2017/PN.Btl tanggal 1 November 2017 yang berisi perkara ini dimenangkan oleh bank Papua. Penggugat mengajukan banding.

j. Gugatan perkara Perdata No.190/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL tanggal 22 Maret 2017 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama Penggugat Ny. Yufita Sumayku.

Inti Materi Gugatan : Perbuatan melawan hukum.

Inti Materi Gugatan: tahap persidangan dengan agenda sidang kesaksian dari penggugat.

k. Gugatan perkara Perdata No.252/Pdt.G/2017/PN.Mks tanggal 18 Agustus 2017 pada Pengadilan Negeri Makassar atas nama Penggugat PT Planet Beckham 18.

Inti Materi Gugatan : Perbuatan melawan hukum

Inti Materi Gugatan: memasuki tahap pembuktian tergugat (Bank Papua).

l. Gugatan perkara Perdata No.160/Pdt.G/2017/PN.Smn tanggal 1 Agustus 2017 pada Pengadilan Negeri Sleman atas nama Penggugat PT Cipta Sarina Vidi.

Inti Materi Gugatan : Perbuatan melawan hukum

Inti Materi Gugatan: memasuki tahap persidangan dengan agenda sidang Putusan.

41. CONTINGENCIES (continued)

h. Lawsuit Civil Case No. 23/Pdt.G/2016/PN.Nab on July 14, 2016 in Nabire District Court, the name of Plaintiff is Yulius Yogi, and PT. Bank Pembangunan Daerah Papua c/q Bank Papua Nabire branch office as defendants V.

The essential of lawsuit material: Defendent V withdrawn as a Defendant because this time at the request of the Ministry of Transportation related to land's compensation fund of Enarotali Airport which currently stands at Yogi PM's bank account at Bank Papua Nabire Branch amounting to Rp32,300,000,000 (thirty billion three hundred million rupiah) plus interest since December 2015, is in blocked position. So that the Plaintiffs's rights to land's compensation fund of Enarotali Airport, then Provisional Decision as Plaintiff requests to Nabire District Court is pleased to order Bank Papua Nabire Branch (Defendant V) to remain in blocking and do not submit to any party the compensation's fund of Enarotali Airport which is lies in AM Yogi's bank account.

Progress of case completion: Plaintiff's claim is rejected and sued to pay the court fee Rp50.000.000 (fifty million rupiah). Until now still waiting for legal action from the plaintiff.

i. Lawsuit of Special Civil Case Number: 06 / Pdt.G / PN.Btl dated February 6, 2017 at the Bantul District Court on behalf of Plaintiff Dwi Hastowo

The essential of lawsuit material: Act against the law.

Progress of case completion: There has been a Decision of the Sleman District Court. 6 / Pdt.Bth / 2017 / PN.Btl dated November 1, 2017 which contains the case won by the Papuan bank. The Plaintiff filed an appeal.

j. Lawsuit Case No. 190 / Pdt.G / 2017 / PN.JKT.SEL dated March 22, 2017 to the South Jakarta District Court on behalf of Plaintiff Ny. Yufita Sumayku

The essential of lawsuit material: Act against the law.

The essential of lawsuit material: the trial stage with the agenda of the testimony from the plaintiff.

k. Lawsuit Case No. 252/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL dated August 18, 2017 to the South Jakarta District Court on behalf of Plaintiff PT Planet Beckham 18.

The essential of lawsuit material: Act against the law.

The essential of lawsuit material: entered the stage of proof of the defendant (Bank Papua).

l. Lawsuit Case No. 252/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL dated August 18, 2017 to the South Jakarta District Court on behalf of Plaintiff PT Planet Beckham 18.

The essential of lawsuit material: Act against the law.

The essential of lawsuit material: enters the trial stage with the agenda of the Judicial session.

41. KONTINJENSI (lanjutan)

m. Perkara Tindak Pidana Korupsi Penarikan Dana Kasda Pemda Kab. Sarmi pada Bank Papua Cabang Sarmi Tahun 2010-2011 diduga melibatkan salah satu Pegawai Bank Pembangunan Daerah Papua. Perkara ini ditangani oleh Petrus Ohoitimur, SH selaku Kuasa Hukum dari Terdakwa yang mana telah dibuatkan Perjanjian Kerja Sama No. 22/PKS-BPD/II/2014 dan No. 10/SKL/PO/11/2014.

Progres penanganan perkara: Telah ada Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura No. 06/Pid.Sus – TPK/2015/PN. Jap tanggal 10 Agustus 2016 dan saat ini masih menunggu putusan banding dari Pengadilan Tinggi Jayapura.

n. Dugaan tindak pidana Korupsi Pemda Membramo Raya yang di duga melibatkan beberapa Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Progres Penanganan Perkara: Proses Penyelidikan sudah dilaksanakan oleh Unit Pidana Khusus Polda Papua dan berdasarkan informasi Penyidik Polda berkas telah dilimpahkan kepada Pihak Kejaksaan.

o. Perkara SBI terkait pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan korupsi oleh Bareskrim. Serta kasus PT Vitas Samudera tindak pidana korupsi.

Inti Permasalahan: Bahwa berdasarkan temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pemberian kredit kepada PT. Vita Samudera dan PT. Sarana Bahtera Irja tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Papua maupun UU Perbankan lainnya sehingga secara keseluruhan Bank Papua terekspos risiko kredit, risiko hukum, risiko operasional dan risiko reputasi.

Progress penanganan perkara: Atas dasar tersebut, Penyidik OJK telah menetapkan tersangka yang dianggap bertanggungjawab dalam pemberian kredit tersebut. Adapun tersangka tersebut terdiri dari mantan Direksi dan Pejabat Eksekutif yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka di Departemen Penyidikan Jasa Keuangan.

p. Gugatan Perkara Perselisihan hubungan Industrial No.20/G/2014/PHI-Jap tanggal 15 September 2014 di Pengadilan Negeri Jayapura an. Penggugat Tridekawani Naibaho dan Bank Papua selaku tergugat.

Inti Permasalahan: Penggugat keberatan dengan Putusan Hubungan kerja yang dilakukan Tergugat secara sepihak sesuai Keputusan Direksi No.220/Kepeg/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai bank papua terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2013. menuru penggugat Surat Keterangan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Bidang Ketenagakerjaan.

Progres Penanganan Perkara: Bank Papua mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung dan telah ada Putusan Mahkamah Agung No.145K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 21 April 2015 yang menyatakan permohonan Kasasi oleh Pemohon Kasasi (Bank Papua) dinyatakan diterima. Penggugat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) dan kuasa hukum Bank Papua telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali dan saat ini menunggu putusan Penijauan Kembali di Mahkamah Agung.

41. CONTINGENCIES (continued)

m. Cases of Corruption Withdrawals Kasda Pemda Kab. Sarmi on the Sarmi branch office in 2010-2011 allegedly involving one of the employee of Bank Papua. This matter is handeld by Peter Ohoitimur, SH as an attorney of the defendant which had made Cooperation Agreement No. 22/PKS-BPD/II/2014 and no. 10/SKL/PO/11/2014.

Progress of case completion: There was decision from Jayapura District Court No. 06/Pid.Sus – TPK/2015/PN. Japwhich on August 10, 2016 and until now still waiting for decision of the appeal from Jayapura High Court.

n. Allegations of criminal acts of Corruption on Pemda Membramo are allegedly involving some employees of PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

Progress of case completion: The process of investigation has been conducted by the Special Criminal Unit of Papua Regional Police and based on information, the investigator's files has handed over to The Prosecutor.

o. Allegantions of SBI related to credit provision that are not in accordance with the principles of prudence and corruption by Bareskrim. As well as the case of PT Vitas Samudera criminal acts of corruption.

The Core Issue : Based on the findings by the Financial Services Authority (OJK) regarding provision of credit to PT. Vita Samudera and PT. Sarana Bahtera Irja which are not in accordance with applicable regulations in Bank Papua and other Laws of Banking so that the overall Bank Papua exposed of impact on credit risk, legal risk, operational risk and reputation risk.

Progress of case completion: Refer to those matter, the investigator from Financial Services Authority (OJK) has set a suspect who are considered responsible in granting the credit. The suspects consisted of former directors and executive officers which are their examination have carried out by the investigator from Financial Services Investigation Department (DPJK)

p. Relations Industrial Relations Disputes Claim No.20/G/2014/PHI-Jap dated September 15, 2014 at the Jayapura District Court. Plaintiffs Tridekawani Naibaho and Bank Papua as defendants.

Core Issue: The Plaintiff objected to the Decision of Employment of the Defendant unilaterally in accordance with the Decree of the Board of Directors No.220 Kepeg/ X/2013 dated October 29, 2013 regarding dismissal discharge as an employee of papua bank since the date of October 28, 2013. to sue the plaintiff of Certificate is contrary to the applicable law provisions in the Field of Manpower.

Progress of Case Handling: The Bank of Papua filed a Cassation Appeal to the Supreme Court and there has been a Supreme Court Decision No.145K/Pdt.Sus-PHI/2015 dated April 21, 2015 stating that a Cassation Application by Cassation Appellant (Bank Papua) is declared accepted. The Plaintiff filed a remarkable remedy that is the Judicial Review (PK) and the legal counsel of Bank Papua has filed a Counter Reconsideration Memory and is currently awaiting the Reforestation verdict in the Supreme Court.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

42. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini.

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

  PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

- PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

  PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset pendasarnya (*underlying assets*) bernilai-rendah.

- Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

  Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan *non-cash*.

- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

  Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan; estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya.

- PSAK 15 (Penyesuaian 2017): Investasi pada Entias Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

  Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pada saat pengakuan awal entitas dapat memilih untuk mengukur investasinya pada nilai wajar atas dasar investasi-per-investasi.

- Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71 Instrumen Keuangan dengan PSAK 62 Kontrak Asuransi, berlaku efektif 1 Januari 2020.

  Amandemen ini mengizinkan yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerapkan pengecualian sementara dari PSAK 71 *(deferral approach)* atau memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis (*overlay approach*) untuk aset keuangan yang ditetapkan

- Amandemen PSAK 53 -- Pembayaran Berbasis Saham: Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

  Amandemen ini bertujuan untuk memperjelas perlakuan akuntansi terkait klasifikasi danpengukuran transaksi pembayaran berbasis saham.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

42. NEW PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current financial statements are disclosed below.

- *SFAS 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9, effective 1 January 2020 with earlier application is permitted.*

  This SFAS provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introduce a more eneral requirements based on management's judgment.

- *SFAS 73: Leases, adopted from IFRS 16, effective 1 January 2020 with earlier application is permitted, but not before an entity applies SFAS 72: Revenue from Contracts with Customers.*

  This SFAS establish the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease; there are 2 optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.

- *Amendments to SFAS 2: Statement of Cash Flows on the Disclosures Initiative, effective 1 January 2018 with earlier application is permitted.*

  This amendments requires entities to provide disclosures that enable the financial statements users to evaluate the changes in liabilities arising from financing activities, including changes from cash flow and noncash.

- *Amendments to SFAS 46: Income Taxes on the Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses, effective 1 January 2018 with earlier application is permitted.*

  This amendments clarifies that to determine whether the taxable income will be available so that the deductible temporary differences can be utilized; estimates of the most likely future taxable income can include recovery of certain assets of the entity exceeds its carrying amount.

- *PSAK 15 (2017 Improvement): Investments in Associates and Joint Ventures, effective 1 January 2018 with earlier application is permitted.*

  This improvement Clarifies that at initial recognition an entity may elect to measure its investee at fair value on the basis of an investment-by-investment.

- *Amendments to SFAS 62: Insurance Contract on Applying PSAK 71 Financial Instruments with SFAS 62 Insurance Contract, effective 1 January 2020.*

  This improvement Clarifies that at initial recognition an entity may elect to measure its investee at fair value on the basis of an investment-by-investment.

- *Amendments to SFAS 53 – Share-based Payment: Classification and Measurement of Share-based Payment Transaction, effective 1 January 2018 with earlier application is permitted.*

  This amendments aims to clarify the accounting treatment related to the classification and measurement of stockbased payment transactions.

42. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank Papua masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank Papua.

42. NEW PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS (continued)

As at the authorisation date of this consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Group's consolidated financial statements.

43. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dan pos dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah direklasifikasikan agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

43. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain accounts and items in the financial statements for the year ended December 31, 2016 have been reclassified to conform with the presentation of the financial statements for the year ended December 31, 2017.

	December 31,2016* / 31 Desember 2016			
	Sebelum reklasifikasi / *Before reclassification*	**Reklasifikasi / *Reclassification***	**Setelah reklasifikasi/ *After reclassification***	
Laporan Posisi Keuangan				***Financial Statements Position***
Aset				***Assets***
Efek - efek - Pihak Ketiga	1,433,336,370,525	6,274,653,979	1,439,611,024,504	*Marketable securities - Third parties*
Aset Lain-lain:				
- Premium Surat Berhargaa dibayar dimuka	6,336,520,054	(6,274,653,979)	61,866,075	*Other Assets*
Jumlah Aset	**21,057,733,864,015**	-	**21,057,733,864,015**	***Total Assets***
Liabilitas				***Liabilities***
Giro	7,118,044,544,382	(7,118,044,544,382)	-	*Current Accounts*
Tabungan	6,292,180,540,048	(6,292,180,540,048)	-	*Saving Accounts*
Deposto	3,159,254,105,730	(3,159,254,105,730)	-	*Time Deposits*
Simpanan Nasabah	-	16,477,114,645,276	16,477,114,645,276	*Deposits from customers*
Simpanan Bank Lain	-	92,364,544,884	92,364,544,884	*Depiosits from other banks*
Jumlah Liabilitas	**18,242,594,923,703**	-	**18,242,594,923,703**	***Total Liability***
Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain				***Statements of Other Comprehensive Income (Losses)***
Pendapatan bunga kredit	1,618,041,303,667	(1,618,041,303,667)	-	*Loan interest income*
Pendapatan bunga penempat	169,432,743,590	(169,432,743,590)	-	*Placement interest income*
Pendapatan operasional	304,292,950,419	(304,292,950,419)	-	*Operational income*
Pendapatan amortisasi konversi kredit	6,307,251,036	(6,307,251,036)	-	*Loan convertion Amortized Income*
Pendapatan bunga	-	2,088,660,627,046	2,088,660,627,046	*Interest income*
Pendapatan operasional lainn	-	31,005,442,483	31,005,442,483	*Other operational income*
Beban Operasional Lainnya				***Other operating expenses***
Tenaga kerja dan tunjangan	(508,649,004,228)	40,282,393,982	(468,366,610,246)	*Salaries and allowances*
Umum dan administrasi	(522,339,375,772)	656,442,443	(521,682,933,329)	*General and administrative*
Imbalan manfaat karyawan	(19,046,528,780)	(40,282,393,982)	(59,328,922,762)	*Post-employment benefits*
Laba (Rugi) Operasional	**194,685,229,406**	**22,248,263,260**	**216,933,492,666**	***Operating Income (Losses)***
Pendapatan (Beban) Bukan Operasional				***Non Operating Income (Expenses)***
Pendapatan bukan operasiona	81,202,795,999	(21,591,820,818)	59,610,975,181	*Non operating incomes*
Beban bukan operasional	(5,316,048,842)	(656,442,443)	(5,972,491,285)	*Non operating expenses*
Laba (Rugi) sebelum Pajak	**270,571,976,563**	**(22,248,263,261)**	**248,323,713,302**	***Income (Losses) before Tax***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

44. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Bank Papua menyajikan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan 1 Januari 2016/31 Desember 2015 serta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 berkaitan dengan penyesuaian terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.46 (Revisi 2014) "Pajak Penghasilan" dan No.55 (Revisi 2014) "Instrument Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan telah diterapkan secara retrospektif

Penyesuaian atas akun-akun yang terdampak penyajian kembali laporan keuangan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan penerapan standar akuntansi yang telah direvisi sejak tanggal 1 Januari 2014 tersebut. Manajemen berkeyakinan bahwa hal tersebut diatas tidak berdampak pada penyajian laporan keuangan tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Ikhtisar angka-angka sebagaimana dilaporkan sebelumnya, penyesuaian dan angka-angka setelah penyajian kembali adalah

44. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS

The Bank Papua restated the financial statements as of December 31, 2016 and January 1, 2016/ December 31, 2015 and for the year ended December 31, 2016 in relation to the adjustment of Statement of Financial Accounting Standard No.46 (Revised 2014) "Income Tax" and No.55 (Revised 2014) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and has been applied retrospectively. Our Opinion is not modified in respect to this matter.

The adjustments on the accounts effected by the restatement of financial statements on as mentioned above in accordance with the application requirement of such revised accounting standards that have been effective since Januari 1, 2014. Management believes that the above mentioned matter does not effect the presentation of the financial statements as of December 31, 2017 and for the year then ended.

Summary of amounts previously reported, the adjustments and the restated amounts is as follows:

	Disajikan sebelumnya/ *As previously stated*	Penyesuaian PSAK No.46 (Revis 2014)/ *Adjustment of PSAK No.46 (Revised 2014)*	Penyesuaian PSAK No.55 (Revis 2014)/ *Adjustment of PSAK No.55 (Revised 2014)*	Setelah Disajikan kembali/ *After Restated*	
Laporan Posisi Keuangan					***Financial Statements Position***
Cadangan Penurunan Nilai					*Allowance for Impairment Losses*
Kredit Yang diberikan					*Loans*
CPN KYD Individual - Pinjaman dan Piutang	(35,629,598,397)	-	(399,652,342,205)	(435,281,940,602)	*CPN KYD Individual - Loans and Receivables*
CPN KYD Kolektif - Pinjaman dan Piutang	(1,237,279,428,492)	-	-	(1,237,279,428,492)	*CPN KYD Collective - Loans and Receivables*
Aset Lain-lain:					*Other Assets*
- Aset Pajak Tangguhan	95,354,376,159	(31,231,527,005)	-	64,122,849,154	*Deffered Asset -*
- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Yang Diambil Alih	(13,772,256,813)	-	(15,000,000,000)	(28,772,256,813)	*Allowance for Impairment - Losses Foreclosed Assets Abandoned property*
Jumlah Aset	**21,057,733,864,015**	**(31,231,527,005)**	**(414,652,342,205)**	**20,611,849,994,805**	***Total Assets***
Ekuitas					***Equity***
Pendapatan Komprehensif Lainnya	(282,318,287,936)	24,805,287,718	-	(257,513,000,218)	*Other Comprehensive Income*
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	233,984,711,988	(56,036,814,723)	(414,652,342,205)	(236,704,444,940)	*Income (Losses) the Current Years*
Jumlah Ekuitas	**233,984,711,988**	**(31,231,527,005)**	**(414,652,342,205)**	**2,369,255,071,102**	***Total Equity***
Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain					***Statements of Other Comprehensive Income (Losses)***
Pembentukan cadangan penurunan nilai					***Provision for impairment losses***
Aset produktif	(465,344,981,209)	-	(399,652,342,205)	(864,997,323,414)	*Productive assets*
Aset non produktif	-	-	(15,000,000,000)	(15,000,000,000)	*Non productive assets*
Laba (Rugi) sebelum Pajak	**270,571,976,563**	-	**(414,652,342,205)**	**(144,080,365,642)**	***Income (Losses) before Tax***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

44. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

44. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS (continued)

	Disajikan sebelumnya/ *As previously stated*	Penyesuaian PSAK No.46 (Revis 2014)/ *Adjustment of PSAK No.46 (Revised 2014)*	Penyesuaian PSAK No.55 (Revis 2014)/ *Adjustment of PSAK No.55 (Revised 2014)*	Setelah Disajikan kembali/ *After Restated*	
Beban Pajak					***Tax Expenses***
Manfaat (Beban) pajak tangguhan	32,045,124,675	(56,036,814,723)	-	(23,991,690,048)	*Deffered income tax*
Laba (Rugi) tahun berjalan	233,984,711,988	(56,036,814,723)	(414,652,342,205)	(236,704,444,940)	***Income (Losses) for the years***
Penghasilan (Beban) Konprehensif lainnya					***Other Comprehensive Income Expenses***
Manfaat (beban) pajak tangguhan atas penghasilan komprehensif lainnya	-	(24,805,287,718)	-	(24,805,287,718)	*Deffered income tax on Other Comprehensive Income*
Jumlah Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan	111,255,899,439	31,231,527,005	414,652,342,205	(384,238,545,207)	***Total Comprehensive Income (Loss) for the years***

45. PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank Papua bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang di otorisasi untuk terbit pada tanggal 28 Pebruari 2018.

45. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

The management of Bank Papua is responsible for the preparation and presentation of the finance statements which were authorized for issuance on February 28, 2018

*****

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

LAPORAN PENYAJIAN KEMBALI

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2016
Beserta Laporan Audit Independen

FINANCIAL RESTEDMENT

For The Years Ended On
December 31, 2016
With Independent Audit Report

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Prof. Dr. H. Tb. Hasanuddin, M.Sc. & Rekan
Registered Public Accountant, Tax & Management Consultant
No. Izin UKAP : Kep - 353/KM.6/2003

Bandung, 26 Januari 2018

Nomor : 025/SR/A/KAP/I/2018
Lamp. : -
Hal. : Penyajian Kmbali Saldo Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas kredit yang Diberikan pada Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

Kepada Yth.
Direktur Keuangan
PT Bank Pembangunan Daerah Papua
Jl. A. Yani No. 5-7
di
Jayapura

Dengan hormat,
Menjawab surat Saudara Nomor : 06/60/SKI/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang perihal tersebut di atas.

Setelah kami pelajari dengan seksama, maka kami menyetujui penyajian kembali saldo Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Kredit yang diberikan pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 yang telah kami audit.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
Kantor Auntan Publik
Prof. DR. H. Tb. Hasanuddin., M. Sc. & Rekan

Drs. H. Michdar Tabroni, Ak., CPAI.

Kantor Pusat : Metro Trade Centre Blok F No. 29 Jl. Soekarno Hatta - Bandung 40286 Telp./Fax. (022) 7536393, 7537665, 7535750 (Hunting)
Website : http://www.kap-hasanuddin.com, email : rpa@kap-hasanuddin.com, kap.tbhasanuddin@gmail.com

Lampiran 1

BANK PAPUA

ACCOUNTING POSITION PAPER

No. 01/14/SKI/2018

TENTANG

ANALISIS TERHADAP PENURUNAN NILAI KREDIT YANG DIBERIKAN SESUAI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 55 (REVISI 2015) DAN ANALISIS KESALAHAN MENDASAR SESUAI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 25(REVISI 2014)
UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2016

I. TUJUAN

Tujuan Accounting Position Paper ini adalah untuk melakukan analisis terhadap penurunan nilai atas kredit yang diberikan sebagaimana diatur dalam paragraph 63 PSAK 55 (Revisi 2015) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran terhadap bukti objektif kerugian penurunan nilai terhadap kredit yang diberikan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.

Selanjutnya Accounting Position Paper ini adalah untuk melakukan analisis terhadap kesalahan mendasar yang terjadi pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagaimana diatur dalam paragraf 41 PSAK 25 (Revisi 2014) tentang kesalahan material periode sebelumnya yang ditemukan pada periode selanjutnya.

II. RUANG LINGKUP

1. Lingkup bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Papua (selanjutnya disebut "Bank Papua") dalam analisis penurunan nilai terhadap kredit yang diberikan ini meliputi kredit yang diberikan kepada pada debitur Bank Papua merupakan

salah satu bisnis utama dari Bank Papua, yaitu penyaluran dana kepada masyarakat.

2. Objek penurunan nilai yang dibahas dalam analisis ini adalah kredit yang diberikan oleh Bank Papua, dimana metode penurunan nilai atas kredit yang diberikan sesuai dengan paragraf 63 PSAK 55 (Revisi 2015) dan peraturan internal Bank Papua melalui Surat Keputusan Direksi nomor 112/DIR-BPD/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015, dimana teknik perhitungan penurunan nilai dibagi menjadi 2 metode, yaitu teknik individual dan teknik kolektif.
3. Kredit yang diberikan yang masuk ke dalam analisis ini, meliputi kredit yang tercatat pada laporan keuangan periode 31 Desember 2016 dengan nilai plafond / limit kredit lebih dari Rp5.000.000.000,- dan dalam status Non Performing Loan (NPL).

III. REFERENSI

1. PSAK 55 (Revisi 2015) –Tentang Penurunan Nilai Aset Tetap;
2. PSAK 25 (Revisi 2014) – Tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi, dan Kesalahan;
3. Peraturan Direksi Bank Papua nomor 112/DIR-BPD/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015.

IV. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan pernyataan pada PSAK No. 55 (Revisi 2015) paragraf 63 bahwa: *"Entitas pertama kali menentukan bahwa terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara **individual** atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual (lihat paragraf 59). Jika entitas menentukan bahwa **tidak terdapat bukti objektif** mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka entitas memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya*

BANK PAPUA

dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penurunan nilai kolektif.".

Selanjutnya, sesuai paragraf 59 PSAK No. 55 (Revisi 2015), dijelaskan bahwa:*"Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika,* ***terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan),*** *dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Sulit untuk mengidentifikasi satu peristiwa tertentu yang menyebabkan penurunan nilai. Penurunan nilai pada dasarnya* ***disebabkan oleh kombinasi dari beberapa peristiwa****. Kerugian yang diperkirakan timbul akibat peristiwa masa depan tidak dapat diakui, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi. Bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai termasuk data yang dapat diobservasi yang menjadi perhatian dari pemegang aset tersebut mengenai peristiwa merugikan berikut ini:*

a) ***Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam****;*
b) ***Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga****;*
c) ***Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomik atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberika keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut****;*
d) ***Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya****;*
e) *Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau*
f) *Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset tersebut, meskipun penurunannya*

belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:

i. Memburuknya status pembayaran peminjam dalam kelompok tersebut (contohnya meningkatnya tunggakan pembayaran atau meningkatnya jumlah pihak peminjam kartu kredit yang mencapai batas kreditnya dan hanya mampu membayar cicilan bulanan minimal); atau

ii. Kondisi ekonomik nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas aset dalam kelompok tersebut (contohnya bertambahnya tingkat pengangguran di area geografis pihak peminjam, turunnya harga properti untuk kredit properti di wilayah relevan, turunnya harga minyak untuk pinjaman yang diberikan kepada produsen minyak, atau memburuknya kondisi industri yang mempengaruhi pihak peminjam dalam kelompok tersebut)."

Sesuai dengan pernyataan pada PSAK No. 25 (Revisi 2014) paragraf 41 bahwa: *"Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu entitas. Potensi kesalahan periode berjalan yang ditemukan pada periode tersebut dikoreksi sebelum laporan keuangan diselesaikan. Akan tetapi, kesalahan material yang kadangkala tidak ditemukan sampai periode selanjutnya, dan kesalahan periode sebelumnya dikoreksi pada informasi komparatif sajian pada laporan keuangan periode selanjutnya tersebut (paragraf 42-47).".*

Selanjutnya sesuai dengan pernyataan pada PSAK 25 (Revisi 2014) paragraf 42 bahwa: *"Entitas mengoreksi kesalahan material periode sebelumnya secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan dengan:*

a. Menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan dimana kesalahan terjadi; atau

BANK PAPUA

b. Jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode sebelumnya sajian paling awal.".

Untuk menganalisis apakah terdapat penurunan nilai atas kredit yang diberikan oleh Bank Papua, khususnya untuk kredit dengan nilai plafond lebih dari Rp5.000.000.000,- dan terdapat bukti objektif adanya penurunan nilai, dan guna melakukan analisis terhadap terjadinya kesalahan material pada periode laporan keuangan sebelumnya, maka perlu dipahami terlebih dahulu karakteristik kredit yang diberikan dan penyajian laporan keuangan periode sebelumnya secara menyeluruh.

V. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan analisis apakah terdapat penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan terjadinya kesalahan material pada laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 55 (Revisi 2015) dan PSAK 25 (Revisi 2014) atas pengukuran aset keuangan dan kesalahan material kredit yang diberikan dalam laporan keuangan tanggal 31 Desember 2016.

Selanjutnya apabila hasil analisa menunjukkan terdapat penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan merupakan suatu kesalahan material, maka manajemen Bank Papua akan melakukan koreksi atas pembentukan penurunan nilai kredit yang diberikan melalui koreksi atas kesalahan mendasar dalam penerapan PSAK 55 pada laporan keuangan tahun buku 31 Desember 2016.

VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi Bank Papua untuk penghitungan penurunan nilai kredit yang diberikan sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2015), dimana perhitungan penurunan nilai kredit yang diberikan *hierarkis* dengan terlebih dahulu melakukan perhitungan dengan teknik individual, dan apabila tidak terdapat bukti objektif adanya penurunan nilai, maka perhitungan penurunan nilai menggunakan teknik

kolektif (lihat lampiran 1. Surat Keputusan Direksi, nomor 112/DIR-BPD/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015).

Diagram Alur Proses Individual Impairment di BANK PAPUA

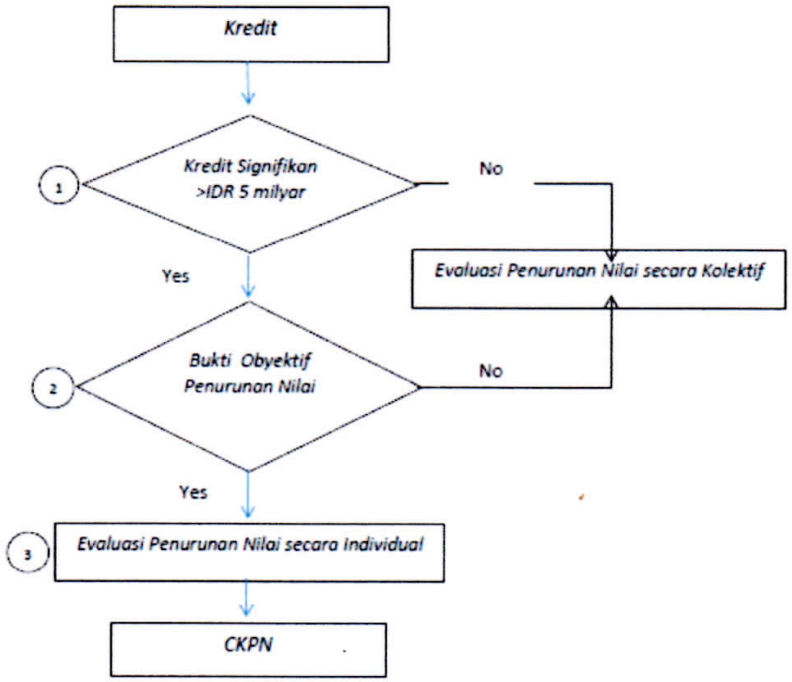

Kredit yang signifikan (significant loan) ditentukan atas masing-masing individual debitur. Kredit dinilai signifikan apabila plafond/limit fasilitas kredit yang diberikan lebih dari Rp5.000.000.000,- (ekuivalen) per individual debitur. Kriteria ini diambil dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Sejalan dengan kebijakan kredit internal Bank Papua, dimana di antaranya untuk limit persetujuan kredit investasi dan modal kerja sampai dengan Rp5.000.000.000,- (ekuivalen).
b. Bank mengadopsi pembiayaan berbasis asset (asset-based lending) untuk kredit kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,- ekuivalen; dimana membutuhkan agunan yang lebih dari cukup (>100% collateral coverage). Agunan sebagian besar terdiri dari tanah dan bangunan yang diikat melalui hak tanggungan pertama. Berdasarkan pengalaman historis, nilai

pengembalian (recovery value) untuk tunggakan pokok (dari likuidasi agunan) sangat baik, berkisar antara 90-100%.

c. Sementara itu, Bank mengadopsi lebih kepada pembiayaan berbasis arus kas (cash flow-based lending) untuk kredit lebih dari Rp5.000.000.000,- ekuivalen dan dengan fasilitas yang lebih kompleks (structured). Oleh karena itu, evaluasi penurunan nilai kredit secara individual (individual impairment) lebih sesuai.
d. Berdasarkan data rata-rata portofolio kredit Bank Papua dari waktu ke waktu:
   - Untuk kredit sampai dengan Rp5.000.000.000,- ekuivalen, total fasilitas secara rata-rata sebesar 13,46 % dari total fasilitas yang diberikan Bank, dan mewakili 20% dari total debitur.
   - Untuk kredit lebih dari Rp5.000.000.000,- ekuivalen, secara rata-rata mewakili 86,53 % dari total fasilitas yang diberikan Bank, dan mewakili 80,38 % dari total debitur Bank.

Bukti Obyektif Penurunan Nilai

a. Kerugian penurunan nilai terjadi hanya jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, **dimana Kredit diklasifikasikan Rating**.
b. Kredit **direkstrukturisasi atau dijadwalkan kembali (*rescheduled*)**, penurunan nilai secara individual diterapkan untuk debitur dalam kategori seperti ini.
   - Penilaian rating kredit dilakukan secara bulanan berdasarkan klasifikasi Rating yakni berdasarkan kemampuan membayar debitur (lamanya hari tunggakan pokok dan atau tunggakan bunga pinjaman).
   - **Evalusi penurunan nilai kredit secara individual untuk kredit yang memenuhi salah satu kriteria di atas, dilakukan secara bulanan.**

BANK PAPUA

VII. ANALISA

Berdasarkan PSAK 55 (Revisi2015) terhadap 47 rekening kredit yang diberikan dengan nilai wajar / saldo neraca sebesar Rp1.273.503.148.772,- pada laporan keuangan periode 31 Desember 2016, khususnya untuk kredit yang diberikan dengan nilai plafond lebih dari Rp5.000.000.000,- yang mengalami potensi penurunan nilai sehubungan dengan bukti–bukti obyektif sebagai berikut:

a. Rating kredit merupakan kolektibilitas macet (Kol. 5) sesuai dengan nominatif kredit pada tanggal 31 Desember 2016, hal ini mengindikasikan adanya:
   - Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
   - Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga.

b. Terdapat skema restruktursasi atau dijadwalkan kembali (*rescheduled*) atas rekening kredit tersebut diatas, hal ini mengindikasikan adanya bukti objektif pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomik atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberika keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut.

Sehubungan dengan kondisi tersebut diatas yang terdampak di rekening kredit yang diberikan oleh Bank Papua pada laporan keuangan 31 Desember 2016, maka berdasarkan analisis manajemen terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit yang diberikan tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan aset keuangan atau kelompok aset keuangan, serta kerugian atas penurunan nilai kredit dapat diestimasi secara andal.

Berdasarkan PSAK 25 (Revisi 2014) manajemen Bank Papua menemukan adanya kesalahan material terhadap pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan sebesar Rp398.587.393.725,- yang disebabkan oleh kesalahan dalam pengukuran dan penyajian unsur pada laporan keuangan, khususnya untuk cadangan kerugian penurunan nilai yang diukur menggunakan teknik individual dimana laporan keuangan untuk tahun yang

BANK PAPUA

berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi tidak sesuai dengan SAK dan mempengaruhi penyajian posisi keuangan dan kinerja keuangan. Kesalahan material tersebut tidak dapat ditemukan oleh manajemen Bank Papua pada laporan keuangan periode 31 Desember 2016 (periode sebelumnya), dan baru ditemukan pada periode laporan keuangan 31 Desember 2017 (periode selanjutnya).

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mengenai penerapan PSAK 55 (Revisi 2015) dan penerapan PSAK 25 (Revisi 2014) sebagaimana tersebut sebelumnya, manajemen Bank Papua akan melakukan koreksi kesalahan material yang dapat diukur secara andal pada laporan keuangan periode 31 Desember 2016 (periode sebelumnya) secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama (periode 31 Desember 2017) yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan dengan menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan dimana kesalahan terjadi.

Rincian rekening kredit yang diberikan dapat dilihat pada **Lampiran 2 – Tabel CKPN Individual 31 Desember 2016**, rincian tersebut yang akan dilakukan koreksi pada laporan keuangan periode 31 Desember 2017 (periode selanjutnya) dengan cara restrospektif yaitu menyajikan kembali jumlah komparatif laporan keuangan periode 31 Desember 2016 dimana kesalahan terjadi.

IX. TANGGAL BERLAKU

Accounting Position Paper ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya.

Disiapkan oleh:		Diperiksa oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:
Kepala Divisi Kredit Khusus	Kepala Divisi Akuntansi	Direktur Keuangan	Direktur Bisnis	Direktur Utama
Pujianto	**Petrus A. Soleman**	**Rudhy Dharma**	**Sadar Sebayang**	**F. Zendrato**
Tgl.	Tgl. :	Tgl. :	Tgl. :	Tgl. :

ACCOUNTING POSITION PAPER

Lampiran 2 - Tabel CKPN Individual 31 Desember 2016

No	No. Rekening	Nama Debitur	Status Restrukturisasi 31 Des 2016	Kol. 31 Des 2016	Plafond 31 Des 2016	CKPN 31 Des 2016 (Audited)	Saldo Neraca 31 Des 2016	Selisih CKPN Individual 31 Des 2016	CKPN Individual 31 Des 2016 After Restatement
1	1500405000435	HARDYS RETAILINDO,PT	Restukturisasi	5	125,000,000,000	88,098,125,000	125,000,000,000	36,901,875,000	125,000,000,000
2	1000405000502	PURNI JAYA	Bukan Restrukturisasi	5	100,000,000,000	70,358,425,525	99,829,629,640	29,471,204,115	99,829,629,640
3	1500405000393	HARDYS RETAILINDO,PT	Restukturisasi	5	99,900,000,000	70,408,021,500	99,900,000,000	29,491,978,500	99,900,000,000
4	1000405000459	PURNI PAPUA PERKASA JAYA	Bukan Restrukturisasi	5	60,000,000,000	42,212,321,117	59,893,898,306	17,681,577,189	59,893,898,306
5	1600405000022	RIMBA SENTOSA,CV	Bukan Restrukturisasi	5	56,186,000,000	39,507,547,122	56,056,169,076	16,548,621,954	56,056,169,076
6	1800405000102	SURYA NAGA BUANA JAYA, CV	Bukan Restrukturisasi	5	46,950,000,000	33,089,655,750	46,950,000,000	13,860,344,250	46,950,000,000
7	1100502001209	BERLIAN PAPUA,PT	Bukan Restrukturisasi	5	35,000,000,000	8,118,356,108	11,518,911,595	3,400,555,487	11,518,911,595
8	1500521000406	HARDYS GLOBAL INVESTINDO,PT	Restukturisasi	5	30,822,279,568	4,287,168,481	30,422,279,568	26,135,111,087	30,422,279,568
9	1000521000692	HOTEL MUTIARA / ANTHONIUS RAH	Bukan Restrukturisasi	5	18,604,425,610	11,821,361,563	16,773,003,914	4,951,642,351	16,773,003,914
10	1600521000029	RIMBA SENTOSA	Bukan Restrukturisasi	5	12,590,000,000	7,150,857,846	10,146,154,993	2,995,297,147	10,146,154,993
11	6000405001285	SURYA PACIFIC, CV	Bukan Restrukturisasi	5	12,000,000,000	8,437,842,640	11,972,222,225	3,534,379,585	11,972,222,225
12	1800405000083	VAGANZA, UD	Bukan Restrukturisasi	5	8,000,000,000	5,588,945,050	7,930,000,000	2,341,054,950	7,930,000,000
13	7000521000455	WALESI ANUGERAH MANDIRI	Restukturisasi	5	8,000,000,000	5,563,019,005	5,563,019,005	-	5,563,019,005
14	1000521000273	TIGA SETIA MANDIRI	Bukan Restrukturisasi	5	7,900,000,000	1,626,960,933	2,308,450,000	681,489,067	2,308,450,000
15	1000521000182	SASANA AGUNG EGLESIA, PT	Restukturisasi	5	6,642,044,978	3,874,555,537	5,497,500,000	1,622,944,463	5,497,500,000
16	1160405000022	NANANG SAJUTI	Bukan Restrukturisasi	5	6,200,000,000	4,369,667,000	6,200,000,000	1,830,333,000	6,200,000,000
17	1000405000125	SARANA SAMUDERA PERMAI	Bukan Restrukturisasi	5	6,000,000,000	4,228,710,000	6,000,000,000	1,771,290,000	6,000,000,000
18	1000514222096	LESTARI JAYA PERMAI	Bukan Restrukturisasi	5	5,420,015,010	-	-	-	-
19	1500405000307	PAPUA INDAH PERKASA PT	Bukan Restrukturisasi	5	5,000,000,000	3,481,587,261	4,939,928,151	1,458,340,890	4,939,928,151
20	1800405000151	CV. REJO	Bukan Restrukturisasi	5	5,000,000,000	3,523,925,000	5,000,000,000	1,476,075,000	5,000,000,000
21	1000514000746	VITA SAMUDERA PT	Restukturisasi	5	57,930,000,000	40,828,195,050	57,930,000,000	17,101,804,950	57,930,000,000
22	1000502000059	VITA SAMUDERA PT	Restukturisasi	5	39,559,000,000	27,880,589,815	39,559,000,000	11,678,410,185	39,559,000,000
23	1000514001302	VITA SAMUDERA PT	Restukturisasi	5	37,896,000,000	26,708,532,360	37,896,000,000	11,187,467,640	37,896,000,000
24	1000514001325	VITA SAMUDERA PT	Restukturisasi	5	18,100,070,478	12,756,658,171	18,100,070,478	5,343,412,307	18,100,070,478
25	1000514000928	VITA SAMUDERA PT	Restukturisasi	5	11,303,159,909	7,966,297,556	11,303,159,909	3,336,862,353	11,303,159,909
26	1000521000443	VITA SAMUDERA PT	Restukturisasi	5	11,283,649,999	7,952,547,264	11,283,649,999	3,331,102,735	11,283,649,999
27	1000521000953	VITA SAMUDERA PT	Restukturisasi	5	5,943,791,883	4,189,095,362	5,943,791,883	1,754,696,521	5,943,791,883
28	1000521000572	VITA SAMUDERA PT	Restukturisasi	5	5,025,066,666	3,541,591,610	5,025,066,666	1,483,475,056	5,025,066,666
29	1500514000382	VITA SAMUDERA,PT	Restukturisasi	5	67,067,590,523	46,317,312,229	65,718,356,987	19,401,044,758	65,718,356,987
30	1500514000412	VITA SAMUDERA,PT	Restukturisasi	5	11,730,552,429	6,273,209,823	8,900,884,417	2,627,674,594	8,900,884,417
31	1000521000455	AGUNG MULIA IRIANA	Bukan Restrukturisasi	5	60,150,000,000	29,654,701,657	42,076,238,367	12,421,536,710	42,076,238,367
32	1000514001866	AGUNG MULIA IRIANA	Restukturisasi	5	40,915,094,590	24,947,595,925	34,542,825,130	9,595,229,205	34,542,825,130
33	1000514000035	AGUNG MULIA IRIANA	Restukturisasi	5	10,888,777,778	7,674,247,246	10,888,777,778	3,214,530,532	10,888,777,778
34	1000502002068	AGUNG MULIA IRIANA	Restukturisasi	5	9,893,255,007	6,972,617,730	9,893,255,007	2,920,637,277	9,893,255,007
35	1500502000254	FASTRADE INTERNATIONAL	Bukan Restrukturisasi	5	60,000,000,000	42,287,100,000	60,000,000,000	17,712,900,000	60,000,000,000
36	1500521000511	RONALD RENYUT	Bukan Restrukturisasi	5	5,000,000,000	3,299,590,517	4,681,697,990	1,382,107,473	4,681,697,990
37	6010405000072	SARANA BAHTERA IRJA,PT	Bukan Restrukturisasi	5	74,951,710,163	37,707,202,797	53,501,710,163	15,794,507,366	53,501,710,163
38	6010521000145	SARANA BAHTERA IRJA,PT	Restukturisasi	5	33,999,999,992	23,962,689,994	33,999,999,992	10,037,309,998	33,999,999,992
39	6010521000133	SARANA BAHTERA IRJA,PT	Restukturisasi	5	31,823,289,465	22,428,577,065	31,823,289,465	9,394,712,400	31,823,289,465
40	6010521000111	SARANA BAHTERA IRJA,PT	Restukturisasi	5	27,352,536,898	19,277,657,717	27,352,536,898	8,074,879,181	27,352,536,898
41	6010521000251	SARANA BAHTERA IRJA,PT	Restukturisasi	5	23,000,000,000	15,804,803,625	22,425,000,000	6,620,196,375	22,425,000,000
42	6010521000199	SARANA BAHTERA IRJA	Restukturisasi	5	21,662,198,884	15,267,192,840	21,662,198,884	6,395,006,044	21,662,198,884
43	6010521000066	SARANA BAHTERA IRJA	Restukturisasi	5	15,700,000,000	11,065,124,500	15,700,000,000	4,634,875,500	15,700,000,000
44	6010521000169	SARANA BAHTERA IRJA,PT	Restukturisasi	5	12,321,428,565	8,683,958,031	12,321,428,565	3,637,470,534	12,321,428,565
45	6010521000229	SARANA BAHTERA IRJA	Restukturisasi	5	5,219,576,719	2,269,109,377	3,219,576,719	950,467,342	3,219,576,719
46	9000405000447	MANDIRI SUKSES PERKASA PT	Restukturisasi	5	12,604,650,000	1,421,996,847	12,604,650,000	11,182,653,153	12,604,650,000
47	9000514002093	MANDIRI SUKSES PERKASA PT	Restukturisasi	5	6,109,306,360	2,030,507,501	3,248,817,002	1,218,309,501	3,248,817,002
				TOTAL	**1,372,645,471,474**	**874,915,755,047**	**1,273,503,148,772**	**398,587,393,725**	**1,273,503,148,772**

LAMPIRAN 3
PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016

	Sebelum penyajian kembali / *Before restatement*	Penyajian kembali / *Restatement*	Setelah penyajian kembali / *After restatement*
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
ASET			
CADANGAN PENURUNAN NILAI (CPN)			
KREDIT YANG DIBERIKAN			
CPN KYD Individual - Pinjaman dan Piutang	(35,629,598,397)	398,587,393,725	(434,216,992,122)
CPN KYD Kolektif - Pinjaman dan Piutang	(1,237,279,428,492)	-	(1,237,279,428,492)
TOTAL ASET	**21,057,733,864,015**	**398,587,393,725**	**20,659,146,470,290**
EKUITAS			
LABA-RUGI TAHUN BERJALAN	**233,984,711,988**	**398,587,393,725**	**(164,602,681,737)**
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Beban CPN - Kredit Yang Diberikan	465,344,981,209	398,587,393,725	863,932,374,934
LABA (RUGI) BERSIH - SETELAH PAJAK	**233,984,711,988**	**398,587,393,725**	**(164,602,681,737)**
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**111,255,899,439**	**398,587,393,725**	**(287,331,494,286)**

BANK PAPUA

Bersama Papua Membangun Negeri

TRANSFORMASI
back on track

Laporan Tahunan / Annual Report 2017

Kantor Pusat
Central Office

Jl. Achmad Yani No.5-7 Jayapura, Kotak Pos 1536
Telp. 0967 532011, 531546, 533608, 531944, 532351, 532940
Fax. 0967 533019, 533207, 533274
Telex. 76198 BEPEDE IA
E-mail : kantorpusat@bankpapua.com
Website : www.bankpapua.com